

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

RKPD

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2027

GUBERNUR MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
10. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 143;
11. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 147);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Maluku;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku;
4. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjtnya disebut BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Perencanaan dan Pembangunan;
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (Satu) Tahun.

BAB II
RKPD

Pasal 2

(1) RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027.
(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan:
    a. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027;
    b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2027;
    c. Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran sementara daerah; dan
    d. Rancangan anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun 2027.

Pasal 3

(1) RKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
    a. BAB I : Pendahuluan;
    b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
    c. BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
    d. BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
    e. BAB V : Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota;
    f. BAB VI : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
    g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Daerah; dan
    h. BAB VIII : Penutup.
(2) Ketentuan mengenai Sistematika RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Gubernur melalui kepala BAPPEDA melaksanakan Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2026.
(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala BAPPEDA melakukan perbaikan/penyempurnaan.
(3) Kepala BAPPEDA melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD kepada Gubernur.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 30 Juni 2026

GUBERNUR MALUKU,

HENDRIK LEWERISSA

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 30 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,

SADALI IE

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2026 NOMOR 426.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN GUBERNUR MALUKU

NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

I. UMUM

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan.

Dalam rangka Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan indikator dan sasaran kinerja yang mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2027 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025-2029. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2027 memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dalam menyusun RAPBD Tahun 2027 dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rancangan Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Tahun 2027.

Berdasarkan penjelasan umum di atas, ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan umum, RKPD Tahun 2026, Pengendalian dan Evaluasi dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2027 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku 2025–2029, yang selaras dengan RPJMN 2025–2029 serta visi Indonesia Emas 2045.

Penyusunan RKPD 2027 mengacu pada evaluasi capaian pembangunan tahun sebelumnya, dinamika kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, dan aspirasi masyarakat. Dokumen ini memuat prioritas pembangunan yang meliputi : *(1) Penguatan Pengelolaan dan Peningkatan Nilai Tambah Sumber Daya Alam Unggulan Daerah, (2) Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran Melalui Pemberdayaan Ekonomi Produktif dan UMKM, (3) Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah Kepulauan, (4) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Daya Saing dan Produktivitas Daerah, (5) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dalam Mendukung Pelayanan Publik yang Inklusif dan Berkelanjutan, (6) Penguatan Kapasitas Pengendalian Lingkungan dan Resiliensi terhadap Bencana untuk Menjamin Pembangunan yang Berkelanjutan, (7) Penguatan kapasitas Lembaga sosial kemasyarakatan berbasis kearifan lokal serta ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum*.

RKPD Tahun 2027 mengusung tema **“Penguatan Daya Saing dan Transformasi Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal”**. tema ini selaras dengan tema RKP Tahun 2027 **“Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri”**. Keselarasan tersebut tercermin melalui upaya peningkatan produktivitas daerah, penguatan sektor unggulan dan industri berbasis potensi lokal, penciptaan iklim investasi yang kondusif, serta pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi berkualitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Penyusunan RKPD 2076 dilakukan secara partisipatif, melalui mekanisme perencanaan pembangunan yang melibatkan Pemerintah, DPRD, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dokumen ini dapat menjadi pedoman terpadu bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Provinsi Maluku pada tahun 2027.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga RKPD 2027 dapat menjadi landasan strategis dalam mewujudkan Maluku yang **Maju, Adil, dan Sejahtera** melalui peningkatan daya saing daerah, transformasi ekonomi, perluasan kesempatan kerja dan investasi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata melalui pengembangan potensi unggulan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		.....	i
DAFTAR ISI		.....	iii
DAFTAR TABEL		.....	ix
DAFTAR GAMBAR		.....	xvii
DAFTAR GRAFIK		.....	xviii
BAB I	**PENDAHULUAN**	.....	I-1
1.1	Latar Belakang	.....	I-1
1.2	Dasar Hukum	.....	I-5
1.3	Hubungan Antar Dokumen	.....	I-7
1.4	Maksud dan Tujuan	.....	I-9
1.5	Sistematika	.....	I-10
BAB II	**GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**	.....	II-1
2.1	Kondisi Umum Daerah	.....	II-1
2.2	Aspek Geografi dan Demografi	.....	II-1
2.2.1	Karakteristik Lokasi dan Wilayah Administrasi	.....	II-1
2.2.2	Luas dan Batas Wilayah Administrasi	.....	II-2
2.2.3	Letak dan Kondisi Geografis	.....	II-3
2.2.4	Topografi Kepulauan Maluku	.....	II-4
2.2.5	Demografi	.....	II-6
2.2.6	Wilayah Rawan Bencana	.....	II-9
2.2.7	Potensi Pengembangan Wilayah	.....	II-10
2.3	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	.....	II-19
2.3.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	.....	II-19
2.3.1.1	Pertumbuhan Ekonomi	.....	II-19
2.3.1.1.1	Analisis Kondisi Ekonomi Global dan Dampaknya terhadap Maluku	.....	II-19
2.3.1.1.2	Kondisi Ekonomi Maluku	.....	II-20
2.3.1.1.2.1	Pertumbuhan PDRB	.....	II-22
2.3.1.1.2.2	Pendapatan Perkapita	.....	II-25
2.3.1.1.2.3	Laju Inflasi	.....	II-26
2.3.1.1.2.4	Indeks Gini	.....	II-27
2.3.1.1.2.5	Tingkat Kemiskinan	.....	II-29
2.3.1.1.2.5.1	Kemiskinan Provinsi Maluku	.....	II-29
2.3.1.1.2.5.2	Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota	.....	II-30
2.3.1.1.2.6	Tingkat Pengangguran	.....	II-31

2.3.1.1.2.6.1	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Maluku	.....	II-31
2.3.1.1.2.6.2	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota	.....	II-32
2.3.1.1.2.7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	.....	II-33
2.3.1.1.2.7.1	IPM Maluku	.....	II-33
2.3.1.1.2.7.2	IPM Kabupaten/Kota	.....	II-35
2.3.1.1.2.8	Pengeluaran Per Kapita Maluku	.....	II-35
2.3.1.1.2.9	Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan	.....	II-37
2.4	Apek Daya Saing	.....	II-37
2.4.1	Indeks Daya Saing Daerah	.....	II-37
2.4.2	Indeks Inovasi Daerah	.....	II-39
2.4.3	Daya Saing Sumber Daya Manusia	.....	II-39
2.5	Aspek Pelayanan Umum	.....	II-40
2.5.1	Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar	.....	II-40
2.5.1.1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan	.....	II-40
2.5.1.2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	.....	II-43
2.5.1.3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum	.....	II-44
2.5.1.4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan dan Kawasan Permukiman	.....	II-46
2.5.1.5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	.....	II-47
2.5.1.6	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial	.....	II-48
2.5.2	Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	.....	II-50
2.5.2.1	Urusan Pangan	.....	II-50
2.5.2.2	Urusan Lingkungan Hidup	.....	II-51
2.5.2.3	Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	.....	II-53
2.5.2.4	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	.....	II-55

2.5.2.5	Urusan Perhubungan	.....	II-56
2.5.2.6	Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	.....	II-57
2.5.2.7	Urusan Penanaman Modal	.....	II-58
2.5.2.9	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	.....	II-59
2.5.3	Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan	.....	II-60
2.5.3.1	Urusan Kelautan dan Perikanan	.....	II-60
2.5.3.2	Urusan Pariwisata	.....	II- 61
2.5.3.3	Urusan Pertanian	.....	II-62
2.5.3.4	Urusan Kehutanan	.....	II-63
2.5.4	Fokus Urusan Pemerintahan Penunjang	.....	II-65
2.5.4.1	Urusan Keuangan	.....	II-65
2.5.4.2	Urusan Pendidikan dan Pelatihan	.....	II-66
2.5.4.3	Urusan Sekretariat Daerah	.....	II-67
2.6.	Pencapaian Indikator Makro Provinsi Maluku	.....	II-67
2.7.	Pencapaian Indikator Kinerja Utama Provinsi Maluku	.....	II-69
2.8	Pencapaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	.....	II-71
2.9	Rekapan Pencapaian IKD Provinsi Maluku Tahun 2025	.....	II-80
2.10.	Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD sampai dengan Tahun 2025	.....	II-120
2.11	Capaian SPM	.....	II-121

2.11.1	Capaian SPM Provinsi Maluku	.....	II-121
2.11.2	Capaian SPM Kabupaten/Kota	.....	II-121
2.12	Program (Outcome) dan Keuangan Tahun 2025	.....	II-123
2.13	Indikator Kinerja Program (Outcome)	.....	II-126
2.14	Capaian Indikator Utama Pembangunan (IUP)	.....	II-173
2.15	Permasalahan Daerah	.....	II-183
2.16	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	.....	II-189
2.16.1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	.....	II-189
2.16.2	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	.....	II-191
2.16.3	Urusan Pilihan	.....	II-196
2.16.4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	.....	II-199
2.17	Isu Strategis Pembangunan	.....	II-201
2.17.1	Isu Strategis Provinsi Maluku	.....	II-201
2.17.2	Isu Strategis dan Fokus Pembangunan Daerah	.....	II-209
2.17.3	Keterkaitan Masalah dan Isu Strategis	.....	II-210
2.18	Telaah Pokok Pikiran DPRD	.....	II-211

2.19	Inovasi daerah dalam Upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat	.....	II-212
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	.....	III-1
3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	.....	III-1
3.1.1	Perkembangan Ekonomi Nasional	.....	III-2
3.1.1.1	Ekonomi Makro Pembangunan Tahun 2027	.....	III-8
3.1.2	Perkembangan Ekonomi Daerah	.....	III- 9
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	.....	III-14
3.2.1	Kondisi dan Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	.....	III-16
3.2.2	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	.....	III-18
3.2.3	Arah Kebijakan Belanja Daerah	.....	III-21
3.2.4	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	.....	III-30
3.3	Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah	.....	III-33
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	.....	IV-1
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	.....	IV-4
4.2	Tema RKPD 2027	.....	IV-9
4.3	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Maluku	.....	IV-10
4.4	Keselarasan Sasaran RKPD dan RKP	.....	IV-18
4.5	Prioritas Pembangunan Tahun 2027	.....	IV-18
4.5.1	Prioritas Nasional Tahun 2027	.....	IV-19
4.5.2	Prioritas Daerah Tahun 2027	.....	IV-19
4.6	Keterkaitan Prioritas Nasional dan Daerah	.....	IV-26
4.7	Keterkaitan Tema RKP 2027 dengan Arah Pembangunan Daerah	.....	IV-27
4.8	Dukungan Provinsi Maluku dalam RKP 2027	.....	IV-39
4.8.1	Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Industri	.....	IV-39
4.8.2	Peningkatan Investasi melalui Pembangunan Infrastruktur	.....	IV-39
4.8.3	Kebijakan Afirmasi untuk Pemerataan Pembangunan	.....	IV-40

4.8.4	Mitigasi Risiko Bencana dan Pengelolaan Ekosistem	.....	IV-40
4.9	Proyek Strategis Nasional	.....	IV-41
4.10	Penguatan Fondasi Keuangan daerah	.....	IV-41
4.11	Arah Pengembangan Lokasi Prioritas dan Highlight Intervensi RKP 2027	.....	IV-42
BAB V	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA	.....	V-1
5.1	Arah Kebijakan Dan Fokus Pembangunan Kewilayahan	.....	V-1
5.1.1	Kebijakan Pengembangan Wilayah	.....	V-1
5.1.2	Arah kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi	.....	V-3
5.1.3	Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan Kabupaten/Kota	.....	V-5
BAB VI	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	.....	VI-1
6.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan	.....	VI-1
6.2	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2027	.....	VI-1
6.3	Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dan Prakiraan Maju	.....	VI-83
6.4	Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 untuk Pencapaian Program Nasional	.....	VI-83
BAB VII	KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAH DAERAH	.....	VII-1
7.1	Penetapan Target Indikator Kinerja Utama (IKU)	.....	VII-2
7.2	Penetapan Indikator dan Target Kinerja Kunci (IKK)	.....	VII-3
BAB VIII	PENUTUP	.....	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku	II-3
Tabel 2.2	Kondisi Dataran Rendah Di Provinsi Maluku	II-4
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk di Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2021-2025	II-8
Tabel 2.4	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2025	II-8
Tabel 2.5	Jenis Bencana Di Provinsi Maluku Tahun 2021-2024	II-10
Tabel 2.6	Sistem Perkotaan Nasional di Provinsi Maluku	II-12
Tabel 2.7	Sistem Arahan Sistem Jaringan Struktur Ruang Wilayah Nasional Di Provinsi Maluku	II-12
Tabel 2.8	Sistem Arahan Pola Ruang Wilayah Nasional Di Provinsi Maluku	II-15
Tabel 2.9	Rata-Rata Kontribusi PDRB ADHB dan Rata-Rata Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektoral	II-23
Tabel 2.10	Distribusi PDRB Pengeluaran ADHB Provinsi Maluku Menurut Lapangan Usaha (Persen)	II-25
Tabel 2.11	PDRB Per Kapita Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota Di Maluku	II-25
Tabel 2.12	Perkembangan Inflasi di Provinsi Maluku dan Nasional	II-27
Tabel 2.13	Indeks Gini Maluku Tahun 2021 - 2025	II-27
Tabel 2.14	Gini Rasio Kab/Kota Maluku 2021-2024	II-28
Tabel 2.15	Persentase Kemiskinan Maluku 2025	II-29

Tabel 2.16	Tingkat kemiskinan Kab/Kota Provinsi Maluku Tahun 2024-2025	.....	II-30
Tabel 2.17	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota Tahun 2021-2025	.....	II-32
Tabel 2.18	Indeks Pembangunan Manusia Maluku menurut Dimensi Penyusunannya 2021-2025	.....	II-34
Tabel 2.19	Perkembangan IPM Kabupaten/Kota	.....	II-35
Tabel 2.20	Pengeluaran Riil Per Kapita yang disesuaikan Provinsi Maluku Tahun 2021-2025	.....	II-36
Tabel 2.21	Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan Provinsi maluku Tahun 2021-2025	.....	II-37
Tabel 2.22	Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2024-2025	.....	II-38
Tabel 2.23	Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020-2024	.....	II-39
Tabel 2.24	Tingkat Partisipasi Angkatan kerja Provinsi Maluku Tahun 2022-2025	.....	II-40
Tabel 2.25	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan	.....	II-40
Tabel 2.26	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan 2023-2025	.....	II-43
Tabel 2.27	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum 2023-2025	.....	II-44
Tabel 2.28	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan dan Permukiman 2023-2025	.....	II-46
Tabel 2.29	Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 2023-2025	.....	II-47
Tabel 2.30	Capaian Indikator Kinerja Urusan Bencana 2023-2025	.....	II-48

Tabel 2.31	Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial 2023-2025	.....	II-48
Tabel 2.32	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan 2023-2025	.....	II-50
Tabel 2.33	Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup 2023-2025	.....	II-51
Tabel 2.34	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2023-2025	.....	II-53
Tabel 2.35	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 2023-2025	.....	II-56
Tabel 2.36	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan 2023-2025	.....	II-56
Tabel 2.37	Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Maluku Tahun 2023 – 2025	.....	II-57
Tabel 2.38	Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Provinsi Maluku Tahun 2023 – 2025	.....	II-59
Tabel 2.39	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun 2023-2025	.....	II-60
Tabel 2.40	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Tahun 2023-2025	.....	II-60
Tabel 2.41	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Provinsi Maluku Tahun 2023-2025	.....	II-61
Tabel 2.42	Indikator Kinerja Urusan Pertanian Provinsi Maluku Tahun 2023-2025	.....	II-62

Tabel 2.43	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2023-2025	.....	II-64
Tabel 2.44	Capaian Indikator Kinerja Urusan Keuangan Provinsi Maluku Tahun 2023-2025	.....	II-65
Tabel 2.45	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Maluku Tahun 2023-2025	.....	II-66
Tabel 2.46	Capaian Indikator Kinerja Urusan Sekretariat Daerah Tahun 2023-2025	.....	II-67
Tabel 2.47	Capaian Indikator Makro Pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2025	.....	II-68
Tabel 2.48	Capaian Indikator Kinerja Utama Provinsi Maluku	.....	II-70
Tabel 2.49	Pencapaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Provinsi Maluku	.....	II-71
Tabel 2.50	Rekapan Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Provinsi Maluku Tahun 2025	.....	II-80
Tabel 2.51	Capaian SPM Provinsi Maluku 2022-2025	.....	II-121
Tabel 2.52	Capaian SPM Kab/Kota 2022-2025	.....	II-122
Tabel 2.53	Ketercapaian Kinerja Program (Outcome) dan Keuangan	.....	II-123
Tabel 2.54	Capaian Indikator Kinerja Program (Outcome) Tahun 2025	.....	II-126
Tabel 2.55	Tabel capaian IUP 45 Tahun 2025	.....	II-173
Tabel 2.56	Isu Strategis Daerah	.....	II-209

Tabel 2.57	Keterkaitan Permasalahan dengan Isu Strategis dan Prioritas daerah tahun 2027	.....	II-211
Tabel 2.58	Daftar Inovasi yang dilakukan di Provinsi Maluku	.....	II-214
Tabel 3.1	Outlook Produk Domestik Bruto Tahun 2025 (%)	.....	III-7
Tabel 3.2	Sasaran Makro Pembangunan Tahun 2027	.....	III-8
Tabel 3.3	Sasaran Utama Pembangunan Maluku tahun 2021-2027	.....	III-14
Tabel 3.4	Realisasi dan Proyeksi Target Pendapatan Daerah Provinsi maluku Tahun 2024-2028	.....	III-17
Tabel 3.5	Daftar Pelayanan SPM Provinsi Maluku Tahun 2027	.....	III-23
Tabel 3.6	Realisasi dan Proyeksi Belanja daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 - 2028	.....	III-29
Tabel 3.7	Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 - 2028	.....	III-31
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2027	.....	IV-5
Tabel 4.2	Keselarasan Tema RKP dan RKPD Tahun 2027	.....	IV-9
Tabel 4.3	Rumusan Strategui dan Arah Kebijakan Provinsi Tahun 2027	.....	IV-11
Tabel 4.3	Isu Strategis Daerah	.....	IV-16
Tabel 4.4	Keselarasan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah dengan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2027	.....	IV-18
Tabel 4.5	Keterkaitan Prioritas Nasional dan Daerah	.....	IV-26

Tabel 4.6	Program Prioritas daerah 2027	.....	IV-29
Tabel 5.1	Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan Kawasan Strategis Provinsi	.....	V-4
Tabel 5.2	Sasaran dan Indikator Pembangunan Kabupaten Buru Mendukung Pencapaian Target Provisi Tahun 2027	.....	V-7
Tabel 5.3	Sasaran dan Indikator Pembangunan Kabupaten Buru Selatan Mendukung Pencapaian Target Provisi Tahun 2027	.....	V-8
Tabel 5.4	Sasaran dan Indikator Pembangunan Kabupaten Kepulauan Aru Mendukung Pencapaian Target Provisi Tahun 2027	.....	V-9
Tabel 5.5	Sasaran dan Indikator Pembangunan Kabupaten Kepulauan Tanimbar Mendukung Pencapaian Target Provisi Tahun 2027	.....	V-10
Tabel 5.6	Sasaran dan Indikator Pembangunan Kabupaten Maluku Barat DayaMendukung Pencapaian Target Provisi Tahun 2027	.....	V-12
Tabel 5.7	Sasaran dan Indikator Pembangunan Kabupaten Maluku Tengah Mendukung Pencapaian Target Provisi Tahun 2027	.....	V-14
Tabel 5.8	Sasaran dan Indikator Pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara Mendukung Pencapaian Target Provisi Tahun 2027	.....	V-16
Tabel 5.9	Sasaran dan Indikator Pembangunan Kabupaten	.....	V-18

	Seram Bagian Barat Mendukung Pencapaian Target Provisi Tahun 2027		
Tabel 5.10	Sasaran dan Indikator Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur Mendukung Pencapaian Target Provisi Tahun 2027	.....	V-20
Tabel 5.11	Sasaran dan Indikator Pembangunan Kota Ambon Mendukung Pencapaian Target Provisi Tahun 2027	.....	V-22
Tabel 5.12	Sasaran dan Indikator Pembangunan Kota Tual Mendukung Pencapaian Target Provisi Tahun 2027	.....	V-24
Tabel 6.1	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Utama Perangkat Daerah tahun 2027	.....	VI-3
Tabel 6.2	Pagu Indikatif berdasarkan Bidang Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2027	.....	VI-5
Tabel 6.3	Indikator Kinerja, Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif Perangkat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2027	.....	VI-9
Tabel 6.4	Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2027 Hasil Kesepakatan Rakortekbang Tahun 2026 berdasarkan Pro-SN/Tematik Pembangunan	.....	VI-85
Tabel 6.5	Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2027 Hasil Kesepakatan Rakortekbang Tahun 2026 yang Mendukung Asta Cita	.....	VI-100
Tabel 6.6	Dukungan Kegiatan Pemerintah Daerah terhadap PKPN Tahun 2027	.....	VI-138
Tabel 7.1	Capaian dan Target Indikator Makro Provinsi Maluku	.....	VII-2

Tabel 7.2	Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Provinsi Maluku	.....	VII-3
Tabel 7.3	Capaian Indikator Kinerja Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025 dan Target Tahun 2026-2027	.....	VII-4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Alur Proses Penyusunan RKPD Provinsi Maluku Tahun 2027	.....	I-4
Gambar 1.2	Hubungan RKPD 2027 Terhadap Dokumen Lain	.....	I-9
Gambar 2.1	Kerangka Pikir Pengembangan Potensi Wilayah	.....	II-2
Gambar 2.2	Peta Administrasi Provinsi Maluku	.....	II-2
Gambar 2.3	Kondisi Ekonomi dan Sosial Maluku Tahun 2025	.....	II-20
Gambar 2.6	Nilai Tukar Petani Maluku 2025	.....	II-26
Gambar 2.10	Capaian Kinerja Program, Keuangan dan Subkegiatan Tahun 2025	.....	II-80
Gambar 4.1	Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku 2025 – 2045	.....	IV-1
Gambar 4.2	Penahapan Pembangunan Provinsi Maluku 2026 – 2030	.....	IV-2
Gambar 4.3	Highlight Lokasi Prioritas Provinsi Maluku berdasarkan RKP 2027	.....	IV-3
Gambar 5.1	Peta Keterkaitan Antarwilayah Pengembangan dalam gugus Pulau	.....	V-2

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Laju Pertumbuhan Penduduk Di Provinsi Maluku Tahun 2022 - 2026	….....	II-7
Grafik 2.2	Capaian Pertumbuhan Ekonomi Maluku dan Indonesia	….....	II-21
Grafik 2.3	Kemiskinan Maluku Tahun 2021-2025	….....	II-29
Grafik 2.4	Perbandingan Perkembangan Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Maluku Tahun 2021-2025	.....	II-32
Grafik 2.5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku Tahun 2021-2025	.....	II-34
Grafik 2.6	Capaian Kinerja Program, Keuangan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025	.....	II-34

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disusun sebagai penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. RKPD memiliki peran strategis sebagai instrumen penghubung antara perencanaan strategis jangka menengah dengan penganggaran tahunan daerah, sekaligus menjadi pedoman penyusunan KUA-PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2027.

Penyusunan RKPD Tahun 2027 berpedoman pada sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menegaskan bahwa perencanaan pembangunan dilaksanakan secara terpadu, terarah, partisipatif, dan berkelanjutan. Selain itu, penyusunan RKPD juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang menegaskan kewenangan daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan prinsip otonomi daerah.

Secara teknis, penyusunan RKPD Tahun 2027 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Selanjutnya, proses penganggaran berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menegaskan keterkaitan erat antara perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.

RKPD Tahun 2027 disusun dengan memperhatikan sinkronisasi terhadap dokumen perencanaan nasional, termasuk RKP Tahun 2027, serta memperkuat integrasi perencanaan pembangunan pusat dan daerah melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, serta kombinasi pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) melalui mekanisme Musrenbang.

Tema RKPD Tahun 2027 adalah **"Penguatan Daya Saing Daerah dan Transformasi Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal."** Tema ini mencerminkan arah kebijakan pembangunan daerah dalam memperkuat struktur ekonomi yang produktif, inovatif, dan berkelanjutan, dengan tetap memastikan pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Penguatan daya saing daerah diarahkan pada peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia, penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan adaptif, peningkatan konektivitas dan infrastruktur wilayah, percepatan transformasi digital, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif. Upaya ini menjadi fondasi penting

dalam meningkatkan nilai tambah sektor unggulan serta memperkuat posisi kompetitif daerah dalam perekonomian regional dan nasional.

Transformasi ekonomi inklusif berbasis potensi lokal difokuskan pada pengembangan sektor unggulan daerah melalui hilirisasi, penguatan rantai nilai, pengembangan industri pengolahan, pemberdayaan UMKM dan koperasi, serta peningkatan akses pembiayaan dan pasar. Pendekatan inklusif diarahkan untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran, mengurangi ketimpangan antarwilayah, serta memperluas kesempatan kerja yang produktif dan berkelanjutan.

RKPD Tahun 2027 juga menekankan pentingnya pendekatan kewilayahan dalam rangka memperkuat pusat-pusat pertumbuhan baru, meningkatkan konektivitas antar kawasan, serta mempercepat pembangunan wilayah tertinggal dan kepulauan. Dengan demikian, pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada pemerataan, keberlanjutan lingkungan, dan ketahanan ekonomi daerah terhadap dinamika global.

Melalui perencanaan yang sistematis, terukur, dan berbasis kinerja, RKPD Tahun 2027 diharapkan menjadi pedoman operasional bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas yang efektif, efisien, dan berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjaga konsistensi pencapaian target RPJMD Tahun 2025–2029.

Penyusunan dokumen RKPD Tahun 2027 memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2025, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional di daerah yang meliputi kebijakan program strategis nasional, amanat pembangunan global/nasional/regional, regulasi yang berlaku, prioritas Gubernur dan wakil gubernur dan dinamika agenda pembangunan nasional lainnya. Selain itu Pendekatan berorientasi proses mencakup empat aspek, yaitu *teknokratik, partisipatif, politis, serta pendekatan atas-bawah dan bawah-atas* yang telah dilalui melalui proses Konsultasi Publik, Forum Lintas Perangkat Daerah serta Musrenbang RKPD Tahun 2027 yang dilaksanakan sebagai bagian dalam penjaringan aspirasi dari berbagai stakeholder yang diharapkan dapat memberikan masukan bagi kebijakan pembangunan daerah tahun 2027.

RKPD Provinsi Maluku Tahun 2027 mengacu pada RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2025 – 2029 serta berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2027. RKPD Tahun 2027 merupakan implementasi tahun ke 3 sekaligus tahun penajaman implementasi dan evaluasi paruh waktu RPJMD Tahun 2025 – 2029. Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah

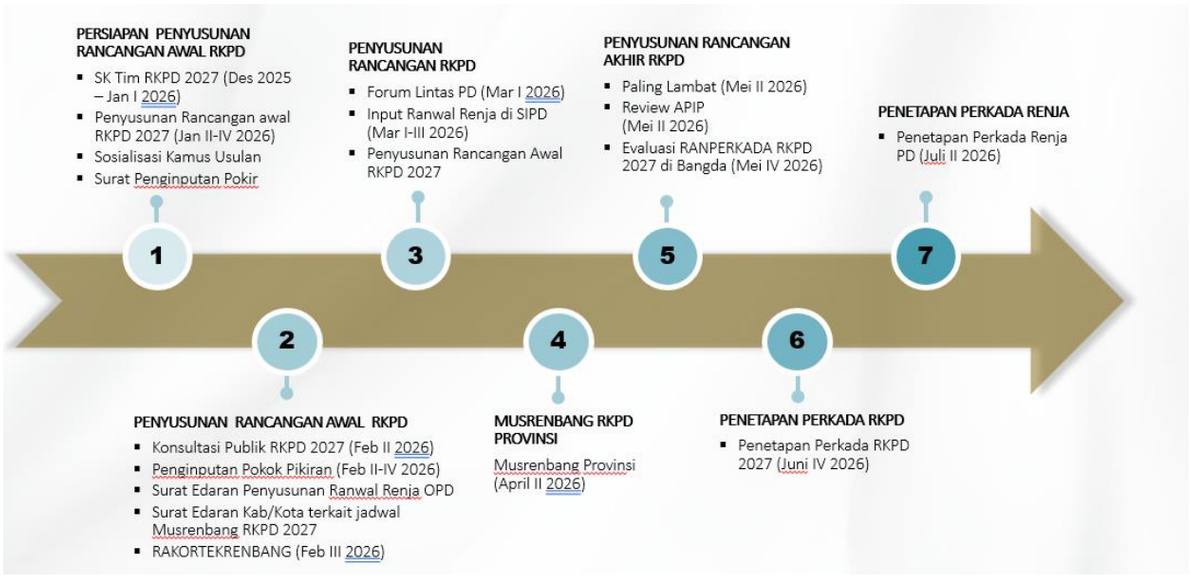
penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;

2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2027 juga disusun dengan memperhatikan arah kebijakan nasional, program strategis nasional di Maluku dan program yang tertuang dalam Asta Cita, untuk menjamin sinkronisasi dokumen Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi Maluku. Rumusan serta sasaran prioritas pembangunan daerah Provinsi Maluku Tahun 2027 akan mengacu pada tujuan dan sasaran yang terdapat dalam RPJMD. Prioritas program dan kegiatan ini menjadi acuan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) berdasarkan urusan yang diampu masing-masing dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) untuk tahun 2027 yang tetap mengacu pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) tahun 2025-2029. Selanjutnya, dalam RKPD Tahun 2027 disusun dengan menyinergikan program strategis Provinsi Maluku dengan kabupaten/kota serta memanfaatkan *competitive* dan *comparative advantage* wilayah. Hal tersebut merupakan wujud pembangunan kewilayahan yang tematik, holistik, integratif dan berbasis spasial yang dilaksanakan melalui upaya membangun kesepahaman dari perencanaan sampai proses pelaksanaan dengan mekanisme koordinatif antar wilayah, lintas sektor, dan *stakeholder* pelaku pembangunan. Pengembangan pola kerja sama antar wilayah menjadi bagian penting dalam mendukung manajemen distribusi sumber daya dalam mengembangkan Provinsi Maluku.

Gambar 1.1

Alur Proses Penyusunan RKPD Provinsi Maluku Tahun 2027



1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan penyusunan RKPD Provinsi Maluku Tahun 2027, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat
6. dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
9. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6869);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
17. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029;
19. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2026 tentang Reviu dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1- 861 Tahun 2026 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
31. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 01 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029.
32. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2025-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025, Nomor 2).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hubungan antar dokumen perencanaan daerah terdiri atas dokumen perencanaan yang berdimensi jangka panjang yakni 20 tahun, perencanaan jangka menengah yakni 5 (lima) tahun, dan dokumen perencanaan jangka pendek (operasional) yang berdimensi tahunan yakni 1 (satu) tahun. Sedangkan berdasarkan strukturnya, dokumen perencanaan dibagi atas dokumen perencanaan berskala nasional dan dokumen perencanaan berskala daerah.

Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD);
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan

5. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

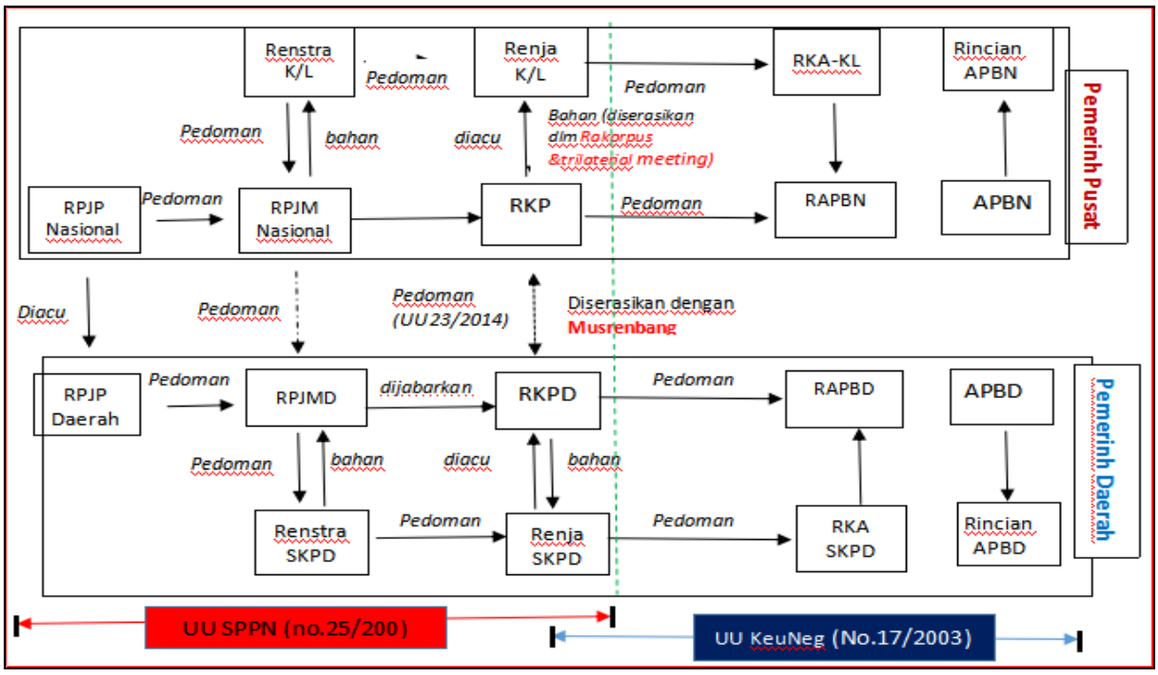
Dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan rangkaian dokumen yang saling terkait dan berkesinambungan untuk memastikan arah pembangunan yang terstruktur, terukur, dan sesuai dengan visi dan misi pembangunan nasional dan daerah.

Proses perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban merupakan satu siklus manajemen pembangunan yang berkelanjutan sehingga dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan memiliki fungsi dan peran yang sangat penting. Jika dikaitkan dengan dokumen di atasnya, maka RKPD merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD yang disusun berdasarkan pada RPJPD. Dokumen RKPD menjadi acuan penyusunan rencana kerja perangkat daerah (RENJA PD) yang juga disusun dengan berpedoman pada rencana strategis perangkat daerah (RENSTRA PD) sebagai dokumen perencanaan strategis perangkat daerah. Dokumen RKPD ini akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS pada saat memasuki tahapan penganggaran. Selanjutnya pada saat pertanggungjawaban, maka dokumen RKPD ini akan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LKPJ). Sehingga dokumen RKPD ini menjadi satu dokumen tahunan yang memiliki korelasi dengan dokumen penganggaran, dan pertanggungjawaban.

Penyusunan dokumen RKPD juga tetap memperhatikan keselarasan dengan dokumen-dokumen lainnya baik yang sifatnya nasional, daerah, maupun sektoral. Dokumen tersebut antara lain dokumen tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW), tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)/*sustainable development goals* (SDGs), *road map* reformasi birokrasi, strategi penanggulangan kemiskinan, percepatan pencegahan *stunting*, pangan dan gizi, penurunan emisi gas rumah kaca, dan pengurangan risiko bencana. Keselarasan dengan dokumen-dokumen tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dituangkan dalam RKPD Tahun 2027. Secara umum, hubungan antara RKPD dengan dokumen lain yang relevan, disajikan dalam gambar berikut:

Gambar 1. 2

Hubungan RKPD 2027 Terhadap Dokumen Lain



Sumber : Bappeda Provinsi Maluku, 2027

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2027 adalah untuk:

1. Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2027
2. Menetapkan program prioritas untuk seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai target RPJMD Tahun 2025-2029.

Tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku yang tertuang dalam rencana kerja perangkat daerah (RENJA PD) Tahun 2027
2. Menjadi pedoman penyusunan rancangan kebijakan umum APBD (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2027 serta
3. Menjadi acuan penyelarasan prioritas pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota.

1.5 Sistematika

Dokumen RKPD Provinsi Maluku Tahun 2027, disusun dengan sistematikasebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang; dasar hukum penyusunan; hubungan antar dokumen; maksud dan tujuan; serta sistematika RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat kondisi umum daerah; evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2025 dan capaian RPJMD sampai dengan tahun 2025; permasalahan pembangunan daerah; dan isu strategis pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan; arah kebijakan ekonomi daerah; serta arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat tujuan dan sasaran pembangunan daerah, prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2027 berdasarkan hasil evaluasi dan analisis pelaksanaan RKPD tahun 2025 dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2027 dalam RPJMD, program prioritas, telaah pokok pikiran, keselarasan prioritas daerah dengan prioritas nasional, serta inovasi pembangunan daerah.

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Memuat tentang arahan kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Provinsi, sebagai dasar penyusunan RKPD kabupaten/kota.

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2026.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang meliputi indikator kinerja utama perangkat daerah dan indikator program prioritas pembangunan daerah.

BAB VIII PENUTUP

Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2027.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

Dalam pembangunan nasional, Provinsi Maluku memiliki peran strategis sebagai wilayah kepulauan yang didukung oleh potensi sumber daya kelautan, perikanan, pertanian, serta jasa pemerintahan dan perdagangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Provinsi Maluku pada tahun 2025 diperkirakan sekitar 1,93 juta jiwa, dengan persebaran penduduk yang tidak merata karena kondisi geografis kepulauan. Kondisi ini menjadikan pembangunan di Maluku memiliki tantangan tersendiri terutama dalam pemerataan pelayanan dasar dan konektivitas antarwilayah.

Struktur perekonomian Maluku masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan**,** diikuti oleh administrasi pemerintahan**,** serta perdagangan besar dan eceran. Kontribusi sektor perikanan dan pertanian tetap menjadi penopang utama PDRB daerah, sejalan dengan karakteristik wilayah yang berbasis sumber daya alam dan kelautan. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi ekonomi masih perlu diarahkan pada peningkatan nilai tambah sektor unggulan daerah.

Pada tahun 2025, kondisi sosial ekonomi Maluku menunjukkan perbaikan, yang ditandai dengan penurunan tingkat kemiskinan menjadi sekitar 15,38 persen**,** walaupun masih berada di atas rata-rata nasional. Penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan pada sektor ekonomi masyarakat, namun kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan masih cukup tinggi sehingga memerlukan perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah ke depan.

Gambaran umum kondisi daerah ini memberikan pemahaman awal mengenai capaian pembangunan Provinsi Maluku serta permasalahan yang masih dihadapi, terutama terkait keterisolasian wilayah, keterbatasan infrastruktur, dan ketergantungan pada sektor primer. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan ke depan perlu diarahkan pada penguatan konektivitas wilayah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan sektor unggulan berbasis kelautan dan perikanan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.

2.2. Aspek Geografi dan Demografi

2.2.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah Administrasi

Aspek Geografi dan Demografi merupakan dasar utama dalam melakukan perencanaan Pembangunan, yaitu adanya identifikasi potensi awal suatu wilayah. Dengan mengetahui aspek geografi dan demografi suatu wilayah, pemangku kebijakan dapat merencanakan dan mengelola pembangunan di masa yang akan datang. Alur pikir potensi pengembangan wilayah dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut :

Gambar 2. 1
Kerangka Pikir Pengembangan Potensi Wilayah



Sumber : Permendagri No .86 Tahun 2017

Pada subbab aspek geografi dan demografi akan dibahas secara rinci mengenai kondisi luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi serta penggunaan lahan sebagaimana digambarkan dalam Gambar 2.1 di atas.

2.2.2. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Provinsi Maluku merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang terletak di wilayah timur Indonesia. Secara keseluruhan, kondisi geografis Provinsi Maluku adalah wilayah darat dan laut yang meliputi pulau-pulau besar dan kecil. Secara keseluruhan Provinsi Maluku memiliki wilayah seluas 712.479,69 km2. Sebagian besar wilayahnya merupakan perairan seluas 658.294,69 km2 (92,4%), sedangkan luas wilayah daratan hanya sekitar 54.185 km2 (7,6%). Provinsi Maluku merupakan wilayah Kepulauan dengan jumlah pulau besar dan kecil sebanyak 1.340 pulau dengan panjang garis pantai 10.630 km.

Gambar 2. 2
Peta Administrasi Provinsi Maluku



Sumber : RTRW Provinsi Maluku 2013-2033

Sejak ditetapkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2008, secara administratif Provinsi Maluku terdiri dari 11 kabupaten/kota. Nama

kabupaten/kota, luas wilayah administratif, serta jumlah kecamatan, desa, dan kelurahan masing-masing kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1
Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku

No	Kabupaten / Kota	Luas Area (km^2/sq.km)	Ibukota Kabupaten	Jumlah		
				Kec.	Desa	Kel.
1	Kab. Maluku Tengah	8.253,92	Masohi	19	196	6
2	Kab. Maluku Tenggara	1.016,92	Langgur	11	193	1
3	Kab. Kepulauan Tanimbar	4.431,08	Saumlaki	10	89	1
4	Kab. Buru	4.915,56	Namlea	10	82	-
5	Kab. Seram Bagian Timur	5.725,44	Bula	15	198	-
6	Kab. Seram Bagian Barat	5.017,138	Piru	11	92	-
7	Kab. Kepulauan Aru	8.096,72	Dobo	10	119	2
8	Kab. Maluku Barat Daya	4.551,67	Tiakur	17	118	-
9	Kab. Buru Selatan	3.678,69	Namrole	6	81	-
10	Kota Ambon	236,66	Ambon	5	50	20
11	Kota Tual	234,41	Tual	5	30	3
MALUKU		46.158,26	**Ambon**	**119**	**1.248**	**33**

2.2.3. Letak dan Kondisi Geografis

Provinsi Maluku terletak di antara 2o30'-9o Lintang Selatan dan 124o-136o Bujur Timur. Secara administrasi, Provinsi Maluku berbatasan dengan Laut Seram di sebelah utara, Laut Indonesia dan Laut Arafura di sebelah selatan, Pulau Papua di sebelah timur dan Laut Sulawesi di sebelah barat. Secara geostrategik, wilayah kepulauan Maluku terletak pada posisi silang geopolitik dan geoekonomi serta merupakan jalur penting lintas perdagangan internasional yakni ALKI 3. Wilayah Kepulauan Maluku berhadapan langsung dengan kawasan Asia Pasifik dan kawasan Australia serta Oceania. Posisi Maluku cukup strategis yakni sebagai wilayah yang berada pada kawasan perbatasan dengan Australia dan Timor Leste, sehingga ke depannya perlu membangun konektivitas wilayah sebagai pintu gerbang bagian selatan Indonesia.

Wilayah Maluku memiliki banyak pulau besar dan kecil. Pulau terbesar adalah Pulau Seram (18.625 km^2), Pulau Buru (9.000 km^2), Pulau Yamdena (5.085 km^2) dan

Pulau Wetar (3.624 km²). Selain itu, wilayah Maluku juga terdapat 4 (empat) gunung di Provinsi Maluku dimana gunung tertinggi adalah Gunung Binaya dengan ketinggian 3.055 meter di atas permukaan laut. Gunung tersebut berada di Pulau Seram. Gunung tertinggi kedua adalah Gunung Kapala Madan yang berada di Pulau Buru, Kabupaten Buru dengan ketinggian 2.429 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya adalah Gunung Salahutu yang berada di Pulau Ambon dengan ketinggian 1.036 meter di atas permukaan laut.

Selain terdapat gunung, di Provinsi Maluku juga terdapat 11 danau yang tersebar di 5 (lima) kabupaten/kota, diantaranya Danau Tihu di Pulau Wetar, Danau Abiel dan Danau Ngilngof di Kepulauan Kei Kecil, Danau Fan di Pulau Dulla, Danau Ohoillim di Kepulauan Kei Besar, Danau Telaga Raja di Pulau Seram, Danau Tihu Suli, Danau Kaitetu dan Danau Laha di Pulau Ambon serta Danau Rana di Pulau Buru.

2.2.4. Topografi Kepulauan Maluku

Kondisi topografi Kepulauan Maluku meliputi dataran rendah, berbukit dan gunung. Wilayah kabupaten/kota dengan topografi dataran rendah yakni Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Buru serta Kabupaten Buru Selatan. Pada Tabel 2.2 dapat dilihat rincian luas wilayah dataran pada masing-masing kabupaten.

Tabel 2. 2

Kondisi Dataran Rendah Di Provinsi Maluku

No	Kabupaten/Kota	Dataran Rendah	Luas (Ha)	Lokasi
1	Kepulauan Tanimbar	Tanimbar	1.100	Pulau Tanimbar
2	Kepulauan Aru	Dataran Aru	1.200	Kepulauan Aru
3	Seram Bagian Timur	Masiwang	5.000	Pulau Seram
4	Maluku Tengah	Seran Selatan Pasahari	4.000 40.000	Pulau Seram Pulau Seram
5	Seram Bagian Barat	Dataran Kawa Eti Kairatu	10.000 600 1.300	Pulau Seram Pulau Seram Pulau Seram
6	Buru dan Buru Selatan	Waeapo Wai Kating Wai Kumu Wai Mala Rana Samalagi	14.000 1.500 1.250 1.250 1.250 1.000	Pulau Buru Pulau Buru Pulau Buru Pulau Buru Pulau Buru Pulau Buru

No	Kabupaten/Kota	Dataran Rendah	Luas (Ha)	Lokasi
		Wai Lo	500	Pulau Buru
Jumlah			**83.950**	-

Sumber : RTRW Provinsi Maluku 2013-2033

1. **Pulau Buru (Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan)**

   Kondisi topografi di Wilayah Pulau Buru dan pulau-pulau di sekitarnya memiliki kemiringan 0-3%, 3-8%, 8-15% dan 15-30%. Untuk Pulau Buru daerah dengan kemiringan 0-3% tersebar di sekitar pesisir Utara. Ketinggian di Pulau Buru terdiri dari tiga klasifikasi yaitu 0-100 meter, 100-500 meter dan >500 meter. Kawasan dengan ketinggian 0-100 meter tersebar di pesisir sebelah utara dan selatan, ketinggian 100-500 meter banyak tersebar di sebelah barat Pulau Buru.

2. **Pulau Seram (Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Timur) dan Pulau Ambon (Kota Ambon)**

   Kondisi topografi di Pulau Seram dan Ambon mayoritas berada pada kemiringan 8-15%, 15-30% dan 30-45%. Daerah dengan kemiringan 3-8% banyak tersebar di wilayah Seram Bagian Barat dan Maluku Tengah. Ketinggian di Pulau Seram hampir serupa dengan ketinggian di Pulau Buru terdiri dari tiga klasifikasi yaitu 0-100 meter, 100-500 meter dan >500 meter. Kawasan dengan ketinggian 0-100 meter tersebar di pesisir sekeliling Pulau Seram, sementara itu ketinggian 100-500 meter pada kawasan agak ke tengah Pulau Seram, sedangkan kawasan dengan ketinggian >500 meter terletak di tengah Pulau Seram.

3. **Kepulauan Kei (Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual)**

   Kondisi topografi di wilayah Kepulauan Kei dibagi menjadi lereng datar (0-3%), landai (3-8%), bergelombang (8-15%), agak curam (15-30%), curam (30-50%) dan sangat curam (>50%). Ketinggian dari muka laut dibagi menjadi 3 (tiga) kelas ketinggian, yaitu kelas rendah dengan ketinggian 0-100 meter, kelas tengah dengan ketinggian 100-500 meter dan kelas tinggi dengan ketinggian >500 meter.

4. **Kepulauan Aru**

   Kondisi topografi di wilayah Kepulauan Aru dibagi menjadi dataran (0-3%), landai (3-8%), bergelombang (8-15%), agak curam (15-30%), curam (30-50%) dan sangat curam >50%. Sedangkan kondisi ketinggian dari muka laut dibagi menjadi 3 (tiga) kelas ketinggian, yaitu ketinggian 0-100 meter, ketinggian 100-500 meter, dan ketinggian >500 meter.

5. Kepulauan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya

Kondisi topografi kepulauan di Wilayah Kepulauan Tanimbar dibagi menjadi 3 (tiga) gugus pulau, yaitu Gugus Pulau Tanimbar, Kepulauan Babar, dan Kepulauan Pulau-Pulau Terselatan dan Wetar. Bentuk lahan di Gugus Pulau Tanimbar terdiri atas dataran (plain), berbukit (hilly) dan bergunung (mountaineous). Secara lebih rinci, bentuk lahan dibagi menjadi datar (0-3%), landai/berombak (3-8%), bergelombang (8-15%), agak curam (15-30%), curam (30-50%) dan sangat curam (>50%). Bentuk lahan di Kepulauan Babar secara makro (makro relief) terdiri atas: dataran (plain), berbukit (hilly) dan bergunung (mountaineous), yang dibagi menjadi dataran (0-3%), landai/berombak (3-8%), bergelombang (8-15%), agak curam (15-30%), curam (30-50%), dan sangat curam (>50%). Bentuk lahan di Gugus Kepulauan Terselatan dan Wetar terdiri atas dataran (plain), berbukit (hilly) dan bergunung (mountaineous), secara rinci bentuk lahan dibagi menjadi datar (0-3%), landai/berombak (3-8%), agak curam (15-30%), curam (30-50%) dan sangat curam (>50%). Kondisi bentuk lahan dan kemiringan lereng serta luasnya pada Gugus Pulau Terselatan dan Wetar.

2.2.5. Demografi

Pembangunan Kependudukan adalah pembangunan yang menempatkan isu perkembangan penduduk sebagai titik sentral dalam melahirkan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Kesadaran pembangunan berwawasan kependudukan dilandasi oleh permasalahan kependudukan (demografi) yang mendasar di setiap wilayah di Maluku. Permasalahan kependudukan di Maluku adalah laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi. Masalah kependudukan ini berdampak kepada bidang sosial, ekonomi, politik dan pertahanan serta keamanan. Masalah kependudukan juga dilihat dari segi kuantitas dan kualitas. Dari segi kuantitas, jumlah penduduk akan mempengaruhi kemampuan menyediakan sandang, pangan, dan papan. Sedangkan dari segi kualitas melihat dari kemampuan daya saing.

Sebagai Provinsi Kepulauan, wilayah di Provinsi Maluku tentunya memiliki tingkat kepadatan penduduk serta struktur penduduk yang berbeda pula, dimana struktur penduduk tersebut meliputi jumlah, persebaran dan komposisi penduduk. Tingkat kepadatan serta struktur yang berbeda-beda dari waktu ke waktu pada setiap wilayah dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kelahiran, kematian dan migrasi. Oleh karena struktur penduduk yang dinamis atau senantiasa mengalami perubahan dari waktu ke waktu maka perlu sekali untuk mengetahui komposisi penduduk di suatu wilayah, hal ini dikarenakan komposisi penduduk dapat memberikan gambaran mengenai pengelompokan penduduk berdasarkan pengelompokan kriteria tertentu.

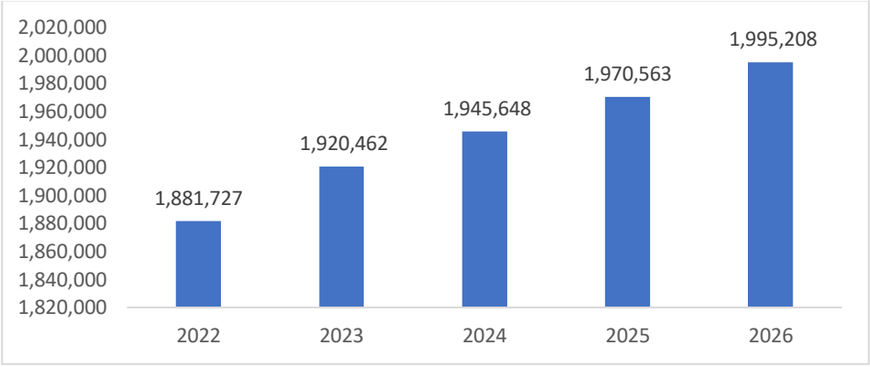
Melalui komposisi penduduk akan diperoleh berbagai data mengenai penduduk menurut jenis kelamin dan pengelompokkan umur. Demikian nantinya akan dapat

diketahui kelompok umur produktif dan tidak produktif, sehingga hal ini akan memudahkan pemerintah untuk meramalkan kebijakan apa yang akan diambil ketika melakukan pembangunan. Untuk itu pentingnya data jumlah dan struktur penduduk sehingga akan digunakan untuk menentukan beberapa kelompok sasaran (target groups) pembangunan, misalnya balita, penduduk usia sekolah, penduduk miskin, dan lansia.

Perkembangan penduduk Provinsi Maluku pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 menunjukkan adanya peningkatan sebagaimana tersaji pada grafik perkembangan laju pertumbuhan penduduk Provinsi Maluku yang dapat dilihat pada Gambar 2.3 di bawah berikut.

Grafik 2. 1

Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Maluku Tahun 2022-2026



Sumber : BPS Maluku, 2026

Jumlah penduduk Provinsi Maluku selama periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 menunjukkan kecenderungan meningkat setiap tahun. Pada tahun 2022 jumlah penduduk tercatat sebesar 1.881.727 jiwa, kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi 1.920.462 jiwa, dan kembali meningkat pada tahun 2024 sebesar 1.945.648 jiwa. Pada tahun 2025 jumlah penduduk mencapai 1.970.563 jiwa, dan pada tahun 2026 diproyeksikan menjadi 1.995.208 jiwa.

Berdasarkan data tersebut, jumlah penduduk terendah terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 1.881.727 jiwa, sedangkan jumlah penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2026 yaitu sebesar 1.995.208 jiwa. Secara keseluruhan terjadi peningkatan jumlah penduduk selama lima tahun terakhir yang menunjukkan adanya pertumbuhan penduduk yang relatif stabil di Provinsi Maluku.

Peningkatan jumlah penduduk ini memberikan implikasi terhadap kebutuhan pelayanan dasar, penyediaan infrastruktur, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga perencanaan pembangunan daerah perlu diarahkan untuk mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk agar pembangunan dapat berlangsung secara merata dan berkelanjutan. Perkembangan jumlah penduduk di Maluku 2022 – 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2. 3
Jumlah Penduduk di Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2022-2026

Kabupaten/Kota	2022	2023	2024	2025	2026
Kepulauan Tanimbar	128.787	128.648	130.487	132.317	134.167
Maluku Tenggara	124.199	124.968	126.245	127.502	128.774
Maluku Tengah	427.050	436.090	440.848	445.618	450.384
B u r u	137.990	140.462	142.304	144.124	145.909
Kepulauan Aru	103.860	107.367	109.159	110.930	112.697
Seram Bagian Barat	217.958	222.449	226.044	229.622	233.187
Seram Bagian Timur	143.438	144.818	147.139	149.475	151.788
Maluku Barat Daya	82.560	85.807	87.197	88.571	89.926
Buru Selatan	78.515	79.455	80.842	82.219	83.587
A m b o n	348.225	358.826	362.639	366.301	369.797
T u a l	93.145	91.572	92.744	93.884	94.992
M A L U K U	1.881.727	1.920.462	1.945.648	1.970.563	1.995.208

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dalam publikasi Maluku Dalam Angka 2026, laju pertumbuhan penduduk menurut kabupaten/kota pada periode 2020–2026 menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi di Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Seram Bagian Timur dengan laju pertumbuhan masing-masing sebesar 1,73 persen, 1,64 persen, dan 1,60 persen. Sementara itu, laju pertumbuhan penduduk terendah terjadi di Kabupaten Maluku Tenggara sebesar 0,97 persen, diikuti Kabupaten Maluku Tengah sebesar 1,05 persen, dan Kota Ambon sebesar 1,05 persen.

Secara umum, laju pertumbuhan penduduk Provinsi Maluku pada periode 2020–2026 tercatat sebesar 1,28 persen per tahun, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk antar kabupaten/kota relatif bervariasi, dimana beberapa daerah seperti Buru Selatan, Kepulauan Aru, Seram Bagian Timur, dan Seram Bagian Barat memiliki laju pertumbuhan di atas rata-rata provinsi, sedangkan beberapa daerah lain berada di bawah rata-rata pertumbuhan provinsi.

Secara lebih rinci, gambaran mengenai laju pertumbuhan penduduk menurut kabupaten/kota di Provinsi Maluku disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2026

Kode	Kab/Kota	KEPENDUDUKAN		
		Laju Pertumbuhan	Distribusi	Kepadatan
8101	Maluku Tengah	1,38	22.57	53.99

Kode	Kab/Kota	KEPENDUDUKAN		
		Laju Pertumbuhan	Distribusi	Kepadatan
8102	Maluku Tenggara	0.97	6.45	126,67
8103	Kepulauan Tanimbar	1,05	6.72	30,38
8104	Buru	1,27	7,31	29.68
8105	Seram Bagian Timur	1.60	7,61	26.51
8106	Seram Bagian Barat	1.57	11.69	46,55
8107	Kepulauan Aru	1.6\4	5,65	13.92
8108	Maluku Barat Daya	1.56	4.51	19.76
8109	Buru Selatan	1.73	4.19	22.72
8171	Kota Ambon	1.05	18.53	1.562,57
8172	Kota Tual	1.23	4.76	403.57
	TOTAL	**1.28**	**100**	**43,23**

2.2.6. Wilayah Rawan Bencana

Maluku memiliki kekhususan dalam hal kerawanan bencana. Beberapa fakta menunjukkan hal-hal sebagai berikut :

(1). Kepulauan Maluku ditinjau dari aspek tektonik, berada pada pertemuan tiga lempeng bumi yakni lempeng Eurasia yang meliputi antara lain Pulau Seram, Buru, Ambon dan pulau-pulau sekitarnya yang bergerak relatif ke arah tenggara, berinteraksi dengan lempeng Hindia, Australia yang relatif bergerak ke arah Utara dengan kecepatan 10 cm/tahun dan lempeng Pasifik yang bergerak relatif ke arah barat dengan kecepatan 12 cm/tahun, zona pertemuan antara ketiga lempeng tersebut membentuk palung yang mempunyai kedalaman sekitar 4.500-7.000 Meter yang dikenal dengan nama Zona Tumbukan atau Zona Subduksi, akibat dari benturan tersebut terbentuklah patahan-patahan (sesar) yang berpotensi menimbulkan ancaman bencana alam seperti Gempa Bumi, Tsunami, Tanah Longsor, Letusan Gunung Api dan bencana lainnya.

(2). Secara klimatologis wilayah Provinsi Maluku memiliki pola musim yang berbeda di setiap daerah. Pulau Ambon, Lease, Banda dan Seram hampir memiliki pola musim yang sama, dimana musim hujan terjadi pada bulan April sampai dengan September dengan puncak curah hujan terjadi pada bulan Juni sampai dengan bulan Agustus. Sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Oktober sampai dengan bulan Maret. Wilayah Pulau Buru, Tual, Saumlaki dan Geser hampir memiliki pola musim yang sama yakni musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai dengan bulan Maret dan musim

kemarau terjadi pada bulan Mei sampai dengan bulan September. Dari perbedaan pola musim yang terjadi di wilayah Provinsi Maluku maka untuk setiap daerah tentunya memiliki potensi bencana sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, gelombang pasang, abrasi dan lain-lain yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, sarana dan prasarana fisik, maupun penderitaan manusia yang pada akhirnya akan menghambat pelaksanaan pembangunan di Provinsi Maluku

(3). Daerah rawan bencana di Provinsi Maluku meliputi 11 Kabupaten/Kota yakni Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, Kepulauan Kei, Kepulauan Lease, Kepulauan Banda, Pulau Seram, Pulau Ambon, Kawasan Pulau Buru dan sekitarnya, kawasan Pulau Wetar dan sekitarnya serta jenis ancaman yang berbeda seperti Banjir, Tanah Longsor, Badai dan Angin Topan, Angin Puting Beliung, Gempa Bumi dan Tsunami, Letusan Gunung Berapi, Gelombang Pasang, Abrasi, Epidemi dan Wabah penyakit, Kemarau dan Kekeringan, Banjir Rob, Kebakaran Hutan, Banjir Bandang dan Kecelakaan Laut.

Tabel 2. 5
Jenis Bencana di Provinsi Maluku Tahun 2021-2025

Jenis Bencana	Jumlah Kejadian				
	2021	2022	2023	2024	2025
Gempa Bumi	8	2	1	-	2
Banjir dan Tanah Longsor	37	19	28	-	33
Angin Puting Beliung	19	4	-	-	-
Gelombang Pasang	5	7	-	-	1
Abrasi Pantai	-	-		-	-
Kebakaran	-	-	13	-	-
Konflik Sosial	-	-		-	-
Wabah Penyakit	-	-		-	-
Kekeringan	-	-		-	-
Total	**69**	**32**	**42**	**-**	**36**

2.2.7. Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah Provinsi Maluku diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang baik Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Maluku guna membangun Maluku sebagai Provinsi Kepulauan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis pada perikanan (budidaya dan tangkap), pertanian (perkebunan rempah-rempah), pariwisata (pariwisata bahari, sejarah dan budaya) dan pertambangan untuk peningkatan perekonomian wilayah melalui pengembangan sistem keterkaitan kepentingan nasional berbasis mitigasi bencana. Rencana struktur ruang Provinsi Maluku dilakukan dengan menggunakan pendekatan Laut Pulau,

Gugus Pulau dan Pintu Jamak (Multi Gate) yang diarahkan untuk meningkatkan interkoneksi antara kawasan perkotaan baik antara Pusat Kegiatan Nasional dengan Pusat Kegiatan Wilayah maupun dengan Pusat Kegiatan Lokal yang didukung oleh peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air secara terpadu di setiap Gugus Pulau.

Dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan antarwilayah di Daerah Maluku sebagai wilayah kepulauan, salah satu pendekatan dalam implementasi pembangunan adalah pendekatan wilayah yang didasarkan pada konsep Gugus Pulau. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033, terdapat 12 Gugus Pulau di Provinsi Maluku, yaitu :

1. Gugus Pulau I meliputi wilayah Pulau Buru;
2. Gugus Pulau II meliputi Wilayah Seram Barat;
3. Gugus Pulau III meliputi Wilayah Seram Utara;
4. Gugus Pulau IV meliputi Wilayah Seram Timur;
5. Gugus Pulau V meliputi Wilayah Seram Selatan;
6. Gugus Pulau VI meliputi Wilayah Kepulauan Banda, P.Teon, P.Nila dan P.Serua;
7. Gugus Pulau VII meliputi Wilayah Pulau Ambon dan PP. Lease;
8. Gugus Pulau VIII meliputi Wilayah Kepulauan Kei;
9. Gugus Pulau IX meliputi Wilayah Kepulauan Aru;
10. Gugus Pulau X meliputi Wilayah Kepulauan Tanimbar;
11. Gugus Pulau XI meliputi Wilayah Kepulauan Babar, Leti, Moa, Lakor dan Damer;
12. Gugus Pulau XII meliputi Wilayah Pulau-Pulau Terselatan dan Pulau Wetar.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) mengamanatkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional yang diwujudkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, pola ruang nasional dan kawasan strategis nasional yang mengatur pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi Maluku. Rencana struktur ruang wilayah nasional di Provinsi Maluku meliputi sistem perkotaan nasional, sistem jaringan transportasi nasional, sistem jaringan energi nasional, sistem jaringan telekomunikasi nasional dan sistem jaringan sumber daya air. Sedangkan rencana pola ruang di Provinsi Maluku mencakup kawasan lindung nasional, dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional serta kawasan strategis nasional.

Tabel 2. 6
Sistem Perkotaan Nasional di Provinsi Maluku

No	Kabupaten/Kota	Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
1	Kepulauan Tanimbar	-	-	Saumlaki
2	Maluku Barat Daya	-	Tiakur dan Wonreli	Ilwaki
3	Maluku Tenggara	-	Langgur	-
4	Maluku Tengah	-	Masohi dan Wahai	-
5	Buru	-	Namlea	-
6	Buru Selatan	-	Kepala Madang dan Namrole	-
7	Kep. Aru	-	-	Dobo
8	Seram Bagian Barat	-	Kairatu dan Dataran Honipopu	-
9	Seram Bagian Timur	-	Werinama, Bula dan Dataran Hunimua	-
10	Ambon	Ambon	-	-
11	Tual	-	Tual	-

Sumber : RTRW Provinsi Maluku 2013-2033

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Provinsi Maluku yang tersebar di 11 Kabupaten/Kota, yaitu Yamtel, Namsela, Tubyal, Waenetat, Ilath, Waplau, Airbuaya, Sawa, Wamlana, Kubalahin, Basalele, Kayeli, Teluk Bara, Leksula, Waisama, Wailua, Biloro, Elfule, Fena Fafan, Taniwel, Waisala, Hunitetu, Latu, Kamal, Luhu, Tomalehu Timur, Dan Uwen Pantai, Amahai, Banda Naira, Sahulau, Saparua, Pelauw, Hila, Ameth, Laimu, Tehoru, Tulehu, Kobisonta, Makariki, Geser, Kilalir, Atiahu, Wermaf Kampung Baru, Weiketam Baru, Tamher Timur, Air Kasar, Kilmuri, Pulau Panjang, Miran, Elat, Weduar, Holath, Ohoira, Rumat, Larat, Adaut, Lorulung, Seira, Romean, Wunlah, Alusi Kelaan, Adodo Molo, Tutukembong, Weet, Wulur, Tepa, Letwurung, Serwaru, Lelang, Jerol, Benjina, Marlasi, Batulei, Koijabi, Longgar, Meror.

Tabel 2. 7
Sistem Arahan Sistem Jaringan Struktur Ruang Wilayah Nasional Di Provinsi Maluku

No.	Kabupaten/Kota	Sistem Jaringan Transportasi Nasional	Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional	Sistem Jaringan Sumber Daya Air
1.	Maluku Tengah	- Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer	- Jaringan Terestrial - Jaringan Satelit	WS Strategis Pulau Ambon-Seram

No.	Kabupaten/Kota	Sistem Jaringan Transportasi Nasional	Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional	Sistem Jaringan Sumber Daya Air
		- Jaringan Jalan Strategis Nasional		
2.	Maluku Tenggara	- Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer - Jaringan Jalan Strategis Nasional	- Jaringan Terestrial - Jaringan Satelit	WS Strategis Nasional Kepulauan Kei-Aru
3.	Kepulauan Tanimbar	- Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer - Jaringan Jalan Strategis Nasional - Pelabuhan Nasional - Bandar Udara Tersier	- Jaringan Terestrial - Jaringan Satelit	WS Strategis Nasional Yamdena-Wetar
4.	Buru	- Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer - Jaringan Jalan Strategis Nasional	- Jaringan Terestrial - Jaringan Satelit	WS Strategi Nasional Pulau Buru
5.	Seram Bagian Timur	- Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer - Jaringan Jalan Strategis Nasional	- Jaringan Terestrial - Jaringan Satelit	WS Strategis Nasional Pulau Ambon-Seram
6.	Seram Bagian Barat	- Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer - Jaringan Jalan Strategis	- Jaringan Terestrial - Jaringan Satelit	WS Strategis Nasional Pulau Ambon-Seram

No.	Kabupaten/Kota	Sistem Jaringan Transportasi Nasional	Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional	Sistem Jaringan Sumber Daya Air
		Nasional		
7.	Kepulauan Aru	- Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer - Jaringan Jalan Strategis Nasional	- Jaringan Terestrial - Jaringan Satelit	WS Strategis Nasional Kepulauan Kei-Aru
8.	Maluku Barat Daya	- Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer - Jaringan Jalan Strategis Nasional	- Jaringan Terestrial - Jaringan Satelit	WS Strategis Nasional Kepulauan Yamdena-Wetar
9.	Buru Selatan	- Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer - Jaringan Jalan Strategis Nasional	- Jaringan Terestrial - Jaringan Satelit	WS Strategis Nasional Pulau Buru
10.	Ambon	- Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer - Jaringan Jalan Kolektor Primer - Jaringan Jalan Strategis Nasional - Pelabuhan Internasional - Bandar Udara Tersier	- Jaringan Terestrial - Jaringan Satelit	WS Strategis Nasional Pulau Ambon-Seram
11.	Tual	- Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer - Jaringan Jalan Strategis	- Jaringan Terestrial - Jaringan Satelit	WS Strategis Nasional Kepulauan Kei-Aru

No.	Kabupaten/Kota	Sistem Jaringan Transportasi Nasional	Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional	Sistem Jaringan Sumber Daya Air
		Nasional		

Sumber : RTRW Tahun 2013-2033 Provinsi Maluku

Strategi pengembangan struktur ruang nasional diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah nasional. Sebagai upaya mewujudkan strategi pengembangan wilayah nasional, Provinsi Maluku mengemban peran sebagai Provinsi Kepulauan dan Lumbung Ikan Nasional didukung oleh keberadaan jaringan jalan arteri primer, jaringan jalan kolektor primer, jaringan jalan strategis nasional dan jaringan jalan kolektor primer. Dua jaringan transportasi di Provinsi Maluku juga didukung oleh jaringan transportasi laut, pengembangan jaringan telekomunikasi berupa jaringan terestrial dan jaringan satelit serta peningkatan kualitas jaringan sumber daya air melalui ketersediaan air baku yang bersumber dari Satuan Wilayah Sungai (SWS) yang merupakan WS strategis nasional di Maluku.

Tabel 2. 8
Sistem Arahan Pola Ruang Wilayah Nasional Di Provinsi Maluku

No	Kabupaten/ Kota	Kawasan Lindung Nasional	Kawasan Budidaya Strategis Nasional	Kawasan Strategis Nasional
1	Maluku Tengah	- Cagar Alam Tanjung Sial - Cagar Alam Laut Banda - Taman Nasional Manusela - Taman Wisata Alam Laut Pulau Pombo - Taman Wisata Alam Laut Banda	- Kawasan Seram (Pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, pariwisata) - Kawasan Andalan Laut Banda (Perikanan, pertambangan, pariwisata)	- Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Seram - Kawasan Laut Banda
2	Maluku Tenggara	- Cagar Alam Daab	- Kawasan Kei sampai Aru, Pulau Wetar-Pulau Tanimbar (Perikanan, pertanian,	

No	Kabupaten/ Kota	Kawasan Lindung Nasional	Kawasan Budidaya Strategis Nasional	Kawasan Strategis Nasional
			kehutanan, perkebunan, industri)	
3	Kepulauan Tanimbar	- Suaka Margasatwa Tanimbar - Cagar Alam Pulau Nuswotar - Cagar Alam Pulau Larat - Cagar Alam Tafermaar	- Kawasan Kei sampai Aru Pulau Wetar-Pulau Tanimbar (Perikanan, pertanian, kehutanan, perkebunan, industri) - Kawasan Andalan Laut Arafura dan Sekitarnya (Perikanan laut, pertambangan, pariwisata)	Kawasan Perbatasan Laut RI
4	Buru	- Cagar Alam Masbait - Cagar Alam Masarete	- Kawasan Buru (Perkebunan, perikanan, pertanian, pariwisata)	
5	Seram Bagian Timur		- Kawasan Seram (Pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, pariwisata)	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Seram
6	Seram Bagian Barat	- Suaka Margasatwa Laut Pulau Kassa - Cagar Alam Gunung Sahuwai - Taman Wisata Alam Laut Pulau Kassa - Taman Wisata Alam Laut Pulau Marsegu	- Kawasan Seram (Pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, pariwisata)	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Seram

No	Kabupaten/ Kota	Kawasan Lindung Nasional	Kawasan Budidaya Strategis Nasional	Kawasan Strategis Nasional
		dan Sekitarnya		
7	Kepulauan Aru	- Suaka Margasatwa Pulau Baun - Cagar Alam Laut Kepulauan Aru Tenggara - Suaka Margasatwa Pulau Kobror	- Kawasan Kei Sampai Aru Pulau Wetar-Pulau Tanimbar (Perikanan, pertanian, kehutanan, perkebunan, industri)	Kawasan Perbatasan Laut RI
8	Maluku Barat Daya	- Cagar Alam Bekau Huhun	- Kawasan Kei Sampai Aru Pulau Wetar-Pulau Tanimbar (Perikanan, pertanian, kehutanan, perkebunan dan industri)	Kawasan Perbatasan Laut RI
9	Buru Selatan		- Kawasan Buru (Perkebunan, perikanan, pertanian, pariwisata)	
10	Ambon	-	-	-
11	Tual		- Kawasan Kei sampai Aru Pulau Wetar-Pulau Tanimbar (Perikanan, pertanian, kehutanan, perkebunan dan industri)	

Sumber : RTRW Tahun 2013-2033 Provinsi Maluku

Kebijakan pengembangan kawasan budidaya di Provinsi Maluku diarahkan dengan melakukan pengembangan kawasan budidaya unggulan yang memiliki nilai strategis. Kawasan perikanan dan pertanian yang diarahkan sebagai kawasan pengembangan budidaya komoditas unggulan berupa kawasan perikanan budidaya dan perikanan tangkap serta pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, pengembangan komoditas pertanian dengan pengembangan kawasan potensial pertanian, tanaman pangan, komoditas padi dan sagu, kawasan berpotensi perkebunan cengkeh, pala, kelapa, kakao, pohon kayu putih, jambu mete, kopi, dan vanili. Sektor unggulan pertanian diarahkan pada kabupaten/kota yang meliputi Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, Kota Ambon, Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Pengembangan komoditas perikanan dengan pengembangan kawasan berpotensi perikanan budidaya dan pengembangan kawasan berpotensi perikanan tangkap dan Kawasan Pengembangan Pariwisata diarahkan pada 11 Kabupaten/Kota.

Pengembangan kawasan strategis Provinsi dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa kawasan pertanian, kawasan pengembangan budidaya komoditas perkebunan unggulan, kawasan pengembangan pariwisata dan kawasan pengembangan komoditas perikanan diarahkan dengan meningkatkan dukungan ketersediaan dan kehandalan serta daya jangkau infrastruktur wilayah melalui peningkatan kapasitas jalan, penyediaan jaringan prasarana dan sarana transportasi, peningkatan kualitas dan cakupan pengelolaan sumber daya air dan peningkatan ketersediaan infrastruktur energi sehingga peran dan fungsi Provinsi Maluku sebagai Provinsi Kepulauan dan sebagai Lumbung Ikan Nasional dapat terwujud. Kawasan yang berpotensi untuk diarahkan sebagai pengembangan komoditas pertambangan meliputi pengembangan kawasan pertambangan komoditas mineral Mangan dan Nikel diarahkan pada Kabupaten Maluku Tengah dan pengembangan kawasan pertambangan minyak bumi diarahkan pada Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Pengembangan kawasan pariwisata diharapkan dapat mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan pekerjaan yang bermuara pada peningkatan ragam sumber dan volume pendapatan masyarakat lokal yang diharapkan tidak menurunkan kualitas lingkungan dan terganggunya habitat berbagai flora dan fauna.

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan bagian dari sumber daya alam dan merupakan kekayaan yang perlu dijaga kelestariannya serta dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, generasi sekarang dan yang akan datang. Potensi demikian memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah, seperti potensi perikanan, potensi jasa lingkungan, potensi energi kelautan dan

pertambangan. Pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil memerlukan perencanaan sehingga pengelolaan dan pemanfaatannya tidak berdampak terhadap perubahan ekosistem dan menurunnya mutu lingkungan. Wilayah pesisir Provinsi Maluku mempunyai peran sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat pedesaan pantai dan pembangunan ekonomi wilayah secara keseluruhan. Wilayah ini mengandung berbagai sumber daya dan potensi ekonomi seperti aneka jenis ikan dan objek wisata. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir Provinsi Maluku menghendaki adanya keberlanjutan (sustainability), mengingat wilayahnya terdapat beraneka ragam sumber daya yang memungkinkan pemanfaatan secara berganda baik dari kepentingan pertumbuhan ekonomi maupun keberlanjutan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu perlu ada kesatuan wawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir melalui perencanaan yang rasional dan terintegrasi antara sektor dan pemangku kepentingan, diwujudkan dalam rencana zonasi yang menentukan arah penggunaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

2.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.3.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

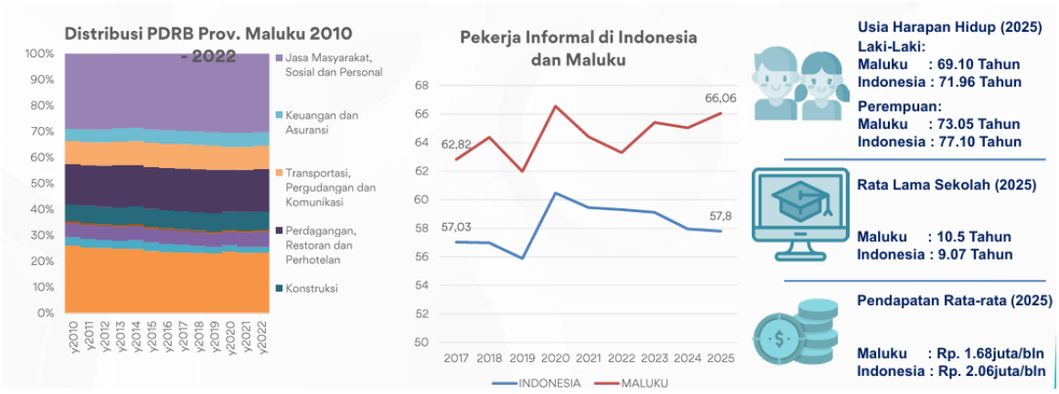
2.3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

2.3.1.1.1 Analisis Kondisi Ekonomi Global dan Dampaknya terhadap Maluku

Perkembangan ekonomi global dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan dinamika yang semakin kompleks, ditandai oleh ketidakpastian pasar, perubahan struktur perdagangan internasional, serta dampak jangka panjang dari krisis kesehatan dan iklim. Kondisi ini memberikan pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian daerah, termasuk Provinsi Maluku, yang memiliki karakteristik khusus dalam struktur ekonomi dan ketenagakerjaan.

Dalam konteks ekonomi global, fenomena *deindustrialisasi prematur* menjadi salah satu tantangan struktural yang dialami oleh sejumlah daerah di Indonesia, termasuk Provinsi Maluku. Fenomena ini terjadi ketika perekonomian daerah didominasi oleh sektor jasa tanpa terlebih dahulu melewati fase industrialisasi yang matang. Integrasi perdagangan internasional, kompetisi manufaktur lintas negara, serta disrupsi teknologi global telah mempercepat pergeseran struktur ekonomi Maluku ke arah sektor jasa, sementara basis industri lokal belum sempat berkembang secara optimal.

Gambar 2. 3
Kondisi Ekonomi dan Sosial Maluku Tahun 2025



Kondisi ekonomi dan sosial Maluku tahun 2025 dapat dilihat melalui sejumlah grafik yang menggambarkan dinamika struktural daerah. Grafik distribusi PDRB menunjukkan bahwa perekonomian Maluku didominasi oleh sektor jasa, seperti perdagangan, transportasi, dan jasa sosial. Dominasi ini menegaskan terjadinya fenomena deindustrialisasi prematur, di mana sektor jasa tumbuh lebih cepat tanpa didahului oleh penguatan sektor industri. Akibatnya, fondasi ekonomi daerah menjadi rapuh terhadap guncangan global.

Grafik pekerja informal memperlihatkan tren yang berlawanan dengan nasional. Jika secara nasional proporsi pekerja informal menurun, di Maluku justru meningkat dari 62,82 persen pada 2017 menjadi 66,06 persen pada 2025. Hal ini menunjukkan tingginya kerentanan tenaga kerja Maluku terhadap krisis global, karena sebagian besar masyarakat bekerja tanpa jaminan sosial, kesehatan, maupun pensiun.

Grafik usia harapan hidup menegaskan adanya kesenjangan kualitas hidup. Laki-laki Maluku memiliki usia harapan hidup 69,10 tahun dan perempuan 73,05 tahun, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Kondisi ini mencerminkan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan yang dapat semakin tertekan oleh dinamika global. Sebaliknya, grafik rata-rata lama sekolah menunjukkan capaian positif, yaitu 10,5 tahun, lebih tinggi dibandingkan nasional. Namun, keunggulan pendidikan ini berpotensi menimbulkan pengangguran terdidik apabila tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja formal.

Grafik pendapatan rata-rata memperlihatkan bahwa masyarakat Maluku memiliki pendapatan Rp 1,68 juta per bulan, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional Rp 2,06 juta per bulan. Perbedaan ini menunjukkan daya beli masyarakat Maluku lebih lemah, sehingga lebih rentan terhadap inflasi dan fluktuasi harga global.

2.3.1.1.2 Kondisi Ekonomi Maluku

Perekonomian Maluku dalam periode 2021–2025 menunjukkan dinamika pertumbuhan yang dipengaruhi oleh struktur ekonomi daerah yang masih didominasi sektor primer serta perkembangan aktivitas produksi dan distribusi antarwilayah.

Pada tahun 2021, ekonomi Maluku tumbuh sebesar 3,04%, mencerminkan peningkatan aktivitas produksi terutama pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai kontributor utama PDRB.

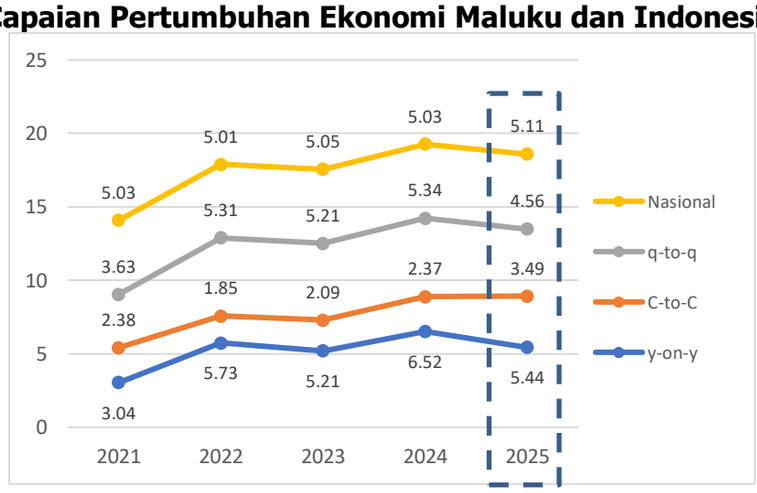
Memasuki tahun 2022, pertumbuhan ekonomi meningkat signifikan menjadi 5,73% (y-on-y) atau sekitar 5,11% (c-to-c). Kinerja ini didorong oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga, ekspansi sektor industri pengolahan, serta penguatan sektor perdagangan.

Pada tahun 2023, ekonomi Maluku tetap tumbuh sebesar 5,21%, menunjukkan stabilitas pertumbuhan dengan dukungan utama dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta kontribusi sektor industri pengolahan dan konstruksi.

Selanjutnya pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,34% (c-to-**c)**. Pada triwulan IV-2024, ekonomi Maluku tumbuh 6,52% (y-on-y), didorong oleh peningkatan aktivitas pada sektor industri pengolahan, perdagangan, dan ekspor komoditas unggulan.

Memasuki tahun 2025, berdasarkan rilis terbaru Badan Pusat Statistik, ekonomi Maluku pada triwulan IV-2025 tumbuh sebesar 5,44% (y-on-y). Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja ekonomi kembali menguat dibandingkan pertumbuhan pada pertengahan tahun. Penguatan ini didorong oleh meningkatnya aktivitas pada sektor perdagangan, perbaikan kinerja industri pengolahan, serta tetap kuatnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan.

Grafik 2.2
Capaian Pertumbuhan Ekonomi Maluku dan Indonesia



Secara keseluruhan, Maluku menunjukkan tren yang lebih fluktuatif dibandingkan nasional. Maluku sempat melampaui angka nasional di 2022 dan 2024, tetapi kembali turun di 2025. Sementara itu, nasional tetap stabil dengan sedikit peningkatan. Perbandingan 2024–2025 memperlihatkan bahwa Maluku mengalami penurunan cukup tajam, sedangkan nasional justru mengalami perbaikan kecil.

2.3.1.1.2.1. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku merupakan indikator penting untuk melihat nilai nominal produksi barang dan jasa di Provinsi Maluku. Data BPS menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 hingga 2025, PDRB Maluku mengalami peningkatan yang konsisten.Pada Triwulan IV 2024, nilai PDRB atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp16,78 triliun. Sementara itu, pada Triwulan IV 2025, nilai PDRB meningkat menjadi Rp17,55 triliun. Dengan demikian, terjadi kenaikan sebesar Rp 0,77 triliun atau sekitar 4,6 persen dalam kurun waktu satu tahun. Kontribusi terbesar terhadap PDRB masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang pada Triwulan IV 2025 mencapai Rp4,13 triliun atau sekitar 0,59 persen dari total PDRB. Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib menyumbang Rp3,52 triliun (4,46 persen), diikuti sektor perdagangan besar dan eceran sebesar Rp2,61 triliun (6,25) persen), serta sektor konstruksi sebesar Rp1,39 triliun (4,70 persen).

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hampir semua sektor menunjukkan peningkatan nilai produksi. Sektor industri pengolahan naik dari Rp1,05 triliun pada Triwulan IV 2024 menjadi Rp1,22 triliun pada Triwulan IV 2025. Sektor transportasi dan pergudangan juga mengalami lonjakan dari Rp894,8 miliar menjadi Rp1,00 triliun.Secara keseluruhan, perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku dari tahun 2024 ke 2025 memperlihatkan adanya pertumbuhan ekonomi nominal yang cukup kuat, dengan sektor pertanian tetap menjadi tulang punggung, namun sektor perdagangan, industri pengolahan, dan transportasi mulai menunjukkan peranan yang semakin besar dalam struktur ekonomi Maluku.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010 digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil dengan menghilangkan pengaruh inflasi. Data BPS menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 hingga 2025, PDRB Maluku atas dasar harga konstan mengalami peningkatan yang cukup berarti. Pada Triwulan IV 2024, nilai PDRB ADHK tercatat sebesar Rp9,85 triliun. Sementara pada Triwulan IV 2025, nilai PDRB meningkat menjadi Rp10,20 triliun. Dengan demikian, terjadi kenaikan sebesar Rp 344.018,14 juta atau sekitar 3,49 persen dalam kurun waktu satu tahun.

Kontribusi terbesar terhadap PDRB ADHK masih berasal dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, dengan nilai mencapai Rp2,35 triliun pada Triwulan IV 2025. Sektor ini tetap menjadi tulang punggung perekonomian Maluku. Selain itu, sektor perdagangan besar dan eceran menyumbang Rp1,65 triliun, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar Rp1,94 triliun, serta sektor industri pengolahan sebesar Rp703 miliar.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hampir semua sektor menunjukkan pertumbuhan riil. Sektor transportasi dan pergudangan naik dari Rp472

miliar pada Triwulan IV 2024 menjadi Rp499 miliar pada Triwulan IV 2025. Sektor jasa keuangan dan asuransi juga mengalami peningkatan signifikan dari Rp379 miliar menjadi Rp417 miliar, mencerminkan peran sektor jasa dalam menopang pertumbuhan ekonomi. Secara keseluruhan, perkembangan PDRB atas dasar harga konstan dari tahun 2024 ke 2025 memperlihatkan adanya pertumbuhan ekonomi riil sebesar 5,44 persen (y-on-y). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan nilai produksi barang dan jasa di Maluku bukan hanya akibat kenaikan harga, tetapi juga karena adanya peningkatan volume produksi dan aktivitas ekonomi di berbagai sektor.

Struktur perekonomian Provinsi Maluku pada periode 2021–2025 menunjukkan pola yang relatif tetap, dengan dominasi sektor primer sebagai kontributor terbesar. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang rata-rata 23,58 persen terhadap PDRB, diikuti oleh sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 21,72 persen. Sektor perdagangan besar dan eceran memberikan kontribusi sekitar 13,73 persen, sedangkan sektor konstruksi menyumbang rata-rata 7,79 persen per tahun.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, sektor dengan laju pertumbuhan tertinggi adalah industri pengolahan dengan rata-rata 9,91 persen, menunjukkan adanya dinamika positif di sektor sekunder. Sektor perdagangan tumbuh rata-rata 6,61 persen, sektor kesehatan dan kegiatan sosial 6,23 persen, serta sektor transportasi dan informasi-komunikasi masing-masing sekitar 5,71 persen

Tabel 2. 9
Rata-Rata Kontribusi PDRB ADHB dan Rata-Rata Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektoral

Kategori		Lapangan Usaha	Rata-Rata Kontribusi PDRB Sektoral 2021-2025	Rata-Rata LPE Sektoral 2021-2025
SEKTOR PRIMER	A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,58	4,39
	B	Pertambangan dan Penggalian	2,00	0,23
SEKTOR SEKUNDER	C	Industri Pengolahan	6,05	9,91
	D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	5,19
	E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	0,39	2,81
	F	Konstruksi	7,79	4,23
SEKTOR TERSIER	G	Perdagangan Besar dan Eceran,	13,73	6,61
	H	Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan	5,26	5,71

	I	Penyediaan Akomodasi dan Makan dan Minum	1,47	3,43
	J	Informasi dan Komunikasi	3,12	5,71
	K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,1	3,63
	L	Real Estate	0,27	4,04
	M,N	Jasa Perusahaan	0,95	4,77
	O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	21,72	3,44
	P	Jasa Pendidikan	5,45	3,9
	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,39	6,23
	R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,63	4,76

Sumber : BPS Provinsi Maluku

Namun, jika ditinjau dari aspek pertumbuhan, sektor-sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap perekonomian cenderung menunjukkan laju pertumbuhan yang relatif lebih moderat dibandingkan dengan beberapa sektor lainnya. Hal ini terlihat dari kinerja sektor-sektor dengan pertumbuhan lebih tinggi, seperti sektor industri pengolahan yang mencatat rata-rata pertumbuhan sebesar 9,91 persen per tahun, diikuti oleh sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 5,19 persen, serta sektor informasi dan komunikasi sebesar 5,71 persen.

Berdasarkan data komponen pengeluaran Provinsi Maluku tahun 2021–2025, terlihat bahwa perekonomian daerah masih sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga tetap menjadi komponen terbesar, meskipun mengalami tren penurunan dari 69,55 persen pada tahun 2021 menjadi 68,70 persen pada tahun 2024, sebelum kembali meningkat ke 70,3 persen pada tahun 2025. Sementara itu, pengeluaran konsumsi pemerintah menunjukkan penurunan yang cukup tajam, dari 32,64 persen pada tahun 2021 menjadi hanya 23,7 persen pada tahun 2025. Kondisi ini mencerminkan adanya efisiensi belanja atau pergeseran peran pemerintah dalam perekonomian daerah. Di sisi lain, perubahan inventori relatif kecil dan stabil, turun dari 0,57 persen pada tahun 2021 menjadi 0,45 persen pada tahun 2025, yang menunjukkan bahwa peran stok barang dalam perekonomian tidak terlalu besar. Secara keseluruhan, pola ini menegaskan bahwa daya beli masyarakat masih menjadi motor utama penggerak ekonomi Maluku, sementara kontribusi pemerintah dalam pengeluaran semakin berkurang dan inventori tetap terbatas.

Tabel 2. 10
Distribusi PDRB Pengeluaran ADHB Provinsi Maluku
Menurut Lapangan Usaha (Persen)

No	KOMPONEN PENGELUARAN	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	71,15	69,55	69,24	68,96	68,70	70,3
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,67	2,62	2,61	2,62	2,8	2,9
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	32,2	32,64	28,87	27,23	26,9	23,7
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	33,64	33,27	31,01	29,37	28,5	27,59
5	Perubahan Inventori	0,62	0,57	0,52	0,48	0,5	0,45
6	Ekspor Barang dan Jasa	-40	-36,5	-31,8	-24,2	-18,5	2,85
	PDRB	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : BPS Provinsi Maluku

2.3.1.1.2.2. Pendapatan Perkapita

Pada periode 2023–2025, PDRB per kapita di Provinsi Maluku menunjukkan tren peningkatan yang konsisten setiap tahun. Pada tahun 2023, pendapatan per kapita tercatat sebesar 30.455 rupiah, naik menjadi 32.198 rupiah pada 2024, dan mencapai 33.650 rupiah pada 2025.

Jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 28.537 rupiah, maka terjadi kenaikan sebesar 5.113 rupiah dalam tiga tahun terakhir. Peningkatan ini mencerminkan adanya pertumbuhan nilai tambah ekonomi yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan laju pertumbuhan jumlah penduduk.

Secara spasial, tren positif ini juga terlihat di beberapa daerah. Kota Ambon meningkat dari 51.568 rupiah pada 2023 menjadi 54.699 rupiah pada 2024, dan tetap stabil di 54.699 rupiah pada 2025. Kabupaten Maluku Tenggara tumbuh dari 32.893 rupiah pada 2023 menjadi 34.920 rupiah pada 2024, lalu naik lagi ke 36.623 rupiah pada 2025. Kabupaten Buru juga menunjukkan kenaikan dari 21.201 rupiah pada 2023 menjadi 22.256 rupiah pada 2024, dan 23.232 rupiah pada 2025. Dengan demikian, periode 2023–2025 menegaskan arah pertumbuhan ekonomi Maluku yang positif, meskipun terdapat variasi antarwilayah.

Tabel 2. 11
PDRB Per Kapita Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota Di Maluku

Kabupaten/Kota	Tahun			
	2022	2023	2024*	2025**
Kepulauan Tanimbar	24.851	26.366	27.728	29.053**
Maluku Tenggara	30.598	32.893	34.920	36.623**
Maluku Tengah	23.154	24.680	25.983	27.364**
Buru	19.985	21.201	22,256	23.232**
Kepulauan Aru	38.309	41.319	43.620	46.189**

Seram Bagian Barat	15.995	17.031	18.037	18.857**
Seram Bagian Timur	25.530	24.233	25.034	25.244**
Maluku Barat Daya	26.874	33.433	33.433	36.666**
Buru Selatan	20.917		22.229	23.340**
Kota Ambon	48.359	51.568	51.568	54.699**
Kota Tual	32.185	34.994	36.846	36.846**
Provinsi Maluku	**28.537**	**30.455**	**32.198***	**33.650****

Sumber: BPS Prov. Maluku, data diolah
*sementara
** Sangat sementara

2.3.1.1.2.3. Laju Inflasi

Provinsi Maluku mencatatkan tingkat inflasi tahunan (*year-on-year*) sebesar 3,58 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,82. Angka ini menunjukkan bahwa tekanan inflasi di Maluku berada di atas rata-rata nasional yang tercatat sebesar 2,92 persen dengan IHK 109,92. Secara bulanan (*month-to-month*), Maluku juga mengalami kenaikan harga yang lebih tajam yaitu sebesar 0,81 persen, sementara secara nasional kenaikan harga pada Desember 2025 hanya menyentuh angka 0,64 persen. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa laju peningkatan harga barang dan jasa di wilayah Kepulauan Maluku bergerak lebih progresif dibandingkan dengan rata-rata wilayah lain di Indonesia.

Penyebab utama tingginya inflasi di Maluku dibandingkan dengan nasional terletak pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang melonjak hingga 6,73 persen, jauh melampaui inflasi nasional pada kelompok yang sama sebesar 4,58 persen. Komoditas perikanan menjadi pembeda utama, di mana ikan layang, ikan selar, dan ikan tongkol memberikan andil besar terhadap inflasi di Maluku, sementara di tingkat nasional, pendorong utama kelompok ini lebih didominasi oleh cabai merah, beras, dan daging ayam ras. Hal ini mencerminkan ketergantungan kuat stabilitas harga di Maluku terhadap pasokan hasil laut dan kondisi cuaca yang memengaruhi aktivitas nelayan setempat.

Sektor transportasi juga menjadi faktor pendorong signifikan yang membedakan kedua wilayah tersebut, di mana Maluku mengalami inflasi sektor ini sebesar 3,90 persen, berbanding terbalik dengan nasional yang hanya sebesar 1,23 persen. Tingginya angka di Maluku dipicu oleh kenaikan tarif angkutan udara serta harga bensin dan mobil, yang dampaknya jauh lebih terasa di daerah kepulauan dengan biaya logistik tinggi. Sebaliknya, secara nasional, inflasi justru sangat dipengaruhi oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang naik drastis sebesar 13,33 persen akibat lonjakan harga emas perhiasan, sebuah fenomena yang andilnya tidak sebesar itu di wilayah Maluku.

Selain pangan dan transportasi, sektor pendidikan dan kesehatan di Maluku juga menunjukkan kenaikan yang lebih tinggi daripada rata-rata Indonesia, dengan inflasi pendidikan mencapai 2,49 persen dibandingkan nasional yang hanya 1,22

persen. Secara keseluruhan, pembentukan inflasi di Maluku lebih banyak didorong oleh faktor struktural dan geografis seperti biaya distribusi logistik antar-pulau dan fluktuasi hasil laut lokal. Sementara itu, inflasi nasional lebih banyak dipengaruhi oleh komoditas global seperti emas serta kebijakan harga air minum (PAM) dan komoditas pangan pokok yang bersifat masif di wilayah daratan besar seperti Jawa dan Sumatera. Perkembangan inflasi nasional dan maluku tahun 2021 – 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 12
Perkembangan Inflasi di Provinsi Maluku dan Nasional

	Tahun					
	2021	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Nasional (y-on-y)	0,45	0,57	0,51	2,61	1,57	2,92
Maluku (y-on-y)	0,21	4,01	6,28	2,81	1,28	3,58

Sumber : BPS Provinsi Maluku

2.3.1.1.2.4. Indeks Gini

Berdasarkan data Berita Resmi Statistik per 5 Februari 2026, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Provinsi Maluku pada September 2025 menunjukkan tren perbaikan yang signifikan dengan angka Gini Ratio sebesar 0,273. Capaian ini menandakan penurunan sebesar 0,023 poin dibandingkan kondisi pada Maret 2025 yang tercatat sebesar 0,296. Penurunan ketimpangan ini terjadi baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, di mana Gini Ratio perkotaan turun dari 0,276 menjadi 0,262, sementara di perdesaan turun dari 0,249 menjadi 0,228.

Tabel 2. 13
Indeks Gini Maluku Tahun 2021 - 2025

Tahun / Periode	Gini Maluku	Gini Nasional
2021 (Maret)	0,314	0,384
2021 (September)	0,316	0,381
2022 (Maret)	0,301	0,384
2022 (September)	0,309	0,381
2023 (Maret)	0,288	0,388
2023 (September)		0,308
2024 (Maret)	0,282	0,379
2024 (September)	0,291	0,381
2025 (Maret)	0,296	0,375
2025 (September)	0,273	0,363

Sumber : BPS Provinsi Maluku, 2025

Berdasarkan data historis Gini Ratio Provinsi Maluku dalam beberapa tahun terakhir, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk mencapai titik tertinggi pada September 2021 dengan angka 0,316, sementara tingkat ketimpangan terendah

tercatat pada September 2025 sebesar 0,273. Kondisi pada September 2025 ini menunjukkan tren pemulihan yang sangat positif, di mana angka tersebut merupakan penurunan signifikan sebesar 0,023 poin dibandingkan dengan posisi Maret 2025 (0,296). Dengan distribusi pengeluaran kelompok 40 persen terbawah yang mencapai 23,87 persen, Maluku menutup tahun 2025 dalam kategori ketimpangan rendah, yang mengindikasikan bahwa pembagian ekonomi di wilayah tersebut semakin merata baik di area perkotaan maupun perdesaan.

Tabel 2. 14
Gini Rasio Kabupaten/Kota Maluku 2021 - 2025

No	Kabupaten/Kota	Gini Rasio Kabupaten/Kota di Maluku				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Kepulauan Tanimbar	0,303	0,277	0,295	0,253	0,251
2	Maluku Tenggara	0,239	0,285	0,244	0,248	0,260
3	Maluku Tengah	0,269	0,277	0,261	0,255	0,255
4	Buru	0,289	0,272	0,303	0,253	0,247
5	Kepulauan Aru	0,322	0,245	0,315	0,292	0,306
6	Seram Bagian Barat	0,267	0,284	0,241	0,252	0,235
7	Seram Bagian Timur	0,266	0,242	0,244	0,201	0,241
8	Maluku Barat Daya	0,248	0,175	0,191	0,177	0,189
9	Buru Selatan	0,274	0,240	0,276	0,225	0,231
10	Ambon	0,29	0,295	0,285	0,263	0,281
11	Tual	0,231	0,256	0,26	0,209	0,231
Maluku		**0,314**	**0,301**	**0,288**	**0,282**	***0,273**

Sumber : BPS Provinsi Maluku, 2026
*Maluku September 2025

Data Gini Rasio Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku periode 2021–2025 menunjukkan tren penurunan ketimpangan pengeluaran yang cukup positif secara agregat, di mana angka provinsi menyusut dari 0,314 menjadi 0,273. Secara spesifik pada tahun 2025, hampir seluruh wilayah mengalami perbaikan pemerataan ekonomi dibandingkan tahun sebelumnya, dengan Maluku Barat Daya konsisten mencatatkan rasio terendah (0,189) yang mengindikasikan distribusi pendapatan paling merata, sementara Kepulauan Aru (0,306) menjadi wilayah dengan tingkat ketimpangan tertinggi meski angka tersebut masih berada dalam kategori ketimpangan tertinggi (di atas 0,3). Fluktuasi yang terjadi di beberapa daerah, seperti Buru dan Kepulauan Tanimbar, menunjukkan adanya dinamika ekonomi lokal yang dinamis, namun secara keseluruhan Maluku berhasil menjaga stabilitas sosial melalui distribusi ekonomi yang semakin inklusif di tingkat kabupaten/kota.

2.3.1.1.2.5. Tingkat Kemiskinan

2.3.1.1.2.5.1. Kemiskinan Provinsi Maluku

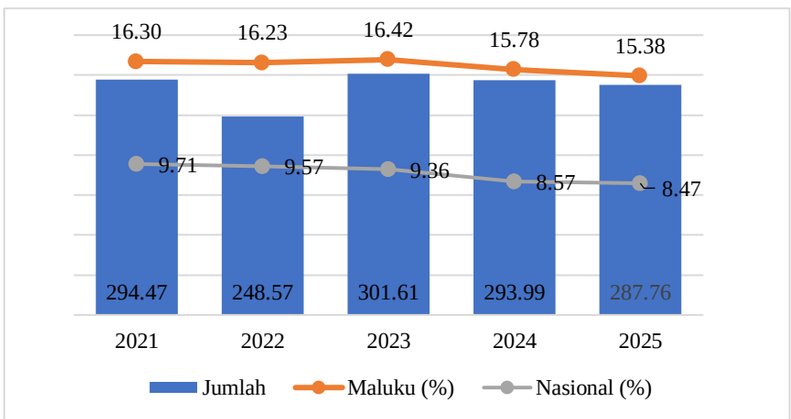
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Maluku pada September 2025 mencapai 286,86 ribu orang atau 15,25 persen. Dibandingkan Maret 2025, jumlah penduduk miskin di Maluku turun 0,13 poin persentase. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 tercatat sebanyak 287,76 ribu orang.Hingga September 2025, angka kemiskinan terus mengalami tren penurunan.

Tabel 2. 15
Persentase Kemiskinan Maluku 2025

Indikator	Maret 2025	September 2025	Perubahan
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang)	287,76	286,86	-0,90
Persentase Kemiskinan (%)	15,38*	15,25	-0,13
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	757,600*	797.060	5,21

Meskipun jumlah penduduk miskin di Maluku fluktuatif (sempat turun drastis di 2022 namun melonjak lagi di 2023), secara keseluruhan dalam jangka panjang (2021-2025) terdapat tren penurunan. Namun, rata-rata penurunan persentase kemiskinan di Maluku (0,23%) masih sedikit lebih lambat dibandingkan rata-rata penurunan nasional (0,31%).

Grafik 2.3
Kemiskinan Maluku Tahun 2021-2025



Berdasarkan grafik tersebut, tren kemiskinan di Provinsi Maluku selama periode 2021 hingga 2025 menunjukkan fluktuasi yang cukup dinamis dengan kecenderungan menurun dalam dua tahun terakhir. Pada awal periode yaitu tahun 2021, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 294,47 ribu orang (16,30%), yang kemudian sempat mengalami penurunan signifikan di tahun 2022 menjadi 248,57 ribu orang. Namun, angka ini kembali melonjak tajam pada tahun 2023 hingga mencapai titik tertinggi dalam lima tahun terakhir, yaitu sebesar 301,61 ribu orang dengan persentase 16,42%. Kondisi ini mengindikasikan adanya faktor ekonomi tertentu yang menyebabkan kerentanan penduduk di wilayah tersebut pada periode

tersebut.

Setelah lonjakan di tahun 2023, Provinsi Maluku berhasil mempertahankan tren penurunan penduduk miskin secara konsisten hingga tahun 2025. Pada tahun 2024, jumlah penduduk miskin turun menjadi 293,99 ribu orang (15,78%) dan terus berkurang hingga mencapai 287,76 ribu orang atau sebesar 15,38% pada tahun 2025. Meskipun tren di Maluku menunjukkan perbaikan, terdapat kesenjangan yang lebar jika dibandingkan dengan persentase kemiskinan nasional yang berada di angka satu digit. Persentase kemiskinan nasional secara konsisten berada jauh di bawah Maluku, bergerak dari 9,71% di tahun 2021 hingga mencapai 8,47% di tahun 2025, yang menunjukkan bahwa tantangan pengentasan kemiskinan di Maluku masih cukup berat dibandingkan rata-rata nasional.

2.3.1.1.2.5.2. Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota

Kesenjangan antarkabupaten/kota tetap nyata. Kota Ambon sebagai pusat ekonomi memiliki kondisi yang relatif lebih baik, sementara wilayah kepulauan seperti Maluku Barat Daya, Kepulauan Aru, dan Maluku Tenggara masih menghadapi tantangan besar akibat keterbatasan akses, infrastruktur, serta ketergantungan pada sektor primer.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Maluku bukan sekadar persoalan angka, melainkan cerminan dari ketimpangan struktural antarwilayah. Oleh karena itu, pembahasan mengenai tingkat kemiskinan kabupaten/kota menjadi penting untuk memahami akar masalah sekaligus merumuskan strategi pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Gambaran mengenai kemiskinan kabupaten/kota tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 16
Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Maluku
Tahun 2024-2025

No	Kabupaten/Kota	Presentase Penduduk Miskin	
		2024	2025
1	Kepulauan Tanimbar	23,66	23,38
2	Maluku Tenggara	21,22	21,16
3	Maluku Tengah	17,67	16,71
4	Buru	16,08	15,11
5	Kepulauan Aru	23,39	23,10
6	Seram Bagian Barat	22,31	21,85
7	Seram Bagian Timur	21,03	20,90
8	Maluku Barat Daya	27,95	27,65
9	Buru Selatan	14,91	14,84
10	Kota Ambon	5,13	4,34
11	Kota Tual	20,01	19,39
Maluku		16,05	15,38

Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku menunjukkan

tren penurunan dari 16,05% pada tahun 2024 menjadi 15,38% pada tahun 2025. Hampir semua kabupaten/kota mengalami perbaikan, meskipun dengan variasi yang berbeda. Kota Ambon mencatat penurunan paling signifikan, dari 5,13% menjadi 4,34%, menjadikannya daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di Maluku. Sementara itu, Maluku Barat Daya tetap menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi, meski turun sedikit dari 27,95% menjadi 27,65%. Penurunan yang cukup nyata juga terlihat di Maluku Tengah dan Kabupaten Buru, masing-masing hampir satu poin persentase. Namun, beberapa daerah seperti Maluku Tenggara dan Buru Selatan hanya mengalami penurunan sangat kecil, menunjukkan perlunya intervensi lebih kuat. Secara umum, data ini menegaskan bahwa meskipun ada kemajuan, tantangan besar masih dihadapi terutama di wilayah kepulauan terpencil yang memiliki keterbatasan akses ekonomi, infrastruktur, dan layanan dasar. Pemerintah daerah perlu menitikberatkan kebijakan pada penguatan sektor produktif, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan agar penurunan kemiskinan lebih merata di seluruh wilayah Maluku.

2.3.1.1.2.6. Tingkat Pengangguran

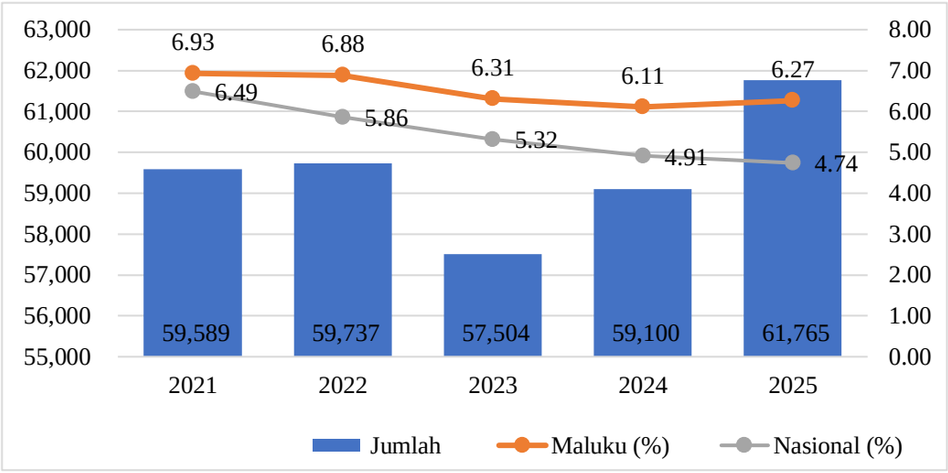
2.3.1.1.2.6.1. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Maluku

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Maluku pada Agustus 2025 tercatat sebesar 6,27 persen. Jika dibandingkan dengan data nasional pada periode yang sama yang berada di angka 4,85 persen, terlihat bahwa tantangan ketenagakerjaan di Maluku masih cukup berat karena angka pengangguranya berada di atas rata-rata nasional dengan selisih sebesar 1,42 persen poin. TPT Maluku mengalami peningkatan sebesar 0,16 persen poin, dari 6,11 persen pada Agustus 2024 menjadi 6,27 persen pada Agustus 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi penambahan kesempatan kerja, laju pertumbuhan angkatan kerja masih lebih tinggi dibandingkan daya serap tenaga kerja, sehingga tekanan di pasar kerja tetap berlangsung

Dari sisi jumlah, penduduk bekerja pada Agustus 2025 mencapai 922.486 orang, meningkat sebanyak 14.773 orang dibandingkan Agustus 2024. Struktur ketenagakerjaan masih didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (30,58 persen), diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran (14,61 persen), serta Industri Pengolahan (13,07 persen). Pola ini mengindikasikan bahwa perekonomian Maluku masih bertumpu pada sektor primer dengan produktivitas relatif rendah dan rentan terhadap fluktuasi musiman. Di sisi lain, kontribusi sektor industri pengolahan yang mulai meningkat menjadi sinyal awal transformasi struktural, meskipun perannya masih terbatas.. Kontras dengan tren nasional yang mulai bergeser ke sektor jasa dan industri manufaktur, Maluku masih sangat bergantung pada sektor primer. Selain itu, komposisi pekerja di Maluku masih didominasi oleh pekerja informal yang mencapai 66,06 persen, yang mencerminkan bahwa struktur pasar

kerja masih didominasi oleh pekerjaan dengan tingkat formalitas dan perlindungan yang relatif terbatas.

Grafik 2. 4
Perbandingan Perkembangan Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Maluku Tahun 2021-2025



2.3.1.1.2.6.2. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota

Pengangguran terbuka di kabupaten/kota di Maluku mencerminkan tantangan struktural dalam pasar kerja daerah, di mana pertumbuhan angkatan kerja tidak sepenuhnya diimbangi oleh ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi indikator penting untuk menilai efektivitas pembangunan ekonomi dan kualitas kebijakan ketenagakerjaan di setiap wilayah. Perbedaan angka TPT antar kabupaten/kota menunjukkan variasi kondisi ekonomi lokal, akses terhadap sektor produktif, serta kemampuan daerah dalam menyerap tenaga kerja. Oleh karena itu, analisis TPT tidak hanya menggambarkan kondisi ketenagakerjaan, tetapi juga menjadi dasar bagi perumusan strategi pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Maluku.

Tabel 2. 17
Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota Tahun 2021-2025

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) - Agustus				
	2021	2022	2023	2024	2025
Kepulauan Tanimbar	4,40	4,33	4,31	4,24	4,21
Maluku Tenggara	5,06	5,74	5,73	5,68	6,01
Maluku Tengah	8,07	6,76	6,75	6,50	6,93
Buru	4,85	4,99	4,86	4,66	4,66
Kepulauan Aru	1,55	2,10	1,96	1,83	2,1
Seram Bagian Barat	5,65	5,45	4,74	4,52	4,92
Seram Bagian Timur	3,88	3,38	3,31	3,24	3,18
Maluku Barat Daya	1,80	2,47	2,43	2,36	2,69
Buru Selatan	1,63	0,98	0,97	1,35	1,29
Kota Ambon	11,3	11,67	11,65	11,44	11,4

Kota Tual	8,71	9,07	8,98	8,68	8,96
Maluku	**6,93**	**6,88**	**6,31**	**6,11**	**6,27**

Secara umum, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) kabupaten/kota menunjukkan tren menurun pada periode 2021–2024, yang mencerminkan perbaikan kondisi ketenagakerjaan dan meningkatnya penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor. Namun, pada tahun 2025 terjadi kenaikan kembali, yang mengindikasikan adanya tekanan baru di pasar kerja.

Terdapat disparitas antarwilayah, di mana daerah perkotaan seperti Kota Ambon dan Kota Tual cenderung memiliki TPT lebih tinggi dibandingkan wilayah berbasis pertanian dan perikanan yang relatif lebih mampu menyerap tenaga kerja, meskipun didominasi sektor informal.

Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa perbaikan ketenagakerjaan belum sepenuhnya stabil, sehingga diperlukan upaya berkelanjutan dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta penguatan sektor ekonomi produktif di masing-masing kabupaten/kota.

2.3.1.1.2.7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2.3.1.1.2.7.1. IPM Maluku

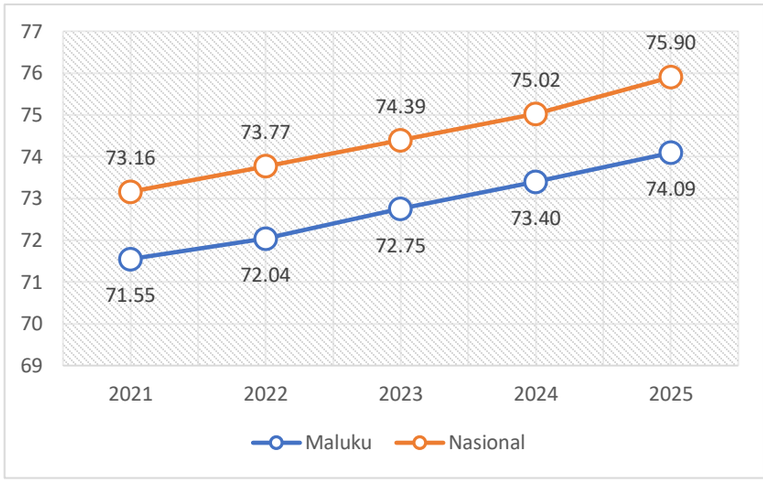
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Maluku pada tahun 2025 mencapai angka 74,09 yang menandakan bahwa kualitas pembangunan manusia di wilayah ini berada pada kategori "Tinggi". Jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar 73,40, terjadi peningkatan sebesar 0,69 poin atau tumbuh sekitar 0,941 persen. Peningkatan ini didorong oleh pertumbuhan pada seluruh dimensi penyusunnya, terutama pada dimensi umur panjang dan hidup sehat yang tercermin dari Umur Harapan Hidup (UHH) yang mencapai 71,02 tahun, serta dimensi pengetahuan melalui Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 14,10 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 10,51 tahun.

Secara tren, IPM Maluku menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan konsisten selama periode 2021 hingga 2025 dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 0,79 persen. Pada tahun 2021, IPM Maluku berada di angka 71,55, kemudian meningkat menjadi 72,04 pada 2022, dan terus naik menjadi 72,75 pada 2023 sebelum menembus angka 74,09 pada tahun 2025. Peningkatan yang paling signifikan terlihat pada dimensi standar hidup layak yang diukur dari pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan, di mana pada tahun 2025 angka ini mencapai Rp9.900,- per tahun, meningkat Rp216,- dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dalam perbandingan skala nasional, meskipun IPM Maluku terus mengalami peningkatan, angka 74,09 tersebut masih berada di bawah angka IPM nasional yang telah mencapai 75,90 pada tahun 2025. Terdapat selisih atau *gap* sebesar 0,89 poin antara pencapaian pembangunan manusia di Maluku dengan rata-rata Indonesia

secara keseluruhan. Dari sisi kecepatan pertumbuhan, IPM Maluku tumbuh sebesar 0,91 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional yang berada di angka 0,85 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Maluku sedang dalam jalur akselerasi untuk mengejar ketertinggalan standar kualitas hidup, pendidikan, dan kesehatan dari rata-rata nasional

Grafik 2.5
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku Tahun 2021 – 2025



Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2026

Peningkatan pencapaian IPM di tahun 2025 tentunya dikontribusikan dari komponen pendukungnya, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Umur harapan hidup saat lahir (UHH) tahun 2025 sebesar1 71,02. Sementara harapan lama sekolah (HLS) di tahun 2025 sebesar 14,10 meningkat sebesar 0,01 dari tahun 2024. Hal yang sama terjadi pada rata-rata lama sekolah (RLS) dari 10,26 tahun 2024, meningkat menjadi 10,51 di tahun 2025 atau lebih lama 0,25 tahun. Sementara untuk rata-rata pengeluaran riel per kapita mengalami peningkatan sebesar 0,216 persen dari tahun 2024, yakni 9.684 juta per tahun menjadi 9.900 per tahun. Keseleruhan dari kemajuan komponen pada IPM tergambar sesuai dengan tabel berikut :

Tabel 2. 18
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku Menurut Dimensi Penyusunnya, 2021–2025

Dimensi/Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
Umur Panjang dan Hidup Sehat						
Umur Harapan Hidup (UHH) saat Lahir	Tahun	69,85	70,16	70,45	70,68	71,02
Pengetahuan						
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,97	14,00	14,08	14,09	14,10
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,03	10,19	10,20	10,26	10,51
Standar Hidup Layak						
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	Ribu Rupiah	8.770	8.876	9.278	9.684	9.900
IPM		**71,55**	**72,04**	**72,75**	**73,40**	**74,09**

Pertumbuhan IPM	**%**	**0,22**	**0,68**	**0,99**	**0,89**	**0,94**

2.3.1.1.2.7.2. IPM Kabupaten/Kota

Secara umum, capaian IPM Maluku menunjukkan tren positif hal ini menandakan peningkatan kualitas hidup masyarakat di berbagai kabupaten/kota. Kenaikan ini tidak hanya menggambarkan keberhasilan program pembangunan sosial dan ekonomi, tetapi juga menunjukkan perbaikan akses terhadap layanan dasar di wilayah kepulauan yang sebelumnya menghadapi tantangan geografis dan infrastruktur.

Kota Ambon tetap menjadi pusat pertumbuhan dengan IPM tertinggi, sementara kabupaten seperti Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, dan Tual menunjukkan peningkatan signifikan yang memperkuat arah pemerataan pembangunan. Namun, kesenjangan antarwilayah masih terlihat, terutama di Maluku Barat Daya dan Kepulauan Tanimbar, yang menuntut kebijakan afirmatif untuk mempercepat peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Tabel. 2.19
Perkembangan IPM Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024
Kepulauan Tanimbar	62,97	63,45	64,16	67,69
Maluku Tenggara	66,33	66,88	67,57	70,58
Maluku Tengah	71,32	71,81	72,45	75,1
Buru	69,33	69,94	70,56	72,55
Kepulauan Aru	63,83	64,21	65,01	69
Seram Bagian Barat	65,83	66,67	67,56	72,54
Seram Bagian Timur	64,3	65,05	65,82	70,28
Maluku Barat Daya	62,37	63,07	63,93	67,68
Buru Selatan	64,8	65,37	66,23	68,54
Ambon	81,23	81,63	82,06	83,37
Tual	68,16	68,6	69,43	72,48
Maluku	69,71	70,22	70,94	73,4

2.3.1.1.2.8. Pengeluaran per Kapita Maluku

Pengeluaran riil per kapita atau angka konsumsi rumah tangga (RT) per kapita Provinsi Maluku selama periode 2021–2025 berfluktuasi. Pengeluaran riil per kapita Provinsi Maluku tahun 2024 sebesar 9.864 ribu rupiah mengalami kenaikan pada tahun 2025 sebesar 9.900 ribu rupiah. Sementara itu, menurut kabupaten/kota, pengeluaran riil per kapita Tahun 2022 terbesar berada di Buru, yaitu sebesar 10.414 ribu rupiah dan terendah berada di Kabupaten Kepualuan Tanimbar, yaitu sebesar 6.473 ribu rupiah yang tergambar dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 20
Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan Provinsi Maluku Tahun 2021 – 2025

Kabupaten/Kota	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu rupiah/orang/tahun)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Kepulauan Tanimbar	6,335	6.473	6.722	7,091	7.342
Maluku Tenggara	7,58	7.795	8.174	8.553	8.738
Maluku Tengah	10,243	10.406	10.788	11.183	11.532
Buru	10,347	10.414	10.879	11.261	11.562
Kepulauan Aru	7,623	7.733	8.133	8.488	8.850
Seram Bagian Barat	8,72	8.890	9.324	9.706	9.854
Seram Bagian Timur	9,48	9.591	10.020	10.049	10.204
Maluku Barat Daya	6,918	7.010	7.223	-	7.776
Buru Selatan	7,600	7.716	8.108	-	8.664
Ambon	14,148	14.405	14.692	15.196	15.549
Tual	7,405	7.519	7.825	-	8.401
Maluku	**8,770**	**8.876**	**9,278**	**9.684**	**9.900**

Sumber : BPS Provinsi Maluku, 2026

Data pengeluaran riil per kapita di Maluku dari tahun 2021 hingga 2025 menunjukkan tren peningkatan yang cukup konsisten di sebagian besar kabupaten/kota, meskipun terdapat variasi antarwilayah. Kepulauan Tanimbar mengalami kenaikan dari 6.335 ribu rupiah pada 2021 menjadi 7.342 ribu rupiah pada 2025, dengan pertumbuhan relatif stabil. Maluku Tenggara juga menunjukkan peningkatan dari 7.580 menjadi 8.738 ribu rupiah, sedangkan Maluku Tengah dan Buru mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi, masing-masing naik dari 10.243 menjadi 11.532 ribu rupiah dan dari 10.347 menjadi 11.562 ribu rupiah. Kepulauan Aru mengalami kenaikan signifikan dari 7.623 ke 8.850 ribu rupiah, sementara Seram Bagian Timur tumbuh moderat dari 9.480 ke 10.204 ribu rupiah.

Di sisi lain, Seram Bagian Barat relatif stagnan, hanya naik tipis dari 8.720 ke 8.854 ribu rupiah, bahkan sempat menurun pada 2024. Maluku Barat Daya dan Buru Selatan menunjukkan pertumbuhan stabil, masing-masing dari 6.918 ke 7.676 ribu rupiah dan dari 7.600 ke 8.664 ribu rupiah. Kota Ambon menempati posisi tertinggi dengan pengeluaran per kapita yang terus meningkat dari 14.148 ke 15.549 ribu rupiah, menjadikannya pusat dengan standar hidup paling tinggi di Maluku. Kota Tual juga mengalami kenaikan dari 7.405 ke 8.401 ribu rupiah.

Secara keseluruhan, rata-rata Maluku meningkat dari 8.770 ribu rupiah pada 2021 menjadi 9.900 ribu rupiah pada 2025, dengan total kenaikan sebesar 1.130 ribu rupiah per kapita. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan standar hidup di tingkat provinsi, meskipun terdapat ketimpangan antarwilayah. Ambon, Maluku Tengah, dan Buru menjadi motor pertumbuhan, sementara Seram Bagian Barat perlu perhatian

khusus karena pertumbuhannya sangat lambat. Analisis ini menunjukkan bahwa pembangunan di Maluku bergerak ke arah positif, tetapi pemerataan antarwilayah masih menjadi tantangan utama.

2.3.1.1.2.9. Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani merupakan indikator yang memberikan gambaran bagaimana kehidupan petani ditopang oleh usaha sektor pertaniannya. Nilai Tukar Petani memperlihatkan dua sisi kehidupan petani yaitu sisi pendapatan yang menopang seluruh pembiayaan hidup rumah tangga petani dari hasil penjualan produk pertaniannya dan sisi pengeluaran untuk kelangsungan rumah tangga petani.

Nilai Tukar Petani (NTP) > 100 menunjukkan petani mengalami surplus, di mana harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya, dan pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya. Sebaliknya, jika NTP < 100, menunjukkan petani mengalami defisit, di mana kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibanding kenaikan harga barang konsumsinya, pendapatan petani turun dan lebih kecil dari pengeluarannya. NTP = 100 menunjukan petani mengalami impas, dimana kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan kenaikan/penurunan harga barang konsumsi, pendapatan petani sama besar dengan pengeluarannya

Tabel 2. 21
Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan Provinsi Maluku Tahun 2021 – 2025

INDIKATOR	2021	2022	2023	2024	2025
Nilai Tukar Petani (Ntp)	97,53	103,88	105,86	102,34	101,95
Nilai Tukar Nelayan	102,35	116,5	113,37	101,76	103,86

Sumber : BPS, 2026

Untuk NTP, nilai turun dari 102.34 di tahun 2024 menjadi 101.95 di tahun 2025. Artinya, terjadi penurunan kecil sebesar 0.39 poin, menunjukkan kondisi petani masih menghadapi tekanan. Untuk Nilai Tukar Nelayan, nilai naik dari 101.76 di tahun 2024 menjadi 103.86 di tahun 2025. Artinya, ada peningkatan sebesar 2.10 poin, menunjukkan adanya perbaikan daya tukar nelayan setelah penurunan tajam sebelumnya.

Secara tren, petani mengalami peningkatan di awal periode namun menurun di akhir, sedangkan nelayan mengalami lonjakan besar di awal, penurunan tajam di tengah, dan sedikit pemulihan di akhir. Perbandingan tahun 2024 dengan 2025 menunjukkan bahwa kondisi petani masih melemah, sementara nelayan mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan.

2.4. Aspek Daya Saing

2.4.1. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) disusun sebagai instrumen reflektif untuk

mengukur kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki. Melalui pemetaan yang komprehensif, indeks ini tidak hanya berfungsi sebagai potret kinerja pembangunan, tetapi juga sebagai kompas strategis dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Berikut adalah rincian indikator yang menjadi fondasi pengukuran daya saing.

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen strategis untuk mengukur dan mengevaluasi kemampuan suatu daerah dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan daya saing jangka panjang.

Bagi Provinsi Maluku, IDSD menjadi barometer penting dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan yang berbasis pada potensi unggulan daerah, penguatan tata kelola, dan optimalisasi sumber daya manusia. Indeks ini mencerminkan kapasitas dan kesiapan Maluku untuk bersaing di era ekonomi terbuka, sekaligus menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah.

Peningkatan nilai IDSD tidak hanya menandakan capaian positif pembangunan, tetapi juga menjadi pendorong semangat untuk terus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Sinergi ini diharapkan mampu mewujudkan Maluku yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan, serta memiliki posisi kompetitif yang kuat di tingkat nasional maupun global.

Tabel 2.22

Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2024-2025

Indeks Daya Saing Daerah	Pilar 1 Institusi	Pilar 2 Infrastruktur	Pilar 3 Adopsi TIK
2024	4,03	2,73	3,10
2025	4,07	3,13	3,17

Sumber : https://brin.go.id/drid/page/indeks-daya-saing-daerah, 2026

Data Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang disajikan, terlihat adanya tren positif pada seluruh pilar utama dalam periode 2024 hingga 2025. Pilar 1 (Institusi) menunjukkan stabilitas dengan peningkatan tipis sebesar 0,04 poin, naik dari angka 4,03 menjadi 4,07. Sementara itu, lonjakan yang paling signifikan terjadi pada Pilar 2 (Infrastruktur), yang berhasil tumbuh sebesar 0,40 poin dari angka 2,73 di tahun 2024 menjadi 3,13 pada tahun 2025. Sejalan dengan perkembangan tersebut, Pilar 3 (Adopsi TIK) juga mengalami penguatan dari posisi 3,10 menjadi 3,17, yang menandakan adanya peningkatan penetrasi dan penggunaan teknologi informasi di daerah. Secara keseluruhan, perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun aspek institusi tetap menjadi pondasi yang kuat, fokus pembangunan pada sektor infrastruktur fisik dan digital menjadi pendorong utama kenaikan daya saing daerah di tahun 2025.

2.4.2. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) merupakan instrumen pengukuran yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk menilai tingkat inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Indeks ini bertujuan untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang kreatif, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Tabel 2. 23
Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020 – 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Inovasi Daerah	25 (Kurang Inovatif)	32,66 (Inovatif)	41,26 (Inovatif)	47,34 (Inovatif)	46,71 (Inovatif)

Sumber : Kementarian Dalam Negeri, 2025

Berdasarkan data Indeks Inovasi Daerah (IID) tahun 2020–2024, terlihat adanya peningkatan yang cukup signifikan pada kinerja inovasi pemerintah daerah. Pada tahun 2020, nilai IID tercatat sebesar 25,00 dengan kategori Kurang Inovatif. Namun sejak tahun 2021, terjadi lonjakan yang menunjukkan peningkatan kapasitas inovasi daerah secara konsisten. Nilai IID meningkat menjadi 32,66 pada tahun 2021, kemudian terus naik menjadi 41,26 pada tahun 2022, dan mencapai puncaknya di tahun 2023 dengan nilai 47,34, semuanya berada dalam kategori Inovatif.

Meski demikian, pada tahun 2024 nilai IID sedikit menurun menjadi 46,71, meskipun masih bertahan dalam kategori yang sama, yaitu Inovatif. Penurunan tipis ini menunjukkan adanya perlambatan laju peningkatan inovasi yang perlu diantisipasi dengan langkah penguatan kelembagaan dan keberlanjutan program inovatif.

2.4.3. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan cermin dari kualitas, produktivitas, dan kemampuan inovasi penduduk suatu daerah dalam menghadapi persaingan global maupun regional. Dalam konteks pembangunan ekonomi, SDM bukan lagi sekadar faktor produksi, melainkan aset strategis yang menentukan keberhasilan transformasi ekonomi.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyediakan berbagai kerangka data untuk memotret sejauh mana manusia Indonesia baik di tingkat nasional maupun Provinsi Maluku siap bersaing di pasar kerja.

Tabel 2. 24
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Maluku 2022 - 2025

Uraian	2022	2023	2024	2025
Tingkat Partisipasi Angkat Kerja Provinsi Maluku	65,46	63,60	66,52	66,66

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Maluku selama periode 2022 hingga 2025 menunjukkan dinamika yang fluktuatif namun progresif, di mana sempat terjadi penurunan dari 65,46% pada tahun 2022 menjadi 63,60% pada tahun 2023. Namun, kondisi ini berhasil berbalik arah dengan pemulihan yang signifikan pada tahun 2024 (66,52%) dan terus meningkat hingga mencapai angka tertinggi sebesar 66,66% pada tahun 2025. Hal ini menyimpulkan bahwa meskipun partisipasi kerja sempat terkontraksi, terdapat tren penguatan keterlibatan penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi di Maluku yang terus tumbuh stabil dalam dua tahun terakhir.

2.5. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi Maluku dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, terdapat 6 urusan wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.

Selain itu, terdapat 18 urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, namun tetap penting dalam mendukung pembangunan daerah, mulai dari perhubungan, lingkungan hidup, hingga pemberdayaan masyarakat. Di samping itu, Maluku juga memiliki 8 urusan pilihan yang disesuaikan dengan potensi lokal,

2.5.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Dasar

2.5.1.1. Urusan Wajib Pelayana Dasar Pendidikan

Tabel 2. 25
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	2025	
			Target	Realisasi
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
1	Meningkatnya Partisipasi menengah dan khusus	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	100%	72,05

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2025	
			Target	Realisasi
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
A	**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**			
1	Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi	%	19.87-22.37	-
2	Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Numerasi	%	15.55-18.05	-
3	Harapan Lama Sekolah	%	14.21-14.22	14,1
4	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk diatas 15 Tahun	%	10.57-10.59	10,51
5	Skor Literasi/Numerasi	Skor	53:36:00	-
5	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	%	60,71	57,27
7	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	14,94	-
8	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	%	73,81	-
B	**Aspek Pelayanan Umum**			
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	%	100	77,28
2	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidikan	%	45	75,43
3	Persentase anak usia 4-18 Tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	%	65,9	82,07
4	Persentase anak usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)	%	78,34	77,28
C	**Indikator Kinerja Kunci**			
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar				
a	**Pendidikan**			
1	Indeks Pendidikan	Indeks	0,473	0,525
2	Nilai Sakip	Nilai	74	61,65
3	Dimensi Warisan Budaya	Nilai	-	-
4	Skor Kemampuan Literasi SLB	%	55,1	-
5	Skor Kemampuan Literasi SMA	%	61,34	-
6	Persentase pemerataan guru	%	100	-
7	Skor Kemampuan Numerasi SMA	%	54,25	-
8	Skor Kemampuan Numerasi SLB	%	46,34	-
9	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra Daerah	%	-	-
10	Skor Kemampuan Numerasi SMK	%	53,28	-
11	Persentase layanan dan tidak lanjut pemberian perizinan Pendidikan	%	-	-
12	Skor Kemampuan Literasi SMK	%	59,84	-
13	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan local	%	-	-
14	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2025	
			Target	Realisasi
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
b				
1	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	%	100	70
2	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	%	100	54,05
3	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	%	100	55,6
4	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	%	45	80
5	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	%	100	70,71
6	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	%	100	97

Berdasarkan data realisasi yang tercatat dalam tabel indikator kinerja urusan pendidikan, terlihat adanya variasi capaian antara target dan hasil aktual. Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada jenjang menengah dan khusus masih jauh di bawah target 100%, dengan realisasi hanya mencapai 72,05% dan 77,28%. Namun, terdapat capaian positif pada partisipasi anak penyandang disabilitas usia 4–18 tahun yang justru melampaui target, yakni 82,07% dibanding target 65,9%. Dari sisi kualitas tenaga pendidik, persentase guru bersertifikat menunjukkan pencapaian yang sangat baik, yaitu 75,43% melampaui target 45%.

Indikator kesejahteraan masyarakat menunjukkan bahwa harapan lama sekolah terealisasi pada angka 14,1 tahun, sedikit di bawah target 14,21–14,22, sementara rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas mencapai 10,51 tahun, juga sedikit di bawah target 10,57–10,59. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) tercatat 57,27, masih di bawah target 60,71. Sementara itu, Indeks Pendidikan justru melampaui target dengan capaian 0,525 dibanding target 0,473. Sebaliknya, nilai SAKIP turun signifikan dari target 74 menjadi 61,65.

Pada aspek kebudayaan, beberapa indikator menunjukkan capaian yang belum optimal. Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan hanya 70% dari target 100%, warisan budaya yang dilestarikan 54,05%, dan cagar budaya yang ditetapkan 55,6%. Namun, tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan dan tinjauan sejarah lokal menunjukkan hasil yang sangat tinggi, masing-masing 80% dan 97%, jauh melampaui target. Persentase kunjungan wisatawan ke museum juga cukup baik dengan capaian 70,71%.

Secara keseluruhan, data ini menggambarkan bahwa meskipun ada beberapa indikator yang berhasil melampaui target, terutama pada partisipasi pendidikan khusus, sertifikasi guru, dan indeks pendidikan, masih terdapat tantangan besar dalam

meningkatkan APS, memperbaiki kualitas kebudayaan, serta menjaga konsistensi capaian tata kelola pendidikan melalui SAKIP.

2.5.1.2. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan

Berdasarkan data indikator kinerja kesehatan tahun 2023 hingga 2025, secara umum terlihat capaian yang progresif pada sektor pemberdayaan masyarakat dan intervensi gizi spesifik. Keberhasilan paling mencolok terletak pada penurunan prevalensi stunting yang mampu ditekan hingga ke angka 5,30%, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 24,7%. Hal ini sejalan dengan efektivitas program pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan yang realisasinya mencapai 90,72%, serta peningkatan kompetensi SDM kesehatan yang sudah berada di atas target. Selain itu, stabilitas sistem kesehatan juga terlihat dari tercapainya target kepesertaan JKN sebesar 98,60% dan terjaganya performa penanganan krisis kesehatan serta eliminasi malaria yang tetap konsisten di angka 100%.

Namun demikian, sektor pencegahan penyakit menular dan cakupan imunisasi masih memerlukan perhatian intensif untuk mencapai target yang direncanakan. Meskipun terdapat tren peningkatan, cakupan imunisasi bayi lengkap baru mencapai 66,35%, yang mana angka ini masih berada di bawah target 80%. Tantangan serupa terlihat pada penemuan dan keberhasilan pengobatan kasus TBC yang masih berkisar di angka 62,3% dan 85% dari target 90%. Selain itu, meskipun angka kematian bayi dan balita terkendali jauh di bawah ambang batas maksimal, kenaikan jumlah absolut kasus kematian ibu menuntut evaluasi lebih lanjut terhadap sistem rujukan dan pengawasan kehamilan guna memastikan tren penurunan yang berkelanjutan di masa mendatang.

Tabel 2. 26
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan 2023-2025

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	2023	2024	2025	
			Realisasi		Target	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Usia Harapan Hidup	%			71.16	
2	Angka Kematian Ibu/100.000 KH	per 100.000 KH	77 Kasus Kematian	75 Kasus Kematian	187	164/100.000 KH (59 kasus kematian)
3	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	7,2%	7%	24.7	5.30%
4	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus TBC	%	70%	59%	90	62.3
5	Angka keberhasilan pengobatan TBC	%	59,7%	51%	90	85
6	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan Nasional	%	93,36%	94,48%	98.6	98,60%
7	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi KLB	%	100%	100%	100%	100

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	2023	2024	2025	
			Realisasi		Target	Realisasi
8	Persentase Penanganan Krisis Kesehatan	%	100%	100%	100%	100
9	Cakupan penerimaan PKG (pemeriksaan Kesehatan gratis)	%	-	-	20	17.9
10	Bed Occupation Rate (BOR)	%	-	34	38	38.44
11	Average Length of Stay (ALOS)	hari	-	4 Hari	4 Hari	5 - 6 hari
12	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 KH	6	6	12.62	6 (212 kasus kematian bayi)
13	Angka kematian balita	Per 1.000 KH	7	6	29.4	6,4 (227 kasus kematian balita)
14	Jumlah Kab/kota eliminasi malaria	Kab/Kota	2	4	4	4
15	Insidensi HIV/Aids Per 1.000 penduduk	per 1.000 pendudk	0,28 per 1.000 pddk	0,28 per 1.000 pddk	0.9	0,28 per 1.000 pddk
16	Cakupan penerimaan imunisasi bayi lengkap	%	54,2	66,1	80	66.35
17	Presentase hipertensi dalam pengendalian	%	0,4	0,87	10	3.45
18	Presentasi peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan	%	-	-	45	52.83
19	Presentasi cakupan sediaan farmasi,alkes dan makan minum	%		78,72	81	81
20	Presentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	%	-	-	55	90.72
21	Presentasi fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi paripurna	%		42,5	30	42.5
22	NIlai SAKIP	B	-	-	63.5	
23	Persentase layanan urusan penunjang pemerintah daerah	%	98	93,5	100	94,28

2.5.1.3. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum

Tabel 2. 27
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*
A	**Aspek Geografi dan Demografi**				
1	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Bidang Tanah			1155
2	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	(%)			23,77
3	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%			1.43
B	**Aspek Daya Saing**				

1	Indeks Infrastruktur Dasar	Angka			35,53
Indikator Kinerja Kunci					
C	**Aspek Pelayanan Umum**				
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar					
1	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah provinsi	%			-
2	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	%	12	11	13
3	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	%		4,32	4,32
4	Tingkat Kemantapan Jalan	%	50,18	53,22	61.84
5	Nilai Sakip	Nilai	A (77,10)	Belum dinilai	-
6	Persentase peningkatan perlindungan kawasan dari abrasi dan banjir rob	%		38,21	38,31
7	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	%	43,30	44,31	27,52
8	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	%		100	100
9	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	%		91,5	100
10	Persentase penataan bangunan dan lingkungan	%		98,5	100
11	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Aman	%	-	-	1.43
12	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%			100
13	Persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/TPST regional	%	-	-	-
14	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak	%	-	-	-
15	Persentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi baik	%	-	-	-
16	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kab/kota	%	-	-	-

Pada sektor tata guna lahan dan kebutuhan dasar, terdapat target besar pada tahun 2025 untuk menyediakan 1.155 bidang tanah objek landreform yang siap diredistribusikan. Dari sisi akses utilitas, pemerintah menargetkan akses rumah tangga perkotaan terhadap air minum perpipaan mencapai 23,77% dan akses sanitasi aman sebesar 1,43% di tahun 2025. Sementara itu, daya saing daerah yang diukur melalui Indeks Infrastruktur Dasar diproyeksikan berada pada angka 35,53.

Sektor infrastruktur fisik menunjukkan tren yang bervariasi namun cenderung ambisius, Kondisi Jalan dan Bangunan: Tingkat kemantapan jalan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dari 50,18% (2023) menjadi 61,84% (2025). Target yang sangat signifikan terlihat pada persentase cakupan drainase dan penataan bangunan lingkungan yang diharapkan mencapai 100% sempurna pada tahun 2025.

Perlindungan Kawasan. Terdapat upaya peningkatan perlindungan kawasan pemukiman dari banjir serta perlindungan pantai dari abrasi dan banjir rob, dengan target capaian yang stabil di kisaran 4,32% dan 38,31% secara berturut-turut untuk tahun 2025.

Irigasi dan SDM : Sebaliknya, persentase luas layanan irigasi multikomoditas diprediksi mengalami penurunan signifikan dari 44,31% di tahun 2024 menjadi hanya 27,52% di tahun 2025. Dari sisi sumber daya manusia, kualifikasi tenaga kerja konstruksi ahli ditargetkan tetap kompetitif di angka 13%.

2.5.1.4. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tabel 2. 28
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*7*	*6*
1	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	%	63,73%	25.25	25.25
2	Nilai Sakip	Nilai	BB	Belum rirlis Inspektorat	A(80,1)
3	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	100	100	100
4	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	0	0
5	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni	%	0	100	100
6	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100

Terjadi penurunan realisasi yang cukup signifikan dari 63,73% di tahun 2023 menjadi 25,25% yang konsisten pada tahun 2024 dan 2025; hal ini mengindikasikan adanya penyesuaian ruang lingkup penanganan pada luas kawasan 10-15 Ha sesuai kewenangan yang ada. Di sisi lain, tata kelola pemerintahan menunjukkan tren positif melalui Nilai SAKIP yang meningkat dari predikat BB di tahun 2023 menuju target predikat A dengan skor 80,1 pada tahun 2025, mencerminkan komitmen kuat pada efisiensi dan akuntabilitas birokrasi.

Untuk indikator pemenuhan infrastruktur. berhasil mempertahankan performa sempurna pada angka 100% secara berturut-turut dari tahun 2023 hingga 2025 dalam penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum (PSU) di pemukiman. Sementara itu, pada aspek bantuan perumahan terdapat pergeseran kebijakan yang sangat tajam, di mana penyediaan rumah layak huni bagi warga korban bencana yang mencapai 100% di tahun 2023 tidak lagi menjadi prioritas utama pada tahun

2024 dan 2025 dengan angka 0%, seiring dengan dialihkannya fokus sumber daya pada program pembangunan lainnya.

2.5.1.5. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Terdapat kesenjangan (gap) yang signifikan antara output administratif dengan outcome di lapangan. Secara administratif, penyelenggaraan Trantibumlinmas dan Penegakan Perda berjalan sempurna (100%), namun hal ini belum mampu menggerakkan Indeks Penyelenggaraan dan Rasa Aman Masyarakat dari angka 0.

Prioritas daerah pada tahun 2025 terlihat bergeser secara spesifik pada Cakupan Edukasi Rawan Kebakaran, sementara indikator penegakan hukum dan penyelenggaraan ketertiban umum lainnya perlu dievaluasi kembali karena penurunan angka ke 0% pada tahun tersebut, sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.29
Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 2023-2025

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*
A	**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**				
1	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Indeks	0	0	0
2	Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas	%	100%	100%	0
B	**Aspek Pelayanan Umum**				
1	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	(%)	0	0	0
2	Presentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	%	100%	100%	0
C	**Indikator Kinerja Kunci**				
	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar				
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				
1	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	%	0	0	100

Indeks Risiko Bencana terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dimulai dari angka 160,03 pada tahun 2023, naik tipis menjadi 161,5 pada tahun 2024, dan melonjak tajam menjadi 203,94 pada tahun 2025. Kenaikan drastis di tahun 2025 ini mengindikasikan adanya peningkatan ancaman atau kerentanan wilayah yang memerlukan perhatian sangat serius dalam hal mitigasi.

Di sisi lain, Indeks Ketahanan Daerah menunjukkan tren yang fluktuatif dan cenderung rendah. Angka ini sempat turun dari 0,34 (2023) menjadi 0,27 (2024), sebelum akhirnya sedikit membaik menjadi 0,33 pada tahun 2025. Namun, skor 0,33 tetap berada di bawah level capaian tahun 2023, yang berarti kapasitas daerah dalam

menghadapi bencana belum mengalami kemajuan berarti dalam tiga tahun terakhir.

Tabel 2.30
Capaian Indikator Kinerja Urusan Bencana 2023-2025

NO	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
A	**Aspek Geografi dan Demografi**				
1	Indeks Risiko Bencana	Indeks	160,03	161,5	203,94
2	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,34	0,27	0,33

2.5.1.6. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial

Tabel 2. 31
Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial 2023-2025

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*
1	Indeks Kesejahteraan Sosial	Angka			
A	**Indikator Kinerja Kunci**				
1	Nilai SAKIP	Nilai	C	C	Masih Menunggu Rilis
2	Persentase Masyarakat miskin yang menerima bantuan sosial	%	100	100	100
3	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasar di dalam panti	%	100	100	100
4	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani	%	100	100	99
5	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100	100	100
6	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial.	%	100	100	0
7	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	%	100	100	100
8	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan	%	72	80	49
9	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya	%	100	100	0
10	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	%	100	100	0

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2023	2024	2025
11	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	%	100	100	100
12	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	%	100	100	100
13	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100	100	100
14	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat sesuai Standar	%	100	100	100
15	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial, dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	%	100	100	100
16	Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100	100	100
17	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Taraf Kesejahteraannya	%	100	100	100
18	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100	100	100
19	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	%	100	100	100
20	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100	100
21	Persentase Pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial	%			100
22	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100

Secara keseluruhan, data indikator kinerja sosial tersebut menunjukkan prioritas yang kuat pada aspek pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial langsung, di mana layanan untuk masyarakat miskin, penyandang disabilitas, dan korban bencana konsisten dipertahankan pada angka 100% selama tiga tahun berturut-turut. Namun, terdapat anomali signifikan pada proyeksi tahun 2025,

khususnya pada indikator pengembangan kapasitas seperti peningkatan kualitas lembaga, kesiapsiagaan bencana masyarakat, dan peningkatan kompetensi SDM yang merosot hingga ke angka 0%. Fenomena ini, ditambah dengan penurunan target penanganan migran serta nilai akuntabilitas (SAKIP) yang masih stagnan di predikat C, mengindikasikan bahwa meskipun pelayanan operasional harian berjalan sangat stabil, terdapat tantangan besar dalam aspek manajerial, pengembangan SDM, dan keberlanjutan program peningkatan kualitas jangka panjang yang memerlukan evaluasi kebijakan lebih mendalam.

Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan (Dalam dan Luar Negeri) yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan Indikator ini menunjukkan tren yang sangat fluktuatif dan menjadi titik perhatian utama dalam laporan kinerja ini. Meskipun sempat mengalami kenaikan sebesar 8% dari tahun 2023 (72%) ke tahun 2024 (80%), terdapat proyeksi penurunan yang sangat tajam pada tahun 2025 menjadi hanya 49%. Penurunan target atau capaian di bawah angka 50% ini mengindikasikan adanya kendala serius, baik dari sisi alokasi anggaran pemulangan, kompleksitas birokrasi lintas negara, maupun peningkatan jumlah kasus yang tidak sebanding dengan kapasitas jangkauan layanan.

2.5.2. Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.5.2.1. Urusan Pangan

Tabel 2. 32
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan 2023-2025

No	Indikator Kinerja Daerah		Satuan	2023	2024	2025
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*7*
A	**Aspek Geografi dan Demografi**					
1.	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah		Ton	10	12.468	54,218
2.	Skor Pola Pangan Harapan		Nilai	75,09	90	89,3
	-	Konsumsi				
3.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU)		**%**	**30,27**	**31,66**	30,51
B	**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**					
1.	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)		Nilai	64,37	57,36	57,18
C	**Indikator Kinerja Kunci**					
Pangan						
1	Nilai SAKIP		Nilai			Belum dirilis
2	Presentase Pengawasan Pangan Segar yang aman dan bermutu		%	89,32	77	104,3
3	Jumlah Cadangan Pangan		Ton	10	12.468	54,218
4	Presentase Daerah Rentan Rawan Pangan		%	17,80	22,03	46,61

Upaya penguatan stok pangan yang sangat masif, di mana Cadangan Pangan Pemerintah Daerah melonjak drastis dari hanya 10 Ton pada tahun 2023 menjadi 12.468 Ton di tahun 2024, dan diproyeksikan mencapai 54.218 Ton pada tahun 2025. Namun,

penguatan stok ini belum berbanding lurus dengan kualitas konsumsi masyarakat; Skor Pola Pangan Harapan yang sempat menyentuh angka 90 pada 2024 diprediksi sedikit menurun ke 89,3 pada 2025. Selain itu, angka prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU) masih tergolong tinggi karena tetap bertahan di kisaran 30%, dengan titik tertinggi sebesar 31,66% pada tahun 2024 sebelum ditargetkan turun tipis ke 30,51% pada tahun 2025.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) secara konsisten dalam tiga tahun terakhir. Indeks ini tercatat sebesar 64,37 pada tahun 2023, kemudian turun cukup signifikan ke angka 57,36 pada tahun 2024, dan diprediksi akan terus melandai ke angka 57,18 pada tahun 2025. Penurunan indeks ini memberikan sinyal bahwa stabilitas dan akses pangan di wilayah tersebut sedang menghadapi tantangan yang perlu mendapat perhatian khusus.

Indikator Kinerja Kunci, fokus pengawasan pangan segar yang aman dan bermutu ditargetkan meningkat tajam ke angka 104,3% pada tahun 2025 setelah sempat merosot ke level 77% di tahun sebelumnya. Meski pengawasan diperketat, tantangan kewilayahan terlihat semakin berat dengan meningkatnya persentase daerah rentan rawan pangan secara signifikan. Dari angka 17,80% pada tahun 2023, kerentanan wilayah meningkat menjadi 22,03% di tahun 2024, dan melonjak drastis hingga mencapai 46,61% pada tahun 2025, yang berarti hampir separuh wilayah masuk dalam kategori rentan pangan.

2.5.2.2. Urusan Lingkungan Hidup

Tabel 2.33
Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup 2023-2025

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*
A	***Aspek Geografi dan Demograi***				
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	78,75 Poin	78,71 Poin	78.83
2	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	-	-	-
3	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	(%)	-	-	67.99
4	Persentase Penurunan Emisi GRK a) Kumulatif	%	-	-	-
	Persentase Penurunan Emisi GRK b) Tahunan	%	28,89%	67,78%	-
5	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (IPKH)	Poin	-	-	-
B	***Indikator Kinerja Kunci***				
1	Persentase sampah dan jumlah limbah B3	%	-	-	73.94

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2023	2024	2025
	terkelola				
2	Jumlah Entitas Pengakuan dan Peningkatan Kapasitas MHA	Kelompok	3	4	-
3	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan	%	128,57	128,57	85.71
4	Nilai SAKIP		B (66,40 Poin)	B (63,10 Poin)	N/A
5	Persentase Penurunan Emisi GRK a) Kumulatif	%	-	-	0
	Persentase Penurunan Emisi GRK b) Tahunan	%	28,89%	67,78%	0
6	Jumlah Masyarakat/ Kelompok/ Pelaku Usaha	Kg/Orang	135	120	90 Orang
7	Jumlah Penerima Penghargaan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penghargaan	-	-	-
8	Persentase Penyelesaian Sengketa / Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	%	-	-	-
9	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah % 100 100	%	100	100	100
10	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Dokumen	-	-	
11	Indeks Kualitas Air	Poin	55,87 Poin	56,55 Poin	69.74
12	Indeks Kualitas Udara	Poin	92,47 Poin	92,42 Poin	84.22
13	Indeks Kualitas Air Laut	Poin	81,88 Poin	78,08 Poin	72.15
14	Persentase Limbah B3 yang terkelola	%			79.88
15	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	%	88,89	88,89	85.71
16	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Poin	-	-	-

Sektor lingkungan hidup mencatatkan performa yang cenderung stabil namun dengan beberapa catatan krusial pada kualitas sumber daya alam. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup secara umum mengalami peningkatan tipis ke angka 78,83 poin, yang didorong oleh perbaikan signifikan pada Indeks Kualitas Air (naik dari 55,87 ke 69,74 poin) dan keberhasilan pengurangan emisi GRK tahunan yang sempat

menyentuh angka 67,78%. Di sisi lain, terjadi penurunan kualitas pada Indeks Udara dan Air Laut, yang diikuti dengan tren menurunnya tingkat ketaatan pelaku usaha serta pengawasan izin lingkungan ke angka 85,71% pada tahun 2025.

2.5.2.3. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 2. 34
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2023-2025

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*
A	**Aspek Pelayanan Umum**				
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks	-	-	73.5 (sangat baik)
2	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	61,37	62,3	64.0 : 67.1
B	**Indikator Kinerja Kunci**				
	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar				
	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil				
1	Persentase Akte Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	88,1	89,60	100
2	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	100
3	Persentase Akte Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	100
4	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	%	100	100	100
5	Persentase Akte Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	100
6	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	%	0	0	0
7	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	2,24		5,35
8	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	90,8
9	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	21,31	-	23,56
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					

1	Kebijakan fasilitasi dan koordinasi layanan kependudukan dan pencatatan sipil	%	100	100	100
2	Nilai Sakip	Nilai	B(61.06)	B(62.01)	N/A
3	Kebijakan fasilitasi dan koordinasi layanan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga	%	100	100	100
4	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat atau cara KB	%	-	-	63,9
5	Indeks Lansia Berdaya	Indeks	57,9	62,2	68,5
6	Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja	Indeks	87,9	83,1	78,8
7	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Angka	2,45	2,42	2,42
8	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	%	-	-	29,31
9	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Angka	25,01	22,5	17,5
10	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per Wanita Usia Subur (WUS) Usia 15-49 Tahun	Angka	2,52	2,44	2,42
11	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	Angka	51,10	37,4	47,41
12	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	%	80	86,73	87,00
13	Persentase Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk	%	80	86,73	87
14	Persentase Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran pada Anak Usia 0-17 Tahun	%	88,1	89,60	91,62
15	Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi dalam 1 Tahun		100	100	100

Berdasarkan data indikator kinerja daerah yang disajikan, pemerintah daerah menunjukkan komitmen yang sangat kuat dalam menjaga standar pelayanan administrasi kependudukan. Hal ini dibuktikan dengan konsistensi capaian 100% pada penerbitan Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Perkawinan, serta pengelolaan profil kependudukan sejak tahun 2023 hingga proyeksi 2025. Meskipun layanan dasar sudah maksimal, terdapat upaya modernisasi melalui peningkatan Identitas Kependudukan Digital yang ditargetkan naik dari 2,24% menjadi 5,35%, serta peningkatan kepemilikan Kartu Identitas Anak yang diproyeksikan mencapai 23,56%.

Di sisi lain, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan ini diharapkan mencapai angka 73,5 dengan predikat "Sangat Baik" pada tahun 2025.

Dalam sektor pengendalian penduduk dan kesejahteraan keluarga, data menunjukkan dinamika yang beragam namun progresif. Indeks Lansia Berdaya diproyeksikan mengalami peningkatan yang cukup tajam dari 57,9 menjadi 68,5, yang mengindikasikan keberhasilan program kemandirian lansia. Upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk juga terlihat efektif dengan penurunan angka kelahiran remaja (ASFR 15-19) yang cukup drastis, yakni dari 25,01 di tahun 2023 menjadi target 17,5 di tahun 2025, sementara angka kesuburan total (TFR) relatif stabil di angka 2,42. Namun, terdapat catatan kritis pada Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja yang justru diprediksi menurun dari 87,9 ke 78,8, mengisyaratkan adanya tantangan baru dalam pola asuh keluarga di masa mendatang.

Pemerintah daerah tidak hanya mengejar kuantitas kepemilikan dokumen dasar (KTP dan Akta Kelahiran), tetapi juga kualitas pelayanan. Meskipun cakupan identitas fisik seperti KTP (87%) dan Akta Kelahiran (91,62%) sudah cukup tinggi, tantangan berikutnya adalah mendorong penduduk untuk beralih ke format digital dan memastikan informasi kependudukan tersebut benar-benar termanfaatkan untuk akses layanan publik lainnya. Kesuksesan dalam menekan angka kelahiran remaja (ASFR) dan meningkatkan kemandirian lansia, ditambah dengan kuatnya fondasi administrasi kependudukan ini, memposisikan daerah tersebut pada tingkat tata kelola kependudukan yang sangat kompetitif.

2.5.2.4. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dan desa di Maluku merupakan fondasi penting dalam upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan karakter kepulauan yang unik, masyarakat Maluku menghadapi tantangan geografis sekaligus memiliki kekayaan sosial-budaya yang menjadi modal besar untuk pembangunan. Desa-desa di Maluku bukan hanya pusat kehidupan sosial, tetapi juga ruang strategis bagi penguatan ekonomi lokal, pelestarian budaya, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Melalui pemberdayaan, masyarakat desa didorong untuk lebih mandiri, kreatif, dan mampu mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada peningkatan kapasitas individu dan kelompok, tetapi juga memperkuat kelembagaan desa agar mampu menjadi motor penggerak pembangunan. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat dan desa di Maluku diharapkan dapat menciptakan sinergi antara pemerintah, komunitas lokal, dan sektor swasta dalam membangun kesejahteraan bersama.

Tabel 2.35
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2023 – 2025

No	Indikator	Satuan	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase Desa Mandiri	Persen	6,83	8,83	9,42

2.5.2.5. Urusan Perhubungan

Perhubungan di Maluku memiliki peran strategis dalam mendukung keterhubungan antarwilayah kepulauan, memperkuat integrasi ekonomi, serta memastikan akses masyarakat terhadap layanan dasar dan peluang pembangunan. Sebagai provinsi dengan karakter geografis yang tersebar, transportasi laut, udara, dan darat menjadi tulang punggung mobilitas orang dan barang. Keterhubungan ini bukan hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga menyangkut kualitas pelayanan, keterjangkauan, dan keberlanjutan sistem transportasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Peningkatan urusan perhubungan di Maluku diarahkan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah, memperkuat konektivitas desa dan kota, serta mendukung distribusi logistik yang efisien. Dengan penguatan jaringan transportasi, Maluku dapat membuka isolasi wilayah, mempercepat arus perdagangan, dan mendukung pengembangan sektor unggulan seperti perikanan, pariwisata, dan pertanian. Pada akhirnya, perhubungan yang terintegrasi dan inklusif akan menjadi katalisator bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

Tabel 2. 36
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan 2023-2035

No	Indikator	Satuan	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*
A	**Aspek Pelayanan Umum**				
1.	Rasio Konektivitas Provinsi	Rasio	0,765	0,761	0.704
2.	Nilai SAKIP	Nilai	B	62,5 (B)	Belum dirilis
B	**Indikator Kinerja Kunci**				
1	Rasio Konektivitas Provinsi	Rasio	0,765	0,761	0.704
2	Nilai Sakip	Nilai	B	62,5 (B)	Belum dirilis
3	Konektivitas Darat	Rasio	0,715	0,758	0.701
4	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Provinsi	%	25.14	25.14	25.14
5	Konektivitas Laut	Rasio	0,787	0,761	0.705
6	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100

Secara umum, terlihat adanya dinamika pada indikator konektivitas. Rasio Konektivitas Provinsi mengalami tren penurunan bertahap dari 0,765 pada tahun 2023 menjadi 0,704 pada tahun 2025. Hal yang sama juga terlihat pada indikator Konektivitas Laut dan Konektivitas Darat yang mencatatkan angka terendahnya di

tahun 2025 masing-masing pada angka 0,705 dan 0,701, meskipun konektivitas darat sempat mengalami kenaikan di tahun 2024.

Beberapa indikator menunjukkan konsistensi yang sangat stabil. Persentase Perlengkapan Jalan yang terpasang bertahan stagnan di angka 25,14% selama tiga tahun berturut-turut. Sebaliknya, Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah berhasil mempertahankan kinerja maksimal dengan capaian sempurna sebesar 100% secara konsisten dari tahun 2023 hingga 2025.

2.5.2.6. Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan data indikator kinerja daerah pada urusan koperasi dan UMKM, terdapat beberapa indikator yang telah memiliki capaian kinerja pada tahun 2023 dan 2024. Persentase koperasi aktif pada tahun 2023 tercatat sebesar 67,70%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 65,25%. Sementara itu, pada indikator kinerja kunci terkait persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas, pada tahun 2023 tercapai sebesar 5,82% dan meningkat pada tahun 2024 menjadi 10,16%.

Adapun beberapa indikator lainnya seperti rasio kewirausahaan daerah, rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB, persentase pertumbuhan UMKM, jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan, persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi, proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor, persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal, pertumbuhan volume usaha koperasi, serta persentase layanan urusan penunjang pemerintah daerah masih belum memiliki data capaian karena merupakan indicator yang baru dirilis pada tahun 2025.

Tabel 2. 37
Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2023-2035

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*
A	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**				
1	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	-	-	0,18
2	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	-	-	0,35
3	Persentase Pertumbuhan UMKM	%	-	-	0,49
4	Persentase Koperasi Aktif	%	67.70	65,25	73,86
B	**Indikator Kinerja Kunci**				
	Penanaman Modal				
1	Nilai Sakip	Nilai			Menunggu Rilis
2	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan	Koperasi	-	-	0

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2023	2024	2025
3	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	%	5,82	10,16	1,89
4	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	-	-	0
5	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	%	-	-	0
6	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	-	-	0,92
7	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	-	-	0,18
8	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	-	-	100

2.5.2.7. Urusan Penanaman Modal

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perijinan Penanaman Modal, kinerja menunjukkan tren yang stabil dan cenderung meningkat, di mana angka indeks berada pada level 93 pada tahun 2023 dan 2024, kemudian naik menjadi 93,3 pada tahun 2025. Namun, pada indikator Jumlah Realisasi Investasi Provinsi Maluku, terlihat adanya penurunan yang cukup signifikan dari 3.477 triliun rupiah pada tahun 2023 menjadi 3.380 triliun rupiah pada 2024, dan menurun tajam ke angka 1,125 triliun rupiah pada tahun 2025. Sejalan dengan hal tersebut, Persentase Peningkatan Realisasi Nilai Investasi (PMA dan PMDN) juga mengalami fluktuasi negatif yang drastis, yakni dari pertumbuhan positif sebesar 108% pada 2023, menjadi minus -2,79% pada 2024, dan menyusut hingga minus -66,71% pada 2025. Sementara itu, indikator Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) hanya mencatatkan angka sebesar 0% pada tahun 2025 tanpa ada data tercatat di dua tahun sebelumnya.

Sementara itu terkait Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha menunjukkan fluktuasi ekstrem, di mana realisasi sebesar 0% pada 2023 melonjak menjadi 100% pada 2024, namun kembali turun ke angka 0% pada 2025. Indikator Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah dan Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal menunjukkan konsistensi yang sempurna dengan capaian masing-masing sebesar 100% setiap tahunnya. Di sisi lain, Realisasi Total terhadap Target Investasi menunjukkan tren penurunan yang tajam, dari 172% pada 2023 menjadi 142% pada 2024, dan turun drastis ke angka 29,92% pada 2025. Terakhir, indikator Jumlah Investor yang Berinvestasi tercatat statis pada angka 0 Investor sepanjang periode tiga tahun tersebut.

Tabel 2. 38
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal 2023 – 2025

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*
	ASPEK DAYA SAING DAERAH				
	Penanaman Modal Dan PTSP				
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perijinan Penanaman Modal	Indeks	93	93	93,3
2	Jumlah Realisasi Investasi Provinsi Maluku	Triliun Rupiah	3.477	3.380	1,125
3	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%			0
4	Persentase Peningkatan Realisasi Nilai investasi (PMA dan PMDN) yang masuk ke Provinsi Maluku	%	108	-2,79	-66,71%
	ASPEK PELAYANAN UMUM				
1	Rata-rata lama pengurusan dokumen perijinan usaha	Hari	0	0	0
	Indikator Kinerja Kunci				
2	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	%	0	100	0
3	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100
4	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	172	142	29,92
5	Persentase Pemanfaatan Data Dan Informasi Penanaman Modal	%	100	100	100
6	Jumlah Investor yang Berinvestasi	Investor	0	0	0

2.5.2.8. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Berdasarkan data pada tabel berikut kategori Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar menunjukkan performa yang beragam selama periode 2023 hingga 2025. Pada indikator yang berkaitan dengan fasilitas menunjukkan tingkat konsistensi yang sangat tinggi. Persentase Fasilitasi Pemuda, Persentase Fasilitasi Pramuka, dan Persentase Fasilitasi Olahraga seluruhnya berhasil mempertahankan capaian sempurna sebesar 100% secara berturut-turut pada tahun 2023, 2024, hingga 2025. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan stabilitas penuh.

Tabel 2. 39

Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar					
2	Persentase Fasilitasi Pemuda	%	100	100	100
3	Persentase Fasilitasi Pramuka	%	100	100	100
4	Persentase Fasilitasi Olahraga	%	100	100	100

2.5.3. Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan

2.5.3.1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Capaian indikator kinerja pada urusan kelautan dan perikanan merupakan cermin dari efektivitas pengelolaan sumber daya maritim dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di wilayah tersebut. Melalui pemantauan data indikator kinerja kunci, dapat terlihat sejauh mana program strategis mampu mendorong produktivitas sektor perikanan tangkap maupun budidaya, serta efisiensi dalam pengawasan dan pemanfaatan ruang laut secara berkelanjutan.

Tabel 2. 40

Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*
Kelautan Perikanan					
1	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap	Ton	513.048,07	533.116,69	488.896,60*)
2	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya	Ton	251.727,62	261.166,28	204.336,91*)
3	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Persen	88,21	80,62	87.5

Indikator Kinerja Daerah pada sektor Kelautan dan Perikanan, terlihat adanya fluktuasi pada volume produksi maupun tingkat kepatuhan pelaku usaha selama periode 2023 hingga 2025. Indikator Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap sempat mengalami kenaikan dari 513.048,07 Ton pada tahun 2023 menjadi 533.116,69 Ton pada tahun 2024, namun kemudian mengalami penurunan menjadi 488.896,60 Ton pada tahun 2025. Tren serupa juga terlihat pada Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya yang meningkat dari 251.727,62 ton di tahun 2023 ke angka 261.166,28 ton pada tahun 2024, sebelum akhirnya terkoreksi turun menjadi 204.336,91 ton pada tahun 2025. Sementara itu, Persentase kepatuhan pelaku usaha

KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menunjukkan dinamika yang berbeda; angka kepatuhan tercatat sebesar 88,21 Persen pada tahun 2023, menurun menjadi 80,62 Persen pada tahun 2024, dan kembali menguat secara signifikan mencapai 87,5 Persen pada tahun 2025. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan tantangan dalam menjaga stabilitas output produksi meskipun terdapat perbaikan pada aspek kepatuhan terhadap regulasi pada tahun terakhir.

2.5.3.2. Pariwisata

Capaian indikator kinerja pada urusan pariwisata merupakan parameter krusial dalam mengukur daya tarik destinasi serta efektivitas strategi promosi dalam menggerakkan roda ekonomi daerah melalui sektor jasa. Melalui pemantauan tren kunjungan wisatawan, optimalisasi objek wisata, hingga peningkatan kualitas pelayanan industri pariwisata, dapat dipetakan sejauh mana sektor ini mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal. Evaluasi terhadap data indikator ini menjadi landasan strategis untuk memperkuat posisi daerah sebagai destinasi unggulan yang kompetitif, sekaligus memastikan pengelolaan pariwisata berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan dan kelestarian budaya.

Tabel 2.41
Capaian Indikator Urusan Pariwisata

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2025	
			Target	Realisasi
1	Kontribusi Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB Maluku	%	0,14	-
2	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	%	1,45	1,47
3	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	Hari	2	2,56
4	Jumlah Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	5	3,07
5	Jumlah Tamu Wisatawan (Nusantara dan Mancanegara)	Orang	422,985	410.697
6	Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara	Hari	2	1,46

Berdasarkan data tahun 2025, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Maluku mencapai 1,47%, sedikit melampaui target sebesar 1,45%. Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara juga menunjukkan capaian positif, yaitu 2,56 hari dibanding target 2 hari. Namun, beberapa indikator belum mencapai target, seperti kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDRB yang ditargetkan 0,14% tetapi belum terealisasi, serta pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif yang hanya 3,07% dari target 5%. Jumlah tamu wisatawan, baik nusantara maupun mancanegara, tercatat 410.697 orang, masih di bawah target 422.985 orang. Selain itu, rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara hanya 1,46 hari, belum memenuhi target 2 hari.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata Maluku

berhasil melampaui beberapa target strategis, khususnya kontribusi terhadap PDRB dan lama tinggal wisatawan mancanegara, meskipun masih terdapat tantangan pada indikator ekonomi kreatif dan wisatawan nusantara.

2.5.3.3. Pertanian

Urusan pertanian merupakan indikator fundamental dalam menilai tingkat ketahanan pangan serta kesejahteraan petani sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan di daerah. Melalui pemantauan terhadap volume produksi komoditi unggulan, luas tambah tanam, hingga efektivitas penyaluran sarana prasarana pertanian, dapat dipetakan sejauh mana sektor ini mampu memenuhi kebutuhan konsumsi domestik sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi. Evaluasi terhadap angka-angka realisasi ini sangat penting untuk mengidentifikasi tantangan produktivitas di lapangan, sehingga kebijakan penguatan sektor agraria dapat dirumuskan secara lebih presisi guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 2. 42
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*
A	**Aspek Daya Saing Daerah**				
1	Pertumbuhan dan Kontribusi Sub Sektor Pertanian	%			10,05*
2	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Pertanian	%			54,83*
B	**indikator Kinerja Kunci**				
1	Cakupan Bina Kelompok Tani	Angka	92,6	63,75	56
3	Produksi Komoditas Pertanian	Ton			325.392
4	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	9,57	10,54	10
5	Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks	105,1	102,7	*98,31*
6	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Ton			109.820
7	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%			100
8	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	%			63
9	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Angka			4.120

10	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	%			86
11	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Angka			198.842
12	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	%			93
13	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Angka	6	6	6
14	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Ha	32.964	32.964	32.964
15	Peningkatan Produksi Hortikultura	Angka			12.610

Berdasarkan data Indikator Kinerja Daerah pada sektor Pertanian yang disajikan, terlihat berbagai capaian signifikan terutama pada proyeksi tahun 2025. Pada indikator Pertumbuhan dan Kontribusi Sub Sektor Pertanian mencatatkan angka 10,05% di tahun 2025, didukung oleh Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Pertanian sebesar 54,83%. Sementara itu, pada bagian Indikator Kinerja Kunci, terdapat dinamika pada beberapa variabel utama seperti Cakupan Bina Kelompok Tani yang mengalami tren penurunan dari 92,6 pada 2023 menjadi 63,75 pada 2024, dan diproyeksikan berada di angka 56 pada 2025. Sebaliknya, aspek akuntabilitas melalui Nilai Sakip menunjukkan peningkatan kualitas dari predikat BB (2023), menjadi B (2024), dan mencapai skor numerik 74,1 pada 2025.

Untuk indikator kesejahteraan dan kontribusi ekonomi, Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB bergerak fluktuatif di kisaran 9,57% hingga 10,54%, dengan capaian 10% pada 2025. Namun, Nilai Tukar Petani (NTP) menunjukkan tren penurunan dari 105,1 di tahun 2023 menjadi 102,7 pada 2024, dan berada di angka 98,31 pada 2025. Dari sisi output produksi tahun 2025, tercatat Produksi Komoditas Pertanian mencapai 325.392 Ton, dengan rincian Peningkatan Produksi Tanaman Pangan sebesar 109.820 Ton dan Peningkatan Produksi Hortikultura sebesar 12.610. Di bidang peternakan, tercatat Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan pada angka 4.120 dengan Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) sebesar 86%. Terakhir, indikator aset tetap seperti Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B terpantau stabil pada luas 32.964 Ha sepanjang periode tiga tahun tersebut.

2.5.3.4. Kehutanan

Urusan kehutanan merupakan parameter vital dalam mengukur keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dengan upaya konservasi lingkungan hidup secara berkelanjutan. Melalui pemantauan terhadap luas tutupan

hutan, efektivitas rehabilitasi lahan kritis, hingga pengawasan terhadap produksi hasil hutan, dapat dipetakan sejauh mana sektor kehutanan mampu memberikan kontribusi ekonomi sekaligus menjaga fungsi ekologis sebagai penyangga kehidupan. Evaluasi terhadap angka-angka realisasi ini sangat penting untuk memastikan tata kelola hutan yang akuntabel, guna meminimalisir risiko bencana ekologis serta menjamin kelestarian kekayaan hayati bagi generasi mendatang

Tabel 2.43
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kehutanan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	2023	2024	2025	
			Realisasi		Target	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	**Urusan Pilihan**					
	Kehutanan					
1	Jumlah kelompok usaha masyarakat di dalam dan sekitar hutan yang terfasilitasi	Kelompok	20	20	28	28
2	Nilai Sakip	Nilai	80	80	85	67.15
3	Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi	Ha	356	30	100	100
4	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100
5	Terkelolanya DAS Lintas Kabupaten/Kota Kegiatan	Kegiatan	0	0	-	-
6	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB	%	0.46	0.46	0.55	0.36
7	Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	Kelompok	20	20	28	28
8	Jumlah Kelompok Tani yang terfasilitasi	Kelompok			0	8

Urusan Pilihan Bidang Kehutanan periode 2023–2025 secara umum menunjukkan performa yang sangat optimal pada aspek pemberdayaan masyarakat dan layanan penunjang pemerintahan. Hal ini dibuktikan oleh capaian Jumlah Kelompok Usaha Masyarakat dan Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang melonjak dari 20 kelompok di tahun 2023–2024 menjadi 28 kelompok di tahun 2025, berhasil memenuhi target 100%. Selain itu, fasilitasi terhadap Kelompok Tani melampaui ekspektasi dengan merealisasikan 8 kelompok dari target awal sebesar 0, disusul oleh konsistensi capaian Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah yang bertahan sempurna di angka 100%. Pada sektor lingkungan, program Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi kembali pulih dan memenuhi target sebesar 100 Ha di tahun 2025 setelah sempat merosot tajam ke angka 30 Ha di tahun sebelumnya. Di sisi lain, indikator Terkelolanya DAS Lintas Kabupaten/Kota Kegiatan tercatat tidak memiliki target maupun realisasi (tanda strip) pada tahun 2025 setelah stagnan di angka 0 pada dua tahun pertama.

Meskipun program pemberdayaan di lapangan berjalan sukses, sektor ini menghadapi tantangan administratif dan makro ekonomi yang cukup serius pada tahun 2025. Penurunan paling signifikan terlihat pada Nilai SAKIP yang merosot tajam ke angka 67.15 dari yang sebelumnya stabil di angka 80 pada tahun 2023 dan 2024, sehingga gagal memenuhi target yang ditetapkan sebesar 85. Penurunan kinerja birokrasi ini sejalan dengan melemahnya Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB

yang justru menyusut ke angka 0.36% di tahun 2025, jauh di bawah target ambisius sebesar 0.55% maupun realisasi tahun-tahun sebelumnya yang berada di angka 0.46%. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam terhadap tata kelola akuntabilitas kinerja instansi serta strategi hilirisasi produk kehutanan agar pertumbuhan kelompok usaha yang masif di lapangan dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan PDRB daerah.

2.5.4. Fokus Urusan Pemerintahan Penunjang

2.5.4.1. Urusan Keuangan

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah ditargetkan mencapai predikat C (Cukup Baik) pada tahun 2025. Sementara itu, Nilai Sakip yang tercatat sebesar 56,7 di tahun 2023, meningkat menjadi 60,6 di tahun 2024, namun diproyeksikan menurun ke angka 50,7 pada tahun 2025. Indikator Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap menunjukkan tren yang serupa, yakni sempat naik ke 9,30% di tahun 2024 sebelum melandai ke 7,93% di tahun 2025.

Efisiensi belanja pegawai di luar tunjangan guru melalui TKD menunjukkan penurunan yang signifikan dari 29,82% (2023) menjadi 20,84% pada tahun 2025. Namun, hal ini dibarengi dengan tren penurunan pada Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang konsisten menurun dari 94,50% (2023) hingga menyentuh 87,82% (2025). Di sisi lain, indikator Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu menunjukkan konsistensi yang sangat baik dengan angka sempurna 100% di setiap tahunnya.

Indikator Persentase Penurunan SILPA menunjukkan perubahan drastis dari angka negatif -36,61% di tahun 2023 menjadi 95,54% di tahun 2025. Pengalokasian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik terus dipacu peningkatannya, di mana pada tahun 2024 berada di angka 22,80% dan diproyeksikan naik menjadi 30,82% pada tahun 2025.

Tabel 2. 44
Capaian Indikator Kinerja Urusan Keuangan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*
A	***Aspek Kesejahteraan Masyarakat***				
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai			C (Cukup Baik)
B	***Indikator Kinerja Kunci***				
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan					
1	Efektifitas pendapatan daerah (persentase)	%			
2	Nilai Sakip	Nilai	56,7	60,6	50,7
3	Nilai Sakip	Nilai			
4	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	6,72%	9,30%	7,93%

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	2023	2024	2025
5	Indeks Pelayanan Publik	Indeks			
6	Persentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	%	29,82%	30,62%	20,84%
7	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	94,50%	93,32%	87,82%
8	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%			100
9	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	56,70%	60,60%	50%
10	Persentase Penurunan SILPA	%	-36,61		95,54%
11	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	100	100	100
12	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%		22,80%	30,82%

2.5.4.2. Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Tingkat capaian yang sangat stabil dan maksimal selama periode tiga tahun berturut-turut, yaitu dari tahun 2023 hingga 2025. Indikator pertama, Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah, secara konsisten mencapai angka 100% setiap tahunnya. Hal yang serupa juga terlihat pada indikator kedua, yakni Meningkatnya Layanan Pengembangan SDM Aparatur, yang tetap bertahan pada capaian optimal sebesar 100% di sepanjang periode tersebut. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan keberhasilan dalam mempertahankan standar pelayanan yang sempurna pada sektor penunjang pemerintahan dan pengembangan aparatur selama kurun waktu tiga tahun.

Tabel 2. 45
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan dan Pelatihan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan					
1	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100
2	Meningkatnya Layanan Pengembangan SDM Aparatur	Persentase Layanan Pengembangan SDM Aparatur	100%	100%	100%

2.5.4.3. Urusan Sekretariat Daerah

Nilai SAKIP Provinsi Maluku menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2023 hingga 2025, dengan capaian 61,06 pada 2023, naik menjadi 62,01 pada 2024, dan mencapai 63,10 pada 2025. Rata-rata kenaikan sebesar 1,02 poin per tahun ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat akuntabilitas kinerja dan efektivitas birokrasi. Kenaikan yang stabil tersebut menandakan adanya perbaikan berkelanjutan dalam sistem perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku, serta menunjukkan arah positif menuju tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, efisien, dan berorientasi hasil.

Tabel 2. 46
Capaian Indikator Kinerja Urusan Sekretariat Daerah

Uraian	2023	2024	2025
Nilai SAKIP Provinsi Maluku	61,06	62,01	63.10

2.6. Pencapaian Indikator Makro Provinsi Maluku

Indikator makro pembangunan daerah merupakan instrumen strategis untuk mengukur capaian kinerja pembangunan secara agregat dalam periode perencanaan lima tahunan. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2025–2029 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2025, indikator makro menjadi tolok ukur utama dalam menilai keberhasilan pelaksanaan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah.

Indikator makro tersebut dirumuskan secara terukur, realistis, dan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, serta mempertimbangkan karakteristik kewilayahan Provinsi Maluku sebagai daerah kepulauan. Penetapan target indikator makro dilakukan berdasarkan kondisi baseline tahun awal RPJMD, proyeksi pertumbuhan ekonomi, kapasitas fiskal daerah, serta dinamika sosial-ekonomi dan lingkungan strategis yang berkembang.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pembangunan daerah Tahun 2025 sebagimana digambarkan pada tabel 3.1. Secara umum indikator makro Provinsi Maluku menunjukkan tren yang positif dibandingkan Tahun 2024, meskipun pada beberapa indikator strategis masih diperlukan penguatan kebijakan dan percepatan intervensi.

Pada aspek pertumbuhan ekonomi, PDRB Per Kapita meningkat dari 32,2 juta rupiah pada Tahun 2024 menjadi 33,65 juta rupiah pada Tahun 2025 atau tumbuh sebesar 4,50 persen. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan rata-rata pendapatan masyarakat, meskipun masih berada di bawah target Tahun 2025

sebesar 34,8 juta rupiah. Sementara itu, kontribusi PDRB Provinsi terhadap perekonomian nasional meningkat dari 0,28 persen menjadi 0,29 persen, atau naik sebesar 3,57 persen, yang mengindikasikan penguatan peran ekonomi daerah secara bertahap.

Dari sisi kesejahteraan masyarakat, tingkat kemiskinan mengalami penurunan dari 15,78 persen pada Tahun 2024 menjadi 15,25 persen pada Tahun 2025, atau turun sebesar 0,53 poin (3,36 persen). Capaian ini telah melampaui target Tahun 2025 sebesar 15,43 persen, yang menunjukkan efektivitas program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta intervensi pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin. Sejalan dengan itu, Rasio Gini menurun dari 0,282 menjadi 0,273 atau membaik sebesar 3,19 persen, yang mencerminkan peningkatan pemerataan distribusi pendapatan masyarakat.

Pada aspek ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 6,11 persen pada Tahun 2025, relatif stagnan dibandingkan Tahun 2024 dan belum mencapai target 5,95 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja baru belum sepenuhnya mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja, sehingga diperlukan penguatan kebijakan hilirisasi sektor unggulan, investasi padat karya, dan pengembangan kewirausahaan.

Dalam dimensi lingkungan hidup, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) meningkat tipis dari 78,71 pada Tahun 2024 menjadi 78,83 pada Tahun 2025 atau naik sebesar 0,15 persen. Meskipun menunjukkan tren positif, capaian ini masih berada di bawah target 82,43, sehingga pengendalian pencemaran dan penguatan tata kelola lingkungan perlu terus ditingkatkan. Adapun indikator Indeks Modal Manusia (IMM) dan penurunan intensitas emisi gas rumah kaca belum dapat dievaluasi secara komparatif karena data capaian Tahun 2025 belum tersedia.

Secara keseluruhan, kinerja makro pembangunan Tahun 2025 menunjukkan kemajuan pada aspek pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan pemerataan pendapatan. Namun demikian, tantangan masih terdapat pada peningkatan kesempatan kerja dan percepatan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Maluku akan melakukan langkah-langkah penguatan kebijakan pada Tahun 2026 melalui optimalisasi belanja pembangunan yang lebih produktif, peningkatan kualitas investasi, serta sinergi lintas perangkat daerah guna memastikan pencapaian target RPJMD secara berkelanjutan.

Tabel 2. 47
Capaian Indikator Makro Pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2025

No.	Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target 2025	Capaian 2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,34	5,34	5,44

No.	Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target 2025	Capaian 2025
2	PDRB Per Kapita	Juta	32,2	34,8	33,65
3	Kontribusi PDRB Provinsi	%	0,28	0,3	0,29
4	Tingkat Kemiskinan	%	15,78	15,43	15,25
5	Rasio Gini	%	0,282	0,282 - 0,287	0,273
6	Indeks Modal Manusia (IMM)	Indeks	Na	0,49	n.a
7	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	%	Na	25,22	n.a
8	IKLH Daerah	Angka	78,71	82,43	78,83
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,11	5,55 – 5,95	6,27

Sumber : BPS, 2026

2.7. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Provinsi Maluku

Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan melalui intervensi berbagai program dan kegiatan pembangunan direfleksikan melalui pencapaian IKU, di mana pencapaian tersebut akan didapati dari serangkaian strategi yang dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Tingkat ketercapaian IKU akan diukur dengan membandingkan kinerja yang telah terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Berdasarkan data indikator pembangunan Provinsi Maluku, terdapat dinamika yang cukup kontras antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik pada periode 2024–2025. Dari sisi ekonomi, Provinsi Maluku menunjukkan tren yang optimis dengan kenaikan laju pertumbuhan ekonomi dari 5,34% menjadi 5,44%, yang diikuti dengan keberhasilan menekan tingkat kemiskinan dari 15,78% ke angka 15,25%. Namun, kemajuan ekonomi ini berbanding terbalik dengan sektor konektivitas dan fisik, di mana Indeks Infrastruktur tercatat menurun dari 60,23 menjadi 56,74, serta Rasio Konektivitas Wilayah yang juga terkontraksi dari 0,761 ke 0,704.

Di sisi lain, capaian luar biasa terlihat pada aspek sosial-budaya melalui Indeks Kerukunan Umat Beragama yang melonjak dari 76,47 ke 80,54, mencapai kategori Tinggi/Progresif pada tahun 2025. Sementara itu, aspek lingkungan hidup cenderung stabil dengan peningkatan tipis pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ke angka 78,83, meskipun kewaspadaan tetap diperlukan mengingat Indeks Risiko Bencana Maluku berada pada angka 161,5 yang menempatkannya pada peringkat risiko tertinggi. Secara keseluruhan, fokus pembangunan di masa depan perlu diarahkan untuk menyeimbangkan akselerasi ekonomi dengan penguatan kembali infrastruktur wilayah guna menjaga kesinambungan pertumbuhan.

Tabel 2.48
Capaian Indikator Kinerja Utama Provinsi Maluku (IKU)

No	Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target 2025	Capaian 2025
(1)	*(2)*	*(3)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Maluku,	Indeks	65,11	66 (B :Cukup Baik)	67,51
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	15,78	15,43	15,25
3	Indeks Modal Manusia	Indeks	na	0,49	Belum dirilis oleh K/L
4	Indeks Infrastruktur	Indeks	60,23	56,65	56,47
5	Rasio Konektivitas Wilayah Provinsi Maluku	Rasio	0,761	0,762	0,704
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	78,71	82,43	78,83
7	Indeks Risiko Bencana	Angka	161,5	161,45	161,50 (Peringkat 1 Risiko Tertinggi)
8	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	Na	42,88	42,88
9	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,34	5,34	5,44
10	Indeks Ekonomi Hijau	Indeks	na	60,07	Belum dirilis oleh K/L
11	Indeks Williamson	Indeks	0,389	0,388	Belum dirilis oleh BPS
`12	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Nilai	76,47	76,5	80,54 (Tinggi/Progresif)
13	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	na	60,71	Belum dirilis oleh K/L
14	Indesk Demokrasi Provinsi	Angka		70,5 - 76,69	67,98

Sumber : * BPS, 2026
* Kementrian/Lembaga, 2026

2.8. Pecapaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran

Tabel 2. 49

Pencapaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Provinsi Maluku

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	2023	2024	2025	
						Target	Realisasi
MISI 1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Secara Adil, Inklusif, Transparan dan Akuntabel							
T1: Meningkatnya kualitas birokrasi dan pelayanan publik		**T1. Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Maluku**	**Indeks**	**38,08**	**65,11**	**66 (B : Cukup Baik)**	
	S1.1. : Tercapainya reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Maluku	S1.1 Indeks Reformasi Birokrasi General	Indeks	n/a	n/a	60,75	
		Indeks Integritas Nasional/Daerah	Skor	60,56	63,12	67,43	66,56
MISI 2. Pengentasan Kemiskinan dan Penurunan Tingkat Pengangguran Melalui Kebijakan Yang Tepat Sasaran, Efisien dan Efektif							
T2. Meningkatkatnya Kesejahteraan Masyarakat		**T1, Tingkat Kemiskinan**	**Persen**	**16,42**	**15,78**	**15,43**	**15,25**
	S2.1. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	S2.1 PDRB Per Kapita	Persen	30,46	32,2	34,8	33,65
	S2.2. Menurunnya Tingkat Pengangguran	S2.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (IUP 45)	Persen	6,31	6,11	5,95	6,27

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	2023	2024	2025	
						Target	Realisasi
MISI 3. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas							
T3: Meningkatnya kualitas SDM Maluku		**T3: Indeks Modal Manusia (IMM)**	**Indeks**	**n.a**	**n.a**	**0,49**	
	S3.1 Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan	S3.1 Indeks Pendidikan	Indeks	0,481	0,471	0,473	0,779
	S3.2 Meningkatnya Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan	S3.2 Indeks Kesehatan	Indeks	0,468	0,422	0,764	0,418.
	S3.3 Meningkatnya Peran Pemuda dan Prestasi Olahraga	S3.3.1 Jumlah cabang olahraga yang meraih prestasi dalam kompetisi nasional dan internasional	Jumlah	11	11	4	
		S3.3.2 Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	54,33	54,67	56,75	
	S3.4 Meningkatnya Peran Kelompok Rentan (Perempuan, anak dan Penyandang Disabilitas) Keluarga dan Kesetaraan Gender	S3.4 Indeks Ketimpangan Gender (IUP 45)	Indeks	0,509	0,538	0,525	0,530

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	2023	2024	2025	
						Target	Realisasi
MISI 4. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar Serta Transportasi dan Telekomunikasi Untuk memperlancar Konektivitas Antar dan Intra Wilayah							
T.4 Meningkatnya Infrastruktur Dasar, Telekomunikasi, Elektrifikasi dan wilayah serta konektivitas Antar dan Intra Wilayah		**T4.1 Indeks Infrastruktur**	**Indeks**	**42,27**	**43,72**	**54,00**	**56,47**
		T4.2 Rasio Konektivitas Wilayah Provinsi Maluku	**Rasio**	**0,766**	**0,761**	**0,704**	**0,704**
	S4.1 Meningkatnya Infrastruktur Dasar	S4.1.1: Indeks Infrastruktur Dasar	Indeks	16,72	17,74	33,67	26,02
		S4.1,2 Kemantapan Jalan	Persen	50,18	53,22	54,63	61,48
		S4.1.3 Persentase Rumah Tangga Terakses Air Minum Aman	Persen	0,00	0,00	40,39	23,79
		S4.1.4 Persentase Akses Rumah Tangga Terhadap Sanitasi Aman	Persen	0,00	0,00	6,00	1,43

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	2023	2024	2025	
						Target	Realisasi
	S4.2 Meningkatnya Infrastruktur Dasar Transportasi	S4.2: Persentase wilayah yang terhubung oleh infrastruktur transportasi	Persentese	67,92	69,75	71,67	
	S4.3. Meningkatnya infrastruktur Dasar telekomunikasi	S4.3. Persentase wilayah yang terhubung oleh infrastruktur telekomunikasi	Persentese	64,75	68,13	71,50	
MISI 5. Pengelolaan Lingkungan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan, Adaptasi dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim dan Ketahanan Bencana (Etis, Responsif dan Akuntabel)							
T5 Meningkatnya pengelolaan SDA, dampak perubahan iklim dan ketahanan bencana		**T5.1: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**Indeks**	**78,75**	**78,71**	**82,43**	
		T5.2 Indeks Risiko Bencana	**Indeks**	**160,33**	**161,50**	**161,45**	**161,50**
		T5.3 Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK	**Persentase**	**Na**	**na**	**42,88**	
	S5.1 Terjaganya Lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	S5.1: Persentase wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil yang terkonservasi	Persentese	Na	2,11	2,05	
	S5.2 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan dampak perubahan iklim	5.2 Indeks Kualitas Lingkungan hidup Daerah (IUP 45)	Angka	78,75	78,71	82,43	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	2023	2024	2025	
						Target	Realisasi
	S5.3 Meningkatnya Mitigasi Bencana	S5.3 Indeks Ketahanan Daerah	Skor	0,34	0,34	0,36	
	S5.4 Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah Secara Berkelanjutan	S5.4 Indeks Ketahanan Pangan	Skor	64,37	62,68	65,15	57,15
MISI 6. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif melalui hilirisasi komoditas unggulan, Pemberian Insentif Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), membuka Aksesibilitas Pasar dan Mengurangi Disparitas Antarwilayah							
T6 Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif		**T6.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**Persen**	**5,21**	**5,34**	**5,34**	**5,44**
		T6.3 Indeks Williamson	**Indeks**	**0,386**	**0,389**	**0,388**	**0,412**
		T5.4. Indeks Ekonomi Hijau	**Indeks**	**na**	**na**	**60,07**	
	S6.1 Terciptanya iklim investasi yang kondusif	S6.1 Persentase Peningkatan Realisasi Nilai investasi (PMA dan PMDN) yang masuk ke Provinsi Maluku	Persen	3,478	3,38	3,760	
	S6.2: Berkembangnya kawasan Ekonomi Khusus	S6.2 Tingkat Perkembangan Kawasan Ekonomi. Khusus	Jumlah	0	0	0	0

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	2023	2024	2025	
						Target	Realisasi
	S6.3 Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan terhadap Perekonomian Daerah	S6.3.1 Rasio PDRB Industri Pengolahan (IUP 45)	Persen	6,26	6,31	6,5	6,51
		S6.3.2 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum (%) (IUP 45)	Rasio	1,45	1,45	1,5	1,45
		S6.3.3 LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	5,66	3,39	5,8	
	S6.4 Meningkatnya Akses Pembiayaan Bagi Masyarakat	S6.4.1 Persentase Masyarakat yang mengakses pembiayaan	Persen	7,20	7,39	7,46	
		S6.4.2 Inklusi Keuangan	Persen			86,30	
	S6.5: Stabilitas Ekonomi Daerah	S6.5.1 : Tingkat Inflasi Daerah	Persen	2,81	1,28	2,5 ± 1	3,58
		S6.5.2 Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	Persen	n/a	n/a	11,50	
	S6.6 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Desa	S6.7.1 Indeks Desa	Skor	n/a	n/a	0,659	
MISI 7. Penataan dan revitalisasi lembaga sosial kemasyarakatan dalam semangat hidup orang basudara, berbasis adat budaya dan kearifan lokal serta ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum							

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	2023	2024	2025	
						Target	Realisasi
T7. Meningkatnya Harmonisasi Sosial, Pembangunan Kebudayaan, dan Penegakan Hukum		**T7.1 Indeks Kerukunan Umat Beragama**	**Angka**	**76,02**	**76,47**	**76,5**	**77,89**
		T7.2 Indeks Pembangunan Kebudayaan	**Angka**	**59,38**	**n/a**	**60,71**	
		T7.3 Indeks Demokrasi Provinsi	**Persen**	**69,35**	**67,98**	**70,5 - 76,69**	**73,93**
	S7.1 Meningkatnya Ketaatan dan kepatuhan Hukum oleh Masyarakat	S7.1 Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	Persen	n/a	100	100	
	S7.2 Meningkatnya Harmonisasi Sosial berbasis Norma Agama, Budaya dan Kearifan Lokal	S7.2.1 Indeks Harmoni	Skor	n/a	n/a	6,5	
	S7.3 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	S7.3 Persentase desa Mandiri	Persen	6,83	15,17	15,25	

Misi 1:

Upaya reformasi birokrasi menunjukkan kemajuan signifikan. Indeks Reformasi Birokrasi meningkat dari 38,08 (2023) menjadi 65,11 (2024) dengan target 66 pada 2025. Indeks Integritas Nasional/Daerah juga naik dari 60,56 ke 66,56, meski realisasi sedikit lebih rendah dari target. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan transparansi dan akuntabilitas birokrasi.

Misi 2:

Tingkat kemiskinan menurun dari 16,42% (2023) ke 15,25% (2025). PDRB per kapita meningkat dari 30,46% ke 33658%. Tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan dari 6,11% pada 2024, naik kembali ke 6,27%. Secara umum, kesejahteraan masyarakat membaik, namun pengangguran masih fluktuatif.

Misi 3:

Indeks Pendidikan relatif stagnan, namun realisasi 2025 melonjak ke 0,779. Indeks Kesehatan sempat turun ke 0,422 (2024) lalu naik ke 0,418 (2025). Indeks Pembangunan Pemuda meningkat ke 54,67, sementara Indeks Ketimpangan Gender relatif mengalami penurunan di kisaran 0,530. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan akses pendidikan dan kesehatan, meski belum konsisten.

Misi 4:

Indeks Infrastruktur meningkat dari 42,27 ke 56,47. Kemantapan jalan naik dari 50,18% ke 61,48%. Namun, akses air minum aman dan sanitasi aman masih rendah (23,79% dan 1.43% pada 2025). Infrastruktur transportasi dan telekomunikasi menunjukkan tren positif dengan cakupan wilayah yang semakin luas.

Misi 5:

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 78,83 (2025). Namun, Indeks Risiko Bencana tetap tinggi sebesar 161,50. Indeks Ketahanan Pangan 57,18 pada 2025. Ini menandakan bahwa meski kualitas lingkungan membaik, ketahanan pangan dan mitigasi bencana masih menjadi tantangan besar.

Misi 6:

Pertumbuhan ekonomi stabil di kisaran 5,44%. Investasi meningkat dari 3,478% ke 3,760%. Kontribusi sektor unggulan seperti industri pengolahan, akomodasi, dan pertanian menunjukkan tren positif. Namun, Indeks Williamson 0,387 menandakan ketimpangan antarwilayah masih terjadi.

Misi 7 :

Indeks Kerukunan Umat Beragama tetap tinggi (77,89). Indeks Demokrasi Provinsi meningkat ke 73,93. Persentase desa mandiri mengalami kenaikan pada tahun 2024 sebesar 15,17. Pencapaian ke dua indikator ini menunjukkan adanya penguatan sosial, budaya, dan tata kelola desa.

Secara keseluruhan, pencapaian tujuan dan sasaran Provinsi Maluku menunjukkan **kemajuan signifikan** dalam reformasi birokrasi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kerukunan sosial. Namun, terdapat beberapa **tantangan utama**:

- Fluktuasi pengangguran dan ketimpangan antarwilayah.
- Rendahnya akses air minum aman, sanitasi, dan ketahanan pangan.
- Tingginya risiko bencana meski kualitas lingkungan membaik.

Dengan demikian, fokus pembangunan ke depan perlu diarahkan pada pemerataan wilayah, penguatan ketahanan pangan, serta mitigasi bencana untuk memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan

2.9. Rekapan Pencapaian IKD Provinsi Maluku Tahun 2025

Sebagaimana telah dipaparkan mengenai Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) Provinsi Maluku Tahun 2025 beserta permasalahan pada masing-masing aspek pembangunan, maka untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai capaian IKD pada setiap urusan pemerintahan, disajikan tabel rekapitulasi IKD. Penyajian tabel ini dimaksudkan untuk mempermudah proses identifikasi capaian kinerja, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah pada tahun perencanaan berikutnya.

Tabel. 2.50

Rekapan Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Provinsi Maluku 2025

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			TARGET		Ket
			2024	2025		2026	2027	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05) - Target*	*Capaian*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN								
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**							
1	Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi	%	-	19.87-22.37	14,1	21.13-23.63	14.33-14.36	
2	Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Numerasi	%	-	15.55-18.05	10,51	16.55-19.05	10.83-10.85	
3	Harapan Lama Sekolah	%	-	14.21-14.22	-	14.27-14.29	22.39-24.89	
4	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk diatas 15 Tahun	%	-	10.57-10.59	-	10.70-10.72	17.55-20.05	
5	Skor Literasi/Numerasi	Skor	52,4	53,36	-	54,32	55,29	
6	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	(%)	-	60,71	57,27	61,31	61,91	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			TARGET		Ket
			2024	2025		2026	2027	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05) - Target*	*Capaian*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
7	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	(%)	-	14,94	-	15,09	15,24	
8	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	(%)	-	73,81	-	74,92	76,05	
III	**ASPEK PELAYANAN UMUM**							
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	%	-	100	77,28	100	100,00	
2	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidikan	%	-	45	75,43	60	75,00	
3	Persentase anak usia 4-18 Tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	%	57,37	65,9	77,28	66	67,00	
4	Persentase anak usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)	%	77,7	78,34	82,07	85	87,00	
IV	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**							
AA	**1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							
1	Indeks Pendidikan	Indeks	0,471	0,473	0,525	0,475	0,47	
2	Nilai Sakip	Nilai	72,15	74	61,65	75,5	77,00	
3	Dimensi Warisan Budaya	Nilai	-	-	-	58,35	58,37	
4	Skor Kemampuan Literasi SLB	%	54,43	55,1	37,5	56,16	57,03	
5	Skor Kemampuan Literasi SMA	%	60,52	61,34	49,5	61,94	62,54	
6	Persentase pemerataan guru	%	-	100	-	100	100	
7	Skor Kemampuan Numerasi SMA	%	52,45	54,25	46,86	55,85	57,45	
8	Skor Kemampuan Numerasi SLB	%	45,89	46,34	75	46,79	47,24	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			TARGET		Ket
			2024	2025		2026	2027	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05) - Target*	*Capaian*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
9	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra Daerah	%	-	-	-	3	7,00	
10	Skor Kemampuan Numerasi SMK	%	51,08	53,28	39,53	55,48	57,68	
11	Persentase layanan dan tidak lanjut pemberian perizinan pendidikan	%	-	-	-	10	11,00	
12	Skor Kemampuan Literasi SMK	%	58,53	59,84	39,75	61,14	62,44	
13	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	%	-	-	-	35	36,00	
14	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	
AB	**2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							
1	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	Persentase	-	-	70,71	50	52,00	
2	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	Persentase	-	-	55,6	100	100,00	
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Persentase	-	-	80	45	60,00	
4	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Persentase	-	-	70	100	100,00	
5	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Persentase	-	-	54,05	100	100,00	
AC								
1	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	Persentase	-	-	97	20	25,00	
1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN								
VI	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**							
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	70,68	71,16	-	71,51	71,85	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			TARGET		Ket
			2024	2025		2026	2027	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05) - Target*	*Capaian*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
2	Penemuan Kasus TBC	%	61	90	62.3	90	90,00	
3	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	(%)	86	90	85	90	90,00	
4	Cakupan Kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	98,6	98,6	98,60%	98,7	98,80	
5	Prevelensi Balita Stunting	%	28,4	24,7	21,46%	23,1	21,60	
6	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Per 100.000 Kelahiran Hidup	189	187	87,70%	168	151,00	
VII	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**							
AA	**1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							
1	Bed Occupancy Rate (BOR)	%	34	38	38.44	41	60,00	
2	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)	%	100	100	100	100	100,00	
3	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehetan akibat bencana dan /atau berpotensi bencana	%	100	100	100	100	100,00	
4	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Orang	16,85	12,62	6 (212 kasus kematian bayi)	11,95	11,28	
5	Nilai Sakip	Nilai	62,1	63,5	63.5	65	66,50	
6	Cakupan Penerimaan PKG (Pemeriksaan Kesehatan Gratis)	%	0	20	17,90%	25	40,00	
7	Average Length of Stay	%	4	4	6	4	3,00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			TARGET		Ket
			2024	2025		2026	2027	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05) - Target*	*Capaian*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
8	Jumlah Kabupaten/Kota Eliminasi Malaria	Kabupaten/Kota	3	4	4	6	8,00	
9	Cakupan penerimaan imunisasi bayi lengkap	Persentase	75	80	80	85	90,00	
10	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	94,28	100	100,00	
11	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	%	40	45	52,83%	50	55,00	
12	Persentase hipertensi dalam pengendalian	Persentase	10	10	3.45	15	20,00	
13	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman	Persentase	80	81	81	82	84,00	
14	Angka Kematian Balita/1000 Kelahiran Hidup	Orang	19,83	29,4	6,4 (227 kasus kematian balita	28	26,50	
15	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	%	50	55	90.72	60	70,00	
16	ODHIV Baru yang ditemukan yang mendapat Pengobatan ARV	%	58	90	64	90	90,00	
1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
IX	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**							
1	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Bidang Tanah	0	0	1155	2.200	1.200,00	
2	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	(%)	0	40,39	23,77	41,25	44,12	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			TARGET		Ket
			2024	2025		2026	2027	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05) - Target*	*Capaian*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
3	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	(%)	0	6	1.43	9,12	9,33	
X	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**							
1	Indeks Infrastruktur Dasar	Angka	17,74	33,67	35,53	35,72	37,27	
XI	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**							
AA	**1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							
1	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah provinsi	%	91,6	25	-	33	33,00	
2	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	%	11	17	13	25	39,00	
3	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	%	4,32	16,01	4,32	17	18,00	
4	Tingkat Kemantapan Jalan	%	53,22	54,63	61.84	56,79	58,37	
5	Nilai Sakip	Nilai	0	78,5	-	83,5	85,00	
6	Persentase peningkatan perlindungan kawasan dari abrasi dan banjir rob	%	8,32	21,14	38,31	22,2	23,00	
7	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	%	26,64	37,11	27,52	39	41,00	
8	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	%	5	5	84,62	15	20,00	
9	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	%	16	16	100	18	20,00	
10	Persentase penataan bangunan dan lingkungan	%	17	17	0	19	20,00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			TARGET		Ket
			2024	2025		2026	2027	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05) - Target*	*Capaian*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
11	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Aman	%	-	6	1.43	9,12	9,33	
12	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100,00	
13	Persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/TPST regional	%	-	2	0	22	24,00	
14	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak	%	-	-	14,58	55,1	55,72	
15	Persentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi baik	%	-	2	0	20	23,00	
16	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kab/kota	%	5	16	0	19	22,00	
AB	**2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							
1	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah	%	100	100	100	100	100,00	
2	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	100	100	52,3	100	100,00	
1.04.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
XIII	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**							
AA	**1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							
1	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	Persentase	23,88	25,25	25.25	26,92	29,41	
2	Nilai Sakip	Nilai	70,15	80,1	belum dikeluarkan oleh Inspektorat	80,5	80,70	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			TARGET		Ket
			2024	2025		2026	2027	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05) - Target*	*Capaian*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
3	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Persentase	100	100	100	100	100,00	
4	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	100,00	
5	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni	Persentase	0	0	100	100	100,00	
6	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100,00	
1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA								
XV	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**							
1	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Indeks	0	0	0	50	52,00	
2	Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Persentase	100	100	0	100	100,00	
XVI	**ASPEK PELAYANAN UMUM**							
1	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	(%)	-	70	0	70,75	71,50	
2	Presentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	%	100	100	0	100	100,00	
XVII	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**							
AA	**1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			TARGET		Ket
			2024	2025		2026	2027	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05) - Target*	*Capaian*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
1	Nilai Sakip	Nilai	60	62,1	B	64,1	66,10	
2	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100,00	
3	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	%	100	100	100	100	100,00	
1.05.1.06.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH								
XIX	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**							
1	Indeks Risiko Bencana	Indeks	161,5	161,45	belum dirilis	161,4	161,35	
2	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,34	0,36	belum dirilis	0,38	0,40	
XX	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**							
AA	**1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							
1	Nilai Sakip	Nilai	62,05	65,05	belum dirilis	68,05	71,05	
2	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100	100	50	100	100,00	
3	Persentase penanganan pra bencana	%	100	100	72	100	100,00	
4	Persentase penanganan tanggap bencana darurat	%	100	100	100	100	100,00	
5	Persentase pendampingan penanganan pasca bencana	%	100	100	100	100	100,00	
6	Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	%	100	100	0	100	100,00	
7	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100,00	
1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL								
XXII	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**							

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			TARGET		Ket
			2024	2025		2026	2027	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05) - Target*	*Capaian*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
1	Indeks Kesejahteraan Sosial	Angka	48,56	48,57	-	48,58	48,59	
XXIII	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**							
AA	**1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							
1	Nilai SAKIP		60	61	Masih Menunggu Rilis	62	63,00	
2	Persentase Masyarakat miskin yang menerima bantuan sosial	%	70	71	100	72	73,00	
3	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasar di dalam panti	%	60	61	100	62	63,00	
4	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani	%	70	71	99	72	73,00	
5	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya	%	80	81	0	82	83,00	
6	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Taraf Kesejahteraannya	%	70	71	100	72	73,00	
7	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial, dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	%	100	100	100	100	100,00	
8	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100,00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			TARGET		Ket
			2024	2025		2026	2027	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05) - Target*	*Capaian*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
9	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	%	60	61	0	63	64,00	
10	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	%	70	71	100	72	73,00	
11	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	%	90	90,1	100	90,2	90,30	
12	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat sesuai Standar	%	80	81	100	82	83,00	
13	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100	100	100	100,00	
14	Persentase Pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial	%	80	81	100	82	83,00	
15	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100	100	100	100	100,00	
16	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	%	80	81	100	82	83,00	
17	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	%	70	71	100	72	73,00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			TARGET		Ket
			2024	2025		2026	2027	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05) - Target*	*Capaian*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
18	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100	100	100	100	100,00	
19	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	%	70	71	0	72	73,00	
20	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan	%	100	100	27	100	100,00	
21	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola dengan Baik	%	80	81	100	82	83,00	
22	Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100	100	100	100	100,00	
23	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100	100	100	100	100,00	
2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI								
XXV	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**							
1	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan	Angka	-	-	-	625	1.250,00	
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,11	5,95	6,27	5,92	5,80	
3	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi	%	43,17	35	49,98	38	41,00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			TARGET		Ket
			2024	2025		2026	2027	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05) - Target*	*Capaian*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
4	Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat Kab/Kota/Provinsi	Unit	0	4	3	6	8,00	
5	Proporsi penciptaan lapangan kerja formal	%	34,9	35	0	35,3	36,00	
XXVI	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**							
AA	**2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							
1	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	0	20	9,09	20	20,00	
2	Tingkat Produktivitas tenaga Kerja	Persentase	40,99	41,05	1,51	41,18	41,36	
3	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Persentase	8,9	0,48	1,11	0,48	0,51	
4	Nilai Sakip	Nilai	61,5	61,5	belum dirilis	62,5	63,50	
5	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	-	-	0	250	250,00	
6	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100,00	
7	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	%	-	-	0,1	0,18	0,21	
8	Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya	Orang	-	-	221	3.075	3.075,00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			TARGET		Ket
			2024	2025		2026	2027	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05) - Target*	*Capaian*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
9	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	Persentase	8,9	-	0	0,48	0,51	
AB	**3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**							
1	Tersedianya dokumen perencanaan kawasan transmigrasi baru	Dokumen	0	0	-	1	1,00	
2	Persentase dokumen perencanaan kawasan terpadu.	%	0	0	-	100	100,00	
3	Persentase Program Transmigrasi yang dilaksanakan	%	-	-	-	100	100,00	
4	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	%	-	-	-	0,21	0,50	
2.08.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
XXVIII	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**							
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,73	93,78	-	93,92	94,06	
2	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*)	(%)	0	65,49	-	66,08	66,67	
3	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	62,96	69,62	-	70,14	70,59	
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	55,72	56,26	66,66	58,8	59,31	
XXIX	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**							
AA	**2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							
1	Nilai Sakip	Nilai	62,5	64	belum dirilis	65,5	67,00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			TARGET		Ket
			2024	2025		2026	2027	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05) - Target*	*Capaian*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
2	Ratio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	%	17,79	16,12	21,5	15,31	14,55	
3	Rasio KDRT	%	2,9	2,89	3,6	2,24	2,22	
4	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	%	7,87	7,67	3,7	7,4	7,03	
5	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Peringkat dalam KLA	Persentase	18,08	18,09	18,09	19	19,21	
6	Persentase Anggaran Responsif (ARG)	%	6,24	6,3	4,5	6,89	7,42	
7	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	Nilai	12,9	20,96	20,96	22,58	24,08	
8	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100,00	
9	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Nilai	65,43	65,62	-	65,92	66,17	
10	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komperhensif	%	100	100	100	100	100,00	
11	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	Nilai	-	-	0	0,51	0,75	
12	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	87,13	88,26	0	90,01	91,49	
13	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	6,24	6,3	4,5	6,89	7,42	
14	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase	100	100	100	100	100,00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			TARGET		Ket
			2024	2025		2026	2027	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05) - Target*	*Capaian*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
2.09.2.09.0.00.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN								
XXXI	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**							
1	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Ton	12,468	6,396	847,69	48	50,00	
2	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	76,9	76	89,3	78	79,00	
3	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan PoU	%	31,66	28,96	105,35	27,64	26,84	
XXXII	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**							
1	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	62,68	65,15	57,18	67,2	69,00	
XXXIII	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**							
AA	**2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							
1	Nilai Sakip	Nilai	50	55	Belum dirilis	60	65,00	
2	Persentase Daerah Rentan Rawan pangan	%	22,03	20,3	46,61	20,1	18,44	
3	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100,00	
4	Jumlah Cadangan Pangan (ton)	Ton	12,46	6,396	54,218	48	50,00	
5	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	%	96,77	83,2	104,3	88	90,00	
2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP								
XXXV	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**							
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	78,71	82,43	78,83	82,59	82,76	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			TARGET		Ket
			2024	2025		2026	2027	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05) - Target*	*Capaian*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
2	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	-	57	-	65,75	74,50	
3	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	(%)	-	10	67.99	13,5	17,00	
4	Persentase Penurunan Emisi GRK b) Tahunan	%	67,78	85,82	85.82	87,65	90,98	
5	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (IPKH)	Poin	0	0,542	-	0,551	0,56	
XXXVI	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**							
AA	**2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							
1	Persentase sampah dan jumlah limbah B3 terkelola	%	0	50	73.94	50	60,00	
2	Jumlah Entitas Pengakuan dan Peningkatan Kapasitas MHA	Kelompok	2	2	-	2	2,00	
3	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan	%	88,89	33,33	85.71	33,33	33,33	
4	Nilai SAKIP		61,5	61,6	N/A	61,7	61,80	
5	Jumlah Penerima Penghargaan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penghargaan	-	-	0	3	3,00	
6	Persentase Penyelesaian Sengketa / Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	%	-	-	0	100	100,00	
7	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Dokumen	1	-	-	1		
8	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	%	88,89	-	85.71	33,33	33,33	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			TARGET		Ket
			2024	2025		2026	2027	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05) - Target*	*Capaian*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
9	Indeks Kualitas Air Laut	poin	78,08	-	72.15	81,99	82,04	
10	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	
11	Indeks Kualitas Udara	poin	92,7	-	84.22	88,23	88,43	
12	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	poin	-	-	0	20	25,00	
13	Indeks Kualitas Air	poin	56,55	-	69.74	72,83	73,03	
14	Jumlah Masyarakat/ Kelompok/ Pelaku Usaha	Kg/Orang	120	20	90	30	30,00	
15	Persentase Limbah B3 yang terkelola	%	-	-	79.88	90	90,00	
2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
XXXVIII	**ASPEK PELAYANAN UMUM**							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks	0	70	-	72,5	75,00	
2	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	58.2:60.2	64.1:65.7	64.0 : 67.1	65.8:67.4	67.5:69.1	
XXXIX	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**							
AA	**2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							
1	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	%	100	100	100	100	100,00	
2	Persentase Akte Perkawian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	100	100	100,00	
3	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	100	100	100,00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			TARGET		Ket
			2024	2025		2026	2027	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05) - Target*	*Capaian*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
4	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	30	10	5,35	20	30,00	
5	Persentase Akte Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	100	100	100,00	
6	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan	Persentase	-	-	0	100	100,00	
7	Persentase Akte Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	100	100	100,00	
8	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	23	-	23,56	55	60,00	
9	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	90,8	100	100,00	
AB	**2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							
1	Kebijakan fasilitasi dan koordinasi layanan kependudukan dan pencatatan sipil	%	0	80	100	82,5	85,00	
2	Kebijakan fasilitasi dan koordinasi layanan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga	%	0	80	100	82,5	85,00	
3	Nilai Sakip	Nilai	60,1	62	-	64	66,00	
4	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat atau cara KB	%	59	59	63,9	60,3	61,60	
5	Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja	Indeks	-	-	78,8	40,5	42,50	
6	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Angka	2,41	-	2,42	2,4	2,39	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			TARGET		Ket
			2024	2025		2026	2027	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05) - Target*	*Capaian*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
7	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	%	-	-	29,31	90,8	91,50	
8	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Angka	19,4	-	17,5	18,4	17,40	
9	Indeks Lansia Berdaya	Indeks	-	-	68,5	65,5		
2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
XLI	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**							
1	Indeks Desa	Indeks	-	0,6594	66	0,6726	0,68	
2	Persentase Desa Mandiri	%	8,63	15,25	9,42	15,67	16,08	
XLII	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**							
AA	**2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							
1	Nilai Sakip	Nilai	68	68	69,6	68,5	69,00	
2	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase	56,25	-	0	1,7	1,70	
3	Persentase Fasilitasi Kerja Sama Desa	Persentase	100	10	0	20	40,00	
4	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	Persentase	0	-	0	20	40,00	
5	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	Persentase	0	-	0	1,7	1,70	
6	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100,00	
7	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Persentase	100	-	0	20	40,00	
8	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persentase	33	-	33,3	50	67,00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			TARGET		Ket
			2024	2025		2026	2027	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05) - Target*	*Capaian*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN								
XLIV	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**							
AA	**2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							
1	Rasio Konektivitas Provinsi	Rasio	0,761	0,704	0.704	0,725	0,74	
2	Konektivitas Darat	Rasio	0,672	0,701	0.701	0,756	0,79	
3	Nilai Sakip	Nilai	62,5	64	Belum dirilis	65,5	67,00	
4	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Provinsi	Persentase	25,14	25,14	25.14	25,24	25,34	
5	Konektivitas Laut	Rasio	0,697	0,705	0.705	0,712	0,71	
6	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100,00	
2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
XLVI	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**							
1	Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi	Indeks	0	5,8	0	6	6,30	
XLVII	**ASPEK PELAYANAN UMUM**							
1	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	Nilai	0	48,6	-	51,5	54,30	
2	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,3	2,35	0	2,4	2,45	
3	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah (Indeks Kami)	Skor	273	229	267	259	304,00	
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,63	2,53	Belum dirilis	2,63	2,73	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			TARGET		Ket
			2024	2025		2026	2027	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05) - Target*	*Capaian*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
XLVIII	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**							
AA	**2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							
1	Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik	Predikat	Informatif	Menuju Informatif	Informatif (92.10)	Menuju Informatif	Informatif	
2	Nilai SAKIP	Skor	0	74	Belum Rilis	76	78,00	
3	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100,00	
AB	**2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							
1	Persentase data statistik sektoral daerah yang tersedia	%	60	62	100	64	66,00	
AC	**2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							
1	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	%	38,76	25	29,15	28,28	33,19	
2.17.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH								
L	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**							
1	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	2,01	2,03	13,63	2,24	2,45	
2	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	%	0,71	0,75	1,77	0,76	0,78	
3	Persentase Pertumbuhan UMKM	%	0,4	0,5	101	0,6	0,70	
4	Persentase Koperasi Aktif	%	65,23	68,5	73,8	68,6	68,70	
LI	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**							
AA	**2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							
1	Nilai Sakip	Nilai	62,5	64	-	65,5	67,00	
2	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	%	0	2	0	2,1	2,20	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			TARGET		Ket
			2024	2025		2026	2027	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05) - Target*	*Capaian*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
3	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	0,66	0	0	4,6	4,60	
4	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	0	1,7	53,93	1,8	1,90	
5	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	%	9,91	9,92	1,89	9,93	9,94	
6	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	1,93	2,5	-18,25	2,5	2,50	
7	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100,00	
2.17.0.00.0.00.01.0001 - BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH								
LIII	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**							
AA	**2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							
1	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan	Koperasi	60	30	0	30	30,00	
2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU								
LV	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perijinan Penanaman Modal	Indeks	93	93,5	93,3	94	94,50	
2	Jumlah Realisasi Investasi Provinsi Maluku	triliun rupiah	3,38	3,76	1,125	3,83	3,91	
3	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	-	29,5	0	30,37	31,25	
4	Persentase Peningkatan Realisasi Nilai investasi (PMA dan PMDN) yang masuk ke Provinsi Maluku	%	3,38	3,76	-66,71%	3,838	3,91	
LVI	**ASPEK PELAYANAN UMUM**							

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			TARGET		Ket
			2024	2025		2026	2027	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05) - Target*	*Capaian*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
1	Rata-rata lama pengurusan dokumen perijinan usaha	Hari	0	0	-	15		
LVII	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**							
AA	**2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							
1	Nilai Sakip	Nilai	70,05	71	70,2	72	73,00	
2	Jumlah Investor yang Berinvestasi	Investor	0	0	0	2	2,00	
3	Persentase Pemanfaatan Data Dan Informasi Penanaman Modal	%	-	-	100	72,5	75,00	
4	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	%	-	-	-	100	100,00	
5	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100,00	
6	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	100	100	29,92	100	29,92	
2.19.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA								
LIX	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**							
1	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	54,33	56,75	-	57,45	58,16	
2	Indeks Partisipasi Olahraga	Persentase	0,32	0,32	-	0,33	0,34	
3	Persentase Fasilitasi Olahraga	%	100	100	100	100	100,00	
LX	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**							
AA	**2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							
1	Nilai Sakip	Nilai	64,25	65,2	Belum dinilai	66,15	67,10	
2	Persentase Fasilitasi Pemuda	%	100	100	100	100	100,00	
3	Persentase Fasilitasi Pramuka	%	100	100	100	100	100,00	
4	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100,00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			TARGET		Ket
			2024	2025		2026	2027	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05) - Target*	*Capaian*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN								
LXII	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**							
1	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	58,55	58,55	30,18	59	59,50	
LXIII	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**							
AA	**2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	62,58	62,58	57,38	63	63,50	
2	Nilai Sakip	Nilai	76,35	77,5	-	78,5	79,50	
3	Persentase Perpustakaan yang dibina sesuai SNP	%	38,31	38,31	-	38,5	39,00	
4	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	%	17	17	17	17	17,00	
5	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100,00	
AB	**2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	Indeks	70,12	71,75	68,204	74,44	78,37	
2	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal	%	70,47	72,5	54,5	75,1	80,05	
3	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal	%	69,89	71,25	77,34	74	77,25	
4	Persentase perangkat daerah yang memiliki daftar arsip dinamis	%	8	11	13,9	13	16,00	
5	Jumlah Arsip yang diselamatkan dan dimusnahkan	Nilai	1	50	0	150	200,00	
3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN								
LXV	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**							

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			TARGET		Ket
			2024	2025		2026	2027	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05) - Target*	*Capaian*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
1	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)	Indeks	95,05	101,5	100.18	95,5	95,75	
2	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Indeks	104,68	103,36	112.15	103,88	104,36	
LXVI	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**							
AA	**3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							
1	Nilai SAKIP	Skor	62,01	64	-	66	68,00	
2	Luasan Kawasan Konservasi (Ha)	Ha	2.111.176,3	2.053.582,18	2677405,81	2.370.729,2	3.318.970,89	
3	Tingkat kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturaan perundang-undangan	%	80,62	90	87.5	45	47,25	
4	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	261.166,28	236.000	204.336,91*)	123.500	129.675,00	
5	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	533.116,69	511.435,9	488.896,60*)	255.846	268.638,25	
6	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	94	100	100,00	
7	Angka Konsumsi Ikan	Angka	82,8	79	41.26	40	41,48	
3.26.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA								
LXVIII	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**							
1	Kontribusi Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB Maluku	Persentase	-	0,14	-	1,68	0,16	
2	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	%	1,45	1,45	1,47	1,46	1,47	
3	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	Hari	2	2	2,56	3	3,00	
4	Jumlah Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase	22	5	3,07	5	7,00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			TARGET		Ket
			2024	2025		2026	2027	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05) - Target*	*Capaian*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
5	Jumlah Tamu Wisatawan (Nusantara dan Mancanegara)	Orang	402,843	422,985	410.697	444,134	466.341,00	
6	Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara	Hari	2	2	1,46	3	3,00	
7	Jumlah Tamu Wisatawan (Nusantara dan Mancanegara)	%	402.843	422.985	410.697	444.134	466.341,00	
LXIX	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**							
AA	**3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							
1	Nilai Sakip	Nilai	-	65	-	66	67,00	
2	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	%	5	5	1,94	5	5,00	
3	Jumlah destinasi pariwisata yang dikelola, ditata, dan dikembangkan	Destinasi	3	4	4	4	4,00	
4	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mendapat pelatihan dan sertifikasi	%	0,17	0,36	0,3	0,66	0,96	
5	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100,00	
6	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Persentase	1,92	1,9	1,86	1,92	1,94	
3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN								
LXXI	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**							
1	Pertumbuhan dan Kontribusi Sub Sektor Pertanian	%	9,56	10,05	10,05*	10,15	10,23	
2	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Pertanian	%	53,75	54,83	54,83*	55,93	56,75	
LXXII	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**							

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			TARGET		Ket
			2024	2025		2026	2027	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05) - Target*	*Capaian*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
AA	**3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							
1	Nilai Sakip	Nilai	70	70	74,1	70	70,00	
2	Produksi Komoditas Pertanian	Ton	252.871,4	295.578	325.392	301.253	307.128,00	
3	Cakupan Bina Kelompok Tani	Angka	54,83	56,1	56	58,2	62,46	
4	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	9,56	10,05	10	10,15	10,23	
5	Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks	102,34	102,35	98,31	102,45	102,55	
6	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Angka	147.895	117.995	109.820	120.355	122.761,00	
7	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100,00	
8	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	%	50	63	63	75	89,00	
9	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Angka	8.702	3.848	4.120	3.925	4.003,00	
10	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Angka	5	6	6	7	8,00	
11	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Ha	32.964,43	32.964,43	32.964	32.964,43	32.964,43	
12	Peningkatan Produksi Hortikultura	Angka	16.512	16.337	12.610	16.675	17.004,00	
13	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	%	85	86	86	87	89,00	
14	Peningkatan Produksi Perkebunan	Angka	142.810	157.398	-	160.298	163.360,00	
3.27.0.00.0.00.01.0002 - BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BPTPHP) PROVINSI MALUKU								

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			TARGET		Ket
			2024	2025		2026	2027	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05) - Target*	*Capaian*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
LXXIV	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**							
AA	**3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							
1	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	%	68,1	71,5	93	75,5	77,50	
3.28.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEHUTANAN								
LXXVI	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**							
AA	**3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							
1	Jumlah kelompok usaha masyarakat di dalam dan sekitar hutan yang terfasilitasi	Kelompok	2	28	28	29	29,00	
2	Nilai Sakip	Nilai	80	85	67,15	85	85,00	
3	Terkelolanya DAS Lintas Kabupaten/Kota	Kegiatan	-	-	-	4	4,00	
4	Jumlah Kelompok Tani yang terfasilitasi (Kel)	Kelompok	2	0	8	15	15,00	
5	Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (Kel)	Kelompok	18	28	28	14	14,00	
6	Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi	Ha	30	100	100	100	100,00	
7	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100,00	
8	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (%)	%	0,55	0,55	0,36	0,57	0,57	
3.29.0.00.0.00.01.0000 - DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL								
LXXVIII	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**							
1	Konsumsi Listrik per Kapita	Kwh/Kapita	-	-	-	395,75	441,50	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			TARGET		Ket
			2024	2025		2026	2027	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05) - Target*	*Capaian*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
2	Intensitas Energi Primer	SBM/Milyar Rupiah	-	-	-	223.597,25	213.870,50	
LXXIX	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**							
1	Rasio elektrifikasi	%	99,67	99,67	99.67	99,68	99,70	
2	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	23,84	27,3		32,58	34,30	
LXXX	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**							
AA	**3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**							
1	Nilai SAKIP	Skor	80	80	80	80	80,00	
2	Persentase Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis tertentu, dan Batuan, Izin Pertambangan Rakyat dan Surat Izin Pertambangan Buatan	%	80	70	15	75	80,00	
3	Porsi EBT dalam Bauran Energi	%	23,84	29,59	-	31,96	34,33	
4	Jumlah Rumah Tangga sasaran (RTS)	Unit	41	10	10	50	55,00	
5	Presentase Pemanfaatan Air Tanah Berkelanjutan	%	0	5	0.83	50	65,00	
6	Luas WPR yang Diusulkan Pemerintah Daerah	Meter	-	-	-	10	1,00	
7	Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota	Meter	-	-	-	381,00	1.739,00	
8	Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik yang bersumber dari Pembangkit EBT	Rumah Tangga	46	-	25	140	150,00	
9	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100,00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			TARGET		Ket
			2024	2025		2026	2027	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05) - Target*	*Capaian*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
10	Jumlah Volume Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota	Rp. Juta Per Tahun	-	-	-	157	749,00	
3.31.3.30.0.00.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN								
LXXXII	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**							
1	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	%	6,31	6	4.8	6	7,00	
2	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase	6,53	7	13	7	7,00	
LXXXIII	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**							
1	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	%	-	3.08-3.09		3.15-3.17		
LXXXIV	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**							
AA	**3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							
1	Persentase Kepatuhan Berusaha (%)	%	0	90	160.5	91	92,00	
2	Jumlah Izin Usaha Perdagangan Terdaftar yang Difasilitasi		4	2-4	-	2-4	2-4	
3	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan	%	0	50	50	60	70,00	
4	Jumlah Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Unit	1	1	1	1	1,00	
5	Jumlah sampel yang diuji	Sampel	100	100	141	105	110,00	
6	Jumlah Penanganan Pengaduan Konsumen (Kasus)	Kasus	5	5	5	5	5,00	
7	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor	Pelaku Usaha	6	6	10	6	8,00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			TARGET		Ket
			2024	2025		2026	2027	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05) - Target*	*Capaian*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
8	Jumlah bahan berbahaya yang dipantau peredarannya	%	4	4	4	4	4,00	
9	Persentase stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	2,78	3.5-4	1.51	3.5-4	3.5-4	
AB	**3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							
1	Nilai Sakip	Nilai	70	70	70	70	70,00	
2	Rata-rata nilai investasi IKM (%)	%	0	7	7	7	7,00	
3	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri (%)	%	0	2,5	11.89%	3	3,50	
4	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100,00	
4.01.0.00.0.00.00.0000 - SEKRETARIAT DAERAH								
LXXXVI	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**							
AA	**4.01 - SEKRETARIAT DAERAH**							
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Skor	65,11	67,5	-	70	72,50	
2	Nilai Sakip	Nilai	100	100	-	100	100,00	
3	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	100	100	-	100	100,00	
4	Indeks Reformasi Hukum	%	100	100	-	100	100,00	
5	Nilai LPPD	%	100	100	-	100	100,00	
6	Indeks Kualitas Kebijakan	%	100	100	-	100	100,00	
7	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Nilai	100	100	-	100	100,00	
8	Indeks Kematangan Organisasi	Nilai	100	100	-	100	100,00	
9	Nilai SPM	Nilai	100	100	-	100	100,00	
10	Persentase Kebijakan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Baik	%	100	100	-	100	100,00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			TARGET		Ket
			2024	2025		2026	2027	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05) - Target*	*Capaian*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
11	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100,00	
4.01.0.00.0.00.00.0001 - BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH								
LXXXVIII	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**							
AA	**4.01 - SEKRETARIAT DAERAH**							
1	Persentase Fasilitasi Kerjasama Daerah	%	100	100	100	100	100,00	
2	Persentase Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	%	100	100	100	100	100,00	
4.01.0.00.0.00.00.0002 - BIRO HUKUM								
XC	**ASPEK PELAYANAN UMUM**							
1	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM (IUP 45)	%	-	-	0	62,5	65,00	
XCI	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**							
AA	**4.01 - SEKRETARIAT DAERAH**							
1	Persentase Bantuan Hukum yang tertangani	%	100	100	100	100	100,00	
2	Persentase Produk Hukum yang di fasilitasi	%	100	100	100	100	100,00	
4.01.0.00.0.00.00.0003 - BIRO ORGANISASI								
XCIII	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**							
AA	**4.01 - SEKRETARIAT DAERAH**							
1	Persentase Penyusunan Kebijakan Daerah Bidang Organisasi yang ditindaklanjuti	Persentase	100	100	100	100	100,00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			TARGET		Ket
			2024	2025		2026	2027	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05) - Target*	*Capaian*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
4.01.0.00.0.00.00.0004 - BIRO KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
XCV	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**							
AA	**4.01 - SEKRETARIAT DAERAH**							
1	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Difasilitasi	%	100	100	100	100	100,00	
4.01.0.00.0.00.00.0007 - BIRO PEREKONOMIAN DAERAH								
XCVII	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**							
1	Return on Asset (ROA) BUMD Perangkat Daerah (IUP 45)	%	-	2,49	-	2,66	2,83	
4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD								
XCIX	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**							
AA	**4.02 - SEKRETARIAT DPRD**							
1	Nilai Sakip	Nilai	66	67	N/A	68	69,00	
2	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100,00	
3	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase	100	100	100	100	100,00	
4	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Ketetapan	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
5	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Persentase	100	100	100	100	100,00	
5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								
CI	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**							
1	Indeks Inovasi Daerah	Angka	46,71	47,15	100	50	51,25	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			TARGET		Ket
			2024	2025		2026	2027	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05) - Target*	*Capaian*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
2	Nilai Transaksi Saham Per kapita Per Provinsi (Rupiah)	Nilai	-	822.214,73	-	1.007.016,22	1.191.817,71	
3	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	(%)	-	-	-	25,02	25,84	
4	Total Kredit/PDRB	(%)	-	-	-	30,45	31,61	
5	Aset Dana Pensiun/PDRB	(%)	-	-	-	0,29	0,31	
CII	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**							
AA	**5.01 - PERENCANAAN**							
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	84,69	84,9	-	85,55	86,14	
2	Konsistensi Dokumen Perencanaan	%	100	100	-	100	100,00	
3	Nilai Sakip	Nilai	80	81	-	82	83,00	
4	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persentase	100	100	100	100	100,00	
5	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persentase	-	-	100	100	100,00	
6	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase	-	-	-	100	100,00	
7	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase	-	-	-	100	100,00	
8	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	-	100	100,00	
9	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase	100	100	-	100	100,00	
AB	**5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			TARGET		Ket
			2024	2025		2026	2027	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05) - Target*	*Capaian*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
1	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	Persentase	0	100	-	100	100,00	
5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH								
CIV	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**							
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	83,7	B (Perlu Perbaikan)	C (cukup baik)	B (Perlu Perbaikan)	B (Perlu Perbaikan)	
CV	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**							
AA	**5.02 - KEUANGAN**							
1	Nilai Sakip	Nilai	-	70	-	70	70,00	
2	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	17,48	18	30,82%	18	18,00	
3	Persentase Penurunan SILPA	%	5	5	5%	5	5,00	
4	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100,00	
5	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	93,9	93,9	87,82	93,9	93,90	
6	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100,00	
7	Persentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	%	0,73	0,78	20,84%	0,78	0,78	
8	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	7,2	7,2	52,30%	7,2	7,20	
5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH								
CVII	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**							
1	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	(%)	1,44	1,51	-	1,55	1,60	
CVIII	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**							

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			TARGET		Ket
			2024	2025		2026	2027	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05) - Target*	*Capaian*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
AA	**5.02 - KEUANGAN**							
1	Efektifitas pendapatan daerah (persentase)	%	94,18	95	88.04	95	95,00	
2	Nilai Sakip	Nilai	60,1	62	62	64	66,00	
3	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	E	B	E	B	B	
4	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100,00	
5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH								
CX	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**							
AA	**5.03 - KEPEGAWAIAN**							
1	Indeks Sistem Merit	Poin	251,5	251,5	-	280	285,00	
2	Nilai Sakip	Nilai	71,1	75	-	80	82,00	
3	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100,00	
4	Nilai Aspek Pengadaan, Perencanaan Kebutuhan, Sistem Informasi	Nilai	87	87	87	100	102,00	
5	Nilai Aspek Manajemen Kinerja, Pengajian, Penghragaan dan Disiplin, dan Perlindungan dan Pelayanan	Nilai	109,5	109,5	109,5	120	122,00	
6	Nilai Aspek Promosi, Mutasi dan Pengembangan Karier	Nilai	55	55	55	60	61,00	
5.04.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA								
CXII	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**							
AA	**5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							
1	Nilai Sakip	Nilai	66,3	66,8	(Belum Rilis)	68	68,50	
2	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100,00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			TARGET		Ket
			2024	2025		2026	2027	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05) - Target*	*Capaian*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
5.06.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH								
CXIV	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**							
AA	**5.06 - PENGELOLAAN PERBATASAN**							
1	Nilai Sakip	Nilai	60	62	-	64	66,00	
2	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100,00	
3	Persentase infrastruktur terbangun di kawasan perbatasan	Persentase	62,38	62,73	100	69,5	72,00	
5.07.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGHUBUNG								
CXVI	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**							
AA	**5.07 - PENGELOLAAN PENGHUBUNG**							
1	Nilai Sakip	Nilai	65,85	66	0	67	68,00	
2	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	0	100	100,00	
6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT								
CXVIII	**ASPEK PELAYANAN UMUM**							
1	Indeks Integritas Nasional	Persentase	67,43	67,43	66,56	68,12	68,81	
CXIX	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**							
AA	**6.01 - INSPEKTORAT DAERAH**							
1	Indeks Maturitas SPIP	Level	3	3	2	3	3,00	
2	Nilai Kapabilitas APIP	Level	3	3	2	3	3,00	
3	Nilai Sakip	Nilai	70	70	72,15	70	70,00	
8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			TARGET		Ket
			2024	2025		2026	2027	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05) - Target*	*Capaian*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
CXXI	**ASPEK PELAYANAN UMUM**							
1	Indeks Demokrasi Provinsi	%	-	70.5-76.69	-	70.55-77.19	70.6-77.69	
CXXII	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**							
AA	**8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							
1	Nilai Sakip	Nilai	62	64	N/A	65	66,00	
2	Persentase Kebijakan Penguatan Ideologi Pancasila	%	100	100	100	100	100,00	
3	Persentase Kebijakan Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika	%	100	100	100	100	100,00	
4	Persentase Fasilitasi Pendidikan Politik oleh Pemerintah Daerah dan Partai Politik	%	100	100	91	100	100,00	
5	Persentase Fasilitasi Pendaftaran Ormas	%	100	100	100	100	100,00	
6	Persentase Konflik Sosial yang Berhasil Difasilitasi.	%	100	100	100	100	100,00	
7	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100,00	

Berdasarkan data sebagaimana Tabel 2.51, hasil evaluasi terhadap Indikator Kinerja Daerah (IKD) tahun 2025. Pemerintah Provinsi memiliki 429 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dari keseluruhan indikator tersebut, sebanyak 292 indikator telah memiliki data target dan capaian Tahun 2025 sehingga dapat dilakukan evaluasi kinerjanya.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 194 indikator (66,44%) telah mencapai atau melampaui target Tahun 2025, sedangkan 98 indikator (33,56%) belum mencapai target yang telah ditetapkan. Selain itu, terdapat 137 indikator yang belum dapat dievaluasi karena data target maupun capaian Tahun 2025 belum tersedia atau masih dalam proses pemutakhiran.

Secara umum, capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja daerah telah menunjukkan kinerja yang positif. Namun demikian, masih terdapat sejumlah indikator yang memerlukan perhatian lebih agar target pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal pada tahun-tahun berikutnya.

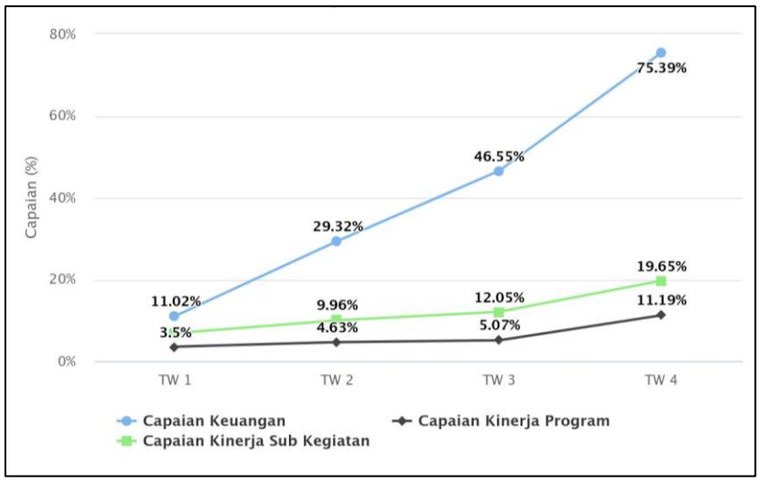
Terhadap indikator yang belum mencapai target, tindak lanjut yang akan dilakukan meliputi:

a. melakukan evaluasi terhadap faktor-faktor penyebab belum tercapainya target pada masing-masing perangkat daerah;
b. menyusun rencana aksi perbaikan yang lebih terarah sesuai hasil evaluasi;
c. meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator;
d. melakukan optimalisasi alokasi sumber daya, baik anggaran, sumber daya manusia maupun sarana pendukung;
e. memperkuat monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program sehingga kendala dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti; serta
f. melakukan pemutakhiran data dan penguatan kualitas pelaporan kinerja agar proses pengukuran IKD menjadi lebih akurat dan akuntabe

2.10. Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Sampai dengan Tahun 2025

Evaluasi pelaksanaan RKPD hingga tahun 2025 menunjukkan dinamika capaian pembangunan daerah yang mencerminkan keberhasilan sekaligus tantangan dalam mewujudkan prioritas pembangunan. Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan telah berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi daerah, serta perbaikan indikator kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian lebih untuk memastikan konsistensi pencapaian target RPJMD dan kesinambungan pembangunan menuju tahun 2027.

Grafik 2. 6
Capaian Kinerja Program,Keuangan dan Sub Kegiatan Tahun 2025



Sumber : SIPD

Berdasarkan hasil pemantauan pelaksanaan program hingga triwulan IV tahun 2025, terlihat adanya perbedaan signifikan antara capaian keuangan dan capaian kinerja program maupun sub kegiatan. Grafik menunjukkan bahwa realisasi keuangan meningkat tajam dari 11,02% pada triwulan I menjadi 75,39% pada triwulan IV, menandakan percepatan penyerapan anggaran menjelang akhir tahun. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan secara administratif dan pengelolaan anggaran yang semakin baik.

Sementara itu, capaian kinerja sub kegiatan hanya naik dari 3,5% menjadi 19,65%, dan capaian kinerja program dari 3,5% menjadi 11,19%. Kenaikan yang relatif lambat ini menunjukkan bahwa meskipun anggaran telah terserap, output dan outcome pembangunan belum sepenuhnya terealisasi sesuai target. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara realisasi keuangan dan kinerja fisik, yang dapat disebabkan oleh keterlambatan pelaksanaan kegiatan, kendala teknis di lapangan, atau belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi.

2.11. Capaian SPM

2.11.1. Capaian SPM Provinsi Maluku

Dalam rangka evaluasi pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar, Pemerintah Daerah Maluku telah melaksanakan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial.

Tabel capaian SPM berikut menyajikan hasil pengukuran tingkat pemenuhan indikator pelayanan dasar pada masing-masing urusan, yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan akses, mutu, dan pemerataan pelayanan. Data capaian ini diharapkan menjadi dasar evaluasi, perencanaan, serta perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Tabel 2.51
Capaian SPM Provinsi Maluku 2022 – 2025

No	Sektor	2022	2023	2024	2025
1	Pendidikan	71,51	100,00	100,00	100,00
2	Kesehatan	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Pekerjaan Umum	100,00	100,00	100,00	87,50
4	Perumahan Rakyat	91,33	100,00	95,00	100,00
5	Trantibumlinmas	50,94	93,38	97,25	100,00
6	Sosial	99,19	97,01	95,09	100,00
Rata-rata Provinsi Maluku		**85,50**	**98,40**	**97,89**	**97,92**

Capaian SPM Provinsi Maluku tahun 2022–2025 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2022, rata-rata capaian masih berada di angka 85,50, namun melalui berbagai upaya perbaikan kebijakan, penguatan koordinasi, serta peningkatan kapasitas pelayanan, capaian melonjak menjadi 98,40 pada tahun 2023. Selanjutnya, capaian tetap konsisten tinggi di atas 97% pada tahun 2024 dan 2025, menandakan bahwa sebagian besar indikator pelayanan dasar telah terpenuhi secara berkelanjutan.

2.11.2. Capaian SPM Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan pemerintahan daerah menuntut adanya kepastian layanan dasar yang wajib dipenuhi oleh setiap kabupaten/kota sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi instrumen penting untuk memastikan masyarakat memperoleh layanan dasar secara merata, berkualitas, dan berkelanjutan.

Capaian SPM tidak hanya mencerminkan kinerja teknis perangkat daerah, tetapi juga menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjamin hak-hak dasar warga, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga layanan sosial dan infrastruktur dasar. Melalui pemantauan capaian SPM, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi keberhasilan, tantangan, serta langkah perbaikan yang diperlukan

untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tabel 2. 52
Capaian SPM Kabupaten/Kota
Tahun 2022-2025

No	Sektor	Rata-rata Kab/Kota			
		2022	2023	2024	2025
1	Maluku Tengah	85,72	90,60	96,72	93,32
2	Maluku Tenggara	82,85	91,02	92,76	86,10
3	Kepulauan Tanimbar	43,94	96,63	86,51	98,05
4	Buru	90,64	99,85	98,51	98,90
5	Seram Bagian Timur	39,62	75,60	68,99	96,82
6	Seram Bagian Barat	64,23	94,97	96,34	97,93
7	Kepulauan Aru	85,29	82,15	88,19	65,17
8	Maluku Barat Daya	58,56	76,23	96,45	96,09
9	Buru Selatan	53,65	99,80	95,70	88,62
10	Kota Ambon	63,68	99,68	96,19	99,12
11	Kota Tual	75,77	93,59	68,76	94,02
Rata-rata Provinsi Maluku		**85,50**	**98,40**	**97,89**	**97,92**

Berdasarkan data rata-rata capaian kabupaten/kota di Provinsi Maluku dari tahun 2022 hingga 2025, terlihat adanya tren peningkatan yang cukup signifikan pada awal periode, diikuti dengan stabilisasi pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2022, rata-rata capaian provinsi berada di angka 85,50, kemudian melonjak tajam menjadi 98,40 pada tahun 2023. Namun, setelah mencapai puncak tersebut, capaian mengalami sedikit penurunan di tahun 2024 menjadi 97,89, dan relatif stabil di tahun 2025 dengan nilai 97,92.

Kecenderungan ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan layanan dasar di kabupaten/kota berhasil meningkatkan capaian secara drastis pada tahun 2023, yang kemungkinan dipengaruhi oleh penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas daerah, atau intervensi program prioritas. Meski terjadi sedikit penurunan setelahnya, capaian tetap berada pada level tinggi dan konsisten mendekati angka 98, yang menandakan adanya keberlanjutan komitmen daerah dalam menjaga kualitas pelayanan.

Secara umum, data ini mencerminkan bahwa Provinsi Maluku telah berhasil mendorong kabupaten/kota untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal dengan baik, dan capaian yang relatif stabil di atas 97 pada dua tahun terakhir menunjukkan adanya konsolidasi kinerja yang patut dipertahankan.

2.12. Pogram (*Outcome)* dan Keuangan Tahun 2025

Tabel 2. 53

Ketercapaian Kinerja Program *(Outcome)* dan Keuangan

No.	Uraian Bidang Urusan	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan		Predikat Kinerja	
			Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)	Keuangan	Program
1	3	4	5	6	7	8	9	10
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.153.817.718.222,00	0	100	740.683.836.165,00	64,19	Rendah	
2	DINAS KESEHATAN	321.364.154.730,00	100	71,63	239.694.082.955,00	74,59	Sedang	Sangat Tinggi
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	195.946.464.377,00	53,08	100	143.981.639.480,00	73,48	Sedang	Rendah
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	26.709.037.386,00	0	60,02	24.900.644.785,00	93,23	Sangat Tinggi	
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	13.022.008.296,00	0	35,76	13.158.426.040,00	101,05	Sangat Tinggi	
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.434.981.856,00	84,75	29,91	5.026.225.586,00	92,48	Sangat Tinggi	Tinggi
7	DINAS SOSIAL	24.954.612.956,00	73,81	52,39	23.745.408.904,00	95,15	Sangat Tinggi	Sedang
8	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	14.060.761.965,00	0	100	12.894.174.381,00	91,7	Sangat Tinggi	
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.630.359.837,00	0	0	4.110.574.405,00	73,01	Sedang	
10	DINAS KETAHANAN PANGAN	8.802.666.233,00	16,67	100	8.453.306.307,00	96,03	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6.009.324.780,00	92,32	73,23	5.796.394.224,00	96,46	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.064.640.269,00	59,37	97	3.968.347.842,00	97,63	Sangat Tinggi	Rendah
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7.865.938.575,00	0	36,68	7.322.632.363,00	93,09	Sangat Tinggi	
14	DINAS PERHUBUNGAN	9.245.353.868,00	42,78	32,94	8.888.549.486,00	96,14	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	12.861.513.778,00	0	36,55	11.440.793.004,00	88,95	Tinggi	
16	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	12.755.802.209,00	25	87,29	11.443.292.123,00	89,71	Tinggi	Sangat Rendah
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	7.447.914.991,00	100	97,23	6.771.164.012,00	90,91	Tinggi	Sangat Tinggi
18	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	19.717.201.737,00	0	0,26	457.359.005,00	2,32	Sangat Rendah	

No.	Uraian Bidang Urusan	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan		Predikat Kinerja	
			Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)	Keuangan	Program
1	3	4	5	6	7	8	9	10
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	8.542.870.519,00	0	59,02	8.175.731.684,00	95,7	Sangat Tinggi	
20	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	65.551.805.159,00	0	33,26	58.442.756.657,00	89,16	Tinggi	
21	DINAS PARIWISATA	10.751.770.006,00	71,41	79,25	10.033.734.756,00	93,32	Sangat Tinggi	Sedang
22	DINAS PERTANIAN	64.463.211.453,00	0	48,93	55.696.180.755,00	86,4	Tinggi	
23	DINAS KEHUTANAN	55.149.103.311,00	44,5	75,97	51.169.206.374,00	92,78	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
24	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	12.140.254.181,00	0	72	10.932.577.756,00	90,05	Tinggi	
25	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	19.148.359.102,00	61,4	44,24	16.569.066.481,00	86,53	Tinggi	Rendah
26	SEKRETARIAT DAERAH	255.076.251.145,00	100	39,87	208.982.797.652,00	81,93	Tinggi	Sangat Tinggi
27	SEKRETARIAT DPRD	148.277.011.118,00	58,83	93,47	118.098.677.707,00	79,65	Tinggi	Sangat Randah
28	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	18.638.044.296,00	100	83,47	14.814.834.773,00	79,49	Tinggi	Sangat Tinggi
29	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	258.388.748.172,00	71,73	100	254.861.838.169,00	98,64	Sangat Tinggi	Sedang
30	BADAN PENDAPATAN DAERAH	32.157.707.993,00	15,63	53,31	30.562.886.169,00	95,04	Sangat Tinggi	Sangat Randah
31	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	8.302.959.007,00	44,91	45,47	7.898.124.591,00	95,12	Sangat Tinggi	Sangat Randah
32	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	14.329.102.268,00	0	59,67	12.918.530.781,00	90,16	Sangat Tinggi	
33	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	3.749.117.419,00	0	28	8.068.738.404,00	215,22	Sangat Tinggi	
34	BADAN PENGHUBUNG	8.606.105.991,00	100	55,94	7.814.236.877,00	90,8	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
35	INSPEKTORAT	15.840.332.941,00	100	100	15.035.156.748,00	94,92	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
36	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	25.875.066.166,00	0	100	24.824.203.381,00	95,94	Sangat Tinggi	
		2.874.698.276.310,00	**11,9**	**19,18**	**2.188.210.933.565,00**	**76,12**	**Tinggi**	**Sangat Rendah**

Sumber : SIPD, diolah

Evaluasi capaian kinerja OPD sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara serapan anggaran dan pencapaian program. Beberapa OPD berhasil merealisasikan anggaran dengan sangat tinggi, namun capaian programnya masih rendah. Seperti Dinas Ketahanan Pangan, yang mencatat realisasi keuangan sebesar 96,03% dengan predikat *sangat tinggi*, tetapi capaian program hanya 16,67% dengan predikat *sangat rendah*. Kondisi serupa terlihat pada Dinas Sosial dengan realisasi keuangan 95,15% (*sangat tinggi*) namun capaian program hanya 52,39% (*sedang*), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan serapan 73,48% (*sedang*) tetapi capaian program 53,08% (*rendah*). Fenomena ini menunjukkan bahwa tingginya serapan anggaran belum selalu berbanding lurus dengan keberhasilan pelaksanaan program.

Sebaliknya, terdapat OPD yang menunjukkan capaian program sangat tinggi meskipun realisasi keuangan relatif lebih rendah. Sekretariat Daerah dan Bappeda menjadi contoh nyata, di mana capaian program mencapai 100% (*sangat tinggi*) sementara realisasi keuangan masing-masing 81,93% dan 79,49% (*tinggi*). Hal ini menandakan adanya efisiensi penggunaan anggaran, di mana program dapat terlaksana optimal tanpa harus menyerap anggaran secara penuh. Selain itu, Inspektorat dan Badan Penghubung menunjukkan keseimbangan ideal, dengan capaian program 100% (*sangat tinggi*) dan realisasi keuangan di atas 90% (*sangat tinggi*), sehingga keduanya dapat dijadikan model praktik baik dalam pengelolaan anggaran berbasis hasil.

Secara keseluruhan, evaluasi ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh tingginya serapan anggaran, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaan program. OPD dengan serapan tinggi namun capaian rendah perlu memperkuat perencanaan dan monitoring agar anggaran benar-benar menghasilkan output dan outcome yang diharapkan. Sementara itu, OPD yang mampu menjaga efisiensi dan efektivitas perlu dijadikan rujukan dalam penyusunan RKPD 2027.

2.13. Indikator Kinerja Progran (*Outcome)*

Tabel 2.54
Capaian Indikatr Kinerja Program (*Outcome)* Tahun 2025

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Realisasi Kinerja 2025	Tingkat Capaian Kinerja 2025 (%)	Pertumbuhan	Predikat Kinerja	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2026	2027	
							TARGET	TARGET	
-1	*-2*	*-3*	*-4*				*-5*	*-7*	*-15*
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100	100	100,00	0,00	ST	100	100	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase anak usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS) (%)	77,7	78,34	100,82	0,82	ST	85	87	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Persentase anak usia 4-18 Tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS) (%)	57,37	65,9	114,87	14,87	ST	66	67	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Skor Kemampuan Literasi SLB (%)	54,43	55,1	101,23	1,23	ST	56,16	57,03	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Skor Kemampuan Literasi SMA (%)	60,52	61,34	101,35	1,35	ST	61,94	62,54	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Skor Kemampuan Literasi SMK (%)	58,53	59,84	102,24	2,24	ST	61,14	62,44	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Skor Kemampuan Numerasi SLB (%)	45,89	46,34	100,98	0,98	ST	46,79	47,24	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Realisasi Kinerja 2025	Tingkat Capaian Kinerja 2025 (%)	Pertumbuhan	Predikat Kinerja	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2026	2027	
							TARGET	TARGET	
-1	*-2*	*-3*	*-4*				*-5*	*-7*	*-15*
	Skor Kemampuan Numerasi SMA (%)	52,45	54,25	103,43	3,43	ST	55,85	57,45	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Skor Kemampuan Numerasi SMK (%)	51,08	53,28	104,31	4,31	ST	55,48	57,68	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Peningkatan Mutu dan Kualitas Pendidikan Pertanian									3.27.0.00.0.00.01.0006 - UPTD SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM									
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal (%)	-	45				35	36	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			100						
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidikan (%)	-					60	75	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Persentase pemerataan guru (%)	-					100	100	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN									
Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Institusi Pendidikan	Persentase layanan dan tidak lanjut pemberian perizinan pendidikan (%)	-					10	11	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA									
Terlestarikannya bahasa dan Sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra Daerah (%)	-	100				3	7	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			29,4						

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Realisasi Kinerja 2025	Tingkat Capaian Kinerja 2025 (%)	Pertumbuhan	Predikat Kinerja	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2026	2027	
							TARGET	TARGET	
-1	*-2*	*-3*	*-4*				*-5*	*-7*	*-15*
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100	12,62	12,62	-87,38	SR	100	100	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			80						
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Balita/1000 Kelahiran Hidup (Orang)	19,83	4	20,17	-79,83	SR	28	26,5	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	16,85	90	534,12	434,12		11,95	11,28	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Cakupan penerimaan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	75	10	13,33	-86,67	SR	85	90	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Jumlah Kabupaten/Kota Eliminasi Malaria (Kabupaten/Kota)	3		0,00	-100,00		6	8	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	ODHIV Baru yang ditemukan yang mendapat Pengobatan ARV (%)	58	45	77,59	-22,41	T	90	90	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase hipertensi dalam pengendalian (Persentase)	10		0,00	-100,00	SR	15	20	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			81						
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (%)	40		0,00	-100,00	SR	50	55	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase)	80	55	68,75	-31,25	S	82	84	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN									

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Realisasi Kinerja 2025	Tingkat Capaian Kinerja 2025 (%)	Pertumbuhan	Predikat Kinerja	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2026	2027	
							TARGET	TARGET	
-1	*-2*	*-3*	*-4*				*-5*	*-7*	*-15*
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100						
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)									
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (%)	26,64	37,11	139,30	39,30	ST	39	41	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase peningkatan perlindungan kawasan dari abrasi dan banjir rob (%)	8,32	21,14	254,09	154,09	ST	22,2	23	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			16,01						1.03.0.00.0.00.01.0001 - LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PERALATAN
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM									
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kab/kota (%)	5	16	320,00	220,00	ST	19	22	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL									
Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/TPST regional (%)	-	2				22	24	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH									

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Realisasi Kinerja 2025	Tingkat Capaian Kinerja 2025 (%)	Pertumbuhan	Predikat Kinerja	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2026	2027	
							TARGET	TARGET	
-1	*-2*	*-3*	*-4*				*-5*	*-7*	*-15*
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Aman (%)	-					9,12	9,33	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			6						
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik (%)	5	-				15	20	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi baik (%)	-					20	23	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			5						
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik (%)	16		0,00	-100,00	SR	18	20	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase penataan bangunan dan lingkungan (%)	17	2	11,76	-88,24	SR	19	20	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN									
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI									
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli (%)	11		0,00	-100,00	SR	25	30	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100	16	16,00	-84,00	SR	100	100	1.04.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Realisasi Kinerja 2025	Tingkat Capaian Kinerja 2025 (%)	Pertumbuhan	Predikat Kinerja	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2026	2027	
							TARGET	TARGET	
-1	*-2*	*-3*	*-4*				*-5*	*-7*	*-15*
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100		0,00	-100,00	SR	100	100	1.04.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni (Persentase)	0					0	0	1.04.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani (Persentase)	24,64	17	68,99	-31,01	S	28,16	31,97	1.04.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)									
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			54,63						
	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100		0,00	-100,00	SR	100	100	1.05.1.06.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									
Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas (Persentase)	100	17	17,00	-83,00	SR	100	100	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Meningkatnya Perlindungan Kepada Masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	9,09		0,00	-100,00	SR	9,09	18,8	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Realisasi Kinerja 2025	Tingkat Capaian Kinerja 2025 (%)	Pertumbuhan	Predikat Kinerja	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2026	2027	
							TARGET	TARGET	
-1	*-2*	*-3*	*-4*				*-5*	*-7*	*-15*
	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya ((%))	-	-	-	-	-	70,75	71,5	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			33						
Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana	Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana (%)	100		0,00	-100,00	SR	100	100	1.05.1.06.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN									
Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (%)	100		0,00	-100,00	SR	100	100	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			100						
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100	100	100,00	0,00	SR	100	100	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
			0						1.06.0.00.0.00.01.0001 - PANTI SOSIAL BINA REMAJA HITI-HITI-HALA-HALA
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL									
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial (%)	60	24,95	41,58	-58,42	SR	63	64	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Realisasi Kinerja 2025	Tingkat Capaian Kinerja 2025 (%)	Pertumbuhan	Predikat Kinerja	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2026	2027	
							TARGET	TARGET	
-1	*-2*	*-3*	*-4*				*-5*	*-7*	*-15*
	Persentase Pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial (%)	80		0,00	-100,00	SR	82	83	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Taraf Kesejahteraannya (%)	70	100	142,86	42,86	ST	72	73	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%)	70		0,00	-100,00	SR	72	73	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN									
Meningkatnya layanan penanganan warga negeri migran korban tindak kekerasan	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan (%)	100	100	100,00	0,00	ST	100	100	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL									
Meningkatnya rehabiltasi sosial	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100	100	100,00	0,00	ST	100	100	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100	100	100,00	0,00	ST	100	100	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	100	9,09	9,09	-90,91	SR	100	100	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Realisasi Kinerja 2025	Tingkat Capaian Kinerja 2025 (%)	Pertumbuhan	Predikat Kinerja	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2026	2027	
							TARGET	TARGET	
-1	*-2*	*-3*	*-4*				*-5*	*-7*	*-15*
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100	70	70,00	-30,00	S	100	100	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100		0,00	-100,00	SR	100	100	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			100						
Meningkatnya Perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan (%)	70		0,00	-100,00	SR	72	73	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat sesuai Standar (%)	80	100	125,00	25,00	ST	82	83	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (%)	90		0,00	-100,00	SR	90,2	90,3	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (%)	80		0,00	-100,00	SR	82	83	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA			100						

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Realisasi Kinerja 2025	Tingkat Capaian Kinerja 2025 (%)	Pertumbuhan	Predikat Kinerja	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2026	2027	
							TARGET	TARGET	
-1	*-2*	*-3*	*-4*				*-5*	*-7*	*-15*
Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial, dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (%)	100		0,00	-100,00	SR	100	100	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (%)	70	61	87,14	-12,86	T	72	73	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya (%)	80	81	101,25	1,25	ST	82	83	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			71						
Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola dengan Baik (%)	80	71	88,75	-11,25	T	82	83	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100						
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100		0,00	-100,00	SR	100	100	2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			100						
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	-	100				20	20	2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			100						

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Realisasi Kinerja 2025	Tingkat Capaian Kinerja 2025 (%)	Pertumbuhan	Predikat Kinerja	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2026	2027	
							TARGET	TARGET	
-1	*-2*	*-3*	*-4*				*-5*	*-7*	*-15*
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	-	100				0,18	0,21	2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			100						
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	8,9		0,00	-100,00	SR	0,48	0,51	2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			71						
Meningkatnya Pekerja Indonesia terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	-	81				250	250	2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.06 - PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN			90,1						
Terlindunginya hak-hak pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya (Orang)	-	81				3.075	3.075	2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100						
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100	71	71,00	-29,00	S	100	100	2.08.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			81						
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif (ARG) (%)	6,24		0,00	-100,00	SR	6,89	7,42	2.08.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	55,72	81	145,37	45,37	ST	58,8	59,31	2.08.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Realisasi Kinerja 2025	Tingkat Capaian Kinerja 2025 (%)	Pertumbuhan	Predikat Kinerja	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2026	2027	
							TARGET	TARGET	
-1	*-2*	*-3*	*-4*				*-5*	*-7*	*-15*
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN									
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komperhensif (%)	100		0,00	-100,00	SR	100	100	2.08.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			100						
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar (Nilai)	-					0,51	0,75	2.08.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			20						
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan (Nilai)	12,9		0,00	-100,00	SR	22,58	24,08	2.08.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			-						
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Nilai)	65,43		0,00	-100,00	SR	65,92	66,17	2.08.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			-						
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Nilai)	87,13		0,00	-100,00	SR	90,01	91,49	2.08.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	-				100	100	2.08.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Realisasi Kinerja 2025	Tingkat Capaian Kinerja 2025 (%)	Pertumbuhan	Predikat Kinerja	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2026	2027	
							TARGET	TARGET	
-1	*-2*	*-3*	*-4*				*-5*	*-7*	*-15*
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			-						
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100		0,00	-100,00	SR	100	100	2.09.2.09.0.00.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN									
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Jumlah Cadangan Pangan (ton) (Ton)	12,46	100	802,57	702,57	SR	48	50	2.09.2.09.0.00.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT									
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Skor)	76,9	6,3	8,19	-91,81	SR	78	79	2.09.2.09.0.00.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			56,26						
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan pangan (%)	22,03		0,00	-100,00	SR	20,1	18,44	2.09.2.09.0.00.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			100						
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan (%)	96,77		0,00	-100,00	SR	88	90	2.09.2.09.0.00.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN									

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Realisasi Kinerja 2025	Tingkat Capaian Kinerja 2025 (%)	Pertumbuhan	Predikat Kinerja	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2026	2027	
							TARGET	TARGET	
-1	*-2*	*-3*	*-4*				*-5*	*-7*	*-15*
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE									
Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (Bidang Tanah)	-	20,96				220	1.200	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH									
Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah (%)	100	65,62	65,62	-34,38	R	100	100	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			88,26						
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100	-				100	100	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02 - PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP									
Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup (Dokumen)	1		0,00	-100,00	SR	1	-	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			100						
Menurunya Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (poin)	56,55		0,00	-100,00	SR	72,83	73,03	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Realisasi Kinerja 2025	Tingkat Capaian Kinerja 2025 (%)	Pertumbuhan	Predikat Kinerja	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2026	2027	
							TARGET	TARGET	
-1	*-2*	*-3*	*-4*				*-5*	*-7*	*-15*
	Indeks Kualitas Air Laut (poin)	78,08	6,396	8,19	-91,81	SR	81,99	82,04	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Indeks Kualitas Udara (poin)	92,7		0,00	-100,00	SR	88,23	88,43	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			76						
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (IPKH) (Poin)	0					0,551	0,561	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			20,3						
Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang terkelola (%)	-					90	90	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			83,2						
Meningkatnya Kepatuhan usaha dan / atau Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH (%)	88,89		0,00	-100,00	SR	33,33	33,33	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH									
Meningkatnya Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah Entitas Pengakuan dan Peningkatan Kapasitas MHA (Kelompok)	2	-				2	2	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT									
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Jumlah Masyarakat/ Kelompok/ Pelaku Usaha (Kg/Orang)	120	100	83,33	-16,67	T	30	30	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Realisasi Kinerja 2025	Tingkat Capaian Kinerja 2025 (%)	Pertumbuhan	Predikat Kinerja	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2026	2027	
							TARGET	TARGET	
-1	*-2*	*-3*	*-4*				*-5*	*-7*	*-15*
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT									
Meningkatnya Penilaian Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Penerima Penghargaan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Penghargaan)	-					3	3	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			100						
Meningkatnya Penyelesaian Sengketa / Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa / Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (%)	-					100	100	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			-						
Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	-					20	25	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah ((%))	-	-				13,5	17	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100		0,00	-100,00	SR	100	100	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Realisasi Kinerja 2025	Tingkat Capaian Kinerja 2025 (%)	Pertumbuhan	Predikat Kinerja	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2026	2027	
							TARGET	TARGET	
-1	*-2*	*-3*	*-4*				*-5*	*-7*	*-15*
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			0,542						
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (%)	30		0,00	-100,00	SR	20	30	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (%)	23	-				55	60	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL									
Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan (%)	100	-				100	100	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Akte Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan (%)	100		0,00	-100,00	SR	100	100	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Akte Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan (%)	100	2	2,00	-98,00	SR	100	100	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Akte Perkawian yang diterbitkan bagi yang melaporkan (%)	100		0,00	-100,00	SR	100	100	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			20						
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (Persentase)	-					100	100	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN									
Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (%)	100		0,00	-100,00	SR	100	100	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Realisasi Kinerja 2025	Tingkat Capaian Kinerja 2025 (%)	Pertumbuhan	Predikat Kinerja	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2026	2027	
							TARGET	TARGET	
-1	*-2*	*-3*	*-4*				*-5*	*-7*	*-15*
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100	-				100	100	2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA			10						
Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)	100		0,00	-100,00	SR	20	40	2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA									
Meningkatnya Efektivitas Kerja Sama Desa	Persentase Fasilitasi Kerja Sama Desa (Persentase)	100	100	100,00	0,00	ST	20	40	2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA									
Meningkatkan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	56,25	10	17,78	-82,22	SR	1,7	1,7	2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase)	0	-				1,7	1,7	2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT									

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Realisasi Kinerja 2025	Tingkat Capaian Kinerja 2025 (%)	Pertumbuhan	Predikat Kinerja	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2026	2027	
							TARGET	TARGET	
-1	*-2*	*-3*	*-4*				*-5*	*-7*	*-15*
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	0	100				20	40	2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	33	100	303,03	203,03	ST	50	67	2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			100						
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			100						
Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Angka)	19,4		0,00	-100,00	SR	18,4	17,4	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) (Angka)	2,41	-				2,4	2,39	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)									
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat atau cara KB (%)	59	100	169,49	69,49	ST	60,3	61,6	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)									
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	-					65,5	68,5	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Realisasi Kinerja 2025	Tingkat Capaian Kinerja 2025 (%)	Pertumbuhan	Predikat Kinerja	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2026	2027	
							TARGET	TARGET	
-1	*-2*	*-3*	*-4*				*-5*	*-7*	*-15*
	Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja (Indeks)	-	100				40,5	42,5	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri (%)	-					90,8	91,5	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100	10	10,00	-90,00	SR	100	100	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)									
Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	Konektivitas Darat (Persentase)	0,672	-				0,756	0,79	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Provinsi (Persentase)	25,14	-				26,35	27,56	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN									
Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut	Konektivitas Laut (%)	0,697	-				0,712	0,719	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Realisasi Kinerja 2025	Tingkat Capaian Kinerja 2025 (%)	Pertumbuhan	Predikat Kinerja	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2026	2027	
							TARGET	TARGET	
-1	*-2*	*-3*	*-4*				*-5*	*-7*	*-15*
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100		0,00	-100,00	SR	100	100	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK									
Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik (Predikat)	Informatif	-				Menuju Informatif	Informatif	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA									
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Indeks)	2,63	59	2243,35	2143,35	ST	2,63	2,73	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100	-				100	100	2.17.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM									
Meningkatnya Kualitas Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (%)	1,93		0,00	-100,00	SR	2,5	2,5	2.17.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI									
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (%)	0,66	100	15151,52	15051,52	ST	4,6	4,6	2.17.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Realisasi Kinerja 2025	Tingkat Capaian Kinerja 2025 (%)	Pertumbuhan	Predikat Kinerja	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2026	2027	
							TARGET	TARGET	
-1	*-2*	*-3*	*-4*				*-5*	*-7*	*-15*
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI									
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif (%)	65,23	0,701	1,07	-98,93	SR	68,6	68,7	2.17.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			25,14						
Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian									2.17.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan (Koperasi)	60	0,705	1,18	-98,83	SR	30	30	2.17.0.00.0.00.01.0001 - BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI									
Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (%)	9,91		0,00	-100,00	SR	9,93	9,94	2.17.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.07 - PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			100						
Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (%)	0					1,8	1,9	2.17.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Menuju Informatif						2.17.0.00.0.00.01.0001 - BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan Wirausaha (%)	-					-	-	2.17.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			2,53						

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Realisasi Kinerja 2025	Tingkat Capaian Kinerja 2025 (%)	Pertumbuhan	Predikat Kinerja	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2026	2027	
							TARGET	TARGET	
-1	*-2*	*-3*	*-4*				*-5*	*-7*	*-15*
Meningkatnya Daya Saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (%)	0					2,1	2,2	2.17.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100						
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100		0,00	-100,00	SR	100	100	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL									
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (%)	100	2,5	2,50	-97,50	SR	100	100	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL									
Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor yang Berinvestasi (Investor)	0	0				2	2	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL									
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Rata-rata lama pengurusan dokumen perijinan usaha (Hari)	-	68,5				15	15	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL									

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Realisasi Kinerja 2025	Tingkat Capaian Kinerja 2025 (%)	Pertumbuhan	Predikat Kinerja	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2026	2027	
							TARGET	TARGET	
-1	*-2*	*-3*	*-4*				*-5*	*-7*	*-15*
Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (%)	-					100	100	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			30						
Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data Dan Informasi Penanaman Modal (%)	-					72,5	75	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			9,92						
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100		0,00	-100,00	SR	100	100	2.19.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			1,7						
Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	4	-				4,2	4,3	2.19.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN									
Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)	50	2	4,00	-96,00	SR	52	54	2.19.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN									

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Realisasi Kinerja 2025	Tingkat Capaian Kinerja 2025 (%)	Pertumbuhan	Predikat Kinerja	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2026	2027	
							TARGET	TARGET	
-1	*-2*	*-3*	*-4*				*-5*	*-7*	*-15*
Meningkatnya Kualitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	5		0,00	-100,00	SR	5,1	5,2	2.19.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			100						
2.20.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			100						
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Indeks)	2,3		0,00	-100,00	SR	2,4	2,45	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI									
Meningkatnya keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah (Indeks Kami) (Skor)	273	-				259	304	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN									
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	-					45	60	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL									
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kesenian Tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	-					100	100	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH									

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Realisasi Kinerja 2025	Tingkat Capaian Kinerja 2025 (%)	Pertumbuhan	Predikat Kinerja	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2026	2027	
							TARGET	TARGET	
-1	*-2*	*-3*	*-4*				*-5*	*-7*	*-15*
Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Informasi Sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	-	100				20	25	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA									
Meningkatnya Warisan Budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)	-	4,1				100	100	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	-					100	100	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			50						
Meningkatnya Tata Kelola Museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase)	-					50	52	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			5						
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100		0,00	-100,00	SR	100	100	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN									
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Persentase Perpustakaan yang dibina sesuai SNP (%)	38,31		0,00	-100,00	SR	38,5	39	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			2,35						
Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (%)	17		0,00	-100,00	SR	17	17	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Realisasi Kinerja 2025	Tingkat Capaian Kinerja 2025 (%)	Pertumbuhan	Predikat Kinerja	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2026	2027	
							TARGET	TARGET	
-1	*-2*	*-3*	*-4*				*-5*	*-7*	*-15*
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			229						
Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis	Persentase perangkat daerah yang memiliki daftar arsip dinamis (%)	8		0,00	-100,00	SR	13	16	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP									
Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip sesuai dengan NSPK	Jumlah Arsip yang diselamatkan dan dimusnahkan (Nilai)	1	-				150	200	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100		0,00	-100,00	SR	100	100	3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL									
Terwujudnya pengelolaan pulau-pulau kecil dan pesisir yang berkelanjutan	Luasan Kawasan Konservasi (Ha) (Ha)	2.111.176,30	-				2.370.729,20	3.318.970,89	3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP									
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	533.116,69		0,00	-100,00	SR	255.846	268.638,25	3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA									
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	261.166,28		0,00	-100,00	SR	123.500	129.675	3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN									

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Realisasi Kinerja 2025	Tingkat Capaian Kinerja 2025 (%)	Pertumbuhan	Predikat Kinerja	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2026	2027	
							TARGET	TARGET	
-1	*-2*	*-3*	*-4*				*-5*	*-7*	*-15*
Meningkatnya Tingkat kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturaan perundang-undangan	Tingkat kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturaan perundang-undangan (%)	80,62	100	124,04	24,04	ST	45	47,25	3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN									
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Angka)	82,8	38,31	46,27	-53,73	SR	40	41,48	3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			17						
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100		0,00	-100,00	SR	100	100	3.26.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA									
Meningkatnya daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi pariwisata yang dikelola, ditata, dan dikembangkan (Destinasi)	3	11	366,67	266,67	ST	4	4	3.26.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA									
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan (%)	5	50	1000,00	900,00	ST	5	5	3.26.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL									
Meningkatnya Kualitas Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	1,92		0,00	-100,00	SR	1,92	1,94	3.26.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Realisasi Kinerja 2025	Tingkat Capaian Kinerja 2025 (%)	Pertumbuhan	Predikat Kinerja	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2026	2027	
							TARGET	TARGET	
-1	*-2*	*-3*	*-4*				*-5*	*-7*	*-15*
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			100						
Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mendapat pelatihan dan sertifikasi (%)	0,17		0,00	-100,00	SR	0,66	0,96	3.26.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			2053582,18						
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100	511.435,90	511435,90	511335,90	ST	100	100	3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN									
Petani memperoleh hasil dan nilai jual yang lebih baik	Peningkatan Produksi Hortikultura (Angka)	16.512	236.000	1429,26	1329,26	ST	16.675	17.004	3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN
	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Angka)	8.702		0,00	-100,00	SR	3.925	4.003	3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN
	Peningkatan Produksi Perkebunan (Angka)	142.810	90	0,06	-99,94	SR	160.298	163.360	3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Angka)	147.895		0,00	-100,00	SR	120.355	122.761	3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			79						
Petani memperoleh hasil dan nilai jual yang lebih baik	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	32.964,43		0,00	-100,00	SR	32.964,43	32.964,43	3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				#DIV/0!	#DIV/0!				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Realisasi Kinerja 2025	Tingkat Capaian Kinerja 2025 (%)	Pertumbuhan	Predikat Kinerja	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2026	2027	
							TARGET	TARGET	
-1	*-2*	*-3*	*-4*				*-5*	*-7*	*-15*
Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (%)	50	100	200,00	100,00	ST	75	89	3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN
	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (%)	85		0,00	-100,00	SR	87	89	3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			4						
Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian									3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN
	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (%)	68,1	5	7,34	-92,66	SR	75,5	77,5	3.27.0.00.0.00.01.0002 - BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BPTPHP) PROVINSI MALUKU
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN									
Meningkatnya Kualitas dan Kemudahan Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi (Angka)	5	1,9	38,00	-62,00	SR	7	8	3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN									
Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani (Angka)	54,83	0,36	0,66	-99,34	SR	58,2	62,46	3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN
3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									
3.28.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100	100	100,00	0,00	ST	100	100	3.28.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEHUTANAN
3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN									

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Realisasi Kinerja 2025	Tingkat Capaian Kinerja 2025 (%)	Pertumbuhan	Predikat Kinerja	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2026	2027	
							TARGET	TARGET	
-1	*-2*	*-3*	*-4*				*-5*	*-7*	*-15*
Meningkatnya produktivitas hasil hutan	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (%) (%)	0,55		0,00	-100,00	SR	0,57	0,57	3.28.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEHUTANAN
	Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi (Ha)	30	16.337	54456,67	54356,67	ST	100	100	3.28.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEHUTANAN
3.28.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			3.848						
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani yang terfasilitasi (Kel) (Kelompok)	2	157.398	7869900,00	7869800,00	ST	15	15	3.28.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEHUTANAN
	Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (Kel) (Kelompok)	18	117.995	655527,78	655427,78	ST	14	14	3.28.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEHUTANAN
3.28.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)									
Meningkatnya kelestarian dan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS)	Terkelolanya DAS Lintas Kabupaten/Kota (Kegiatan)	-	32.964,43				4	4	3.28.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEHUTANAN
3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL									
3.29.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			63						
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100	86	86,00	-14,00	T	100	100	3.29.0.00.0.00.01.0000 - DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3.29.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN									
Meningkatnya Tata Kelola Kegeologian	Jumlah Volume Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota (Rp. Juta Per Tahun)	-					157	749	3.29.0.00.0.00.01.0000 - DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Realisasi Kinerja 2025	Tingkat Capaian Kinerja 2025 (%)	Pertumbuhan	Predikat Kinerja	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2026	2027	
							TARGET	TARGET	
-1	*-2*	*-3*	*-4*				*-5*	*-7*	*-15*
	Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota (Meter)	-	71,5				-	-	3.29.0.00.0.00.01.0000 - DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3.29.03 - PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA									
Meningkatnya Tata Kelola Mineral dan Batu Bara	Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR (%)	0	6				0	0	3.29.0.00.0.00.01.0000 - DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
	Luas WPR yang Diusulkan Pemerintah Daerah (Meter)	-					10	1	3.29.0.00.0.00.01.0000 - DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3.29.05 - PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN			56,1						
Meningkatnya Tata Kelola Energi Baru Terbarukan	Intensitas Energi Primer (SBM/Milyar Rupiah)	-					223.597,25	213.870,50	3.29.0.00.0.00.01.0000 - DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
	Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik yang bersumber dari Pembangkit EBT (Rumah Tangga)	46		0,00	-100,00	SR	140	150	3.29.0.00.0.00.01.0000 - DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	23,84	100	419,46	319,46	ST	32,58	34,3	3.29.0.00.0.00.01.0000 - DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3.29.06 - PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN									
Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kelistrikan	Konsumsi Listrik per Kapita (Kwh/Kapita)	-	0,55				395,75	441,5	3.29.0.00.0.00.01.0000 - DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
	Rasio Elektrifikasi (%)	99,67	100	100,33	0,33	ST	99,68	99,7	3.29.0.00.0.00.01.0000 - DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Realisasi Kinerja 2025	Tingkat Capaian Kinerja 2025 (%)	Pertumbuhan	Predikat Kinerja	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2026	2027	
							TARGET	TARGET	
-1	*-2*	*-3*	*-4*				*-5*	*-7*	*-15*
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN									
Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan dan Pendaftaran Berusaha	Jumlah Izin Usaha Perdagangan Terdaftar yang Difasilitasi (Jenis)	4	28	700,00	600,00	ST	02-Apr	02-Apr	3.31.3.30.0.00.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN									
Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang yang Efisien, Merata dan Terintegrasi	Jumlah Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Unit)	1	-				1	1	3.31.3.30.0.00.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING									
Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (%)	2,78		0,00	-100,00	SR	3.5-4	3.5-4	3.31.3.30.0.00.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			100						
Meningkatnya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) (%)	-					3.15-3.17	3.22-3.26	3.31.3.30.0.00.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor (Pelaku Usaha)	6	-				6	8	3.31.3.30.0.00.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN									
Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk	Persentase Kepatuhan Berusaha (%) (%)	0					91	92	3.31.3.30.0.00.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah bahan berbahaya yang dipantau peredarannya (Jenis)	4	0	0,00	-100,00	SR	4	4	3.31.3.30.0.00.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah Penanganan Pengaduan Konsumen (Kasus) (Kasus)	5	-				5	5	3.31.3.30.0.00.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Realisasi Kinerja 2025	Tingkat Capaian Kinerja 2025 (%)	Pertumbuhan	Predikat Kinerja	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2026	2027	
							TARGET	TARGET	
-1	*-2*	*-3*	*-4*				*-5*	*-7*	*-15*
	Jumlah sampel yang diuji (Sampel)	100		0,00	-100,00	SR	105	110	3.31.3.30.0.00.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI									
Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan (%)	0	-				60	70	3.31.3.30.0.00.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			27,3						
3.31.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100	-				100	100	3.31.3.30.0.00.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.02 - PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			99,67						
Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri (%) (%)	0					3	3,5	3.31.3.30.0.00.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI									
3.32.02 - PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI									
Meningkatnya Pelaksanaan Transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi yang dilaksanakan (%)	-					100	100	2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI			02-Apr						
Meningkatnya Pemberdayaan dan Kapasitas Transmigran dalam Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (%)	-					0,21	0,5	2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH									

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Realisasi Kinerja 2025	Tingkat Capaian Kinerja 2025 (%)	Pertumbuhan	Predikat Kinerja	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2026	2027	
							TARGET	TARGET	
-1	*-2*	*-3*	*-4*				*-5*	*-7*	*-15*
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			1						
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100		0,00	-100,00	SR	100	100	4.01.0.00.0.00.00.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pimpinan Daerah			3.5-4						4.01.0.00.0.00.00.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Kebijakan Layanan Administrasi Pimpinan Daerah (%)	100		0,00	-100,00	SR	100	100	4.01.0.00.0.00.00.0006 - BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Umum Daerah			3.08-3.09						4.01.0.00.0.00.00.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Kebijakan Layanan Umum Daerah (%)	100	6	6,00	-94,00	SR	100	100	4.01.0.00.0.00.00.0005 - BIRO UMUM
4.01.02 - PROGRAM PENATAAN ORGANISASI									
Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah			90						4.01.0.00.0.00.00.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Penyusunan Kebijakan Daerah Bidang Organisasi yang ditindaklanjuti (Persentase)	100	4	4,00	-96,00	SR	100	100	4.01.0.00.0.00.00.0003 - BIRO ORGANISASI
4.01.03 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH			5						
Meningkatnya kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah			100						4.01.0.00.0.00.00.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Fasilitasi Kerjasama Daerah (%)	100		0,00	-100,00	SR	100	100	4.01.0.00.0.00.00.0001 - BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	Persentase Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah (%)	100	50	50,00	-50,00	SR	100	100	4.01.0.00.0.00.00.0001 - BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4.01.04 - PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT									

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Realisasi Kinerja 2025	Tingkat Capaian Kinerja 2025 (%)	Pertumbuhan	Predikat Kinerja	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2026	2027	
							TARGET	TARGET	
-1	*-2*	*-3*	*-4*				*-5*	*-7*	*-15*
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat									4.01.0.00.0.00.00.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Difasilitasi (%)	100	100	100,00	0,00	SR	100	100	4.01.0.00.0.00.00.0004 - BIRO KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
4.01.05 - PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM									
Meningkatnya Kualitas Produk Hukum yang dihasilkan									4.01.0.00.0.00.00.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Bantuan Hukum yang tertangani (%)	100	2,5	2,50	-97,50	SR	100	100	4.01.0.00.0.00.00.0002 - BIRO HUKUM
	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM (IUP 45) (%)	-					62,5	65	4.01.0.00.0.00.00.0002 - BIRO HUKUM
	Persentase Produk Hukum yang di fasilitasi (%)	100		0,00	-100,00	SR	100	100	4.01.0.00.0.00.00.0002 - BIRO HUKUM
4.01.06 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN									
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan									4.01.0.00.0.00.00.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian yang DIfasilitasi (%)	100	-				100	100	4.01.0.00.0.00.00.0007 - BIRO PEREKONOMIAN DAERAH
	Return on Asset (ROA) BUMD Perangkat Daerah (IUP 45) (%)	-					2,66	2,83	4.01.0.00.0.00.00.0007 - BIRO PEREKONOMIAN DAERAH
4.01.07 - PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA									
Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa			100						4.01.0.00.0.00.00.0000 - SEKRETARIAT DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Realisasi Kinerja 2025	Tingkat Capaian Kinerja 2025 (%)	Pertumbuhan	Predikat Kinerja	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2026	2027	
							TARGET	TARGET	
-1	*-2*	*-3*	*-4*				*-5*	*-7*	*-15*
	Tingkat Kematangan UKPBJ (%)	100		0,00	-100,00	SR	100	100	4.01.0.00.0.00.00.0008 - BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4.01.08 - PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			100						
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan									4.01.0.00.0.00.00.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan yang ditindaklanjuti dengan Baik (%)	100	100	100,00	0,00	ST	100	100	4.01.0.00.0.00.00.0008 - BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4.02 - SEKRETARIAT DPRD									
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100	100	100,00	0,00	ST	100	100	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD									
Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Ketetapan)	Tepat Waktu					Tepat Waktu	Tepat Waktu	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD
Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	100	100	100,00	0,00	ST	100	100	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD
	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100	100	100,00	0,00	ST	100	100	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Realisasi Kinerja 2025	Tingkat Capaian Kinerja 2025 (%)	Pertumbuhan	Predikat Kinerja	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2026	2027	
							TARGET	TARGET	
-1	*-2*	*-3*	*-4*				*-5*	*-7*	*-15*
5.01 - PERENCANAAN									
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100	100	100,00	0,00	ST	100	100	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH									
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	100		0,00	-100,00	SR	100	100	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	-	100			NR	100	100	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	-	100				100	100	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembagunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	-					100	100	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA	Aset Dana Pensiun/PDRB ((%))	-					0,29	0,31	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Realisasi Kinerja 2025	Tingkat Capaian Kinerja 2025 (%)	Pertumbuhan	Predikat Kinerja	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2026	2027	
							TARGET	TARGET	
-1	*-2*	*-3*	*-4*				*-5*	*-7*	*-15*
	Nilai Transaksi Saham Per kapita Per Provinsi (Rupiah) (Nilai)	-	100				1.007.016,22	1.191.817,71	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	100	2,49	2,49	-97,51	SR	100	100	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB ((%))	-					25,02	25,84	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Total Kredit/PDRB ((%))	-					30,45	31,61	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.02 - KEUANGAN			100						
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100		0,00	-100,00	SR	100	100	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	E	100				B	B	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100		0,00	-100,00	SR	100	100	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			100						
Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	17,48		0,00	-100,00	SR	18	18	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Realisasi Kinerja 2025	Tingkat Capaian Kinerja 2025 (%)	Pertumbuhan	Predikat Kinerja	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2026	2027	
							TARGET	TARGET	
-1	*-2*	*-3*	*-4*				*-5*	*-7*	*-15*
	Persentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD (%)	0,73	Tepat Waktu				0,78	0,78	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu (%)	100	100	100,00	0,00	ST	100	100	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Persentase Penurunan SILPA (%)	5	100	2000,00	1900,00	ST	5	5	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (%)	93,9		0,00	-100,00	SR	93,9	93,9	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan	Efektifitas pendapatan daerah (persentase) (%)	94,18		0,00	-100,00	SR	95	95	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			100						
Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (%)	100		0,00	-100,00	SR	100	100	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (%)	7,2	100	1388,89	1288,89	ST	7,2	7,2	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Meningkatnya Efisiensi Keuangan dan Nilai Pemanfaatan Aset Daerah	Persentase aset produktif terhadap total aset (%)	-	-				-	-	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Rasio laba bersih terhadap aset (Rasio)	-:-					-:-	-:-	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH									

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Realisasi Kinerja 2025	Tingkat Capaian Kinerja 2025 (%)	Pertumbuhan	Predikat Kinerja	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2026	2027	
							TARGET	TARGET	
-1	*-2*	*-3*	*-4*				*-5*	*-7*	*-15*
Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan			-	-	-				5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Efektifitas pendapatan daerah (persentase) (%)	94,18	-	-	-		95	95	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.03 - KEPEGAWAIAN			822214,73						
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100	-				100	100	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH									
Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian	Nilai Aspek Manajemen Kinerja, Pengajian, Penghragaan dan Disiplin, dan Perlindungan dan Pelayanan (Nilai)	109,5		0,00	-100,00	SR	120	122	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	Nilai Aspek Pengadaan, Perencanaan Kebutuhan, Sistem Informasi (Nilai)	87		0,00	-100,00	SR	100	102	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	Nilai Aspek Promosi, Mutasi dan Pengembangan Karier (Nilai)	55	100	181,82	81,82	ST	60	61	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			B						
5.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100						

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Realisasi Kinerja 2025	Tingkat Capaian Kinerja 2025 (%)	Pertumbuhan	Predikat Kinerja	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2026	2027	
							TARGET	TARGET	
-1	*-2*	*-3*	*-4*				*-5*	*-7*	*-15*
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100		0,00	-100,00	SR	100	100	5.04.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			18						
Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Dasar, Kader, Manajerial, dan Fungsional	Persentase ASN yang menyelesaikan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (%)	100	0,78	0,78	-99,22	SR	100	100	5.04.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
Meningkatnya Layanan Penjamin Mutu dan Sertifikasi Kompetensi	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (Persentase)	100	100	100,00	0,00	ST	100	100	5.04.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (%)	100	5	5,00	-95,00	SR	100	100	5.04.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			93,9						
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			95						
Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	-					50	70	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH			100						

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Realisasi Kinerja 2025	Tingkat Capaian Kinerja 2025 (%)	Pertumbuhan	Predikat Kinerja	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2026	2027	
							TARGET	TARGET	
-1	*-2*	*-3*	*-4*				*-5*	*-7*	*-15*
Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah dalam Pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	-	7,2				80	85	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.06 - PENGELOLAAN PERBATASAN									
5.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100		0,00	-100,00	SR	100	100	5.06.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
5.06.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN									
Meningkatnya pemanfaatan kawasan perbatasan	Persentase infrastruktur terbangun di kawasan perbatasan (Persentase)	62,38	95	152,29	52,29	ST	69,05	72	5.06.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
5.07 - PENGELOLAAN PENGHUBUNG									
5.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100	100	100,00	0,00	ST	100	100	5.07.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGHUBUNG
5.07.02 - PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG									
Meningkatnya Layanan Penghubung Pemerintah Daerah	Persentase Layanan Penghubung (%)	100	109,5	109,50	9,50	ST	100	100	5.07.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGHUBUNG
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH			87						

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Realisasi Kinerja 2025	Tingkat Capaian Kinerja 2025 (%)	Pertumbuhan	Predikat Kinerja	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2026	2027	
							TARGET	TARGET	
-1	*-2*	*-3*	*-4*				*-5*	*-7*	*-15*
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			55						
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Implementasi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) (%)	100		0,00	-100,00	SR	100	100	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100		0,00	-100,00	SR	100	100	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran n-1 (%)	72	100	138,89	38,89	ST	76	78	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN									
Menurunnya Penyelewengan atau Penyimpangan, baik yang Bersifat Anggaran ataupun Proses dan Kewenangan	Persentase Implementasi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) (%)	100	100	100,00	0,00	ST	100	100	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			100						
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Nilai Pencegahan Korupsi (%)	62,72	-				70	75	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100	-				100	100	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Realisasi Kinerja 2025	Tingkat Capaian Kinerja 2025 (%)	Pertumbuhan	Predikat Kinerja	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2026	2027	
							TARGET	TARGET	
-1	*-2*	*-3*	*-4*				*-5*	*-7*	*-15*
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN									
Meningkatnya Kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	100	-				100	100	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK									
Meningkatnya Etika dan Budaya politik	Persentase Kebijakan Pendidikan Politik oleh Pemerintah Daerah (%)	100		0,00	-100,00	SR	100	100	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (%)	100	100	100,00	0,00	ST	100	100	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN									
Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang aktif (%)	71,64	-				68	69	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA									
Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat	Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan (%)	100		0,00	-100,00	SR	100	100	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Realisasi Kinerja 2025	Tingkat Capaian Kinerja 2025 (%)	Pertumbuhan	Predikat Kinerja	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2026	2027	
							TARGET	TARGET	
-1	*-2*	*-3*	*-4*				*-5*	*-7*	*-15*
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			100						
Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan (%)	100		0,00	-100,00	SR	100	100	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TOTAL KESELURUHAN			100						

Secara keseluruhan, evaluasi indikator kinerja program tahun 2025 menunjukkan capaian yang beragam dengan predikat kinerja mulai dari Sangat Tinggi (ST), Tinggi (T), Sedang (S), hingga Sangat Rendah (SR). Program di sektor pendidikan dan sebagian besar infrastruktur dasar mencatat capaian sangat tinggi, seperti partisipasi anak usia sekolah, peningkatan literasi dan numerasi, serta layanan irigasi, perlindungan kawasan dari abrasi, dan penyediaan air minum. Sektor sosial juga menampilkan keberhasilan pada beberapa indikator, misalnya peningkatan kesejahteraan penerima manfaat, penanganan anak terlantar, serta kesiapsiagaan masyarakat di daerah rawan bencana.

Namun, sejumlah indikator hanya mencapai predikat tinggi atau sedang, seperti cakupan layanan HIV, pemulihan sosial korban bencana, tata kelola taman makam pahlawan, serta penanganan kawasan kumuh dan sediaan farmasi. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan, tetapi belum sepenuhnya optimal.

Di sisi lain, terdapat banyak indikator dengan predikat sangat rendah, terutama di sektor kesehatan, perumahan, sosial, dan ketenagakerjaan. seperti, cakupan imunisasi bayi, pengendalian hipertensi, kondisi bangunan gedung, penataan lingkungan, perlindungan sosial keluarga miskin, serta penempatan tenaga kerja dalam negeri. Beberapa indikator bahkan mengalami penurunan drastis dari baseline, menandakan adanya kegagalan pencapaian target.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendidikan, sosial, dan infrastruktur dasar menjadi sektor unggulan dengan capaian sangat tinggi, sementara kesehatan, perlindungan sosial, dan ketenagakerjaan masih menghadapi tantangan serius. Evaluasi ini memberikan gambaran jelas bahwa ke depan perlu ada penguatan kebijakan, alokasi sumber daya yang lebih tepat, serta perbaikan manajemen program untuk sektor-sektor yang masih tertinggal.

2.14. Capaian Indikator Utama Pambangunan (IUP)

Tabel 2.55
Tabel Capaian IUP 45 Tahun 2025

45 Indikator Utama Pembangunan Provinsi Maluku					
Arah Pembangunan	**Indikator Utama Pembangunan (IUP)**	**Realisasi 2024**	**Target 2025**	**Realisas 2025**	**Pertumbuhan / Perubahan / Penurunan**
Transformasi Sosial					
Kesehatan untuk Semua					
	2. Kesehatan Ibu dan Anak:				
	a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	75	187	164	118,67
	b) Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	7	24,7	5,3	-24,29
	3. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)				
	a) Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*) (%)	59	85	62	5,59
	b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkolusis (*treatment success rate*) (%)	51	90	85	66,67
	4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	**94,48**	**98,6**	**98,60**	4,36

45 Indikator Utama Pembangunan Provinsi Maluku					
Arah Pembangunan	**Indikator Utama Pembangunan (IUP)**	**Realisasi 2024**	**Target 2025**	**Realisas 2025**	**Pertumbuhan / Perubahan / Penurunan**
Pendidikan Berkualitas yang Merata	**5. Hasil Pembelajaran:**				
	a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:				
	- Literasi Membaca		9.09 - 9.09		
	- Numerasi		0.00 - 9.09		
	b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:				
	- Literasi Membaca		19.87 - 22.37		
	- Numerasi		15.55 - 18.05		
	c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)		10.57 - 10.59	10.51	
	d) Harapan Lama Sekolah	14,09	14.21 - 14.22	14,10	0,01
	6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi(%)		**14,94**		
	7. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)		**73,81**		

45 Indikator Utama Pembangunan Provinsi Maluku					
Arah Pembangunan	**Indikator Utama Pembangunan (IUP)**	**Realisasi 2024**	**Target 2025**	**Realisas 2025**	**Pertumbuhan / Perubahan / Penurunan**
Transformasi Ekonomi					
	8. Tingkat Kemiskinan (%)	**15,78**	**13,51**	**15,25**	-0,53
	9. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	**42**	**38,26**	**49,96**	18,95
	10. Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%), diusulkan untuk menggunakan proksi:				
	a. Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan		-		
	b. Proxy: Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kab/kota/provinsi		4	3	
Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	**11. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)**	**6,31**	**6,50**	**6,51**	3,17
	b) Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,39	5,8	6,42	89,38
	12. Pengembangan Pariwisata				
	a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,45	1,5	1,45	0,00

45 Indikator Utama Pembangunan Provinsi Maluku					
Arah Pembangunan	**Indikator Utama Pembangunan (IUP)**	**Realisasi 2024**	**Target 2025**	**Realisas 2025**	**Pertumbuhan / Perubahan / Penurunan**
	b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)		10,68		
	13. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekraf Nasional (%)		**0,14**		
	14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN		**1,79%**		
	a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)				
	~~a. a-i. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi (%)~~				
	~~a-ii. Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi (%)~~				
	b. Rasio kewirausahaan daerah (%)	3,95	2,03%	0,18	-95,44
	c. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)		0,75%	0.35%	
	d. *Return on Asset* (ROA) BUMD (%)		2,49		
	15. Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik				
	a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,11	5,95	6,27	2,62
	b. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	*33,94*	35	*33,94*	0

45 Indikator Utama Pembangunan Provinsi Maluku					
Arah Pembangunan	**Indikator Utama Pembangunan (IUP)**	**Realisasi 2024**	**Target 2025**	**Realisas 2025**	**Pertumbuhan / Perubahan / Penurunan**
	16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	**56,25**	**56,20 - 57,71**	**56,10**	0,15
	17. Tingkat Penguasaan IPTEK				
	a. Indeks Inovasi	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif
Penerapan Ekonomi Hijau	**18. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau**				
	a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah		60,07		
	b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)		29,59		
Transformasi Digital	**19. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi**		**5,8**		
Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	**20. Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi**		**11,5**		
	21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	**28,87**	**29,5**	**27,39**	**1,48**
	22. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)		**3,08 - 3,09**	**4.5**	
Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	**23. Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan**				
	a. Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)				

45 Indikator Utama Pembangunan Provinsi Maluku					
Arah Pembangunan	**Indikator Utama Pembangunan (IUP)**	**Realisasi 2024**	**Target 2025**	**Realisas 2025**	**Pertumbuhan / Perubahan / Penurunan**
	b. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)		67,45		
	c. Persentase Desa Mandiri (%)	8,83	8,63%	9,42	6,68
Transformasi Tata Kelola					
Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	**24. Indeks Materi Hukum** **Catatan Ditkumlasi: untuk indikator ini, proksi di daerahnya merupakan Indeks Reformasi Hukum (IRH), sebagaimana penyelarasan RPJPD**		**70**		
	25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		**2,53**		
	26. Indeks Pelayanan Publik	**2,19**	**1,8**	**2,91**	**0,72**
	27. Indeks Integritas Nasional		**67,43**		
Supremasi Hukum, Stabilitas, Dan Kepemimpinan Indonesia					
Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	***28. Disesuaikan dengan karakteristik daerahUsulan Proksi:***				
	a) Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah		*70*		

45 Indikator Utama Pembangunan Provinsi Maluku					
Arah Pembangunan	**Indikator Utama Pembangunan (IUP)**	**Realisasi 2024**	**Target 2025**	**Realisas 2025**	**Pertumbuhan / Perubahan / Penurunan**
	b) Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM		*60*		
	29. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)		**70**		
	30. Indeks Demokrasi Indonesia	**67,98**	**70,5**	**73.93**	**8,75**
Stabilitas Ekonomi Makro	**31. Rasio Pajak terhadap PDB (%)**		**1,51**		
	32. Tingkat Inflasi (%)	**1,28**	**2,5 ± 1**	**3.58**	**179,69**
	33. Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan				
	a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)		24,21		
	b. Aset Dana Pensiun/PDRB (%)		0,27		
	c. Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah)		822.214,73		
	d. Total Kredit/PDRB (%)		29,3	22-24	
	34. Inklusi Keuangan (%)		**86,3**		
	35. *Dsisesuaikan dengan karakteristik daerah Usulan Proksi:*				

45 Indikator Utama Pembangunan Provinsi Maluku					
Arah Pembangunan	**Indikator Utama Pembangunan (IUP)**	**Realisasi 2024**	**Target 2025**	**Realisas 2025**	**Pertumbuhan / Perubahan / Penurunan**
Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	*Jumlah Kerja Sama Provinsi/ Kabupaten/ Kota Kembar/ Bersaudara (Sister Province/ Sister City)*				
	36. Disesuaikan dengan karakteristik daerah (Asia Power Indeks - Military Capability)				
Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekologi					
Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	**37. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IKP)**	**59,38**	**60,71**	**53,77**	**-5,61**
	38. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	**80,54**	**76,5**	**65,64**	**-14,9**
Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	**39. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga**		**65,49**		
	40. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	**0,538**	**0,529**	**0,530**	**-0,008**
Lingkungan Hidup Berkualitas	**41. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**		**0,542**	**0.44**	
	42. Kualitas Lingkungan Hidup				
	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	78,81	82,43	78,83	0,02
	b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)		6,0%	1.43%	

45 Indikator Utama Pembangunan Provinsi Maluku					
Arah Pembangunan	**Indikator Utama Pembangunan (IUP)**	**Realisasi 2024**	**Target 2025**	**Realisas 2025**	**Pertumbuhan / Perubahan / Penurunan**
	c. Pengelolaan Sampah				
	- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)		10,00%	67.99%	
	- Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)		57%		
Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	**43. Ketahanan Energi, Air, dan Pangan**				
	a. Ketahanan Energi				
	- Konsumsi listrik per kapita (kWh)		350		
	- Intensitas energi primer (SBM/ Rp milyar)		233324		
	b. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*) (%)		28,96858		
	c. Ketahanan Air				
	Kapasitas Tampungan Air (m3/kapita)				
	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)		40,39		
	44. Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level provinsi)	**161,50**	**161,45**	**203,94**	**26,28**

45 Indikator Utama Pembangunan Provinsi Maluku					
Arah Pembangunan	**Indikator Utama Pembangunan (IUP)**	**Realisasi 2024**	**Target 2025**	**Realisas 2025**	**Pertumbuhan / Perubahan / Penurunan**
Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	**45. Persentase Penurunan Emisi GRK (%)**		**40,94**		
	a. Kumulatif		97,39%		
	b. Tahunan		85,82%		

2.15. Permasalahan Daerah

1. Belum optimalnya aksesibilitas dan layanan kesehatan

Sebagai provinsi kepulauan, Maluku menghadapi tantangan besar dalam pemerataan layanan kesehatan. Kondisi geografis yang terdiri dari banyak pulau menyebabkan distribusi tenaga medis, obat-obatan, dan peralatan kesehatan menjadi mahal dan lambat. Hal ini berdampak pada keterlambatan penanganan darurat serta rendahnya kualitas layanan kesehatan di daerah terpencil.

Pemerintah telah mengembangkan pendekatan gugus pelayanan kesehatan dengan 56 Puskesmas pusat gugus di 11 kabupaten/kota. Namun, keterbatasan infrastruktur, transportasi, dan jaringan komunikasi masih menjadi hambatan utama. Ketidakmerataan distribusi tenaga kesehatan juga memperburuk akses masyarakat terhadap layanan dasar.

Capaian indikator 2026: Usia Harapan Hidup **71,51 tahun** (target 71,85), prevalensi stunting balita mencapai **24,7%** , angka kematian ibu masih tinggi **Kerenyanya memerlukan kebijakan p**erluasan gugus pelayanan kesehatan, peningkatan transportasi medis antar-pulau, dan distribusi tenaga kesehatan ke daerah 3T untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Kesehatan

2. Belum meratanya kualitas dan aksesibilitas Pendidikan

Pendidikan merupakan kunci utama pembangunan, namun di Maluku akses dan kualitas pendidikan masih belum merata. Ketidaksetaraan antara desa dan kota terlihat jelas, dengan fasilitas pendidikan di desa yang minim serta jumlah tenaga pengajar yang jauh lebih sedikit dibandingkan di kota. Kondisi ini memperlebar kesenjangan mutu pendidikan antarwilayah.

Selain itu, rendahnya kualitas guru dan sarana prasarana pendidikan menjadi faktor penghambat. Lebih dari 50% guru belum memenuhi standar kualifikasi, dan hanya sekitar 30% gedung sekolah dalam kondisi baik. Mutu layanan dasar seperti literasi dan numerasi juga masih rendah, sehingga capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan belum optimal.

3. Belum Optimalnya pengembangan IPTEKIN dan riset

Kemampuan riset dan inovasi di Maluku masih rendah, dengan Indeks Inovasi hanya mencapai 36,97 pada 2023. Mekanisme intermediasi IPTEK belum optimal, sehingga hasil riset tidak terhubung dengan kebutuhan industri. Minimnya infrastruktur IPTEK dan kapasitas SDM riset juga menjadi kendala besar.

Hasil penelitian seringkali tidak selaras dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha, sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini menghambat kontribusi IPTEK terhadap pembangunan daerah.

4. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi daerah

Pertumbuhan ekonomi Maluku masih bergantung pada sektor primer, terutama perikanan dan pertanian. Ketergantungan ini membuat ekonomi daerah rentan terhadap fluktuasi harga dan hasil produksi. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum inklusif.

Transformasi ekonomi menuju sektor sekunder (industri) dan tersier (jasa) masih berjalan lambat. Padahal, industrialisasi hasil perikanan dan pertanian serta pengembangan sektor jasa dapat meningkatkan nilai tambah dan memperluas kontribusi ekonomi daerah.

5. Kesenjangan Antara Wilayah masih Tinggi

Ketimpangan ekonomi antarwilayah di Maluku masih tinggi. Beberapa daerah mengalami pertumbuhan pesat, sementara daerah lain tertinggal karena keterbatasan akses dan infrastruktur. Hal ini mencerminkan belum meratanya distribusi pembangunan.

Pendekatan pemerataan harus menjadi prioritas, dengan pengembangan pusat pertumbuhan baru berbasis potensi lokal dan penguatan wilayah penyangga.

6. Belum merata dan memadainya infrastruktur wilayah dan dasar

Ketersediaan infrastruktur dasar di Maluku masih sangat terbatas. Persentase rumah tangga yang memiliki akses air bersih dan listrik layak masih rendah, sementara sarana perkotaan seperti drainase dan pengelolaan sampah belum berfungsi optimal.

Kondisi geografis kepulauan menuntut pembangunan pelabuhan, penyeberangan, dan transportasi laut yang lebih memadai. Tanpa infrastruktur dasar yang kuat, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akan terhambat.

7. Tingkat Kemiskinan Provinsi Maluku Masih Tingg

Kemiskinan di Maluku masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, meskipun menunjukkan tren penurunan. Sebagian besar kabupaten/kota mencatat angka kemiskinan di atas 20%, kecuali Kota Ambon dan Kabupaten Buru Selatan.

Kemiskinan di Maluku bersifat multidimensi, mencakup keterbatasan ekonomi, rendahnya pendidikan, derajat kesehatan, serta akses terhadap rumah layak huni dan sanitasi.

Tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku masih menjadi tantangan pembangunan daerah karena masih berada di atas rata-rata nasional. Meskipun demikian, dalam kurun waktu enam tahun terakhir, Provinsi Maluku menunjukkan tren penurunan tingkat kemiskinan yang cukup positif. Persentase penduduk miskin berhasil ditekan dari **17,69% pada Maret 2019** menjadi **15,38% pada Maret 2025**, atau mengalami penurunan sebesar **2,31 persen poin** (setara dengan penurunan relatif sebesar **13,06%** dibandingkan tahun 2019). Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat, meskipun upaya percepatan pengurangan kemiskinan masih perlu terus diperkuat mengingat tingkat kemiskinan Provinsi Maluku masih tergolong tinggi dibandingkan rata-rata nasional

8. Masih Tingginya Tingkat Pengangguran

Masih tingginya tingkat pengangguran di Provinsi Maluku merupakan salah satu permasalahan pembangunan yang perlu mendapat perhatian serius. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun, tingkat pengangguran di Provinsi Maluku masih relatif tinggi dan bersifat fluktuatif, yang mencerminkan belum optimalnya penciptaan lapangan kerja serta masih adanya ketidaksesuaian antara ketersediaan tenaga kerja dan kebutuhan pasar kerja. Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Maluku pada Februari 2023 tercatat sebesar **6,82 persen**, kemudian menurun menjadi **5,96 persen** pada Februari 2024, dan kembali menurun menjadi **5,95 persen** pada Februari 2025. Dengan demikian, selama periode 2023–2025, TPT Provinsi Maluku berhasil ditekan sebesar **0,87 persen poin**.

Meskipun mengalami penurunan, tingkat pengangguran di Provinsi Maluku masih menjadi tantangan pembangunan daerah karena penurunan tersebut belum diikuti dengan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja secara merata. Kondisi ini diperparah oleh tingginya proporsi pekerja pada sektor informal yang pada Februari 2025 mencapai **68,41 persen** dari total penduduk bekerja, menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja masih bekerja pada sektor yang rentan dan berproduktivitas relatif rendah. Selain itu, pertumbuhan angkatan kerja yang lebih cepat dibandingkan dengan penciptaan lapangan kerja baru,

keterbatasan investasi padat karya, serta belum optimalnya keterkaitan antara pendidikan dan pelatihan vokasi dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri menjadi faktor yang mempengaruhi masih tingginya tingkat pengangguran di Provinsi Maluku.

9. Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Serta Ancaman Bencana

Permasalahan pencemaran, kerusakan lingkungan, serta ancaman bencana di Provinsi Maluku masih menjadi tantangan pembangunan yang perlu mendapat perhatian serius. Sebagai daerah kepulauan yang memiliki kekayaan sumber daya alam, ekosistem pesisir dan laut yang luas, serta berada pada kawasan cincin api (ring of fire), Provinsi Maluku menghadapi berbagai tekanan lingkungan akibat aktivitas pemanfaatan sumber daya alam, perubahan penggunaan lahan, pencemaran lingkungan, serta tingginya potensi bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, gelombang ekstrem, dan cuaca ekstrem. Kondisi ini menuntut upaya pengelolaan lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, kualitas lingkungan hidup di Provinsi Maluku dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tren yang relatif membaik. Berdasarkan data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), capaian Provinsi Maluku pada tahun 2021 sebesar 78,23, kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi 77,69 pada tahun 2022, dan kembali meningkat menjadi 78,75 pada tahun 2023. Capaian tersebut menempatkan kualitas lingkungan hidup Provinsi Maluku dalam kategori baik, yang didukung oleh peningkatan Indeks Kualitas Udara dari 90,70 pada tahun 2021 menjadi 92,47 pada tahun 2023, serta Indeks Kualitas Lahan dari 90,21 menjadi 90,73 pada periode yang sama. Namun demikian, masih terdapat tantangan pada pengelolaan kualitas air dan ekosistem perairan yang ditunjukkan oleh fluktuasi Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Air Laut.

Di sisi lain, tingkat ancaman bencana di Provinsi Maluku masih tergolong tinggi. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana (IRB), Provinsi Maluku mencatat nilai 159,68 pada tahun 2021, meningkat menjadi 160,42 pada tahun 2022, dan berada pada angka 160,03 pada tahun 2023. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Maluku masih berada pada kategori risiko bencana tinggi, yang dipengaruhi oleh karakteristik geografis wilayah kepulauan, aktivitas tektonik, serta kerentanan sosial dan infrastruktur di berbagai wilayah kabupaten/kota. Tingginya risiko bencana ini berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi, kerusakan lingkungan, dan gangguan terhadap keberlanjutan pembangunan

daerah apabila tidak diantisipasi melalui penguatan kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana.

Dengan demikian, permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta ancaman bencana di Provinsi Maluku masih memerlukan penanganan yang komprehensif melalui penguatan pengendalian pencemaran, rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam, peningkatan kualitas lingkungan hidup, penguatan sistem peringatan dini, peningkatan kapasitas penanggulangan bencana, serta pengarusutamaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berketahanan bencana.

10. Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan

Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di Provinsi Maluku masih menjadi salah satu permasalahan pembangunan daerah yang memerlukan perhatian serius. Kondisi ini tercermin dari berbagai indikator kinerja tata kelola pemerintahan yang menunjukkan bahwa upaya reformasi birokrasi, digitalisasi pemerintahan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Tantangan tersebut antara lain disebabkan oleh belum kuatnya integrasi perencanaan dan penganggaran, masih terbatasnya implementasi transformasi digital pemerintahan, belum optimalnya manajemen kinerja organisasi, serta belum meratanya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Salah satu indikator utama yang menggambarkan kondisi tata kelola pemerintahan adalah Indeks Reformasi Birokrasi (RB). Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PANRB sebagaimana tercantum dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Maluku, capaian Reformasi Birokrasi Provinsi Maluku pada tahun 2023 mengalami penurunan dengan predikat "C", kemudian pada tahun 2024 meningkat menjadi predikat "B". Meskipun mengalami perbaikan, capaian tersebut masih berada di bawah target daerah yang ditetapkan pada predikat "BB", sehingga menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Maluku belum sepenuhnya mampu mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Kondisi ini juga menunjukkan adanya stagnasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang dalam beberapa tahun terakhir belum menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Selain itu, implementasi pemerintahan berbasis elektronik juga masih menghadapi berbagai tantangan. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum sepenuhnya terintegrasi antar perangkat daerah,

sehingga efektivitas layanan pemerintahan digital dan interoperabilitas data masih perlu ditingkatkan. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya efisiensi proses bisnis pemerintahan, kualitas pelayanan publik, serta pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan pembangunan.

Dari aspek akuntabilitas dan kinerja pemerintahan, masih terdapat tantangan dalam penguatan budaya kerja berbasis kinerja, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis hasil, penguatan pengawasan internal, serta peningkatan kapasitas aparatur sipil negara. Di samping itu, koordinasi lintas perangkat daerah dan sinergi pelaksanaan program pembangunan masih memerlukan penguatan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara efektif dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di Provinsi Maluku ke depan perlu difokuskan pada percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi, penguatan implementasi SPBE dan Satu Data Indonesia, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, serta penguatan koordinasi dan kolaborasi antar perangkat daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, transparan, dan berorientasi pada has

11. Belum Optimalnya Pelestarian Budaya dan Potensi Instabilitas Sosial

Belum optimalnya pelestarian budaya serta masih adanya potensi instabilitas sosial merupakan salah satu tantangan pembangunan di Provinsi Maluku yang memerlukan perhatian serius. Sebagai daerah yang memiliki keragaman budaya, adat istiadat, bahasa daerah, serta sejarah sosial yang kompleks, Provinsi Maluku menghadapi tantangan dalam upaya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan daerah di tengah arus globalisasi dan modernisasi. Di sisi lain, karakteristik masyarakat yang majemuk serta pengalaman konflik sosial pada masa lalu menuntut adanya upaya yang berkelanjutan untuk memperkuat kohesi sosial, toleransi, dan kerukunan masyarakat guna menjaga stabilitas daerah.

Dari aspek pembangunan kebudayaan, capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Maluku menunjukkan perkembangan yang relatif lambat dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, nilai IPK Provinsi Maluku pada tahun 2023 tercatat sebesar 57,27, masih berada di bawah target pembangunan kebudayaan nasional dan menunjukkan bahwa berbagai dimensi pembangunan kebudayaan, seperti ekonomi budaya, ketahanan sosial budaya, pendidikan, warisan budaya, dan ekspresi budaya, masih perlu diperkuat. Hingga tahun 2024 dan 2025, pengukuran IPK nasional belum menunjukkan peningkatan yang

signifikan bagi Provinsi Maluku, sehingga pelestarian dan pemajuan kebudayaan masih menjadi agenda strategis pembangunan daerah.

Di sisi lain, kondisi stabilitas sosial di Provinsi Maluku menunjukkan perkembangan yang cukup baik yang tercermin dari capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB). **Berdasarkan hasil survei Kementerian Agama, nilai IKUB Provinsi Maluku pada tahun** 2023 berada pada angka 78,64**, kemudian meningkat menjadi** 80,54 pada tahun 2024**, dan tetap berada dalam kategori tinggi pada tahun** 2025**, menjadikan Provinsi Maluku sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kerukunan umat beragama terbaik di Indonesia. Meskipun demikian, tingginya indeks kerukunan tersebut belum sepenuhnya menghilangkan potensi kerawanan sosial yang dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti kesenjangan ekonomi, konflik pemanfaatan sumber daya alam, penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, serta dinamika sosial politik di tingkat lokal.**

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelestarian budaya dan penguatan stabilitas sosial di Provinsi Maluku masih memerlukan intervensi yang lebih terarah melalui penguatan kelembagaan kebudayaan, pelindungan dan revitalisasi warisan budaya, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemajuan kebudayaan, penguatan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal, serta penguatan sistem deteksi dini dan mitigasi konflik sosial. Upaya tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa keberagaman budaya dan sosial yang dimiliki Provinsi Maluku dapat menjadi modal sosial yang kuat dalam mendukung pembangunan daerah yang inklusif, harmonis, dan berkelanjutan

2.16. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

2.16.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.16.1.1. Bidang Pendidikan

Permasalahan pada Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

a. Penguatan efektifitas birokrasi melalui penguatan tata kelola pelayanan pendidikan;
b. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan melalui pengembangan program dan kegiatan pelatihan, bimtek dan penilaian kinerja guru yang tepat sasaran serta memenuhi kebutuhan kompetensi guru;
c. Perluasan akses melalui pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan secara merata serta pemenuhan kesejahteraan siswa;
d. Rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik /pengajar serta pemerataan pada semua jenjang pendidikan;
e. Masih terbatasnya akses terhadap pelayanan pendidikan; dan
f. Belum optimalnya tatakelola bidang pendidikan.

2.16.1.2. Bidang Kesehatan

Berdasarkan hasil evaluasi tingkat capaian indikator kesehatan didapati Permasalahan kesehatan yang masih ditemui di Provinsi Maluku meliputi:

a. Masih tingginya tingkat kematian ibu dan bayi;
b. Perbaikan Gizi Masyarakat (stunting);
c. Pengembangan dan Pencapaian indikator Program TB;
d. Pengembangan dan Pencapaian indikator Program Malaria;
e. Penanggulangan HIV/AIDS;
f. Belum optimalnya kepesertaan dan layanan dalam jaminan kesehatan,
g. Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
h. Akreditasi Rumah Sakit;
i. Keterbatasan kapasitas, kuantitas dan distribusi tenaga medis dan paramedis;
j. Pengelolaan BLUD dan pelayanan masyarakat pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi, Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan;
k. Status Gizi Masyarakat Buruk dan prevalensi balita pendek masih belum dapat dikendalikan;
l. Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan dan akses pelayanan kesehatan daerah dan rujukan yang berkualitas belum merata;
m. Ketimpangan kualitas pelayanan kesehatan antar daerah di Provinsi Maluku disebabkan karena sumberdaya kesehatan masih belum merata memenuhi standar yang ditetapkan dan terjadi ketimpangan ketersediaan, pendistribusian dan penempatannya; dan
n. Masih terbatasnya alat kesehatan dan obat-obatan dibandingkan dengan peningkatan kebutuhan.

2.16.1.3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan bidang Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang yang masih ditemui di Provinsi Maluku, meliputi:

a. Masih rendahnya tingkat kemantapan jalan;
b. Rendahnya luas layanan irigasi;
c. Masih rendahnya aksesk air minum layak;
d. Masih rendahnya akses masyarakat kepulauan terhadap air bersih;
e. Belum optimalnya konektivitas infrastruktur ke kawasan prioritas (industri, pariwisata dan sumber pertanian) dan simpul pusat kegiatan
f. Terbatasnya infrastruktur asset ke-PU-an dalam rangka mendukung

sektor pelayanan dasar; dan

g. Masih rendahnya tingkat kesesuaian pemanfataran ruang terhadap RTRW.

2.16.1.4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan pembangunan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, meliputi:

a. Belum terintegrasinya pembangunan perumahan dengan Prasarana Sarana Utilitas Umum Permukiman (PSU);
b. Masih rendahnya cakupan ketersediaan rumah layak huni baik di Kawasan perkotaan dan pedesaan; dan
c. Belum terpenuhinya SPM perumahan.

2.16.1.5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan pembangunan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, meliputi:

a. Masih banyaknya pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta belum maksimalnya penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kab/Kota;
b. Belum optomalnya upaya-upaya penegakan Perda;
c. Belum memadainya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan penanggulangan bencana; dan
d. Masih rendahnya implementasi daerah terkait dengan penganggaran SPM Bidang Trantibumlinmas dalam APBD.

2.16.1.6. Bidang Sosial

Permasalahan pembangunan Bidang Sosial, meliputi:

a. Minimnya kepemilikikan lembaga kesejahteraan sosial yang berfungsi untuk menampung anak-anak terlantar; dan
b. Belum optimalnya keterpaduan penanganan PPKS dalam penanggulangan kemiskinan.

2.16.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.16.2.1. Tenaga Kerja

Permasalahan pembangunan Bidang Tenaga Kerja, meliputi:

a. Rendahnya keahlian, ketrampilan, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;

b. Terbatasnya kesempatan kerja di sektor formal;
c. Akses pencari kerja terhadap informasi pasar kerja belum optimal;
d. Kesejahteraan pekerja dan perlindungan tenaga kerja belum optimal;
e. Pengawasan implementasi norma ketenagakerjaan masih lemah;
f. Peningkatan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja;
g. Pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja yang belum maksimal;

2.16.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Permasalahan pembangunan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, meliputi:

a. Masih adanya Kabupaten/Kota yang belum konsisten dalam pelaksanaan pembangunan yang responsif gender;
b. Belum semua Dinas/Instasi/Lembaga membuat data terpilah berdasarkan gender;
c. Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak;
d. Perencanaan penganggaran berbasis gender belum optimal;
e. Masih ada Anak jalanan, anak korban narkoba, anak terlantar dan anak putus sekolah;
f. Tingginya bentuk kekerasan, penelantaran, dan perlakuan salah pada anak dan perempuan; dan
g. Kurangnya pengembangan usaha ekonomi produktif perempuan.

2.16.2.3. Pangan

Permasalahan pembangunan Bidang Pangan, meliputi:

a. Ketersediaan dan keterjangkauan sembilan bahan pokok serta distribusi dan pengawasan pangan belum terlaksana dengan baik dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
b. Keamanan pangan yang masih memerlukan penanganan serius terutama bahan addiktif dan cemaran (bahan kimia, mikro organisme dan fisik) yang membahayakan bagi kesehatan masyarakat;
c. Belum stabilnya harga bahan pangan strategis terutama beras pada saat panen raya. Pada saat menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional harga beberapa komoditi pangan strategis mengalami kenaikan karena meningkatnya permintaan;
d. Belum optimalnya pengembangan pangan strategis melalui intensifikasi dan ektensifikasi serta masih rendahnya diversifikasi produk pangan lokal;

dan

e. Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana untuk meningkatkan produktifitas pangan strategis dan pangan lokal.

2.16.2.4. Pertanahan

Permasalahan pembangunan Bidang Pertanahan, meliputi:

a. Masih tingginya intesitas konflik dan sengketa pertanahan;
b. Masih banyaknya tanah yang belum terdaftar; dan
c. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebutuhan tanah untuk kepentingan umum dan pembangunan.

2.16.2.5. Lingkungan Hidup

Permasalahan pembangunan Bidang Lingkungan Hidup, meliputi:

a. Belum dimilikinya dokumen rencana perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup (RPPLH) Provinsi Maluku;
b. Pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Maluku masih lemah. Hal ini diindikasikan oleh masih banyaknya masalah dalam perizinan dan pengawasan lingkungan seperti kasus AMDAL, laporan ketidaktaatan industri, keberadaan KPA di kabupaten/kota yang masih terbatas dan rendahnya kemampuan pengawasan lingkungan oleh kabupaten/kota;
c. Belum optimalnya upaya-upaya penanganan sampah dan limbah di Provinsi Maluku masih terbatas; dan
d. Indeks kualitas lingkungan hidup di Provinsi Maluku masih di bawah nasional. Pencemaran air dan udara di Provinsi Maluku masih terjadi. Air sungai di Provinsi Maluku rata-rata masih tercemar ringan sampai sedang. Dalam pengukuran kondisi lingkungan, belum didukung oleh laboratorium lingkungan yang mumpuni di kabupaten/kota.

2.16.2.6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, meliputi:

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Negeri belum berjalan secara optimal dikarenakan masih rendahnya SDM perangkat Desa/Negeri;
b. Masih kurangnya Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat;
c. Masih kurangnya usaha ekonomi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat; dan
d. Kurang optimalnya pembentukan dan pengembangan kawasan

perdesaan.

2.16.2.7. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana, meliputi:

a. Pertambahan penduduk yang cepat disebabkan oleh migrasi dan kelahiran;
b. Persebaran penduduk yang tidak merata serta tidak seimbangnya antara jumlah penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;

2.16.2.8. Perhubungan

Permasalahan pembangunan Bidang Perhubungan, meliputi:

a. Masih rendahnya kualitas pelayanan transportasi, yang disebabkan oleh belum terbentuknya kelembagaan pelayanan transportasi yang baik, belum maksimalnya pemberian subsidi terhadap pelayanan transportasi;
b. Belum optimalnya pengawasan standar pelayanan transportasi serta belum memadainya kualitas SDM dalam perencanaan dan pengelolaan layanan tranportasi;
c. Belum maksimalnya jangkauan pelayanan sarana transportasi dalam membangun konektifitas wilayah; dan
d. Belum semua daerah kabupaten/kota memiliki transportasi publik, di samping itu belum adanya keterpaduan intra dan antar modal transportasi.

2.16.2.9. Komunikasi dan Informatika

Permasalahan pembangunan Bidang Komunikasi dan informatika, meliputi:

a. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
b. Masih rendahnya pemahaman OPD sebagai produsen data tentang data yang harus diserahkan OPD;
c. Belum adanya aturan tentang statistik sektoral atau satu data Provinsi Maluku;
d. Belum terbentuknya Forum Data Satu Maluku;
e. Terbatasnya sarana dan parasana teknologi infomasi dan komunikasi

2.16.2.10. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Permasalahan pembangunan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, meliputi:

a. Persentase koperasi aktif yang masih rendah dikarenakan masih rendahnya kulitas manjemen kelembagaan koperasi;
b. Masih terbatasnya penerapan IT dalam pengembangan Usaha dan pemasaran. Akses pemasaran yang masi menggunakan cara-cara konvensional masiih merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dan UMKM di Provinsi Maluku. Sebagian besar koperasi dan UMKM dapat memproduksi satu barang dan jasa, namun tidak mampu mengakses pasar atas komoditas tersebut secara online; dan
c. Keterbatasan akses permodalan bagi koperasi dan UMKM.

2.16.2.11. Penanaman Modal

Permasalahan pembangunan Bidang Penanaman Modal Permasalahan Pembangunan meliputi:

a. Sarana Prasarana penunjang pelaksanaan PTSP belum tersedia sesuai kebutuhan;
b. Terhambatnya investasi yang disebabkan antara lain karena : ketertersediaan lahan untuk industri yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang dan keterbatasan infrastruktur pendukung;
c. Masih terdapat tumpang tindih regulasi penanaman modal antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota; dan
d. Masih terbatasnya data informasi mengenai peluang usaha/sektor/bidang usaha unggulan.

2.16.2.12. Kepemudaan dan Olahraga Permasalahan:

Permasalahan pembangunan Bidang Kepemudaan dan Olahraga, meliputi:

a. Belum optimalnya peran pemuda dalam pembangunan;
b. Rendahnya minat pemuda dalam pengembangan kewirausahaan;
c. Belum meratanya penyebaran sarana prasarana olahraga dalam menunjang prestasi olahraga di Provinsi Maluku; dan
d. Rendahnya peran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemuda dan olahraga.

2.16.2.13. Statistik

Permasalahan pembangunan Bidang Statistik, meliputi:

a. Masih rendahnya ketersediaan dan layanan data/informasi statistic sektoral;
b. Masih rendahnya komitmen perangkat daerah dalam menyediakan dan

menyampaikan data tepat waktu; dan

c. Belum optimalnya pemanfaatan data statistic bagi pembangunan.

2.16.2.14. Persandian

Permasalahan pembangunan Bidang Persandian, meliputi:

a. Sistem keamanan informasi masih lemah;
b. Kesadaran keamanan informasi masih rendah; dan
c. Kurangnya sarana dan prasarana teknologi keamanan informasi.

2.16.2.15. Kebudayaan

Permasalahan pembangunan Bidang Kebudayaan, meliputi:

a. Belum optimalnya nilai pemanfaatan ekonomi cagar dan objek pemajuan budaya;
b. Keterbatasan kewenangan pengelolaan urusan kebudayaan di tingkat provinsi, berdampak terhadap optimalisasi pelestarian dan pengembangan cagar budaya di wilayahnya; dan
c. Masih kurangya tempat kesenian sebagai area untuk mengekspresikan dan pementasan seni budaya daerah.

2.16.2.16. Perpustakaan

Permasalahan pembangunan Bidang Perpustakaan, meliputi:

a. Belum meratanya pelayanan perpustakaan keliling;
b. Rendahnya minat baca siswa dan masyarakat; dan
c. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dapat mendukung peningkatan minat baca.

2.16.2.17. Kearsipan

Permasalahan pembangunan Bidang Kearsipan, meliputi:

- Terbatasnya Sarana dan Prasarana Kearsipan untuk mendukung pengolahan, penyelamatan, dan pelayanan kepada masyarakat.

2.16.3. Urusan Pilihan

2.16.3.1. Kelautan dan Perikanan

Permasalahan pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan, meliputi:

a. Aspek Ekonomi :
   - Kontinuitas Produksi belum stabil (tergantung musim).
   - Pemahaman terhadap pengamanan kualitas ikan masih rendah.

- Infrastruktur pendukung belum terpenuhi secara optimal.
- Daya saing produksi yang masih rendah.
- Akses Permodalan masih relative sulit dan bunga yang masih tinggi.

b. Aspek Sosial :

- Profesi nelayan masih dianggap sebagai pekerjaan informal.
- Didominasi oleh nelayan skala kecil dan bersifat individual.
- Kualitas nelayan masih rendah.

c. Aspek Lingkungan :

- Sistem pengawasan yang bekum berjalan dengan baik.
- Sebagian besar terfokus hanya daerah pantai/pesisir karena skala kecil mengakibatkan banyak kawasan yang telah mengalami padat tangkap (tingginya penangkapan di perairan pesisir).
- Pencemaran perairan.

d. Aspek Kelembagaan :

- Kapasitas kelembagaan pengawas masih terbatas.
- Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam pengendalian pemanfaatan sumber daya perikanan.
- Belum adanya system pengelolaan data perikanan tangkap.

2.16.3.2. Pariwisata

Permasalahan pembangunan Bidang Pariwisata, meliputi:

a. Masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam industri pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
b. Terbatasnya kewenangan pemerintah provinsi dalam pengembangan objek wisata didaerah.

2.16.3.3. Pertanian

Permasalahan pembangunan Bidang Pertanian, meliputi:

a. Belum optimalnya peningkatan Produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
b. Produksi dan Produktifitas masih rendah;
c. Nilai tambah dan daya saing produk masih rendah;
d. Ketersediaan sarana dan prasarana belum mencukupi;
e. Masih terjadi alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian;
f. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pertanian; dan
g. Belum optimalnya akses ketersediaan modal usaha di tingkat petani.

2.16.3.4. Kehutanan

Permasalahan pembangunan Bidang Kehutanan, meliputi:

a. Sumber daya hutan Provinsi Maluku belum terkelola secara optimal untuk meningkatkan perekonomian daerah;
b. Klaim masyarakat adat atas hak ulayat pada kawasan hutan & penggunaan kawasan hutan non prosedural;
c. Kerusakan ekosistem mangrove & lahan kritis yang luas tersebar di kab/kota;
d. Belum opetimalnya pengawasan penebangan liar & peredaran kayu illegal; dan
e. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan.

2.16.3.5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Permasalahan pembangunan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, meliputi:

a. Belum tercapainya cakupan rasio elektrifikasi 100%;
b. Belum optimalnya pemanfaatan potensi energi baru terbarukan (EBT);
c. Minimnya data dan informasi potensi energy dan sumber daya mineral serta daerah rawan bencana geologi;
d. Rendahnya ketaatan serta pemahaman pelaku usaha pertambangan terhadap regulasi di bidang energy dan sumber daya mineral;
e. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan bahan bakar selain minyak;
f. Maraknya penambangan tanpa ijin; dan
g. Belum optimalnya pemanfaatan potensi air tanah.

2.16.3.6. Perdagangan

Permasalahan pembangunan Bidang Perdagangan, meliputi:

a. Masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen serta belum optimalnya pengawasan barang dan jasa;
b. Ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang belum memadai, seperti pasar tradiisonal yang perlu direhabilitasi, pusat kuliner dan lain-lain; dan
c. Masih banyak ditemui barang beredar yang tidak memenuhi ketentuan.

2.16.3.7. Perindustrian

Permasalahan pembangunan Bidang Perindustrian, meliputi:

a. Belum optimalnya pengembangan OVOP (One Village One Product);
b. Daya saing produk IKM yang dihasilkan masih relatif rendah dari sisi kemasan, standar dan mutu produk;
c. Inovasi dan diversifikasi produk industri kecil menengah masih rendah; dan
d. Belum optimalnya pengembangan industri sesuai potensi daerah.

2.16.3.8. Transmigrasi

Permasalahan pembangunan Bidang Transmigrasi, meliputi:

a. Rendahnya kemampuan anggaran baik di Provinsi dan Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan transmigrasi sehingga kegiatan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah tidak dapat dilaksanakan secara maksimal; dan
b. Terkait dengan penyelesaian permasalahan lahan transmigrasi adanya pembatasan kewenangan Provinsi yang hanya bisa mengintervensi Kawasan Transmigrasi yang lintas Kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi.

2.16.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.16.4.1. Administrasi Pemerintahan

Permasalahan pembangunan Bidang Pemerintahan, meliputi:

a. Sumber Daya Manusia di bidang kehumasan, Data Statistik Sektor dan Keprotokalan belum memadai;
b. Personil. Kesiapan penyelenggara kegiatan terutama kemampuan teknis operasional masih sangat terbatas, disamping multi persepsi dari masing-masing personil turut menghambat terlasananya program/kegiatan;
c. Belum optimalnya koordinasi internal di lingkup DPRD, dan koordinasi eksternal Sekretariat DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam pembahasan RANPERDA yang diusulkan;
d. Belum optimalnya kualitas kemampuan Sumber Daya Aparatur;
e. Masih terbatasnya kewenangan yang diberikan pada Badan Penghubung Provinsi Maluku sebagai perwakilan daerah di Jakarta;
f. Sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Penghubung Provinsi Maluku belum cukup memadai; dan
g. Belum optimalnya pengelolaan program-program dibidang promosi.

2.16.4.2. Pengawasan

Permasalahan pembangunan Bidang Pengawasan, meliputi:

a. Masih kurangnya respon auditan dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Maluku;
b. Masih kurangnya SDM aparatur pengawasan di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku; dan
c. Terbatasnya sarana dan prasarana yang representative dalam pelaksanaan tugastugas pengawasan untuk menjalani tugas dan fungsi pengawasan.

2.16.4.3. Perencanaan

Permasalahan pembangunan Bidang Perpustakaan, meliputi:

a. Rendahnya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan daerah akibat ego sektoral yang mempersulit penyelesaian masalah lintas sektor;
b. Sistem pengendalian dan evaluasinya pembangunan belum berjalan secara optimal;
c. Belum berkembangnya sistim inovasi daerah, jaringan penelitian dan pengembangan serta terbatasnya kuantitas dan kualitas penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek;
d. Masih rendahnya alokasi anggaran serta fasilitas kerja untuk meningkatkan pemantapan kawasan perbatasan Provinsi Maluku; dan
e. Belum terintegrasinya proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan pemerintah provinsi Maluku.

2.16.4.4. Keuangan

Permasalahan pembangunan Bidang Perpustakaan, meliputi:

- Belum optimalnya Penerimaan Retribusi Daerah, pajak Daerah dan Alokasi Dana Transfer dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah Provinsi Maluku.

2.16.4.5. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan pembangunan Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan, meliputi:

a. Minimnya PNS yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk bisa melaksanakan inpassing ke dalam Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 26/2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian (Inpassing);

b. Masih belum maksimalnya sinergitas antara pengelola kepegawaian provinsi dengan kabupaten/kota terutama dalam pelaksanaan Manajemen kepegawaian berbasis sistem merit;
c. Peningkatan layanan kepegawaian berbasis elektronik (less paper) dalam rangka percepatan pelayanan kepegawaian;
d. Sarana dan prasarana pendukung kediklatan belum memenuhi standar akreditasi terbaik dari Lembaga Administrasi Negara; dan
e. Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara diklat belum dapat memenuhi perkembangan standar kompetensi penyelenggara diklat.

2.16.4.6. Fungsi Lainnya

Permasalahan dalam fungsi lain penunjang pemerintahan daerah, yaitu:

a. Belum optimalnya pengelolaan aset daerah dalam pengamanan dan pemanfaatan aset daerah yang mendukung peningkatan pendapatan;
b. Masih belum optimalnya pengelolaan kas dan aset tetap pada kabupaten/ kota yang tercermin dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang belum akuntabel;
c. Keterlambatan penyelesaian rancangan peraturan daerah yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) akibat belum adanya standar waktu pengusulan, pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah oleh eksekutif dan legislative;

2.17. Isu Strategis Pembagunan

2.17.1. Isu Strategis Provinsi Maluku

Isu-isu ini dirumuskan karena memiliki dampak langsung terhadap pencapaian visi pembangunan jangka menengah, sekaligus menjadi fondasi bagi pencapaian target jangka panjang maupun jangka menengah (RPJPD & RPJMD). Antara lain rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat tidak hanya menjadi permasalahan teknis, tetapi juga isu strategis karena berpengaruh pada daya saing daerah. Demikian pula, ketimpangan antarwilayah di Maluku menjadi isu strategis karena menghambat pemerataan kesejahteraan dan berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial.

Dengan kata lain, isu strategis dibuat untuk menyederhanakan kompleksitas permasalahan menjadi fokus kebijakan yang lebih terarah. Penyebabnya adalah karena tidak semua permasalahan bisa ditangani sekaligus, sehingga perlu dipilih yang paling mendesak, berdampak luas, dan berhubungan langsung dengan sasaran RPJMD. Inilah

mengapa isu strategis selalu relevan dengan RPJMD: ia menjadi jembatan antara analisis masalah dan arah kebijakan yang akan dijalankan pemerintah daerah.

Perumusan isu strategis Provinsi Maluku dalam perencanaan pembangunan daerah tahun 2027, masih relevan dengan isu strategis yang ada pada RPJMD 2025 - 2029 yang telah dikaji dan dianalisis permasalahan pembangunannya. Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan dan tantangan pembangunan sebagaimana dijabarkan pada isu internasional, isu nasional, isu regional, maupun telaahan RTRW, maka dapat diindikasikan bahwa isu strategis pada rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Maluku Tahun 2027 dijabarkan sebagai berikut:

A. SDM Yang Berdaya Saing Terbatas

Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing tinggi merupakan kebutuhan yang mutlak dan mendesak di era revolusi industri 4.0. Hal ini disebabkan karena SDM merupakan salah satu sumber daya strategis yang dimiliki dan harus terus menerus dibina dan dikembangkan secara berkesinambungan.

Salah satu kunci keberhasilannya adalah pembangunan manusia yang seutuhnya, dengan menciptakan SDM yang memiliki kemampuan profesional serta kematangan pribadi dan saling memperkuat satu dengan yang lainnya. Profesionalisme dapat turut membentuk sikap dan perilaku serta kepribadian SDM yang tangguh, di mana kepribadian tersebut merupakan persyaratan dalam membentuk profesionalisme. Minimal ada empat kebijakan pokok dalam upaya peningkatan SDM yaitu: Peningkatan kualitas hidup yang meliputi baik kualitas manusianya seperti jasmani dan rohani, serta kualitas kehidupannya seperti perumahan dan pemukiman yang sehat; Peningkatan kualitas SDM yang produktif dan upaya pemerataan penyebarannya ; Peningkatan kualitas SDM yang berkemmapuan dalam memanfaatkan, mengambangkan dan mengusai IPTEK yang berwawasan lingkungan; serta pengembangna pranata yang meliputi kelembagaan dan pearan hukum yang mendukunng upaya peningkatan kualiats SDM.

Dalam kaitan ini, terdapat beberapa hal yang harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kualitas SDM, antara lain, pertama, sistem pendidikan yang baik dan bermutu. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan penataan terhadap sistem pendidikan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Pemerintahdaerah dalam hal ini harus memiliki peran penting dalam penyelenggaraan sistem pendidikan yang efektif dan efisien, berorientasi pada penguasaan IPTEK serta merata di seluruh daerah kepulauan.

Untuk itu, peningkatan kapasitas SDM dilakukan melalui berbagai diklat, kompetensi, pembinaan, dan lain-lain. Tenaga kerja profesional dan terampil sesuai tuntutan/kebutuhan pasar merupakan faktor keunggulan suatu bangsa dalam menghadapi persaingan global. Perlu menjadi perhatian, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, memegang peranan penting dalam menyiapkan program-program strategis guna menghasilkan SDM berkualitas dan siap memasuki pasar kerja. Pembinaan dan pengembangan masyarakat terutama generasi muda. Sebagai penopang utama dalam roda pembangunan, pemberdayaan generasi muda diharapkan dapat menciptakan generasi yang kreatif, inovatif dan berdaya saing tinggi. Karakteristik generasi muda seperti inilah yang diharapkan mampu berkonstribusi dan memenangkan persaingan global.

Kepribadian dan karakter sumber daya unggul juga diperlukan. Kerja sama stakeholder dalam mewujudkannya, untuk itu, penguatan peran lembaga agama dalam kehidupan sosial bermasyarakat dalam rangka memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa (*character building*) menjadi sangat penting.

B. Belum Optimalnya Pengembangan IPTEKIN dan RISET

Produktivitas pemanfaatan sumber daya alam unggulan masih relatif rendah karena belum didukung teknologi, inovasi dan riset yang memadai serta sumber daya manusia dan infrastruktur yang berkualitas. Ekosistem riset, IPTEK dan inovasi yang lemah berakibat pada kurangnya hasil riset berkualitas dan aplikatif. Provinsi Maluku memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, namun untuk memanfaatkan sumber daya alam sebagai komoditas utama penggerak ekonomi Maluku diperlukan penguatan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi dan riset yang mutakhir. Seiring dengan kemajuan IPTEKIN yang berkembang begitu cepat, baik secara nasional maupun global, hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi Maluku untuk dapat mewujudkan kemajuan IPTEK, inovasi dan riset daerah yang didukung sumber daya manusia berkualitas sebagai bagian dari solusi terhadap isu dan tantangan pembangunan.

C. Pembangunan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya hilirisasi komoditas unggulan

Perekonomian Indonesia sedang menghadapi tantangan besar. Tantangan ini terkait upaya mengubah pola pertumbuhan ekonomi yang sarat tergantung pada sumber daya alam yang berlimpah dan upah tenaga kerja yang murah, menjadi pola pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif *(inclusive growth)* serta ramah lingkungan dan berkelanjutan *(green growth)*. Pertumbuhan yang inklusif didefinisikan sebagai pertumbuhan yang tidak hanya menghasilkan peluang

ekonomi, tetapi juga menjamin akses yang adil bagi seluruh anggota masyarakat terhadap peluang ekonomi yang tercipta. Pertumbuhan yang inklusif memungkinkan semua anggota masyarakat untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi atas dasar kesetaraan terlepas dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeda (Hill, Khan, Zhuang 2012: 2).

Menurut ADB (2011), ada beberapa alasan mengapa perekonomian harus inklusif yaitu:

1. Pertimbangan kesetaraan dan keadilan, pertumbuhan seharusnya terdistribusi dan inklusif di seluruh lapisan masyarakat dan daerah.
2. Pertumbuhan dengan ketimpangan yang persisten dapat membahayakan kondisi sosial, seperti orang miskin dan pengangguran lebih rentan masuk dalam aktivitas kriminal, perempuan lebih rentan ke prostitusi, dan tenaga kerja anak yang tidak diharapkan.
3. Ketimpangan dalam hasil dan akses yang berkelanjutan dapat mengganggu stabilitas politik dan struktur sosial sehingga mengurangi potensi pertumbuhan yang berkelanjutan.

Tantangan pembangunan ekonomi Provinsi Maluku ke depan adalah membangun keterkaitan hulu dan hilir dari komoditas komoditas unggulan yang dapat menjadi basis perekonomian Provinsi Maluku pada masa mendatang dalam upaya peningkatan kualitas pertumbuhan ekonominya harus mendrong terwujdunya kebijakan Transformasi ekonomi menuju keseimbangan permintaan antara dan permintaan akhir merupakan salah satu upaya yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian daerah.

Transformasi dari ekonomi berbasis SDA tak terbaharukan menjadi ekonomi berbasis SDA terbaharukan merupakan tantangan utama yang perlu disiapkan oleh pemerintah daerah dalam jangka menengah dan panjang. Proses menipisnya stok SDA tak terbaharukan merupakan hukum alam yang tidak dapat dicegah, sehingga transformasi menjadi suatu keharusan guna menjamin keberlanjutan pembangunan wilayah Provinsi Maluku. Sektor nonmigas memiliki tingkat pertumbuhan rata-rata yang lebih tinggi daripada sektor migas. Kondisi ini mencerminkan bahwa sektor-sektor nonpertambangan yang saat ini belum dimaksimalkan memiliki perilaku pertumbuhan alami yang menjanjikan.

Provinsi Maluku berfokus pada sektor unggulan pertanian, kehutanan dan perikanan yang merupakan sektor primer. Sektor sekunder (manufaktur) dan tersier (jasa) harus lebih ditingkatkan dengan adanya inovasi hasil sektor tersebut. Diperlukan otoritas pengawasan pada tingkat daerah untuk mengurangi degradasi

lingkungan hidup. Pemerintah bersama dengan pelaku pembangunan lainnya perlu melakukan kolaborasi untuk memperkuat produktivitas daerah. Berbagai upaya untuk pengembangan sektor-sektor unggulan non migas dan tambang perlu ditempuh, seperti pendekatan industri teknologi bersih melalui penerapan transformasi digital dan industrialisasi hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan secara berkelanjutan; pembangunan rendah karbon memalui ekonomi sirkular; industri hijau; peningkatan ekowisata dan pariwisata.

a. Peningkatan Keberdayaan ekonomi masyarakat

   Masalah kesejahteraan sosial tidak terlepas dari masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Provinsi Maluku dihadapkan dengan masalah kemiskinan dengan akar masalah yang sebagian berbeda-beda pada setiap daerah kabupaten/kota. Penanganan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem menjadi perhatian pemerintah Daerah. Berbagai upaya telah dilakukan dan masih terus dilaksanakan, antara lain upaya untuk meningkatkan kemampuan penduduk miskin dan rentan dalam pemenuhan kebutuhan dasar untuk kemandirian, meningkatkan kualitas SDM dan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial, serta penataan permukiman kumuh dan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak.

   Pemerintah daerah juga terus berusaha untuk meningkatkan dan menguatkan partisipasi UMKM dan koperasi. Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi diharapkan dapat membangkitkan perekonomian masyarakat serta membuka lapangan kerja. Pengembangan usaha UMKM dan koperasi diarahkan juga untuk mengolah produk-produk lokal hasil pertanian dalam arti luas, kelautan dan perikanan, serta unggulan lainnya

b. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur

   Pengembangan perekonomian daerah membutuhkan dukungan infrastruktur yang andal. Pembangunan Provinsi Maluku masih dihadapkan pada minimnya infrastruktur sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan peningkatan mutu layanan bagi masyarakat, baik itu infrastruktur dasar maupun infrastruktur yang mendukung perekonomian daerah. Infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi, persampahan, telekomunikasi dan listrik diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan penerapan standar pelayanan minimal (SPM). Selain itu, infrastruktur juga diarahkan ke kawasan-kawsan strategis yang mampu membangkitkan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

D. Belum Optimanya Infratsruktur Dasar, serta infrastrutur transportasi, dan telekomunikasi untuk meningkatkan koneketivitas antar pulau

Sebagai provinsi kepulauan dengan 1.340 pulau yang tersebar, Provinsi Maluku menghadapi tantangan besar dalam penyediaan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, transportasi, serta telekomunikasi. Keterbatasan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, energi, dan perumahan layak masih menjadi persoalan di berbagai wilayah, khususnya di pulau-pulau kecil dan terluar. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kualitas hidup masyarakat dan menghambat produktivitas ekonomi lokal. Selain itu, jaringan transportasi darat, laut, dan udara belum terintegrasi secara baik sehingga konektivitas antar pulau masih lemah. Biaya logistik yang tinggi, keterbatasan armada, serta belum meratanya pelabuhan dan bandara yang representatif, menjadikan pergerakan barang, jasa, dan orang masih terkendala. Di sisi lain, infrastruktur telekomunikasi yang belum optimal juga memperlebar kesenjangan akses informasi dan teknologi digital. Akses internet yang lambat dan belum merata di pulau-pulau kecil menyebabkan keterbatasan masyarakat dalam mengakses layanan publik, pendidikan, kesehatan, maupun peluang ekonomi digital. Kondisi ini jika tidak segera diatasi akan menghambat pencapaian sasaran pembangunan daerah, memperlebar kesenjangan antarwilayah, dan menurunkan daya saing daerah. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur dasar, transportasi, dan telekomunikasi untuk memperkuat konektivitas antar pulau menjadi isu strategis yang tetap harus mendapat perhatian prioritas dalam perencanaan pembangunan tahun 2027.

E. Masih Tinggginya Angka Kemiskinan dan Prevalensi Stunting

Masih tinggnya Angka kemiskinan dan prevalensi stunting Provinsi Maluku dirasakan akan terus mengalami tantangan semakin berat pada level makro Pemerintah Provinsi Maluku akan dihadapkan dengan tantangan untuk menjaga stabilitas inflasi/harga, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja produktif, maupun menjaga iklim investasi masih dihadapkan dengan kenyataan terjadinya kenaikan harga komoditas pangan dan energi. Pada level mikro, upaya untuk menurunkan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan kelompok miskin melalui program ekonomi produktif juga menghadapi tantangan yang tidak ringan, yakni dimilikinya akurasi data dan mewujudkan sinergi antar program yang melibatkan pemerintah daerah, kementerian/lembaga dan dunia usaha, Selain itu, harus didorong percepatan pemutakhiran data melalui Regsosek dengan tujuan membangun data

kependudukan tunggal, atau satu data yang bisa digunakan untuk melaksanakan berbagai program secara terintegrasi, tidak tumpang tindih, dan lebih efisien.

F. Kesenjangan Antarwilayah

Provinsi Maluku secara fisik terdiri atas 1,340 pulau dan didominasi oleh pulau kecil serta tata letaknya yang tersebar dalam wilayahnya seluas 712.479,65 Km2 dan mempunyai luas laut mencapai 658.294,69 Km2 atau 92,4% dibandingkan dengan luas daratan (terestrial) yang luasnya hanya 54.184,96 Km2 atau sekitar 7,6%. Karakteristik geografis tersebut menunjukan bahwa potensi Provinsi Maluku dominasi akan karakteristik wilayah yang bercirikan kepulauan sebagai keunggulan komparitif terhadap wilayah provinsi lainya. Potensi wilayah yang bercirikan kepulauan tidak hanya mencakup daratan tetapi juga laut beserta ekosistemnya. Selain itu, terdapat 5 kabupaten/kota di Provinsi Maluku yang berada pada Kawasan perbatasan. Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual merupakan kabupaten/kota yang berbatasan laut dengan negara tetangga Australia dan Timor Leste.

Pemerataan pembangunan yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, menjadi isu strategis sebagai mainstream pembangunan ekonomi ke depan. Strategi kebijakan pembangunan yang berpihak kepada pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan akan terus dipacu, guna lebih meningkatkan daya saing menuju kemakmuran yang berkeadilan. Kemakmuran yang berkeadilan sejatinya merupakan jawaban terhadap berbagai masalah ketimpangan yang masih menjadi tantangan besar pembangunan.

Ketimpangan yang terjadi antara lain dapat dicermati dari angka kemiskinan, tingkat pengangguran dan pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya konektivitas antarwilayah. Dengan karakteristik wilayah kepulauan salah satu tantangan terbesar pembangunan di Provinsi Maluku adalah aksesibilitas dan konektivitas wilayah. Untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, diperlukan adanya infrastruktur yang mampu menjalin konektivitas di setiap wilayah Provinsi Maluku. Infrastruktur transportasi yang memudahkan mobilitas orang, barang dan jasa dalam rangka menurunkan biaya logistik dan produk hingga sampai ke tangan konsumen, yang juga mendukung pelayanan dasar. Konsep konektivitas kepulauan di Provinsi Maluku diharapkan menjadikan Provinsi Maluku yang terakses secara lokal, terintegrasi secara nasional dan terhubung secara global. Untuk itu selain memperkuat aksesibilitas lokal, konektivitas dengan jaringan nasional dan global pun perlu diperhatikan, salah satunya dengan mempersiapkan

pintu keluar di kawasan perbatasan sebagai salah satu pintu gerbang bagian selatan Indonesia.

G. Resiko Bencana, Ancaman Perubahan Iklim dan Kerentanan Daya Dukung Wilayah

Integrasi adaptasi perubahan iklim dengan pengurangan risiko bencana merupakan tantangan yang perlu disinergikan dalam sistem pembangunan. Kebijakan adaptasi perubahan iklim dengan turut mempertimbangkan risiko bencana diperlukan untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam melakukan pencegahan, mengurangi kerentanan (mitigasi) dan meningkatkan kapasitas (kesiapsiagaan). Provinsi Maluku berkarakteristik wilayah kepulauan yang didominasi oleh pulau-pulau kecil di mana pulau kecil memiliki sumberdaya alam yang sangat terbatas. Terbatasnya sumberdaya alam pulau (ruang, air, vegetasi, tanah, kawasan pantai dan margasatwa) serta rapuhnya ekosistem pulau, sangat menentukan kapasitas sebuah pulau untuk menerima dan dibangun secara berkelanjutan. Pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak diimbangi oleh upaya penanggulangan akan berdampak negatif terhadap keberlangsungan lingkungan hidup. Hal ini tidak hanya mengancam keberlangsungan lingkungan alam, tetapi juga keberlangsungan hidup manusia sendiri. Isu pemanasan global dan perubahan iklim hanyalah sebagian dari sekian banyak isu lingkungan untuk diperhatikan yang tidak hanya bersifat lokal tetapi global, demikian halnya dengan Indonesia dan khususnya Maluku. Indonesia masih menghadapi tantangan besar dimana model pembangunan ekonomi yang dikembangkan telah menggerakkan pembangunan ekonomi yang cenderung bersifat ekstraktif atau mengandalkan eksploitasi sumberdaya alam secara langsung. Bahkan ada kecenderungan besar di mana upaya mempertahankan fungsi lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari masih jauh dari yang diharapkan.

Perubahan iklim di Provinsi Maluku akan sangat terkait dengan aktivitas masyarakat di wilayah laut dan pesisir serta pertanian. Ketersediaan air dan kesehatan juga sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim. Peningkatan tinggi gelombang ekstrem, kenaikan permukaan air laut, peningkatan suhu dan perubahan curah hujan merupakan risiko yang perlu diantisipasi.

H. Tata Kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik

Berbagai masalah faktor penyebab belum optimalnya penyelenggaran tata kelola pememerintahan dalam penyelenggaran pelayanan publik antara lain faktor

SDM aparatur, organisasi, tata laksana, pola pikir, kinerja organisasi dan budaya birokrasi yang berimplikasi pada upaya mewujudkan Inovasi dalam birokrasi. Karenanya perlu kebijakan pemerintahan yang dapat mengoptimalkan kinerja birokrasi dengan menciptakan pemerintahan yang transparan, bersih, efektif, dan terpercaya. Selain itu pemerintah juga diperhadapkan dengan upaya Menyederhanakan birokrasi, meningkatkan kemudahan dan kecepatan layanan publik salah satuanya melalui inovasi berbasis *Information and Communication Technology* (ICT). Pengembangan komitmen dan kualitas ASN secara merit sistem serta berkelanjutan. Pemantapan sistem informasi pembangunan yang transparan dan membuka ruang aspirasi secara luas serta mendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Selain itu cita-cita untuk mewujudkan *good governance* mesti dilakukan dengan membangun kolaborasi sinergi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil dalam pengelolaan sumber-sumber alam, sosial, lingkungan dan ekonomi. *Good governance* menitikberatkan pada adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, pemberdayaan hukum, efektifitas dan efisiensi, dan keadilan.

2.17.2. Isu Strategis dan Fokus Pembangunan Daerah

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku merumuskan sejumlah isu strategis yang lahir dari permasalahan pembangunan mendasar sebagaimana diuraikan sebelumnya. Isu strategis ini merupakan penyederhanaan dari kompleksitas masalah, sehingga menjadi fokus kebijakan yang lebih terarah, berdampak luas, dan relevan dengan pencapaian sasaran RPJMD.

Fokus pembangunan daerah diarahkan untuk menjawab isu-isu tersebut secara sistematis. Dengan demikian, isu strategis dan fokus pembangunan daerah Maluku saling terkait dan membentuk kerangka kebijakan yang komprehensif. Keduanya menjadi landasan bagi perumusan prioritas pembangunan tahun 2027, sehingga arah kebijakan yang diambil benar-benar menjawab tantangan nyata dan mendukung pencapaian visi pembangunan daerah.

Tabel 2.56

Isu Strategis Daerah

No	Isu Strategis	Fokus
1	**SDM Yang Berdaya Saing Terbatas**	1. Peningkatan Kuatintas sarana dan prasarna kesehatan dan pendidikan 2. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan kesehatan 3. Masih belum optimalnya peran pemuda dalam pembangunan

No	Isu Strategis	Fokus
2	**Belum Optimanya Infratsruktur Dasar, serta infrastrutur transportasi, dan telekomonikasi untuk meningkatkan konketivitas antar pulau**	1. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur perekonomian dan integrasinya terhadap pusat-pusat pertumbuhan ekonomi 2. Keterkaitan antar moda masih belum optimal 3. Pemenuhan akses infrastruktur dasar belum merata
3	**Kesenjangan Antarwilayah**	1. Difokuskan pada peningkatan sarana dan prasarana dasar dan penunjang 2. Pemerataan sarana dan prasarana dasar dan penunjang yang menjangkau wilayah pulau
4	**Pembangunan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya hilirisasi komoditas unggulan**	1. Difokuskan pada upaya paningkatan fasilitasi sarana produksi perikanan, memperkuat kapasitas dan keterampilan kelompok pembudidaya dan pembenih ikan yang diarahkan pada sentra-sentra usaha perikanan; 2. Difokuskan pada upaya meningkatkan fasilitasi sarana produksi, mendorong revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani dan kelompok ternak dengan prioritas pada sentra-sentra produksi pertanian/perkebunan dan peternakan 3. Mendorong terwujudnya Peningkatan diversifikasi
5	**Resiko Bencana, Ancaman Perubahan Iklim dan Kerentanan Daya Dukung Wilayah**	1. Penurunan Indeks Kualitas Air 2. Peningkatan luas lahan kritis pada Kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan; 3. Indeks risiko bencana Indonesia (IRBI) di Maluku cenderung masih tinggi 4. mitigasi bencana yang belum optimal 5. Kerentanan pulau-pulau kecil terhadap bencana akibat perubahan iklim
6	**Tata Kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik**	1. Indeks Profesionalitas ASN Provinsi Maluku masih rendah 2. Masih belum optimalnya pelayanan masyarakat berbasis elektronik. 3. Masih belum optimalnya profesionalime ASN 4. Masih belum optimalnya penerapan informasi publik (SAKIP)
7	**Masih tingginya angka kemiskinan dan prevalensi stunting**	1. Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan yang menjankau masyarakat miskin 2. Menyediakan dan memfasilitasi tenaga kerja yang terampil dengan melakukan pengembangan sistem informasi investasi dan tenaga kerja berbasis teknologi informasi.
8	**Belum Optimalnya Pengembangan IPTEKIN dan RISET**	1. Difokuskan untuk Produk Inovasi Daerah 2. Penguatan peran litbang dalam menghasilkan kebijakan pembangunan
9	**Pelestarian Budaya Belum Optimal dan Potensi Stabilitas Sosial**	1. Difokuskan untuk pelestarian budaya 2. Difokuskan untuk penguatan kerukunan umat beragama, harmonisasi, kelembagaan adat

2.17.3. Keterkaitan Masalah dan Isu Strategis

Keterkaitan antara permasalahan pembangunan dengan isu strategis dan prioritas pembangunan Tahun 2027 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.57
Keterkaitan Permasalahan dengan Isu Strategis dan Prioritas Daerah Tahun 2027

No	Permasalahan Pembangunan	Isu Stratgeis	Prioritas Daerah Tahun 2027
1	Belum optimalnya aksesibilitas dan layanan kesehatan	Sumber Daya Manusìa Yang Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM untuk mendukung daya saing dan produktivitas daerah
2	Belum meratanya kualitas dan aksesibilitas Pendidikan		
3	Belum Optimalnya pengembangan IPTEKIN dan riset	Belum Optimalnya pengembangan IPTEKIN dan riset	
4	Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi daerah	Pembangunan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya hilirisasi komoditas unggulan	Penguatan pengelolaan dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam unggulan daerah
5	Kesenjangan Antara Wilayah masih Tinggi	Kesenjangan Antarwilayah	Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah kepulauan
6	Belum merata dan memadainya infrastruktur wilayah dan dasar	Belum Optimalnya Infrastruktur Dasar, serta infrastruktur transportasi, dan telekomunikasi untuk meningkatkan koneketivitas antar pulau	
7	Tingkat Kemiskinan Provinsi Maluku Masih Tinggi	Masih tingginya angka kemiskinan dan prevalensi stunting	Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran melalui pemberdayaan ekonomi produktif dan UMKM
8	Masih Tingginya Tingkat Pengangguran		
9	Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Serta Ancaman Bencana	Resiko Bencana, Ancaman Perubahan Iklim dan Kerentanan Daya Dukung Wilayah	Penguatan Kapasitas Pengendalian Lingkungan Dan Resiliensi Terhadap Bencana Untuk Menjamin Pembangunan Yang Berkelanjutan
10	Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Tata Kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan public	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Dalam Mendukung Pelayanan Publik Yang Inklusif Dan Berkelanjutan
11	Belum Optimalnya Pelestarian Budaya dan Potensi Instabilitas Sosial	Pelestarian Budaya Belum Optimal dan Potensi Stabilitas Sosial	Penguatan kapasitas lembaga sosial kemasyarakatan berbasis kearifan lokal serta ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum

2.18. Telaah Pokok pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang kemudian ditelaah secara sistematis untuk memastikan keselarasan dengan isu strategis pembangunan daerah. Telaah ini menjadi jembatan antara kebutuhan riil masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD dan RKPD. Dengan demikian, pokok pikiran DPRD tidak hanya mencerminkan suara rakyat, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memastikan efektivitas dan akuntabilitas pembangunan daerah.

Dalam konteks isu strategis, pokok pikiran DPRD menyoroti tantangan utama seperti tingginya angka kemiskinan, ketimpangan antarwilayah, keterbatasan infrastruktur dasar, serta ancaman perubahan iklim dan bencana. Isu-isu tersebut kemudian dihubungkan dengan prioritas pembangunan daerah, antara lain percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas SDM, penguatan tata kelola pemerintahan, serta pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah kepulauan. Dengan cara ini, pokok pikiran DPRD berfungsi sebagai masukan substantif yang memperkuat relevansi prioritas pembangunan terhadap kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya, telaah ini diterjemahkan ke dalam program prioritas pembangunan **daerah**. Program-program unggulan seperti pemberdayaan UMKM, pembangunan jalan dan jembatan antar-pulau, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan lembaga sosial berbasis kearifan lokal menjadi wujud nyata dari integrasi antara aspirasi DPRD dan kebijakan pemerintah daerah. Program prioritas tersebut tidak hanya mendukung pencapaian target RPJMD, tetapi juga memiliki daya ungkit yang tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat Maluku menjadi pertimbangan dalam penyusunan fokus dan prioritas pembangunan daerah, antara lain :

a) Keterbatasan ketersediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak lokal.
b) Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi dalam pengelolaan jalan usaha tani.
c) Permukiman masyarakat yang masih banyak membutuhkan pemugaran dan peremajaan.
d) Terbatasnya mutu dan ketersediaan benih/bibit ternak, tanaman pakan ternak, bahan pakan, serta pakan kewenangan provinsi.
e) Kerentanan masyarakat terhadap bencana.
f) Keterbatasan pembangunan jalan dan sarana prasarana wilayah.
g) Belum meratanya penyediaan sarana dasar.

2.19. Inovasi Daerah dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pelayanan publik di Provinsi Maluku masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait keterjangkauan dan kualitas layanan dasar di wilayah kepulauan. Kondisi geografis Maluku yang terdiri dari ribuan pulau menyebabkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi pemerintahan tidak merata. Data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2025, tingkat kemiskinan di Maluku masih berada di atas rata-rata nasional, dengan kontribusi terbesar berasal dari wilayah kepulauan terpencil yang sulit dijangkau oleh layanan pemerintah. Hal ini memperlihatkan bahwa pelayanan publik belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat di daerah dengan keterbatasan infrastruktur dan transportasi.

Permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya kualitas pelayanan kesehatan di pulau-pulau kecil. Banyak fasilitas kesehatan yang kekurangan tenaga medis dan peralatan, sehingga masyarakat harus menempuh perjalanan jauh ke ibu kota kabupaten atau provinsi untuk mendapatkan layanan yang memadai. Selain itu, pelayanan administrasi kependudukan juga masih terkendala oleh keterbatasan jaringan internet dan sarana transportasi, sehingga proses pencatatan sipil dan pelayanan dokumen sering tertunda. Buktinyata dapat dilihat dari rendahnya angka cakupan layanan kesehatan dasar dan masih tingginya angka putus sekolah di beberapa kabupaten kepulauan.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, RKPD 2027 Provinsi Maluku perlu menekankan pada penguatan pelayanan berbasis digital dan mobile service yang menjangkau pulau-pulau kecil. Pemerintah daerah harus memperluas program pelayanan keliling (mobile service) untuk administrasi kependudukan, kesehatan, dan pendidikan, sehingga masyarakat di wilayah terpencil dapat merasakan kehadiran negara secara langsung. Selain itu, peningkatan kapasitas tenaga pelayanan publik melalui pelatihan dan distribusi tenaga kerja ke daerah-daerah terpencil menjadi prioritas. Dengan langkah ini, pelayanan publik di Maluku diharapkan lebih inklusif, merata, dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Pada tahun 2025 inovasi daerah yang dilakukan oleh perangkat daerah dengan tujuan menjawab bebagai permasalahan yang ada sebagai berikut :

Tabel. 2.58

Daftar Inovasi Yang dilakukan di Provinsi Maluku

No	Judul Inovasi	Inisiator	Nama Inisiator	Bentuk Inovasi	Jenis	Asta Cipta	Kematangan	Tahapan Inovasi	Tanggal Input	Tanggal Penerapan	Koordinat	Link Video
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	LENSO KESBANG atau Layanan Elektronik dan Sistem Informasi Kesbangpol	OPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Inovasi pelayanan publik	Digital	-	0	Inisiatif	29-08-2022	02-01-2023	null	-
3	ARMADA ARSIP (Arsiparsi Masuk Desa untuk Pembinaan Arsip	ASN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.	0	Inisiatif	13-09-2022	03-01-2023	-3.694812998261074, 128.1807396807014	-

No	Judul Inovasi	Inisiator	Nama Inisiator	Bentuk Inovasi	Jenis	Asta Cipta	Kematangan	Tahapan Inovasi	Tanggal Input	Tanggal Penerapan	Koordinat	Link Video
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	(Si Ayang Wasnaker : Sistem Layanan dan Penanganan Pengawasan Ketenagakerjaan)	OPD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Maluku	Inovasi pelayanan publik	Digital	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	52.00	Uji Coba	15-09-2022	01-02-2023	-3.690905932704698 7, 128.18234268254383	https://drive.google.com/file/d/1Oo0_6gOtNaCRwk0TBXK-cdYZR__LG2ke/view?usp=sharing
5	E-PISKDA (Pusat Informasi Kelautan dan Perikanan Daerah)	OPD	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku	Inovasi pelayanan publik	Digital	-	0	Inisiatif	15-09-2022	02-01-2023	null	-
6	BahumaMa (Bantuan Hukum bagi Masyarakat Maluku)	OPD	Biro Hukum Setda Maluku	Inovasi pelayanan publik	Digital	-	41.00	Inisiatif	16-09-2022	28-02-2023	null	https://drive.google.com/file/d/1HStUnNS4MK0DBHTAJP3NDfsv_6baeREJ/view?usp=sharing
8	Pembayaran Non Tunai di Destinasi Wisata (Par Nona Dewi)	OPD	DINAS PARIWISATA PROVINSI MALUKU	Inovasi pelayanan publik	Digital	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi	81.00	Penerapan	26-07-2023	24-07-2023	-3.679009708011268, 128.1921086096477	https://res5.tuxedovation.com/e58c747c38301a8261123b5fff2e04400c704999.mp4

No	Judul Inovasi	Inisiator	Nama Inisiator	Bentuk Inovasi	Jenis	Asta Cipta	Kematangan	Tahapan Inovasi	Tanggal Input	Tanggal Penerapan	Koordinat	Link Video
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.						
9	SI PAPACEDA	OPD	Dinas Kehutanan Provinsi Maluku	Inovasi pelayanan publik	Digital	-	0	Uji Coba	27-07-2023	29-12-2023	null	-
10	SISTEM PENANGANAN DAN PERLINDUNGAN PELAPORAN	OPD	Inspektur Provinsi Maluku	Inovasi pelayanan publik	Digital	-	0	Inisiatif	28-07-2023	28-07-2023	null	-
11	"KADERA PARINTAH"	OPD	BPKAD	Inovasi pelayanan publik	Digital	-	0	Inisiatif	28-07-2023	28-07-2023	null	-
12	MOBILING (MOBIL PELAYANAN KELILING) PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	OPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku	Inovasi pelayanan publik	Digital	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	12.00	Penerapan	28-07-2023	28-07-2023	-3.697952215855129 7, 128.17409188778834	https://res3.tuxedovation.com/9081faa09ab2fe883e96b085515bab0fc8a75f2b.mp4

No	Judul Inovasi	Inisiator	Nama Inisiator	Bentuk Inovasi	Jenis	Asta Cipta	Kematangan	Tahapan Inovasi	Tanggal Input	Tanggal Penerapan	Koordinat	Link Video
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	PELITA Si TANI (Pelibatan Stakeholder dalam Pembiayaan Petani)	ASN	Dr. ILHAM TAUDA, SP., M.Si / SAHARANY, SP	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	90.00	Penerapan	08-07-2024	03-10-2023	-3.6927063145299246, 128.18486840888377	https://drive.google.com/file/d/12Zc4WUB9TuMn0WU49UqTR8hvaLr-wTYe/view?usp=sharing
15	EMON DAN EVA PAKE BATIK	OPD	UPTD Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan Provinsi Maluku	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan	93.00	Penerapan	30-07-2024	01-08-2023	-3.6824770046087 36, 128.19446793296424	https://static2024.tuxedovation.com/7999598854ec1940cc8dd558b6dbb75c4de1d082.mp4

No	Judul Inovasi	Inisiator	Nama Inisiator	Bentuk Inovasi	Jenis	Asta Cipta	Kematangan	Tahapan Inovasi	Tanggal Input	Tanggal Penerapan	Koordinat	Link Video
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						penyandang disabilitas.						
20	Sistem KEnaikan JaBATan FUngsionaL (SEBATUL)	OPD	Badan Kepegawaian Provinsi Maluku	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.	75.00	Penerapan	18-08-2024	04-12-2023	-3.6943191374116835, 128.18277419419283	https://drive.google.com/file/d/1KYqws_JdRTSrp8g6dDYBxy97QDTahKlY/view?usp=sharing
21	MANTAP (MARI TAAT MELAPOR)	OPD	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI MALUKU	Inovasi pelayanan publik	Digital	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi	90.00	Penerapan	18-08-2024	18-08-2024	-3.6977468208091104, 128.17416582129138	https://res4.tuxedovation.com/dd2568c3c60ae5b076ad0fc5dce7127e48917416.mp4

No	Judul Inovasi	Inisiator	Nama Inisiator	Bentuk Inovasi	Jenis	Asta Cipta	Kematangan	Tahapan Inovasi	Tanggal Input	Tanggal Penerapan	Koordinat	Link Video
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						hijau, dan ekonomi biru.						
24	RASA PATITA (Ruangan Akomodasi Sebagai Pelayanan Untuk Tempat Tidur khusus Wanita)	OPD	Dinas Perhubungan Provinsi Maluku	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	-	0	Inisiatif	22-08-2024	22-08-2024	null	-
25	WALANG DUKCAPIL	OPD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku	Inovasi pelayanan publik	Digital	-	26.00	Uji Coba	22-08-2024	22-08-2024	null	https://res4.tuxedovation.com/e27c4cf5cc8046e47962da079836b35e24aeacac.mp4
27	Teko Sehat, barkode SIWALIMA, HOTLINE SIWALIMA	ASN	dr. Sherly Yakobus, Sp.KJ	Inovasi pelayanan publik	Digital	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi	7.00	Uji Coba	25-07-2025	06-06-2025	-3.626972142084591, 128.2429136966014	-

No	Judul Inovasi	Inisiator	Nama Inisiator	Bentuk Inovasi	Jenis	Asta Cipta	Kematangan	Tahapan Inovasi	Tanggal Input	Tanggal Penerapan	Koordinat	Link Video
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.						
29	SAKINA (Satu Klik Identitas Aktif)	OPD	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	81.00	Penerapan	28-07-2025	09-09-2024	-3.679414542523177, 128.19542352337078	https://drive.google.com/file/d/1ADBtL7OHBKQz7YU6nMUl0l0QUoY1t7sP/view?usp=sharing
32	KIOS PENGENDALIAN INFLASI PANGAN STRATEGIS" (KOPI PANAS)	OPD	Dr.sc.agr.drh.Faradilla Attamimi, MTAPSc	Inovasi pelayanan publik	Digital	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi	65.00	Inisiatif	11-08-2025	01-07-2025	-3.6955227538294118, 128.17585289846184	https://res5.tuxedovation.com/5eba35b2b6e97bdabdd4eb30b5288f818e518741.mp4

No	Judul Inovasi	Inisiator	Nama Inisiator	Bentuk Inovasi	Jenis	Asta Cipta	Kematangan	Tahapan Inovasi	Tanggal Input	Tanggal Penerapan	Koordinat	Link Video
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						hijau, dan ekonomi biru.						
33	"GERCEP HL (Gerak Cepat Haulussy)"	OPD	RSUD dr. M. Haulussy Ambon	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.	0	Inisiatif	12-08-2025	03-07-2025	-3.70764598142863, 128.16571575197662	-
34	MoLLU-CAS (Mobilisasi Layanan Usaha dan Cipta Akses Sistem)	Kepala Daerah	GESANG POLLE, S.E., M.Si	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan	0	Penerapan	13-08-2025	01-07-2025	-3.6938838719040015, 128.18277420779816	-

No	Judul Inovasi	Inisiator	Nama Inisiator	Bentuk Inovasi	Jenis	Asta Cipta	Kematangan	Tahapan Inovasi	Tanggal Input	Tanggal Penerapan	Koordinat	Link Video
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						pemberantasan kemiskinan.						
35	BETA ♥ TEAM (Be Everything Together Act – Transportation Emergency Ambulance Madis).	OPD	RSUD dr. H. Ishak Umarella	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.	87.00	Penerapan	23-08-2025	04-04-2022	-3.594187619042066 7, 128.3465394231398	https://res5.tuxedovation.com/8ec18fdcc99eec4b9da35b0f055997a6f6d23d14.mp4

Ketarangan :

1	**Inovasi Baru**	9
2	**Inovasi Pembaharuan**	1
3	**Inovasi Yang dikirimkan ke IGA**	9
4	**Bersasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6097 Tahun 2025, Capaian Indeks Inovasi Daerah Provinsi Maluku Sebesar 45,61 dengan Predikat Inovatif**	

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
PEMERINTAH MALUKU
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV Tahun 2025

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**1.147.112.138.326**		**145.790.210.792**		**168.859.536.361**		**148.828.409.101**		**275.112.446.053**		738.590.602.307	**850,31**	**64,39**		
		1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**800.688.038.403**		**145.420.888.772**		**150.950.323.418**		**127.544.442.384**		**188.738.208.505**		612.653.863.079	**2224,4**	**76,52**	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)									100		100		0			
		1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.017.354.999		109.142.860		906.519.988		818.112.364		873.789.908		2.707.565.120	80	89,73		
			Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		1		1		0		1		3		100			
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2		0		0		0		1		1		50			
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		1		0		0		1		100			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2		0		0		0		1		1		50			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			852.427.999		109.142.860		512.282.980		58.735.500		29.382.000		709.543.340	100	83,24		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		1		1		0		1		3		100			
		1.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			128.860.000		-		77.619.000		-		36.600.000		114.219.000	50	88,64		
			Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2		0		0		0		1		1		50			
		1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			176.637.000		-		76.450.000		-		45.600.000		122.050.000	100	69,1		
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		1		0		0		1		100			
		1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			774.527.000		-		209.584.008		194.109.950		294.769.368		698.463.326	50	90,18		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2		0		0		0		1		1		50			
		1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.084.903.000		-		30.584.000		565.266.914		467.438.540		1.063.289.454	100	98,01		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			770.864.100.181		144.022.869.840		145.575.267.720		125.213.309.457		179.946.271.513		594.757.718.530	20302,78	77,15		
			Tersedianya Dokumen Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	12		7.300		7.300		7.300		7.300		7.300		60833,33			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4		0		0		0		1		1		25			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2		0		0		0		1		1		50			
		1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			768.706.330.181		143.818.867.024		145.313.575.627		124.813.051.639		179.271.479.308		593.216.973.598	60833,33	77,17		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	12		7.300		7.300		7.300		7.300		7.300		60833,33			
		1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1.393.894.000		103.602.816		222.376.093		251.476.618		602.142.205		1.179.597.732	25	84,63		
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4		0		0		0		1		1		25			
		1.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			763.876.000		100.400.000		39.316.000		148.781.200		72.650.000		361.147.200	50	47,28		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2		0		0		0		1		1		50			
		1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			981.839.200		3.600.000		487.894.816		9.000.000		173.600.000		674.094.816	75	68,66		
			Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	2		0		0		0		1		1		50			
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.01.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			371.400.000		-		217.865.808		-		14.490.000		232.355.808	50	62,56		
			Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	2		0		0		0		1		1		50			
		1.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			610.439.200		3.600.000		270.029.008		9.000.000		159.110.000		441.739.008	100	72,36		
			Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2.832.520.701		4.934.100		655.200.900		-		749.998.316		1.410.133.316	83,33	49,78		
			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2		0		0		0		1		1		50			
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1		0		1		0		0		1		100			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	100		0		100		0		100		100		100			
		1.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			613.647.000		-		73.449.936		-		342.000.000		415.449.936	50	67,7		
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2		0		0		0		1		1		50			
		1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			406.509.500		2.541.000		74.700.000		-		-		77.241.000	100	19		
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1		0		1		0		0		1		100			
		1.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			1.812.364.201		2.393.100		507.050.964		-		407.998.316		917.442.380	100	50,62		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	100		0		100		0		100		100		100			
		1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.577.342.686		194.572.208		661.994.150		298.781.660		2.000.536.938		3.155.884.956	26,19	68,95		
			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6		0		1		0		0		1		16,67			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	14		1		0		0		0		1		7,14			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	14		0		0		0		1		1		7,14			
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			70.108.500		-		5.670.000		33.994.000		19.044.500		58.708.500	16,67	83,74		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6		0		1		0		0		1		16,67			
		1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0		0		0			
		1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			1.346.138.216		17.709.556		358.864.370		135.042.460		282.679.678		794.296.064	7,14	59,01		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	14		1		0		0		0		1		7,14			
		1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.561.095.970		176.862.652		297.459.780		129.745.200		1.598.812.760		2.202.880.392	7,14	86,01		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	14		0		0		0		1		1		7,14			
		1.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			600.000.000		-		-		-		100.000.000		100.000.000	100	16,67		
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			4.092.712.360		-		859.474.500		-		833.355.000		1.692.829.500	27,67	41,36		
			Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	6		0		4		0		0		4		66,67			
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	12		0		0		0		1		1		8,33			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	25		0		1		0		1		2		8			
		1.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			430.030.000		-		232.560.000		-		-		232.560.000	66,67	54,08		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	6		0		4		0		0		4		66,67			
		1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel			898.509.254		-		-		-		90.156.000		90.156.000	8,33	10,03		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	12		0		0		0		1		1		8,33			
		1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2.764.173.106		-		626.914.500		-		743.199.000		1.370.113.500	8	49,57		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	25		0		1		0		1		2		8			
		1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			8.398.330.702		1.012.602.260		1.638.174.315		1.068.579.603		1.603.177.494		5.322.533.672	30,95	63,38		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	6		0		0		1		0		1		16,67			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	14		0		0		0		1		1		7,14			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	14		0		0		0		14		14		100			
		1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			61.770.000		1.500.000		2.435.000		15.000.000		4.415.000		23.350.000	16,67	37,8		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	6		0		0		1		0		1		16,67			
		1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.192.869.703		145.341.582		192.168.487		87.163.952		201.336.501		626.010.522	7,14	52,48		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	14		0		0		0		1		1		7,14			
		1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			7.143.690.999		865.760.678		1.443.570.828		966.415.651		1.397.425.993		4.673.173.150	100	65,42		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	14		0		0		0		14		14		100			
		1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.923.837.574		73.167.504		165.797.029		136.659.300		2.557.479.336		2.933.103.169	79,01	49,51		
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	21		0		0		0		21		21		100			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	27		0		0		5		5		10		37,04			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			1.073.208.192		54.767.504		129.165.829		96.354.300		199.804.336		480.091.969	100	44,73		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	21		0		0		0		21		21		100			
		1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			161.083.782		18.400.000		36.631.200		40.305.000		13.843.000		109.179.200	37,04	67,78		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	27		0		0		5		5		10		37,04			
		1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			4.689.545.600		-		-		-		2.343.832.000		2.343.832.000	100	49,98		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			**320.871.321.386**		**-**		**15.968.393.936**		**14.823.436.429**		**80.352.831.093**		111.144.661.458	**159,03**	**34,64**	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Skor Kemampuan Literasi SMA (%)									49.5		49,5		0			
				Skor Kemampuan Numerasi SMK (%)									39.53		39,53		0			
				Persentase anak usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS) (%)									77.28		77,28		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Skor Kemampuan Literasi SMK (%)									39.75		39,75		0			
				Skor Kemampuan Numerasi SMA (%)									46.86		46,86		0			
				Skor Kemampuan Numerasi SLB (%)									77.33		77,33		0			
				Skor Kemampuan Literasi SLB (%)									74.67		74,67		0			
				Persentase anak usia 4-18 Tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS) (%)									62.67		62,67		0			
		1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			215.042.888.629		-		9.730.173.176		4.685.329.439		31.208.691.294		45.624.193.909	254,52	21,22		
			Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	7		0		0		0		10		10		142,86			
				Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	11		0		2		0		0		2		18,18			
				Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	6		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	29		0		0		0		22		22		75,86			
				Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	7		0		0		0		35		35		500			
				Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	4		0		0		0		10		10		250			
				Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	10		0		2		0		0		2		20			
				Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	2		0		0		0		17		17		850			
				Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta didik)	68078		0		0		0		72.000		72.000		105,76			
				Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	350		0		0		0		100		100		28,57			
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1352		0		0		0		25		25		1,85			
				Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	250		0		0		0		35		35		14			
				Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	285		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	6		0		0		0		5		5		83,33			
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)	6		0		0		0		12		12		200			
				Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	30		0		0		30		0		30		100			
				Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1		0		0		25		0		25		2500			
				Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	15		0		0		0		15		15		100			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat (Unit)	3		0		3		0		0		3		100			
		1.01.02.1.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			3.428.573.815		-		808.700.815		40.000.000		1.134.909.940		1.983.610.755	142,86	57,86		
			Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	7		0		0		0		10		10		142,86			
		1.01.02.1.01.0010	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			183.798.395		-		176.248.395		-		-		176.248.395	18,18	95,89		
			Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	11		0		2		0		0		2		18,18			
		1.01.02.1.01.0011	Pembangunan Perpustakaan Sekolah			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	6		0		0		0		0		0		0			
		1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			12.505.092.677		-		875.597.376		818.503.372		4.896.351.309		6.590.452.057	75,86	52,7		
			Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	29		0		0		0		22		22		75,86			
		1.01.02.1.01.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			5.166.290.000		-		1.488.491.130		764.203.402		1.715.024.770		3.967.719.302	500	76,8		
			Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	7		0		0		0		35		35		500			
		1.01.02.1.01.0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			1.097.282.100		-		22.249.600		187.240.005		629.057.700		838.547.305	250	76,42		
			Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	4		0		0		0		10		10		250			
		1.01.02.1.01.0027	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1		0		0		0		0		0		0			
		1.01.02.1.01.0028	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			409.215.675		-		396.165.675		-		-		396.165.675	20	96,81		
			Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	10		0		2		0		0		2		20			
		1.01.02.1.01.0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			9.548.246.000		-		-		-		6.524.380.489		6.524.380.489	850	68,33		
			Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	2		0		0		0		17		17		850			
		1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			20.492.071.447		-		2.917.964.741		1.561.744.500		4.402.360.378		8.882.069.619	105,76	43,34		
			Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta didik)	68078		0		0		0		72.000		72.000		105,76			
		1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			2.026.299.992		-		54.150.592		-		1.814.049.820		1.868.200.412	28,57	92,2		
			Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	350		0		0		0		100		100		28,57			
		1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			2.948.072.500		-		-		-		1.975.638.905		1.975.638.905	1,85	67,01		
			Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1352		0		0		0		25		25		1,85			
		1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas			725.968.400		-		-		-		20.000.000		20.000.000	14	2,75		
			Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	250		0		0		0		35		35		14			
		1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			137.939.150.000		-		-		-		-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	285		0		0		0		0		0		0			
		1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			1.409.612.000		-		-		-		891.315.020		891.315.020	83,33	63,23		
			Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	6		0		0		0		5		5		83,33			
		1.01.02.1.01.0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			6.027.432.688		-		331.239.206		45.409.433		4.343.036.913		4.719.685.552	200	78,3		
			Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)	6		0		0		0		12		12		200			
		1.01.02.1.01.0070	Pembangunan Ruang Laboratorium			1.379.352.250		-		987.454.051		372.290.916		-		1.359.744.967	100	98,58		
			Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	30		0		0		30		0		30		100			
		1.01.02.1.01.0071	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium			1.016.661.700		-		520.706.340		24.950.000		-		545.656.340	2500	53,67		
			Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1		0		0		25		0		25		2500			
		1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru			8.245.845.480		-		698.910.674		870.987.811		2.862.566.050		4.432.464.535	100	53,75		
			Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	15		0		0		0		15		15		100			
		1.01.02.1.01.0073	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			493.923.510		-		452.294.581		-		-		452.294.581	100	91,57		
			Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat (Unit)	3		0		3		0		0		3		100			
		1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			86.363.377.936		-		4.339.436.307		6.979.666.707		40.536.814.785		51.855.917.799	109,72	60,04		
			Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun (Ruang)	1		0		0		0		6		6		600			
				Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	9		0		0		0		9		9		100			
				Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	9		0		0		0		9		9		100			
				Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	3		0		0		0		3		3		100			
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	37		0		0		0		7		7		18,92			
				Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	10		0		0		0		5		5		50			
				Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta didik)	21031		0		0		0		27.100		27.100		128,86			
				Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	600		0		0		0		600		600		100			
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1886		0		0		0		500		500		26,51			
				Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	231		0		0		0		105		105		45,45			
				Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	119		0		0		0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	3		0		0		0		7		7		233,33			
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)	32		0		0		0		23		23		71,88			
				Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	5		0		0		0		5		5		100			
				Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	15		0		0		0		15		15		100			
				Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	20		0		0		0		20		20		100			
				Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	4		0		0		0		0		0		0			
		1.01.02.1.02.0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa			1.148.873.415		-		886.227.415		127.897.000		93.586.500		1.107.710.915	600	96,42		
			Ruang Praktik Siswa yang Terbangun	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun (Ruang)	1		0		0		0		6		6		600			
		1.01.02.1.02.0005	Pembangunan Ruang Laboratorium			2.510.075.999		-		2.005.281.489		244.305.637		220.772.450		2.470.359.576	100	98,42		
			Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	9		0		0		0		9		9		100			
		1.01.02.1.02.0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			254.757.806		-		217.307.064		12.100.742		20.600.000		250.007.806	100	98,14		
			Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	9		0		0		0		9		9		100			
		1.01.02.1.02.0007	Pembangunan Perpustakaan Sekolah			24.553.178		-		-		12.451.998		12.101.180		24.553.178	100	100		
			Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	3		0		0		0		3		3		100			
		1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			9.035.307.167		-		812.311.183		383.878.482		4.876.679.148		6.072.868.813	18,92	67,21		
			Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	37		0		0		0		7		7		18,92			
		1.01.02.1.02.0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			420.000.000		-		-		-		211.771.500		211.771.500	100	50,42		
			Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.01.02.1.02.0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			40.575.809.000		-		-		1.597.001.000		24.373.210.806		25.970.211.806	50	64		
			Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	10		0		0		0		5		5		50			
		1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			4.965.060.180		-		-		1.531.500.000		3.327.142.180		4.858.642.180	128,86	97,86		
			Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta didik)	21031		0		0		0		27.100		27.100		128,86			
		1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			1.258.796.900		-		-		-		493.821.370		493.821.370	100	39,23		
			Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	600		0		0		0		600		600		100			
		1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			7.609.685.387		-		-		2.291.719.372		1.280.249.420		3.571.968.792	26,51	46,94		
			Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1886		0		0		0		500		500		26,51			
		1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan			1.366.097.790		-		251.604.000		293.688.970		173.932.361		719.225.331	45,45	52,65		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	231		0		0		0		105		105		45,45			
		1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			6.541.500.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	119		0		0		0		0		0		0			
		1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			3.039.097.000		-		-		27.600.000		1.030.549.260		1.058.149.260	233,33	34,82		
			Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	3		0		0		0		7		7		233,33			
		1.01.02.1.02.0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			5.606.917.258		-		102.205.113		301.508.474		3.239.850.610		3.643.564.197	71,88	64,98		
			Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)	32		0		0		0		23		23		71,88			
		1.01.02.1.02.0063	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik			1.575.000.000		-		-		-		1.150.848.000		1.150.848.000	100	73,07		
			Ruang Praktik Peserta Didik yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	5		0		0		0		5		5		100			
		1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru			18.670.548		-		-		9.470.548		9.200.000		18.670.548	100	100		
			Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	15		0		0		0		15		15		100			
		1.01.02.1.02.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah			413.176.308		-		64.500.043		146.544.484		22.500.000		233.544.527	100	56,52		
			Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	20		0		0		0		20		20		100			
		1.01.02.1.02.0075	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	4		0		0		0		0		0		0			
		1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus			19.465.054.821		-		1.898.784.453		3.158.440.283		8.607.325.014		13.664.549.750	66,09	70,2		
			Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	2		0		0		0		2		2		100			
				Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	8		0		0		0		8		8		100			
				Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun (Ruang)	2		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	19		0		0		0		4		4		21,05			
				Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	852		0		0		0		852		852		100			
				Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	366		0		0		366		0		366		100			
				Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	270		0		0		0		16		16		5,93			
				Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah (Ruang)	2		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat (Ruang)	4		0		0		0		4		4		100			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.01.02.1.03.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			369.456.500		-		-		-		99.266.600		99.266.600	100	26,87		
			Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.01.02.1.03.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			89.962.437		-		-		-		73.991.842		73.991.842	100	82,25		
			Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	2		0		0		0		2		2		100			
		1.01.02.1.03.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah			124.545.505		-		-		-		60.206.809		60.206.809	100	48,34		
			Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			7.088.474.560		-		424.619.253		68.968.980		3.254.284.213		3.747.872.446	100	52,87		
			Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	8		0		0		0		8		8		100			
		1.01.02.1.03.0015	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Terbangun	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun (Ruang)	2		0		0		0		0		0		0			
		1.01.02.1.03.0040	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			1.465.064.588		-		-		-		679.441.788		679.441.788	21,05	46,38		
			Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	19		0		0		0		4		4		21,05			
		1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus			4.748.018.500		-		1.026.220.000		942.045.000		2.518.118.900		4.486.383.900	100	94,49		
			Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	852		0		0		0		852		852		100			
		1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			1.454.740.000		-		264.440.000		1.185.980.000		-		1.450.420.000	100	99,7		
			Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	366		0		0		366		0		366		100			
		1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus			1.059.260.000		-		-		-		896.780.112		896.780.112	5,93	84,66		
			Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	270		0		0		0		16		16		5,93			
		1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Ruang Kelas Sekolah Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah (Ruang)	2		0		0		0		0		0		0			
		1.01.02.1.03.0079	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah			3.065.532.731		-		183.505.200		961.446.303		1.025.234.750		2.170.186.253	100	70,79		
			Ruang Kelas Sekolah yang Terehabiltasi sedang/berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat (Ruang)	4		0		0		0		4		4		100			
		1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**			**21.793.588.817**		**10.042.020**		**1.080.520.000**		**5.727.001.500**		**4.344.179.280**		11.161.742.800	**100**	**51,22**	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase pemerataan guru (%)			0		0		0		0		0		0			
				Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidikan (%)									75.43		75,43		0			
		1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi			21.793.588.817		10.042.020		1.080.520.000		5.727.001.500		4.344.179.280		11.161.742.800	100	51,22		
			Terlaksananya Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus			21.793.588.817		10.042.020		1.080.520.000		5.727.001.500		4.344.179.280		11.161.742.800	100	51,22		
			Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			**3.759.189.720**		**359.280.000**		**860.299.007**		**733.528.788**		**1.677.227.175**		3.630.334.970	**80**	**96,57**	DINAS PERTANIAN	
		1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			3.759.189.720		359.280.000		860.299.007		733.528.788		1.677.227.175		3.630.334.970	80	96,57		
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	5		0		5		0		0		5		100			
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta didik)	100		0		0		0		100		100		100			
				Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	364		0		0		0		364		364		100			
		1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
		1.01.02.1.02.0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			769.100.000		-		369.274.800		-		398.428.950		767.703.750	100	99,82		
			Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	5		0		5		0		0		5		100			
		1.01.02.1.02.0035	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			300.000.000		-		-		-		295.358.045		295.358.045	100	98,45		
			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			2.160.000.000		359.280.000		488.064.207		527.947.200		719.928.000		2.095.219.407	100	97		
			Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta didik)	100		0		0		0		100		100		100			
		1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik			530.089.720		-		2.960.000		205.581.588		263.512.180		472.053.768	100	89,05		
			Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	364		0		0		0		364		364		100			
		1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**321.364.154.730**		**36.714.770.419**		**51.647.842.967**		**68.145.195.140**		**83.186.274.429**		239.694.082.955	**74,14**	**74,59**		
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**135.036.332.572**		**32.430.800.080**		**29.776.249.946**		**35.126.174.373**		**32.562.543.362**		129.895.767.761	**51,41**	**96,19**	DINAS KESEHATAN	
			Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)			0		0		0		94.28		94,28		0			
				Presentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100		0		0		0		94.28		94,28		94,28			
		1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			20.260.000		-		-		-		18.250.000		18.250.000	27,78	90,08		
			Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah melalui forum OPD dan evaluasi perencanaan dan keuangan di 11 kab//kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	9		0		0		0		1		1		11,11			
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7.300.000		-		-		-		7.300.000		7.300.000	11,11	100		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	9		0		0		0		1		1		11,11			
		1.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			2.000.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2		0		0		0		0		0		0			
		1.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			10.960.000		-		-		-		10.950.000		10.950.000	100	99,91		
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			124.000.282.465		31.308.433.790		28.409.524.499		33.368.870.040		28.279.270.164		121.366.098.493	64,57	97,88		
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dalam terpenuhinya hak dan kesejahteraan tenaga kesehatan pada Dinas Kresehatan Provinsi Maluku	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	1285		1.208		1.208		1.208		1.208		1.208		94,01			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2		0		0		1		0		1		50			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7		0		0		0		1		1		14,29			
		1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			123.757.377.465		31.303.783.790		28.405.922.499		33.254.960.040		28.164.325.214		121.128.991.543	94,01	97,88		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	1285		1.208		1.208		1.208		1.208		1.208		94,01			
		1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			216.120.000		-		-		105.960.000		105.960.000		211.920.000	50	98,06		
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2		0		0		1		0		1		50			
		1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			7.500.000		1.500.000		1.500.000		4.200.000		300.000		7.500.000	100	100		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			19.285.000		3.150.000		2.102.000		3.750.000		8.684.950		17.686.950	14,29	91,71		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7		0		0		0		1		1		14,29			
		1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			10.000.000		1.200.000		1.650.000		750.000		6.300.000		9.900.000	33,33	99		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Meningkatnkan kualitas pelayanan kesehatan melalui sistem penataan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4		0		0		0		0		0		0			
		1.02.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		1.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			10.000.000		1.200.000		1.650.000		750.000		6.300.000		9.900.000	100	99		
			Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4		0		0		0		0		0		0			
		1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			204.182.000		-		-		106.146.000		67.795.520		173.941.520	43,7	85,19		
			Tersedinaya atribut kepegawaian di Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	178		0		0		230		0		230		129,21			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	53		0		0		0		1		1		1,89			
		1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			118.000.000		-		-		101.000.000		-		101.000.000	129,21	85,59		
			Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	178		0		0		230		0		230		129,21			
		1.02.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		1.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			86.182.000		-		-		5.146.000		67.795.520		72.941.520	1,89	84,64		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	53		0		0		0		1		1		1,89			
		1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.552.216.843		317.008.298		460.176.415		637.072.142		939.809.942		2.354.066.797	72,08	92,24		
			Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran dan sinkronisasi program kegiatan antara pusat, provinsi dan kab/kota oleh pimpinan OPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		2		1		1		5		100			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8		1		1		1		1		4		50			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	11		1		1		1		3		6		54,55			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	9		1		1		3		4		9		100			
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		2		1		5		4		12		100			
		1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			276.839.550		23.226.800		140.594.110		41.646.750		58.252.318		263.719.978	100	95,26		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		2		1		1		5		100			
		1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			437.145.800		87.589.500		32.698.500		111.956.365		127.319.325		359.563.690	50	82,25		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8		1		1		1		1		4		50			
		1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2		0		0		0		0		0		0			
		1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			889.893.440		110.738.450		260.026.112		125.759.179		306.603.708		803.127.449	54,55	90,25		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	11		1		1		1		3		6		54,55			
		1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			299.256.465		27.685.800		17.566.193		97.528.895		144.171.529		286.952.417	100	95,89		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	9		1		1		3		4		9		100			
		1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			317.054.400		7.712.100		5.991.500		122.035.550		180.814.800		316.553.950	100	99,84		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			332.027.188		60.055.648		3.300.000		138.145.403		122.648.262		324.149.313	100	97,63		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		2		1		5		4		12		100			
		1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.860.891.285		-		42.000.000		-		1.591.787.500		1.633.787.500	4,56	57,11		
			Meningkatkan kualitas pelayanan perkantoran	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4		0		0		0		1		1		25			
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	5		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	42		0		0		0		1		1		2,38			
				Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	30		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	43		0		1		0		0		0		0			
		1.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3		0		0		0		0		0		0			
		1.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			532.000.000		-		-		-		531.700.000		531.700.000	25	99,94		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4		0		0		0		1		1		25			
		1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	5		0		0		0		0		0		0			
		1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.060.087.500		-		-		-		1.060.087.500		1.060.087.500	2,38	100		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	42		0		0		0		1		1		2,38			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.02.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	30		0		0		0		0		0		0			
		1.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.268.803.785		-		42.000.000		-		-		42.000.000	0	3,31		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	43		0		1		0		0		0		0			
		1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.418.361.473		721.790.220		771.172.473		750.441.637		1.332.673.846		3.576.078.176	73,93	80,94		
			Meningjkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui penyediaan jasa penunnjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	17		0		0		0		7		7		41,18			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2		0		1		0		1		2		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	11		0		0		0		6		6		54,55			
		1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			66.018.048		9.748.000		4.598.000		19.912.500		15.894.002		50.152.502	100	75,97		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
		1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.851.528.000		291.195.462		273.845.718		410.042.983		635.950.865		1.611.035.028	41,18	87,01		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	17		0		0		0		7		7		41,18			
		1.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			12.000.000		-		5.000.000		-		6.000.000		11.000.000	100	91,67		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2		0		1		0		1		2		100			
		1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.488.815.425		420.846.758		487.728.755		320.486.154		674.828.979		1.903.890.646	54,55	76,5		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	11		0		0		0		6		6		54,55			
		1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			970.138.506		82.367.772		91.726.559		262.894.554		326.656.390		763.645.275	82,42	78,72		
			Mneingkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	17		0		0		0		17		17		100			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	33		7		3		12		13		35		106,06			
				Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	35		0		1		0		0		1		2,86			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	88		15		25		28		30		98		111,36			
				Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10		0		0		19		0		19		190			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6		0		0		0		4		4		66,67			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6		0		0		0		0		0		0			
		1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			66.406.479		-		-		-		66.406.479		66.406.479	100	100		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	17		0		0		0		17		17		100			
		1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			536.186.000		73.401.972		49.351.559		153.522.314		165.483.217		441.759.062	106,06	82,39		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	33		7		3		12		13		35		106,06			
		1.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel			2.000.000		-		2.000.000		-		-		2.000.000	2,86	100		
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	35		0		1		0		0		1		2,86			
		1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			301.571.027		8.965.800		40.375.000		53.872.240		86.291.694		189.504.734	111,36	62,84		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	88		15		25		28		30		98		111,36			
		1.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			55.500.000		-		-		55.500.000		-		55.500.000	190	100		
			Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10		0		0		19		0		19		190			
		1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-		-		-		-		8.475.000		8.475.000	66,67	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6		0		0		0		4		4		66,67			
		1.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			8.475.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6		0		0		0		0		0		0			
		1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			-		-		-		-		-		-	0	0		
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		0		0		0		0		0		0			
		1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		0		0		0		0		0		0			
		1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**159.318.578.408**		**4.235.351.459**		**21.739.124.421**		**31.486.609.301**		**47.877.091.615**		105.338.176.796	**113,13**	**66,12**	DINAS KESEHATAN	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi (%)	100		0		0		0		97		97		97			
				Jumlah Kabupaten/ Kota yang Eliminasi Malaria (Kabupaten/Kota)	2		0		0		0		4		4		200			
				Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana (%)	100		100		100		100		100		100		100			
				ODHIV Baru yang ditemukan yang mendapat Pengobatan ARV (%)			0		0		0		64		64		0			
				Jumlah Kab/Kota yang melakukan pengendalian konsumsi rokok pada penduduk 10 - 18 tahun (Kabupaten/Kota)	9		0		0		0		8		8		88,89			
				Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup (/ 100.000 Kelahiran Hidup)	113												0			
				Angka Kematian Balita/1000 Kelahiran Hidup (Orang)			0		0		0		6		6		0			
				Prevalensi Stunting pada Balita (%)	19		0		0		0		6.01		6,01		31,63			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Kabupaten/Kota Eliminasi Malaria (Kabupaten/Kota)			0		0		0		4		4		0			
				Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (/ 1000 Kelahiran Hidup)	6												0			
				Persentase hipertensi dalam pengendalian (Persentase)			0		0		0		3.45		3,45		0			
				Persentase Penduduk yang terlayani dengan Jaminan Kesehatan (%)	98		0		0		0		98.6		98,6		100,61			
				Cakupan penerimaan imunisasi bayi lengkap (Persentase)			0		0		0		66.35		66,35		0			
				Persentase Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (%)	95		0		0		0		97.63		97,63		102,77			
				Presentase Kab/Kota yang melakukan respon KLB/ Wabah (%)	100		100		100		100		100		400		400			
		1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			75.050.975.620		31.150.263		3.344.086.024		13.459.026.600		24.591.665.924		41.425.928.811	88,64	55,2		
			Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	2		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	3		0		0		0		2		2		66,67			
				Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan (Layanan)	2		0		0		0		2		2		100			
				Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (Unit)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit (Unit)	4		0		0		2		4		6		150			
				Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	12		0		0		0		11		11		91,67			
				Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara (Unit)	2		0		0		0		2		2		100			
				Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan (Unit)	10		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	21		0		5		10		20		35		166,67			
				Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	6		0		0		0		6		6		100			
		1.02.02.1.01.0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya			19.711.402.094		-		-		-		-		-	0	0		
			Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	2		0		0		0		0		0		0			
		1.02.02.1.01.0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya			752.619.000		-		-		130.306.000		417.426.865		547.732.865	66,67	72,78		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	3		0		0		0		2		2		66,67			
		1.02.02.1.01.0006	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)			897.130.000		-		-		-		681.126.037		681.126.037	100	75,92		
			Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan (Layanan)	2		0		0		0		2		2		100			
		1.02.02.1.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya			151.389.120		4.725.000		4.165.000		9.016.500		33.454.304		51.360.804	100	33,93		
			Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (Unit)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit			11.165.033.700		-		1.250.000		5.102.215.445		2.715.431.669		7.818.897.114	150	70,03		
			Terlaksananya Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit (Unit)	4		0		0		2		4		6		150			
		1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan			12.689.133.613		-		-		-		10.619.972.005		10.619.972.005	91,67	83,69		
			Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	12		0		0		0		11		11		91,67			
		1.02.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi			1.598.875.200		-		1.355.000		41.366.223		402.675.212		445.396.435	100	27,86		
			Telaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara (Unit)	2		0		0		0		2		2		100			
		1.02.02.1.01.0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan (Unit)	10		0		0		0		0		0		0			
		1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan			491.399.000		-		20.250.000		74.122.860		143.528.000		237.900.860	166,67	48,41		
			Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	21		0		5		10		20		35		166,67			
		1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan			1.720.465.318		-		13.880.800		354.201.000		958.784.127		1.326.865.927	100	77,12		
			Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			25.873.528.575		26.425.263		3.303.185.224		7.747.798.572		8.619.267.705		19.696.676.764	100	76,13		
			Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	6		0		0		0		6		6		100			
		1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			81.380.948.788		4.177.776.956		18.384.386.047		18.006.391.876		21.170.297.355		61.738.852.234	143,06	75,86		
			Jumlah dokumen hasil penyediaan layanan kesehatan	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar (Orang)	100		0		0		0		752		752		752			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	200		0		0		0		560		560		280			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	2		0		0		0		2		2		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	4		1		1		1		1		4		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	3		0		1		1		1		3		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	3		0		3		0		3		6		200			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapakan Rehabilitasi Medis (Orang)	25		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	2		0		0		0		2		2		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	2		0		0		1		1		2		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (Dokumen)	2		0		0		0		2		2		100			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	3		0		0		0		3		3		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana			172.794.000		-		-		-		-		-	752	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar (Orang)	100		0		0		0		752		752		752			
		1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			140.460.000		-		-		-		4.120.000		4.120.000	280	2,93		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi Sesuai Standar	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	200		0		0		0		560		560		280			
		1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak			452.595.550		-		-		269.849.500		61.946.721		331.796.221	100	73,31		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			904.625.000		-		15.075.000		41.686.500		379.789.624		436.551.124	100	48,26		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	2		0		0		0		2		2		100			
		1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			389.928.300		-		194.257.000		-		39.735.203		233.992.203	100	60,01		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1.265.129.463		9.528.000		27.758.400		56.987.339		575.134.109		669.407.848	100	52,91		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	4		1		1		1		1		4		100			
		1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			222.666.544		-		8.869.000		9.832.000		145.104.665		163.805.665	100	73,57		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	3		0		1		1		1		3		100			
		1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya			83.844.850		-		27.136.850		-		35.933.200		63.070.050	100	75,22		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			3.005.967.000		-		478.000.000		-		514.048.645		992.048.645	200	33		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	3		0		3		0		3		6		200			
		1.02.02.1.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji			63.175.000		-		-		-		33.859.320		33.859.320	100	53,6		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		1.02.02.1.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapakan Rehabilitasi Medis (Orang)	25		0		0		0		0		0		0			
		1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			40.015.000.000		-		12.727.506.200		10.059.641.300		7.089.798.000		29.876.945.500	100	74,66		
			Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	2		0		0		0		2		2		100			
		1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			675.074.000		-		-		270.158.284		277.815.000		547.973.284	100	81,17		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	2		0		0		1		1		2		100			
		1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan			755.462.900		2.478.400		9.174.400		270.562.400		268.152.956		550.368.156	100	72,85		
			Terbinanya Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (Dokumen)	2		0		0		0		2		2		100			
		1.02.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit			31.924.662.081		4.130.033.808		4.682.538.303		6.741.649.381		11.416.596.630		26.970.818.122	100	84,48		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	3		0		0		0		3		3		100			
		1.02.02.1.02.0024	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik			1.309.564.100		35.736.748		214.070.894		286.025.172		328.263.282		864.096.096	100	65,98		
			Terlaksananya Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			2.567.754.000		26.424.240		10.652.350		21.190.825		2.115.128.336		2.173.395.751	100	84,64		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	6		0		0		0		6		6		100			
		1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			2.567.754.000		26.424.240		10.652.350		21.190.825		2.115.128.336		2.173.395.751	100	84,64		
			Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	6		0		0		0		6		6		100			
		1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			318.900.000		-		-		-		-		-	0	0		
				Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan (Unit)	3		0		0		0		0		0		0			
		1.02.02.1.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit			25.000.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
		1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			293.900.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan (Unit)	3		0		0		0		0		0		0			
		1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**			**25.751.847.350**		**48.618.880**		**111.760.000**		**1.024.979.054**		**2.407.997.216**		3.593.355.150	**6,91**	**13,95**	DINAS KESEHATAN	
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Rasio dokter dengan Penduduk (per 100.000 penduduk)	43		0		0		0		40		40		93,02			
				Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)	19		0		0		0		21.99		21,99		115,74			
				Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (%)			0		0		0		52.83		52,83		0			
		1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi			19.169.424.004		-		-		-		-		-	0	0		
				Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	350		0		0		0		0		0		0			
		1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan			19.169.424.004		-		-		-		-		-	0	0		
			Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Memenuhi Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	350		0		0		0		0		0		0			
		1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			6.582.423.346		48.618.880		111.760.000		1.024.979.054		2.407.997.216		3.593.355.150	10,36	54,59		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensi dan kualifikasinya	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat (Orang)	473		0		0		0		98		98		20,72			
				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan			6.582.423.346		48.618.880		111.760.000		1.024.979.054		2.407.997.216		3.593.355.150	20,72	54,59		
			Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat (Orang)	473		0		0		0		98		98		20,72			
		1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**			**295.524.200**		-		-		-		**165.904.096**		165.904.096	**4,55**	**56,14**	DINAS KESEHATAN	
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase)			0		0		0		81		81		0			
				Persentase Puskesmas dengan ketersediaan Obat Esensial (%)	60		0		0		0		80		80		133,33			
		1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)			204.430.400		-		-		-		165.904.096		165.904.096	9,09	81,15		
			Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan (Sarana)	11		0		0		0		1		1		9,09			
		1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK			204.430.400		-		-		-		165.904.096		165.904.096	9,09	81,15		
			Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan (Sarana)	11		0		0		0		1		1		9,09			
		1.02.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)			91.093.800		-		-		-		-		-	0	0		
			Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (Sarana)	11		0		0		0		0		0		0			
		1.02.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional			91.093.800		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (Sarana)	11		0		0		0		0		0		0			
		1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**961.872.200**		-		**20.708.600**		**507.432.412**		**172.738.140**		700.879.152	**83,33**	**72,87**	DINAS KESEHATAN	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Kab/ Kota dengan minimal 80% posyandu aktif (%)	75		0		0		0		70.5		70,5		94			
				Persentase Kab/ Kota yang menerapkan kebijakan germas (%)	45		0		0		0		9.09		9,09		20,2			
				Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan (%)			0		0		0		90.72		90,72		0			
		1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi			645.584.200		-		11.553.600		412.357.412		86.303.140		510.214.152	100	79,03		
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi			645.584.200		-		11.553.600		412.357.412		86.303.140		510.214.152	100	79,03		
			Terlaksananya Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi			316.288.000		-		9.155.000		95.075.000		86.435.000		190.665.000	66,67	60,28		
			Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	3		0		0		0		2		2		66,67			
		1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			316.288.000		-		9.155.000		95.075.000		86.435.000		190.665.000	66,67	60,28		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	3		0		0		0		2		2		66,67			
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**195.329.044.119**		**4.290.369.865**		**38.505.200.998**		**30.392.729.193**		**70.254.506.594**		143.442.806.650	**195**	**73,44**		
	1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				**36.260.669.053**		**3.217.869.865**		**10.657.586.537**		**3.089.313.301**		**11.798.454.654**		28.763.224.357	**318,88**	**79,32**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
			Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)			0		0		0		100		100		0			
				Persentase Terpenuhinya Penunjang Administrasi Kantor (%)	100		0		0		0		100		100		100			
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.322.665.451		-		130.209.300		55.671.060		1.025.651.847		1.211.532.207	100	52,16		
			Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6		0		0		0		6		6		100			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6		0		0		0		6		6		100			
	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.082.640.750		-		48.698.180		11.855.280		935.030.193		995.583.653	100	47,8		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6		0		0		0		6		6		100			
	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				240.024.701		-		81.511.120		43.815.780		90.621.654		215.948.554	100	89,97		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6		0		0		0		6		6		100			
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				19.873.264.282		1.849.469.865		6.612.685.779		572.163.453		5.942.802.922		14.977.122.019	100	75,36		
			Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	214		214		214		214		214		214		100			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				19.755.304.282		1.849.469.865		6.612.685.779		503.353.453		5.893.652.922		14.859.162.019	100	75,22		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	214		214		214		214		214		214		100			
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				117.960.000		-		-		68.810.000		49.150.000		117.960.000	100	100		
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				112.570.000		-		-		7.027.500		88.655.400		95.682.900	100	85		
			Presentase hasil penataan Aset Dinas	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				112.570.000		-		-		7.027.500		88.655.400		95.682.900	100	85		
			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				89.368.000		-		660.000		-		78.360.960		79.020.960	50	88,42		
			Persentase Tertib Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	9		0		0		0		0		0		0			
	1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				89.368.000		-		660.000		-		78.360.960		79.020.960	100	88,42		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	9		0		0		0		0		0		0			
		1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.522.624.632		-		380.500.251		149.491.848		813.365.974		1.343.358.073	100	88,23		
			Persentase Penunjang Perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		0		0		0		2		2		100			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		0		0		0		2		2		100			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		0		0		0		2		2		100			
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			21.345.600		-		9.354.000		2.774.000		6.587.500		18.715.500	100	87,68		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		0		0		0		2		2		100			
		1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			40.290.700		-		14.552.500		1.580.500		22.485.700		38.618.700	100	95,85		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		0		0		0		2		2		100			
		1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			51.465.732		-		24.268.800		11.296.400		15.121.000		50.686.200	100	98,49		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		0		0		0		2		2		100			
		1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			77.760.000		-		9.220.000		9.600.000		38.020.000		56.840.000	100	73,1		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			810.528.000		-		222.083.238		46.865.728		503.231.254		772.180.220	100	95,27		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			521.234.600		-		101.021.713		77.375.220		227.920.520		406.317.453	100	77,95		
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			8.608.975.796		1.368.400.000		3.012.768.212		1.971.140.727		2.112.354.980		8.464.663.919	150	98,32		
			Persentase Penunjang Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2		0		0		0		2		2		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3		0		0		0		6		6		200			
		1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			404.565.200		-		159.772.412		78.370.551		113.067.504		351.210.467	100	86,81		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2		0		0		0		2		2		100			
		1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			8.204.410.596		1.368.400.000		2.852.995.800		1.892.770.176		1.999.287.476		8.113.453.452	200	98,89		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3		0		0		0		6		6		200			
		1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.731.200.892		-		520.762.995		333.818.713		1.737.262.571		2.591.844.279	1139,69	69,46		
			Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		0		0		0		7		7		140			
				Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	1		0		0		0		42		42		4200			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	71		0		0		0		37		37		52,11			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		0		0		0		5		5		166,67			
		1.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			221.178.000		-		42.626.042		55.651.941		107.077.029		205.355.012	140	92,85		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		0		0		0		7		7		140			
		1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar			35.000.000		-		-		10.270.000		24.630.490		34.900.490	4200	99,72		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	1		0		0		0		42		42		4200			
		1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			117.170.000		-		17.750.000		39.060.000		31.310.000		88.120.000	52,11	75,21		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	71		0		0		0		37		37		52,11			
		1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			3.357.852.892		-		460.386.953		228.836.772		1.574.245.052		2.263.468.777	166,67	67,41		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		0		0		0		5		5		166,67			
		1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**			**30.721.334.070**		**-**		**5.863.618.346**		**4.937.623.581**		**12.642.106.979**		23.443.348.906	**37,92**	**76,31**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase infrastruktur SDA yang tertangani (%)	100		0		0		0		75.78		75,78		75,78			
				Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir (%)			0		0		0		4.32		4,32		0			
				Persentase peningkatan perlindungan kawasan dari abrasi dan banjir rob (%)			0		0		0		38.31		38,31		0			
				Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (%)			0		0		0		77.42		77,42		0			
		1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota			29.499.873.370		-		5.599.828.346		4.579.878.581		12.335.776.979		22.515.483.906	43,59	76,32		
			Persentase Peningkatan perlindungan kawasan Permukiman Rawan Banjir	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun (KM)	2.50		0		0		0		0,69		0,69		27,6			
				Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan (Lembaga)	3		0		0		0		0		0		0			
				Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun (KM)	2.20		0		0		0		2,27		2,27		103,18			
		1.03.02.1.01.0009	Pembangunan Tanggul Sungai			5.826.108.506		-		1.246.877.000		823.883.800		2.331.785.094		4.402.545.894	27,6	75,57		
			Terbangunnya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun (KM)	2.50		0		0		0		0,69		0,69		27,6			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.03.02.1.01.0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi			19.261.100		-		19.261.100		-		-		19.261.100	0	100		
			Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan (Lembaga)	3		0		0		0		0		0		0			
		1.03.02.1.01.0096	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya			23.654.503.764		-		4.333.690.246		3.755.994.781		10.003.991.885		18.093.676.912	103,18	76,49		
			Terbangunnya Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun (KM)	2.20		0		0		0		2,27		2,27		103,18			
		1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota			1.221.460.700		-		263.790.000		357.745.000		306.330.000		927.865.000	32,25	75,96		
			Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)	5.1		0		0		0		0,05		0,05		0,98			
				Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	4.1		0		0		0		0		0		0			
				Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	90.00		0		0		0		86,2		86,2		95,78			
		1.03.02.1.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan			259.910.700		-		-		-		-		-	0,98	0		
			Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)	5.1		0		0		0		0,05		0,05		0,98			
		1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	4.1		0		0		0		0		0		0			
		1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan			961.550.000		-		263.790.000		357.745.000		306.330.000		927.865.000	95,78	96,5		
			Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	90.00		0		0		0		86,2		86,2		95,78			
		1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**			**6.309.456.914**		**-**		**454.788.104**		**1.012.367.500**		**1.801.788.580**		3.268.944.184	**49,42**	**51,81**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kab/kota (%)			0		0		0		0		0		0			
				Persentase Penduduk Berakses Air Minum (%)	80,65		0		0		0		23.79		23,79		29,5			
		1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota			6.309.456.914		-		454.788.104		1.012.367.500		1.801.788.580		3.268.944.184	49,42	51,81		
			Persentase Peningkatan Kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kab/kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun (Liter/Detik)	27.82		0		0		0		27,5		27,5		98,85			
		1.03.03.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			302.875.400		-		10.793.200		20.920.000		79.486.200		111.199.400	0	36,71		
			Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		1.03.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota			6.006.581.514		-		443.994.904		991.447.500		1.722.302.380		3.157.744.784	98,85	52,57		
			Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun (Liter/Detik)	27.82		0		0		0		27,5		27,5		98,85			
		1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**			**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		-	**0**	**0**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Rasio Pelayanan Pengelolaan Limbah Domestik Oleh SPAL Regional (%)	20		0		0		0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak (%)			0		0		0		14.58		14,58		0			
				Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Aman (%)			0		0		0		1.43		1,43		0			
		1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dibangun (MÃ³/Hari)	0.00042		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		1.03.05.1.01.0013	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dibangun (MÃ³/Hari)	0.00042		0		0		0		0		0		0			
		1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**			**2.557.475.500**		**-**		**487.810.900**		**369.749.000**		**1.084.842.600**		1.942.402.500	**84,62**	**75,95**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
			Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik (%)			0		0		0		84.62		84,62		0			
				Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (%)	76,53		0		0		0		0		0		0			
		1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi			2.557.475.500		-		487.810.900		369.749.000		1.084.842.600		1.942.402.500	84,62	75,95		
			Persentase Cakupan Drainase dalam kondisi baik	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	13		0		0		0		11		11		84,62			
		1.03.06.1.01.0008	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan			2.557.475.500		-		487.810.900		369.749.000		1.084.842.600		1.942.402.500	84,62	75,95		
			Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	13		0		0		0		11		11		84,62			
		1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**			**25.260.682.200**		**1.072.500.000**		**10.310.017.636**		**2.407.262.661**		**7.334.039.645**		21.123.819.942	**186,67**	**83,62**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung (%)	100		0		0		0		100		100		100			
				Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik (%)									100		100		0			
		1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi			25.260.682.200		1.072.500.000		10.310.017.636		2.407.262.661		7.334.039.645		21.123.819.942	186,67	83,62		
			Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan (Bangunan Gedung)	15		0		0		0		28		28		186,67			
		1.03.08.1.01.0016	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi			25.260.682.200		1.072.500.000		10.310.017.636		2.407.262.661		7.334.039.645		21.123.819.942	186,67	83,62		
			Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang mendapatkan Pengubahsuaian	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan (Bangunan Gedung)	15		0		0		0		28		28		186,67			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.03.09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**			**45.905.332.300**		**-**		**6.159.901.340**		**8.184.085.002**		**20.929.935.642**		35.273.921.984	**209,09**	**76,84**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
			Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bagunan dan Lingkungan Perkotaan dan Perdesaan (%)	100		0		0		0		100		100		100			
				Persentase penataan bangunan dan lingkungan (%)													0			
		1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			45.905.332.300		-		6.159.901.340		8.184.085.002		20.929.935.642		35.273.921.984	209,09	76,84		
			Persentase penataan bangunan dan lingkungan	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata (Kawasan)	55		0		0		0		115		115		209,09			
		1.03.09.1.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya			45.905.332.300		-		6.159.901.340		8.184.085.002		20.929.935.642		35.273.921.984	209,09	76,84		
			Tertatanya Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata (Kawasan)	55		0		0		0		115		115		209,09			
		1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**			**46.634.534.082**		**-**		**4.296.290.099**		**9.887.371.158**		**13.932.556.488**		28.116.217.745	**202,43**	**60,29**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
			Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan (%)			0		0		0		61.84		61,84		0			
				Persentase Kemantapan Jalan (%)	52,00		0		0		0		61.84		61,84		118,92			
		1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi			46.634.534.082		-		4.296.290.099		9.887.371.158		13.932.556.488		28.116.217.745	202,43	60,29		
			Tingkat Kemantapan Jalan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi (Jembatan)	1		0		0		0		5		5		500			
				Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	90		0		0		0		6,99		6,99		7,77			
				Jumlah Jembatan yang Dibangun (Jembatan)	4		0		0		0		2		2		50			
				Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	324.51		0		0		0		313,61		313,61		96,64			
				Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	0.526		0		0		0		3,38		3,38		642,59			
				Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	10		0		0		0		6		6		60			
				Panjang Jalan yang Dibangun (KM)	1		0		0		0		0,6		0,6		60			
		1.03.10.1.01.0025	Rehabilitasi Jembatan			3.851.287.400		-		2.403.500.000		880.446.043		466.778.367		3.750.724.410	500	97,39		
			Terehabilitasinya Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi (Jembatan)	1		0		0		0		5		5		500			
		1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan			23.858.782.000		-		-		5.264.260.850		7.721.263.908		12.985.524.758	7,77	54,43		
			Terekonstruksinya Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	90		0		0		0		6,99		6,99		7,77			
		1.03.10.1.01.0032	Pembangunan Jembatan			4.205.387.500		-		1.392.300.000		831.706.300		965.600.693		3.189.606.993	50	75,85		
			Terbangunnya Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun (Jembatan)	4		0		0		0		2		2		50			
		1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan			2.852.164.619		-		264.403.250		353.543.215		1.657.003.467		2.274.949.932	96,64	79,76		
			Terpeliharanya Jalan Secara Rutin	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	324.51		0		0		0		313,61		313,61		96,64			
		1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan			6.722.558.400		-		-		2.557.414.750		2.394.128.750		4.951.543.500	642,59	73,66		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terpeliharanya Jalan Secara Berkala	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	0.526		0		0		0		3,38		3,38		642,59			
		1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan			3.422.614.163		-		236.086.849		-		211.211.303		447.298.152	60	13,07		
			Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	10		0		0		0		6		6		60			
		1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan			1.721.740.000		-		-		-		516.570.000		516.570.000	60	30		
			Terbangunnya Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun (KM)	1		0		0		0		0,6		0,6		60			
		1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**			**625.000.000**		**-**		**96.935.480**		**105.072.240**		**415.677.440**		617.685.160	**65,82**	**98,83**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
			Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli (%)			0		0		0		13		13		0			
				Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi (%)	100		0		0		0		65.8		65,8		65,8			
		1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi			104.000.000		-		54.966.300		45.800.820		-		100.767.120	94,12	96,89		
			jumlah tenaga kerja ahli konstruksi yang kompeten dan bersertifikat	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi (Orang)	17		0		0		0		16		16		94,12			
		1.03.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli			104.000.000		-		54.966.300		45.800.820		-		100.767.120	94,12	96,89		
			Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi (Orang)	17		0		0		0		16		16		94,12			
		1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi			107.000.000		-		22.377.500		5.971.500		75.280.200		103.629.200	100	96,85		
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan (Layanan Informasi)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.03.11.1.02.0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi			107.000.000		-		22.377.500		5.971.500		75.280.200		103.629.200	100	96,85		
			Beroperasinya Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan (Layanan Informasi)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi			414.000.000		-		19.591.680		53.299.920		340.397.240		413.288.840	3,33	99,83		
			Jumlah Proyek Konstruksi yang diawasi dan dievaluasi	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)	30		0		0		0		1		1		3,33			
		1.03.11.1.03.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota			414.000.000		-		19.591.680		53.299.920		340.397.240		413.288.840	3,33	99,83		
			Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)	30		0		0		0		1		1		3,33			
		1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**			**1.054.560.000**		**-**		**178.252.556**		**399.884.750**		**315.104.566**		893.241.872	**50**	**84,7**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah provinsi (%)			0		0		0		0		0		0			
				Persentase Ketaatan RTRW (%)	100		0		0		0		0		0		0			
		1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Persentase Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi (Orang)	40		0		0		0		0		0		0			
		1.03.12.1.01.0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang			-		-		-		-		-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersampaikannya substansi pengaturan bidang penataan ruang kepada pemangku kepentingan	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi (Orang)	40		0		0		0		0		0		0			
		1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi			1.054.560.000		-		178.252.556		399.884.750		315.104.566		893.241.872	100	84,7		
			Persentase Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.03.12.1.03.0004	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang			1.054.560.000		-		178.252.556		399.884.750		315.104.566		893.241.872	100	84,7		
			Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan	Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**			**26.709.037.386**		**1.963.348.223**		**2.964.927.794**		**2.537.379.374**		**17.434.989.394**		24.900.644.785	**60,02**	**93,23**		
		1.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**8.952.137.061**		**1.902.934.943**		**2.828.447.714**		**1.515.072.874**		**2.293.633.570**		8.540.089.101	**52,5**	**95,4**	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Capaian Program dan Kegiatan Dinas (%)	100												0			
				Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)													0			
		1.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			11.150.400		-		-		-		11.149.000		11.149.000	50	99,99		
			Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4		0		0		0		4		4		100			
		1.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		1.04.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			11.150.400		-		-		-		11.149.000		11.149.000	100	99,99		
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4		0		0		0		4		4		100			
		1.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.545.966.794		1.247.538.487		1.919.784.133		1.053.836.682		1.185.152.971		5.406.312.273	100	97,48		
			Persentase administrasi keuangan daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	54		54		54		54		54		54		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1		0		1		1		1		1		100			
		1.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.470.886.794		1.247.538.487		1.898.484.133		1.041.796.682		1.143.412.971		5.331.232.273	100	97,45		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	54		54		54		54		54		54		100			
		1.04.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			75.080.000		-		21.300.000		12.040.000		41.740.000		75.080.000	100	100		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1		0		1		1		1		1		100			
		1.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			25.024.850		-		900.000		12.096.000		7.342.800		20.338.800	50	81,27		
			Persentase BMD penunjang urasan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2		0		1		1		1		1		50			
		1.04.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			25.024.850		-		900.000		12.096.000		7.342.800		20.338.800	50	81,27		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2		0		1		1		1		1		50			
		1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			490.831.842		55.221.004		62.405.608		74.584.560		235.411.282		427.622.454	33,75	87,12		
			Tersedianya Peralatan Umum Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		2		1		1		20			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4		1		1		1		1		1		25			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		1		0		0		1		1		50			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	10		2		2		2		4		4		40			
		1.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			5.001.620		1.200.000		1.760.000		1.817.500		220.000		4.997.500	20	99,92		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		2		1		1		20			
		1.04.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			153.929.680		5.707.500		12.294.500		9.607.800		125.224.615		152.834.415	25	99,29		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4		1		1		1		1		1		25			
		1.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			9.450.000		2.670.000		480.000		4.411.000		1.889.000		9.450.000	50	100		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		1		0		0		1		1		50			
		1.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			322.450.542		45.643.504		47.871.108		58.748.260		108.077.667		260.340.539	40	80,74		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	10		2		2		2		4		4		40			
		1.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.470.740.440		570.594.452		793.244.113		337.800.352		579.550.927		2.281.189.844	41,67	92,33		
			Tersedianya Jasa Penunjang Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2		0		0		1		1		1		50			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3		0		1		1		1		1		33,33			
		1.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			218.700.000		22.093.187		81.598.882		34.395.268		37.989.936		176.077.273	50	80,51		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2		0		0		1		1		1		50			
		1.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.252.040.440		548.501.265		711.645.231		303.405.084		541.560.991		2.105.112.571	33,33	93,48		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3		0		1		1		1		1		33,33			
		1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			408.422.735		29.581.000		52.113.860		36.755.280		275.026.590		393.476.730	55,56	96,34		
			Jumlah jenis penyediaan jasa pemeliharaan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	15		4		3		4		4		4		26,67			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5		1		1		1		2		2		40			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.04.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			196.520.700		24.231.000		48.763.860		35.005.280		75.696.590		183.696.730	26,67	93,47		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	15		4		3		4		4		4		26,67			
		1.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			13.232.035		5.350.000		3.350.000		1.750.000		2.700.000		13.150.000	40	99,38		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5		1		1		1		2		2		40			
		1.04.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			198.670.000		-		-		-		196.630.000		196.630.000	100	98,97		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**			**7.693.040.600**		**22.712.960**		**-**		**-**		**7.667.398.544**		7.690.111.504	**75,5**	**99,96**	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni (Persentase)													0			
				Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)													0			
				Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	100												0			
		1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			53.040.600		22.712.960		-		-		29.056.000		51.768.960	50	97,6		
			Terlaksananya pembangunan rumah korban bencana	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen)	4		1		0		0		3		4		100			
				Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi (Dokumen)	4		0		0		0		0		0		0			
		1.04.02.1.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani			53.040.600		22.712.960		-		-		29.056.000		51.768.960	100	97,6		
			Tersusunnya Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen)	4		1		0		0		3		4		100			
		1.04.02.1.01.0008	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi (Dokumen)	4		0		0		0		0		0		0			
		1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			7.440.000.000		-		-		-		7.439.989.200		7.439.989.200	102	100		
			Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi yang Terbangun (Unit Rumah)	200		0		0		0		204		204		102			
		1.04.02.1.03.0008	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi			7.440.000.000		-		-		-		7.439.989.200		7.439.989.200	102	100		
			Terbangunnya Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi yang Terbangun (Unit Rumah)	200		0		0		0		204		204		102			
		1.04.02.1.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			200.000.000		-		-		-		198.353.344		198.353.344	100	99,18		
			Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelanggaraan perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.04.02.1.04.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan			200.000.000		-		-		-		198.353.344		198.353.344	100	99,18		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**			**7.514.503.725**		**25.618.940**		**123.220.080**		**1.020.206.500**		**5.773.823.856**		6.942.869.376	**54,91**	**92,39**	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase pemukiman yang tertata (%)	100												0			
				Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani (Persentase)													0			
		1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			536.792.100		14.516.160		-		-		412.786.185		427.302.345	88,89	79,6		
			Penyusunan /Review/ Legalisasi kebijakan bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara (Sistem Informasi)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (Laporan)	3		1		0		0		2		2		66,67			
		1.04.03.1.01.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP			400.000.000		7.258.080		-		-		324.505.085		331.763.165	100	82,94		
			Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.04.03.1.01.0011	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman			55.000.000		-		-		-		55.000.000		55.000.000	100	100		
			Terbentuknya/terpeliharanya Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara (Sistem Informasi)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.04.03.1.01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman			81.792.100		7.258.080		-		-		33.281.100		40.539.180	66,67	49,56		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (Laporan)	3		1		0		0		2		2		66,67			
		1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			6.977.711.625		11.102.780		123.220.080		1.020.206.500		5.361.037.671		6.515.567.031	34,52	93,38		
			Perbaikan rumah tidak layak huni dalam kawasan permukiman dengan luas 10 Ha sampai dengan dibawah 15 Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha (Laporan)	5		0		1		0		2		2		40			
				Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	214		0		1		4		8		8		3,74			
				Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha (Unit Rumah)	22		0		0		1		21		21		95,45			
				Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan (Hektar)	0.5		0		0		0,05		0,11		0,16		32,4			
				Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar (Ha)	10		0		0		0		0,1		0,1		1,03			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.04.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			155.108.500		-		11.280.000		-		120.880.500		132.160.500	40	85,21		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha (Laporan)	5		0		1		0		2		2		40			
		1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			913.964.750		-		22.520.000		313.550.000		448.615.900		784.685.900	3,74	85,86		
			Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	214		0		1		4		8		8		3,74			
		1.04.03.1.02.0011	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			1.673.085.400		11.102.780		9.580.000		75.688.400		1.566.022.400		1.662.393.580	95,45	99,36		
			Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha (Unit Rumah)	22		0		0		1		21		21		95,45			
		1.04.03.1.02.0013	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			1.845.271.100		-		-		630.968.100		991.487.301		1.622.455.401	32,4	87,93		
			Terlaksananya Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan (Hektar)	0.5		0		0		0,05		0,11		0,16		32,4			
		1.04.03.1.02.0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			2.390.281.875		-		79.840.080		-		2.234.031.570		2.313.871.650	1,03	96,8		
			Terlaksananya Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar (Ha)	10		0		0		0		0,1		0,1		1,03			
		1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**			**2.549.356.000**		**12.081.380**		**13.260.000**		**2.100.000**		**1.700.133.424**		1.727.574.804	**88,1**	**67,77**	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase lingkungan pemukiman kumuh (%)	100												0			
				Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)													0			
		1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman			2.549.356.000		12.081.380		13.260.000		2.100.000		1.700.133.424		1.727.574.804	88,1	67,77		
			Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman (Dokumen)	4		1		1		0		2		2		50			
				Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman (Lokasi)	7		0		1		1		6		8		114,29			
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman (Laporan)	11		0		0		0		11		11		100			
		1.04.05.1.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman			61.480.000		12.081.380		11.460.000		-		26.570.000		50.111.380	50	81,51		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman (Dokumen)	4		1		1		0		2		2		50			
		1.04.05.1.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman			2.155.116.000		-		1.800.000		2.100.000		1.390.609.900		1.394.509.900	114,29	64,71		
			Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman yang Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman (Lokasi)	7		0		1		1		6		8		114,29			
		1.04.05.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman			332.760.000		-		-		-		282.953.524		282.953.524	100	85,03		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman (Laporan)	11		0		0		0		11		11		100			
		1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			**18.456.990.151**		**3.762.072.459**		**3.827.757.045**		**5.063.221.640**		**5.531.600.482**		18.184.651.626	**33,75**	**98,52**		
		1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**7.244.821.526**		**1.673.613.039**		**1.108.135.574**		**1.564.497.959**		**3.116.963.648**		7.463.210.220	**53,87**	**103,01**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
			Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Nilai Sakip (%)	100												0			
				Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)													0			
		1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			34.201.455		-		2.910.000		-		30.704.535		33.614.535	49,21	98,28		
			Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4		0		0		0		4		4		100			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	9		0		0		0		4		4		44,44			
		1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4		0		0		0		0		0		0			
		1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			1.522.000		-		-		-		1.522.000		1.522.000	100	100		
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.05.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			2.297.455		-		-		-		2.297.455		2.297.455	100	100		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		1.05.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			6.383.000		-		2.910.000		-		3.473.000		6.383.000	100	100		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4		0		0		0		4		4		100			
		1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			23.999.000		-		-		-		23.412.080		23.412.080	44,44	97,55		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	9		0		0		0		4		4		44,44			
		1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.884.436.121		1.589.421.471		1.067.950.129		1.515.224.663		2.555.147.600		6.727.743.863	133,7	97,72		
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	60		53		53		53		114		114		190			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0		0		2		2		200			
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	36		0		0		0		4		4		11,11			
		1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			6.881.446.121		1.589.421.471		1.067.950.129		1.515.224.663		2.552.157.600		6.724.753.863	190	97,72		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	60		53		53		53		114		114		190			
		1.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1.500.000		-		-		-		1.500.000		1.500.000	200	100		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0		0		2		2		200			
		1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			1.490.000		-		-		-		1.490.000		1.490.000	11,11	100		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	36		0		0		0		4		4		11,11			
		1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksannya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
	1.05.01.1.03.0001		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
	1.05.01.1.03.0005		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
	1.05.01.1.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
	1.05.01.1.03.0007		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
	1.05.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			3.500.000		3.500.000		-		-		-		3.500.000	100	100		
			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		1		0		0		0		1		100			
	1.05.01.1.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			3.500.000		3.500.000		-		-		-		3.500.000	100	100		
			Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		1		0		0		0		1		100			
	1.05.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			181.481.950		49.050.000		17.078.000		23.225.700		499.276.074		588.629.774	52,08	324,35		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3		1		0		0		1		2		66,67			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		0		0		0		1		1		50			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12		0		0		5		0		5		41,67			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		1		1		1		27		30		50			
	1.05.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			64.335.950		31.972.000		-		-		440.311.500		472.283.500	66,67	734,09		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3		1		0		0		1		2		66,67			
	1.05.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			7.938.000		-		-		4.907.700		3.030.300		7.938.000	50	100		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		0		0		0		1		1		50			
	1.05.01.1.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			1.250.000		-		-		1.240.000		-		1.240.000	41,67	99,2		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12		0		0		5		0		5		41,67			
	1.05.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			107.958.000		17.078.000		17.078.000		17.078.000		55.934.274		107.168.274	50	99,27		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		1		1		1		27		30		50			
	1.05.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-		-		-		-		-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0		0		0			
		1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0		0		0			
		1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			90.200.000		17.070.418		10.972.445		13.454.596		17.481.439		58.978.898	100	65,39		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
		1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			90.200.000		17.070.418		10.972.445		13.454.596		17.481.439		58.978.898	100	65,39		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
		1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			51.002.000		14.571.150		9.225.000		12.593.000		14.354.000		50.743.150	46,36	99,49		
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	11		0		0		0		1		1		9,09			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	20		4		0		2		0		6		30			
		1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			44.920.000		12.870.000		9.225.000		11.593.000		11.232.000		44.920.000	9,09	100		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	11		0		0		0		1		1		9,09			
		1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			3.122.000		-		-		-		3.122.000		3.122.000	100	100		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.05.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			2.960.000		1.701.150		-		1.000.000		-		2.701.150	30	91,26		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	20		4		0		2		0		6		30			
		1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**5.768.475.470**		**1.040.735.750**		**1.573.561.750**		**1.143.771.710**		**1.928.435.310**		5.686.504.520	**15,37**	**98,58**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Presentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah (%)													0			
		1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			5.759.680.970		1.040.735.750		1.573.561.750		1.143.771.710		1.919.640.810		5.677.710.020	29,44	98,58		
			Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya (Orang)	300		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur (Dokumen)	12		0		0		0		1		1		8,33			
				Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada (Laporan)	2		0		2		0		0		2		100			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan (laporan)	54		3		3		3		3		12		22,22			
				Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	24		0		0		0		4		4		16,67			
		1.05.02.1.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya (Orang)	300		0		0		0		0		0		0			
		1.05.02.1.01.0012	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi			72.786.300		-		3.457.000		-		66.149.300		69.606.300	8,33	95,63		
			Terbentuknya Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur (Dokumen)	12		0		0		0		1		1		8,33			
		1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			6.238.000		-		5.238.000		-		-		5.238.000	100	83,97		
			Tersedianya Pelayanan Dasar keapada warga negara yang terkena dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada (Laporan)	2		0		2		0		0		2		100			
		1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan			5.679.646.670		1.040.735.750		1.564.866.750		1.143.771.710		1.852.481.510		5.601.855.720	22,22	98,63		
			Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan (laporan)	54		3		3		3		3		12		22,22			
		1.05.02.1.01.0019	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa			1.010.000		-		-		-		1.010.000		1.010.000	16,67	100		
			Terlaksananya Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	24		0		0		0		4		4		16,67			
		1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur			7.784.500		-		-		-		7.784.500		7.784.500	5,56	100		
			Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP (Laporan)	3		0		0		0		1		1		33,33			
				Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (laporan)	2		0		0		0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (laporan)	2		0		0		0		0		0		0			
		1.05.02.1.02.0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			7.784.500		-		-		-		7.784.500		7.784.500	33,33	100		
			Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP (Laporan)	3		0		0		0		1		1		33,33			
		1.05.02.1.02.0005	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (laporan)	2		0		0		0		0		0		0			
		1.05.02.1.02.0006	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersusunnya SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		1.05.02.1.02.0008	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan pada Pelanggar Peraturan daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (laporan)	2		0		0		0		0		0		0			
		1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi			1.010.000		-		-		-		1.010.000		1.010.000	12,5	100		
			Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda (Laporan)	2		0		0		0		1		1		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		1.05.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS			1.010.000		-		-		-		1.010.000		1.010.000	50	100		
			Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda (Laporan)	2		0		0		0		1		1		50			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.05.02.1.03.0004	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		1.05.02.1.03.0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		1.05.02.1.03.0006	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersediannya Anggaran Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**			**8.711.300**		**-**		**-**		**-**		**8.711.300**		8.711.300	**10**	**100**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
			Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum (%)	100												0			
				Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (%)													0			
		1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran			8.711.300		-		-		-		8.711.300		8.711.300	12,5	100		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota) (Orang)	100		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal (Dokumen)	2		0		0		0		1		1		50			
		1.05.04.1.01.0009	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota) (Orang)	100		0		0		0		0		0		0			
		1.05.04.1.01.0014	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		1.05.04.1.01.0015	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		1.05.04.1.01.0019	Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran			8.711.300		-		-		-		8.711.300		8.711.300	50	100		
			Tersedianya Dokumen Pemutakhiran Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal (Dokumen)	2		0		0		0		1		1		50			
		1.05.04.1.02	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			-		-		-		-		-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		1.05.04.1.02.0004	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**5.254.093.456**		**1.047.723.670**		**1.123.463.721**		**2.279.943.892**		**411.491.624**		4.862.622.907	**24,53**	**92,55**	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100		25		25		35		15		100		100			
				Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)													0			
		1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5.000.000		-		-		4.967.000		-		4.967.000	0	99,34		
			Terlaksananya perencanaan, penggganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1		0		0		1		0		0		0			
		1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5.000.000		-		-		4.967.000		-		4.967.000	0	99,34		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1		0		0		1		0		0		0			
		1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.479.071.848		909.854.623		916.284.264		2.095.880.130		251.670.450		4.173.689.467	75	93,18		
			Terlaksananya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	35		35		35		35		35		35		100			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		0		0		6		6		6		50			
		1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.425.791.848		909.854.623		916.284.264		2.069.240.130		225.030.450		4.120.409.467	100	93,1		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	35		35		35		35		35		35		100			
		1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			53.280.000		-		-		26.640.000		26.640.000		53.280.000	50	100		
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		0		0		6		6		6		50			
		1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			46.144.000		-		10.801.700		30.275.400		4.367.300		45.444.400	6	98,48		
			Terlaksananya layanan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		1		0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		1		0		0		0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		0		1		1		0		0		0			
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1		0		1		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	10		0		6		1		3		3		30			
		1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.400.000		-		750.000		2.238.000		400.000		3.388.000	0	99,65		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		1		0		0		0			
		1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			15.462.000		-		4.196.000		8.664.000		2.542.000		15.402.000	0	99,61		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		1		0		0		0			
		1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			5.062.000		-		2.063.700		2.319.400		675.300		5.058.400	0	99,93		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		0		1		1		0		0		0			
		1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			1.992.000		-		1.992.000		-		-		1.992.000	0	100		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1		0		1		0		0		0		0			
		1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			20.228.000		-		1.800.000		17.054.000		750.000		19.604.000	30	96,92		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	10		0		6		1		3		3		30			
		1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
		1.05.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
		1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			659.138.608		137.869.047		177.070.257		127.938.542		134.136.555		577.014.401	66,67	87,54		
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3		0		1		1		1		1		33,33			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			112.100.028		-		36.653.937		28.476.982		35.877.030		101.007.949	33,33	90,11		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3		0		1		1		1		1		33,33			
		1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			547.038.580		137.869.047		140.416.320		99.461.560		98.259.525		476.006.452	100	87,02		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			64.739.000		-		19.307.500		20.882.820		21.317.319		61.507.639	13,64	95,01		
			Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	11		0		2		3		3		3		27,27			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	11		0		2		2		3		3		27,27			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
		1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			37.670.000		-		8.577.500		15.971.820		12.576.219		37.125.539	27,27	98,55		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	11		0		2		3		3		3		27,27			
		1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			24.629.000		-		10.730.000		4.911.000		8.741.100		24.382.100	27,27	99		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	11		0		2		2		3		3		27,27			
		1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2.440.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12		0		0		0		0		0		0			
		1.05.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
		1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**			**180.888.400**		**-**		**22.596.000**		**75.008.079**		**65.998.600**		163.602.679	**40**	**90,44**	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dinyatakan sah/legal (%)	100		67		0		0		0		67		67			
				Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana (%)													0			
				Persentase penanganan pasca bencana (%)	100		0		20		50		30		100		100			
				Persentase penanganan pra bencana (%)	100		0		10		20		42		72		72			
		1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Meningkatnya pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota (Orang)	50		0		0		0		0		0		0			
		1.05.03.1.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi bagi warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota (Orang)	50		0		0		0		0		0		0			
		1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			80.862.400		-		9.640.000		22.720.300		41.830.100		74.190.400	50	91,75		
			Meningkatnya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	2		0		0		0		2		2		100			
				Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana (Orang)	40		0		0		0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah akar masalah risiko bencana lintas Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	1		0		0		0		0		0		0			
				Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana			27.425.450		-		-		5.765.450		17.890.000		23.655.450	100	86,25		
			Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	2		0		0		0		2		2		100			
		1.05.03.1.02.0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			8.185.850		-		-		8.035.850		-		8.035.850	0	98,17		
			Terlaksananya uji mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana lintas Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana (Orang)	40		0		0		0		0		0		0			
		1.05.03.1.02.0026	Pengelolaan Risiko Bencana			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan berisiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota	Jumlah akar masalah risiko bencana lintas Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	1		0		0		0		0		0		0			
		1.05.03.1.02.0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			45.251.100		-		9.640.000		8.919.000		23.940.100		42.499.100	100	93,92		
			Terbentuknya Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap (SOP) untuk pengendalian operasi yang sah dan legal dengan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			100.026.000		-		12.956.000		52.287.779		24.168.500		89.412.279	40	89,39		
			Meningkatnya penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal (Lembaga)	2		0		0		0		0		0				
				Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun (kabupaten/kota)	5		0		0		0		1		1		20			
		1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi			66.026.000		-		3.316.000		46.171.779		8.390.000		57.877.779	100	87,66		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.05.03.1.04.0010	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal (Lembaga)	2		0		0		0		0		0		0			
		1.05.03.1.04.0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota			34.000.000		-		9.640.000		6.116.000		15.778.500		31.534.500	20	92,75		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun (kabupaten/kota)	5		0		0		0		1		1		20			
		1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**			**24.954.612.956**		**2.994.693.233**		**6.282.544.494**		**8.010.198.826**		**6.457.972.351**		23.745.408.904	**53,95**	**95,15**		
		1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**15.352.117.927**		**2.850.143.233**		**4.950.678.997**		**3.046.729.518**		**3.777.030.924**		14.624.582.672	**97,88**	**95,26**	DINAS SOSIAL	
			Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)													0			
				Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100												0			
		1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			74.591.000		-		-		-		68.313.000		68.313.000	0	91,58		
			Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2		0		0		0		0		0		0			
		1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			74.591.000		-		-		-		68.313.000		68.313.000	0	91,58		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5		0		0		0		0		0		0			
		1.06.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2		0		0		0		0		0		0			
		1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			10.277.653.496		2.351.297.341		2.380.536.145		2.485.496.726		2.826.976.708		10.044.306.920	69,61	97,73		
			Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	110		106		106		106		106		106		96,36			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	21		0		0		9		9		9		42,86			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			10.181.290.496		2.351.297.341		2.380.536.145		2.448.256.726		2.767.853.708		9.947.943.920	96,36	97,71		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	110		106		106		106		106		106		96,36			
		1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			96.363.000		-		-		37.240.000		59.123.000		96.363.000	42,86	100		
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	21		0		0		9		9		9		42,86			
		1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	10		0		0		0		0		0		0			
		1.06.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	10		0		0		0		0		0		0			
		1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			617.271.070		-		200.737.021		57.358.884		313.968.865		572.064.770	87,82	92,68		
			Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		0		2		1		1		1		50			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	11		0		0		0		11		11		100			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3		0		1		1		1		3		100			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		0		1		1		2		2		100			
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12		0		4		4		4		12		100			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	13		0		3		2		5		10		76,92			
		1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			7.975.000		-		4.477.000		1.472.000		2.026.000		7.975.000	50	100		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		0		2		1		1		1		50			
		1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			52.630.000		-		-		-		52.630.000		52.630.000	100	100		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	11		0		0		0		11		11		100			
		1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			69.897.720		-		45.269.120		8.177.300		8.832.000		62.278.420	100	89,1		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3		0		1		1		1		3		100			
		1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			17.998.350		-		11.256.000		3.512.000		3.230.350		17.998.350	100	100		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		0		1		1		2		2		100			
		1.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			13.200.000		-		4.400.000		2.000.000		6.800.000		13.200.000	100	100		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12		0		4		4		4		12		100			
		1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			455.570.000		-		135.334.901		42.197.584		240.450.515		417.983.000	76,92	91,75		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	13		0		3		2		5		10		76,92			
		1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			4.000.000		-		-		4.000.000		-		4.000.000	1,25	100		
			Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	35		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	20		0		0		1		0		1		5			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	10		0		0		0		0		0		0			
		1.06.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0		0		0		0			
		1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	35		0		0		0		0		0		0			
		1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			4.000.000		-		-		4.000.000		-		4.000.000	5	100		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	20		0		0		1		0		1		5			
		1.06.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	10		0		0		0		0		0		0			
		1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.337.805.625		498.845.892		638.503.615		461.218.788		445.444.232		2.044.012.527	54,2	87,43		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	8		0		1		0		7		8		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36		0		6		3		3		12		33,33			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	41		3		3		3		3		12		29,27			
		1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4.500.000		-		640.000		-		3.860.000		4.500.000	100	100		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	8		0		1		0		7		8		100			
		1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			286.160.000		-		86.445.269		71.011.829		82.164.915		239.622.013	33,33	83,74		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36		0		6		3		3		12		33,33			
		1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.047.145.625		498.845.892		551.418.346		390.206.959		359.419.317		1.799.890.514	29,27	87,92		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	41		3		3		3		3		12		29,27			
		1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.040.796.736		-		1.730.902.216		38.655.120		122.328.119		1.891.885.455	329,9	92,7		
			Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	38		0		12		12		13		37		97,37			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	18		0		5		1		4		10		55,56			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		1		1		0		1		100			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		0		10		2		20		32		1066,67			
		1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			206.295.500		-		36.631.956		31.683.620		107.296.619		175.612.195	97,37	85,13		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	38		0		12		12		13		37		97,37			
		1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			25.000.000		-		13.000.000		2.000.000		10.000.000		25.000.000	55,56	100		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	18		0		5		1		4		10		55,56			
		1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1.796.345.037		-		1.680.025.260		4.000.000		-		1.684.025.260	100	93,75		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		1		1		0		1		100			
		1.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			13.156.199		-		1.245.000		971.500		5.031.500		7.248.000	1066,67	55,09		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		0		10		2		20		32		1066,67			
		1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**			**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		-	**0**	**0**	DINAS SOSIAL	
			Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial (%)													0			
				Jumlah Document penerbitan Izin Undian gratis berhadiah dan pengumpulan yang atau barang yang (dokumen)	2		0		0		0		0		0		0			
				Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) [deleted] (%)	100		0		0		0		0		0		0			
				Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%)			0		0		0		0		0		0			
				Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial (%)			0		0		0		0		0		0			
				Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Taraf Kesejahteraannya (%)			0		0		0		0		0		0			
		1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Presentase Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	2		0		0		0		0		0		0			
		1.06.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	2		0		0		0		0		0		0			
		1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Presentase jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi (Orang)	30		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	118		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi (Keluarga)	30		0		0		0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi (Lembaga)	15		0		0		0		0		0		0			
		1.06.02.1.02.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi (Orang)	30		0		0		0		0		0		0			
		1.06.02.1.02.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	118		0		0		0		0		0		0			
		1.06.02.1.02.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi (Keluarga)	30		0		0		0		0		0		0			
		1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi (Lembaga)	15		0		0		0		0		0		0			
		1.06.03	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**			**79.695.000**		**-**		**-**		**30.858.968**		**24.288.000**		55.146.968	**33,75**	**69,2**	DINAS SOSIAL	
			Meningkatnya layanan penanganan warga negeri migran korban tindak kekerasan	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan (%)													0			
				Persentase Deportan / Orang Terlantar (%)	100								49		49		49			
		1.06.03.1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal			79.695.000		-		-		30.858.968		24.288.000		55.146.968	33,75	69,2		
			Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	80		0		0		16		11		27		33,75			
		1.06.03.1.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal			79.695.000		-		-		30.858.968		24.288.000		55.146.968	33,75	69,2		
			Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	80		0		0		16		11		27		33,75			
		1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**			**2.829.111.992**		**144.550.000**		**652.766.720**		**739.960.940**		**844.501.192**		2.381.778.852	**18,25**	**84,19**	DINAS SOSIAL	
			Meningkatnya rehabiltasi sosial	Jumlah Document hasil koordinasi dan pembinan rehabilitasi sosial dasar penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya diltar HIV/AIDS dan NAPZA (document)	6								11		11		183,33			
				Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)									100		100		0			
				Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 Tahun kewenangan provinsi (orang)	30								16		16		53,33			
				Persentase Remaja Putus Sekolah, Anak Berhadapan dengan Hukum / Respons Kasus (%)	100								100		100		100			
				Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)									100		100		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)									100		100		0			
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)									100		100		0			
				Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)									100		100		0			
				Persentase Disabilitas Terlantar yang Mendapat Bantuan Sosial (%)	100								100		100		100			
				Persentase Anak Terlantar yang Mendapat Bantuan Sosial (%)	100								100		100		100			
		1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti			231.201.000		-		-		166.448.330		60.893.100		227.341.430	34,89	98,33		
			Presentase cakupan jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi (Orang)	150		0		0		157		157		157		104,67			
				Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi (Orang)	150		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi (Orang)	150		0		0		0		0		0		0			
		1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan			231.201.000		-		-		166.448.330		60.893.100		227.341.430	104,67	98,33		
			Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi (Orang)	150		0		0		157		157		157		104,67			
		1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi (Orang)	150		0		0		0		0		0		0			
		1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi (Orang)	150		0		0		0		0		0		0			
		1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti			1.700.733.492		144.550.000		275.126.700		433.000.857		505.066.292		1.357.743.849	18,8	79,83		
			Presentase cakupan jumlah anak terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi (Orang)	825		755		755		755		755		755		91,52			
				Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi (Orang)	825		0		16		16		16		48		5,82			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi (Orang)	140		0		16		16		16		48		34,29			
				Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Orang)	0		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi (Orang)	90		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi (Orang)	20		0		0		0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi (Orang)	65		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)	100		0		0		0		0		0		0			
		1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan			1.299.515.000		144.550.000		255.995.500		408.084.857		454.744.000		1.263.374.357	91,52	97,22		
			Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi (Orang)	825		755		755		755		755		755		91,52			
		1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang			48.000.200		-		2.647.200		13.678.000		31.663.000		47.988.200	5,82	99,98		
			Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi (Orang)	825		0		16		16		16		48		5,82			
		1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti			39.147.292		-		16.484.000		11.238.000		18.659.292		46.381.292	34,29	118,48		
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi (Orang)	140		0		16		16		16		48		34,29			
		1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial			139.076.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Orang)	0		0		0		0		0		0		0			
		1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi (Orang)	90		0		0		0		0		0		0			
		1.06.04.1.02.0008	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak			7.500.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlsntar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi (Orang)	20		0		0		0		0		0		0			
		1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			14.895.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi (Orang)	65		0		0		0		0		0		0			
		1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			152.600.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)	100		0		0		0		0		0		0			
		1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti			716.695.000		-		231.397.000		125.680.000		260.424.000		617.501.000	4,58	86,16		
			Presentase cakupan jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi (Orang)	85		0		35		35		35		35		41,18			
				Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi (Orang)	50		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi (Orang)	50		0		0		0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi (Orang)	85		0		0		0		0		0		0				
				Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Orang)	85		0		0		0		0		0		0				
				Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi (Orang)	85		0		0		0		0		0		0				
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi (Orang)	50		0		0		0		0		0		0				
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)	83		0		0		0		0		0		0				
				Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi (Orang)	13		0		0		0		0		0		0				
		1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan			657.495.000		-		231.397.000		125.680.000		260.424.000		617.501.000	41,18	93,92		
			Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi (Orang)	85		0		35		35		35		35		41,18			
		1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi (Orang)	50		0		0		0		0		0		0			
		1.06.04.1.03.0004	Penyediaan Alat Bantu			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi (Orang)	50		0		0		0		0		0		0			
		1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial			10.000.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi (Orang)	85		0		0		0		0		0		0			
		1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial			4.800.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Orang)	85		0		0		0		0		0		0			
		1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			3.600.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi (Orang)	85		0		0		0		0		0		0			
		1.06.04.1.03.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi (Orang)	50		0		0		0		0		0		0			
		1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			19.800.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)	83		0		0		0		0		0		0			
		1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan			21.000.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi (Orang)	13		0		0		0		0		0		0			
		1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti			29.328.000		-		-		14.831.753		14.388.000		29.219.753	70	99,63		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Presentase cakupan jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi (Orang)	10		0		0		7		7		7		70			
		1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan			29.328.000		-		-		14.831.753		14.388.000		29.219.753	70	99,63		
			Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi (Orang)	10		0		0		7		7		7		70			
		1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti			151.154.500		-		146.243.020		-		3.729.800		149.972.820	20	99,22		
			Presentase cakupan jumlah PMKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi (Orang)	35		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi (Orang)	30		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi (Orang)	30		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Orang)	30		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi (Orang)	30		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi (Orang)	30		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi (Orang)	30		0		0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi (Orang)	30		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal (Orang)	30		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA (Dokumen)	10		0		10		0		10		20		200			
		1.06.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi (Orang)	35		0		0		0		0		0		0			
		1.06.04.1.05.0002	Penyediaan Sandang			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi (Orang)	30		0		0		0		0		0		0			
		1.06.04.1.05.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti			-		-		-		-		-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi (Orang)	30		0		0		0		0		0		0			
		1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Orang)	30		0		0		0		0		0		0			
		1.06.04.1.05.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi (Orang)	30		0		0		0		0		0		0			
		1.06.04.1.05.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi (Orang)	30		0		0		0		0		0		0			
		1.06.04.1.05.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi (Orang)	30		0		0		0		0		0		0			
		1.06.04.1.05.0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi (Orang)	30		0		0		0		0		0		0			
		1.06.04.1.05.0010	Pemulangan ke Daerah Asal			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS ke Daerah Asal Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal (Orang)	30		0		0		0		0		0		0			
		1.06.04.1.05.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA			151.154.500		-		146.243.020		-		3.729.800		149.972.820	200	99,22		
			Terlaksananya Koordinasi Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA (Dokumen)	10		0		10		0		10		20		200			
		1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**			**6.302.148.777**		**-**		**679.098.777**		**4.148.000.000**		**1.470.329.135**		6.297.427.912	**139,47**	**99,93**	DINAS SOSIAL	
			Meningkatnya Perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan atau KAT yang Mendapat Bantuan Sosial (%)	100								100		100		100			
				Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (%)													0			
				Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (%)													0			
				Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan (%)													0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat sesuai Standar (%)												0			
		1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Presentase cakupan jumlah pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh orang tua tunggal	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi (Orang)	12		0		0		0		0		0		0			
		1.06.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak antar WNI			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Asuh/Oang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi (Orang)	12		0		0		0		0		0		0			
		1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi			6.302.148.777		-		679.098.777		4.148.000.000		1.470.329.135		6.297.427.912	209,2	99,93		
			Presentase cakupan jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi yang ditangani	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota (Keluarga)	50		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi (Orang)	250		0		1.046		1.046		1.046		1.046		418,4			
		1.06.05.1.02.0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota (Keluarga)	50		0		0		0		0		0		0			
		1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat			6.302.148.777		-		679.098.777		4.148.000.000		1.470.329.135		6.297.427.912	418,4	99,93		
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi (Orang)	250		0		1.046		1.046		1.046		1.046		418,4			
		1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**			**255.000.000**		**-**		**-**		**-**		**249.933.240**		249.933.240	**50**	**98,01**	DINAS SOSIAL	
			Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (%)													0			
				Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya (%)													0			
				Persentase Korban Bencana Alam yang Mendapat Bantuan Sosial (%)	100								100		100		100			
				Persentase Korban Bencana Alam, Sosial, dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (%)													0			
		1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi			255.000.000		-		-		-		249.933.240		249.933.240	50	98,01		
			Presentase cakupan penanganan bencana alam dan sosial	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi (Orang)	1000		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi (Orang)	150		0		0		0		150		150		100			
		1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terpenuhinya Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi (Orang)	1000		0		0		0		0		0		0			
		1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial			255.000.000		-		-		-		249.933.240		249.933.240	100	98,01		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Provinsi	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi (Orang)	150		0		0		0		150		150		100			
		1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**			**136.539.260**		**-**		**-**		**44.649.400**		**91.889.860**		136.539.260	**200**	**100**	DINAS SOSIAL	
			Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan	Jumlah Sarana Prasarana Kesejahteraan Sosial Kehsos) (%)	100								100		100		100			
				Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola dengan Baik (%)													0			
		1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi			136.539.260		-		-		44.649.400		91.889.860		136.539.260	200	100		
			Presentase jumlah Taman makam pahlawan Nasional yang dipelihara dan dirawat	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi (Makam)	710		0		0		710		710		1.420		200			
		1.06.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi			136.539.260		-		-		44.649.400		91.889.860		136.539.260	200	100		
			Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi (Makam)	710		0		0		710		710		1.420		200			
		2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**			**13.990.124.465**		**2.945.838.325**		**3.213.753.003**		**3.547.135.424**		**3.928.921.565**		13.635.648.317	**92,95**	**97,47**		
		2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**12.754.773.715**		**2.936.163.325**		**3.005.441.003**		**3.257.483.824**		**3.215.405.578**		12.414.493.730	**92,29**	**97,33**	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)									100		100		0			
		2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100.749.500		1.211.300		50.257.100		18.640.000		29.630.000		99.738.400	76,67	99		
			Tersusunnya dokumen perencanaan yang baik, pelaksanaan program yang efektif, dan pencapaian target kinerja yang optimal	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6		0		1		0		1		2		33,33			
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		1		0		0		1		100			
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		1		0		0		1		100			
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		1		0		0		1		100			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2		0		0		1		0		1		50			
		2.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			66.721.000		-		47.490.000		5.040.000		13.180.000		65.710.000	33,33	98,48		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6		0		1		0		1		2		33,33			
		2.07.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			2.528.500		761.300		1.767.100		-		-		2.528.400	100	100		
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		1		0		0		1		100			
		2.07.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			1.450.000		450.000		1.000.000		-		-		1.450.000	100	100		
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		1		0		0		1		100			
		2.07.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			-		-		-		-		-		-	100	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		1		0		0		1		100			
		2.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			30.050.000		-		-		13.600.000		16.450.000		30.050.000	50	100		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2		0		0		1		0		1		50			
		2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			11.296.599.587		2.482.272.177		2.526.141.981		3.000.576.849		2.965.607.987		10.974.598.994	438,89	97,15		
			Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	102		0		0		0		119		119		116,67			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		12		12		1200			
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2		0		0		0		0		0		0			
		2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			11.107.439.587		2.481.071.527		2.514.461.981		2.907.276.849		2.883.477.987		10.786.288.344	116,67	97,11		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	102		0		0		0		119		119		116,67			
		2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			187.110.000		-		11.680.000		93.300.000		82.130.000		187.110.000	1200	100		
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		12		12		1200			
		2.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			2.050.000		1.200.650		-		-		-		1.200.650	0	58,57		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2		0		0		0		0		0		0			
		2.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			8.530.000		-		2.600.000		900.000		5.030.000		8.530.000	100	100		
			Tertibnya pengadministrasian barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0		1		0		1		100			
		2.07.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			8.530.000		-		2.600.000		900.000		5.030.000		8.530.000	100	100		
			Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0		1		0		1		100			
		2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			5.310.000		450.000		1.666.500		-		3.170.000		5.286.500	50	99,56		
			Tersedianya data dan laporan pengelolaan kegiatan kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.07.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			5.310.000		450.000		1.666.500		-		3.170.000		5.286.500	100	99,56		
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			261.030.760		97.138.842		73.618.091		35.362.550		44.421.880		250.541.363	34,38	95,98		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya pengadministrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5		2		1		1		1		5		100			
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8		1		1		3		1		6		75			
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			12.640.260		1.167.400		7.772.500		-		-		8.939.900	0	70,73		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		0		0		0		0		0			
		2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			87.358.000		13.761.700		37.835.500		10.073.000		8.211.500		69.881.700	0	79,99		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7		0		0		0		0		0		0			
		2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			19.655.500		6.793.750		6.637.350		971.350		5.215.500		19.617.950	0	99,81		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7		0		0		0		0		0		0			
		2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			2.500.000		800.000		650.000		500.000		500.000		2.450.000	100	98		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5		2		1		1		1		5		100			
		2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			12.826.000		1.571.800		6.137.741		1.989.100		2.110.000		11.808.641	0	92,07		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5		0		0		0		0		0		0			
		2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			118.879.000		72.379.192		13.920.000		21.829.100		21.884.880		130.013.172	75	109,37		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8		1		1		3		1		6		75			
		2.07.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			7.172.000		665.000		665.000		-		6.500.000		7.830.000	100	109,17		
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			136.720.000		78.500.000		26.500.000		12.040.000		3.680.000		120.720.000	0	88,3		
			Penyediaan barang yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		0		0		0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.07.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			113.000.000		78.500.000		26.500.000		12.040.000		-		117.040.000	0	103,58		
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		0		0		0		0		0		0			
		2.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			23.720.000		-		-		-		3.680.000		3.680.000	0	15,51		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		0		0		0		0		0		0			
		2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			788.923.868		252.045.248		242.076.071		172.898.006		131.229.891		798.249.216	57,14	101,18		
			Tersedianya layanan dan fasilitas yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	18		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7		3		3		3		3		12		171,43			
		2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.694.000		1.964.000		1.040.000		520.000		1.181.500		4.705.500	0	127,38		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7		0		0		0		0		0		0			
		2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			253.354.875		82.166.764		70.091.700		61.818.928		65.645.929		279.723.321	0	110,41		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	18		0		0		0		0		0		0			
		2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			531.874.993		167.914.484		170.944.371		110.559.078		64.402.462		513.820.395	171,43	96,61		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7		3		3		3		3		12		171,43			
		2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			156.910.000		24.545.758		82.581.260		17.066.419		32.635.820		156.829.257	59,42	99,95		
			Persentase jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	14		1		1		1		1		4		28,57			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	11		2		8		0		2		12		109,09			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			22.900.000		9.877.126		6.000.000		3.150.000		3.870.000		22.897.126	100	99,99		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		0		0		1		0		1		100			
		2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			64.000.000		8.963.632		24.271.260		11.136.419		19.550.820		63.922.131	28,57	99,88		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	14		1		1		1		1		4		28,57			
		2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			70.010.000		5.705.000		52.310.000		2.780.000		9.215.000		70.010.000	109,09	100		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	11		2		8		0		2		12		109,09			
		2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-		-		-		-		-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.07.02	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**			**78.123.000**		**-**		**12.398.000**		**13.259.100**		**52.441.000**		78.098.100	**50**	**99,97**	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)			9.09								9,09		0			
		2.07.02.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			78.123.000		-		12.398.000		13.259.100		52.441.000		78.098.100	50	99,97		
			Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan yang mampu menyusun RTK Makro (Orang)	30		0		0		0		0		0		0			
		2.07.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro			78.123.000		-		12.398.000		13.259.100		52.441.000		78.098.100	100	99,97		
			Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
		2.07.02.1.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan yang mampu menyusun RTK Makro (Orang)	30		0		0		0		0		0		0			
		2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**			**205.771.000**		**-**		**-**		**200.419.000**		**3.800.000**		204.219.000	**33,33**	**99,25**	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)			0		0		0.05		0		0,05		0			
		2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi			205.771.000		-		-		200.419.000		3.800.000		204.219.000	100	99,25		
			Tersedianya lulusan yang kompeten dan siap kerja sesuai dengan kebutuhan industri	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n (Orang)	20		0		0		10		10		20		100			
		2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi			205.771.000		-		-		200.419.000		3.800.000		204.219.000	100	99,25		
			Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n (Orang)	20		0		0		10		10		20		100			
		2.07.03.1.02	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terjaminnya kualitas dan kredibilitas LPK, serta memastikan bahwa lulusan LPK memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi (LPK)	5		0		0		0		0		0		0			
		2.07.03.1.02.0001	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi (LPK)	5		0		0		0		0		0		0			
		2.07.03.1.03	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja dan efisiensi operasional perusahaan	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	15		0		0		0		0		0		0			
		2.07.03.1.03.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	15		0		0		0		0		0		0			
		2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**			**34.982.000**		**-**		**3.030.000**		**-**		**31.952.000**		34.982.000	**30**	**100**	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)			0		1.1		0		0		0		0			
		2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			34.982.000		-		3.030.000		-		31.952.000		34.982.000	30	100		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Penyerapan Tenaga Kerja di Perusahaan	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub) (Orang)	50		0		10		10		10		30		60			
				Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	200		0		0		0		0		0		0			
		2.07.04.1.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online			34.982.000		-		3.030.000		-		31.952.000		34.982.000	60	100		
			Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Melalui sistem online (KarirHub)	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub) (Orang)	50		0		10		10		10		30		60			
		2.07.04.1.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	200		0		0		0		0		0		0			
		2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**			**589.379.900**		**-**		**7.816.000**		**44.962.000**		**536.591.000**		589.369.000	**225**	**100**	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			Meningkatnya Pekerja Indonesia terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)			0		0		10000		0		10.000		0			
		2.07.05.1.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota			29.621.900		-		-		17.915.000		11.706.000		29.621.000	150	100		
			Terlaksananya PeraturanPerusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan terdaftar WLKPyang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	10		0		0		10		10		20		200			
				Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek (Laporan)	2		0		0		0		2		2		100			
		2.07.05.1.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial			13.875.000		-		-		12.875.000		1.000.000		13.875.000	200	100		
			Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait Dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	10		0		0		10		10		20		200			
		2.07.05.1.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja			15.746.900		-		-		5.040.000		10.706.000		15.746.000	100	99,99		
			Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek (Laporan)	2		0		0		0		2		2		100			
		2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi			27.047.000		-		-		27.047.000		-		27.047.000	500	100		
			Laporan kegiatan, rekomendasi kebijakan, perjanjian kerjasama, data dan informasi, serta hasil mediasi atau konsiliasi perselisihan industrial	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	10		0		0		50		0		50		500			
		2.07.05.1.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi			27.047.000		-		-		27.047.000		-		27.047.000	500	100		
			Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	10		0		0		50		0		50		500			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)			532.711.000		-		7.816.000		-		524.885.000		532.701.000	100	100		
			Keputusan Gubernur dalam penetapan besaran upah minimum dan terlindunginya pekerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan	Jumlah Penetapan UMP (Surat Keputusan)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Orang)	0		0		0		0		230.788		230.788		0			
		2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)			25.681.000		-		4.786.000		-		20.885.000		25.671.000	100	99,96		
			Ditetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP (Surat Keputusan)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.07.05.1.03.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			507.030.000		-		3.030.000		-		504.000.000		507.030.000	0	100		
			Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Orang)	0		0		0		0		230.788		230.788		0			
		2.07.06	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**			**327.094.850**		**9.675.000**		**185.068.000**		**31.011.500**		**88.731.987**		314.486.487	**53,25**	**96,15**	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			Terlindunginya hak-hak pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya (Orang)			0		0		0		2.21		2,21		0			
		2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan			327.094.850		9.675.000		185.068.000		31.011.500		88.731.987		314.486.487	53,25	96,15		
			Terlaksananya pengawasan ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA) (Perusahaan)	385		50		165		150		250		615		159,74			
				Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan (Kasus)	6		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3 (Perusahaan)	205		0		0		0		0		0		0			
		2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan			103.128.600		525.000		33.638.000		8.280.000		52.662.887		95.105.887	159,74	92,22		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA) (Perusahaan)	385		50		165		150		250		615		159,74			
		2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan			1.350.000		500.000		-		850.000		-		1.350.000	0	100		
			Terlaksananya Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan (Kasus)	6		0		0		0		0		0		0			
		2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan			222.616.250		8.650.000		151.430.000		21.881.500		36.069.100		218.030.600	0	97,94		
			Terlaksananya Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3 (Perusahaan)	205		0		0		0		0		0		0			
		2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**			**5.630.359.837**		**496.725.105**		**1.459.543.289**		**810.555.627**		**1.343.750.384**		4.110.574.405	**0**	**73,01**		
		2.08.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**4.319.210.337**		**496.725.105**		**1.397.054.949**		**699.505.977**		**556.249.644**		3.149.535.675	**0**	**72,92**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (%)	100		45		54		0		0		0		0			
				Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)			100		100		100		100		100		0			
		2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-		-		-		-		-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	20		0		0		0		0		0		0			
		2.08.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20		0		0		0		0		0		0			
		2.08.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	20		0		0		0		0		0		0			
		2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.360.341.995		496.725.105		1.004.386.279		631.222.226		107.892.345		2.240.225.955	0	66,67		
			Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	28		26		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	10		0		0		0		0		0		0			
		2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.307.061.995		496.725.105		1.004.386.279		631.222.226		107.892.345		2.240.225.955	0	67,74		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	28		26		0		0		0		0		0			
		2.08.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			53.280.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	10		0		0		0		0		0		0			
		2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Persentase Ketercapaian kinerja administrasi kepegawaian milik daerah pada perangkat Daerah	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	28		0		0		0		0		0		0			
		2.08.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.08.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.08.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	28		0		0		0		0		0		0			
		2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			390.017.942		-		123.849.568		24.348.750		212.876.900		361.075.218	0	92,58		
			Persentase ketercapaian kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	24		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	17		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	24		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	22		0		0		0		0		0		0			
		2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.514.000		-		1.020.000		680.000		2.095.000		3.795.000	0	150,95		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		0		0		0		0		0		0			
		2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.08.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			76.198.592		-		32.197.000		6.305.000		34.964.500		73.466.500	0	96,41		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	24		0		0		0		0		0		0			
		2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			28.250.750		-		7.032.200		1.761.750		20.133.900		28.927.850	0	102,4		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	17		0		0		0		0		0		0			
		2.08.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			32.400.000		-		12.786.000		3.241.000		16.374.000		32.401.000	0	100		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	24		0		0		0		0		0		0			
		2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			250.654.600		-		70.814.368		12.361.000		139.309.500		222.484.868	0	88,76		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	22		0		0		0		0		0		0			
		2.08.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Persentase ketercapaian kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	16		0		0		0		0		0		0			
		2.08.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.08.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	16		0		0		0		0		0		0			
		2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			462.230.400		-		232.961.102		40.332.001		172.531.497		445.824.600	0	96,45		
			Persentase tersedianya jasa kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		0		0		0		0		0		0			
		2.08.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.000.000		-		1.100.000		800.000		1.100.000		3.000.000	0	100		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		0		0		0		0		0		0			
		2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			74.400.000		-		33.464.302		4.520.801		35.552.097		73.537.200	0	98,84		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		0		0		0		0		0		0			
		2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			384.830.400		-		198.396.800		35.011.200		135.879.400		369.287.400	0	95,96		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		0		0		0		0		0		0			
		2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			106.620.000		-		35.858.000		3.603.000		62.948.902		102.409.902	0	96,05		
			Persentase Pemeliharaan Aset Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.08.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			66.000.000		-		25.727.000		3.253.000		34.745.417		63.725.417	0	96,55		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.08.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			26.000.000		-		5.831.000		350.000		18.003.485		24.184.485	0	93,02		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4		0		0		0		0		0		0			
		2.08.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			14.620.000		-		4.300.000		-		10.200.000		14.500.000	0	99,18		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12		0		0		0		0		0		0			
		2.08.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**			**123.557.600**		**-**		**-**		**-**		**122.604.000**		122.604.000	**0**	**99,23**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)													0			
				Persentase Anggaran Responsif (ARG) (%)													0			
				Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (%)	15												0			
		2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Jumlah Lembaga yang memahami konsep gender dan ARG	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi (Kebijakan)	2		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG (Dokumen)	2		0		0		0		0		0		0			
		2.08.02.1.01.0005	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi			-		-		-		-		-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi (Kebijakan)	2		0		0		0		0		0		0			
		2.08.02.1.01.0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG (Dokumen)	2		0		0		0		0		0		0			
		2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Jumlah Organisasi yang mendapatkan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga)	25		0		0		0		0		0		0			
		2.08.02.1.02.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan bagi organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media dlm rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga)	25		0		0		0		0		0		0			
		2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi			123.557.600		-		-		-		122.604.000		122.604.000	0	99,23		
			Persentase ketercapaian kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi (Orang)	25		0		0		0		0		0		0			
		2.08.02.1.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi			123.557.600		-		-		-		122.604.000		122.604.000	0	99,23		
			Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi dalam pengembangan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/ Kepemimpinan/Hukum	Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi (Orang)	25		0		0		0		0		0		0			
		2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**			**389.970.000**		**-**		**-**		**62.749.650**		**95.956.800**		158.706.450	**0**	**40,7**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komperhensif (%)													0			
				Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (%)	1,5												0			
				Rasio KDRT (%)	0,25												0			
		2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			101.500.000		-		-		-		95.956.800		95.956.800	0	94,54		
			Ratio KDRT,Cakupan penegakan Hukum dari tingkt pendidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi (Perangkat Daerah)	35		0		0		0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi			101.500.000		-		-		-		95.956.800		95.956.800	0	94,54		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2		0		0		0		0		0		0			
		2.08.03.1.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi (Perangkat Daerah)	35		0		0		0		0		0		0			
		2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			219.450.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Persentase ketercapian kegiatan penyedia layanan rujukan lanjutan bagi Perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi (Layanan)	30		0		0		0		0		0		0			
		2.08.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi			219.450.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi (Layanan)	30		0		0		0		0		0		0			
		2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi			69.020.000		-		-		62.749.650		-		62.749.650	0	90,92		
			Persentase ketercapaian Kegiatan penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (Orang)	25		0		0		0		0		0		0			
		2.08.03.1.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi			69.020.000		-		-		62.749.650		-		62.749.650	0	90,92		
			Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (Orang)	25		0		0		0		0		0		0			
		2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**			**469.630.900**		**-**		**62.488.340**		**48.300.000**		**301.651.680**		412.440.020	**0**	**87,82**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar (Nilai)													0			
				Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang aktif (%)	20												0			
		2.08.04.1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi			31.580.900		-		-		-		31.556.500		31.556.500	0	99,92		
			Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang aktif	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Perangkat Daerah)	32		0		0		0		0		0		0			
		2.08.04.1.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota			31.580.900		-		-		-		31.556.500		31.556.500	0	99,92		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Perangkat Daerah)	32		0		0		0		0		0		0			
		2.08.04.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi			438.050.000		-		62.488.340		48.300.000		270.095.180		380.883.520	0	86,95		
			Persentase tercapainya kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningktatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak anak	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2		0		0		0		0		0		0			
		2.08.04.1.02.0003	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi			438.050.000		-		62.488.340		48.300.000		270.095.180		380.883.520	0	86,95		
			Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2		0		0		0		0		0		0			
		2.08.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**			**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		-	**0**	**0**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan (Nilai)													0			
				Cakupan Kab/Kota Pengelola Sistim Data Gender (%)	91,2												0			
		2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Persentase ketercapian kegiatan pengumpulan pengolahan analisi dan penyedia data gender dan anak	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia (Dokumen)	2		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi (Dokumen)	2		0		0		0		0		0		0			
		2.08.05.1.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia (Dokumen)	2		0		0		0		0		0		0			
		2.08.05.1.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi (Dokumen)	2		0		0		0		0		0		0			
		2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**			**248.748.500**		**-**		**-**		**-**		**192.938.260**		192.938.260	**0**	**77,56**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Persentase Forum Anak yang terbentuk (%)	70												0			
				Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Nilai)													0			
		2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi			200.000.000		-		-		-		191.214.760		191.214.760	0	95,61		
			Persentase ketercapian kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah,Non Pemerintah,dan Dunia Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2		0		0		0		0		0		0			
				umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi (perangkat daerah)	35		0		0		0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.08.06.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi			200.000.000		-		-		-		191.214.760		191.214.760	0	95,61		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2		0		0		0		0		0		0			
		2.08.06.1.01.0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Provinsi	umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi (perangkat daerah)	35		0		0		0		0		0		0			
		2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi			48.748.500		-		-		-		1.723.500		1.723.500	0	3,54		
			Persentase ketercapaian kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan kualitas Hidup Anak	Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemernuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota (Kegiatan)	2		0		0		0		0		0		0			
		2.08.06.1.02.0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota			48.748.500		-		-		-		1.723.500		1.723.500	0	3,54		
			Terbangunnya kerjasama antar Lembaga penyedia layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemernuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota (Kegiatan)	2		0		0		0		0		0		0			
		2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**			**79.242.500**		**-**		**-**		**-**		**74.350.000**		74.350.000	**0**	**93,83**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Nilai)													0			
				Persentase Anak Korban Kekerasan yang tertangani (%)	100												0			
				Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)													0			
		2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			60.272.500		-		-		-		55.380.000		55.380.000	0	91,88		
			Persentase ketercapaian kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2		0		0		0		0		0		0			
		2.08.07.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi			60.272.500		-		-		-		55.380.000		55.380.000	0	91,88		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2		0		0		0		0		0		0			
		2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi			18.970.000		-		-		-		18.970.000		18.970.000	0	100		
			Persentase ketercapaian kegiatan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi tingkat daerah Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi (Orang)	25		0		0		0		0		0		0			
		2.08.07.1.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi			18.970.000		-		-		-		18.970.000		18.970.000	0	100		
			Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi (Orang)	25		0		0		0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Persentase ketercapaian kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan Prlindungan Khusus Tingkat daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2		0		0		0		0		0		0			
		2.08.07.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2		0		0		0		0		0		0			
		2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**			**8.802.666.233**		**1.551.083.995**		**1.848.012.345**		**1.859.488.689**		**3.190.896.278**		8.449.481.307	**474,19**	**95,99**		
		2.09.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**7.390.932.373**		**1.461.702.501**		**1.540.988.645**		**1.741.409.060**		**2.431.646.678**		7.175.746.884	**93,14**	**97,09**	DINAS KETAHANAN PANGAN	
			Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Terwujudnya Perencanaan Yang Efektif, Penatausahaan Keuangan Yang Tertib dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100		0		0		0		100		100		100			
				Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)													0			
		2.09.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			43.607.000		13.439.000		-		15.054.720		15.618.000		44.111.720	100	101,16		
			Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5		0		2		2		1		5		100			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3		0		0		0		3		3		100			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2		0		0		1		1		2		100			
		2.09.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			29.837.000		13.439.000		-		12.084.720		4.818.000		30.341.720	100	101,69		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5		0		2		2		1		5		100			
		2.09.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			10.800.000		-		-		-		10.800.000		10.800.000	100	100		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3		0		0		0		3		3		100			
		2.09.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.970.000		-		-		2.970.000		-		2.970.000	100	100		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2		0		0		1		1		2		100			
		2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.779.125.793		1.285.950.128		1.308.790.719		1.515.645.841		1.539.324.163		5.649.710.851	97,27	97,76		
			Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	55		48		49		50		49		49		89,09			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3		1		0		1		1		3		100			
		2.09.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.712.815.793		1.283.850.128		1.292.140.719		1.498.725.841		1.508.684.163		5.583.400.851	89,09	97,73		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	55		48		49		50		49		49		89,09			
		2.09.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			56.010.000		-		16.050.000		13.320.000		26.640.000		56.010.000	100	100		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.09.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			7.350.000		1.500.000		600.000		3.000.000		2.250.000		7.350.000	100	100		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.09.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			2.950.000		600.000		-		600.000		1.750.000		2.950.000	100	100		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3		1		0		1		1		3		100			
		2.09.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			19.020.000		450.000		6.180.000		4.230.000		8.460.000		19.320.000	50	101,58		
			Terlaksananya administrasi kepegawaian daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.09.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			19.020.000		450.000		6.180.000		4.230.000		8.460.000		19.320.000	100	101,58		
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.09.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			140.468.100		21.448.480		12.213.200		48.057.888		54.406.700		136.126.268	152	96,91		
			Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		1		1		1		1		100			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		2		2		2		2		100			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		2		2		2		2		2		100			
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1		0		1		0		1		2		200			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5		3		1		4		5		13		260			
		2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			8.116.500		-		1.169.000		3.020.000		3.760.000		7.949.000	100	97,94		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		1		1		1		1		100			
		2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			25.527.600		3.146.600		350.000		19.268.800		2.747.500		25.512.900	100	99,94		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		2		2		2		2		100			
		2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			13.318.000		1.750.000		1.902.200		4.373.200		4.818.200		12.843.600	100	96,44		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		2		2		2		2		2		100			
		2.09.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			3.600.000		-		1.248.000		2.075.000		240.000		3.563.000	200	98,97		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1		0		1		0		1		2		200			
		2.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			89.906.000		16.551.880		7.544.000		19.320.888		42.841.000		86.257.768	260	95,94		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5		3		1		4		5		13		260			
		2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			52.319.200		-		-		-		52.319.200		52.319.200	50	100		
			Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6		0		0		0		6		6		100			
		2.09.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.09.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			52.319.200		-		-		-		52.319.200		52.319.200	100	100		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6		0		0		0		6		6		100			
		2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			814.732.280		136.814.893		200.333.736		153.400.611		255.762.690		746.311.930	83,33	91,6		
			Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2		0		0		0		1		1		50			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2		0		1		0		1		2		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	21		0		0		0		21		21		100			
		2.09.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.200.000		206.000		-		-		948.000		1.154.000	50	96,17		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2		0		0		0		1		1		50			
		2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			105.600.000		22.520.633		16.037.316		21.760.311		39.745.944		100.064.204	100	94,76		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2		0		1		0		1		2		100			
		2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			707.932.280		114.088.260		184.296.420		131.640.300		215.068.746		645.093.726	100	91,12		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	21		0		0		0		21		21		100			
		2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			541.660.000		3.600.000		13.470.990		5.020.000		505.755.925		527.846.915	50	97,45		
			Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		2		2		2		2		2		100			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		0		0		1		1		50			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6		0		0		0		0		0		0			
		2.09.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			38.000.000		3.600.000		13.470.990		5.020.000		15.725.325		37.816.315	100	99,52		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		2		2		2		2		2		100			
		2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			500.000.000		-		-		-		490.030.600		490.030.600	50	98,01		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		0		0		1		1		50			
		2.09.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			3.660.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6		0		0		0		0		0		0			
		2.09.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**			**23.536.000**		**-**		**4.230.000**		**3.030.000**		**16.850.000**		24.110.000	**100**	**102,44**	DINAS KETAHANAN PANGAN	
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Presentase Daerah Rawan Pangan (%)	20,3												0			
				Jumlah Cadangan Pangan (ton) (Ton)													0			
		2.09.02.1.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi			23.536.000		-		4.230.000		3.030.000		16.850.000		24.110.000	100	102,44		
			Tersedianya infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenagan provinsi	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia (Unit)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.09.02.1.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya			23.536.000		-		4.230.000		3.030.000		16.850.000		24.110.000	100	102,44		
			Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia (Unit)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**			**1.038.788.760**		**41.695.000**		**249.241.000**		**92.074.629**		**519.366.000**		902.376.629	**72,92**	**86,87**	DINAS KETAHANAN PANGAN	
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi (Nilai)	76												0			
				Skor Pola Pangan Harapan (Skor)													0			
				Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Ton)	6,396												0			
		2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			429.254.000		41.695.000		245.246.000		41.503.029		87.780.000		416.224.029	70,83	96,96		
			Tersedianya dan tersalurnya pangan pokok lainnya sesuai kebutuhan daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins (Laporan)	12		5		7		4		6		22		183,33			
				Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	1		0		0		1		0		0		0			
		2.09.03.1.01.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis			-		-		-		-		-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan pokok strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.09.03.1.01.0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi			412.335.000		41.395.000		244.796.000		29.388.240		84.090.000		399.669.240	183,33	96,93		
			Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins (Laporan)	12		5		7		4		6		22		183,33			
		2.09.03.1.01.0010	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi			4.040.000		300.000		450.000		-		3.290.000		4.040.000	100	100		
			Tersedianya prognosa neraca pangan Wilayah Provinsi	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.09.03.1.01.0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)			12.879.000		-		-		12.114.789		400.000		12.514.789	0	97,17		
			Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	1		0		0		1		0		0		0			
		2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi			80.653.560		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan provinsi	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Ton)	6.396		0		0		0		0		0		0			
		2.09.03.1.02.0007	Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi			80.653.560		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Ton)	6.396		0		0		0		0		0		0			
		2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi			528.881.200		-		3.995.000		50.571.600		431.586.000		486.152.600	100	91,92		
			Terlaksananya promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) (Laporan)	3		0		1		1		4		6		200			
				Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.09.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)			522.688.600		-		3.995.000		50.571.600		425.586.000		480.152.600	200	91,86		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) (Laporan)	3		0		1		1		4		6		200			
		2.09.03.1.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun			6.192.600		-		-		-		6.000.000		6.000.000	100	96,89		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.09.03.1.04.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**			**213.219.100**		**-**		**-**		**2.500.000**		**208.513.600**		211.013.600	**175**	**98,97**	DINAS KETAHANAN PANGAN	
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan pangan (%)	20,3												0			
		2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi			23.092.600		-		-		2.500.000		20.550.100		23.050.100	100	99,82		
			Tersusunnya peta kerentanan dan ketahanan pangan kewenangan provinsi	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota			23.092.600		-		-		2.500.000		20.550.100		23.050.100	100	99,82		
			Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi			190.126.500		-		-		-		187.963.500		187.963.500	200	98,86		
			Tertanganinya kerawanan pangan kewenangan provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dokumen)	2		0		0		0		8		8		400			
				Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			178.543.900		-		-		-		176.830.900		176.830.900	400	99,04		
			Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dokumen)	2		0		0		0		8		8		400			
		2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi			4.670.000		-		-		-		5.420.000		5.420.000	100	116,06		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.09.04.1.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi			6.912.600		-		-		-		5.712.600		5.712.600	100	82,64		
			Tersedianya Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**			**136.190.000**		**47.686.494**		**53.552.700**		**20.475.000**		**14.520.000**		136.234.194	**3107**	**100,03**	DINAS KETAHANAN PANGAN	
			Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pengawasan Pangan Segar yang Aman dan Bermutu (%)	83,2												0			
				Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan (%)													0			
		2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota			136.190.000		47.686.494		53.552.700		20.475.000		14.520.000		136.234.194	3107	100,03		
			Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar distribusi	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Sertifikat)	20		1		20		4		2		27		135			
				Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	1		0		6		20		1		27		2700			
				Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	1		68		19		20		20		127		12700			
				Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan			64.785.000		1.868.000		48.422.700		8.925.000		6.060.000		65.275.700	135	100,76		
			Tersertifikasinya keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Sertifikat)	20		1		20		4		2		27		135			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.09.05.1.01.0007	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan			5.820.000		-		1.500.000		3.720.000		600.000		5.820.000	2700	100		
			Penerbitan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	1		0		6		20		1		27		2700			
		2.09.05.1.01.0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Penerbitan Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan			65.585.000		45.818.494		3.630.000		7.830.000		7.860.000		65.138.494	12700	99,32		
			terlaksananya penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	1		68		19		20		20		127		12700			
		2.09.05.1.01.0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**			**338.790.000**		**-**		**83.324.340**		**92.079.220**		**117.869.060**		293.272.620	**100**	**86,56**		
		2.10.10	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**			**338.790.000**		**-**		**83.324.340**		**92.079.220**		**117.869.060**		293.272.620	**100**	**86,56**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
			Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Pengelolaan Tanah Kosong (%)	100		0		0		0		0		0		0			
				Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah (%)			0		0		0		100		100		0			
				Persentase penatagunaan tanah (%)	100		0		0		0		0		0		0			
		2.10.10.1.01	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			338.790.000		-		83.324.340		92.079.220		117.869.060		293.272.620	100	86,56		
			Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.10.10.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah			338.790.000		-		83.324.340		92.079.220		117.869.060		293.272.620	100	86,56		
			Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**			**6.009.324.780**		**1.240.098.220**		**1.535.840.931**		**1.424.650.833**		**1.595.804.240**		5.796.394.224	**73,23**	**96,46**		
		2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**5.634.909.180**		**1.078.945.980**		**1.412.210.897**		**1.424.650.833**		**1.539.304.640**		5.455.112.350	**59,96**	**96,81**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku ()			0		0		0		0		0		0			
				Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)			13.2		42.97		50.87		63.16		63,16		0			
		2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-		-		-		-		-		-	100	0		
			TersusunnyaDokumenPerencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
		2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			-		-		-		-		-		-	100	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
		2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.768.029.060		847.197.675		1.083.199.780		1.309.229.851		1.438.773.644		4.678.400.950	113,16	98,12		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	38		38		36		36		43		43		113,16			
		2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.768.029.060		847.197.675		1.083.199.780		1.309.229.851		1.438.773.644		4.678.400.950	113,16	98,12		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	38		38		36		36		43		43		113,16			
		2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	8		0		0		0		0		0		0			
		2.11.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	8		0		0		0		0		0		0			
		2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			192.488.440		34.512.870		132.132.380		-		11.283.500		177.928.750	70,55	92,44		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		1		0		0		1		100			
		2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.997.600		-		3.997.600		-		-		3.997.600	100	100		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		1		0		0		1		100			
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0		1		0		0		1		100			
		2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			5.801.700		-		5.801.700		-		-		5.801.700	100	100		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0		1		0		0		1		100			
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		0		2		0		2		2		100			
		2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			38.283.000		-		31.958.500		-		6.324.500		38.283.000	100	100		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		0		2		0		2		2		100			
			TerlaksananyaFasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	24		0		14		0		0		14		58,33			
		2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			22.205.940		-		22.205.940		-		-		22.205.940	58,33	100		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	24		0		14		0		0		14		58,33			
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0		0		0			
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	169		26		34		0		0		60		35,5			
		2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			98.125.000		34.112.870		49.452.440		-		-		83.565.310	35,5	85,16		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	169		26		34		0		0		60		35,5			
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3		1		3		0		3		3		100			
		2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			24.075.200		400.000		18.716.200		-		4.959.000		24.075.200	100	100		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3		1		3		0		3		3		100			
		2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-		-		-		-		-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.11.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.11.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			575.751.680		185.701.905		164.967.883		88.629.717		60.870.330		500.169.835	66,67	86,87		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
		2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			444.651.680		131.640.300		131.640.300		67.282.820		43.880.100		374.443.520	100	84,21		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
		2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			131.100.000		54.061.605		33.327.583		21.346.897		16.990.230		125.726.315	100	95,9		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
		2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			98.640.000		11.533.530		31.910.854		26.791.265		28.377.166		98.612.815	57,41	99,97		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	18		0		12		0		1		13		72,22			
		2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			7.320.000		-		6.872.800		-		447.200		7.320.000	72,22	100		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	18		0		12		0		1		13		72,22			
			Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.11.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	4		3		4		4		4		4		100			
		2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			91.320.000		11.533.530		25.038.054		26.791.265		27.929.966		91.292.815	100	99,97		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	4		3		4		4		4		4		100			
		2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**			**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		-	**0**	**0**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Menurunya Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ()			0		0		0		78.83		78,83		0			
				Indeks Kualitas Air (poin)			0		0		0		69.74		69,74		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Indeks Kualitas Udara (poin)			0		0		0		84.22		84,22		0			
				Indeks Kualitas Air Laut (poin)			0		0		0		72.15		72,15		0			
		2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	2		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	2		0		0		0		0		0		0			
		2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	2		0		0		0		0		0		0			
		2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	2		0		0		0		0		0		0			
		2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Sumber Pencemaran dan/atau KerusakanLingkunganHidup yang Dihentikan	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan (Titik)	4		0		0		0		0		0		0			
		2.11.03.1.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan (Titik)	4		0		0		0		0		0		0			
		2.11.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**			**25.642.000**		**-**		**23.842.000**		**-**		**-**		23.842.000	**100**	**92,98**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang terkelola (%)			0		0		0		79.88		79,88		0			
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	82,43		0		0		0		78.83		78,83		95,63			
		2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			25.642.000		-		23.842.000		-		-		23.842.000	100	92,98		
			Terlaksananya Koordinasi dan SinkronisasiPengelolaanLimbah B3 Dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan,Pengolahan,dan/atau Penimbunan yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam1(Satu)DaerahProvinsiyang Sesuai Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya (Dokumen)	2		0		2		0		0		2		100			
		2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan			25.642.000		-		23.842.000		-		-		23.842.000	100	92,98		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 Dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya (Dokumen)	2		0		2		0		0		2		100			
		2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**			**267.990.000**		**143.308.240**		**99.788.034**		**-**		**-**		243.096.274	**147,27**	**90,71**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Meningkatnya Kepatuhan usaha dan / atau Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH (%)			0		0		0		85.71		85,71		0			
				Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi (%)	100		0		0		0		85.71		85,71		85,71			
		2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi			267.990.000		143.308.240		99.788.034		-		-		243.096.274	147,27	90,71		
			Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan 0perasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan (Dokumen)	11		3		7		1		6		17		154,55			
				Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	5		1		1		0		5		7		140			
		2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH			210.452.000		104.198.800		86.729.000		-		-		190.927.800	154,55	90,72		
			Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan 0perasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan (Dokumen)	11		3		7		1		6		17		154,55			
		2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			57.538.000		39.109.440		13.059.034		-		-		52.168.474	140	90,67		
			Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	5		1		1		0		5		7		140			
		2.11.07	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**			**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		-	**0**	**0**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Meningkatnya Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah Entitas Pengakuan dan Peningkatan Kapasitas MHA (Kelompok)			0		0		0		0		0		0			
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ()			0		0		0		78.83		78,83		0			
		2.11.07.1.01	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, PenyediaanData dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.11.07.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.11.07.1.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH			-		-		-		-		-		-	0	0		
			KelembagaanMHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.11.07.1.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**			**59.999.600**		**-**		**-**		**-**		**56.499.600**		56.499.600	**450**	**94,17**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ()			0		0		0		78.83		78,83		0			
				Jumlah Masyarakat/ Kelompok/ Pelaku Usaha (Kg/Orang)			0		0		0		90		90		0			
		2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi			59.999.600		-		-		-		56.499.600		56.499.600	450	94,17		
			Meningkatnya jumlah penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat (Orang)	20		0		0		0		90		90		450			
		2.11.08.1.01.0003	Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi			59.999.600		-		-		-		56.499.600		56.499.600	450	94,17		
			Meningkatnya jumlah penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat (Orang)	20		0		0		0		90		90		450			
		2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**			**20.784.000**		**17.844.000**		**-**		**-**		**-**		17.844.000	**200**	**85,85**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Meningkatnya Penyelesaian Sengketa / Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa / Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (%)			0		0		0		0		0		0			
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	82,43		0		0		0		78.83		78,83		95,63			
		2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi			20.784.000		17.844.000		-		-		-		17.844.000	200	85,85		
			Penanganan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani (Pengaduan)	1		2		0		0		0		2		200			
		2.11.10.1.01.0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi			20.784.000		17.844.000		-		-		-		17.844.000	200	85,85		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Penanganan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani (Pengaduan)	1		2		0		0		0		2		200			
		2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**			-		-		-		-		-		-	**0**	**0**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah ((%))			0		0		0		67.99		67,99		0			
				Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)			0		0		0		0		0		0			
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ()			0		0		0		78.83		78,83		0			
		2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaanpengelolaansampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**			**4.033.723.269**		**813.096.740**		**1.031.156.606**		**888.402.253**		**1.210.955.243**		3.943.610.842	**101,33**	**97,77**		
		2.12.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**3.942.064.269**		**813.096.740**		**1.014.881.606**		**888.402.253**		**1.139.065.043**		3.855.445.642	**102**	**97,8**	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase program tercapai (Persen)	100												0			
				Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)			0.82		8.12		12.13		100		100		0			
		2.12.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.423.206.464		739.465.913		887.399.885		820.907.328		930.464.052		3.378.237.178	85,61	98,69		
			Terlaksananya proses Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	33		26		27		33		34		34		103,03			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		0		3		0		0		3		25			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		1		0		0		1		100			
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1		0		1		0		0		1		100			
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4		0		4		0		0		4		100			
		2.12.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.393.332.964		739.465.913		857.526.385		820.907.328		930.464.052		3.348.363.678	103,03	98,67		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	33		26		27		33		34		34		103,03			
		2.12.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			13.320.000		-		13.320.000		-		-		13.320.000	25	100		
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		0		3		0		0		3		25			
		2.12.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			8.404.000		-		8.404.000		-		-		8.404.000	100	100		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		1		0		0		1		100			
		2.12.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			3.580.500		-		3.580.500		-		-		3.580.500	100	100		
			Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1		0		1		0		0		1		100			
		2.12.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			4.569.000		-		4.569.000		-		-		4.569.000	100	100		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4		0		4		0		0		4		100			
		2.12.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			4.963.500		-		4.961.000		-		-		4.961.000	100	99,95		
			Terlaksananya proses Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		1		0		0		1		100			
		2.12.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			4.963.500		-		4.961.000		-		-		4.961.000	100	99,95		
			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		1		0		0		1		100			
		2.12.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			72.105.090		-		-		-		64.767.728		64.767.728	133,33	89,82		
			Terlaksananya proses Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3		0		0		0		3		3		100			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3		0		0		0		3		3		100			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2		0		0		0		4		4		200			
		2.12.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			27.101.090		-		-		-		27.088.000		27.088.000	100	99,95		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3		0		0		0		3		3		100			
		2.12.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			8.500.000		-		-		-		8.500.000		8.500.000	100	100		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3		0		0		0		3		3		100			
		2.12.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			36.504.000		-		-		-		29.179.728		29.179.728	200	79,94		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2		0		0		0		4		4		200			
		2.12.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			7.000.000		-		-		-		6.900.000		6.900.000	0	98,57		
			Terlaksananya proses Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		0		0		0		1		1		0			
		2.12.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			7.000.000		-		-		-		6.900.000		6.900.000	0	98,57		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		0		0		0		1		1		0			
		2.12.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			404.689.215		73.630.827		111.730.681		67.494.925		114.025.371		366.881.804	100	90,66		
			Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4		0		1		0		3		4		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4		1		1		1		1		4		100			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.12.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			116.664.299		-		38.099.854		-		48.202.479		86.302.333	100	73,97		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4		0		1		0		3		4		100			
		2.12.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			288.024.916		73.630.827		73.630.827		67.494.925		65.822.892		280.579.471	100	97,41		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4		1		1		1		1		4		100			
		2.12.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			30.100.000		-		10.790.040		-		22.907.892		33.697.932	100	111,95		
			Terlaksananya proses Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10		0		0		0		10		10		100			
		2.12.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			12.000.000		-		6.304.040		-		9.295.960		15.600.000	100	130		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.12.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			12.000.000		-		4.486.000		-		7.511.932		11.997.932	100	99,98		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.12.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			6.100.000		-		-		-		6.100.000		6.100.000	100	100		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10		0		0		0		10		10		100			
		2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**			**19.007.000**		**-**		**16.275.000**		**-**		**-**		16.275.000	**33,33**	**85,63**	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk (Persen)	95		0		0		0		84.99		84,99		89,46			
				Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (%)			0		0		0		23.56		23,56		0			
				Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (%)			0		0		0		5.35		5,35		0			
		2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan			19.007.000		-		16.275.000		-		-		16.275.000	50	85,63		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)	1		0		1		0		0		1		100			
				Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)	5		0		0		0		0		0		0			
		2.12.02.1.02.0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk			19.007.000		-		16.275.000		-		-		16.275.000	100	85,63		
			Terlaksananya Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)	1		0		1		0		0		1		100			
		2.12.02.1.02.0002	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)	5		0		0		0		0		0		0			
		2.12.02.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk (Laporan)	11		0		0		0		0		0		0			
		2.12.02.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pendaftaran Penduduk			-		-		-		-		-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk (Laporan)	11		0		0		0		0		0		0			
		2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**			**7.116.000**		**-**		**-**		**-**		**6.654.200**		6.654.200	**200**	**93,51**	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan (%)			0		0		0		100		100		0			
				Persentase Akte Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan (%)			0		0		0		100		100		0			
				Persentase Akte Perkawian yang diterbitkan bagi yang melaporkan (%)			0		0		0		100		100		0			
				Persentase Akte Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan (%)			0		0		0		100		100		0			
				Persentase Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran pada Anak Usia 0-17 Tahun (Persen)	92		0		0		0		89.14		89,14		96,89			
		2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota (Laporan)	2		0		0		0		0		0		0			
		2.12.03.1.01.0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terfasilitasinya Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota (Laporan)	2		0		0		0		0		0		0			
		2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			7.116.000		-		-		-		6.654.200		6.654.200	400	93,51		
			Terlaksananya Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	1		0		0		0		4		4		400			
		2.12.03.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil			7.116.000		-		-		-		6.654.200		6.654.200	400	93,51		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	1		0		0		0		4		4		400			
		2.12.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**			**65.536.000**		**-**		**-**		**-**		**65.236.000**		65.236.000	**100**	**99,54**	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi Dalam 1 Tahun (Persen)	100		0		0		0		100		100		100			
				Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (%)													0			
		2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan			65.536.000		-		-		-		65.236.000		65.236.000	100	99,54		
			Tersedianya Profil Kependudukan tingkat provinsi	Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia (Dokumen)	2		0		0		0		2		2		100			
				Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.12.05.1.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi			16.170.000		-		-		-		15.870.000		15.870.000	100	98,14		
			Tersedianya Data Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia (Dokumen)	2		0		0		0		2		2		100			
		2.12.05.1.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain			49.366.000		-		-		-		49.366.000		49.366.000	100	100		
			Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**			**7.865.938.575**		**662.067.455**		**2.119.879.003**		**1.604.155.645**		**2.936.530.260**		7.322.632.363	**46,94**	**93,09**		
		2.13.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**5.515.253.575**		**662.067.455**		**1.799.044.605**		**1.225.967.894**		**1.520.236.614**		5.207.316.568	**48,36**	**94,42**	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)			25		25		25		25		25		0			
		2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			60.486.900		-		11.640.300		-		44.522.460		56.162.760	100	92,85		
			Meningkatnya tata kelola perencanaan , evaluasi dan pelaporan OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5		0		1		0		4		5		100			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3		0		3		0		0		3		100			
		2.13.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			58.723.200		-		9.877.200		-		44.522.460		54.399.660	100	92,64		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5		0		1		0		4		5		100			
		2.13.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1.763.700		-		1.763.100		-		-		1.763.100	100	99,97		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3		0		3		0		0		3		100			
		2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.193.667.135		662.067.455		1.192.586.199		1.014.729.925		1.209.995.599		4.079.379.178	99,05	97,27		
			Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan OPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	35		34		34		34		34		34		97,14			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		0		0		6		6		12		100			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		1		0		0		1		100			
		2.13.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.125.120.135		662.067.455		1.190.036.199		970.829.925		1.188.195.599		4.011.129.178	97,14	97,24		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	35		34		34		34		34		34		97,14			
		2.13.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			65.400.000		-		-		43.600.000		21.800.000		65.400.000	100	100		
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		0		0		6		6		12		100			
		2.13.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			3.147.000		-		2.550.000		300.000		-		2.850.000	100	90,56		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		1		0		0		1		100			
		2.13.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			26.936.000		-		-		660.000		1.320.000		1.980.000	6,67	7,35		
			Meningkatnya tata kelola administrasi kepegawaian OPD	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	68		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	60		0		0		3		5		8		13,33			
		2.13.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	68		0		0		0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.13.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			26.936.000		-		-		660.000		1.320.000		1.980.000	13,33	7,35		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	60		0		0		3		5		8		13,33			
		2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			216.982.100		-		72.115.252		29.488.726		50.545.040		152.149.018	38,43	70,12		
			Meningkatnya Tata kelola Administrasi umum OPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	36		8		8		8		8		8		22,22			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12		0		2		1		1		1		8,33			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12		0		3		3		6		6		50			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	10		0		2		1		2		5		50			
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.13.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			41.320.100		-		23.476.000		8.550.400		9.293.700		41.320.100	22,22	100		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	36		8		8		8		8		8		22,22			
		2.13.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			17.000.000		-		13.500.000		1.700.000		2.711.800		17.911.800	8,33	105,36		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12		0		2		1		1		1		8,33			
		2.13.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			4.100.000		-		2.120.000		525.000		1.455.000		4.100.000	100	100		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.13.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			17.932.000		-		3.945.200		1.264.600		12.702.000		17.911.800	50	99,89		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12		0		3		3		6		6		50			
		2.13.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			104.489.000		-		29.074.052		17.448.726		22.241.540		68.764.318	50	65,81		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	10		0		2		1		2		5		50			
		2.13.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			32.141.000		-		-		-		2.141.000		2.141.000	0	6,66		
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.13.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya barang milik daerah penunjang tugas dan fungsi OPD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6		0		0		0		0		0		0			
		2.13.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.13.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3		0		0		0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.13.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6		0		0		0		0		0		0			
		2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			797.788.840		-		454.772.795		136.384.332		117.928.691		709.085.818	83,33	88,88		
			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		0		1		0		1		2		200			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		3		3		3		25			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		3		3		3		25			
		2.13.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.500.000		-		250.000		-		1.000.000		1.250.000	200	83,33		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		0		1		0		1		2		200			
		2.13.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			124.108.000		-		47.216.013		30.532.128		40.479.877		118.228.018	25	95,26		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		3		3		3		25			
		2.13.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			672.180.840		-		407.306.782		105.852.204		76.448.814		589.607.800	25	87,72		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		3		3		3		25			
		2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			219.392.600		-		67.930.059		44.704.911		95.924.824		208.559.794	24,32	95,06		
			Terpeliharanya Barang Miliki Daerah Penunjang Fungsi OPD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	12		0		4		3		3		3		25			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	41		0		1		2		3		6		14,63			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		0		0		1		0		1		33,33			
		2.13.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			154.940.000		-		47.885.059		32.024.411		74.875.824		154.785.294	25	99,9		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	12		0		4		3		3		3		25			
		2.13.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			18.900.000		-		4.720.000		5.275.000		8.905.000		18.900.000	14,63	100		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	41		0		1		2		3		6		14,63			
		2.13.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			45.552.600		-		15.325.000		7.405.500		12.144.000		34.874.500	33,33	76,56		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		0		0		1		0		1		33,33			
		2.13.02	**PROGRAM PENATAAN DESA**			**51.082.000**		**-**		**24.501.371**		**9.832.120**		**114.168.800**		148.502.291	**100**	**290,71**	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)									0		0		0			
		2.13.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat			51.082.000		-		24.501.371		9.832.120		114.168.800		148.502.291	100	290,71		
			Persentase fasilitasi penataan desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat (Dokumen)	1		0		1		0		0		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.13.02.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat			24.680.000		-		24.501.371		-		-		24.501.371	100	99,28		
			Terlaksananya Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat (Dokumen)	1		0		1		0		0		1		100			
		2.13.02.1.01.0003	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa			26.402.000		-		-		9.832.120		114.168.800		124.000.920	100	469,66		
			Terlaksananya Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.13.03	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**			**19.371.000**		**-**		**24.593.820**		**-**		**-**		24.593.820	**50**	**126,96**	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Meningkatnya Efektivitas Kerja Sama Desa	Persentase Fasilitasi Kerja Sama Desa (Persentase)									0		0		0			
		2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi			19.371.000		-		24.593.820		-		-		24.593.820	50	126,96		
			Persentase Fasilitasi Kerja Sama Desa	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	1		0		1		0		0		1		100			
		2.13.03.1.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.13.03.1.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan			19.371.000		-		24.593.820		-		-		24.593.820	100	126,96		
			Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	1		0		1		0		0		1		100			
		2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**			**7.499.000**		**-**		**-**		**-**		**7.499.000**		7.499.000	**14,29**	**100**	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Meningkatkan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)									0		0		0			
				Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase)									0		0		0			
		2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			7.499.000		-		-		-		7.499.000		7.499.000	14,29	100		
			Meningkatnya kapasitas Aparatur Desa dan Anggota BPD	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Produk Hukum desa yang Ditetapkan (Dokumen)	11		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.13.04.1.01.0002	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa			7.499.000		-		-		-		7.499.000		7.499.000	100	100		
			Terlaksananya Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.13.04.1.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Produk Hukum desa yang Ditetapkan (Dokumen)	11		0		0		0		0		0		0			
		2.13.04.1.01.0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.13.04.1.01.0009	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan			-		-		-		-		-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Desa	jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Orang)	20		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.13.04.1.01.0007	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Orang)	20		0		0		0		0		0		0			
		2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.13.04.1.01.0012	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**			**2.272.733.000**		**-**		**271.739.207**		**368.355.631**		**1.294.625.846**		1.934.720.684	**61,11**	**85,13**	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)									33.3		33,3		0			
				Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)									0		0		0			
		2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota		2.272.733.000		-		271.739.207		368.355.631		1.294.625.846		1.934.720.684	61,11	85,13		
			Terlaksananya pemberdayaan bagi LKD, LAD dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya (Lembaga)	2		0		0		0		1		1		50			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Unit)	3		0		0		0		1		1		33,33			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	1		0		0		0		2		2		200			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Laporan)	6		0		1		2		2		5		83,33			
		2.13.05.1.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			612.733.000		-		10.395.720		-		486.000.044		496.395.764	50	81,01		
			Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya (Lembaga)	2		0		0		0		1		1		50			
		2.13.05.1.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			15.000.000		-		-		-		13.680.000		13.680.000	33,33	91,2		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Unit)	3		0		0		0		1		1		33,33			
		2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			45.000.000		-		-		-		18.082.000		18.082.000	200	40,18		
			Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	1		0		0		0		2		2		200			
		2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			1.600.000.000		-		261.343.487		368.355.631		776.863.802		1.406.562.920	83,33	87,91		
			Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Laporan)	6		0		1		2		2		5		83,33			
		2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**			**30.917.000**		**-**		**-**		**-**		**24.737.000**		24.737.000	**66,67**	**80,01**		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**			**30.917.000**		-		-		-		**24.737.000**		24.737.000	**100**	**80,01**	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat atau cara KB (%)			0		0		0		63.9		63,9		0			
				Total Fertility Rate (TFR) (Persen)	2.73		0		0		0		2.42		2,42		88,64			
		2.14.03.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			30.917.000		-		-		-		24.737.000		24.737.000	100	80,01		
			Terlaksananya pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (Dokumen)	1		0		0		0		2		2		200			
				Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (Organisasi)	2		0		0		0		0		0		0			
		2.14.03.1.02.0001	Pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			30.917.000		-		-		-		24.737.000		24.737.000	200	80,01		
			Terlaksananya Pengembangan Strategi Operasional dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi KeMasyarakatan Dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (Dokumen)	1		0		0		0		2		2		200			
		2.14.03.1.02.0002	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terpenuhinya Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (Organisasi)	2		0		0		0		0		0		0			
		2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**			**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		-	**0**	**0**	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri (%)			0		0		0		29.31		29,31		0			
				Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja (Indeks)			0		0		0		78.8		78,8		0			
				Persentase Keluarga yang melaksanakan Pengasuhan dan Pendampingan Pembentukan Karakter (Persen)	43.68												0			
				Indeks Lansia Berdaya (Indeks)			0		0		0		68.5		68,5		0			
		2.14.04.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.14.04.1.02.0003	Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**			**9.245.353.868**		**2.376.433.831**		**1.681.446.392**		**2.770.219.238**		**2.060.450.025**		8.888.549.486	**32,94**	**96,14**		
		2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**8.342.999.853**		**2.238.183.831**		**1.662.451.392**		**2.378.778.666**		**1.865.005.697**		8.144.419.586	**45,71**	**97,62**	DINAS PERHUBUNGAN	
			Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)													0			
				Persentase Kelancaran Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%)	100		100		100		100		100		100		100			
		2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.249.800		-		-		-		1.249.800		1.249.800	25	100		
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Berkualitas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5		0		0		0		0		0		0			
		2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1.249.800		-		-		-		1.249.800		1.249.800	100	100		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.15.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.15.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.15.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5		0		0		0		0		0		0			
		2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.556.401.704		1.752.721.759		1.194.113.681		2.167.759.266		1.328.946.417		6.443.541.123	75	98,28		
			Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	70		70		70		70		70		70		100			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1		0		1		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			6.490.943.504		1.752.721.759		1.178.063.681		2.167.759.266		1.279.538.217		6.378.082.923	100	98,26		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	70		70		70		70		70		70		100			
		2.15.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			64.200.000		-		16.050.000		-		48.150.000		64.200.000	100	100		
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1		0		1		0		1		1		100			
		2.15.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.15.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			1.258.200		-		-		-		1.258.200		1.258.200	100	100		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.15.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Persentase Ketersediaan Barang Milik Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.15.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.15.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.15.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.15.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2.501.500		-		-		-		2.457.000		2.457.000	33,33	98,22		
			Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		0		0		0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0		0		0		0		30		30		0			
		2.15.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.15.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.15.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			1.251.300		-		-		-		1.251.000		1.251.000	100	99,98		
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.15.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			1.250.200		-		-		-		1.206.000		1.206.000	0	96,46		
			Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0		0		0		0		30		30		0			
		2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			265.391.673		18.349.843		32.288.702		-		179.556.037		230.194.582	100	86,74		
			Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		1		0		1		1		100			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		1		0		1		1		100			
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1		1		1		0		1		1		100			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		1		1		0		1		1		100			
		2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.000.000		-		-		-		2.000.000		2.000.000	100	100		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2.528.173		-		-		-		2.528.173		2.528.173	100	100		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			10.155.600		1.849.400		350.000		-		7.956.000		10.155.400	100	100		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		1		0		1		1		100			
		2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			14.160.000		2.160.000		10.128.900		-		1.871.100		14.160.000	100	100		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		1		0		1		1		100			
		2.15.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			28.628.000		2.820.300		10.237.482		-		15.543.700		28.601.482	100	99,91		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1		1		1		0		1		1		100			
		2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			207.919.900		11.520.143		11.572.320		-		149.657.064		172.749.527	100	83,08		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		1		1		0		1		1		100			
		2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perkantoran	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	20		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.15.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0		0		0		0			
		2.15.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	20		0		0		0		0		0		0			
		2.15.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.15.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.15.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.337.105.050		420.926.730		416.754.869		211.019.400		278.399.864		1.327.100.863	100	99,25		
			Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		1		0		1		1		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		1		1		0		1		1		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		1		1		1		1		100			
		2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.000.000		1.100.000		1.000.000		-		900.000		3.000.000	100	100		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		1		0		1		1		100			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			182.229.600		35.707.084		27.762.649		-		111.296.140		174.765.873	100	95,9		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		1		1		0		1		1		100			
		2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.151.875.450		384.119.646		387.992.220		211.019.400		166.203.724		1.149.334.990	100	99,78		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		1		1		1		1		100			
		2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			180.350.126		46.185.499		19.294.140		-		74.396.579		139.876.218	50	77,56		
			Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	35		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	34		34		34		0		34		34		100			
				Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	2		0		0		0		2		2		100			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	35		0		0		0		0		0		0			
		2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			170.350.126		46.185.499		19.294.140		-		64.396.579		129.876.218	100	76,24		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	34		34		34		0		34		34		100			
		2.15.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud			10.000.000		-		-		-		10.000.000		10.000.000	100	100		
			Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	2		0		0		0		2		2		100			
		2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**			**284.699.625**		**138.250.000**		**600.000**		**-**		**145.255.750**		284.105.750	**7,81**	**99,79**	DINAS PERHUBUNGAN	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Provinsi (Persentase)													0			
				Konektivitas Darat (Persentase)													0			
				Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Transportasi Jalan (%)	9		9		9		9		9		9		100			
		2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi			1.848.750		-		-		-		1.848.750		1.848.750	0	100		
			Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia (Unit)	300		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	0		0		0		0		50		50		0			
		2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia (Unit)	300		0		0		0		0		0		0			
		2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan			1.848.750		-		-		-		1.848.750		1.848.750	0	100		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	0		0		0		0		50		50		0			
		2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terkelolanya Terminal Tipe B	Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi (Unit)	2		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	2		0		0		0		0		0		0			
		2.15.02.1.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengawasan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi (Unit)	2		0		0		0		0		0		0			
		2.15.02.1.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	2		0		0		0		0		0		0			
		2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.15.02.1.05.0003	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.15.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan)	3		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi (Laporan)	4		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi (Orang)	6		0		0		0		0		0		0			
		2.15.02.1.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan)	3		0		0		0		0		0		0			
		2.15.02.1.06.0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terawasinya Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi (Laporan)	4		0		0		0		0		0		0			
		2.15.02.1.06.0005	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Meningkatnya Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi (Orang)	6		0		0		0		0		0		0			
		2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			9.145.100		7.950.000		-		-		1.195.000		9.145.000	11,11	100		
			Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	2		0		0		0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan)	1		1		0		0		1		1		100			
				Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun (Unit)	2		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah lokasi Rute Aman Sekolah (RASS) yang diidentifikasi dan diawasi (Laporan / Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	2		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.15.02.1.07.0001	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Meningkatnya Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	2		0		0		0		0		0		0			
		2.15.02.1.07.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.15.02.1.07.0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum			9.145.100		7.950.000		-		-		1.195.000		9.145.000	100	100		
			Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan)	1		1		0		0		1		1		100			
		2.15.02.1.07.0007	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terbangunnya Rute Aman Selamat Sekolah	Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun (Unit)	2		0		0		0		0		0		0			
		2.15.02.1.07.0008	Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya identifikasi dan pengawasan terhadap zona selamat sekolah (ZOSS)	Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.15.02.1.07.0009	Monitoring dan evaluasi Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya identifikasi dan pengawasan terhadap Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Jumlah lokasi Rute Aman Sekolah (RASS) yang diidentifikasi dan diawasi (Laporan / Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.15.02.1.07.0010	Peningkatan Kompetensi Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Meningkatnya Kompetensi Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	2		0		0		0		0		0		0			
		2.15.02.1.07.0013	Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum			-		-		-		-		-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terpenuhinya dan Terbitnya Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.15.02.1.07.0015	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			273.705.775		130.300.000		600.000		-		142.212.000		273.112.000	35,9	99,78		
			Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi (Laporan)	3		1		0		0		1		1		33,33			
				Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Unit)	13		5		5		0		5		5		38,46			
		2.15.02.1.08.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi			266.505.775		127.000.000		-		-		138.912.000		265.912.000	33,33	99,78		
			Terkendalinya dan Terawasinya KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi (Laporan)	3		1		0		0		1		1		33,33			
		2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			7.200.000		3.300.000		600.000		-		3.300.000		7.200.000	38,46	100		
			Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Unit)	13		5		5		0		5		5		38,46			
		2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Ditetapkan	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan (Unit)	500		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.15.02.1.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan (Unit)	500		0		0		0		0		0		0			
		2.15.02.1.13.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.15.02.1.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			-		-		-		-		-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Jumlah Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Ditetapkan	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.15.02.1.14.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.15.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**			**617.654.390**		**-**		**18.395.000**		**391.440.572**		**50.188.578**		460.024.150	**46,15**	**74,48**	DINAS PERHUBUNGAN	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut	Pertumbuhan Trayek Angkutan Laut Perintis (%)	5,26												0			
				Pertumbuhan Lintasan Angkutan Penyeberangan [deleted] (%)	1,64												0			
				Konektivitas Laut (%)													0			
				Indeks Konektivitas Transportasi Laut dan Penyeberangan (%)	1,64												0			
				Rasio Konektivitas Provinsi (Rasio)	0,784		0.784		0.784		0.784		0.784		0,78		99,49			
		2.15.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi			19.652.000		-		-		-		-		-	100	0		
			Persentase Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Ditetapkan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.15.03.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi			19.652.000		-		-		-		-		-	100	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.15.03.1.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional			-		-		18.395.000		-		1.257.000		19.652.000	50	0		
			Jumlah Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Ditetapkan	Jumlah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi (Laporan)	1		0		1		0		1		1		100			
		2.15.03.1.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan	Jumlah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.15.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi			-		-		18.395.000		-		1.257.000		19.652.000	100	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi (Laporan)	1		0		1		0		1		1		100			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.15.03.1.04	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi (Dokumen)	2		0		0		0		0		0		0			
		2.15.03.1.04.0002	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi (Dokumen)	2		0		0		0		0		0		0			
		2.15.03.1.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			595.501.790		-		-		391.440.572		46.440.278		437.880.850	100	73,53		
			Tersedianya Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi (Laporan)	1		0		0		2		2		2		200			
		2.15.03.1.05.0003	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.15.03.1.05.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi			595.501.790		-		-		391.440.572		46.440.278		437.880.850	200	73,53		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terkendalinya dan Terawasinya Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan terkendalinya dan terawasinya izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi (Laporan)	1		0		0		2		2		2		200			
		2.15.03.1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.15.03.1.06.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional			1.251.300		-		-		-		1.251.300		1.251.300	50	100		
			Tersedianya Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.15.03.1.09.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.15.03.1.09.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional			1.251.300		-		-		-		1.251.300		1.251.300	100	100		
			Terawasinya Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.15.03.1.10	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			1.249.300		-		-		-		1.240.000		1.240.000	25	99,26		
			Tersedianya Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan (Laporan)	2		0		0		0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi (Orang)	3		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.15.03.1.10.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan (Laporan)	2		0		0		0		0		0		0			
		2.15.03.1.10.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.15.03.1.10.0007	Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Pengoperasian & Pemeliharaan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Meningkatnya Kompetensi Personil bidang Pengoperasian & Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi (Orang)	3		0		0		0		0		0		0			
		2.15.03.1.10.0008	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			1.249.300		-		-		-		1.240.000		1.240.000	100	99,26		
			Terawasinya Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.15.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**			**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		-	**0**	**0**	DINAS PERHUBUNGAN	
				Rasio Konektivitas Provinsi (Rasio)	0,784												0			
		2.15.05.1.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian			-		-		-		-		-		-	0	0		
				Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.15.05.1.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersusunnya Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.15.05.1.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**			**12.463.526.978**		**1.487.846.473**		**1.608.263.838**		**2.050.321.545**		**5.897.698.136**		11.044.129.992	**35,48**	**88,61**		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**7.712.889.115**		**1.484.290.691**		**1.554.376.838**		**1.743.035.350**		**1.775.828.713**		6.557.531.592	**32,15**	**85,02**	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah (%)	100												0			
				Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)													0			
		2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			16.919.865		-		-		-		16.919.865		16.919.865	66,67	100		
			Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		0		0		0		3		3		100			
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		2		2		200			
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7		0		0		0		7		7		100			
		2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3.727.865		-		-		-		3.727.865		3.727.865	100	100		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		0		0		0		3		3		100			
		2.16.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.16.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.16.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			5.840.000		-		-		-		5.840.000		5.840.000	200	100		
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		2		2		200			
		2.16.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.16.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			7.352.000		-		-		-		7.352.000		7.352.000	100	100		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7		0		0		0		7		7		100			
		2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.969.655.396		1.182.174.666		1.215.760.709		1.278.893.520		1.243.355.905		4.920.184.800	50	82,42		
			Persentase Penyusunan Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	50		50		50		50		50		50		100			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		0		0		0		12		12		100			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0		1		0		0		0			
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	6		0		0		0		0		0		0			
		2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.909.611.396		1.182.174.666		1.213.076.709		1.240.653.520		1.224.235.905		4.860.140.800	100	82,24		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	50		50		50		50		50		50		100			
		2.16.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			57.360.000		-		-		38.240.000		19.120.000		57.360.000	100	100		
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		0		0		0		12		12		100			
		2.16.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			2.684.000		-		2.684.000		-		-		2.684.000	0	100		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0		1		0		0		0			
		2.16.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	6		0		0		0		0		0		0			
		2.16.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			1.440.000		-		690.000		-		750.000		1.440.000	33,33	100		
			Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.16.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.16.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			1.440.000		-		690.000		-		750.000		1.440.000	100	100		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.16.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Persentase Penyusunan Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	50		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	50		0		0		0		0		0		0			
		2.16.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.16.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.16.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.16.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.16.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5		0		0		0		0		0		0			
		2.16.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	50		0		0		0		0		0		0			
		2.16.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	50		0		0		0		0		0		0			
		2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			317.223.966		75.831.000		62.070.500		64.012.400		113.752.640		315.666.540	65,35	99,51		
			Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		1		1		1		1		100			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3		0		0		3		3		3		100			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		1		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12		3		3		0		6		6		50			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	38		0		0		0		16		16		42,11			
		2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			10.000.000		-		3.851.500		-		6.148.000		9.999.500	100	100		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		1		1		1		1		100			
		2.16.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			52.600.966		1.450.000		21.277.000		19.057.000		10.766.000		52.550.000	100	99,9		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3		0		0		3		3		3		100			
		2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			5.000.000		970.000		1.950.000		-		2.080.000		5.000.000	100	100		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		1		0		1		1		100			
		2.16.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12		0		0		0		0		0		0			
		2.16.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			15.000.000		1.974.000		12.272.000		-		767.000		15.013.000	50	100,09		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12		3		3		0		6		6		50			
		2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			234.623.000		71.437.000		22.720.000		44.955.400		93.991.640		233.104.040	42,11	99,35		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	38		0		0		0		16		16		42,11			
		2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Persentase Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	11		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		0		0		0		0		0		0			
		2.16.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.16.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.16.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	11		0		0		0		0		0		0			
		2.16.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-		-		-		-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		0		0		0		0		0		0			
		2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			958.289.888		216.585.025		249.041.629		158.858.430		237.113.673		861.598.757	16,67	89,91		
			Persentase Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		3		3		3		25			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		3		3		3		25			
		2.16.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		0		0		0		0		0		0			
		2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			198.499.992		30.938.443		63.395.047		35.094.042		60.451.101		189.878.633	25	95,66		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		3		3		3		25			
		2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			759.789.896		185.646.582		185.646.582		123.764.388		176.662.572		671.720.124	25	88,41		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		3		3		3		25			
		2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			449.360.000		9.700.000		26.814.000		241.271.000		163.936.630		441.721.630	15,93	98,3		
			Persentase Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	14		8		8		8		8		8		57,14			
				Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10		0		0		0		1		1		10			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		1		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	16		0		2		0		2		2		12,5			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		0		0		0		0		0			
		2.16.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			112.360.000		9.700.000		24.194.000		42.385.000		36.075.000		112.354.000	57,14	99,99		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	14		8		8		8		8		8		57,14			
		2.16.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			132.000.000		-		-		-		125.481.630		125.481.630	10	95,06		
			Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10		0		0		0		1		1		10			
		2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			200.000.000		-		-		198.886.000		-		198.886.000	0	99,44		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		1		0		0		0			
		2.16.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			5.000.000		-		2.620.000		-		2.380.000		5.000.000	12,5	100		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	16		0		2		0		2		2		12,5			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.16.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		0		0		0		0		0			
		2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**			**2.707.286.404**		**-**		**53.887.000**		**157.782.495**		**2.422.602.441**		2.634.271.936	**33,91**	**97,3**	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase Informasi dan Komunikasi yang terkelola (%)	75												0			
				Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik (Predikat)													0			
		2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi			2.707.286.404		-		53.887.000		157.782.495		2.422.602.441		2.634.271.936	33,91	97,3		
			Persentase Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	500		0		0		446		0		446		89,2			
				Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)	75		0		0		0		0		0		0			
				Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	85		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	7		0		0		0		1		1		14,29			
		2.16.02.1.01.0014	Relasi Media			1.546.119.000		-		-		-		1.498.182.000		1.498.182.000	100	96,9		
			Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.16.02.1.01.0015	Penyusunan Konten			999.044.404		-		53.887.000		157.782.495		774.383.441		986.052.936	89,2	98,7		
			Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	500		0		0		446		0		446		89,2			
		2.16.02.1.01.0016	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)	75		0		0		0		0		0		0			
		2.16.02.1.01.0018	Diseminasi Informasi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	85		0		0		0		0		0		0			
		2.16.02.1.01.0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.16.02.1.01.0022	Pelayanan Informasi Publik			162.123.000		-		-		-		150.037.000		150.037.000	14,29	92,55		
			Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	7		0		0		0		1		1		14,29			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**			**2.043.351.459**		**3.555.782**		**-**		**149.503.700**		**1.699.266.982**		1.852.326.464	**80,83**	**90,65**	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Indeks)													0			
				Persentase Aplikasi Informatika yang terkelola (%)	20												0			
		2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi			2.043.351.459		3.555.782		-		149.503.700		1.699.266.982		1.852.326.464	80,83	90,65		
			Presentase Pengelolaan E -government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda (Laporan)	1		0		1		0		0		1		100			
				Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	40		0		0		17		0		17		42,5			
		2.16.03.1.02.0016	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda			-		-		-		-		-		-	100	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda (Laporan)	1		0		1		0		0		1		100			
		2.16.03.1.02.0021	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi			75.100.000		55.500		-		20.000.000		54.876.000		74.931.500	100	99,78		
			Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.16.03.1.02.0026	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE			1.968.251.459		3.500.282		-		129.503.700		1.644.390.982		1.777.394.964	42,5	90,3		
			Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	40		0		0		17		0		17		42,5			
		2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**			**12.755.802.209**		**2.251.676.573**		**2.551.195.292**		**1.813.724.574**		**4.826.695.684**		11.443.292.123	**91,29**	**89,71**		
		2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**9.993.801.209**		**2.251.676.573**		**2.551.195.292**		**1.781.723.574**		**2.731.420.704**		9.316.016.143	**99,11**	**93,22**	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
			Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0												0			
				Mengembangkan dan Menguatkan Kapasitas dan Institusi Dinas (%)	100												0			
				Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)			100		100		100		100		100		0			
		2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			66.456.000		33.801.000		31.678.720		-		-		65.479.720	275	98,53		
			Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2		6		5		0		0		11		550			
		2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			66.456.000		33.801.000		31.678.720		-		-		65.479.720	550	98,53		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2		6		5		0		0		11		550			
		2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.353.798.048		1.635.970.685		2.038.435.653		1.451.616.485		2.108.392.076		7.234.414.899	253,57	98,38		
			Terlaksananya pengadministrasian keuangan yang baik	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	14		65		65		65		65		65		464,29			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7		3		3		3		3		3		42,86			
		2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			7.295.478.048		1.635.970.685		2.030.325.653		1.421.116.485		2.090.132.076		7.177.544.899	464,29	98,38		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	14		65		65		65		65		65		464,29			
		2.17.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			58.320.000		-		8.110.000		30.500.000		18.260.000		56.870.000	42,86	97,51		
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7		3		3		3		3		3		42,86			
		2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya pelayanan administrasi kepegawaian sesuai prosedur	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	16		0		0		0		0		0		0			
		2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	16		0		0		0		0		0		0			
		2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			278.760.335		118.410.522		39.103.528		-		119.444.288		276.958.338	61,9	99,35		
			Terlaksananya operasional kantor yang memadai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3		1		1		1		1		1		33,33			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4		1		1		1		1		1		25			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4		1		1		1		1		1		25			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12		3		3		3		3		12		100			
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	5		1		1		1		1		1		20			
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	15		3		3		3		3		12		80			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	16		6		6		6		6		24		150			
		2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.065.900		1.548.000		1.254.150		-		250.000		3.052.150	33,33	99,55		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3		1		1		1		1		1		33,33			
		2.17.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			13.048.236		7.872.854		3.091.400		-		2.073.754		13.038.008	25	99,92		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4		1		1		1		1		1		25			
		2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			18.880.650		4.484.800		2.000.000		-		12.395.850		18.880.650	25	100		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4		1		1		1		1		1		25			
		2.17.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			1.250.000		500.000		700.000		-		-		1.200.000	100	96		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12		3		3		3		3		12		100			
		2.17.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			99.427.370		25.021.898		12.015.900		-		61.105.760		98.143.558	20	98,71		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	5		1		1		1		1		1		20			
		2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			22.134.709		7.485.100		3.147.500		-		11.457.924		22.090.524	80	99,8		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	15		3		3		3		3		12		80			
		2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			120.953.470		71.497.870		16.894.578		-		32.161.000		120.553.448	150	99,67		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	16		6		6		6		6		24		150			
		2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			18.500.000		-		-		-		16.799.000		16.799.000	20	90,81		
			Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0		1		1		20			
		2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			18.500.000		-		-		-		16.799.000		16.799.000	20	90,81		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0		1		1		20			
		2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.658.976.578		428.473.028		417.180.633		330.107.089		374.591.433		1.550.352.183	37,22	93,45		
			Menguatkan kapasitas dan institusi dinas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	26		3		3		3		3		12		46,15			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	62		3		3		3		3		12		19,35			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	26		3		3		3		3		12		46,15			
		2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.740.000		996.000		-		-		800.000		1.796.000	46,15	65,55		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	26		3		3		3		3		12		46,15			
		2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			138.646.532		31.948.506		25.251.728		-		73.208.994		130.409.228	19,35	94,06		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	62		3		3		3		3		12		19,35			
		2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.517.590.046		395.528.522		391.928.905		330.107.089		300.582.439		1.418.146.955	46,15	93,45		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	26		3		3		3		3		12		46,15			
		2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			167.310.363		35.021.338		24.796.758		-		106.813.907		166.632.003	116,67	99,59		
			Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah dengan baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	8		3		3		3		3		12		150			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4		1		1		1		1		4		100			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10		3		4		0		3		10		100			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		0		0		0		1		1		0			
		2.17.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			93.834.655		28.352.236		19.821.758		-		67.408.296		115.582.290	150	123,18		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	8		3		3		3		3		12		150			
		2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			36.925.708		2.114.102		-		-		12.385.611		14.499.713	100	39,27		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4		1		1		1		1		4		100			
		2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			9.850.000		4.555.000		4.975.000		-		320.000		9.850.000	100	100		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10		3		4		0		3		10		100			
		2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			26.700.000		-		-		-		26.700.000		26.700.000	0	100		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		0		0		0		1		1		0			
		2.17.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			449.999.885		-		-		-		5.380.000		5.380.000	10	1,2		
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	50		0		0		0		5		5		10			
		2.17.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			449.999.885		-		-		-		5.380.000		5.380.000	10	1,2		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	50		0		0		0		5		5		10			
		2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**			**150.000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		-	**0**	**0**	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
				Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (%)													0			
				Persentase koperasi aktif (%)	68,5						68.5				68,5		100			
		2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			150.000.000		-		-		-		-		-	0	0		
				Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	10		0		0		0		0		0		0			
		2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			150.000.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	10		0		0		0		0		0		0			
		2.17.04	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**			**32.001.000**		**-**		**-**		**32.001.000**		**-**		32.001.000	**100**	**100**	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
			Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	Terlaksananya pengukuran tingkat kesehatan koperas (Unit)	6												0			
				Persentase Koperasi Aktif (%)													0			
		2.17.04.1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			32.001.000		-		-		32.001.000		-		32.001.000	100	100		
			mengukur tingkat kesehatan koperasi	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	10		0		0		10		0		10		100			
		2.17.04.1.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan			32.001.000		-		-		32.001.000		-		32.001.000	100	100		
			Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	10		0		0		10		0		10		100			
		2.17.06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**			**395.996.000**		**-**		**-**		**-**		**395.722.600**		395.722.600	**100**	**99,93**	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
			Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (%)									9.92		9,92		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)	0												0			
		2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			395.996.000		-		-		-		395.722.600		395.722.600	100	99,93		
			mengembangkan usaha koperasi yang inovatif	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	2		0		0		0		2		2		100			
		2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha			395.996.000		-		-		-		395.722.600		395.722.600	100	99,93		
			Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	2		0		0		0		2		2		100			
		2.17.07	**PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**			**2.184.004.000**		**-**		**-**		**-**		**1.699.552.380**		1.699.552.380	**100**	**77,82**	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
			Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (%)													0			
				Terlaksananya Perluasan akses pasar, akses pembiayaan, penataan manajemen, standarisasi dan retrukturisasi usah (Unit)	933												0			
		2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan			2.184.004.000		-		-		-		1.699.552.380		1.699.552.380	100	77,82		
			Jumlah Wirausaha yang tumbuh	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan (Unit Usaha)	885		0		0		0		885		885		100			
		2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan			2.184.004.000		-		-		-		1.699.552.380		1.699.552.380	100	77,82		
			Berkembangnya UMKM Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan (Unit Usaha)	885		0		0		0		885		885		100			
		2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**			**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		-	**0**	**0**	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
			Meningkatnya Daya Saing UMKM	Terciptanya UMKM yang unggul dan berdaya saing (Unit)	0												0			
				Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (%)													0			
		2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah			-		-		-		-		-		-	0	0		
			digitalisasi UMKM dan peningkatan kapasitas pelaku UMKM	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	10		0		0		0		0		0		0			
		2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	10		0		0		0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**			**7.447.914.991**		**1.187.224.848**		**1.444.456.972**		**1.574.209.037**		**2.565.273.155**		6.771.164.012	**97,23**	**90,91**		
		2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**6.589.583.591**		**1.175.959.208**		**1.439.026.902**		**1.304.406.777**		**2.034.179.333**		5.953.572.220	**95,69**	**90,35**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Nilai SAKIP (Nilai)	80												0			
				Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)			100		100		100		100		100		0			
		2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			475.192.227		20.697.700		123.140.000		61.422.600		258.481.567		463.741.867	93,33	97,59		
			Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4		1		3		0		0		4		100			
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2		1		0		0		1		2		100			
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2		1		0		0		1		2		100			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6		2		0		0		4		4		66,67			
		2.18.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			133.588.700		-		95.753.600		28.951.200		8.103.900		132.808.700	100	99,42		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4		1		3		0		0		4		100			
		2.18.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			19.473.500		8.755.000		646.600		7.091.900		2.980.000		19.473.500	100	100		
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2		1		0		0		1		2		100			
		2.18.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			19.473.500		6.287.700		2.663.900		6.791.900		3.730.000		19.473.500	100	100		
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2		1		0		0		1		2		100			
		2.18.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			11.552.300		-		9.407.300		945.000		1.200.000		11.552.300	100	100		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.18.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			291.104.227		5.655.000		14.668.600		17.642.600		242.467.667		280.433.867	66,67	96,33		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6		2		0		0		4		4		66,67			
		2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.644.277.924		980.768.282		1.089.836.779		1.092.580.149		1.167.353.996		4.330.539.206	100	93,24		
			Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	40		40		40		40		40		40		100			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18		4		5		4		5		18		100			
		2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.513.095.624		967.677.662		1.072.768.779		1.089.004.449		1.062.249.456		4.191.700.346	100	92,88		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	40		40		40		40		40		40		100			
		2.18.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			56.920.000		-		-		-		56.920.000		56.920.000	100	100		
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.18.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			63.929.000		13.090.620		13.567.900		1.067.500		43.859.540		71.585.560	100	111,98		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.18.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			10.333.300		-		3.500.100		2.508.200		4.325.000		10.333.300	100	100		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18		4		5		4		5		18		100			
		2.18.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			5.175.000		745.300		900.000		-		3.529.700		5.175.000	100	100		
			Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.18.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			5.175.000		745.300		900.000		-		3.529.700		5.175.000	100	100		
			Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			86.265.400		10.678.400		11.911.020		4.844.100		52.797.646		80.231.166	115	93,01		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Diklat dan Sosialisasi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10		13		0		0		0		13		130			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	25		3		6		8		8		25		100			
		2.18.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			5.902.600		5.902.600		-		-		-		5.902.600	130	100		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10		13		0		0		0		13		130			
		2.18.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			80.362.800		4.775.800		11.911.020		4.844.100		52.797.646		74.328.566	100	92,49		
			Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	25		3		6		8		8		25		100			
		2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			396.534.360		76.762.460		48.383.300		73.739.300		147.297.532		346.182.592	100	87,3		
			Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		0		0		0		1		100			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		1		0		0		1		1		100			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		1		1		1		1		100			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		1		1		1		1		100			
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1		1		1		1		1		1		100			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	21		5		3		3		10		21		100			
		2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.835.460		1.835.460		-		-		-		1.835.460	100	100		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		0		0		0		1		100			
		2.18.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			3.006.300		3.006.300		-		-		-		3.006.300	100	100		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		1		0		0		1		1		100			
		2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			71.623.100		9.466.300		17.888.200		28.824.300		15.444.300		71.623.100	100	100		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		1		1		1		1		100			
		2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			16.704.500		7.818.800		2.485.000		3.325.700		3.075.000		16.704.500	100	100		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		1		1		1		1		100			
		2.18.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			24.838.900		4.439.500		2.075.000		-		9.244.400		15.758.900	100	63,44		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1		1		1		1		1		1		100			
		2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			278.526.100		50.196.100		25.935.100		41.589.300		119.533.832		237.254.332	100	85,18		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	21		5		3		3		10		21		100			
		2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			256.850.000		-		45.000.000		-		-		45.000.000	0	17,52		
			Jumlah Barang Milik Daerah yang Tersedia	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6		0		1		0		0		0		0			
		2.18.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			256.850.000		-		45.000.000		-		-		45.000.000	0	17,52		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6		0		1		0		0		0		0			
		2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			461.974.480		76.967.066		108.694.572		54.125.628		180.821.230		420.608.496	100	91,05		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
		2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			105.083.000		6.758.906		38.486.412		13.170.868		40.404.910		98.821.096	100	94,04		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			356.891.480		70.208.160		70.208.160		40.954.760		140.416.320		321.787.400	100	90,16		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
		2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			263.314.200		9.340.000		11.161.231		17.695.000		223.897.662		262.093.893	100	99,54		
			Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	6		6		6		6		6		6		100			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	11		3		3		3		2		11		100			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.18.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			73.146.000		5.000.000		8.321.231		17.695.000		41.652.545		72.668.776	100	99,35		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	6		6		6		6		6		6		100			
		2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			7.180.000		4.340.000		2.840.000		-		-		7.180.000	100	100		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	11		3		3		3		2		11		100			
		2.18.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			182.988.200		-		-		-		182.245.117		182.245.117	100	99,59		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**			**40.000.000**		**-**		**-**		**21.963.000**		**15.985.040**		37.948.040	**100**	**94,87**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (%)									29.92		29,92		0			
				Jumlah Pelaku Usaha yang Naik Kelas (Pelaku Usaha)	5												0			
		2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi			40.000.000		-		-		21.963.000		15.985.040		37.948.040	100	94,87		
			Jumlah Dokumen Potensi Investasi Unggulan Daerah	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi			40.000.000		-		-		21.963.000		15.985.040		37.948.040	100	94,87		
			Tersusunnya Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**			**300.196.000**		**-**		**-**		**180.169.340**		**111.396.132**		291.565.472	**100**	**97,13**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor yang Berminat Berinvestasi (Investor)	1												0			
				Jumlah Investor yang Berinvestasi (Investor)													0			
		2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			300.196.000		-		-		180.169.340		111.396.132		291.565.472	100	97,13		
			Jumlah Dokumen Strategi dan Kegiatan Promosi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi			250.200.000		-		-		176.433.340		65.181.132		241.614.472	100	96,57		
			Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
		2.18.03.1.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi			49.996.000		-		-		3.736.000		46.215.000		49.951.000	100	99,91		
			Tersusunnya Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**			**468.135.400**		**11.265.640**		**4.600.070**		**41.150.420**		**383.734.650**		440.750.780	**102,97**	**94,15**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Rata-rata lama pengurusan dokumen perijinan usaha (Hari)													0			
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)	93,5		91.3		91		94.4		96.5		93,3		99,79			
		2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			468.135.400		11.265.640		4.600.070		41.150.420		383.734.650		440.750.780	102,97	94,15		
			Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	100		23		26		24		37		110		110			
				Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	1000		211		214		160		434		1.019		101,9			
				Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	11		0		0		11		0		11		100			
		2.18.04.1.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah			20.000.000		1.900.000		-		7.000.000		7.050.000		15.950.000	100	79,75		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.18.04.1.02.0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			22.500.000		-		-		9.000.000		12.260.000		21.260.000	110	94,49		
			Tersedianya dan Terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	100		23		26		24		37		110		110			
		2.18.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			405.635.400		7.344.140		4.600.070		13.250.420		358.346.150		383.540.780	101,9	94,55		
			Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	1000		211		214		160		434		1.019		101,9			
		2.18.04.1.02.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			20.000.000		2.021.500		-		11.900.000		6.078.500		20.000.000	100	100		
			Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	11		0		0		11		0		11		100			
		2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**			**30.000.000**		**-**		**-**		**22.019.500**		**5.400.000**		27.419.500	**100**	**91,4**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (%)													0			
				Nilai Realisasi Investasi (Triliun)	2,6								1.125		1.125		43269,23			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			30.000.000		-		-		22.019.500		5.400.000		27.419.500	100	91,4		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pengawasan, Fasilitas Penyelesaian Permasalahan dan Pembinaan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan usaha)	6		0		0		6		0		6		100			
		2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal			30.000.000		-		-		22.019.500		5.400.000		27.419.500	100	91,4		
			Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan usaha)	6		0		0		6		0		6		100			
		2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**			**20.000.000**		**-**		**830.000**		**4.500.000**		**14.578.000**		19.908.000	**100**	**99,54**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	Jumlah Layanan Data Informasi Perizinan/Non Perizinan yang dipublikasikan (Data)	3								3		3		100			
				Persentase Pemanfaatan Data Dan Informasi Penanaman Modal (%)			100		100		100		100		100		0			
		2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi			20.000.000		-		830.000		4.500.000		14.578.000		19.908.000	100	99,54		
			Jumlah Layanan Data Informasi Perizinan/Non Perizinan yang dipublikasikan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	7		1		2		1		3		7		100			
		2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			20.000.000		-		830.000		4.500.000		14.578.000		19.908.000	100	99,54		
			Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	7		1		2		1		3		7		100			
		2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**			**19.717.201.737**		**457.359.005**		**-**		**-**		**-**		457.359.005	**6,13**	**2,32**		
		2.19.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**6.478.577.017**		**457.359.005**		**-**		**-**		**-**		457.359.005	**11,64**	**7,06**	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	
			Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)			19								19		0			
		2.19.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			103.406.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.19.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			22.438.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		0		0		0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.19.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			6.000.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4		0		0		0		0		0		0			
		2.19.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			74.968.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.272.656.375		893		-		-		-		893	40,95	0		
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.19.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			81.780.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.19.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			24.971.500		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	35		43		0		0		0		43		122,86			
		2.19.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.165.904.875		893		-		-		-		893	122,86	0		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	35		43		0		0		0		43		122,86			
		2.19.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			28.546.000		28.518.960		-		-		-		28.518.960	10	99,91		
			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi ASN	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	20		2		0		0		0		2		10			
		2.19.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			28.546.000		28.518.960		-		-		-		28.518.960	10	99,91		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	20		2		0		0		0		2		10			
		2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			468.491.400		41.710.554		-		-		-		41.710.554	0	8,9		
			Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	17		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			12.500.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			81.000.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			73.500.400		12.500.000		-		-		-		12.500.000	0	17,01		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			20.005.000		1.600.000		-		-		-		1.600.000	0	8		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			117.363.000		27.610.554		-		-		-		27.610.554	0	23,53		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	17		0		0		0		0		0		0			
		2.19.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			164.123.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.444.469.642		373.182.598		-		-		-		373.182.598	0	25,84		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.19.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.070.000		748.000		-		-		-		748.000	0	24,36		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			205.000.000		41.095.890		-		-		-		41.095.890	0	20,05		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2		0		0		0		0		0		0			
		2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.236.399.642		331.338.708		-		-		-		331.338.708	0	26,8		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			161.007.600		13.946.000		-		-		-		13.946.000	25	8,66		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peraltan dan Bangunan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	8		8		0		0		0		8		100			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.19.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			116.007.600		13.946.000		-		-		-		13.946.000	100	12,02		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	8		8		0		0		0		8		100			
		2.19.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.19.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			25.000.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.19.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			20.000.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**			**563.703.100**		**-**		**-**		**-**		**-**		-	**0**	**0**	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	
			Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)			9		28		14				14		0			
		2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi			563.703.100		-		-		-		-		-	0	0		
			Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya (Orang)	25		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah yang menerima penghargaan pemuda (Orang)	5		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)	11		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	40		0		0		0		0		0		0			
		2.19.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi			36.131.200		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya (Orang)	25		0		0		0		0		0		0			
		2.19.02.1.01.0010	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda			119.858.500		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberian Penghargaan pemuda bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda (Orang)	5		0		0		0		0		0		0			
		2.19.02.1.01.0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi			36.380.000		-		-		-		-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0				
		2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi			54.287.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)	11		0		0		0		0		0		0				
		2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi			317.046.400		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	40		0		0		0		0		0		0				
		2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi (Organisasi)	25		0		0		0		0		0		0				
		2.19.02.1.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi (Organisasi)	25		0		0		0		0		0		0				
		2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**			**12.643.636.620**		**-**		**-**		**-**		**-**		-	**0**	**0**	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	
			Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)			3		8		45		45		45		0			
		2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			5.131.094.520		-		-		-		-		-	0	0		
			Peningkatan Prestasi dan Fasilitas Olahraga	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan (Unit)	1		0		0		0		0		0		0				
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0				
				Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia (Unit)	2		0		0		0		0		0		0				
		2.19.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha			249.298.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Berkembangnya Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan (Unit)	1		0		0		0		0		0		0				
		2.19.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus			-		-		-		-		-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terselenggaranya Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.19.03.1.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi			4.881.796.520		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga	Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia (Unit)	2		0		0		0		0		0		0			
		2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga			442.997.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Penyelengarran dan Keikutsertaan Kontigen Daerah dalam Olahraga	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga (Orang)	150		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi (Kegiatan)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara (Kegiatan)	2		0		0		0		0		0		0			
		2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga			442.997.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga (Orang)	150		0		0		0		0		0		0			
		2.19.03.1.02.0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terselenggaranya Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi (Kegiatan)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terselenggaranya Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara (Kegiatan)	2		0		0		0		0		0		0			
		2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional			3.922.296.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Peningkatan Atlet Berprestasi di Tingkat Nasional dan Internasional	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang)	30		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah penerima Penghargaan olahraga (Orang)	4		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.19.03.1.03.0001	Seleksi Atlet Daerah			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terselenggaranya Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang)	30		0		0		0		0		0		0			
		2.19.03.1.03.0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga			3.922.296.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga (Orang)	4		0		0		0		0		0		0			
		2.19.03.1.03.0008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya data Keolahragaan terpadu di provinsi	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			3.147.249.100		-		-		-		-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait (Dokumen)	20		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.19.03.1.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait			3.147.249.100		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait (Dokumen)	20		0		0		0		0		0		0			
		2.19.03.1.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.19.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**			**31.285.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		-	**0**	**0**	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	
			Meningkatnya Kualitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)													0			
		2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			31.285.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.19.04.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi			31.285.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**			**269.441.800**		**-**		**30.384.000**		**-**		**239.035.012**		269.419.012	**50**	**99,99**		
		2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**			**269.441.800**		**-**		**30.384.000**		**-**		**239.035.012**		269.419.012	**50**	**99,99**	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase Data Statistik Sektoral yang tersedia (%)	80												0			
				Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Indeks)													0			
		2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi			269.441.800		-		30.384.000		-		239.035.012		269.419.012	50	99,99		
			Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata (Dokumen)	2		0		0		0		1		1		50			
		2.20.02.1.01.0011	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia			269.441.800		-		30.384.000		-		239.035.012		269.419.012	50	99,99		
			Terwujudnya Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata (Dokumen)	2		0		0		0		1		1		50			
		2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**			**128.545.000**		**-**		**-**		**-**		**127.244.000**		127.244.000	**55**	**98,99**		
		2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**			**128.545.000**		**-**		**-**		**-**		**127.244.000**		127.244.000	**55**	**98,99**	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Meningkatnya keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase Penyelenggaraan keamanan informasi di Provinsi Maluku (%)	100												0			
				Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah (Indeks Kami) (Skor)													0			
		2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi			128.545.000		-		-		-		127.244.000		127.244.000	55	98,99		
			Persentase Layanan Keamanan Informasi yang dikelola	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi (Laporan)	3		0		0		0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi (Perangkat Daerah)	40		0		0		0		44		44		110			
		2.21.02.1.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi (Laporan)	3		0		0		0		0		0		0			
		2.21.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi			128.545.000		-		-		-		127.244.000		127.244.000	110	98,99		
			Tersedianya Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah di Tingkat Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi (Perangkat Daerah)	40		0		0		0		44		44		110			
		2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**			**10.464.769.616**		**-**		**199.467.000**		**2.970.232.732**		**2.553.869.096**		5.723.568.828	**67,95**	**54,69**		
		2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**			**1.215.449.500**		**-**		**-**		**-**		**420.660.720**		420.660.720	**50**	**34,61**	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)									80		80		0			
		2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			918.789.500		-		-		-		420.660.720		420.660.720	100	45,78		
			Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan (Objek)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			918.789.500		-		-		-		420.660.720		420.660.720	100	45,78		
			Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan (Objek)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.22.02.1.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			296.660.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina (Orang)	4		0		0		0		0		0		0			
		2.22.02.1.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat			296.660.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina (Orang)	4		0		0		0		0		0		0			
		2.22.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**			**3.595.663.916**		**-**		**-**		**2.050.122.353**		**1.016.449.676**		3.066.572.029	**77,78**	**85,29**	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kesenian Tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)									70		70		0			
		2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			3.595.663.916		-		-		2.050.122.353		1.016.449.676		3.066.572.029	77,78	85,29		
			Terlaksananya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	500		0		0		0		500		500		100			
				Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi (Sertifikat)	5		0		0		5		0		5		100			
				Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	3		0		0		0		1		1		33,33			
		2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional			269.060.460		-		-		-		195.060.460		195.060.460	100	72,5		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	500		0		0		0		500		500		100			
		2.22.03.1.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan			345.604.200		-		-		140.876.200		-		140.876.200	100	40,76		
			Tersedianya Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi (Sertifikat)	5		0		0		5		0		5		100			
		2.22.03.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional			2.980.999.256		-		-		1.909.246.153		821.389.216		2.730.635.369	33,33	91,6		
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	3		0		0		0		1		1		33,33			
	2.22.04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**				**258.484.000**		**-**		**-**		**-**		**8.660.000**		8.660.000	**100**	**3,35**	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Informasi Sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)									97		97		0			
		2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi			258.484.000		-		-		-		8.660.000		8.660.000	100	3,35		
			Terlaksananya Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.22.04.1.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah			258.484.000		-		-		-		8.660.000		8.660.000	100	3,35		
			Tersedianya Data dan Informasi Sejarah yang Diakses Masyarakat	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
	2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**				**3.895.172.200**		**-**		**199.467.000**		**622.860.379**		**452.923.700**		1.275.251.079	**80**	**32,74**	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			Meningkatnya Warisan Budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)									55.6		55,6		0			
				Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)									54.05		54,05		0			
		2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi			2.165.542.000		-		199.467.000		622.860.379		32.806.488		855.133.867	100	39,49		
			Tersedianya Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang ditetapkan	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)	2		0		0		0		2		2		100			
				Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.22.05.1.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya			1.151.832.600		-		-		447.458.379		8.536.000		455.994.379	100	39,59		
			Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)	2		0		0		0		2		2		100			
		2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya			1.013.709.400		-		199.467.000		175.402.000		24.270.488		399.139.488	100	39,37		
			Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi			1.729.630.200		-		-		-		420.117.212		420.117.212	66,67	24,29		
			Tersedianya Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang dikelola	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi (Objek)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.22.05.1.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya			711.061.200		-		-		-		15.308.080		15.308.080	100	2,15		
			Terlaksananya Cagar Budaya yang Diregistrasi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi (Objek)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.22.05.1.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya			162.903.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	1		0		0		0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.22.05.1.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya			855.666.000		-		-		-		404.809.132		404.809.132	100	47,31		
			Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.22.06	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**			**1.500.000.000**		**-**		**-**		**297.250.000**		**655.175.000**		952.425.000	**25**	**63,5**	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			Meningkatnya Tata Kelola Museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase)									70.71		70,71		0			
		2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi			1.500.000.000		-		-		297.250.000		655.175.000		952.425.000	25	63,5		
			Terkelolanya Museum Provinsi	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan (Unit)	2		0		0		0		1		1		50			
				Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu			1.500.000.000		-		-		297.250.000		655.175.000		952.425.000	50	63,5		
			Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan (Unit)	2		0		0		0		1		1		50			
		2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Meningkatnya Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**			**8.474.561.219**		**1.499.753.380**		**1.663.014.689**		**2.214.034.126**		**2.654.184.589**		8.030.986.784	**64,89**	**94,77**		
		2.23.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**7.365.417.639**		**1.498.394.380**		**1.557.806.439**		**1.896.976.855**		**2.046.229.959**		6.999.407.633	**89,44**	**95,03**	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)													0			
		2.23.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			62.108.453		-		22.989.000		6.735.000		32.384.453		62.108.453	100	100		
			Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2		0		0		0		2		2		100			
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2		0		0		0		2		2		100			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4		0		1		0		3		4		100			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4		0		1		3		0		4		100			
		2.23.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			6.011.000		-		-		774.000		5.237.000		6.011.000	100	100		
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2		0		0		0		2		2		100			
		2.23.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			5.000.000		-		-		1.063.000		3.937.000		5.000.000	100	100		
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2		0		0		0		2		2		100			
		2.23.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			18.137.000		-		18.137.000		-		-		18.137.000	100	100		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4		0		1		0		3		4		100			
		2.23.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			32.960.453		-		4.852.000		4.898.000		23.210.453		32.960.453	100	100		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4		0		1		3		0		4		100			
		2.23.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.796.083.238		1.316.720.209		1.307.515.343		1.526.630.601		1.409.975.307		5.560.841.460	139,09	95,94		
			Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	55		45		45		53		53		196		356,36			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2		1		1		0		2		2		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2		1		1		0		2		2		100			
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	6		0		0		0		0		0		0			
		2.23.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.704.972.938		1.310.519.709		1.304.515.343		1.526.630.601		1.408.875.307		5.550.540.960	356,36	97,29		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	55		45		45		53		53		196		356,36			
		2.23.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			7.593.000		3.493.000		3.000.000		-		1.100.000		7.593.000	100	100		
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2		1		1		0		2		2		100			
		2.23.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			2.709.500		2.707.500		-		-		-		2.707.500	100	99,93		
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2		1		1		0		2		2		100			
		2.23.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			80.807.800		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	6		0		0		0		0		0		0			
		2.23.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			2.250.000		2.250.000		-		-		-		2.250.000	25	100		
			Tersedianya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4		1		0		0		0		1		25			
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4		1		0		0		0		1		25			
		2.23.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			1.000.000		1.000.000		-		-		-		1.000.000	25	100		
			Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4		1		0		0		0		1		25			
		2.23.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			1.250.000		1.250.000		-		-		-		1.250.000	25	100		
			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4		1		0		0		0		1		25			
		2.23.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-		-		-		-		-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah secara baik dan lancar	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	8		0		0		0		0		0		0			
		2.23.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.23.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	8		0		0		0		0		0		0			
		2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			366.284.178		33.468.270		75.751.290		105.113.270		144.758.849		359.091.679	86,52	98,04		
			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah secara baik dan lancer	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		0		0		1		1		1		50			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4		1		1		1		1		4		100			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	17		1		4		0		11		16		94,12			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	200		0		0		50		100		150		75			
		2.23.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			29.998.850		4.067.200		8.166.900		10.265.500		7.499.050		29.998.650	100	100		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		1		0		1		100			
		2.23.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			86.117.600		1.068.600		22.929.110		38.750.700		23.353.805		86.102.215	50	99,98		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		0		0		1		1		1		50			
		2.23.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			35.000.000		5.469.800		11.289.000		12.848.560		4.562.490		34.169.850	100	97,63		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.23.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			75.649.352		12.325.850		11.038.002		40.046.510		10.958.848		74.369.210	100	98,31		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4		1		1		1		1		4		100			
		2.23.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			129.855.376		10.536.820		22.328.278		-		91.931.656		124.796.754	94,12	96,1		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	17		1		4		0		11		16		94,12			
		2.23.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			9.663.000		-		-		3.202.000		6.453.000		9.655.000	75	99,92		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	200		0		0		50		100		150		75			
		2.23.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			240.000.000		-		-		-		239.920.780		239.920.780	0	99,97		
			Terpenuhinya Sarana dan prasarana aparatur daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		0		0		0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		0		0		0		0		0		0			
		2.23.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.23.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			240.000.000		-		-		-		239.920.780		239.920.780	0	99,97		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		0		0		0		0		0		0			
		2.23.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		0		0		0		0		0		0			
		2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			611.856.770		123.213.969		109.247.265		151.490.412		130.908.509		514.860.155	200	84,15		
			Tersedianya jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4		1		1		1		1		4		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3		3		3		3		3		12		400			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
		2.23.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4.848.000		1.690.000		1.000.000		1.100.000		348.000		4.138.000	100	85,35		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4		1		1		1		1		4		100			
		2.23.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			243.081.732		21.792.551		41.602.321		92.996.324		42.641.488		199.032.684	400	81,88		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3		3		3		3		3		12		400			
		2.23.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			363.927.038		99.731.418		66.644.944		57.394.088		87.919.021		311.689.471	100	85,65		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
		2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			286.835.000		22.741.932		42.303.541		107.007.572		88.282.061		260.335.106	100	90,76		
			Terpeliharanya Sarana dan prasarana penunjang Pemerintahan daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20		2		2		6		10		20		100			
				Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10		1		1		3		5		10		100			
		2.23.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			81.000.000		8.163.000		11.940.000		29.775.000		31.122.000		81.000.000	100	100		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20		2		2		6		10		20		100			
		2.23.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			205.835.000		14.578.932		30.363.541		77.232.572		57.160.061		179.335.106	100	87,13		
			Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10		1		1		3		5		10		100			
		2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**			**1.094.824.300**		**1.359.000**		**102.809.250**		**317.057.271**		**596.354.630**		1.017.580.151	**33,33**	**92,94**	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Persentase Perpustakaan yang dibina sesuai SNP (%)													0			
		2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi			94.968.000		1.359.000		2.220.750		9.219.742		63.683.750		76.483.242	33,33	80,54		
			Output 1	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya (Perpustakaan)	5		0		0		0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan (Eksemplar)	50		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	20		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi (Orang)	15		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)	100		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK (Perpustakaan)	1		0		0		1		1		2		200			
		2.23.02.1.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi			2.920.000		1.359.000		1.561.000		-		-		2.920.000	0	100		
			Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya (Perpustakaan)	5		0		0		0		0		0		0			
		2.23.02.1.01.0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan (Eksemplar)	50		0		0		0		0		0		0			
		2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan			240.000		-		240.000		-		-		240.000	0	100		
			Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus di seluruh wilayah provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	20		0		0		0		0		0		0			
		2.23.02.1.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi (Orang)	15		0		0		0		0		0		0			
		2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka			16.808.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Provinsi untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)	100		0		0		0		0		0		0			
		2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik			75.000.000		-		419.750		9.219.742		63.683.750		73.323.242	200	97,76		
			Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK (Perpustakaan)	1		0		0		1		1		2		200			
		2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi			999.856.300		-		100.588.500		307.837.529		532.670.880		941.096.909	33,33	94,12		
			Output 1	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus (Lokus)	4		0		1		1		2		4		100			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan (Perpustakaan)	20		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya (Orang)	4		0		0		0		0		0		0			
		2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat			999.856.300		-		100.588.500		307.837.529		532.670.880		941.096.909	100	94,12		
			Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus (Lokus)	4		0		1		1		2		4		100			
		2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan (Perpustakaan)	20		0		0		0		0		0		0			
		2.23.02.1.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya (Orang)	4		0		0		0		0		0		0			
		2.23.03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**			**14.319.280**		**-**		**2.399.000**		**-**		**11.600.000**		13.999.000	**14,29**	**97,76**	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (%)													0			
		2.23.03.1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi			2.719.280		-		2.399.000		-		-		2.399.000	0	88,22		
			Output 1	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR (Eksemplar)	10		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Penerbit)	6		0		0		0		0		0		0			
		2.23.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam			2.719.280		-		2.399.000		-		-		2.399.000	0	88,22		
			Terlaksananya Penghimpunan dan Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam Serta Peningkatan Kepatuhan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR (Eksemplar)	10		0		0		0		0		0		0			
		2.23.03.1.01.0002	Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberian Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Penerbit)	6		0		0		0		0		0		0			
		2.23.03.1.02	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah			11.600.000		-		-		-		11.600.000		11.600.000	50	100		
			Output 1	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan (Entry)	300		0		0		0		300		300		100			
				Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan (Naskah)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.23.03.1.02.0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah			11.600.000		-		-		-		11.600.000		11.600.000	100	100		
			Terlaksananya Penerbitan Katalog Induk Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan (Entry)	300		0		0		0		300		300		100			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.23.03.1.02.0002	Penerbitan Bibliografi Daerah			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Penerbitan Bibliografi Daerah Provinsi	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan (Naskah)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.23.03.1.03	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Test	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno (Orang)	7		0		0		0		0		0		0			
		2.23.03.1.03.0004	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno (Orang)	7		0		0		0		0		0		0			
		2.23.03.1.04	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Test	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi (Eksemplar)	10		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi (Eksemplar)	10		0		0		0		0		0		0			
		2.23.03.1.04.0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi (Eksemplar)	10		0		0		0		0		0		0			
		2.23.03.1.04.0002	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi (Eksemplar)	10		0		0		0		0		0		0			
		2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**			**68.309.300**		**11.948.500**		**11.104.000**		**9.651.400**		**31.233.500**		63.937.400	**28,2**	**93,6**		
		2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**			**68.240.100**		**11.881.500**		**11.104.000**		**9.651.400**		**31.233.500**		63.870.400	**37,61**	**93,6**	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis	Persentase perangkat daerah yang memiliki daftar arsip dinamis (%)													0			
		2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi			37.913.900		4.442.500		3.727.000		8.334.400		15.948.500		32.452.400	76,74	85,59		
			Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis	Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis (Instansi)	8		0		0		8		0		8		100			
				Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan (Lembaga)	43		0		0		13		10		23		53,49			
		2.24.02.1.01.0008	Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi			12.915.700		533.500		2.017.000		4.199.500		743.500		7.493.500	100	58,02		
			Terlaksananya Implementasi Pengelolaan Arsip Dinamis pada ORMAS, ORPOL, OPD/SKPD, BUMD	Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis (Instansi)	8		0		0		8		0		8		100			
		2.24.02.1.01.0012	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi			24.998.200		3.909.000		1.710.000		4.134.900		15.205.000		24.958.900	53,49	99,84		
			Terselenggaranya Pengawasan kearsipan pada OPD provinsi dan BUMD provinsi	Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan (Lembaga)	43		0		0		13		10		23		53,49			
		2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi			30.326.200		7.439.000		7.377.000		1.317.000		15.285.000		31.418.000	36,07	103,6		
			Meningkatnya Tata Kelola Arsip Satis	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI (Arsip)	20		2		1		0		0		3		15			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi (Arsip)	350		50		50		50		50		200		57,14			
		2.24.02.1.02.0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI			12.992.000		1.556.000		-		-		12.542.000		14.098.000	15	108,51		
			Terlaksananya Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI (Arsip)	20		2		1		0		0		3		15			
		2.24.02.1.02.0005	Akuisisi Arsip Statis			17.334.200		5.883.000		7.377.000		1.317.000		2.743.000		17.320.000	57,14	99,92		
			Terlaksananya Akuisisi Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi (Arsip)	350		50		50		50		50		200		57,14			
		2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Test	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN (Pengguna)	200		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi (Laporan)	3		0		0		0		0		0		0			
		2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN (Pengguna)	200		0		0		0		0		0		0			
		2.24.02.1.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi (Laporan)	3		0		0		0		0		0		0			
		2.24.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**			**69.200**		**67.000**		**-**		**-**		**-**		67.000	**0**	**96,82**	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip sesuai dengan NSPK	Jumlah Arsip yang diselamatkan dan dimusnahkan (Nilai)													0			
		2.24.03.1.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota			69.200		67.000		-		-		-		67.000	0	96,82		
			Test	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota (Arsip)	2		0		0		0		0		0		0			
		2.24.03.1.03.0003	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota			69.200		67.000		-		-		-		67.000	0	96,82		
			Terlaksananya Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota (Arsip)	2		0		0		0		0		0		0			
		2.24.03.1.05	Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Test	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman (Arsip)	150		0		0		0		0		0		0			
		2.24.03.1.05.0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman (Arsip)	150		0		0		0		0		0		0			
		3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**			**65.551.805.159**		**4.995.901.969**		**13.490.382.305**		**12.394.962.271**		**27.561.510.112**		58.442.756.657	**33,26**	**89,16**		
		3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**44.269.241.659**		**4.863.929.707**		**11.873.219.031**		**9.040.266.515**		**16.484.109.077**		42.261.524.330	**37,62**	**95,46**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)													0			
		3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.702.331.169		737.594.529		735.327.715		895.854.516		1.249.676.978		3.618.453.738	100	97,73		
			Terselenggaranya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4		0		0		0		4		4		100			
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		0		0		0		1		100			
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		2		0		0		2		200			
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4		0		0		0		0		0		0			
		3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3.649.966.169		736.946.529		734.577.715		894.864.516		1.248.769.478		3.615.158.238	100	99,05		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4		0		0		0		4		4		100			
		3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			13.146.000		648.000		-		-		-		648.000	100	4,93		
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		0		0		0		1		100			
		3.25.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			7.415.000		-		-		990.000		367.500		1.357.500	100	18,31		
			Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		3.25.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			13.371.000		-		750.000		-		-		750.000	200	5,61		
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		2		0		0		2		200			
		3.25.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			7.415.000		-		-		-		540.000		540.000	100	7,28		
			Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			11.018.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4		0		0		0		0		0		0			
		3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			24.826.089.735		2.972.498.429		8.805.976.687		5.432.350.606		7.290.787.835		24.501.613.557	32,68	98,69		
			Terselanggaranya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	254		249		249		249		249		249		98,03			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			24.818.589.735		2.972.498.429		8.805.976.687		5.432.350.606		7.290.787.835		24.501.613.557	98,03	98,72		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	254		249		249		249		249		249		98,03			
		3.25.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			7.500.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		3.25.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			78.568.500		-		-		41.947.879		36.321.100		78.268.979	100	99,62		
			Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0		1		1		1		100			
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0		1		1		1		100			
		3.25.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			64.860.000		-		-		32.279.379		32.281.100		64.560.479	100	99,54		
			Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0		1		1		1		100			
		3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			13.708.500		-		-		9.668.500		4.040.000		13.708.500	100	100		
			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0		1		1		1		100			
		3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			226.428.000		57.346.422		34.803.820		40.466.898		66.418.402		199.035.542	27,33	87,9		
			Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	13		0		2		0		2		4		30,77			
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1		1		1		1		1		1		100			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	17		0		0		0		1		1		5,88			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	80		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	80		0		0		0		0		0		0			
		3.25.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			45.200.000		-		25.196.000		-		20.000.000		45.196.000	30,77	99,99		
			Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	13		0		2		0		2		4		30,77			
		3.25.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			146.942.000		57.346.422		9.607.820		40.466.898		39.518.402		146.939.542	100	100		
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1		1		1		1		1		1		100			
		3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			34.286.000		-		-		-		6.900.000		6.900.000	5,88	20,12		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	17		0		0		0		1		1		5,88			
		3.25.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	80		0		0		0		0		0		0			
		3.25.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	80		0		0		0		0		0		0			
		3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.680.079.757		122.273.100		378.575.525		723.774.650		1.249.216.726		2.473.840.001	16,5	92,3		
			Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	19		2		2		2		2		2		10,53			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	23		4		4		4		4		4		17,39			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	9		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	29		2		2		2		2		2		6,9			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	23		0		2		2		2		2		8,7			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2		0		1		1		1		1		50			
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	63		0		1		1		1		1		1,59			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	89		3		3		3		3		3		3,37			
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2		0		0		0		1		1		50			
		3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			88.895.986		8.916.850		14.735.600		15.267.700		49.357.100		88.277.250	10,53	99,3		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	19		2		2		2		2		2		10,53			
		3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			774.028.988		14.747.000		126.185.304		336.598.398		293.709.343		771.240.045	17,39	99,64		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	23		4		4		4		4		4		17,39			
		3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			10.999.000		876.400		1.799.900		6.429.700		1.006.400		10.112.400	0	91,94		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	9		0		0		0		0		0		0			
		3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			219.213.720		41.478.250		40.896.324		43.842.800		91.290.450		217.507.824	6,9	99,22		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	29		2		2		2		2		2		6,9			
		3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			137.158.063		-		28.762.500		19.291.500		68.320.900		116.374.900	8,7	84,85		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	23		0		2		2		2		2		8,7			
		3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			45.000.000		-		10.580.000		7.470.000		11.180.000		29.230.000	50	64,96		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2		0		1		1		1		1		50			
		3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			99.550.000		-		23.075.089		15.193.970		47.818.635		86.087.694	1,59	86,48		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	63		0		1		1		1		1		1,59			
		3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			990.612.000		56.254.600		132.540.808		279.680.582		404.915.374		873.391.364	3,37	88,17		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	89		3		3		3		3		3		3,37			
		3.25.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			314.622.000		-		-		-		281.618.524		281.618.524	50	89,51		
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2		0		0		0		1		1		50			
		3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.642.823.244		-		29.300.000		227.755.620		915.152.419		1.172.208.039	35,98	71,35		
			Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	12		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	18		0		0		1		1		1		5,56			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	77		0		0		0		10		10		12,99			
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		1		1		2		200			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	23		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		0		0		1		0		1		33,33			
		3.25.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
		3.25.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			100.617.500		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	12		0		0		0		0		0		0			
		3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel			71.727.480		-		-		44.075.000		27.588.000		71.663.000	5,56	99,91		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	18		0		0		1		1		1		5,56			
		3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.225.380.264		-		29.300.000		124.692.620		877.484.419		1.031.477.039	12,99	84,18		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	77		0		0		0		10		10		12,99			
		3.25.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			195.160.000		-		-		10.080.000		10.080.000		20.160.000	200	10,33		
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		1		1		2		200			
		3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	23		0		0		0		0		0		0			
		3.25.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			49.938.000		-		-		48.908.000		-		48.908.000	33,33	97,94		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		0		0		1		0		1		33,33			
		3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.517.478.604		458.888.163		574.220.029		461.464.465		1.864.920.498		3.359.493.155	0,37	95,51		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terselenggaranya Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	42		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	204		2		2		2		2		2		0,98			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	13		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	204		1		1		1		1		1		0,49			
		3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			18.200.000		870.000		2.000.000		2.327.000		5.665.000		10.862.000	0	59,68		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	42		0		0		0		0		0		0			
		3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.031.077.180		135.883.308		231.677.468		187.087.465		333.103.098		887.751.339	0,98	86,1		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	204		2		2		2		2		2		0,98			
		3.25.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	13		0		0		0		0		0		0			
		3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.468.201.424		322.134.855		340.542.561		272.050.000		1.526.152.400		2.460.879.816	0,49	99,7		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	204		1		1		1		1		1		0,49			
		3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.595.442.650		515.329.064		1.315.015.255		1.216.651.881		3.811.615.119		6.858.611.319	21,21	90,3		
			Terselenggaranya Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	115		49		49		49		49		49		42,61			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	95		5		5		5		5		20		21,05			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	23		1		1		1		1		4		17,39			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		0		0		0		1		1		25			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		0		0		0		0		0		0			
		3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			5.928.720.784		508.181.064		923.418.652		1.005.569.586		3.057.993.343		5.495.162.645	42,61	92,69		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	115		49		49		49		49		49		42,61			
		3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			192.522.576		5.360.000		20.982.000		32.477.500		85.216.843		144.036.343	21,05	74,82		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	95		5		5		5		5		20		21,05			
		3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1.471.199.290		1.788.000		370.614.603		178.604.795		665.404.933		1.216.412.331	17,39	82,68		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	23		1		1		1		1		4		17,39			
		3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-		-		-		3.000.000		3.000.000	25	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		0		0		0		1		1		25			
		3.25.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			3.000.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		0		0		0		0		0		0			
		3.25.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**			**633.090.500**		**23.749.909**		**27.508.040**		**72.597.320**		**449.890.945**		573.746.214	**11,11**	**90,63**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
			Terwujudnya pengelolaan pulau-pulau kecil dan pesisir yang berkelanjutan	Luasan Kawasan Konservasi (Ha) (Ha)													0			
				Luas Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dikelola ()													0			
		3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi			320.009.600		5.230.000		25.558.040		40.665.320		246.695.200		318.148.560	0	99,42		
			Pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil semakin tertata dengan baik sesuai dengan peruntukannya	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)	1986166.294		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (Orang)	20		0		0		0		0		0		0			
				Dokumen Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K yang terintegrasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat			116.160.000		2.280.000		3.780.000		29.920.000		79.615.000		115.595.000	0	99,51		
			Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)	1986166.294		0		0		0		0		0		0			
		3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			3.850.000		2.950.000		-		-		900.000		3.850.000	0	100		
			Terlaksananya Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (Orang)	20		0		0		0		0		0		0			
		3.25.02.1.01.0013	Pengintegrasian Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi			199.999.600		-		21.778.040		10.745.320		166.180.200		198.703.560	0	99,35		
			Terintegrasinya Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	Dokumen Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K yang terintegrasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terselenggaranya Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut	Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan (Rekomendasi)	10		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah database perizinan Berusaha yang dicatat atau didokumentasikan (Dokumen)	34		0		0		0		0		0		0			
		3.25.02.1.02.0004	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan (Rekomendasi)	10		0		0		0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		3.25.02.1.02.0006	Pencatatan dan Pengadministrasian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber daya Pesisir dan Laut sebagai database perizinan berusaha			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tercatat/terdokumentasikanny a Perizinan Berusaha yang terbit sebagai database perizinan berusaha	Jumlah database perizinan Berusaha yang dicatat atau didokumentasikan (Dokumen)	34		0		0		0		0		0		0			
		3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			313.080.900		18.519.909		1.950.000		31.932.000		203.195.745		255.597.654	25	81,64		
			Meningkatnya jumlah masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberdayakan	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	245		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kelompok)	40		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang)	125		0		0		0		125		125		100			
				Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	22		0		0		0		0		0		0			
		3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			78.030.900		-		-		28.082.000		48.083.813		76.165.813	0	97,61		
			Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	245		0		0		0		0		0		0			
		3.25.02.1.03.0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			18.950.000		-		-		3.850.000		15.100.000		18.950.000	0	100		
			Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kelompok)	40		0		0		0		0		0		0			
		3.25.02.1.03.0003	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			12.200.000		-		-		-		11.710.000		11.710.000	100	95,98		
			Terlibatnya Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang)	125		0		0		0		125		125		100			
		3.25.02.1.03.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan			203.900.000		18.519.909		1.950.000		-		128.301.932		148.771.841	0	72,96		
			Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	22		0		0		0		0		0		0			
		3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**			**13.987.333.000**		**16.900.000**		**1.348.488.114**		**2.847.842.825**		**7.174.533.920**		11.387.764.859	**28,87**	**81,41**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)													0			
		3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil			13.730.249.200		7.260.000		1.325.178.114		2.834.522.825		7.003.544.120		11.170.505.059	44,35	81,36		
			Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Tangkap di Maluku	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Dokumen)	63		1		1		1		1		1		1,59			
				Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Unit)	287		0		0		0		250		250		87,11			
		3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan			134.020.000		7.260.000		12.170.000		31.460.000		72.730.000		123.620.000	1,59	92,24		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Dokumen)	63		1		1		1		1		1		1,59			
		3.25.03.1.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap			13.596.229.200		-		1.313.008.114		2.803.062.825		6.930.814.120		11.046.885.059	87,11	81,25		
			Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Unit)	287		0		0		0		250		250		87,11			
		3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT			26.450.000		-		-		-		-		-	0	0		
				Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil (Persentase)	100		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang tersedia (Dokumen)	55		0		0		0		0		0		0			
		3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil			5.650.000		-		-		-		-		-	0	0		
		Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT	30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil (Persentase)	100		0		0		0		0		0		0			
		3.25.03.1.03.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil			20.800.000		-		-		-		-		-	0	0		
		Tersedianya Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT	30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang tersedia (Dokumen)	55		0		0		0		0		0		0			
		3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			-		-		-		-		-		-	0	0		
				Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan (Dokumen)	20		0		0		0		0		0		0			
		3.25.03.1.05.0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Diterbitkannya Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan (Dokumen)	20		0		0		0		0		0		0			
		3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi			206.823.800		4.140.000		16.560.000		12.420.000		170.989.800		204.109.800	100	98,69		
			Terselenggaranya pelayanan dan operasional pelabuhan perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana (Layanan)	2		0		0		0		2		2		100			
		3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan			206.823.800		4.140.000		16.560.000		12.420.000		170.989.800		204.109.800	100	98,69		
			Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana (Layanan)	2		0		0		0		2		2		100			
		3.25.03.1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT			11.450.000		5.500.000		6.750.000		900.000		-		13.150.000	50	114,85		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terselenggaranya Pelayanan Pendaftaran Kapal Perikanan	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Provinsi (Dokumen)	51		0		0		51		0		51		100			
				Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan (Rekomendasi)	26		0		0		0		0		0		0			
		3.25.03.1.09.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT			5.950.000		-		6.750.000		900.000		-		7.650.000	100	128,57		
			Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Provinsi (Dokumen)	51		0		0		51		0		51		100			
		3.25.03.1.09.0003	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)			5.500.000		5.500.000		-		-		-		5.500.000	0	100		
			Diterbitkannya Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan (Rekomendasi)	26		0		0		0		0		0		0			
		3.25.03.1.10	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			12.360.000		-		-		-		-		-	0	0		
				Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi Kewenangan Provinsi (Dokumen)	4		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan (Rekomendasi)	100		0		0		0		0		0		0			
		3.25.03.1.10.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT			12.360.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi Kewenangan Provinsi (Dokumen)	4		0		0		0		0		0		0			
		3.25.03.1.10.0003	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Diterbitkannya Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan (Rekomendasi)	100		0		0		0		0		0		0			
		3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**			**2.992.672.000**		**52.029.760**		**86.168.000**		**216.316.800**		**1.703.015.837**		2.057.530.397	**34,57**	**68,75**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)													0			
		3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			254.900.000		34.219.760		6.240.000		18.910.000		173.775.890		233.145.650	23,62	91,47		
			Terselenggaranya Pelayanan Perizinan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan (Rekomendasi)	44		0		0		0		20		20		45,45			
				Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko (Dokumen)	56		0		0		0		1		1		1,79			
		3.25.04.1.01.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan			203.850.000		28.639.760		900.000		2.950.000		149.605.890		182.095.650	45,45	89,33		
			Diterbitkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan (Rekomendasi)	44		0		0		0		20		20		45,45			
		3.25.04.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan			51.050.000		5.580.000		5.340.000		15.960.000		24.170.000		51.050.000	1,79	100		
			Tersedianya Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko (Dokumen)	56		0		0		0		1		1		1,79			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		3.25.04.1.04	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Meningkatnya Pelayanan Penerbitan TDPIK	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudi Daya Ikan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Rekomendasi)	10		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Rekomendasi)	5		0		0		0		0		0		0			
		3.25.04.1.04.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Diterbitkannya Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudi Daya Ikan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudi Daya Ikan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Rekomendasi)	10		0		0		0		0		0		0			
		3.25.04.1.04.0002	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Rekomendasi)	5		0		0		0		0		0		0			
		3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut			2.737.772.000		17.810.000		79.928.000		197.406.800		1.529.239.947		1.824.384.747	52,79	66,64		
			Meningkatnya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut (Unit)	61		0		0		0		100		100		163,93			
				Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut (Unit)	43		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Pembudidaya (Orang)	87		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia (Unit)	13		0		0		0		13		13		100			
		3.25.04.1.05.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			15.810.000		-		3.780.000		-		11.731.600		15.511.600	0	98,11		
			Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		0		0		0		0		0		0			
		3.25.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut			2.205.285.000		-		-		57.590.000		1.236.961.147		1.294.551.147	163,93	58,7		
			Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut (Unit)	61		0		0		0		100		100		163,93			
		3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut			426.547.000		14.550.000		64.578.000		94.106.800		250.957.200		424.192.000	0	99,45		
			Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut (Unit)	43		0		0		0		0		0		0			
		3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi			66.540.000		3.260.000		2.420.000		41.140.000		19.720.000		66.540.000	0	100		
			Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya (Orang)	87		0		0		0		0		0		0			
		3.25.04.1.05.0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			23.590.000		-		9.150.000		4.570.000		9.870.000		23.590.000	100	100		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan dan Ikan	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia (Unit)	13		0		0		0		13		13		100			
		3.25.05	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**			**839.038.000**		**24.439.393**		**68.259.000**		**99.820.710**		**411.932.000**		604.451.103	**24,63**	**72,04**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
			Meningkatnya Tingkat kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturaan perundang-undangan	Tingkat kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturaan perundang-undangan (%)													0			
		3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil			780.433.000		24.439.393		63.699.000		93.500.710		366.387.000		548.026.103	11,94	70,22		
			Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap, Budidaya dan Ruang Laut	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi (Pelaku Usaha)	35		0		0		0		1		1		2,86			
				Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi (Pelaku Usaha)	59		0		0		0		10		10		16,95			
				Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi (Pelaku Usaha)	78		0		0		0		10		10		12,82			
				Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan (Kelompok Masyarakat)	33		0		0		0		5		5		15,15			
		3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi			1.800.000		-		-		900.000		900.000		1.800.000	2,86	100		
			Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi (Pelaku Usaha)	35		0		0		0		1		1		2,86			
		3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi			142.420.000		4.680.000		30.869.000		16.380.000		78.050.000		129.979.000	16,95	91,26		
			Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi (Pelaku Usaha)	59		0		0		0		10		10		16,95			
		3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi			317.371.000		19.159.393		11.950.000		53.620.710		201.037.400		285.767.503	12,82	90,04		
			Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi (Pelaku Usaha)	78		0		0		0		10		10		12,82			
		3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)			318.842.000		600.000		20.880.000		22.600.000		86.399.600		130.479.600	15,15	40,92		
			Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan (Kelompok Masyarakat)	33		0		0		0		5		5		15,15			
		3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			58.605.000		-		4.560.000		6.320.000		45.545.000		56.425.000	50	96,28		
			Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi (Pelaku Usaha)	46		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi (Pelaku Usaha)	30		0		0		0		30		30		100			
		3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi			29.600.000		-		4.560.000		6.320.000		17.740.000		28.620.000	0	96,69		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi (Pelaku Usaha)	46		0		0		0		0		0		0			
		3.25.05.1.02.0005	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi			29.005.000		-		-		-		27.805.000		27.805.000	100	95,86		
			Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi (Pelaku Usaha)	30		0		0		0		30		30		100			
		3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**			**2.830.430.000**		**14.853.200**		**86.740.120**		**118.118.101**		**1.338.028.333**		1.557.739.754	**50,66**	**55,04**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Angka)													0			
		3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			61.010.000		2.190.000		4.200.000		15.410.000		39.210.000		61.010.000	50,86	100		
			Terselenggaranya Pelaylanan Perizinan Usaha Pemasaranan dan Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)	58		0		0		0		1		1		1,72			
				Penetapan Persyaratan dan Prosedur Perizinan Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang diterbitkan (Dokumen)	5		0		0		0		5		5		100			
		3.25.06.1.01.0004	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			57.010.000		2.190.000		4.200.000		15.410.000		35.210.000		57.010.000	1,72	100		
			Tersedianya Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)	58		0		0		0		1		1		1,72			
		3.25.06.1.01.0006	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Menengah dan Besar dengan Penanaman Modal Dalam Negeri			4.000.000		-		-		-		4.000.000		4.000.000	100	100		
			Terlaksananya penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Menengah dan Besar dengan Penanaman Modal Dalam Negeri	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Perizinan Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang diterbitkan (Dokumen)	5		0		0		0		5		5		100			
		3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			690.368.000		12.663.200		69.720.000		102.708.101		469.347.351		654.438.652	51,11	94,8		
			Meningkatnya mutu dan keamanan hasil perikanan, produk olahan hasil perikanan dan pemasaran	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing (Kegiatan)	45		0		0		0		1		1		2,22			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko (Kegiatan)	63		0		0		0		63		63		100			
		3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing			678.008.000		12.663.200		69.720.000		101.508.101		458.187.351		642.078.652	2,22	94,7		
			Terlaksananya Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing (Kegiatan)	45		0		0		0		1		1		2,22			
		3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			12.360.000		-		-		1.200.000		11.160.000		12.360.000	100	100		
			Terlaksananya Pembinaan Terhadap Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko (Kegiatan)	63		0		0		0		63		63		100			
		3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			2.079.052.000		-		12.820.120		-		829.470.982		842.291.102	50	40,51		
			Meningkatnya pengolahan perikanan dan pemasaran di Maluku	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi (Unit Usaha)	50		0		0		0		0		0		0			
				Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan yang terkoneksi dari hulu sampai hilir (Sistem Informasi)	1		0		0		0		1		1		100			
		3.25.06.1.03.0002	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			1.892.500.000		-		-		-		658.232.775		658.232.775	0	34,78		
			Diberikannya Insentif dan Fasilitasi bagi Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi (Unit Usaha)	50		0		0		0		0		0		0			
		3.25.06.1.03.0005	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dari hulu sampai hilir			186.552.000		-		12.820.120		-		171.238.207		184.058.327	100	98,66		
			Terkoneksinya Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dari hulu sampai hilir	Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan yang terkoneksi dari hulu sampai hilir (Sistem Informasi)	1		0		0		0		1		1		100			
		3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**			**10.751.770.006**		**1.660.752.592**		**2.906.020.116**		**2.719.209.602**		**2.644.047.446**		9.930.029.756	**79,25**	**92,36**		
		3.26.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**8.483.783.280**		**1.660.752.592**		**1.911.056.114**		**2.414.836.260**		**2.122.723.760**		8.109.368.726	**67,08**	**95,59**	DINAS PARIWISATA	
			Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Presentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Umum, Perencanaan Dan Keuangan (%)	100		0		0		0		100		100		100			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)									100		100		0			
		3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			137.386.900		-		-		60.585.000		56.925.400		117.510.400	59,09	85,53		
			Tersedianya dokumen perencanaan, evaluasi, dan pelaporan yang sesuai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2		0		0		0		1		1		50			
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2		0		0		0		1		1		50			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	11		0		0		1		3		4		36,36			
		3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			46.970.000		-		-		44.770.000		-		44.770.000	100	95,32		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
		3.26.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			1.850.000		-		-		-		1.850.000		1.850.000	50	100		
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2		0		0		0		1		1		50			
		3.26.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			2.750.000		-		-		250.000		2.500.000		2.750.000	50	100		
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2		0		0		0		1		1		50			
		3.26.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			85.816.900		-		-		15.565.000		52.575.400		68.140.400	36,36	79,4		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	11		0		0		1		3		4		36,36			
		3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.959.468.415		1.096.386.988		1.116.836.297		1.608.930.153		1.007.088.159		4.829.241.597	45,98	97,37		
			Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	56		0		0		0		47		47		83,93			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.887.228.415		1.096.386.988		1.116.836.297		1.575.310.153		970.968.159		4.759.501.597	83,93	97,39		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	56		0		0		0		47		47		83,93			
		3.26.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			72.240.000		-		-		33.620.000		36.120.000		69.740.000	100	96,54		
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		3.26.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		3.26.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			-		-		-		-		-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		3.26.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Meningkatnya pegawai yang mengikuti pelatihan dan bimtek	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	55		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	55		0		0		0		0		0		0			
		3.26.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	55		0		0		0		0		0		0			
		3.26.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	55		0		0		0		0		0		0			
		3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			364.403.789		-		51.527.850		82.903.980		180.397.024		314.828.854	100,89	86,4		
			Meningkatnya pelayanan dukungan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		0		0		2		0		2		100			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		0		0		5		5		100			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3		0		1		1		1		3		100			
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	16		0		0		0		17		17		106,25			
		3.26.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			7.500.000		-		-		7.500.000		-		7.500.000	100	100		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		0		0		2		0		2		100			
		3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			19.000.000		-		3.350.000		3.330.000		8.475.000		15.155.000	100	79,76		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
		3.26.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			13.970.000		-		-		6.956.510		6.608.500		13.565.010	100	97,1		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
		3.26.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			25.151.379		-		6.793.122		3.560.000		14.582.235		24.935.357	100	99,14		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		0		0		5		5		100			
		3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			19.843.090		-		6.530.000		7.005.000		6.275.000		19.810.000	100	99,83		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3		0		1		1		1		3		100			
		3.26.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			14.458.320		-		466.000		3.850.000		8.710.000		13.026.000	100	90,09		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			264.481.000		-		34.388.728		50.702.470		135.746.289		220.837.487	106,25	83,5		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	16		0		0		0		17		17		106,25			
		3.26.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			15.000.000		-		-		-		15.000.000		15.000.000	100	100		
			Meningkatnya pelayanan dukungan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
		3.26.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel			15.000.000		-		-		-		15.000.000		15.000.000	100	100		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
		3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.499.410.196		564.365.604		652.012.315		503.344.711		721.715.888		2.441.438.518	100	97,68		
			Meningkatnya kinerja pengadaan barang dan jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2		0		0		0		2		2		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			154.832.796		-		72.794.995		34.493.716		37.514.867		144.803.578	100	93,52		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2		0		0		0		2		2		100			
		3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.344.577.400		564.365.604		579.217.320		468.850.995		684.201.021		2.296.634.940	100	97,96		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			508.113.980		-		90.679.652		159.072.416		141.597.289		391.349.357	45,83	77,02		
			Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang terawat dengan baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	24		0		0		0		20		20		83,33			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
		3.26.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			53.119.000		-		17.548.674		27.637.575		5.830.000		51.016.249	100	96,04		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		0		0		0		1		1		100			
		3.26.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			349.994.980		-		73.130.978		131.434.841		135.767.289		340.333.108	83,33	97,24		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	24		0		0		0		20		20		83,33			
		3.26.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			25.000.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15		0		0		0		0		0		0			
		3.26.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			80.000.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**			**1.565.289.644**		**-**		**761.098.700**		**41.298.680**		**345.068.944**		1.147.466.324	**85,71**	**73,31**	DINAS PARIWISATA	
			Meningkatnya daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi pariwisata yang dikelola, ditata, dan dikembangkan (Destinasi)													0			
				Lama Tinggal Wisatawan (hari)	4								4		4		100			
		3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi			1.487.289.644		-		761.098.700		41.298.680		345.068.944		1.147.466.324	300	77,15		
			Tersedianya sarana prasarana penunjang daya tarik wisata provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi (Lokasi)	3		0		0		0		3		3		100			
				Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi (Laporan)	1		0		0		0		5		5		500			
		3.26.02.1.01.0005	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi			1.437.200.644		-		748.066.700		16.400.000		339.647.944		1.104.114.644	100	76,82		
			Terlaksananya Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi (Lokasi)	3		0		0		0		3		3		100			
		3.26.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi			50.089.000		-		13.032.000		24.898.680		5.421.000		43.351.680	500	86,55		
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi (Laporan)	1		0		0		0		5		5		500			
		3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi			78.000.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya sarana dan prasarana penunjang destinasi pariwisata pariwisata provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	3		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan (Orang)	60		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Kegiatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata (Kegiatan)	1		0		0		0		0		0		0			
		3.26.02.1.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi			78.000.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	3		0		0		0		0		0		0			
		3.26.02.1.03.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan (Orang)	60		0		0		0		0		0		0			
		3.26.02.1.03.0011	Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Tata Kelola Destinasi Pariwisata di Tingkat Provinsi	Jumlah Kegiatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata (Kegiatan)	1		0		0		0		0		0		0			
		3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Usaha Pariwisata yang berstandar dan tersertifikasi	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi (Usaha)	60		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi) (Unit Usaha)	60		0		0		0		0		0		0			
		3.26.02.1.04.0006	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi (Usaha)	60		0		0		0		0		0		0			
		3.26.02.1.04.0009	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)			-		-		-		-		-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terfasilitasinya Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menegah Tinggi)	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi) (Unit Usaha)	60		0		0		0		0		0		0			
		3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**			**189.392.900**		**-**		**120.230.340**		**46.263.124**		**18.930.000**		185.423.464	**300**	**97,9**	DINAS PARIWISATA	
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan (%)									1.94		1,94		0			
				Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	429214								410647		410.647		95,67			
		3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi			189.392.900		-		120.230.340		46.263.124		18.930.000		185.423.464	300	97,9		
			Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Dokumen)	1		0		1		1		1		3		300			
				Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	2		0		0		0		10		10		500			
		3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			51.575.000		-		39.595.000		6.060.000		5.920.000		51.575.000	100	100		
			Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		3.26.03.1.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata			31.184.000		-		9.936.000		16.502.000		2.400.000		28.838.000	300	92,48		
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Dokumen)	1		0		1		1		1		3		300			
		3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri			106.633.900		-		70.699.340		23.701.124		10.610.000		105.010.464	500	98,48		
			Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	2		0		0		0		10		10		500			
		3.26.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**			**228.263.382**		**-**		**29.641.382**		**99.059.500**		**85.891.852**		214.592.734	**57,14**	**94,01**	DINAS PARIWISATA	
			Meningkatnya Kualitas Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (%)	5								3.07		3,07		61,4			
				Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)													0			
		3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif			151.565.600		-		26.181.600		42.239.000		79.245.852		147.666.452	50	97,43		
			Terlaksananya kegiatan ekonomi kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar (Laporan)	11		0		0		0		0		0		0			
		3.26.04.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif			151.565.600		-		26.181.600		42.239.000		79.245.852		147.666.452	100	97,43		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		3.26.04.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar			-		-		-		-		-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM dan Produksi dan Pasar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar (Laporan)	11		0		0		0		0		0		0			
		3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifÂ			76.697.782		-		3.459.782		56.820.500		6.646.000		66.926.282	60	87,26		
			Meningkatnya jumlah pelaku ekonomi kreatif yang tersertifikasi	Jumlah Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual (Orang)	20		0		0		0		40		40		200			
				Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
		3.26.04.1.02.0008	Perlindungan Hasil Kreativitas			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlindunginya Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		3.26.04.1.02.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif			5.166.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		3.26.04.1.02.0013	Fasilitasi Kekayaan Intelektual			63.485.782		-		3.459.782		56.820.500		-		60.280.282	200	94,95		
			Terlaksananya kegiatan konsultasi kekayaan intelektual	Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual (Orang)	20		0		0		0		40		40		200			
		3.26.04.1.02.0017	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah			8.046.000		-		-		-		6.646.000		6.646.000	100	82,6		
			Tersedianya Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		3.26.04.1.02.0019	Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
		3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**			**285.040.800**		**-**		**83.993.580**		**117.752.038**		**71.432.890**		273.178.508	**46,67**	**95,84**	DINAS PARIWISATA	
			Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mendapat pelatihan dan sertifikasi (%)													0			
				Peningkatan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif (orang)	158												0			
		3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan			285.040.800		-		83.993.580		117.752.038		71.432.890		273.178.508	62,22	95,84		
			Meningkatnya jumlah pelaku ekonomi kreatif yang tersertifikasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Orang)	30		0		22		0		0		22		73,33			
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang)	1		0		0		0		1		1		100			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Orang (aparatur pemerintah daerah) yang mendapatkan diklat teknis kepariwisataan (Orang)	3		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI (Orang)	20		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		3.26.05.1.01.0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata			65.853.800		-		65.129.800		-		-		65.129.800	73,33	98,9		
			Terfasilitasinya Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Orang)	30		0		22		0		0		22		73,33			
		3.26.05.1.01.0007	Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata			71.759.000		-		18.863.780		45.479.480		6.060.000		70.403.260	100	98,11		
			Terfasilitasinya Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		3.26.05.1.01.0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata			94.532.000		-		-		72.272.558		20.000.000		92.272.558	100	97,61		
			Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang)	1		0		0		0		1		1		100			
		3.26.05.1.01.0015	Diklat Teknis Kepariwisataan Tingkat Lanjutan bagi Pemerintah Daerah			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Meningkatnya kapasitas SDM aparatur pemerintah daerah terkait pengembangan kepariwisataan	Jumlah Orang (aparatur pemerintah daerah) yang mendapatkan diklat teknis kepariwisataan (Orang)	3		0		0		0		0		0		0			
		3.26.05.1.01.0016	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Berkembangkan Kapasitas SDM Pariwisata berdasarkan pada SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI (Orang)	20		0		0		0		0		0		0			
		3.26.05.1.01.0018	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			52.896.000		-		-		-		45.372.890		45.372.890	100	85,78		
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya SDm pelaku ekonomi kreatif yang terlatih dan terseertifikasi	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	35		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang di fasilitasi sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif (Orang)	40		0		0		0		0		0		0			
		3.26.05.1.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	35		0		0		0		0		0		0			
		3.26.05.1.02.0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang di fasilitasi sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif (Orang)	40		0		0		0		0		0		0			
		3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**			**60.704.021.733**		**9.369.818.260**		**9.602.594.541**		**11.370.783.523**		**26.289.867.739**		56.633.064.063	**62,57**	**93,29**		
		3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**43.181.941.848**		**9.059.328.214**		**9.127.923.157**		**9.860.787.504**		**13.166.954.396**		41.214.993.271	**52,01**	**95,44**	DINAS PERTANIAN	

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)													0			
				Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah (%)	100		20.98		21.14		22.84		30.49		95,45		95,45			
		3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			778.825.000		69.995.000		-		273.768.000		411.089.940		754.852.940	43,43	96,92		
			Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		0		0		0		3		3		100			
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2		0		0		0		2		2		100			
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	3		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	25		0		0		0		1		1		4			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			357.132.000		1.315.000		-		172.882.000		182.909.000		357.106.000	100	99,99		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		0		0		0		3		3		100			
		3.27.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			2.000.000		-		-		-		1.350.000		1.350.000	100	67,5		
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2		0		0		0		2		2		100			
		3.27.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			2.000.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	3		0		0		0		0		0		0			
		3.27.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			2.000.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		3.27.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			2.000.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			194.397.000		-		-		54.806.000		128.200.940		183.006.940	4	94,14		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	25		0		0		0		1		1		4			
		3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			219.296.000		68.680.000		-		46.080.000		98.630.000		213.390.000	100	97,31		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			34.095.083.949		7.929.692.717		7.957.536.232		7.598.243.433		9.360.472.502		32.845.944.884	50,09	96,34		
			Jumlah laporan kinerja keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	175		176		0		0		0		44		25,14			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	9		0		0		0		4		4		44,44			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	13		0		0		0		4		4		30,77			
		3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			33.840.163.949		7.929.692.717		7.922.576.232		7.556.663.433		9.202.532.502		32.611.464.884	25,14	96,37		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	175		176		0		0		0		44		25,14			
		3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			30.480.000		-		-		15.240.000		13.760.000		29.000.000	44,44	95,14		
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	9		0		0		0		4		4		44,44			
		3.27.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			140.440.000		-		34.960.000		9.600.000		94.200.000		138.760.000	100	98,8		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			84.000.000		-		-		16.740.000		49.980.000		66.720.000	30,77	79,43		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	13		0		0		0		4		4		30,77			
		3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			89.116.950		-		7.440.000		18.840.000		57.658.000		83.938.000	87,5	94,19		
			Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2		0		0		0		1		1		50			
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		3.27.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			28.729.000		-		-		-		27.689.000		27.689.000	100	96,38		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		3.27.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			20.879.000		-		-		1.200.000		19.529.000		20.729.000	100	99,28		
			Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		3.27.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			8.188.950		-		-		6.600.000		1.200.000		7.800.000	50	95,25		
			Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2		0		0		0		1		1		50			
		3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			31.320.000		-		7.440.000		11.040.000		9.240.000		27.720.000	100	88,51		
			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			295.096.600		61.855.400		-		164.029.120		63.762.600		289.647.120	34,17	98,15		
			Jumlah laporan administrasi kepegawaian pada perangkat daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	6		0		0		0		1		1		16,67			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	5		0		0		0		1		1		20			
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10		0		0		0		0		0		0			
		3.27.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			154.696.600		24.751.100		-		91.976.000		35.574.600		152.301.700	16,67	98,45		
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	6		0		0		0		1		1		16,67			
		3.27.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			88.600.000		37.104.300		-		49.533.120		288.000		86.925.420	20	98,11		
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	5		0		0		0		1		1		20			
		3.27.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			51.800.000		-		-		22.520.000		27.900.000		50.420.000	100	97,34		
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10		0		0		0		0		0		0			
		3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.580.462.486		128.749.260		244.932.791		218.929.709		949.770.617		1.542.382.377	24,21	97,59		
			Jumlah administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	14		0		0		0		1		0,25		1,79			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		0		0		0		1		1		25			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3		1		0		1		1		3		100			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	46		0		0		0		1		1		2,17			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		0		0		0		1		1		5			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2		0		0		0		1		1		50			
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12		0		0		0		1		1		8,33			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	71		0		0		0		1		1		1,41			
		3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			79.456.780		4.977.800		4.928.500		30.589.920		38.816.499		79.312.719	1,79	99,82		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	14		0		0		0		1		0,25		1,79			
		3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			461.225.000		-		225.000		1.479.900		458.046.100		459.751.000	25	99,68		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		0		0		0		1		1		25			
		3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			14.404.780		3.641.280		-		4.742.050		6.011.670		14.395.000	100	99,93		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3		1		0		1		1		3		100			
		3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			215.555.176		37.736.500		23.086.651		27.471.383		113.991.242		202.285.776	2,17	93,84		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	46		0		0		0		1		1		2,17			
		3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			191.601.750		23.215.000		41.530.000		36.441.420		80.668.158		181.854.578	5	94,91		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		0		0		0		1		1		5			
		3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			5.000.000		-		-		1.440.000		3.560.000		5.000.000	50	100		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2		0		0		0		1		1		50			
		3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			34.360.000		5.150.000		-		9.093.964		20.116.036		34.360.000	8,33	100		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12		0		0		0		1		1		8,33			
		3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			578.859.000		54.028.680		175.162.640		107.671.072		228.560.912		565.423.304	1,41	97,68		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	71		0		0		0		1		1		1,41			
		3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.837.190.000		-		-		662.503.500		1.172.972.049		1.835.475.549	42,42	99,91		
			Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	11		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	17		0		0		7		10		17		100			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	11		0		0		2		4		6		54,55			
		3.27.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
		3.27.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			-		-		-		-		-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	11		0		0		0		0		0		0			
		3.27.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel			295.500.000		-		-		-		294.887.484		294.887.484	100	99,79		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
		3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			802.890.000		-		-		377.622.000		424.548.000		802.170.000	100	99,91		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	17		0		0		7		10		17		100			
		3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		0		0		0		0		0		0			
		3.27.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			738.800.000		-		-		284.881.500		453.536.565		738.418.065	54,55	99,95		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	11		0		0		2		4		6		54,55			
		3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.634.047.867		828.696.497		855.852.564		755.047.003		802.898.861		3.242.494.925	79,46	89,23		
			Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	28		0		1		2		2		5		17,86			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	47		7		5		15		20		47		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	8		0		0		3		5		8		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	62		0		0		0		62		62		100			
		3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			21.236.000		1.374.000		2.924.000		7.044.000		9.206.000		20.548.000	17,86	96,76		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	28		0		1		2		2		5		17,86			
		3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			767.908.000		150.987.184		110.693.251		228.737.896		236.682.060		727.100.391	100	94,69		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	47		7		5		15		20		47		100			
		3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			79.565.000		2.500.000		-		28.748.580		46.989.370		78.237.950	100	98,33		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	8		0		0		3		5		8		100			
		3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.765.338.867		673.835.313		742.235.313		490.516.527		510.021.431		2.416.608.584	100	87,39		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	62		0		0		0		62		62		100			
		3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			872.118.996		40.339.340		62.161.570		169.426.739		348.329.827		620.257.476	79,86	71,12		
			Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	4		0		1		1		2		4		100			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20		2		3		6		9		20		100			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	59		5		3		17		34		59		100			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	24		0		0		0		7		7		29,17			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		0		0		1		1		50			
		3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			94.046.100		10.780.500		19.300.648		41.284.200		17.480.350		88.845.698	100	94,47		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	4		0		1		1		2		4		100			
		3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			216.552.600		22.202.090		24.099.922		70.562.864		89.124.272		205.989.148	100	95,12		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20		2		3		6		9		20		100			
		3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			119.020.500		7.356.750		4.961.000		19.940.875		86.751.375		119.010.000	100	99,99		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	59		5		3		17		34		59		100			
		3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			219.218.000		-		12.000.000		37.158.800		132.383.830		181.542.630	29,17	82,81		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	24		0		0		0		7		7		29,17			
		3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			18.656.700		-		-		-		16.950.000		16.950.000	100	90,85		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		1		1		100			
		3.27.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			204.625.096		-		1.800.000		480.000		5.640.000		7.920.000	50	3,87		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		0		0		1		1		50			
		3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**			**11.749.037.089**		**240.299.046**		**352.208.906**		**764.503.019**		**8.428.810.999**		9.785.821.970	**81,03**	**83,29**	DINAS PERTANIAN	
			Petani memperoleh hasil dan nilai jual yang lebih baik	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Angka)													0			
				Volume Ekspor (%)	100		2.05		3		6.51		71.74		83,3		83,3			
				Peningkatan Produksi Hortikultura (Angka)													0			
				Nilai Tukar Petani (%)	102,5												0			
				Peningkatan Produksi Perkebunan (Angka)													0			
				Produksi Komoditas Pertanian (Ton)	531081,71												0			
				Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Angka)													0			
		3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian			757.419.000		450.000		40.230.000		79.101.000		606.886.913		726.667.913	100	95,94		
			Jumlah laporan peredaran sarana pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	2		0		0		0		2		2		100			
		3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian			757.419.000		450.000		40.230.000		79.101.000		606.886.913		726.667.913	100	95,94		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terawasinya Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	2		0		0		0		2		2		100			
		3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman			8.058.446.200		148.762.145		199.622.425		459.239.452		5.360.953.876		6.168.577.898	14,61	76,55		
			Jumlah laporan pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman	Jumlah Sertifikat Benih (Sertifikat)	103		0		0		0		3		3		2,91			
				Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (laporan)	19		0		0		0		5		5		26,32			
		3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih			197.709.000		16.024.620		-		55.001.027		121.350.863		192.376.510	2,91	97,3		
			Terkelolanya Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih (Sertifikat)	103		0		0		0		3		3		2,91			
		3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan			7.860.737.200		132.737.525		199.622.425		404.238.425		5.239.603.013		5.976.201.388	26,32	76,03		
			Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (laporan)	19		0		0		0		5		5		26,32			
		3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi			65.835.700		7.193.420		-		11.892.500		44.693.200		63.779.120	100	96,88		
			Jumlah Sumber Daya Genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikroorganisme kewenangan provinsi yang terkelola	Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai (Varietas Unggul Baru (VUB))	425		0		0		0		425		425		100			
				Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		3.27.02.1.03.0002	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme			20.645.000		7.193.420		-		1.522.500		11.372.500		20.088.420	100	97,3		
			Terlaksananya Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai (Varietas Unggul Baru (VUB))	425		0		0		0		425		425		100			
		3.27.02.1.03.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme			45.190.700		-		-		10.370.000		33.320.700		43.690.700	100	96,68		
			Terlaksananya Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi			2.263.090.400		45.438.000		89.658.000		141.597.000		1.952.291.160		2.228.984.160	100	98,49		
			Jumlah laporan ketersediaan dan mutu benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak, bahan pakan serta pakan kewenangan provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (laporan)	4		0		0		0		4		4		100			
		3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi			2.263.090.400		45.438.000		89.658.000		141.597.000		1.952.291.160		2.228.984.160	100	98,49		
			Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (laporan)	4		0		0		0		4		4		100			
		3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi			199.442.289		13.497.481		12.258.481		26.247.567		142.276.850		194.280.379	100	97,41		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan serta penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan kewenangan provinsi	Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
				Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi (laporan)	2		0		0		0		2		2		100			
		3.27.02.1.05.0003	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak			36.398.000		4.899.000		-		12.544.740		17.690.500		35.134.240	100	96,53		
			Terawasinya Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
		3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak			163.044.289		8.598.481		12.258.481		13.702.827		124.586.350		159.146.139	100	97,61		
			Terkendalinya penyediaan dan produksi benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi (laporan)	2		0		0		0		2		2		100			
		3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain			404.803.500		24.958.000		10.440.000		46.425.500		321.709.000		403.532.500	100	99,69		
			Jumlah laporan persediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain (Ekor)	300		0		0		0		300		300		100			
		3.27.02.1.07.0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain			404.803.500		24.958.000		10.440.000		46.425.500		321.709.000		403.532.500	100	99,69		
			Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain (Ekor)	300		0		0		0		300		300		100			
		3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**			**4.348.206.096**		**53.391.000**		**43.756.000**		**189.493.000**		**3.937.764.544**		4.224.404.544	**76**	**97,15**	DINAS PERTANIAN	
			Petani memperoleh hasil dan nilai jual yang lebih baik	Produksi Komoditas Pertanian ()													0			
				Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)			1.23		1.01		4.36		90.56		97,16		0			
		3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian			4.348.206.096		53.391.000		43.756.000		189.493.000		3.937.764.544		4.224.404.544	76	97,15		
			Jumlah laporan penataan prasarana pertanian	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani (Dokumen)	5		0		0		0		5		5		100			
				Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi (Unit)	5		0		0		2		2		4		80			
				Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan, dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet (Unit)	2		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3		0		0		0		3		3		100			
				Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	5		0		0		0		5		5		100			
		3.27.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani			1.613.233.096		27.000.000		16.261.000		100.033.000		1.466.686.350		1.609.980.350	100	99,8		
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani (Dokumen)	5		0		0		0		5		5		100			
		3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya			51.743.000		-		-		21.600.000		25.586.146		47.186.146	80	91,19		
			Terbangun, Terehabilitasi, dan Terpeliharanya Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi (Unit)	5		0		0		2		2		4		80			
		3.27.03.1.01.0012	Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet			-		-		-		-		-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terbangun, terehabilitasi, terpelihara, dan Terselenggaranya Laboratorium Keswan dan Kesmavet	Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan, dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet (Unit)	2		0		0		0		0		0		0			
		3.27.03.1.01.0017	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan			79.484.000		11.870.000		-		15.080.000		51.854.000		78.804.000	100	99,14		
			Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Perkebunan	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3		0		0		0		3		3		100			
		3.27.03.1.01.0023	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan			2.603.746.000		14.521.000		27.495.000		52.780.000		2.393.638.048		2.488.434.048	100	95,57		
			Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	5		0		0		0		5		5		100			
		3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**			**237.119.000**		**-**		**77.760.000**		**74.620.000**		**83.616.000**		235.996.000	**80**	**99,53**	DINAS PERTANIAN	
			Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (%)													0			
				Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (%)													0			
				Terkendalinya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (%)	100		0		32.79		31.47		35.26		99,52		99,52			
		3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			79.500.000		-		-		39.419.000		39.890.000		79.309.000	50	99,76		
			Jumlah kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		3.27.04.1.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tertanggulanginya Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		3.27.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			79.500.000		-		-		39.419.000		39.890.000		79.309.000	100	99,76		
			Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi			131.119.000		-		77.760.000		29.770.000		23.138.000		130.668.000	100	99,66		
			Jumlah laporan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan lintas daerah provinsi	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM (Laporan)	2		0		0		1		1		2		100			
				Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		3.27.04.1.02.0004	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM			104.619.000		-		77.760.000		21.809.000		5.050.000		104.619.000	100	100		
			Terawasi dan terperiksanya kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM (Laporan)	2		0		0		1		1		2		100			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		3.27.04.1.02.0007	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)			26.500.000		-		-		7.961.000		18.088.000		26.049.000	100	98,3		
			Terawasinya penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan			26.500.000		-		-		5.431.000		20.588.000		26.019.000	100	98,18		
			Jumlah laporan penerapan persyaratan teknis sertifikati zona/kompartemen bebas penyakit dan usaha produk hewan	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		3.27.04.1.03.0002	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan			26.500.000		-		-		5.431.000		20.588.000		26.019.000	100	98,18		
			Terbinanya Unit Usaha Produk Hewan Dalam Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**			**229.830.000**		**15.380.000**		**-**		**87.840.000**		**126.560.000**		229.780.000	**0,1**	**99,98**	DINAS PERTANIAN	
			Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian														0,1			
		3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi			229.830.000		15.380.000		-		87.840.000		126.560.000		229.780.000	0,1	99,98		
			Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang dapat Dikendalikan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	5000		0		0		0		5		5		0,1			
		3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			229.830.000		15.380.000		-		87.840.000		126.560.000		229.780.000	0,1	99,98		
			Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	5000		0		0		0		5		5		0,1			
		3.27.06	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**			**45.486.000**		**-**		**-**		**29.480.000**		**13.830.000**		43.310.000	**87,5**	**95,22**	DINAS PERTANIAN	
			Meningkatnya Kualitas dan Kemudahan Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi (Angka)													0			
				Terlaksananya Perizinan Usaha Pertanian (%)	100		0		0		64.81		30.4		95,21		95,21			
		3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			45.486.000		-		-		29.480.000		13.830.000		43.310.000	87,5	95,22		
			Menerbitkan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	4		0		0		1		3		3		75			
		3.27.06.1.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota			22.660.000		-		-		21.400.000		-		21.400.000	100	94,44		
			Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
		3.27.06.1.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian			22.826.000		-		-		8.080.000		13.830.000		21.910.000	75	95,99		
			Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	4		0		0		1		3		3		75			
		3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**			**912.401.700**		**1.420.000**		**946.478**		**364.060.000**		**532.331.800**		898.758.278	**99,19**	**98,5**	DINAS PERTANIAN	
			Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani (%)	97		0.16		0.1		39.9		58.34		58,34		60,14			
		3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian			489.268.700		1.420.000		946.478		146.276.000		329.289.800		477.932.278	98,39	97,68		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Jumlah ketenagaan penyuluhan pertanian yang dikembangkan	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	31		0		0		15		15		30		96,77			
				Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	143		0		0		0		143		143		100			
		3.27.07.1.01.0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian			140.085.000		-		-		68.853.000		70.631.000		139.484.000	96,77	99,57		
			Terlaksananya peningkatan kapasitas dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	31		0		0		15		15		30		96,77			
		3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian			349.183.700		1.420.000		946.478		77.423.000		258.658.800		338.448.278	100	96,93		
			Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	143		0		0		0		143		143		100			
		3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian			423.133.000		-		-		217.784.000		203.042.000		420.826.000	100	99,45		
			Jumlah laporan pengembangan penyerapan penyuluh pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian (Dokumen)	2		0		0		1		1		2		100			
				Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok)	24		0		0		2		22		24		100			
		3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian			200.000.000		-		-		95.597.000		104.083.000		199.680.000	100	99,84		
			Termanfaatkannya Teknologi Inovasi Pertanian yang Didesiminasikan oleh Penyuluh Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian (Dokumen)	2		0		0		1		1		2		100			
		3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani			223.133.000		-		-		122.187.000		98.959.000		221.146.000	100	99,11		
			Terlaksananya Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok)	24		0		0		2		22		24		100			
		3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**			**55.149.103.311**		**7.264.021.761**		**10.334.343.811**		**11.777.098.172**		**21.793.742.630**		51.169.206.374	**75,97**	**92,78**		
		3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**38.720.468.496**		**7.264.021.761**		**9.629.518.872**		**8.511.680.204**		**11.457.204.736**		36.862.425.573	**56,8**	**95,2**	DINAS KEHUTANAN	
			Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Jumlah bahan administrasi umum yang dikelola (Paket)	5		1		1		1		1		1		20			
				Terlaksananya Penatausahaan & Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1		0		0		1		1		1		100			
				Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan yang dikelola (Unit)	2								1		1		50			
				Indeks Reformasi Birokrasi (Point (Kriteria))	80												0			
				Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)									100		100		0			
				Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Kedinasan (Laporan)	3		1		1		1		1		1		33,33			
				Jumlah barang milik daerah penunjang urusan yang dipelihara (Unit)	8				33		33		33		33		412,5			
		3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			105.760.800		-		1.460.000		18.934.000		78.932.950		99.326.950	100	93,92		
			Tersedianyan Dokumen Perencanaan yang terstruktur dan bersinergi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6		0		2		0		4		6		100			
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		1		1		1		100			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		1		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		1		1		1		100			
		3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			72.625.800		-		1.460.000		-		64.731.950		66.191.950	100	91,14		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6		0		2		0		4		6		100			
		3.28.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			11.784.000		-		-		10.309.000		1.475.000		11.784.000	100	100		
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		1		1		1		100			
		3.28.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			11.212.000		-		-		1.974.000		9.238.000		11.212.000	100	100		
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		1		1		1		100			
		3.28.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			10.139.000		-		-		6.651.000		3.488.000		10.139.000	100	100		
			Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		1		1		1		100			
		3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			33.994.179.198		7.116.921.598		9.042.963.806		7.291.347.042		9.475.661.589		32.926.894.035	68,1	96,86		
			Tersedianya biaya gaji dan tunjangan ASN, PPPK, dalam 1 Tahun	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	331		3		334		334		334		334		100,91			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	34		0		0		12		12		12		35,29			
		3.28.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			33.337.299.198		7.116.921.598		9.036.913.806		6.957.227.042		9.179.901.589		32.290.964.035	100,91	96,86		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	331		3		334		334		334		334		100,91			
		3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			656.880.000		-		6.050.000		334.120.000		295.760.000		635.930.000	35,29	96,81		
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	34		0		0		12		12		12		35,29			
		3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			277.406.000		-		-		-		235.140.650		235.140.650	9,09	84,76		
			Tersedianya Dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	11		0		0		0		1		1		9,09			
		3.28.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			277.406.000		-		-		-		235.140.650		235.140.650	9,09	84,76		
			Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	11		0		0		0		1		1		9,09			
		3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.479.574.234		-		58.664.650		367.857.334		849.301.749		1.275.823.733	21,84	86,23		
			Jumlah Bahan Administrasi Umum yang dikelola	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7		0		0		1		1		1		14,29			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		0		0		2		2		4		100			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	10		0		1		1		1		1		10			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12		0		0		1		1		1		8,33			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	11		0		1		1		1		1		9,09			
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12		0		1		1		1		1		8,33			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	35		0		1		1		1		1		2,86			
		3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			24.289.160		-		980.000		15.088.300		6.294.500		22.362.800	14,29	92,07		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7		0		0		1		1		1		14,29			
		3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			112.176.800		-		-		8.500.000		103.331.800		111.831.800	100	99,69		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		0		0		2		2		4		100			
		3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			49.479.000		-		658.000		10.414.100		34.155.200		45.227.300	10	91,41		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	10		0		1		1		1		1		10			
		3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			151.525.774		-		-		84.600.600		64.741.600		149.342.200	8,33	98,56		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12		0		0		1		1		1		8,33			
		3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			70.031.000		-		10.148.650		15.043.000		33.811.900		59.003.550	9,09	84,25		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	11		0		1		1		1		1		9,09			
		3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			101.451.500		-		5.435.000		33.525.447		53.140.400		92.100.847	8,33	90,78		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12		0		1		1		1		1		8,33			
		3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			970.621.000		-		41.443.000		200.685.887		553.826.349		795.955.236	2,86	82		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	35		0		1		1		1		1		2,86			
		3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			344.045.000		-		-		226.467.500		110.500.000		336.967.500	68,75	97,94		
			Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan yang dikelola	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	2		0		0		1		1		2		100			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	8		0		0		3		0		3		37,5			
		3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel			33.000.000		-		-		9.990.000		22.900.000		32.890.000	100	99,67		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	2		0		0		1		1		2		100			
		3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			311.045.000		-		-		216.477.500		87.600.000		304.077.500	37,5	97,76		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	8		0		0		3		0		3		37,5			
		3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			932.947.264		147.100.163		263.714.998		129.465.275		116.155.521		656.435.957	34,07	70,36		
			Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Kedinasan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5		0		1		1		1		1		20			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	45		0		1		1		1		1		2,22			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		1		1		1		1		4		80			
		3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			13.820.000		-		600.000		1.410.000		6.990.000		9.000.000	20	65,12		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5		0		1		1		1		1		20			
		3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			341.012.000		-		119.967.984		69.645.798		74.061.441		263.675.223	2,22	77,32		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	45		0		1		1		1		1		2,22			
		3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			578.115.264		147.100.163		143.147.014		58.409.477		35.104.080		383.760.734	80	66,38		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		1		1		1		1		4		80			
		3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.586.556.000		-		262.715.418		477.609.053		591.512.277		1.331.836.748	92,11	83,95		
			Jumlah barang milik daerah penunjang urusan yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	70		0		53		53		53		53		75,71			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6		0		2		2		2		6		100			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	55		0		0		51		51		51		92,73			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		0		0		4		4		4		100			
		3.28.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			1.194.600.000		-		231.962.318		353.324.199		389.446.425		974.732.942	75,71	81,59		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	70		0		53		53		53		53		75,71			
		3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			140.000.000		-		30.753.100		36.623.600		50.990.640		118.367.340	100	84,55		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6		0		2		2		2		6		100			
		3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			40.600.000		-		-		18.571.000		21.373.200		39.944.200	92,73	98,38		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	55		0		0		51		51		51		92,73			
		3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			211.356.000		-		-		69.090.254		129.702.012		198.792.266	100	94,06		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		0		0		4		4		4		100			
		3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**			**14.210.347.215**		**-**		**574.789.939**		**3.004.231.215**		**8.619.754.906**		12.198.776.060	**100,93**	**85,84**	DINAS KEHUTANAN	
			Meningkatnya produktivitas hasil hutan	Menurunnya kerusakan kawasan Hutan (Ha)	50												0			
				Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (%) (%)													0			
				Jumlah KPH yang terkelola secara Efektif (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
				Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi (Hektar (Persentase))	325								100		100		30,77			
				Tersusunnya Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang tersusun (Dokumen)	1												0			
				Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB (Persen)	0,55								0.36		0,36		65,45			
		3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi			3.704.268.000		-		-		1.243.608.883		2.017.531.642		3.261.140.525	66,67	88,04		
			Terlaksanannya Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara (Unit)	11		0		0		11		11		11		100			
				Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH (Dokumen)	3		0		0		1		1		1		33,33			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH			3.604.268.000		-		-		1.205.161.383		1.961.778.542		3.166.939.925	100	87,87		
			Terpeliharanya Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara (Unit)	11		0		0		11		11		11		100			
		3.28.03.1.01.0007	Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH			100.000.000		-		-		38.447.500		55.753.100		94.200.600	33,33	94,2		
			Telaksananya kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH	Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH (Dokumen)	3		0		0		1		1		1		33,33			
		3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)			115.908.000		-		-		-		-		-	0	0		
				Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun (Dokumen)	12		0		0		0		0		0		0			
		3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan			115.908.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun (Dokumen)	12		0		0		0		0		0		0			
		3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung			660.014.436		-		80.290.800		79.486.000		353.486.116		513.262.916	72,22	77,77		
			Terlaksananya pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala (Dokumen)	19		0		4		0		15		19		100			
				Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan (Dokumen)	18		0		3		7		8		18		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi (Dokumen)	6		0		1		1		1		1		16,67			
		3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi			197.924.336		-		24.737.200		-		155.021.016		179.758.216	100	90,82		
			Tersedianya Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala (Dokumen)	19		0		4		0		15		19		100			
		3.28.03.1.03.0010	Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi			212.950.600		-		31.246.000		26.226.800		101.630.100		159.102.900	100	74,71		
			Dilakukannya penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan (Dokumen)	18		0		3		7		8		18		100			
		3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi			249.139.500		-		24.307.600		53.259.200		96.835.000		174.401.800	16,67	70		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi (Dokumen)	6		0		1		1		1		1		16,67			
		3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara			7.205.379.179		-		449.655.639		1.301.996.012		4.496.081.764		6.247.733.415	104,97	86,71		
			Luas Lahan Kritis yang direhabilitasi	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) (Dokumen)	1		0		0		1		1		1		100			
				Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara (Ha)	102		0		20		40		40		100		98,04			
				Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara (Ha)	2		0		0		0		2,9		2,9		145			
				Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Ha)	5.5		0		10		10		10		10		181,82			
				Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan (Laporan)	11		0		0		0		0		0		0			
		3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)			52.048.500		-		-		36.882.000		9.126.500		46.008.500	100	88,4		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersusunnya Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) (Dokumen)	1		0		0		1		1		1		100			
		3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara			4.163.821.629		-		365.270.829		1.174.224.000		1.838.759.852		3.378.254.681	98,04	81,13		
			Terbangunnya Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara (Ha)	102		0		20		40		40		100		98,04			
		3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara			285.798.200		-		-		4.825.000		259.967.900		264.792.900	145	92,65		
			Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara (Ha)	2		0		0		0		2,9		2,9		145			
		3.28.03.1.04.0007	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan			2.641.566.850		-		84.384.810		86.065.012		2.386.407.512		2.556.857.334	181,82	96,79		
			Diterapkannya Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Ha)	5.5		0		10		10		10		10		181,82			
		3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan			62.144.000		-		-		-		1.820.000		1.820.000	0	2,93		
			Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan (Laporan)	11		0		0		0		0		0		0			
		3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			2.194.403.300		-		42.794.000		360.162.320		1.537.277.184		1.940.233.504	107,44	88,42		
			Menurunnya Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan (Dokumen)	3		0		0		3		3		6		200			
				Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun (Laporan)	21		0		0		5		5		10		47,62			
				Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan (Ha)	560		0		0		180		180		180		32,14			
				Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL) (Operasi)	8		0		4		4		4		12		150			
		3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan			100.691.600		-		6.600.000		49.550.000		44.241.600		100.391.600	200	99,7		
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan (Dokumen)	3		0		0		3		3		6		200			
		3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan			349.531.600		-		-		111.235.320		208.422.924		319.658.244	47,62	91,45		
			Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun (Laporan)	21		0		0		5		5		10		47,62			
		3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			195.223.000		-		17.250.000		88.252.000		71.531.000		177.033.000	32,14	90,68		
			Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan (Ha)	560		0		0		180		180		180		32,14			
		3.28.03.1.05.0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal			1.548.957.100		-		18.944.000		111.125.000		1.213.081.660		1.343.150.660	150	86,71		
			Terlaksananya Pengamanan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL) (Operasi)	8		0		4		4		4		12		150			
		3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)			99.999.700		-		2.049.500		18.978.000		7.200.000		28.227.500	300	28,23		
			Terlaksananya Pembangunan Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu/HHBK	Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani (Unit Managemen)	3		0		3		3		3		9		300			
		3.28.03.1.06.0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi			99.999.700		-		2.049.500		18.978.000		7.200.000		28.227.500	300	28,23		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau Bukan Kayu skala dan menengah kecil yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani (Unit Managemen)	3		0		3		3		3		9		300			
		3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun			230.374.600		-		-		-		208.178.200		208.178.200	111,11	90,37		
			terlaksananya Pembinaan & Pengelolaan Industri Kehutanan	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi (Laporan)	9		0		0		0		10		10		111,11			
		3.28.03.1.07.0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi			230.374.600		-		-		-		208.178.200		208.178.200	111,11	90,37		
			Terlaksananya Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi (Laporan)	9		0		0		0		10		10		111,11			
		3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**			**2.218.287.600**		**-**		**130.035.000**		**261.186.753**		**1.716.782.988**		2.108.004.741	**84,33**	**95,03**	DINAS KEHUTANAN	
			Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang terfasilitasi (Kelompok)	25												0			
				Jumlah Kelompok Tani yang terfasilitasi (Kel) (Kelompok)													0			
				Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial (PS) dan KTH yang terfailitasi (Kelompok)	40												0			
				Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (Kel) (Kelompok)									28		28		0			
				Terlaksananya identifikasi, fasilitasi dan pemberdayaan Masyarakat sekitar hutan (Kelompok)	40												0			
				Terlaksananya identifikasi, fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan (Kelompok)	4												0			
				Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang terfasilitasi (Kelompok)	15												0			
		3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			2.218.287.600		-		130.035.000		261.186.753		1.716.782.988		2.108.004.741	84,33	95,03		
			Jumlah Kelompok Usaha Masyarakat di dalam dan sekitar hutan yang terfasilitasi	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan (Kelompok)	31		0		0		8		8		8		25,81			
				Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya (Unit)	14		0		0		0		20		20		142,86			
		3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			855.938.800		-		14.095.000		193.010.753		600.910.188		808.015.941	25,81	94,4		
			Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan (Kelompok)	31		0		0		8		8		8		25,81			
		3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial			1.362.348.800		-		115.940.000		68.176.000		1.115.872.800		1.299.988.800	142,86	95,42		
			Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya (Unit)	14		0		0		0		20		20		142,86			
		3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**			**12.140.254.181**		**1.132.362.513**		**2.654.509.452**		**2.129.850.347**		**5.015.855.444**		10.932.577.756	**72**	**90,05**		
		3.29.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**8.470.263.691**		**1.132.362.513**		**2.591.136.150**		**2.123.684.347**		**2.154.538.827**		8.001.721.837	**78**	**94,47**	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	
			Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Presentasi Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran (%)	100												0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)													0			
		3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			35.924.900		-		-		2.500.000		29.649.874		32.149.874	100	89,49		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5		0		0		0		5		5		100			
		3.29.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			35.924.900		-		-		2.500.000		29.649.874		32.149.874	100	89,49		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5		0		0		0		5		5		100			
		3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.390.194.388		1.013.639.069		2.327.663.579		1.924.860.359		1.768.239.316		7.034.402.323	100	95,19		
			Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	66		66		66		66		66		66		100			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		3.29.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			7.325.994.388		1.013.639.069		2.327.663.579		1.892.760.359		1.736.139.316		6.970.202.323	100	95,14		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	66		66		66		66		66		66		100			
		3.29.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			64.200.000		-		-		32.100.000		32.100.000		64.200.000	100	100		
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		3.29.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			13.625.000		-		12.643.780		-		-		12.643.780	100	92,8		
			Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		1		0		0		1		100			
		3.29.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			13.625.000		-		12.643.780		-		-		12.643.780	100	92,8		
			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		1		0		0		1		100			
		3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4		0		0		0		0		0		0			
		3.29.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		0		0		0		0		0		0			
		3.29.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4		0		0		0		0		0		0			
		3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			258.790.100		-		62.685.220		40.516.000		119.222.844		222.424.064	85,71	85,95		
			Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		1		0		0		1		100			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		0		0		0		1		1		50			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		0		1		1		1		1		100			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1		0		1		1		1		1		100			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2		0		1		0		1		1		50			
		3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.994.000		-		1.261.600		-		-		1.261.600	100	63,27		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		1		0		0		1		100			
		3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			14.340.000		-		-		-		13.640.000		13.640.000	100	95,12		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
		3.29.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			18.985.600		-		11.712.500		7.100.000		-		18.812.500	100	99,09		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
		3.29.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			30.791.000		-		1.120.000		24.670.000		400.000		26.190.000	50	85,06		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		0		0		0		1		1		50			
		3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			16.000.000		-		1.591.500		6.247.500		5.349.500		13.188.500	100	82,43		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		0		1		1		1		1		100			
		3.29.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			12.117.500		-		7.444.500		2.498.500		773.500		10.716.500	100	88,44		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1		0		1		1		1		1		100			
		3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			164.562.000		-		39.555.120		-		99.059.844		138.614.964	50	84,23		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2		0		1		0		1		1		50			
		3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
		3.29.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
		3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			694.869.303		118.723.444		173.068.571		134.380.184		206.501.900		632.674.099	133,33	91,05		
			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		0		1		0		1		2		200			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		0		1		1		1		1		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		1		1		1		1		100			
		3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			525.000		-		148.000		-		372.000		520.000	200	99,05		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		0		1		0		1		2		200			
		3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			112.200.000		-		37.784.983		16.226.688		53.517.872		107.529.543	100	95,84		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		0		1		1		1		1		100			
		3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			582.144.303		118.723.444		135.135.588		118.153.496		152.612.028		524.624.556	100	90,12		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		1		1		1		1		100			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			76.860.000		-		15.075.000		21.427.804		30.924.893		67.427.697	53,33	87,73		
			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3		0		1		1		1		3		100			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5		0		0		2		1		3		60			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
		3.29.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			73.900.000		-		15.075.000		20.627.804		30.149.893		65.852.697	100	89,11		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3		0		1		1		1		3		100			
		3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2.960.000		-		-		800.000		775.000		1.575.000	60	53,21		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5		0		0		2		1		3		60			
		3.29.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
		3.29.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**			**44.999.900**		**-**		**23.645.121**		**-**		**14.982.000**		38.627.121	**100**	**85,84**	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	
			Meningkatnya Tata Kelola Kegeologian	Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan air Tanah di Wilayah Sungai Lintas kabupaten/Kota (KmÂ²)													0			
				Jumlah Volume Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota (Rp. Juta Per Tahun)													0			
				Peta Konservasi Air Tanah (Dokumen)	1												0			
		3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi			44.999.900		-		23.645.121		-		14.982.000		38.627.121	100	85,84		
			Persentase Pelaksanaan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		3.29.02.1.03.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah			44.999.900		-		23.645.121		-		14.982.000		38.627.121	100	85,84		
			Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		3.29.03	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**			**2.148.264.590**		**-**		**28.170.000**		**-**		**1.705.874.499**		1.734.044.499	**50**	**80,72**	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	
			Meningkatnya Tata Kelola Mineral dan Batu Bara	Luas WPR yang Diusulkan Pemerintah Daerah (Meter)													0			
				Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR (%)													0			
				Jumlah IUP yang diterbitkan (Dokumen)	2												0			
		3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil			26.935.000		-		25.744.000		-		181.000		25.925.000	0	96,25		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Persentase Penetapan Wilayah Izin Usaha pertambangan Mineral Bukan Logam dan batuan dalam Provinsi	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah (Dokumen)	0		0		0		0		1		1		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		3.29.03.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil			25.925.000		-		25.744.000		-		181.000		25.925.000	0	100		
			Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah (Dokumen)	0		0		0		0		1		1		0			
		3.29.03.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil			1.010.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat			2.121.329.590		-		2.426.000		-		1.705.693.499		1.708.119.499	100	80,52		
			Persentase Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		3.29.03.1.04.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat			2.121.329.590		-		2.426.000		-		1.705.693.499		1.708.119.499	100	80,52		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		3.29.05	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**			**1.337.550.000**		**-**		**11.558.181**		**-**		**1.026.880.900**		1.038.439.081	**66,67**	**77,64**	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	
			Meningkatnya Tata Kelola Energi Baru Terbarukan	Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik yang bersumber dari Pembangkit EBT (Rumah Tangga)												0				
				Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)												0				
				Intensitas Energi Primer (SBM/Milyar Rupiah)												0				
				Porsi EBT dalam Bauran Energi (%)	27,3											0				
		3.29.05.1.05	Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Persentase Pengelolaan Penyediaan Biomassa dan/ atau Biogas dalam Wilayah Provinsi	Jumlah dokumen data potensi biogas (Dokumen)	2		0		0		0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		3.29.05.1.05.0006	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi biogas			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terkumpulnya data potensi biogas	Jumlah dokumen data potensi biogas (Dokumen)	2		0		0		0		0		0		0			
		3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi			1.337.550.000		-		11.558.181		-		1.026.880.900		1.038.439.081	100	77,64		
			Persentase Pengelolaan Aneka Energi Baru Terbarukan	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT (unit)	66		0		0		0		66		66		100			
		3.29.05.1.07.0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah			54.210.000		-		11.558.181		-		38.897.200		50.455.381	100	93,07		
			Terlaksananya pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT			1.283.340.000		-		-		-		987.983.700		987.983.700	100	76,99		
			Terlaksananya kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT (unit)	66		0		0		0		66		66		100			
		3.29.06	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**			**139.176.000**		**-**		**-**		**6.166.000**		**113.579.218**		119.745.218	**50**	**86,04**	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	
			Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kelistrikan	Konsumsi Listrik per Kapita (Kwh/Kapita)													0			
				Rasio Elektrifikasi (%)	99,5												0			
		3.29.06.1.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi			-		-		-		-		-		-	0	0		
				Jumlah Pelaksanaan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan. (Dokumen)	4		0		0		0		0		0		0			
		3.29.06.1.01.0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan. (Dokumen)	4		0		0		0		0		0		0			
		3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Persentase Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi (Laporan)	4		0		0		0		0		0		0			
		3.29.06.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terkendalinya dan Terawasinya Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi (Laporan)	4		0		0		0		0		0		0			
		3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan			139.176.000		-		-		6.166.000		113.579.218		119.745.218	100	86,04		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Cakupan Pelayanan Listrik Perdesaan	Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (Unit)	10		0		0		0		10		10		100			
		3.29.06.1.06.0004	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan			26.868.000		-		-		-		19.180.000		19.180.000	100	71,39		
			Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan			112.308.000		-		-		6.166.000		94.399.218		100.565.218	100	89,54		
			Terbangunnya Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (Unit)	10		0		0		0		10		10		100			
		3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**			**5.090.401.833**		**180.776.736**		**1.197.817.850**		**363.917.467**		**2.420.110.925**		4.162.622.978	**77,38**	**81,77**		
		3.30.02	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**			**14.992.000**		**-**		**-**		**-**		**13.052.000**		13.052.000	**100**	**87,06**	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan dan Pendaftaran Berusaha	Jenis Bahan Berbahaya (Jenis)	4								4		4		100			
				Jumlah Izin Usaha Perdagangan Terdaftar yang Difasilitasi (Jenis)													0			
		3.30.02.1.03	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar			14.992.000		-		-		-		13.052.000		13.052.000	100	87,06		
			Tingkat Pengendalian usaha perdagangan bahan berbahaya	Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		3.30.02.1.03.0002	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya			14.992.000		-		-		-		13.052.000		13.052.000	100	87,06		
			Tersedianya Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**			**3.789.733.529**		**135.697.956**		**1.166.233.850**		**286.472.467**		**1.519.280.421**		3.107.684.694	**100**	**82**	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang yang Efisien, Merata dan Terintegrasi	Jumlah Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Unit)													0			
				Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	1								1		1		100			
		3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas			3.789.733.529		135.697.956		1.166.233.850		286.472.467		1.519.280.421		3.107.684.694	100	82		
			Jumlah Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi (Laporan)	1		1		1		1		0		1		100			
		3.30.03.1.01.0002	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi			3.789.733.529		135.697.956		1.166.233.850		286.472.467		1.519.280.421		3.107.684.694	100	82		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi (Laporan)	1		1		1		1		0		1		100			
		3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING**			**799.887.000**		**12.346.780**		**400.000**		**10.200.000**		**673.204.504**		696.151.284	**200**	**87,03**	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (%)													0			
				Persentase Stabilisasi dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Penting (%)	4-5								1.51		1.51		37,75			
		3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			799.887.000		12.346.780		400.000		10.200.000		673.204.504		696.151.284	200	87,03		
			Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota (Laporan)	2		1		1		1		1		4		200			
		3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota			799.887.000		12.346.780		400.000		10.200.000		673.204.504		696.151.284	200	87,03		
			Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota (Laporan)	2		1		1		1		1		4		200			
		3.30.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**			**250.000.000**		**25.532.000**		**25.184.000**		**37.565.000**		**160.054.000**		248.335.000	**33,33**	**99,33**	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			Meningkatnya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) (%)													0			
				Jumlah Pelaku Usaha Ekspor (Pelaku Usaha)													0			
				Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas (%)	38,5												0			
				Nilai Ekspor Hasil Industri Pengolahan Non Migas (USD JUTA)	38.5												0			
		3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi			250.000.000		25.532.000		25.184.000		37.565.000		160.054.000		248.335.000	33,33	99,33		
			Jumlah rapat koordinasi peningkatan ekspor, FGD Permasalahan Ekspor, Workshop Kebijakan Ekspor, Bimtek Memasuki Pasar Ekspor, Rebreanding IKM serta Promosi Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi (Produk)	3		0		0		0		1		1		33,33			
		3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor			250.000.000		25.532.000		25.184.000		37.565.000		160.054.000		248.335.000	33,33	99,33		
			Meningkatnya Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi (Produk)	3		0		0		0		1		1		33,33			
		3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**			**235.789.304**		**7.200.000**		**6.000.000**		**29.680.000**		**54.520.000**		97.400.000	**36,11**	**41,31**	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk	Jumlah bahan berbahaya yang dipantau peredarannya (Jenis)													0			
				Jumlah sampel yang diuji (Sampel)													0			
				Persentase Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Tertib Niaga (%)	100								160.5		160,5		160,5			
				Jumlah Sampel hasil uji laboratorium komoditi potensial (Sampel)	100								141		141		141			
				Jumlah Laporan Penanganan Konsumen (Laporan)	5												0			
				Jumlah Penanganan Pengaduan Konsumen (Kasus) (Kasus)													0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Komoditi Potensial yang Sesuai Ketentuan yang Berlaku (Komoditi)	7								6		6		85,71			
				Persentase Kepatuhan Berusaha (%) (%)													0			
		3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota			70.000.000		-		2.400.000		16.480.000		29.320.000		48.200.000	100	68,86		
			Persentase Penanganan Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani (Pengaduan)	5		1		1		2		1		5		100			
		3.30.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen			70.000.000		-		2.400.000		16.480.000		29.320.000		48.200.000	100	68,86		
			Tersedianya Layanan Penanganan Pengaduan Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani (Pengaduan)	5		1		1		2		1		5		100			
		3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota			116.589.304		-		-		-		-		-	0	0		
				Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan (laporan)	5		0		0		0		0		0		0			
		3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian			116.589.304		-		-		-		-		-	0	0		
			Meningkatnya Layanan Pengujian Mutu Barang	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan (laporan)	5		0		0		0		0		0		0			
		3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota			49.200.000		7.200.000		3.600.000		13.200.000		25.200.000		49.200.000	8,33	100		
			persentase pengawasan barang beredar dan tertib niaga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi (Laporan)	12		1		1		1		1		1		8,33			
		3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga			49.200.000		7.200.000		3.600.000		13.200.000		25.200.000		49.200.000	8,33	100		
			Meningkatnya Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi (Laporan)	12		1		1		1		1		1		8,33			
		3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**			**14.057.957.269**		**1.753.114.898**		**1.735.869.890**		**2.536.492.027**		**6.380.966.688**		12.406.443.503	**38,96**	**88,25**		
		3.31.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**8.645.779.269**		**1.696.305.180**		**1.706.499.615**		**2.201.121.752**		**2.035.753.262**		7.639.679.809	**32,15**	**88,36**	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)													0			
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah ()	80												0			
		3.31.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			525.782.000		96.399.000		102.730.000		220.054.000		106.143.000		525.326.000	81,25	99,91		
			Jumlah laporan monitoring dan evaluasi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	8		1		1		1		1		1		12,5			
		3.31.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			142.237.000		53.490.000		50.486.000		-		38.132.000		142.108.000	12,5	99,91		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	8		1		1		1		1		1		12,5			
			Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4		1		2		1		2		6		150			
		3.31.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			383.545.000		42.909.000		52.244.000		220.054.000		68.011.000		383.218.000	150	99,91		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4		1		2		1		2		6		150			
		3.31.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.133.114.266		1.301.569.720		1.307.556.250		1.757.590.319		1.661.669.313		6.028.385.602	60	98,29		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	5		0		0		0		1		1		20			
		3.31.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			99.480.000		-		-		-		69.240.000		69.240.000	20	69,6		
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	5		0		0		0		1		1		20			
			Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	51		51		51		51		51		51		100			
		3.31.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			6.033.634.266		1.301.569.720		1.307.556.250		1.757.590.319		1.592.429.313		5.959.145.602	100	98,77		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	51		51		51		51		51		51		100			
		3.31.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			-		-		-		-		-		-	0	0		
				Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		3.31.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		3.31.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			31.020.000		-		-		-		31.020.000		31.020.000	0	100		
			Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis dan fungsional	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2		0		0		0		0		0		0			
		3.31.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2		0		0		0		0		0		0			
			Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	10		0		0		0		0		0		0			
		3.31.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			31.020.000		-		-		-		31.020.000		31.020.000	0	100		
			Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	10		0		0		0		0		0		0			
		3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			362.278.763		66.858.560		67.328.400		39.234.500		132.098.900		305.520.360	40,25	84,33		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	23		0		0		0		1		1		4,35			
		3.31.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			5.000.000		-		1.955.000		1.373.000		1.000.000		4.328.000	4,35	86,56		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	23		0		0		0		1		1		4,35			
			Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	23		0		0		0		1		1		4,35			
		3.31.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			93.086.500		2.246.000		21.919.500		15.144.500		37.513.200		76.823.200	4,35	82,53		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	23		0		0		0		1		1		4,35			
			Jumlah buku, laporan dan dokumen yang dicetak dan digandakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3		0		0		0		1		1		33,33			
		3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			39.525.667		3.710.800		4.843.000		14.550.300		13.081.100		36.185.200	33,33	91,55		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3		0		0		0		1		1		33,33			
			Jumlah koran, Buku, dan peraturan perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		3.31.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			5.000.000		-		2.060.000		1.500.000		300.000		3.860.000	100	77,2		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
			Jumlah rapat dan tamu yang dijamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	14		0		0		0		1		1		7,14			
		3.31.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			51.330.596		-		10.948.900		6.666.700		26.866.600		44.482.200	7,14	86,66		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	14		0		0		0		1		1		7,14			
			Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	13		0		0		0		12		12		92,31			
		3.31.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			168.336.000		60.901.760		25.602.000		-		53.338.000		139.841.760	92,31	83,07		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	13		0		0		0		12		12		92,31			
		3.31.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			8.000.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Jumlah pengadaan Mebeler perkantoran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0		0		0			
		3.31.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0		0		0			
			Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		0		0		0		0		0		0			
		3.31.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			8.000.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		0		0		0		0		0		0			
		3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.183.194.240		221.471.900		221.014.417		162.797.933		82.088.679		687.372.929	33,33	58,09		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3		1		1		1		1		1		33,33			
		3.31.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			5.680.000		300.000		1.380.000		1.500.000		1.200.000		4.380.000	33,33	77,11		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3		1		1		1		1		1		33,33			
			Jumlah supir dan tenaga administrasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3		0		0		0		1		1		33,33			
		3.31.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			982.914.240		193.072.440		193.072.440		128.714.960		46.805.440		561.665.280	33,33	57,14		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3		0		0		0		1		1		33,33			
			Jumlah jasa komunikasi, Listrik dan Air yang terbayarkan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3		0		0		0		1		1		33,33			
		3.31.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			194.600.000		28.099.460		26.561.977		32.582.973		34.083.239		121.327.649	33,33	62,35		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3		0		0		0		1		1		33,33			
		3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			402.390.000		10.006.000		7.870.548		21.445.000		22.733.370		62.054.918	20,83	15,42		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	6		0		0		0		5		5		83,33			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	17		0		0		0		0		0		0			
		3.31.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			70.000.000		10.006.000		7.870.548		21.445.000		22.733.370		62.054.918	83,33	88,65		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	6		0		0		0		5		5		83,33			
		3.31.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			4.470.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
		3.31.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2.920.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	17		0		0		0		0		0		0			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		0		0		0		0		0		0			
		3.31.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			325.000.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		0		0		0		0		0		0			
		3.31.02	**PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**			**5.412.178.000**		**56.809.718**		**29.370.275**		**335.370.275**		**4.345.213.426**		4.766.763.694	**88,89**	**88,07**	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Nilai Ekspor Hasil Industri Pengolahan Non Migas (USD Juta)	38,5								42.29		42,29		109,84			
				Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri (%) (%)													0			
				Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Orang)	39.683								780		780		1,97			
		3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi			5.412.178.000		56.809.718		29.370.275		335.370.275		4.345.213.426		4.766.763.694	88,89	88,07		
			Jumlah pengembangan industri pengolahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	3		0		0		0		2		2		66,67			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		3.31.02.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri			33.000.000		-		-		-		7.962.000		7.962.000	100	24,13		
			Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			868.928.000		30.251.718		29.370.275		335.370.275		338.619.688		733.611.956	66,67	84,43		
			Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	3		0		0		0		2		2		66,67			
		3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			4.510.250.000		26.558.000		-		-		3.998.631.738		4.025.189.738	100	89,25		
			Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**			**70.637.500**		**-**		**70.527.500**		**-**		**-**		70.527.500	**200**	**99,84**		
		3.32.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**			**70.637.500**		**-**		**70.527.500**		**-**		**-**		70.527.500	**200**	**99,84**	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya Pemberdayaan dan Kapasitas Transmigran dalam Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (%)			0		0		0		0		0		0			
		3.32.04.1.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan			70.637.500		-		70.527.500		-		-		70.527.500	200	99,84		
			Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan di kawasan transmigrasi	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina (Kepala Keluarga)	10		0		20		0		0		20		200			
		3.32.04.1.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman			70.637.500		-		70.527.500		-		-		70.527.500	200	99,84		
			Terwujudnya Penguatan SDM dalam Rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina (Kepala Keluarga)	10		0		20		0		0		20		200			
		4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**			**255.076.251.145**		**10.004.254.182**		**19.301.129.851**		**25.033.246.814**		**27.772.548.127**		82.111.178.974	**13,28**	**32,19**		
		4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**100.995.126.229**		**9.892.442.182**		**14.147.544.851**		**24.966.571.224**		**26.411.813.607**		75.418.371.864	**20,55**	**74,68**	SEKRETARIAT DAERAH	
			Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Pelayanan terhadap Pimpinan dan Adminisrasi Umum Pelayanan Perkantoran (%)	100												0			
				Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)			100		100		100		100		100		0			
		4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			193.464.000		-		-		-		-		-	0	0		
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3		0		0		0		0		0		0			
		4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			130.124.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5		0		0		0		0		0		0			
		4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5		0		0		0		0		0		0			
		4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			63.340.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3		0		0		0		0		0		0			
		4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			31.630.391.106		5.789.989.986		7.761.479.992		7.688.470.421		8.311.789.669		29.551.730.068	84,58	93,43		
			Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	320		812		812		812		812		812		253,75			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	17		0		2		0		0		0		0			
		4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			30.182.039.106		5.789.989.986		7.737.761.992		7.688.470.421		8.262.589.669		29.478.812.068	253,75	97,67		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	320		812		812		812		812		812		253,75			
		4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1.259.562.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		0		0		0		0		0		0			
		4.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			188.790.000		-		23.718.000		-		49.200.000		72.918.000	0	38,62		
			Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	17		0		2		0		0		0		0			
		4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			34.656.000		-		-		-		13.250.000		13.250.000	66,67	38,23		
			Persentase Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3		0		0		0		2		2		66,67			
		4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			34.656.000		-		-		-		13.250.000		13.250.000	66,67	38,23		
			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3		0		0		0		2		2		66,67			
		4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			865.979.800		55.945.634		7.680.000		13.510.000		40.840.000		117.975.634	4	13,62		
			Persentase Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	133		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	5		0		1		0		0		1		20			
				Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang)	2		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan (Orang)	2		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	55		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	150		12		0		0		0		12		8			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	15		0		0		0		0		0		0			
		4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			648.753.100		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	133		0		0		0		0		0		0			
		4.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			53.890.500		-		4.050.000		9.000.000		40.840.000		53.890.000	20	100		
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	5		0		1		0		0		1		20			
		4.01.01.1.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang)	2		0		0		0		0		0		0			
		4.01.01.1.05.0008	Pemindahan Tugas ASN			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan (Orang)	2		0		0		0		0		0		0			
		4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			163.336.200		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	55		0		0		0		0		0		0			
		4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			-		55.945.634		3.630.000		4.510.000		-		64.085.634	8	0		
			Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	150		12		0		0		0		12		8			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		4.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	15		0		0		0		0		0		0			
		4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			33.538.819.243		3.036.039.598		2.712.983.376		13.226.788.337		10.897.772.226		29.873.583.537	18,42	89,07		
			Persentase Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	9		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	28		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	26		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		0		1		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	10		2		2		2		4		4		40			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	66		17		17		17		17		17		25,76			
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			317.185.650		-		235.000		142.432.000		98.965.000		241.632.000	100	76,18		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
		4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			4.353.081.629		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		0		0		0		0		0		0			
		4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			7.317.914.500		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	9		0		0		0		0		0		0			
		4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			811.623.907		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	28		0		0		0		0		0		0			
		4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			632.008.329		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	26		0		0		0		0		0		0			
		4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			54.989.000		-		3.000.000		-		38.372.300		41.372.300	0	75,24		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		0		1		0		0		0		0			
		4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			11.772.485.228		1.864.633.396		1.866.126.438		171.588.027		7.639.062.128		11.541.409.989	40	98,04		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	10		2		2		2		4		4		40			
		4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			8.279.531.000		1.171.406.202		843.621.938		12.912.768.310		3.121.372.798		18.049.169.248	25,76	218		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	66		17		17		17		17		17		25,76			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			381.275.000		-		-		-		-		-	0	0		
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	10		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	8		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		0		0		0		0		0		0			
		4.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			224.500.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	10		0		0		0		0		0		0			
		4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel			11.100.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3		0		0		0		0		0		0			
		4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			96.530.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	8		0		0		0		0		0		0			
		4.01.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			49.145.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		0		0		0		0		0		0			
		4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12.779.432.490		48.877.440		51.044.361		300.624.595		543.243.487		943.789.883	4,17	7,39		
			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	9		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	43		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	6		1		1		1		1		1		16,67			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	90		0		0		0		0		0		0			
		4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			87.900.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	9		0		0		0		0		0		0			
		4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			2.939.474.420		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	43		0		0		0		0		0		0			
		4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.806.506.000		48.877.440		51.044.361		300.624.595		543.243.487		943.789.883	16,67	52,24		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	6		1		1		1		1		1		16,67			
		4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			7.945.552.070		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	90		0		0		0		0		0		0			
		4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			11.658.619.686		961.589.524		1.433.413.657		1.501.684.879		2.031.624.617		5.928.312.677	19,79	50,85		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	30		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	37		9		9		9		9		9		24,32			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	41		10		10		10		10		40		97,56			
				Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	18		5		5		5		3		3		16,67			
		4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			895.307.002		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	30		0		0		0		0		0		0			
		4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			4.334.523.400		554.601.937		985.739.292		786.166.754		1.459.229.717		3.785.737.700	24,32	87,34		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	37		9		9		9		9		9		24,32			
		4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.191.364.688		156.965.000		155.135.000		506.757.100		368.006.900		1.186.864.000	97,56	99,62		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	41		10		10		10		10		40		97,56			
		4.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4		0		0		0		0		0		0			
		4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			3.886.380.401		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6		0		0		0		0		0		0			
		4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			300.000.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
		4.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.051.044.195		250.022.587		292.539.365		208.761.025		204.388.000		955.710.977	16,67	90,93		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	18		5		5		5		3		3		16,67			
		4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			2.781.865.544		-		492.266.909		1.015.073.121		969.629.687		2.476.969.717	19,44	89,04		
			Persentase Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2		0		1		0		1		1		50			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	12		0		0		1		1		1		8,33			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	2		0		2		0		0		0		0			
		4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			1.543.865.544		-		394.218.525		525.849.212		487.122.799		1.407.190.536	50	91,15		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2		0		1		0		1		1		50			
		4.01.01.1.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			1.063.000.000		-		90.431.384		464.806.909		479.872.388		1.035.110.681	8,33	97,38		
			Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	12		0		0		1		1		1		8,33			
		4.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			175.000.000		-		7.617.000		24.417.000		2.634.500		34.668.500	0	19,81		
			Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	2		0		2		0		0		0		0			
		4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			6.801.272.360		-		1.688.676.556		1.220.419.871		3.603.663.921		6.512.760.348	100	95,76		
			Terfasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
		4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah			1.631.538.880		-		255.277.594		483.888.308		808.944.104		1.548.110.006	100	94,89		
			Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
		4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah			1.196.459.472		-		204.108.253		239.543.571		680.876.033		1.124.527.857	100	93,99		
			Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
		4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah			3.973.274.008		-		1.229.290.709		496.987.992		2.113.843.784		3.840.122.485	100	96,65		
			Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
		4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan			184.888.000		-		-		-		-		-	0	0		
				Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		4.01.01.1.13.0001	Penyiapan Materi Pimpinan			115.200.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			22.479.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		4.01.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan			47.209.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan			144.463.000		-		-		-		-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara (Laporan)	5		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			85.963.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara (Laporan)	5		0		0		0		0		0		0			
		4.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			23.700.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan			34.800.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		4.01.02	**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**			**440.596.700**		**-**		**-**		**-**		**-**		-	**0**	**0**	SEKRETARIAT DAERAH	
				Persentase Kebijakan Daerah Bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Bidang Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dan Bidang Tatalaksana (%)	100		100		100		100		100		400		400			
		4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan			238.195.000		-		-		-		-		-	0	0		
				Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	8		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan (Dokumen)	3		0		0		0		0		0		0			
		4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi			87.208.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		0		0		0		0		0		0			
		4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota			37.080.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	8		0		0		0		0		0		0			
		4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan			113.907.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan (Dokumen)	3		0		0		0		0		0		0			
		4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja			202.401.700		-		-		-		-		-	0	0		
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			57.107.500		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan			65.070.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik			80.224.200		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		4.01.03	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**			**9.650.552.130**		**-**		**-**		**-**		**-**		-	**0**	**0**	SEKRETARIAT DAERAH	
				Persentase Kebijakan Daerah Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti (%)	100		100								100		100			
		4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan			5.174.657.130		-		-		-		-		-	0	0		
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		4.01.03.1.01.0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan			109.380.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terkelolanya Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum			124.700.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah			4.940.577.130		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah														0			
		4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah			2.866.462.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Persentase Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan (Laporan)	5		0		0		0		0		0		0			
		4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD			415.572.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan			188.552.000		-		-		-		-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan			2.262.338.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan (Laporan)	5		0		0		0		0		0		0			
		4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah			1.609.433.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Persentase Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi (Dokumen)	2		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah			1.338.230.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi (Dokumen)	2		0		0		0		0		0		0			
		4.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta			123.406.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama			147.797.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		4.01.04	**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**			**141.483.009.571**		**111.812.000**		**5.153.585.000**		**66.675.590**		**1.360.734.520**		6.692.807.110	**48,57**	**4,73**	SEKRETARIAT DAERAH	
				Persentase Pengoordinasian Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti (%)	100		100		100		100		100		400		400			
		4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual			134.907.208.071		-		-		-		-		-	0	0		
				Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi (Lembaga)	1		0		0		0		0		0		0			
		4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual			117.081.208.071		-		-		-		-		-	0	0		
			Terkelolanya Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
		4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual			17.826.000.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi (Lembaga)	1		0		0		0		0		0		0			
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat														68			
		4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar			6.384.171.500		58.212.000		4.795.885.000		66.675.590		1.283.834.520		6.204.607.110	86,67	97,19		
			Persentase Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan (Dokumen)	5		0		1		2		2		5		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial (Dokumen)	5		0		1		1		3		3		60			
		4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan			3.198.381.000		44.572.000		2.454.440.000		21.550.000		662.247.760		3.182.809.760	100	99,51		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan			47.860.000		12.440.000		10.440.000		11.690.000		12.160.000		46.730.000	100	97,64		
			Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan (Dokumen)	5		0		1		2		2		5		100			
		4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial			3.137.930.500		1.200.000		2.331.005.000		33.435.590		609.426.760		2.975.067.350	60	94,81		
			Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial (Dokumen)	5		0		1		1		3		3		60			
		4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar			191.630.000		53.600.000		357.700.000		-		76.900.000		488.200.000	40	254,76		
			Persenrase Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Dokumen)	1		1		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Dokumen)	10		2		0		0		8		8		80			
		4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata			133.400.000		51.800.000		357.700.000		-		41.130.000		450.630.000	0	337,8		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Dokumen)	1		1		0		0		0		0		0			
		4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja			58.230.000		1.800.000		-		-		35.770.000		37.570.000	80	64,52		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Dokumen)	10		2		0		0		8		8		80			
		4.01.05	**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**			**771.304.388**		-		-		-		-		-	**0**	**0**	SEKRETARIAT DAERAH	
				Persentase Kebijakan Daerah Bidang Hukum yang ditindaklanjuti (%)	100		100		100		100		100		400		400			
		4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan			305.639.388		-		-		-		-		-	0	0		
				Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun (Dokumen)	50		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun (Dokumen)	50		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya (Dokumen)	50		0		0		0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi (Dokumen)	6		0		0		0		0		0		0			
		4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan			176.109.500		-		-		-		-		-	0	0		
			Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun (Dokumen)	50		0		0		0		0		0		0			
		4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun (Dokumen)	50		0		0		0		0		0		0			
		4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya			25.000.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya (Dokumen)	50		0		0		0		0		0		0			
		4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota			104.529.888		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi (Dokumen)	6		0		0		0		0		0		0			
		4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum			465.665.000		-		-		-		-		-	0	0		
				Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan (Kasus)	7		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan (Kasus)	7		0		0		0		0		0		0			
		4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum			260.553.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan (Kasus)	7		0		0		0		0		0		0			
		4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM			205.112.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan (Kasus)	7		0		0		0		0		0		0			
		4.01.06	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**			**503.227.967**		**-**		**-**		**-**		**-**		-	**0**	**0**	SEKRETARIAT DAERAH	
				Persentase Pengoordinasian Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti (%)	100		100		100		100		100		400		400			
		4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian			291.595.267		-		-		-		-		-	0	0		
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro			204.778.416		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro			86.816.851		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam			109.927.700		-		-		-		-		-	0	0		
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan			56.167.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		4.01.06.1.02.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup			40.192.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		4.01.06.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air			13.568.700		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD			101.705.000		-		-		-		-		-	0	0		
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha			61.414.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		4.01.06.1.03.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi			21.976.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		4.01.06.1.03.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah			18.315.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		4.01.07	**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**			**693.627.160**		**-**		**-**		**-**		**-**		-	**0**	**0**	SEKRETARIAT DAERAH	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa														0			
		4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			52.644.200		-		-		-		-		-	0	0		
			Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terkelolanya Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa			52.644.200		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik			431.594.960		-		-		-		-		-	0	0		
			Persentase Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik			431.594.960		-		-		-		-		-	0	0		
			Terkelolanya Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		4.01.07.1.02.0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terkelolanya Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			209.388.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Persentase Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	10		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terbinanya Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	10		0		0		0		0		0		0			
		4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa			209.388.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		4.01.08	**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**			**538.807.000**		-		-		-		-		-	**0**	**0**	SEKRETARIAT DAERAH	
		4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah			325.225.000		-		-		-		-		-	0	0		
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD (Laporan)	2		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN (Laporan)	2		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah (Laporan)	2		0		0		0		0		0		0			
		4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD			229.880.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terkendalinya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD (Laporan)	2		0		0		0		0		0		0			
		4.01.08.1.01.0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN			41.315.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terkendalianya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN (Laporan)	2		0		0		0		0		0		0			
		4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah			54.030.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terkendalinya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah (Laporan)	2		0		0		0		0		0		0			
		4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah			213.582.000		-		-		-		-		-	0	0		
				Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		4.01.08.1.02.0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah			56.791.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah			100.000.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersusunnya Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		4.01.08.1.02.0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah			56.791.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		4.02	**SEKRETARIAT DPRD**			**148.277.011.118**		**21.056.796.823**		**26.576.525.549**		**31.205.473.661**		**39.259.881.674**		118.098.677.707	**100,47**	**79,65**		
		4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**82.318.680.418**		**12.174.869.732**		**12.259.067.697**		**16.104.774.586**		**21.090.958.219**		61.629.670.234	**91,77**	**74,87**	SEKRETARIAT DPRD	
			Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Nilai Sakip (Skor)	80								80		80		100			
				Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)			100		100		100		100		100		0			
		4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.824.231.654		1.674.705.190		1.734.436.092		1.825.287.182		2.036.414.682		7.270.843.146	102,67	92,93		
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	75		77		77		77		77		77		102,67			
		4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			7.824.231.654		1.674.705.190		1.734.436.092		1.825.287.182		2.036.414.682		7.270.843.146	102,67	92,93		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	75		77		77		77		77		77		102,67			
		4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	45		0		0		0		0		0		0			
		4.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	45		0		0		0		0		0		0			
		4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.740.316.829		246.849.000		866.891.455		1.165.015.058		1.796.405.178		4.075.160.691	68,75	70,99		
			Terlaksanannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		1		1		1		1		100			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		1		1		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	8		1		1		1		1		1		12,5			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		4.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			661.004.900		99.016.000		188.689.005		170.907.275		198.432.150		657.044.430	100	99,4		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		1		1		1		1		100			
		4.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			202.210.000		-		-		-		202.149.528		202.149.528	100	99,97		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
		4.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			377.427.300		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0		0		0			
		4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.671.324.629		40.273.000		136.981.450		602.417.783		227.505.500		1.007.177.733	100	60,26		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		1		1		1		1		100			
		4.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			1.972.795.000		107.560.000		541.221.000		391.690.000		490.360.000		1.530.831.000	12,5	77,6		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	8		1		1		1		1		1		12,5			
		4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			855.555.000		-		-		-		677.958.000		677.958.000	100	79,24		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			10.919.904.960		-		-		902.111.600		2.298.029.660		3.200.141.260	66,67	29,31		
			Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1		0		0		1		1		1		100			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0		0		1		1		2		100			
		4.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-		-		-		-		-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0		0		0		0			
		4.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel			2.097.243.360		-		-		49.950.000		303.279.750		353.229.750	100	16,84		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1		0		0		1		1		1		100			
		4.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			8.822.661.600		-		-		852.161.600		1.994.749.910		2.846.911.510	100	32,27		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0		0		1		1		2		100			
		4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			10.921.005.587		1.766.550.363		1.605.247.164		2.018.074.562		3.167.940.750		8.557.812.839	100	78,36		
			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		1		1		1		1		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		1		1		1		1		1		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		1		1		1		1		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		1		1		1		1		100			
		4.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			135.910.000		15.250.000		8.700.000		47.234.000		6.200.000		77.384.000	100	56,94		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		1		1		1		1		100			
		4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			3.052.486.000		622.212.497		604.987.718		598.686.384		738.888.128		2.564.774.727	100	84,02		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		1		1		1		1		1		100			
		4.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.430.320.000		121.025.000		65.309.000		210.250.000		462.711.100		859.295.100	100	60,08		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		1		1		1		1		100			
		4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			6.302.289.587		1.008.062.866		926.250.446		1.161.904.178		1.960.141.522		5.056.359.012	100	80,23		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		1		1		1		1		100			
		4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			11.512.837.269		550.720.684		684.302.894		2.574.427.655		2.050.182.940		5.859.634.173	75	50,9		
			Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha Daaerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4		4		4		4		4		4		100			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		0		2		0		2		100			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		2		2		2		2		2		100			
		4.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		0		0		0		0		0		0			
		4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			2.023.426.405		463.875.684		425.802.894		476.658.991		442.319.640		1.808.657.209	100	89,39		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4		4		4		4		4		4		100			
		4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1.158.028.800		-		-		1.158.028.800		-		1.158.028.800	100	100		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		0		2		0		2		100			
		4.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			8.331.382.064		86.845.000		258.500.000		939.739.864		1.607.863.300		2.892.948.164	100	34,72		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		2		2		2		2		2		100			
		4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			30.617.864.119		7.245.521.995		6.640.458.492		6.789.383.529		8.463.140.009		29.138.504.025	98,53	95,17		
			Terlaksananya Kelancaran Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/ Bulan)	45		45		44		44		44		44		97,78			
				Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	46		0		0		0		46		46		100			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	46		45		45		45		45		45		97,83			
		4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD			28.671.954.119		7.181.839.075		6.640.458.492		6.725.700.609		6.725.700.609		27.273.698.785	97,78	95,12		
			Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/ Bulan)	45		45		44		44		44		44		97,78			
		4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD			1.745.910.000		-		-		-		1.737.439.400		1.737.439.400	100	99,51		
			Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	46		0		0		0		46		46		100			
		4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD			200.000.000		63.682.920		-		63.682.920		-		127.365.840	97,83	63,68		
			Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	46		45		45		45		45		45		97,83			
		4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD			4.782.520.000		690.522.500		727.731.600		830.475.000		1.278.845.000		3.527.574.100	400	73,76		
			Terlaksanannya Administrasi DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)	1		4		4		4		4		4		400			
		4.02.01.1.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD			4.782.520.000		690.522.500		727.731.600		830.475.000		1.278.845.000		3.527.574.100	400	73,76		
			Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)	1		4		4		4		4		4		400			
		4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**			**65.958.330.700**		**8.881.927.091**		**14.317.457.852**		**15.100.699.075**		**18.168.923.455**		56.469.007.473	**107,87**	**85,61**	SEKRETARIAT DPRD	
			Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-undangan	Persentase Fasilitasi DPRD (%)	85		100		100		100		100		100		117,65			
				Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Ketetapan)			101		101		101		101		101		0			
		4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD			6.947.867.000		148.220.000		1.839.739.200		1.058.018.000		2.528.757.400		5.574.734.600	275	80,24		
			Tersedianya Hasil Penyusunan dan Pembahasan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	8		0		12		0		0		12		150			
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda (Dokumen)	2		8		8		8		8		8		400			
		4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			817.073.000		-		387.885.200		-		-		387.885.200	150	47,47		
			Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	8		0		12		0		0		12		150			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda			6.130.794.000		148.220.000		1.451.854.000		1.058.018.000		2.528.757.400		5.186.849.400	400	84,6		
			Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda (Dokumen)	2		8		8		8		8		8		400			
		4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD			15.338.030.960		1.889.755.462		1.993.237.462		3.459.013.663		4.668.741.962		12.010.748.549	102,08	78,31		
			Meningkatnya Kapasitas Anggota DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen)	1		1		0		0		0		1		100			
				Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)	8		9		9		9		9		9		112,5			
				Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	8		8		8		8		8		8		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen)	1		1		1		1		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen)	1		1		1		1		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	1		1		1		1		1		1		100			
		4.02.02.1.04.0001	Orientasi DPRD			979.980.000		928.070.000		-		-		-		928.070.000	100	94,7		
			Terselenggaranya Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen)	1		1		0		0		0		1		100			
		4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli			1.301.360.000		195.000.000		252.000.000		307.886.500		333.313.500		1.088.200.000	112,5	83,62		
			Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)	8		9		9		9		9		9		112,5			
		4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi			1.279.416.960		301.047.462		301.047.462		353.385.163		301.047.462		1.256.527.549	100	98,21		
			Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	8		8		8		8		8		8		100			
		4.02.02.1.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat			3.451.987.000		39.268.000		30.410.000		1.224.897.000		1.031.200.000		2.325.775.000	100	67,37		
			Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen)	1		1		1		1		1		1		100			
		4.02.02.1.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD			513.652.000		-		-		-		498.126.000		498.126.000	100	96,98		
			Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen)	1		1		1		1		1		1		100			
		4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD			7.811.635.000		426.370.000		1.409.780.000		1.572.845.000		2.505.055.000		5.914.050.000	100	75,71		
			Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	1		1		1		1		1		1		100			
		4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			251.959.000		-		-		5.000.000		25.410.000		30.410.000	50	12,07		
			Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen)	1		0		0		1		1		1		100			
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		4.02.02.1.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD			167.201.000		-		-		5.000.000		25.410.000		30.410.000	100	18,19		
			Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen)	1		0		0		1		1		1		100			
		4.02.02.1.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD			84.758.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD			12.527.677.600		3.481.418.180		2.377.757.958		3.468.136.378		2.450.049.000		11.777.361.516	100	94,01		
			Terfasilitasinya Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	1		1		1		1		1		1		100			
				Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			12.483.514.600		3.481.418.180		2.377.757.958		3.468.136.378		2.445.154.000		11.772.466.516	100	94,3		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	1		1		1		1		1		1		100			
		4.02.02.1.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD			44.163.000		-		-		-		4.895.000		4.895.000	100	11,08		
			Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
			Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)			100		100		100		100		100		0			
				Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)			100		100		100		100		100		0			
		4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran			4.713.461.540		360.873.262		611.133.232		640.501.034		967.849.542		2.580.357.070	91,67	54,74		
			Tersedianya hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	4		0		0		0		2		2		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	2		0		0		0		2		2		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	2		0		2		2		2		2		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD (Dokumen)	2		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (Dokumen)	1		0		0		2		2		2		200			
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	1		1		1		1		1		1		100			
		4.02.02.1.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS			730.218.000		-		-		-		349.025.500		349.025.500	50	47,8		
			Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	4		0		0		0		2		2		50			
		4.02.02.1.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			728.677.540		-		-		-		344.819.692		344.819.692	100	47,32		
			Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	2		0		0		0		2		2		100			
		4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD			1.131.843.000		-		12.750.000		205.835.124		72.450.000		291.035.124	100	25,71		
			Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	2		0		2		2		2		2		100			
		4.02.02.1.02.0004	Pembahasan Perubahan APBD			400.285.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD (Dokumen)	2		0		0		0		0		0		0			
		4.02.02.1.02.0005	Pembahasan Laporan Semester			361.178.000		-		-		243.276.634		113.305.000		356.581.634	200	98,73		
			Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (Dokumen)	1		0		0		2		2		2		200			
		4.02.02.1.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			1.361.260.000		360.873.262		598.383.232		191.389.276		88.249.350		1.238.895.120	100	91,01		
			Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	1		1		1		1		1		1		100			
		4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			6.635.976.500		2.782.410.187		2.161.840.000		34.710.000		672.690.551		5.651.650.738	100	85,17		
			Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)	1		1		1		1		1		1		100			
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)	1		1		1		1		1		1		100			
				Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan)	1		1		1		1		1		1		100			
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam (Laporan)	1		1		1		1		1		1		100			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dokumen)	1		1		1		1		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen)	1		1		1		1		1		1		100			
	4.02.02.1.03.0001		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum			1.294.195.500		509.449.400		530.255.000		8.750.000		165.830.486		1.214.284.886	100	93,83		
			Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)	1		1		1		1		1		1		100			
	4.02.02.1.03.0002		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur			1.295.995.500		517.000.002		571.395.000		13.625.000		178.995.000		1.281.015.002	100	98,84		
			Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)	1		1		1		1		1		1		100			
	4.02.02.1.03.0003		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat			1.217.835.500		508.759.900		529.155.000		2.885.000		151.970.700		1.192.770.600	100	97,94		
			Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan)	1		1		1		1		1		1		100			
	4.02.02.1.03.0005		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam			1.218.835.500		556.069.885		527.785.000		4.300.000		91.410.006		1.179.564.891	100	96,78		
			Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam (Laporan)	1		1		1		1		1		1		100			
	4.02.02.1.03.0006		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan			10.477.500		-		-		5.150.000		5.275.000		10.425.000	100	99,5		
			Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dokumen)	1		1		1		1		1		1		100			
	4.02.02.1.03.0007		Pengawasan Penggunaan Anggaran			1.598.637.000		691.131.000		3.250.000		-		79.209.359		773.590.359	100	48,39		
			Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen)	1		1		1		1		1		1		100			
	4.02.02.1.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			19.543.358.100		219.250.000		5.333.750.000		6.435.320.000		6.855.425.000		18.843.745.000	100	96,42		
			Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan)	1		1		1		1		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	1		0		1		1		1		1		100			
	4.02.02.1.05.0001		Kunjungan Kerja dalam Daerah			4.967.640.000		219.250.000		552.800.000		1.681.700.000		2.066.940.000		4.520.690.000	100	91		
			Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan)	1		1		1		1		1		1		100			
	4.02.02.1.05.0002		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD			37.558.100		-		-		-		2.925.000		2.925.000	100	7,79		
			Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
	4.02.02.1.05.0003		Pelaksanaan Reses			14.538.160.000		-		4.780.950.000		4.753.620.000		4.785.560.000		14.320.130.000	100	98,5		
			Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	1		0		1		1		1		1		100			
	5.01		**PERENCANAAN**			**17.442.871.096**		**87.144.000**		**961.905.365**		**-**		**13.094.292.601**		14.143.341.966	**88,69**	**81,08**		
	5.01.01		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**10.698.563.468**		**87.144.000**		**85.491.044**		**-**		**9.335.508.226**		9.508.143.270	**85,3**	**88,87**	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)			100		100		100		100		100		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Persentase Capaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100		100		100		100		100		400		400			
		5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			160.669.000		-		43.603.564		-		22.806.000		66.409.564	92,86	41,33		
			Tersedianya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		1		1		1		1		1		50			
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		1		1		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		1		1		1		1		100			
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		1		1		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		1		1		1		1		100			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		1		1		1		1		1		100			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2		1		1		1		2		2		100			
		5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			44.956.400		-		-		-		15.911.000		15.911.000	50	35,39		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		1		1		1		1		1		50			
		5.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			10.021.000		-		7.844.800		-		-		7.844.800	100	78,28		
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		1		1		1		1		100			
		5.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			2.623.500		-		-		-		1.405.000		1.405.000	100	53,55		
			Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		1		1		1		1		100			
		5.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			20.142.700		-		15.870.500		-		-		15.870.500	100	78,79		
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		1		1		1		1		100			
		5.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			15.080.000		-		-		-		5.490.000		5.490.000	100	36,41		
			Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		1		1		1		1		100			
		5.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			8.784.600		-		7.931.000		-		-		7.931.000	100	90,28		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		1		1		1		1		1		100			
		5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			59.060.800		-		11.957.264		-		-		11.957.264	100	20,25		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2		1		1		1		2		2		100			
		5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.863.993.512		87.144.000		26.813.500		-		6.844.908.306		6.958.865.806	96,83	88,49		
			Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	63		55		55		55		55		55		87,3			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1		1		1		1		1		1		100			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		1		1		1		1		100			
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3		1		1		2		3		3		100			
		5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			7.325.907.512		-		-		-		6.789.149.485		6.789.149.485	87,3	92,67		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	63		55		55		55		55		55		87,3			
		5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			251.977.000		-		26.813.500		-		-		26.813.500	100	10,64		
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1		1		1		1		1		1		100			
		5.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			208.939.000		87.144.000		-		-		-		87.144.000	100	41,71		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		1		1		1		1		100			
		5.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			77.170.000		-		-		-		55.758.821		55.758.821	100	72,25		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3		1		1		2		3		3		100			
		5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			48.533.000		-		15.073.980		-		-		15.073.980	150	31,06		
			Persentase realisasi anggaran terhadap besaran anggaran	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2		0		6		0		6		6		300			
		5.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			48.533.000		-		15.073.980		-		-		15.073.980	300	31,06		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2		0		6		0		6		6		300			
		5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			136.872.424		-		-		-		134.972.455		134.972.455	100	98,61		
			Persentase realisasi anggaran terhadap besaran anggaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		1		1		1		1		100			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		1		1		1		1		100			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		1		1		1		1		100			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		1		1		1		1		1		100			
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1		1		1		1		1		1		100			
		5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			6.000.000		-		-		-		6.000.000		6.000.000	100	100		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		1		1		1		1		100			
		5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			99.863.424		-		-		-		99.213.455		99.213.455	100	99,35		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		1		1		1		1		100			
		5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			19.993.000		-		-		-		19.693.000		19.693.000	100	98,5		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		1		1		1		1		100			
		5.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			6.000.000		-		-		-		5.050.000		5.050.000	100	84,17		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		1		1		1		1		1		100			
		5.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			5.016.000		-		-		-		5.016.000		5.016.000	100	100		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1		1		1		1		1		1		100			
		5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Persentase realisasi fisik pengadaan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	9		0		0		0		0		0		0			
		5.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	9		0		0		0		0		0		0			
		5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.979.945.562		-		-		-		1.917.059.750		1.917.059.750	100	96,82		
			Persentase realisasi anggaran terhadap besaran anggaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		1		1		1		1		1		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		1		1		1		1		100			
		5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			132.253.956		-		-		-		132.253.956		132.253.956	100	100		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		1		1		1		1		1		100			
		5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.847.691.606		-		-		-		1.784.805.794		1.784.805.794	100	96,6		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		1		1		1		1		100			
		5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			508.549.970		-		-		-		415.761.715		415.761.715	31,76	81,75		
			Jumlah Jenis barang Milik daerah yang dilakukan pemeliharaan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	40		34		34		34		34		34		85			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	68		7		7		7		7		7		10,29			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		5.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			408.199.970		-		-		-		322.242.915		322.242.915	85	78,94		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	40		34		34		34		34		34		85			
		5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			100.350.000		-		-		-		93.518.800		93.518.800	10,29	93,19		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	68		7		7		7		7		7		10,29			
		5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**			**3.849.054.380**		**-**		**876.414.321**		**-**		**2.266.877.039**		3.143.291.360	**93,15**	**81,66**	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)			100		100		100		100		100		0			
				Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)			100		100		100		100		100		0			
				Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah dan Laporan Evaluasi Pembangunan Daerah (Persen)	100		100		100		100		100		400		400			
		5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			3.000.267.200		-		876.414.321		-		1.491.304.946		2.367.719.267	116,67	78,92		
			Tesedianya Dokumen Perencanaan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	1		1		1		1		1		1		100			
				Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Dokumen)	1		1		1		1		1		1		100			
				Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	2		1		1		1		2		2		100			
				Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	1		2		2		2		2		2		200			
				Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi (Berita Acara)	2		2		2		2		2		2		100			
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	2		2		2		2		2		2		100			
		5.01.02.1.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah			1.227.907.700		-		-		-		667.238.545		667.238.545	100	54,34		
			Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	1		1		1		1		1		1		100			
		5.01.02.1.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya			25.744.000		-		-		-		22.406.940		22.406.940	100	87,04		
			Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Dokumen)	1		1		1		1		1		1		100			
		5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik			97.875.200		-		95.947.000		-		-		95.947.000	100	98,03		
			Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	2		1		1		1		2		2		100			
		5.01.02.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah			44.968.000		-		39.958.000		-		-		39.958.000	200	88,86		
			Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	1		2		2		2		2		2		200			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi			760.064.800		-		740.509.321		-		-		740.509.321	100	97,43		
			Terlaksananya Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi (Berita Acara)	2		2		2		2		2		2		100			
		5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi			843.707.500		-		-		-		801.659.461		801.659.461	100	95,02		
			Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	2		2		2		2		2		2		100			
		5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			126.959.400		-		-		-		105.197.444		105.197.444	78,97	82,86		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pemanfaatan Data Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	130		84		84		84		84		84		64,62			
				Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah (Orang)	90		84		84		84		84		84		93,33			
		5.01.02.1.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah			103.833.900		-		-		-		86.343.312		86.343.312	64,62	83,16		
			Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	130		84		84		84		84		84		64,62			
		5.01.02.1.02.0003	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			23.125.500		-		-		-		18.854.132		18.854.132	93,33	81,53		
			Terbinanya Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah (Orang)	90		84		84		84		84		84		93,33			
		5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			721.827.780		-		-		-		670.374.649		670.374.649	83,33	92,87		
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya (Kerja Sama)	0		5		5		5		5		5		0			
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	4		4		4		4		4		4		100			
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi (Dokumen)	33		22		22		22		22		22		66,67			
		5.01.02.1.03.0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah			69.515.900		-		-		-		47.909.024		47.909.024	0	68,92		
			Terkendalinya Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya (Kerja Sama)	0		5		5		5		5		5		0			
		5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah			637.075.880		-		-		-		609.229.625		609.229.625	100	95,63		
			Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	4		4		4		4		4		4		100			
		5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			15.236.000		-		-		-		13.236.000		13.236.000	66,67	86,87		
			Terfasilitasi/Evaluasinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi (Dokumen)	33		22		22		22		22		22		66,67			
		5.01.02.1.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			-		-		-		-		-		-	0	0		
				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi (Dokumen)	2		0		0		0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		5.01.02.1.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi (Dokumen)	2		0		0		0		0		0		0			
		5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**			**2.895.253.248**		**-**		**-**		**-**		**1.491.907.336**		1.491.907.336	**91,67**	**51,53**	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA	Nilai Transaksi Saham Per kapita Per Provinsi (Rupiah) (Nilai)													0			
				Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Persen)	100												0			
				Total Dana Pihak Ketiga/PDRB ((%))													0			
				Aset Dana Pensiun/PDRB ((%))													0			
				Total Kredit/PDRB ((%))													0			
				Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)													0			
		5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			1.256.450.500		-		-		-		633.544.533		633.544.533	75	50,42		
			Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Renja Perangkat Daerah bidang perekonomian dan SDA yang dihasilkan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	1		1		1		1		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1		1		1		1		1		1		100			
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	1		1		1		1		1		1		100			
		5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian			246.254.000		-		-		-		163.091.904		163.091.904	100	66,23		
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	1		1		1		1		1		1		100			
		5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			460.196.500		-		-		-		153.386.571		153.386.571	100	33,33		
			Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1		1		1		1		1		1		100			
		5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA			550.000.000		-		-		-		317.066.058		317.066.058	100	57,65		
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	1		1		1		1		1		1		100			
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)													0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			999.999.600		-		-		-		483.435.398		483.435.398	100	48,34		
			Tercapainya Keselaran Program RKPD dengan Renja PD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1		1		1		1		1		1		100			
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	1		1		1		1		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1		1		1		1		1		1		100			
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1		1		1		1		1		1		100			
		5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			40.396.000		-		-		-		19.393.000		19.393.000	100	48,01		
			Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1		1		1		1		1		1		100			
		5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan			159.604.000		-		-		-		48.211.160		48.211.160	100	30,21		
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	1		1		1		1		1		1		100			
		5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			31.792.000		-		-		-		20.480.400		20.480.400	100	64,42		
			Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1		1		1		1		1		1		100			
		5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			768.207.600		-		-		-		395.350.838		395.350.838	100	51,46		
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1		1		1		1		1		1		100			
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembagunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)			100		100		100		100		100		0			
		5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			638.803.148		-		-		-		374.927.405		374.927.405	100	58,69		
			Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Renja Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahaan yang dihasilkan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1		1		1		1		1		1		100			
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	1		1		1		1		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1		1		1		1		1		1		100			
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	1		1		1		1		1		1		100			
		5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			157.986.800		-		-		-		91.620.640		91.620.640	100	57,99		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1		1		1		1		1		1		100			
		5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur			248.500.000		-		-		-		165.699.479		165.699.479	100	66,68		
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	1		1		1		1		1		1		100			
		5.01.03.1.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			53.589.548		-		-		-		29.462.171		29.462.171	100	54,98		
			Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1		1		1		1		1		1		100			
		5.01.03.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan			178.726.800		-		-		-		88.145.115		88.145.115	100	49,32		
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	1		1		1		1		1		1		100			
		5.02	**KEUANGAN**			**290.825.086.423**		**24.876.177.392**		**90.939.182.897**		**72.152.104.600**		**97.703.012.359**		285.670.477.248	**83839,36**	**98,23**		
		5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**			**278.630.258**		**-**		**124.513.870**		**4.640.000**		**116.406.340**		245.560.210	**100**	**88,13**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
			Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Pengelolaan Barang dan Penataausahaan Keuangan Perangkat Daerah (%)	100		0		0		0		100		100		100			
				Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (%)			0		0		0		0		0		0			
		5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah			278.630.258		-		124.513.870		4.640.000		116.406.340		245.560.210	100	88,13		
			Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga			278.630.258		-		124.513.870		4.640.000		116.406.340		245.560.210	100	88,13		
			Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**17.058.977.216**		**2.052.127.828**		**5.270.065.464**		**5.713.290.626**		**3.493.105.955**		16.528.589.873	**155,83**	**96,89**	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Nilai SAKIP (Nilai)	80						60				60		75			
				Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)									100		100		0			
				Nilai Sakip (Nilai)	80												0			
		5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			462.566.300		105.507.000		51.150.850		58.625.000		241.986.613		457.269.463	166,67	98,85		
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		2		0		1		1		4		200			
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2		0		0		1		1		2		100			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1		1		1		0		0		2		200			
		5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			278.440.000		94.552.000		51.150.850		54.925.000		75.285.000		275.912.850	200	99,09		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		2		0		1		1		4		200			
		5.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			153.699.000		6.455.000		-		3.700.000		141.830.913		151.985.913	100	98,89		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2		0		0		1		1		2		100			
		5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			30.427.300		4.500.000		-		-		24.870.700		29.370.700	200	96,53		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1		1		1		0		0		2		200			
		5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			13.499.501.817		1.451.950.830		4.670.130.753		5.207.632.734		1.720.679.903		13.050.394.220	107,14	96,67		
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	63		72		72		72		72		72		114,29			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		1		0		0		1	100				
		5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			13.470.067.817		1.442.950.830		4.649.756.223		5.207.632.734		1.720.679.903		13.021.019.690	114,29	96,67		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	63		72		72		72		72		72		114,29			
		5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			29.434.000		9.000.000		20.374.530		-		-		29.374.530	100	99,8		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		1		0		0		1		100			
		5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			44.557.000		-		-		13.800.000		-		13.800.000	16,67	30,97		
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6		0		0		2		0		2		33,33			
		5.02.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			44.557.000		-		-		13.800.000		-		13.800.000	33,33	30,97		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6		0		0		2		0		2		33,33			
		5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			930.669.700		98.372.715		93.647.872		94.961.089		632.581.554		919.563.230	210	98,81		
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		0		1		1		1		100			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		1		1		1		1		100			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		1		1		1		1		4		200			
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1		1		1		1		1		4		400			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6		3		2		2		8		15		250			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			27.578.800		15.000.000		-		1.909.000		10.339.200		27.248.200	100	98,8		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		0		1		1		1		100			
		5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			184.124.000		20.318.600		23.900.000		20.100.000		119.802.600		184.121.200	100	100		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		1		1		1		1		100			
		5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			23.499.900		207.950		8.277.000		6.282.800		8.731.800		23.499.550	200	100		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		1		1		1		1		4		200			
		5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			144.585.000		16.198.850		31.541.552		40.099.144		56.744.648		144.584.194	400	100		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1		1		1		1		1		4		400			
		5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			550.882.000		46.647.315		29.929.320		26.570.145		436.963.306		540.110.086	250	98,04		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6		3		2		2		8		15		250			
		5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			357.510.000		-		-		-		357.135.000		357.135.000	288,89	99,9		
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	9		0		0		0		26		26		288,89			
		5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			357.510.000		-		-		-		357.135.000		357.135.000	288,89	99,9		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	9		0		0		0		26		26		288,89			
		5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.375.872.399		374.016.979		390.931.241		272.964.598		323.195.940		1.361.108.758	141,67	98,93		
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		1		0		1		3		300			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		35		35		25		20		20		166,67			
		5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			50.500.000		3.151.500		6.959.700		-		39.246.000		49.357.200	300	97,74		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		1		0		1		3		300			
		5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			193.600.000		34.530.612		61.836.674		31.175.312		61.641.274		189.183.872	100	97,72		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
		5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.131.772.399		336.334.867		322.134.867		241.789.286		222.308.666		1.122.567.686	166,67	99,19		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		35		35		25		20		20		166,67			
		5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			388.300.000		22.280.304		64.204.748		65.307.205		217.526.945		369.319.202	231,73	95,11		
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	20		22		22		22		22		88		440			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	98		23		23		23		23		23		23,47			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			363.300.000		22.280.304		58.369.748		63.089.705		204.996.945		348.736.702	440	95,99		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	20		22		22		22		22		88		440			
		5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			25.000.000		-		5.835.000		2.217.500		12.530.000		20.582.500	23,47	82,33		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	98		23		23		23		23		23		23,47			
		5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**			**240.612.343.556**		**17.421.502.535**		**78.843.853.922**		**59.041.290.590**		**82.337.652.515**		237.644.299.562	**270664,81**	**98,77**	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Opini BPK (Opini)	4				4						4		100			
				IPKD (Indeks)	75								62.75		62,75		83,67			
				Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu (%)					100						100		0			
		5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			1.168.787.300		159.094.125		193.517.536		26.562.000		481.648.350		860.822.011	100	73,65		
			Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	3		3		3		3		3		3		100			
				Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	1		0		1		1		1		1		100			
				Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi (Dokumen)	2		0		0		0		2		2		100			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi (Orang)	36		36		36		36		36		36		100			
		5.02.02.1.04.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			685.738.300		159.094.125		173.248.186		11.031.000		135.388.450		478.761.761	100	69,82		
			Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	3		3		3		3		3		3		100			
		5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			119.322.000		-		20.269.350		9.000.000		26.250.000		55.519.350	100	46,53		
			Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	1		0		1		1		1		1		100			
		5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi			328.142.000		-		-		-		314.950.900		314.950.900	100	95,98		
			Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi (Dokumen)	2		0		0		0		2		2		100			
		5.02.02.1.04.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi			35.585.000		-		-		6.531.000		5.059.000		11.590.000	100	32,57		
			Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi (Orang)	36		36		36		36		36		36		100			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		5.02.02.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah			372.436.200		-		-		26.729.189		109.219.260		135.948.449	53,85	36,5		
			Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	13		0		0		0		1		1		7,69			
				Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	13		0		0		0		13		13		100			
		5.02.02.1.06.0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah			258.528.000		-		-		26.729.189		14.466.400		41.195.589	7,69	15,93		
			Terlaksananya Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	13		0		0		0		1		1		7,69			
		5.02.02.1.06.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah			113.908.200		-		-		-		94.752.860		94.752.860	100	83,18		
			Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	13		0		0		0		13		13		100			
			Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Persentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD (%)									20.84		20,84		0			
				Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (%)									30.82		30,82		0			
		5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			4.223.110.115		306.198.000		463.660.380		1.335.745.457		1.808.204.897		3.913.808.734	83,33	92,68		
			Presentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2		2		2		2		2		2		100			
				Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2		0		2		2		2		2		100			
				Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	2		2		0		2		2		2		100			
				Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	2		2		2		2		2		2		100			
				Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	1		1		1		1		1		1		100			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi (Orang)	20		0		0		0		0		0		0			
		5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS			803.815.100		111.204.000		180.269.408		305.325.457		174.894.320		771.693.185	100	96		
			Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2		2		2		2		2		2		100			
		5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			364.634.200		-		27.711.672		155.887.800		177.946.532		361.546.004	100	99,15		
			Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2		0		2		2		2		2		100			
		5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			1.181.437.653		94.765.000		-		200.494.700		879.982.872		1.175.242.572	100	99,48		
			Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	2		2		0		2		2		2		100			
		5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			1.225.172.362		13.229.000		162.679.300		575.122.700		456.830.673		1.207.861.673	100	98,59		
			Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	2		2		2		2		2		2		100			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		5.02.02.1.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			648.050.800		87.000.000		93.000.000		98.914.800		118.550.500		397.465.300	100	61,33		
			Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	1		1		1		1		1		1		100			
		5.02.02.1.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi (Orang)	20		0		0		0		0		0		0			
		5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota			656.888.258		21.904.679		-		97.956.096		407.078.624		526.939.399	89,61	80,22		
			Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota (Laporan)	11		0		0		0		11		11		100			
				Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota (Laporan)	11		0		0		0		7		7		63,64			
				Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Laporan)	11		0		0		0		11		11		100			
				Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi (Dokumen)	11		11		0		11		11		11		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	11		0		0		0		11		11		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	11		0		0		0		7		7		63,64			
				Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	11		0		0		0		11		11		100			
		5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota			101.299.585		-		-		-		99.681.700		99.681.700	100	98,4		
			Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota (Laporan)	11		0		0		0		11		11		100			
		5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota			114.609.123		-		-		-		102.227.800		102.227.800	63,64	89,2		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota (Laporan)	11		0		0		0		7		7		63,64			
		5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			123.703.300		-		-		79.157.346		27.585.100		106.742.446	100	86,29		
			Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Laporan)	11		0		0		0		11		11		100			
		5.02.02.1.02.0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota			56.368.900		21.904.679		-		8.106.400		14.025.000		44.036.079	100	78,12		
			Terlaksanannya Asistensi Pengeloaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi (Dokumen)	11		11		0		11		11		11		100			
		5.02.02.1.02.0008	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota			62.764.200		-		-		3.304.350		19.947.000		23.251.350	100	37,05		
			Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	11		0		0		0		11		11		100			
		5.02.02.1.02.0009	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota			99.246.500		-		-		1.321.200		65.763.124		67.084.324	63,64	67,59		
			Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	11		0		0		0		7		7		63,64			
		5.02.02.1.02.0010	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			98.896.650		-		-		6.066.800		77.848.900		83.915.700	100	84,85		
			Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	11		0		0		0		11		11		100			
		5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			233.249.978.783		16.763.311.931		78.014.386.794		57.341.465.259		79.161.621.292		231.280.785.276	100	99,16		
			Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	1		1		0		1		1		1		100			
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi (Laporan)	11		11		11		11		11		11		100			
		5.02.02.1.05.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah			605.687.134		-		-		-		526.757.283		526.757.283	100	86,97		
			Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			5.500.000.000		110.980.150		-		1.336.481.000		2.300.666.946		3.748.128.096	100	68,15		
			Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	1		1		0		1		1		1		100			
		5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi			227.144.291.649		16.652.331.781		78.014.386.794		56.004.984.259		76.334.197.063		227.005.899.897	100	99,94		
			Terkelolanya Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi (Laporan)	11		11		11		11		11		11		100			
			Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (%)					87.82						87,82		0			
				Persentase Penurunan SILPA (%)					-121.98						-121,98		0			
		5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			941.142.900		170.993.800		172.289.212		212.832.589		369.880.092		925.995.693	1758837,5	98,39		
			Persentase Penurunan SILPA	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	1		18		18		18		18		18		1800			
		5.02.02.1.03.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait			665.817.500		95.619.000		137.289.212		121.130.229		311.534.232		665.572.673	1800	99,96		
			Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	1		18		18		18		18		18		1800			
			Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	2		156		156		156		156		156		7800			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	2		0		0		0		140.497		140.497	7024850			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)	2		18		18		18		18		18		900			
		5.02.02.1.03.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD			164.810.800		57.224.800		35.000.000		48.221.200		23.741.600		164.187.600	7800	99,62		
			Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	2		156		156		156		156		156		7800			
		5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			77.783.100		17.750.000		-		21.450.000		34.604.260		73.804.260	7024850	94,88		
			Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	2		0		0		0		140.497		140.497	7024850			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		5.02.02.1.03.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank			32.731.500		400.000		-		22.031.160		-		22.431.160	900	68,53		
			Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)	2		18		18		18		18		18		900			
		5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**			**717.427.400**		**3.190.000**		**57.527.000**		**121.918.600**		**506.313.134**		688.948.734	**57,14**	**96,03**	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	OPINI BPK (Opini)	4				4						4		100			
				Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (%)					7.93						7,93		0			
		5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah			717.427.400		3.190.000		57.527.000		121.918.600		506.313.134		688.948.734	57,14	96,03		
			Persentase Penambahan Nilai Asset Tetap	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	1		0		1		1		1		1		100			
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1		0		1		1		1		1		100			
				Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	36		0		0		0		36		36		100			
		5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga			113.396.350		-		5.566.000		12.352.200		95.303.500		113.221.700	100	99,85		
			Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	1		0		1		1		1		1		100			
		5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.02.03.1.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah			297.639.500		-		13.256.000		49.676.600		218.284.232		281.216.832	100	94,48		
			Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		5.02.03.1.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			71.888.500		-		10.000.000		19.574.500		42.209.300		71.783.800	100	99,85		
			Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1		0		1		1		1		1		100			
		5.02.03.1.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			234.503.050		3.190.000		28.705.000		40.315.300		150.516.102		222.726.402	100	94,98		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	36		0		0		0		36		36		100			
		5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**29.461.502.493**		**5.357.757.029**		**6.419.413.341**		**6.340.198.003**		**9.874.002.316**		27.991.370.689	**53,2**	**95,01**	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
			Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)			0		0		0		100		100		0			
				Indeks Pelayanan Publik (Nilai)	80								50		50		62,5			
				Nilai SAKIP (Nilai)	80												0			
		5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			607.112.847		-		-		118.574.310		472.971.655		591.545.965	62,5	97,44		
			Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6		2		0		1		3		3		50			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4		0		0		1		3		3		75			
		5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			89.219.994		-		-		6.784.600		78.253.652		85.038.252	50	95,31		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6		2		0		1		3		3		50			
		5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			517.892.853		-		-		111.789.710		394.718.003		506.507.713	75	97,8		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4		0		0		1		3		3		75			
		5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			18.565.562.903		4.850.122.478		4.515.338.438		4.206.607.906		4.222.720.425		17.794.789.247	66,67	95,85		
			Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	97		91		92		92		97		97		100			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7		0		0		0		7		7		100			
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4		0		0		0		0		0		0			
		5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			18.166.582.903		4.850.122.478		4.442.921.438		4.133.377.906		3.971.240.425		17.397.662.247	100	95,77		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	97		91		92		92		97		97		100			
		5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			398.980.000		-		72.417.000		73.230.000		251.480.000		397.127.000	100	99,54		
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7		0		0		0		7		7		100			
		5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4		0		0		0		0		0		0			
		5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			151.607.128		-		24.014.900		47.663.600		69.633.228		141.311.728	38,46	93,21		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	13		0		4		4		5		5		38,46			
		5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			151.607.128		-		24.014.900		47.663.600		69.633.228		141.311.728	38,46	93,21		
			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	13		0		4		4		5		5		38,46			
		5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			222.310.000		-		9.306.000		93.561.940		110.028.140		212.896.080	100	95,77		
			Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		5.02.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah			123.580.000		-		9.306.000		66.054.440		41.595.880		116.956.320	100	94,64		
			Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah			98.730.000		-		-		27.507.500		68.432.260		95.939.760	100	97,17		
			Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			95.218.400		-		-		49.950.000		37.911.353		87.861.353	50	92,27		
			Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3		0		0		1		0		0		0			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3		0		0		0		3		3		100			
		5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			50.000.000		-		-		49.950.000		-		49.950.000	0	99,9		
			Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3		0		0		1		0		0		0			
		5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			45.218.400		-		-		-		37.911.353		37.911.353	100	83,84		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3		0		0		0		3		3		100			
		5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.410.318.465		30.870.950		413.762.648		704.949.570		1.153.717.547		2.303.300.715	39,57	95,56		
			Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	17		0		0		8		6		6		35,29			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	17		0		0		0		4		4		23,53			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	18		0		4		6		9		9		50			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	19		0		0		1		1		1		5,26			
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	23		0		1		1		20		20		86,96			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	22		0		0		0		8		8		36,36			
		5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			61.270.950		-		19.412.500		19.343.000		21.648.560		60.404.060	35,29	98,59		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	17		0		0		8		6		6		35,29			
		5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			216.912.900		3.061.000		39.582.300		70.986.500		86.302.415		199.932.215	23,53	92,17		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	17		0		0		0		4		4		23,53			
		5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			498.529.742		13.609.950		114.168.950		177.004.850		186.220.350		491.004.100	50	98,49		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	18		0		4		6		9		9		50			
		5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			496.098.850		-		39.356.700		209.261.200		238.052.050		486.669.950	5,26	98,1		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	19		0		0		1		1		1		5,26			
		5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			137.575.000		-		24.989.850		24.435.600		77.320.500		126.745.950	86,96	92,13		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	23		0		1		1		20		20		86,96			
		5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			999.931.023		14.200.000		176.252.348		203.918.420		544.173.672		938.544.440	36,36	93,86		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	22		0		0		0		8		8		36,36			
		5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.981.718.499		-		-		6.105.000		1.944.269.735		1.950.374.735	55,1	98,42		
			Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	33		0		0		0		1		1		3,03			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	53		0		0		0		33		33		62,26			
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		1		1		100			
		5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel			45.000.000		-		-		-		43.000.000		43.000.000	3,03	95,56		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	33		0		0		0		1		1		3,03			
		5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.840.658.051		-		-		6.105.000		1.813.569.735		1.819.674.735	62,26	98,86		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	53		0		0		0		33		33		62,26			
		5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			96.060.448		-		-		-		87.700.000		87.700.000	100	91,3		
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		1		1		100			
		5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.111.746.773		462.972.855		1.079.753.080		782.927.109		1.401.430.682		3.727.083.726	45,29	90,64		
			Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	23		0		1		7		14		14		60,87			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	84		18		24		21		21		21		25			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	18		3		3		3		9		9		50			
		5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			77.080.000		362.000		7.564.950		7.510.000		30.562.400		45.999.350	60,87	59,68		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	23		0		1		7		14		14		60,87			
		5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.410.163.600		60.232.315		277.996.330		407.821.209		505.121.272		1.251.171.126	25	88,73		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	84		18		24		21		21		21		25			
		5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.624.503.173		402.378.540		794.191.800		367.595.900		865.747.010		2.429.913.250	50	92,59		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	18		3		3		3		9		9		50			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.315.907.478		13.790.746		377.238.275		329.858.568		461.319.551		1.182.207.140	42,62	89,84		
			Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	48		1		15		21		10		10		20,83				
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	114		0		49		34		44		44		38,6				
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	19		1		1		4		13		13		68,42				
		5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			529.247.258		9.648.246		112.722.771		223.326.568		147.597.250		493.294.835	20,83	93,21		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	48		1		15		21		10		10		20,83				
		5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			155.718.000		-		53.609.504		29.321.000		68.180.000		151.110.504	38,6	97,04		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	114		0		49		34		44		44		38,6				
		5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			630.942.220		4.142.500		210.906.000		77.211.000		245.542.301		537.801.801	68,42	85,24		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	19		1		1		4		13		13		68,42				
		5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**			**113.692.000**		**-**		**-**		**55.008.000**		**53.799.320**		108.807.320	**50**	**95,7**	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
			Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan	Efektifitas Pendapatan Daerah (%)	97.7												0				
				Efektifitas pendapatan daerah (persentase) (%)			0		0		0		88.04		88,04		0				
		5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			113.692.000		-		-		55.008.000		53.799.320		108.807.320	50	95,7		
			Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	2		0		0		1		1		1		50				
		5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			113.692.000		-		-		55.008.000		53.799.320		108.807.320	50	95,7		
			Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	2		0		0		1		1		1		50				
		5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**			**2.582.513.500**		**41.600.000**		**223.809.300**		**875.758.781**		**1.321.732.779**		2.462.900.860	**56,25**	**95,37**	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
			Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan	Efektifitas pendapatan daerah (persentase) (%)			0		0		0		88.04		88,04		0				
				Efektifitas Pendapatan Daerah (%)	97.7												0				
		5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			2.582.513.500		41.600.000		223.809.300		875.758.781		1.321.732.779		2.462.900.860	56,25	95,37		
			Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	4		0		0		1		3		3		75				
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	12		0		0		0		0		0		0				
				Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD)	12		0		0		0		12		12		100				
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Laporan)	2		0		0		1		1		1		50				

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah			140.929.000		-		-		38.542.820		94.215.410		132.758.230	75	94,2		
			Tersedianya Analisa dan Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah, serta Tersusunnya Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	4		0		0		1		3		3		75			
		5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	12		0		0		0		0		0		0			
		5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah			2.255.768.500		41.600.000		223.809.300		726.618.361		1.162.401.029		2.154.428.690	100	95,51		
			Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD)	12		0		0		0		12		12		100			
		5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			185.816.000		-		-		110.597.600		65.116.340		175.713.940	50	94,56		
			Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Laporan)	2		0		0		1		1		1		50			
		5.03	**KEPEGAWAIAN**			**8.302.959.007**		**1.428.970.930**		**2.318.173.508**		**1.320.603.943**		**2.830.376.210**		7.898.124.591	**69,1**	**95,12**		
		5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**6.199.447.052**		**1.337.366.794**		**1.844.067.955**		**940.893.588**		**1.810.136.958**		5.932.465.295	**73,53**	**95,69**	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)			30		50		70		100		100		0			
				Nilai SAKIP (Nilai)	86												0			
		5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			107.284.800		-		24.390.920		36.844.500		46.046.580		107.282.000	120	100		
			Presentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1		1		0		0		0		1		100			
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		0		0		1		2		200			
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		0		0		1		2		200			
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2		1		0		0		1		2		100			
		5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			86.771.000		-		12.070.420		32.812.000		41.888.580		86.771.000	100	100		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1		1		0		0		0		1		100			
		5.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			9.527.000		-		7.832.000		1.000.000		695.000		9.527.000	200	100		
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		0		0		1		2		200			
		5.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			6.495.500		-		-		3.032.500		3.463.000		6.495.500	200	100		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		0		0		1		2		200			
		5.03.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			4.491.300		-		4.488.500		-		-		4.488.500	100	99,94		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2		1		0		0		1		2		100			
		5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.451.440.363		1.178.681.434		1.706.808.475		726.588.876		1.573.270.340		5.185.349.125	116,67	95,12		
			Presentase Teraksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	48		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		4		4		400			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18		4		5		4		5		18		100			
		5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.372.459.863		1.178.681.434		1.706.808.475		681.031.476		1.539.847.240		5.106.368.625	0	95,05		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	48		0		0		0		0		0		0			
		5.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			56.400.000		-		-		37.600.000		18.800.000		56.400.000	400	100		
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		4		4		400			
		5.03.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			9.327.500		-		-		2.999.900		6.327.600		9.327.500	100	100		
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
		5.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			3.253.000		-		-		-		3.253.000		3.253.000	100	100		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		5.03.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			10.000.000		-		-		4.957.500		5.042.500		10.000.000	100	100		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18		4		5		4		5		18		100			
		5.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Presentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.03.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			73.224.000		-		13.529.000		24.505.000		35.190.000		73.224.000	50	100		
			Presentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1		1		0		0		0		1		100			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	30		0		0		0		30		30		100			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	100		0		0		0		0		0		0			
		5.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			67.824.000		-		13.529.000		24.505.000		29.790.000		67.824.000	100	100		
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1		1		0		0		0		1		100			
		5.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			5.400.000		-		-		-		5.400.000		5.400.000	100	100		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	30		0		0		0		30		30		100			
		5.03.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	100		0		0		0		0		0		0			
		5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			286.174.300		95.154.240		20.002.120		108.934.280		62.042.060		286.132.700	100	99,99		
			Presentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12		3		3		3		3		12		100			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		0		0		0		1		100			
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2		0		0		1		1		2		100			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2		1		0		0		4		4		200			
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.020.000		-		-		978.400		-		978.400	100	95,92		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		1		0		1		100			
		5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			74.713.300		23.030.000		5.000.000		38.404.000		8.279.300		74.713.300	100	100		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12		3		3		3		3		12		100			
		5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			15.000.000		10.000.000		-		-		5.000.000		15.000.000	100	100		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		0		0		0		1		100			
		5.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			25.920.000		-		-		17.496.000		8.424.000		25.920.000	100	100		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2		0		0		1		1		2		100			
		5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			169.521.000		62.124.240		15.002.120		52.055.880		40.338.760		169.521.000	200	100		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2		1		0		0		4		4		200			
		5.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Presentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	15		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.03.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	15		0		0		0		0		0		0			
		5.03.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			186.671.020		54.926.120		63.747.140		13.604.554		54.393.206		186.671.020	100	100		
			Presentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		0		0		1		0		1		100			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		1		0		0		0		1		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		0		0		0		1		100			
		5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.692.000		-		-		1.692.000		-		1.692.000	100	100		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		0		0		1		0		1		100			
		5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			24.275.000		2.000.000		2.000.000		4.469.874		15.805.126		24.275.000	100	100		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		1		0		0		0		1		100			
		5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			160.704.020		52.926.120		61.747.140		7.442.680		38.588.080		160.704.020	100	100		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		0		0		0		1		100			
		5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			94.652.569		8.605.000		15.590.300		30.416.378		39.194.772		93.806.450	25	99,11		
			Presentase Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	10		10		0		0		0		10		100			
				Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	10		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			94.652.569		8.605.000		15.590.300		30.416.378		39.194.772		93.806.450	100	99,11		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	10		10		0		0		0		10		100			
		5.03.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	10		0		0		0		0		0		0			
		5.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30		0		0		0		0		0		0			
		5.03.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**			**2.103.511.955**		**91.604.136**		**474.105.553**		**379.710.355**		**1.020.239.252**		1.965.659.296	**61,94**	**93,45**	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian	Nilai Aspek Pengadaan, Perencanaan Kebutuhan, Sistem Informasi (Nilai)			87		87		87		87		87		0			
				Nilai Aspek Promosi, Mutasi dan Pengembangan Karier (Nilai)			55		55		55		55		55		0			
				Nilai Aspek Manajemen Kinerja, Pengajian, Penghragaan dan Disiplin, dan Perlindungan dan Pelayanan (Nilai)			109.5		109.5		109.5		109.5		109,5		0			
				Indeks Sistem Merit (Point)	280		251.5		251.5		251.5		251.5		251,5		89,82			
		5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			897.036.500		51.316.260		447.099.453		89.150.630		296.850.609		884.416.952	71,43	98,59		
			Presentase Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	1		1		0		0		0		1		100			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	1		1		0		0		0		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)	1		1		0		0		0		1		100			
				Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)	1		1		0		0		0		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1		1		0		0		0		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.03.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			50.021.000		15.488.420		4.296.000		20.815.700		4.586.000		45.186.120	100	90,33		
			Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	1		1		0		0		0		1		100			
		5.03.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			303.433.930		35.027.840		38.642.000		65.205.500		161.537.694		300.413.034	100	99		
			Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	1		1		0		0		0		1		100			
		5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			7.404.670		-		641.435		620.000		6.143.235		7.404.670	100	100		
			Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)	1		1		0		0		0		1		100			
		5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN			119.175.000		800.000		-		-		118.091.500		118.891.500	100	99,76		
			Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)	1		1		0		0		0		1		100			
		5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			417.001.900		-		403.520.018		2.509.430		6.492.180		412.521.628	100	98,93		
			Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1		1		0		0		0		1		100			
		5.03.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.03.02.1.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN			724.310.600		25.287.876		12.517.180		2.460.000		669.352.143		709.617.199	100	97,97		
			Presentase Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah (Dokumen)	1		1		0		0		0		1		100			
				Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Laporan)	1		1		0		0		0		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	1		1		0		0		0		1		100			
		5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN			11.162.000		4.800.000		826.300		700.000		4.835.700		11.162.000	100	100		
			Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah (Dokumen)	1		1		0		0		0		1		100			
		5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			29.148.600		9.822.080		582.700		1.760.000		16.411.900		28.576.680	100	98,04		
			Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Laporan)	1		1		0		0		0		1		100			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN			684.000.000		10.665.796		11.108.180		-		648.104.543		669.878.519	100	97,94		
			Terlaksananya Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	1		1		0		0		0		1		100			
		5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN			309.614.800		15.000.000		-		173.762.300		20.852.500		209.614.800	50	67,7		
			Presentase Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola (Dokumen)	1		1		0		0		0		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional (Dokumen)	1		1		0		0		0		1		100			
		5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terkelolanya Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.03.02.1.03.0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terkelolanya Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN			301.672.200		15.000.000		-		171.672.200		15.000.000		201.672.200	100	66,85		
			Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola (Dokumen)	1		1		0		0		0		1		100			
		5.03.02.1.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional			7.942.600		-		-		2.090.100		5.852.500		7.942.600	100	100		
			Terfasilitasinya Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional (Dokumen)	1		1		0		0		0		1		100			
		5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			172.550.055		-		14.488.920		114.337.425		33.184.000		162.010.345	42,95	93,89		
			Presentase Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja, Pembinaan Disiplin dan Pemberiaan Penghargaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	1		1		0		0		0		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang)	300		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa (Orang)	150		1		0		0		0		1		0,67			
				Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)	30		10		5		5		10		30		100			
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN (Laporan)	1		1		0		0		0		1		100			
		5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			8.083.000		-		4.357.400		3.725.600		-		8.083.000	100	100		
			Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	1		1		0		0		0		1		100			
		5.03.02.1.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang)	300		0		0		0		0		0		0			
		5.03.02.1.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai			14.478.700		-		-		13.471.820		-		13.471.820	0,67	93,05		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa (Orang)	150		1		0		0		0		1		0,67			
		5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN			147.856.955		-		8.000.855		97.140.005		33.184.000		138.324.860	100	93,55		
			Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)	30		10		5		5		10		30		100			
		5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.03.02.1.04.0010	Evaluasi Disiplin ASN			2.131.400		-		2.130.665		-		-		2.130.665	100	99,97		
			Terlaksananya Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN (Laporan)	1		1		0		0		0		1		100			
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**14.329.102.268**		**1.917.515.655**		**2.279.066.910**		**3.511.140.591**		**5.210.807.625**		12.918.530.781	**59,67**	**90,16**		
	5.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				**9.465.942.268**		**1.917.515.655**		**1.883.411.490**		**2.177.738.111**		**2.547.262.491**		8.525.927.747	**75,34**	**90,07**	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
			Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)													0			
				Persentase Ketercapaian Layanan Administrasi Perangkat Daerah (%)	100												0			
		5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			28.120.000		-		-		4.200.000		23.861.000		28.061.000	50	99,79		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	11		0		0		0		11		11		100			
		5.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			28.120.000		-		-		4.200.000		23.861.000		28.061.000	100	99,79		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	11		0		0		0		11		11		100			
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	11		0		0		0		0		0		0			
		5.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	11		0		0		0		0		0		0			
		5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.997.691.068		1.527.439.661		1.494.981.706		1.805.741.706		1.815.420.661		6.643.583.734	101,85	94,94		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2		0		0		0		2		2		100			
		5.04.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			15.179.592		300.000		1.800.000		4.300.000		8.736.000		15.136.000	100	99,71		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2		0		0		0		2		2		100			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	54		59		59		57		57		57		105,56			
		5.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			6.907.991.476		1.527.139.661		1.493.181.706		1.764.181.706		1.769.424.661		6.553.927.734	105,56	94,87		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	54		59		59		57		57		57		105,56			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4		0		0		0		4		4		100			
		5.04.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			74.520.000		-		-		37.260.000		37.260.000		74.520.000	100	100		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4		0		0		0		4		4		100			
		5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			68.324.000		-		-		-		57.192.000		57.192.000	31,25	83,71		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	58		0		0		0		0		0		0			
		5.04.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	58		0		0		0		0		0		0			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	8		0		0		0		5		5		62,5			
		5.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			68.324.000		-		-		-		57.192.000		57.192.000	62,5	83,71		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	8		0		0		0		5		5		62,5			
		5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			145.948.480		17.199.000		13.321.444		38.619.864		47.069.141		116.209.449	66,67	79,62		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0		0		0			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
		5.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			10.000.000		2.416.000		-		-		7.550.000		9.966.000	100	99,66		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		2		2		200			
		5.04.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			28.480.480		-		2.966.000		3.566.000		21.947.500		28.479.500	200	100		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		2		2		200			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0		0		0			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6		0		0		0		2		2		33,33			
		5.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			107.468.000		14.783.000		10.355.444		35.053.864		17.571.641		77.763.949	33,33	72,36		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6		0		0		0		2		2		33,33			
		5.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			124.500.000		-		-		-		124.000.000		124.000.000	25	99,6		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0		1		1		50			
		5.04.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			124.500.000		-		-		-		124.000.000		124.000.000	50	99,6		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0		1		1		50			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.04.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.943.378.720		364.151.994		333.171.340		323.753.971		378.179.828		1.399.257.133	100	72		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3		0		0		0		3		3		100			
		5.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			449.800.000		65.767.314		103.637.340		47.208.151		168.858.368		385.471.173	100	85,7		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3		0		0		0		3		3		100			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		5.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.493.578.720		298.384.680		229.534.000		276.545.820		209.321.460		1.013.785.960	100	67,88		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			157.980.000		8.725.000		41.937.000		5.422.570		101.539.861		157.624.431	126,67	99,77		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		0		0		0		9		9		180			
		5.04.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			107.980.000		8.725.000		41.937.000		5.422.570		51.539.861		107.624.431	180	99,67		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		0		0		0		9		9		180			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.04.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		2		2		200			
		5.04.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			50.000.000		-		-		-		50.000.000		50.000.000	200	100		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		2		2		200			
		5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**			**4.863.160.000**		**-**		**395.655.420**		**1.333.402.480**		**2.663.545.134**		4.392.603.034	**10,06**	**90,32**	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
			Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Dasar, Kader, Manajerial, dan Fungsional	Persentase ASN yang menyelesaikan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (%)													0			
				Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia (%)	100												0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100												0			
		5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			4.556.880.000		-		346.692.420		1.333.402.480		2.509.006.310		4.189.101.210	5,19	91,93		
			Jumlah ASN Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi (Dokumen)	30		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Orang)	385		0		40		0		0		40		10,39			
		5.04.02.1.02.0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terkelolanya Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi (Dokumen)	30		0		0		0		0		0		0			
		5.04.02.1.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			4.556.880.000		-		346.692.420		1.333.402.480		2.509.006.310		4.189.101.210	10,39	91,93		
			Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Orang)	385		0		40		0		0		40		10,39			
			Meningkatnya Layanan Penjamin Mutu dan Sertifikasi Kompetensi	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (Persentase)													0			
		5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			149.930.000		-		48.963.000		-		40.274.500		89.237.500	16,67	59,52		
			Jumlah dokumen pelaksanaan kerja sama antar lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.04.02.1.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
			Jumlah laporan pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi dan sumber belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar (Laporan)	2		0		1		0		0		1		50			
		5.04.02.1.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar			80.000.000		-		48.963.000		-		29.038.500		78.001.500	50	97,5		
			Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar (Laporan)	2		0		1		0		0		1		50			
			Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi (Orang)	135		0		0		0		0		0		0			
		5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota			69.930.000		-		-		-		11.236.000		11.236.000	0	16,07		
			Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi (Orang)	135		0		0		0		0		0		0			
			Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (%)													0			
		5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis			156.350.000		-		-		-		114.264.324		114.264.324	0	73,08		
			Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)	47		0		0		0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		5.04.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			156.350.000		-		-		-		114.264.324		114.264.324	0	73,08		
			Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)	47		0		0		0		0		0		0			
		5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**			**1.195.173.200**		**-**		**-**		**-**		**671.492.807**		671.492.807	**41,67**	**56,18**		
		5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**			**1.195.173.200**		**-**		**-**		**-**		**671.492.807**		671.492.807	**41,67**	**56,18**	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan	Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Inovasi yang Terimplementasi (Persen)	100												0			
				Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)													0			
		5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			546.315.000		-		-		-		37.207.400		37.207.400	50	6,81		
			Tersedianya Rekomendasi Kegiatan Hasil Penelitian Bidang Sosial Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	2		1		1		1		1		1		50			
		5.05.02.1.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial			546.315.000		-		-		-		37.207.400		37.207.400	50	6,81		
			Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	2		1		1		1		1		1		50			
		5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			520.200.000		-		-		-		516.959.900		516.959.900	33,33	99,38		
			Tersedianya Data dan Kajian Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)	1		1		1		1		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	0		1		1		1		1		1		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.05.02.1.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan			20.200.000		-		-		-		16.959.900		16.959.900	100	83,96		
			Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)	1		1		1		1		1		1		100			
		5.05.02.1.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan			500.000.000		-		-		-		500.000.000		500.000.000	0	100		
			Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	0		1		1		1		1		1		0			
		5.05.02.1.03.0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.05.02.1.03.0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			128.658.200		-		-		-		117.325.507		117.325.507	50	91,19		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedinya Jumlah Teknologi dan Inovasi yang Dikembangkan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	1		1		1		1		1		1		100			
		5.05.02.1.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan			128.658.200		-		-		-		117.325.507		117.325.507	100	91,19		
			Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	1		1		1		1		1		1		100			
		5.06	**PENGELOLAAN PERBATASAN**			**3.749.117.419**		**511.566.683**		**1.138.299.242**		**1.080.382.695**		**5.338.489.784**		8.068.738.404	**47,05**	**215,22**		
		5.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**3.582.900.919**		**511.566.683**		**1.076.670.634**		**1.080.382.695**		**5.338.489.784**		8.007.109.796	**39,21**	**223,48**	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
			Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)													0			
		5.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5.000.000		-		-		-		5.000.000		5.000.000	100	100		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		5.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5.000.000		-		-		-		5.000.000		5.000.000	100	100		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		5.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.707.026.779		467.686.583		941.638.395		391.917.775		4.929.525.723		6.730.768.476	135,71	248,64		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	14		21		21		21		24		24		171,43			
		5.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.664.846.779		467.686.583		941.638.395		365.277.775		4.913.985.723		6.688.588.476	171,43	250,99		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	14		21		21		21		24		24		171,43			
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1		0		0		1		1		1		100			
		5.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			42.180.000		-		-		26.640.000		15.540.000		42.180.000	100	100		
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1		0		0		1		1		1		100			
		5.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			317.332.200		-		37.299.274		-		188.432.409		225.731.683	8,33	71,13		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12		0		0		0		1		1		8,33			
		5.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			27.665.200		-		-		-		7.206.209		7.206.209	8,33	26,05		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12		0		0		0		1		1		8,33			
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12		0		1		0		1		1		8,33			
		5.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			16.633.000		-		4.828.950		-		8.707.500		13.536.450	8,33	81,38		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12		0		1		0		1		1		8,33			
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12		0		1		0		1		1		8,33			
		5.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			26.855.000		-		3.528.000		-		18.285.800		21.813.800	8,33	81,23		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12		0		1		0		1		1		8,33			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		1		1		0		1		1		8,33			
		5.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			246.179.000		-		28.942.324		-		154.232.900		183.175.224	8,33	74,41		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		1		1		0		1		1		8,33			
		5.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			59.000.000		-		-		-		58.850.000		58.850.000	33,33	99,75		
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0		0		0		0			
		5.06.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0		0		0		0			
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0		0		0			
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		1		1		100			
		5.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			59.000.000		-		-		-		58.850.000		58.850.000	100	99,75		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		1		1		100			
		5.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			322.236.940		43.880.100		62.538.965		688.464.920		129.978.452		924.862.437	20,83	287,01		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		0		1		1		1		1		8,33			
		5.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			56.031.000		-		18.658.865		653.360.840		11.164.640		683.184.345	8,33	1219,3		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		0		1		1		1		1		8,33			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		1		1		1		1		4		33,33			
		5.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			266.205.940		43.880.100		43.880.100		35.104.080		118.813.812		241.678.092	33,33	90,79		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		1		1		1		1		4		33,33			
		5.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			172.305.000		-		35.194.000		-		26.703.200		61.897.200	13,89	35,92		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	12		0		1		0		1		2		16,67			
		5.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			111.265.000		-		3.139.000		-		7.968.200		11.107.200	16,67	9,98		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	12		0		1		0		1		2		16,67			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	12		0		1		0		1		2		16,67			
		5.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			11.500.000		-		4.300.000		-		5.900.000		10.200.000	16,67	88,7		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	12		0		1		0		1		2		16,67			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	12		0		1		0		1		1		8,33			
		5.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			49.540.000		-		27.755.000		-		12.835.000		40.590.000	8,33	81,93		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	12		0		1		0		1		1		8,33			
		5.06.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN**			**166.216.500**		**-**		**61.628.608**		**-**		**-**		61.628.608	**66,67**	**37,08**	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
			Meningkatnya pemanfaatan kawasan perbatasan	Persentase infrastruktur terbangun di kawasan perbatasan (Persentase)													0			
		5.06.02.1.01	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama			89.107.500		-		25.595.514		-		-		25.595.514	100	28,72		
			Jumlah dokumen hasil koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kebijakan otonomi daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah (Dokumen)	1		0		1		0		0		1		100			
		5.06.02.1.01.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah			13.265.000		-		13.265.000		-		-		13.265.000	100	100		
			Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah (Dokumen)	1		0		1		0		0		1		100			
			Jumlah dokumen rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun (Dokumen)	1		0		1		0		0		1		100			
		5.06.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan			75.842.500		-		12.330.514		-		-		12.330.514	100	16,26		
			Tersusunnya Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun (Dokumen)	1		0		1		0		0		1		100			
		5.06.02.1.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan			39.009.000		-		36.033.094		-		-		36.033.094	100	92,37		
			Jumlah dokumen hasil inventarisasi potensi sumber daya untuk pengusulan penetapan zona pengembangan ekonomi sosial budaya, lingkungan Hidup, dan zona lainnya di kawasan perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan (Dokumen)	1		0		1		0		0		1		100			
		5.06.02.1.02.0004	Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan			13.265.000		-		10.921.700		-		-		10.921.700	100	82,33		
			Terlaksananya Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan (Dokumen)	1		0		1		0		0		1		100			
			Jumlah dokumen hasil koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pembangunan kawasan perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasaan (Dokumen)	1		0		1		0		0		1		100			
		5.06.02.1.02.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan			25.744.000		-		25.111.394		-		-		25.111.394	100	97,54		
			Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasaan (Dokumen)	1		0		1		0		0		1		100			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		5.06.02.1.03	Monitoring dan Evaluasi			38.100.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta Evaluasi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.06.02.1.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan			19.800.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
			Jumlah laporan pembangunan kawasan perbatasan	Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.06.02.1.03.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan			18.300.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.07	**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**			**8.606.105.991**		**1.210.583.036**		**1.484.338.927**		**1.507.350.937**		**3.611.963.977**		7.814.236.877	**55,94**	**90,8**		
		5.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**7.870.137.238**		**1.078.122.159**		**1.442.510.326**		**1.460.580.901**		**3.128.686.520**		7.109.899.906	**61,23**	**90,34**	BADAN PENGHUBUNG	
			Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Nilai SAKIP OPD (Nilai)	80		80		80		80		80		80		100			
				Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)			1078122159		1442510326		1460580901		3128686520		7.109.899.906		0			
		5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			113.224.000		35.639.030		9.697.000		8.966.420		38.490.340		92.792.790	66,67	81,96		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1		1		0		0		0		1		100			
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		1		0		0		0		1		100			
		5.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			29.556.000		22.802.710		-		-		5.000.000		27.802.710	100	94,07		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1		1		0		0		0		1		100			
		5.07.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.07.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			-		-		-		-		-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.07.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			24.556.000		-		-		-		22.270.660		22.270.660	100	90,69		
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		5.07.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			29.556.000		-		-		8.966.420		11.219.680		20.186.100	100	68,3		
			Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		5.07.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			29.556.000		12.836.320		9.697.000		-		-		22.533.320	100	76,24		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		1		0		0		0		1		100			
		5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.581.099.372		385.730.250		1.098.612.533		903.114.036		994.016.585		3.381.473.404	51,72	94,43		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	29		32		32		32		32		32		110,34			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		0		0		0		1		100			
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.480.503.372		361.870.966		1.093.612.533		903.114.036		922.976.585		3.281.574.120	110,34	94,28		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	29		32		32		32		32		32		110,34			
		5.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			71.040.000		-		-		-		71.040.000		71.040.000	100	100		
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		5.07.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			29.556.000		23.859.284		5.000.000		-		-		28.859.284	100	97,64		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		0		0		0		1		100			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		5.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.07.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			37.436.000		10.860.004		-		-		21.795.120		32.655.124	0	87,23		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		1		0		0		0		0		0			
		5.07.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			1.190.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.07.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.07.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			36.246.000		10.860.004		-		-		21.795.120		32.655.124	0	90,09		
			Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		1		0		0		0		0		0			
		5.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			43.032.000		-		-		-		42.598.000		42.598.000	100	98,99		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1		1		0		0		0		1		100			
		5.07.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			43.032.000		-		-		-		42.598.000		42.598.000	100	98,99		
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1		1		0		0		0		1		100			
		5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			327.532.280		81.648.234		21.303.707		41.456.063		182.986.192		327.394.196	60	99,96		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		0		0		0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		1		0		0		0		0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		0		0		0		1		100			
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		5.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			130.000.000		21.444.050		7.315.050		-		101.172.071		129.931.171	0	99,95		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		0		0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		5.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			16.632.280		-		4.875.858		11.753.865		-		16.629.723	0	99,98		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		1		0		0		0		0			
		5.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			19.740.000		14.468.000		5.240.000		-		-		19.708.000	100	99,84		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		0		0		0		1		100			
		5.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			34.860.000		8.511.528		3.872.799		10.101.999		12.366.327		34.852.653	100	99,98		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		5.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			126.300.000		37.224.656		-		19.600.199		69.447.794		126.272.649	100	99,98		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			547.121.000		-		29.370.000		-		500.525.999		529.895.999	66,67	96,85		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0		3		3		150			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		1		0		1		1		100			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0		1		1		50			
		5.07.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.07.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			300.000.000		-		-		-		295.550.000		295.550.000	100	98,52		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		1		1		100			
		5.07.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			15.000.000		-		-		-		14.490.000		14.490.000	150	96,6		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0		3		3		150			
		5.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			182.121.000		-		29.370.000		-		141.096.000		170.466.000	100	93,6		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		1		0		1		1		100			
		5.07.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			50.000.000		-		-		-		49.389.999		49.389.999	50	98,78		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0		1		1		50			
		5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			921.304.301		149.038.041		95.752.934		114.762.324		518.681.358		878.234.657	66,67	95,33		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		5.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			87.500.000		28.089.968		5.496.373		22.723.794		27.957.948		84.268.083	100	96,31		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		5.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			833.804.301		120.948.073		90.256.561		92.038.530		490.723.410		793.966.574	100	95,22		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.299.388.285		415.206.600		187.774.152		392.282.058		829.592.926		1.824.855.736	92,86	79,36		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		5		5		5		5		5		100			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7		5		5		5		5		5		71,43			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7		7		7		7		7		7		100			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	40		40		40		40		40		40		100			
		5.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			1.005.345.000		149.229.682		75.090.228		147.949.862		399.281.085		771.550.857	100	76,74		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		5		5		5		5		5		100			
		5.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.156.787.500		228.387.105		94.008.028		228.972.436		366.546.166		917.913.735	71,43	79,35		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7		5		5		5		5		5		71,43			
		5.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			55.736.669		10.159.383		7.663.057		-		37.564.676		55.387.116	100	99,37		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7		7		7		7		7		7		100			
		5.07.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			81.519.116		27.430.430		11.012.839		15.359.760		26.200.999		80.004.028	100	98,14		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	40		40		40		40		40		40		100			
		5.07.02	**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**			**735.968.753**		**132.460.877**		**41.828.601**		**46.770.036**		**483.277.457**		704.336.971	**20**	**95,7**	BADAN PENGHUBUNG	
			Meningkatnya Layanan Penghubung Pemerintah Daerah	Persentase Pelayanan Pelayanan Penghubung (%)	100		132460877		41828601		46770036		48327457		704336.971		704336971			
				Persentase Layanan Penghubung (%)			132460877		41828601		46770036		48327457		704336.971		0			
		5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung			735.968.753		132.460.877		41.828.601		46.770.036		483.277.457		704.336.971	20	95,7		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan (Laporan)	1		1		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya (Laporan)	1		1		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung (Laporan)	1		1		0		0		0		0		0			
		5.07.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.07.02.1.01.0002	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat			225.000.000		-		-		-		224.700.000		224.700.000	100	99,87		
			Terlaksananya Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		5.07.02.1.01.0003	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya			64.698.000		18.509.859		33.735.201		8.100.000		-		60.345.060	0	93,27		
			Terlaksananya Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan (Laporan)	1		1		0		0		0		0		0			
		5.07.02.1.01.0004	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya			27.164.800		1.416.000		8.093.400		-		-		9.509.400	0	35,01		
			Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya (Laporan)	1		1		0		0		0		0		0			
		5.07.02.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung			419.105.953		112.535.018		-		38.670.036		258.577.457		409.782.511	0	97,78		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung (Laporan)	1		1		0		0		0		0		0			
		6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**			**15.840.332.941**		**3.147.099.724**		**3.620.346.682**		**4.287.377.645**		**3.946.632.697**		15.001.456.748	**108,88**	**94,7**		
		6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**13.453.535.264**		**2.676.368.274**		**2.665.289.377**		**3.993.153.945**		**3.309.355.967**		12.644.167.563	**64,9**	**93,98**	INSPEKTORAT	
			Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Implementasi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) (%)									100		100		0			
				Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran n-1 (%)									87		87		0			
				Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum dengan Baik dan Akuntabel. (%)	100								100		100		100			
				Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)									100		100		0			
		6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			255.144.000		105.984.925		105.984.925		11.550.000		28.350.000		251.869.850	66,67	98,72		
			Presentase Penyelesaian Urusan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		1		1		0		0		2		100			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3		2		3		0		0		5		166,67			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			129.669.000		63.722.425		63.722.425		-		-		127.444.850	100	98,28		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		1		1		0		0		2		100			
		6.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			28.350.000		-		-		-		28.350.000		28.350.000	100	100		
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
		6.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			12.075.000		-		-		11.550.000		-		11.550.000	100	95,65		
			Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
		6.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		6.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		6.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			85.050.000		42.262.500		42.262.500		-		-		84.525.000	166,67	99,38		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3		2		3		0		0		5		166,67			
		6.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			10.832.500.062		2.015.215.547		2.060.590.547		3.358.692.578		2.751.154.062		10.185.652.734	83,13	94,03		
			Presentase Penyelesaian urusan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	80		73		73		106		106		106		132,5			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1		0		1		0		0		1		100			
		6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			10.722.550.062		2.015.215.547		2.015.215.547		3.358.692.578		2.686.954.062		10.076.077.734	132,5	93,97		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	80		73		73		106		106		106		132,5			
		6.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		6.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			64.200.000		-		-		-		64.200.000		64.200.000	100	100		
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		6.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			45.750.000		-		45.375.000		-		-		45.375.000	100	99,18		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1		0		1		0		0		1		100			
		6.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			35.625.000		35.100.000		-		-		-		35.100.000	100	98,53		
			Presentase Penyelesaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1		1		0		0		0		1		100			
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		1		0		0		0		1		100			
		6.01.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			25.875.000		25.350.000		-		-		-		25.350.000	100	97,97		
			Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1		1		0		0		0		1		100			
		6.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			9.750.000		9.750.000		-		-		-		9.750.000	100	100		
			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		1		0		0		0		1		100			
		6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			161.373.000		-		-		124.197.462		-		124.197.462	2,55	76,96		
			Presentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	55		0		0		7		0		7		12,73			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	50		0		0		0		0		0		0			
		6.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		0		0		0		0		0		0			
		6.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		6.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		6.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			161.373.000		-		-		124.197.462		-		124.197.462	12,73	76,96		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	55		0		0		7		0		7		12,73			
		6.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	50		0		0		0		0		0		0			
		6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.246.811.950		314.153.230		295.741.333		295.741.333		323.937.333		1.229.573.229	87,5	98,62		
			Presentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		0		0		0		1		100			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		1		0		0		0		1		100			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		1		1		1		1		100			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		1		1		1		1		100			
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1		1		1		1		1		1		100			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		1		1		1		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			6.899.000		6.881.897		-		-		-		6.881.897	100	99,75		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		0		0		0		1		100			
		6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0		0		0			
		6.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			11.530.000		11.530.000		-		-		-		11.530.000	100	100		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		1		0		0		0		1		100			
		6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			166.872.950		41.462.875		41.462.875		41.462.875		41.462.875		165.851.500	100	99,39		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		1		1		1		1		100			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			163.490.000		40.808.606		40.808.606		40.808.606		40.808.606		163.234.424	100	99,84		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		1		1		1		1		100			
		6.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			193.495.000		48.078.194		48.078.194		48.078.194		48.078.194		192.312.776	100	99,39		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1		1		1		1		1		1		100			
		6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			664.525.000		165.391.658		165.391.658		165.391.658		165.391.658		661.566.632	100	99,55		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		1		1		1		1		1		100			
		6.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			40.000.000		-		-		-		28.196.000		28.196.000	100	70,49		
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Presentase Penyelesaian Urusan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	8		0		0		0		0		0		0			
		6.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	8		0		0		0		0		0		0			
		6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			437.781.252		96.315.903		93.373.903		93.373.903		96.315.903		379.379.612	100	86,66		
			Presentase Penyelesaian Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		0		0		1		1		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		1		1		1		1		100			
		6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			6.000.000		2.942.000		-		-		2.942.000		5.884.000	100	98,07		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		0		0		1		1		100			
		6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			431.781.252		93.373.903		93.373.903		93.373.903		93.373.903		373.495.612	100	86,5		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		1		1		1		1		100			
		6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			484.300.000		109.598.669		109.598.669		109.598.669		109.598.669		438.394.676	50	90,52		
			Presentase Penyelesaian Urusan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	25		25		25		25		25		25		100			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	15		0		0		0		0		0		0			
		6.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			450.600.000		109.598.669		109.598.669		109.598.669		109.598.669		438.394.676	100	97,29		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	25		25		25		25		25		25		100			
		6.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			33.700.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	15		0		0		0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**			**1.721.493.000**		**431.128.205**		**770.890.010**		**145.462.405**		**362.399.905**		1.709.880.525	**261,62**	**99,33**	INSPEKTORAT	
			Menurunnya Penyelewengan atau Penyimpangan, baik yang Bersifat Anggaran ataupun Proses dan Kewenangan	Menurunya Objek Pemeriksaan yang Beresiko Tinggi. (%)	18								18		18		100			
				Persentase Implementasi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) (%)									100		100		0			
		6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			1.351.243.000		304.246.045		644.007.850		87.308.545		304.246.045		1.339.808.485	82,8	99,15		
			Presentase Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang Diimplementasikan.	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	80		120		0		0		87		207		258,75			
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	20		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	40		0		37		0		0		37		92,5			
				Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	40		0		38		0		0		38		95			
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota (Laporan)	11		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	3		1		1		1		1		4		133,33			
		6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			433.950.000		216.937.500		-		-		216.937.500		433.875.000	258,75	99,98		
			Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	80		120		0		0		87		207		258,75			
		6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	20		0		0		0		0		0		0			
		6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja			120.300.000		-		119.775.000		-		-		119.775.000	92,5	99,56		
			Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	40		0		37		0		0		37		92,5			
		6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan			437.475.000		-		436.924.305		-		-		436.924.305	95	99,87		
			Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	40		0		38		0		0		38		95			
		6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota (Laporan)	11		0		0		0		0		0		0			
		6.01.02.1.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	1		0		0		0		0		0		0			
		6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			359.518.000		87.308.545		87.308.545		87.308.545		87.308.545		349.234.180	133,33	97,14		
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	3		1		1		1		1		4		133,33			
		6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			370.250.000		126.882.160		126.882.160		58.153.860		58.153.860		370.072.040	887,5	99,95		
			Menurunya Resiko Kecurangan.	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	8		67		67		0		0		134		1675			
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	20		5		5		5		5		20		100			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah			137.562.000		68.728.300		68.728.300		-		-		137.456.600	1675	99,92		
			Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	8		67		67		0		0		134		1675			
		6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			232.688.000		58.153.860		58.153.860		58.153.860		58.153.860		232.615.440	100	99,97		
			Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	20		5		5		5		5		20		100			
		6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**			**665.304.677**		**39.603.245**		**184.167.295**		**148.761.295**		**274.876.825**		647.408.660	**106,67**	**97,31**	INSPEKTORAT	
			Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Produk Hukum Bidang Pengawasan yang dikeluarkan serta tingkat pemahaman auditee dan Perangkat Daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan sesuai TUPOKSI dan Peraturan Perundang-Undangan. (Dokumen)	2								2		2		100			
				Persentase Nilai Pencegahan Korupsi (%)									82		82		0			
		6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			200.118.096		-		-		-		184.065.580		184.065.580	100	91,98		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan yang Terbentuk.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	1		0		0		0		1		1		100			
		6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan			200.118.096		-		-		-		184.065.580		184.065.580	100	91,98		
			Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	1		0		0		0		1		1		100			
		6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi			465.186.581		39.603.245		184.167.295		148.761.295		90.811.245		463.343.080	108,33	99,6		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Didampingi Dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola.	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	35		0		18		17		0		35		100			
				Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	15		0		15		0		0		15		100			
				Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	3		1		1		1		1		4		133,33			
				Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (Perangkat Daerah)	1		0		0		0		1		1		100			
		6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			218.745.000		-		109.158.050		109.158.050		-		218.316.100	100	99,8		
			Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	35		0		18		17		0		35		100			
		6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			35.589.581		-		35.406.000		-		-		35.406.000	100	99,48		
			Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	15		0		15		0		0		15		100			
		6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			159.644.000		39.603.245		39.603.245		39.603.245		39.603.245		158.412.980	133,33	99,23		
			Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	3		1		1		1		1		4		133,33			
		6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			51.208.000		-		-		-		51.208.000		51.208.000	100	100		
			Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (Perangkat Daerah)	1		0		0		0		1		1		100			
		8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**			**25.875.066.166**		**3.876.372.506**		**13.075.355.339**		**3.936.914.148**		**3.915.049.388**		24.803.691.381	**228,74**	**95,86**		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**5.106.440.992**		**1.021.372.506**		**1.037.703.899**		**1.273.593.806**		**1.285.607.133**		4.618.277.344	**157,35**	**90,44**	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)													0			
				Nilai Sakip (%)	100												0			
				Nilai SAKIP (Nilai)	80												0			
		8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			37.000.000		-		11.546.300		3.187.300		22.065.200		36.798.800	108,33	99,46		
			Jumlah dokumen dan laporan perencanaan, serta evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	6		0		4		0		2		6		100			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6		0		2		2		3		7		116,67			
		8.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			18.500.000		-		6.192.550		1.525.000		10.624.150		18.341.700	100	99,14		
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	6		0		4		0		2		6		100			
		8.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			18.500.000		-		5.353.750		1.662.300		11.441.050		18.457.100	116,67	99,77		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6		0		2		2		3		7		116,67			
		8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.344.691.068		938.685.924		829.287.809		1.167.570.845		958.761.870		3.894.306.448	141,67	89,63		
			Jumlah orang penerima gaji dan tunjangan ASN serta laporan akhir tahun	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	36		33		33		33		30		30		83,33			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		1		0		1		2		200			
		8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.199.691.468		938.685.924		805.869.409		1.160.010.845		846.227.550		3.750.793.728	83,33	89,31		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	36		33		33		33		30		30		83,33			
		8.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			144.999.600		-		23.418.400		7.560.000		112.534.320		143.512.720	200	98,97		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		1		0		1		2		200			
		8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			27.785.000		-		-		7.260.000		20.525.000		27.785.000	25	100		
			Jumlah kapasitas sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	45		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2		0		0		0		1		1		50			
		8.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	45		0		0		0		0		0		0			
		8.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			27.785.000		-		-		7.260.000		20.525.000		27.785.000	50	100		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2		0		0		0		1		1		50			
		8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			297.943.100		-		60.898.634		45.093.400		178.917.690		284.909.724	116,67	95,63		
			Jumlah sarana dan pra sarana dalam mendukung peningkatan operasional	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		1		1		1		1		100			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		0		1		1		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1		0		2		1		1		4		400			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2		0		1		0		1		2		100			
		8.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0		0		0			
		8.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			29.681.600		-		7.500.500		8.193.000		13.817.000		29.510.500	100	99,42		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		1		1		1		1		100			
		8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			27.000.000		-		5.131.700		5.769.400		16.083.450		26.984.550	100	99,94		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		0		1		1		1		1		100			
		8.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		8.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			31.650.000		-		12.980.000		5.280.000		13.192.000		31.452.000	400	99,37		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1		0		2		1		1		4		400			
		8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			209.611.500		-		35.286.434		25.851.000		135.825.240		196.962.674	100	93,97		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2		0		1		0		1		2		100			
		8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			277.993.824		82.686.582		100.686.582		40.433.261		54.145.387		277.951.812	466,67	99,98		
			Jumlah laporan pelayanan administrasi dan operasional kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		0		3		3		6		12		1200			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
		8.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			996.000		-		-		996.000		-		996.000	100	100		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		0		0		1		0		1		100			
		8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			72.000.000		-		18.000.000		18.000.000		36.000.000		72.000.000	1200	100		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		0		3		3		6		12		1200			
		8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			204.997.824		82.686.582		82.686.582		21.437.261		18.145.387		204.955.812	100	99,98		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
		8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			121.028.000		-		35.284.574		10.049.000		51.191.986		96.525.560	12,5	79,75		
			Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan sarana serta prasarana gedung kantor yang direhabilitasi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8		0		2		2		2		2		25			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8		0		0		0		0		0		0			
		8.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			100.488.000		-		35.284.574		10.049.000		51.191.986		96.525.560	25	96,06		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8		0		2		2		2		2		25			
		8.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			20.540.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8		0		0		0		0		0		0			
		8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**			**3.731.805.900**		**-**		**380.351.820**		**1.908.270.602**		**1.358.246.000**		3.646.868.422	**558,29**	**97,72**	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Meningkatnya Kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	100												0			
				Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)													0			
		8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			3.731.805.900		-		380.351.820		1.908.270.602		1.358.246.000		3.646.868.422	558,29	97,72		
			Jumlah kebijakan penguatan ideologi pancasila	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	1		0		1		1		1		1		100			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	50		0		0		0		300		300		600			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	50		0		500		1.054		0		1.554		3108			
				Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)	4		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila (Orang)	45		0		0		0		0		0		0			
				Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)	2		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Paskibraka (Orang)	54		0		54		54		54		54		100			
		8.01.02.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			-		-		-		-		-		-	100	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	1		0		1		1		1		1		100			
		8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			129.115.900		-		-		-		126.263.000		126.263.000	600	97,79		
			Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	50		0		0		0		300		300		600			
		8.01.02.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			700.859.500		-		200.340.500		198.923.000		272.971.000		672.234.500	3108	95,92		
			Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	50		0		500		1.054		0		1.554		3108			
		8.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)	4		0		0		0		0		0		0			
		8.01.02.1.01.0007	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila (Orang)	45		0		0		0		0		0		0			
		8.01.02.1.01.0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)	2		0		0		0		0		0		0			
		8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka			2.901.830.500		-		180.011.320		1.709.347.602		959.012.000		2.848.370.922	100	98,16		
			Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka (Orang)	54		0		54		54		54		54		100			
		8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**			**2.056.574.950**		**-**		**1.499.533.620**		**132.771.240**		**237.716.255**		1.870.021.115	**77,33**	**90,93**	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Meningkatnya Etika dan Budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (%)													0			
				Indeks Demokrasi Provinsi Maluku (indeks)	85												0			
				Persentase Kebijakan Pendidikan Politik oleh Pemerintah Daerah (%)													0			
		8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			2.056.574.950		-		1.499.533.620		132.771.240		237.716.255		1.870.021.115	77,33	90,93		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Jumlah Kebijakan pendidikan politik oleh pemerintah daerah dan partai politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	50		0		16		16		16		16		32				
				Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	50		0		50		0		50		100		200				
				Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	2		0		0		0		0		0		0				
		8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			2.024.467.950		-		1.491.485.620		132.771.240		214.950.255		1.839.207.115	32	90,85			
			Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	50		0		16		16		16		16		32				
		8.01.03.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			32.107.000		-		8.048.000		-		22.766.000		30.814.000	200	95,97			
			Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	50		0		50		0		50		100		200				
		8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			-		-		-		-		-		-	0	0			
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	2		0		0		0		0		0		0				
		8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**			**14.521.937.000**		**2.855.000.000**		**10.133.000.000**		**299.390.000**		**930.723.000**		14.218.113.000	**290**	**97,91**	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Peningkatan Ormas yang terdaftar (%)	100												0			
				Persentase Ormas yang aktif (%)													0			
				Jumlah Koordinasi dengan Instansi Terkait (Jumlah)	14												0			
		8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			14.521.937.000		2.855.000.000		10.133.000.000		299.390.000		930.723.000		14.218.113.000	290	97,91		
			Jumlah orang mengikuti pelaksanaan kebijakan dan laporan hasil monitoring keselarasan antara pemerintah daerah dengan organisasi kemasyarakatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	25		0		0		0		145		145		580			
				Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			14.521.937.000		2.855.000.000		10.133.000.000		299.390.000		930.723.000		14.218.113.000	580	97,91		
			Terlaksananya Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	25		0		0		0		145		145		580			
		8.01.04.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**			**215.894.824**		**-**		**-**		**162.714.000**		**45.597.000**		208.311.000	**230**	**96,49**	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat	Persentase Fasilitasi Peningkatan Indeks Kerukunan Umat Beragama (%)	100												0			
				Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan (%)													0			
				Jumlah Pembinaan dalam rangka Pencegahan, Pengedaran dan Penyalahgunaan Narkoba (Pembinaan)	2												0			
		8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			215.894.824		-		-		162.714.000		45.597.000		208.311.000	230	96,49		
			Jumlah orang mengikuti Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	50		0		0		60		55		115		230			
		8.01.05.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			215.894.824		-		-		162.714.000		45.597.000		208.311.000	230	96,49		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	50		0		0		60		55		115		230			
		8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**			**242.412.500**		**-**		**24.766.000**		**160.174.500**		**57.160.000**		242.100.500	**38**	**99,87**	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang diselesaikan	Persentase fasilitasi penanganan Konflik dan fasilitasi penanganan Tindak Kriminal (%)	100												0			
				Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan (%)													0			
		8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			242.412.500		-		24.766.000		160.174.500		57.160.000		242.100.500	38	99,87		
			Jumlah orang mengikuti pelaksanaan pemantapan kewaspadaan dan penanganan konflik sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	50		0		0		12		12		24		48			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	50		0		2		0		0		2		4			
				Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	2		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi (Dokumen)	1		0		0		1		1		1		100			
		8.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			24.820.000		-		-		8.460.000		16.360.000		24.820.000	48	100		
			Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	50		0		0		12		12		24		48			
		8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			24.958.000		-		24.766.000		-		-		24.766.000	4	99,23		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	50		0		2		0		0		2		4			
		8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	2		0		0		0		0		0		0			
		8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi			192.634.500		-		-		151.714.500		40.800.000		192.514.500	100	99,94		
			Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi (Dokumen)	1		0		0		1		1		1		100			
				JUMLAH		**2.874.698.276.310**		**306.969.847.101**		**496.255.041.094**		**473.932.902.060**		**788.743.584.763**		**2.065.901.375.017**				
				Rata-rata capaian kinerja (%)													**4317,7**	**71,86**		
				Predikat kinerja													**Sangat tinggi**	**Sedang**		

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:
Faktor penghambat pencapaian kinerja	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Penyusunan arah kebijakan ekonomi daerah Tahun 2027 dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian global yang masih diwarnai oleh ketidakpastian akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, tekanan inflasi global, fluktuasi harga komoditas, serta meningkatnya tensi geopolitik yang berdampak pada stabilitas perdagangan dan investasi internasional. Di sisi lain, transformasi ekonomi global yang semakin mengarah pada ekonomi hijau, ekonomi digital, serta penguatan rantai pasok global juga membuka peluang baru bagi daerah untuk meningkatkan daya saing ekonomi melalui pemanfaatan potensi sumber daya lokal secara lebih optimal.

Dalam konteks nasional, arah pembangunan ekonomi daerah Tahun 2027 diselaraskan dengan tema **Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 yaitu *"Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi dan Industri."*** Tema tersebut menekankan pentingnya penguatan produktivitas sektor ekonomi, peningkatan investasi yang berkualitas, serta pengembangan sektor industri sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Sejalan dengan arah kebijakan nasional tersebut, pembangunan ekonomi di Provinsi Maluku diarahkan pada upaya memperkuat struktur ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi unggulan daerah, khususnya pada sektor kelautan dan perikanan, pertanian, serta sektor jasa yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Pengembangan sektor-sektor tersebut dilakukan melalui peningkatan produktivitas, penguatan rantai nilai komoditas unggulan, serta pengembangan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal guna meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah.

Selain itu, penguatan iklim investasi menjadi salah satu fokus utama dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini dilakukan melalui penyederhanaan proses perizinan, peningkatan kepastian regulasi, serta penguatan dukungan infrastruktur ekonomi guna menciptakan lingkungan usaha yang kondusif bagi investor dan pelaku usaha. Peningkatan investasi diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kapasitas produksi daerah, serta mendorong pertumbuhan sektor industri dan jasa.

Dalam mendukung transformasi ekonomi daerah, pemerintah daerah juga mendorong

pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai salah satu pilar penting perekonomian daerah. Penguatan UMKM dilakukan melalui peningkatan akses pembiayaan, peningkatan kapasitas usaha, pemanfaatan teknologi digital, serta perluasan akses pasar bagi produk-produk lokal.

Di sisi lain, karakteristik wilayah kepulauan yang dimiliki Provinsi Maluku menuntut adanya penguatan konektivitas antar wilayah sebagai faktor penting dalam mendukung aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur transportasi, logistik, dan konektivitas antar pulau menjadi bagian penting dalam mendorong kelancaran distribusi barang dan jasa, menurunkan biaya logistik, serta membuka akses ekonomi pada wilayah-wilayah yang memiliki potensi pengembangan ekonomi.

Melalui arah kebijakan tersebut, pembangunan ekonomi daerah Tahun 2027 diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, meningkatkan daya saing daerah, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

3.1.1. Perkembangan Ekonomi Nasional

Perkembangan perekonomian global dalam beberapa tahun terakhir masih dihadapkan pada berbagai ketidakpastian akibat perlambatan ekonomi dunia, ketegangan geopolitik, serta dinamika perdagangan internasional. Berdasarkan laporan **International Monetary Fund** dalam publikasi *World Economic Outlook*, pertumbuhan ekonomi global menunjukkan kecenderungan melambat. Pada tahun **2025 pertumbuhan ekonomi global tercatat sekitar 3,3 persen**, sementara pada tahun **2026 diperkirakan melambat menjadi sekitar 3,2 persen**. Kinerja dan prospek ekonomi global memperkirakan pertumbuhan melambat, ketidakpastian tinggi hal ini juga dipicu oleh adanya Kebijakan tarif AS dan berlanjut ketegangan geopolitik berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi global dengan fragmentasi antarnegara yang semakin melebar.

Kedepan perekonomian dunia diperkirakan masih akan diwarnai oleh berlanjutnya ketidakpastian. Terdapat beberapa hal yang perlu diwaspadai antara lain pertama, berlanjutnya perang dan polarisasi perdagangan dan investasi antarnegara dalam mengatasi ketidakseimbangan perdagangan global. Kedua, pertumbuhan ekonomi dunia diprakirakan akan melambat dengan fragmentasi antarnegara yang melebar. Ketiga, membengkak tingginya utang publik dunia dengan beban yang semakin berat, baik di negara maju maupun emerging economies. Keempat, pasar keuangan global memendam kerentanan dan risiko yang tinggi, khususnya dari lembaga keuangan nonbank. Kelima, kerentanan dan risiko pasar

keuangan global semakin tinggi sejalan dengan maraknya penerbitan dan perdagangan mata uang dan aset digital oleh pihak swasta. Dinamika, prospek dan risiko perekonomian global yang penuh gejolak dan tantangan tersebut berimplikasi besar pada perekonomian negara-negara EMEs, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, kondisi tersebut perlu direspons dengan perumusan dan implementasi bauran kebijakan ekonomi nasional yang optimal.

Di tengah perlambatan ekonomi global tahun 2025, kinerja dan prospek ekonomi nasional tetap terjaga stabil dan pertumbuhan ekonomi nasional meningkat. Ekonomi Indonesia 2025 tetap berkinerja baik dan berdaya tahan di tengah tingginya gejolak dan ketidakpastian global. Berdasarkan data **Badan Pusat Statistik**, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun **2025 tercatat sebesar 5,11 persen**, meningkat dibandingkan capaian tahun **2024 yang sebesar 5,03 persen**. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 diprakirakan berada pada kisaran 4,7-5,5% dan akan meningkat lebih tinggi pada 2026 dan 2027 masing-masing dalam kisaran 4,9-5,7% dan 5,1-5,9%.

Kinerja perekonomian nasional tersebut didukung oleh meningkatnya aktivitas konsumsi pemerintah, pertumbuhan investasi, serta membaiknya kinerja ekspor barang dan jasa. Di samping itu, berbagai kebijakan pemerintah dalam mendorong transformasi ekonomi melalui penguatan sektor industri, peningkatan produktivitas, serta penguatan investasi turut memberikan kontribusi terhadap stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional.

Perkembangan ekonomi nasional tersebut menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, khususnya dalam mendorong peningkatan produktivitas, investasi, serta pengembangan sektor industri berbasis potensi lokal.

Ditinjau dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi nasional masih didorong oleh kuatnya permintaan domestik. Struktur perekonomian Indonesia hingga tahun 2025 masih didominasi oleh komponen **konsumsi rumah tangga**, dengan kontribusi mencapai sekitar **53–54 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)**. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi nasional sangat bergantung pada tingkat konsumsi masyarakat sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Dominasi konsumsi rumah tangga mengindikasikan bahwa stabilitas daya beli masyarakat menjadi faktor kunci dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan pengendalian inflasi, peningkatan pendapatan masyarakat, serta perlindungan sosial menjadi instrumen penting untuk menjaga konsumsi tetap kuat. Di sisi lain, komponen **Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)** atau investasi memberikan kontribusi sekitar **29 persen terhadap PDB**,

yang menempatkannya sebagai kontributor terbesar kedua setelah konsumsi rumah tangga. Peran PMTB menjadi sangat strategis dalam mendorong kapasitas produksi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan daya saing ekonomi dalam jangka menengah dan panjang. Namun demikian, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dan berkelanjutan, diperlukan penguatan pada sisi investasi (PMTB). Peningkatan investasi akan memperluas basis produksi, mendorong hilirisasi industri, serta meningkatkan produktivitas ekonomi daerah. Dengan demikian, transformasi struktur ekonomi dari yang berbasis konsumsi menuju keseimbangan antara konsumsi dan investasi menjadi agenda penting dalam perencanaan pembangunan daerah.

Komponen **konsumsi pemerintah** juga berperan dalam menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi melalui belanja negara yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta program-program prioritas pembangunan nasional. komponen **konsumsi pemerintah** juga memiliki peran penting dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), dengan kontribusi pada tahun 2025 berada pada kisaran **±8–9 persen** terhadap PDB nasional. Sementara itu, komponen **ekspor barang dan jasa** turut memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional meskipun menghadapi tantangan akibat perlambatan ekonomi global dan fluktuasi harga komoditas di pasar internasional. Dengan kontribusi pada tahun 2025 berada pada kisaran **±20–22 persen terhadap PDB nasional**. Ekspor berperan sebagai sumber pertumbuhan yang berasal dari permintaan eksternal, sekaligus menjadi indikator daya saing produk nasional di pasar global.

Secara keseluruhan, struktur pertumbuhan ekonomi nasional menunjukkan bahwa **permintaan domestik masih menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi**, yang didukung oleh konsumsi masyarakat, investasi, serta peran belanja pemerintah. Kondisi ini menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang selaras dengan arah pembangunan nasional, khususnya dalam mendorong peningkatan produktivitas sektor ekonomi, penguatan investasi, serta pengembangan sektor industri berbasis potensi daerah.

Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 5,09 persen pada tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan aktivitas investasi yang didorong oleh percepatan pembangunan infrastruktur, perbaikan iklim investasi, serta stabilitas ekonomi makro yang terjaga. Selain itu, meningkatnya permintaan domestik dan berkembangnya sektor unggulan daerah turut mendorong pelaku usaha untuk melakukan ekspansi kapasitas produksi. Masuknya proyek-proyek strategis serta dukungan akses pembiayaan yang memadai juga menjadi faktor penting dalam memperkuat kinerja investasi di daerah.

Kinerja impresif ini didorong oleh investasi Mesin dan Perlengkapan yang tumbuh 17,99% pada 2025, mengindikasikan penguatan aktivitas industri. Sementara itu, investasi kendaraan tumbuh 7,29 persen, mencerminkan meningkatnya kebutuhan distribusi barang dan mobilitas ekonomi. Pertumbuhan ini sejalan dengan kinerja sektor transportasi dan pergudangan yang tetap ekspansif, serta meningkatnya aktivitas logistik nasional. Meskipun tidak setinggi pertumbuhan investasi mesin dan perlengkapan, investasi kendaraan tetap berperan strategis dalam mendukung kelancaran rantai pasok dan konektivitas antarwilayah, tercermin dari realisasi investasi PMA dan PMDN yang tumbuh 12,7% pada 2025. Pertumbuhan tinggi PMA sebesar 46,6 % didorong oleh peningkatan kinerja investasi hilirisasi utamanya untuk subsektor industri logam dasar, transportasi dan pertambangan. Sementara itu, pertumbuhan tinggi PMDN sebesar 53,4 % didorong oleh peningkatan investasi domestik serta investasi global.

Pada tahun 2025 kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap PDB meningkat 2,60 % menjadi 3,25 %, Kinerja ekspor barang dan jasa pada tahun 2025 didorong oleh beberapa sektor utama, terutama industri pengolahan yang tumbuh sekitar 4,6–4,8 persen dan berperan sebagai kontributor terbesar ekspor bernilai tambah. Selain itu, sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh sekitar 5,5–6,0 persen turut menopang ekspor berbasis komoditas unggulan. Dari sisi pendukung, sektor transportasi dan pergudangan mencatat pertumbuhan tertinggi sekitar 8,5–9,0 persen, yang memperkuat kelancaran distribusi ekspor. Sementara itu, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap berkontribusi dalam menopang ekspor berbasis sumber daya alam, khususnya di wilayah kepulauan.

Dari sisi lapangan usaha, seluruh sektor kembali mencatatkan pertumbuhan positif pada tahun 2025. Tiga sektor dengan pertumbuhan tertinggi meliputi sektor jasa lainnya (9,93 %); transportasi dan pergudangan (8,78 %); serta informasi dan komunikasi (8,35 %). Pertumbuhan sektor jasa lainnya didorong oleh peningkatan aktivitas rekreasi serta berbagai event olahraga dan hiburan. Sektor transportasi dan pergudangan tumbuh seiring peningkatan mobilitas, jumlah penumpang, dan volume barang. Sementara itu, sektor informasi dan komunikasi didukung oleh peningkatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan perilaku masyarakat menuju aktivitas berbasis digital semakin memperkuat peran sektor ini sebagai enabler utama dalam perekonomian. Adapun sektor pertanian, yang memberikan kontribusi sebesar 13,10 % terhadap perekonomian Indonesia di tahun 2025, tetap tumbuh positif sebesar 3,89 %.

Sektor industri pengolahan tetap menjadi kontributor utama dengan pertumbuhan

5,30 % pada tahun 2025. Subsektor industri logam dasar mencatat pertumbuhan kuat sebesar 15,71 %, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Kinerja ini didorong oleh meningkatnya permintaan luar negeri terhadap produk logam dasar, khususnya besi dan baja serta produk hilirisasi mineral. Pertumbuhan yang tinggi tersebut menunjukkan peran strategis subsektor ini dalam mendorong ekspor bernilai tambah dan memperkuat struktur industri nasional. Subsektor industri makanan dan minuman pada tahun 2025 tumbuh sebesar sekitar 6,49 persen (year-on-year), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Kinerja ini didukung oleh kuatnya permintaan domestik serta ketersediaan bahan baku dalam negeri, sehingga menjadikan subsektor ini sebagai kontributor terbesar dalam industri pengolahan nonmigas dan salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, Subsektor industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik pada tahun 2025 tumbuh sebesar 4,58 persen (year-on-year). Meskipun masih mencatatkan pertumbuhan positif, kinerja subsektor ini relatif moderat dibandingkan subsektor industri pengolahan lainnya, yang dipengaruhi oleh dinamika permintaan global serta tekanan pada industri elektronik. Namun demikian, subsektor ini tetap memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan industri berbasis teknologi dan transformasi digital nasional. Optimisme pelaku industri pun tetap tinggi, tecermin dari Indeks Kepercayaan Industri (IKI) berada pada kisaran 52-53 pada akhir tahun 2025, Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas industri manufaktur masih tumbuh dan pelaku usaha tetap optimis terhadap kondisi usaha. Meskipun demikian, pada akhir tahun terjadi perlambatan dengan IKI tercatat sebesar 51,90, yang mencerminkan sikap hati-hati pelaku industri dalam merespons dinamika ekonomi global dan kebijakan ke depan. Namun, Pada tahun 2025, beberapa subsektor mengalami perlambatan, terutama sektor pertambangan dan penggalian yang terkontraksi akibat menurunnya permintaan global dan adanya gangguan operasional tambang. Selain itu, sektor industri pengolahan juga mengalami moderasi pertumbuhan dari 4,89 persen pada akhir 2024 menjadi 4,55 persen pada awal 2025, yang menunjukkan adanya penurunan momentum ekspansi industri. Perlambatan juga tercermin dari melambatnya investasi (PMTB) serta kontraksi konsumsi pemerintah, yang berdampak pada terbatasnya ekspansi sektor-sektor terkait. Kondisi ini mengindikasikan adanya tekanan eksternal dan kehati-hatian pelaku usaha dalam melakukan ekspansi ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi turut diikuti oleh perkembangan pariwisata dan industri pendukungnya. Pada tahun 2025, rasio PDB pariwisata diproyeksikan mencapai 3,97 %. Capaian ini terutama didorong oleh pemulihan kunjungan wisatawan mancanegara serta lonjakan wisatawan nusantara. Selain itu, peningkatan kualitas infrastruktur destinasi

pariwisata, penyelenggaraan berbagai acara berskala internasional di Indonesia, juga berkontribusi terhadap pertumbuhan sektor ini. Faktor lain yang mendukung adalah pemulihan ekonomi di negara asal wisatawan, peningkatan frekuensi penerbangan langsung ke Indonesia, terutama dari Tiongkok dan India, serta pengaturan libur dan cuti bersama yang mendorong pertumbuhan pariwisata domestik.

Tabel 3.1 Outlook Produk Domestik Bruto Tahun 2026 – 2027 (Persen)

No	Komponen Pertumbuhan Ekonomi	Realisasi 2025	Outlook 2026	Outlook 2027
1	Konsumsi Rumah Tangga	5,0	5,2	5,3–5,6
2	Konsumsi LNPRT	5,1	5,5	7,0–7,3
3	Konsumsi Pemerintah	2,5	8,4	4,3–7,7
4	Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB)	5,1	5,4	6,5–7,5
5	Ekspor Barang dan Jasa	7,0	3,9	7,1–8,8
6	Impor Barang dan Jasa	4,8	5,5	7,8–9,9
7	Pertumbuhan PDB	5,1	5,4	5,8–6,5

Sumber : Permen PPN Bappenas Nomor 4 Tahun 2026.

Pada triwulan I-2026, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,6 persen year on year (YoY) dengan didorong oleh akselerasi konsumsi masyarakat pada momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN), implementasi program prioritas pembangunan, dan peningkatan aktivitas produksi untuk memenuhi permintaan domestik yang meningkat. Kinerja ini menjadi sinyal positif dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun 2026 sebesar 5,4 persen dan menjadi fondasi yang kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada tahun 2027.

Dari sisi pengeluaran, sumber pertumbuhan utama ekonomi tahun 2026 akan didorong oleh konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor. Sementara itu, sumber pertumbuhan dari sisi lapangan usaha akan didorong utamanya oleh sektor industri pengolahan yang didukung oleh hilirisasi sektor-sektor prioritas serta program di sektor pertanian.

Secara kewilayahan, pertumbuhan ekonomi tahun 2026 akan terjaga melalui keseimbangan antara akselerasi hilirisasi di timur dan penguatan sektor manufaktur serta

jasa di wilayah barat. Pertumbuhan Kawasan Timur Indonesia (KTI) diproyeksikan mencapai enam persen dengan dipicu oleh masifnya aktivitas hilirisasi nikel di Wilayah Maluku dan Sulawesi, pemulihan pariwisata di Bali-Nusa Tenggara serta sektor peningkatan sektor pertambangan dan berlanjutnya konstruksi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan. Sementara itu, Kawasan Barat Indonesia (KBI) diproyeksikan tumbuh sebesar 5,3 persen yang ditopang oleh kinerja wilayah Jawa melalui sektor industri dan jasa, serta wilayah Sumatera yang didorong oleh peningkatan permintaan komoditas unggulan dan pembangunan infrastruktur

3.1.1.1 Ekonomi Makro Pembangunan Tahun 2027

Tahun 2027 diarahkan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, dengan sasaran sebesar 5,8–6,5 persen menuju pertumbuhan ekonomi delapan persen pada tahun 2029 sesuai RPJMN Tahun 2025–2029. Pertumbuhan ini diharapkan meningkatkan gross national income (GNI) per kapita ke US$5.800–5.840, mempertahankan status negara berpendapatan menengah atas, serta mendukung agenda ekonomi hijau melalui penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) dan peningkatan kualitas lingkungan. Pembangunan difokuskan pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas SDM melalui penurunan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan serta peningkatan Indeks Modal Manusia. Selain itu, kesejahteraan petani dan penciptaan lapangan kerja formal menjadi indikator utama untuk memastikan pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 3.2 Sasaran Makro Pembangunan Tahun 2027

No	Sasaran dan Indikator	Sasaran 2027
	Sasaran Pembangunan Nasional	
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,8–6,5
2	GNI Per Capita (US$)	5.800–5.840
3	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	39,57
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,84
5	a. Tingkat Kemiskinan (%)	6,0–6,5
	b. Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)	0,0
6	Rasio Gini	0,362–0,367
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,30–4,87
8	Indeks Modal Manusia	0,575
	Indikator Pembangunan	

9	Indeks Kesejahteraan Petani	0,8038
10	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	40,81
	Indikator Ekonomi Makro	
11	Inflasi (%, YoY) : akhir Periode	2,5 ± 1,0
12	Nilai Tukar Rupiah (Rp/US$)	16.800–17.500
13	Cadangan Devisa (Miliar US$)	158,50–162,07
14	Cadangan Devisa (dalam Bulan Impor)	5,4–5,6
15	Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	(0,20)–(0,38)(a)
16	Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	21,5
17	Rasio PDB Pariwisata (%)	4,70–4,80
18	Devisa Pariwisata (Miliar US$)	25,5–28,6
19	Pendapatan Negara (% PDB)	11,82–12,40
20	Penerimaan Perpajakan (% PDB)	10,02–10,50
21	Keseimbangan Primer (% PDB)	0,45–(0,14)(a)
22	Surplus/Defisit APBN (% PDB)	(1,80)–(2,40)(a)
23	Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	6,5–7,5
24	Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	2.322,0–2.451,0
25	Nilai Realisasi PMA dan PMDN Sektor Sekunder (Triliun Rp)	1.110,6–1.180,4

3.1.2. Perkembangan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi perekonomian Maluku Tahun 2025 menunjukkan tren pertumbuhan yang menurun dibandingkan tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi Maluku di Tahun 2025 sebesar 4,56 (c-to-c) turun dari tahun 2024 yang sebesar 5,34% (c-to-c). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar Harga Berlaku Tahun 2025 mencapai Rp66,31 triliun dan atas dasar Harga Konstan 2010 mencapai Rp 38,90 triliun. Pertumbuhan ekonomi Maluku yang meningkat di tahun 2025 terjadi hampir di semua lapangan usaha, kecuali jasa pendidikan yang tumbuh negatif 0,16%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada jasa keuangan dan asuransi yaitu 7,38%.

Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi Maluku pada tahun 2025 mengalami kenaikan disebabkan oleh kinerja hampir disemua Lapangan Usaha termasuk lapangan usaha (sektor) utama. Lapangan usaha pertanian, perikanan dan kehutanan masih menjadi

kontributor terbesar terhadap PDRB yaitu sekitar 23,96%. lapangan usaha ini mengalami peningkatan kinerja yaitu sebesar 1,57% lebih tinggi jika dibandingkan dengan distribusi tahun 2024 sebesar 23,59%.

Kinerja lapangan usaha (sektro) administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebagai kontributor terbesar kedua kinerja sektor tersebut mengalami kontraksi sebesar sekitar 3,62 persen, dari 21,53 pada tahun 2024 menjadi 20,75 pada tahun 2025, yang menunjukkan adanya penurunan aktivitas dibandingkan tahun sebelumnya.

Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor masih merupakan penyumbang terbesar ketiga dalam pembentukan PDRB Maluku tahun 2025. Sumbangan sektor ini cenderung meningkat dari 14,01% pada tahun 2024 menjadi 14,49% di tahun 2025. Hal ini didorong oleh tingginya aktivitas distribusi barang antar wilayah kepulauan, kuatnya konsumsi rumah tangga, serta peran Maluku sebagai simpul perdagangan dan logistik kawasan. Selain itu, peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan berkembangnya usaha perdagangan skala kecil turut memperkuat kontribusi sektor ini terhadap perekonomian daerah.

Dilihat dari sisi pengeluaran, struktur perekonomian Provinsi Maluku masih didominasi oleh tiga komponen utama yaitu; komponen Konsumsi Rumah Tangga, Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB) dan Konsumsi Pemerintah. Komponen Konsumsi Rumah Tangga (RT) pada tahun 2025 sebesar 3,58% lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar 4,02%. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga mengalami perlambatan signifikan, dari 4,02 persen pada tahun 2024 menjadi 3,58 persen pada tahun 2025, atau turun sekitar 10,95 persen secara relatif, yang menunjukkan melemahnya laju konsumsi masyarakat dibandingkan tahun sebelumnya.

Sejalan dengan itu, Konsumsi Pemerintah juga mengalami penurunan pertumbuhan di tahun 2025 yaitu sebesar -8,49%, menurun signifikan dibandingkan dengan tahun 2024 yang tumbuh sebesar 3,77%. Penurunan ini antara lain disebabkan oleh belum optimalnya realisasi belanja pemerintah, adanya kebijakan efisiensi anggaran, serta berkurangnya belanja barang dan jasa maupun belanja modal.

Sementara itu, Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB) Provinsi Maluku pada tahun 2025 juga mengalami penurunan kinerja. Penurunan kinerja PMTDB ini mencerminkan kegiatan investasi menunjukkan penurunan sebesar 0,92% dibandingkan dengan tahun 2024 yang pertumbuhannya meningkat 2,03%. Kondisi ini mengindikasikan melemahnya aktivitas investasi di daerah, baik yang bersumber dari pemerintah maupun swasta. Melemahnya investasi ini berpotensi menahan akselerasi pertumbuhan ekonomi

daerah, mengingat peran PMTDB sebagai salah satu komponen utama dalam mendorong kapasitas produksi dan penciptaan lapangan kerja

Tingkat Inflasi

Inflasi tahunan pada gabungan kota di Provinsi Maluku pada tahun 2025 tercatat mengalami inflasi sebesar 3,58%, meningkat dari triwulan IV 2024 sebesar 1,28%, dan masih lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional yang sebesar 2,92%. Secara umum, rendahnya realisasi inflasi pada gabungan kota di Provinsi Maluku pada triwulan IV 2025 tidak terlepas dari upaya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Provinsi Maluku dalam melakukan berbagai upaya pengendalian inflasi melalui berbagai program yang difokuskan pada pemenuhan pasokan bahan pokok serta keterjangkauan harga ditingkat produsen, tingkat distributor, hingga konsumen akhir di pasar secara intensif.

Tingkat Pengangguran

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku, merilis Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Maluku pada Agustus Tahun 2025 mencapai 14.773 ribu orang atau sebesar 6,27% terhadap total angkatan kerja sebanyak 984.241 ribu orang. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan TPT pada Agustus 2024 yang tercatat sebesar 6,11% atau sebesar 56.055 ribu orang dari total angkatan kerja sebanyak 966.813 ribu orang. Berdasarkan laju pertumbuhannya, jumlah pengangguran di Provinsi Maluku pada Agustus 2025 tersebut tercatat naik 2,62% (yoy) jika dibandingkan dengan pada Agustus 2024. Jika dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin maka pada Agustus 2025, TPT Perempuan sebesar 6,80%, lebih tinggi dibanding TPT laki-laki yang sebesar 5,90%. TPT perempuan dan laki-laki mengalami kenaikan jika dibandingkan Agustus 2023. Apabila dilihat penyebaran TPT berdasarkan kabupaten/kota, maka proporsi terbanyak berada di Kota Ambon (11,37%) dan terendah berada di Kabupaten Buru Selatan (1,29%).

Berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, TPT pada Februari 2025 mempunyai pola yang hampir sama dengan Februari 2024. Pada Februari 2025, TPT tamatan Diploma IV, S1, S2, S3 merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 13,20 persen. Sementara TPT yang paling rendah adalah pendidikan Sekolah Menengah Pertama, yaitu sebesar 2,38 persen. Dibandingkan Februari 2024, penurunan TPT hanya pada kategori pendidikan Sekolah Menengah Atas yaitu sebesar 2,21 persen poin.

Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku pada September 2025 adalah sebesar 15,25%, turun 0,13 persen dari Maret 2025 berada pada angka 15,38%. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Maluku pada September 2025 adalah sebesar 286,86 ribu orang, berkurang sebanyak 0,9 ribu orang dibandingkan Maret 2025 yang sebanyak 287,76 ribu orang.

Jika dilihat dari persebarannya maka, persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2025 4,36% naik menjadi 4,80% pada September 2025 atau naik 0,44% poin. Jumlah penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2025 tercatat sebesar 37,16 ribu orang Jumlah ini meningkat pada September 2025 yang tercatat sebesar 41,13 ribu orang, atau mengalami kenaikan sekitar 10,68 persen.

Penduduk miskin di perdesaan pada Maret 2025 tercatat sebesar 250,6 ribu orang. Jumlah ini turun 4,6 ribu orang dibandingkan bulan September 2024 yang menunjukkan angka 255,16 ribu orang. Bila dilihat dari sisi persentase, tingkat kemiskinan di perdesaan pada Maret 2025 (24,61 persen) juga mengalami penurunan pada September 2025 sebesar 24, 01 persen.

Garis Kemiskinan pada Maret 2025 tercatat sebesar Rp.757.600,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp.554.327,- (73,17%) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp.203.273,- (26,83%). Secara rata-rata rumah tangga miskin di Maluku memiliki 6,47 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp 4.901.672,-/rumah tangga miskin/bulan pada Maret 2025.

Prospek Ekonomi Makro Provinsi Maluku Tahun 2025

Kinerja Ekonomi Maluku triwulan IV di tahun 2025 tercatat tumbuh menguat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal tersebut ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi maluku yang tercatat sebesar 5,44% (YOY) meningkat dibandingkan triwulan III 2025 yang tumbuh sebesar 4,31% (yoy). Capaian tersebut berada di atas laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,39% (yoy). Secara nominal, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Provinsi Maluku tercatat sebesar Rp17,55 triliun, sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tercatat sebesar Rp10,20 triliun. Secara kuartalan, perekonomian Provinsi Maluku pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 3,49% (qtq), tetap menunjukkan kinerja positif meskipun berada di bawah capaian triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,03% (qtq).

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Maluku triwulan IV 2025 bersumber

dari komponen Komsumsi Rumah Tangga yang tumbuh 4,11% (yoy) tumbuh meningkat dibandingkan triwulan III 2025 yang tumbuh sebesar 3,35% (yoy) Pertumbuhan positif pada Konsumsi Rumah Tangga dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang tetap kuat, ditopang antara lain oleh penurunan BI Rate sepanjang tahun 2025, peningkatan kredit konsumsi RT pada tahun 2025, serta kenaikan UMP Provinsi Maluku sebesar 6,50% di tahun 2025. Sementara itu, penurunan Impor Luar Negeri dipengaruhi oleh penurunan impor migas, yang merupakan komoditas dengan pangsa nilai Impor Luar Negeri terbesar di Maluku.

Sementara itu, pada sisi Lapangan Usaha (LU) pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku triwulan IV 2025 dipengaruhi oleh peningkatan kinerja pada LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (PKP) serta LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Perdagangan dan Reparasi). Capaian positif LU PKP dan LU Perdagangan dan Reparasi secara umum sejalan dengan adanya peningkatan permintaan masyarakat yang didukung oleh terselenggaranya berbagai perayaan festival dan kegiatan besar di wilayah Maluku. Lebih lanjut, terdapatnya momen puncak Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru 2026 juga turut mendukung penguatan kinerja pada kedua sektor ini di tengah masih terjaganya daya beli masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi Maluku sampai dengan akhir tahun 2025 diperkirakan akan tetap tumbuh positif meskipun sedikit melambat dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2024. Masih kuatnya kinerja perekonomian Maluku tahun 2025 ditopang oleh Konsumsi Masyarakat dan Pemerintah seiring dengan bergulirnya sejumlah paket kebijakan nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah rakyat. Disamping itu juga pemerintah sedang mempersiapkan paket kebijakan dalam rangka percepatan pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional 6% di tahun 2025.

Pengendalian inflasi yang terus dilakukan oleh pemerintah pusat dengan koordinasi yang intens dengan TPID serta sinergitas program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) akan sangat berdampak signifikan bagi terjaganya inflasi di daerah berada pada kisaran (2,5$\pm$ 1%), ditengah pesimisme akan meningkatnya tekanan inflasi akibat meningkatnya harga energi dan pangan global.

Berdasarkan gambaran kondisi ekonomi tahun 2025 tentang prospek dan tantangan perekonomian daerah masih harus dihadapi di tahun 2027, maka dalam penyusunan RKPD tahun 2027 dilakukan penyesuaian target sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025 - 2029. Proyeksi terhadap indikator bersifat dinamis dan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik faktor internal maupun faktor eksternal, salah satunya adalah perang Amerika - Iran. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan dengan skenario moderat dengan memperhatikan

proyeksi Bank Indonesia serta mempertimbangkan target indikator pada RPJMD, maka berdasarkan analisis yang dilakukan BAPPEDA pertumbuhan ekonomi tahun 2027 diproyeksikan berada pada kisaran 6,85 %, dengan tingkat Inflasi diproyeksikan berada pada kisaran roadmap inflasi Maluku yakni ±3+1%. Untuk lebih jelasnya, gambaran tentang target-target makro dapat diikuti pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Sasaran Utama Pembangunan Maluku, Tahun 2021 – 2027

NO.	Indikator Makro Ekonomi	Realisasi					Target	
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
1	Tingkat kemiskinan (%)	16.3	16.23	16.42	15,78	15,25	14,54	13,67
2.	Gini Rasio	0.316	0.306	0.288	0,282	0,273	0.271-0.276	0,261-0,265
3.	Indeks Modal Manusia	-	-	-	-	Na	0,49	0,50
4.	Penurunan Intensitas Emisi GRK	-	-	-	-	Na	49,38	58,91
5.	Laju Pertumbuhan ekonomi (%)	6.02	5.65	4.77	5,34	5,44	6,07	6,85
6.	Tingkat pengangguran Terbuka (%)	6.93	6.88	6.31	6,11	6,27	5.92	5,8
7.	PDRB Perkapita	31,88	33,57	35,32	37,21	38,90	38,73	42,65
8.	Kontribusi PDRB Provinsi					0,29	0,28	0.29
9.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	78,23	77,69	78,75	78,71	78,83	82,59	82,76

Sumber : Bappeda Provinsi Maluku, 2026

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan Daerah di Provinsi Maluku didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan daerah tersebut harus dikelola dengan prinsip- prinsip transparan, efisien, efektif, akuntabilitas dan partisipatif. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Dalam

rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. Semua sumber keuangan yang melekat pada urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber penerimaan yang cukup dengan mengacu pada peraturan perundang- undangan.

Berkaitan dengan itu, kemampuan keuangan daerah menjadi penting karena sangat menentukan bagi terselenggaranya roda pemerintahan dan pembangunan dengan baik. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan Pemerintah Daerah. Dalam rangka mendanai pelaksanaan program dan kegiatan selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (non-APBD) antara lain pendanaan melalui pendanaan APBN; kolaborasi APBD kabupaten/kota; pinjaman bank; PHLN; dana kemitraan dunia usaha; Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)/Public Private Partnership (PPP); swadaya masyarakat; serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) Perusahaan dan Program Kemitraan serta Bina Lingkungan (PKBL) di Maluku, yang semuanya berkolaborasi menjadi potensi sumber penerimaan guna menunjang belanja pembangunan daerah.

Berdasarkan pada hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah seperti diuraikan pada subbab sebelumnya dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2027, baik pendapatan, belanja dan pembiayaan dilaksanakan melalui arah kebijakan sebagai berikut.

3.2.1 Kondisi dan Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting. Daerah yang mempunyai kemampuan fiskalnya baik, akan memiliki kemampuan yang lebih baik didalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang akhirnya dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah.

Kemampuan pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah. Analisis dan proyeksi mempertimbangkan perkembangan realisasi pendapatan tahun 2024, 2025 dan target tahun 2026, serta asumsi pendapatan tahun 2027 dan 2028.

Sektor-sektor penerimaan pendapatan daerah di Provinsi Maluku. Kembali digerakan sehingga akan memberikan dampak terhadap penerimaan pendapatan daerah, khususnya dari retribusi, maupun potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Gambaran tentang realisasi pendapatan pendapatan daerah tahun 2024 sampai dengan tahun 2025, target pendapatan tahun 2026 dan proyeksi pendapatan tahun 2027 dan 2028 dapat diikuti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4
Realisasi dan Proyeksi Target Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024-2028 (Juta Rupiah)

No.	Uraian	Belanja				
		Realiasasi Tahun 2024	Realiasasi Tahun 2025	Target APBD Tahun 2026	Proyeksi RKPD Tahun 2027	Proyeksi RKPD Tahun 2028
4.1	**Pendapatan asli daerah**	**652.248,93**	**628,182,33**	**740,438,59**	**740,460,85**	**755,199,38**
4.1.1	Pajak daerah	537.680,58	444,707,64	475,258,53	469.518.66	470.710.08
4.1.2	Retribusi daerah	28.220,40	30,772,13	24,969,75	30,731,88	32,268,48
4.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	34.366,55	42,740,57	65,000,00	65,000,00	68,250,00
4.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	51.981,40	109,961,97	175,210,30	175,210,30	183,970,82
4.2	**Dana Perimbangan/Transfer**	**2.429.052,77**	**2,080,502,93**	**1,787,117,76**	**2,140,502,93**	**2,247,528,08**
4.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	77.418,83	61,438,82	-	91,438,82	96,010,77
4.2.2	Dana Alokasi Umum	1.626.314,99	1,574,783,52	1,787,117,76	1,574,783,52	1,653,522,70
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	725.318,95	444,280,57		444,280,57	466,494,60
4.2.4	Dana Insentif Daerah	-	-	-	30,000,00	31,500,00
4.3	**Lain-lain pendapatan daerah yang sah**	**4.898,31**	**325,668,00**	**325,668,00**	**325,668,00**	**325,668,00**
4.3.1	Hibah	4.898,31	325,668,00	325,668,00	325,668,00	325,668,00
4.3.2	Dana darurat	-	-	-	-	-
4.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsidan dari pemerintah daerah Lainnya	-	-	-	-	-
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	-	-	-
4.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**)	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1+1.2+1.3)	**3.086.200,02**	**2,709,384,42**	**2,527,882,03**	**2,881,289,45**	**3,003,053,14**

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2026

Pendapatan daerah dalam Tahun 2027 diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 13,98% apabila dibandingkan dengan target APBD Tahun 2026 yang telah mengalami efisiensi, Optimisme Provinsi Maluku dalam meningkatkan pendapatan daerah pada tahun 2027 didorong oleh prospek perbaikan aktivitas ekonomi daerah yang diperkirakan semakin stabil serta penguatan berbagai sektor unggulan daerah. Potensi peningkatan pendapatan didukung oleh membaiknya kinerja sektor perdagangan, perikanan, pertanian, dan jasa, yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian Maluku. Selain itu, peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mendorong pertumbuhan basis penerimaan daerah, khususnya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di sisi lain, pemerintah daerah terus melakukan upaya optimalisasi pendapatan melalui penguatan tata kelola keuangan daerah, digitalisasi pelayanan dan pemungutan pajak/retribusi, serta peningkatan pengelolaan aset daerah agar lebih produktif. Selain itu, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah diharapkan mampu meningkatkan kemandirian fiskal daerah guna mendukung pelaksanaan program prioritas pembangunan dan pelayanan publik yang lebih berkualitas di Provinsi Maluku. Pemerintah juga berupaya memperluas sumber-sumber pendapatan baru melalui pengembangan potensi unggulan daerah dan peningkatan investasi. Optimisme tersebut turut didukung oleh komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal daerah, meningkatkan efektivitas belanja, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat guna memperoleh dukungan pendanaan pembangunan. Dengan berbagai upaya tersebut, pendapatan daerah tahun 2027 diharapkan mampu tumbuh secara positif dan menjadi penopang utama dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di Provinsi Maluku.

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan pendapatan daerah Provinsi Maluku Tahun 2027 diarahkan pada upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi seluruh potensi sumber pendapatan secara terukur, akuntabel, dan berkelanjutan. Kebijakan pendapatan daerah difokuskan pada penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan efektivitas pengelolaan pendapatan transfer, serta pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah lainnya yang sah guna mendukung pembiayaan pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam rangka meningkatkan PAD, pemerintah daerah mendorong intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan melalui optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah, peningkatan kualitas pelayanan perpajakan berbasis digital, penguatan pengawasan dan kepatuhan wajib pajak, serta pengelolaan aset daerah yang lebih produktif. Selain itu, optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga menjadi bagian

penting dalam memperkuat kontribusi PAD terhadap struktur pendapatan daerah.

Dari sisi pendapatan transfer, arah kebijakan difokuskan pada penguatan sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan optimalisasi alokasi dana transfer, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), serta sumber pendanaan lainnya yang mendukung prioritas pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Maluku juga mendorong peningkatan kualitas perencanaan program agar selaras dengan prioritas nasional sehingga mampu meningkatkan peluang memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah pusat.

Sejalan dengan kondisi geografis Maluku sebagai daerah kepulauan, kebijakan pendapatan daerah Tahun 2027 juga diarahkan untuk mendukung penguatan sektor-sektor unggulan daerah, seperti perikanan, kelautan, pariwisata, perdagangan, dan investasi berbasis potensi lokal. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi daerah diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan penerimaan daerah secara berkelanjutan.

Melalui arah kebijakan tersebut, pendapatan daerah Tahun 2027 diharapkan dapat menjadi instrumen utama dalam mendukung stabilitas fiskal daerah, memperkuat kemandirian daerah, serta menunjang percepatan pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Maluku secara inklusif dan berkelanjutan.

Untuk meningkatkan pendapatan daerah Provinsi Maluku pada tahun 2027, dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Memantapkan kelembagaan melalui peningkatan peran dan fungsi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPTD) dan Badan Pendapatan.
2. Memantapkan kelembagaan melalui peningkatan peran dan fungsi unit pelayanan pendapatan daerah melalui Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPTD) Pasar Mardika
3. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
4. Meningkatkan dividen BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap pendapatan daerah.
5. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.
6. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional.
7. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan.
8. Memantapkan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada

wajib pajak.

9. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan dana perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan penerimaan pajak orang pribadi dalam negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, pajak ekspor, dan PPh Badan.
2. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana perimbangan.
3. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat untuk dana perimbangan dan kabupaten/kota untuk obyek pendapatan sesuai kewenangan provinsi.

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut, dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan pendapatan daerah (target), diperlukan strategi pencapaiannya sebagai berikut :

1. Strategi pencapaian target pendapatan asli daerah, ditempuh melalui :
   a. Menata kelembagaan, menyempurnakan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan, serta menyederhanakan sistem prosedur pelayanan.
   b. Melaksanakan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan mengembangkan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya.
   c. Meningkatkan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran.
   d. Melaksanakan dan mengembangkan inovasi di dalam pelayanan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi dan telematika di bidang pendapatan antara lain drive thru, Gerai Samsat dan Samsat Mobile, layanan SMS, mengembangkan Samsat Outlet.
   e. Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di seluruh kantor bersama/samsat dengan menggunakan parameter ISO 9001-2008.
   f. Menyebarluaskan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat.
   g. Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya yaitu mengelola BUMD secara profesional, meningkatkan sarana dan prasarana, memberikan kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai

dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari publik.

h. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah.

i. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan kabupaten/kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan pendapatan daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah (PD) penghasil.

2. Strategi pencapaian target dana perimbangan, dilakukan melalui :

   a. Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak.

   b. Meningkatkan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil.

   c. Meningkatkan keterlibatan pemerintah daerah dalam perhitungan lifting migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi.

   d. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, kementerian teknis, Badan Anggaran DPR-RI dan DPD-RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Transfer (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak).

3. Strategi pencapaian Lain-lain Pendapatan Yang Sah yang optimal ditempuh melalui :

   a. Koordinasi dengan kementerian teknis dan lembaga non pemerintah, baik dalam maupun luar negeri.

   b. Inisiasi dan pengenalan sumber pendapatan dari masyarakat.

   c. Optimalisasi penerimaan hibah pemerintah maupun non-pemerintah

   d. Kerja sama antardaerah dan kerja sama dengan pihak ketiga dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang. Maka tentunya program dan kegiatan yang bersifat strategis akan menjadi prioritas yang mendapatkan anggaran. Hal ini juga yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan pembangunan di tahun 2027.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, pemerintah Provinsi Maluku menerapkan prinsip money follows program dan penganggaran berbasis kinerja dengan memastikan alokasi belanja difokuskan pada program prioritas yang mendukung pencapaian target pembangunan daerah. Efisiensi belanja juga terus didorong melalui pengendalian belanja operasional yang lebih proporsional serta porsi belanja modal dan belanja yang bersifat produktif.

Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, pemenuhan belanja rutin perkantoran (fixed cost), belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah walaupun pendapatan daerah Provinsi Maluku dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Hal ini berdampak pada kemampuan riil keuangan daerah yang cenderung semakin menurun. Dengan menggunakan indikator ruang fiskal (ketersediaan dana dalam APBD yang dapat digunakan secara bebas oleh daerah) dan ruang fiskal daerah Maluku menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah Provinsi Maluku tahun anggaran 2026, adalah sebagai berikut :

1. Dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat. Komponen belanja langsung wajib dan mengikat meliputi: Honorarium Pegawai ASN BLUD; Belanja Jasa Kantor Listrik, Air, Telepon/Internet); Belanja Premi Asuransi; Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir; Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor; dan Belanja Beasiswa Pendidikan PNS.
2. Dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan penerapan pelayanan dasar, diantaranya :
    a. Penerapan standar pelayanan minimal (SPM) kewenangan provinsi, meliputi 6 (enam) urusan pelayanan dasar yaitu:
        - Pendidikan
        - Kesehatan
        - Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
        - Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
        - Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
        - Sosial

Tabel 3.5
Daftar Pelayanan SPM Provinsi Maluku Tahun 2027

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran
SPM Bidang Pendidikan			
1	**Angka Partisipasi Sekolah**	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	850.000.000,00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	8.000.000.000,00
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	9.219.764.440,00
		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	160.000.000,00
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	300.000.000,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	4.750.000.000,00
		Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	5.000.000.000,00
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.900.000.000,00
		Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	9.000.000.000,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	22.000.000.000,00
		Pembangunan Ruang Praktik Siswa	1.200.000.000,00
		Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	8.000.000.000,00
TOTAL			**70.379.764.440,00**
2	**Literasi dan Numerasi**	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1.500.000.000,00
		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	2.000.000.000,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	1.200.000.000,00
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	3.450.000.000,00

		Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	8.000.000.000,00
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	3.600.000.000,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	700.000.000,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	3.300.000.000,00
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	260.000.000,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	1.400.000.000,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	7.000.000.000,00
TOTAL			**32.410.000.000,00**
3	**Kekhususan SMK**	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.000.000.000,00
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	9.000.000.000,00
		Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	1.000.000.000,00
		Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.600.000.000,00
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.200.000.000,00
		Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	6.500.000.000,00
		Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	2.500.000.000,00
		Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	1.500.000.000,00
TOTAL			**29.300.000.000,00**
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan			**132.089.764.440,00**

SPM Bidang Kesehatan			
1	**Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi**	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1.000.000.000,00
TOTAL			**1.000.000.000,00**
2	**Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi**	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1.000.000.000,00
TOTAL			**1.000.000.000,00**
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Kesehatan			**2.000.000.000,00**

SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			
1	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota**	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	5.709.456.914,00
		Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	300.000.000,00
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.000.000.000,00
TOTAL			**7.009.456.914,00**
2	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional**	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	6.650.000.000,00
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	500.000.000,00
TOTAL			**7.150.000.000,00**
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			**14.159.456.914,00**

SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			
1	**Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi**	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	1.000.000.000,00
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	926.502.000,00
		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	400.000.000,00
		Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi	500.000.000,00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	100.000.000,00
TOTAL			**2.926.502.000,00**
2	**Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi**	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	3.512.894.812,00
		Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	450.000.000,00
TOTAL			**3.962.894.812,00**
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			**6.889.396.812,00**

SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum			
1	**Pelayananan Ketenteraman dan Keteriban Umum Provinsi**	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat serta dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	5.000.000,00
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	30.000.000,00
		Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4.780.000,00
TOTAL			**39.780.000,00**
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum			**39.780.000,00**

SPM Bidang Sosial			
1	**Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti**	Penyediaan Alat Bantu	20.000.000,00
		Penyediaan Permakanan	243.818.000,00
		Penyediaan Sandang	25.000.000,00
TOTAL			**288.818.000,00**
2	**Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti**	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	18.000.000,00
		Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	5.000.000,00
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	233.527.800,00
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	109.000.000,00
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	53.000.000,00
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	31.500.000,00
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	13.000.000,00
		Penyediaan Permakanan	1.342.957.600,00
		Penyediaan Sandang	87.460.000,00
TOTAL			**1.893.445.400,00**
3	**Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti**	Akses ke Layanan Kesehatan Dasar	4.950.000,00
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	10.000.000,00
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	10.800.000,00
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	24.000.000,00
		Pemulasaraan	35.000.000,00
		Penyediaan Alat Bantu	35.000.000,00

		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	24.230.000,00
		Penyediaan Permakanan	784.275.000,00
		Penyediaan Sandang	14.495.000,00
TOTAL			**942.750.000,00**
4	**Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti**	Penyediaan Permakanan	39.892.000,00
TOTAL			**39.892.000,00**
5	**Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial provinsi**	Pelayanan Dukungan Psikososial	157.600.000,00
		Penyediaan Permakanan	335.720.000,00
TOTAL			**493.320.000,00**
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial			**3.658.225.400,00**
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Tahun 2027			**158.836.623.566,00**

3. Sinkronisasi prioritas pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027.
4. Penggunaan dana fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.
5. Penggunaan dana fungsi kesehatan dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Provinsi Maluku secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 % dari total belanja APBD di luar gaji, pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti sarana olahraga dan sumber daya insani.
6. Penggunaan dana fungsi infrastruktur 10 % dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009.
7. Dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya untuk mendanai program-program perangkat daerah yang menjadi kewenangan provinsi dalam rangka mendukung program strategis nasional.
8. Mengalokasikan dana Hibah unutk lembaga/oraganisasi keagamaan dan

kemasayarakatan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Provinsi Maluku.

Belanja daerah di tahun 2027 relatif berfluktuasi sesuai dengan kondisi dan perkembangan reguasi serta kebutuhan daerah.

Tabel 3.6
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Maluku
Tahun 2024 - 2028

No	Uraian	Belanja				
		Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	APBD Tahun 2026	Proyeksi Tahun 2027	Proyeksi Tahun 2028
1	2	3	4	6	7	7
2	**Belanja Daerah**	**3.042.434,96**	**2.566.124,91**	**3.892.209,80**	**2.881.118,50**	**3,025.060,98**
2.1	**Belanja Operasi dan Belanja Modal**	**2.746.702,56**	**2.335.335,09**	**3.642.459,07**	**2.648.564,21**	**2.780.878,97**
	Belanja Operasi	**2.362.256.82**	**2.151.325.10**	**2.270.252.04**	**2.448.282.27**	**2.570.696.39**
	Belanja Pegawai	1.129.294.94	1.183.781.69	1.348.703.12	1.420.231.78	1.486.945.19
	Belanja Barang dan Jasa	867.848.63	760.558.86	846.119.21	895.797.27	1.000.589.94
	Belanja Bunga	758.53	526.75	10.000.00	605.68	11.025.00
	Belanja Hibah	360.292.64	199.130.29	62.140.20	127.308.08	68.509.57
	Belanja Subsidi	667.98	452.02	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	3.394.08	6.875.47	3.289.50	4.33945	3.626.67
	Belanja Modal	**384.445.73**	**184.045.77**	**1.372.207.03**	**200.281.93**	**210.296.03**
2.2	**Belanja Tidak Terduga**	**77,33**	**3,748,12**	**10.000,00**	**5.410,00**	**5.680,50**
	Belanja Tidak Terduga	77,33	3,748,12	10.000,00	5.410,00	5.680,50
2.3	**Belanja Transfer**	**295.655,06**	**227.005,89**	**239.750,72**	**227.144,29**	**238.501,50**
	Belanja bagi hasil kepada Kabupaten/ kota	295.655,06	227.005,89	239.750,72	227.144,29	238.501,50

Sumber : BAPPEDA Provinsi Maluku Tahun 2026

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah 3 (tiga) tahun serta perkembangan terakhir, dan melihat asumsi dan target pendapatan daerah tahun anggaran 2026, serta memperhatikan pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dan pencapaian target serta sasaran pembangunan dalam RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2025 - 2029 maka belanja daerah pada tahun anggaran 2027 diproyeksikan mengalami penyesuaian sebesar 25,98% dibandingkan target belanja tahun 2026 sebesar 3,89 triliun, Penurunan tersebut merupakan bagian dari kebijakan penyesuaian kapasitas fiskal daerah serta upaya penguatan kualitas belanja daerah agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Kebijakan belanja Tahun 2027 diarahkan pada optimalisasi penggunaan anggaran melalui prioritas program yang memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan sektor unggulan daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong efisiensi belanja operasional dan memfokuskan alokasi anggaran pada belanja yang produktif dan mendukung percepatan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, selain berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Analisis Standar Belanja (ASB) adalah alat untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau belanja maksimal setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja perangkat daerah untuk meningkatkan tingkat pelayanan tertentu dalam 1 (satu) tahun anggaran yang berupa personil, barang modal, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua objek sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, bahwa Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut diantaranya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pengelolaan SiLPA dan pinjaman daerah, sedangkan pengeluaran

pembiayaan daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

Perencanaan penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Pemerintah Provinsi Maluku mengasumsikan SiLPA menurun dari tahun ke tahun, begitu pun dengan proporsi SiLPA terhadap total belanja daerah. Hal ini bertujuan agar alokasi belanja daerah ditutupi oleh total pendapatan daerah.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 2 (dua) tahun, maka dapat dihasilkan proyeksi/target tahun rencana dan perkiraan maju. Pada tahun 2027 pembiayaan netto diperkirakan akan terjadi penurunan. Rumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam dua tabel sebagai berikut.

Tabel 3.7
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Maluku
Tahun 2024 - 2028

No	Uraian	Belanja				
		Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026	Proyeksi Tahun 2027	Proyeksi Tahun 2028
1	2	3	4	5	6	7
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**98,370.07**	**4.665,59**	**1.501.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	SILPA	98,370.07	4.665,59	1,000,00	1,000,00	1.000,00
	Penerimaan Kembali Investasi non Permanen	-	-	-	-	-
	Pinjaman dari pemerintah	-	-	1,500,000,00	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**136,672.22**	**136,672.22**	**136.672,23**	**160,672.22**	**150,000.00**
	Penyertaan Modal	-	-	-		
	Pengembalian Pokok Hutang	136,672.22	136,672.22	136.672,23	160,672.22	150,000.00
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-		
	Pembiayaan Neto	**(38,302.15)**	**(132.006,63)**	**1,364,327,77**	**(159.672,22)**	**(149.000,00)**

Sumber : BPKAD Provinsi Maluku Tahun 2026

Penerimaan pembiayaan daerah menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan selama periode tahun 2024–2028. Realisasi penerimaan pembiayaan pada tahun 2024 sebesar **98.370,07**, kemudian menurun menjadi **4.665,59** pada tahun 2025. Pada tahun

2026 diproyeksikan meningkat sangat tajam menjadi **1.501.000,00**, terutama berasal dari **rencana pinjaman dari pemerintah sebesar 1.500.000,00**, sedangkan komponen SILPA diproyeksikan relatif kecil sebesar **1.000,00**. Selanjutnya, pada tahun 2027 dan 2028 penerimaan pembiayaan kembali menurun menjadi **1.000,00**, yang seluruhnya bersumber dari proyeksi SILPA. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan pembiayaan pada tahun 2026 bersifat **temporer (one-off)** karena dipengaruhi oleh kebijakan pemanfaatan pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan. Setelah tahun 2026, daerah tidak lagi merencanakan penambahan pinjaman sehingga struktur penerimaan pembiayaan kembali bergantung pada SILPA.

Di sisi lain, pengeluaran pembiayaan selama periode perencanaan seluruhnya dialokasikan untuk **pengembalian pokok utang**. Realisasi tahun 2024 dan 2025 masing-masing sebesar **136.672,22**, meningkat menjadi **136.672,23** pada tahun 2026, kemudian menjadi **160.672,22** pada tahun 2027 sebelum menurun menjadi **150.000,00** pada tahun 2028. Tidak terdapat alokasi penyertaan modal maupun pembentukan dana cadangan selama periode tersebut. Perkembangan tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah daerah memprioritaskan pemenuhan kewajiban pembayaran pokok utang guna menjaga kredibilitas dan kesehatan fiskal daerah. Meningkatnya pengeluaran pembiayaan pada tahun 2027 mencerminkan dimulainya kewajiban pembayaran pinjaman yang direncanakan pada tahun 2026 sesuai dengan jadwal pengembalian pinjaman. Pembiayaan neto mengalami perubahan yang cukup tajam. Pada tahun 2024 dan 2025 pembiayaan neto masih bernilai negatif masing-masing sebesar **(38.302,15)** dan **(132.006,63)**, yang menunjukkan bahwa pengeluaran pembiayaan lebih besar dibandingkan penerimaannya. Namun pada tahun 2026 pembiayaan neto berubah menjadi positif sebesar **1.364.327,77** sebagai akibat adanya rencana pinjaman daerah. Selanjutnya pada tahun 2027 dan 2028 pembiayaan neto kembali negatif masing-masing sebesar **(159.672,22)** dan **(149.000,00)** seiring tidak adanya tambahan pinjaman dan tetap dilaksanakannya pembayaran pokok utang.

Secara keseluruhan, struktur pembiayaan daerah menunjukkan bahwa **pinjaman daerah hanya direncanakan sebagai instrumen pembiayaan jangka pendek untuk menutup kebutuhan pendanaan pembangunan pada tahun 2026**, sedangkan pada tahun-tahun berikutnya pemerintah daerah berfokus pada penyelesaian kewajiban pembayaran utang. Oleh karena itu, kebijakan pembiayaan daerah perlu tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, kemampuan fiskal daerah, kapasitas pembayaran kembali pinjaman (debt service capacity), serta menjaga kesinambungan fiskal agar tidak membebani APBD pada tahun-tahun berikutnya. Analisis pembiayaan juga perlu dikaitkan dengan proyeksi defisit atau surplus APBD sehingga menunjukkan keseimbangan antara kebutuhan pendanaan dan kemampuan keuangan daerah sebagaimana diarahkan dalam penyusunan RKPD.

3.3 Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah

Besarnya kebutuhan dana untuk pembangunan di Maluku dan terbatasnya sumber–sumber penerimaan konvesional mendorong Pemerintah Daerah Provinsi Maluku untuk mencari alternatif pembiayaan anggaran dalam membangun Maluku. Sumber-sumber pendanaan pembangunan non-APBD yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan antara lain: 1) APBN, 2) APBD Kabupaten/Kota, 3) Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), 4) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan 5) Hibah. Adapun penjelasan alternatif pembiayaan pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pembangunan dalam suatu daerah membutuhkan banyak sumber pendanaan, pembangunan Provinsi Maluku selain bersumber dari APBD Provinsi Maluku, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh Perangkat Daerah di kabupaten/kota maupun Perangkat Daerah Provinsi, maupun unit pelaksana teknis dari Pemerintah Pusat.

2. APBD Kabupaten/Kota

Keterbatasan sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah melalui APBD Provinsi Maluku dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan melalui kolaborasi pembiayaan dengan APBD kabupaten/kota. Kolaborasi sangat diperlukan agar tercipta sinkronisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kolaborasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan provinsi sejalan dan sinergis dengan program dan kegiatan pemerintah kabupaten/kota, sehingga antara provinsi dan kabupaten/kota dapat bekerja sama didalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun penuntasannya dilakukan dengan *sharing* pendanaan ataupun pembagian peran pendanaannya.

3. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Berdasarkan Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha. Saat ini banyak pemerintah daerah yang menyadari pentingnya kontribusi dari pihak swasta dalam mendorong pembangunan. Berdasarkan fakta, pihak swasta dapat membawa keahlian, ilmu, teknologi, efisiensi, dan permodalan yang sangat dibutuhkan sektor publik sehingga apabila dikombinasikan dengan sumberdaya publik yang tepat dapat berkontribusi lebih besar untuk pembangunan berkelanjutan. Namun pihak swasta membutuhkan lingkungan yang stabil dan dukungan peraturan dan kerangka regulasi yang kuat, persiapan kelembagaan yang jelas, dan faktor lainnya yang penting untuk "menciptakan pangsa pasar". Salah satu persoalan yang dihadapi pemerintah daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak mampu sepenuhnya membiayai pembangunan infrastruktur yang diinginkan atau diharapkan. Artinya, masih banyak bidang-bidang lain, seperti kesehatan, pendidikan, kebudayaan, sosial, dan agama yang juga membutuhkan penyerapan anggaran dari APBD. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan. Pada kondisi ini skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dapat menjadi solusi dengan prinsip gotong royong. Melalui skema pembiayaan KPBU, pemerintah, BUMN/BUMD, serta swasta bahu-membahu untuk membiayai keselarasian pembangunan.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai tahap awal pelaksanaan RPJPD 2025–2045 sekaligus menjadi bagian dari tahap pertama implementasi RPJMD 2025–2029. RKPD berfungsi sebagai instrumen penting untuk menerjemahkan visi dan misi pembangunan daerah ke dalam arah kebijakan yang fokus, terukur, serta responsif terhadap dinamika kebutuhan dan tantangan pembangunan aktual.

Arah kebijakan pembangunan daerah menjadi pedoman utama dalam menetapkan prioritas lintas sektor dan lintas wilayah, sehingga mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Pada periode perencanaan RPJMD 2025–2029, kebijakan pembangunan diarahkan pada penguatan fondasi transformasi. Fokus kebijakan ini mencakup delapan pilar utama yang menjadi landasan dalam mewujudkan visi serta mencapai sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

Dengan demikian, RPJPD Provinsi Maluku 2025–2045 membutuhkan tahapan dan prioritas yang terstruktur, yang kemudian dijabarkan ke dalam agenda pembangunan jangka menengah. RKPD 2027 hadir sebagai instrumen awal untuk memastikan konsistensi arah kebijakan, sekaligus memperkuat fondasi transformasi menuju pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Gambar 4.1
Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Maluku 2025 – 2045



Sumber : Perda No. 9 Tahun 2024, RPJPD 2025 – 2045

Tahapan pembangunan RPJMD 2025-2029 merupakan tahapan pertama pembangunan jangka menengah sebagaimana dituangkan dalam RPJPD Provinsi Maluku. Pada tahapan pertama diarahkan pada :

Penguatan fondasi untuk transformasi tahap-tahap selanjutnya. Pada tahap ini pertumbuhan ekonomi ditargetkan pada kisaran 5,9 - 6,1 persen per tahun.

Transformasi Sosial difokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan serta perlindungan sosial.

Transformasi Ekonomi difokuskan pada hilirisasi sumberdaya alam unggulan melalui pengembangan sentra-sentra industri yang telah memiliki potensi berkembang yang cukup besar pada saat ini, peningkatan kapasitas riset dan inovasi, produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau dan digitalisasi, pengembangan produk wisata baru yang kreatif dan inovatif, pemberdayaan ekonomi masyarakat, optimalisasi pemanfaatan teknologi dan digitalisasi, iklim investasi yang semakin baik, optimalisasi perdagangan luar negeri dengan penguatan akses jaringan perdagangan ekspor.

Transformasi Tata Kelola difokuskan pada perbaikan dan penataan kelembagaan yang tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN berbasis merit sistem, peningkatan kualitas pelayanan publik yang berbasis Teknologi Informasi, penataan regulasi daerah dan pemberdayaan masyarakat sipil.

Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Daerah dititikberatkan penguatan modal sosial masyarakat Maluku melalui kebijakan pemerintah daerah antara lain dengan revitalisasi budaya dan kearifan lokal (termasuk pendidikan), mengoptimalkan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dan peningkatan nilai-nilai kerukunan umat beragama, penguatan supremasi hukum, penataan kelembagaan pemerintah daerah, peningkatan kelembagaan adat dan memanfaatkan ruang-ruang publik dalam menciptakan kohesi sosial yang semakin berkualitas. Peningkatan keamanan dan stabilitas ekonomi daerah dengan implementasi kebijakan yang adaptif.

Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana yang sejalan dengan penguatan pembangunan lingkungan hidup secara inklusif, mempercepat pencapaian target pembangunan sektor lingkungan hidup, sosial dan ekonomi yang merata, adil dan berdaya saing dengan meningkatkan tata kelola dan adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan.

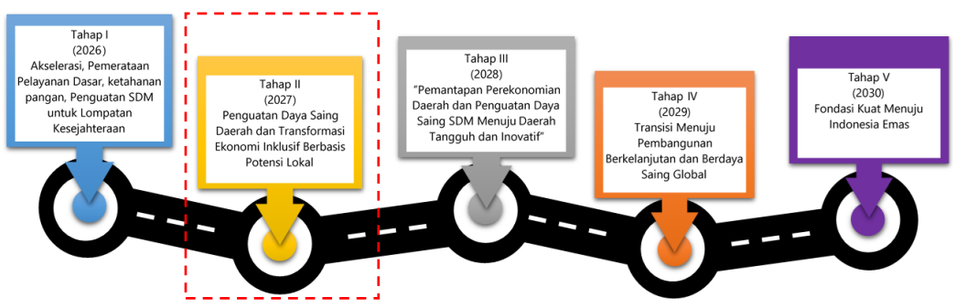
Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan difokuskan pada penyediaan infrastruktur yang memadai untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan wilayah sebagai landasan transformasi melalui peningkatan perluasan dan pemerataan cakupan akses layanan infrastruktur dasar dan transportasi termasuk penguatan jejaring konektivitas wilayah yang berbasis mitigasi bencana, perluasan jangkauan layanan akses telekomunikasi universal, penyiapan SDM TIK termasuk ASN, pengembangan jaringan 5G di Kawasan Pariwisata. Pemenuhan kebutuhan energi melalui diversifikasi sumber energi listrik termasuk mendorong investasi energi baru terbarukan, dan kesinambungan pembangunan pada tahap ini difokuskan pada peningkatan pemanfaatan cakupan sektor yang didanai non pemerintah

Pembangunan daerah merupakan suatu proses berkelanjutan yang memerlukan perencanaan yang sistematis, bertahap, dan berorientasi pada hasil jangka menengah serta kontribusi terhadap visi jangka panjang daerah maupun nasional. Dalam konteks Provinsi Maluku, penyusunan RPJMD Tahun 2025–2029 merupakan bagian dari kerangka perencanaan jangka panjang menuju *Maluku yang Maju, Adil, dan Sejahtera*, serta sebagai bagian dari kontribusi daerah dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

Agar pelaksanaan pembangunan lebih terarah, fokus, dan terukur, maka dalam RPJMD ini diterapkan pendekatan pentahapan pembangunan lima tahunan yang disusun secara strategis berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah, serta mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia. Pentahapan pembangunan ini dirancang untuk membentuk kesinambungan kebijakan, memperkuat fondasi kelembagaan, dan memastikan pencapaian sasaran pembangunan daerah secara progresif. Dengan memperhatikan arah kebijakan pada tiap misi dan arahan kebijakan pada RPJMN maka ditetapkan pentahapan pembangunan Provinsi Maluku sebagai berikut :

Gambar 4.2

Penahapan Pembangunan Provinsi Maluku 2026 – 2030



Sumber : Bappeda Provinsi Maluku, 2025

Pentahapan pembangunan diarahkan untuk menciptakan akselerasi yang sistematis dan terukur, dengan setiap tahun memperkuat fondasi dari capaian sebelumnya, sehingga tujuan misi pembangunan dapat diwujudkan secara bertahap. Berdasarkan tahapan dalam RPJMD Provinsi Maluku 2025–2029, arah kebijakan pembangunan tahun 2027 ditetapkan sebagai *"Penguatan Daya Saing Daerah dan Transformasi Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal."*

Kebijakan ini menegaskan bahwa pembangunan Maluku diarahkan untuk meningkatkan keunggulan kompetitif daerah melalui perbaikan infrastruktur, pelayanan publik, dan iklim investasi, sekaligus mendorong perubahan struktur ekonomi yang lebih produktif dan beragam dengan memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Transformasi ini berakar pada kekuatan khas Maluku, seperti sumber daya kelautan, perikanan, pariwisata bahari, pertanian tropis, serta budaya lokal, sehingga pembangunan tidak hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tetapi juga memperkuat identitas daerah dan memberikan lompatan kesejahteraan bagi masyarakat secara inklusif. Seluruhnya menjadi landasan penting untuk mencapai lompatan kesejahteraan masyarakat Maluku.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, tema pembangunan RKPD Tahun 2027 ditetapkan sebagai berikut:

"Penguatan Daya Saing Daerah dan Transformasi Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal."

Tema pembangunan berfungsi sebagai payung strategis yang menyatukan arah kebijakan, program, dan kegiatan lintas sektor dalam satu narasi besar yang konsisten. Dalam konteks RKPD, tema berperan untuk memastikan kesinambungan antara visi jangka panjang (RPJPD), sasaran jangka menengah (RPJMD), dan prioritas tahunan, sehingga setiap perangkat daerah memiliki pedoman yang jelas dalam menyusun rencana kerja. Tema juga menjadi kerangka konseptual yang menjelaskan fokus pembangunan, mengarahkan alokasi sumber daya agar tepat sasaran, serta memperkuat identitas pembangunan daerah dengan menekankan potensi lokal dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, tema bukan sekadar slogan, melainkan instrumen penting untuk menjaga konsistensi arah pembangunan, membangun legitimasi kebijakan, dan memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan pembangunan daerah ditetapkan sebagai orientasi utama yang menjawab secara langsung berbagai isu strategis dan permasalahan nyata dalam pembangunan daerah. Tujuan adalah rumusan umum tentang apa yang ingin dicapai pada tahun 2027 sebagai tahap awal RPJMD sehingga menjadi fondasi dalam menuntun pelaksanaan program-program prioritas pembangunan Provinsi Maluku tahun 2025–2029. Tujuan Pembangunan RKPD 2027 dalam RPJMD 2025-2029 diarahkan untuk:

1. Meningkatnya kualitas birokrasi dan pelayanan publik
2. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat
3. Meningkatnya kualitas SDM Maluku
4. Meningkatnya Infrastruktur Dasar, Telekomunikasi, Elektrifikasi dan wilayah serta konektivitas Antar dan Intra Wilayah
5. Meningkatnya Pengelolaan SDA, dampak perubahan Iklim dan ketahanan bencana
6. Mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif
7. Meningkatnya harmonisasi sosial, Budaya dan penegakan hukum

Ke-7 (tujuh) tujuan pembangunan itu diarahkan untuk mengokohkan **transformasi pembangunan Maluku** dalam rangka mencapai visi *"Transformasi Menuju Maluku yang Maju, Adil, dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045"*. Tahun 2027 menjadi fase lanjutan dalam perjalanan RPJMD Provinsi Maluku **dan** merupakan periode yang menegaskan kesinambungan antara pemerataan pelayanan dasar dan penguatan daya saing daerah. Pada tahap awal, fokus diarahkan pada pemenuhan kebutuhan fundamental masyarakat melalui pemerataan akses pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta penguatan ketahanan pangan dan kualitas sumber daya manusia. Fondasi kesejahteraan ini kemudian menjadi pijakan untuk melangkah ke tahap berikutnya, yaitu transformasi ekonomi inklusif berbasis potensi lokal. Dengan memanfaatkan kekuatan pangan, perikanan, pariwisata, dan energi terbarukan, daerah tidak hanya memperkuat daya saing tetapi juga memastikan partisipasi luas masyarakat dalam proses pembangunan. SDM yang telah diperkuat di Tahap II diarahkan untuk menguasai

teknologi, berinovasi, dan mengembangkan kewirausahaan lokal, sehingga kesejahteraan yang merata dapat ditransformasikan menjadi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sekaligus menjadi tahun pertama pelaksanaan tahapan kedua RPJMD Provinsi Maluku 2025-2029. Sasaran Pembangunan RKPD 2027 dalam RPJMD 2025-2029 diarahkan untuk :

1. Tercapainya reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Maluku
2. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat
3. Menurunnya Tingkat Pengangguran
4. Meningkatnya kualitas dan akses Pendidikan
5. Meningkatnya kualitas dan akses layanan Kesehatan
6. Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga
7. Meningkatnya Peran Kelompok Rentan (Perempuan, anak dan Penyandang Disabilitas) Keluarga dan Kesetaraan Gender
8. Meningkatnya infrastruktur dasar
9. Meningkatnya infrastruktur dasar transportasi
10. Meningkatnya Infrastruktur dasar Telekomunikasi
11. Terjaganya wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil
12. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan dampak perubahan iklim
13. Meningkatnya mitigasi bencana
14. Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah Secara Berkelanjutan
15. Terciptanya iklim investasi yang kondusif
16. Berkembangnya kawasan ekonomi khusus
17. Meningkatnya Kontribusi sektor unggulan terhadap perekonomian daerah
18. Meningkatnya akses pembiayaan bagi Masyarakat
19. Stabilitas ekonomi daerah
20. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa
21. Meningkatnya Ketaatan dan kepatuhan Hukum oleh Masyarakat
22. Meningkatnya Harmonisasi Sosial berbasis Norma Agama, Budaya dan Kearifan Lokal
23. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa

Untuk mengetahui tercapainya tujuan dan sasaran tersebut diatas tentunya dibutuhkan tolak ukur yang dapat mengukur pencapaian keberhasilannya dalam bentuk indikator kinerja. Indikator kinerja pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2027

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Capaian 2025	TARGET	
					2026	2027
T1: Meningkatnya kualitas birokrasi dan pelayanan publik		**T1. Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Maluku**	**Indeks**	67,51 (B)	70 (B)	72,5 (BB)
	S1.1. : Tercapainya reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Maluku	S1.1 Indeks Reformasi Birokrasi General	Indeks	60,84	62,75	64,75

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Capaian 2025	TARGET	
					2026	2027
		Indeks Integritas Nasional/Daerah	Skor	66,56	68,12	68,81
T2. Meningkatkatnya Kesejahteraan Masyarakat		**T1, Tingkat Kemiskinan**	**Persen**	15,25	14,54	13,67
	S2.1. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	S2.1 PDRB Per Kapita	Persen	33,65	38,73	42,65
	S2.2. Menurunnya Tingkat Pengangguran	S2.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (IUP 45)	Persen	6,27	5,92	5,8
T3: Meningkatnya kualitas SDM Maluku		**T3: Indeks Modal Manusia (IMM)**	**Indeks**		0,49	0,50
	S3.1 Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan	S3.1 Indeks Pendidikan	Indeks	0,466	0,475	0,477
	S3.2 Meningkatnya Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan	S3.2 Indeks Kesehatan	Indeks	0,418	0,767	0,770
	S3.3 Meningkatnya Peran Pemuda dan Prestasi Olahraga	S3.3.1 Jumlah cabang olah raga yang meraih prestasi dalam kompetisi nasional dan internasional	Jumlah		4	4
		S3.3.2 Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks		57,45	58,16
	S3.4 Meningkatnya Peran Kelompok Rentan (Perempuan, anak dan Penyandang Disabilitas) Keluarga dan Kesetaraan Gender	S3.4 Indeks Ketimpangan Gender (IUP 45)	Indeks	0,530	0,514	0,502
T.4 Meningkatnya Infrastruktur Dasar,Telekomunikasi, Elektrifikasi dan wilayah serta konektivitas Antar dan Intra Wilayah		**T4.1 Indeks Infrastruktur**	**Indeks**	56,47	54,76	57,13
		T4.2 Rasio Konektivitas Wilayah Provinsi Maluku	**Rasio**	0,704	0,725	0,741
	S4.1 Meningkatnya Infrastruktur Dasar	S4.1.1: Indeks Infrastruktur Dasar	Indeks	29,02	35,72	37,27

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Capaian 2025	TARGET	
					2026	2027
		S4.1,2 Kemantapan Jalan	Persen	61,48	72,11	76,11
		S4.1.3 Persentase Rumah Tangga Terakses Air Minum Aman	Persen	23,70	27,15	29,89
		S4.1.4 Persentase Akses Rumah Tangga Terhadap Sanitasi Aman	Persen	1,43	0,00	1,71
	S4.2 Meningkatnya Infrastruktur Dasar Transportasi	S4.2: Persentase wilayah yang terhubung oleh infrastruktur transportasi	Persentase		73,58	75,58
	S4.3. Meningkatnya infrastruktur Dasar telekomunikasi	S4.3. Persentase wilayah yang terhubung oleh infrastruktur telekomunikasi	Persentase		74,87	78,25
T5 Meningkatnya pengelolaan SDA, dampak perubahan iklim dan ketahanan bencana		**T5.1: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**Indeks**	78,83	82,29	82,76
		T5.2 Indeks Risiko Bencana	**Indeks**	161,50	161,40	161,35
		T5.3 Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK	**Persentase**	42,88	49,38	58,91
	S5.1 Terjaganya Lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	S5.1: Persentase wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terkonservasi	Persentase	2,11	2,37	3,32
	S5.2 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan dampak perubahan iklim	5.2 Indeks Kualitas Lingkungan hidup Daerah (IUP 45)	Angka	78,43	82,59	82,76
	S5.3 Meningkatnya Mitigasi Bencana	S5.3 Indeks Ketahanan Daerah	Skor		0,38	0,40
	S5.4 Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah Secara Berkelanjutan	S5.4 Indeks Ketahanan Pangan	Skor	57,15	67,20	69

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Capaian 2025	TARGET	
					2026	2027
T6 Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif		**T6.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**Persen**	5,44	6,07	6,85
		T6.3 Indeks Wiliamson	**Indeks**	0,412	0,388	0,388
		T5.4. Indeks Ekonomi Hijau	**Indeks**		61,90	63,73
	S6.1 Terciptanya iklim investasi yang kondusif	S6.1 Persentase Peningkatan Realisasi Nilai investasi (PMA dan PMDN) yang masuk ke Provinsi Maluku	Persen		3,838	3,912
	S6.2: Berkembangnya kawasan Ekonomi Khusus	S6.2 Tingkat Perkembangan Kawasan Ekonomi. Khusus	Jumlah	0	0	0
	S6.3 Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan terhadap Perekonomian Daerah	S6.3.1 Rasio PDRB Industri Pengolahan (IUP 45)	Persen	6,51	6,6	6,7
		S6.3.2 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum (%) (IUP 45)	Rasio	1,45	1,58	1,62
		S6.3.3 LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	6,42	6,35	6,9
	S6.4 Meningkatnya Akses Pembiayaan Bagi Masyarakat	S6.4.1 Persentase Masyarakat yang mengakses pembiayaan	Persen		7,54	7,61
		S6.4.2 Inklusi Keuangan	Persen		87,11	87,92
	S6.5: Stabilitas Ekonomi Daerah	S6.5.1 : Tingkat Inflasi Daerah	Persen	3,58	2,5 ± 1	2,5 ± 1
		S6.5.2 Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	Persen		11,32	11,15
	S6.6 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Desa	S6.7.1 Indeks Desa	Skor		0,672	0,686

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Capaian 2025	TARGET	
					2026	2027
T7. **Meningkatkan Harmonisasi Sosial, Pembangunan Kebudayaan, dan Penegakan Hukum**		**T7.1** **Indeks Kerukunan Umat Beragama**	**Angka**	77,89	80,89	83,89
		T7.2 **Indeks Pembangunan Kebudayaan**	**Angka**		61,31	61,91
		T7.3 **Indeks Demokrasi Provinsi**	**Persen**	73,93	70.55-77,19	70,6 - 77,69
	S7.1 Meningkatnya Ketaatan dan kepatuhan Hukum oleh Masyarakat	S7.1 Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	Persen		100	100
	S7.2 Meningkatnya Harmonisasi Sosial berbasis Norma Agama, Budaya dan Kearifan Lokal	S7.2.1 Indeks Harmoni	Skor		6,6	6,7
	S7.3 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	S7.3 Persentase desa Mandiri	Persen	11,08	15,67	16,08

4.2. Tema RKPD 2027

RKPD Provinsi Maluku tahun 2027 disusun melalui sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya, salah satunya melalui penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan RKPD mengacu pada RKP melalui penyelarasan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan daerah. Tema RKPD Provinsi Maluku Tahun 2027, dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dan tema RKP Tahun 2027, adalah "***AKSELERASI PERTUMBUHAN BERKUALITAS MELALUI PRODUKTIVITAS,INVESTASI DAN INDUSTRI"*** Keselarasan antara tema RKP Tahun 2027 dengan Tema RKPD Provinsi Maluku Tahun 2027 disajikan dalam tebel berikut ;

Tabel 4. 2 Keselarasan Tema RKP dan RKPD Tahun 2027

TEMA RKP	TEMA RKPD
AKSELERASI PERTUMBUHAN BERKUALITAS MELALUI PRODUKTIVITAS,INVESTASI DAN INDUSTRI	*PENGUATAN DAYA SAING DAERAH & TRANSFORMASI EKONOMI INKLUSIF BERBASIS POTENSI LOKAL*

4.3. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Maluku

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Maluku, diperlukan strategi dan arah kebijakan yang mampu menjawab tantangan khas daerah kepulauan. Pembangunan Maluku diarahkan pada penguatan konektivitas antar-pulau, peningkatan kualitas hidup masyarakat pesisir, serta pengembangan ekonomi berbasis kelautan dan budaya lokal.

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Maluku mengacu pada **RPJMD 2025–2029,** dengan semangat "***Par Maluku Pung Bae"*** sebagai semangat bersama merumuskan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan RKPD Tahun 2027 akan menjadi pedoman operasional dalam pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga setiap program dan kegiatan dapat terarah, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Tabel 4.3

Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan Provinsi Tahun 2027

No	Visi/Misi	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Secara Adil, Inklusif, Transparan dan Akuntabel	**Tujuan 1 :** **Meningkatnya kualitas birokrasi dan pelayanan publik**		
		Sasaran 1 : Tercapainya reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Maluku	Memperkuat Sistem Pemerintahan Yang Transparan, Efisien, Responsif, dan Berbasis Teknologi untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Secara Efektif	Peningkatan kapasitas manajemen kinerja pemerintahan berbasis hasil, dan percepatan digitalisasi layanan publik
				Peningkatan kualitas aparatur melalui pelatihan, sistem merit, serta budaya kerja berintegritas dan adaptif
				Peningkatan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui penerapan sistem informasi yang terbuka dan Akuntabel
				Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan berbasis data, partisipatif, dan inovatif.
2		**Tujuan 2 :**		

No	Visi/Misi	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pengentasan Kemiskinan dan Penurunan Tingkat Pengangguran Melalui Kebijakan Yang Tepat Sasaran, Efisien dan Efektif	**Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat**		
		Sasaran 2 : Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan pengangguran	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Percepatan Akses terhadap Perlindungan Sosial Adaptif, Pengurangan Beban Pengeluaran Rumah Tangga Miskin, Penguatan Sinergi Antar Perangkat Daerah dan Lintas Sektor serta Penguatan program perlindungan sosial, peningkatan pendapatan masyarakat
		Sasaran 3 : Menurunnya Tingkat Pengangguran		Perluasan Kesempatan Kerja yang Inklusif dan Berkelanjutan melalui upaya penciptaan lapangan kerja, investasi, proyek padat karya, penguatan sektor informal, Pengembangan pasar tenaga kerja yang adaptif dan responsif terhadap perubahan, Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja,
3	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sains, Teknologi,	**Tujuan 3 :** **Meningkatnya Kualitas SDM Maluku**		

No	Visi/Misi	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas	Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas dan akses Pendidikan	Memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan, layanan kesehatan, pembinaan olahraga, serta pemberdayaan kelompok rentan	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang memadai, kapasitas guru, serta penguatan kurikulum berbasis teknologi
		Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas dan akses layanan kesehatan		Penguatan sistem layanan kesehatan yang merata, responsif, dan berkelanjutan, termasuk peningkatan kualitas tenaga dan sarana prasarana kesehatan
		Sasaran 6 : Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga		Pengembangan sistem pembinaan olahraga terpadu yang berbasis komunitas, pendidikan, dan potensi lokal untuk meningkatkan prestasi
		Sasaran 7 : Meningkatnya Peran Kelompok Rentan (Perempuan, anak dan Penyandang Disabilitas) Keluarga dan Kesetaraan Gender		Perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan serta mendorong kesetaraan gender dalam seluruh aspek pembangunan
4	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar serta Transportasi dan Telekomunikasi Untuk Memperlancar Konektivitas Antar dan Intra Wilayah	**Tujuan 4 :** **Meningkatnya Infrastruktur Dasar, Wilayah Serta Konektivitas Antar dan Intra Wilayah**		
		Sasaran 8 : Meningkatnya infrastruktur dasar	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar,	Perluasan cakupan dan peningkatan kualitas layanan air bersih, sanitasi, energi, dan

No	Visi/Misi	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			transportasi, dan telekomunikasi secara terpadu	perumahan layak secara merata dan berkelanjutan
		Sasaran 9 : Meningkatnya infrastruktur dasar transportasi		Percepatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan transportasi serta Mengoptimalkan peran bandara di Maluku sebagai simpul transportasi udara utama yang mendukung pariwisata, investasi, dan mobilitas masyarakat secara berkelanjutan dan terintegrasi serta Memperkuat peran pelabuhan utama sebagai simpul konektivitas maritim regional dan nasional, serta mendukung pengembangan sentra produksi.
		Sasaran 10 : Meningkatnya Infrastruktur Telekomunikasi		Perluasan jangkauan dan peningkatan kualitas infrastruktur telekomunikasi dan digital
5	Pengelolaan Lingkungan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Sumber Daya Alam Yang berkelanjutan, Adaptasi dan Mitigasi dampak Perubahan Iklim dan Ketahanan	**Tujuan 5 :** **Meningkatnya Pengelolaan SDA, dampak perubahan Iklim dan ketahanan bencana**		
		Sasaran 11 :	Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan	Penguatan perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil

No	Visi/Misi	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Bencana (Etis, Responsif dan Akuntabel)	Terjaganya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	ketahanan pangan, air, energi serta peningkatan kapasitas adaptasi dan ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana yang inklusif dan berbasis komunitas	
		Sasaran 12 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan dampak perubahan iklim		Pengurangan pencemaran, rehabilitasi lingkungan, dan integrasi mitigasi-adaptasi perubahan iklim dalam pembangunan
		Sasaran 13 : Meningkatnya Mitigasi Bencana		Penguatan sistem peringatan dini, pemetaan risiko bencana, dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana berbasis wilayah dan kearifan lokal
		Sasaran 14 : Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah secara berkelanjutan		Peningkatan Kapasitas Produksi dan Produktivitas Pangan dan Pengembangan Diversifikasi Pangan Lokal dan Penguatan Sistem Logistik dan Distribusi Pangan
6	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif melalui hilirisasi komoditas unggulan, Pemberian Insentif bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Membuka	**Tujuan 6 : Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif**		
		Sasaran 15 : Terciptanya iklim investasi yang kondusif	Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Kemudahan Investasi, Hilirisasi	Peningkatan iklim investasi, kepastian hukum, dan penyediaan infrastruktur pendukung investasi

No	Visi/Misi	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Aksesibilitas Pasar dan Mengurangi Disparitas Antar Wilayah	Sasaran 16 : Berkembangnya kawasan ekonomi khusus	Industri, Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Lokal dan UMKM.	Pengembangan kawasan industri pengolahan melalui penyediaan infrastruktur, insentif fiskal, dan kemitraan dengan pelaku usaha local
		Sasaran 17 : Meningkatnya Kontribusi sektor unggulan terhadap perekonomian daerah		Memperkuat nilai tambah dan daya saing sektor unggulan, penguatan rantai pasok, peningkatan kualitas SDM, serta perluasan akses pasar domestik dan ekspor
		Sasaran 18 : Meningkatnya akses pembiayaan bagi masyarakat		Perluasan akses pembiayaan inklusif melalui penguatan kelembagaan keuangan lokal, digitalisasi layanan, dan skema pembiayaan yang terjangkau
		Sasaran 19 : Stabilitas ekonomi daerah		Penguatan diversifikasi usaha dan pengendalian inflasi daerah
		Sasaran 20 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa		Pemberdayaan masyarakat, pengembangan usaha berbasis sumber daya lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan
7	Penataan dan revitalisasi lembaga sosial kemasyarakatan dalam semangat hidup orang basudara,	**Tujuan 7 :**		

No	Visi/Misi	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	berbasis adat budaya dan kearifan lokal serta ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum	**Meningkatnya Harmonisasi Sosial, Pembangunan Kebudayaan, dan Penegakan Hukum**		
		Sasaran 21 : Meningkatnya Ketaatan dan kepatuhan Hukum oleh Masyarakat	Memperkuat integrasi sosial melalui penguatan nilai-nilai toleransi dan inklusi, penegakan hukum yang berkeadilan, serta peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif dan akuntabel	Penguatan dialog antar komunitas, nilai toleransi, serta partisipasi aktif dalam kegiatan sosial yang inklusif dan berkelanjutan
		Sasaran 22 : Meningkatnya Harmonisasi Sosial berbasis Norma Agama, Budaya dan Kearifan Lokal		Penguatan sinergitas antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat
		Sasaran 23 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa		Penguatan integrasi adat istiadat dan kearifan lokal, sistem tata kelola yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan

4.4. Keselarasan Sasaran RKPD dan RKP

RKPD Provinsi Maluku tahun 2027 ditetapkan dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, sekaligus memastikan kesinambungan arah pembangunan menuju visi jangka menengah daerah. Di sisi lain, RPJMD disusun untuk mendukung kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RKP tahun 2027. Keselarasan kebijakan pembangunan daerah Provinsi Maluku tahun 2027 dengan RKP tahun 2027 tercermin dalam kesesuaian tema pembangunan yang menekankan transformasi inklusif, keberlanjutan, dan daya saing global, serta diperkuat dengan prioritas, sasaran dan indikator kinerja, target pengembangan wilayah, dan dukungan program prioritas daerah. Dengan demikian, RKPD 2027 tidak hanya menjadi instrumen perencanaan tahunan, tetapi juga menjadi jembatan strategis yang menghubungkan pencapaian kesejahteraan masyarakat dengan agenda pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Tabel 4.4 Keselarasan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah dengan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2027

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RKP	Target RKP Untuk Maluku	TARGET RKPD
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,9-7,5	5,2-6,0	6,85
2	Tingkat Kemiskinan	%	6,0-6,5	13,75-14,17	13,67
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,30-4,87	5,80	5,8
4	Rasio Gini	Indeks	0,362-0,367	0,261- 0,265	0,261- 0,265
5	Indeks Modal Manusia	Indeks	0,575	0,500	0,500
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	76,84	-	82,76
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	39,57	-	58,91
8	GNI Per Capita/PDRB Perkapita	Juta	5,980-6,050	35,8-38,2	42,65
9	Kontribusi PDRB Provinsi	%	-	0,3	0,29

4.5. Prioritas Pembangunan Tahun 2027

Prioritas pembangunan nasional dan daerah saling terkait sebagai satu kesatuan arah kebijakan. Pada tingkat nasional, RKP 2027 menekankan akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui peningkatan produktivitas, investasi, dan penguatan industri, dengan fokus pada ketahanan pangan dan energi, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, serta tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan. Sementara itu, Maluku sebagai provinsi kepulauan menyesuaikan prioritasnya dengan karakteristik lokal, antara lain penguatan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam unggulan, percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran melalui pemberdayaan UMKM, peningkatan konektivitas antar-pulau, serta penguatan kualitas SDM dan tata kelola berbasis kearifan lokal. Dengan demikian, prioritas nasional menjadi payung besar yang memberikan arah strategis, sedangkan prioritas daerah Maluku merupakan turunan yang kontekstual, memastikan potensi lokal dapat berkontribusi pada pencapaian target nasional sekaligus menjawab tantangan spesifik wilayah kepulauan.

4.5.1. Prioritas Nasional 2027

Prioritas nasional merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden, dimana Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Prioritas Nasional meliputi:

1. Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan;
8. Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

4.5.2. Prioritas Daerah 2027

Prioritas pembangunan daerah secara khusus berkaitan dengan pencapaian sasaran pembangunan, tingkat urgensi, serta daya ungkit terhadap peningkatan kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas dilakukan melalui evaluasi permasalahan pembangunan yang kemudian dihubungkan dengan program pembangunan daerah. Prioritas pembangunan daerah merupakan agenda tahap pertama pemerintah daerah dalam RPJMD 2025–2029. Pada dasarnya, prioritas ini mencakup program-program unggulan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah (PD) untuk mencapai target sasaran pembangunan sesuai tahun rencana. Prioritas pembangunan juga dapat dipandang sebagai bentuk operasional dari tujuan strategis daerah, dengan mendasarkan pada urgensi, daya ungkit terhadap kesejahteraan, serta cakupan pembangunan. Program prioritas adalah program yang diselenggarakan oleh PD, baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah, serta berkaitan dengan

pemenuhan kebutuhan dasar dan standar layanan minimal. Tidak semua program prioritas dapat ditetapkan sebagai prioritas pembangunan daerah, karena adanya keterbatasan anggaran dan hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu, penentuan prioritas pembangunan harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan berbagai aspek.

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Maluku Tahun 2027 disusun berdasarkan isu strategis serta memuat pokok-pokok pikiran tahunan DPRD Tahun 2027, yang tertuang dalam prioritas pembangunan dan arah kebijakan RPJMD 2025–2029. Dengan demikian, keterkaitan antara prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2025 dengan arah kebijakan RKPD Tahun 2027 menjadi sangat erat.

Perumusan prioritas 2027 disajikan dengan tetap menjaga keterkaitan antara prioritas pembangunan daerah, diantaranya :

1. Penguatan Pengelolaan Dan Peningkatan Nilai Tambah Sumber Daya Alam Unggulan Daerah
2. Percepatan Penurunan Kemiskinan Dan Pengangguran Melalui Pemberdayaan Ekonomi Produktif Dan UMKM
3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Wilayah Kepulauan
4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Untuk Mendukung Daya Saing Dan Produktivitas Daerah
5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Dalam Mendukung Pelayanan Publik Yang Inklusif Dan Berkelanjutan;
6. Penguatan Kapasitas Pengendalian Lingkungan Dan Resiliensi Terhadap Bencana Untuk Menjamin Pembangunan Yang Berkelanjutan
7. Penguatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan Berbasis Kearifan Lokal Serta Ketaatan Dan Kepatuhan Terhadap Hukum

Adapun untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2027 dilakukan melalui strategi dan arah kebijakan yang tersebar ke dalam 7 (tujuh) prioritas pembangunan yang diuraikan sebagai berikut :

1. Penguatan Pengelolaan Dan Peningkatan Nilai Tambah Sumber Daya Alam Unggulan Daerah

Maluku dikenal sebagai provinsi kepulauan dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, terutama sektor perikanan, perkebunan rempah, dan kelautan. Namun, kontribusi sektor ini masih dominan pada bentuk primer sehingga nilai tambah yang dihasilkan relatif rendah. Kondisi ini menyebabkan hasil produksi belum sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan pertumbuhan ekonomi Maluku yang tercatat 5,44% (yoy) pada 2025, penguatan pengelolaan SDA menjadi penting agar potensi unggulan daerah dapat diolah secara berkelanjutan. Hilirisasi hasil laut dan perkebunan, serta pengembangan kawasan pangan terintegrasi, menjadi strategi utama untuk meningkatkan daya saing daerah, maka strategi yang dilakukan antara lain mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif melalui hilirisasi komoditas unggulan, penguatan sektor unggulan, dan perluasan akses pasar domestik serta ekspor;

Arah Kebijakan:

- Memperkuat nilai tambah dan daya saing sektor unggulan melalui pengolahan hasil laut dan rempah.
- Pengembangan kawasan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal.
- Peningkatan kualitas SDM dan rantai pasok untuk mendukung ekspor.

Strategi :

- Hilirisasi hasil perikanan dan perkebunan untuk meningkatkan nilai tambah.
- Pengembangan kawasan pangan terintegrasi berbasis kelautan.
- Dukungan investasi industri pengolahan hasil laut dan rempah.

2. Percerpatan Penurunan Kemiskinan Dan Pengangguran Melalui Pemberdayaan Ekonomi Produktif Dan UMKM

Kemiskinan masih menjadi tantangan besar di Maluku, terutama di wilayah pedesaan dan kepulauan. Data BPS September 2025 menunjukkan angka kemiskinan sebesar 15,25% dengan tingkat kemiskinan desa mencapai 24,01%. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan lapangan kerja produktif yang menyebabkan pengangguran terbuka tetap tinggi.

UMKM terbukti menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM berbasis komunitas pesisir, dukungan pembiayaan mikro, serta integrasi bantuan sosial dengan program produktif menjadi strategi utama dalam menurunkan kemiskinan dan pengangguran di Maluku.

Arah Kebijakan:

- Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui akses pembiayaan dan pelatihan usaha.
- Perluasan kesempatan kerja melalui proyek padat karya dan investasi daerah.
- Integrasi bantuan sosial dengan program produktif untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Strategi :

Strategi percepatan pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah, perluasan kesempatan kerja inklusif, serta penguatan program perlindungan sosial.

- Pemberdayaan UMKM berbasis komunitas
- Program kredit mikro dan akses pembiayaan digital
- Integrasi bantuan sosial dengan program produktif

3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Wilayah Kepulauan

Provinsi Maluku sebagai daerah kepulauan dengan 1.340 pulau menghadapi tantangan besar dalam penyediaan dan pemerataan infrastruktur. Kondisi geografis menyebabkan biaya logistik tinggi, keterbatasan aksesibilitas antar wilayah, serta rendahnya konektivitas antar

pulau. Hal ini berdampak pada terbatasnya pergerakan barang, jasa, dan orang, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan menurunkan daya saing wilayah.

Ketersediaan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, serta sarana transportasi laut dan darat belum sepenuhnya memadai, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Masih terdapat daerah yang sulit dijangkau akibat kondisi jaringan transportasi yang terbatas dan belum terintegrasi.

Selain itu, infrastruktur telekomunikasi dan digital juga belum merata, terutama di pulau-pulau kecil, sehingga memperlebar kesenjangan digital antar wilayah. Keterbatasan ini menjadi hambatan dalam pengembangan ekonomi berbasis digital, pelayanan publik, serta akses informasi dan pendidikan.

Dengan kondisi tersebut, pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas wilayah menjadi sangat strategis untuk mendorong pemerataan pembangunan, memperkuat integrasi ekonomi, menurunkan disparitas antar wilayah, serta mempercepat distribusi logistik, pangan, energi, dan pelayanan dasar di seluruh wilayah Maluku. Arah kebijakan dan strategi yang dilakukan antara lain :

Arah Kebijakan :

- Perluasan cakupan layanan air bersih, sanitasi, energi, dan perumahan layak.
- Percepatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan transportasi darat, laut, dan udara.
- Memperkuat peran pelabuhan dan bandara sebagai simpul konektivitas regional.
- Perluasan jangkauan telekomunikasi dan digitalisasi layanan publik.

Strategi :

1. Pembangunan dan perbaikan jalan provinsi strategis untuk konektivitas ekonomi dan wilayah
2. Revitalisasi dan pembangunan pelabuhan perikanan dan pelabuhan rakyat di pulau-pulau kecil.
3. Pemerataan akses telekomunikasi dan digital melalui pembangunan infrastruktur jaringan internet, BTS, dan sistem informasi publik digital
4. Peningkatan jaringan telekomunikasi dan internet broadband di seluruh kecamatan, terutama pulau-pulau kecil
5. Penyediaan sarana dasar (air bersih, listrik, sanitasi).
6. Penguatan transportasi laut dan udara untuk distribusi barang**.**

4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Untuk Mendukung Daya Saing Dan Produktivitas Daerah

Akses dan kualitas layanan pendidikan di Maluku masih menghadapi disparitas antar wilayah, terutama wilayah kepulauan dan 3T. Data BPS menunjukkan kondisi ruang kelas baik masih di bawah 50% untuk semua jenjang Peningkatan layanan dasar terhadap jangkauan dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan baik guru maupun murid, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta memastikan tata kelola penyelenggaraan pendidikan berbiaya murah dan terjangkau secara merata di seluruh wilayah Provinsi Maluku. Demikian halnya dengan sektor kesehatan,

dengan misi ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan dokter dan tenaga medis serta sarana dan prasarana kesehatan secara merata, berbiaya murah dan terjangkau di seluruh wilayah kepulauan Maluku dengan dukungan tata kelola penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang baik, akan memberikan dampak terhadap meningkatnya kualitas SDM serta kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Provinsi Maluku masih terus dikembangkan dengan pendekatan fungsional gugus pelayanan kesehatan untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat Maluku hingga ke pulau- pulau terpencil, terdepan dan terluar,

Arah Kebijakan:

- Peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kapasitas guru, serta kurikulum berbasis teknologi.
- Penguatan sistem layanan kesehatan yang merata dan berkelanjutan.
- Pengembangan sistem pembinaan olahraga berbasis komunitas dan pendidikan.
- Perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan serta kesetaraan gender.

Strategi yang ingin dilakukan diantaranya :

1. Penyediaan dan rehabilitasi sarana prasana pendidikan;
2. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan;
3. Bantuan penyelenggaraan pendidikan yang murah bagi siswa miskin
4. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
5. Penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan;
6. Peningkatan jumlah dan kualitas dokter serta tenaga kesehatan lainnya;
7. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pelayanan Kesehatan.
8. Penyediaan data bagi pelaksanaan MBG

Pemberdayaan pemuda melalui kewirausahaan, inovasi, IPTEK, dan keterlibatan aktif dalam pembangunan akan menjadi kunci memperkuat daya saing daerah sekaligus mencegah masalah sosial seperti pengangguran dan urbanisasi berlebih, begitu juga kesenjangan akses layanan dasar bagi kelompok rentan (perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat/terpencil) sehingga Pengarusutamaan GEDSI penting untuk memastikan pembangunan inklusif, mencegah diskriminasi, serta memperkuat kohesi sosial di masyarakat kepulauan Maluku

5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Dalam Mendukung Pelayanan Publik Yang Inklusif Dan Berkelanjutan;

Optimalisasi reformasi birokrasi menuju good governance bertujuan untuk menggambarkan wujud reformasi birokrasi yang ingin dicapai, yaitu *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik, yang dimanifestasikan dalam berbagai skala baik berupa aparatur sipil negara (ASN) yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, responsif, kolaboratif dan komunikatif, optimalisasi pelayanan publik, akuntabilitas serta pengawasan yang intensif.

Manajemen birokrasi yang baik dan dinamis serta yang melayani, diantaranya sangat ditentukan oleh kompetensi birokratnya dan atmosfir budaya kerja yang baik. Guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, inovatif dan berprinsip good governace .

Kebijakan yang akan ditempuh yakni :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2. Peningkatan penerapan inovasi daerah dalam pembangunan
3. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan
4. Peningkatan nilai hasil pengawasan kearsipan
5. Peningkatan Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
6. Peningkatan Pelayanan Dukungan Pelaksanaan Fungsi DPRD
7. Konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran
8. Peningkatan Penerapan Manajemen ASN
9. Peningkatan Kualitas Kompetensi Aparatur

Strategi :

- Digitalisasi tata kelola pemerintahan.
- Transparansi APBD dan pelayanan publik berbasis data.
- Penguatan kapasitas birokrasi daerah.

6. Penguatan Kapasitas Pengendalian Lingkungan Dan Resiliensi Terhadap Bencana Untuk Menjamin Pembangunan Yang Berkelanjutan

Provinsi Maluku, sebagai daerah kepulauan yang memiliki garis pantai panjang dan ekosistem laut dan darat yang kaya, menghadapi risiko tinggi terhadap bencana alam dan perubahan iklim, seperti banjir, tanah longsor, gelombang tinggi, abrasi pantai, serta perubahan pola curah hujan yang berdampak pada pertanian dan perikanan. Selain itu, kerusakan lingkungan akibat degradasi hutan, pencemaran laut, dan penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan juga menjadi tantangan serius dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

Pengelolaan lingkungan yang baik menjadi krusial untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan sumber daya alam, sekaligus mendukung sektor ekonomi berbasis SDA seperti perikanan, pertanian, dan pariwisata.

Peningkatan ketahanan bencana sangat penting karena sebagian besar wilayah Maluku berada di zona rawan gempa dan tsunami. Kesiapsiagaan masyarakat, pembangunan infrastruktur tangguh bencana, dan sistem peringatan dini harus menjadi prioritas untuk mengurangi risiko kerugian jiwa dan kerusakan ekonomi.

Selain itu, adaptasi terhadap perubahan iklim diperlukan untuk menjaga ketahanan pangan, keberlanjutan sumber daya air, dan stabilitas ekonomi masyarakat, terutama bagi komunitas pulau-pulau kecil yang sangat rentan terhadap naiknya muka air laut dan perubahan pola cuaca. Dengan demikian, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas mitigasi bencana, dan strategi adaptasi perubahan iklim menjadi isu strategis untuk memastikan pembangunan Maluku tetap tangguh, aman, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi Gubernur Maluku "Transformasi Menuju Maluku Yang Maju, Adil dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045"

Arah Kebijakan :

- Penguatan perlindungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- Pengurangan pencemaran dan rehabilitasi lingkungan.
- Penguatan sistem peringatan dini dan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana.
- Peningkatan kapasitas produksi pangan lokal dan sistem distribusi pangan.\

Strategi :

Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan ketahanan pangan, air, energi serta peningkatan kapasitas adaptasi dan ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana berbasis komunitas Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

1. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
2. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
4. Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
5. Pengelolaan Hutan
6. Pengelolaan Aspek Kegeologian
7. Program Penanggulangan Bencana
8. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
9. Penanganan Kerawanan Pangan

7. Penguatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan Berbasis Kearifan Lokal Serta Ketaatan Dan Kepatuhan Terhadap Hukum

Provinsi Maluku memiliki **keanekaragaman budaya, adat, dan kearifan lokal** yang menjadi landasan sosial masyarakat. Lembaga sosial kemasyarakatan berbasis kearifan lokal, seperti adat, kepemimpinan tradisional, dan organisasi kemasyarakatan, memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial, memediasi konflik, serta memperkuat kohesi masyarakat di tengah pluralitas budaya dan geografi kepulauan.

Namun, kapasitas lembaga sosial ini masih perlu diperkuat, baik dari sisi kelembagaan, sumber daya manusia, maupun integrasi dengan program pembangunan daerah. Penguatan lembaga sosial kemasyarakatan menjadi penting agar mereka mampu mendukung pembangunan inklusif, penyelesaian konflik berbasis lokal, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan.

Di sisi lain**,** ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum di Maluku juga menjadi isu strategis. Masih terdapat tantangan dalam penegakan hukum, kepatuhan masyarakat terhadap regulasi, serta integrasi hukum adat dengan hukum nasional. Peningkatan kesadaran hukum dan penguatan mekanisme hukum yang inklusif dan adil diperlukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dengan demikian, penguatan kapasitas lembaga sosial kemasyarakatan berbasis kearifan lokal, bersamaan dengan peningkatan ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum, menjadi isu strategis untuk memastikan pembangunan Maluku berjalan berkeadilan, aman, dan harmonis**,**

selaras dengan misi ke 7 (tujuh) Gubernur Maluku yaitu Penataan dan revitalisasi lembaga sosial kemasyarakatan dalam semangat hidup orang basudara, berbasis adat budaya dan kearifan lokal serta ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum.

Arah Kebijakan:

- Penguatan dialog antar komunitas dan nilai toleransi.
- Sinergitas aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat.
- Integrasi adat istiadat dan kearifan lokal dalam tata kelola desa.

Strategi yang diharapkan dapat menunjang antara lain :

1. Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
2. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
3. Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
4. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
5. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

4.6. KETERKAITAN PRIORITAS NASIONAL DAN DAERAH

Tabel 4.5

Keterkairan Prioritas Nasional dan Daerah

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah
1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);	Penguatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan Berbasis Kearifan Lokal Serta Ketaatan Dan Kepatuhan Terhadap Hukum
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;	Penguatan Kapasitas Pengendalian Lingkungan Dan Resiliensi Terhadap Bencana Untuk Menjamin Pembangunan Yang Berkelanjutan
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Wilayah Kepulauan
4	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Untuk Mendukung Daya Saing Dan Produktivitas Daerah
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;	Penguatan Pengelolaan Dan Peningkatan Nilai Tambah Sumber Daya Alam Unggulan Daerah

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;	Percerpatan Penurunan Kemiskinan Dan Pengangguran Melalui Pemberdayaan Ekonomi Produktif Dan UMKM
7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan;	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Dalam Mendukung Pelayanan Publik Yang Inklusif Dan Berkelanjutan;
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan Berbasis Kearifan Lokal Serta Ketaatan Dan Kepatuhan Terhadap Hukum

4.7. KETERKAITAN TEMA RKP 2027 DENGAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 merupakan penjabaran tahunan dari RPJMN 2025–2029 dengan tema "Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri". Tema ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan, sekaligus memperkuat daya saing nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam kerangka tersebut, setiap daerah memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Provinsi Maluku, dengan karakter kepulauan dan potensi kelautan yang besar, diarahkan menjadi hub kemaritiman wilayah timur Indonesia. Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan pembangunan Maluku dalam RKPD 2027 diselaraskan dengan prioritas nasional, khususnya pada bidang kedaulatan pangan, penguatan infrastruktur, penanganan bencana, serta penyediaan sarana dasar bagi masyarakat.

Tema ini diterjemahkan ke dalam 8 Klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN**)** yang menjadi pedoman pembangunan daerah, termasuk Maluku, antara lain :

1. **Kedaulatan Pangan**
   - Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak, baik dari sumber lokal maupun provinsi lain.
   - Peningkatan mutu benih/bibit ternak, tanaman pakan, bahan pakan, serta pakan kewenangan provinsi.
   - Penguatan jalan usaha tani untuk mendukung distribusi hasil pertanian dan peternakan.
   - Pengembangan kawasan pangan terintegrasi berbasis potensi lokal Maluku.
2. **Kemandirian Energi dan Air**
   - Pembangunan sarana dasar energi dan air bersih di wilayah kepulauan.
   - Optimalisasi pemanfaatan energi terbarukan (PLTS, bioenergi) untuk desa-desa terpencil.
3. **Pendidikan**
   - Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah/madrasah di daerah kepulauan.

- Digitalisasi pendidikan untuk memperkuat akses belajar di wilayah terpencil.

4. **Kesehatan**
   - Peningkatan layanan kesehatan dasar, termasuk gizi ibu hamil, balita, dan masyarakat pesisir.
   - Penguatan fasilitas kesehatan di daerah rawan bencana.
5. **Hilirisasi dan Industrialisasi**
   - Pengembangan industri berbasis sumber daya alam Maluku (perikanan, kelautan, rempah).
   - Dukungan investasi untuk industri pengolahan hasil laut dan perkebunan.
6. **Infrastruktur, Perumahan, dan Ketahanan Bencana**
   - Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana serta program relokasi.
   - Pemugaran/peremajaan permukiman untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
   - Pembangunan jalan, sarana prasarana wilayah, serta sarana dasar (air bersih, sanitasi, listrik).
   - Penguatan infrastruktur konektivitas antar-pulau sebagai hub kemaritiman wilayah timur Indonesia.
7. **Ekonomi Kerakyatan dan Desa**
   - Penguatan koperasi desa dan usaha mikro berbasis komunitas pesisir.
   - Percepatan pembangunan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
8. **Penurunan Kemiskinan**
   - Bantuan sosial terintegrasi untuk masyarakat miskin.
   - Program pemberdayaan ekonomi lokal agar masyarakat dapat berusaha dan bekerja secara produktif.

Tabel 4.6
Program Prioritas Daerah 2027

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Indikator Program	Target 2027
1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);	Penguatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan Berbasis Kearifan Lokal Serta Ketaatan Dan Kepatuhan Terhadap Hukum	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	
			Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	1,70
				Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase)	1,70
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;	Penguatan Kapasitas Pengendalian Lingkungan Dan Resiliensi Terhadap Bencana Untuk Menjamin Pembangunan Yang Berkelanjutan	Penanggulangan Bencana Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (poin)	
				Indeks Kualitas Air Laut (poin)	
				Indeks Kualitas Udara (poin)	
			Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		
			Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Intensitas Energi Primer (SBM/Milyar Rupiah)	213.870,50
				Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik yang bersumber dari Pembangkit EBT (Rumah Tangga)	150,00
				Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	34,30
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Wilayah Kepulauan	Pengelolaan Jalan		
			Pengelolaan Jembatan		
			Pengembangan Infrastruktur Wilayah		
			Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	58,37
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		
			Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Konektivitas Darat (Persentase)	0,79

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Indikator Program	Target 2027
	agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;			Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Provinsi (Persentase)	27,56
			Pengelolaan Ketenagalistrikan		
			Pengelolaan Pelayaran		
			Pengelolaan Aplikasi Inormatika		
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Aman (%)	9,33
				Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak (%)	55,72
4	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Untuk Mendukung Daya Saing Dan Produktivitas Daerah	Pengelolaan Pendidikan	Persentase anak usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS) (%)	87,00
				Persentase anak usia 4-18 Tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS) (%)	67,00
				Skor Kemampuan Literasi SLB (%)	57,03
				Skor Kemampuan Literasi SMA (%)	62,54
				Skor Kemampuan Literasi SMK (%)	62,44
				Skor Kemampuan Numerasi SLB (%)	47,24
				Skor Kemampuan Numerasi SMA (%)	57,45
				Skor Kemampuan Numerasi SMK (%)	57,68

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Indikator Program	Target 2027
			Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upayaKesehatan Masyarakat	Angka Kematian Balita/1000 Kelahiran Hidup (Orang)	26,50
				Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	11,28
				Cakupan penerimaan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	90,00
				Jumlah Kabupaten/Kota Eliminasi Malaria (Kabupaten/Kota)	8,00
				ODHIV Baru yang ditemukan yang mendapat Pengobatan ARV (%)	90,00
				Persentase hipertensi dalam pengendalian (Persentase)	20,00
			Peningkatan Prestasi Olahraga		
			Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidikan (%)	75,00
				Persentase pemerataan guru (%)	100,00
			Pembinaan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan yang dibina sesuai SNP (%)	39,00
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (%)	55,00
			Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	54,00
			Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	4,30
			Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif (ARG) (%)	74,2
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	59,31
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri	Penguatan Pengelolaan Dan Peningkatan Nilai Tambah	Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Kawasan Konservasi (Ha) (Ha)	3.318.970,89

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Indikator Program	Target 2027
	berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;	Sumber Daya Alam Unggulan Daerah	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	268.638,25
			Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	129.675,00
			Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan (Angka)	41,48
			Pengalolaan Hutan	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (%) (%)	0,57
				Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi (Ha)	100,00
			Pengelolan Energi Baru Terbarukan	Intensitas Energi Primer (SBM/Milyar Rupiah)	213.870,50
				Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik yang bersumber dari Pembangkit EBT (Rumah Tangga)	150,00
				Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	34,30
			Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Jumlah Cadangan Pangan (ton) (Ton)	50,00
			Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Skor)	79,00
			Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi Total terhadap Target Investasi (%)	100,00
			Perencanaan Pembangunan Industri		
			Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Hortikultura (Angka)	17.004,00
				Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Angka)	4.003,00
				Peningkatan Produksi Perkebunan (Angka)	163.360,00

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Indikator Program	Target 2027
				Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Angka)	122.761,00
			Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	32964,43
			Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	1,94
			Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mendapat pelatihan dan sertifikasi (%)	0,96
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;	Percerpatan Penurunan Kemiskinan Dan Pengangguran Melalui Pemberdayaan Ekonomi Produktif Dan UMKM	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan (%)	73,00
				Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat sesuai Standar (%)	83,00
				Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (%)	90,30
				Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (%)	83,00
				Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan (%)	73,00
			Rehabilitasi Sosial		

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Indikator Program	Target 2027
			Pengembangan Perumahan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100,00
				Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni (Persentase)	100,00
			Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani (Persentase)	31,97
			Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	20,00
			Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	0,21
			Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	0,51
			Pengembangan UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (%)	2,20
7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan;	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Dalam Mendukung Pelayanan Publik Yang Inklusif Dan Berkelanjutan;	Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100,00
			Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Implementasi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) (%)	100,00
			Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan		
			Pelayanan Penghubung	Persentase Layanan Penghubung (%)	100,00

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Indikator Program	Target 2027
			Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang menyelesaikan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (%)	100,00
				Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (Persentase)	100,00
				Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (%)	100,00
			Kepegawaian Daerah	Nilai Aspek Manajemen Kinerja, Pengajian, Penghragaan dan Disiplin, dan Perlindungan dan Pelayanan (Nilai)	122,00
				Nilai Aspek Pengadaan, Perencanaan Kebutuhan, Sistem Informasi (Nilai)	102,00
				Nilai Aspek Promosi, Mutasi dan Pengembangan Karier (Nilai)	61,00
			Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa		
			Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Nilai Pencegahan Korupsi (%)	75,00
			Penataan Organisasi	Persentase Penyusunan Kebijakan Daerah Bidang Organisasi yang ditindaklanjuti (Persentase)	100,00
			Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Fasilitasi Kerjasama Daerah (%)	100,00
				Persentase Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah (%)	100,00
			Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Bantuan Hukum yang tertangani (%)	100,00

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Indikator Program	Target 2027
				Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM (IUP 45) (%)	65,00
				Persentase Produk Hukum yang di fasilitasi (%)	100,00
			Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Indeks)	2,73
			Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Ketetapan)	Tepat Waktu
				Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	100,00
				Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100,00
			Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	18,00
				Persentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD (%)	0,78
				Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu (%)	100,00
				Persentase Penurunan SILPA (%)	5,00
				Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (%)	93,90
				Efektifitas pendapatan daerah (persentase) (%)	95,00
			Pengelolaan Pendapatan Daerah	Efektifitas pendapatan daerah (persentase) (%)	95,00
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	100,00

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Indikator Program	Target 2027
				Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	100,00
				Aset Dana Pensiun/PDRB ((%))	0,31
				Nilai Transaksi Saham Per kapita Per Provinsi (Rupiah) (Nilai)	1.191.817,71
				Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	100,00
				Total Dana Pihak Ketiga/PDRB ((%))	25,84
				Total Kredit/PDRB ((%))	31,61
			Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	70,00
			Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi Total terhadap Target Investasi (%)	100,00
			Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	85,00
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan Berbasis Kearifan Lokal Serta Ketaatan Dan Kepatuhan Terhadap Hukum	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	40,00
				Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	67,00

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Indikator Program	Target 2027
			Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	1,70
				Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase)	1,70

4.8. Dukungan Provinsi Maluku dalam RKP 2027

4.8.1. Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Industri

Provinsi Maluku diarahkan untuk memperkuat sektor unggulan berbasis sumber daya alam, terutama perikanan dan energi. Sentra industri perikanan berbasis komoditas tuna, cakalang, tongkol, udang, dan lobster dikembangkan di Ambon dan Tual, dengan dukungan produksi di Seram Bagian Barat, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, dan Kepulauan Aru. Selain itu, pemanfaatan gas bumi Lapangan Abadi WK Masela di Kepulauan Tanimbar menjadi prioritas, dengan ekosistem pendukung berupa sarana prasarana dasar, konektivitas, pangan, air, dan SDM. Pariwisata berbasis alam, sejarah, dan budaya juga menjadi sumber pertumbuhan baru, dengan Banda Neira sebagai destinasi unggulan yang didukung amenitas wisata seperti penginapan, restoran, dan diving centre.

Provinsi Maluku diarahkan untuk memperkuat sektor unggulan berbasis sumber daya alam, khususnya perikanan dan energi, dengan potensi Produksi perikanan: 138.931 ton (2024), tertinggi ke-2 nasional, Komoditas TCT tersebar di 3 WPP-RI seluas 161 juta Ha, 846 daya tarik wisata berbasis alam, sejarah, dan budaya, serta Gas alam WK Masela: 18,54 TCF, salah satu cadangan terbesar di Indonesia. Maluku di arahkan :

- Sentra Industri Perikanan: Fokus pada komoditas tuna, cakalang, tongkol, udang, dan lobster, dengan pusat pengembangan di Ambon dan Tual, serta peningkatan produksi di Seram Bagian Barat, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, dan Kepulauan Aru.
- Pemanfaatan Gas Bumi: Lapangan Abadi WK Masela di Kepulauan Tanimbar menjadi prioritas, dengan dukungan ekosistem pendukung berupa sarana prasarana dasar, konektivitas, pangan, air, dan SDM.
- Pariwisata Berbasis Alam, Sejarah, dan Budaya: Banda Neira dan Ambon dikembangkan sebagai destinasi unggulan dengan penyediaan infrastruktur wisata, konektivitas, dan peningkatan kualitas SDM.

4.8.2. Peningkatan Investasi melalui Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur menjadi tulang punggung investasi dan pemerataan pembangunan. Maluku memiliki 20 pelabuhan, 15 bandara, dan 9.747 km jalan (56% dalam kondisi mantap), yang perlu dioptimalkan untuk mendukung pariwisata Banda Neira dan komoditas unggulan perikanan. Selain itu, pembangunan infrastruktur energi dan air diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi dan air, melalui percepatan pemanfaatan energi baru terbarukan dan peningkatan kapasitas tampungan air. Infrastruktur dasar perkotaan juga ditingkatkan, termasuk penyediaan rumah layak huni, listrik, air minum, serta sarana pendidikan dan kesehatan seperti sekolah berpola asrama dan rumah sakit berkualitas.

Infrastruktur menjadi tulang punggung peningkatan investasi dan pemerataan pembangunan :

- Konektivitas Wilayah: Optimalisasi 20 pelabuhan, 15 bandara, dan 9.747 km jalan (56% mantap).
- Energi dan Air: Percepatan pemanfaatan energi baru terbarukan, peningkatan kapasitas tampungan air, dan penyediaan sumber air baku alternatif.

- Infrastruktur Dasar Perkotaan: Penyediaan rumah layak huni, air minum, listrik, serta sarana pendukung sektor ekonomi unggulan.
- Layanan Pendidikan dan Kesehatan: Pembangunan sekolah berpola asrama, sistem pembelajaran jarak jauh, serta peningkatan kualitas rumah sakit dan layanan kesehatan bergerak.

4.8.3. Kebijakan Afirmasi untuk Pemerataan Pembangunan

Karakter kepulauan Maluku menuntut kebijakan afirmasi untuk wilayah perbatasan dan pulau kecil terluar. Fokus utama diarahkan pada Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP) Saumlaki dan Ilwaki, serta 11 kecamatan perbatasan prioritas dan 14 pulau kecil terluar. Intervensi meliputi pemenuhan layanan dasar, penguatan sarana pendidikan dan kesehatan, peningkatan akses utilitas permukiman, serta diversifikasi ekonomi desa. Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan menjadi instrumen pemerataan pembangunan berbasis masyarakat.

Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan: 0,53 – 0,62 (target nasional 2027: 0,64 – 0,75). Status Desa Maju & Mandiri: 31,2% di PPKP, namun hanya 14,8% di kecamatan perbatasan. untuk menciptakan pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan dan pulau kecil :

- Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP): Saumlaki dan Ilwaki menjadi fokus utama.
- Kecamatan Perbatasan Prioritas: 11 kecamatan dengan status pembangunan tertinggal.
- Pulau-Pulau Kecil Terluar: 14 lokasi prioritas dengan intervensi layanan dasar, pendidikan, kesehatan, utilitas permukiman, serta penguatan kelembagaan ekonomi desa.

4.8.4. Mitigasi Risiko Bencana dan Pengelolaan Ekosistem

Maluku menghadapi risiko tinggi bencana hidrometeorologi dan geologi, dengan Indeks Risiko Bencana (IRB 2025) sebesar 161,50 (kategori tinggi). Daerah paling berisiko adalah Maluku Barat Daya dan Seram Bagian Timur. Strategi mitigasi mencakup penguatan sistem peringatan dini banjir dan cuaca ekstrem, pembangunan infrastruktur pelindung pesisir, penerapan standar bangunan tahan gempa, serta integrasi peta risiko bencana ke dalam RTRW/RDTR. Selain itu, penguatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat serta sistem logistik kebencanaan antar pulau menjadi prioritas untuk mendukung ketangguhan wilayah kepulauan.

Maluku menghadapi risiko tinggi bencana hidrometeorologi dan geologi. Dengan ancaman utama: banjir, longsor, cuaca ekstrem, gempa, tsunami, dan abrasi pesisir, maka diperlukan Strategi Mitigasi:

- Sistem peringatan dini banjir dan cuaca ekstrem.
- Infrastruktur pelindung pesisir.
- Standar bangunan tahan gempa.
- Integrasi peta risiko bencana ke dalam RTRW/RDTR.
- Penguatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat.

- Sistem logistik kebencanaan antar pulau

4.9. Proyek Strategis Nasional (PSN)

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Maluku merupakan bagian integral dari RKP 2027 yang menuntut adanya koordinasi erat antara pemerintah pusat dan daerah. Sinergi ini menjadi kunci agar PSN tidak hanya berfungsi sebagai proyek berskala nasional, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pembangunan daerah, kesejahteraan masyarakat, serta daya saing ekonomi Maluku.

Dalam konteks Maluku, terdapat dua PSN yang memiliki nilai strategis tinggi, yaitu Bendungan Way Apu dan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela. Bendungan Way Apu berperan penting dalam mendukung ketahanan air, irigasi, serta pengelolaan sumber daya alam di wilayah kepulauan. Sementara itu, Lapangan Abadi WK Masela dengan cadangan gas alam sebesar 18,54 TCF merupakan salah satu proyek energi terbesar di Indonesia, yang diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus regional.

Sinergi pusat-daerah diwujudkan melalui tiga aspek utama:

1. **Perencanaan Bersama** Pemerintah daerah Maluku memastikan bahwa dokumen perencanaan daerah, termasuk RKPD dan RPJMD, selaras dengan prioritas PSN. Hal ini dilakukan agar alokasi anggaran daerah mendukung keberhasilan proyek dan tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.
2. **Monitoring Pelaksanaan** Pemerintah daerah turut serta dalam pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PSN. Keterlibatan ini penting untuk memastikan proyek berjalan sesuai target waktu, kualitas, dan manfaat yang diharapkan, sekaligus mengidentifikasi hambatan di lapangan.
3. **Pengendalian Pembangunan** Pemerintah daerah berperan aktif dalam memberikan masukan kebijakan, membuka ruang dialog dengan pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat sipil, serta memastikan keberlanjutan proyek. Dengan demikian, PSN dapat memberikan dampak inklusif terhadap pembangunan wilayah kepulauan Maluku.

4.10. Penguatan Fondasi Keuangan Daerah

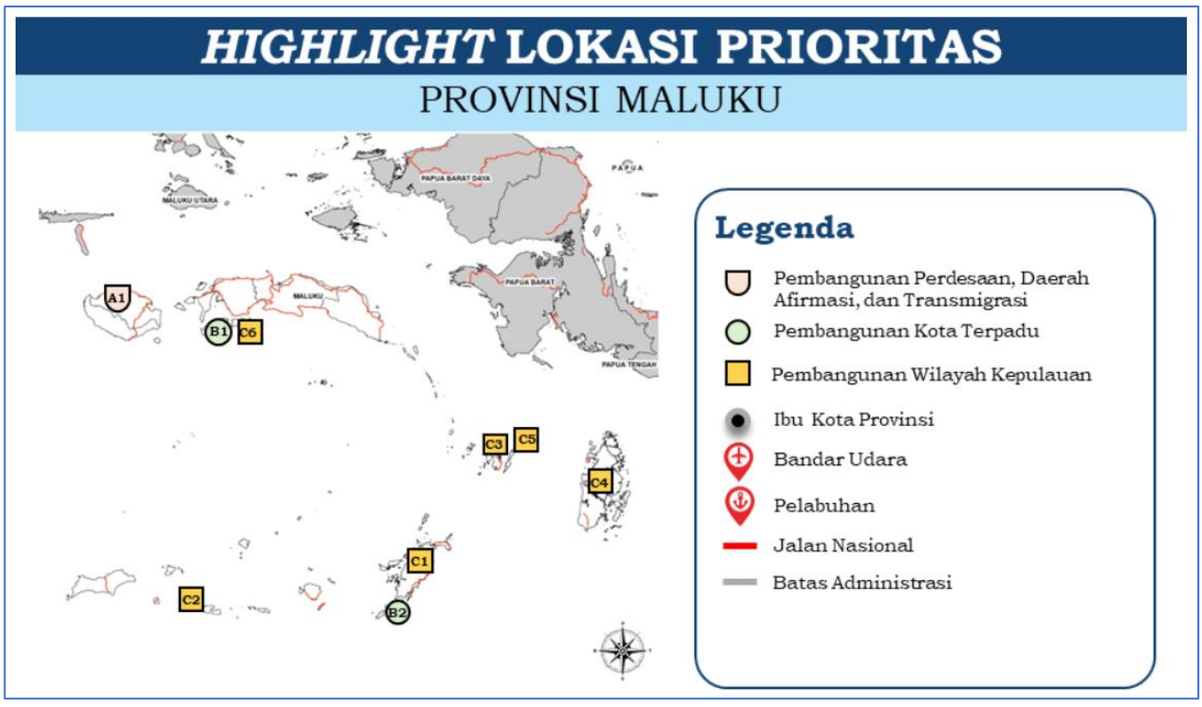
Kemandirian fiskal Maluku masih relatif rendah, sehingga diperlukan strategi penguatan keuangan daerah. Optimalisasi **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** dilakukan melalui pemetaan potensi pajak, tata kelola BUMD, dan digitalisasi sistem keuangan. Belanja daerah diarahkan untuk bergeser dari belanja rutin menuju belanja produktif yang berdampak langsung pada masyarakat. Inovasi pendanaan pembangunan juga digalakkan melalui KPBU, obligasi/sukuk daerah, dana abadi daerah, serta pemanfaatan SiLPA secara produktif. Data menunjukkan PAD Provinsi Maluku pada 2025 sebesar 29,29%, sementara belanja pegawai di kabupaten/kota mencapai 50,62%, menandakan perlunya perbaikan struktur fiskal agar lebih produktif.

Kemandirian fiskal Maluku masih rendah, sehingga diperlukan strategi penguatan keuangan daerah.

- Kualitas Belanja Daerah: Menggeser belanja rutin menuju belanja produktif, memperkuat pengawalan realisasi APBD, dan pemanfaatan SIPD.
- Inovasi Pendanaan: KPBU, obligasi/sukuk daerah, dana abadi daerah, serta pemanfaatan SiLPA secara produktif.
- Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diarahkan untuk lebih profesional dan profitabel. Optimalisasi dilakukan dengan memperbaiki tata kelola, meningkatkan efisiensi, serta memaksimalkan pemanfaatan aset daerah (BMD) agar BUMD menjadi sumber pendapatan yang signific

4.11. Arah Pengembangan, Lokasi Prioritas dan *Higlight* Intervensi RKP 2027

Gambar 4.3
***Highlight* Lokasi Prioritas Provinsi Maluku**
Berdasarkan RKP 2027



A. Pembangunan Perdesaan, Daerah Afirmasi dan Transmigrasi

No	Kawasan Prioritas
1	Kawasan Perdesaan Waeapo Agropolitan Komoditas Unggulan Padi – Kabupaten Buru

B. Pembangunan Kota Terpadu

Fokus	Lokasi Prioritas
Produktivitas	Kawasan Perkotaan Sedang Ambon – Kota Ambon
Industri	Kawasan Pemanfaatan Gas Bumi (Blok Masela) – Kabupaten Kepulauan Tanimbar

C. Pembangunan Wilayah Kepulauan

No	Kabupaten/Kota Prioritas
1	Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2	Kabupaten Maluku Barat Daya
3	Kota Tual
4	Kabupaten Kepulauan Aru
5	Kabupaten Maluku Tenggara
6	Kota Ambon

Klaster/Fokus Pembangunan	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
Pembangunan Perdesaan, Daerah Afirmasi dan Transmigrasi		
Infrastruktur dan Konektivitas Ekonomi	**Kawasan Perdesaan Prioritas** **A1:** Kawasan Perdesaan Waeapo Agropolitan Komoditas Unggulan Padi – Kabupaten Buru	Pembangunan Bendungan Way Apu* Elektrifikasi Desa
B. Pembangunan Kota Terpadu		
Kualitas SDM, Tenaga Kerja	• **B1:** Kawasan Perkotaan	• Sekolah Garuda Baru • Sekolah Garuda Transformasi

Klaster/Fokus Pembangunan	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
Produktif, dan Inovasi	Sedang Ambon – Kota Ambon	• Universitas Baru: *Medical University* berbasis STEMM
Swasembada Pangan, Energi, dan Air	• **B2:** Kawasan Pemanfaatan Gas Bumi (Blok Masela) – Kabupaten Kepulauan Tanimbar	• Peningkatan *Lifting* Minyak dan Gas Bumi Lapangan Abadi WK Masela*

Pembangunan Wilayah Kepulauan

Klaster/Fokus Pembangunan	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
Kualitas SDM, Tenaga Kerja Produktif, dan Inovasi	• **C1:** Kabupaten Kepulauan Tanimbar • **C2:** Kabupaten Maluku Barat Daya • **C3:** Kota Tual	• Rumah Sakit *Upgrade*
Swasembada Pangan, Energi, dan Air	• **C1:** Kabupaten Kepulauan Tanimbar • **C2:** Kabupaten Maluku Barat Daya • **C3:** Kota Tual • **C4:** Kabupaten Kepulauan Aru • **C5:** Kabupaten Maluku Tenggara • **C6:** Kota Ambon	• Swasembada Air

Fokus Pembangunan Kewilayahan Prioritas Lainnya

Klaster/Fokus Pembangunan	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
Kualitas SDM, Tenaga Kerja Produktif, dan Inovasi	• Kabupaten Buru • Kabupaten Buru Selatan	• Rumah Sakit *Upgrade*
Swasembada Pangan, Energi, dan Air	Provinsi Maluku	• Budi Daya Ikan Darat Tematik • Pengembangan Kawasan Pangan Terintegrasi (Padi dan Jagung) • Pengembangan Kawasan Perkebunan (Pala dan Kakao) • Peningkatan Produksi Daging, Susu, dan Telur • Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) • PLTA Skala Besar Terintegrasi • Kompor Listrik untuk Rumah Tangga • Optimalisasi *Lifting* Sumur Tua • Swasembada Air

Klaster/Fokus Pembangunan	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
Hilirisasi SDA Strategis	• Kabupaten Maluku Tengah	• Hilirisasi Industri Strategis (Industri Nata de Coco, MCT, dll dan Industri Oleoresin)

Keterangan:

a. *Highlight* intervensi mengacu pada Buku I PKPN RKP 2027.

b. (*) merupakan indikasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Tahun 2026–2027

BAB V
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

5.1. ARAH KEBIJAKAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

5.1.1 Kebijakan Pengembangan Wilayah

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku tahun 2027 disusun sebagai penjabaran tahunan dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten/Kota dan RKPD tahun 2027, dengan tetap mengacu pada arah pembangunan RPJMD Provinsi Maluku tahun 2025–2029. Perumusan arah kebijakan ini juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, agar pembangunan berjalan lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan kedudukan RPJMD Provinsi Maluku sebagai pedoman bagi RPJMD Kabupaten/Kota dan RKPD tahunan.

Dalam penyusunannya, arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota Tahun 2027 memperhatikan tahapan pembangunan daerah Provinsi Maluku Tahun 2025–2020 yang menekankan bahwa pembangunan dilaksanakan secara bertahap, progresif, dan berkesinambungan, dengan setiap tahun membangun fondasi bagi tahapan berikutnya. Selain itu, arah kebijakan ini juga disusun dengan memperhatikan pendekatan pembangunan kewilayahan, karakteristik Provinsi Maluku sebagai daerah kepulauan, serta kebutuhan pembangunan berbasis potensi, tantangan, dan daya dukung masing-masing kabupaten/kota. Perumusan kebijakan juga mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah, efisiensi belanja, serta kebutuhan untuk menjaga kesinambungan pelayanan publik dan pembangunan prioritas daerah

Kebijakan pengembangan wilayah berfungsi untuk menetapkan fokus pengembangan secara kewilayahan sesuai dengan karakteristik, potensi kewilayahan, ketersediaan daya dukung dan daya tampung pada fungsi kawasan yang mendukung pembangunan daerah. Berdasarkan pembentukan gugus pulau, kebijakan pengembangan wilayah akan diarahkan untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi antarwilayah di Provinsi Maluku. Strategi kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Maluku terdiri dari:

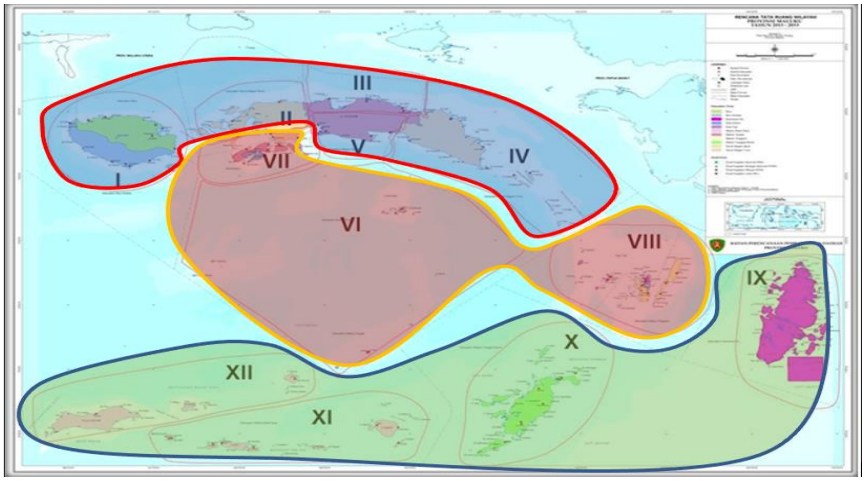
1. Pembagian 8 (delapan) Wilayah Pengembangan meliputi: Pulau Buru, Ambon dan Pulau-pulau Lease, Pulau Seram, Kepulauan Banda, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Maluku Barat Daya;
2. Penentuan keterkaitan fungsional antarwilayah pengembangan berdasarkan gugus pulau yang bertujuan untuk meningkatkan sinergitas pengembangan wilayah sehingga

kesenjangan pembangunan bisa dikurangi. Penentuan keterkaitan fungsional antar WP ini meliputi tiga bagian:

a. Kawasan yang terletak di gugus pulau I, II, III, IV, dan V mencakup WP Pulau Buru dan WP Pulau Seram menjadi kawasan yang dikembangkan untuk kegiatan budidaya dengan tujuan ekonomis seperti pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan;
b. Kawasan yang terletak di gugus pulau VI, VII, dan VIII mencakup WP Kepulauan Banda, WP Ambon dan Pulau-pulau Lease, dan WP Kepulauan Kei menjadi kawasan yang dikembangkan untuk kegiatan pariwisata, kebudayaan, dan melibatkan pengembangan infrastruktur dengan tetap memperhatikan kerentanan terhadap risiko bencana alam dan non alam, serta sedapat mungkin menghindari alih fungsi lahan lindung dan pertanian;
c. Kawasan yang terletak di gugus pulau IX, X, XI, dan XII mencakup WP Kepulauan Aru, WP Kepulauan Tanimbar, dan WP Kepulauan Maluku Barat Daya menjadi kawasan yang dikembangkan untuk kegiatan budidaya perikanan, peternakan, dan pertambangan. Kegiatan-kegiatan ini merupakan prioritas pembangunan Provinsi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengoptimalkan sumber pendapatan daerah tanpa harus mengorbankan fungsi-fungsi lingkungan.

Keterkaitan fungsional antar Wilayah Pengembangan ini dapat dilihat di gambar berikut :

Gambar 5. 1 Peta Keterkaitan Antar Wilayah Pengembangan dalam Gugus Pulau



Sumber: RTRW Provinsi Maluku

5.1.2 Arah kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi

Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW bertujuan untuk mendukung tujuan penataan ruang yang tercantum pada RTR di atasnya (RTRW Nasional dan rencana rincinya) melalui keterpaduan antarsektor, wilayah dan masyarakat. Dalam dokumen RTRW, dijelaskan secara rinci mengenai pembangunan berdasarkan zonasi di Provinsi Maluku selama 20 tahun ke depan, yaitu dari 2013-2033. Kawasan strategis Provinsi Maluku meliputi wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta lingkungan. Jenis kawasan strategis Provinsi di Provinsi Maluku yaitu :

1. Kawasan strategi dari Aspek Kepentingan Pertahanan dan Keamanan, yang meliputi :
   a. Kepulauan Aru;
   b. Kepulauan Tanimbar;
   c. Kepulauan Babar;
   d. Kepulauan Leti – Moa – Lakor;
   e. Pulau Kisar;
   f. Pulau Wetar;
   g. Pulau Lirang
2. Kawasan strategi dari Aspek Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi, yang meliputi
   a. Kawasan Seram Barat (GP 2);
   b. Kawasan Seram Selatan (GP 5);
   c. Kawasan Seram Timur (GP 4);
   d. Kawasan Seram Utara (GP 3);
   e. Kawasan Pulau Buru (GP 1);
   f. Kota Ambon (GP 7);
   g. Kepulauan Tanimbar (GP 10);
   h. Kepulauan Kei (GP 8);
   i. Kawasan Bula (GP 4);
   j. Kawasan Benjina (GP 9);
   k. Zona Industri Seram Selatan (GP 5);
   l. Kawasan Ambon – Natsepa – Tulehu – Liang.
3. Kawasan Strategis dari Aspek Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup meliputi seluruh kawasan darat dan laut kebupaten/kota di Provinsi Maluku, terutama di :
   a. Teluk Ambon (GP 7);

b. Kawasan Bula (GP 4);

c. Kawasan Buru (GP 1);

Tabel 5. 1

Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan Kawasan Strategis Provinsi

NO.	KAWASAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS
1.	Kepulauan Aru; Kepulauan Tanimbar; Kepulauan Babar; Kepulauan Leti – Moa – Lakor; Pulau Kisar; Pulau Wetar; dan Pulau Lirang	Pengembangan sistem pusat permukiman perbatasan negara sebagai pusat pertahanan dan keamanan negara di Kawasan Perbatasan Provinsi.	Mengembangkan PKSN sebagai pusat pelayanan utama yang memiliki fungsi kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, perdagangan ekspor/antar pulau, promosi, simpul transportasi, dan industri pengolahan serta didukung prasarana permukiman.
2	Kawasan Seram Barat (GP 2); Kawasan Seram Selatan (GP 5); Kawasan Seram Timur (GP 4); Kawasan Seram Utara (GP 3); Kawasan Pulau Buru (GP 1); Kota Ambon (GP 7); Kepulauan Tanimbar (GP 10); Kepulauan Kei (GP 8); Kawasan Bula (GP 4); Kawasan Benjina (GP 9); Zona Industri Seram Selatan (GP 5); dan Kawasan Ambon – Natsepa – Tulehu – Liang.	Percepatan pengelolaan dan pemanfaatan SDA, SDM, dan sumber daya lainnya di kawasan kepulauan yang mencakup wilayah darat dan laut (perairan).	Mengembangkan kawasan industri pengolahan hasil pertanian, peternakan, hortikultura dan perkebunan, serta perikanan.
3	Teluk Ambon (GP 7); Kawasan Bula (GP 4); dan Kawasan Buru (GP 1);	Peningkatan fungsi lingkungan hidup dan daya dukung lingkungan sekitarnya.	Mengendalikan kegiatan budi daya pada kawasan strategis yang dapat mengganggu ekosistem dan kehidupan serta daya dukung lingkungan, termasuk pengendalian alih fungsi kawasan lindung.

Sumber : RPJMD Provinsi Maluku, 2025-2029

5.1.3 Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan Kabupaten/Kota

Perumusan kebijakan kewilayahan didasarkan kepada berbagai faktor dan merupakan integrasi pembangunan antar sektor guna menciptakan daya saing daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perumusan ini dibuat mempertimbangkan sinkronisasi kebijakan dan arah pengembangan di setiap Wilayah Pengembangan, dikaitkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku 2013-2033. Dengan demikian strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah kabupaten/kota mendatang secara umum diarahkan untuk mendukung:

1. Peningkatan akuntabilitas, pengawasan dan kualitas tata kelola pemerintahan daerah di setiap Gugus Pulau;
2. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki;
3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di setiap Gugus Pulau;
4. Peningkatan kapasitas pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan ketangguhan menghadapi bencana;
5. Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas unggulan daerah melalui kawasan budidaya; dan
6. Optimalisasi seluruh sumber pendapatan daerah.

5.1.3.1 Kabupaten Buru

Kabupaten Buru memiliki peran penting dalam struktur ruang Provinsi Maluku sebagai salah satu kawasan andalan dengan basis perkebunan, perikanan, pertanian, serta pariwisata. Dalam sistem pusat kegiatan, wilayah ini ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Namlea, yang berfungsi sebagai simpul pertumbuhan ekonomi regional serta penghubung distribusi barang dan jasa antarpulau di Maluku.

Selaras dengan RPJMN 2025–2029, pengembangan Kabupaten Buru diarahkan untuk penguatan ketahanan pangan melalui pengembangan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan darat maupun laut. Diversifikasi ekonomi lokal dilakukan dengan mendorong pengembangan agroindustri dan industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan (cengkeh, pala, kelapa), serta perikanan.

Pengembangan pariwisata berbasis alam dan budaya, terutama destinasi ekowisata dan wisata bahari di sekitar gugus Pulau Buru. Perbaikan infrastruktur konektivitas darat, laut, dan logistik, agar aksesibilitas ke Namlea maupun antarwilayah di Maluku lebih lancar.

Pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, termasuk kehutanan dan tambang, dengan tetap menjaga daya dukung lingkungan dan mengurangi risiko bencana.

Sementara itu, dalam RTRW Maluku, Kabupaten Buru diarahkan sebagai, Kawasan andalan dengan komoditas unggulan perkebunan, perikanan, dan pariwisata.Wilayah pengembangan pusat permukiman Namlea (PKW) yang diperkuat fungsinya sebagai simpul pelayanan barang dan jasa. Pengembangan jaringan transportasi darat dan laut yang menghubungkan Buru dengan Ambon, Seram, dan pulau-pulau sekitarnya.

Pengembangan kawasan pertanian dan perkebunan untuk mendukung ketahanan pangan Maluku dan nasional. Penguatan sektor perikanan tangkap dan budidaya, termasuk pengolahan hasil laut.

- Mendorong terciptanya kedaulatan pangan, energi, dan air bagi kebutuhan masyarakat
- Intensifikasi dan ekstensifikasi lahan lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan penambahan armada penangkapan dan perikanan budidaya, serta membuka akses ke pasar (lokal, regional, nasional maupun internasional)
- Mendorong terciptanya kedaulatan pangan, energi, dan air bagi kebutuhan masyarakat
- Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan

Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Waeapo Agropolitan berbasis Komoditas Unggulan Padi dengan mendukung intervensi RPJMN Tahun 2025–2029, melalui:

1. Peningkatan layanan dasar perdesaan (pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan energi) untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat desa.
2. Penguatan aksesibilitas desa melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur konektivitas antarwilayah serta jaringan logistik yang mendukung kelancaran distribusi hasil pertanian.
3. Diversifikasi ekonomi lokal dengan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), agroindustri berbasis padi, serta pengembangan ekonomi kreatif yang mendukung nilai tambah produk pertanian.
4. Penguatan tata kelola kawasan perdesaan yang inklusif dan partisipatif, melalui peningkatan kapasitas kelembagaan desa, kemitraan petani, dan pengelolaan sumber daya berbasis komunitas.

Pengarusutamaan ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan melalui praktik pertanian modern, ramah lingkungan, serta peningkatan ketahanan terhadap perubahan

iklim dan bencana

Dalam rangka mendukung pencapaian target indikator makro ekonomi Provinsi Maluku maka Kabupaten Buru pada tahun 2027 ditargetkan :

Tabel 5. 2
Sasaran dan Indikator Pembangunan Kabupaten Buru
Mendukung Pencapaian Target Provinsi Tahun 2027

No	Indikator Makro	Satuan	Target
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	6,80
2	PDRB Perkapita	Rp Juta	15,24
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota Terhadap Provinsi	%	5,02
4	Tingkat Kemiskinan	%	15,21
5	Rasio Gini	Indeks	0,2355
6	Indeks Modal Manusia / Indeks Pembangunan Manusia	Indks	74,11
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	80,08
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,31

Sumber : RPJMD Provinsi Maluku, 2025 - 2029

5.1.3.2 Kabupaten Buru Selatan

Sebagai bagian dari implementasi RPJMN dan selaras dengan RPJMD Provinsi Maluku, arah kebijakan pembangunan tahun 2027 difokuskan pada konsolidasi program prioritas, penguatan sektor unggulan daerah, serta pencapaian target pembangunan menengah.

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Buru Selatan tahun 2027 diarahkan pada percepatan penguatan akses layanan dasar, konektivitas antarwilayah, pembangunan ekonomi lokal, dan pengurangan kesenjangan pembangunan antarkecamatan, dengan tetap menjaga kesinambungan pembangunan berbasis potensi lokal dan daya dukung wilayah.

Fokus Pembangunan Tahun 2027:

- Peningkatan kualitas pelayanan dasar masyarakat.
- Penguatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar.
- Pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan.
- Pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan UMKM.
- Percepatan penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan wilayah.
- Penguatan tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa.
- Penguatan ketahanan lingkungan dan pengurangan risiko bencana.

Dalam rangka mendukung pencapaian target indikator makro ekonomi Provinsi Maluku maka Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2027 ditargetkan :

Tabel 5. 3
Sasaran dan Indikator Pembangunan Kabupaten Buru Selatan Mendukung Pencapaian Target Provinsi Tahun 2027

No	Indikator Makro	Satuan	Target
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	5,81
2	PDRB Perkapita	Rp Juta	15,73
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota Terhadap Provinsi	%	3,08
4	Tingkat Kemiskinan	%	9,92
5	Rasio Gini	Indeks	0,2145
6	Indeks Modal Manusia / Indeks Pembangunan Manusia	Indks	70,55
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	-
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	0,86

Sumber : RPJMD Provinsi Maluku, 2025-2029

5.1.3.3. Kabupaten Kepulauan Aru

Arah pengembangan kewilayahan Kepulauan Aru dalam RPJMN 2025 – 2029 dan RPJMD Maluku mengarahkan Kepulauan Aru sebagai Kawasan Komoditas Unggulan yang difokuskan sebagai sentra produksi berbasis komoditas TCT, udang dan lobster dan juga Kawasan Afirmasi yang difokuskan sebagai Kecamatan Perbatasan Prioritas.

Arah pengembangan ini tidak hanya bertujuan memperkuat daya saing ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi maritim, tetapi juga memastikan pemerataan pembangunan di kecamatan perbatasan. Dengan demikian, kebijakan pembangunan Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2027 diarahkan untuk :

- Pengembangan kawasan sentra produksi TCT, udang, lobster; pembangunan cold storage dan rantai pasok; fasilitasi ekspor komoditas unggulan.
- Peningkatan infrastruktur dasar di kecamatan perbatasan; penguatan layanan publik (pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan); pemberdayaan masyarakat perbatasan.
- Penguatan kapasitas nelayan dan UMKM; pengembangan koperasi perikanan; peningkatan literasi keuangan dan akses permodalan.
- Pengawasan ketat terhadap praktik penangkapan ilegal; rehabilitasi ekosistem pesisir dan mangrove; penerapan prinsip keberlanjutan dalam produksi komoditas.
- Peningkatan koordinasi lintas sektor; digitalisasi sistem perizinan perikanan; penguatan pengawasan perdagangan lintas batas.

Dalam rangka mendukung pencapaian target indikator makro ekonomi Provinsi Maluku maka Kabupaten Kepulauan Aru pada tahun 2027 ditargetkan :

Tabel 5. 4
Sasaran dan Indikator Pembangunan Kabupaten Kepulauan Aru Mendukung Pencapaian Target Provinsi Tahun 2027

No	Indikator Makro	Satuan	Target
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	6,74
2	PDRB Perkapita	Rp Juta	29,29
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota Terhadap Provinsi	%	7,48
4	Tingkat Kemiskinan	%	16,73
5	Rasio Gini	Indeks	0,2495
6	Indeks Modal Manusia / Indeks Pembangunan Manusia	Indks	70,80
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	82,75
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	1,64

Sumber : RPJMD Provinsi Maluku, 2025 - 2029

5.1.3.4. Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Kabupaten Kepulauan Tanimbar diposisikan sebagai wilayah strategis dengan peran sentral dalam pembangunan ekonomi Indonesia Timur. Perpres No 12 Tahun 2025 mengarahkan Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai Kawasan Pertumbuhan dengan Fokus Kawasan industri Pemanfaatan Gas Bumi, Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi dengan Fokus Potensial Air, dan Kawasan Afirmasi yang diarahkan sebagai PKSN dan Wilayah Pendukung,

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 menegaskan peran Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai Kawasan Pertumbuhan dengan fokus pada pengembangan industri pemanfaatan gas bumi, kawasan swasembada pangan, air, dan energi, serta kawasan potensial berbasis sumber daya air. Selain itu, Tanimbar juga ditetapkan sebagai Kawasan Afirmasi yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan wilayah pendukung dalam memperkuat konektivitas serta pemerataan pembangunan di Indonesia Timur.

Untuk mendukung arahan RPJMN dan RPJMD Provinsi Maluku maka tahun 2027 Kepulauan Tanimbar diarahkan untuk :

1. Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi
   - Pangan: Penguatan produksi lokal (perikanan, pertanian, peternakan) dengan teknologi adaptif terhadap iklim kepulauan.
   - Air: Optimalisasi potensi sumber daya air melalui sistem penyediaan air bersih, konservasi, dan pemanfaatan teknologi desalinasi.
   - Energi: Diversifikasi energi terbarukan (tenaga surya, angin, biomassa) untuk mendukung kemandirian energi di wilayah kepulauan.
2. Kawasan Potensial Air
   - Pengembangan industri perikanan terpadu, budidaya laut, serta ekowisata bahari.
   - Perlindungan ekosistem pesisir dan laut sebagai aset strategis jangka panjang.
3. Kawasan Afirmasi (PKSN dan Wilayah Pendukung)
   - Peningkatan infrastruktur transportasi laut dan udara untuk memperkuat integrasi antarwilayah.
   - Penguatan kapasitas kelembagaan daerah agar mampu menjadi simpul koordinasi pembangunan kawasan timur Indonesia.
   - Afirmasi kebijakan sosial-ekonomi untuk memperkecil kesenjangan pembangunan dengan wilayah lain.

Dalam rangka mendukung pencapaian target indikator makro ekonomi Provinsi Maluku maka Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tahun 2027 ditargetkan

Tabel 5. 5
Sasaran dan Indikator Pembangunan Kabupaten Kepulauan Tanimbar Mendukung Pencapaian Target Provinsi Tahun 2027

No	Indikator Makro	Satuan	Target
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	7,91
2	PDRB Perkapita	Rp Juta	18,85
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota Terhadap Provinsi	%	5,72
4	Tingkat Kemiskinan	%	16,46
5	Rasio Gini	Indeks	0,2125
6	Indeks Modal Manusia / Indeks Pembangunan Manusia	Indks	69,31
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	81,81
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,64

Sumber : RPJMD Provinsi Maluku, 2025-2029

5.1.3.5. Kabupaten Maluku Barat Daya

Kabupaten Maluku Barat Daya memiliki posisi strategis sebagai wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), khususnya melalui Kawasan Perkotaan Skala Nasional (PKSN) Ilwaki. Dalam kerangka RPJMN 2025–2029 sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025 serta RTRW Provinsi Maluku, Maluku Barat Daya diarahkan sebagai Kawasan Afirmasi dengan fokus pada penguatan kawasan perbatasan. Peran ini menempatkan MBD tidak hanya sebagai garda terdepan pertahanan dan keamanan negara, tetapi juga sebagai simpul pertumbuhan ekonomi berbasis maritim dan pintu interaksi antarbangsa.

Arah pengembangan Maluku Barat Daya mencakup penguatan fungsi PKSN Ilwaki sebagai pusat pelayanan publik, perdagangan, dan logistik perbatasan; peningkatan konektivitas antar-pulau; serta pengembangan ekonomi lokal berbasis sumber daya alam terutama sektor kelautan dan perikanan. Selain itu, pembangunan layanan dasar, peningkatan kapasitas SDM, pelestarian lingkungan, serta penguatan identitas sosial-budaya masyarakat perbatasan menjadi fokus penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kedaulatan negara.

Arah kebijakan Kabupaten Maluku Daya sebagai berikut :

1. Penguatan Kawasan Perbatasan dan PKSN Ilwaki
   - Menjadikan PKSN Ilwaki sebagai pusat pelayanan publik, perdagangan, dan logistik perbatasan.
   - Memperkuat fungsi Ilwaki sebagai simpul interaksi antarbangsa sekaligus garda terdepan pertahanan dan keamanan NKRI.
   - Mendorong pembangunan fasilitas perbatasan yang mendukung diplomasi, perdagangan lintas batas, dan pengawasan wilayah.
2. Peningkatan Konektivitas Antar-Pulau
   - Pembangunan dan modernisasi sarana transportasi laut dan udara untuk memperkuat integrasi antar-pulau di MBD.
   - Pengembangan jaringan logistik terpadu untuk mendukung distribusi barang dan mobilitas masyarakat.
   - Memperkuat konektivitas digital sebagai bagian dari integrasi pelayanan publik dan ekonomi kepulauan.
3. Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Maritim
   - Optimalisasi potensi kelautan dan perikanan sebagai basis ekonomi utama.

- Pembangunan sentra industri perikanan, fasilitas pengolahan hasil laut, dan cold storage untuk memperkuat rantai pasok.
- Pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya maritim dan pariwisata bahari.

4. Pembangunan Layanan Dasar dan SDM
   - Peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan air bersih di wilayah perbatasan.
   - Penguatan kapasitas SDM lokal melalui pelatihan vokasi, pendidikan maritim, dan pengembangan kewirausahaan.
   - Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan berbasis komunitas.
5. Pelestarian Lingkungan dan Identitas Sosial-Budaya
   - Perlindungan ekosistem pesisir dan laut sebagai aset strategis jangka panjang.
   - Pelestarian budaya lokal sebagai identitas masyarakat perbatasan dan daya tarik pariwisata.
   - Integrasi nilai-nilai sosial budaya dalam kebijakan pembangunan untuk memperkuat kohesi sosial.

Dalam rangka mendukung pencapaian target indikator makro ekonomi Provinsi Maluku maka Kabupaten Maluku Barat Daya pada tahun 2027 ditargetkan :

Tabel 5. 6
Sasaran dan Indikator Pembangunan Kabupaten Maluku Barat Daya Mendukung Pencapaian Target Provinsi Tahun 2027

No	Indikator Makro	Satuan	Target
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	9,03
2	PDRB Perkapita	Rp Juta	23,72
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota Terhadap Provinsi	%	4,83
4	Tingkat Kemiskinan	%	18,89
5	Rasio Gini	Indeks	0,1290
6	Indeks Modal Manusia / Indeks Pembangunan Manusia	Indks	70,04
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	83,30
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	1,96

Sumber : RPJMD Provinsi Maluku, 2025-2029

5.1.3.6. Kabupaten Maluku Tengah

Kabupaten Maluku Tengah memiliki peran strategis sebagai salah satu pusat pertumbuhan di Provinsi Maluku yang didukung oleh potensi pariwisata, perikanan, pertanian,

serta kekayaan sumber daya alam lainnya. Dalam arah kebijakan pembangunan nasional (RPJMN 2025–2029) dan RTRW Provinsi Maluku, Maluku Tengah didorong menjadi Kawasan Pertumbuhan dengan fokus pada pengembangan sektor pariwisata berkelas dunia, komoditas unggulan berbasis perikanan (TCT, udang, lobster), serta kawasan swasembada pangan, air, dan energi. Selain itu, Maluku Tengah juga diarahkan sebagai kawasan konservasi yang menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan darat.

Pengembangan kawasan ini diharapkan tidak hanya memperkuat daya saing ekonomi lokal dan nasional, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas SDM, serta pelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Dengan demikian, Maluku Tengah diharapkan mampu menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi hijau dan biru di Maluku.

1. Pengembangan Pariwisata Berkelas Dunia
   - Menjadikan Maluku Tengah sebagai destinasi unggulan pariwisata bahari, budaya, dan ekowisata.
   - Pembangunan infrastruktur pariwisata (akses transportasi, akomodasi, fasilitas publik) yang berstandar internasional.
   - Promosi pariwisata berbasis identitas lokal untuk memperkuat daya tarik global sekaligus menjaga kearifan budaya.
2. Penguatan Komoditas Unggulan Perikanan
   - Pengembangan komoditas unggulan: tuna cakalang tongkol (TCT), udang, dan lobster.
   - Pembangunan sentra industri perikanan terpadu, fasilitas pengolahan, dan cold storage untuk memperkuat rantai pasok ekspor.
   - Penerapan standar mutu internasional untuk meningkatkan daya saing produk perikanan Maluku Tengah di pasar global.
3. Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi
   - Pangan: Diversifikasi produksi pertanian lokal (padi, jagung, hortikultura) untuk mendukung ketahanan pangan daerah.
   - Air: Peningkatan akses air bersih melalui konservasi sumber daya air dan pemanfaatan teknologi penyediaan air.
   - Energi: Pengembangan energi terbarukan (surya, angin, biomassa) untuk mendukung kemandirian energi kepulauan.

4. Kawasan Konservasi Laut dan Darat
   - Menetapkan kawasan konservasi untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut, pesisir, dan hutan.
   - Integrasi kebijakan konservasi dengan pengembangan ekonomi hijau dan biru.
   - Pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan konservasi untuk memperkuat rasa memiliki dan keberlanjutan.
5. Peningkatan Kesejahteraan dan Kapasitas SDM
   - Penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan sektor pariwisata, perikanan, dan pertanian.
   - Peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan vokasi, pelatihan kewirausahaan, dan penguatan kompetensi berbasis lokal.
   - Pembangunan layanan dasar (pendidikan, kesehatan, air bersih) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dalam rangka mendukung pencapaian target indikator makro ekonomi Provinsi Maluku maka Kabupaten Maluku Tengah pada tahun 2027 ditargetkan :

Tabel 5. 7
Sasaran dan Indikator Pembangunan Kabupaten Maluku Tengah Mendukung Pencapaian Target Provinsi Tahun 2027

No	Indikator Makro	Satuan	Target
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	6,87
2	PDRB Perkapita	Rp Juta	17,87
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota Terhadap Provinsi	%	18,14
4	Tingkat Kemiskinan	%	14,19
5	Rasio Gini	Indeks	0,252
6	Indeks Modal Manusia / Indeks Pembangunan Manusia	Indks	76,65
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	83,70
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,60

Sumber : RPJMD Provinsi Maluku, 2025-2029

5.1.3.7. Kabupaten Maluku Tenggara

Arah pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara selaras dengan dokumen perencanaan utama: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku 2025-2029, dan Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku 2013 - 2033. Keterpaduan ini menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berwawasan maritim.

Kabupaten Maluku Tenggara diarahkan sebagai Kawasan Komoditas Unggulan yang difokuskan sebagai sentra produksi berbasis komoditas TCT, udang, dan lobster dan dalam skala yang signifikan dan Kawasan Afirmasi yang difokuskan pada Kawasan Kecamatan Perbatasan Prioritas yang bertujuan mengatasi kesenjangan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat kedaulatan negara.

Arah Kebijakan Kabupaten Maluku Tenggara

1. Penguatan Kawasan Komoditas Unggulan
   - Pengembangan sentra produksi perikanan tangkap dan budidaya di Kei Besar dan Kei Kecil.
   - Peningkatan infrastruktur perikanan (pelabuhan, cold storage,dan rantai dingin),
   - Pengembangan industri pengolahan hasil laut berorientasi ekspor.
   - Penguatan kelembagaan nelayan, koperasi, dan UMKM pengolahan perikanan.
   - Peningkatan kapasitas SDM perikanan dan budidaya berbasis teknologi modern.
2. Kawasan Afirmasi di Kecamatan Perbatasan Prioritas
   - Pembangunan kawasan perbatasan untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antarwilayah.
   - Peningkatan infrastruktur dasar (transportasi, listrik, air bersih, telekomunikasi) di kecamatan perbatasan.
   - Penguatan layanan publik (pendidikan, kesehatan, administrasi) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat perbatasan.
   - Menjadikan kawasan perbatasan sebagai garda terdepan kedaulatan NKRI sekaligus pintu interaksi antarbangsa.
3. Peningkatan Kesejahteraan dan Kapasitas SDM
   - Penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata lokal.
   - Peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan vokasi, pelatihan kewirausahaan, dan penguatan kompetensi berbasis maritim.
   - Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan berbasis komunitas.
4. Pelestarian Lingkungan dan Ekosistem Maritim
   - Perlindungan ekosistem laut dan pesisir sebagai aset strategis jangka panjang.
   - Integrasi kebijakan konservasi dengan pengembangan ekonomi biru (blue economy).
   - Pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan konservasi untuk memperkuat

keberlanjutan.

Dalam rangka mendukung pencapaian target indikator makro ekonomi Provinsi Maluku maka Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2027 ditargetkan :

Tabel 5. 8
Sasaran dan Indikator Pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara
Mendukung Pencapaian Target Provinsi Tahun 2027

No	Indikator Makro	Satuan	Target
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	6,57
2	PDRB Perkapita	Rp Juta	23,89
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota Terhadap Provinsi	%	6,93
4	Tingkat Kemiskinan	%	13,85
5	Rasio Gini	Indeks	0,2235
6	Indeks Modal Manusia / Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,07
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	79,91
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,37

Sumber : RPJMD Provinsi Maluku, 2025-2029

5.1.3.8. Kabupaten Seram Bagian Barat

Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) merupakan wilayah strategis di Maluku dengan potensi besar dalam sektor perikanan tangkap, kelautan, energi, serta lingkungan hidup. Dalam arah pembangunan nasional dan penataan ruang provinsi, SBB diarahkan sebagai Kawasan Komoditas Unggulan**,** Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi**,** serta Kawasan Konservasi Laut dan Pesisir.

Peran ini menempatkan SBB sebagai salah satu sentra produksi berbasis perikanan unggulan (TCT, udang, lobster), kawasan potensial energi yang mendukung kemandirian daerah, sekaligus pusat konservasi laut melalui pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Buano. Dengan pendekatan ini, pembangunan SBB diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menjaga kelestarian lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

1. Penguatan Kawasan Komoditas Unggulan
   - Fokus pada pengembangan perikanan tangkap unggulan (TCT, udang, lobster) sebagai basis ekonomi daerah.
   - Mendorong hilirisasi produk perikanan melalui industri pengolahan dan pemasaran berbasis lokal.
   - Memperkuat akses pasar domestik dan ekspor dengan dukungan infrastruktur logistik dan pelabuhan perikanan.

2. Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi
   - Optimalisasi potensi energi terbarukan (mikrohidro, tenaga surya, biomassa) untuk mendukung kemandirian energi daerah.
   - Pengembangan sistem irigasi dan pengelolaan sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan.
   - Diversifikasi komoditas pertanian dan perikanan untuk memperkuat ketahanan pangan lokal.
3. Kawasan Konservasi Laut dan Pesisir
   - Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Buano sebagai pusat konservasi laut yang berfungsi menjaga ekosistem pesisir.
   - Penerapan prinsip blue economy dengan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan kelestarian lingkungan.
   - Pemberdayaan masyarakat pesisir dalam pengelolaan konservasi berbasis kearifan lokal.
4. Pertumbuhan Ekonomi Lokal Berkelanjutan
   - Mendorong ekonomi berbasis komunitas melalui koperasi perikanan dan usaha kecil menengah.
   - Pengembangan ekowisata bahari dan pesisir sebagai sumber pendapatan alternatif.
   - Peningkatan kapasitas SDM lokal melalui pelatihan, pendidikan vokasi, dan transfer teknologi.
5. Kesejahteraan dan Kemandirian Masyarakat
   - Memperkuat program pemberdayaan nelayan dan petani untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup.
   - Penyediaan akses layanan dasar (pendidikan, kesehatan, infrastruktur desa) secara merata.
   - Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.

Dalam rangka mendukung pencapaian target indikator makro ekonomi Provinsi Maluku maka Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2027 ditargetkan :

Tabel 5. 9
Sasaran dan Indikator Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Barat Mendukung Pencapaian Target Provinsi Tahun 2027

No	Indikator Makro	Satuan	Target
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	6,80
2	PDRB Perkapita	Rp Juta	12,08
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota Terhadap Provinsi	%	6,38
4	Tingkat Kemiskinan	%	14,19
5	Rasio Gini	Indeks	0,2340
6	Indeks Modal Manusia / Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	74,86
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	83,21
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,07

Sumber : RPJMD Provinsi Maluku, 2025-2029

5.1.3.9. Kabupaten Seram Bagian Timur

Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor pangan, air, dan energi yang menjadikannya sebagai salah satu kawasan strategis di Provinsi Maluku. RPJMN 2025–2029 mengarahkan SBT sebagai Kawasan Potensial Swasembada Pangan, Air, dan Energi, dengan fokus pada peningkatan produktivitas pangan lokal, pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, serta percepatan elektrifikasi melalui pemanfaatan energi baru terbarukan.

Selain itu, SBT termasuk kawasan dengan tingkat elektrifikasi yang masih rendah, sehingga intervensi pembangunan infrastruktur energi menjadi prioritas untuk mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mendukung penguatan aktivitas ekonomi lokal. Arah pengembangan ini juga sejalan dengan arahan RTRW Provinsi Maluku, yang menempatkan SBT sebagai wilayah penting dalam mendukung ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya air, serta penyediaan energi berkelanjutan untuk mempercepat transformasi wilayah menuju pembangunan inklusif

Kabupaten SBT diarahkan sebagai Kawasan Potensial Swasembada Pangan, Air, dan Energi, dengan fokus pada pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas hidup, dan penguatan ekonomi lokal berbasis sumber daya alam berkelanjutan.

Arah Kebijakan Kabupaten Seram Bagian Timur

1. Ketahanan Pangan
   - Peningkatan produktivitas pangan lokal melalui intensifikasi pertanian berbasis komoditas unggulan (padi, sagu, kelapa, perikanan).
   - Penguatan rantai pasok pangan dengan membangun pusat distribusi dan pasar

regional.

- Diversifikasi pangan untuk mendukung pola konsumsi sehat dan mengurangi ketergantungan pada impor.

2. Pengelolaan Sumber Daya Air
   - Pengembangan sistem irigasi terpadu untuk mendukung produktivitas pertanian.
   - Konservasi daerah aliran sungai (DAS) dan perlindungan sumber mata air guna menjamin keberlanjutan pasokan.
   - Peningkatan akses air bersih melalui pembangunan infrastruktur air minum berbasis desa.
3. Energi Baru Terbarukan (EBT)
   - Percepatan elektrifikasi desa dengan memanfaatkan potensi energi surya, mikrohidro, dan biomassa.
   - Pembangunan infrastruktur energi untuk pemerataan akses listrik, terutama di wilayah terpencil.
   - Pengembangan kawasan energi mandiri yang mendukung aktivitas ekonomi lokal (misalnya agroindustri berbasis energi terbarukan).
4. Infrastruktur dan Pemerataan Pembangunan
   - Pembangunan jaringan listrik dan jalan penghubung untuk memperkuat konektivitas antarwilayah.
   - Integrasi kebijakan energi dengan sektor ekonomi lokal, sehingga elektrifikasi mendorong tumbuhnya usaha kecil dan menengah.
   - Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui akses energi, air bersih, dan pangan yang terjangkau.
5. Transformasi Wilayah Inklusif
   - Penguatan kapasitas kelembagaan daerah dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya.
   - Pemberdayaan masyarakat lokal melalui program berbasis komunitas di sektor pangan, air, dan energi.
   - Kolaborasi multipihak (pemerintah, swasta, masyarakat) untuk mempercepat transformasi wilayah menuju pembangunan berkelanjutan.

Seram Bagian Timur juga menjadi kawasan strategis pengembangan sagu sebagai komoditas unggulan daerah. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan pengembangan terintegrasi berbasis hilirisasi sagu, dengan strategi sebagai berikut :

- Peningkatan Kapasitas Produksi dan Teknologi Pengolahan

Mendorong penggunaan teknologi tepat guna untuk panen dan pengolahan sagu, mulai dari pengolahan pati hingga produk turunan seperti sagu instan, makanan olahan, bioetanol, dan bioplastik.

- Penguatan Kelembagaan Petani dan Industri UMKM Sagu

Pengembangan koperasi petani sagu, BUMDes, dan kemitraan dengan sektor swasta untuk memperkuat rantai nilai (value chain) sagu dari hulu ke hilir.

- Fasilitasi Investasi dan Insentif Hilirisasi

Mendorong investasi sektor hilir dengan memberikan kemudahan perizinan, insentif fiskal, serta dukungan infrastruktur dasar dan penunjang industri pengolahan sagu.

- Promosi dan Diversifikasi Pasar

Menyusun strategi branding dan pemasaran sagu Maluku sebagai produk sehat, alami, dan berkelanjutan ke pasar domestik dan ekspor.

- Riset dan Inovasi Produk Turunan Sagu

Mendorong perguruan tinggi dan lembaga riset lokal untuk melakukan inovasi produk turunan sagu yang bernilai tambah tinggi, serta mendukung riset keberlanjutan budidaya sagu di lahan marginal.

Dalam rangka mendukung pencapaian target indikator makro ekonomi Provinsi Maluku maka Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun 2027 ditargetkan :

Tabel 5. 10
Sasaran dan Indikator Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur Mendukung Pencapaian Target Provinsi Tahun 2027

No	Indikator Makro	Satuan	Target
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	5,90
2	PDRB Perkapita	Rp Juta	17,19
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota Terhadap Provinsi	%	5,91
4	Tingkat Kemiskinan	%	13,67
5	Rasio Gini	Indeks	0,1480
6	Indeks Modal Manusia / Indeks Pembangunan Manusia	Indks	72,09
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	84,98
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,86

Sumber : RPJMD Provinsi Maluku, 2025-2029

5.1.3.10. Kota Ambon

Sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku, Kota Ambon memiliki peran strategis sebagai pusat pemerintahan, pelayanan, perdagangan, dan jasa, sekaligus simpul utama konektivitas di kawasan timur Indonesia. RPJMN 2025–2029 mengarahkan Kota Ambon sebagai Kawasan Pertumbuhan, dengan fokus pada penguatan fungsi perkotaan sedang yang mampu mendorong aktivitas ekonomi regional. Ambon juga ditetapkan sebagai Kawasan Komoditas Unggulan**,** dengan pengembangan sentra industri dan sentra produksi berbasis komoditas kelautan perikanan, terutama tuna, cakalang, tongkol (TCT), udang, dan lobster, yang menjadi basis perekonomian daerah.

Selain itu, Kota Ambon diarahkan sebagai Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi, dengan penekanan pada pengembangan kawasan potensial energi baru terbarukan guna mendukung keberlanjutan pembangunan perkotaan. Ambon juga ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi, yang bertujuan menjaga keseimbangan ekosistem laut dan pesisir, serta menjamin keberlanjutan sumber daya perikanan. Arahan pengembangan ini sejalan dengan RTRW Provinsi Maluku, yang menempatkan Ambon sebagai pusat pertumbuhan utama, simpul konektivitas regional, dan motor penggerak ekonomi Maluku.

Kota Ambon diarahkan sebagai Pusat Pertumbuhan dan Simpul Konektivitas Regional, sekaligus Kawasan Komoditas Unggulan Kelautan-Perikanan dan Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi, dengan penekanan pada pembangunan berkelanjutan dan konservasi pesisir-laut.

Arah Kebijakan Kota Ambon :

1. Pusat Pertumbuhan Ekonomi Regional
   - Penguatan fungsi perkotaan sedang sebagai motor penggerak ekonomi Maluku dan simpul utama konektivitas kawasan timur Indonesia.
   - Pengembangan sektor perdagangan dan jasa untuk memperkuat peran Ambon sebagai pusat pelayanan regional.
   - Peningkatan infrastruktur perkotaan (transportasi, logistik, telekomunikasi) guna mendukung integrasi ekonomi antarwilayah.
2. Pengembangan Komoditas Unggulan
   - Sentra industri kelautan dan perikanan berbasis komoditas unggulan (tuna, cakalang, tongkol, udang, lobster).
   - Penguatan rantai nilai perikanan dari hulu ke hilir: produksi, pengolahan, distribusi, hingga ekspor.

- Peningkatan daya saing produk perikanan melalui sertifikasi mutu, branding, dan akses pasar internasional.

3. Swasembada Pangan, Air, dan Energi
   - Pengembangan kawasan energi baru terbarukan (EBT) seperti tenaga surya dan biomassa untuk mendukung keberlanjutan perkotaan.
   - Peningkatan ketahanan pangan perkotaan melalui urban farming, diversifikasi pangan, dan sistem distribusi modern.
   - Pengelolaan sumber daya air perkotaan dengan pendekatan berkelanjutan untuk menjamin akses air bersih dan sanitasi.
4. Kawasan Konservasi Laut dan Pesisir
   - Perlindungan ekosistem pesisir dan laut untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan.
   - Pengembangan kawasan konservasi berbasis masyarakat guna meningkatkan partisipasi lokal dalam menjaga lingkungan.
   - Integrasi kebijakan konservasi dengan ekonomi biru, sehingga konservasi mendukung pariwisata bahari dan perikanan berkelanjutan.
5. Transformasi Wilayah Inklusif
   - Peningkatan kualitas hidup masyarakat perkotaan melalui akses energi, air bersih, pangan, dan layanan publik yang merata.
   - Penguatan kapasitas kelembagaan daerah dalam perencanaan, pengelolaan sumber daya, dan tata kelola perkotaan.
   - Kolaborasi multipihak (pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat) untuk mempercepat transformasi Ambon sebagai pusat pertumbuhan utama.

Dalam rangka mendukung pencapaian target indikator makro ekonomi Provinsi Maluku maka Kota Ambon pada tahun 2027 ditargetkan :

Tabel 5. 11
Sasaran dan Indikator Pembangunan Kota Ambon
Mendukung Pencapaian Target Provinsi Tahun 2027

No	Indikator Makro	Satuan	Target
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	6,69
2	PDRB Perkapita	Rp Juta	37,52
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota Terhadap Provinsi	%	31,12
4	Tingkat Kemiskinan	%	6,15
5	Rasio Gini	Indeks	0,2415

No	Indikator Makro	Satuan	Target
6	Indeks Modal Manusia / Indeks Pembangunan Manusia	Indks	84,62
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	76,82
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	11,67

Sumber : RPJMD Provinsi Maluku, 2025-2029

5.1.3.11. Kota Tual

Kota Tual memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang wilayah tenggara Maluku sekaligus sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi kelautan dan perikanan. Dalam RPJMN 2025–2029, Kota Tual diarahkan sebagai Kawasan Komoditas Unggulan, dengan fokus pada pengembangan industri berbasis hasil laut terutama Tuna, Cakalang, Tongkol (TCT), udang, dan lobster. Peran ini menjadikan Tual sebagai salah satu simpul penting dalam rantai produksi, hilirisasi, dan ekspor perikanan nasional.

Selain itu, Kota Tual juga ditetapkan sebagai Kawasan Perbatasan Prioritas, yang diarahkan untuk memperkuat integrasi wilayah perbatasan, mengurangi kesenjangan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkokoh kedaulatan negara. Arah pengembangan ini juga konsisten dengan RTRW Provinsi Maluku, yang menempatkan Tual sebagai pusat pertumbuhan perikanan, kawasan industri kelautan, sekaligus garda terdepan pengelolaan wilayah perbatasan.

Kota Tual diarahkan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kelautan dan Perikanan, sekaligus Kawasan Perbatasan Prioritas yang memperkuat integrasi wilayah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkokoh kedaulatan negara.

Arah Kebijakan Kota Tual

1. Pengembangan Komoditas Unggulan Kelautan-Perikanan
   - Sentra industri perikanan berbasis komoditas unggulan (tuna, cakalang, tongkol, udang, lobster).
   - Penguatan rantai nilai perikanan dari produksi, pengolahan, hingga ekspor untuk meningkatkan daya saing nasional.
2. Kawasan Perbatasan Prioritas
   - Penguatan integrasi wilayah perbatasan melalui pembangunan infrastruktur dasar (jalan, listrik, air bersih).
   - Peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan dengan program ekonomi lokal berbasis kelautan dan perikanan.
   - Memperkokoh kedaulatan negara melalui pengelolaan wilayah laut dan pengawasan

sumber daya perikanan di perbatasan.

3. Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kelautan
   - Pengembangan Tual sebagai simpul ekspor perikanan nasional, mendukung konektivitas perdagangan internasional.
   - Diversifikasi ekonomi kelautan dengan mendorong pariwisata bahari, jasa transportasi laut, dan industri pendukung.
   - Peningkatan kapasitas SDM lokal melalui pendidikan vokasi dan pelatihan berbasis kelautan-perikanan.
4. Infrastruktur dan Konektivitas
   - Penguatan jaringan transportasi laut dan darat untuk mendukung mobilitas barang dan orang.
   - Integrasi sistem logistik perikanan dengan kawasan industri dan pasar regional.
5. Pembangunan Berkelanjutan dan Inklusif
   - Pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan untuk menjamin keberlanjutan produksi perikanan.
   - Pemberdayaan masyarakat pesisir melalui koperasi perikanan dan usaha mikro berbasis hasil laut.
   - Kolaborasi multipihak (pemerintah, swasta, masyarakat) dalam pengembangan kawasan industri kelautan.

Dalam rangka mendukung pencapaian target indikator makro ekonomi Provinsi Maluku maka Kota Ambon pada tahun 2027 ditargetkan :

Tabel 5. 12
Sasaran dan Indikator Pembangunan Kota Tual
Mendukung Pencapaian Target Provinsi Tahun 2027

No	Indikator Makro	Satuan	Target
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	6,08
2	PDRB Perkapita	Rp Juta	25,19
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota Terhadap Provinsi	%	5,40
4	Tingkat Kemiskinan	%	14,82
5	Rasio Gini	Indeks	0,1635
6	Indeks Modal Manusia / Indeks Pembangunan Manusia	Indks	74,94
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	78,95
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	7,29

Sumber : RPJMD Provinsi Maluku, 2025

Sinergitas antara perencanaan pusat dan daerah merupakan kunci keberhasilan pencapaian target pembangunan nasional. RPJMN 2025–2029 telah memberikan arah strategis yang menempatkan kabupaten/kota di Maluku sebagai bagian integral dari agenda pembangunan nasional, dengan peran spesifik sesuai potensi dan karakteristik wilayah.

Kabupaten/kota memiliki peran penting sebagai motor penggerak pembangunan di tingkat lokal**,** sekaligus simpul yang menghubungkan kebijakan nasional dengan kebutuhan masyarakat. Melalui penguatan sektor unggulan, pembangunan infrastruktur dasar, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, setiap daerah dapat berkontribusi nyata dalam mewujudkan ketahanan pangan, air, energi, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Dengan adanya keselarasan antara kebijakan pusat dan daerah, pembangunan di Maluku tidak hanya akan memperkuat daya saing regional, tetapi juga memastikan pemerataan kesejahteraan masyarakat, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan memperkokoh integrasi nasional.

BAB VI
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

6.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan

Kerangka pendanaan pembangunan tahun 2027 disusun sebagai instrumen utama untuk memastikan keterpaduan antara prioritas pembangunan daerah dengan kapasitas fiskal yang tersedia. Pendanaan diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam visi, misi, dan arah kebijakan daerah, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Dokumen RKPD Provinsi Maluku tahun 2027 memuat rencana tahunan berupa program, kegiatan dan sub kegiatan yang meliputi kerangka regulasi, kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan, isu strategis yang berkembang, aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD.

Penetapan target dan pagu indikatif program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RKPD Provinsi Maluku tahun 2027 menggunakan pendekatan *Money Follow* program Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial. Pencapaian sasaran pembangunan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dengan alokasi anggaran belanja daerah yang digunakan untuk mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Maluku mendatang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku dan sumber pendanaan lainnya yang sah.

Adapun strategi pendanaan pembangunan 2027 menekankan pada penguatan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan PAD secara berkelanjutan. Efisiensi belanja daerah dengan fokus pada program prioritas yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Diversifikasi sumber pendanaan melalui kemitraan dengan sektor swasta dan pemanfaatan skema pembiayaan inovatif serta pengendalian belanja rutin agar ruang fiskal lebih besar dialokasikan untuk belanja pembangunan. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran dengan berbasis kinerja dapat menghasilkan *output* dan *outcome* yang jelas sehingga pembangunan daerah tahun 2027 dapat berjalan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan serta mampu menjawab tantangan pembangunan sekaligus memperkuat daya saing daerah.

6.2 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2027

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah tahun 2027, perangkat daerah menetapkan program dan kegiatan prioritas yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan daya saing daerah, serta pencapaian target pembangunan berkelanjutan. Program dan kegiatan tersebut dirancang secara terintegrasi dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, potensi wilayah, serta arah kebijakan nasional dan daerah. Rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun sebagai tindak lanjut atas arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah yang tertuang dalam RKP 2027 serta RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2025–2029. Perangkat daerah berperan sebagai pelaksana sekaligus penggerak utama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Program dan kegiatan yang dirancang diarahkan untuk memperkuat pencapaian Kegiatan Prioritas Utama (KPU), dengan fokus pada penguatan ketahanan pangan dan energi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi wilayah. Sinergi lintas sektor dan tata kelola perencanaan berbasis data menjadi landasan agar setiap intervensi pembangunan lebih tepat sasaran, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Fokus utama rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah Tahun 2027 diarahkan pada penguatan ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM, sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata berbasis kearifan lokal, serta dukungan inovasi dan digitalisasi. Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, dan transportasi dilakukan untuk mendukung konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ditempuh melalui pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan kerja, sementara pengelolaan lingkungan hidup difokuskan pada pelestarian sumber daya alam, pengendalian pencemaran, serta adaptasi perubahan iklim. Reformasi birokrasi dilaksanakan melalui transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Seluruh program disusun dengan pendekatan partisipatif, melibatkan masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan, pemerataan pembangunan, dan mewujudkan daerah yang maju, mandiri, serta berkelanjutan. RKPD Provinsi Maluku Tahun 2027 berpedoman pada RPJMD 2025–2029,

dengan program OPD yang disusun sesuai tupoksi dan hasil musyawarah perencanaan, menghubungkan proses "bottom-up" dan "top-down". Program OPD terintegrasi dengan kebijakan nasional untuk mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RKP 2027, termasuk ketahanan pangan dan energi, peningkatan SDM, pengembangan ekonomi lokal, penurunan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, peningkatan konektivitas, dan transformasi digital pelayanan publik. Perangkat daerah berperan sebagai pelaksana teknis sekaligus penggerak utama pembangunan inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan, sebagai wujud komitmen Maluku menyongsong Indonesia Emas 2045.

Tabel 6.1
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Utama Perangkat Daerah Tahun 2027

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Kegiatan Prioritas Utama	Perangkat Daerah
(1)	*(2)*	*(3)*
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah	DINAS PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pencegahan dan Penurunan Stunting	DINAS KESEHATAN
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Provinsi dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses	DINAS KESEHATAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir	DINAS PEKERJAAN UMUM dan PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan	DINAS PEKERJAAN UMUM dan PENATAAN RUANG
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	DINAS PERUMAHAN dan KAWASAN PERMUKIMAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Lumbung Pangan Lainnya	DINAS KETAHANAN PANGAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Kegiatan Prioritas Utama	Perangkat Daerah
(1)	*(2)*	*(3)*
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
PROGRAM PENATAAN DESA	Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT dan DESA
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT dan DESA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Peningkatan Ketahanan Iklim Pesisir dan Laut	DINAS KELAUTAN dan PERIKANAN
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)	DINAS KELAUTAN dan PERIKANAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Penguatan Implementasi Transisi Energi Berkeadilan	DINAS ENERGI dan SUMBER DAYA MINERAL
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital	DINAS PERINDUSTRIAN dan PERDAGANGAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Riset dan Inovasi	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Berikut rincian rekapan jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pagu indikatif berdasarkan bidang urusan pemerintahan daerah Tahun 2027 yang akan dilaksanakan di Provinsi Maluku dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dengan acuan tersebut, seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan telah diselaraskan dengan nomenklatur terbaru yang terintegrasi dalam SIPD-RI, sehingga menjamin konsistensi antara dokumen perencanaan daerah dengan kebijakan nasional.

Tabel 6. 2
Pagu Indikatif berdasarkan Bidang Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2027

Kode		Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**38**	**104**	**379**	**1.747.746.392.261,64**
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	6	17	93	1.145.457.482.662,00
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	5	19	86	336.364.154.730,00
1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	12	24	65	195.207.674.377,00
1	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4	13	39	26.709.037.386,00
1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	4	14	39	19.053.430.150,64
1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	7	17	57	24.954.612.956,00
2		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**72**	**185**	**497**	**129.147.387.082,76**
2	07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	6	16	40	14.000.761.965,00
2	08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7	20	84	5.630.359.837,00
2	09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	5	14	43	8.802.666.233,00
2	10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2	2	2	538.790.000,00
2	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	4	7	15	6.009.324.335,00
2	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	15	34	4.943.890.269,00
2	13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5	11	47	7.865.938.575,00
2	14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3	5	6	100.000.000,00
2	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	3	18	27	9.245.352.636,24
2	16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3	10	34	11.911.513.178,00
2	17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	7	13	31	12.755.802.208,00
2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	6	14	40	7.447.914.991,00

Kode		Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
		PENANAMAN MODAL				
2	19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4	14	36	19.602.201.736,68
2	20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1	1	3	600.000.000,00
2	21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1	1	3	350.000.600,00
2	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	5	7	13	10.800.000.000,00
2	23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	3	13	32	8.377.870.518,84
2	24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2	4	6	165.000.000,00
3		**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**37**	**113**	**330**	**224.812.075.411,88**
3	25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	6	23	84	65.551.805.158,88
3	26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	5	14	45	10.751.770.006,00
3	27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	7	22	69	62.023.418.391,00
3	28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	4	16	45	55.136.561.855,00
3	29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	5	17	44	12.140.254.081,00
3	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	6	12	18	5.625.715.626,00
3	31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	2	8	24	13.522.550.294,00
3	32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	2	1	1	60.000.000,00
4		**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**10**	**44**	**153**	**88.539.144.346,25**
4	01	SEKRETARIAT DAERAH	8	30	102	240.262.133.228,25
4	02	SEKRETARIAT DPRD	2	14	51	148.277.011.118,00
5		**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**17**	**66**	**217**	**344.371.782.205,67**
5	01	PERENCANAAN	3	12	40	18.388.044.296,00
5	02	KEUANGAN	4	16	69	290.746.455.964,92
5	03	KEPEGAWAIAN	2	10	33	8.302.956.432,00
5	04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2	10	21	14.329.102.267,75
5	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	2	2	250.000.000,00
5	06	PENGELOLAAN PERBATASAN	2	8	18	3.749.117.254,00

Kode		Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
5	07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG	2	8	34	8.606.105.991,00
6		**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	**3**	**11**	**37**	**15.840.332.941,00**
6	01	INSPEKTORAT DAERAH	3	11	37	15.840.332.941,00
8		**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	**6**	**12**	**36**	**25.663.916.140,00**
8	01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	12	36	25.663.916.140,00
X		**NON URUSAN**	**1**	**4**	**7**	**4.997.476.337,00**
X	XX	URUSAN PEMERINTAH BIDANG XX	1	4	7	4.997.476.337,00
JUMLAH			**182**	**539**	**1.661**	**2.881.118.506.726,20**

Pagu Indikatif Tahun 2027 disusun sebagai pedoman awal dalam perencanaan anggaran Pemerintah Provinsi Maluku, dengan mengacu pada prioritas pembangunan daerah serta arah kebijakan nasional. Alokasi anggaran didistribusikan ke berbagai bidang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan strategis, sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Bidang **Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar** tetap menjadi prioritas utama, dengan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta penyediaan infrastruktur dasar untuk menjamin pemenuhan hak dasar masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. **1.747.746.392.261,64**. Bidang **Urusan Wajib yang tidak Berkaitan Pelayanan Dasar** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. **129.147.387.082,76** diarahkan untuk mendukung ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan administrasi kependudukan.

Sementara itu, **Urusan Pemerintahan Pilihan** memberikan ruang bagi daerah untuk mengembangkan potensi lokal seperti pariwisata, pertanian, dan ekonomi kreatif dengan alokasi anggaran Rp. **224.812.075.411,88**. **Unsur Penunjang dan Pendukung Urusan Pemerintahan** dialokasikan anggaran sebesar Rp. 732.910.926.551,92 guna memperkuat kapasitas kelembagaan, pengelolaan SDM, sarana prasarana, serta sistem informasi, sehingga efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dapat ditingkatkan.

Selain itu, **Unsur Pengawasan** diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. **15.840.332.941,00**, sedangkan **Unsur Pemerintahan Umum** mendukung fungsi koordinasi, administrasi, dan pelayanan lintas

sektor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. **25.663.916.140,00**. Untuk **Non-Urusan** dengan anggaran sebesar **4.997.476.337,00** untuk mendukung kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.

Dengan struktur pagu indikatif tersebut terdapat 182 program, 539 kegiatan dan 1.661 sub kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2027 dengan memastikan keseimbangan antara pemenuhan layanan dasar, penguatan kelembagaan, pengembangan potensi daerah, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Berikut tabel rekapan indikator kinerja dan target kinerja program beserta pagu indikatif tahun 2027 yang disusun sebagai instrumen utama dalam memastikan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran pembangunan. Rekapan ini menjadi gambaran komprehensif mengenai arah kebijakan, capaian yang diharapkan, serta alokasi sumber daya yang tersedia.

Tabel 6. 3
Indikator Kinerja, Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif Perangkat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2027

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			1.360.486.834.002,00			1.145.347.852.662,00	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			850.500.046.438,00			892.155.785.582,00	
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100,00	850.500.046.438,00	100,00	100,00	892.155.785.582,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			476.366.045.036,00			248.792.067.080,00	
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase anak usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS) (%)	87,00	472.804.349.932,80	77,28	87,00	246.352.302.640,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase anak usia 4-18 Tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS) (%)	67,00		82,07	67,00		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Skor Kemampuan Literasi SLB (%)	57,03		37,5	57,03		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Skor Kemampuan Literasi SMA (%)	62,54		49,5	62,54		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Skor Kemampuan Literasi SMK (%)	62,44		39,75	62,44		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Skor Kemampuan Numerasi SLB (%)	47,24		75	47,24		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Skor Kemampuan Numerasi SMA (%)	57,45		46,86	57,45		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Skor Kemampuan Numerasi SMK (%)	57,68		39,53	57,68		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Peningkatan Mutu dan Kualitas Pendidikan Pertanian			3.561.695.103,20			2.439.764.440,00	3.27.0.00.0.00.01.0006 - UPTD SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			583.000.000,00			300.000.000,00	
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal (%)	36,00	583.000.000,00		36,00	300.000.000,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			32.069.742.528,00			3.500.000.000,00	
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidikan (%)	75,00	32.069.742.528,00	75,43	75,00	3.500.000.000,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Persentase pemerataan guru (%)	100,00		0	100,00		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN			451.000.000,00			300.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Institusi Pendidikan	Persentase layanan dan tindak lanjut pemberian perizinan pendidikan (%)	11,00	451.000.000,00	0	11,00	300.000.000,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA			517.000.000,00			300.000.000,00	
Terlestarikannya bahasa dan Sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra Daerah (%)	7,00	517.000.000,00	0	7,00	300.000.000,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			338.740.916.450,00			336.364.154.730,00	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			159.811.207.000,00			160.723.552.000,00	
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel,	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100,00	159.811.207.000,00	94,28	100,00	160.723.552.000,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik							
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			152.010.007.220,00			151.577.741.500,00	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Balita/1000 Kelahiran Hidup (Orang)	26,50	152.010.007.220,00	6,4	26,50	151.577.741.500,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	11,28		0	11,28		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Cakupan penerimaan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	90,00		66,35	90,00		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Jumlah Kabupaten/Kota Eliminasi Malaria (Kabupaten/Kota)	8,00		4	8,00		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	ODHIV Baru yang ditemukan yang mendapat Pengobatan ARV (%)	90,00		64	90,00		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase hipertensi dalam pengendalian (Persentase)	20,00		3,45	20,00		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			25.187.202.230,00			22.685.361.230,00	
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (%)	55,00	25.187.202.230,00	52,83	55,00	22.685.361.230,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			620.000.000,00			310.000.000,00	
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (Persentase)	84,00	620.000.000,00	81	84,00	310.000.000,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			1.112.500.000,00			1.067.500.000,00	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan (%)	70,00	1.112.500.000,00	90,72	70,00		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			252.138.944.055,00			195.207.674.377,00	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN			42.397.258.805,00			35.964.339.311,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100,00	42.397.258.805,00	100	100,00	35.964.339.311,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			32.541.940.800,00			30.721.334.070,00	
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (%)	41,00	32.541.940.800,00	77,42	41,00	30.721.334.070,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase peningkatan perlindungan kawasan dari abrasi dan banjir rob (%)	23,00		38,31	23,00		1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir (%)	18,00		4,32	18,00		1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN			10.494.125.900,00			7.309.456.914,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM							
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kab/kota (%)	22,00	10.494.125.900,00	0	22,00	7.309.456.914,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			5.250.000.000,00			5.500.000.000,00	
Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/TPST regional (%)	24,00	5.250.000.000,00	0	24,00	5.500.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			1.568.968.700,00			7.500.000.000,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Aman (%)	9,33	1.568.968.700,00	1,43	9,33	7.500.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak (%)	55,72		14,58	55,72		1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN			4.888.183.000,00			2.557.475.500,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE							
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik (%)	20,00	4.888.183.000,00	84,62	20,00	2.557.475.500,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			43.959.555.000,00			15.000.000.000,00	
Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi baik (%)	23,00	43.959.555.000,00	0	23,00	15.000.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			15.131.762.000,00			13.260.682.200,00	
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik (%)	20,00	15.131.762.000,00	100	20,00	13.260.682.200,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			22.867.205.000,00			28.905.332.300,00	
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase penataan bangunan dan lingkungan (%)	20,00	22.867.205.000,00	0	20,00	28.905.332.300,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			71.446.928.000,00			47.009.494.082,00	
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	58,37	71.446.928.000,00	61,84	58,37	47.009.494.082,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			702.029.650,00			625.000.000,00	
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli (%)	30,00	702.029.650,00	13	30,00	625.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			890.987.200,00			854.560.000,00	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah provinsi (%)	33,00	890.987.200,00	0	33,00	854.560.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			22.614.615.043,00			26.709.037.386,00	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			10.401.656.043,00			11.674.349.574,00	
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100,00	10.401.656.043,00	100	100,00	11.674.349.574,00	1.04.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik							
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			4.067.668.000,00			6.889.396.812,00	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100,00	4.067.668.000,00	100	100,00	6.889.396.812,00	1.04.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni (Persentase)	100,00		100	100,00		1.04.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			4.988.003.000,00			4.988.003.000,00	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani (Persentase)	31,97	4.988.003.000,00	25,25	31,97	4.988.003.000,00	1.04.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			3.157.288.000,00			3.157.288.000,00	
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana,	100,00	3.157.288.000,00	100	100,00	3.157.288.000,00	1.04.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	dan Utilitas Umum) (Persentase)						DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			22.027.626.595,00			19.056.990.150,64	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			13.633.500.347,00			18.798.903.450,64	
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100,00	13.633.500.347,00	97	100,00	13.483.921.595,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100,00			100,00	5.314.981.855,64	1.05.1.06.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN			7.430.895.498,00			110.086.700,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
DAN KETERTIBAN UMUM							
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Presentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah (%)	100,00	7.430.895.498,00	0	100,00	110.086.700,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas (Persentase)	100,00	0,00		100,00		1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Meningkatnya Perlindungan Kepada Masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	18,80	0,00		18,80		1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya ((%))	71,50			71,50		1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			797.992.000,00			120.000.000,00	
Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana	Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana (%)	100,00	797.992.000,00	0	100,00	120.000.000,00	1.05.1.06.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			165.238.750,00			28.000.000,00	
Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (%)	100,00	165.238.750,00	100	100,00	28.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			24.379.555.769,00			24.954.612.956,00	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			16.300.468.872,00			18.964.278.696,00	
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100,00	16.300.468.872,00	100	100,00	18.964.278.696,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			158.338.740,00			150.798.800,00	
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial (%)	64,00	158.338.740,00	0	64,00	150.798.800,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase Pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial (%)	83,00		0	83,00		1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Taraf Kesejahteraannya (%)	73,00		0	73,00		1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%)	73,00		0	73,00		1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			78.965.250,00			79.695.000,00	
Meningkatnya layanan penanganan warga negeri migran korban tindak kekerasan	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan (%)	100,00	78.965.250,00	49	100,00	79.695.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			4.828.647.075,00			3.524.195.400,00	
Meningkatnya rehabiltasi sosial	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100,00	4.828.647.075,00	100	100,00	3.524.195.400,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100,00		100	100,00		1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	100,00		100	100,00		1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100,00		100	100,00		1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100,00		100	100,00		1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			1.788.131.100,00			995.261.800,00	
Meningkatnya Perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan (%)	73,00	1.788.131.100,00	100	73,00	995.261.800,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat sesuai Standar (%)	83,00		100	83,00		1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (%)	90,30		100	90,30		1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (%)	83,00		-	83,00		1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA			727.986.000,00			1.070.052.000,00	
Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial, dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (%)	100,00	727.986.000,00	100	100,00	1.070.052.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (%)	73,00		100	73,00		1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya (%)	83,00		0	83,00		1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			497.018.732,00			170.331.260,00	
Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola dengan Baik (%)	83,00	497.018.732,00	100	83,00	170.331.260,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			16.109.516.724,00			14.000.761.965,00	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG			14.800.311.644,00			13.077.736.125,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100,00	14.800.311.644,00	100	100,00	13.077.736.125,00	2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			207.810.000,00			173.350.000,00	
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	20,00	207.810.000,00	54,09	20,00	173.350.000,00	2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			259.763.000,00			184.913.000,00	
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	0,21	259.763.000,00	0,1	0,21	184.913.000,00	2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			135.076.780,00			175.076.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	0,51	135.076.780,00	0	0,51	175.076.000,00	2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			145.467.300,00			69.000.000,00	
Meningkatnya Pekerja Indonesia terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	250,00	145.467.300,00	0	250,00	69.000.000,00	2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.06 - PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN			561.088.000,00			320.686.840,00	
Terlindunginya hak-hak pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya (Orang)	3.075,00	561.088.000,00	221	3.075,00	320.686.840,00	2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			9.188.280.373,00			5.630.359.837,00	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			6.321.750.100,00			5.357.500.237,00	
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100,00	6.321.750.100,00	100	100,00	5.357.500.237,00	2.08.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik							
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			138.950.280,00			68.496.600,00	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif (ARG) (%)	74,2	138.950.280,00	71,43	74,2	68.496.600,00	2.08.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	59,31		66,66	59,31		2.08.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			579.710.817,00			32.949.000,00	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komperhensif (%)	100,00	579.710.817,00	100	100,00	32.949.000,00	2.08.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			946.740.564,00			23.215.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar (Nilai)	0,75	946.740.564,00	0	0,75	23.215.000,00	2.08.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			209.474.900,00			34.989.200,00	
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan (Nilai)	24,08	209.474.900,00	0	24,08	34.989.200,00	2.08.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			551.249.944,00			58.917.800,00	
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Nilai)	66,17	551.249.944,00	0	66,17	58.917.800,00	2.08.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			440.403.768,00			54.292.000,00	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Nilai)	91,49	440.403.768,00	0	91,49	54.292.000,00	2.08.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
lainnya terhadap anak							
	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100,00		100	100,00		2.08.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			10.171.834.676,00			8.802.666.233,00	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			8.431.423.676,00			7.667.666.233,00	
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100,00	8.431.423.676,00	100	100,00	7.667.666.233,00	2.09.2.09.0.00.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN			77.929.000,00			98.860.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Jumlah Cadangan Pangan (ton) (Ton)	50,00	77.929.000,00	54.218	50,00	98.860.000,00	2.09.2.09.0.00.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			1.194.910.000,00			679.112.000,00	
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Skor)	79,00	1.194.910.000,00	0	79,00	679.112.000,00	2.09.2.09.0.00.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			192.224.000,00			97.028.000,00	
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan pangan (%)	18,44	192.224.000,00	46,61	18,44	97.028.000,00	2.09.2.09.0.00.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			275.348.000,00			260.000.000,00	
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan (%)	90,00	275.348.000,00	0	90,00	260.000.000,00	2.09.2.09.0.00.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			687.669.000,00			538.790.000,00	
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH			315.000.000,00			200.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE							
Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (Bidang Tanah)	1.200,00	315.000.000,00	0	1.200,00	200.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			372.669.000,00			338.790.000,00	
Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah (%)	100,00	372.669.000,00	100	100,00	338.790.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			8.145.822.906,00			6.009.324.335,00	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			6.751.097.406,00			5.809.324.735,00	
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100,00	6.751.097.406,00	63,16	100,00	5.809.324.735,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik							
2.11.02 - PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP			0,00			-	
Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup (Dokumen)		0,00			-	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			223.396.000,00			99.999.600,00	
Menurunya Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (poin)	73,03	223.396.000,00	69,74	73,03	99.999.600,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Indeks Kualitas Air Laut (poin)	82,04		72,15	82,04		2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Indeks Kualitas Udara (poin)	88,43		84,22	88,43		2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			208.000.000,00			-	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (IPKH) (Poin)	0,56	208.000.000,00	-	0,56	-	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			83.124.000,00			-	
Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang terkelola (%)	90,00	83.124.000,00	79,88	90,00	-	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			381.248.500,00			50.000.000,00	
Meningkatnya Kepatuhan usaha dan / atau Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH (%)	33,33	381.248.500,00	85,71	33,33	50.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA			119.491.000,00			-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
YANG TERKAIT DENGAN PPLH							
Meningkatnya Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah Entitas Pengakuan dan Peningkatan Kapasitas?MHA (Kelompok)	2,00	119.491.000,00	0	2,00	-	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			103.900.000,00			50.000.000,00	
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Jumlah Masyarakat/ Kelompok/ Pelaku?Usaha (Kg/Orang)	30,00	103.900.000,00	90	30,00	50.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			156.000.000,00			-	
Meningkatnya Penilaian Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Penerima Penghargaan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Penghargaan)	3,00	156.000.000,00	0	3,00	-	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			36.366.000,00			-	
Meningkatnya Penyelesaian Sengketa / Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa / Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (%)	100,00	36.366.000,00	0	100,00	-	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			83.200.000,00			-	
Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	25,00	83.200.000,00	0	25,00	-	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah ((%))	17,00		67,99	17,00		2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			5.820.540.000,00			4.943.890.269,00	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			5.051.020.000,00			4.488.843.269,00	
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100,00	5.051.020.000,00	100	100,00	4.488.843.269,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik							
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			150.660.000,00			100.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (%)	30,00	150.660.000,00	5,35	30,00	100.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (%)	60,00		23,56	60,00		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL			187.030.000,00			100.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan (%)	100,00	187.030.000,00	100	100,00	100.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Akte Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan (%)	100,00		100	100,00		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Akte Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan (%)	100,00		100	100,00		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Akte Perkawian yang diterbitkan bagi yang melaporkan (%)	100,00		100	100,00		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			390.270.000,00			158.047.000,00	
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (Persentase)	100,00	390.270.000,00	0	100,00	158.047.000,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			41.560.000,00			97.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (%)	100,00	41.560.000,00	0	100,00	97.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			9.037.884.436,00			7.865.936.175,00	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			6.450.645.936,00			5.608.335.775,00	
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100,00	6.450.645.936,00	25	100,00	5.608.335.775,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik							
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA			155.857.000,00			191.600.000,00	
Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)	40,00	155.857.000,00	0	40,00	191.600.000,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA			129.881.500,00			129.500.400,00	
Meningkatnya Efektivitas Kerja Sama Desa	Persentase Fasilitasi Kerja Sama Desa (Persentase)	40,00	129.881.500,00	0	40,00	129.500.400,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			103.905.000,00			361.500.000,00	
Meningkatkan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	1,70	103.905.000,00	0	1,70	361.500.000,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase)	1,70		0	1,70		2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA			2.197.595.000,00			1.575.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT							
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	40,00	2.197.595.000,00	0	40,00	1.575.000.000,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	67,00		33,3	67,00		2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			403.650.000,00			100.000.000,00	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			119.490.000,00			20.000.000,00	
Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Angka)	17,40	119.490.000,00	0	17,40	20.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) (Angka)	2,39		0	2,39		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN			116.370.000,00			25.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
KELUARGA BERENCANA (KB)							
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat atau cara KB (%)	61,60	116.370.000,00	63,9	61,60	25.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			167.790.000,00			55.000.000,00	
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	68,50	167.790.000,00	0	68,50	55.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja (Indeks)	42,50		0	42,50		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri (%)	91,50		0	91,50		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			11.568.042.030,00			9.245.352.636,24	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			9.210.058.630,00			8.658.982.836,24	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100,00	9.210.058.630,00	100	100,00	8.658.982.836,24	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			570.709.800,00			366.369.800,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	Konektivitas Darat (Persentase)	0,79	570.709.800,00	0,70	0,79	366.369.800,00	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Provinsi (Persentase)	27,56		25.,14	27,56		2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			1.787.273.600,00			220.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut	Konektivitas Laut (%)	0,71	1.787.273.600,00	0,71	0,71	220.000.000,00	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG			11.191.695.863,00			11.911.512.778,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			8.656.218.863,00			8.351.512.778,00	
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100,00	8.656.218.863,00	100	100,00	8.351.512.778,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			1.298.815.000,00			1.360.000.000,00	
Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik (Predikat)	Informatif	1.298.815.000,00	90 (informatif)	Informatif	1.360.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			1.236.662.000,00			2.200.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis	2,73	1.236.662.000,00	0	2,73	2.200.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Elektronik (SPBE) (Indeks)						
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			14.222.627.694,00			12.755.802.208,00	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			11.154.698.194,00			12.086.177.208,00	
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100,00	11.154.698.194,00	100	100,00	12.086.177.208,00	2.17.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM			110.000.000,00			-	
Meningkatnya Kualitas Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (%)	2,50	110.000.000,00	0	2,50	-	2.17.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN			259.763.000,00			80.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
PEMERIKSAAN KOPERASI							
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (%)	4,60	259.763.000,00	0	4,60	80.000.000,00	2.17.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			155.857.000,00			80.000.000,00	
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif (%)	68,70	155.857.000,00	-	68,70	80.000.000,00	2.17.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			103.905.000,00			40.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian			103.905.000,00			40.000.000,00	2.17.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan (Koperasi)	30,00		-	30,00		2.17.0.00.0.00.01.0001 - BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			155.857.000,00			160.000.000,00	
Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (%)	9,94	155.857.000,00	9,92	9,94	160.000.000,00	2.17.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.17.07 - PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			2.033.175.000,00			109.625.000,00	
Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (%)	1,90	2.033.175.000,00	-	1,90	109.625.000,00	2.17.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri			0,00				2.17.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			249.372.500,00			200.000.000,00	
Meningkatnya Daya Saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (%)	2,20	249.372.500,00	-	2,20	200.000.000,00	2.17.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			9.228.185.622,00			7.447.914.991,00	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			8.478.348.622,00			6.593.364.991,00	
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100,00	8.478.348.622,00	100	100,00	6.593.364.991,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik							
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			156.242.000,00			200.000.000,00	
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (%)	100,00	156.242.000,00	29,92	100,00	200.000.000,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			194.161.000,00			200.000.000,00	
Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor yang Berinvestasi (Investor)	2,00	194.161.000,00	-	2,00	221.874.600,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			194.874.000,00			224.550.000,00	
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui	Rata-rata lama pengurusan dokumen perijinan usaha (Hari)	15,00	194.874.000,00	-	15,00	224.550.000,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik							
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			174.280.000,00			200.000.000,00	
Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (%)	100,00	174.280.000,00	-	100,00	200.000.000,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			30.280.000,00			30.000.000,00	
Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data Dan Informasi Penanaman Modal (%)	75,00	30.280.000,00	100	75,00	30.000.000,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			17.573.422.638,00			19.717.201.736,68	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG			7.391.720.388,00			7.470.394.849,68	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100,00	7.391.720.388,00	100	100,00	7.470.394.849,68	2.19.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			940.342.000,00			938.634.800,00	
Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	4,30	940.342.000,00	4	4,30	938.634.800,00	2.19.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			8.462.071.250,00			10.528.883.087,00	
Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)	54,00	8.462.071.250,00	45	54,00	10.528.883.087,00	2.19.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			779.289.000,00			779.289.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Kualitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	5,20	779.289.000,00	5	5,20	779.289.000,00	2.19.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			148.376.650,00			600.000.000,00	
2.20.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			0,00			-	
-			0,00	-		-	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			148.376.650,00			600.000.000,00	
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Indeks)	2,45	148.376.650,00	0	2,45	600.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			238.461.400,00			350.000.600,00	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			238.461.400,00			350.000.600,00	
Meningkatnya keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah (Indeks Kami) (Skor)	304,00	238.461.400,00	267	304,00	350.000.600,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			7.591.912.670,00			10.909.630.000,00	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			1.771.675.170,00			1.100.000.000,00	
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	60,00	1.771.675.170,00	80	60,00	1.100.000.000,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			1.155.000.000,00			3.850.000.000,00	
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kesenian Tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	100,00	1.155.000.000,00	70	100,00	3.850.000.000,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			231.000.000,00			300.000.000,00	
Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Informasi Sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	25,00	231.000.000,00	97	25,00	300.000.000,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			1.443.750.000,00			3.850.000.000,00	
Meningkatnya Warisan Budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)	100,00	1.443.750.000,00	55,6	100,00	3.850.000.000,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	100,00		54,05	100,00		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			2.990.487.500,00			1.809.630.000,00	
Meningkatnya Tata Kelola Museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase)	52,00	2.990.487.500,00	70,71	52,00	1.809.630.000,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			9.832.987.152,00			8.377.870.518,84	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			9.164.387.352,00			8.012.870.518,84	
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100,00	9.164.387.352,00	25	100,00	8.012.870.518,84	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			531.122.900,00			265.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Persentase Perpustakaan yang dibina sesuai SNP (%)	39,00	531.122.900,00	0	39,00	265.000.000,00	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			137.476.900,00			100.000.000,00	
Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (%)	17,00	137.476.900,00	17	17,00	100.000.000,00	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			374.394.000,00			165.000.000,00	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			199.394.000,00			145.000.000,00	
Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis	Persentase perangkat daerah yang memiliki daftar arsip dinamis (%)	16,00	199.394.000,00	13,9	16,00	145.000.000,00	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			175.000.000,00			20.000.000,00	
Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip sesuai dengan NSPK	Jumlah Arsip yang diselamatkan dan dimusnahkan (Nilai)	200,00	175.000.000,00	0	200,00	20.000.000,00	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			70.159.287.453,00			65.551.805.158,88	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG			47.726.777.353,00			45.179.459.558,88	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100,00	47.726.777.353,00	100	100,00	45.179.459.558,88	3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL			1.232.980.000,00			1.180.962.000,00	
Terwujudnya pengelolaan pulau-pulau kecil dan pesisir yang berkelanjutan	Luasan Kawasan Konservasi (Ha) (Ha)	3.318.970,89	1.232.980.000,00	#########	3.318.970,89	1.180.962.000,00	3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			16.574.452.900,00			14.357.269.600,00	
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	268.638,25	16.574.452.900,00	488.896,60	268.638,25	14.357.269.600,00	3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN			2.815.589.000,00			2.951.605.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
PERIKANAN BUDIDAYA							
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	129.675,00	2.815.589.000,00	204.336,91	129.675,00	2.951.605.000,00	3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			1.261.756.200,00			1.340.410.800,00	
Meningkatnya Tingkat kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturaan perundang-undangan	Tingkat kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturaan perundang-undangan (%)	47,25	1.261.756.200,00	87,5	47,25	1.340.410.800,00	3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			547.732.000,00			542.098.200,00	
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Angka)	41,48	547.732.000,00	41,26	41,48	542.098.200,00	3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			13.295.807.100,00			10.751.770.006,00	
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			11.004.701.600,00			8.483.783.780,00	
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100,00	11.004.701.600,00	100	100,00	8.483.783.780,00	3.26.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik							
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			1.106.590.500,00			1.499.999.600,00	
Meningkatnya daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi pariwisata yang dikelola, ditata, dan dikembangkan (Destinasi)	4,00	1.106.590.500,00	-	4,00	1.499.999.600,00	3.26.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			420.816.000,00			207.986.726,00	
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan (%)	5,00	420.816.000,00	1,94	5,00	207.986.726,00	3.26.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			270.150.000,00			235.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	1,94	270.150.000,00	-	1,94	235.000.000,00	3.26.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			493.549.000,00			324.999.900,00	
Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mendapat pelatihan dan sertifikasi (%)	0,96	493.549.000,00	-	0,96	324.999.900,00	3.26.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			72.761.933.390,00			62.023.418.391,00	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			49.479.686.690,00			46.888.698.512,00	
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100,00	49.479.686.690,00	95,45	100,00	46.888.698.512,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			16.401.543.200,00			8.877.398.879,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
Petani memperoleh hasil dan nilai jual yang lebih baik	Peningkatan Produksi Hortikultura (Angka)	17.004,00	16.401.543.200,00	12610	17.004,00	8.877.398.879,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN
	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Angka)	4.003,00		4120	4.003,00		3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN
	Peningkatan Produksi Perkebunan (Angka)	163.360,00		-	163.360,00		3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Angka)	122.761,00		109.820	122.761,00		3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			4.954.912.500,00			4.063.284.800,00	
Petani memperoleh hasil dan nilai jual yang lebih baik	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	######	4.954.912.500,00	32.964,43	32.964,43	4.063.284.800,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			533.468.000,00			560.576.600,00	
Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (%)	89,00	533.468.000,00	63	89,00	560.576.600,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN
	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (%)	89,00		86	89,00		3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			261.622.000,00			400.000.000,00	
Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian			261.622.000,00			400.000.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN
	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (%)	77,50		93	77,50		3.27.0.00.0.00.01.0002 - BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BPTPHP) PROVINSI MALUKU
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			83.124.000,00			83.124.000,00	
Meningkatnya Kualitas dan Kemudahan Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi (Angka)	8,00	83.124.000,00	6	8,00	83.124.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			1.047.577.000,00			1.150.335.600,00	
Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani (Angka)	62,46	1.047.577.000,00	56	62,46	1.150.335.600,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN
3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			64.492.284.459,00			55.149.103.276,00	
3.28.01 - PROGRAM PENUNJANG			45.733.989.459,00			39.833.052.861,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100,00	45.733.989.459,00	100	100,00	39.833.052.861,00	3.28.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEHUTANAN
3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			16.524.868.000,00			13.974.314.315,00	
Meningkatnya produktivitas hasil hutan	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (%) (%)	0,57	16.524.868.000,00	0,36	0,57	13.974.314.315,00	3.28.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEHUTANAN
	Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi (Ha)	100,00		100	100,00		3.28.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEHUTANAN
3.28.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			2.072.816.000,00			1.201.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani yang terfasilitasi (Kel) (Kelompok)	15,00	2.072.816.000,00	8	15,00	1.201.000.000,00	3.28.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEHUTANAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (Kel) (Kelompok)	14,00		28	14,00		3.28.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEHUTANAN
3.28.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)			160.611.000,00			140.736.100,00	
Meningkatnya kelestarian dan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS)	Terkelolanya DAS Lintas Kabupaten/Kota (Kegiatan)	4,00	160.611.000,00	-	4,00	140.736.100,00	3.28.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEHUTANAN
3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			12.398.866.204,00			12.140.254.081,00	
3.29.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			9.749.273.504,00			9.490.668.381,00	
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100,00	9.749.273.504,00	100	100,00	9.490.668.381,00	3.29.0.00.0.00.01.0000 - DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.29.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN			285.739.000,00			285.732.000,00	
Meningkatnya Tata Kelola Kegeologian	Jumlah Volume Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota (Rp. Juta Per Tahun)	749,00	285.739.000,00	-	749,00	285.732.000,00	3.29.0.00.0.00.01.0000 - DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
	Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan air Tanah di Wilayah Sungai Lintas kabupaten/Kota (Km²)	1.739,00		-	1.739,00		3.29.0.00.0.00.01.0000 - DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3.29.03 - PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA			285.749.700,00			285.749.700,00	
Meningkatnya Tata Kelola Mineral dan Batu Bara	Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR (%)	2,00	285.749.700,00	-	2,00	285.749.700,00	3.29.0.00.0.00.01.0000 - DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
	Luas WPR yang Diusulkan Pemerintah Daerah (Meter)	1,00		-	1,00		3.29.0.00.0.00.01.0000 - DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3.29.05 - PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN			1.298.815.000,00			1.298.815.000,00	
Meningkatnya Tata Kelola Energi Baru Terbarukan	Intensitas Energi Primer (SBM/Milyar Rupiah)	213.870,50	1.298.815.000,00	-	213.870,50	1.298.815.000,00	3.29.0.00.0.00.01.0000 - DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
	Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik yang bersumber dari Pembangkit EBT (Rumah Tangga)	150,00		25	150,00		3.29.0.00.0.00.01.0000 - DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	34,30		-	34,30		3.29.0.00.0.00.01.0000 - DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3.29.06 - PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN			779.289.000,00			779.289.000,00	
Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kelistrikan	Konsumsi Listrik per Kapita (Kwh/Kapita)	441,50	779.289.000,00	-	441,50	779.289.000,00	3.29.0.00.0.00.01.0000 - DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
	Rasio Elektrifikasi (%)	99,70		99,67	99,70		3.29.0.00.0.00.01.0000 - DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			5.681.974.400,00			5.625.715.626,00	
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			0,00			224.350.753,00	
-			0,00			224.350.753,00	
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			88.319.400,00			191.744.000,00	
Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan dan Pendaftaran Berusaha	Jumlah Izin Usaha Perdagangan Terdaftar yang Difasilitasi (Jenis) (Jenis)	2-4	88.319.400,00	-	2-4	191.744.000,00	3.31.3.30.0.00.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			4.156.208.000,00			3.661.326.873,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang yang Efisien, Merata dan Terintegrasi	Jumlah Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Unit)	1,00	4.156.208.000,00	1	1,00	3.661.326.873,00	3.31.3.30.0.00.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING			571.478.000,00			964.756.000,00	
Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (%)	3.5-4	571.478.000,00	1,51	3.5-4	964.756.000,00	3.31.3.30.0.00.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			467.573.000,00			349.120.000,00	
Meningkatnya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) (%)	3.22-3.26	467.573.000,00	4,5	3.22-3.26	349.120.000,00	3.31.3.30.0.00.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor (Pelaku Usaha)	8,00		10	8,00		3.31.3.30.0.00.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			323.396.000,00			234.418.000,00	
Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk	Persentase Kepatuhan Berusaha (%) (%)	92,00	323.396.000,00	160,5	92,00	234.418.000,00	3.31.3.30.0.00.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah komoditi potensial yang diuji (Jenis) (Jenis)	4,00		6	4,00		3.31.3.30.0.00.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
	Jumlah Penanganan Pengaduan Konsumen (Kasus) (Kasus)	5,00		5	5,00		3.31.3.30.0.00.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah sampel yang diuji (Sampel)	110,00		141	110,00		3.31.3.30.0.00.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			75.000.000,00			-	
Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan (%)	70,00	75.000.000,00	50	70,00		3.31.3.30.0.00.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			15.302.917.882,00			13.522.550.294,00	
3.31.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			10.599.071.882,00			9.879.653.114,00	
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100,00	10.599.071.882,00	100	100,00	9.879.653.114,00	3.31.3.30.0.00.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
pengelolaan kinerja pelayanan publik							
3.31.02 - PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			4.703.846.000,00			3.642.897.180,00	
Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri (%) (%)	3,50	4.703.846.000,00	11,89%	3,50	3.642.897.180,00	3.31.3.30.0.00.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			1.359.763.000,00			60.000.000,00	
3.32.02 - PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI			1.000.000.000,00			-	
Meningkatnya Pelaksanaan Transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi yang dilaksanakan (%)	100,00	1.000.000.000,00	-	100,00	-	2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI			359.763.000,00			60.000.000,00	
Meningkatnya Pemberdayaan dan Kapasitas Transmigran dalam Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (%)	0,50	359.763.000,00	-	0,50	60.000.000,00	2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH			388.545.807.146,00			244.917.358.144,25	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN			247.674.479.117,00			122.809.299.198,25	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100,00	218.029.479.117,00	100	100,00	122.809.299.198,25	4.01.0.00.0.00.00.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pimpinan Daerah			3.025.000.000,00				4.01.0.00.0.00.00.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Kebijakan Layanan Administrasi Pimpinan Daerah (%)	100,00		100	100,00		4.01.0.00.0.00.00.0006 - BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Umum Daerah			26.620.000.000,00				4.01.0.00.0.00.00.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Kebijakan Layanan Umum Daerah (%)	100,00		100	100,00		4.01.0.00.0.00.00.0005 - BIRO UMUM
4.01.02 - PROGRAM PENATAAN ORGANISASI			1.974.500.000,00			2.232.000.000,00	
Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah			1.974.500.000,00			2.232.000.000,00	4.01.0.00.0.00.00.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Penyusunan Kebijakan Daerah	100,00		70	100,00		4.01.0.00.0.00.00.0003 - BIRO ORGANISASI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Bidang Organisasi yang ditindaklanjuti (Persentase)						
4.01.03 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH			15.575.000.000,00			14.292.513.215,00	
Meningkatnya kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah			15.575.000.000,00			14.292.513.215,00	4.01.0.00.0.00.00.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Fasilitasi Kerjasama Daerah (%)	100,00		100	100,00		4.01.0.00.0.00.00.0001 - BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	Persentase Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah (%)	100,00		100	100,00		4.01.0.00.0.00.00.0001 - BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4.01.04 - PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT			114.823.800.000,00			98.247.360.701,00	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			114.823.800.000,00			98.247.360.701,00	4.01.0.00.0.00.00.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Difasilitasi (%)	100,00		100	100,00		4.01.0.00.0.00.00.0004 - BIRO KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
4.01.05 - PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM			2.263.599.000,00			2.264.280.000,00	
Meningkatnya Kualitas Produk Hukum yang dihasilkan			2.263.599.000,00			2.264.280.000,00	4.01.0.00.0.00.00.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Bantuan Hukum yang tertangani (%)	100,00		100	100,00		4.01.0.00.0.00.00.0002 - BIRO HUKUM

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM (IUP 45) (%)	65,00		0	65,00		4.01.0.00.0.00.00.0002 - BIRO HUKUM
	Persentase Produk Hukum yang di fasilitasi (%)	100,00		100	100,00		4.01.0.00.0.00.00.0002 - BIRO HUKUM
4.01.06 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			1.375.621.229,00			1.375.597.230,00	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan			1.375.621.229,00			1.375.597.230,00	4.01.0.00.0.00.00.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian yang DIfasilitasi (%)	100,00		99	100,00		4.01.0.00.0.00.00.0007 - BIRO PEREKONOMIAN DAERAH
	Return on Asset (ROA) BUMD Perangkat Daerah (IUP 45) (%)	2,83		0	2,83		4.01.0.00.0.00.00.0007 - BIRO PEREKONOMIAN DAERAH
4.01.07 - PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			2.887.500.000,00			1.725.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa			2.887.500.000,00			1.725.000.000,00	4.01.0.00.0.00.00.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Tingkat Kematangan UKPBJ (%)	100,00		-	100,00		4.01.0.00.0.00.00.0008 - BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.01.08 - PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			1.971.307.800,00			1.971.307.800,00	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan			1.971.307.800,00			1.971.307.800,00	4.01.0.00.0.00.00.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan yang ditindaklanjuti dengan Baik (%)	100,00		100	100,00		4.01.0.00.0.00.00.0008 - BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4.02 - SEKRETARIAT DPRD			145.089.278.012,00			148.277.011.118,00	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			83.228.533.012,00			79.818.680.418,00	
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100,00	83.228.533.012,00	100	100,00	79.818.680.418,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN			61.860.745.000,00			68.458.330.700,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
TUGAS DAN FUNGSI DPRD							
Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Ketetapan)	Tepat Waktu	26.870.887.433,00	Tepat Waktu	Tepat Waktu	68.458.330.700,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD
Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	100,00	34.989.857.567,00	100	100,00		4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD
	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100,00		100	100,00		4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD
5.01 - PERENCANAAN			27.268.449.319,92			18.388.044.296,00	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			15.425.943.914,00			12.177.917.296,00	
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100,00	15.425.943.914,00	100	100,00	12.177.917.296,00	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			6.671.069.020,00			3.468.358.000,00	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	100,00	6.671.069.020,00	100	100,00	3.468.358.000,00	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	100,00		100	100,00		5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			5.171.436.385,92			2.741.769.000,00	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	100,00	2.205.000.000,00	-	100,00	2.741.769.000,00	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembagunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	100,00	1.312.686.385,92	-	100,00		5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	Aset Dana Pensiun/PDRB ((%))	0,31	1.653.750.000,00	-	0,31		5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Bidang Perekonomian dan SDA							PEMBANGUNAN DAERAH
	Nilai Transaksi Saham Per kapita Per Provinsi (Rupiah) (Nilai)	1.191.817,71		-	1.191.817,71		5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	100,00		-	100,00		5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB ((%))	25,84		-	25,84		5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Total Kredit/PDRB ((%))	31,61			31,61		5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.02 - KEUANGAN			408.031.203.303,00			290.746.455.964,92	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			67.963.148.950,00			46.411.370.858,68	
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100,00	67.963.148.950,00	100	100,00	17.098.977.215,68	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik							
	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	B		E	B	29.312.393.643,00	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100,00		100	100,00		5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			328.887.806.795,00			240.676.015.556,24	
Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	18,00	321.909.793.900,00	30,82	18,00	240.562.343.556,24	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Persentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD (%)	0,78		20,84	0,78		5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu (%)	100,00	2.918.323.082,00	100	100,00		5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Persentase Penurunan SILPA (%)	5,00	2.892.652.613,00	95,54	5,00		5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (%)	93,90		87,82	93,90		5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan	Efektifitas pendapatan daerah (persentase) (%)	95,00	1.167.037.200,00	88,04	95,00	113.672.000,00	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			1.787.332.383,00			927.427.200,00	
Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (%)	100,00	1.787.332.383,00	-	100,00	200.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (%)	7,20		52,3	7,20	727.427.200,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			9.392.915.175,00			2.731.642.350,00	
Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan			9.392.915.175,00			2.731.642.350,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Efektifitas pendapatan daerah (persentase) (%)	95,00		88,04	95,00		5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.03 - KEPEGAWAIAN			13.116.072.558,00			8.302.956.432,00	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			9.536.944.850,00			6.462.118.632,00	
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel,	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100,00	9.536.944.850,00	100	100,00	6.462.118.632,00	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik							
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			3.579.127.708,00			1.840.837.800,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian	Nilai Aspek Manajemen Kinerja, Pengajian, Penghragaan dan Disiplin, dan Perlindungan dan Pelayanan (Nilai)	122,00	3.579.127.708,00	109,5	122,00	1.840.837.800,00	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	Nilai Aspek Pengadaan, Perencanaan Kebutuhan, Sistem Informasi (Nilai)	102,00		87	102,00		5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	Nilai Aspek Promosi, Mutasi dan Pengembangan Karier (Nilai)	61,00		55	61,00		5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			17.011.716.000,00			14.329.102.267,75	
5.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			12.500.000.000,00			11.129.102.267,75	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100,00	12.500.000.000,00	100	100,00	11.129.102.267,75	5.04.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			4.511.716.000,00			3.200.000.000,00	
Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Dasar, Kader, Manajerial, dan Fungsional	Persentase ASN yang menyelesaikan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (%)	100,00	1.678.520.000,00	100	100,00	3.200.000.000,00	5.04.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
Meningkatnya Layanan Penjamin Mutu dan Sertifikasi Kompetensi	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (Persentase)	100,00	1.731.600.000,00	100	100,00		5.04.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (%)	100,00	1.101.596.000,00	100	100,00		5.04.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			8.532.375.000,00			250.000.000,00	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN			2.954.875.000,00			-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
PENGEMBANGAN DAERAH							
Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	70,00	2.954.875.000,00	-	70,00	-	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH			5.577.500.000,00			250.000.000,00	
Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah dalam Pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	85,00	5.577.500.000,00	-	85,00	250.000.000,00	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.06 - PENGELOLAAN PERBATASAN			7.327.240.976,00			3.749.117.254,00	
5.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			4.415.389.456,00			3.647.130.754,00	
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100,00	4.415.389.456,00	100	100,00	3.647.130.754,00	5.06.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik							
5.06.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN			2.911.851.520,00			101.986.500,00	
Meningkatnya pemanfaatan kawasan perbatasan	Persentase infrastruktur terbangun di kawasan perbatasan (Persentase)	72,00	2.911.851.520,00	100	72,00	101.986.500,00	5.06.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
5.07 - PENGELOLAAN PENGHUBUNG			11.123.559.090,00			8.606.105.991,00	
5.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			8.741.692.036,00			7.517.970.100,00	
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100,00	8.741.692.036,00	100	100,00	7.517.970.100,00	5.07.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGHUBUNG
5.07.02 - PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG			2.381.867.054,00			1.088.135.891,00	
Meningkatnya Layanan	Persentase Layanan Penghubung (%)	100,00	2.381.867.054,00	100	100,00	1.088.135.891,00	5.07.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGHUBUNG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penghubung Pemerintah Daerah							
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH			28.862.546.000,00			15.840.332.941,00	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			19.271.010.000,00			14.119.000.000,00	
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100,00	19.271.010.000,00	100	100,00	14.119.000.000,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
	Presentase layanan urusan Penunjang Pemerintahan Daerah INSPEKTORAT (%)	100,00		85,71	100,00		6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran n-1 (%)	78,00		79,98	78,00		6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			7.877.100.000,00			1.395.000.000,00	
Menurunnya Penyelewengan atau Penyimpangan, baik	Persentase Implementasi Program	100,00	7.877.100.000,00	100	100,00	1.395.000.000,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
yang Bersifat Anggaran ataupun Proses dan Kewenangan	Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) (%)						
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			1.714.436.000,00			326.332.941,00	
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Nilai Pencegahan Korupsi (%)	75,00	1.714.436.000,00	82	75,00	326.332.941,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			19.278.000.000,00			25.875.066.140,00	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			7.968.240.000,00			7.968.230.590,00	
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100,00	7.968.240.000,00	100	100,00	7.968.230.590,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN			4.856.985.000,00			4.856.985.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN							
Meningkatnya Kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	100,00	4.856.985.000,00	100	100,00	4.856.985.000,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			3.373.650.000,00			3.373.649.800,00	
Meningkatnya Etika dan Budaya politik	Persentase Kebijakan Pendidikan Politik oleh Pemerintah Daerah (%)	100,00	3.373.650.000,00	100	100,00	3.373.649.800,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (%)	100,00			100,00		8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			1.472.625.000,00			8.069.701.000,00	
Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang aktif (%)	69,00	1.472.625.000,00		69,00	8.069.701.000,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025 – 2029 TARGET 2027		REALISASI KINERJA 2025	TARGET RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			374.850.000,00			374.850.000,00	
Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat	Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan (%)	100,00	374.850.000,00		100,00	374.850.000,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			1.231.650.000,00			1.231.649.750,00	
Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan (%)	100,00	1.231.650.000,00	100	100,00	1.231.649.750,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TOTAL KESELURUHAN			3.491.562.877.040,92			2.881.118.503.926,20	

6.3 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dan Prakiraan Maju

Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan daerah dalam satu tahun anggaran. Dokumen ini memuat arah kebijakan, strategi, serta prioritas yang menjadi tanggung jawab masing-masing perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Program dan kegiatan yang direncanakan diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien. Dalam penyusunannya, perangkat daerah memperhatikan keterpaduan antar sektor, konsistensi dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi (RPJMD dan kebijakan nasional), serta prinsip akuntabilitas dan transparansi, dengan demikian setiap program dan kegiatan yang dirumuskan tidak hanya berorientasi pada output, tetapi juga outcome yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Prakiraan maju merupakan proyeksi rencana program dan kegiatan untuk tahun-tahun berikutnya setelah tahun berjalan. Prakiraan ini berfungsi sebagai gambaran awal arah pembangunan jangka menengah, sekaligus sebagai antisipasi terhadap kebutuhan, tantangan, dan peluang yang mungkin muncul di masa depan. Prakiraan maju mencakup estimasi kebutuhan anggaran, rencana lanjutan dari program multi-year, serta prioritas pembangunan yang tetap konsisten dengan visi dan misi daerah. Dengan adanya rencana program dan kegiatan serta prakiraan maju, perangkat daerah memiliki pedoman yang jelas dalam melaksanakan pembangunan secara berkesinambungan. Hal ini juga memudahkan proses pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih terarah, terukur dan berkelanjutan. Pogram/Kegiatan/Sub Kegiatan penunjang tujuan dan sasaran untuk perencanaan Tahun 2027 secara rinci dapat dilihat pada lampiran RKPD Provinsi Maluku Tahun 2027.

6.4 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 untuk Pencapaian Program Nasional

Tindak lanjut rencana kerja dan pendanaan yang mendukung pencapaian target *outcome* prioritas nasional masing-masing urusan dan tematik pembangunan hasil pembahasan Rakortekrenbang Tahun 2026 menekankan pentingnya keterpaduan antara kebijakan pusat dan daerah. Dokumen ini menjadi pedoman strategis untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan yang direncanakan mampu mendukung pencapaian target *outcome* prioritas nasional secara konsisten dan terukur. Dengan demikian, arah

pembangunan tidak hanya berorientasi pada output administratif, tetapi lebih pada *outcome* yang memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan RKP Tahun 2027, pemerintah daerah berkomitmen untuk mengintegrasikan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) ke dalam dokumen perencanaan daerah. Dalam rangka mendukung program tersebut diwujudkan melalui sinkronisasi kebijakan dan program antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga arah pembangunan daerah selaras dengan prioritas nasional. Penguatan alokasi anggaran pada program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target PKPN, dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya. Kolaborasi lintas sektor dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program prioritas, guna memastikan keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan serta dibutuhkan monitoring dan evaluasi berbasis indikator nasional, sehingga capaian pembangunan daerah dapat langsung dikaitkan dengan target RKP Tahun 2027. Dengan demikian, RKPD Tahun 2027 tidak hanya menjadi instrumen perencanaan pembangunan daerah, tetapi juga menjadi bagian integral dari upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional melalui dukungan penuh terhadap PKPN.

Berikut tabel rencana kerja perangkat daerah dan pendanaan Tahun 2027 untuk pencapaian Program Nasional berdasarkan PRO-SN/tematik pembangunan dan dukungan terhadap Asta Cita serta tabel rekapan dukungan program dan kegiatan Pemerintah Daerah terhadap PKPN.

Tabel 6.4

Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2027 Hasil Kesepakatan Rakortekbang Tahun 2026

berdasarkan Pro – SN/Tematik Pembangunan

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU RKPD 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1.	DIGITALISASI PEMBELAJARAN									
	Perluasan Akses Pendidikan	Pembangunan dan Revitalisasi SMA Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	55	495	3.600.000.000
2.	EKONOMI SYARIAH									
			4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Dokumen	2	2	303.090.000
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang	160	200	990.261.800

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU RKPD 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
			3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02.1.04.0018	Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata	Pelaku Usaha	20	60	248.390.900
3.	IRIGASI YANG MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN									
	Ketahanan Pangan	Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan)	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	20	45	1.000.000.000
4.	JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)									
	Kesehatan untuk Semua	Jaminan Kesehatan Nasional	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05.1.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin	Kab/Kota	11	5	990.261.800
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	2	1	44.000.000.000

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU RKPD 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
			2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.04.1.02.0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	Dokumen	2	5	100.000.000
5.	KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH									
	Ketahanan Pangan	Kampung Nelayan Merah Putih	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	1	1	5.500.000.000
6.	KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH									
	Pertumbuhan Ekonomi	Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih								
7.	MAKAN BERGIZI GRATIS									
	Perluasan Akses Pendidikan	Makan Bergizi Gratis	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	55	495	3.600.000.000

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU RKPD 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1	2.235.750.000
			3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Kegiatan	2	8	284.359.200
8.	MASYARAKAT ADAT									
			2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05.1.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1	1	100.000.000

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU RKPD 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
			2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05.1.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1	1	100.000.000
9.	MENCETAK DAN MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS LAHAN PERTANIAN (SAWAH/LUMBUNG PANGAN/FOOD ESTATE)									
	Ketahanan Pangan	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate)	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.02.1.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	Unit	4	6	98.860.000
10.	OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM									

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU RKPD 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
	Pengentasan Kemiskinan	Penanggulangan Kemiskinan	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit	15	14	533.190.000
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang	480	200	990.261.800
11.	PANGAN AKUATIK									
	Ketahanan Pangan	Pangan Akuatik	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03.1.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	1	38	7.999.980.000
			3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha	3318970.89	10	646.540.000
12.	PELESTARIAN LINGKUNGAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH									

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU RKPD 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
	Pertumbuhan Ekonomi	Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.04.1.01.0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	Dokumen	0	1	500.000.000
13.	PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT LENGKAP BERKUALITAS DI KABUPATEN/KOTA									
	Kesehatan untuk Semua	Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	5	30	1.257.499.999

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU RKPD 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	457	422	18.066.009.230
14.	PEMBANGUNAN TIGA JUTA RUMAH									
	Pengentasan Kemiskinan	Pembangunan 3 Juta Rumah	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02.1.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	Unit Rumah	3	10	1.000.000.000
			1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.08.1.01.0023	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Pemerintah Kabupaten/Kotan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Kabupaten/Kota	0	11	350.000.000

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU RKPD 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
			1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02.1.03.0008	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi yang Terbangun	Unit Rumah	17	70	3.512.894.812
15.	PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA									
			8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Orang	56	54	1.890.000.000
			8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	900	150	1.732.500.000
16.	PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS									
	Kesehatan untuk Semua	Pemeriksaan Kesehatan Gratis	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.1.02.0038	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Laporan	1	1	650.000.450

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU RKPD 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
			2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.04.1.02.0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	Dokumen	2	5	100.000.000
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.1.02.0032	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Laporan	9	14	2.301.377.000
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	2	2	44.071.500.000
17.	PENANGGULANGAN BENCANA									
			1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03.1.04.0009	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	Kegiatan	1	1	27.780.000

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU RKPD 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
			1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03.1.04.0013	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Orang	15	25	12.220.000
18.	PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING									
	Kesehatan untuk Semua	Stunting	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	2	2	2.235.750.000
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	1	1	1.292.500.000

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU RKPD 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
			1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03.1.01.0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kabupaten/Kota	11	2	300.000.000
			2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03.1.01.0006	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Dokumen		1	46.060.000
19.	PENDAYAGUNAAN PENYULUH PERTANIAN									
	Ketahanan Pangan	Pendayagunaan Penyuluh Pertanian	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07.1.01.0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	30	31	180.586.000
			3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07.1.01.0006	Pembinaan penyuluh pertanian swadaya dan swasta lintas kabupaten/kota	Jumlah Penyuluh pertanian swadaya dan/atau penyuluh pertanian swasta yang mendapatkan pembinaan	Orang	210	130	477.030.600
20.	PENGARUSUTAMAAN GENDER									
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik	72000	1275	22.000.000.000

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU RKPD 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	1	1	1.292.500.000
			2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02.1.01.0013	Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Lembaga	2	2	6.175.000
21.	PENGENDALIAN INFLASI									
	Pertumbuhan Ekonomi	Pengendalian Inflasi	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03.1.01.0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins	Laporan	3	3	109.565.000
			2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03.1.01.0015	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi	Dokumen	1	1	7.900.000
22.	PENUNTASAN TUBERKULOSIS (TBC)									

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU RKPD 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
	Kesehatan untuk Semua	Penuntasan TBC	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.04.1.02.0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	Dokumen	2	5	100.000.000
23.	PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN REVITALISASI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH									
	Perluasan Akses Pendidikan	Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	2	2	850.000.000
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	2	2	550.000.000
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	2	2	500.000.000
24.	PERLINDUNGAN ANAK									
			5.01 PERENCANAAN	5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	Berita Acara	1	1	650.000.000

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU RKPD 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	1	1	1.292.500.000
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	25	115	73.400.000
			2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.06.1.02.0016	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan.	Orang	30	30	10.000.000

Tabel 6.5

Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2027 Hasil Kesepakatan Rakortekbang Tahun 2026 yang Mendukung Asta Cita

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU RKPD 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1.	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan usaha	17	17	90.566.500
							2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan usaha	12	12	115.075.000

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU RKPD 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
2.	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.30.03.1.01.0002	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Laporan		1	3.661.326.873
					3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	Produk	3	2	349.120.000
3.	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dok	1	1	2.133.439.000
4.	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM		7,5	2.000.000.000

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU RKPD 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru										
					1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	Liter/ Detik		7	5.709.456.914
							1.03.03.1.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun	Dok		5	1.000.000.000
				Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.1.02.0012	Koordinasi Fasilitasi Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Surat Hasil Fasilitasi Ranperkada RDTR Kabupaten/KotaÂ	Dok	10	1	50.000.000
				Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0009	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	KM	5	5	15.170.000.000

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU RKPD 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun	Dok	5	5	1.000.000.000
					1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Dok	1	1.00	500.000.000
					1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM	0.86	0.86	3.592.403.600
							1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	KM	5.31	2	10.050.000.000
					1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.03.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Paket Pekerjaan	11	11	202.029.650
5.	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangk	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN	2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan	Unit		1	70.000.000

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU RKPD 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
		BIDANG PERHUBUNGAN	an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Provinsi		LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Jalan Provinsi	Provinsi yang Tersedia				
				Terwujudnya Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	Unit	1	1	70.000.000
6.	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong	Meningkatnya ketahanan pangan	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN	2.09.03.1.01.0006	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Dok	1	1	46.060.000

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU RKPD 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
			kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru			PANGAN MASYARAKAT							
							2.09.03.1.01.0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins	Laporan	3	3	109.565.000
					2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dok	1	1	15.000.000
							2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Laporan	1	1	6.924.000

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU RKPD 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
7.	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.01.00 02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha		10	646.540.000
					3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.1.01.00 10	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Hari Operasi	20	20	93.977.000
							3.25.05.1.01.00 13	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha		5	27.490.000
							3.25.05.1.01.00 14	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa	Pelaku Usaha	50	41	262.403.000

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU RKPD 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
								dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				
							3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha		29	246.428.800
							3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha		32	102.158.000
							3.25.05.1.02.0005	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya	Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksa kepatuhannya sesuai	Pelaku Usaha		2	8.000.000

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU RKPD 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
								sesuai kewenangan provinsi	kewenangan provinsi				
8.	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Produksi Pertanian	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	2	2	267.497.900
					3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	Dok	1	1	400.000.000
							3.27.03.1.01.0018	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola di tingkat Provinsi	Dok	1	1	150.000.000

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU RKPD 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
								Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi					
9.	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan pengelolaan hutan lestari sebagai sumber pertumbuhan baru, pengentasan kemiskinan, serta ketahanan pangan, air dan energi	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04.00 04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	10	4	111.217.700
							3.28.03.1.04.00 09	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	Ha	20	31	1.578.123.000
					3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01.00 09	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit	15	14	533.190.000
							3.28.05.1.01.00 11	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat	Klp	15	24	667.810.000

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU RKPD 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
								Kelompok Tani Hutan	Kapasitas Kelembagaannya				
10.	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pencapaian Ketahanan Energi	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	unit		150	841.589.100
					3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Unit		92	550.000.000
				Swasembada Energi	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Lap	3	3	88.448.100
							3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	unit	150	150	841.589.100

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU RKPD 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
					3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Unit	55	92	779.289.000
11.	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.1.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	4	4	250.002.000
							2.21.02.1.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan	Dok	2	2.00	44.996.600

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU RKPD 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
								Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggara				
12.	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi	Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.1.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Usaha/ Kegiatan	7	5.00	50.000.000

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU RKPD 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
			antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.										
13.	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	17	17.00	1.265.601.054
							1.04.03.1.02.0011	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Unit Rumah	14	14.00	1.840.000.000
					1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN	1.04.05.1.01.0008	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Lokasi PSU Permukiman yang Dilaksanakan Perbaikan	Lokasi	4	4.00	1.100.000.000

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU RKPD 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
						UTILITAS UMUM (PSU)							
							1.04.05.1.01.0009	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	11	11.00	1.757.288.000
14.	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.04.1.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	KK		100	60.000.000
15.	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Lembaga	8	5	61.544.000

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU RKPD 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
			perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.										
							1.06.02.1.02.0008	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	Orang		30	49.998.800
					1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang		200	990.261.800
16.	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	60	20	154.650.000

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU RKPD 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
			sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.										
17.	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dok		1	60.900.000

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU RKPD 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
			masyarakat yang adil dan makmur.										
				Meningkatnya Kemandirian Pedesaan yang Berkelanjutan yang didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan Desa	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	2.13.03.1.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dok	1	1	75.500.000
18.	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.1.01.0016	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	%		75	219.131.000
							2.20.02.1.01.0019	Peningkatan kualitas statistik sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	%	75	75	305.869.000
							2.20.02.1.01.0022	Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik pusat dan/atau daerah	%	10	10	75.000.000

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU RKPD 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
19.	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01.0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Laporan			600.000.000
							2.16.02.1.01.0022	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan			
							2.16.02.1.01.0028	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (strakom tematik dan strakom isu daerah)	Dok	2	2	50.000.000
							2.16.02.1.01.0029	Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	Orang	899311	899311	650.000.000

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU RKPD 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
					2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02.0032	Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	PD		48 titik	1.661.418.800
							2.16.03.1.02.0038	Koordinasi pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Layanan	33	33	293.448.000
							2.16.03.1.02.0039	Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Titik	13	48	1.661.418.800
20.	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkokoh ideologi	Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,	Orang	400	400	2.870.260.400

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU RKPD 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.					Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan				
							8.01.03.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Pol	Orang	100	100	313.499.900

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU RKPD 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
								Pemantauan Situasi Politik di Daerah					
					8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang		100	7.939.826.000
					8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanga	Orang	150	150.00	686.642.000

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU RKPD 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
								Konflik di Daerah					
							8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	Orang	150	150.00	104.499.850
21.	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim	Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah									

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU RKPD 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
			industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.										
22.	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.1.01.0012	Pendampingan dan Fasilitasi Koperasi	Jumlah Koperasi yang mendapatkan pendampingan restrukturisasi dan revitalisasi	Kop	100	7	160.000.000
					2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.1.01.0015	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	Orang	365	30	40.000.000
23.	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	Unit		3	168.000.000

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU RKPD 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Ekonomi Nasional				Pariwisata Provinsi					
							3.26.02.1.03.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	Orang		40	229.108.300
					3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dok	1	1	37.200.000
							3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Keg	15	3	170.786.726
					3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAAT	3.26.04.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronissi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Lap		1	30.150.000

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU RKPD 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
						AN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		bagi Usaha Pemula					
							3.26.04.1.01.0007	Fasilitasi Prasarana Melalui Revitalisasi Ruang Kreatif	Jumlah Prasarana Ruang Kreatif	Unit	1	1	20.150.000
							3.26.04.1.02.0017	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Dok		2	15.300.000
24.	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.01.0013	Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Aktivitas/Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan	Keg		1	800.000.000

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU RKPD 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
			dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.										
					2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek		20	1.000.000.000
							2.22.05.1.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek		1	200.000.000
							2.22.05.1.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Objek	3	3	850.000.000
25.	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik		1275	22.000.000.000

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU RKPD 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
			pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.										
							1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	440	495	3.600.000.000
							1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	95	95	1.400.000.000
							1.01.02.1.02.0060	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	Orang	230	230	2.500.000.000
							1.01.02.1.03.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit		1	9.000.000.000
							1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	Ruang		8	10.000.000.000
					1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan	Laporan	1	1	1.500.000.000

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU RKPD 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
								Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				
26.	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Dok	1	1	1.550.000.000
							1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi	Unit	5	30	1.257.499.999

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU RKPD 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
									rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka p				
							1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket		17	23.258.202.220
							1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dok		1	1.292.500.000
							1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dok		2	44.071.500.000
							1.02.02.1.02.0038	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Lap	1	1	650.000.450
					1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas	Orang	457	422	18.066.009.230

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU RKPD 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
						MANUSIA KESEHATAN			Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				
27.	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.										
				Meningkatnya efektivitas penanganan sesuai standar bagi korban KtP dan TPPO serta anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.1.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	20	20	3.541.000

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU RKPD 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
							2.08.03.1.03.0011	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	Lembaga	14	14	5.000.000
					2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.02.0017	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	35	35	1.500.000
							2.08.07.1.03.0015	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat provinsi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	Lembaga	14	14	1.022.000

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU RKPD 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
28.	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.1.02.0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Laporan	1	3	25.000.000
							2.12.02.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	1	4	25.000.000
					2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.1.01.0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Laporan	1	4	25.000.000
							2.12.03.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Laporan		4	25.000.000

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU RKPD 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
30.	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Orang	71	55	256.182.000
					2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.03.0001	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Orang		20	500.000.000
31.	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	25	25	35.000.000

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU RKPD 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.					Standar Nasional Perpustakaan					
							2.23.02.1.01.0017	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi	Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	Perpustakaan	10	10	20.000.000
					2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	Eksemplar		24	10.000.000

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU RKPD 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
								dan Karya Rekam					
							2.23.03.1.03.0003	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	Eksemplar	30	30	20.000.000
							2.23.03.1.03.0004	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Orang	80	80	50.000.000
32.	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman)	Orang	40	40	7.850.000

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU RKPD 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
			toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.						lintas Kabupaten/Kota				
							1.05.03.1.02.0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	Orang	40	50	11.150.000
							1.05.03.1.02.0026	Pengelolaan Risiko Bencana	Jumlah akar masalah risiko bencana lintas Kabupaten/Kota yang tertangani	Kegiatan	1	1	21.000.000
				Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01.0026	Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan	Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1	1	29.296.700

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU RKPD 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
				pemadam kebakaran sesuai standar				Kabupaten/ Kota					
							1.05.02.1.02.0012	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	Laporan	12	1	30.000.000
33.	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.1.01.0012	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	Lembaga	36	36	40.000.000
							2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Pengguna	100	100	15.000.000

Tabel 6.5

Dukungan Kegiatan Pemerintah Daerah terhadap PKPN Tahun 2027

NO.	PKPN	RINCIAN OUTPUT	DUKUNGAN KEGIATAN TAHUN 2027
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas	SMA yang direvitalisasi	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat
			Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat
			Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat
			Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat
			Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat
			Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi
		SMK yang direvitalisasi	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat
			Ruang Praktik Peserta Didik yang Terehabilitasi
			Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat
		SLB yang direvitalisasi	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat
			Ruang Kelas Sekolah yang Terehabiltasi sedang/berat

NO.	PKPN	RINCIAN OUTPUT	DUKUNGAN KEGIATAN TAHUN 2027
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Sekolah Rakyat	(RO di Kementerian PU)	Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
			Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
			Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin
3	80 Sekolah Garuda Transformasi	Sekolah yang Bertranformasi menjadi Sekolah Unggul Garuda	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
4	Elektrifikasi 10.000 Desa	Pembangunan Infrastruktur Listrik Perdesaan	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
5	Pemerataan Akses Listrik	Pemasangan Sambungan Baru Listrik bagi Rumah Tangga Belum Berlistrik yang Tidak Mampu atau Berada di Daerah 3T (BPBL)	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
6	Pengembangan Jaringan Kereta Api Nasional	-	-
7	PRO-KESRA 10 Juta Penduduk Berusaha dan Bekerja	Pelatihan Pertanian bagi Non Aparatur	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian

NO.	PKPN	RINCIAN OUTPUT	DUKUNGAN KEGIATAN TAHUN 2027
(1)	(2)	(3)	(4)
			Pembinaan penyuluh pertanian swadaya dan swasta lintas kabupaten/kota
			Terlaksananya Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
		Alat dan Mesin Pertanian Pasca Panen Sub Sektor Tanaman Pangan	Penataan Prasarana Pertanian
			Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan
		Alat dan Mesin Pertanian Pasca Panen Sub Sektor Hortikultura	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultur
			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Bantuan Ternak Lainnya	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
		Alat dan Mesin Pertanian Pasca Panen Sub Sektor Perkebunan	Penataan Prasarana Pertanian
			Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Alat dan Mesin Pertanian Pasca Panen Sub Sektor Peternakan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

NO.	PKPN	RINCIAN OUTPUT	DUKUNGAN KEGIATAN TAHUN 2027
(1)	(2)	(3)	(4)
		Fasilitasi Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Usaha Mikro	Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Non Mogas
8	Program 3 Juta Rumah, Termasuk Gerakan ASRI: Penggantian Atap Seng Menjadi Genteng (Gentengisasi)	Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
		Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Pemerintah Kabupaten/Kotan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
		Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi
9	Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik	Program gentengisasi akan diintegrasikan dengan BSPS, sehingga lokasi pelaksanaan gentengisasi akan sama dengan BSPS.	Tidak Masuk Lokpri
10	Pembangunan Jaringan Gas Kota (JARGAS) untuk 1 Juta Sambungan Rumah (SR)		Tidak Masuk Lokpri
11	Swasembada Air	Peningkatan SPAM	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
		Perluasan SPAM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota

NO.	PKPN	RINCIAN OUTPUT	DUKUNGAN KEGIATAN TAHUN 2027
(1)	(2)	(3)	(4)
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi
		Optimalisasi dan Rehabilitasi SPAM	Pembangunan Sistem Penyediaan Air
		Pembangunan SPALD-T Skala Kota/Permukiman/Kawasan tertentu	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat di Kawasan Strategis Provinsi
		Pembangunan SPALD-S Skala Kota	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota
12	Gerakan ASRI: Penghijauan	Rehabilitasi hutan dan lahan secara sipil teknis di DAS yang dipulihkan	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negar
			Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
13	Kampung Nelayan Merah Putih	Kampung yang Nelayan Ditingkatkan Fasilitasnya	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan PP.Kecil
14	Budidaya Ikan Darat Tematik	Sarana Budidaya Ikan Air Tawar yang disalurkan di Masyarakat BIOFLOK	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan PP.Kecil
		Sarana Budidaya Ikan Air Tawar yang disalurkan di Masyarakat MINAPADI	Tidak Lokpri
15	Pengembangan Kawasan Pangan Terintegrasi	Kawasan Padi	
		Kawasan Jagung	

NO.	PKPN	RINCIAN OUTPUT	DUKUNGAN KEGIATAN TAHUN 2027
(1)	(2)	(3)	(4)
		Kawasan Ubi Kayu	
		Kawasan Kedelai	Tidak Lokpri
		Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi)	
		Sertifikat Produk Tanaman Pangan	Tidak Lokpri
		Cetak Sawah	
		Optimasi Lahan	Tidak Lokpri
		Rehabilitasi Lahan Sawah	
16	Pengembangan Kawasan Perkebunan (Sawit, Tebu, Kakao, Kelapa, Kopi, Jambu Mete, Rempah)	Kawasan Tebu	Tidak Lokpri
		Kawasan Kelapa	Tidak Lokpri
		Kawasan Kopi	Tidak Lokpri
		Kawasan Kakao	Tidak Lokpri
		Kawasan Jambu Mete	Tidak Lokpri
		Kawasan Lada	Tidak Lokpri
		Kawasan Pala	
17	Peningkatan Produksi Daging, Susu, dan Telur	Bantuan Ternak Unggas	Tidak Lokpri

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI MALUKU
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						**1.140.474.335.022,00**							**1.140.687.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.133.874.335.022,00**							**1.133.847.000.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.133.874.335.022,00**							**1.133.847.000.000,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**886.589.180.582,00**							**806.456.501.700,00**	
			Persentase Layananan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	-		-	100 %	876.845.797.382,00						-	797.887.000.000,00	
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.573.272.000,00					-		2.102.300.000,00	
		-						2.573.272.000,00					-		2.102.300.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	176.637.000,00						-	90.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	799.775.000,00						-	910.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	125.260.000,00						-	65.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	760.800.000,00						-	83.600.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	700.000.000,00						-	950.000.000,00	
	1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						799.775.000,00							910.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	1 Dokumen	799.775.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	910.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						125.260.000,00							65.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	2 Dokumen	125.260.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	65.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						176.637.000,00							90.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	2 Dokumen	176.637.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	90.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						750.000.000,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	1 Laporan	750.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						700.000.000,00							950.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	1 Laporan	700.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	950.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						861.883.725.382,00					-		781.962.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						861.883.725.382,00					-		781.962.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	1.103.800.000,00						-	1.198.600.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	760.800.000,00						-	763.600.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	860.019.125.382,00						-	780.000.000.000,00	
	1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						860.019.125.382,00							780.000.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	1000 Orang/ Bulan	860.019.125.382,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Non Fisik-TPG PNSD DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD DAK Non Fisik-TKG PNSD	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	780.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						1.000.000.000,00							1.100.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	1 Dokumen	1.000.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						750.000.000,00							760.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	750.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	760.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						960.800.000,00					-		963.700.000,00	
		-						960.800.000,00					-		963.700.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	600.000.000,00						-	605.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-		-	-	360.800.000,00						-	358.700.000,00	
	1.01.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						350.000.000,00							355.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-		-	1 Laporan	350.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	355.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan PengendalianBarang Milik Daerah pada SKPD						600.000.000,00							605.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	1 Laporan	600.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	605.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						2.910.800.000,00					-		2.928.600.000,00	
		-						2.910.800.000,00					-		2.928.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	-	400.000.000,00						-	405.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	-	610.800.000,00						-	608.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	1.800.000.000,00						-	1.805.000.000,00	
	1.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian						600.000.000,00							605.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	1 Dokumen	600.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	605.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai						400.000.000,00							405.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	1 Dokumen	400.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	405.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan						1.800.000.000,00							1.805.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	200 Orang	1.800.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	1.805.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						5.566.284.720,00					-		4.809.846.200,00	
		-						5.566.284.720,00					-		4.809.846.200,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-		-	-	1.000.000.000,00						-	605.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	3.058.909.000,00						-	2.700.265.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.442.491.720,00						-	1.435.672.700,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	64.884.000,00						-	68.908.500,00	
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						50.000.000,00							52.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	50.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	52.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						1.050.000.000,00							1.100.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	1.050.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						1.150.000.000,00							1.155.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	1.150.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	1.155.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						1.000.000.000,00							605.000.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-		-	1 Dokumen	1.000.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	605.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						2.792.650.000,00					-		3.085.251.000,00	
		-						2.792.650.000,00					-		3.085.251.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	542.000.000,00						-	643.956.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	-	1.156.160.000,00						-	1.239.500.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	1.094.490.000,00						-	1.201.795.000,00	
	1.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						1.000.000.000,00							1.050.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	2 Unit	1.000.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	1.050.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						500.000.000,00							510.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	1 Paket	500.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	510.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						750.000.000,00							760.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	2 Unit	750.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	760.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						3.725.172.480,00					-		4.158.089.470,00	
		-						3.725.172.480,00					-		4.158.089.470,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	1.136.695.880,00						-	1.216.295.400,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	2.547.876.600,00						-	2.891.494.070,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	40.600.000,00						-	50.300.000,00	
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						30.000.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						895.000.000,00							900.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	895.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.350.000.000,00							1.355.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	1.350.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	1.355.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						6.176.476.000,00					-		6.446.515.030,00	
		-						6.176.476.000,00					-		6.446.515.030,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	-	906.426.000,00						-	989.564.030,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	130.050.000,00						-	196.951.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	5.000.000.000,00						-	5.050.000.000,00	
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						500.000.000,00							550.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	10 Unit	500.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						100.000.000,00							105.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	10 Unit	100.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						5.000.000.000,00							5.050.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	5.000.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.050.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**252.028.537.640,00**							**345.215.000.000,00**	
			Persentase Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)	-		-	87 %	181.978.537.640,00						-	261.840.000.000,00	
			Persentase Anak Usia 4-18 Tahun penyandanga Disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusu (APS)	-		-	67 %	30.350.000.000,00						-	30.870.000.000,00	
			Skor Kemampuan Literasi SLB	-		-	57,03 %	30.350.000.000,00						-	30.870.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Skor Kemampuan Literasi SMA	-		-	62,54 %	144.178.537.640,00						-	222.180.000.000,00	
			Skor Kemampuan Literasi SMK	-		-	62,44 %	47.800.000.000,00						-	50.070.000.000,00	
			Skor Kemampuan Numerasi SLB	-		-	47,24 %	30.350.000.000,00						-	30.870.000.000,00	
			Skor Kemampuan Numerasi SMA	-		-	57,45 %	144.178.537.640,00						-	222.180.000.000,00	
			Skor Kemampuan Numerasi SMK	-		-	57,68 %	47.800.000.000,00						-	50.070.000.000,00	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						162.678.537.640,00					-		243.435.000.000,00	
		-						162.678.537.640,00					-		243.435.000.000,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	-		-	-	5.000.000.000,00						-	5.100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-		-	-	1.400.000.000,00						-	850.000.000,00	
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	-	1.000.000.000,00						-	1.100.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	-	3.300.000.000,00						-	3.395.000.000,00	
			Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	-	1.000.000.000,00						-	1.100.000.000,00	
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	-	500.000.000,00						-	510.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	-	3.600.000.000,00						-	3.650.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	-	22.000.000.000,00						-	25.000.000.000,00	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	-		-	-	1.000.000.000,00						-	1.100.000.000,00	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	-	1.000.000.000,00						-	1.100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-		-	-	8.000.000.000,00						-	8.100.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	-	2.000.000.000,00						-	2.100.000.000,00	
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	-		-	-	1.000.000.000,00						-	1.100.000.000,00	
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	-		-	-	500.008.000,00						-	510.000.000,00	
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	-	1.000.000.000,00						-	1.100.000.000,00	
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	-	500.000.000,00						-	510.000.000,00	
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	-	1.000.000.000,00						-	750.000.000,00	
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat	-		-	-	1.000.000.000,00						-	1.100.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	-	2.000.000.000,00						-	2.100.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	-		-	-	5.000.000.000,00						-	5.100.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	-		-	-	700.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-		-	-	98.228.529.640,00						-	176.000.000.000,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-		-	-	1.950.000.000,00						-	2.060.000.000,00	
	1.01.02.1.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						1.000.000.000,00							1.100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	-		-	2 Ruang	1.000.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0010	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah						500.000.000,00							510.000.000,00	
		Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	1 Ruang	500.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	510.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0011	Pembangunan Perpustakaan Sekolah						500.000.000,00							510.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	1 Ruang	500.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	510.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0012	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula						500.008.000,00							510.000.000,00	
		Ruang Serba Guna/Aula yang Terbangun	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	-		-	1 Ruang	500.008.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	510.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						2.000.000.000,00							2.100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	3 Unit	2.000.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	2.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						2.000.000.000,00							2.100.000.000,00	
		Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	4 Ruang	2.000.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	2.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						1.000.000.000,00							1.100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	2 Ruang	1.000.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0028	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah						1.000.000.000,00							1.100.000.000,00	
		Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	2 Ruang	1.000.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0029	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula						1.000.000.000,00							1.100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	2 Ruang	1.000.000.000,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik						5.000.000.000,00							5.100.000.000,00	
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	-		-	1 Paket	5.000.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	5.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas						22.000.000.000,00							22.100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	1000 Peserta didik	22.000.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	22.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						1.500.000.000,00							1.600.000.000,00	
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-		-	200 Peserta Didik	1.500.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	1.600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						300.000.000,00							320.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	50 Orang	300.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	320.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas						700.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	-		-	50 Satuan Pendidikan	700.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas						98.228.529.640,00							176.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-		-	200 Satuan Pendidikan	98.228.529.640,00	Provinsi Maluku	DAK Non Fisik-BOS Reguler	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	176.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						850.000.000,00							850.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-		-	2 Dokumen	850.000.000,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	850.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0067	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah						1.000.000.000,00							750.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	1 Unit	1.000.000.000,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						5.000.000.000,00							5.100.000.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	-		-	3 Unit	5.000.000.000,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	5.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0070	Pembangunan Ruang Laboratorium						1.000.000.000,00							1.100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	-		-	2 Ruang	1.000.000.000,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0071	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium						1.000.000.000,00							1.100.000.000,00	
		Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	2 Ruang	1.000.000.000,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru						8.000.000.000,00							8.100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-		-	5 Ruang	8.000.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	8.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0073	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah						1.000.000.000,00							1.100.000.000,00	
		Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat	-		-	1 Unit	1.000.000.000,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan						3.600.000.000,00							3.650.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	495 Orang	3.600.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	3.650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						52.500.000.000,00					-		59.500.000.000,00	
		-						52.500.000.000,00					-		59.500.000.000,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	-		-	-	6.500.000.000,00						-	6.600.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-		-	-	500.000.000,00						-	510.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	-	7.000.000.000,00						-	10.000.000.000,00	
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	-	500.000.000,00						-	510.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	-	5.000.000.000,00						-	8.000.000.000,00	
			Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	-		-	-	2.500.000.000,00						-	2.550.000.000,00	
			Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	-		-	-	500.000.000,00						-	510.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-		-	-	2.000.000.000,00						-	2.100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	-		-	-	1.000.000.000,00						-	1.100.000.000,00	
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	-		-	-	2.000.000.000,00						-	2.100.000.000,00	
			Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi	-		-	-	1.500.000.000,00						-	1.600.000.000,00	
			Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	-		-	-	1.200.000.000,00						-	1.250.000.000,00	
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	-	500.000.000,00						-	510.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	-	9.000.000.000,00						-	9.100.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	-		-	-	5.600.000.000,00						-	5.700.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	-		-	-	1.400.000.000,00						-	1.500.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-		-	-	4.600.000.000,00						-	4.650.000.000,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-		-	-	1.200.000.000,00						-	1.210.000.000,00	
	1.01.02.1.02.0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa						1.200.000.000,00							1.250.000.000,00	
		Ruang Praktik Siswa yang Terbangun	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	-		-	1 Ruang	1.200.000.000,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	1.250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.1.02.0005	Pembangunan Ruang Laboratorium						2.000.000.000,00							2.100.000.000,00	
		Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	-		-	3 Ruang	2.000.000.000,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	2.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah						500.000.000,00							510.000.000,00	
		Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	1 Ruang	500.000.000,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	510.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0007	Pembangunan Perpustakaan Sekolah						500.000.000,00							510.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	1 Ruang	500.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	510.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						9.000.000.000,00							9.100.000.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	5 Unit	9.000.000.000,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	9.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						500.000.000,00							510.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	-		-	1 Ruang	500.000.000,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	510.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik						6.500.000.000,00							6.600.000.000,00	
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	-		-	5 Paket	6.500.000.000,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	6.600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan						5.000.000.000,00							5.100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	1000 Peserta didik	5.000.000.000,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	5.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						1.200.000.000,00							1.210.000.000,00	
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-		-	100 Peserta Didik	1.200.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	1.210.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						7.000.000.000,00							7.100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	200 Orang	7.000.000.000,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	7.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan						1.400.000.000,00							1.500.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	-		-	95 Satuan Pendidikan	1.400.000.000,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan						4.600.000.000,00							4.650.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-		-	50 Satuan Pendidikan	4.600.000.000,00	Provinsi Maluku	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	4.650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						500.000.000,00							510.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-		-	2 Dokumen	500.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	510.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0060	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik						2.500.000.000,00							2.550.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya sertifikasi kompetensi peserta didik	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	-		-	230 Orang	2.500.000.000,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	2.550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						5.600.000.000,00							5.700.000.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	-		-	5 Unit	5.600.000.000,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	5.700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0063	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik						1.500.000.000,00							1.600.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ruang Praktik Peserta Didik yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi	-		-	1 Ruang	1.500.000.000,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	1.600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru						2.000.000.000,00							2.100.000.000,00	
		Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-		-	3 Ruang	2.000.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	2.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah						1.000.000.000,00							1.100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	-		-	3 Ruang	1.000.000.000,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus						36.850.000.000,00					-		42.280.000.000,00	
		-						36.850.000.000,00					-		42.280.000.000,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	-		-	-	3.000.000.000,00						-	3.100.000.000,00	
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	-	500.000.000,00						-	510.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	-	4.750.000.000,00						-	7.120.000.000,00	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	-		-	-	600.000.000,00						-	650.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat	-		-	-	3.000.000.000,00						-	3.100.000.000,00	
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	-	500.000.000,00						-	510.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	-	7.000.000.000,00						-	7.100.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	-	3.000.000.000,00						-	3.100.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	-		-	-	9.000.000.000,00						-	9.100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	-		-	-	1.200.000.000,00						-	1.250.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	-		-	-	2.800.000.000,00						-	2.810.000.000,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-		-	-	1.500.000.000,00						-	1.550.000.000,00	
	1.01.02.1.03.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)						9.000.000.000,00							9.100.000.000,00	
		Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	-		-	1 Unit	9.000.000.000,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	9.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						600.000.000,00							650.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	-		-	1 Ruang	600.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah						500.000.000,00							510.000.000,00	
		Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	1 Ruang	500.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	510.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah						500.000.000,00							510.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	1 Ruang	500.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	510.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						7.000.000.000,00							7.100.000.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	8 Unit	7.000.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	7.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0040	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik						3.000.000.000,00							3.100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	-		-	1 Paket	3.000.000.000,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	3.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus						4.750.000.000,00							4.800.000.000,00	
		Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	920 Peserta Didik	4.750.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	4.800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						1.500.000.000,00							1.550.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-		-	100 Peserta Didik	1.500.000.000,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	1.550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus						1.200.000.000,00							1.250.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	-		-	16 Satuan Pendidikan	1.200.000.000,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	1.250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus						2.800.000.000,00							2.810.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	-		-	16 Satuan Pendidikan	2.800.000.000,00	Provinsi Maluku	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	2.810.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						3.000.000.000,00							3.100.000.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	3 Unit	3.000.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	3.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0079	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah						3.000.000.000,00							3.100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ruang Kelas Sekolah yang Terehabiltasi sedang/berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat	-		-	3 Ruang	3.000.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	3.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**						**300.000.000,00**							**320.000.000,00**	
			Persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan kurikulum Muatan Lokal	-		-	36 %	150.000.000,00						-	160.000.000,00	
	1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah						150.000.000,00					-		160.000.000,00	
		-						150.000.000,00					-		160.000.000,00	
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkat Kompetensinya	-		-	-	150.000.000,00						-	160.000.000,00	
	1.01.03.1.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah						150.000.000,00							160.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah Meningkat Kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkat Kompetensinya	-		-	15 Orang	150.000.000,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	160.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.1.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus						150.000.000,00					-		160.000.000,00	
		-						150.000.000,00					-		160.000.000,00	
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkat Kompetensinya	-		-	-	150.000.000,00						-	160.000.000,00	
	1.01.03.1.02.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus						150.000.000,00							160.000.000,00	
		Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus Meningkat Kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkat Kompetensinya	-		-	15 Orang	150.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	160.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**						**3.500.000.000,00**							**3.650.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase Guru yang memiliki Sertifikat Pendidikan	-		-	75 %	3.500.000.000,00						-	3.650.000.000,00	
			Persentase Pemerataan Guru	-		-	100 %	3.500.000.000,00						-	3.650.000.000,00	
	1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi						3.500.000.000,00					-		3.650.000.000,00	
		-						3.500.000.000,00					-		3.650.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	-		-	-	2.000.000.000,00						-	2.100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	-		-	-	1.500.000.000,00						-	1.550.000.000,00	
	1.01.04.1.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus						2.000.000.000,00							2.100.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	-		-	1 Dokumen	2.000.000.000,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	2.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus						1.500.000.000,00							1.550.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	-		-	1 Laporan	1.500.000.000,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	1.550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5.	**1.01.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**						**300.000.000,00**							**320.000.000,00**	
			Persentase Layanan dan tindaklanjut pemberian perizinan pendidikan	-		-	11 %	150.000.000,00						-	160.000.000,00	
	1.01.05.1.01	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						150.000.000,00					-		160.000.000,00	
		-						150.000.000,00					-		160.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-		-	-	150.000.000,00						-	160.000.000,00	
	1.01.05.1.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						150.000.000,00							160.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-		-	1 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	160.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.05.1.02	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						150.000.000,00					-		160.000.000,00	
		-						150.000.000,00					-		160.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-		-	-	150.000.000,00						-	160.000.000,00	
	1.01.05.1.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						150.000.000,00							160.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-		-	1 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	160.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
6.	**1.01.06**	**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**						**300.000.000,00**							**320.000.000,00**	
			Persentase pengembangan bahasa dan sastra daerah	-		-	7 %	150.000.000,00						-	160.000.000,00	
	1.01.06.1.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						300.000.000,00					-		320.000.000,00	
		-						300.000.000,00					-		320.000.000,00	
			Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi yang Tersusun	-		-	-	150.000.000,00						-	160.000.000,00	
			Jumlah sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan yang terbina di provinsi	-		-	-	150.000.000,00						-	160.000.000,00	
	1.01.06.1.01.0007	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi						150.000.000,00							160.000.000,00	
		Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi yang Tersusun	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi yang Tersusun	-		-	1 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	160.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.06.1.01.0013	Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebahasaan dan Kesastraan kewenangan provinsi						150.000.000,00							160.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbinanya sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan di provinsi	Jumlah sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan yang terbina di provinsi	-		-	15 Orang	150.000.000,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	160.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.600.000.000,00**							**6.840.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**6.600.000.000,00**							**6.840.000.000,00**	
7.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**						**1.100.000.000,00**							**1.120.000.000,00**	
			Tingkat Partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	-		-	60 %	1.100.000.000,00						-	1.120.000.000,00	
	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						800.000.000,00					-		810.000.000,00	
		-						800.000.000,00					-		810.000.000,00	
			Jumlah Aktivitas/Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan	-		-	-	800.000.000,00						-	810.000.000,00	
	2.22.02.1.01.0013	Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan						800.000.000,00							810.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Aktivitas/Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan	-		-	1 Kegiatan	800.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	810.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						300.000.000,00					-		310.000.000,00	
		-						300.000.000,00					-		310.000.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	-		-	-	300.000.000,00						-	310.000.000,00	
	2.22.02.1.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat						300.000.000,00							310.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	-		-	25 Orang	300.000.000,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	310.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
8.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**						**3.850.000.000,00**							**3.930.000.000,00**	
			Persentase Kesenian Tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	-		-	100 %	1.350.000.000,00						-	1.380.000.000,00	
	2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota						3.850.000.000,00					-		3.930.000.000,00	
		-						3.850.000.000,00					-		3.930.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	-	3.200.000.000,00						-	3.260.000.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	-		-	-	300.000.000,00						-	310.000.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	-		-	-	350.000.000,00						-	360.000.000,00	
	2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional						300.000.000,00							310.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	-		-	25 Orang	300.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	310.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.1.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan						350.000.000,00							360.000.000,00	
		Tersedianya Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	-		-	1 Sertifikat	350.000.000,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	360.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional						700.000.000,00							710.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	1 Lembaga	700.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	710.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
9.	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**						**300.000.000,00**							**310.000.000,00**	
			Tingkat Partisipasi masyarakat terhadap tinjauan sejarah lokal	-		-	25 %	300.000.000,00						-	310.000.000,00	
	2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi						300.000.000,00					-		310.000.000,00	
		-						300.000.000,00					-		310.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	-		-	-	300.000.000,00						-	310.000.000,00	
	2.22.04.1.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah						300.000.000,00							310.000.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Sejarah yang Diakses Masyarakat	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	-		-	1 Dokumen	300.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	310.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
10.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**						**3.850.000.000,00**							**4.030.000.000,00**	
			Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	-		-	100 %	2.100.000.000,00						-	2.250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan	-		-	100 %	1.750.000.000,00						-	1.780.000.000,00	
	2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi						2.100.000.000,00					-		2.250.000.000,00	
		-						2.100.000.000,00					-		2.250.000.000,00	
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	-		-	-	1.000.000.000,00						-	1.100.000.000,00	
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	-		-	-	1.100.000.000,00						-	1.150.000.000,00	
	2.22.05.1.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya						1.100.000.000,00							1.150.000.000,00	
		Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	-		-	50 Objek	1.100.000.000,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	1.150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya						1.000.000.000,00							1.100.000.000,00	
		Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	-		-	20 Objek	1.000.000.000,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi						1.750.000.000,00					-		1.780.000.000,00	
		-						1.750.000.000,00					-		1.780.000.000,00	
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	-		-	-	200.000.000,00						-	210.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	-		-	-	850.000.000,00						-	860.000.000,00	
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	-		-	-	700.000.000,00						-	710.000.000,00	
	2.22.05.1.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya						700.000.000,00							710.000.000,00	
		Terlaksananya Cagar Budaya yang Diregistrasi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	-		-	22 Objek	700.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	710.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya						200.000.000,00							210.000.000,00	
		Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	-		-	1 Objek	200.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	210.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya						850.000.000,00							860.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	-		-	3 Objek	850.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	860.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN						**1.768.935.200,00**							**1.364.600.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.768.935.200,00**							**1.364.600.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.768.935.200,00**							**1.364.600.000,00**	
11.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**886.589.180.582,00**							**806.456.501.700,00**	
			Persentase Layananan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	-		-	100 %	714.935.200,00						-	890.100.000,00	
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.573.272.000,00					-		2.102.300.000,00	
		-						2.573.272.000,00					-		2.102.300.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	10.800.000,00						-	3.700.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	760.800.000,00						-	83.600.000,00	
	1.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						10.800.000,00							3.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	10.800.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	3.700.000,00	UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						10.800.000,00							3.600.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	1 Laporan	10.800.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	3.600.000,00	UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						861.883.725.382,00					-		781.962.200.000,00	
		-						861.883.725.382,00					-		781.962.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	1.103.800.000,00						-	1.198.600.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	760.800.000,00						-	763.600.000,00	
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						10.800.000,00							3.600.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	1 Dokumen	10.800.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	3.600.000,00	UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						10.800.000,00							3.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	10.800.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	3.600.000,00	UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						960.800.000,00					-		963.700.000,00	
		-						960.800.000,00					-		963.700.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-		-	-	360.800.000,00						-	358.700.000,00	
	1.01.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						10.800.000,00							3.700.000,00	
		Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-		-	1 Laporan	10.800.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	3.700.000,00	UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						2.910.800.000,00					-		2.928.600.000,00	
		-						2.910.800.000,00					-		2.928.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	-	610.800.000,00						-	608.600.000,00	
	1.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian						10.800.000,00							3.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	1 Dokumen	10.800.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	3.600.000,00	UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						5.566.284.720,00					-		4.809.846.200,00	
		-						5.566.284.720,00					-		4.809.846.200,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	3.058.909.000,00						-	2.700.265.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.442.491.720,00						-	1.435.672.700,00	
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						138.560.200,00							138.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	138.560.200,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	138.000.000,00	UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						149.875.000,00							95.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	149.875.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	95.000.000,00	UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						3.725.172.480,00					-		4.158.089.470,00	
		-						3.725.172.480,00					-		4.158.089.470,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	1.136.695.880,00						-	1.216.295.400,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	2.547.876.600,00						-	2.891.494.070,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	40.600.000,00						-	50.300.000,00	
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.700.000,00							3.800.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	3.700.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	3.800.000,00	UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						0,00							93.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	93.000.000,00	UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						406.000.000,00							454.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	406.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	454.000.000,00	UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						6.176.476.000,00					-		6.446.515.030,00	
		-						6.176.476.000,00					-		6.446.515.030,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	-	906.426.000,00						-	989.564.030,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	130.050.000,00						-	196.951.000,00	
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							57.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	2 Unit	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	57.000.000,00	UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						6.000.000,00							42.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	2 Unit	6.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	42.000.000,00	UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
12.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**252.028.537.640,00**							**345.215.000.000,00**	
			Persentase Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)	-		-	87 %	1.000.000.000,00						-	460.000.000,00	
			Skor Kemampuan Literasi SMA	-		-	62,54 %	1.000.000.000,00						-	460.000.000,00	
			Skor Kemampuan Numerasi SMA	-		-	57,45 %	1.000.000.000,00						-	460.000.000,00	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						162.678.537.640,00					-		243.435.000.000,00	
		-						162.678.537.640,00					-		243.435.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-		-	-	1.400.000.000,00						-	850.000.000,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-		-	-	1.950.000.000,00						-	2.060.000.000,00	
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						450.000.000,00							460.000.000,00	
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-		-	100 Peserta Didik	450.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	460.000.000,00	UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						550.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-		-	2 Dokumen	550.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		TAMAN BUDAYA						**3.071.500.000,00**							**3.139.300.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**571.500.000,00**							**589.300.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**571.500.000,00**							**589.300.000,00**	
13.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**886.589.180.582,00**							**806.456.501.700,00**	
			Persentase Layananan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	-		-	100 %	571.500.000,00						-	589.300.000,00	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						861.883.725.382,00					-		781.962.200.000,00	
		-						861.883.725.382,00					-		781.962.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	1.103.800.000,00						-	1.198.600.000,00	
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						46.000.000,00							47.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	1 Dokumen	46.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	47.000.000,00	TAMAN BUDAYA
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						5.566.284.720,00					-		4.809.846.200,00	
		-						5.566.284.720,00					-		4.809.846.200,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	3.058.909.000,00						-	2.700.265.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.442.491.720,00						-	1.435.672.700,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	64.884.000,00						-	68.908.500,00	
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.500.000,00							3.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	3.500.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	3.600.000,00	TAMAN BUDAYA
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						22.500.000,00							22.600.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	22.500.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	22.600.000,00	TAMAN BUDAYA
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						100.000.000,00							110.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	110.000.000,00	TAMAN BUDAYA
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						2.792.650.000,00					-		3.085.251.000,00	
		-						2.792.650.000,00					-		3.085.251.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	-	1.156.160.000,00						-	1.239.500.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	1.094.490.000,00						-	1.201.795.000,00	
	1.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						59.000.000,00							60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	2 Unit	59.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	60.000.000,00	TAMAN BUDAYA
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00							21.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	20.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	21.000.000,00	TAMAN BUDAYA
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						3.725.172.480,00					-		4.158.089.470,00	
		-						3.725.172.480,00					-		4.158.089.470,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	1.136.695.880,00						-	1.216.295.400,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	2.547.876.600,00						-	2.891.494.070,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	40.600.000,00						-	50.300.000,00	
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.000.000,00							5.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.500.000,00	TAMAN BUDAYA
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						34.000.000,00							35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	34.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	35.000.000,00	TAMAN BUDAYA
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						203.000.000,00							205.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	203.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	205.000.000,00	TAMAN BUDAYA
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						6.176.476.000,00					-		6.446.515.030,00	
		-						6.176.476.000,00					-		6.446.515.030,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	-	906.426.000,00						-	989.564.030,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	130.050.000,00						-	196.951.000,00	
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						62.000.000,00							63.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	1 Unit	62.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	63.000.000,00	TAMAN BUDAYA
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						16.500.000,00							16.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	1 Unit	16.500.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-		-	16.600.000,00	TAMAN BUDAYA
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.500.000.000,00**							**2.550.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**2.500.000.000,00**							**2.550.000.000,00**	
14.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**						**3.850.000.000,00**							**3.930.000.000,00**	
			Persentase Kesenian Tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	-		-	100 %	2.500.000.000,00						-	2.550.000.000,00	
	2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota						3.850.000.000,00					-		3.930.000.000,00	
		-						3.850.000.000,00					-		3.930.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	-	3.200.000.000,00						-	3.260.000.000,00	
	2.22.03.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional						2.500.000.000,00							2.550.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	1 Lembaga	2.500.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	2.550.000.000,00	TAMAN BUDAYA
		MUSEUM SIWALIMA						**2.688.000.000,00**							**2.845.200.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**988.000.000,00**							**1.085.200.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**988.000.000,00**							**1.085.200.000,00**	
15.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**886.589.180.582,00**							**806.456.501.700,00**	
			Persentase Layananan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	-		-	100 %	888.000.000,00						-	975.200.000,00	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						861.883.725.382,00					-		781.962.200.000,00	
		-						861.883.725.382,00					-		781.962.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	1.103.800.000,00						-	1.198.600.000,00	
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						47.000.000,00							48.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	1 Dokumen	47.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	48.000.000,00	MUSEUM SIWALIMA
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						2.910.800.000,00					-		2.928.600.000,00	
		-						2.910.800.000,00					-		2.928.600.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	100.000.000,00						-	110.000.000,00	
	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						100.000.000,00							110.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	1 Paket	100.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	110.000.000,00	MUSEUM SIWALIMA
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						5.566.284.720,00					-		4.809.846.200,00	
		-						5.566.284.720,00					-		4.809.846.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	3.058.909.000,00						-	2.700.265.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.442.491.720,00						-	1.435.672.700,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	64.884.000,00						-	68.908.500,00	
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						9.000.000,00							9.200.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	9.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	9.200.000,00	MUSEUM SIWALIMA
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						54.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	54.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	55.000.000,00	MUSEUM SIWALIMA
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						113.000.000,00							115.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	113.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	115.000.000,00	MUSEUM SIWALIMA
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						2.792.650.000,00					-		3.085.251.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						2.792.650.000,00					-		3.085.251.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	1.094.490.000,00						-	1.201.795.000,00	
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						100.000.000,00							110.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	100.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	110.000.000,00	MUSEUM SIWALIMA
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						3.725.172.480,00					-		4.158.089.470,00	
		-						3.725.172.480,00					-		4.158.089.470,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	1.136.695.880,00						-	1.216.295.400,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	2.547.876.600,00						-	2.891.494.070,00	
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						87.000.000,00							88.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	87.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	88.000.000,00	MUSEUM SIWALIMA
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						296.000.000,00							297.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	296.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	297.000.000,00	MUSEUM SIWALIMA
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						6.176.476.000,00					-		6.446.515.030,00	
		-						6.176.476.000,00					-		6.446.515.030,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	140.000.000,00						-	210.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	-	906.426.000,00						-	989.564.030,00	
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						42.000.000,00							43.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	8 Unit	42.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	43.000.000,00	MUSEUM SIWALIMA
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						140.000.000,00							210.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	140.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	210.000.000,00	MUSEUM SIWALIMA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.700.000.000,00**							**1.760.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**1.700.000.000,00**							**1.760.000.000,00**	
16.	**2.22.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**						**1.700.000.000,00**							**1.760.000.000,00**	
			-	-		-	-	1.700.000.000,00						-	1.760.000.000,00	
	2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi						1.700.000.000,00					-		1.760.000.000,00	
		-						1.700.000.000,00					-		1.760.000.000,00	
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan	-		-	-	1.500.000.000,00						-	1.550.000.000,00	
			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	-		-	-	200.000.000,00						-	210.000.000,00	
	2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu						1.500.000.000,00							1.550.000.000,00	
		Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan	-		-	1 Unit	1.500.000.000,00	Provinsi Maluku	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	1.550.000.000,00	MUSEUM SIWALIMA
	2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum						200.000.000,00							210.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	-		-	1 Unit	200.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	210.000.000,00	MUSEUM SIWALIMA
		CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN MALUKU TENGAH						**345.522.000,00**							**2.124.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**345.522.000,00**							**2.124.000.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**345.522.000,00**							**2.124.000.000,00**	
17.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**886.589.180.582,00**							**806.456.501.700,00**	
			Persentase Layananan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	-		-	100 %	45.522.000,00						-	247.000.000,00	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						5.566.284.720,00					-		4.809.846.200,00	
		-						5.566.284.720,00					-		4.809.846.200,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	3.058.909.000,00						-	2.700.265.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.442.491.720,00						-	1.435.672.700,00	
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						19.032.000,00							22.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	19.032.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	22.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN MALUKU TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						0,00							162.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	0,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	162.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN MALUKU TENGAH
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						2.792.650.000,00					-		3.085.251.000,00	
		-						2.792.650.000,00					-		3.085.251.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	1.094.490.000,00						-	1.201.795.000,00	
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							28.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	28.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN MALUKU TENGAH
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						3.725.172.480,00					-		4.158.089.470,00	
		-						3.725.172.480,00					-		4.158.089.470,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	1.136.695.880,00						-	1.216.295.400,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	2.547.876.600,00						-	2.891.494.070,00	
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						4.200.000,00							3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	4.200.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	3.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN MALUKU TENGAH
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							32.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	0,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	32.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN MALUKU TENGAH
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						6.176.476.000,00					-		6.446.515.030,00	
		-						6.176.476.000,00					-		6.446.515.030,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	-	906.426.000,00						-	989.564.030,00	
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						22.290.000,00							22.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	1 Unit	22.290.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	22.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN MALUKU TENGAH
18.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**252.028.537.640,00**							**345.215.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)	-		-	87 %	300.000.000,00						-	615.000.000,00	
			Persentase Anak Usia 4-18 Tahun penyandanga Disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusu (APS)	-		-	67 %	0,00						-	310.000.000,00	
			Skor Kemampuan Literasi SLB	-		-	57,03 %	0,00						-	310.000.000,00	
			Skor Kemampuan Literasi SMA	-		-	62,54 %	300.000.000,00						-	615.000.000,00	
			Skor Kemampuan Literasi SMK	-		-	62,44 %	0,00						-	310.000.000,00	
			Skor Kemampuan Numerasi SLB	-		-	47,24 %	0,00						-	310.000.000,00	
			Skor Kemampuan Numerasi SMA	-		-	57,45 %	300.000.000,00						-	615.000.000,00	
			Skor Kemampuan Numerasi SMK	-		-	57,68 %	0,00						-	310.000.000,00	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						162.678.537.640,00					-		243.435.000.000,00	
		-						162.678.537.640,00					-		243.435.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	-	3.300.000.000,00						-	3.395.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	-	22.000.000.000,00						-	25.000.000.000,00	
	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas						0,00							310.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	50 Peserta didik	0,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	310.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN MALUKU TENGAH
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						300.000.000,00							305.000.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	25 Orang	300.000.000,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	305.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN MALUKU TENGAH
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						52.500.000.000,00					-		59.500.000.000,00	
		-						52.500.000.000,00					-		59.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	-	7.000.000.000,00						-	10.000.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	-	5.000.000.000,00						-	8.000.000.000,00	
	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan						0,00							310.000.000,00	
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	25 Peserta didik	0,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	310.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN MALUKU TENGAH
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						0,00							310.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	25 Orang	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	310.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN MALUKU TENGAH
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus						36.850.000.000,00					-		42.280.000.000,00	
		-						36.850.000.000,00					-		42.280.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	-	0,00						-	2.380.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	-	4.750.000.000,00						-	7.120.000.000,00	
	1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus						0,00							310.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	25 Peserta Didik	0,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	310.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN MALUKU TENGAH
	1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus						0,00							310.000.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	25 Orang	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	310.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN MALUKU TENGAH
		CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT						**671.600.000,00**							**2.250.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**671.600.000,00**							**2.250.000.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**671.600.000,00**							**2.250.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
19.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**886.589.180.582,00**							**806.456.501.700,00**	
			Persentase Layananan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	-		-	100 %	371.600.000,00						-	395.000.000,00	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						5.566.284.720,00					-		4.809.846.200,00	
		-						5.566.284.720,00					-		4.809.846.200,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	3.058.909.000,00						-	2.700.265.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.442.491.720,00						-	1.435.672.700,00	
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						24.646.000,00							32.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	24.646.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	32.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						223.654.000,00							78.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	223.654.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	78.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						2.792.650.000,00					-		3.085.251.000,00	
		-						2.792.650.000,00					-		3.085.251.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	542.000.000,00						-	643.956.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	1.094.490.000,00						-	1.201.795.000,00	
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						17.000.000,00							26.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	1 Paket	17.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	26.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00							52.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	20.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	52.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						3.725.172.480,00					-		4.158.089.470,00	
		-						3.725.172.480,00					-		4.158.089.470,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	1.136.695.880,00						-	1.216.295.400,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	2.547.876.600,00						-	2.891.494.070,00	
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						0,00							9.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	9.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						55.000.000,00							88.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	55.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	88.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						6.176.476.000,00					-		6.446.515.030,00	
		-						6.176.476.000,00					-		6.446.515.030,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	-	906.426.000,00						-	989.564.030,00	
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						31.300.000,00							110.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	2 Unit	31.300.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	110.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
20.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**252.028.537.640,00**							**345.215.000.000,00**	
			Persentase Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)	-		-	87 %	300.000.000,00						-	615.000.000,00	
			Persentase Anak Usia 4-18 Tahun penyandanga Disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusu (APS)	-		-	67 %	0,00						-	310.000.000,00	
			Skor Kemampuan Literasi SLB	-		-	57,03 %	0,00						-	310.000.000,00	
			Skor Kemampuan Literasi SMA	-		-	62,54 %	300.000.000,00						-	615.000.000,00	
			Skor Kemampuan Literasi SMK	-		-	62,44 %	0,00						-	310.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Skor Kemampuan Numerasi SLB	-		-	47,24 %	0,00						-	310.000.000,00	
			Skor Kemampuan Numerasi SMA	-		-	57,45 %	300.000.000,00						-	615.000.000,00	
			Skor Kemampuan Numerasi SMK	-		-	57,68 %	0,00						-	310.000.000,00	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						162.678.537.640,00					-		243.435.000.000,00	
		-						162.678.537.640,00					-		243.435.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	-	3.300.000.000,00						-	3.395.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	-	22.000.000.000,00						-	25.000.000.000,00	
	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas						0,00							310.000.000,00	
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	25 Peserta didik	0,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	310.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						300.000.000,00							305.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	25 Orang	300.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	305.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						52.500.000.000,00					-		59.500.000.000,00	
		-						52.500.000.000,00					-		59.500.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	-	7.000.000.000,00						-	10.000.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	-	5.000.000.000,00						-	8.000.000.000,00	
	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan						0,00							310.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	25 Peserta didik	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	310.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						0,00							310.000.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	25 Orang	0,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	310.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus						36.850.000.000,00					-		42.280.000.000,00	
		-						36.850.000.000,00					-		42.280.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	-	0,00						-	2.380.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	-	4.750.000.000,00						-	7.120.000.000,00	
	1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus						0,00							310.000.000,00	
		Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	25 Peserta Didik	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	310.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
	1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus						0,00							310.000.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	25 Orang	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	310.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR						**600.000.000,00**							**896.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**600.000.000,00**							**896.000.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**600.000.000,00**							**896.000.000,00**	
21.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**886.589.180.582,00**							**806.456.501.700,00**	
			Persentase Layananan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	-		-	100 %	300.000.000,00						-	259.000.000,00	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						5.566.284.720,00					-		4.809.846.200,00	
		-						5.566.284.720,00					-		4.809.846.200,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	3.058.909.000,00						-	2.700.265.000,00	
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						155.518.000,00							125.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	155.518.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	125.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						2.792.650.000,00					-		3.085.251.000,00	
		-						2.792.650.000,00					-		3.085.251.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	542.000.000,00						-	643.956.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	1.094.490.000,00						-	1.201.795.000,00	
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						4.500.000,00							21.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	1 Paket	4.500.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	21.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						85.042.000,00							33.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	85.042.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	33.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						3.725.172.480,00					-		4.158.089.470,00	
		-						3.725.172.480,00					-		4.158.089.470,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	1.136.695.880,00						-	1.216.295.400,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	2.547.876.600,00						-	2.891.494.070,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	40.600.000,00						-	50.300.000,00	
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.200.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	1.200.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	2.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						15.840.000,00							8.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	15.840.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	8.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						18.900.000,00							64.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	18.900.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	64.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						6.176.476.000,00					-		6.446.515.030,00	
		-						6.176.476.000,00					-		6.446.515.030,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	-	906.426.000,00						-	989.564.030,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	130.050.000,00						-	196.951.000,00	
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						19.000.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	1 Unit	19.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	6.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	1 Unit	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	2.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
22.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**252.028.537.640,00**							**345.215.000.000,00**	
			Persentase Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)	-		-	87 %	300.000.000,00						-	415.000.000,00	
			Skor Kemampuan Literasi SMA	-		-	62,54 %	300.000.000,00						-	415.000.000,00	
			Skor Kemampuan Literasi SMK	-		-	62,44 %	0,00						-	110.000.000,00	
			Skor Kemampuan Numerasi SMA	-		-	57,45 %	300.000.000,00						-	415.000.000,00	
			Skor Kemampuan Numerasi SMK	-		-	57,68 %	0,00						-	110.000.000,00	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						162.678.537.640,00					-		243.435.000.000,00	
		-						162.678.537.640,00					-		243.435.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	-	3.300.000.000,00						-	3.395.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	-	22.000.000.000,00						-	25.000.000.000,00	
	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas						0,00							110.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	25 Peserta didik	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	110.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						300.000.000,00							305.000.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	25 Orang	300.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	305.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						52.500.000.000,00					-		59.500.000.000,00	
		-						52.500.000.000,00					-		59.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	-	7.000.000.000,00						-	10.000.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	-	5.000.000.000,00						-	8.000.000.000,00	
	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan						0,00							110.000.000,00	
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	25 Peserta didik	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	110.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						0,00							110.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	25 Orang	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	110.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
		CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN BURU						**599.826.000,00**							**2.009.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**599.826.000,00**							**2.009.000.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**599.826.000,00**							**2.009.000.000,00**	
23.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**886.589.180.582,00**							**806.456.501.700,00**	
			Persentase Layananan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	-		-	100 %	299.826.000,00						-	254.000.000,00	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						5.566.284.720,00					-		4.809.846.200,00	
		-						5.566.284.720,00					-		4.809.846.200,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	3.058.909.000,00						-	2.700.265.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.442.491.720,00						-	1.435.672.700,00	
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						39.600.000,00							4.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	39.600.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	4.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN BURU
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						108.026.000,00							84.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	108.026.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	84.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN BURU
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						2.792.650.000,00					-		3.085.251.000,00	
		-						2.792.650.000,00					-		3.085.251.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	542.000.000,00						-	643.956.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	1.094.490.000,00						-	1.201.795.000,00	
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						20.500.000,00							26.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	1 Paket	20.500.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	26.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN BURU
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00							65.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	20.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	65.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN BURU
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						3.725.172.480,00					-		4.158.089.470,00	
		-						3.725.172.480,00					-		4.158.089.470,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	1.136.695.880,00						-	1.216.295.400,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	2.547.876.600,00						-	2.891.494.070,00	
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						18.600.000,00							11.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	18.600.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN BURU
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						60.000.000,00							57.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	60.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	57.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN BURU
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						6.176.476.000,00					-		6.446.515.030,00	
		-						6.176.476.000,00					-		6.446.515.030,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	-	906.426.000,00						-	989.564.030,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	130.050.000,00						-	196.951.000,00	
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						33.100.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	1 Unit	33.100.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN BURU
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	1 Unit	0,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	2.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN BURU
24.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**252.028.537.640,00**							**345.215.000.000,00**	
			Persentase Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)	-		-	87 %	300.000.000,00						-	615.000.000,00	
			Persentase Anak Usia 4-18 Tahun penyandanga Disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusu (APS)	-		-	67 %	0,00						-	520.000.000,00	
			Skor Kemampuan Literasi SLB	-		-	57,03 %	0,00						-	520.000.000,00	
			Skor Kemampuan Literasi SMA	-		-	62,54 %	300.000.000,00						-	615.000.000,00	
			Skor Kemampuan Literasi SMK	-		-	62,44 %	0,00						-	310.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Skor Kemampuan Numerasi SLB	-		-	47,24 %	0,00						-	520.000.000,00	
			Skor Kemampuan Numerasi SMA	-		-	57,45 %	300.000.000,00						-	615.000.000,00	
			Skor Kemampuan Numerasi SMK	-		-	57,68 %	0,00						-	310.000.000,00	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						162.678.537.640,00					-		243.435.000.000,00	
		-						162.678.537.640,00					-		243.435.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	-	3.300.000.000,00						-	3.395.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	-	22.000.000.000,00						-	25.000.000.000,00	
	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas						0,00							310.000.000,00	
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	25 Peserta didik	0,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-	-	310.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN BURU
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						300.000.000,00							305.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	25 Orang	300.000.000,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	305.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN BURU
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						52.500.000.000,00					-		59.500.000.000,00	
		-						52.500.000.000,00					-		59.500.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	-	7.000.000.000,00						-	10.000.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	-	5.000.000.000,00						-	8.000.000.000,00	
	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan						0,00							310.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	25 Peserta didik	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	310.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN BURU
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						0,00							310.000.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	25 Orang	0,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	310.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN BURU
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus						36.850.000.000,00					-		42.280.000.000,00	
		-						36.850.000.000,00					-		42.280.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	-	0,00						-	2.380.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	-	4.750.000.000,00						-	7.120.000.000,00	
	1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus						0,00							310.000.000,00	
		Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	25 Peserta Didik	0,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	310.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN BURU
	1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus						0,00							210.000.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	25 Orang	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	210.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN BURU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN BURU SELATAN						**600.000.000,00**							**2.115.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**600.000.000,00**							**2.115.000.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**600.000.000,00**							**2.115.000.000,00**	
25.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**886.589.180.582,00**							**806.456.501.700,00**	
			Persentase Layananan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	-		-	100 %	300.000.000,00						-	260.000.000,00	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						5.566.284.720,00					-		4.809.846.200,00	
		-						5.566.284.720,00					-		4.809.846.200,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	3.058.909.000,00						-	2.700.265.000,00	
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						149.875.000,00							115.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	149.875.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	115.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN BURU SELATAN
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						2.792.650.000,00					-		3.085.251.000,00	
		-						2.792.650.000,00					-		3.085.251.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	542.000.000,00						-	643.956.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	1.094.490.000,00						-	1.201.795.000,00	
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							4.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	1 Paket	0,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	4.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN BURU SELATAN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						40.848.000,00							47.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	40.848.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	47.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN BURU SELATAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						3.725.172.480,00					-		4.158.089.470,00	
		-						3.725.172.480,00					-		4.158.089.470,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	1.136.695.880,00						-	1.216.295.400,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	2.547.876.600,00						-	2.891.494.070,00	
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						12.758.400,00							9.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	12.758.400,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	9.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN BURU SELATAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						63.052.600,00							68.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	63.052.600,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	68.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN BURU SELATAN
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						6.176.476.000,00					-		6.446.515.030,00	
		-						6.176.476.000,00					-		6.446.515.030,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	-	906.426.000,00						-	989.564.030,00	
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						33.466.000,00							17.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	1 Unit	33.466.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	17.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN BURU SELATAN
26.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**252.028.537.640,00**							**345.215.000.000,00**	
			Persentase Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)	-		-	87 %	300.000.000,00						-	615.000.000,00	
			Persentase Anak Usia 4-18 Tahun penyandanga Disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusu (APS)	-		-	67 %	0,00						-	310.000.000,00	
			Skor Kemampuan Literasi SLB	-		-	57,03 %	0,00						-	310.000.000,00	
			Skor Kemampuan Literasi SMA	-		-	62,54 %	300.000.000,00						-	615.000.000,00	
			Skor Kemampuan Literasi SMK	-		-	62,44 %	0,00						-	310.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Skor Kemampuan Numerasi SLB	-		-	47,24 %	0,00						-	310.000.000,00	
			Skor Kemampuan Numerasi SMA	-		-	57,45 %	300.000.000,00						-	615.000.000,00	
			Skor Kemampuan Numerasi SMK	-		-	57,68 %	0,00						-	310.000.000,00	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						162.678.537.640,00					-		243.435.000.000,00	
		-						162.678.537.640,00					-		243.435.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	-	3.300.000.000,00						-	3.395.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	-	22.000.000.000,00						-	25.000.000.000,00	
	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas						0,00							310.000.000,00	
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	25 Peserta didik	0,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	310.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN BURU SELATAN
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						300.000.000,00							305.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	25 Orang	300.000.000,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	305.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN BURU SELATAN
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						52.500.000.000,00					-		59.500.000.000,00	
		-						52.500.000.000,00					-		59.500.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	-	7.000.000.000,00						-	10.000.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	-	5.000.000.000,00						-	8.000.000.000,00	
	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan						0,00							310.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	25 Peserta didik	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	310.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN BURU SELATAN
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						0,00							310.000.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	25 Orang	0,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	310.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN BURU SELATAN
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus						36.850.000.000,00					-		42.280.000.000,00	
		-						36.850.000.000,00					-		42.280.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	-	0,00						-	2.380.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	-	4.750.000.000,00						-	7.120.000.000,00	
	1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus						0,00							310.000.000,00	
		Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	25 Peserta Didik	0,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	310.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN BURU SELATAN
	1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus						0,00							310.000.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	25 Orang	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	310.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN BURU SELATAN
		CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KOTA TUAL						**600.000.000,00**							**2.013.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**600.000.000,00**							**2.013.000.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**600.000.000,00**							**2.013.000.000,00**	
27.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**886.589.180.582,00**							**806.456.501.700,00**	
			Persentase Layananan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	-		-	100 %	300.000.000,00						-	307.000.000,00	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						5.566.284.720,00					-		4.809.846.200,00	
		-						5.566.284.720,00					-		4.809.846.200,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	3.058.909.000,00						-	2.700.265.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.442.491.720,00						-	1.435.672.700,00	
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						12.947.000,00							9.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	12.947.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	9.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KOTA TUAL
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						191.283.000,00							136.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	191.283.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	136.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KOTA TUAL
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						2.792.650.000,00					-		3.085.251.000,00	
		-						2.792.650.000,00					-		3.085.251.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	542.000.000,00						-	643.956.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	-	1.156.160.000,00						-	1.239.500.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	1.094.490.000,00						-	1.201.795.000,00	
	1.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						56.210.000,00							51.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	1 Unit	56.210.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	51.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KOTA TUAL
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	1 Paket	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	15.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KOTA TUAL
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.600.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	5.600.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	6.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KOTA TUAL
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						3.725.172.480,00					-		4.158.089.470,00	
		-						3.725.172.480,00					-		4.158.089.470,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	1.136.695.880,00						-	1.216.295.400,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	2.547.876.600,00						-	2.891.494.070,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	40.600.000,00						-	50.300.000,00	
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						700.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	700.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	2.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KOTA TUAL
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						0,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	6.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KOTA TUAL
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							67.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	0,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	67.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KOTA TUAL
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						6.176.476.000,00					-		6.446.515.030,00	
		-						6.176.476.000,00					-		6.446.515.030,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	-	906.426.000,00						-	989.564.030,00	
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						33.260.000,00							21.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	1 Unit	33.260.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	21.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KOTA TUAL
28.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**252.028.537.640,00**							**345.215.000.000,00**	
			Persentase Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)	-		-	87 %	300.000.000,00						-	310.000.000,00	
			Persentase Anak Usia 4-18 Tahun penyandanga Disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusu (APS)	-		-	67 %	0,00						-	460.000.000,00	
			Skor Kemampuan Literasi SLB	-		-	57,03 %	0,00						-	460.000.000,00	
			Skor Kemampuan Literasi SMA	-		-	62,54 %	300.000.000,00						-	310.000.000,00	
			Skor Kemampuan Literasi SMK	-		-	62,44 %	0,00						-	310.000.000,00	
			Skor Kemampuan Numerasi SLB	-		-	47,24 %	0,00						-	460.000.000,00	
			Skor Kemampuan Numerasi SMA	-		-	57,45 %	300.000.000,00						-	310.000.000,00	
			Skor Kemampuan Numerasi SMK	-		-	57,68 %	0,00						-	310.000.000,00	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						162.678.537.640,00					-		243.435.000.000,00	
		-						162.678.537.640,00					-		243.435.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	-	3.300.000.000,00						-	3.395.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	-	22.000.000.000,00						-	25.000.000.000,00	
	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas						0,00							310.000.000,00	
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	25 Peserta didik	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	310.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KOTA TUAL
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						300.000.000,00							310.000.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	25 Orang	300.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	310.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KOTA TUAL
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						52.500.000.000,00					-		59.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						52.500.000.000,00					-		59.500.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	-	7.000.000.000,00						-	10.000.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	-	5.000.000.000,00						-	8.000.000.000,00	
	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan						0,00							310.000.000,00	
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	25 Peserta didik	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	310.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KOTA TUAL
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						0,00							310.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	25 Orang	0,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	310.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KOTA TUAL
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus						36.850.000.000,00					-		42.280.000.000,00	
		-						36.850.000.000,00					-		42.280.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	-	0,00						-	2.380.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	-	4.750.000.000,00						-	7.120.000.000,00	
	1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus						0,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	7 Peserta Didik	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	150.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KOTA TUAL
	1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus						0,00							310.000.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	7 Orang	0,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	310.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KOTA TUAL
		CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN MALUKU TENGGARA						**598.000.000,00**							**2.171.095.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**598.000.000,00**							**2.171.095.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**598.000.000,00**							**2.171.095.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
29.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**886.589.180.582,00**							**806.456.501.700,00**	
			Persentase Layananan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	-		-	100 %	298.000.000,00						-	290.095.000,00	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						5.566.284.720,00					-		4.809.846.200,00	
		-						5.566.284.720,00					-		4.809.846.200,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	3.058.909.000,00						-	2.700.265.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.442.491.720,00						-	1.435.672.700,00	
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						33.980.520,00							21.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	33.980.520,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	21.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN MALUKU TENGGARA
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						194.142.000,00							109.444.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	194.142.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	109.444.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN MALUKU TENGGARA
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						2.792.650.000,00					-		3.085.251.000,00	
		-						2.792.650.000,00					-		3.085.251.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	542.000.000,00						-	643.956.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	-	1.156.160.000,00						-	1.239.500.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	1.094.490.000,00						-	1.201.795.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							27.500.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	1 Unit	0,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	27.500.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN MALUKU TENGGARA
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							10.956.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	1 Paket	0,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.956.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN MALUKU TENGGARA
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							18.095.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	0,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	18.095.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN MALUKU TENGGARA
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						3.725.172.480,00					-		4.158.089.470,00	
		-						3.725.172.480,00					-		4.158.089.470,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	1.136.695.880,00						-	1.216.295.400,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	2.547.876.600,00						-	2.891.494.070,00	
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						11.277.480,00							10.948.400,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	11.277.480,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	10.948.400,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN MALUKU TENGGARA
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						6.100.000,00							63.363.570,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	6.100.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	63.363.570,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN MALUKU TENGGARA
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						6.176.476.000,00					-		6.446.515.030,00	
		-						6.176.476.000,00					-		6.446.515.030,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	-	906.426.000,00						-	989.564.030,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	130.050.000,00						-	196.951.000,00	
	1.01.01.1.09.0001	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						48.000.000,00							28.788.030,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	1 Unit	48.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	28.788.030,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN MALUKU TENGGARA
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4.500.000,00							21.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	1 Unit	4.500.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	21.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN MALUKU TENGGARA
30.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**252.028.537.640,00**							**345.215.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)	-		-	87 %	300.000.000,00						-	310.000.000,00	
			Persentase Anak Usia 4-18 Tahun penyandanga Disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusu (APS)	-		-	67 %	0,00						-	310.000.000,00	
			Skor Kemampuan Literasi SLB	-		-	57,03 %	0,00						-	310.000.000,00	
			Skor Kemampuan Literasi SMA	-		-	62,54 %	300.000.000,00						-	310.000.000,00	
			Skor Kemampuan Literasi SMK	-		-	62,44 %	0,00						-	310.000.000,00	
			Skor Kemampuan Numerasi SLB	-		-	47,24 %	0,00						-	310.000.000,00	
			Skor Kemampuan Numerasi SMA	-		-	57,45 %	300.000.000,00						-	310.000.000,00	
			Skor Kemampuan Numerasi SMK	-		-	57,68 %	0,00						-	310.000.000,00	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						162.678.537.640,00					-		243.435.000.000,00	
		-						162.678.537.640,00					-		243.435.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	-	3.300.000.000,00						-	3.395.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	-	22.000.000.000,00						-	25.000.000.000,00	
	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas						0,00							310.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	25 Peserta didik	0,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	310.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN MALUKU TENGGARA
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						300.000.000,00							310.000.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	25 Orang	300.000.000,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	310.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN MALUKU TENGGARA
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						52.500.000.000,00					-		59.500.000.000,00	
		-						52.500.000.000,00					-		59.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	-	7.000.000.000,00						-	10.000.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	-	5.000.000.000,00						-	8.000.000.000,00	
	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan						0,00							310.000.000,00	
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	25 Peserta didik	0,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	310.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN MALUKU TENGGARA
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						0,00							310.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	25 Orang	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	310.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN MALUKU TENGGARA
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus						36.850.000.000,00					-		42.280.000.000,00	
		-						36.850.000.000,00					-		42.280.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	-	0,00						-	2.380.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	-	4.750.000.000,00						-	7.120.000.000,00	
	1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus						0,00							310.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	25 Peserta Didik	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	310.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN MALUKU TENGGARA
	1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus						0,00							310.000.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	15 Orang	0,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	310.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN MALUKU TENGGARA
		CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR						**600.000.000,00**							**2.100.746.700,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**600.000.000,00**							**2.100.746.700,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**600.000.000,00**							**2.100.746.700,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
31.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**886.589.180.582,00**							**806.456.501.700,00**	
			Persentase Layananan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	-		-	100 %	300.000.000,00						-	240.746.700,00	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						5.566.284.720,00					-		4.809.846.200,00	
		-						5.566.284.720,00					-		4.809.846.200,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	3.058.909.000,00						-	2.700.265.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.442.491.720,00						-	1.435.672.700,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	64.884.000,00						-	68.908.500,00	
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.664.000,00							1.100.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	1.664.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	1.100.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						11.696.000,00							3.387.700,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	11.696.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	3.387.700,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						193.670.000,00							133.374.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	193.670.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	133.374.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						2.792.650.000,00					-		3.085.251.000,00	
		-						2.792.650.000,00					-		3.085.251.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	542.000.000,00						-	643.956.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	1.094.490.000,00						-	1.201.795.000,00	
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	1 Paket	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						46.000.000,00							26.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	46.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	26.500.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						3.725.172.480,00					-		4.158.089.470,00	
		-						3.725.172.480,00					-		4.158.089.470,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	1.136.695.880,00						-	1.216.295.400,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	2.547.876.600,00						-	2.891.494.070,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	40.600.000,00						-	50.300.000,00	
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	0,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	2.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						27.420.000,00							15.110.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	27.420.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	15.110.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	0,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	40.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						6.176.476.000,00					-		6.446.515.030,00	
		-						6.176.476.000,00					-		6.446.515.030,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	-	906.426.000,00						-	989.564.030,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	130.050.000,00						-	196.951.000,00	
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						16.500.000,00							9.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	1 Unit	16.500.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	9.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						3.050.000,00							5.275.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	1 Unit	3.050.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.275.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
32.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**252.028.537.640,00**							**345.215.000.000,00**	
			Persentase Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)	-		-	87 %	300.000.000,00						-	310.000.000,00	
			Persentase Anak Usia 4-18 Tahun penyandanga Disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusu (APS)	-		-	67 %	0,00						-	310.000.000,00	
			Skor Kemampuan Literasi SLB	-		-	57,03 %	0,00						-	310.000.000,00	
			Skor Kemampuan Literasi SMA	-		-	62,54 %	300.000.000,00						-	310.000.000,00	
			Skor Kemampuan Literasi SMK	-		-	62,44 %	0,00						-	310.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Skor Kemampuan Numerasi SLB	-		-	47,24 %	0,00						-	310.000.000,00	
			Skor Kemampuan Numerasi SMA	-		-	57,45 %	300.000.000,00						-	310.000.000,00	
			Skor Kemampuan Numerasi SMK	-		-	57,68 %	0,00						-	310.000.000,00	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						162.678.537.640,00					-		243.435.000.000,00	
		-						162.678.537.640,00					-		243.435.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	-	3.300.000.000,00						-	3.395.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	-	22.000.000.000,00						-	25.000.000.000,00	
	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas						0,00							310.000.000,00	
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	25 Peserta didik	0,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	310.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						300.000.000,00							310.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	25 Orang	300.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	310.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						52.500.000.000,00					-		59.500.000.000,00	
		-						52.500.000.000,00					-		59.500.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	-	7.000.000.000,00						-	10.000.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	-	5.000.000.000,00						-	8.000.000.000,00	
	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan						0,00							310.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	25 Peserta didik	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	310.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						0,00							310.000.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	25 Orang	0,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	310.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus						36.850.000.000,00					-		42.280.000.000,00	
		-						36.850.000.000,00					-		42.280.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	-	0,00						-	2.380.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	-	4.750.000.000,00						-	7.120.000.000,00	
	1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus						0,00							310.000.000,00	
		Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	25 Peserta Didik	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		-	310.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
	1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus						0,00							310.000.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	10 Orang	0,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	310.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
		CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN KEPULAUAN ARU						**600.000.000,00**							**2.209.847.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**600.000.000,00**							**2.209.847.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**600.000.000,00**							**2.209.847.000,00**	
33.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**886.589.180.582,00**							**806.456.501.700,00**	
			Persentase Layananan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	-		-	100 %	300.000.000,00						-	349.847.000,00	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						5.566.284.720,00					-		4.809.846.200,00	
		-						5.566.284.720,00					-		4.809.846.200,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	3.058.909.000,00						-	2.700.265.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.442.491.720,00						-	1.435.672.700,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	64.884.000,00						-	68.908.500,00	
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						720.000,00							3.008.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	720.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	3.008.500,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN KEPULAUAN ARU
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						30.980.000,00							21.685.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	30.980.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	21.685.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN KEPULAUAN ARU
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						130.174.000,00							142.954.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	130.174.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	142.954.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN KEPULAUAN ARU
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						2.792.650.000,00					-		3.085.251.000,00	
		-						2.792.650.000,00					-		3.085.251.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	542.000.000,00						-	643.956.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	-	1.156.160.000,00						-	1.239.500.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	1.094.490.000,00						-	1.201.795.000,00	
	1.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						40.950.000,00							51.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	1 Unit	40.950.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	51.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN KEPULAUAN ARU
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							5.500.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	1 Paket	0,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.500.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN KEPULAUAN ARU
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							23.200.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	23.200.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN KEPULAUAN ARU
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						3.725.172.480,00					-		4.158.089.470,00	
		-						3.725.172.480,00					-		4.158.089.470,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	1.136.695.880,00						-	1.216.295.400,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	2.547.876.600,00						-	2.891.494.070,00	
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						11.400.000,00							12.937.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	11.400.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	12.937.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN KEPULAUAN ARU
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						61.576.000,00							60.486.500,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	61.576.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	60.486.500,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN KEPULAUAN ARU
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						6.176.476.000,00					-		6.446.515.030,00	
		-						6.176.476.000,00					-		6.446.515.030,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	-	906.426.000,00						-	989.564.030,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	130.050.000,00						-	196.951.000,00	
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						24.200.000,00							26.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	1 Unit	24.200.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	26.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN KEPULAUAN ARU
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							3.076.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	1 Unit	0,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-		-	3.076.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN KEPULAUAN ARU
34.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**252.028.537.640,00**							**345.215.000.000,00**	
			Persentase Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)	-		-	87 %	300.000.000,00						-	310.000.000,00	
			Persentase Anak Usia 4-18 Tahun penyandanga Disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusu (APS)	-		-	67 %	0,00						-	310.000.000,00	
			Skor Kemampuan Literasi SLB	-		-	57,03 %	0,00						-	310.000.000,00	
			Skor Kemampuan Literasi SMA	-		-	62,54 %	300.000.000,00						-	310.000.000,00	
			Skor Kemampuan Literasi SMK	-		-	62,44 %	0,00						-	310.000.000,00	
			Skor Kemampuan Numerasi SLB	-		-	47,24 %	0,00						-	310.000.000,00	
			Skor Kemampuan Numerasi SMA	-		-	57,45 %	300.000.000,00						-	310.000.000,00	
			Skor Kemampuan Numerasi SMK	-		-	57,68 %	0,00						-	310.000.000,00	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						162.678.537.640,00					-		243.435.000.000,00	
		-						162.678.537.640,00					-		243.435.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	-	3.300.000.000,00						-	3.395.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	-	22.000.000.000,00						-	25.000.000.000,00	
	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas						0,00							310.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	25 Peserta didik	0,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	310.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN KEPULAUAN ARU
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						300.000.000,00							310.000.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	25 Orang	300.000.000,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	310.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN KEPULAUAN ARU
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						52.500.000.000,00					-		59.500.000.000,00	
		-						52.500.000.000,00					-		59.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	-	7.000.000.000,00						-	10.000.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	-	5.000.000.000,00						-	8.000.000.000,00	
	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan						0,00							310.000.000,00	
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	25 Peserta didik	0,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	310.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN KEPULAUAN ARU
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						0,00							310.000.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	25 Orang	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		-	310.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN KEPULAUAN ARU
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus						36.850.000.000,00					-		42.280.000.000,00	
		-						36.850.000.000,00					-		42.280.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	-	0,00						-	2.380.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	-	4.750.000.000,00						-	7.120.000.000,00	
	1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus						0,00							310.000.000,00	
		Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	25 Peserta Didik	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		-	310.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN KEPULAUAN ARU
	1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus						0,00							310.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	10 Orang	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		-	310.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN KEPULAUAN ARU
		CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA						**600.000.000,00**							**1.506.713.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**600.000.000,00**							**1.506.713.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**600.000.000,00**							**1.506.713.000,00**	
35.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**886.589.180.582,00**							**806.456.501.700,00**	
			Persentase Layananan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	-		-	100 %	300.000.000,00						-	266.713.000,00	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						5.566.284.720,00					-		4.809.846.200,00	
		-						5.566.284.720,00					-		4.809.846.200,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	3.058.909.000,00						-	2.700.265.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.442.491.720,00						-	1.435.672.700,00	
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						4.550.000,00							7.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	4.550.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	7.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						199.692.000,00							139.493.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	199.692.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	139.493.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						2.792.650.000,00					-		3.085.251.000,00	
		-						2.792.650.000,00					-		3.085.251.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	542.000.000,00						-	643.956.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	1.094.490.000,00						-	1.201.795.000,00	
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							20.500.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	1 Paket	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	20.500.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						7.000.000,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	7.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	12.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						3.725.172.480,00					-		4.158.089.470,00	
		-						3.725.172.480,00					-		4.158.089.470,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	1.136.695.880,00						-	1.216.295.400,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	2.547.876.600,00						-	2.891.494.070,00	
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						19.200.000,00							15.300.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	19.200.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	15.300.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						28.248.000,00							40.644.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	28.248.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	40.644.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						6.176.476.000,00					-		6.446.515.030,00	
		-						6.176.476.000,00					-		6.446.515.030,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	-	906.426.000,00						-	989.564.030,00	
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						41.310.000,00							31.776.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	1 Unit	41.310.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	31.776.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
36.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**252.028.537.640,00**							**345.215.000.000,00**	
			Persentase Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)	-		-	87 %	300.000.000,00						-	310.000.000,00	
			Skor Kemampuan Literasi SMA	-		-	62,54 %	300.000.000,00						-	310.000.000,00	
			Skor Kemampuan Literasi SMK	-		-	62,44 %	0,00						-	310.000.000,00	
			Skor Kemampuan Numerasi SMA	-		-	57,45 %	300.000.000,00						-	310.000.000,00	
			Skor Kemampuan Numerasi SMK	-		-	57,68 %	0,00						-	310.000.000,00	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						162.678.537.640,00					-		243.435.000.000,00	
		-						162.678.537.640,00					-		243.435.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	-	3.300.000.000,00						-	3.395.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	-	22.000.000.000,00						-	25.000.000.000,00	
	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas						0,00							310.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	25 Peserta didik	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	310.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						300.000.000,00							310.000.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	25 Orang	300.000.000,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	310.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						52.500.000.000,00					-		59.500.000.000,00	
		-						52.500.000.000,00					-		59.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	-	7.000.000.000,00						-	10.000.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	-	5.000.000.000,00						-	8.000.000.000,00	
	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan						0,00							310.000.000,00	
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	25 Peserta didik	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		-	310.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						0,00							310.000.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	25 Orang	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		-	310.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
		DINAS KESEHATAN						**229.879.959.739,00**							**257.218.816.326,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**229.879.959.739,00**							**257.218.816.326,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**229.879.959.739,00**							**257.218.816.326,00**	
37.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**160.723.552.000,00**							**183.331.893.500,00**	
			NILAI SAKIP	-		-	66,5 persen	142.866.950.000,00						-	163.924.637.500,00	
			Presentasi layanan penunjang urusan pemerintah Daerah	-		-	100 persen	143.003.570.000,00						-	164.463.287.500,00	
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.320.437.000,00					Perencana Dinkes dan RS 11 Kab/Kota, Mitra BAPPEDA dan BPKAD Provinsi Maluku		3.230.537.000,00	
		-						1.320.437.000,00					Perencana Dinkes dan RS 11 Kab/Kota, Mitra BAPPEDA dan BPKAD Provinsi Maluku		3.230.537.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	700.000.000,00						-	750.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	18.500.000,00						-	1.752.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	2.000.000,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	10.000.000,00						-	105.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	452.500.000,00						-	475.000.000,00	
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						0,00							1.732.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	1.732.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						10.000.000,00							105.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	105.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						0,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						450.000.000,00							472.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	1 Laporan	450.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	472.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-		-	1 Data	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						700.000.000,00							750.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	1 Berita Acara	700.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	750.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						140.608.130.000,00					Mitra BPKAD bidang Perencanaan Anggaran, Bidang Akuntansi, BUD dan Bidang pengelolaan Aset Daerah		157.974.300.000,00	
		-						140.608.130.000,00					Mitra BPKAD bidang Perencanaan Anggaran, Bidang Akuntansi, BUD dan Bidang pengelolaan Aset Daerah		157.974.300.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	324.380.000,00						-	340.500.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	0,00						-	54.600.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	33.750.000,00						-	79.200.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	140.250.000.000,00						-	157.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						140.250.000.000,00							157.500.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	1338 Orang/ Bulan	140.250.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	157.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						250.000.000,00							220.500.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	1 Dokumen	250.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	220.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0,00							54.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Maluku	-	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	54.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						10.000.000,00							54.075.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	54.075.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						48.440.000,00					Mitra BPKAD bidang Perencanaan Anggaran dan Bidang pengelolaan Aset Daerah		66.320.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						48.440.000,00					Mitra BPKAD bidang Perencanaan Anggaran dan Bidang pengelolaan Aset Daerah		66.320.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	34.640.000,00						-	51.640.000,00	
	1.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						25.000.000,00							42.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	1 Laporan	25.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	42.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						999.000.000,00					ASN Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, BKD Provinsi Maluku		1.574.800.000,00	
		-						999.000.000,00					ASN Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, BKD Provinsi Maluku		1.574.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	-		-	-	0,00						-	220.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	200.000.000,00						-	430.500.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	799.000.000,00						-	923.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						0,00							323.400.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	75 Paket	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	323.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						0,00							220.500.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	-		-	0 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	-	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	220.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan						0,00							230.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	0 Orang	0,00	Provinsi Maluku	-	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	230.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						3.569.638.000,00					Kantor Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Tamu Dinkes, Lintas OPD dan Kementerian/Lembaga		5.779.040.000,00	
		-						3.569.638.000,00					Kantor Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Tamu Dinkes, Lintas OPD dan Kementerian/Lembaga		5.779.040.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	133.000.000,00						-	574.950.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	710.014.000,00						-	1.118.890.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	795.000.000,00						-	1.134.400.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	522.624.000,00						-	820.200.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	600.000.000,00						-	880.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	599.000.000,00						-	1.029.400.000,00	
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						100.000.000,00							323.400.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	100.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	323.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						100.000.000,00							220.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	100.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	220.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						100.000.000,00							323.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	100.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	323.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						100.000.000,00							323.400.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	100.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	323.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						100.000.000,00							538.650.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	3 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	538.650.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						136.620.000,00							538.650.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	136.620.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	538.650.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						4.411.000.000,00					ASN dan Operasional Kantor Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Maluku		2.387.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						4.411.000.000,00					ASN dan Operasional Kantor Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Maluku		2.387.500.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	695.000.000,00						-	648.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	-	600.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	620.000.000,00						-	342.000.000,00	
	1.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Maluku	-	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	0 Paket	0,00	Provinsi Maluku	-	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						300.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	20 Unit	300.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						5.976.552.000,00					Kantor Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Maluku		7.990.242.500,00	
		-						5.976.552.000,00					Kantor Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Maluku		7.990.242.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	2.648.454.000,00						-	2.766.982.500,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	3.094.998.000,00						-	4.725.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	203.100.000,00						-	463.260.000,00	
	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00							54.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Maluku	-	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	54.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						410.050.000,00							430.562.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	410.050.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	430.562.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						196.900.000,00							1.800.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	196.900.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	1.800.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.592.355.000,00					Kantor Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Maluku		4.111.354.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						3.592.355.000,00					Kantor Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Maluku		4.111.354.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	672.000.000,00						-	881.500.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	-	325.000.000,00						-	305.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	786.000.000,00						-	850.200.000,00	
	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						175.000.000,00							155.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	5 Unit	175.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	155.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						100.000.000,00							105.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	25 Unit	100.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	105.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Maluku	-	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	DINAS KESEHATAN
38.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**151.577.741.500,00**							**178.835.108.443,00**	
			Angka Kematian Balita	-		-	26,5 per 1.000 KH	81.500.639.739,00						-	80.399.749.660,00	
			Angka Kematian Bayi	-		-	11,28 per 1.000 KH	81.500.639.739,00						-	80.399.749.660,00	
			Cakupan penerimaan Imunisasi Bayi lengkap	-		-	90 persen	10.472.102.219,00						-	24.992.037.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Hypertensi daalm pengendalian	-		-	20 persen	14.641.759.070,00						-	1.156.000.000,00	
			Hypertensi dalam pengendalian	-		-	20 persen	66.858.880.669,00						-	79.243.749.660,00	
			Jumlah kab/kota eliminasi malaria	-		-	8 kab/kota	14.641.759.070,00						-	1.156.000.000,00	
			Jumlah kab/kota Eliminasi Malaria	-		-	8 kab/kota	56.386.778.450,00						-	55.879.212.660,00	
			Jumlah Kab/Kota Eliminasi Malaria	-		-	8 kab/kota	10.472.102.219,00						-	24.992.037.000,00	
			ODIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ARV	-		-	90 persen	71.028.537.520,00						-	57.035.212.660,00	
			Presentasi fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi paripurna	-		-	50 persen	14.641.759.070,00						-	1.156.000.000,00	
			Presetasi fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi paripurna	-		-	50 persen	10.472.102.219,00						-	24.992.037.000,00	
			Prsentasi fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi paripurna	-		-	50 persen	56.386.778.450,00						-	55.879.212.660,00	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						43.828.304.980,00					Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu, Instalasi Farmasi Provinsi kab/kota dan Masyarakat		80.457.891.983,00	
		-						43.828.304.980,00					Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu, Instalasi Farmasi Provinsi kab/kota dan Masyarakat		80.457.891.983,00	
			Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	-		-	-	1.550.000.000,00						-	1.627.500.000,00	
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		-	-	30.000.000,00						-	2.122.600.000,00	
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-		-	-	23.258.202.220,00						-	25.755.037.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	-		-	-	331.250.000,00						-	11.233.437.500,00	
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	-		-	-	1.257.499.999,00						-	4.100.000.000,00	
	1.02.02.1.01.0006	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)						0,00								10.837.500.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	-		-	9 Layanan	0,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	10.837.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0020	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan						0,00								2.050.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		-	29 Unit	0,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	2.050.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan						1.550.000.000,00							1.627.500.000,00	
		Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	-		-	1 Dokumen	1.550.000.000,00	Provinsi Maluku	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	1.627.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit						1.257.499.999,00							4.100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	-		-	30 Unit	1.257.499.999,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	4.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						7.664.602.220,00							6.377.037.000,00	
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-		-	4 Paket	7.664.602.220,00	Provinsi Maluku	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	6.377.037.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						92.190.677.450,00					Ibu Hamil, ibu bersalin, Ibu menyusui, Bayi, Balita, Anak sekolah, remaja, lansia (siklus hidup), Masyarakat, tenaga kesehatan, lintas program, lintas sektor, LSM		95.251.816.460,00	
		-						92.190.677.450,00					Ibu Hamil, ibu bersalin, Ibu menyusui, Bayi, Balita, Anak sekolah, remaja, lansia (siklus hidup), Masyarakat, tenaga kesehatan, lintas program, lintas sektor, LSM		95.251.816.460,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	-		-	-	300.000.000,00						-	325.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	-		-	-	2.373.246.000,00						-	1.300.650.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-		-	-	44.071.500.000,00						-	43.671.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	-	2.235.750.000,00						-	1.820.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	-		-	-	95.158.000,00						-	80.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	-		-	-	1.292.500.000,00						-	1.123.287.493,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	-	1.217.548.000,00						-	1.380.962.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	-		-	-	110.000.000,00						-	220.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	-		-	-	0,00						-	288.750.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	-		-	-	0,00						-	1.054.175.167,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-		-	-	2.000.000.000,00						-	1.627.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	-	456.250.000,00						-	625.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	2.301.377.000,00						-	2.911.750.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	650.000.450,00						-	700.000.000,00	
			Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-		-	-	160.000.000,00						-	89.250.000,00	
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	1.000.000.000,00						-	850.000.000,00	
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	-		-	-	1.000.000.000,00						-	850.000.000,00	
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	-		-	-	0,00						-	1.100.000.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	110.000.000,00						-	325.500.000,00	
	1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana						1.000.000.000,00							850.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	-		-	500 Orang	1.000.000.000,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	850.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						1.000.000.000,00							850.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi Sesuai Standar	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	20 Orang	1.000.000.000,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	850.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak						1.292.500.000,00							1.123.287.493,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	-		-	1 Dokumen	1.292.500.000,00	Provinsi Maluku	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	1.123.287.493,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif						0,00							1.054.175.167,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	1.054.175.167,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut						0,00							288.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	288.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						1.935.750.000,00							1.470.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	1 Dokumen	1.935.750.000,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	1.470.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						350.000.000,00							283.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	1 Dokumen	350.000.000,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	283.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya						110.000.000,00							220.500.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	-		-	1 Dokumen	110.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	220.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji						95.158.000,00							80.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	-		-	1 Dokumen	95.158.000,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						44.000.000.000,00							43.575.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-		-	1 Dokumen	44.000.000.000,00	Provinsi Maluku	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	43.575.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						310.000.000,00							325.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	1 Dokumen	310.000.000,00	Provinsi Maluku	Lain-lain PAD Yang Sah	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	325.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota						300.000.000,00							325.500.000,00	
		Terkoordinasi dan Tersinkronisasinya Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	300.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	325.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan						2.296.246.000,00							1.191.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbinanya Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	-		-	2 Dokumen	2.296.246.000,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	1.191.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)						0,00							1.100.000.000,00	
		Tersedianya dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	-		-	1 Unit	0,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	1.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0024	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik						2.000.000.000,00							1.627.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-		-	1 Dokumen	2.000.000.000,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	1.627.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional						160.000.000,00							89.250.000,00	
		Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-		-	100 Paket	160.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	89.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0032	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						1.887.124.000,00							1.900.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	1.887.124.000,00	Provinsi Maluku	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	1.900.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0036	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						110.000.000,00							325.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	1 Laporan	110.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	325.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0038	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						650.000.450,00							700.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	1 Laporan	650.000.450,00	Provinsi Maluku	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						15.011.259.070,00					Fasilitas Kesehatan (RS, Puskesmas, Pustu) Dinas Kesehatan Provinsi dan kb/kota		2.684.650.000,00	
		-						15.011.259.070,00					Fasilitas Kesehatan (RS, Puskesmas, Pustu) Dinas Kesehatan Provinsi dan kb/kota		2.684.650.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-		-	-	15.011.259.070,00						-	2.684.650.000,00	
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						14.641.759.070,00							1.156.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-		-	1 Dokumen	14.641.759.070,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	1.156.000.000,00	DINAS KESEHATAN
39.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**22.685.361.230,00**							**30.529.924.161,00**	
			Presentasi peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan	-		-	55 persen	2.460.750.000,00						-	5.439.929.166,00	
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi						18.066.009.230,00					SDM Kesehatan Provinsi dan kab/kota		21.061.115.929,00	
		-						18.066.009.230,00					SDM Kesehatan Provinsi dan kab/kota		21.061.115.929,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-		-	-	18.066.009.230,00						-	21.061.115.929,00	
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan						2.000.000.000,00							2.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Memenuhi Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-		-	11 Orang	2.000.000.000,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						4.619.352.000,00					SDM Kesehatan Provinsi dan kab/kota		9.468.808.232,00	
		-						4.619.352.000,00					SDM Kesehatan Provinsi dan kab/kota		9.468.808.232,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-		-	-	205.000.000,00						-	788.750.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	-		-	-	4.414.352.000,00						-	8.680.058.232,00	
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan						335.750.000,00							3.151.179.166,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	-		-	25 Orang	335.750.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	3.151.179.166,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan						125.000.000,00							288.750.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-		-	1 Dokumen	125.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	288.750.000,00	DINAS KESEHATAN
40.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**						**310.000.000,00**							**651.000.000,00**	
			Presentasi cakupan sediaan farmasi,alkes dan makan minum	-		-	84 persen	155.000.000,00						-	325.500.000,00	
	1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)						155.000.000,00					PBF dan cabang dan penyalur alat kesehatan		325.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						155.000.000,00					PBF dan cabang dan penyalur alat kesehatan		325.500.000,00	
			Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	-		-	-	155.000.000,00						-	325.500.000,00	
	1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK						155.000.000,00							325.500.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	-		-	11 Sarana	155.000.000,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	325.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)						155.000.000,00					PBF dan cabang dan penyalur alat kesehatan		325.500.000,00	
		-						155.000.000,00					PBF dan cabang dan penyalur alat kesehatan		325.500.000,00	
			Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	-		-	-	155.000.000,00						-	325.500.000,00	
	1.02.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional						155.000.000,00							325.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	-		-	11 Sarana	155.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	325.500.000,00	DINAS KESEHATAN
41.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**1.067.500.000,00**							**1.232.750.000,00**	
			Presentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	-		-	70 persen	985.000.000,00						-	540.750.000,00	
	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi						573.554.460,00					UKBM, Kader, LSM dan Masyarakat		540.750.000,00	
		-						573.554.460,00					UKBM, Kader, LSM dan Masyarakat		540.750.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	-		-	-	573.554.460,00						-	540.750.000,00	
	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi						573.554.460,00							540.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	-		-	1 Dokumen	573.554.460,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	540.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi						493.945.540,00					Masyarakat, Dinkes Provinsi dan kab/kota, Lintas sektor		692.000.000,00	
		-						493.945.540,00					Masyarakat, Dinkes Provinsi dan kab/kota, Lintas sektor		692.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-		-	-	493.945.540,00						-	692.000.000,00	
	1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat						411.445.540,00							540.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-		-	1 Dokumen	411.445.540,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	540.750.000,00	DINAS KESEHATAN
		BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN						**8.846.225.000,00**							**16.608.339.230,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**8.846.225.000,00**							**16.608.339.230,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**8.846.225.000,00**							**16.608.339.230,00**	
42.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**160.723.552.000,00**							**183.331.893.500,00**	
			NILAI SAKIP	-		-	66,5 persen	2.439.380.000,00						-	3.432.500.000,00	
			Presentasi layanan penunjang urusan pemerintah Daerah	-		-	100 persen	2.696.684.000,00						-	3.932.500.000,00	
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.320.437.000,00					-		3.230.537.000,00	
		-						1.320.437.000,00					-		3.230.537.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	2.000.000,00						-	2.500.000,00	
	1.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						2.000.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	2 Dokumen	2.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Karang Panjang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.500.000,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						140.608.130.000,00					-		157.974.300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						140.608.130.000,00					-		157.974.300.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	324.380.000,00						-	340.500.000,00	
	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						74.380.000,00							120.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	1 Dokumen	74.380.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Karang Panjang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	120.000.000,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						999.000.000,00					-		1.574.800.000,00	
		-						999.000.000,00					-		1.574.800.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	799.000.000,00						-	923.800.000,00	
	1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						75.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	1 Paket	75.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Karang Panjang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	150.000.000,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						3.569.638.000,00					-		5.779.040.000,00	
		-						3.569.638.000,00					-		5.779.040.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	710.014.000,00						-	1.118.890.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	795.000.000,00						-	1.134.400.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	522.624.000,00						-	820.200.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	600.000.000,00						-	880.200.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	599.000.000,00						-	1.029.400.000,00	
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						100.000.000,00							120.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	100.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Karang Panjang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	120.000.000,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						200.000.000,00							400.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	200.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Karang Panjang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	400.000.000,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						100.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	100.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Karang Panjang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	150.000.000,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	50.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Karang Panjang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	100.000.000,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						107.304.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	3 Laporan	107.304.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Karang Panjang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	100.000.000,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						4.411.000.000,00					-		2.387.500.000,00	
		-						4.411.000.000,00					-		2.387.500.000,00	
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-		-	-	200.000.000,00						-	350.000.000,00	
	1.02.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						200.000.000,00							350.000.000,00	
		Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-		-	20 Unit	200.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Karang Panjang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	350.000.000,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						5.976.552.000,00					-		7.990.242.500,00	
		-						5.976.552.000,00					-		7.990.242.500,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	2.648.454.000,00						-	2.766.982.500,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	3.094.998.000,00						-	4.725.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	203.100.000,00						-	463.260.000,00	
	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						160.000.000,00							380.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	5 Laporan	160.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Karang Panjang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	380.000.000,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						700.000.000,00							700.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	3 Laporan	700.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Karang Panjang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	700.000.000,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.078.000.000,00							1.300.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	4 Laporan	1.078.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Karang Panjang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.300.000.000,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.592.355.000,00					-		4.111.354.000,00	
		-						3.592.355.000,00					-		4.111.354.000,00	
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	200.000.000,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	672.000.000,00						-	881.500.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	1.226.855.000,00						-	1.229.454.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	786.000.000,00						-	850.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						200.000.000,00							180.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	3 Unit	200.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Karang Panjang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	180.000.000,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						150.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	4 Unit	150.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Karang Panjang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	250.000.000,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						200.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-		-	15 Unit	200.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Karang Panjang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	250.000.000,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						200.000.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	200.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Karang Panjang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	350.000.000,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN
43.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**151.577.741.500,00**							**178.835.108.443,00**	
			Angka Kematian Balita	-		-	26,5 per 1.000 KH	4.589.541.000,00						-	10.925.839.230,00	
			Angka Kematian Bayi	-		-	11,28 per 1.000 KH	4.589.541.000,00						-	10.925.839.230,00	
			Cakupan penerimaan Imunisasi Bayi lengkap	-		-	90 persen	4.514.541.000,00						-	10.775.839.230,00	
			Hypertensi dalam pengendalian	-		-	20 persen	4.589.541.000,00						-	10.925.839.230,00	
			Jumlah kab/kota Eliminasi Malaria	-		-	8 kab/kota	75.000.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Kab/Kota Eliminasi Malaria	-		-	8 kab/kota	4.514.541.000,00						-	10.775.839.230,00	
			ODIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ARV	-		-	90 persen	75.000.000,00						-	150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Presetasi fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi paripurna	-		-	50 persen	4.514.541.000,00						-	10.775.839.230,00	
			Prsentasi fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi paripurna	-		-	50 persen	75.000.000,00						-	150.000.000,00	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						43.828.304.980,00					-		80.457.891.983,00	
		-						43.828.304.980,00					-		80.457.891.983,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	-		-	-	8.101.684.146,00						-	12.729.352.053,00	
			Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara	-		-	-	540.769.615,00						-	2.725.839.230,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	-		-	-	600.000.000,00						-	1.571.000.000,00	
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-		-	-	23.258.202.220,00						-	25.755.037.000,00	
	1.02.02.1.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya						200.000.000,00							450.000.000,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	-		-	7 Unit	200.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Karang Panjang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	450.000.000,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan						534.771.385,00							2.900.000.000,00	
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	-		-	2 Unit	534.771.385,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Karang Panjang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.900.000.000,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi						540.769.615,00							2.725.839.230,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Telaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara	-		-	8 Unit	540.769.615,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Karang Panjang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.725.839.230,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						3.239.000.000,00							4.700.000.000,00	
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-		-	3 Paket	3.239.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Karang Panjang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	4.700.000.000,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						92.190.677.450,00					-		95.251.816.460,00	
		-						92.190.677.450,00					-		95.251.816.460,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-		-	-	195.090.000,00						-	420.000.000,00	
	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						75.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-		-	1 Dokumen	75.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Karang Panjang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	150.000.000,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN
44.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**22.685.361.230,00**							**30.529.924.161,00**	
			Presentasi peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan	-		-	55 persen	660.000.000,00						-	780.000.000,00	
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						4.619.352.000,00					-		9.468.808.232,00	
		-						4.619.352.000,00					-		9.468.808.232,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	-		-	-	4.414.352.000,00						-	8.680.058.232,00	
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan						660.000.000,00							780.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	-		-	8 Orang	660.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Karang Panjang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	780.000.000,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN
		BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT						**7.880.500.000,00**							**15.608.339.230,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.880.500.000,00**							**15.608.339.230,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**7.880.500.000,00**							**15.608.339.230,00**	
45.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**160.723.552.000,00**							**183.331.893.500,00**	
			NILAI SAKIP	-		-	66,5 persen	1.583.419.000,00						-	530.000.000,00	
			Presentasi layanan penunjang urusan pemerintah Daerah	-		-	100 persen	1.893.419.000,00						-	680.000.000,00	
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						999.000.000,00					-		1.574.800.000,00	
		-						999.000.000,00					-		1.574.800.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	799.000.000,00						-	923.800.000,00	
	1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	2 Paket Paket	100.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Ahusen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	100.000.000,00	BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						3.569.638.000,00					-		5.779.040.000,00	
		-						3.569.638.000,00					-		5.779.040.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	710.014.000,00						-	1.118.890.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	795.000.000,00						-	1.134.400.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	522.624.000,00						-	820.200.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	599.000.000,00						-	1.029.400.000,00	
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						100.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket Paket	100.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Ahusen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	100.000.000,00	BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket Paket	150.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Ahusen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	150.000.000,00	BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						160.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	4 Paket Paket	160.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Ahusen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	100.000.000,00	BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	4 Laporan Laporan	100.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	100.000.000,00	BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						4.411.000.000,00					-		2.387.500.000,00	
		-						4.411.000.000,00					-		2.387.500.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	695.000.000,00						-	648.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	-	600.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	649.000.000,00						-	652.500.000,00	
	1.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						600.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	1 Unit Unit	600.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Ahusen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	100.000.000,00	BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT
	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							56.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	1 Paket Paket	0,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Ahusen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	56.000.000,00	BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						199.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	4 Unit Unit	199.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Ahusen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	100.000.000,00	BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						5.976.552.000,00					-		7.990.242.500,00	
		-						5.976.552.000,00					-		7.990.242.500,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	2.648.454.000,00						-	2.766.982.500,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	3.094.998.000,00						-	4.725.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	203.100.000,00						-	463.260.000,00	
	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						24.000.000,00							9.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	4 Laporan Laporan	24.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Ahusen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	9.000.000,00	BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						171.204.000,00							175.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	4 Laporan Laporan	171.204.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Ahusen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	175.000.000,00	BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						55.800.000,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	4 Laporan Laporan	55.800.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Ahusen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	60.000.000,00	BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.592.355.000,00					-		4.111.354.000,00	
		-						3.592.355.000,00					-		4.111.354.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	672.000.000,00						-	881.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	1.226.855.000,00						-	1.229.454.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	786.000.000,00						-	850.200.000,00	
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						132.415.000,00							130.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	12 Unit Unit	132.415.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Ahusen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	130.000.000,00	BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						104.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	32 Unit Unit	104.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Ahusen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	100.000.000,00	BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						197.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit Unit	197.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Ahusen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	100.000.000,00	BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT
46.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**151.577.741.500,00**							**178.835.108.443,00**	
			Angka Kematian Balita	-		-	26,5 per 1.000 KH	4.168.942.000,00						-	11.458.339.230,00	
			Angka Kematian Bayi	-		-	11,28 per 1.000 KH	4.168.942.000,00						-	11.458.339.230,00	
			Cakupan penerimaan Imunisasi Bayi lengkap	-		-	90 persen	3.443.349.000,00						-	10.108.339.230,00	
			Hypertensi daalm pengendalian	-		-	20 persen	70.000.000,00						-	400.000.000,00	
			Hypertensi dalam pengendalian	-		-	20 persen	4.098.942.000,00						-	11.458.339.230,00	
			Jumlah kab/kota eliminasi malaria	-		-	8 kab/kota	70.000.000,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah kab/kota Eliminasi Malaria	-		-	8 kab/kota	655.593.000,00						-	1.350.000.000,00	
			Jumlah Kab/Kota Eliminasi Malaria	-		-	8 kab/kota	3.443.349.000,00						-	10.108.339.230,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			ODIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ARV	-		-	90 persen	725.593.000,00						-	1.750.000.000,00	
			Presentasi fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi paripurna	-		-	50 persen	70.000.000,00						-	400.000.000,00	
			Presetasi fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi paripurna	-		-	50 persen	3.443.349.000,00						-	10.108.339.230,00	
			Prsentasi fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi paripurna	-		-	50 persen	655.593.000,00						-	1.350.000.000,00	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						43.828.304.980,00					-		80.457.891.983,00	
		-						43.828.304.980,00					-		80.457.891.983,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	-		-	-	8.101.684.146,00						-	12.729.352.053,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-		-	-	745.650.000,00						-	826.497.000,00	
			Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	-		-	-	215.000.000,00						-	3.203.000.000,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-		-	-	698.749.000,00						-	2.057.129.200,00	
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-		-	-	23.258.202.220,00						-	25.755.037.000,00	
	1.02.02.1.01.0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya						148.749.000,00							455.000.000,00	
		Tersedianya Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-		-	1 Unit	148.749.000,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	-		-	455.000.000,00	BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan						850.000.000,00							2.413.339.230,00	
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	-		-	5 Unit	850.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Ahusen || 0	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	-		-	2.413.339.230,00	BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.1.01.0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit						50.000.000,00							2.840.000.000,00	
		Tersedianya Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	-		-	5 Unit	50.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Ahusen || 0	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	-		-	2.840.000.000,00	BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT
	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan						370.000.000,00							400.000.000,00	
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-		-	3 Unit	370.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Ahusen || 0	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	-		-	400.000.000,00	BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						2.024.600.000,00							4.000.000.000,00	
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-		-	1 Paket	2.024.600.000,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	-		-	4.000.000.000,00	BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						92.190.677.450,00					-		95.251.816.460,00	
		-						92.190.677.450,00					-		95.251.816.460,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	-	1.217.548.000,00						-	1.380.962.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-		-	-	195.090.000,00						-	420.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	-	456.250.000,00						-	625.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	2.301.377.000,00						-	2.911.750.000,00	
	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						100.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	4 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Ahusen || 0	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	-		-	250.000.000,00	BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT
	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						105.090.000,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-		-	1 Dokumen	105.090.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Ahusen || 0	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	-		-	250.000.000,00	BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT
	1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						146.250.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	12 Dokumen Dokumen	146.250.000,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	-		-	300.000.000,00	BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT
	1.02.02.1.02.0032	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						304.253.000,00							800.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	12 Dokumen Laporan	304.253.000,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	-		-	800.000.000,00	BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						15.011.259.070,00					-		2.684.650.000,00	
		-						15.011.259.070,00					-		2.684.650.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-		-	-	15.011.259.070,00						-	2.684.650.000,00	
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						70.000.000,00							400.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-		-	1 Dokumen Dokumen	70.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Ahusen || 0	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	-		-	400.000.000,00	BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT
47.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**22.685.361.230,00**							**30.529.924.161,00**	
			Presentasi peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan	-		-	55 persen	1.618.139.000,00						-	2.120.000.000,00	
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi						18.066.009.230,00					-		21.061.115.929,00	
		-						18.066.009.230,00					-		21.061.115.929,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-		-	-	18.066.009.230,00						-	21.061.115.929,00	
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan						1.250.000.000,00							1.320.000.000,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Memenuhi Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-		-	75 Orang	1.250.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Ahusen || 0	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	-		-	1.320.000.000,00	BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						4.619.352.000,00					-		9.468.808.232,00	
		-						4.619.352.000,00					-		9.468.808.232,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	-		-	-	4.414.352.000,00						-	8.680.058.232,00	
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan						368.139.000,00							800.000.000,00	
		Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	-		-	20 Orang Orang	368.139.000,00	Provinsi Maluku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	-		-	800.000.000,00	BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT
		BALAI PELATIHAN DAN PENELITIAN KESEHATAN						**6.216.782.000,00**							**11.068.416.066,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.216.782.000,00**							**11.068.416.066,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**6.216.782.000,00**							**11.068.416.066,00**	
48.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**160.723.552.000,00**							**183.331.893.500,00**	
			NILAI SAKIP	-		-	66,5 persen	1.387.438.000,00						-	838.000.000,00	
			Presentasi layanan penunjang urusan pemerintah Daerah	-		-	100 persen	1.500.062.000,00						-	1.110.000.000,00	
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						999.000.000,00					-		1.574.800.000,00	
		-						999.000.000,00					-		1.574.800.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	200.000.000,00						-	430.500.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	799.000.000,00						-	923.800.000,00	
	1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						60.000.000,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	1 Paket	60.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Kudamati || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	60.000.000,00	BALAI PELATIHAN DAN PENELITIAN KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan						200.000.000,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	5 Orang	200.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Kudamati || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	200.000.000,00	BALAI PELATIHAN DAN PENELITIAN KESEHATAN
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						3.569.638.000,00					-		5.779.040.000,00	
		-						3.569.638.000,00					-		5.779.040.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	710.014.000,00						-	1.118.890.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	795.000.000,00						-	1.134.400.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	522.624.000,00						-	820.200.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	600.000.000,00						-	880.200.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	599.000.000,00						-	1.029.400.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	210.000.000,00						-	221.000.000,00	
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						40.000.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	40.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Kudamati || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	40.000.000,00	BALAI PELATIHAN DAN PENELITIAN KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						100.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	100.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Kudamati || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	200.000.000,00	BALAI PELATIHAN DAN PENELITIAN KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	100.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Kudamati || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	100.000.000,00	BALAI PELATIHAN DAN PENELITIAN KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						35.000.000,00							40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	35.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Kudamati || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	40.000.000,00	BALAI PELATIHAN DAN PENELITIAN KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						37.624.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	37.624.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Kudamati || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	50.000.000,00	BALAI PELATIHAN DAN PENELITIAN KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						175.000.000,00							182.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	175.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Kudamati || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	182.000.000,00	BALAI PELATIHAN DAN PENELITIAN KESEHATAN
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						4.411.000.000,00					-		2.387.500.000,00	
		-						4.411.000.000,00					-		2.387.500.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	695.000.000,00						-	648.000.000,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	175.000.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	-	1.372.000.000,00						-	45.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	620.000.000,00						-	342.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	100.000.000,00						-	100.000.000,00	
	1.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						45.000.000,00							45.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	1 Unit	45.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Kudamati || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	45.000.000,00	BALAI PELATIHAN DAN PENELITIAN KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						175.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	1 Paket	175.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Kudamati || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	100.000.000,00	BALAI PELATIHAN DAN PENELITIAN KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	5 Unit	100.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Kudamati || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	100.000.000,00	BALAI PELATIHAN DAN PENELITIAN KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						175.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	175.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Kudamati || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	150.000.000,00	BALAI PELATIHAN DAN PENELITIAN KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	100.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Kudamati || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	100.000.000,00	BALAI PELATIHAN DAN PENELITIAN KESEHATAN
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						5.976.552.000,00					-		7.990.242.500,00	
		-						5.976.552.000,00					-		7.990.242.500,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	2.648.454.000,00						-	2.766.982.500,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	3.094.998.000,00						-	4.725.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	203.100.000,00						-	463.260.000,00	
	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						7.500.000,00							8.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	7.500.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Kudamati || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	8.000.000,00	BALAI PELATIHAN DAN PENELITIAN KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						275.000.000,00							275.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	2 Laporan	275.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Kudamati || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	275.000.000,00	BALAI PELATIHAN DAN PENELITIAN KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						124.938.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	2 Laporan	124.938.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Kudamati || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	200.000.000,00	BALAI PELATIHAN DAN PENELITIAN KESEHATAN
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.592.355.000,00					-		4.111.354.000,00	
		-						3.592.355.000,00					-		4.111.354.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	-	325.000.000,00						-	305.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	786.000.000,00						-	850.200.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	210.000.000,00						-	221.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	100.500.000,00						-	300.000.000,00	
	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	4 Unit	150.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Kudamati || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	150.000.000,00	BALAI PELATIHAN DAN PENELITIAN KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						250.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	4 Unit	250.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Kudamati || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	200.000.000,00	BALAI PELATIHAN DAN PENELITIAN KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						100.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	2 Unit	100.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Kudamati || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	100.000.000,00	BALAI PELATIHAN DAN PENELITIAN KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						100.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	100.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Kudamati || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	200.000.000,00	BALAI PELATIHAN DAN PENELITIAN KESEHATAN
49.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**151.577.741.500,00**							**178.835.108.443,00**	
			Angka Kematian Balita	-		-	26,5 per 1.000 KH	2.150.000.000,00						-	5.250.000.000,00	
			Angka Kematian Bayi	-		-	11,28 per 1.000 KH	2.150.000.000,00						-	5.250.000.000,00	
			Cakupan penerimaan Imunisasi Bayi lengkap	-		-	90 persen	2.050.000.000,00						-	4.350.000.000,00	
			Hypertensi daalm pengendalian	-		-	20 persen	100.000.000,00						-	900.000.000,00	
			Hypertensi dalam pengendalian	-		-	20 persen	2.050.000.000,00						-	4.350.000.000,00	
			Jumlah kab/kota eliminasi malaria	-		-	8 kab/kota	100.000.000,00						-	900.000.000,00	
			Jumlah Kab/Kota Eliminasi Malaria	-		-	8 kab/kota	2.050.000.000,00						-	4.350.000.000,00	
			ODIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ARV	-		-	90 persen	100.000.000,00						-	900.000.000,00	
			Presentasi fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi paripurna	-		-	50 persen	100.000.000,00						-	900.000.000,00	
			Presetasi fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi paripurna	-		-	50 persen	2.050.000.000,00						-	4.350.000.000,00	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						43.828.304.980,00					-		80.457.891.983,00	
		-						43.828.304.980,00					-		80.457.891.983,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	-		-	-	1.500.000.000,00						-	2.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	-		-	-	600.000.000,00						-	1.571.000.000,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-		-	-	698.749.000,00						-	2.057.129.200,00	
	1.02.02.1.01.0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya						1.500.000.000,00							2.500.000.000,00	
		Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	-		-	1 Unit	1.500.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Kudamati || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.500.000.000,00	BALAI PELATIHAN DAN PENELITIAN KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya						200.000.000,00							850.000.000,00	
		Tersedianya Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-		-	4 Unit	200.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Kudamati || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	850.000.000,00	BALAI PELATIHAN DAN PENELITIAN KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya						350.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	-		-	3 Unit	350.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Kudamati || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.000.000.000,00	BALAI PELATIHAN DAN PENELITIAN KESEHATAN
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						15.011.259.070,00					-		2.684.650.000,00	
		-						15.011.259.070,00					-		2.684.650.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-		-	-	15.011.259.070,00						-	2.684.650.000,00	
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						100.000.000,00							900.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-		-	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Kudamati || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	900.000.000,00	BALAI PELATIHAN DAN PENELITIAN KESEHATAN
50.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**22.685.361.230,00**							**30.529.924.161,00**	
			Presentasi peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan	-		-	55 persen	1.716.720.000,00						-	3.318.416.066,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi						18.066.009.230,00					-		21.061.115.929,00	
		-						18.066.009.230,00					-		21.061.115.929,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-		-	-	18.066.009.230,00						-	21.061.115.929,00	
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan						286.720.000,00							620.000.000,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Memenuhi Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-		-	30 Orang	286.720.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Kudamati || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	620.000.000,00	BALAI PELATIHAN DAN PENELITIAN KESEHATAN
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						4.619.352.000,00					-		9.468.808.232,00	
		-						4.619.352.000,00					-		9.468.808.232,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-		-	-	205.000.000,00						-	788.750.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	-		-	-	4.414.352.000,00						-	8.680.058.232,00	
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan						1.350.000.000,00							2.198.416.066,00	
		Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	-		-	200 Orang	1.350.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Kudamati || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.198.416.066,00	BALAI PELATIHAN DAN PENELITIAN KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan						80.000.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-		-	5 Dokumen	80.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Kudamati || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	500.000.000,00	BALAI PELATIHAN DAN PENELITIAN KESEHATAN
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. M. HAULUSSY						**50.002.009.531,00**							**55.602.166.792,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**50.002.009.531,00**							**55.602.166.792,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**50.002.009.531,00**							**55.602.166.792,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
51.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**151.577.741.500,00**							**178.835.108.443,00**	
			Angka Kematian Balita	-		-	26,5 per 1.000 KH	46.299.246.531,00						-	52.049.403.792,00	
			Angka Kematian Bayi	-		-	11,28 per 1.000 KH	46.299.246.531,00						-	52.049.403.792,00	
			Cakupan penerimaan Imunisasi Bayi lengkap	-		-	90 persen	15.399.246.531,00						-	19.549.403.792,00	
			Hypertensi dalam pengendalian	-		-	20 persen	46.299.246.531,00						-	52.049.403.792,00	
			Jumlah kab/kota Eliminasi Malaria	-		-	8 kab/kota	30.900.000.000,00						-	32.500.000.000,00	
			Jumlah Kab/Kota Eliminasi Malaria	-		-	8 kab/kota	15.399.246.531,00						-	19.549.403.792,00	
			ODIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ARV	-		-	90 persen	30.900.000.000,00						-	32.500.000.000,00	
			Presetasi fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi paripurna	-		-	50 persen	15.399.246.531,00						-	19.549.403.792,00	
			Prsentasi fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi paripurna	-		-	50 persen	30.900.000.000,00						-	32.500.000.000,00	
			-	-		-	-	150.000.000,00						-	0,00	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						43.828.304.980,00					-		80.457.891.983,00	
		-						43.828.304.980,00					-		80.457.891.983,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	-		-	-	8.101.684.146,00						-	12.729.352.053,00	
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-		-	-	23.258.202.220,00						-	25.755.037.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	-		-	-	4.999.500.000,00						-	10.006.500.000,00	
	1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit						4.500.000.000,00							9.500.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	-		-	2 Unit	4.500.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Benteng || 0	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	-		-	9.500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. M. HAULUSSY

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan						5.049.246.531,00							5.049.403.792,00	
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	-		-	2 Unit	5.049.246.531,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Benteng || 0	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	-		-	5.049.403.792,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. M. HAULUSSY
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						5.850.000.000,00							5.000.000.000,00	
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-		-	1 Paket	5.850.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Benteng || 0	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	-		-	5.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. M. HAULUSSY
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						92.190.677.450,00						-		95.251.816.460,00	
		-						92.190.677.450,00						-		95.251.816.460,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	-		-	-	32.473.675.000,00							-	34.244.675.000,00	
	1.02.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit						30.900.000.000,00							32.500.000.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	-		-	1 Dokumen	30.900.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Benteng || 0	Pendapatan dari BLUD	-	-		-	32.500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. M. HAULUSSY
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						547.500.000,00						-		440.750.000,00	
		-						547.500.000,00						-		440.750.000,00	
			Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	-		-	-	300.000.000,00							-	200.000.000,00	
	1.02.02.1.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit						150.000.000,00								0,00	
		Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	-		-	1 Unit	150.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Benteng || 0	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	-		-	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. M. HAULUSSY
52.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**22.685.361.230,00**							**30.529.924.161,00**	
			Presentasi peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan	-		-	55 persen	3.552.763.000,00						-	3.552.763.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi						18.066.009.230,00					-		21.061.115.929,00	
		-						18.066.009.230,00					-		21.061.115.929,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-		-	-	18.066.009.230,00						-	21.061.115.929,00	
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan						2.532.300.000,00							2.532.300.000,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Memenuhi Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-		-	51 Orang	2.532.300.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Benteng || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.532.300.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. M. HAULUSSY
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						4.619.352.000,00					-		9.468.808.232,00	
		-						4.619.352.000,00					-		9.468.808.232,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	-		-	-	4.414.352.000,00						-	8.680.058.232,00	
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan						1.020.463.000,00							1.020.463.000,00	
		Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	-		-	56 Orang	1.020.463.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Benteng || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.020.463.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. M. HAULUSSY
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ISHAK UMARELLA						**17.213.339.230,00**							**20.138.339.230,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**17.213.339.230,00**							**20.138.339.230,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**17.213.339.230,00**							**20.138.339.230,00**	
53.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**160.723.552.000,00**							**183.331.893.500,00**	
			NILAI SAKIP	-		-	66,5 persen	3.236.877.000,00						-	1.986.377.000,00	
			Presentasi layanan penunjang urusan pemerintah Daerah	-		-	100 persen	3.481.467.000,00						-	2.905.967.000,00	
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.320.437.000,00					-		3.230.537.000,00	
		-						1.320.437.000,00					-		3.230.537.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	-		-	-	137.437.000,00						-	145.937.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	18.500.000,00						-	1.752.100.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	452.500.000,00						-	475.000.000,00	
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						7.500.000,00							7.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	6 Dokumen	7.500.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Maluku Tengah || Kecamatan Salahutu || Desa Tulehu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	7.500.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ISHAK UMARELLA
	1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	4 Laporan	2.500.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Maluku Tengah || Kecamatan Salahutu || Desa Tulehu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.500.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ISHAK UMARELLA
	1.02.01.1.01.0012	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan						52.437.000,00							52.437.000,00	
		Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	-		-	1 Berita Acara	52.437.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Maluku Tengah || Kecamatan Salahutu || Desa Tulehu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	52.437.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ISHAK UMARELLA
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						140.608.130.000,00					-		157.974.300.000,00	
		-						140.608.130.000,00					-		157.974.300.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	33.750.000,00						-	79.200.000,00	
	1.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						10.000.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	4 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Maluku Tengah || Kecamatan Salahutu || Desa Tulehu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ISHAK UMARELLA
	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						48.440.000,00					-		66.320.000,00	
		-						48.440.000,00					-		66.320.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	34.640.000,00						-	51.640.000,00	
	1.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						9.640.000,00							9.640.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	1 Laporan	9.640.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Maluku Tengah || Kecamatan Salahutu || Desa Tulehu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	9.640.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ISHAK UMARELLA
	1.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Maluku Tengah || Kecamatan Salahutu || Desa Tulehu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ISHAK UMARELLA
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						999.000.000,00					-		1.574.800.000,00	
		-						999.000.000,00					-		1.574.800.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	799.000.000,00						-	923.800.000,00	
	1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						300.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	1 Paket	300.000.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Maluku Tengah || Kecamatan Salahutu || Desa Tulehu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ISHAK UMARELLA
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						3.569.638.000,00					-		5.779.040.000,00	
		-						3.569.638.000,00					-		5.779.040.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	710.014.000,00						-	1.118.890.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	795.000.000,00						-	1.134.400.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	522.624.000,00						-	820.200.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	600.000.000,00						-	880.200.000,00	
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						300.000.000,00							300.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	300.000.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Maluku Tengah || Kecamatan Salahutu || Desa Tulehu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	300.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ISHAK UMARELLA
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						300.000.000,00							350.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	5 Paket	300.000.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Maluku Tengah || Kecamatan Salahutu || Desa Tulehu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	350.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ISHAK UMARELLA
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						125.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	2 Paket	125.000.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Maluku Tengah || Kecamatan Salahutu || Desa Tulehu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	150.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ISHAK UMARELLA
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						119.590.000,00							119.590.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	119.590.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Maluku Tengah || Kecamatan Salahutu || Desa Tulehu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	119.590.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ISHAK UMARELLA
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						4.411.000.000,00					-		2.387.500.000,00	
		-						4.411.000.000,00					-		2.387.500.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	695.000.000,00						-	648.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	-	1.372.000.000,00						-	45.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	649.000.000,00						-	652.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						900.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	3 Unit	900.000.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Maluku Tengah || Kecamatan Salahutu || Desa Tulehu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ISHAK UMARELLA
	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						300.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	5 Paket	300.000.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Maluku Tengah || Kecamatan Salahutu || Desa Tulehu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	250.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ISHAK UMARELLA
	1.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						250.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	3 Unit	250.000.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Maluku Tengah || Kecamatan Salahutu || Desa Tulehu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	250.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ISHAK UMARELLA
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						5.976.552.000,00					-		7.990.242.500,00	
		-						5.976.552.000,00					-		7.990.242.500,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	2.648.454.000,00						-	2.766.982.500,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	3.094.998.000,00						-	4.725.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	203.100.000,00						-	463.260.000,00	
	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Maluku Tengah || Kecamatan Salahutu || Desa Tulehu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ISHAK UMARELLA
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						650.000.000,00							700.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	3 Laporan	650.000.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Maluku Tengah || Kecamatan Salahutu || Desa Tulehu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	700.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ISHAK UMARELLA
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						155.000.000,00							155.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	155.000.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Maluku Tengah || Kecamatan Salahutu || Desa Tulehu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	155.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ISHAK UMARELLA
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.592.355.000,00					-		4.111.354.000,00	
		-						3.592.355.000,00					-		4.111.354.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	672.000.000,00						-	881.500.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	1.226.855.000,00						-	1.229.454.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	72.000.000,00						-	74.200.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	786.000.000,00						-	850.200.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	100.500.000,00						-	300.000.000,00	
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						644.300.000,00							644.300.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	17 Unit	644.300.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Maluku Tengah || Kecamatan Salahutu || Desa Tulehu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	644.300.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ISHAK UMARELLA
	1.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	20 Unit	50.000.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Maluku Tengah || Kecamatan Salahutu || Desa Tulehu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	50.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ISHAK UMARELLA
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	5 Unit	50.000.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Maluku Tengah || Kecamatan Salahutu || Desa Tulehu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	50.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ISHAK UMARELLA
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						200.000.000,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	10 Unit	200.000.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Maluku Tengah || Kecamatan Salahutu || Desa Tulehu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	250.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ISHAK UMARELLA
	1.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						500.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	20 Unit	500.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Maluku Tengah || Kecamatan Salahutu || Desa Tulehu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	100.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ISHAK UMARELLA
54.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**151.577.741.500,00**							**178.835.108.443,00**	
			Angka Kematian Balita	-		-	26,5 per 1.000 KH	6.111.872.230,00						-	7.877.480.531,00	
			Angka Kematian Bayi	-		-	11,28 per 1.000 KH	6.111.872.230,00						-	7.877.480.531,00	
			Cakupan penerimaan Imunisasi Bayi lengkap	-		-	90 persen	4.670.489.230,00						-	6.362.543.531,00	
			Hypertensi daalm pengendalian	-		-	20 persen	150.000.000,00						-	150.000.000,00	
			Hypertensi dalam pengendalian	-		-	20 persen	5.961.872.230,00						-	7.727.480.531,00	
			Jumlah kab/kota eliminasi malaria	-		-	8 kab/kota	150.000.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah kab/kota Eliminasi Malaria	-		-	8 kab/kota	1.291.383.000,00						-	1.364.937.000,00	
			Jumlah Kab/Kota Eliminasi Malaria	-		-	8 kab/kota	4.670.489.230,00						-	6.362.543.531,00	
			ODIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ARV	-		-	90 persen	1.441.383.000,00						-	1.514.937.000,00	
			Presentasi fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi paripurna	-		-	50 persen	150.000.000,00						-	150.000.000,00	
			Presetasi fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi paripurna	-		-	50 persen	4.670.489.230,00						-	6.362.543.531,00	
			Prsentasi fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi paripurna	-		-	50 persen	1.291.383.000,00						-	1.364.937.000,00	
			-	-		-	-	165.000.000,00						-	215.000.000,00	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						43.828.304.980,00					-		80.457.891.983,00	
		-						43.828.304.980,00					-		80.457.891.983,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	-		-	-	8.101.684.146,00						-	12.729.352.053,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-		-	-	745.650.000,00						-	826.497.000,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-		-	-	698.749.000,00						-	2.057.129.200,00	
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-		-	-	23.258.202.220,00						-	25.755.037.000,00	
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	-		-	-	331.250.000,00						-	11.233.437.500,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	-		-	-	4.999.500.000,00						-	10.006.500.000,00	
	1.02.02.1.01.0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-		-	1 Unit	100.000.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Maluku Tengah || Kecamatan Salahutu || Desa Tulehu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	100.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ISHAK UMARELLA
	1.02.02.1.01.0006	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)						331.250.000,00							395.937.500,00	
		Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	-		-	5 Layanan	331.250.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Maluku Tengah || Kecamatan Salahutu || Desa Tulehu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	395.937.500,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ISHAK UMARELLA
	1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit						329.500.000,00							264.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	-		-	5 Unit	329.500.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Maluku Tengah || Kecamatan Salahutu || Desa Tulehu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	264.500.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ISHAK UMARELLA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan						1.144.089.230,00							1.796.609.031,00	
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	-		-	1 Unit	1.144.089.230,00	Provinsi Maluku || Kab. Maluku Tengah || Kecamatan Salahutu || Desa Tulehu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.796.609.031,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ISHAK UMARELLA
	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan						265.650.000,00							305.497.000,00	
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-		-	3 Unit	265.650.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Maluku Tengah || Kecamatan Salahutu || Desa Tulehu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	305.497.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ISHAK UMARELLA
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						2.500.000.000,00							3.500.000.000,00	
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-		-	7 Paket	2.500.000.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Maluku Tengah || Kecamatan Salahutu || Desa Tulehu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	3.500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ISHAK UMARELLA
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						92.190.677.450,00					-		95.251.816.460,00	
		-						92.190.677.450,00					-		95.251.816.460,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	-	2.235.750.000,00						-	1.820.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	-	1.217.548.000,00						-	1.380.962.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-		-	-	195.090.000,00						-	420.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	-		-	-	32.473.675.000,00						-	34.244.675.000,00	
	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						300.000.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	1 Dokumen	300.000.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Maluku Tengah || Kecamatan Salahutu || Desa Tulehu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	350.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ISHAK UMARELLA
	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						612.708.000,00							581.262.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	4 Dokumen	612.708.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Maluku Tengah || Kecamatan Salahutu || Desa Tulehu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	581.262.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ISHAK UMARELLA
	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						15.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-		-	2 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Maluku Tengah || Kecamatan Salahutu || Desa Tulehu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	20.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ISHAK UMARELLA
	1.02.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit						363.675.000,00							413.675.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	-		-	5 Dokumen	363.675.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Maluku Tengah || Kecamatan Salahutu || Desa Tulehu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	413.675.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ISHAK UMARELLA
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						15.011.259.070,00					-		2.684.650.000,00	
		-						15.011.259.070,00					-		2.684.650.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-		-	-	15.011.259.070,00						-	2.684.650.000,00	
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-		-	1 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Maluku Tengah || Kecamatan Salahutu || Desa Tulehu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	150.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ISHAK UMARELLA
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						547.500.000,00					-		440.750.000,00	
		-						547.500.000,00					-		440.750.000,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	-		-	-	165.000.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	-		-	-	300.000.000,00						-	200.000.000,00	
	1.02.02.1.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit						150.000.000,00							200.000.000,00	
		Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	-		-	7 Unit	150.000.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Maluku Tengah || Kecamatan Salahutu || Desa Tulehu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	200.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ISHAK UMARELLA
	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan						15.000.000,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	-		-	2 Unit	15.000.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Maluku Tengah || Kecamatan Salahutu || Desa Tulehu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	15.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ISHAK UMARELLA
55.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**22.685.361.230,00**							**30.529.924.161,00**	
			Presentasi peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan	-		-	55 persen	6.500.000.000,00						-	8.584.891.699,00	
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi						18.066.009.230,00					-		21.061.115.929,00	
		-						18.066.009.230,00					-		21.061.115.929,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-		-	-	18.066.009.230,00						-	21.061.115.929,00	
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan						6.200.000.000,00							8.234.891.699,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Memenuhi Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-		-	41 Orang	6.200.000.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Maluku Tengah || Kecamatan Salahutu || Desa Tulehu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	8.234.891.699,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ISHAK UMARELLA
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						4.619.352.000,00					-		9.468.808.232,00	
		-						4.619.352.000,00					-		9.468.808.232,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	-		-	-	4.414.352.000,00						-	8.680.058.232,00	
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan						300.000.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	-		-	30 Orang	300.000.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Maluku Tengah || Kecamatan Salahutu || Desa Tulehu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	350.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ISHAK UMARELLA
		RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH						**16.325.339.230,00**							**18.336.259.230,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**16.325.339.230,00**							**18.336.259.230,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**16.325.339.230,00**							**18.336.259.230,00**	
56.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**160.723.552.000,00**							**183.331.893.500,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			NILAI SAKIP	-		-	66,5 persen	3.781.850.000,00						-	3.451.039.000,00	
			Presentasi layanan penunjang urusan pemerintah Daerah	-		-	100 persen	4.095.350.000,00						-	3.771.689.000,00	
			-	-		-	-	198.000.000,00						-	217.800.000,00	
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.320.437.000,00					-		3.230.537.000,00	
		-						1.320.437.000,00					-		3.230.537.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	-		-	-	137.437.000,00						-	145.937.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	18.500.000,00						-	1.752.100.000,00	
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						11.000.000,00							12.100.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	11.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Negeri Lama || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	12.100.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH
	1.02.01.1.01.0012	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan						85.000.000,00							93.500.000,00	
		Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	-		-	1 Berita Acara	85.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Negeri Lama || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	93.500.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						140.608.130.000,00					-		157.974.300.000,00	
		-						140.608.130.000,00					-		157.974.300.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	33.750.000,00						-	79.200.000,00	
	1.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						13.750.000,00							15.125.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	1 Laporan	13.750.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Negeri Lama || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	15.125.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						48.440.000,00					-		66.320.000,00	
		-						48.440.000,00					-		66.320.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	8.800.000,00						-	9.680.000,00	
	1.02.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan PengendalianBarang Milik Daerah pada SKPD						8.800.000,00							9.680.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	1 Laporan	8.800.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Negeri Lama || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	9.680.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						999.000.000,00					-		1.574.800.000,00	
		-						999.000.000,00					-		1.574.800.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	799.000.000,00						-	923.800.000,00	
	1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						264.000.000,00							290.400.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	1 Paket	264.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Negeri Lama || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	290.400.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						3.569.638.000,00					-		5.779.040.000,00	
		-						3.569.638.000,00					-		5.779.040.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	133.000.000,00						-	574.950.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	710.014.000,00						-	1.118.890.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	795.000.000,00						-	1.134.400.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	522.624.000,00						-	820.200.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	600.000.000,00						-	880.200.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	599.000.000,00						-	1.029.400.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	210.000.000,00						-	221.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						60.000.000,00							96.800.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	60.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Negeri Lama || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	96.800.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						99.000.000,00							108.900.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	2 Paket	99.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Negeri Lama || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	108.900.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH
	1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						110.000.000,00							121.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	110.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Negeri Lama || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	121.000.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						110.000.000,00							121.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	110.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Negeri Lama || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	121.000.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						50.000.000,00							96.800.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	50.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Negeri Lama || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	96.800.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH
	1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						33.000.000,00							36.300.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	33.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Negeri Lama || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	36.300.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						71.500.000,00							78.650.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	71.500.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Negeri Lama || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	78.650.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						4.411.000.000,00					-		2.387.500.000,00	
		-						4.411.000.000,00					-		2.387.500.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	695.000.000,00						-	648.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	-	1.372.000.000,00						-	45.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	620.000.000,00						-	342.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	649.000.000,00						-	652.500.000,00	
	1.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						427.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	1 Unit	427.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Negeri Lama || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH
	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						220.000.000,00							242.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	1 Paket	220.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Negeri Lama || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	242.000.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH
	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						220.000.000,00							242.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	7 Unit	220.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Negeri Lama || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	242.000.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH
	1.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						200.000.000,00							302.500.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	8 Unit	200.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Negeri Lama || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	302.500.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						5.976.552.000,00					-		7.990.242.500,00	
		-						5.976.552.000,00					-		7.990.242.500,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	2.648.454.000,00						-	2.766.982.500,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	3.094.998.000,00						-	4.725.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	30.000.000,00						-	35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	203.100.000,00						-	463.260.000,00	
	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						6.600.000,00							7.260.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	6.600.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Negeri Lama || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	7.260.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						442.200.000,00							486.420.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	3 Laporan	442.200.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Negeri Lama || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	486.420.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH
	1.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						30.000.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Negeri Lama || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	35.000.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.484.360.000,00							1.210.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	1.484.360.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Negeri Lama || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.210.000.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.592.355.000,00					-		4.111.354.000,00	
		-						3.592.355.000,00					-		4.111.354.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	672.000.000,00						-	881.500.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	1.226.855.000,00						-	1.229.454.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	72.000.000,00						-	74.200.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	786.000.000,00						-	850.200.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	210.000.000,00						-	221.000.000,00	
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						250.140.000,00							275.154.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	6 Unit	250.140.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Negeri Lama || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	275.154.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH
	1.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel						22.000.000,00							24.200.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	15 Unit	22.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Negeri Lama || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	24.200.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						132.000.000,00							145.200.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	15 Unit	132.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Negeri Lama || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	145.200.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						75.000.000,00							181.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	5 Unit	75.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Negeri Lama || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	181.500.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH
	1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						110.000.000,00							121.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	7 Unit	110.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Negeri Lama || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	121.000.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						198.000.000,00					-		217.800.000,00	
		-						198.000.000,00					-		217.800.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	198.000.000,00						-	217.800.000,00	
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						198.000.000,00							217.800.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	198.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Negeri Lama || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	217.800.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH
57.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**151.577.741.500,00**							**178.835.108.443,00**	
			Angka Kematian Balita	-		-	26,5 per 1.000 KH	4.918.500.000,00						-	6.534.046.000,00	
			Angka Kematian Bayi	-		-	11,28 per 1.000 KH	4.918.500.000,00						-	6.534.046.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Cakupan penerimaan Imunisasi Bayi lengkap	-		-	90 persen	3.278.577.000,00						-	4.198.729.200,00	
			Hypertensi daalm pengendalian	-		-	20 persen	49.500.000,00						-	78.650.000,00	
			Hypertensi dalam pengendalian	-		-	20 persen	4.869.000.000,00						-	6.455.396.000,00	
			Jumlah kab/kota eliminasi malaria	-		-	8 kab/kota	49.500.000,00						-	78.650.000,00	
			Jumlah kab/kota Eliminasi Malaria	-		-	8 kab/kota	1.700.423.000,00						-	2.256.666.800,00	
			Jumlah Kab/Kota Eliminasi Malaria	-		-	8 kab/kota	3.278.577.000,00						-	4.198.729.200,00	
			ODIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ARV	-		-	90 persen	1.749.923.000,00						-	2.335.316.800,00	
			Presentasi fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi paripurna	-		-	50 persen	49.500.000,00						-	78.650.000,00	
			Presetasi fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi paripurna	-		-	50 persen	3.278.577.000,00						-	4.198.729.200,00	
			Prsentasi fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi paripurna	-		-	50 persen	1.700.423.000,00						-	2.256.666.800,00	
			-	-		-	-	232.500.000,00						-	225.750.000,00	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						43.828.304.980,00					-		80.457.891.983,00	
		-						43.828.304.980,00					-		80.457.891.983,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	-		-	-	8.101.684.146,00						-	12.729.352.053,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-		-	-	745.650.000,00						-	826.497.000,00	
			Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	-		-	-	215.000.000,00						-	3.203.000.000,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	-		-	-	600.000.000,00						-	1.571.000.000,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-		-	-	698.749.000,00						-	2.057.129.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		-	-	30.000.000,00						-	2.122.600.000,00	
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-		-	-	23.258.202.220,00						-	25.755.037.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	-		-	-	4.999.500.000,00						-	10.006.500.000,00	
	1.02.02.1.01.0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya						250.000.000,00							652.129.200,00	
		Tersedianya Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-		-	1 Unit	250.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Negeri Lama || 1	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	-		-	652.129.200,00	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH
	1.02.02.1.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya						50.000.000,00							121.000.000,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	-		-	1 Unit	50.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Negeri Lama || 1	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	-		-	121.000.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH
	1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit						170.000.000,00							242.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	-		-	4 Unit	170.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Negeri Lama || 1	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	-		-	242.000.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan						523.577.000,00							570.000.000,00	
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	-		-	6 Unit	523.577.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Negeri Lama || 1	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	-		-	570.000.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH
	1.02.02.1.01.0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit						165.000.000,00							363.000.000,00	
		Tersedianya Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	-		-	10 Unit	165.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Negeri Lama || 1	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	-		-	363.000.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan						110.000.000,00							121.000.000,00	
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-		-	25 Unit	110.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Negeri Lama || 1	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	-		-	121.000.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH
	1.02.02.1.01.0020	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan						30.000.000,00							72.600.000,00	
		Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		-	1 Unit	30.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Negeri Lama || 1	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	-		-	72.600.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						1.980.000.000,00							2.178.000.000,00	
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-		-	1 Paket	1.980.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Negeri Lama || 1	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	-		-	2.178.000.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						92.190.677.450,00					-		95.251.816.460,00	
		-						92.190.677.450,00					-		95.251.816.460,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	-		-	-	2.373.246.000,00						-	1.300.650.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-		-	-	44.071.500.000,00						-	43.671.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	-	1.217.548.000,00						-	1.380.962.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	-		-	-	71.500.000,00						-	114.950.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	-		-	-	32.473.675.000,00						-	34.244.675.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	2.301.377.000,00						-	2.911.750.000,00	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapakan Rehabilitasi Medis	-		-	-	77.083.000,00						-	127.066.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						154.840.000,00							266.200.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	1 Dokumen	154.840.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Negeri Lama || 1	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	-		-	266.200.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH
	1.02.02.1.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA						77.083.000,00							127.066.800,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapakan Rehabilitasi Medis	-		-	15 Orang	77.083.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Negeri Lama || 1	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	-		-	127.066.800,00	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH
	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						71.500.000,00							96.800.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-		-	1 Dokumen	71.500.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Negeri Lama || 1	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	-		-	96.800.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH
	1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan						77.000.000,00							108.900.000,00	
		Terbinanya Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	-		-	1 Dokumen	77.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Negeri Lama || 1	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	-		-	108.900.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH
	1.02.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit						1.210.000.000,00							1.331.000.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	-		-	1 Dokumen	1.210.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Negeri Lama || 1	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	-		-	1.331.000.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH
	1.02.02.1.02.0032	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						110.000.000,00							211.750.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	110.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Negeri Lama || 1	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	-		-	211.750.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH
	1.02.02.1.02.0035	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						71.500.000,00							114.950.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	-		-	1 Dokumen	71.500.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Negeri Lama || 1	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	-		-	114.950.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						15.011.259.070,00					-		2.684.650.000,00	
		-						15.011.259.070,00					-		2.684.650.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-		-	-	15.011.259.070,00						-	2.684.650.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						49.500.000,00							78.650.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-		-	1 Dokumen	49.500.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Negeri Lama || 1	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	-		-	78.650.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						547.500.000,00					-		440.750.000,00	
		-						547.500.000,00					-		440.750.000,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	-		-	-	165.000.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	-		-	-	82.500.000,00						-	90.750.000,00	
	1.02.02.1.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan						82.500.000,00							90.750.000,00	
		Tersedianya Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	-		-	1 Unit	82.500.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Negeri Lama || 1	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	-		-	90.750.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH
	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan						150.000.000,00							135.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	-		-	1 Unit	150.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Negeri Lama || 1	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	-		-	135.000.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH
58.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**22.685.361.230,00**							**30.529.924.161,00**	
			Presentasi peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan	-		-	55 persen	6.176.989.230,00						-	6.733.924.230,00	
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi						18.066.009.230,00					-		21.061.115.929,00	
		-						18.066.009.230,00					-		21.061.115.929,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-		-	-	18.066.009.230,00						-	21.061.115.929,00	
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan						5.796.989.230,00							6.353.924.230,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Memenuhi Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-		-	214 Orang	5.796.989.230,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Negeri Lama || 1	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	6.353.924.230,00	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						4.619.352.000,00					-		9.468.808.232,00	
		-						4.619.352.000,00					-		9.468.808.232,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	-		-	-	4.414.352.000,00						-	8.680.058.232,00	
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan						380.000.000,00							380.000.000,00	
		Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	-		-	15 Orang	380.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Negeri Lama || 1	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	-		-	380.000.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH
59.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**1.067.500.000,00**							**1.232.750.000,00**	
			Presentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	-		-	70 persen	82.500.000,00						-	151.250.000,00	
	1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi						493.945.540,00					-		692.000.000,00	
		-						493.945.540,00					-		692.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-		-	-	493.945.540,00						-	692.000.000,00	
	1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat						82.500.000,00							151.250.000,00	
		Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-		-	1 Dokumen	82.500.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Negeri Lama || 1	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	-		-	151.250.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						**195.093.320.599,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**194.354.530.599,00**							**0,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**194.354.530.599,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
60.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**35.964.339.311,00**							**0,00**	
			Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	-		-	100 %	35.011.195.533,00						-	0,00	
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.710.030.000,00					-		0,00	
		-						1.710.030.000,00					-		0,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	400.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-		-	-	350.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	500.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	460.030.000,00						-	0,00	
	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						500.000.000,00							0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	6 Dokumen	500.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						350.030.000,00							0,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	6 Laporan	350.030.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						350.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-		-	1 Data	350.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						400.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	11 Berita Acara	400.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						20.172.154.532,00					-		0,00	
		-						20.172.154.532,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	117.960.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	20.054.194.532,00						-	0,00	
	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						20.054.194.532,00							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	235 Orang/ Bulan	20.054.194.532,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						117.960.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	1 Dokumen	117.960.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						100.080.000,00					-		0,00	
		-						100.080.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	100.080.000,00						-	0,00	
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						100.080.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	1 Laporan	100.080.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						400.000.000,00					-		0,00	
		-						400.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	-	100.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	300.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian						100.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						300.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	10 Orang	300.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.232.214.525,00					-		0,00	
		-						2.232.214.525,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-		-	-	1.150.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	166.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	700.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	66.494.025,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	105.832.500,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	43.888.000,00						-	0,00	
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						35.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	35.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						50.955.747,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	50.955.747,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						100.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	100.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						166.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	166.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						700.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	700.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						1.150.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-		-	1 Dokumen	1.150.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						9.127.291.224,00					-		0,00	
		-						9.127.291.224,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	93.325.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	9.033.966.224,00						-	0,00	
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						54.440.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	54.440.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						8.533.966.224,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	2 Laporan	8.533.966.224,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.222.569.030,00					-		0,00	
		-						2.222.569.030,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	1.800.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	-	258.569.030,00						-	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	104.000.000,00						-	0,00	
	1.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						198.569.030,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	4 Unit	198.569.030,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	31 Unit	50.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						1.800.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	3 Unit	1.800.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
61.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**						**30.721.334.070,00**							**0,00**	
			Persentase peningkatan perlindungan kawasan dari abrasi dan banjir rob	-		-	23 %	30.721.334.070,00						-	0,00	
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota						27.721.334.070,00					-		0,00	
		-						27.721.334.070,00					-		0,00	
			Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	-		-	-	700.000.000,00						-	0,00	
			Panjang Bangunan Pengamanan Pantai yang Dibangun	-		-	-	11.851.334.070,00						-	0,00	
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	-		-	-	15.170.000.000,00						-	0,00	
	1.03.02.1.01.0009	Pembangunan Tanggul Sungai						15.170.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangunnya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	-		-	5 KM	15.170.000.000,00	Provinsi Maluku	DBH Sawit PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.01.0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi						700.000.000,00							0,00	
		Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	-		-	3 Lembaga	700.000.000,00	Provinsi Maluku	DBH Sawit PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.01.0127	Pembangunan Bangunan Pengamanan Pantai						11.851.334.070,00							0,00	
		Terbangunnya Bangunan Pengamanan Pantai	Panjang Bangunan Pengamanan Pantai yang Dibangun	-		-	6 KM	11.851.334.070,00	Provinsi Maluku	DBH Sawit PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota						3.000.000.000,00					-		0,00	
		-						3.000.000.000,00					-		0,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	-		-	-	1.000.000.000,00						-	0,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	-		-	-	2.000.000.000,00						-	0,00	
	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan						2.000.000.000,00							0,00	
		Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	-		-	7,5 KM	2.000.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Sawit Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan						1.000.000.000,00							0,00	
		Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	-		-	45 KM	1.000.000.000,00	Provinsi Maluku	DBH Sawit Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
62.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**						**7.309.456.914,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kab/kota	-		-	22 %	7.009.456.914,00						-	0,00	
	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota						7.309.456.914,00					-		0,00	
		-						7.309.456.914,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun	-		-	-	1.000.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	-		-	-	300.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Lembaga Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	-		-	-	300.000.000,00						-	0,00	
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	-		-	-	5.709.456.914,00						-	0,00	
	1.03.03.1.01.0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota						300.000.000,00							0,00	
		Terbinanya Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	-		-	2 Kabupaten/ Kota	300.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota						5.709.456.914,00							0,00	
		Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	-		-	7 Liter/Detik	5.709.456.914,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.1.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota						1.000.000.000,00							0,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun	-		-	5 Dokumen	1.000.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.1.01.0026	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)						300.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	-		-	2 Lembaga	300.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
63.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**						**5.500.000.000,00**							**0,00**	
			Persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/TPST regional	-		-	24 %	5.000.000.000,00						-	0,00	
	1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional						5.500.000.000,00					-		0,00	
		-						5.500.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	-		-	-	500.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina dalam Pengembangan dan Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota	-		-	-	500.000.000,00						-	0,00	
			Kapasitas TPA/TPST/SPA yang dibangun	-		-	-	4.500.000.000,00						-	0,00	
	1.03.04.1.01.0013	Pembangunan TPA/TPST/SPA						4.500.000.000,00							0,00	
		Terbangunnya TPA/TPST/SPA	Kapasitas TPA/TPST/SPA yang dibangun	-		-	6250 Ton/hari	4.500.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.1.01.0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan						500.000.000,00							0,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	-		-	1 Dokumen	500.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.1.01.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan dan Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota						500.000.000,00							0,00	
		Terbinanya dan Terawasinya Kabupaten/Kota dalam Pengembangan dan Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina dalam Pengembangan dan Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota	-		-	1 Kabupaten/ Kota	500.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
64.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**						**7.500.000.000,00**							**0,00**	
				-		-		7.500.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Aman	-		-	1,71 %	7.500.000.000,00						-	0,00	
	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional						7.500.000.000,00					-		0,00	
		-						7.500.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	-		-	-	500.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Kabupaten/Kota yang memperoleh pembinaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	-		-	-	350.000.000,00						-	0,00	
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dibangun	-		-	-	6.650.000.000,00						-	0,00	
	1.03.05.1.01.0013	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat						6.650.000.000,00							0,00	
		Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dibangun	-		-	7 M³/Hari	6.650.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)						500.000.000,00							0,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	-		-	1 Dokumen	500.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.1.01.0022	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota						350.000.000,00							0,00	
		Terbinanya Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Kabupaten/Kota yang memperoleh pembinaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	-		-	2 Kabupaten/ Kota	350.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
65.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**						**2.557.475.500,00**							**0,00**	
			Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	-		-	20 %	2.557.475.500,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi						2.557.475.500,00					-		0,00	
		-						2.557.475.500,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	-		-	-	500.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	-		-	-	2.057.475.500,00						-	0,00	
	1.03.06.1.01.0008	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan						2.057.475.500,00							0,00	
		Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	-		-	1 Sistem Drainase Perkotaan	2.057.475.500,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.1.01.0012	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan						500.000.000,00							0,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	-		-	2 Dokumen	500.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
66.	**1.03.07**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**						**15.000.000.000,00**							**0,00**	
			Persentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi baik	-		-	23 %	15.000.000.000,00						-	0,00	
	1.03.07.1.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi						15.000.000.000,00					-		0,00	
		-						15.000.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	-		-	-	600.000.000,00						-	0,00	
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	-		-	-	5.000.000.000,00						-	0,00	
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	-		-	-	7.150.000.000,00						-	0,00	
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	-		-	-	2.250.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.07.1.01.0026	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi						7.150.000.000,00							0,00	
		Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	-		-	150 Liter/Detik	7.150.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.07.1.01.0029	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi						600.000.000,00							0,00	
		Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	-		-	3 Unit	600.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.07.1.01.0040	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi						2.250.000.000,00							0,00	
		Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	-		-	125.000 Ton/hari	2.250.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.07.1.01.0041	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat di Kawasan Strategis Provinsi						5.000.000.000,00							0,00	
		Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	-		-	5 M³/Hari	5.000.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
67.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**						**13.260.682.200,00**							**0,00**	
			Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	-		-	20 %	13.260.682.200,00						-	0,00	
	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi						13.260.682.200,00					-		0,00	
		-						13.260.682.200,00					-		0,00	
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan	-		-	-	12.660.682.200,00						-	0,00	
			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	-		-	-	350.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Rumah Negara yang Dikelola	-		-	-	250.000.000,00						-	0,00	
	1.03.08.1.01.0013	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara						250.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah Rumah Negara yang Dikelola	-		-	15 Rumah Negara	250.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.1.01.0016	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi						12.660.682.200,00							0,00	
		Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang mendapatkan Pengubahsuaian	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan	-		-	10 Bangunan Gedung	12.660.682.200,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.1.01.0023	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Pemerintah Kabupaten/Kotan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota						350.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	-		-	11 Kabupaten/Kota	350.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
68.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**						**28.905.332.300,00**							**0,00**	
			Persentase penataan bangunan dan lingkungan	-		-	20 %	28.905.332.300,00						-	0,00	
	1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						28.905.332.300,00					-		0,00	
		-						28.905.332.300,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	500.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	-		-	-	28.405.332.300,00						-	0,00	
	1.03.09.1.01.0013	Penyusunan Rencana dan Teknis Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						500.000.000,00							0,00	
		Tersusunnya Rencana dan Teknis Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	2 Dokumen	500.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.09.1.01.0019	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						28.405.332.300,00							0,00	
		Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	-		-	5 Kawasan	28.405.332.300,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
69.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**						**47.009.494.082,00**							**0,00**	
			Persentase Kemantapan Jalan	-		-	76,11 %	47.009.494.082,00						-	0,00	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi						47.009.494.082,00					-		0,00	
		-						47.009.494.082,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	-		-	-	2.114.578.450,00						-	0,00	
			Panjang Jalan yang Dibangun	-		-	-	19.993.271.782,00						-	0,00	
			Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	-		-	-	1.694.750.000,00						-	0,00	
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	-		-	-	3.592.403.600,00						-	0,00	
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi	-		-	-	10.050.000.000,00						-	0,00	
			Panjang jembatan yang dibangun	-		-	-	9.564.490.250,00						-	0,00	
	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan						3.592.403.600,00							0,00	
		Terehabilitasinya Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	-		-	0.86 KM	3.592.403.600,00	Provinsi Maluku	DBH Sawit Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan						10.050.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terekonstruksinya Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	-		-	2 KM	10.050.000.000,00	Provinsi Maluku	DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan						2.114.578.450,00							0,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	-		-	5 Dokumen	2.114.578.450,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0045	Pemeliharaan Rutin Jalan						1.694.750.000,00							0,00	
		&Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	-		-	170.67 KM	1.694.750.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah	-	-		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0054	Pembangunan Jembatan						9.564.490.250,00							0,00	
		Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	-		-	40 Meter	9.564.490.250,00	Provinsi Maluku	DBH Sawit DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0058	Pembangunan Jalan						19.993.271.782,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		&Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	-		-	8.96 KM	19.993.271.782,00	Provinsi Maluku	DBH Sawit PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah	-	-		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
70.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**						**625.000.000,00**							**0,00**	
			Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	-		-	30 %	625.000.000,00						-	0,00	
	1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi						322.970.350,00					-		0,00	
		-						322.970.350,00					-		0,00	
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	-		-	-	172.970.350,00						-	0,00	
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	-		-	-	150.000.000,00						-	0,00	
	1.03.11.1.01.0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli						150.000.000,00							0,00	
		Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	-		-	20 Orang	150.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli						172.970.350,00							0,00	
		Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	-		-	30 Orang	172.970.350,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi						100.000.000,00					-		0,00	
		-						100.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	-		-	-	100.000.000,00						-	0,00	
	1.03.11.1.02.0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi						100.000.000,00							0,00	
		Beroperasinya Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	-		-	2 Layanan Informasi	100.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi						202.029.650,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						202.029.650,00					-		0,00	
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	-		-	-	202.029.650,00						-	0,00	
	1.03.11.1.03.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota						202.029.650,00							0,00	
		Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	-		-	11 Paket Pekerjaan	202.029.650,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
71.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**						**854.560.000,00**							**0,00**	
			Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi	-		-	33 %	654.560.000,00						-	0,00	
	1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi						213.572.800,00					-		0,00	
		-						213.572.800,00					-		0,00	
			Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	-		-	-	163.572.800,00						-	0,00	
			Jumlah publikasi informasi penataan ruang	-		-	-	50.000.000,00						-	0,00	
	1.03.12.1.01.0005	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang						50.000.000,00							0,00	
		Tersampaikannya informasi penataan ruang kepada masyarakat	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	-		-	1 Publikasi	50.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.01.0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang						163.572.800,00							0,00	
		Tersampaikannya substansi pengaturan bidang penataan ruang kepada pemangku kepentingan	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	-		-	20 Orang	163.572.800,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang						370.987.200,00					-		0,00	
		-						370.987.200,00					-		0,00	
			Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kab/Kota	-		-	-	50.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	-		-	-	170.987.200,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	-		-	-	100.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Surat Hasil Fasilitasi Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	-		-	-	50.000.000,00						-	0,00	
	1.03.12.1.02.0005	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang						100.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas SDM perencana tata ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	-		-	10 Orang	100.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.02.0006	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota						170.987.200,00							0,00	
		Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota dengan adanya laporan progres dan tindak lanjut dari provinsi	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	170.987.200,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.02.0011	Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya koordinasi fasilitasi pembahasan materi teknis dan ranperda RTRW Kab/Kota	Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kab/Kota	-		-	1 Berita Acara	50.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.02.0012	Koordinasi Fasilitasi Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksana Koordinasi Fasilitasi Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota dalam rangka penerbitan surat hasil fasilitasi	Jumlah Surat Hasil Fasilitasi Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi						100.000.000,00					-		0,00	
		-						100.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	-		-	-	100.000.000,00						-	0,00	
	1.03.12.1.03.0004	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang						100.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan	Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	-		-	1 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi						170.000.000,00					-		0,00	
		-						170.000.000,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	-		-	-	170.000.000,00						-	0,00	
	1.03.12.1.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang						170.000.000,00							0,00	
		Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	-		-	5 Dokumen	170.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**538.790.000,00**							**0,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**538.790.000,00**							**0,00**	
72.	**2.10.06**	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**						**200.000.000,00**							**0,00**	
			Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diretribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	-		-	1200 Bidang Tanah	200.000.000,00						-	0,00	
	2.10.06.1.01	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						200.000.000,00					-		0,00	
		-						200.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	200.000.000,00						-	0,00	
	2.10.06.1.01.0002	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota						200.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	200.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
73.	**2.10.10**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**						**338.790.000,00**							**0,00**	
			Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah	-		-	100 %	338.790.000,00						-	0,00	
	2.10.10.1.01	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						338.790.000,00					-		0,00	
		-						338.790.000,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	-		-	-	338.790.000,00						-	0,00	
	2.10.10.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah						338.790.000,00							0,00	
		Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	-		-	1 Laporan	338.790.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**200.000.000,00**							**0,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**200.000.000,00**							**0,00**	
74.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**						**200.000.000,00**							**0,00**	
			Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	-		-	100 %	200.000.000,00						-	0,00	
	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah						200.000.000,00					-		0,00	
		-						200.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	-		-	-	200.000.000,00						-	0,00	
	5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga						200.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	-		-	1 Dokumen	200.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PERALATAN						**853.143.778,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**853.143.778,00**							**0,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**853.143.778,00**							**0,00**	
75.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**35.964.339.311,00**							**0,00**	
			Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	-		-	100 %	793.143.778,00						-	0,00	
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.710.030.000,00					-		0,00	
		-						1.710.030.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	460.030.000,00						-	0,00	
	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						110.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	1 Laporan	110.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PERALATAN
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.232.214.525,00					-		0,00	
		-						2.232.214.525,00					-		0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	66.494.025,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	105.832.500,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	43.888.000,00						-	0,00	
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						8.888.000,00							0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	8.888.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PERALATAN
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						15.538.278,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	15.538.278,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PERALATAN
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.832.500,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	5.832.500,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PERALATAN
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						9.127.291.224,00					-		0,00	
		-						9.127.291.224,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	93.325.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	9.033.966.224,00						-	0,00	
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						38.885.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	38.885.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PERALATAN
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						500.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	500.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PERALATAN
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.222.569.030,00					-		0,00	
		-						2.222.569.030,00					-		0,00	
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	-		-	-	60.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	-	258.569.030,00						-	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	104.000.000,00						-	0,00	
	1.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						60.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	2 Unit	60.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PERALATAN
	1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Perizinan Alat Besar						60.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	-		-	1 Unit	60.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PERALATAN
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						54.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	40 Unit	54.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PERALATAN
		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						**26.709.037.386,00**							**31.774.239.600,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**26.709.037.386,00**							**31.774.239.600,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**26.709.037.386,00**							**31.774.239.600,00**	
76.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**11.674.349.574,00**							**12.141.087.000,00**	
			Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	-		-	100 %	11.379.349.574,00						-	11.794.087.000,00	
	1.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						401.750.000,00					Perangkat Daerah		433.500.000,00	
		-						401.750.000,00					Perangkat Daerah		433.500.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	155.000.000,00						-	165.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	30.000.000,00						-	30.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	70.000.000,00						-	80.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	90.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	36.750.000,00						-	38.000.000,00	
	1.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						70.000.000,00							80.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	1 Dokumen	70.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	80.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						30.000.000,00							30.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	4 Dokumen	30.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	30.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						90.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	3 Laporan	90.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						36.750.000,00							38.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	5 Laporan	36.750.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	38.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						10.000.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-		-	1 Data	10.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						155.000.000,00							165.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	1 Berita Acara	155.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	165.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.034.711.231,00					Perangkat Daerah		9.150.000.000,00	
		-						9.034.711.231,00					Perangkat Daerah		9.150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	128.000.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	8.906.711.231,00						-	9.000.000.000,00	
	1.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						8.906.711.231,00							9.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	107 Orang/ Bulan	8.906.711.231,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	9.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						128.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	128.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						51.250.000,00					Perangkat Daerah		57.000.000,00	
		-						51.250.000,00					Perangkat Daerah		57.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-		-	-	16.250.000,00						-	17.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	35.000.000,00						-	40.000.000,00	
	1.04.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						16.250.000,00							17.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-		-	5 Laporan	16.250.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	17.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						35.000.000,00							40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	2 Laporan	35.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	40.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						262.500.000,00					Perangkat Daerah		280.000.000,00	
		-						262.500.000,00					Perangkat Daerah		280.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	262.500.000,00						-	280.000.000,00	
	1.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						262.500.000,00							280.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	14 Orang	262.500.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	280.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						487.338.343,00					Perangkat Daerah		573.587.000,00	
		-						487.338.343,00					Perangkat Daerah		573.587.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	220.000.000,00						-	240.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	35.000.000,00						-	40.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	15.750.000,00						-	16.537.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	21.000.000,00						-	22.050.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	195.588.343,00						-	255.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						21.000.000,00							22.050.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	5 Paket	21.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	22.050.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						195.588.343,00							255.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	195.588.343,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	255.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						35.000.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	35.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	40.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						15.750.000,00							16.537.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	2 Paket	15.750.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	16.537.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						220.000.000,00							240.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	10 Laporan	220.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	240.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						750.000.000,00					Perangkat Daerah		900.000.000,00	
		-						750.000.000,00					Perangkat Daerah		900.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	250.000.000,00						-	300.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	500.000.000,00						-	600.000.000,00	
	1.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						250.000.000,00							300.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	2 Laporan	250.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						500.000.000,00							600.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	2 Laporan	500.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	600.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						686.800.000,00					Perangkat Daerah		747.000.000,00	
		-						686.800.000,00					Perangkat Daerah		747.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	420.000.000,00						-	450.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	-	250.000.000,00						-	280.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	16.800.000,00						-	17.000.000,00	
	1.04.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						250.000.000,00							280.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	15 Unit	250.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	280.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						16.800.000,00							17.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	5 Unit	16.800.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	17.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						420.000.000,00							450.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	420.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	450.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
77.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**						**6.889.396.812,00**							**8.050.000.000,00**	
			Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	-		-	100 %	6.889.396.812,00						-	7.550.000.000,00	
	1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi						1.350.000.000,00					Korban Bencana dan Masyarakat Berpenghailan Rendah (MBR)		1.450.000.000,00	
		-						1.350.000.000,00					Korban Bencana dan Masyarakat Berpenghailan Rendah (MBR)		1.450.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	-		-	-	400.000.000,00						-	500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	-		-	-	450.000.000,00						-	450.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Provinsi Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	-		-	-	500.000.000,00						-	500.000.000,00	
	1.04.02.1.01.0008	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi						450.000.000,00							450.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	-		-	3 Dokumen	450.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	450.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.01.0009	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi						500.000.000,00							500.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Provinsi Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Provinsi Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	-		-	2 Dokumen	500.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.01.0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi						400.000.000,00							500.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	-		-	2 Dokumen	400.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi						5.439.396.812,00					Korban Bencana dan Masyarakat Berpenghailan Rendah (MBR)		6.400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						5.439.396.812,00					Korban Bencana dan Masyarakat Berpenghailan Rendah (MBR)		6.400.000.000,00	
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	-		-	-	1.000.000.000,00						-	1.200.000.000,00	
			Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi yang Terbangun	-		-	-	3.512.894.812,00						-	3.600.000.000,00	
			Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	-		-	-	926.502.000,00						-	1.600.000.000,00	
	1.04.02.1.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana						926.502.000,00							1.600.000.000,00	
		Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	-		-	15 Unit Rumah	926.502.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	1.600.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana						1.000.000.000,00							1.200.000.000,00	
		Terbangunnya Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	-		-	10 Unit Rumah	1.000.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	1.200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.03.0008	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi						3.512.894.812,00							3.600.000.000,00	
		Terbangunnya Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi yang Terbangun	-		-	70 Unit Rumah	3.512.894.812,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	3.600.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.04.02.1.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi						100.000.000,00					Korban Bencana dan Masyarakat Berpenghailan Rendah (MBR)		200.000.000,00	
		-						100.000.000,00					Korban Bencana dan Masyarakat Berpenghailan Rendah (MBR)		200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	-		-	-	100.000.000,00						-	200.000.000,00	
	1.04.02.1.04.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan						100.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	-		-	1 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
78.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**						**4.988.003.000,00**							**5.354.066.200,00**	
			Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	-		-	100 Persentase	4.788.003.000,00						-	5.354.066.200,00	
	1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha						300.000.000,00					Masyarakat Berpenghailan Rendah (MBR)		320.000.000,00	
		-						300.000.000,00					Masyarakat Berpenghailan Rendah (MBR)		320.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	-		-	-	200.000.000,00						-	210.000.000,00	
			Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara	-		-	-	100.000.000,00						-	110.000.000,00	
	1.04.03.1.01.0011	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman						100.000.000,00							110.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbentuknya/terpeliharanya Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara	-		-	1 Sistem Informasi	100.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	110.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman						200.000.000,00							210.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	-		-	4 Laporan	200.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	210.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha						4.688.003.000,00					Masyarakat Berpenghailan Rendah (MBR)		5.034.066.200,00	
		-						4.688.003.000,00					Masyarakat Berpenghailan Rendah (MBR)		5.034.066.200,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	-		-	-	200.000.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	-		-	-	1.840.000.000,00						-	970.000.000,00	
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	-		-	-	1.265.601.054,32						-	1.446.849.138,67	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar	-		-	-	1.382.401.945,68						-	2.417.217.061,33	
	1.04.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	-		-	3 Laporan	200.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha						1.265.601.054,32							1.446.849.138,67	
		Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	-		-	17 Unit Rumah	1.265.601.054,32	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	1.446.849.138,67	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.02.0011	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha						1.840.000.000,00							970.000.000,00	
		Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	-		-	14 Unit Rumah	1.840.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	970.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.04.03.1.02.0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha						1.382.401.945,68							2.417.217.061,33	
		Terlaksananya Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar	-		-	2.4 Ha	1.382.401.945,68	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	2.417.217.061,33	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
79.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**						**3.157.288.000,00**							**6.229.086.400,00**	
			Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	-		-	100 Persentase	3.157.288.000,00						-	6.229.086.400,00	
	1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman						3.157.288.000,00					Masyarakat Berpenghailan Rendah (MBR)		6.229.086.400,00	
		-						3.157.288.000,00					Masyarakat Berpenghailan Rendah (MBR)		6.229.086.400,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	-		-	-	100.000.000,00						-	120.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	-		-	-	200.000.000,00						-	240.000.000,00	
			Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	-		-	-	1.757.288.000,00						-	4.250.000.000,00	
			Jumlah Lokasi PSU Permukiman yang Dilaksanakan Perbaikan	-		-	-	1.100.000.000,00						-	1.619.086.400,00	
	1.04.05.1.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman						100.000.000,00							120.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	-		-	3 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	120.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.04.05.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman						200.000.000,00							240.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	-		-	2 Laporan	200.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	240.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.1.01.0008	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman						1.100.000.000,00							1.619.086.400,00	
		Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Lokasi PSU Permukiman yang Dilaksanakan Perbaikan	-		-	4 Lokasi	1.100.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	1.619.086.400,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.1.01.0009	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman						1.757.288.000,00							4.250.000.000,00	
		Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	-		-	11 Lokasi	1.757.288.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	4.250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						**13.622.008.295,00**							**15.174.982.100,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**13.622.008.295,00**							**15.174.982.100,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**13.622.008.295,00**							**15.174.982.100,00**	
80.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**13.483.921.595,00**							**14.930.462.100,00**	
			Persentase Terselenggaranya pelayanan urusan Pemerintahan Daerah Satpol PP Provinsi Maluku (%)	-		-	100 %	13.483.921.595,00						-	14.876.462.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						35.513.850,00					-		91.000.000,00	
		-						35.513.850,00					-		91.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	4.420.650,00						-	6.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	3.297.800,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	3.630.800,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	3.179.600,00						-	35.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	20.985.000,00						-	40.000.000,00	
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						4.420.650,00							6.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	3 Dokumen	4.420.650,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	6.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						3.630.800,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	3.630.800,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						3.297.800,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	3.297.800,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						3.179.600,00							35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	4 Laporan	3.179.600,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	35.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						20.985.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	8 Laporan	20.985.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						13.009.426.743,00					-		14.338.712.100,00	
		-						13.009.426.743,00					-		14.338.712.100,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	64.200.000,00						-	60.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	2.295.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	1.676.600,00						-	3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	12.941.255.143,00						-	14.272.712.100,00	
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						12.941.255.143,00							14.272.712.100,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	233 Orang/ Bulan	12.941.255.143,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	14.272.712.100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						64.200.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	1 Dokumen	64.200.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						2.295.000,00							3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	2.295.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	3.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						1.676.600,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	2 Laporan	1.676.600,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	3.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						5.000.000,00					-		40.000.000,00	
		-						5.000.000,00					-		40.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	5.000.000,00						-	40.000.000,00	
	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						5.000.000,00							40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						165.477.010,00					-		143.000.000,00	
		-						165.477.010,00					-		143.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	1.250.000,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	119.280.000,00						-	120.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	10.972.610,00						-	11.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	6.445.000,00						-	6.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	27.529.400,00						-	3.500.000,00	
	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						27.529.400,00							3.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	27.529.400,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	3.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						10.972.610,00							11.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	10.972.610,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	11.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						6.445.000,00							6.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	2 Paket	6.445.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	6.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						1.250.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	12 Dokumen	1.250.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	2.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						119.280.000,00							120.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	119.280.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	120.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						14.224.000,00					-		50.000.000,00	
		-						14.224.000,00					-		50.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	14.224.000,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	30.000.000,00	
	1.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	1 Unit	0,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						14.224.000,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	0 Paket	14.224.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						158.219.992,00					-		170.000.000,00	
		-						158.219.992,00					-		170.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	93.419.992,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	64.800.000,00						-	70.000.000,00	
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						93.419.992,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	93.419.992,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						64.800.000,00							70.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	64.800.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	70.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						96.060.000,00					-		97.750.000,00	
		-						96.060.000,00					-		97.750.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	6.244.000,00						-	700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	82.820.000,00						-	90.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	6.996.000,00						-	7.050.000,00	
	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						82.820.000,00							90.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	10 Unit	82.820.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	90.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						6.244.000,00							700.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	6.244.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	700.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						6.996.000,00							7.050.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	20 Unit	6.996.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	7.050.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
81.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**110.086.700,00**							**204.520.000,00**	
			Presentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah (%)	-		-	100 %	80.086.700,00						-	169.520.000,00	
	1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						80.086.700,00					-		134.520.000,00	
		-						80.086.700,00					-		134.520.000,00	
			Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		-	-	29.296.700,00						-	35.000.000,00	
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	-		-	-	0,00						-	500.000,00	
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	-		-	-	11.010.000,00						-	9.000.000,00	
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	-		-	-	0,00						-	20.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	-		-	-	4.780.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	-		-	-	0,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	-		-	-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	-		-	-	30.000.000,00						-	50.000.000,00	
	1.05.02.1.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat						0,00							500.000,00	
		Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						4.780.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Pelayanan Dasar keapada warga negara yang terkena dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	-		-	4 Laporan	4.780.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0020	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa						11.010.000,00							9.000.000,00	
		Terlaksananya Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	-		-	12 Laporan	11.010.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	9.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0021	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan						0,00							20.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	-		-	1 laporan	0,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	20.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0022	Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat						0,00							30.000.000,00	
		Tersedianya laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Pelindungan Masyarakat dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	-		-	1 Laporan	0,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0026	Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota						29.296.700,00							35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai dengan Kepmendagri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		-	1 Dokumen	29.296.700,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	35.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0029	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat serta dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	-		-	2 Unit	5.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0030	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat						30.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Peningkatan Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	-		-	100 Orang	30.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur						30.000.000,00					-		40.000.000,00	
		-						30.000.000,00					-		40.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	-		-	-	30.000.000,00						-	40.000.000,00	
	1.05.02.1.02.0012	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						30.000.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	-		-	1 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi						0,00					-		30.000.000,00	
		-						0,00					-		30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	-		-	-	0,00						-	30.000.000,00	
	1.05.02.1.03.0007	Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum						0,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	-		-	1 Laporan	0,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
82.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**						**28.000.000,00**							**40.000.000,00**	
			Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (%)	-		-	100 %	28.000.000,00						-	40.000.000,00	
	1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran						28.000.000,00					-		40.000.000,00	
		-						28.000.000,00					-		40.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	-		-	-	28.000.000,00						-	40.000.000,00	
	1.05.04.1.01.0019	Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran						28.000.000,00							40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Pemutakhiran Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	-		-	2 Dokumen	28.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						**5.434.981.855,64**							**6.171.957.500,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.431.421.855,64**							**6.167.457.500,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**5.431.421.855,64**							**6.167.457.500,00**	
83.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**5.311.421.855,64**							**5.667.457.500,00**	
			-	-		-	-	5.311.421.855,64						-	5.577.457.500,00	
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.967.999.855,64					-		5.308.457.500,00	
		-						4.967.999.855,64					-		5.308.457.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	32.320.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	53.280.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	4.882.399.855,64						-	5.308.457.500,00	
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.882.399.855,64							5.308.457.500,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	49 Orang/ Bulan	4.882.399.855,64	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.308.457.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						32.320.000,00							0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	12 Dokumen	32.320.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						53.280.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	12 Dokumen	53.280.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						107.227.000,00					-		98.500.000,00	
		-						107.227.000,00					-		98.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	83.077.000,00						-	85.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	3.000.000,00						-	3.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	16.150.000,00						-	5.000.000,00	
	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						16.150.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	16.150.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.000.000,00							3.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	3.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	3.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						83.077.000,00							85.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	83.077.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	85.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						124.000.000,00					-		115.000.000,00	
		-						124.000.000,00					-		115.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	124.000.000,00						-	115.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						124.000.000,00							115.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	124.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	115.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						112.195.000,00					-		145.500.000,00	
		-						112.195.000,00					-		145.500.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	63.315.000,00						-	85.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	-	43.440.000,00						-	55.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	5.440.000,00						-	5.500.000,00	
	1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						43.440.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	2 Unit	43.440.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	55.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						63.315.000,00							85.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	11 Unit	63.315.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	85.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.440.000,00							5.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	5 Unit	5.440.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
84.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**						**120.000.000,00**							**500.000.000,00**	
			Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	-		-	100 %	100.000.000,00						-	100.000.000,00	
	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi						7.850.000,00					Masyarakat dan aparatur		0,00	
		-						7.850.000,00					Masyarakat dan aparatur		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota	-		-	-	7.850.000,00						-	0,00	
	1.05.03.1.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi						0,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)						7.850.000,00							0,00	
		Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi bagi warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota	-		-	40 Orang	7.850.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						52.150.000,00					Masyarakat dan aparatur		300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						52.150.000,00					Masyarakat dan aparatur		300.000.000,00	
			Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	-		-	-	20.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah akar masalah risiko bencana lintas Kabupaten/Kota yang tertangani	-		-	-	21.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	-		-	-	11.150.000,00						-	100.000.000,00	
	1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana						0,00							0,00	
		Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	-		-	1 Kawasan	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						11.150.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya uji mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana lintas Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	-		-	50 Orang	11.150.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0024	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi						0,00							0,00	
		Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0026	Pengelolaan Risiko Bencana						21.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan berisiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota	Jumlah akar masalah risiko bencana lintas Kabupaten/Kota yang tertangani	-		-	1 Kegiatan	21.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						20.000.000,00							100.000.000,00	
		Terbentuknya Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap (SOP) untuk pengendalian operasi yang sah dan legal dengan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	-		-	1 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						20.000.000,00					Masyarakat		100.000.000,00	
		-						20.000.000,00					Masyarakat		100.000.000,00	
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-		-	-	20.000.000,00						-	100.000.000,00	
	1.05.03.1.03.0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						20.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-		-	100 Orang	20.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						40.000.000,00					Aparatur		100.000.000,00	
		-						40.000.000,00					Aparatur		100.000.000,00	
			Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	-		-	-	12.220.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	-		-	-	0,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	-		-	-	27.780.000,00						-	0,00	
	1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi						0,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0009	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi						27.780.000,00							0,00	
		Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	-		-	1 Kegiatan	27.780.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0013	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi						12.220.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	-		-	25 Orang	12.220.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	X							**3.560.000,00**							**4.500.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**3.560.000,00**							**4.500.000,00**	
85.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**3.560.000,00**							**4.500.000,00**	
			-	-		-	-	3.560.000,00						-	4.500.000,00	
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						3.560.000,00					-		4.500.000,00	
		-						3.560.000,00					-		4.500.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	3.560.000,00						-	4.500.000,00	
	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						3.560.000,00							4.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	3.560.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	4.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL						**21.167.662.956,00**							**23.937.490.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**21.167.662.956,00**							**23.937.490.000,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**21.167.662.956,00**							**23.937.490.000,00**	
86.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**18.964.278.696,00**							**21.447.605.450,00**	
			-	-		-	-	18.055.191.496,00						-	20.368.000.000,00	
	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						701.129.700,00					-		715.000.000,00	
		-						701.129.700,00					-		715.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	203.720.400,00						-	215.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	497.409.300,00						-	500.000.000,00	
	1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						497.409.300,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	5 Laporan	497.409.300,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	500.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						203.720.400,00							215.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Berita Acara	203.720.400,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	215.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						11.491.917.269,00					-		15.160.000.000,00	
		-						11.491.917.269,00					-		15.160.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	175.924.200,00						-	160.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	11.315.993.069,00						-	15.000.000.000,00	
	1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						11.315.993.069,00							15.000.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	110 Orang/ Bulan	11.315.993.069,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	15.000.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						64.200.000,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	2 Dokumen	64.200.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	70.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						315.137.000,00					-		345.000.000,00	
		-						315.137.000,00					-		345.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	115.137.000,00						-	125.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	200.000.000,00						-	220.000.000,00	
	1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						200.000.000,00							220.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	1 Paket	200.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	220.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						115.137.000,00							125.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	10 Orang	115.137.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	125.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.144.755.220,00					-		1.195.359.950,00	
		-						1.144.755.220,00					-		1.195.359.950,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-		-	-	400.000.000,00						-	450.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	48.200.000,00						-	59.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	469.955.000,00						-	453.734.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	86.249.220,00						-	89.997.600,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	26.376.000,00						-	29.998.350,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	18.975.000,00						-	19.500.000,00	
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.975.000,00							3.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.975.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	3.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						31.730.820,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	31.730.820,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	35.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						15.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	15.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						13.200.000,00							14.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	10 Laporan	13.200.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	14.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						354.027.000,00							365.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	10 Laporan	354.027.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	365.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						400.000.000,00							450.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-		-	1 Dokumen	400.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	450.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						0,00					-		50.000.000,00	
		-						0,00					-		50.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	50.000.000,00	
	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	5 Unit	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						532.688.400,00					-		534.000.000,00	
		-						532.688.400,00					-		534.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	425.676.000,00						-	418.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	101.132.400,00						-	107.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	5.880.000,00						-	8.500.000,00	
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.000.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	5 Laporan	2.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	3.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						210.000.000,00							220.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	10 Laporan	210.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	220.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						24.426.000,00							27.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	10 Laporan	24.426.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	27.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.778.651.107,00					-		3.448.245.500,00	
		-						4.778.651.107,00					-		3.448.245.500,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	4.504.072.907,00						-	3.171.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	186.300.000,00						-	184.995.500,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	35.000.000,00						-	41.000.000,00	
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						166.300.000,00							170.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	37 Unit	166.300.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	170.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	10 Unit	15.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						4.439.072.907,00							3.100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	0 Unit	4.439.072.907,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	3.100.000.000,00	DINAS SOSIAL
87.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**						**150.798.800,00**							**197.840.000,00**	
			-	-		-	-	150.798.800,00						-	197.840.000,00	
	1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi						150.798.800,00					-		197.840.000,00	
		-						150.798.800,00					-		197.840.000,00	
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	-		-	-	61.544.000,00						-	32.840.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	-		-	-	39.256.000,00						-	110.000.000,00	
			Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	-		-	-	49.998.800,00						-	55.000.000,00	
	1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi						61.544.000,00							32.840.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	-		-	5 Lembaga	61.544.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	32.840.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0008	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi						49.998.800,00							55.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	-		-	30 Orang	49.998.800,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	55.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0011	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial						39.256.000,00							110.000.000,00	
		Terlaksananya Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	-		-	2 Orang	39.256.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	110.000.000,00	DINAS SOSIAL
88.	**1.06.03**	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**						**79.695.000,00**							**70.000.000,00**	
			-	-		-	-	79.695.000,00						-	70.000.000,00	
	1.06.03.1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal						79.695.000,00					-		70.000.000,00	
		-						79.695.000,00					-		70.000.000,00	
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	79.695.000,00						-	70.000.000,00	
	1.06.03.1.01.0003	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal						79.695.000,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	-		-	55 Orang	79.695.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	70.000.000,00	DINAS SOSIAL
89.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**						**3.524.195.400,00**							**3.763.000.000,00**	
			-	-		-	-	631.332.600,00						-	656.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti						288.818.000,00					-		276.000.000,00	
		-						288.818.000,00					-		276.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	-		-	-	20.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	-		-	-	243.818.000,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	-		-	-	25.000.000,00						-	26.000.000,00	
	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan						243.818.000,00							250.000.000,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	-		-	150 Orang	243.818.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	250.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang						25.000.000,00							26.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	-		-	40 Orang	25.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	26.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu						20.000.000,00							0,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	-		-	100 Orang	20.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti						2.167.735.400,00					-		2.358.500.000,00	
		-						2.167.735.400,00					-		2.358.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	-		-	-	1.547.347.600,00						-	1.725.000.000,00	
	1.06.04.1.02.0015	Penyediaan Permakanan						252.622.600,00							275.000.000,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	-		-	735 Orang	252.622.600,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	275.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti						39.892.000,00					-		45.000.000,00	
		-						39.892.000,00					-		45.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	-		-	-	39.892.000,00						-	45.000.000,00	
	1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan						39.892.000,00							45.000.000,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	-		-	10 Orang	39.892.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	45.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti						50.000.000,00					-		60.000.000,00	
		-						50.000.000,00					-		60.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	-		-	-	50.000.000,00						-	60.000.000,00	
	1.06.04.1.05.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA						50.000.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	-		-	10 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	60.000.000,00	DINAS SOSIAL
90.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**						**995.261.800,00**							**1.006.000.000,00**	
			-	-		-	-	995.261.800,00						-	1.006.000.000,00	
	1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal						5.000.000,00					-		6.000.000,00	
		-						5.000.000,00					-		6.000.000,00	
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	-		-	-	5.000.000,00						-	6.000.000,00	
	1.06.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak antar WNI						5.000.000,00							6.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Asuh/Oang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	-		-	10 Orang	5.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	6.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi						990.261.800,00					-		1.000.000.000,00	
		-						990.261.800,00					-		1.000.000.000,00	
			Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	-		-	-	990.261.800,00						-	1.000.000.000,00	
	1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat						990.261.800,00							1.000.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	-		-	200 Orang	990.261.800,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.000.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin	-		-	5 Kab/Kota	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS SOSIAL
91.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**						**1.070.052.000,00**							**1.199.650.000,00**	
			-	-		-	-	1.070.052.000,00						-	1.199.650.000,00	
	1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi						1.070.052.000,00					-		1.199.650.000,00	
		-						1.070.052.000,00					-		1.199.650.000,00	
			Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	-		-	-	59.625.000,00						-	64.650.000,00	
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	-		-	-	157.600.000,00						-	410.000.000,00	
			Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	-		-	-	335.720.000,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	-		-	-	517.107.000,00						-	475.000.000,00	
	1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan						335.720.000,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	-		-	1500 Orang	335.720.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	250.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial						157.600.000,00							410.000.000,00	
		Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Provinsi	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	-		-	200 Orang	157.600.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	410.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0016	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana						517.107.000,00							475.000.000,00	
		Meningkatnya Kompetensi Tagana Dalam Penanganan Bencana	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	-		-	50 Orang	517.107.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	475.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0018	Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah						59.625.000,00							64.650.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	-		-	100 Orang	59.625.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	64.650.000,00	DINAS SOSIAL
92.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**						**170.331.260,00**							**200.000.000,00**	
			-	-		-	-	170.331.260,00						-	200.000.000,00	
	1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi						170.331.260,00					-		200.000.000,00	
		-						170.331.260,00					-		200.000.000,00	
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	-		-	-	170.331.260,00						-	200.000.000,00	
	1.06.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi						170.331.260,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	-		-	710 Makam	170.331.260,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	200.000.000,00	DINAS SOSIAL
		PANTI SOSIAL BINA REMAJA HITI-HITI-HALA-HALA						**1.287.000.000,00**							**1.303.605.450,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.287.000.000,00**							**1.303.605.450,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**1.287.000.000,00**							**1.303.605.450,00**	
93.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**18.964.278.696,00**							**21.447.605.450,00**	
			-	-		-	-	561.372.200,00						-	454.605.450,00	
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						11.491.917.269,00					-		15.160.000.000,00	
		-						11.491.917.269,00					-		15.160.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	175.924.200,00						-	160.000.000,00	
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						80.044.200,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	10 Dokumen	80.044.200,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	35.000.000,00	PANTI SOSIAL BINA REMAJA HITI-HITI-HALA-HALA
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.144.755.220,00					-		1.195.359.950,00	
		-						1.144.755.220,00					-		1.195.359.950,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	48.200.000,00						-	59.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	469.955.000,00						-	453.734.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	86.249.220,00						-	89.997.600,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	26.376.000,00						-	29.998.350,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	18.975.000,00						-	19.500.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	95.000.000,00						-	92.630.000,00	
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						6.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	6.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.000.000,00	PANTI SOSIAL BINA REMAJA HITI-HITI-HALA-HALA
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						60.000.000,00							52.630.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	60.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	52.630.000,00	PANTI SOSIAL BINA REMAJA HITI-HITI-HALA-HALA
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						20.004.000,00							14.997.600,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	20.004.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	14.997.600,00	PANTI SOSIAL BINA REMAJA HITI-HITI-HALA-HALA
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.000.000,00							2.998.350,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.998.350,00	PANTI SOSIAL BINA REMAJA HITI-HITI-HALA-HALA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						30.000.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	40.000.000,00	PANTI SOSIAL BINA REMAJA HITI-HITI-HALA-HALA
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						100.928.000,00							71.234.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	3 Laporan	100.928.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	71.234.000,00	PANTI SOSIAL BINA REMAJA HITI-HITI-HALA-HALA
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						532.688.400,00					-		534.000.000,00	
		-						532.688.400,00					-		534.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	425.676.000,00						-	418.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	101.132.400,00						-	107.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	5.880.000,00						-	8.500.000,00	
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.400.000,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	3 Laporan	2.400.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.500.000,00	PANTI SOSIAL BINA REMAJA HITI-HITI-HALA-HALA
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						84.996.000,00							63.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	10 Laporan	84.996.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	63.000.000,00	PANTI SOSIAL BINA REMAJA HITI-HITI-HALA-HALA
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						72.000.000,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	10 Laporan	72.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	75.000.000,00	PANTI SOSIAL BINA REMAJA HITI-HITI-HALA-HALA
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.778.651.107,00					-		3.448.245.500,00	
		-						4.778.651.107,00					-		3.448.245.500,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	4.504.072.907,00						-	3.171.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	186.300.000,00						-	184.995.500,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	35.000.000,00						-	41.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	15.000.000,00						-	7.250.000,00	
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						20.000.000,00							14.995.500,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	1 Unit	20.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	14.995.500,00	PANTI SOSIAL BINA REMAJA HITI-HITI-HALA-HALA
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	8 Unit	10.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.000.000,00	PANTI SOSIAL BINA REMAJA HITI-HITI-HALA-HALA
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						55.000.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	55.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	60.000.000,00	PANTI SOSIAL BINA REMAJA HITI-HITI-HALA-HALA
	1.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						15.000.000,00							7.250.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	2 Unit	15.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	7.250.000,00	PANTI SOSIAL BINA REMAJA HITI-HITI-HALA-HALA
94.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**						**3.524.195.400,00**							**3.763.000.000,00**	
			-	-		-	-	725.627.800,00						-	849.000.000,00	
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti						2.167.735.400,00					-		2.358.500.000,00	
		-						2.167.735.400,00					-		2.358.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	-		-	-	233.527.800,00						-	235.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	-		-	-	40.500.000,00						-	40.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	-		-	-	31.500.000,00						-	45.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	-		-	-	13.000.000,00						-	13.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	-		-	-	1.547.347.600,00						-	1.725.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	-		-	-	87.460.000,00						-	80.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	-		-	-	14.000.000,00						-	14.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	-		-	-	137.800.000,00						-	140.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	-		-	-	62.600.000,00						-	65.500.000,00	
	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang						30.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	-		-	30 Orang	30.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	20.000.000,00	PANTI SOSIAL BINA REMAJA HITI-HITI-HALA-HALA
	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	-		-	30 Orang	10.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.000.000,00	PANTI SOSIAL BINA REMAJA HITI-HITI-HALA-HALA
	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial						53.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	-		-	30 Orang	53.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	55.000.000,00	PANTI SOSIAL BINA REMAJA HITI-HITI-HALA-HALA
	1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari						109.000.000,00							110.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	-		-	30 Orang	109.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	110.000.000,00	PANTI SOSIAL BINA REMAJA HITI-HITI-HALA-HALA
	1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar						22.500.000,00							15.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	-		-	15 Orang	22.500.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	15.500.000,00	PANTI SOSIAL BINA REMAJA HITI-HITI-HALA-HALA
	1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga						31.500.000,00							45.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	-		-	100 Orang	31.500.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	45.000.000,00	PANTI SOSIAL BINA REMAJA HITI-HITI-HALA-HALA
	1.06.04.1.02.0015	Penyediaan Permakanan						227.100.000,00							350.000.000,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	-		-	30 Orang	227.100.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	350.000.000,00	PANTI SOSIAL BINA REMAJA HITI-HITI-HALA-HALA
	1.06.04.1.02.0017	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti						233.527.800,00							235.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	-		-	2 Dokumen	233.527.800,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	235.000.000,00	PANTI SOSIAL BINA REMAJA HITI-HITI-HALA-HALA
	1.06.04.1.02.0022	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar						9.000.000,00							8.500.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	-		-	20 Orang	9.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	8.500.000,00	PANTI SOSIAL BINA REMAJA HITI-HITI-HALA-HALA
		PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA INA KAKA						**1.249.950.000,00**							**1.342.500.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.249.950.000,00**							**1.342.500.000,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**1.249.950.000,00**							**1.342.500.000,00**	
95.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**18.964.278.696,00**							**21.447.605.450,00**	
			-	-		-	-	232.200.000,00						-	291.500.000,00	
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						11.491.917.269,00					-		15.160.000.000,00	
		-						11.491.917.269,00					-		15.160.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	175.924.200,00						-	160.000.000,00	
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						31.680.000,00							55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	2 Dokumen	31.680.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	55.000.000,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA INA KAKA
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.144.755.220,00					-		1.195.359.950,00	
		-						1.144.755.220,00					-		1.195.359.950,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	48.200.000,00						-	59.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	469.955.000,00						-	453.734.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	86.249.220,00						-	89.997.600,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	26.376.000,00						-	29.998.350,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	18.975.000,00						-	19.500.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	95.000.000,00						-	92.630.000,00	
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.000.000,00							11.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	11.000.000,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA INA KAKA
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						35.000.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	35.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	40.000.000,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA INA KAKA
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						15.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	15.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	20.000.000,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA INA KAKA
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.000.000,00							5.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.500.000,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA INA KAKA
	1.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						5.000.000,00							5.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	2 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.500.000,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA INA KAKA
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						15.000.000,00							17.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	15.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	17.500.000,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA INA KAKA
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						532.688.400,00					-		534.000.000,00	
		-						532.688.400,00					-		534.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	425.676.000,00						-	418.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	101.132.400,00						-	107.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	5.880.000,00						-	8.500.000,00	
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.000.000,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.500.000,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA INA KAKA
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						104.520.000,00							105.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	3 Laporan	104.520.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	105.000.000,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA INA KAKA
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	10 Laporan	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA INA KAKA
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.778.651.107,00					-		3.448.245.500,00	
		-						4.778.651.107,00					-		3.448.245.500,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	4.504.072.907,00						-	3.171.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	-	38.278.200,00						-	44.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	35.000.000,00						-	41.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	0,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	15.000.000,00						-	7.250.000,00	
	1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						30.000.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	5 Unit	30.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	35.000.000,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA INA KAKA
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.000.000,00							11.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	5 Unit	10.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	11.000.000,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA INA KAKA
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						10.000.000,00							11.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	2 Unit	10.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	11.000.000,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA INA KAKA
	1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	4 Unit	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA INA KAKA
	1.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	10 Unit	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA INA KAKA
96.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**						**3.524.195.400,00**							**3.763.000.000,00**	
			-	-		-	-	942.750.000,00						-	1.008.500.000,00	
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti						977.750.000,00					-		1.023.500.000,00	
		-						977.750.000,00					-		1.023.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	-		-	-	4.950.000,00						-	6.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	-		-	-	35.000.000,00						-	37.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	-		-	-	24.000.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	-		-	-	30.000.000,00						-	35.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	-		-	-	24.230.000,00						-	27.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	-		-	-	784.275.000,00						-	795.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	-		-	-	14.495.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	-		-	-	5.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	-		-	-	35.000.000,00						-	40.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	-		-	-	10.000.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	-		-	-	10.800.000,00						-	12.000.000,00	
	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan						784.275.000,00							795.000.000,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	-		-	35 Orang	784.275.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	795.000.000,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA INA KAKA
	1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang						14.495.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	-		-	35 Orang	14.495.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	15.000.000,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA INA KAKA
	1.06.04.1.03.0004	Penyediaan Alat Bantu						35.000.000,00							37.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	-		-	35 Orang	35.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	37.500.000,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA INA KAKA
	1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial						24.230.000,00							27.500.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	-		-	35 Orang	24.230.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	27.500.000,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA INA KAKA
	1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial						10.800.000,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	-		-	35 Orang	10.800.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	12.000.000,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA INA KAKA
	1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari						10.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	-		-	35 Orang	10.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	15.000.000,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA INA KAKA
	1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga						24.000.000,00							30.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	-		-	19 Orang	24.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	30.000.000,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA INA KAKA
	1.06.04.1.03.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga						30.000.000,00							35.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	-		-	20 Orang	30.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	35.000.000,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA INA KAKA
	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan						35.000.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	-		-	7 Orang	35.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	40.000.000,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA INA KAKA
	1.06.04.1.03.0015	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	-		-	35 Orang	5.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.000.000,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA INA KAKA
	1.06.04.1.03.0016	Akses ke Layanan Kesehatan Dasar						4.950.000,00							6.500.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	-		-	35 Orang	4.950.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	6.500.000,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA INA KAKA
		PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HUKEINA						**1.250.000.000,00**							**1.300.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.250.000.000,00**							**1.300.500.000,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**1.250.000.000,00**							**1.300.500.000,00**	
97.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**18.964.278.696,00**							**21.447.605.450,00**	
			-	-		-	-	60.515.000,00						-	66.000.000,00	
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.144.755.220,00					-		1.195.359.950,00	
		-						1.144.755.220,00					-		1.195.359.950,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	86.249.220,00						-	89.997.600,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	26.376.000,00						-	29.998.350,00	
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						19.514.400,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	19.514.400,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	20.000.000,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HUKEINA
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.376.000,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	1.376.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.500.000,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HUKEINA
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						532.688.400,00					-		534.000.000,00	
		-						532.688.400,00					-		534.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	425.676.000,00						-	418.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	101.132.400,00						-	107.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	5.880.000,00						-	8.500.000,00	
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						480.000,00							500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	480.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	500.000,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HUKEINA
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						26.160.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	3 Laporan	26.160.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	30.000.000,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HUKEINA
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						4.706.400,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	2 Laporan	4.706.400,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.000.000,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HUKEINA
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.778.651.107,00					-		3.448.245.500,00	
		-						4.778.651.107,00					-		3.448.245.500,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	-	38.278.200,00						-	44.000.000,00	
	1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						8.278.200,00							9.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	3 Unit	8.278.200,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	9.000.000,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HUKEINA
98.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**						**3.524.195.400,00**							**3.763.000.000,00**	
			-	-		-	-	1.189.485.000,00						-	1.234.500.000,00	
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti						2.167.735.400,00					-		2.358.500.000,00	
		-						2.167.735.400,00					-		2.358.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	-		-	-	40.500.000,00						-	40.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	-		-	-	13.000.000,00						-	13.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	-		-	-	1.547.347.600,00						-	1.725.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	-		-	-	87.460.000,00						-	80.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	-		-	-	14.000.000,00						-	14.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	-		-	-	137.800.000,00						-	140.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	-		-	-	62.600.000,00						-	65.500.000,00	
	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang						57.460.000,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	-		-	18 Orang	57.460.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	60.000.000,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HUKEINA
	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti						3.000.000,00							3.500.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	-		-	50 Orang	3.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	3.500.000,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HUKEINA
	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial						9.600.000,00							10.500.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	-		-	50 Orang	9.600.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.500.000,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HUKEINA
	1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari						28.800.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	-		-	50 Orang	28.800.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	30.000.000,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HUKEINA
	1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar						18.000.000,00							25.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	-		-	50 Orang	18.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	25.000.000,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HUKEINA
	1.06.04.1.02.0015	Penyediaan Permakanan						1.067.625.000,00							1.100.000.000,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	-		-	50 Orang	1.067.625.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.100.000.000,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HUKEINA
	1.06.04.1.02.0022	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar						5.000.000,00							5.500.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	-		-	50 Orang	5.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.500.000,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HUKEINA
		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI						**13.506.469.850,00**							**15.359.129.900,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**13.446.469.850,00**							**15.359.129.900,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**13.446.469.850,00**							**15.359.129.900,00**	
99.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**13.077.736.125,00**							**14.890.867.829,00**	
			-	-		-	-	12.719.255.850,00						-	14.172.305.000,00	
	2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						30.835.500,00					-		152.000.000,00	
		-						30.835.500,00					-		152.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-		-	-	5.000.000,00						-	17.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	15.087.000,00						-	85.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	-		-	-	1.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	1.244.500,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	6.504.000,00						-	41.000.000,00	
	2.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						15.087.000,00							85.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	15.087.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	85.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						1.244.500,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.244.500,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	3.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.000.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	3.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						1.000.000,00							3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	3.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						6.504.000,00							41.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	1 Laporan	6.504.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	41.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						5.000.000,00							17.000.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-		-	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	17.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD						1.000.000,00							0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12.173.769.142,00					-		13.226.772.000,00	
		-						12.173.769.142,00					-		13.226.772.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-		-	-	0,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	162.000.000,00						-	225.600.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	1.999.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	0,00						-	6.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	12.009.770.142,00						-	12.992.172.000,00	
	2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						12.009.770.142,00							12.992.172.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	125 Orang/ Bulan	12.009.770.142,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	12.992.172.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						162.000.000,00							225.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	12 Dokumen	162.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	225.600.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1.999.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	1.999.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						0,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						0,00							6.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	1 Laporan	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	6.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						9.993.000,00					-		15.000.000,00	
		-						9.993.000,00					-		15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	9.993.000,00						-	15.000.000,00	
	2.07.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan PengendalianBarang Milik Daerah pada SKPD						9.993.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	1 Laporan	9.993.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						19.319.208,00					-		91.000.000,00	
		-						19.319.208,00					-		91.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	-		-	-	0,00						-	12.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	-		-	-	9.715.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	-	0,00						-	16.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	9.604.208,00						-	62.500.000,00	
	2.07.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						9.715.000,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	-		-	1 Dokumen	9.715.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai						0,00							16.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	12 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	16.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.05.0008	Pemindahan Tugas ASN						0,00							12.500.000,00	
		Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	-		-	3 Orang	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	12.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						9.604.208,00							62.500.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	2 Orang	9.604.208,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	62.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						196.432.400,00					-		481.536.811,00	
		-						196.432.400,00					-		481.536.811,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-		-	-	0,00						-	12.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	7.281.000,00						-	25.005.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	116.519.000,00						-	274.524.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	49.293.400,00						-	91.760.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	9.539.000,00						-	35.460.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	13.800.000,00						-	22.537.811,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	15.000.000,00	
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.000.000,00							8.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	8.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						23.500.000,00							76.760.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	23.500.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	76.760.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4.000.000,00							22.460.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	4.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	22.460.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						6.000.000,00							16.355.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	12 Laporan	6.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	16.355.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						93.539.000,00							175.964.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	14 Laporan	93.539.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	175.964.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						0,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	12.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						324.540.000,00					-		239.723.625,00	
		-						324.540.000,00					-		239.723.625,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	3.500.000,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	204.000.000,00						-	105.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.07.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	1 Unit	0,00	Provinsi Maluku	-	-	-		-	0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						3.500.000,00							0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	1 Paket	3.500.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						204.000.000,00							105.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	5 Unit	204.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	105.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						263.026.875,00					-		425.202.549,00	
		-						263.026.875,00					-		425.202.549,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	256.246.875,00						-	319.394.923,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	3.030.000,00						-	100.500.000,00	
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						121.000.000,00							165.174.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	121.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	165.174.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						59.820.000,00					-		259.632.844,00	
		-						59.820.000,00					-		259.632.844,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	2.500.000,00						-	12.025.625,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	5.700.000,00						-	107.360.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	-	19.500.000,00						-	42.900.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	32.120.000,00						-	90.433.469,00	
	2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						19.500.000,00							42.900.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	1 Unit	19.500.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	42.900.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							48.420.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	4 Unit	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	48.420.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						2.300.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	18 Unit	2.300.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
100.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**						**173.350.000,00**							**216.812.900,00**	
			Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	-		-	20 %	173.350.000,00						-	216.812.900,00	
	2.07.02.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)						173.350.000,00					-		216.812.900,00	
		-						173.350.000,00					-		216.812.900,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	-		-	-	0,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro	-		-	-	73.350.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan yang mampu menyusun RTK Makro	-		-	-	100.000.000,00						-	116.812.900,00	
	2.07.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro						0,00							0,00	
		Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	-		-	0 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.02.1.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro						100.000.000,00							116.812.900,00	
		Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan yang mampu menyusun RTK Makro	-		-	12 Orang	100.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	116.812.900,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro						73.350.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro	-		-	12 Orang	73.350.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
101.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**						**184.913.000,00**							**271.016.600,00**	
			Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	-		-	100 %	184.913.000,00						-	271.016.600,00	
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi						154.650.000,00					Masyarakat		235.000.000,00	
		-						154.650.000,00					Masyarakat		235.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	-		-	-	154.650.000,00						-	235.000.000,00	
	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi						154.650.000,00							235.000.000,00	
		Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	-		-	20 Orang	154.650.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	235.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.02	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja						0,00					Masyarakat		10.500.000,00	
		-						0,00					Masyarakat		10.500.000,00	
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	-		-	-	0,00						-	10.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.07.03.1.02.0001	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja						0,00							10.500.000,00	
		Terlaksananya Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	-		-	0 LPK	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.03	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah						30.263.000,00					Masyarakat		25.516.600,00	
		-						30.263.000,00					Masyarakat		25.516.600,00	
			Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	-		-	-	30.263.000,00						-	25.516.600,00	
	2.07.03.1.03.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah						30.263.000,00							25.516.600,00	
		Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	-		-	10 Perusahaan	30.263.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	25.516.600,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
102.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**						**175.076.000,00**							**140.920.000,00**	
			Presentase Tenaga Kerja yang ditempatkan di dalam negeri	-		-	0.48 %	7.000.000,00						-	10.000.000,00	
			-	-		-	-	168.076.000,00						-	130.920.000,00	
	2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota						7.000.000,00					-		10.000.000,00	
		-						7.000.000,00					-		10.000.000,00	
			Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	-		-	-	7.000.000,00						-	10.000.000,00	
	2.07.04.1.01.0006	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan						7.000.000,00							10.000.000,00	
		Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	-		-	50 Orang	7.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja						168.076.000,00					-		130.920.000,00	
		-						168.076.000,00					-		130.920.000,00	
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	-		-	-	40.000.000,00						-	130.920.000,00	
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	-		-	-	128.076.000,00						-	0,00	
	2.07.04.1.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online						40.000.000,00							130.920.000,00	
		Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Melalui sistem online (KarirHub)	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	-		-	50 Orang	40.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	130.920.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.07.04.1.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja						128.076.000,00							0,00	
		Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	-		-	200 Orang	128.076.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi						0,00					-		0,00	
		-						0,00					-		0,00	
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	-		-	-	0,00						-	0,00	
	2.07.04.1.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)						0,00							0,00	
		Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	-		-	0 Orang	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
103.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**						**69.000.000,00**							**151.679.500,00**	
			Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	-		-	250 Orang	0,00						-	25.075.000,00	
			-	-		-	-	69.000.000,00						-	126.604.500,00	
	2.07.05.1.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota						0,00					-		25.075.000,00	
		-						0,00					-		25.075.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	-		-	-	0,00						-	7.500.000,00	
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	-		-	-	0,00						-	12.575.000,00	
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	-		-	-	0,00						-	5.000.000,00	
	2.07.05.1.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial						0,00							12.575.000,00	
		Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait Dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	-		-	10 Perusahaan	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	12.575.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial						0,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Perjanjian Kerja Bersama yang Terkait Dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	-		-	1 Perusahaan	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja						0,00								7.500.000,00	
		Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	-		-	1 Laporan	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	7.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi						42.718.000,00					-		66.393.500,00	
		-						42.718.000,00					-		66.393.500,00	
			Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	-		-	-	0,00						-	11.000.000,00	
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	-		-	-	24.278.000,00						-	25.047.000,00	
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah	-		-	-	18.440.000,00						-	0,00	
			Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	-		-	-	0,00						-	30.346.500,00	
	2.07.05.1.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi						18.440.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	-		-	2 Perkara	18.440.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi						24.278.000,00							25.047.000,00	
		Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	-		-	50 Perkara	24.278.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	25.047.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	-		-	5 Asosiasi dan Serikat Pekerja	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi						0,00							11.000.000,00	
		Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	-		-	1 Lembaga	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	11.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0005	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi						0,00							30.346.500,00	
		Terlaksananya Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	-		-	10 Perusahaan	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	30.346.500,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)						26.282.000,00					-		60.211.000,00	
		-						26.282.000,00					-		60.211.000,00	
			Jumlah penetapan UMK	-		-	-	0,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Penetapan UMP	-		-	-	26.282.000,00						-	32.711.000,00	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	-		-	-	0,00						-	25.000.000,00	
	2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)						26.282.000,00							32.711.000,00	
		Ditetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	-		-	1 Surat Keputusan	26.282.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	32.711.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.03.0003	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)						0,00							2.500.000,00	
		Ditetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Jumlah penetapan UMK	-		-	1 Surat Keputusan	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.03.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja						0,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	-		-	200 Orang	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
104.	**2.07.06**	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**						**320.686.840,00**							**580.395.900,00**	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindunginya hak-hak dasar	-		-	3075 Orang	122.875.000,00						-	385.395.900,00	
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan						320.686.840,00					-		580.395.900,00	
		-						320.686.840,00					-		580.395.900,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	-		-	-	0,00						-	35.000.000,00	
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	-		-	-	177.852.340,00						-	290.395.900,00	
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	-		-	-	142.834.500,00						-	255.000.000,00	
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan						67.000.000,00							170.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	-		-	840 Perusahaan	67.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	170.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan						0,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	-		-	1 Kasus	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan						55.875.000,00							190.395.900,00	
		Terlaksananya Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	-		-	240 Perusahaan	55.875.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	190.395.900,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**60.000.000,00**							**0,00**	
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**						**60.000.000,00**							**0,00**	
105.	**3.32.02**	**PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI**						**0,00**							**0,00**	
			-	-		-	-	0,00						-	0,00	
	3.32.02.1.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi						0,00					-		0,00	
		-						0,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	-		-	-	0,00						-	0,00	
	3.32.02.1.01.0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi						0,00							0,00	
		Teridentifikasinya Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	-		-	0 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
106.	**3.32.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**						**60.000.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase transmigrasi yang dibina dan diberdayakan	-		-	0,21 %	60.000.000,00						-	0,00	
	3.32.04.1.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan						60.000.000,00					-		0,00	
		-						60.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	-		-	-	60.000.000,00						-	0,00	
	3.32.04.1.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman						60.000.000,00							0,00	
		Terwujudnya Penguatan SDM dalam Rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	-		-	100 Kepala Keluarga	60.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		BALAI PENGEMBANGAN KESELAMATAN KERJA DAN HIPERKES						**170.555.240,00**							**230.600.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**170.555.240,00**							**230.600.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**170.555.240,00**							**230.600.000,00**	
107.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**13.077.736.125,00**							**14.890.867.829,00**	
			-	-		-	-	101.338.400,00						-	177.100.000,00	
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						196.432.400,00					-		481.536.811,00	
		-						196.432.400,00					-		481.536.811,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	7.281.000,00						-	25.005.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	116.519.000,00						-	274.524.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	49.293.400,00						-	91.760.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	9.539.000,00						-	35.460.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	13.800.000,00						-	22.537.811,00	
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						0,00							3.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	3.500.000,00	BALAI PENGEMBANGAN KESELAMATAN KERJA DAN HIPERKES
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						1.989.900,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	1.989.900,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	BALAI PENGEMBANGAN KESELAMATAN KERJA DAN HIPERKES
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.287.500,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	1.287.500,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	6.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN KESELAMATAN KERJA DAN HIPERKES
	2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						1.281.000,00							3.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	1.281.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	3.500.000,00	BALAI PENGEMBANGAN KESELAMATAN KERJA DAN HIPERKES
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	BALAI PENGEMBANGAN KESELAMATAN KERJA DAN HIPERKES
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						324.540.000,00					-		239.723.625,00	
		-						324.540.000,00					-		239.723.625,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
	2.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	BALAI PENGEMBANGAN KESELAMATAN KERJA DAN HIPERKES
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						263.026.875,00					-		425.202.549,00	
		-						263.026.875,00					-		425.202.549,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	256.246.875,00						-	319.394.923,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	3.030.000,00						-	100.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	3.750.000,00						-	5.307.626,00	
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.500.000,00							1.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	1.500.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.700.000,00	BALAI PENGEMBANGAN KESELAMATAN KERJA DAN HIPERKES
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						69.000.000,00							71.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	69.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	71.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN KESELAMATAN KERJA DAN HIPERKES
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	BALAI PENGEMBANGAN KESELAMATAN KERJA DAN HIPERKES
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						59.820.000,00					-		259.632.844,00	
		-						59.820.000,00					-		259.632.844,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	2.500.000,00						-	12.025.625,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	5.700.000,00						-	107.360.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	32.120.000,00						-	90.433.469,00	
	2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						4.500.000,00							37.900.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	1 Unit	4.500.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	37.900.000,00	BALAI PENGEMBANGAN KESELAMATAN KERJA DAN HIPERKES
	2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						21.780.000,00							57.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	4 Unit	21.780.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	57.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN KESELAMATAN KERJA DAN HIPERKES
	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	BALAI PENGEMBANGAN KESELAMATAN KERJA DAN HIPERKES

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
108.	**2.07.06**	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**						**320.686.840,00**							**580.395.900,00**	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindunginya hak-hak dasar	-		-	3075 Orang	69.216.840,00						-	50.000.000,00	
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan						320.686.840,00					-		580.395.900,00	
		-						320.686.840,00					-		580.395.900,00	
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	-		-	-	177.852.340,00						-	290.395.900,00	
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan						69.216.840,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	-		-	30 Perusahaan	69.216.840,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	50.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN KESELAMATAN KERJA DAN HIPERKES
		BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL I						**81.500.000,00**							**107.460.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**81.500.000,00**							**107.460.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**81.500.000,00**							**107.460.000,00**	
109.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**13.077.736.125,00**							**14.890.867.829,00**	
			-	-		-	-	42.699.000,00						-	77.460.000,00	
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						196.432.400,00					-		481.536.811,00	
		-						196.432.400,00					-		481.536.811,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	5.250.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	7.281.000,00						-	25.005.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	116.519.000,00						-	274.524.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	49.293.400,00						-	91.760.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	9.539.000,00						-	35.460.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	13.800.000,00						-	22.537.811,00	
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						800.000,00							7.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	800.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	7.000.000,00	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL I
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						10.619.000,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	10.619.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL I
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						0,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	0 Paket	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL I
	2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						0,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	0 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL I
	2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						0,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL I
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						14.780.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	2 Laporan	14.780.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	35.000.000,00	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL I
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						263.026.875,00					-		425.202.549,00	
		-						263.026.875,00					-		425.202.549,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	256.246.875,00						-	319.394.923,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	3.750.000,00						-	5.307.626,00	
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.500.000,00							1.700.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	1.500.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.700.000,00	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL I
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						15.000.000,00							18.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	15.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	18.000.000,00	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL I

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						59.820.000,00					-		259.632.844,00	
		-						59.820.000,00					-		259.632.844,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	2.500.000,00						-	12.025.625,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	5.700.000,00						-	107.360.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	32.120.000,00						-	90.433.469,00	
	2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							5.260.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	2 Unit	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.260.000,00	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL I
	2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							5.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	8 Unit	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.500.000,00	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL I
	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.000.000,00	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL I
110.	**2.07.06**	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**						**320.686.840,00**							**580.395.900,00**	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindunginya hak-hak dasar	-		-	3075 Orang	19.400.500,00						-	30.000.000,00	
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan						320.686.840,00					-		580.395.900,00	
		-						320.686.840,00					-		580.395.900,00	
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	-		-	-	177.852.340,00						-	290.395.900,00	
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	-		-	-	142.834.500,00						-	255.000.000,00	
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan						19.400.500,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan dan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	-		-	300 Perusahaan	19.400.500,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	20.000.000,00	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL I
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan						19.400.500,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	-		-	35 Perusahaan	19.400.500,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.000.000,00	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL I
		BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL II						**77.198.875,00**							**165.080.374,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**77.198.875,00**							**165.080.374,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**77.198.875,00**							**165.080.374,00**	
111.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**13.077.736.125,00**							**14.890.867.829,00**	
			-	-		-	-	48.614.875,00						-	135.080.374,00	
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						196.432.400,00					-		481.536.811,00	
		-						196.432.400,00					-		481.536.811,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	5.250.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	7.281.000,00						-	25.005.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	116.519.000,00						-	274.524.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	49.293.400,00						-	91.760.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	9.539.000,00						-	35.460.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	13.800.000,00						-	22.537.811,00	
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						0,00							1.037.811,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.037.811,00	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL II
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						1.624.500,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	1.624.500,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.000.000,00	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL II
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						751.500,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	751.500,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.000.000,00	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL II
	2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						0,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.500.000,00	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL II
	2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						0,00							1.250.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	5 Laporan	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.250.000,00	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL II
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						0,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	3 Laporan	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	15.000.000,00	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL II
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						324.540.000,00					-		239.723.625,00	
		-						324.540.000,00					-		239.723.625,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	117.040.000,00						-	134.723.625,00	
	2.07.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						28.040.000,00							28.000.000,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	28.040.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	28.000.000,00	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL II
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						263.026.875,00					-		425.202.549,00	
		-						263.026.875,00					-		425.202.549,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	256.246.875,00						-	319.394.923,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	3.030.000,00						-	100.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	3.750.000,00						-	5.307.626,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						500.000,00							578.813,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	500.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	578.813,00	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL II
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						17.698.875,00							21.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	17.698.875,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	21.000.000,00	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL II
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							50.300.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	50.300.000,00	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL II
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						59.820.000,00					-		259.632.844,00	
		-						59.820.000,00					-		259.632.844,00	
			Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	-		-	-	0,00						-	5.260.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	2.500.000,00						-	12.025.625,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	0,00						-	1.653.750,00	
	2.07.01.1.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor						0,00							5.260.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	-		-	1 Unit	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.260.000,00	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL II
	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.500.000,00	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL II
	2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							1.653.750,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	3 Unit	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.653.750,00	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL II
112.	**2.07.06**	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**						**320.686.840,00**							**580.395.900,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindunginya hak-hak dasar	-		-	3075 Orang	28.584.000,00						-	30.000.000,00	
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan						320.686.840,00					-		580.395.900,00	
		-						320.686.840,00					-		580.395.900,00	
			Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	-		-	-	0,00						-	35.000.000,00	
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	-		-	-	177.852.340,00						-	290.395.900,00	
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	-		-	-	142.834.500,00						-	255.000.000,00	
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan						22.064.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	-		-	120 Perusahaan	22.064.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	15.000.000,00	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL II
	2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan						0,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	-		-	10 Kasus	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.000.000,00	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL II
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan						6.520.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	-		-	100 Perusahaan	6.520.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.000.000,00	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL II
		BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL III						**71.290.000,00**							**119.112.907,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**71.290.000,00**							**119.112.907,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**71.290.000,00**							**119.112.907,00**	
113.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**13.077.736.125,00**							**14.890.867.829,00**	
			-	-		-	-	43.630.000,00						-	87.212.907,00	
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						196.432.400,00					-		481.536.811,00	
		-						196.432.400,00					-		481.536.811,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	5.250.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	7.281.000,00						-	25.005.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	116.519.000,00						-	274.524.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	49.293.400,00						-	91.760.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	9.539.000,00						-	35.460.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	13.800.000,00						-	22.537.811,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	15.000.000,00	
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.000.000,00							750.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	1.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	750.000,00	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL III
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL III
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						3.500.000,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	3.500.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	4.000.000,00	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL III
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.000.000,00							1.900.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	1.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.900.000,00	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL III
	2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						0,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.000.000,00	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL III
	2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						0,00							1.900.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	6 Laporan	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.900.000,00	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL III

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						1.000.000,00							25.600.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	2 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	25.600.000,00	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL III
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						324.540.000,00					-		239.723.625,00	
		-						324.540.000,00					-		239.723.625,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	117.040.000,00						-	134.723.625,00	
	2.07.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						25.000.000,00							28.940.625,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	25.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	28.940.625,00	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL III
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						263.026.875,00					-		425.202.549,00	
		-						263.026.875,00					-		425.202.549,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	256.246.875,00						-	319.394.923,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	3.750.000,00						-	5.307.626,00	
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						250.000,00							578.813,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	250.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	578.813,00	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL III
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						11.040.000,00							14.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	11.040.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	14.000.000,00	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL III
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						59.820.000,00					-		259.632.844,00	
		-						59.820.000,00					-		259.632.844,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	2.500.000,00						-	12.025.625,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	5.700.000,00						-	107.360.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	32.120.000,00						-	90.433.469,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							5.260.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	1 Unit	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.260.000,00	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL III
	2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						2.840.000,00							3.183.469,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	3 Unit	2.840.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	3.183.469,00	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL III
	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.000.000,00	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL III
114.	**2.07.06**	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**						**320.686.840,00**							**580.395.900,00**	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindunginya hak-hak dasar	-		-	3075 Orang	25.660.000,00						-	30.000.000,00	
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan						320.686.840,00					-		580.395.900,00	
		-						320.686.840,00					-		580.395.900,00	
			Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	-		-	-	0,00						-	35.000.000,00	
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	-		-	-	177.852.340,00						-	290.395.900,00	
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	-		-	-	142.834.500,00						-	255.000.000,00	
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan						11.230.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	-		-	60 Perusahaan	11.230.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	15.000.000,00	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL III
	2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan						0,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	-		-	10 Kasus	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.000.000,00	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL III

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan						14.430.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	-		-	30 Perusahaan	14.430.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.000.000,00	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL III
		BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL IV						**73.048.000,00**							**121.349.548,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**73.048.000,00**							**121.349.548,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**73.048.000,00**							**121.349.548,00**	
115.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**13.077.736.125,00**							**14.890.867.829,00**	
			-	-		-	-	49.238.000,00						-	91.349.548,00	
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						196.432.400,00					-		481.536.811,00	
		-						196.432.400,00					-		481.536.811,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	5.250.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	7.281.000,00						-	25.005.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	116.519.000,00						-	274.524.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	49.293.400,00						-	91.760.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	9.539.000,00						-	35.460.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	13.800.000,00						-	22.537.811,00	
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						0,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.500.000,00	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL IV
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						1.500.000,00							4.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	1.500.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	4.500.000,00	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL IV
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						0,00							2.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.100.000,00	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL IV
	2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						0,00							1.250.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.250.000,00	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL IV
	2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						0,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	6 Laporan	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.000.000,00	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL IV
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						0,00							22.960.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	2 Laporan	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	22.960.000,00	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL IV
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						324.540.000,00					-		239.723.625,00	
		-						324.540.000,00					-		239.723.625,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	117.040.000,00						-	134.723.625,00	
	2.07.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						24.000.000,00							27.783.000,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	24.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	27.783.000,00	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL IV
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						263.026.875,00					-		425.202.549,00	
		-						263.026.875,00					-		425.202.549,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	256.246.875,00						-	319.394.923,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	3.030.000,00						-	100.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	3.750.000,00						-	5.307.626,00	
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00							750.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	750.000,00	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL IV

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						14.108.000,00							17.720.923,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	14.108.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	17.720.923,00	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL IV
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						3.030.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	3.030.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL IV
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						59.820.000,00					-		259.632.844,00	
		-						59.820.000,00					-		259.632.844,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	2.500.000,00						-	12.025.625,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	5.700.000,00						-	107.360.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	32.120.000,00						-	90.433.469,00	
	2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						600.000,00							5.260.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	1 Unit	600.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.260.000,00	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL IV
	2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						3.500.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	3 Unit	3.500.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	3.000.000,00	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL IV
	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						2.500.000,00							2.525.625,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	2.500.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.525.625,00	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL IV
116.	**2.07.06**	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**						**320.686.840,00**							**580.395.900,00**	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindunginya hak-hak dasar	-		-	3075 Orang	23.810.000,00						-	30.000.000,00	
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan						320.686.840,00					-		580.395.900,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						320.686.840,00					-		580.395.900,00	
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	-		-	-	177.852.340,00						-	290.395.900,00	
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	-		-	-	142.834.500,00						-	255.000.000,00	
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan						11.400.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	-		-	40 Perusahaan	11.400.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	20.000.000,00	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL IV
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan						12.410.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	-		-	20 Perusahaan	12.410.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.000.000,00	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL IV
		BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL V						**80.700.000,00**							**148.960.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**80.700.000,00**							**148.960.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**80.700.000,00**							**148.960.000,00**	
117.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**13.077.736.125,00**							**14.890.867.829,00**	
			-	-		-	-	68.960.000,00						-	122.460.000,00	
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						196.432.400,00					-		481.536.811,00	
		-						196.432.400,00					-		481.536.811,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	5.250.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	116.519.000,00						-	274.524.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	49.293.400,00						-	91.760.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	9.539.000,00						-	35.460.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	13.800.000,00						-	22.537.811,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.000.000,00							250.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	250.000,00	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL V
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						6.560.000,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	6.560.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.500.000,00	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL V
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.500.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.500.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.000.000,00	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL V
	2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						0,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.500.000,00	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL V
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						7.200.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	2 Laporan	7.200.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL V
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						324.540.000,00					-		239.723.625,00	
		-						324.540.000,00					-		239.723.625,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	117.040.000,00						-	134.723.625,00	
	2.07.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						40.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	40.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	50.000.000,00	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL V
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						263.026.875,00					-		425.202.549,00	
		-						263.026.875,00					-		425.202.549,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	256.246.875,00						-	319.394.923,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	3.030.000,00						-	100.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						8.400.000,00							12.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	8.400.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	12.500.000,00	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL V
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							50.200.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	50.200.000,00	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL V
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						59.820.000,00					-		259.632.844,00	
		-						59.820.000,00					-		259.632.844,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	5.700.000,00						-	107.360.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	32.120.000,00						-	90.433.469,00	
	2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						600.000,00							5.260.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	1 Unit	600.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.260.000,00	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL V
	2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						1.700.000,00							1.750.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	3 Unit	1.700.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.750.000,00	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL V
118.	**2.07.06**	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**						**320.686.840,00**							**580.395.900,00**	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindunginya hak-hak dasar	-		-	3075 Orang	11.740.000,00						-	25.000.000,00	
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan						320.686.840,00					-		580.395.900,00	
		-						320.686.840,00					-		580.395.900,00	
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	-		-	-	177.852.340,00						-	290.395.900,00	
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	-		-	-	142.834.500,00						-	255.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan						11.740.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	-		-	120 Perusahaan	11.740.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	15.000.000,00	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL V
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan						0,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	-		-	100 Perusahaan	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.000.000,00	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL V
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						**5.630.359.837,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.630.359.837,00**							**0,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**5.630.359.837,00**							**0,00**	
119.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**5.357.500.237,00**							**0,00**	
			Persentase Ketercapaian kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-		-	100 %	287.260.607,00						-	0,00	
			Persentase Ketercapaian kinerja administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	-		-	100 %	1.022.000,00						-	0,00	
			Persentase Ketercapaian kinerja administrasi kepegawaaian milik daerah pada perangkat daerah	-		-	100 %	297.896.000,00						-	0,00	
			Persentase Ketercapaian kinerja administrasi kepegawaian milik daerah pada perangkat daerah	-		-	100 %	14.522.000,00						-	0,00	
			Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	-		-	100 %	4.338.470.270,00						-	0,00	
			Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	-		-	100 %	1.022.000,00						-	0,00	
			Persentase pemeliharaan aset Dinas	-		-	100 %	40.000.000,00						-	0,00	
			Persentase Tersedianya jasa Kantor	-		-	100 %	124.241.360,00						-	0,00	
	2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.044.000,00					-		0,00	
		-						2.044.000,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	1.022.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	1.022.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	0,00						-	0,00	
	2.08.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.022.000,00							0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	7 Dokumen	1.022.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.022.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	10 Dokumen	1.022.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	1 Laporan	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00							0,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	2 Laporan	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-		-	3 Data	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						0,00							0,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	11 Berita Acara	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						0,00							0,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-		-	2 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.01.0012	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan						0,00							0,00	
		Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	-		-	1 Berita Acara	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.338.470.270,00					-		0,00	
		-						4.338.470.270,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-		-	-	0,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	1.500.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	1.022.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	60.600.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	4.275.348.270,00						-	0,00	
	2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.275.348.270,00							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	41 Orang/ Bulan	4.275.348.270,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						1.500.000,00							0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	5 Dokumen	1.500.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	2 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-		-	2 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1.022.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	2 Laporan	1.022.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						0,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-		-	2 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						60.600.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	11 Laporan	60.600.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						0,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	2 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						1.022.000,00					-		0,00	
		-						1.022.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	-	1.022.000,00						-	0,00	
	2.08.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						1.022.000,00							0,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	2 Dokumen	1.022.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	3 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						16.566.000,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						16.566.000,00					-		0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	1.022.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	1.022.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	3.500.000,00						-	0,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	1.022.000,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-		-	-	10.000.000,00						-	0,00	
	2.08.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana DisiplinPegawai						10.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-		-	12 Unit	10.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						3.500.000,00							0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	45 Paket	3.500.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						1.022.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	45 Orang	1.022.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						1.022.000,00							0,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	3 Orang	1.022.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan						1.022.000,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	0 Orang	1.022.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						297.896.000,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						297.896.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	-	5.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	5.900.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	245.412.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	30.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	3.500.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	2.084.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	6.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
	2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.084.000,00							0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	3 Paket	2.084.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						6.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	2 Paket	6.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						30.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	30.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.500.000,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	8 Paket	3.500.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						0,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	3 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						0,00							0,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	5 Paket	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						5.900.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	12 Laporan	5.900.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						245.412.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	3 Laporan	245.412.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						5.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	5 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-		-	2 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						462.260.607,00					-		0,00	
		-						462.260.607,00					-		0,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	7.500.000,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-		-	-	39.375.000,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	59.785.607,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	-	175.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	-	175.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	5.600.000,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
	2.08.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						175.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	1 Unit	175.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						175.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	1 Unit	175.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.01.1.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor						0,00							0,00	
		Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	-		-	1 Unit	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						7.500.000,00							0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	2 Paket	7.500.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.600.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	3 Unit	5.600.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						39.375.000,00							0,00	
		Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-		-	0 Unit	39.375.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud						0,00							0,00	
		Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	-		-	2 Unit	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						59.785.607,00							0,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	59.785.607,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						124.241.360,00					-		0,00	
		-						124.241.360,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	99.540.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	11.701.360,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	10.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	3.000.000,00						-	0,00	
	2.08.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	3.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						99.540.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	99.540.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						11.701.360,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	11.701.360,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						115.000.000,00					-		0,00	
		-						115.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	25.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	25.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	-	25.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	15.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	25.000.000,00						-	0,00	
	2.08.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						25.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	2 Unit	25.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						25.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	4 Unit	25.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	12 Unit	15.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						25.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	25.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						25.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	25.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
120.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**						**68.496.600,00**							**0,00**	
			IPG	-		-	94,06 Indeks	43.950.800,00						-	0,00	
			Persentase Anggaran yang Responsif Gender (ARG)	-		-	7,42 %	68.496.600,00						-	0,00	
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	-		-	59,31 %	45.016.600,00						-	0,00	
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	-		-	59,31 %	23.480.000,00						-	0,00	
	2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi						23.480.000,00					Lembaga		0,00	
		-						23.480.000,00					Lembaga		0,00	
			Jumlah kebijakan terkait penyelenggaraan PUG di tingkat Provinsi	-		-	-	5.750.000,00						-	0,00	
			Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	-		-	-	5.450.000,00						-	0,00	
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	-		-	-	6.175.000,00						-	0,00	
			Jumlah SDM Perangkat Daerah Provinsi dan kab/kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	-	6.105.000,00						-	0,00	
	2.08.02.1.01.0013	Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi						6.175.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	-		-	2 Lembaga	6.175.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.01.0014	Bimbingan Teknis dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG bagi Perangkat Daerah Tingkat Provinsi dan Perangkat Daerah Penggerak PUG Tingkat Kab/Kota						6.105.000,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG bagi Perangkat Daerah Tingkat Provinsi dan Perangkat Daerah Penggerak PUG Tingkat Kab/Kota	Jumlah SDM Perangkat Daerah Provinsi dan kab/kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	25 Orang	6.105.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.01.0015	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi						5.450.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	-		-	0 Laporan	5.450.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.01.0016	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi						5.750.000,00							0,00	
		Tersusunnya kebijakan terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan terkait penyelenggaraan PUG di tingkat Provinsi	-		-	2 Kebijakan	5.750.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi						20.470.800,00					Lembaga		0,00	
		-						20.470.800,00					Lembaga		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	-		-	-	5.170.800,00						-	0,00	
			Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	-	8.260.000,00						-	0,00	
			Jumlah SDM organisasi kemasyarakatan, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	-	7.040.000,00						-	0,00	
	2.08.02.1.02.0010	Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Provinsi						8.260.000,00							0,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	2 Lembaga	8.260.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.02.0011	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi						7.040.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pendampingan SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM organisasi kemasyarakatan, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	25 Orang	7.040.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.02.0012	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Provinsi						5.170.800,00							0,00	
		Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	-		-	3 Laporan	5.170.800,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi						24.545.800,00					Lembaga		0,00	
		-						24.545.800,00					Lembaga		0,00	
			Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	-		-	-	8.845.800,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	-		-	-	4.500.000,00						-	0,00	
			Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	-		-	-	5.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	-	6.200.000,00						-	0,00	
	2.08.02.1.03.0011	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi						5.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	-		-	14 Lembaga	5.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.03.0012	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi						6.200.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pendampingan SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	25 Orang	6.200.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.03.0013	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi						4.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	-		-	3 Laporan	4.500.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.03.0014	Kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi						8.845.800,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	-		-	1 Dokumen	8.845.800,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
121.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**						**32.949.000,00**							**0,00**	
			Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komperhensif	-		-	100 %	22.233.000,00						-	0,00	
			Ratio KDRT	-		-	2,22 %	8.000.000,00						-	0,00	
	2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						24.949.000,00					-		0,00	
		-						24.949.000,00					-		0,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan gelar kasus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	3.588.000,00						-	0,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan medikolegal Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	3.588.000,00						-	0,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	3.541.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	3.540.000,00						-	0,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	3.588.000,00						-	0,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan spesifik Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	3.564.000,00						-	0,00	
			Jumlah Perempuan Korban yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	3.540.000,00						-	0,00	
	2.08.03.1.02.0012	Layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						3.588.000,00							0,00	
		Tersedianya layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan gelar kasus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	30 Orang	3.588.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.1.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						3.541.000,00							0,00	
		Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	20 Orang	3.541.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.1.02.0014	Layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						3.588.000,00							0,00	
		Tersedianya layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan medikolegal Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	30 Orang	3.588.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.03.1.02.0015	Layanan spesifik bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						3.564.000,00							0,00	
		Tersedianya Layanan spesifik bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan spesifik Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	30 Orang	3.564.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.1.02.0016	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						3.540.000,00							0,00	
		Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	30 Orang	3.540.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.1.02.0017	Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						3.540.000,00							0,00	
		Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	30 Orang	3.540.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.1.02.0018	Layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						3.588.000,00							0,00	
		Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	30 Orang	3.588.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi						8.000.000,00						-		0,00	
		-						8.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	-		-	-	3.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	-	5.000.000,00							-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.03.1.03.0010	Kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						3.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	-		-	1 Dokumen	3.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.1.03.0011	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi						5.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	14 Lembaga	5.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
122.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**						**23.215.000,00**							**0,00**	
			Indeks Pembangungan Kualitas Keluarga (IPKK)	-		-	66,67 %	23.215.000,00						-	0,00	
			Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang berperspektif gender dan hak Anak sesuai standar	-		-	0,75 Nilai	23.215.000,00						-	0,00	
	2.08.04.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi						23.215.000,00					-		0,00	
		-						23.215.000,00					-		0,00	
			Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	-		-	-	5.640.000,00						-	0,00	
			Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	-		-	-	5.900.000,00						-	0,00	
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan	-		-	-	6.675.000,00						-	0,00	
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	-		-	-	5.000.000,00						-	0,00	
	2.08.04.1.02.0004	monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi						5.900.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	-		-	1 Dokumen	5.900.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.1.02.0005	penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi						5.640.000,00							0,00	
		Terlaksananya penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	-		-	2 Lembaga	5.640.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.1.02.0007	peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi						5.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	-		-	2 Lembaga	5.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.1.02.0008	pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi						6.675.000,00							0,00	
		Terlaksananya pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan	-		-	2 Lembaga	6.675.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
123.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**						**34.989.200,00**							**0,00**	
			Tingkat pemanfaatan data gender dan anak	-		-	24,08 Nilai	29.989.200,00						-	0,00	
	2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi						34.989.200,00					-		0,00	
		-						34.989.200,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak tingkat provinsi yang Tersedia	-		-	-	24.989.200,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan Aplikasi Simfoni PPA, mencakup beberapa hal, seperti: pelaksanan Bimtek di tingkat daerah, komposisi penyelenggara, pengelolaan data, Kebijakan & SOP pendukung, mekanisme validasi, pemanfaatan data, rencana tindak lanjut, dan lain sebagainya	-		-	-	5.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak	-		-	-	5.000.000,00						-	0,00	
	2.08.05.1.01.0004	Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak						5.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak	-		-	2 Lembaga	5.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.1.01.0006	Penguatan Penyelenggaraan Aplikasi Simfoni PPA untuk Penyediaan Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Berkualitas						5.000.000,00							0,00	
		Terwujudnya data kekerasan terhadap perempuan dan anak yang valid, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui optimalisasi penyelenggaraan Aplikasi Simfoni PPA di daerah	Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan Aplikasi Simfoni PPA, mencakup beberapa hal, seperti: pelaksanan Bimtek di tingkat daerah, komposisi penyelenggara, pengelolaan data, Kebijakan & SOP pendukung, mekanisme validasi, pemanfaatan data, rencana tindak lanjut, dan lain sebagainya	-		-	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.1.01.0007	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak tingkat provinsi						24.989.200,00							0,00	
		Tersedianya Data Gender dan Anak tingkat provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak tingkat provinsi yang Tersedia	-		-	1 Dokumen	24.989.200,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
124.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**						**58.917.800,00**							**0,00**	
			Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	-		-	66,17 Nilai	23.917.800,00						-	0,00	
			Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan peringkat dalam KLA (Kota Layak Anak)	-		-	19,21 %	23.917.800,00						-	0,00	
	2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi						30.917.800,00					-		0,00	
		-						30.917.800,00					-		0,00	
			Jumlah kebijakan terkait penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak di tingkat provinsi	-		-	-	5.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan provinsi	-		-	-	10.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	-		-	-	10.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah SDM Perangkat Daerah Provinsi serta lembaga non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	-	5.917.800,00						-	0,00	
	2.08.06.1.01.0009	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Provinsi						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	-		-	2 Lembaga	10.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.1.01.0010	Bimbingan Teknis dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi						5.917.800,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM Perangkat Daerah Provinsi serta lembaga non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	30 Orang	5.917.800,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.1.01.0011	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi						5.000.000,00							0,00	
		Tersusunnya kebijakan terkait penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan terkait penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak di tingkat provinsi	-		-	2 Kebijakan	5.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.1.01.0012	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan provinsi						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan provinsi	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan provinsi	-		-	3 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi						28.000.000,00					-		0,00	
		-						28.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	-		-	-	3.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	-		-	-	5.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Lembaga tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	-		-	-	10.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan.	-		-	-	10.000.000,00						-	0,00	
	2.08.06.1.02.0013	Kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi						3.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	-		-	2 Dokumen	3.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.1.02.0014	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penguatan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi						5.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	-		-	3 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.1.02.0015	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	-		-	2 Lembaga	10.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.1.02.0016	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan.	-		-	30 Orang	10.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
125.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**						**54.292.000,00**							**0,00**	
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)	-		-	70,59 Indeks	33.726.000,00						-	0,00	
			Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	-		-	91,49 Indeks	33.726.000,00						-	0,00	
			Persentase Anak korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komperhensif	-		-	100 %	1.991.000,00						-	0,00	
			Persentase Anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komperhensif	-		-	100 %	32.757.000,00						-	0,00	
			Ratio Kekerasan terhadap Anak	-		-	7,03 %	33.726.000,00						-	0,00	
	2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						26.979.000,00					-		0,00	
		-						26.979.000,00					-		0,00	
			Jumlah kebijakan pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Provinsi	-		-	-	1.022.000,00						-	0,00	
			Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) tingkat Provinsi	-		-	-	4.935.000,00						-	0,00	
			Jumlah Kerjasama yang melibatkan para pihak baik pemerintah maupun lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) di tingkat Provinsi atau lintas Kabupaten/Kota	-		-	-	10.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Provinsi	-		-	-	10.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah SDM yang mendapat Bimbingan Teknis pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Provinsi	-		-	-	1.022.000,00						-	0,00	
	2.08.07.1.01.0011	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi						4.935.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Provinsi	Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) tingkat Provinsi	-		-	2 Kegiatan	4.935.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.1.01.0012	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Provinsi						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Provinsi	-		-	3 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.1.01.0013	Kerjasama pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Provinsi						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya kerjasama para pihak termasuk pemerintah dan lembaga non pemerintah termasuk lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) di tingkat Provinsi atau lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama yang melibatkan para pihak baik pemerintah maupun lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) di tingkat Provinsi atau lintas Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.1.01.0014	Penyusunan kebijakan pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Provinsi						1.022.000,00							0,00	
		Tersusunnya kebijakan pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Provinsi	-		-	2 Kebijakan	1.022.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.1.01.0015	Bimbingan Teknis dan pendampingan SDM yang terkait langsung pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Provinsi						1.022.000,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan pendampingan SDM yang terkait langsung pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA)	Jumlah SDM yang mendapat Bimbingan Teknis pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Provinsi	-		-	30 Orang	1.022.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi						24.300.000,00					-		0,00	
		-						24.300.000,00					-		0,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	1.500.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	1.500.000,00						-	0,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan medikolegal Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	1.500.000,00						-	0,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	1.500.000,00						-	0,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	15.300.000,00						-	0,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan spesifik Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	1.500.000,00						-	0,00	
			Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	1.500.000,00						-	0,00	
	2.08.07.1.02.0016	Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						1.500.000,00							0,00	
		Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	30 Orang	1.500.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.1.02.0017	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						1.500.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	35 Orang	1.500.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.1.02.0018	Layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						1.500.000,00							0,00	
		Tersedianya layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan medikolegal Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	30 Orang	1.500.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.1.02.0019	Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						1.500.000,00							0,00	
		Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	30 Orang	1.500.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.1.02.0020	Layanan spesifik bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						1.500.000,00							0,00	
		Tersedianya Layanan spesifik bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan spesifik Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	30 Orang	1.500.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.1.02.0021	Layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						1.500.000,00							0,00	
		Tersedianya layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	30 Orang	1.500.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.1.02.0022	Layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						15.300.000,00							0,00	
		Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	30 Orang	15.300.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						3.013.000,00					-		0,00	
		-						3.013.000,00					-		0,00	
			Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-		-	-	1.022.000,00						-	0,00	
			Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-		-	-	969.000,00						-	0,00	
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat provinsi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	-	1.022.000,00						-	0,00	
	2.08.07.1.03.0014	Kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						1.022.000,00							0,00	
		Terlaksananya kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-		-	1 Dokumen	1.022.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.1.03.0015	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi						1.022.000,00							0,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat provinsi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	14 Lembaga	1.022.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.1.03.0016	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan provinsi						969.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan provinsi	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-		-	3 Laporan	969.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		DINAS KETAHANAN PANGAN						**8.627.666.233,00**							**9.458.200.813,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**8.627.666.233,00**							**9.423.200.813,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**8.627.666.233,00**							**9.423.200.813,00**	
126.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**7.667.666.233,00**							**8.188.700.813,00**	
			Nilai SAKIP	-		-	65 Nilai	7.282.666.233,00						-	7.694.200.813,00	
			Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	-		-	100 %	7.282.666.233,00						-	7.694.200.813,00	
			-	-		-	-	0,00						-	5.000.000,00	
	2.09.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						220.000.000,00					-		500.920.813,00	
		-						220.000.000,00					-		500.920.813,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	70.000.000,00						-	205.920.813,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	10.000.000,00						-	7.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-		-	-	0,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	55.000.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	10.000.000,00						-	7.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	15.000.000,00						-	30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	60.000.000,00						-	221.000.000,00	
	2.09.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						55.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	1 Dokumen	55.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						10.000.000,00							7.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	2 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	7.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						10.000.000,00							7.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	2 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	7.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						15.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	3 Laporan	15.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						60.000.000,00							221.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	2 Laporan	60.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	221.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						70.000.000,00							205.920.813,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	1 Berita Acara	70.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	205.920.813,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						0,00							5.000.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.639.117.033,00					-		6.483.280.000,00	
		-						6.639.117.033,00					-		6.483.280.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	67.800.000,00						-	53.280.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	50.000.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	0,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	6.521.317.033,00						-	6.400.000.000,00	
	2.09.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						6.521.317.033,00							6.400.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	69 Orang/ Bulan	6.521.317.033,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	6.400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						67.800.000,00							53.280.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	67.800.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	53.280.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						50.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	2 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						0,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	1 Laporan	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						0,00					-		5.000.000,00	
		-						0,00					-		5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	0,00						-	5.000.000,00	
	2.09.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan PengendalianBarang Milik Daerah pada SKPD						0,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	1 Laporan	0,00	Provinsi Maluku	-	-	-		-	5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						57.610.000,00					-		143.000.000,00	
		-						57.610.000,00					-		143.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	-		-	-	50.000.000,00						-	54.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	-	0,00						-	12.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	7.610.000,00						-	7.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	0,00						-	70.000.000,00	
	2.09.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						50.000.000,00							52.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	-		-	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	52.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai						0,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	12.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	2 Orang	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						7.610.000,00							7.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	57 Orang	7.610.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	7.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						304.710.800,00					-		442.500.000,00	
		-						304.710.800,00					-		442.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-		-	-	0,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	12.960.000,00						-	20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	106.600.000,00						-	285.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	58.369.800,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	63.281.000,00						-	27.500.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	63.500.000,00						-	35.000.000,00	
	2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						50.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	2 Paket	50.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						50.000.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	2 Paket	50.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	35.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						60.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	2 Paket	60.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						12.960.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	12.960.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						100.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						0,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						57.700.000,00					-		178.000.000,00	
		-						57.700.000,00					-		178.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	37.000.000,00						-	60.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	20.700.000,00						-	43.000.000,00	
	2.09.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	1 Unit	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	1 Paket	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	4 Unit	20.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	35.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						20.700.000,00							18.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	2 Unit	20.700.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	18.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						191.978.400,00					-		226.000.000,00	
		-						191.978.400,00					-		226.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	117.098.400,00						-	116.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	74.880.000,00						-	110.000.000,00	
	2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						100.849.200,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	100.849.200,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						74.880.000,00							110.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	4 Laporan	74.880.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	110.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						196.550.000,00					-		210.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						196.550.000,00					-		210.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	100.000.000,00						-	55.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	-	80.800.000,00						-	95.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	10.750.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	5.000.000,00						-	45.000.000,00	
	2.09.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						80.800.000,00							95.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	4 Unit	80.800.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	95.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.750.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	6 Unit	10.750.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						100.000.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	100.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	35.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						5.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	12 Unit	5.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
127.	**2.09.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**						**98.860.000,00**							**80.000.000,00**	
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	-		-	50 Ton	98.860.000,00						-	80.000.000,00	
	2.09.02.1.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi						98.860.000,00					-		80.000.000,00	
		-						98.860.000,00					-		80.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	-		-	-	98.860.000,00						-	80.000.000,00	
	2.09.02.1.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya						98.860.000,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	-		-	6 Unit	98.860.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	80.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
128.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**						**679.112.000,00**							**1.080.000.000,00**	
			Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	-		-	50 Ton	86.647.000,00						-	310.000.000,00	
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	-		-	79 Nilai	592.465.000,00						-	660.000.000,00	
	2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						188.525.000,00					-		360.000.000,00	
		-						188.525.000,00					-		360.000.000,00	
			Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi	-		-	-	7.900.000,00						-	25.000.000,00	
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	-		-	-	25.000.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	-		-	-	46.060.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins	-		-	-	109.565.000,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	-		-	-	0,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis	-		-	-	0,00						-	20.000.000,00	
	2.09.03.1.01.0006	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						46.060.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	-		-	1 Dokumen	46.060.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.01.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis						0,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan pokok strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis	-		-	12 Laporan	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.01.0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi						109.565.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins	-		-	3 Laporan	109.565.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.01.0011	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi						0,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Berkembangnya Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	-		-	1 Unit	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.01.0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	-		-	1 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.01.0015	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi						7.900.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya data proyeksi neraca pangan Wilayah Provinsi	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi	-		-	1 Dokumen	7.900.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi						86.647.000,00					-		310.000.000,00	
		-						86.647.000,00					-		310.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	-		-	-	86.647.000,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	-		-	-	0,00						-	60.000.000,00	
	2.09.03.1.02.0006	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi						0,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	-		-	15 Ton	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.02.0007	Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi						86.647.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	-		-	6,7 Ton	86.647.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi						403.940.000,00					-		410.000.000,00	
		-						403.940.000,00					-		410.000.000,00	
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	-		-	-	17.920.000,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	-		-	-	354.820.000,00						-	350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	-		-	-	0,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	-		-	-	31.200.000,00						-	25.000.000,00	
	2.09.03.1.04.0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						31.200.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	-		-	1 Dokumen	31.200.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)						354.820.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	-		-	3 Laporan	354.820.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun						0,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	-		-	1 Laporan	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.04.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi						17.920.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	-		-	1 Laporan	17.920.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
129.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**						**97.028.000,00**							**175.000.000,00**	
			Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	-		-	18,44 %	97.028.000,00						-	95.000.000,00	
	2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi						56.884.000,00					-		60.000.000,00	
		-						56.884.000,00					-		60.000.000,00	
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	-		-	-	56.884.000,00						-	60.000.000,00	
	2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota						56.884.000,00							60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	-		-	1 Dokumen	56.884.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi						40.144.000,00					-		115.000.000,00	
		-						40.144.000,00					-		115.000.000,00	
			Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	-		-	-	0,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	-		-	-	6.924.000,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-		-	-	15.000.000,00						-	60.000.000,00	
			Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	-		-	-	18.220.000,00						-	20.000.000,00	
	2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						15.000.000,00							60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-		-	1 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.1.02.0003	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi						0,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi						6.924.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	-		-	1 Laporan	6.924.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.1.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi						18.220.000,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	-		-	1 Dokumen	18.220.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
130.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**						**260.000.000,00**							**255.000.000,00**	
			Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	-		-	90 %	150.000.000,00						-	145.000.000,00	
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota						260.000.000,00					-		255.000.000,00	
		-						260.000.000,00					-		255.000.000,00	
			Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	-		-	-	10.000.000,00						-	40.000.000,00	
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	-		-	-	59.480.000,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	-		-	-	50.520.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	-		-	-	30.000.000,00						-	60.000.000,00	
	2.09.05.1.01.0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						50.520.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Penerbitan Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	-		-	40 Dokumen	50.520.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan						59.480.000,00							20.000.000,00	
		terlaksananya penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	-		-	1 Dokumen	59.480.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.1.01.0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan						30.000.000,00							60.000.000,00	
		Tersedianya sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	-		-	1 Dokumen	30.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.1.01.0011	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan						10.000.000,00							40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	-		-	2 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	X							**0,00**							**35.000.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**0,00**							**35.000.000,00**	
131.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**0,00**							**35.000.000,00**	
			Nilai SAKIP	-		-	65 Nilai	0,00						-	35.000.000,00	
			Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	-		-	100 %	0,00						-	35.000.000,00	
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					-		5.000.000,00	
		-						0,00					-		5.000.000,00	
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-		-	-	0,00						-	5.000.000,00	
	X.XX.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana DisiplinPegawai						0,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-		-	1 Unit	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						0,00					-		30.000.000,00	
		-						0,00					-		30.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	30.000.000,00	
	X.XX.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	1 Unit	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
		BALAI PENGUJIAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN						**175.000.000,00**							**355.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**175.000.000,00**							**355.500.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**175.000.000,00**							**355.500.000,00**	
132.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**7.667.666.233,00**							**8.188.700.813,00**	
			Nilai SAKIP	-		-	65 Nilai	65.000.000,00						-	150.500.000,00	
			Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	-		-	100 %	65.000.000,00						-	150.500.000,00	
	2.09.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						57.610.000,00					-		143.000.000,00	
		-						57.610.000,00					-		143.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	-		-	-	50.000.000,00						-	54.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	0,00						-	70.000.000,00	
	2.09.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						0,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.000.000,00	BALAI PENGUJIAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	2.09.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	2 Orang	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	30.000.000,00	BALAI PENGUJIAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						304.710.800,00					-		442.500.000,00	
		-						304.710.800,00					-		442.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	106.600.000,00						-	285.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	58.369.800,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	63.281.000,00						-	27.500.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	63.500.000,00						-	35.000.000,00	
	2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						13.500.000,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	2 Paket	13.500.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	15.000.000,00	BALAI PENGUJIAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						8.369.800,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	2 Paket	8.369.800,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	15.000.000,00	BALAI PENGUJIAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.281.000,00							7.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	3.281.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	7.500.000,00	BALAI PENGUJIAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	2.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						6.600.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	2 Laporan	6.600.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	35.000.000,00	BALAI PENGUJIAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						57.700.000,00					-		178.000.000,00	
		-						57.700.000,00					-		178.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	55.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	37.000.000,00						-	60.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	20.700.000,00						-	43.000.000,00	
	2.09.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	1 Unit	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	30.000.000,00	BALAI PENGUJIAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	2.09.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						17.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	2 Unit	17.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	25.000.000,00	BALAI PENGUJIAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	2.09.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	2 Unit	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	25.000.000,00	BALAI PENGUJIAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						191.978.400,00					-		226.000.000,00	
		-						191.978.400,00					-		226.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	117.098.400,00						-	116.000.000,00	
	2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						16.249.200,00							16.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	16.249.200,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	16.000.000,00	BALAI PENGUJIAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						196.550.000,00					-		210.000.000,00	
		-						196.550.000,00					-		210.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	100.000.000,00						-	55.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	5.000.000,00						-	45.000.000,00	
	2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	20.000.000,00	BALAI PENGUJIAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	2.09.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	2 Unit	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	25.000.000,00	BALAI PENGUJIAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
133.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**						**260.000.000,00**							**255.000.000,00**	
			Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	-		-	90 %	110.000.000,00						-	110.000.000,00	
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota						260.000.000,00					-		255.000.000,00	
		-						260.000.000,00					-		255.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	-		-	-	5.500.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	-		-	-	104.500.000,00						-	85.000.000,00	
	2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan						104.500.000,00							85.000.000,00	
		Tersertifikasinya keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	-		-	30 Sertifikat	104.500.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	85.000.000,00	BALAI PENGUJIAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	2.09.05.1.01.0007	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan						5.500.000,00							25.000.000,00	
		Penerbitan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	-		-	1 Dokumen	5.500.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	25.000.000,00	BALAI PENGUJIAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP						**6.009.324.335,00**							**6.309.790.551,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.009.324.335,00**							**6.309.790.551,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**6.009.324.335,00**							**6.309.790.551,00**	
134.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**5.809.324.735,00**							**6.099.790.971,00**	
			Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	-		-	100 %	5.809.324.735,00						-	6.099.790.971,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.280.336.447,00					PNS dan PPPK Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku		5.544.353.269,00	
		-						5.280.336.447,00					PNS dan PPPK Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku		5.544.353.269,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	5.280.336.447,00						-	5.544.353.269,00	
	2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.280.336.447,00							5.544.353.269,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	52 Orang/ Bulan	5.280.336.447,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Waihaong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	5.544.353.269,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						310.627.100,00					PNS dan PPPK Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku		326.158.455,00	
		-						310.627.100,00					PNS dan PPPK Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku		326.158.455,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	12.480.000,00						-	13.104.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	266.150.000,00						-	279.457.500,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	10.952.100,00						-	11.499.705,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	11.067.000,00						-	11.620.350,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	3.058.000,00						-	3.210.900,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	6.920.000,00						-	7.266.000,00	
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.058.000,00							3.210.900,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	3.058.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Waihaong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	3.210.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						6.920.000,00							7.266.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	6.920.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Waihaong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	7.266.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						10.952.100,00							11.499.705,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	3 Paket	10.952.100,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Waihaong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	11.499.705,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						11.067.000,00							11.620.350,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	11.067.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	11.620.350,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						12.480.000,00							13.104.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	10 Laporan	12.480.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	13.104.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						266.150.000,00							279.457.500,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	64 Laporan	266.150.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	279.457.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						116.400.000,00					PNS dan PPPK Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku		122.220.000,00	
		-						116.400.000,00					PNS dan PPPK Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku		122.220.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	116.400.000,00						-	122.220.000,00	
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						116.400.000,00							122.220.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	116.400.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Waihaong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	122.220.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						101.961.188,00					PNS dan PPPK Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku		107.059.247,00	
		-						101.961.188,00					PNS dan PPPK Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku		107.059.247,00	
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	-		-	-	4.141.188,00						-	4.348.247,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	-	91.320.000,00						-	95.886.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	6.500.000,00						-	6.825.000,00	
	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						91.320.000,00							95.886.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	4 Unit	91.320.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	95.886.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						6.500.000,00							6.825.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	10 Unit	6.500.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Waihaong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	6.825.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						4.141.188,00							4.348.247,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	-		-	1 Unit	4.141.188,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Waihaong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	4.348.247,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
135.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**						**99.999.600,00**							**104.999.580,00**	
			Indeks Kualitas Air	-		-	73,03 Poin	99.999.600,00						-	104.999.580,00	
			Indeks Kualitas Air Laut	-		-	82,04 Poin	99.999.600,00						-	104.999.580,00	
			Indeks Kualitas Udara	-		-	88,43 Poin	99.999.600,00						-	104.999.580,00	
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup						99.999.600,00					Masyarakat dan stakeholder lingkup Provinsi Maluku		104.999.580,00	
		-						99.999.600,00					Masyarakat dan stakeholder lingkup Provinsi Maluku		104.999.580,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	-		-	-	49.999.600,00						-	52.499.580,00	
			Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	-		-	-	50.000.000,00						-	52.500.000,00	
	2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim						49.999.600,00							52.499.580,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	-		-	2 Dokumen	49.999.600,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	52.499.580,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0004	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan						50.000.000,00							52.500.000,00	
		Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	-		-	3 Paket	50.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	52.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
136.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**						**50.000.000,00**							**52.500.000,00**	
			Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	-		-	33,33 %	50.000.000,00						-	52.500.000,00	
	2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi						50.000.000,00					Masyarakat dan stakeholder lingkup Provinsi Maluku		52.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						50.000.000,00					Masyarakat dan stakeholder lingkup Provinsi Maluku		52.500.000,00	
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	-		-	-	50.000.000,00						-	52.500.000,00	
	2.11.06.1.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						50.000.000,00							52.500.000,00	
		Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	-		-	5 Usaha/Kegiatan	50.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	52.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
137.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**						**50.000.000,00**							**52.500.000,00**	
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	-		-	30 Kg/Orang	50.000.000,00						-	52.500.000,00	
	2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi						50.000.000,00					Masyarakat dan stakeholder lingkup Provinsi Maluku		52.500.000,00	
		-						50.000.000,00					Masyarakat dan stakeholder lingkup Provinsi Maluku		52.500.000,00	
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	-		-	-	50.000.000,00						-	52.500.000,00	
	2.11.08.1.01.0003	Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi						50.000.000,00							52.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya jumlah penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	-		-	60 Orang	50.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	52.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						**5.043.890.269,00**							**5.647.318.595,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.043.890.269,00**							**5.647.318.595,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**4.943.890.269,00**							**5.504.318.595,00**	
138.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**4.488.843.269,00**							**4.970.543.595,00**	
			Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	-		-	100 %	4.485.593.269,00						-	4.966.968.595,00	
	2.12.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						51.455.000,00					Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah		76.431.300,00	
		-						51.455.000,00					Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah		76.431.300,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	42.406.000,00						-	66.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	1.948.000,00						-	2.142.800,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	967.000,00						-	1.276.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	1.625.000,00						-	1.787.500,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	1.625.000,00						-	1.787.500,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	1.625.000,00						-	1.787.500,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	1.259.000,00						-	1.650.000,00	
	2.12.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						967.000,00							1.276.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	967.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Desa Batu Merah || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.276.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						1.625.000,00							1.787.500,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.625.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Desa Batu Merah || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.787.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						1.625.000,00							1.787.500,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.625.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Desa Batu Merah || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.787.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.948.000,00							2.142.800,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.948.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Desa Batu Merah || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.142.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						1.625.000,00							1.787.500,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.625.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Desa Batu Merah || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.787.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.12.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1.259.000,00							1.650.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	3 Laporan	1.259.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Desa Batu Merah || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.650.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						42.406.000,00							66.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	1 Berita Acara	42.406.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	66.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.929.801.269,00					Aparatur Sipil Negara		4.324.130.295,00	
		-						3.929.801.269,00					Aparatur Sipil Negara		4.324.130.295,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	53.280.000,00						-	58.608.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	1.500.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	3.875.021.269,00						-	4.262.522.295,00	
	2.12.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.875.021.269,00							4.262.522.295,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	41 Orang/ Bulan	3.875.021.269,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Desa Batu Merah || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	4.262.522.295,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						53.280.000,00							58.608.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	12 Dokumen	53.280.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Desa Batu Merah || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	58.608.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1.500.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	1.500.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	3.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						2.503.000,00					Barang Milik Daerah Dinas Dukcapil Provinsi Maluku		7.000.000,00	
		-						2.503.000,00					Barang Milik Daerah Dinas Dukcapil Provinsi Maluku		7.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	2.503.000,00						-	7.000.000,00	
	2.12.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						2.503.000,00							7.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	1 Laporan	2.503.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Desa Batu Merah || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	7.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						23.532.000,00					ASN Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten / Kota		27.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						23.532.000,00					ASN Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten / Kota		27.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	23.532.000,00						-	27.500.000,00	
	2.12.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						23.532.000,00							27.500.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	35 Orang	23.532.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Desa Batu Merah || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	27.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						208.173.000,00					Dinas Dukcapil Provinsi Maluku		234.300.000,00	
		-						208.173.000,00					Dinas Dukcapil Provinsi Maluku		234.300.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	175.173.000,00						-	198.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	21.000.000,00						-	23.100.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	12.000.000,00						-	13.200.000,00	
	2.12.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						21.000.000,00							23.100.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	21.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Desa Batu Merah || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	23.100.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						12.000.000,00							13.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	2 Paket	12.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Desa Batu Merah || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	13.200.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						175.173.000,00							198.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	13 Laporan	175.173.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	198.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						74.999.000,00					Dinas Dukcapil Provinsi Maluku		82.500.000,00	
		-						74.999.000,00					Dinas Dukcapil Provinsi Maluku		82.500.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	74.999.000,00						-	82.500.000,00	
	2.12.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						74.999.000,00							82.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	6 Unit	74.999.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	82.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						112.760.000,00					Dinas Dukcapil Provinsi Maluku		124.500.000,00	
		-						112.760.000,00					Dinas Dukcapil Provinsi Maluku		124.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	110.000.000,00						-	121.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	2.760.000,00						-	3.500.000,00	
	2.12.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						110.000.000,00							121.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	4 Laporan	110.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Desa Batu Merah || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	121.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.760.000,00							3.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	4 Laporan	2.760.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Desa Batu Merah || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	3.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						85.620.000,00					Barang Milik Daerah Dinas Dukcapil Provinsi Maluku		94.182.000,00	
		-						85.620.000,00					Barang Milik Daerah Dinas Dukcapil Provinsi Maluku		94.182.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	32.000.000,00						-	35.200.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	-	39.000.000,00						-	42.900.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	14.620.000,00						-	16.082.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.12.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						39.000.000,00							42.900.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	1 Unit	39.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Desa Batu Merah || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	42.900.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						32.000.000,00							35.200.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	1 Unit	32.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Desa Batu Merah || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	35.200.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						14.620.000,00							16.082.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	18 Unit	14.620.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Desa Batu Merah || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	16.082.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
139.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**						**100.000.000,00**							**110.000.000,00**	
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	-		-	1 Laporan	25.000.000,00						-	27.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	-		-	11 Laporan	25.000.000,00						-	27.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	-		-	30 persen	25.000.000,00						-	27.500.000,00	
			Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	-		-	30 %	25.000.000,00						-	27.500.000,00	
			Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	-		-	60 %	25.000.000,00						-	27.500.000,00	
			Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	-		-	60 persen	25.000.000,00						-	27.500.000,00	
	2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan						50.000.000,00					Masyarakat		55.000.000,00	
		-						50.000.000,00					Masyarakat		55.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	-		-	-	25.000.000,00						-	27.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	-		-	-	25.000.000,00						-	27.500.000,00	
	2.12.02.1.02.0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk						25.000.000,00							27.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	-		-	3 Laporan	25.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	27.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02.0002	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk						25.000.000,00							27.500.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	-		-	1 Laporan	25.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	27.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan						50.000.000,00					Dinas Dukcapil Kabupaten / Kota		55.000.000,00	
		-						50.000.000,00					Dinas Dukcapil Kabupaten / Kota		55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	-		-	-	25.000.000,00						-	27.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	-		-	-	25.000.000,00						-	27.500.000,00	
	2.12.02.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pendaftaran Penduduk						25.000.000,00							27.500.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	-		-	4 Laporan	25.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	27.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk						25.000.000,00							27.500.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	-		-	1 Laporan	25.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	27.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
140.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**						**100.000.000,00**							**110.000.000,00**	
			Persentase Akte Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	-		-	100 %	25.000.000,00						-	27.500.000,00	
			Persentase Akte Perkawian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	-		-	100 %	25.000.000,00						-	27.500.000,00	
	2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil						25.000.000,00					Masyarakat		27.500.000,00	
		-						25.000.000,00					Masyarakat		27.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	-		-	-	25.000.000,00						-	27.500.000,00	
	2.12.03.1.01.0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota						25.000.000,00							27.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terfasilitasinya Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	-		-	4 Laporan	25.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	27.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi						25.000.000,00					Dinas Dukcapil Kabupaten / Kota dan masyarakat		27.500.000,00	
		-						25.000.000,00					Dinas Dukcapil Kabupaten / Kota dan masyarakat		27.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	-		-	-	25.000.000,00						-	27.500.000,00	
	2.12.03.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil						25.000.000,00							27.500.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	-		-	1 Laporan	25.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	27.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil						50.000.000,00					Dinas Dukcapil Kabupaten / Kota		55.000.000,00	
		-						50.000.000,00					Dinas Dukcapil Kabupaten / Kota		55.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	-		-	-	25.000.000,00						-	27.500.000,00	
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	-		-	-	25.000.000,00						-	27.500.000,00	
	2.12.03.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil						25.000.000,00							27.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	-		-	4 Laporan	25.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	27.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil						25.000.000,00							27.500.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	-		-	1 Laporan	25.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	27.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
141.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**						**158.047.000,00**							**207.075.000,00**	
			Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	-		-	100 persentase	158.047.000,00						-	207.075.000,00	
	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi						158.047.000,00					Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat		207.075.000,00	
		-						158.047.000,00					Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat		207.075.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	-		-	-	100.000.000,00						-	110.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	-		-	-	8.250.000,00						-	9.075.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	-		-	-	49.797.000,00						-	88.000.000,00	
	2.12.04.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						8.250.000,00							9.075.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	-		-	11 Laporan	8.250.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	9.075.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						49.797.000,00							88.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	-		-	2 Laporan	49.797.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	88.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan						100.000.000,00							110.000.000,00	
		Terselenggarakannya Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	-		-	5 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	110.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
142.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**						**97.000.000,00**							**106.700.000,00**	
			Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	-		-	100 %	97.000.000,00						-	106.700.000,00	
	2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan						97.000.000,00					Organisasi Perangkat Daerah dan instansi terkait		106.700.000,00	
		-						97.000.000,00					Organisasi Perangkat Daerah dan instansi terkait		106.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia	-		-	-	42.000.000,00						-	46.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun	-		-	-	55.000.000,00						-	60.500.000,00	
	2.12.05.1.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi						42.000.000,00							46.200.000,00	
		Tersedianya Data Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia	-		-	2 Dokumen	42.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Desa Batu Merah || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	46.200.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.1.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain						55.000.000,00							60.500.000,00	
		Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun	-		-	1 Dokumen	55.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Desa Batu Merah || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	60.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**100.000.000,00**							**143.000.000,00**	
143.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**						**20.000.000,00**							**55.000.000,00**	
			Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	-		-	17,4 Angka	10.000.000,00						-	27.500.000,00	
			Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	-		-	2,39 Angka	10.000.000,00						-	27.500.000,00	
	2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk						10.000.000,00					Masyarakat		27.500.000,00	
		-						10.000.000,00					Masyarakat		27.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi PJPK	-		-	-	10.000.000,00						-	27.500.000,00	
	2.14.02.1.01.0043	Advokasi dan Sosialisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK)						10.000.000,00							27.500.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi PJPK	-		-	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	27.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.14.02.1.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi						10.000.000,00					Program Bangga Kencana		27.500.000,00	
		-						10.000.000,00					Program Bangga Kencana		27.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Program Bangga Kencana	-		-	-	10.000.000,00						-	27.500.000,00	
	2.14.02.1.02.0012	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)						10.000.000,00							27.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemetaan Program Bangga Kencana	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Program Bangga Kencana	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	27.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
144.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**						**25.000.000,00**							**27.500.000,00**	
			Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat atau cara KB	-		-	61,6 %	25.000.000,00						-	27.500.000,00	
	2.14.03.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB						25.000.000,00					Organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi		27.500.000,00	
		-						25.000.000,00					Organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi		27.500.000,00	
			Jumlah Dokumen hasil Pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi dan Mitra Kerja dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB dan kesehatan reproduksi	-		-	-	25.000.000,00						-	27.500.000,00	
	2.14.03.1.02.0011	Pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi dan Mitra Kerja dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB dan kesehatan reproduksi						25.000.000,00							27.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi dan Mitra Kerja dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB dan kesehatan reproduksi	Jumlah Dokumen hasil Pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi dan Mitra Kerja dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB dan kesehatan reproduksi	-		-	0 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	27.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
145.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**						**55.000.000,00**							**60.500.000,00**	
			Indeks Lansia Berdaya	-		-	68,5 Indeks	40.000.000,00						-	44.000.000,00	
			Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja	-		-	42,5 Indeks	40.000.000,00						-	44.000.000,00	
			Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	-		-	91,5 %	40.000.000,00						-	44.000.000,00	
	2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						30.000.000,00					Lansia, Keluarga Remaja, Kampung Keluarga Berkualitas		33.000.000,00	
		-						30.000.000,00					Lansia, Keluarga Remaja, Kampung Keluarga Berkualitas		33.000.000,00	
			Jumlah kelompok PIK-R yang mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	-		-	-	15.000.000,00						-	16.500.000,00	
			Jumlah sosialisasi dan promosi Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI)	-		-	-	15.000.000,00						-	16.500.000,00	
	2.14.04.1.01.0021	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)						15.000.000,00							16.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	Jumlah kelompok PIK-R yang mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	-		-	1 Kelompok	15.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	16.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.14.04.1.01.0037	Fasilitasi Sosialisasi dan Promosi Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI)						15.000.000,00							16.500.000,00	
		Terlaksananya sosialisasi dan promosi Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI)	Jumlah sosialisasi dan promosi Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI)	-		-	1 Laporan / Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	16.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.14.04.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						25.000.000,00					Lansia, Keluarga Remaja, Kampung Keluarga Berkualitas		27.500.000,00	
		-						25.000.000,00					Lansia, Keluarga Remaja, Kampung Keluarga Berkualitas		27.500.000,00	
			Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi dan Pembinaan Lanjut Usia Berdaya	-		-	-	25.000.000,00						-	27.500.000,00	
	2.14.04.1.02.0012	Fasilitasi dan Pembinaan Lanjut Usia Berdaya						25.000.000,00							27.500.000,00	
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan lanjut usia berdaya	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi dan Pembinaan Lanjut Usia Berdaya	-		-	1 Laporan / Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	27.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						**7.865.938.575,00**							**8.161.980.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.865.938.575,00**							**8.161.980.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**7.865.938.575,00**							**8.161.980.000,00**	
146.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**5.608.338.575,00**							**5.956.100.000,00**	
			Nilai SAKIP	-		-	69,0 Poin	5.278.338.575,00						-	5.699.100.000,00	
			Nilai SAKIP	-		-	69,0 Poin	190.000.000,00						-	215.000.000,00	
			P	-		-	100 %	4.706.338.575,00						-	5.111.500.000,00	
			Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	-		-	100 %	742.000.000,00						-	594.500.000,00	
			Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	-		-	100 %	10.000.000,00						-	218.600.000,00	
	2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						40.000.000,00					-		218.600.000,00	
		-						40.000.000,00					-		218.600.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	10.000.000,00						-	165.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-		-	-	10.000.000,00						-	22.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	10.000.000,00						-	21.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	10.000.000,00						-	10.500.000,00	
	2.13.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						10.000.000,00							21.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	4 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	21.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						10.000.000,00							10.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	3 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	10.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.13.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						10.000.000,00							22.100.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-		-	1 Data	10.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	22.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						10.000.000,00							165.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	1 Berita Acara	10.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	165.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.706.338.575,00					-		5.111.500.000,00	
		-						4.706.338.575,00					-		5.111.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	65.000.000,00						-	6.500.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	4.636.338.575,00						-	5.100.000.000,00	
	2.13.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.636.338.575,00							5.100.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	61 Orang/ Bulan	4.636.338.575,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	5.100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						65.000.000,00							6.500.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	12 Dokumen	65.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	6.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						80.000.000,00					-		37.500.000,00	
		-						80.000.000,00					-		37.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	-	10.000.000,00						-	12.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	20.000.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	50.000.000,00						-	0,00	
	2.13.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						50.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	60 Paket	50.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian						10.000.000,00							12.500.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	5 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	12.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	15 Orang	20.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						172.000.000,00					-		188.000.000,00	
		-						172.000.000,00					-		188.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	5.000.000,00						-	5.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-		-	-	10.000.000,00						-	10.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	-	10.000.000,00						-	11.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	12.000.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	100.000.000,00						-	105.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	25.000.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	10.000.000,00						-	11.000.000,00	
	2.13.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						25.000.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	3 Paket	25.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.000.000,00							11.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	3 Paket	10.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	11.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						5.000.000,00							5.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	5.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						12.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	12 Laporan	12.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						100.000.000,00							105.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	5 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	105.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						10.000.000,00							11.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	11.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						10.000.000,00							10.500.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	10.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						260.000.000,00					-		15.000.000,00	
		-						260.000.000,00					-		15.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	10.000.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	-	200.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	50.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.13.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						200.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	1 Unit	200.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						10.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	3 Unit	50.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						160.000.000,00					-		170.500.000,00	
		-						160.000.000,00					-		170.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	125.000.000,00						-	130.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	30.000.000,00						-	35.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	5.000.000,00						-	5.500.000,00	
	2.13.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.000.000,00							5.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	5.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						125.000.000,00							130.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	125.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						30.000.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						190.000.000,00					-		215.000.000,00	
		-						190.000.000,00					-		215.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	130.000.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	25.000.000,00						-	27.500.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	35.000.000,00						-	37.500.000,00	
	2.13.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						130.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	10 Unit	130.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						25.000.000,00							27.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	20 Unit	25.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	27.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						35.000.000,00							37.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	35.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	37.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
147.	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**						**180.000.000,00**							**150.000.000,00**	
			Persentase Fasilitasi Penataan Desa	-		-	40 %	180.000.000,00						-	150.000.000,00	
	2.13.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat						180.000.000,00					-		150.000.000,00	
		-						180.000.000,00					-		150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	-		-	-	90.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	-		-	-	65.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan	-		-	-	25.000.000,00						-	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.13.02.1.01.0001	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi						25.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan	-		-	1 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat						65.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	-		-	1 Dokumen	65.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.1.01.0003	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa						90.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	-		-	1 Dokumen	90.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
148.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**						**129.500.000,00**							**136.000.000,00**	
			Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	-		-	40 %	129.500.000,00						-	136.000.000,00	
	2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi						129.500.000,00					-		136.000.000,00	
		-						129.500.000,00					-		136.000.000,00	
			jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	-		-	-	75.500.000,00						-	76.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	-		-	-	54.000.000,00						-	60.000.000,00	
	2.13.03.1.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota						54.000.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	54.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.1.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan						75.500.000,00							76.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	-		-	1 Dokumen	75.500.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	76.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
149.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**						**373.100.000,00**							**96.080.000,00**	
			Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	-		-	1,7 %	373.100.000,00						-	74.280.000,00	
	2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						373.100.000,00					-		96.080.000,00	
		-						373.100.000,00					-		96.080.000,00	
			jumlah Dokumen hasi Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	-		-	-	60.500.000,00						-	10.900.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	-		-	-	112.000.000,00						-	13.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	-		-	-	35.500.000,00						-	10.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	-		-	-	4.500.000,00						-	4.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	-		-	-	11.600.000,00						-	12.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-		-	-	32.600.000,00						-	10.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	-		-	-	60.900.000,00						-	11.280.000,00	
			Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	-		-	-	10.500.000,00						-	10.800.000,00	
			jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	-		-	-	45.000.000,00						-	10.500.000,00	
	2.13.04.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa						4.500.000,00							4.800.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	-		-	1 Dokumen	4.500.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	4.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa						60.500.000,00							10.900.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	jumlah Dokumen hasi Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	-		-	1 Dokumen	60.500.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	10.900.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.1.01.0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa						60.900.000,00							11.280.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	-		-	1 Dokumen	60.900.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	11.280.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.1.01.0006	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa						35.500.000,00							10.900.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	-		-	1 Dokumen	35.500.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	10.900.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.1.01.0007	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa						45.000.000,00							10.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	-		-	10 Orang	45.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	10.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan						112.000.000,00							13.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	-		-	1 Dokumen	112.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	13.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.1.01.0011	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD						10.500.000,00							10.800.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	-		-	20 Orang	10.500.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	10.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.1.01.0012	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis						11.600.000,00							12.500.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	-		-	1 Dokumen	11.600.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	12.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.1.01.0016	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa						32.600.000,00							10.900.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-		-	1 Dokumen	32.600.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	10.900.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
150.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**						**1.575.000.000,00**							**1.823.800.000,00**	
			Persentase Fasilitasi Lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum Adat Desa	-		-	40 %	1.225.000.000,00						-	1.823.800.000,00	
			Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	-		-	67 %	1.225.000.000,00						-	1.823.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota						1.575.000.000,00					-		1.823.800.000,00	
		-						1.575.000.000,00					-		1.823.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	-		-	-	200.000.000,00						-	270.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	-		-	-	250.000.000,00						-	267.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	-		-	-	100.000.000,00						-	165.300.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	-		-	-	100.000.000,00						-	165.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	-		-	-	570.000.000,00						-	580.500.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	-		-	-	250.000.000,00						-	266.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	-		-	-	105.000.000,00						-	110.000.000,00	
	2.13.05.1.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat						100.000.000,00							165.300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	-		-	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	165.300.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.1.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						100.000.000,00							165.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	-		-	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	165.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						250.000.000,00							266.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	-		-	1 Lembaga	250.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	266.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.1.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						105.000.000,00							110.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	-		-	3 Unit	105.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa						250.000.000,00							267.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	-		-	2 Dokumen	250.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	267.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna						200.000.000,00							270.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	-		-	1 Laporan	200.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	270.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga						570.000.000,00							580.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	-		-	5 Laporan	570.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	580.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		DINAS PERHUBUNGAN						**9.245.352.636,24**							**13.735.304.681,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**9.245.352.636,24**							**13.735.304.681,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**9.245.352.636,24**							**13.735.304.681,00**	
151.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**8.658.982.836,24**							**9.575.166.781,00**	
			Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	-		-	100 %	8.578.982.836,24						-	9.271.166.781,00	
	2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						35.000.000,00					Meningkatnya Tingkat Implementasi Nilai SAKIP Perangkat Daerah		173.000.000,00	
		-						35.000.000,00					Meningkatnya Tingkat Implementasi Nilai SAKIP Perangkat Daerah		173.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	0,00						-	4.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	35.000.000,00						-	165.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	0,00						-	4.000.000,00	
	2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						35.000.000,00							165.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	1 Dokumen	35.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	165.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						0,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	4.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						0,00							4.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	4.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						0,00							0,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	1 Berita Acara	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0012	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	-		-	1 Berita Acara	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7.875.239.940,24					Meningkatnya Tingkat Implementasi Nilai SAKIP Perangkat Daerah		7.837.757.697,91	
		-						7.875.239.940,24					Meningkatnya Tingkat Implementasi Nilai SAKIP Perangkat Daerah		7.837.757.697,91	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	68.000.000,00						-	70.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	35.000.000,00						-	75.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	7.772.239.940,24						-	7.692.757.697,91	
	2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						7.772.239.940,24							7.692.757.697,91	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	75 Orang/ Bulan	7.772.239.940,24	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	7.692.757.697,91	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						68.000.000,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	1 Dokumen	68.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	70.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						35.000.000,00							75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	1 Laporan	35.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						0,00					Meningkatnya Tingkat Implementasi Nilai SAKIP Perangkat Daerah		0,00	
		-						0,00					Meningkatnya Tingkat Implementasi Nilai SAKIP Perangkat Daerah		0,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	0,00						-	0,00	
	2.15.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan PengendalianBarang Milik Daerah pada SKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	1 Laporan	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						69.999.400,00					Meningkatnya Tingkat Implementasi Nilai SAKIP Perangkat Daerah		183.909.084,09	
		-						69.999.400,00					Meningkatnya Tingkat Implementasi Nilai SAKIP Perangkat Daerah		183.909.084,09	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	-		-	-	34.999.400,00						-	7.500.000,09	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	35.000.000,00						-	75.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	0,00						-	101.409.084,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	0,00						-	0,00	
	2.15.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						0,00							101.409.084,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	1 Paket	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	101.409.084,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						34.999.400,00							7.500.000,09	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	-		-	1 Dokumen	34.999.400,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	7.500.000,09	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	2 Orang	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						35.000.000,00							75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	20 Orang	35.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						309.752.500,00					Meningkatnya Tingkat Implementasi Nilai SAKIP Perangkat Daerah		725.000.000,00	
		-						309.752.500,00					Meningkatnya Tingkat Implementasi Nilai SAKIP Perangkat Daerah		725.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	10.000.000,00						-	75.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	264.752.500,00						-	500.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	25.000.000,00						-	75.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	10.000.000,00						-	75.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						0,00							0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						25.000.000,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	25.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.000.000,00							75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						10.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						264.752.500,00							500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	264.752.500,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						0,00					Meningkatnya Tingkat Implementasi Nilai SAKIP Perangkat Daerah		0,00	
		-						0,00					Meningkatnya Tingkat Implementasi Nilai SAKIP Perangkat Daerah		0,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
	2.15.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	2 Unit	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	1 Unit	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	1 Paket	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	15 Unit	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						188.999.996,00					Meningkatnya Tingkat Implementasi Nilai SAKIP Perangkat Daerah		370.499.999,00	
		-						188.999.996,00					Meningkatnya Tingkat Implementasi Nilai SAKIP Perangkat Daerah		370.499.999,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	186.999.996,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	110.450.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	50.049.999,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	2.000.000,00						-	10.000.000,00	
	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.000.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	2.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						186.999.996,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	186.999.996,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							50.049.999,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	50.049.999,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							110.450.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	110.450.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						179.991.000,00					Meningkatnya Tingkat Implementasi Nilai SAKIP Perangkat Daerah		285.000.000,00	
		-						179.991.000,00					Meningkatnya Tingkat Implementasi Nilai SAKIP Perangkat Daerah		285.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	179.991.000,00						-	285.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	0,00						-	0,00	
	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						179.991.000,00							285.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	35 Unit	179.991.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	285.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	1 Unit	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
152.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**						**366.369.800,00**							**1.295.434.500,00**	
			Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Provinsi	-		-	27,56 Persentase	276.369.800,00						-	1.070.434.500,00	
			Persentase Terselenggaranya Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Maluku	-		-	27,56 Persentase	10.000.000,00						-	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.15.02.1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi						0,00					MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN TRANSPORTASI YANG NYAMAN, AMAN DAN TERJANGKAU YANG DIDUKUNG OLEH INFRASTRUKTUR LAYAK, MANAJEMEN MODERN SERTA PARTISIPASI MASYARAKAT		0,00	
		-						0,00					MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN TRANSPORTASI YANG NYAMAN, AMAN DAN TERJANGKAU YANG DIDUKUNG OLEH INFRASTRUKTUR LAYAK, MANAJEMEN MODERN SERTA PARTISIPASI MASYARAKAT		0,00	
			Jumlah dokumen penetapan dan sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	-		-	-	0,00						-	0,00	
	2.15.02.1.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi						0,00							0,00	
		Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.01.0004	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ditetapkannya dan Tersosialisasinya Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Jumlah dokumen penetapan dan sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.01.0005	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi						0,00							0,00	
		Tersusun Rencana Aksi Keselamatan lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi						70.000.000,00					MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN TRANSPORTASI YANG NYAMAN, AMAN DAN TERJANGKAU YANG DIDUKUNG OLEH INFRASTRUKTUR LAYAK, MANAJEMEN MODERN SERTA PARTISIPASI MASYARAKAT		164.955.016,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						70.000.000,00					MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN TRANSPORTASI YANG NYAMAN, AMAN DAN TERJANGKAU YANG DIDUKUNG OLEH INFRASTRUKTUR LAYAK, MANAJEMEN MODERN SERTA PARTISIPASI MASYARAKAT		164.955.016,00	
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	-		-	-	30.000.000,00						-	134.955.016,00	
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	-		-	-	20.000.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Provinsi yang Terbangun	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	-		-	-	20.000.000,00						-	0,00	
	2.15.02.1.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi						0,00							0,00	
		Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Provinsi yang Terbangun	-		-	1 Unit	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi						30.000.000,00							134.955.016,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	-		-	1 Unit	30.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	134.955.016,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan						20.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	-		-	1 Unit	20.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan						20.000.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	-		-	1 Unit	20.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B						10.000.000,00					MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN TRANSPORTASI YANG NYAMAN, AMAN DAN TERJANGKAU YANG DIDUKUNG OLEH INFRASTRUKTUR LAYAK, MANAJEMEN MODERN SERTA PARTISIPASI MASYARAKAT		100.000.000,00	
		-						10.000.000,00					MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN TRANSPORTASI YANG NYAMAN, AMAN DAN TERJANGKAU YANG DIDUKUNG OLEH INFRASTRUKTUR LAYAK, MANAJEMEN MODERN SERTA PARTISIPASI MASYARAKAT		100.000.000,00	
			Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang terpenuhi.	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi	-		-	-	10.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	-		-	-	0,00						-	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	-		-	-	0,00						-	0,00	
	2.15.02.1.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B						10.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi	-		-	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.03.0007	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)						0,00							0,00	
		Terlaksananya Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	-		-	1 Unit	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.03.0009	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksana Pemenuhan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang terpenuhi.	-		-	2 Orang	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.03.0010	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang						0,00							0,00	
		Terbangunnya Terminal Tipe B yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang	Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	-		-	1 Unit	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)						0,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi						25.000.000,00					MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN TRANSPORTASI YANG NYAMAN, AMAN DAN TERJANGKAU YANG DIDUKUNG OLEH INFRASTRUKTUR LAYAK, MANAJEMEN MODERN SERTA PARTISIPASI MASYARAKAT		50.000.000,00	
		-						25.000.000,00					MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN TRANSPORTASI YANG NYAMAN, AMAN DAN TERJANGKAU YANG DIDUKUNG OLEH INFRASTRUKTUR LAYAK, MANAJEMEN MODERN SERTA PARTISIPASI MASYARAKAT		50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	-		-	-	0,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	-		-	-	0,00						-	25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan	-		-	-	25.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) yang Terbangun	-		-	-	0,00						-	0,00	
	2.15.02.1.05.0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	-		-	1 Laporan	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0003	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi						0,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	-		-	1 Laporan	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi						0,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	-		-	1 Laporan	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0006	Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas						0,00							0,00	
		Terselenggaranya Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	-		-	1 Unit	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0007	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas						25.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan	-		-	2 Unit	25.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0008	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)						0,00							0,00	
		Terbangunnya Rute Aman Selamat Sekolah	Jumlah Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) yang Terbangun	-		-	1 Rute	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi						0,00					MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN TRANSPORTASI YANG NYAMAN, AMAN DAN TERJANGKAU YANG DIDUKUNG OLEH INFRASTRUKTUR LAYAK, MANAJEMEN MODERN SERTA PARTISIPASI MASYARAKAT		98.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						0,00					MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN TRANSPORTASI YANG NYAMAN, AMAN DAN TERJANGKAU YANG DIDUKUNG OLEH INFRASTRUKTUR LAYAK, MANAJEMEN MODERN SERTA PARTISIPASI MASYARAKAT		98.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	-		-	-	0,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	-		-	-	0,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	-		-	-	0,00						-	48.000.000,00	
			Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan	-		-	-	0,00						-	0,00	
	2.15.02.1.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin						0,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	-		-	1 Laporan	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.06.0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin						0,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terawasinya Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	-		-	1 Laporan	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.06.0005	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin						0,00							48.000.000,00	
		Meningkatnya Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	-		-	1 Orang	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	48.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.06.0007	Penetapan Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ditetapkannya Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin	Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan						30.000.000,00					MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN TRANSPORTASI YANG NYAMAN, AMAN DAN TERJANGKAU YANG DIDUKUNG OLEH INFRASTRUKTUR LAYAK, MANAJEMEN MODERN SERTA PARTISIPASI MASYARAKAT		90.000.000,00	
		-						30.000.000,00					MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN TRANSPORTASI YANG NYAMAN, AMAN DAN TERJANGKAU YANG DIDUKUNG OLEH INFRASTRUKTUR LAYAK, MANAJEMEN MODERN SERTA PARTISIPASI MASYARAKAT		90.000.000,00	
			Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	-		-	-	0,00						-	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	-		-	-	30.000.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah laporan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah lokasi Rute Aman Sekolah (RASS) yang diidentifikasi dan diawasi	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi	-		-	-	0,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang ditingkatkan kapasitasnya	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Ruas jalan yang diidentifikasi dan dilakukan pengawasan terhadap implementasi batas kecepatan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	-		-	-	0,00						-	0,00	
	2.15.02.1.07.0001	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ						0,00							0,00	
		Meningkatnya Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	1 Orang	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.15.02.1.07.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal						0,00							0,00	
		Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	-		-	1 Laporan	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	-		-	1 Laporan	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07.0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum						30.000.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	-		-	1 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07.0006	Monitoring dan evaluasi Implementasi Batas Kecepatan						0,00							0,00	
		Terlaksananya identifikasi dan pengawasan terhadap Implementasi Batas Kecepatan	Jumlah Ruas jalan yang diidentifikasi dan dilakukan pengawasan terhadap implementasi batas kecepatan	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07.0008	Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)						0,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya identifikasi dan pengawasan terhadap zona selamat sekolah (ZOSS)	Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07.0009	Monitoring dan evaluasi Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)						0,00							0,00	
		Terlaksananya identifikasi dan pengawasan terhadap Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Jumlah lokasi Rute Aman Sekolah (RASS) yang diidentifikasi dan diawasi	-		-	1 Laporan / Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07.0010	Peningkatan Kompetensi Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kompetensi Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang ditingkatkan kapasitasnya	-		-	2 Orang	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07.0011	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)						0,00							0,00	
		Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	-		-	1 Lokasi	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07.0013	Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya dan Terbitnya Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07.0014	Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Penumpang Tipe B						0,00							0,00	
		Terlaksananya Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Jumlah laporan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	-		-	1 Laporan	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						201.369.800,00					MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN TRANSPORTASI YANG NYAMAN, AMAN DAN TERJANGKAU YANG DIDUKUNG OLEH INFRASTRUKTUR LAYAK, MANAJEMEN MODERN SERTA PARTISIPASI MASYARAKAT		767.479.484,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						201.369.800,00					MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN TRANSPORTASI YANG NYAMAN, AMAN DAN TERJANGKAU YANG DIDUKUNG OLEH INFRASTRUKTUR LAYAK, MANAJEMEN MODERN SERTA PARTISIPASI MASYARAKAT		767.479.484,00	
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-		-	-	0,00						-	550.000.000,00	
			Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	-		-	-	201.369.800,00						-	217.479.484,00	
	2.15.02.1.08.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi						201.369.800,00							217.479.484,00	
		Terkendalinya dan Terawasinya KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	-		-	2 Laporan	201.369.800,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	217.479.484,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						0,00							550.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-		-	17 Unit	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	550.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.10	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						0,00					MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN TRANSPORTASI YANG NYAMAN, AMAN DAN TERJANGKAU YANG DIDUKUNG OLEH INFRASTRUKTUR LAYAK, MANAJEMEN MODERN SERTA PARTISIPASI MASYARAKAT		0,00	
		-						0,00					MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN TRANSPORTASI YANG NYAMAN, AMAN DAN TERJANGKAU YANG DIDUKUNG OLEH INFRASTRUKTUR LAYAK, MANAJEMEN MODERN SERTA PARTISIPASI MASYARAKAT		0,00	
			Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	-		-	-	0,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.15.02.1.10.0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi						0,00							0,00	
		Tersusunnya Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.10.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi						0,00							0,00	
		Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.15.02.1.12	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						0,00					MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN TRANSPORTASI YANG NYAMAN, AMAN DAN TERJANGKAU YANG DIDUKUNG OLEH INFRASTRUKTUR LAYAK, MANAJEMEN MODERN SERTA PARTISIPASI MASYARAKAT		0,00	
		-						0,00					MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN TRANSPORTASI YANG NYAMAN, AMAN DAN TERJANGKAU YANG DIDUKUNG OLEH INFRASTRUKTUR LAYAK, MANAJEMEN MODERN SERTA PARTISIPASI MASYARAKAT		0,00	
			Jumlah Dokumen kebijakan penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen kebijakan penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah laporan pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	-		-	-	0,00						-	0,00	
	2.15.02.1.12.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen kebijakan penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.12.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi						0,00							0,00	
		Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.12.0003	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.12.0004	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi						0,00							0,00	
		Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						30.000.000,00					MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN TRANSPORTASI YANG NYAMAN, AMAN DAN TERJANGKAU YANG DIDUKUNG OLEH INFRASTRUKTUR LAYAK, MANAJEMEN MODERN SERTA PARTISIPASI MASYARAKAT		25.000.000,00	
		-						30.000.000,00					MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN TRANSPORTASI YANG NYAMAN, AMAN DAN TERJANGKAU YANG DIDUKUNG OLEH INFRASTRUKTUR LAYAK, MANAJEMEN MODERN SERTA PARTISIPASI MASYARAKAT		25.000.000,00	
			Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	-		-	-	30.000.000,00						-	25.000.000,00	
	2.15.02.1.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	-		-	1 Unit	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.13.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi						30.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	-		-	1 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.15.02.1.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						0,00					MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN TRANSPORTASI YANG NYAMAN, AMAN DAN TERJANGKAU YANG DIDUKUNG OLEH INFRASTRUKTUR LAYAK, MANAJEMEN MODERN SERTA PARTISIPASI MASYARAKAT		0,00	
		-						0,00					MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN TRANSPORTASI YANG NYAMAN, AMAN DAN TERJANGKAU YANG DIDUKUNG OLEH INFRASTRUKTUR LAYAK, MANAJEMEN MODERN SERTA PARTISIPASI MASYARAKAT		0,00	
			Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	-		-	-	0,00						-	0,00	
	2.15.02.1.14.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	-		-	1 Laporan	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.14.0004	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						0,00							0,00	
		Tersedianya Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	-		-	1 Unit	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.15.02.1.15	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						0,00					MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN TRANSPORTASI YANG NYAMAN, AMAN DAN TERJANGKAU YANG DIDUKUNG OLEH INFRAST RUKTUR LAYAK, MANAJEMEN MODERN SERTA PARTISIPASI MASYARAKAT		0,00	
		-						0,00					MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN TRANSPORTASI YANG NYAMAN, AMAN DAN TERJANGKAU YANG DIDUKUNG OLEH INFRAST RUKTUR LAYAK, MANAJEMEN MODERN SERTA PARTISIPASI MASYARAKAT		0,00	
			Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-		-	-	0,00						-	0,00	
	2.15.02.1.15.0001	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.15.0002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						0,00							0,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.15.0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-		-	1 Laporan	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
153.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**						**220.000.000,00**							**2.864.703.400,00**	
			Konektivitas Laut	-		-	0,719 %	70.000.000,00						-	1.379.703.400,00	
	2.15.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi						40.000.000,00					MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN TRANSPORTASI YANG NYAMAN, AMAN DAN TERJANGKAU YANG DIDUKUNG OLEH INFRASTRUKTUR LAYAK, MANAJEMEN MODERN SERTA PARTISIPASI MASYARAKAT		285.000.000,00	
		-						40.000.000,00					MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN TRANSPORTASI YANG NYAMAN, AMAN DAN TERJANGKAU YANG DIDUKUNG OLEH INFRASTRUKTUR LAYAK, MANAJEMEN MODERN SERTA PARTISIPASI MASYARAKAT		285.000.000,00	
			Jumlah Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	-		-	-	0,00						-	93.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	-		-	-	40.000.000,00						-	192.000.000,00	
	2.15.03.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						0,00							93.000.000,00	
		Tersedianya Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	Jumlah Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	-		-	1 Unit	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	93.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi						40.000.000,00							192.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	-		-	1 Laporan	40.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	192.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.15.03.1.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional						30.000.000,00					MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN TRANSPORTASI YANG NYAMAN, AMAN DAN TERJANGKAU YANG DIDUKUNG OLEH INFRAST RUKTUR LAYAK, MANAJEMEN MODERN SERTA PARTISIPASI MASYARAKAT		570.000.000,00	
		-						30.000.000,00					MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN TRANSPORTASI YANG NYAMAN, AMAN DAN TERJANGKAU YANG DIDUKUNG OLEH INFRAST RUKTUR LAYAK, MANAJEMEN MODERN SERTA PARTISIPASI MASYARAKAT		570.000.000,00	
			Jumlah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan	-		-	-	0,00						-	285.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	-		-	-	30.000.000,00						-	285.000.000,00	
	2.15.03.1.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						0,00							285.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan	Jumlah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan	-		-	1 Unit	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	285.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi						30.000.000,00							285.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	-		-	1 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	285.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.03	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan						30.000.000,00					MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN TRANSPORTASI YANG NYAMAN, AMAN DAN TERJANGKAU YANG DIDUKUNG OLEH INFRASTRUKTUR LAYAK, MANAJEMEN MODERN SERTA PARTISIPASI MASYARAKAT		30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						30.000.000,00					MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN TRANSPORTASI YANG NYAMAN, AMAN DAN TERJANGKAU YANG DIDUKUNG OLEH INFRAST RUKTUR LAYAK, MANAJEMEN MODERN SERTA PARTISIPASI MASYARAKAT		30.000.000,00	
			Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan	-		-	-	30.000.000,00						-	30.000.000,00	
	2.15.03.1.03.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Serizinan	Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan	-		-	1 Unit	30.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.15.03.1.04	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi						0,00					MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN TRANSPORTASI YANG NYAMAN, AMAN DAN TERJANGKAU YANG DIDUKUNG OLEH INFRASTRUKTUR LAYAK, MANAJEMEN MODERN SERTA PARTISIPASI MASYARAKAT		154.000.000,00	
		-						0,00					MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN TRANSPORTASI YANG NYAMAN, AMAN DAN TERJANGKAU YANG DIDUKUNG OLEH INFRASTRUKTUR LAYAK, MANAJEMEN MODERN SERTA PARTISIPASI MASYARAKAT		154.000.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	-		-	-	0,00						-	154.000.000,00	
	2.15.03.1.04.0002	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi						0,00							154.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	154.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					40.000.000,00					MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN TRANSPORTASI YANG NYAMAN, AMAN DAN TERJANGKAU YANG DIDUKUNG OLEH INFRASTRUKTUR LAYAK, MANAJEMEN MODERN SERTA PARTISIPASI MASYARAKAT			850.703.400,00	
		-					40.000.000,00					MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN TRANSPORTASI YANG NYAMAN, AMAN DAN TERJANGKAU YANG DIDUKUNG OLEH INFRASTRUKTUR LAYAK, MANAJEMEN MODERN SERTA PARTISIPASI MASYARAKAT			850.703.400,00	
			Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	-		-	-	0,00						-	285.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	-		-	-	40.000.000,00						-	565.703.400,00	
	2.15.03.1.05.0003	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi						0,00							285.000.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	285.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.05.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi						40.000.000,00							565.703.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkendalinya dan Terawasinya Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan terkendalinya dan terawasinya izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	-		-	1 Laporan	40.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	565.703.400,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas						0,00					MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN TRANSPORTASI YANG NYAMAN, AMAN DAN TERJANGKAU YANG DIDUKUNG OLEH INFRASTRUKTUR LAYAK, MANAJEMEN MODERN SERTA PARTISIPASI MASYARAKAT		285.000.000,00		
		-						0,00					MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN TRANSPORTASI YANG NYAMAN, AMAN DAN TERJANGKAU YANG DIDUKUNG OLEH INFRASTRUKTUR LAYAK, MANAJEMEN MODERN SERTA PARTISIPASI MASYARAKAT		285.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	-		-	-	0,00						-	285.000.000,00	
	2.15.03.1.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						0,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.15.03.1.06.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas						0,00								285.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	-		-	1 Laporan	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	285.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional						40.000.000,00					MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN TRANSPORTASI YANG NYAMAN, AMAN DAN TERJANGKAU YANG DIDUKUNG OLEH INFRASTRUKTUR LAYAK, MANAJEMEN MODERN SERTA PARTISIPASI MASYARAKAT		345.000.000,00	
		-						40.000.000,00					MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN TRANSPORTASI YANG NYAMAN, AMAN DAN TERJANGKAU YANG DIDUKUNG OLEH INFRASTRUKTUR LAYAK, MANAJEMEN MODERN SERTA PARTISIPASI MASYARAKAT		345.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Regional yang Tersedia	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	-		-	-	40.000.000,00						-	285.000.000,00	
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	-		-	-	0,00						-	60.000.000,00	
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	-		-	-	0,00						-	0,00	
	2.15.03.1.09.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional						0,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	-		-	1 Unit	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.09.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangunnya Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	-		-	1 Unit	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.09.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	-		-	1 Unit	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.09.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional						40.000.000,00							285.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terawasinya Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	-		-	1 Laporan	40.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	285.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.09.0005	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan Regional						0,00							0,00	
		Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Regional yang Tersedia	-		-	1 Unit	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.10	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						40.000.000,00					MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN TRANSPORTASI YANG NYAMAN, AMAN DAN TERJANGKAU YANG DIDUKUNG OLEH INFRASTRUKTUR LAYAK, MANAJEMEN MODERN SERTA PARTISIPASI MASYARAKAT		345.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						40.000.000,00					MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN TRANSPORTASI YANG NYAMAN, AMAN DAN TERJANGKAU YANG DIDUKUNG OLEH INFRASTRUKTUR LAYAK, MANAJEMEN MODERN SERTA PARTISIPASI MASYARAKAT		345.000.000,00	
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-		-	-	40.000.000,00						-	285.000.000,00	
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan	-		-	-	0,00						-	60.000.000,00	
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Terbangun	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	-		-	-	0,00						-	0,00	
	2.15.03.1.10.0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangunnya Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Terbangun	-		-	1 Unit	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.10.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						0,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan	-		-	1 Unit	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.10.0006	Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Angkutan Sungai dan Danau						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kompetensi Personil bidang Angkutan Sungai dan Danau	Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	-		-	1 Orang	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.10.0007	Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Pengoperasian & Pemeliharaan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan						0,00							0,00	
		Meningkatnya Kompetensi Personil bidang Pengoperasian & Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	-		-	1 Orang	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.10.0008	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						40.000.000,00							285.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terawasinya Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-		-	1 Laporan	40.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	285.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.10.0009	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						0,00							0,00	
		Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						**12.861.513.778,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**12.861.513.778,00**							**0,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**11.911.513.178,00**							**0,00**	
154.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**8.351.513.178,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	-		-	100 %	164.000.000,00						-	0,00	
			Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	-		-	100 %	8.133.513.178,00						-	0,00	
	2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						169.000.000,00					Organisasi Perangkat Daerah		0,00	
		-						169.000.000,00					Organisasi Perangkat Daerah		0,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	100.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	5.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	50.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	5.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	9.000.000,00						-	0,00	
	2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						50.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Waihaong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						5.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	2 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Waihaong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						5.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	2 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Waihaong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						9.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	7 Laporan	9.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Waihaong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.16.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						100.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	1 Berita Acara	100.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Waihaong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.782.851.966,00					Organisasi Perangkat Daerah		0,00	
		-						6.782.851.966,00					Organisasi Perangkat Daerah		0,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	57.360.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	7.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	7.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	6.711.491.966,00						-	0,00	
	2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						6.711.491.966,00							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	50 Orang/ Bulan	6.711.491.966,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Waihaong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.16.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						57.360.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	12 Dokumen	57.360.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Waihaong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						7.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	7.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Waihaong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						7.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	6 Laporan	7.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Waihaong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						8.000.000,00					Organisasi Perangkat Daerah		0,00	
		-						8.000.000,00					Organisasi Perangkat Daerah		0,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	4.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	-	4.000.000,00						-	0,00	
	2.16.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						4.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	1 Dokumen	4.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Waihaong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						4.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	1 Laporan	4.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Waihaong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						62.002.000,00					Organisasi Perangkat Daerah		0,00	
		-						62.002.000,00					Organisasi Perangkat Daerah		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	-		-	-	4.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	-	54.002.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	-	4.000.000,00						-	0,00	
	2.16.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian						4.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	1 Dokumen	4.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Waihaong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						4.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	-		-	1 Dokumen	4.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Waihaong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai						54.002.000,00							0,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	1 Dokumen	54.002.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Waihaong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						288.931.812,00					Organisasi Perangkat Daerah		0,00	
		-						288.931.812,00					Organisasi Perangkat Daerah		0,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	11.290.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	222.641.812,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	35.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	10.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	10.000.000,00						-	0,00	
	2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Waihaong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						35.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	3 Paket	35.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Waihaong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Waihaong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						11.290.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	12 Laporan	11.290.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Waihaong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						222.641.812,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	38 Laporan	222.641.812,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Waihaong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						467.007.400,00					Organisasi Perangkat Daerah		0,00	
		-						467.007.400,00					Organisasi Perangkat Daerah		0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	-	327.007.400,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	130.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	10.000.000,00						-	0,00	
	2.16.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						327.007.400,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	1 Unit	327.007.400,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Waihaong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						130.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	8 Unit	130.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Waihaong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						10.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Waihaong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						200.000.000,00					Organisasi Perangkat Daerah		0,00	
		-						200.000.000,00					Organisasi Perangkat Daerah		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	200.000.000,00						-	0,00	
	2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						200.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	200.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Waihaong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						373.720.000,00					Organisasi Perangkat Daerah		0,00	
		-						373.720.000,00					Organisasi Perangkat Daerah		0,00	
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	100.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	25.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	238.720.000,00						-	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	10.000.000,00						-	0,00	
	2.16.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						238.720.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	14 Unit	238.720.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Waihaong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						100.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-		-	4 Unit	100.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Waihaong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						25.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	25.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Waihaong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	5 Unit	10.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Waihaong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
155.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**						**1.360.000.000,00**							**0,00**	
			Kualifikasi keterbukaan informasi Publik	-		-	91,28 Predikat	1.360.000.000,00						-	0,00	
	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi						1.360.000.000,00					Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat		0,00	
		-						1.360.000.000,00					Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	-		-	-	60.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	-		-	-	650.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (strakom tematik dan strakom isu daerah)	-		-	-	50.000.000,00						-	0,00	
			Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	-		-	-	600.000.000,00						-	0,00	
	2.16.02.1.01.0026	Pelayanan Informasi Publik serta Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik						600.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Pelayanan Informasi Publik bagi masyarakat dan terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	-		-	75 %	600.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Waihaong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0027	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik						60.000.000,00							0,00	
		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	-		-	47 Orang	60.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Waihaong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0028	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik						50.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (strakom tematik dan strakom isu daerah)	-		-	2 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Waihaong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0029	Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik						650.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	-		-	899331 Orang	650.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Waihaong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
156.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**						**2.200.000.000,00**							**0,00**	
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	-		-	2,73 indeks	2.200.000.000,00						-	0,00	
	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi						2.200.000.000,00					Organisasi Perangkat Daerah		0,00	
		-						2.200.000.000,00					Organisasi Perangkat Daerah		0,00	
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	-		-	-	293.448.000,00						-	0,00	
			Jumlah Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota dalam lingkup Provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	-		-	-	245.133.200,00						-	0,00	
			Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	-		-	-	1.661.418.800,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.16.03.1.02.0038	Koordinasi pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi						293.448.000,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	-		-	33 Layanan	293.448.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Waihaong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0039	Penyediaan Akses Internet						1.661.418.800,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dan UPTD, termasuk ruang publik dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	-		-	48 Titik	1.661.418.800,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Waihaong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0042	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi dan Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi						245.133.200,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota dalam lingkup Provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	-		-	36 Titik	245.133.200,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Waihaong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**600.000.000,00**							**0,00**	
157.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**						**600.000.000,00**							**0,00**	
			Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	-		-	2,45 poin	600.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi						600.000.000,00					Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat		0,00	
		-						600.000.000,00					Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat		0,00	
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	-		-	-	305.869.000,00						-	0,00	
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik pusat dan/atau daerah	-		-	-	75.000.000,00						-	0,00	
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	-		-	-	219.131.000,00						-	0,00	
	2.20.02.1.01.0016	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia						219.131.000,00							0,00	
		Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	-		-	75 %	219.131.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Waihaong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.1.01.0019	Peningkatan kualitas statistik sektoral						305.869.000,00							0,00	
		Meningkatnya kualitas statistik sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	-		-	75 %	305.869.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Waihaong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.1.01.0022	Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional						75.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik pusat dan/atau daerah	-		-	10 %	75.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Waihaong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**350.000.600,00**							**0,00**	
158.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**						**350.000.600,00**							**0,00**	
			Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (indeks KAMI)	-		-	304 poin	350.000.600,00						-	0,00	
	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi						350.000.600,00					Organisasi Perangkat Daerah		0,00	
		-						350.000.600,00					Organisasi Perangkat Daerah		0,00	
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian.	-		-	-	44.996.600,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-		-	-	250.002.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	-		-	-	55.002.000,00						-	0,00	
	2.21.02.1.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik						250.002.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-		-	4 Laporan	250.002.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Waihaong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.1.01.0007	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan						55.002.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	-		-	5 Laporan	55.002.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Waihaong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.1.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah						44.996.600,00							0,00	
		Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian.	-		-	2 Dokumen	44.996.600,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Waihaong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						**11.586.431.208,00**							**12.070.302.246,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**11.586.431.208,00**							**12.070.302.246,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**11.586.431.208,00**							**12.070.302.246,00**	
159.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**12.086.177.208,00**							**12.653.188.295,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	-		-	100 %	10.876.431.208,00						-	11.403.802.246,00	
	2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						212.697.261,00					Dinas Koperasi UKM Provinsi Maluku		208.527.100,00	
		-						212.697.261,00					Dinas Koperasi UKM Provinsi Maluku		208.527.100,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	38.930.261,00						-	40.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	173.767.000,00						-	168.527.100,00	
	2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						38.930.261,00							40.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	12 Dokumen	38.930.261,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	40.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						68.562.000,00							71.990.100,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	12 Laporan	68.562.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	71.990.100,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.975.493.947,00					Dinas Koperasi UKM Provinsi Maluku		10.473.176.646,00	
		-						9.975.493.947,00					Dinas Koperasi UKM Provinsi Maluku		10.473.176.646,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	107.880.000,00						-	112.182.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	10.000.000,00						-	10.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	9.857.613.947,00						-	10.350.494.646,00	
	2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						9.857.613.947,00							10.350.494.646,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	126 Orang/ Bulan	9.857.613.947,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	10.350.494.646,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						64.200.000,00							67.410.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	12 Dokumen	64.200.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	67.410.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						10.000.000,00							10.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	12 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	10.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						453.428.265,00					Dinas Koperasi UKM Provinsi Maluku		472.724.328,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						453.428.265,00					Dinas Koperasi UKM Provinsi Maluku		472.724.328,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	1.250.000,00						-	1.312.500,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	43.965.000,00						-	45.835.500,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	276.508.000,00						-	288.439.600,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	-	77.202.265,00						-	80.193.728,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	19.800.000,00						-	20.691.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	15.160.000,00						-	15.838.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	19.543.000,00						-	20.414.000,00	
	2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.000.000,00							10.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	10.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						10.000.000,00							10.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	10.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.000.000,00							10.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	10.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						1.250.000,00							1.312.500,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	12 Dokumen	1.250.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	1.312.500,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						30.000.000,00							31.500.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	1 Paket	30.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	31.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						19.999.000,00							21.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	12 Laporan	19.999.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	21.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						149.976.000,00							157.500.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	149.976.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	157.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						600.000.000,00					Dinas Koperasi UKM Provinsi Maluku		614.650.000,00	
		-						600.000.000,00					Dinas Koperasi UKM Provinsi Maluku		614.650.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	75.000.000,00						-	78.750.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	-	380.000.000,00						-	383.650.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	145.000.000,00						-	152.250.000,00	
	2.17.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						380.000.000,00							383.650.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	1 Unit	380.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	383.650.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						75.000.000,00							78.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	1 Paket	75.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	78.750.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						100.000.000,00							105.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	10 Unit	100.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	105.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						193.977.735,00					Dinas Koperasi UKM Provinsi Maluku		203.106.221,00	
		-						193.977.735,00					Dinas Koperasi UKM Provinsi Maluku		203.106.221,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	181.917.735,00						-	190.533.221,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	12.060.000,00						-	12.573.000,00	
	2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.000.000,00							3.150.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	3.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	3.150.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						100.000.000,00							105.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	105.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						400.580.000,00					Dinas Koperasi UKM Provinsi Maluku		418.504.000,00	
		-						400.580.000,00					Dinas Koperasi UKM Provinsi Maluku		418.504.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	125.000.000,00						-	131.250.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	70.780.000,00						-	73.595.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	-	169.680.000,00						-	177.027.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	35.120.000,00						-	36.632.000,00	
	2.17.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						37.900.000,00							39.795.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	1 Unit	37.900.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	39.795.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						25.000.000,00							26.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	6 Unit	25.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	26.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15.000.000,00							15.750.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	20 Unit	15.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	15.750.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						100.000.000,00							105.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	100.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	105.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
160.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**						**80.000.000,00**							**84.000.000,00**	
			Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	-		-	4,6 %	80.000.000,00						-	84.000.000,00	
	2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						80.000.000,00					Koperasi		84.000.000,00	
		-						80.000.000,00					Koperasi		84.000.000,00	
			Jumlah Koperasi yang diperiksa	-		-	-	80.000.000,00						-	84.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.17.03.1.01.0005	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						80.000.000,00							84.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang diperiksa	-		-	7 Unit Usaha	80.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	84.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
161.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**						**80.000.000,00**							**84.000.000,00**	
			Persentase Koperasi Aktif	-		-	68,7 %	80.000.000,00						-	84.000.000,00	
	2.17.04.1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						80.000.000,00					Koperasi		84.000.000,00	
		-						80.000.000,00					Koperasi		84.000.000,00	
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	-		-	-	80.000.000,00						-	84.000.000,00	
	2.17.04.1.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan						80.000.000,00							84.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	-		-	7 Unit Usaha	80.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	84.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
162.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**						**160.000.000,00**							**85.000.000,00**	
			Persentase Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas	-		-	9,94 %	160.000.000,00						-	85.000.000,00	
	2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						160.000.000,00					Koperasi		85.000.000,00	
		-						160.000.000,00					Koperasi		85.000.000,00	
			Jumlah Koperasi yang mendapatkan pendampingan restrukturisasi dan revitalisasi	-		-	-	160.000.000,00						-	85.000.000,00	
	2.17.06.1.01.0012	Pendampingan dan Fasilitasi Koperasi						160.000.000,00							85.000.000,00	
		Terwujudnya restrukturisasi dan revitalisasi	Jumlah Koperasi yang mendapatkan pendampingan restrukturisasi dan revitalisasi	-		-	7 Koperasi	160.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	85.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
163.	**2.17.07**	**PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**						**109.625.000,00**							**117.506.250,00**	
			Pertumbuhan Wirausaha	-		-	1,9 %	40.000.000,00						-	44.000.000,00	
	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan						109.625.000,00					UMKM		117.506.250,00	
		-						109.625.000,00					UMKM		117.506.250,00	
			Jumlah Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM	-		-	-	40.000.000,00						-	44.000.000,00	
	2.17.07.1.01.0024	Perkuatan Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM						40.000.000,00							44.000.000,00	
		Terfasilitasinya perkuatan Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM	Jumlah Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM	-		-	1 Lembaga	40.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	44.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
164.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**						**200.000.000,00**							**213.000.000,00**	
			Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	-		-	2,2 %	120.000.000,00						-	128.000.000,00	
	2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah						200.000.000,00					UMKM		213.000.000,00	
		-						200.000.000,00					UMKM		213.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang terfasilitasi Penguatan Akses Pembiayaan bagi UMKM	-		-	-	120.000.000,00						-	129.000.000,00	
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang memperoleh pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi	-		-	-	80.000.000,00						-	84.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.17.08.1.01.0015	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM						80.000.000,00							84.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada unit usaha UMKM	Jumlah Unit Usaha UMKM yang memperoleh pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi	-		-	1 Unit Usaha	80.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	84.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.1.01.0023	Pembinaan dan Fasilitasi Penguatan Akses Pembiayaan bagi UMKM						40.000.000,00							44.000.000,00	
		Terfasilitasinya Penguatan Akses Pembiayaan bagi UMKM	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Penguatan Akses Pembiayaan bagi UMKM	-		-	1 Unit Usaha	40.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	44.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH						**296.000.000,00**							**304.681.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**296.000.000,00**							**304.681.000,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**296.000.000,00**							**304.681.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
165.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**12.086.177.208,00**							**12.653.188.295,00**	
			Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	-		-	100 %	216.000.000,00						-	219.881.000,00	
	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.975.493.947,00					Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah		10.473.176.646,00	
		-						9.975.493.947,00					Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah		10.473.176.646,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	107.880.000,00						-	112.182.000,00	
	2.17.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						21.840.000,00							21.840.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	1 Dokumen	21.840.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	21.840.000,00	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						453.428.265,00					Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah		472.724.328,00	
		-						453.428.265,00					Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah		472.724.328,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	43.965.000,00						-	45.835.500,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	276.508.000,00						-	288.439.600,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	-	77.202.265,00						-	80.193.728,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	19.800.000,00						-	20.691.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	15.160.000,00						-	15.838.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	19.543.000,00						-	20.414.000,00	
	2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.660.000,00							2.713.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.660.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	2.713.000,00	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						3.543.000,00							3.614.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	3.543.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	3.614.000,00	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.300.000,00							3.366.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	3.300.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	3.366.000,00	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						28.933.000,00							29.511.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	1 Paket	28.933.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	29.511.000,00	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						10.956.000,00							11.175.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	10.956.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	11.175.000,00	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						63.960.000,00							65.239.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	4 Laporan Laporan	63.960.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	65.239.000,00	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						193.977.735,00					Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah		203.106.221,00	
		-						193.977.735,00					Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah		203.106.221,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	181.917.735,00						-	190.533.221,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	12.060.000,00						-	12.573.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.000.000,00							3.060.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	3.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	3.060.000,00	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						16.008.000,00							16.328.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	16.008.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	16.328.000,00	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						400.580.000,00					Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah		418.504.000,00	
		-						400.580.000,00					Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah		418.504.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	70.780.000,00						-	73.595.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	-	169.680.000,00						-	177.027.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	35.120.000,00						-	36.632.000,00	
	2.17.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						37.900.000,00							38.658.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	1 Unit	37.900.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	38.658.000,00	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						15.780.000,00							16.095.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	3 Unit	15.780.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	16.095.000,00	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						8.120.000,00							8.282.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	2 Unit	8.120.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	8.282.000,00	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
166.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**						**40.000.000,00**							**42.400.000,00**	
			-	-		-	-	40.000.000,00						-	42.400.000,00	
	2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						40.000.000,00					Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah		42.400.000,00	
		-						40.000.000,00					Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah		42.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	-		-	-	40.000.000,00						-	42.400.000,00	
	2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi						40.000.000,00							42.400.000,00	
		Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	-		-	30 Orang	40.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	42.400.000,00	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
167.	**2.17.07**	**PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**						**109.625.000,00**							**117.506.250,00**	
			Pertumbuhan Wirausaha	-		-	1,9 %	40.000.000,00						-	42.400.000,00	
	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan						109.625.000,00					Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah		117.506.250,00	
		-						109.625.000,00					Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah		117.506.250,00	
			Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	-		-	-	40.000.000,00						-	42.400.000,00	
	2.17.07.1.01.0015	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha						40.000.000,00							42.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	-		-	30 Orang	40.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	42.400.000,00	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
		PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH						**500.000.000,00**							**511.071.749,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**500.000.000,00**							**511.071.749,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**500.000.000,00**							**511.071.749,00**	
168.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**12.086.177.208,00**							**12.653.188.295,00**	
			Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	-		-	100 %	250.000.000,00						-	248.571.749,00	
			-	-		-	-	250.000.000,00						-	262.500.000,00	
	2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						212.697.261,00					Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah		208.527.100,00	
		-						212.697.261,00					Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah		208.527.100,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	173.767.000,00						-	168.527.100,00	
	2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						105.205.000,00							96.537.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	1 Laporan	105.205.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	96.537.000,00	PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						453.428.265,00					Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah		472.724.328,00	
		-						453.428.265,00					Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah		472.724.328,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	43.965.000,00						-	45.835.500,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	-	77.202.265,00						-	80.193.728,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	19.800.000,00						-	20.691.000,00	
	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4.000.000,00							4.200.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	4.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	4.200.000,00	PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						8.269.265,00							8.682.728,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	1 Paket	8.269.265,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	8.682.728,00	PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						5.900.000,00							6.195.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	5.900.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	6.195.000,00	PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						193.977.735,00					PDB KUMKM		203.106.221,00	
		-						193.977.735,00					PDB KUMKM		203.106.221,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	181.917.735,00						-	190.533.221,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	12.060.000,00						-	12.573.000,00	
	2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						4.060.000,00							4.263.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	4.060.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	4.263.000,00	PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						28.685.735,00							30.120.021,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	28.685.735,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	30.120.021,00	PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						400.580.000,00					PDB KUMKM		418.504.000,00	
		-						400.580.000,00					PDB KUMKM		418.504.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	-	169.680.000,00						-	177.027.000,00	
	2.17.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						93.880.000,00							98.574.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	1 Unit	93.880.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	98.574.000,00	PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						250.000.000,00					PDB KUMKM		262.500.000,00	
		-						250.000.000,00					PDB KUMKM		262.500.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	250.000.000,00						-	262.500.000,00	
	2.17.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						250.000.000,00							262.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	250.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	262.500.000,00	PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
		PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH						**373.371.000,00**							**393.039.550,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**373.371.000,00**							**393.039.550,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**373.371.000,00**							**393.039.550,00**	
169.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**12.086.177.208,00**							**12.653.188.295,00**	
			Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	-		-	100 %	261.246.000,00						-	274.308.300,00	
	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.975.493.947,00					PLUT KUMKM		10.473.176.646,00	
		-						9.975.493.947,00					PLUT KUMKM		10.473.176.646,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	107.880.000,00						-	112.182.000,00	
	2.17.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						21.840.000,00							22.932.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	1 Dokumen	21.840.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	22.932.000,00	PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						453.428.265,00					PLUT KUMKM		472.724.328,00	
		-						453.428.265,00					PLUT KUMKM		472.724.328,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	43.965.000,00						-	45.835.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	276.508.000,00						-	288.439.600,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	-	77.202.265,00						-	80.193.728,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	19.800.000,00						-	20.691.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	15.160.000,00						-	15.838.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	19.543.000,00						-	20.414.000,00	
	2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.500.000,00							2.625.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.500.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	2.625.000,00	PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						6.000.000,00							6.300.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	6.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	6.300.000,00	PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.500.000,00							2.625.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.500.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	2.625.000,00	PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						10.000.000,00							10.500.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	10.500.000,00	PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						7.110.000,00							7.465.500,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	6 Laporan	7.110.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	7.465.500,00	PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						62.572.000,00							65.700.600,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	5 Laporan	62.572.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	65.700.600,00	PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						600.000.000,00					PLUT KUMKM		614.650.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						600.000.000,00					PLUT KUMKM		614.650.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	145.000.000,00						-	152.250.000,00	
	2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						45.000.000,00							47.250.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	5 Unit	45.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	47.250.000,00	PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						193.977.735,00					PLUT KUMKM		203.106.221,00	
		-						193.977.735,00					PLUT KUMKM		203.106.221,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	181.917.735,00						-	190.533.221,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	12.060.000,00						-	12.573.000,00	
	2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.000.000,00							2.100.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	2.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	2.100.000,00	PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						37.224.000,00							39.085.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	37.224.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	39.085.200,00	PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						400.580.000,00					PLUT KUMKM		418.504.000,00	
		-						400.580.000,00					PLUT KUMKM		418.504.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	125.000.000,00						-	131.250.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	70.780.000,00						-	73.595.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	35.120.000,00						-	36.632.000,00	
	2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						30.000.000,00							31.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	1 Unit	30.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	31.500.000,00	PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						12.000.000,00							12.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	10 Unit	12.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	12.600.000,00	PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						25.000.000,00							26.250.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	25.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	26.250.000,00	PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
170.	**2.17.07**	**PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**						**109.625.000,00**							**117.506.250,00**	
			Pertumbuhan Wirausaha	-		-	1,9 %	29.625.000,00						-	31.106.250,00	
	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan						109.625.000,00					PLUT KUMKM		117.506.250,00	
		-						109.625.000,00					PLUT KUMKM		117.506.250,00	
			Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perizinan Berusaha	-		-	-	29.625.000,00						-	31.106.250,00	
	2.17.07.1.01.0017	Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM						29.625.000,00							31.106.250,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perizinan Berusaha	-		-	150 Unit Usaha	29.625.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	31.106.250,00	PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
171.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**						**200.000.000,00**							**213.000.000,00**	
			Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	-		-	2,2 %	80.000.000,00						-	85.000.000,00	
	2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah						200.000.000,00					PLUT KUMKM		213.000.000,00	
		-						200.000.000,00					PLUT KUMKM		213.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang terfasilitasi Penguatan Akses Pembiayaan bagi UMKM	-		-	-	120.000.000,00						-	129.000.000,00	
	2.17.08.1.01.0023	Pembinaan dan Fasilitasi Penguatan Akses Pembiayaan bagi UMKM						80.000.000,00							85.000.000,00	
		Terfasilitasinya Penguatan Akses Pembiayaan bagi UMKM	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Penguatan Akses Pembiayaan bagi UMKM	-		-	100 Unit Usaha	80.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	85.000.000,00	PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						**7.447.914.991,00**							**13.482.588.328,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.447.914.991,00**							**13.482.588.328,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**7.447.914.991,00**							**13.482.588.328,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
172.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**6.526.759.591,00**							**8.897.805.228,00**	
			Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	-		-	100 %	6.500.309.591,00						-	8.755.580.228,00	
	2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						306.450.296,00					Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku		1.053.747.600,00	
		-						306.450.296,00					Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku		1.053.747.600,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	16.250.000,00						-	36.725.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	132.140.000,00						-	524.636.400,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	16.250.000,00						-	36.725.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	11.800.000,00						-	28.928.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	130.010.296,00						-	426.733.200,00	
	2.18.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						132.140.000,00							524.636.400,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	3 Dokumen	132.140.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	524.636.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						16.250.000,00							36.725.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	2 Dokumen	16.250.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	36.725.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						16.250.000,00							36.725.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	2 Dokumen	16.250.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	36.725.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						11.800.000,00							28.928.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	1 Laporan	11.800.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	28.928.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						130.010.296,00							426.733.200,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	6 Laporan	130.010.296,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	426.733.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.331.621.855,00					Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku		5.483.010.038,00	
		-						5.331.621.855,00					Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku		5.483.010.038,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	53.280.000,00						-	64.200.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	22.410.000,00						-	50.646.600,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	5.100.000,00						-	11.526.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	5.250.831.855,00						-	5.356.637.438,00	
	2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.250.831.855,00							5.356.637.438,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	50 Orang/ Bulan	5.250.831.855,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.356.637.438,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						53.280.000,00							64.200.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	1 Dokumen	53.280.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	64.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.18.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						22.410.000,00							50.646.600,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	22.410.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	50.646.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						5.100.000,00							11.526.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	18 Laporan	5.100.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	11.526.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						10.200.000,00					Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku		11.000.000,00	
		-						10.200.000,00					Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku		11.000.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	5.100.000,00						-	5.500.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	-	5.100.000,00						-	5.500.000,00	
	2.18.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						5.100.000,00							5.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	1 Dokumen	5.100.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						5.100.000,00							5.500.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	2 Laporan	5.100.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						107.330.000,00					Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku		320.966.000,00	
		-						107.330.000,00					Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku		320.966.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	68.398.000,00						-	170.180.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	38.932.000,00						-	150.786.000,00	
	2.18.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						38.932.000,00							150.786.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	10 Orang	38.932.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	150.786.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.18.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						68.398.000,00							170.180.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	15 Orang	68.398.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	170.180.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						311.022.200,00					Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku		1.115.323.710,00	
		-						311.022.200,00					Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku		1.115.323.710,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	12.980.000,00						-	56.136.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	224.078.000,00						-	706.726.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	39.367.200,00						-	194.300.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	29.122.000,00						-	92.100.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	2.605.000,00						-	26.250.710,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	2.870.000,00						-	39.811.000,00	
	2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.605.000,00							26.250.710,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.605.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	26.250.710,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						2.870.000,00							39.811.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.870.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	39.811.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						39.367.200,00							194.300.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	39.367.200,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	194.300.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						29.122.000,00							92.100.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	29.122.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	92.100.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						12.980.000,00							56.136.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	12.980.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	56.136.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						224.078.000,00							706.726.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	14 Laporan	224.078.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	706.726.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						88.000.000,00					Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku		250.000.000,00	
		-						88.000.000,00					Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku		250.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	30.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	-	35.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	23.000.000,00						-	100.000.000,00	
	2.18.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						35.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	1 Unit	35.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						30.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	1 Paket	30.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						23.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	2 Unit	23.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						225.995.240,00					Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku		506.827.880,00	
		-						225.995.240,00					Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku		506.827.880,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	120.683.000,00						-	120.683.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	105.312.240,00						-	386.144.880,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						120.683.000,00							120.683.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	120.683.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	120.683.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						105.312.240,00							386.144.880,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	105.312.240,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	386.144.880,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						146.140.000,00					Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku		156.930.000,00	
		-						146.140.000,00					Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku		156.930.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	-	122.000.000,00						-	122.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	14.140.000,00						-	24.930.000,00	
	2.18.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						122.000.000,00							122.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	4 Unit	122.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	122.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						14.140.000,00							24.930.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	13 Unit	14.140.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	24.930.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
173.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**						**129.304.600,00**							**1.030.793.300,00**	
			Realisasi Total terhadap target Investasi	-		-	100 %	129.304.600,00						-	1.030.793.300,00	
	2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi						20.934.600,00					Pelaku Usaha		385.793.300,00	
		-						20.934.600,00					Pelaku Usaha		385.793.300,00	
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	-		-	-	20.934.600,00						-	385.793.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.18.02.1.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi						20.934.600,00							385.793.300,00	
		Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	-		-	1 Dokumen	20.934.600,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan membangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	385.793.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi						108.370.000,00					Dinas PMPTSP Provinsi Maluku dan Investor		645.000.000,00	
		-						108.370.000,00					Dinas PMPTSP Provinsi Maluku dan Investor		645.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Provinsi	-		-	-	30.672.000,00						-	345.000.000,00	
			Jumlah Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Provinsi	-		-	-	77.698.000,00						-	300.000.000,00	
	2.18.02.1.02.0006	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi						77.698.000,00							300.000.000,00	
		Tersusunnya Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Provinsi	Jumlah Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Provinsi	-		-	1 Dokumen	77.698.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan membangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.02.0007	Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Provinsi						30.672.000,00							345.000.000,00	
		Tersusunnya Peta Potensi dan Peluang Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Provinsi	-		-	1 Dokumen	30.672.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan membangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	345.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
174.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**						**221.874.600,00**							**1.576.120.000,00**	
			Jumlah Investor yang Berinvestasi	-		-	1 Investor	221.874.600,00						-	1.576.120.000,00	
	2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi						221.874.600,00					Dinas PMPTSP Provinsi Maluku dan Investor		1.576.120.000,00	
		-						221.874.600,00					Dinas PMPTSP Provinsi Maluku dan Investor		1.576.120.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	-		-	-	152.316.600,00						-	818.120.000,00	
			Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	-		-	-	69.558.000,00						-	758.000.000,00	
	2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi						152.316.600,00							818.120.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	-		-	1 Dokumen	152.316.600,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	818.120.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.1.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi						69.558.000,00							758.000.000,00	
		Tersusunnya Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	-		-	1 Dokumen	69.558.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	758.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
175.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**						**294.599.500,00**							**1.083.895.300,00**	
			Rata-rata lama pengurusan dokumen perizinan usaha	-		-	15 Hari	294.599.500,00						-	1.083.895.300,00	
	2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi						294.599.500,00					Dinas PMPTSP Provinsi Maluku dan Pelaku Usaha		1.083.895.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						294.599.500,00					Dinas PMPTSP Provinsi Maluku dan Pelaku Usaha		1.083.895.300,00	
			Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	-		-	-	72.761.000,00						-	266.140.000,00	
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi	-		-	-	69.550.000,00						-	270.183.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-		-	-	62.105.000,00						-	242.057.300,00	
			Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-		-	-	90.183.500,00						-	305.515.000,00	
	2.18.04.1.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah						69.550.000,00							270.183.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi	-		-	3 Dokumen	69.550.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	270.183.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.02.0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko						62.105.000,00							242.057.300,00	
		Tersedianya dan Terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-		-	220 Pelaku Usaha	62.105.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	242.057.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.18.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik						90.183.500,00							305.515.000,00	
		Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-		-	1000 Pelaku Usaha	90.183.500,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	305.515.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.02.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko						72.761.000,00							266.140.000,00	
		Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	-		-	22 Kegiatan Usaha	72.761.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	266.140.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
176.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**						**255.123.700,00**							**757.802.500,00**	
			Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	-		-	100 %	255.123.700,00						-	757.802.500,00	
	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi						255.123.700,00					Dinas PMPTSP Provinsi Maluku dan Pelaku Usaha		757.802.500,00	
		-						255.123.700,00					Dinas PMPTSP Provinsi Maluku dan Pelaku Usaha		757.802.500,00	
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	-		-	-	90.566.500,00						-	257.083.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	-		-	-	49.482.200,00						-	168.330.000,00	
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-		-	-	115.075.000,00						-	332.389.500,00	
	2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal						90.566.500,00							257.083.000,00	
		Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	-		-	17 Kegiatan usaha	90.566.500,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan membangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	257.083.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya						115.075.000,00							332.389.500,00	
		Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-		-	12 Kegiatan usaha	115.075.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan membangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	332.389.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha						49.482.200,00							168.330.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	-		-	220 Pelaku Usaha	49.482.200,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan membangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	168.330.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
177.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**						**20.253.000,00**							**136.172.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Moda	-		-	96 %	20.253.000,00						-	136.172.000,00	
	2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi						20.253.000,00					Dinas PMPTSP Provinsi Maluku dan Pelaku Usaha		136.172.000,00	
		-						20.253.000,00					Dinas PMPTSP Provinsi Maluku dan Pelaku Usaha		136.172.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	-		-	-	20.253.000,00						-	136.172.000,00	
	2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik						20.253.000,00							136.172.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	-		-	7 Dokumen	20.253.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	136.172.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA						**19.717.201.736,68**							**18.882.143.816,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**19.602.201.736,68**							**18.734.643.816,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**19.602.201.736,68**							**18.734.643.816,00**	
178.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**7.355.394.849,68**							**7.433.048.033,00**	
			-	-		-	-	7.355.394.849,68						-	6.818.048.033,00	
	2.19.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						237.758.000,00					Meningkatnya tata Kelola yang baik untuk mendukung Pelaksanaan Tugas Teknis di Kepemudaan dan Olahraga		305.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						237.758.000,00					Meningkatnya tata Kelola yang baik untuk mendukung Pelaksanaan Tugas Teknis di Kepemudaan dan Olahraga		305.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-		-	-	80.000.000,00						-	80.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	95.358.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	12.400.000,00						-	45.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	50.000.000,00						-	80.000.000,00	
	2.19.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						95.358.000,00							100.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	8 Dokumen	95.358.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-		-	100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						12.400.000,00							45.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	4 Laporan	12.400.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-		-	45.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						50.000.000,00							80.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	80.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						80.000.000,00							80.000.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-		-	1 Dokumen	80.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	80.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.004.732.849,68					Meningkatnya tata Kelola yang baik untuk mendukung Pelaksanaan Tugas Teknis di Kepemudaan dan Olahraga		5.804.865.845,00	
		-						6.004.732.849,68					Meningkatnya tata Kelola yang baik untuk mendukung Pelaksanaan Tugas Teknis di Kepemudaan dan Olahraga		5.804.865.845,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	92.160.000,00						-	95.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	60.687.000,00						-	75.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	5.851.885.849,68						-	5.634.865.845,00	
	2.19.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.851.885.849,68							5.634.865.845,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	34 Orang/ Bulan	5.851.885.849,68	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.634.865.845,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						92.160.000,00							95.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	1 Dokumen	92.160.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	95.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						60.687.000,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	60.687.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	75.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						0,00					Meningkatnya tata Kelola yang baik untuk mendukung Pelaksanaan Tugas Teknis di Kepemudaan dan Olahrag		90.000.000,00	
		-						0,00					Meningkatnya tata Kelola yang baik untuk mendukung Pelaksanaan Tugas Teknis di Kepemudaan dan Olahrag		90.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	0,00						-	90.000.000,00	
	2.19.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan PengendalianBarang Milik Daerah pada SKPD						0,00							90.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	4 Laporan	0,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	90.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						115.000.000,00					Meningkatnya tata Kelola yang baik untuk mendukung Pelaksanaan Tugas Teknis di Kepemudaan dan Olahraga		140.000.000,00	
		-						115.000.000,00					Meningkatnya tata Kelola yang baik untuk mendukung Pelaksanaan Tugas Teknis di Kepemudaan dan Olahraga		140.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	60.000.000,00						-	65.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	55.000.000,00						-	75.000.000,00	
	2.19.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						60.000.000,00							65.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	1 Paket	60.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	65.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.19.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						55.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	5 Orang	55.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	75.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						283.904.000,00					MeninMeningkatnya tata Kelola yang baik untuk mendukung Pelaksanaan Tugas Teknis di Kepemudaan dan Olahragagkatnya tata Kelola yang baik untuk mendukung Pelaksanaan Tugas Teknis di Kepemudaan dan Olahraga		303.682.188,00	
		-						283.904.000,00					MeninMeningkatnya tata Kelola yang baik untuk mendukung Pelaksanaan Tugas Teknis di Kepemudaan dan Olahragagkatnya tata Kelola yang baik untuk mendukung Pelaksanaan Tugas Teknis di Kepemudaan dan Olahraga		303.682.188,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	25.110.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	150.000.000,00						-	185.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	8.794.000,00						-	8.682.188,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	100.000.000,00						-	80.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						8.794.000,00							8.682.188,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	8.794.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	8.682.188,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						100.000.000,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	0 Paket	100.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	80.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						25.110.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	25.110.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	30.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						150.000.000,00							185.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	150.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	185.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						70.000.000,00					Meningkatnya tata Kelola yang baik untuk mendukung Pelaksanaan Tugas Teknis di Kepemudaan dan Olahraga		100.000.000,00	
		-						70.000.000,00					Meningkatnya tata Kelola yang baik untuk mendukung Pelaksanaan Tugas Teknis di Kepemudaan dan Olahraga		100.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	-	70.000.000,00						-	100.000.000,00	
	2.19.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						70.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	2 Unit	70.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						229.000.000,00					Meningkatnya tata Kelola yang baik untuk mendukung Pelaksanaan Tugas Teknis di Kepemudaan dan Olahraga		254.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						229.000.000,00					Meningkatnya tata Kelola yang baik untuk mendukung Pelaksanaan Tugas Teknis di Kepemudaan dan Olahraga		254.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	225.000.000,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	4.000.000,00						-	4.500.000,00	
	2.19.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						4.000.000,00							4.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	4.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	4.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						225.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	225.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	250.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						415.000.000,00					Meningkatnya tata Kelola yang baik untuk mendukung Pelaksanaan Tugas Teknis di Kepemudaan dan Olahraga		435.000.000,00	
		-						415.000.000,00					Meningkatnya tata Kelola yang baik untuk mendukung Pelaksanaan Tugas Teknis di Kepemudaan dan Olahraga		435.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	250.000.000,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	-	135.000.000,00						-	140.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	0,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	30.000.000,00						-	30.000.000,00	
	2.19.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						135.000.000,00							140.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	12 Unit	135.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	140.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	10 Unit	0,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	-	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	15.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						250.000.000,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	250.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	250.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	30.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	30.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
179.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**						**938.634.800,00**							**1.181.080.000,00**	
			-	-		-	-	938.634.800,00						-	1.181.080.000,00	
	2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi						780.734.800,00					Tersedianya pemuda yang maju dalam kemandirian dan berkarakter		961.080.000,00	
		-						780.734.800,00					Tersedianya pemuda yang maju dalam kemandirian dan berkarakter		961.080.000,00	
			Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	-		-	-	50.029.800,00						-	82.070.000,00	
			Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	-		-	-	151.566.000,00						-	189.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	-		-	-	167.867.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	-		-	-	256.182.000,00						-	300.000.000,00	
			Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	-		-	-	155.090.000,00						-	189.910.000,00	
	2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi						167.867.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	-		-	15 Orang	167.867.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi						256.182.000,00							300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	-		-	55 Orang	256.182.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	300.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.1.01.0018	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda						155.090.000,00							189.910.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Penghargaan pemuda bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	-		-	10 Orang	155.090.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	189.910.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.1.01.0019	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi						151.566.000,00							189.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	-		-	25 Orang	151.566.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	189.100.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.1.01.0020	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi						50.029.800,00							82.070.000,00	
		Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	-		-	1 Dokumen	50.029.800,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	82.070.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi						157.900.000,00					Tersedianya pemuda yang maju dalam kemandirian dan berkarakter		220.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						157.900.000,00					Tersedianya pemuda yang maju dalam kemandirian dan berkarakter		220.000.000,00	
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	-		-	-	157.900.000,00						-	220.000.000,00	
	2.19.02.1.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi						157.900.000,00							220.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	-		-	30 Organisasi	157.900.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	220.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
180.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**						**10.528.883.087,00**							**9.107.465.783,00**	
			-	-		-	-	10.028.883.087,00						-	9.107.465.783,00	
	2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi						2.681.000.000,00					Terwujudnya Pembangunan dan Prestasi Olahraga		523.100.000,00	
		-						2.681.000.000,00					Terwujudnya Pembangunan dan Prestasi Olahraga		523.100.000,00	
			Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia	-		-	-	1.731.000.000,00						-	73.100.000,00	
			Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	-		-	-	950.000.000,00						-	450.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.19.03.1.01.0006	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi						1.731.000.000,00							73.100.000,00	
		Terlaksananya penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga	Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia	-		-	1 Unit	1.731.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	73.100.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.1.01.0007	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha						950.000.000,00							450.000.000,00	
		Berkembangnya Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	-		-	2 Unit	950.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	450.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga						1.321.429.087,00					Terwujudnya Pembangunan dan Prestasi Olahraga		1.325.182.933,00	
		-						1.321.429.087,00					Terwujudnya Pembangunan dan Prestasi Olahraga		1.325.182.933,00	
			Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	-		-	-	410.617.250,00						-	10.633,00	
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	-		-	-	500.000.000,00						-	525.172.300,00	
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	-		-	-	410.811.837,00						-	800.000.000,00	
	2.19.03.1.02.0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi						410.811.837,00							800.000.000,00	
		Terselenggaranya Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	-		-	1 Kegiatan	410.811.837,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	800.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.1.02.0007	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga						410.617.250,00							10.633,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	-		-	0 Orang	410.617.250,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	10.633,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.1.02.0008	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi						500.000.000,00							525.172.300,00	
		Terselenggaranya Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	-		-	1 Kegiatan	500.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	525.172.300,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional						1.613.462.000,00					Terwujudnya Pembangunan dan Prestasi Olahraga		2.370.182.850,00	
		-						1.613.462.000,00					Terwujudnya Pembangunan dan Prestasi Olahraga		2.370.182.850,00	
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	-		-	-	500.000.000,00						-	500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	-		-	-	100.000.000,00						-	81.290.850,00	
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga	-		-	-	1.013.462.000,00						-	1.788.892.000,00	
	2.19.03.1.03.0011	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi						100.000.000,00							81.290.850,00	
		Tersedianya data Keolahragaan terpadu di provinsi	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	-		-	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	81.290.850,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.1.03.0013	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga						1.013.462.000,00							1.788.892.000,00	
		Terlaksananya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	-		-	14 Orang	1.013.462.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	1.788.892.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.19.03.1.03.0014	Seleksi Atlet Daerah						500.000.000,00							500.000.000,00	
		Terselenggaranya Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	-		-	20 Orang	500.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	500.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga						4.912.992.000,00					Terwujudnya Pembangunan dan Prestasi Olahraga		4.889.000.000,00	
		-						4.912.992.000,00					Terwujudnya Pembangunan dan Prestasi Olahraga		4.889.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	-		-	-	4.712.992.000,00						-	4.845.000.000,00	
			Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	-		-	-	200.000.000,00						-	44.000.000,00	
	2.19.03.1.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait						4.712.992.000,00							4.845.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	-		-	4 Dokumen	4.712.992.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	4.845.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.1.04.0007	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi						200.000.000,00							44.000.000,00	
		Terlaksananya Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	-		-	1 Dokumen	200.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	44.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
181.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**						**779.289.000,00**							**1.013.050.000,00**	
			-	-		-	-	779.289.000,00						-	1.013.050.000,00	
	2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan						779.289.000,00					Tersedianya pemuda yang maju dalam kemandirian dan berkarakter		1.013.050.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						779.289.000,00					Tersedianya pemuda yang maju dalam kemandirian dan berkarakter		1.013.050.000,00	
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	-		-	-	779.289.000,00						-	1.013.050.000,00	
	2.19.04.1.01.0010	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi						779.289.000,00							1.013.050.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	-		-	1 Organisasi	779.289.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	1.013.050.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	X							**115.000.000,00**							**147.500.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**115.000.000,00**							**147.500.000,00**	
182.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**115.000.000,00**							**147.500.000,00**	
			-	-		-	-	95.000.000,00						-	147.500.000,00	
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						115.000.000,00					MeninMeningkatnya tata Kelola yang baik untuk mendukung Pelaksanaan Tugas Teknis di Kepemudaan dan Olahragagkatnya tata Kelola yang baik untuk mendukung Pelaksanaan Tugas Teknis di Kepemudaan dan Olahraga		147.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						115.000.000,00					MeninMeningkatnya tata Kelola yang baik untuk mendukung Pelaksanaan Tugas Teknis di Kepemudaan dan Olahragagkatnya tata Kelola yang baik untuk mendukung Pelaksanaan Tugas Teknis di Kepemudaan dan Olahraga		147.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-		-	-	20.000.000,00						-	45.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	75.000.000,00						-	75.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	20.000.000,00						-	27.500.000,00	
	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						75.000.000,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	75.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	75.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						20.000.000,00							27.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	20.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	27.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	X.XX.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						20.000.000,00							45.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-		-	1 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Amantelu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-		-	45.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						**8.542.870.518,84**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**8.542.870.518,84**							**0,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**8.377.870.518,84**							**0,00**	
183.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**8.012.870.518,84**							**0,00**	
			-	-		-	-	7.962.870.518,84						-	0,00	
	2.23.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						91.387.000,00					OPD		0,00	
		-						91.387.000,00					OPD		0,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	14.009.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	17.378.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	25.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	35.000.000,00						-	0,00	
	2.23.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						17.378.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	2 Dokumen	17.378.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						14.009.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	2 Dokumen	14.009.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						25.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	4 Laporan	25.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						35.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	4 Laporan	35.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.360.083.210,84					OPD		0,00	
		-						6.360.083.210,84					OPD		0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	39.999.800,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	6.320.083.410,84						-	0,00	
	2.23.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						6.320.083.410,84							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	59 Orang/ Bulan	6.320.083.410,84	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						39.999.800,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	6 Laporan	39.999.800,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						10.000.000,00					OPD		0,00	
		-						10.000.000,00					OPD		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	10.000.000,00						-	0,00	
	2.23.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	4 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						20.000.000,00					OPD		0,00	
		-						20.000.000,00					OPD		0,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	20.000.000,00						-	0,00	
	2.23.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						20.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	1 Paket	20.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						343.653.376,00					OPD		0,00	
		-						343.653.376,00					OPD		0,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	-	20.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	49.990.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	163.663.376,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	30.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	30.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	50.000.000,00						-	0,00	
	2.23.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						30.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	30.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						50.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	2 Paket	50.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						30.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	30.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						49.990.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	4 Laporan	49.990.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						163.663.376,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	17 Laporan	163.663.376,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						20.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	200 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						250.000.000,00					OPD		0,00	
		-						250.000.000,00					OPD		0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	250.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.23.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						250.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	6 Unit	250.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						477.746.932,00					OPD		0,00	
		-						477.746.932,00					OPD		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	265.161.732,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	208.584.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	4.001.200,00						-	0,00	
	2.23.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						4.001.200,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	4 Laporan	4.001.200,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						265.161.732,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	3 Laporan	265.161.732,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						208.584.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	208.584.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						460.000.000,00					OPD		0,00	
		-						460.000.000,00					OPD		0,00	
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	150.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	70.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	240.000.000,00						-	0,00	
	2.23.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						70.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	20 Unit	70.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						150.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-		-	10 Unit	150.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						240.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	240.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
184.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**						**265.000.000,00**							**0,00**	
			Persentase Perpustakaan yang dibina sesuai Standar Nasional Perpustakaan	-		-	undefined undefined	95.000.000,00						-	0,00	
			-	-		-	-	150.000.000,00						-	0,00	
	2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi						115.000.000,00					Perpustakaan		0,00	
		-						115.000.000,00					Perpustakaan		0,00	
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	-		-	-	20.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	-		-	-	40.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	-		-	-	35.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	-		-	-	20.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan						35.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus di seluruh wilayah provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	-		-	25 Perpustakaan	35.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka						20.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Provinsi untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	-		-	400 Eksemplar	20.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik						40.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	-		-	1 Perpustakaan	40.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0017	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi						20.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan umum dan khusus sesuai Kewenangan Provinsi dalam Mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	-		-	10 Perpustakaan	20.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi						150.000.000,00					Siswa,Masyarakat		0,00	
		-						150.000.000,00					Siswa,Masyarakat		0,00	
			Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	-		-	-	50.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	-		-	-	100.000.000,00						-	0,00	
	2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat						100.000.000,00							0,00	
		Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	-		-	2 Lokus	100.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	-		-	5 Perpustakaan	50.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
185.	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**						**100.000.000,00**							**0,00**	
			Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dimiliki	-		-	undefined undefined	80.000.000,00						-	0,00	
	2.23.03.1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi						10.000.000,00					Lembaga		0,00	
		-						10.000.000,00					Lembaga		0,00	
			Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	-		-	-	10.000.000,00						-	0,00	
	2.23.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penghimpunan dan Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam Serta Peningkatan Kepatuhan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	-		-	24 Eksemplar	10.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.02	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah						20.000.000,00					Kabupaten Kota		0,00	
		-						20.000.000,00					Kabupaten Kota		0,00	
			Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	-		-	-	10.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	-		-	-	10.000.000,00						-	0,00	
	2.23.03.1.02.0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah						10.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penerbitan Katalog Induk Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	-		-	100 Entry	10.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.02.0002	Penerbitan Bibliografi Daerah						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penerbitan Bibliografi Daerah Provinsi	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	-		-	1 Naskah	10.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.03	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi						70.000.000,00					Masyarakat		0,00	
		-						70.000.000,00					Masyarakat		0,00	
			Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	-		-	-	50.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	-		-	-	20.000.000,00						-	0,00	
	2.23.03.1.03.0003	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan						20.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	-		-	30 Eksemplar	20.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.03.0004	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno						50.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	-		-	80 Orang	50.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**165.000.000,00**							**0,00**	
186.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**						**145.000.000,00**							**0,00**	
			Meningkatnya Tata Kelola dan Layanan Arsip	-		-	undefined undefined	35.000.000,00						-	0,00	
			Persentase Perangkat Daerah yang memiliki daftar Arsip Dinamis	-		-	undefined undefined	70.000.000,00						-	0,00	
	2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi						70.000.000,00					OPD		0,00	
		-						70.000.000,00					OPD		0,00	
			Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	-		-	-	40.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	-		-	-	30.000.000,00						-	0,00	
	2.24.02.1.01.0008	Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi						30.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Implementasi Pengelolaan Arsip Dinamis pada ORMAS, ORPOL, OPD/SKPD, BUMD	Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	-		-	12 Instansi	30.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.01.0012	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi						40.000.000,00							0,00	
		Terselenggaranya Pengawasan kearsipan pada OPD provinsi dan BUMD provinsi	Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	-		-	36 Lembaga	40.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi						40.000.000,00					OPD		0,00	
		-						40.000.000,00					OPD		0,00	
			Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	-		-	-	40.000.000,00						-	0,00	
	2.24.02.1.02.0005	Akuisisi Arsip Statis						40.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Akuisisi Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	-		-	150 Arsip	40.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi						35.000.000,00					OPD		0,00	
		-						35.000.000,00					OPD		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	-		-	-	20.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	-		-	-	15.000.000,00						-	0,00	
	2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN						15.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	-		-	100 Pengguna	15.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi						20.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	-		-	4 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
187.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**						**20.000.000,00**							**0,00**	
			Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	-		-	undefined undefined	20.000.000,00						-	0,00	
	2.24.03.1.05	Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang						20.000.000,00					OPD/Masyarakat/ Lembaga		0,00	
		-						20.000.000,00					OPD/Masyarakat/ Lembaga		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	-		-	-	20.000.000,00						-	0,00	
	2.24.03.1.05.0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)						20.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	-		-	3 Arsip	20.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						**59.801.825.162,88**							**62.791.895.416,82**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**59.801.825.162,88**							**62.791.895.416,82**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**59.801.825.162,88**							**62.791.895.416,82**	
188.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**45.179.459.558,88**							**47.484.970.216,82**	
			Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	-		-	100 %	40.372.844.962,88						-	40.670.779.966,82	
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.462.394.000,00					-		2.601.900.000,00	
		-						2.462.394.000,00					-		2.601.900.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	320.068.000,00						-	336.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	-		-	-	100.000.000,00						-	105.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-		-	-	420.000.000,00						-	441.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	16.000.000,00						-	16.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-		-	-	21.000.000,00						-	22.050.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	1.500.000.000,00						-	1.575.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	11.000.000,00						-	11.550.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	11.000.000,00						-	11.550.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	16.000.000,00						-	16.800.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	47.326.000,00						-	66.150.000,00	
	3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.500.000.000,00							1.575.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	3 Dokumen	1.500.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.575.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						16.000.000,00							16.800.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	16.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	16.800.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						11.000.000,00							11.550.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	11.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	11.550.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						16.000.000,00							16.800.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	16.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	16.800.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						11.000.000,00							11.550.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	11.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	11.550.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						47.326.000,00							66.150.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	4 Laporan	47.326.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	66.150.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						420.000.000,00							441.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-		-	1 Data	420.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	441.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						320.068.000,00							336.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	1 Berita Acara	320.068.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	336.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						21.000.000,00							22.050.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-		-	1 Dokumen	21.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	22.050.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0012	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan						100.000.000,00							105.000.000,00	
		Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	-		-	1 Berita Acara	100.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	105.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						30.802.416.158,88					-		32.300.704.966,82	
		-						30.802.416.158,88					-		32.300.704.966,82	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	12.500.000,00						-	13.125.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	30.789.916.158,88						-	32.287.579.966,82	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						30.789.916.158,88							32.287.579.966,82	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	259 Orang/ Bulan	30.789.916.158,88	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	32.287.579.966,82	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						12.500.000,00							13.125.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	12.500.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	13.125.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						111.757.100,00					-		112.350.000,00	
		-						111.757.100,00					-		112.350.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	87.940.000,00						-	89.250.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	23.817.100,00						-	23.100.000,00	
	3.25.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan PengendalianBarang Milik Daerah pada SKPD						87.940.000,00							89.250.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	1 Laporan	87.940.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	89.250.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						23.817.100,00							23.100.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	1 Laporan	23.817.100,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	23.100.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						370.771.000,00					-		438.753.000,00	
		-						370.771.000,00					-		438.753.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	-	154.149.000,00						-	157.500.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	103.262.000,00						-	142.800.000,00	
	3.25.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai						154.149.000,00							157.500.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	1 Dokumen	154.149.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	157.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						31.386.000,00							31.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	2 Orang	31.386.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	31.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.550.708.560,00					-		2.954.994.000,00	
		-						2.550.708.560,00					-		2.954.994.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	46.000.000,00						-	48.300.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-		-	-	150.000.000,00						-	157.500.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	97.254.000,00						-	110.433.750,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	1.155.161.000,00						-	1.240.837.500,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	208.384.060,00						-	223.860.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	147.111.500,00						-	167.265.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	155.578.600,00						-	115.158.750,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	579.219.400,00						-	876.676.500,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	12.000.000,00						-	14.962.500,00	
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						52.704.000,00							44.100.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	2 Paket	52.704.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	44.100.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						501.551.200,00							792.750.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	501.551.200,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	792.750.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						12.000.000,00							12.600.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	2 Paket	12.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	12.600.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						80.000.000,00							105.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	2 Paket	80.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	105.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						100.000.000,00							105.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	2 Paket	100.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	105.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						46.000.000,00							48.300.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	1 Dokumen	46.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	48.300.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						24.000.000,00							25.200.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	24.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	25.200.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						454.891.000,00							479.850.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	3 Laporan	454.891.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	479.850.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						150.000.000,00							157.500.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-		-	2 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	157.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						1.693.845.040,00					-		1.353.187.500,00	
		-						1.693.845.040,00					-		1.353.187.500,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	82.500.000,00						-	81.375.000,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	400.000.000,00						-	210.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	-	75.000.000,00						-	78.750.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	736.345.040,00						-	563.062.500,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	200.000.000,00						-	210.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	200.000.000,00						-	210.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						50.000.000,00							52.500.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	2 Unit	50.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	52.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						50.000.000,00							52.500.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	1 Paket	50.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	52.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						200.000.000,00							210.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	10 Unit	200.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	210.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						400.000.000,00							210.000.000,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	2 Unit	400.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	210.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						200.000.000,00							210.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	2 Unit	200.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	210.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						200.000.000,00							210.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	200.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	210.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						2.303.506.196,00					-		2.506.743.750,00	
		-						2.303.506.196,00					-		2.506.743.750,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	1.104.966.196,00						-	1.230.258.750,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.186.440.000,00						-	1.260.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	12.100.000,00						-	16.485.000,00	
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						7.500.000,00							7.875.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	2 Laporan	7.500.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	7.875.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						420.000.000,00							441.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	2 Laporan	420.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	441.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.186.440.000,00							1.260.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	1.186.440.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.260.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.884.061.504,00					-		5.216.337.000,00	
		-						4.884.061.504,00					-		5.216.337.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	1.477.241.504,00						-	1.419.363.750,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	2.620.330.000,00						-	2.853.233.250,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	181.490.000,00						-	308.490.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	300.000.000,00						-	315.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	305.000.000,00						-	320.250.000,00	
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						2.000.000.000,00							2.100.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	50 Unit	2.000.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						62.690.000,00							147.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	3 Unit	62.690.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	147.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						1.309.966.504,00							1.260.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	4 Unit	1.309.966.504,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.260.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						300.000.000,00							315.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	2 Unit	300.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	315.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						300.000.000,00							315.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	2 Unit	300.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	315.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
189.	**3.25.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**						**1.180.962.000,00**							**1.260.315.000,00**	
			Luasan Kawasan Konservasi (Ha)	-		-	3318970,89 Ha	705.000.000,00						-	740.250.000,00	
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi						852.490.000,00					-		885.045.000,00	
		-						852.490.000,00					-		885.045.000,00	
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-		-	-	80.950.000,00						-	85.050.000,00	
			Kelompok masyarakat yang meningkat kapasitasnya terkait pengelolaan pengelola Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove diluar kawasan hutan	-		-	-	50.000.000,00						-	52.500.000,00	
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	-		-	-	646.540.000,00						-	668.745.000,00	
			Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	-		-	-	75.000.000,00						-	78.750.000,00	
	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat						500.000.000,00							525.000.000,00	
		Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	-		-	1 Ha	500.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	525.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						75.000.000,00							78.750.000,00	
		Terehabilitasinya Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	-		-	1 Ha	75.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	78.750.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						75.000.000,00							78.750.000,00	
		Terlaksananya Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-		-	90 Orang	75.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	78.750.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0010	Peningkatan kapasitas masyarakat pengelola ekosistem blue carbon						50.000.000,00							52.500.000,00	
		Meningkatnya kapasitas masyarakat pengelola Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove diluar kawasan hutan	Kelompok masyarakat yang meningkat kapasitasnya terkait pengelolaan pengelola Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove diluar kawasan hutan	-		-	5 Kelompok Masyarakat	50.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	52.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi						50.900.000,00					-		63.000.000,00	
		-						50.900.000,00					-		63.000.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan	-		-	-	50.900.000,00						-	63.000.000,00	
	3.25.02.1.02.0004	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir						50.000.000,00							52.500.000,00	
		Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan	-		-	10 Rekomendasi	50.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	52.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						277.572.000,00					-		312.270.000,00	
		-						277.572.000,00					-		312.270.000,00	
			Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	93.550.000,00						-	101.850.000,00	
			Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-		-	-	43.800.000,00						-	45.990.000,00	
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	-		-	-	131.742.000,00						-	130.830.000,00	
	3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						75.000.000,00							78.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	-		-	200 Orang	75.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	78.750.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						20.000.000,00							21.000.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-		-	5 Kelompok	20.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	21.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan						60.000.000,00							63.000.000,00	
		Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-		-	3 Kelompok	60.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	63.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
190.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**						**14.357.269.600,00**							**15.071.910.000,00**	
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	-		-	268.638,25 Ton	13.744.980.000,00						-	14.432.250.000,00	
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil						8.397.350.000,00					-		8.810.235.000,00	
		-						8.397.350.000,00					-		8.810.235.000,00	
			Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-		-	-	172.370.000,00						-	173.985.000,00	
			Jumlah prasarana pendukung yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	-		-	-	200.000.000,00						-	210.000.000,00	
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-		-	-	7.999.980.000,00						-	8.400.000.000,00	
	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan						25.000.000,00							26.250.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-		-	1 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	26.250.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap						7.999.980.000,00							8.400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-		-	38 Unit	7.999.980.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	8.400.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0005	Pengadaan prasarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur						200.000.000,00							210.000.000,00	
		Tersedianya prasarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Jumlah prasarana pendukung yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	-		-	8 Unit	200.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	210.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi						5.807.239.600,00					-		6.090.000.000,00	
		-						5.807.239.600,00					-		6.090.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	-		-	-	5.500.000.000,00						-	5.775.000.000,00	
	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan						5.500.000.000,00							5.775.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	-		-	1 Unit	5.500.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.775.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT						90.450.000,00					-		99.750.000,00	
		-						90.450.000,00					-		99.750.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	-		-	-	88.800.000,00						-	92.400.000,00	
	3.25.03.1.09.0003	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)						20.000.000,00							21.000.000,00	
		Diterbitkannya Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	-		-	10 Rekomendasi	20.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	21.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
191.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**						**2.951.605.000,00**							**3.088.995.000,00**	
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	-		-	129.675 Ton	2.310.342.000,00						-	2.220.750.000,00	
	3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						421.180.000,00					-		453.075.000,00	
		-						421.180.000,00					-		453.075.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	-		-	-	110.800.000,00						-	114.975.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	-		-	-	310.380.000,00						-	338.100.000,00	
	3.25.04.1.01.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan						310.380.000,00							330.750.000,00	
		Diterbitkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	-		-	20 Rekomendasi	310.380.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	330.750.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan						28.000.000,00							29.400.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	-		-	1 Dokumen	28.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	29.400.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.04	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						0,00						-		210.000.000,00	
		-						0,00						-		210.000.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-		-	-	0,00						-	105.000.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudi Daya Ikan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-		-	-	0,00						-	105.000.000,00	
	3.25.04.1.04.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						0,00							105.000.000,00	
		Diterbitkannya Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudi Daya Ikan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudi Daya Ikan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-		-	5 Rekomendasi	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	105.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.04.0002	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						0,00							105.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-		-	5 Rekomendasi	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	105.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut						2.530.425.000,00					-		2.425.920.000,00	
		-						2.530.425.000,00					-		2.425.920.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	80.040.000,00						-	101.850.000,00	
			Jumlah Pembudidaya	-		-	-	260.562.000,00						-	195.720.000,00	
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	-		-	-	1.600.000.000,00						-	1.575.000.000,00	
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	-		-	-	535.323.000,00						-	509.250.000,00	
	3.25.04.1.05.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						22.000.000,00							23.100.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	22.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	23.100.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut						1.600.000.000,00							1.575.000.000,00	
		Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	-		-	25 Unit	1.600.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.575.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut						200.000.000,00							157.500.000,00	
		Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	-		-	10 Unit	200.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	157.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi						149.962.000,00							105.000.000,00	
		Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	-		-	100 Orang	149.962.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	105.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
192.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**1.340.410.800,00**							**1.348.614.750,00**	
			Tingkat kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturaan perundang-undangan	-		-	47,25 %	644.000.000,00						-	581.700.000,00	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil						1.230.252.800,00					-		1.258.839.750,00	
		-						1.230.252.800,00					-		1.258.839.750,00	
			Jumlah Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan	-		-	-	5.825.000,00						-	10.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	-		-	-	93.977.000,00						-	126.000.000,00	
			Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang diadakan	-		-	-	160.000.000,00						-	168.000.000,00	
			Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat	-		-	-	160.000.000,00						-	168.000.000,00	
			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	-		-	-	246.428.800,00						-	213.564.750,00	
			Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	-		-	-	27.490.000,00						-	28.350.000,00	
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	-		-	-	262.403.000,00						-	271.950.000,00	
			Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	-		-	-	9.320.000,00						-	10.500.000,00	
			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	-		-	-	211.409.000,00						-	156.975.000,00	
			Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibangun	-		-	-	30.000.000,00						-	89.250.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	-		-	-	23.400.000,00						-	15.750.000,00	
	3.25.05.1.01.0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi						9.320.000,00							10.500.000,00	
		Perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	-		-	2 Perkara	9.320.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan						23.400.000,00							15.750.000,00	
		Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	-		-	20 Orang	23.400.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	15.750.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan						93.977.000,00							126.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	-		-	20 Hari Operasi	93.977.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	126.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0011	Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan						160.000.000,00							168.000.000,00	
		Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat	Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat	-		-	2 Unit	160.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	168.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0012	Pengadaan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan						160.000.000,00							168.000.000,00	
		Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang diadakan	Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang diadakan	-		-	1 Unit	160.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	168.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi						17.490.000,00							17.850.000,00	
		Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	-		-	3 Pelaku Usaha	17.490.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	17.850.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi						88.547.000,00							84.000.000,00	
		Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	-		-	10 Pelaku Usaha	88.547.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	84.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0015	Pembangunan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan						30.000.000,00							89.250.000,00	
		Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibangun	Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibangun	-		-	1 Unit	30.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	89.250.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi						82.282.000,00							84.000.000,00	
		Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	-		-	10 Pelaku Usaha	82.282.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	84.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)						91.911.000,00							47.250.000,00	
		Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	-		-	5 Kelompok Masyarakat	91.911.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	47.250.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0018	Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Daerah						5.825.000,00							10.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan	Jumlah Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan	-		-	1 Forum	5.825.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						110.158.000,00					-		89.775.000,00	
		-						110.158.000,00					-		89.775.000,00	
			Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	-		-	-	102.158.000,00						-	81.375.000,00	
	3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi						41.248.000,00							23.100.000,00	
		Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	-		-	10 Pelaku Usaha	41.248.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	23.100.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
193.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**						**542.098.200,00**							**565.665.450,00**	
			Angka Konsumsi Ikan	-		-	41,48 Angka	367.658.200,00						-	369.315.450,00	
	3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						123.739.000,00					-		138.840.450,00	
		-						123.739.000,00					-		138.840.450,00	
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	-		-	-	123.739.000,00						-	131.490.450,00	
	3.25.06.1.01.0004	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						26.729.000,00							28.065.450,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	-		-	1 Dokumen	26.729.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	28.065.450,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar						293.359.200,00					-		295.575.000,00	
		-						293.359.200,00					-		295.575.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	-		-	-	284.359.200,00						-	287.175.000,00	
	3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing						215.929.200,00							210.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	-		-	1 Kegiatan	215.929.200,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	210.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						125.000.000,00					-		131.250.000,00	
		-						125.000.000,00					-		131.250.000,00	
			Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi	-		-	-	50.000.000,00						-	52.500.000,00	
			Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan yang terkoneksi dari hulu sampai hilir	-		-	-	75.000.000,00						-	78.750.000,00	
	3.25.06.1.03.0002	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						50.000.000,00							52.500.000,00	
		Diberikannya Insentif dan Fasilitasi bagi Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi	-		-	5 Unit Usaha	50.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	52.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.03.0005	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dari hulu sampai hilir						75.000.000,00							78.750.000,00	
		Terkoneksinya Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dari hulu sampai hilir	Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan yang terkoneksi dari hulu sampai hilir	-		-	1 Sistem Informasi	75.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	78.750.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		BALAI BUDIDAYA IKAN PANTAI MASIKA JAYA						**450.000.000,00**							**472.500.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**450.000.000,00**							**472.500.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**450.000.000,00**							**472.500.000,00**	
194.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**45.179.459.558,88**							**47.484.970.216,82**	
			Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	-		-	100 %	303.000.000,00						-	262.500.000,00	
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						370.771.000,00					-		438.753.000,00	
		-						370.771.000,00					-		438.753.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	113.360.000,00						-	138.453.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	103.262.000,00						-	142.800.000,00	
	3.25.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						9.000.000,00							9.450.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	1 Paket	9.000.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Seram Bagian Barat || Kecamatan Huamual Belakang || Desa Waesala || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	9.450.000,00	BALAI BUDIDAYA IKAN PANTAI MASIKA JAYA
	3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						16.890.000,00							21.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	2 Orang	16.890.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Seram Bagian Barat || Kecamatan Huamual Belakang || Desa Waesala || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	21.000.000,00	BALAI BUDIDAYA IKAN PANTAI MASIKA JAYA
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.550.708.560,00					-		2.954.994.000,00	
		-						2.550.708.560,00					-		2.954.994.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	97.254.000,00						-	110.433.750,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	1.155.161.000,00						-	1.240.837.500,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	208.384.060,00						-	223.860.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	147.111.500,00						-	167.265.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	155.578.600,00						-	115.158.750,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	579.219.400,00						-	876.676.500,00	
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.111.000,00							1.050.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	5.111.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Seram Bagian Barat || Kecamatan Huamual Belakang || Desa Waesala || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.050.000,00	BALAI BUDIDAYA IKAN PANTAI MASIKA JAYA
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						1.991.000,00							1.050.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	1.991.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Seram Bagian Barat || Kecamatan Huamual Belakang || Desa Waesala || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.050.000,00	BALAI BUDIDAYA IKAN PANTAI MASIKA JAYA
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						3.100.000,00							2.625.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	3.100.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Seram Bagian Barat || Kecamatan Huamual Belakang || Desa Waesala || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.625.000,00	BALAI BUDIDAYA IKAN PANTAI MASIKA JAYA
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.000.000,00							2.100.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.000.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Seram Bagian Barat || Kecamatan Huamual Belakang || Desa Waesala || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.100.000,00	BALAI BUDIDAYA IKAN PANTAI MASIKA JAYA
	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						2.065.000,00							2.100.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	2.065.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Seram Bagian Barat || Kecamatan Huamual Belakang || Desa Waesala || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.100.000,00	BALAI BUDIDAYA IKAN PANTAI MASIKA JAYA
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						45.283.000,00							21.525.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	45.283.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Seram Bagian Barat || Kecamatan Huamual Belakang || Desa Waesala || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	21.525.000,00	BALAI BUDIDAYA IKAN PANTAI MASIKA JAYA
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						1.693.845.040,00					-		1.353.187.500,00	
		-						1.693.845.040,00					-		1.353.187.500,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	736.345.040,00						-	563.062.500,00	
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						49.960.000,00							52.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	5 Unit	49.960.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Seram Bagian Barat || Kecamatan Huamual Belakang || Desa Waesala || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	52.500.000,00	BALAI BUDIDAYA IKAN PANTAI MASIKA JAYA
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						2.303.506.196,00					-		2.506.743.750,00	
		-						2.303.506.196,00					-		2.506.743.750,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	1.104.966.196,00						-	1.230.258.750,00	
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						72.600.000,00							105.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	72.600.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Seram Bagian Barat || Kecamatan Huamual Belakang || Desa Waesala || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	105.000.000,00	BALAI BUDIDAYA IKAN PANTAI MASIKA JAYA
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.884.061.504,00					-		5.216.337.000,00	
		-						4.884.061.504,00					-		5.216.337.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	1.477.241.504,00						-	1.419.363.750,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	2.620.330.000,00						-	2.853.233.250,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	181.490.000,00						-	308.490.000,00	
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						30.000.000,00							31.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	1 Unit	30.000.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Seram Bagian Barat || Kecamatan Huamual Belakang || Desa Waesala || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	31.500.000,00	BALAI BUDIDAYA IKAN PANTAI MASIKA JAYA
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00							52.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	2 Unit	50.000.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Seram Bagian Barat || Kecamatan Huamual Belakang || Desa Waesala || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	52.500.000,00	BALAI BUDIDAYA IKAN PANTAI MASIKA JAYA
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						15.000.000,00							15.750.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	2 Unit	15.000.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Seram Bagian Barat || Kecamatan Huamual Belakang || Desa Waesala || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	15.750.000,00	BALAI BUDIDAYA IKAN PANTAI MASIKA JAYA
195.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**						**2.951.605.000,00**							**3.088.995.000,00**	
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	-		-	129.675 Ton	141.000.000,00						-	148.050.000,00	
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut						2.530.425.000,00					-		2.425.920.000,00	
		-						2.530.425.000,00					-		2.425.920.000,00	
			Jumlah Pembudidaya	-		-	-	260.562.000,00						-	195.720.000,00	
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	-		-	-	535.323.000,00						-	509.250.000,00	
			Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	-		-	-	54.500.000,00						-	44.100.000,00	
	3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut						135.000.000,00							141.750.000,00	
		Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	-		-	12 Unit	135.000.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Seram Bagian Barat || Kecamatan Huamual Belakang || Desa Waesala || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	141.750.000,00	BALAI BUDIDAYA IKAN PANTAI MASIKA JAYA
	3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi						6.000.000,00							6.300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	-		-	10 Orang	6.000.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Seram Bagian Barat || Kecamatan Huamual Belakang || Desa Waesala || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	6.300.000,00	BALAI BUDIDAYA IKAN PANTAI MASIKA JAYA
	3.25.04.1.05.0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						6.000.000,00							6.300.000,00	
		Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan dan Ikan	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	-		-	10 Unit	6.000.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Seram Bagian Barat || Kecamatan Huamual Belakang || Desa Waesala || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	6.300.000,00	BALAI BUDIDAYA IKAN PANTAI MASIKA JAYA
		BALAI BUDIDAYA LAUT TUAL						**550.000.000,00**							**577.500.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**550.000.000,00**							**577.500.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**550.000.000,00**							**577.500.000,00**	
196.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**45.179.459.558,88**							**47.484.970.216,82**	
			Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	-		-	100 %	344.284.000,00						-	354.900.000,00	
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						370.771.000,00					-		438.753.000,00	
		-						370.771.000,00					-		438.753.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	113.360.000,00						-	138.453.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	103.262.000,00						-	142.800.000,00	
	3.25.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						0,00							9.450.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	1 Paket	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	9.450.000,00	BALAI BUDIDAYA LAUT TUAL
	3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						29.000.000,00							21.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	2 Orang	29.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	21.000.000,00	BALAI BUDIDAYA LAUT TUAL
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.550.708.560,00					-		2.954.994.000,00	
		-						2.550.708.560,00					-		2.954.994.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	97.254.000,00						-	110.433.750,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	1.155.161.000,00						-	1.240.837.500,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	208.384.060,00						-	223.860.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	147.111.500,00						-	167.265.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	155.578.600,00						-	115.158.750,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	579.219.400,00						-	876.676.500,00	
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						16.000.000,00							16.800.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	16.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	16.800.000,00	BALAI BUDIDAYA LAUT TUAL
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.000.000,00							5.250.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	5.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.250.000,00	BALAI BUDIDAYA LAUT TUAL
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						8.500.000,00							8.925.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	8.500.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	8.925.000,00	BALAI BUDIDAYA LAUT TUAL
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.000.000,00							2.100.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.100.000,00	BALAI BUDIDAYA LAUT TUAL
	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						5.000.000,00							5.250.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.250.000,00	BALAI BUDIDAYA LAUT TUAL
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						86.284.000,00							84.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	86.284.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	84.000.000,00	BALAI BUDIDAYA LAUT TUAL
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						1.693.845.040,00					-		1.353.187.500,00	
		-						1.693.845.040,00					-		1.353.187.500,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	82.500.000,00						-	81.375.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	736.345.040,00						-	563.062.500,00	
	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						10.000.000,00							10.500.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.500.000,00	BALAI BUDIDAYA LAUT TUAL
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15.000.000,00							15.750.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	15.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	15.750.000,00	BALAI BUDIDAYA LAUT TUAL
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						2.303.506.196,00					-		2.506.743.750,00	
		-						2.303.506.196,00					-		2.506.743.750,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	1.104.966.196,00						-	1.230.258.750,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	12.100.000,00						-	16.485.000,00	
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.000.000,00							1.050.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.050.000,00	BALAI BUDIDAYA LAUT TUAL
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						140.000.000,00							147.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	140.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	147.000.000,00	BALAI BUDIDAYA LAUT TUAL
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.884.061.504,00					-		5.216.337.000,00	
		-						4.884.061.504,00					-		5.216.337.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	1.477.241.504,00						-	1.419.363.750,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	2.620.330.000,00						-	2.853.233.250,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	181.490.000,00						-	308.490.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	305.000.000,00						-	320.250.000,00	
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						31.500.000,00							33.075.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	4 Unit	31.500.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	33.075.000,00	BALAI BUDIDAYA LAUT TUAL
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.000.000,00							10.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.500.000,00	BALAI BUDIDAYA LAUT TUAL
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						10.000.000,00							10.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.500.000,00	BALAI BUDIDAYA LAUT TUAL
	3.25.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						5.000.000,00							5.250.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	5.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.250.000,00	BALAI BUDIDAYA LAUT TUAL
197.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**						**2.951.605.000,00**							**3.088.995.000,00**	
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	-		-	129.675 Ton	175.716.000,00						-	191.100.000,00	
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut						2.530.425.000,00					-		2.425.920.000,00	
		-						2.530.425.000,00					-		2.425.920.000,00	
			Jumlah Pembudidaya	-		-	-	260.562.000,00						-	195.720.000,00	
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	-		-	-	535.323.000,00						-	509.250.000,00	
			Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	-		-	-	54.500.000,00						-	44.100.000,00	
	3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut						123.716.000,00							136.500.000,00	
		Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	-		-	1 Unit	123.716.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	136.500.000,00	BALAI BUDIDAYA LAUT TUAL
	3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi						40.000.000,00							42.000.000,00	
		Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	-		-	20 Orang	40.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	42.000.000,00	BALAI BUDIDAYA LAUT TUAL
	3.25.04.1.05.0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						12.000.000,00							12.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan dan Ikan	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	-		-	1 Unit	12.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	12.600.000,00	BALAI BUDIDAYA LAUT TUAL
		BALAI BUDIDAYA LAUT DOBO						**400.000.000,00**							**420.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**400.000.000,00**							**420.000.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**400.000.000,00**							**420.000.000,00**	
198.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**45.179.459.558,88**							**47.484.970.216,82**	
			Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	-		-	100 %	254.873.000,00						-	233.100.000,00	
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						370.771.000,00					-		438.753.000,00	
		-						370.771.000,00					-		438.753.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	113.360.000,00						-	138.453.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	103.262.000,00						-	142.800.000,00	
	3.25.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						14.000.000,00							9.450.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	1 Paket	14.000.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Kepulauan Aru || Kecamatan Pulau-Pulau Aru || Desa Durjela || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	9.450.000,00	BALAI BUDIDAYA LAUT DOBO
	3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							21.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	2 Orang	0,00	Provinsi Maluku || Kab. Kepulauan Aru || Kecamatan Pulau-Pulau Aru || Desa Durjela || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	21.000.000,00	BALAI BUDIDAYA LAUT DOBO
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.550.708.560,00					-		2.954.994.000,00	
		-						2.550.708.560,00					-		2.954.994.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	97.254.000,00						-	110.433.750,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	1.155.161.000,00						-	1.240.837.500,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	208.384.060,00						-	223.860.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	147.111.500,00						-	167.265.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	155.578.600,00						-	115.158.750,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	579.219.400,00						-	876.676.500,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	12.000.000,00						-	14.962.500,00	
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.500.000,00							5.250.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	3.500.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Kepulauan Aru || Kecamatan Pulau-Pulau Aru || Desa Durjela || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.250.000,00	BALAI BUDIDAYA LAUT DOBO
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						4.728.500,00							5.250.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	4.728.500,00	Provinsi Maluku || Kab. Kepulauan Aru || Kecamatan Pulau-Pulau Aru || Desa Durjela || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.250.000,00	BALAI BUDIDAYA LAUT DOBO
	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						0,00							2.362.500,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	0,00	Provinsi Maluku || Kab. Kepulauan Aru || Kecamatan Pulau-Pulau Aru || Desa Durjela || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.362.500,00	BALAI BUDIDAYA LAUT DOBO
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						11.013.500,00							5.250.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	3 Paket	11.013.500,00	Provinsi Maluku || Kab. Kepulauan Aru || Kecamatan Pulau-Pulau Aru || Desa Durjela || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.250.000,00	BALAI BUDIDAYA LAUT DOBO
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4.000.000,00							4.200.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	2 Paket	4.000.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Kepulauan Aru || Kecamatan Pulau-Pulau Aru || Desa Durjela || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	4.200.000,00	BALAI BUDIDAYA LAUT DOBO
	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						5.670.000,00							4.200.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	2 Laporan	5.670.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Kepulauan Aru || Kecamatan Pulau-Pulau Aru || Desa Durjela || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	4.200.000,00	BALAI BUDIDAYA LAUT DOBO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						44.656.000,00							68.250.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	44.656.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Benteng || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	68.250.000,00	BALAI BUDIDAYA LAUT DOBO
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						1.693.845.040,00					-		1.353.187.500,00	
		-						1.693.845.040,00					-		1.353.187.500,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	736.345.040,00						-	563.062.500,00	
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						37.000.000,00							15.750.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	2 Unit	37.000.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Kepulauan Aru || Kecamatan Pulau-Pulau Aru || Desa Durjela || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	15.750.000,00	BALAI BUDIDAYA LAUT DOBO
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						2.303.506.196,00					-		2.506.743.750,00	
		-						2.303.506.196,00					-		2.506.743.750,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	1.104.966.196,00						-	1.230.258.750,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	12.100.000,00						-	16.485.000,00	
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00							2.625.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	0,00	Provinsi Maluku || Kab. Kepulauan Aru || Kecamatan Pulau-Pulau Aru || Desa Durjela || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.625.000,00	BALAI BUDIDAYA LAUT DOBO
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						55.800.000,00							68.250.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	55.800.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Kepulauan Aru || Kecamatan Pulau-Pulau Aru || Desa Durjela || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	68.250.000,00	BALAI BUDIDAYA LAUT DOBO
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.884.061.504,00					-		5.216.337.000,00	
		-						4.884.061.504,00					-		5.216.337.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	1.477.241.504,00						-	1.419.363.750,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	2.620.330.000,00						-	2.853.233.250,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	181.490.000,00						-	308.490.000,00	
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						64.505.000,00							93.712.500,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	2 Unit	64.505.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Kepulauan Aru || Kecamatan Pulau-Pulau Aru || Desa Durjela || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	93.712.500,00	BALAI BUDIDAYA LAUT DOBO
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4.000.000,00							4.200.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	1 Unit	4.000.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Kepulauan Aru || Kecamatan Pulau-Pulau Aru || Desa Durjela || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	4.200.000,00	BALAI BUDIDAYA LAUT DOBO
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						10.000.000,00							10.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Kepulauan Aru || Kecamatan Pulau-Pulau Aru || Desa Durjela || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.500.000,00	BALAI BUDIDAYA LAUT DOBO
199.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**						**2.951.605.000,00**							**3.088.995.000,00**	
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	-		-	129.675 Ton	141.127.000,00						-	99.750.000,00	
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut						2.530.425.000,00					-		2.425.920.000,00	
		-						2.530.425.000,00					-		2.425.920.000,00	
			Jumlah Pembudidaya	-		-	-	260.562.000,00						-	195.720.000,00	
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	-		-	-	535.323.000,00						-	509.250.000,00	
			Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	-		-	-	54.500.000,00						-	44.100.000,00	
	3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut						76.607.000,00							73.500.000,00	
		Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	-		-	1 Unit	76.607.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Kepulauan Aru || Kecamatan Pulau-Pulau Aru || Desa Durjela || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	73.500.000,00	BALAI BUDIDAYA LAUT DOBO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi						31.920.000,00							10.500.000,00	
		Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	-		-	20 Orang	31.920.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.500.000,00	BALAI BUDIDAYA LAUT DOBO
	3.25.04.1.05.0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						32.600.000,00							15.750.000,00	
		Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan dan Ikan	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	-		-	1 Unit	32.600.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	15.750.000,00	BALAI BUDIDAYA LAUT DOBO
		PELABUHAN PERIKANAN PANTAI DOBO						**600.000.000,00**							**630.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**600.000.000,00**							**630.000.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**600.000.000,00**							**630.000.000,00**	
200.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**45.179.459.558,88**							**47.484.970.216,82**	
			Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	-		-	100 %	427.460.400,00						-	425.250.000,00	
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						370.771.000,00					-		438.753.000,00	
		-						370.771.000,00					-		438.753.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	113.360.000,00						-	138.453.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	103.262.000,00						-	142.800.000,00	
	3.25.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						0,00							9.450.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	1 Paket	0,00	Provinsi Maluku || Kab. Kepulauan Aru || Kecamatan Pulau-Pulau Aru || Desa Durjela || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	9.450.000,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI DOBO
	3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							26.250.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	5 Orang	0,00	Provinsi Maluku || Kab. Kepulauan Aru || Kecamatan Pulau-Pulau Aru || Desa Durjela || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	26.250.000,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI DOBO
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.550.708.560,00					-		2.954.994.000,00	
		-						2.550.708.560,00					-		2.954.994.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	97.254.000,00						-	110.433.750,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	1.155.161.000,00						-	1.240.837.500,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	208.384.060,00						-	223.860.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	147.111.500,00						-	167.265.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	155.578.600,00						-	115.158.750,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	579.219.400,00						-	876.676.500,00	
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						47.950.000,00							10.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	47.950.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Kepulauan Aru || Kecamatan Pulau-Pulau Aru || Desa Durjela || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.500.000,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI DOBO
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						7.960.000,00							10.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	7.960.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Kepulauan Aru || Kecamatan Pulau-Pulau Aru || Desa Durjela || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.500.000,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI DOBO
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						22.858.400,00							16.800.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	22.858.400,00	Provinsi Maluku || Kab. Kepulauan Aru || Kecamatan Pulau-Pulau Aru || Desa Durjela || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	16.800.000,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI DOBO
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						7.000.000,00							10.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	7.000.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Kepulauan Aru || Kecamatan Pulau-Pulau Aru || Desa Durjela || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.500.000,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI DOBO
	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						10.044.000,00							10.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	10.044.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Kepulauan Aru || Kecamatan Pulau-Pulau Aru || Desa Durjela || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.500.000,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI DOBO
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						90.203.000,00							126.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	90.203.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Kepulauan Aru || Kecamatan Pulau-Pulau Aru || Desa Durjela || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	126.000.000,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI DOBO
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						1.693.845.040,00					-		1.353.187.500,00	
		-						1.693.845.040,00					-		1.353.187.500,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	736.345.040,00						-	563.062.500,00	
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						95.000.000,00							15.750.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	95.000.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Kepulauan Aru || Kecamatan Pulau-Pulau Aru || Desa Durjela || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	15.750.000,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI DOBO
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						2.303.506.196,00					-		2.506.743.750,00	
		-						2.303.506.196,00					-		2.506.743.750,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	1.104.966.196,00						-	1.230.258.750,00	
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						128.400.000,00							157.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	128.400.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Kepulauan Aru || Kecamatan Pulau-Pulau Aru || Desa Durjela || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	157.500.000,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI DOBO
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.884.061.504,00					-		5.216.337.000,00	
		-						4.884.061.504,00					-		5.216.337.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	2.620.330.000,00						-	2.853.233.250,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	181.490.000,00						-	308.490.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						18.045.000,00							42.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	4 Unit	18.045.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Kepulauan Aru || Kecamatan Pulau-Pulau Aru || Desa Durjela || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	42.000.000,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI DOBO
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							21.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	1 Unit	0,00	Provinsi Maluku || Kab. Kepulauan Aru || Kecamatan Pulau-Pulau Aru || Desa Durjela || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	21.000.000,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI DOBO
201.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**						**14.357.269.600,00**							**15.071.910.000,00**	
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	-		-	268.638,25 Ton	172.539.600,00						-	173.250.000,00	
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil						8.397.350.000,00					-		8.810.235.000,00	
		-						8.397.350.000,00					-		8.810.235.000,00	
			Jumlah data dan informasi yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	-		-	-	25.000.000,00						-	26.250.000,00	
	3.25.03.1.01.0006	Pengolahan data dan informasi terkait dengan penangkapan ikan terukur						15.000.000,00							15.750.000,00	
		Tersedianya data dan informasi terkait dengan penangkapan ikan terukur	Jumlah data dan informasi yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	-		-	1 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Kepulauan Aru || Kecamatan Pulau-Pulau Aru || Desa Durjela || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	15.750.000,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI DOBO
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi						5.807.239.600,00					-		6.090.000.000,00	
		-						5.807.239.600,00					-		6.090.000.000,00	
			Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	-		-	-	307.239.600,00						-	315.000.000,00	
	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan						157.539.600,00							157.500.000,00	
		Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	-		-	1 Layanan	157.539.600,00	Provinsi Maluku || Kab. Kepulauan Aru || Kecamatan Pulau-Pulau Aru || Desa Durjela || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	157.500.000,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI DOBO
		PELABUHAN PERIKANAN PANTAI BANDA						**449.999.996,00**							**472.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**449.999.996,00**							**472.500.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**449.999.996,00**							**472.500.000,00**	
202.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**45.179.459.558,88**							**47.484.970.216,82**	
			Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	-		-	100 %	280.299.996,00						-	286.125.000,00	
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						370.771.000,00					-		438.753.000,00	
		-						370.771.000,00					-		438.753.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	113.360.000,00						-	138.453.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	103.262.000,00						-	142.800.000,00	
	3.25.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						9.450.000,00							9.922.500,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	1 Paket	9.450.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	9.922.500,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI BANDA
	3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						25.986.000,00							22.050.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	2 Orang	25.986.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	22.050.000,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI BANDA
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.550.708.560,00					-		2.954.994.000,00	
		-						2.550.708.560,00					-		2.954.994.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	97.254.000,00						-	110.433.750,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	1.155.161.000,00						-	1.240.837.500,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	208.384.060,00						-	223.860.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	147.111.500,00						-	167.265.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	155.578.600,00						-	115.158.750,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	579.219.400,00						-	876.676.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						8.450.000,00							8.951.250,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	8.450.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	8.951.250,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI BANDA
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						20.000.000,00							21.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	20.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	21.000.000,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI BANDA
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						10.000.000,00							10.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.500.000,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI BANDA
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						7.509.000,00							7.875.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	7.509.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	7.875.000,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI BANDA
	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						6.000.000,00							6.300.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	6.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	6.300.000,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI BANDA
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						62.947.000,00							65.651.250,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	13 Laporan	62.947.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	65.651.250,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI BANDA
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						1.693.845.040,00					-		1.353.187.500,00	
		-						1.693.845.040,00					-		1.353.187.500,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	82.500.000,00						-	81.375.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	736.345.040,00						-	563.062.500,00	
	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						7.500.000,00							7.875.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	1 Paket	7.500.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	7.875.000,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI BANDA
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						30.000.000,00							31.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	3 Dokumen Unit	30.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	31.500.000,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI BANDA
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						2.303.506.196,00					-		2.506.743.750,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						2.303.506.196,00					-		2.506.743.750,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	1.104.966.196,00						-	1.230.258.750,00	
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						39.999.996,00							42.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	39.999.996,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	42.000.000,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI BANDA
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.884.061.504,00					-		5.216.337.000,00	
		-						4.884.061.504,00					-		5.216.337.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	1.477.241.504,00						-	1.419.363.750,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	2.620.330.000,00						-	2.853.233.250,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	181.490.000,00						-	308.490.000,00	
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						39.958.000,00							47.250.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	5 Unit Unit	39.958.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	47.250.000,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI BANDA
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.000.000,00							10.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	5 Unit	10.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.500.000,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI BANDA
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						12.500.000,00							13.125.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	3 Unit	12.500.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	13.125.000,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI BANDA
203.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**						**14.357.269.600,00**							**15.071.910.000,00**	
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	-		-	268.638,25 Ton	159.700.000,00						-	168.000.000,00	
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil						8.397.350.000,00					-		8.810.235.000,00	
		-						8.397.350.000,00					-		8.810.235.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah data dan informasi yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	-		-	-	25.000.000,00						-	26.250.000,00	
	3.25.03.1.01.0006	Pengolahan data dan informasi terkait dengan penangkapan ikan terukur						10.000.000,00							10.500.000,00	
		Tersedianya data dan informasi terkait dengan penangkapan ikan terukur	Jumlah data dan informasi yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.500.000,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI BANDA
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi						5.807.239.600,00					-		6.090.000.000,00	
		-						5.807.239.600,00					-		6.090.000.000,00	
			Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	-		-	-	307.239.600,00						-	315.000.000,00	
	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan						149.700.000,00							157.500.000,00	
		Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	-		-	1 Layanan	149.700.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	157.500.000,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI BANDA
		CABANG DINAS GUGUS PULAU I						**300.000.000,00**							**315.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**300.000.000,00**							**315.000.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**300.000.000,00**							**315.000.000,00**	
204.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**45.179.459.558,88**							**47.484.970.216,82**	
			Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	-		-	100 %	132.770.000,00						-	144.270.000,00	
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						370.771.000,00					-		438.753.000,00	
		-						370.771.000,00					-		438.753.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	113.360.000,00						-	138.453.000,00	
	3.25.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						6.275.000,00							6.588.750,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	1 Paket	6.275.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Buru || Kecamatan Namlea || Desa Namlea || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	6.588.750,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU I
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.550.708.560,00					-		2.954.994.000,00	
		-						2.550.708.560,00					-		2.954.994.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	97.254.000,00						-	110.433.750,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	1.155.161.000,00						-	1.240.837.500,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	208.384.060,00						-	223.860.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	147.111.500,00						-	167.265.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	155.578.600,00						-	115.158.750,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	579.219.400,00						-	876.676.500,00	
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.500.000,00							3.675.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	3.500.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Buru || Kecamatan Namlea || Desa Namlea || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	3.675.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU I
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						3.232.000,00							3.675.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	3.232.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Buru || Kecamatan Namlea || Desa Namlea || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	3.675.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU I
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						8.800.000,00							8.400.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	8.800.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Buru || Kecamatan Namlea || Desa Namlea || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	8.400.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU I
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.773.000,00							3.150.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.773.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Buru || Kecamatan Namlea || Desa Namlea || 1 || Provinsi Maluku || Kab. Buru Selatan || Kecamatan Namrole || Desa Labuang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	3.150.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU I
	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						5.740.000,00							6.300.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	5.740.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Buru || Kecamatan Namlea || Desa Namlea || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	6.300.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU I

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						30.750.000,00							32.287.500,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	30.750.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Nusaniwe || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	32.287.500,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU I
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						1.693.845.040,00					-		1.353.187.500,00	
		-						1.693.845.040,00					-		1.353.187.500,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	736.345.040,00						-	563.062.500,00	
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						21.000.000,00							22.050.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	21.000.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Buru || Kecamatan Namlea || Desa Namlea || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	22.050.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU I
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						2.303.506.196,00					-		2.506.743.750,00	
		-						2.303.506.196,00					-		2.506.743.750,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	1.104.966.196,00						-	1.230.258.750,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	12.100.000,00						-	16.485.000,00	
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.800.000,00							2.625.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	1.800.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Buru || Kecamatan Namlea || Desa Namlea || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.625.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU I
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						16.200.000,00							19.293.750,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	16.200.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Buru || Kecamatan Namlea || Desa Namlea || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	19.293.750,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU I
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.884.061.504,00					-		5.216.337.000,00	
		-						4.884.061.504,00					-		5.216.337.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	1.477.241.504,00						-	1.419.363.750,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	2.620.330.000,00						-	2.853.233.250,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	181.490.000,00						-	308.490.000,00	
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						21.700.000,00							34.650.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	1 Unit	21.700.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Buru || Kecamatan Namlea || Desa Namlea || 1 || Provinsi Maluku || Kab. Buru Selatan || Kecamatan Namrole || Desa Elfule || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	34.650.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU I
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.000.000,00							5.250.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	4 Unit	5.000.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Buru || Kecamatan Namlea || Desa Namlea || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.250.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU I
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						6.000.000,00							6.300.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	6.000.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Buru || Kecamatan Namlea || Desa Namlea || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	6.300.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU I
205.	**3.25.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**						**1.180.962.000,00**							**1.260.315.000,00**	
			Luasan Kawasan Konservasi (Ha)	-		-	3318970,89 Ha	22.320.000,00						-	35.280.000,00	
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi						852.490.000,00					-		885.045.000,00	
		-						852.490.000,00					-		885.045.000,00	
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	-		-	-	646.540.000,00						-	668.745.000,00	
	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat						7.440.000,00							15.750.000,00	
		Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	-		-	1 Ha	7.440.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	15.750.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU I

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						277.572.000,00					-		312.270.000,00	
		-						277.572.000,00					-		312.270.000,00	
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	-		-	-	131.742.000,00						-	130.830.000,00	
			Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-		-	-	8.480.000,00						-	33.600.000,00	
	3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						14.880.000,00							6.930.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	-		-	20 Orang	14.880.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	6.930.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU I
	3.25.02.1.03.0003	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						0,00							12.600.000,00	
		Terlibatnya Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-		-	10 Orang	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	12.600.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU I
206.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**						**14.357.269.600,00**							**15.071.910.000,00**	
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	-		-	268.638,25 Ton	36.240.000,00						-	31.500.000,00	
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil						8.397.350.000,00					-		8.810.235.000,00	
		-						8.397.350.000,00					-		8.810.235.000,00	
			Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-		-	-	172.370.000,00						-	173.985.000,00	
	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan						21.360.000,00							19.950.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-		-	1 Dokumen	21.360.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	19.950.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU I
	3.25.03.1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT						90.450.000,00					-		99.750.000,00	
		-						90.450.000,00					-		99.750.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	-		-	-	88.800.000,00						-	92.400.000,00	
	3.25.03.1.09.0003	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)						14.880.000,00							11.550.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Diterbitkannya Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	-		-	1 Rekomendasi	14.880.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	11.550.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU I
207.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**						**2.951.605.000,00**							**3.088.995.000,00**	
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	-		-	129.675 Ton	22.080.000,00						-	11.550.000,00	
	3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						421.180.000,00					-		453.075.000,00	
		-						421.180.000,00					-		453.075.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	-		-	-	110.800.000,00						-	114.975.000,00	
	3.25.04.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan						14.400.000,00							11.550.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	-		-	1 Dokumen	14.400.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	11.550.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU I
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut						2.530.425.000,00					-		2.425.920.000,00	
		-						2.530.425.000,00					-		2.425.920.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	80.040.000,00						-	101.850.000,00	
	3.25.04.1.05.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						7.680.000,00							11.550.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	7.680.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	11.550.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU I
208.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**1.340.410.800,00**							**1.348.614.750,00**	
			Tingkat kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturaan perundang-undangan	-		-	47,25 %	73.310.000,00						-	55.125.000,00	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil						1.230.252.800,00					-		1.258.839.750,00	
		-						1.230.252.800,00					-		1.258.839.750,00	
			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	-		-	-	246.428.800,00						-	213.564.750,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	-		-	-	262.403.000,00						-	271.950.000,00	
			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	-		-	-	211.409.000,00						-	156.975.000,00	
	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi						16.960.000,00							23.625.000,00	
		Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	-		-	5 Pelaku Usaha	16.960.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	23.625.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU I
	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi						22.590.000,00							11.550.000,00	
		Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	-		-	5 Pelaku Usaha	22.590.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	11.550.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU I
	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)						14.400.000,00							14.175.000,00	
		Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	-		-	2 Kelompok Masyarakat	14.400.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	14.175.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU I
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						110.158.000,00					-		89.775.000,00	
		-						110.158.000,00					-		89.775.000,00	
			Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	-		-	-	102.158.000,00						-	81.375.000,00	
	3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi						19.360.000,00							5.775.000,00	
		Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	-		-	5 Pelaku Usaha	19.360.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.775.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU I
209.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**						**542.098.200,00**							**565.665.450,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Angka Konsumsi Ikan	-		-	41,48 Angka	13.280.000,00						-	7.875.000,00	
	3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						123.739.000,00					-		138.840.450,00	
		-						123.739.000,00					-		138.840.450,00	
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	-		-	-	123.739.000,00						-	131.490.450,00	
	3.25.06.1.01.0004	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						6.080.000,00							7.875.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	-		-	1 Dokumen	6.080.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	7.875.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU I
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar						293.359.200,00					-		295.575.000,00	
		-						293.359.200,00					-		295.575.000,00	
			Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	-		-	-	284.359.200,00						-	287.175.000,00	
	3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing						7.200.000,00							7.875.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	-		-	1 Kegiatan	7.200.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	7.875.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU I
		CABANG DINAS GUGUS PULAU II						**300.000.000,00**							**315.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**300.000.000,00**							**315.000.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**300.000.000,00**							**315.000.000,00**	
210.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**45.179.459.558,88**							**47.484.970.216,82**	
			Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	-		-	100 %	144.650.000,00						-	153.200.250,00	
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						370.771.000,00					-		438.753.000,00	
		-						370.771.000,00					-		438.753.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	113.360.000,00						-	138.453.000,00	
	3.25.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						8.400.000,00							8.820.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	1 Paket	8.400.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Seram Bagian Barat || Kecamatan Seram Barat || Desa Piru || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	8.820.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU II
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.550.708.560,00					-		2.954.994.000,00	
		-						2.550.708.560,00					-		2.954.994.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	97.254.000,00						-	110.433.750,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	1.155.161.000,00						-	1.240.837.500,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	208.384.060,00						-	223.860.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	147.111.500,00						-	167.265.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	155.578.600,00						-	115.158.750,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	579.219.400,00						-	876.676.500,00	
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.146.000,00							3.307.500,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	3.146.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Seram Bagian Barat || Kecamatan Seram Barat || Desa Piru || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	3.307.500,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU II

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						2.729.900,00							2.866.500,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.729.900,00	Provinsi Maluku || Kab. Seram Bagian Barat || Kecamatan Seram Barat || Desa Piru || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.866.500,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU II
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						6.364.100,00							6.615.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	6.364.100,00	Provinsi Maluku || Kab. Seram Bagian Barat || Kecamatan Seram Barat || Desa Piru || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	6.615.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU II
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.100.000,00							2.205.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.100.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Seram Bagian Barat || Kecamatan Seram Barat || Desa Piru || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.205.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU II
	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						1.580.000,00							1.653.750,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	1.580.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Seram Bagian Barat || Kecamatan Seram Barat || Desa Piru || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.653.750,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU II
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						25.755.000,00							29.058.750,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	25.755.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Seram Bagian Barat || Kecamatan Seram Barat || Desa Piru || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	29.058.750,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU II
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						1.693.845.040,00					-		1.353.187.500,00	
		-						1.693.845.040,00					-		1.353.187.500,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	736.345.040,00						-	563.062.500,00	
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						30.000.000,00							27.562.500,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	3 Unit	30.000.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Seram Bagian Barat || Kecamatan Seram Barat || Desa Piru || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	27.562.500,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU II
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						2.303.506.196,00					-		2.506.743.750,00	
		-						2.303.506.196,00					-		2.506.743.750,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	1.104.966.196,00						-	1.230.258.750,00	
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						9.900.000,00							11.025.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	9.900.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Seram Bagian Barat || Kecamatan Seram Barat || Desa Piru || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	11.025.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU II
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.884.061.504,00					-		5.216.337.000,00	
		-						4.884.061.504,00					-		5.216.337.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	1.477.241.504,00						-	1.419.363.750,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	2.620.330.000,00						-	2.853.233.250,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	181.490.000,00						-	308.490.000,00	
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						46.800.000,00							51.817.500,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	5 Unit	46.800.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Seram Bagian Barat || Kecamatan Seram Barat || Desa Piru || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	51.817.500,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU II
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.250.000,00							5.512.500,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	1 Unit	5.250.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Seram Bagian Barat || Kecamatan Seram Barat || Desa Piru || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.512.500,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU II
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						2.625.000,00							2.756.250,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	2.625.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Seram Bagian Barat || Kecamatan Seram Barat || Desa Piru || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.756.250,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU II
211.	**3.25.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**						**1.180.962.000,00**							**1.260.315.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Luasan Kawasan Konservasi (Ha)	-		-	3318970,89 Ha	25.850.000,00						-	13.650.000,00	
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi						852.490.000,00					-		885.045.000,00	
		-						852.490.000,00					-		885.045.000,00	
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-		-	-	80.950.000,00						-	85.050.000,00	
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	-		-	-	646.540.000,00						-	668.745.000,00	
	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat						6.000.000,00							6.300.000,00	
		Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	-		-	1 Ha	6.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	6.300.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU II
	3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						5.950.000,00							6.300.000,00	
		Terlaksananya Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-		-	20 Orang	5.950.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	6.300.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU II
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						277.572.000,00					-		312.270.000,00	
		-						277.572.000,00					-		312.270.000,00	
			Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	93.550.000,00						-	101.850.000,00	
			Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-		-	-	43.800.000,00						-	45.990.000,00	
	3.25.02.1.03.0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						7.000.000,00							7.350.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-		-	1 Kelompok	7.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	7.350.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU II
	3.25.02.1.03.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan						6.900.000,00							7.350.000,00	
		Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-		-	2 Kelompok	6.900.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	7.350.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU II
212.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**						**14.357.269.600,00**							**15.071.910.000,00**	
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	-		-	268.638,25 Ton	18.200.000,00						-	18.060.000,00	
			-	-		-	-	14.600.000,00						-	7.350.000,00	
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil						8.397.350.000,00					-		8.810.235.000,00	
		-						8.397.350.000,00					-		8.810.235.000,00	
			Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-		-	-	172.370.000,00						-	173.985.000,00	
	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan						16.550.000,00							10.710.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-		-	1 Dokumen	16.550.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.710.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU II
	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT						49.630.000,00					-		55.125.000,00	
		-						49.630.000,00					-		55.125.000,00	
			Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang tersedia	-		-	-	49.630.000,00						-	47.775.000,00	
			Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	-		-	-	0,00						-	7.350.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil						0,00							7.350.000,00	
		Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	-		-	100 Persentase	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	7.350.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU II
	3.25.03.1.03.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil						14.600.000,00							7.350.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang tersedia	-		-	1 Dokumen	14.600.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	7.350.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU II
	3.25.03.1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT						90.450.000,00					-		99.750.000,00	
		-						90.450.000,00					-		99.750.000,00	
			Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	-		-	-	1.650.000,00						-	7.350.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	-		-	-	88.800.000,00						-	92.400.000,00	
	3.25.03.1.09.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT						1.650.000,00							7.350.000,00	
		Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	-		-	1 Dokumen	1.650.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	7.350.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU II
	3.25.03.1.09.0003	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)						0,00							7.350.000,00	
		Diterbitkannya Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	-		-	1 Rekomendasi	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	7.350.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU II
213.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**						**2.951.605.000,00**							**3.088.995.000,00**	
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	-		-	129.675 Ton	27.950.000,00						-	7.350.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						421.180.000,00					-		453.075.000,00	
		-						421.180.000,00					-		453.075.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	-		-	-	110.800.000,00						-	114.975.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	-		-	-	310.380.000,00						-	338.100.000,00	
	3.25.04.1.01.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan						0,00							7.350.000,00	
		Diterbitkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	-		-	1 Rekomendasi	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	7.350.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU II
	3.25.04.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan						11.350.000,00							7.350.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	-		-	1 Dokumen	11.350.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	7.350.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU II
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut						2.530.425.000,00					-		2.425.920.000,00	
		-						2.530.425.000,00					-		2.425.920.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	80.040.000,00						-	101.850.000,00	
			Jumlah Pembudidaya	-		-	-	260.562.000,00						-	195.720.000,00	
	3.25.04.1.05.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						9.700.000,00							7.350.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	9.700.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	7.350.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU II
	3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi						6.900.000,00							7.350.000,00	
		Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	-		-	20 Orang	6.900.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	7.350.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU II

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
214.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**1.340.410.800,00**							**1.348.614.750,00**	
			Tingkat kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturaan perundang-undangan	-		-	47,25 %	48.850.000,00						-	35.589.750,00	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil						1.230.252.800,00					-		1.258.839.750,00	
		-						1.230.252.800,00					-		1.258.839.750,00	
			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	-		-	-	246.428.800,00						-	213.564.750,00	
			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	-		-	-	211.409.000,00						-	156.975.000,00	
	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi						36.600.000,00							28.239.750,00	
		Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	-		-	5 Pelaku Usaha	36.600.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	28.239.750,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU II
	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)						7.600.000,00							7.350.000,00	
		Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	-		-	2 Kelompok Masyarakat	7.600.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	7.350.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU II
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						110.158.000,00					-		89.775.000,00	
		-						110.158.000,00					-		89.775.000,00	
			Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	-		-	-	102.158.000,00						-	81.375.000,00	
	3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi						4.650.000,00							7.350.000,00	
		Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	-		-	5 Pelaku Usaha	4.650.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	7.350.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU II
215.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**						**542.098.200,00**							**565.665.450,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Angka Konsumsi Ikan	-		-	41,48 Angka	19.900.000,00						-	7.350.000,00	
	3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						123.739.000,00					-		138.840.450,00	
		-						123.739.000,00					-		138.840.450,00	
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	-		-	-	123.739.000,00						-	131.490.450,00	
			Penetapan Persyaratan dan Prosedur Perizinan Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang diterbitkan	-		-	-	0,00						-	7.350.000,00	
	3.25.06.1.01.0004	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						11.500.000,00							7.350.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	-		-	1 Dokumen	11.500.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	7.350.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU II
	3.25.06.1.01.0006	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Menengah dan Besar dengan Penanaman Modal Dalam Negeri						0,00							7.350.000,00	
		Terlaksananya penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Menengah dan Besar dengan Penanaman Modal Dalam Negeri	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Perizinan Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang diterbitkan	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	7.350.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU II
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar						293.359.200,00					-		295.575.000,00	
		-						293.359.200,00					-		295.575.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	-		-	-	284.359.200,00						-	287.175.000,00	
	3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing						8.400.000,00							7.350.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	-		-	1 Kegiatan	8.400.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	7.350.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU II
		CABANG DINAS GUGUS PULAU IV						**299.980.000,00**							**315.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**299.980.000,00**							**315.000.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**299.980.000,00**							**315.000.000,00**	
216.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**45.179.459.558,88**							**47.484.970.216,82**	
			Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	-		-	100 %	165.530.000,00						-	149.887.500,00	
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						370.771.000,00					-		438.753.000,00	
		-						370.771.000,00					-		438.753.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	113.360.000,00						-	138.453.000,00	
	3.25.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						6.000.000,00							6.300.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	1 Paket	6.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	6.300.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU IV
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.550.708.560,00					-		2.954.994.000,00	
		-						2.550.708.560,00					-		2.954.994.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	97.254.000,00						-	110.433.750,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	1.155.161.000,00						-	1.240.837.500,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	208.384.060,00						-	223.860.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	147.111.500,00						-	167.265.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	155.578.600,00						-	115.158.750,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	579.219.400,00						-	876.676.500,00	
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.000.000,00							1.050.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	1.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.050.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU IV
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						2.000.000,00							2.100.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.100.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU IV
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						6.120.000,00							6.300.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	6.120.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	6.300.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU IV
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.200.000,00							2.310.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.200.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.310.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU IV
	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						5.000.000,00							5.250.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.250.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU IV
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						53.460.000,00							38.640.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	53.460.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	38.640.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU IV
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						1.693.845.040,00					-		1.353.187.500,00	
		-						1.693.845.040,00					-		1.353.187.500,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	736.345.040,00						-	563.062.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						17.000.000,00							17.850.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	3 Unit	17.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	17.850.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU IV
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						2.303.506.196,00					-		2.506.743.750,00	
		-						2.303.506.196,00					-		2.506.743.750,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	1.104.966.196,00						-	1.230.258.750,00	
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						10.000.000,00							10.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.500.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU IV
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.884.061.504,00					-		5.216.337.000,00	
		-						4.884.061.504,00					-		5.216.337.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	1.477.241.504,00						-	1.419.363.750,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	2.620.330.000,00						-	2.853.233.250,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	181.490.000,00						-	308.490.000,00	
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						57.500.000,00							60.375.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	4 Unit	57.500.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	60.375.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU IV
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.250.000,00							5.512.500,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	5 Unit	5.250.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.512.500,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU IV
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						5.250.000,00							5.512.500,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	5.250.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.512.500,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU IV
217.	**3.25.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**						**1.180.962.000,00**							**1.260.315.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Luasan Kawasan Konservasi (Ha)	-		-	3318970,89 Ha	35.900.000,00						-	43.575.000,00	
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi						852.490.000,00					-		885.045.000,00	
		-						852.490.000,00					-		885.045.000,00	
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	-		-	-	646.540.000,00						-	668.745.000,00	
	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat						31.100.000,00							38.325.000,00	
		Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	-		-	1 Ha	31.100.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	38.325.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU IV
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						277.572.000,00					-		312.270.000,00	
		-						277.572.000,00					-		312.270.000,00	
			Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	93.550.000,00						-	101.850.000,00	
	3.25.02.1.03.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan						4.800.000,00							5.250.000,00	
		Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-		-	1 Kelompok	4.800.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.250.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU IV
218.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**						**14.357.269.600,00**							**15.071.910.000,00**	
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	-		-	268.638,25 Ton	19.900.000,00						-	23.625.000,00	
			-	-		-	-	4.600.000,00						-	8.400.000,00	
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil						8.397.350.000,00					-		8.810.235.000,00	
		-						8.397.350.000,00					-		8.810.235.000,00	
			Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-		-	-	172.370.000,00						-	173.985.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan						16.700.000,00							18.375.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-		-	1 Dokumen	16.700.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	18.375.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU IV
	3.25.03.1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT						90.450.000,00					-		99.750.000,00	
		-						90.450.000,00					-		99.750.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	-		-	-	88.800.000,00						-	92.400.000,00	
	3.25.03.1.09.0003	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)						3.200.000,00							5.250.000,00	
		Diterbitkannya Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	-		-	1 Rekomendasi	3.200.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.250.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU IV
	3.25.03.1.10	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						12.600.000,00					-		16.800.000,00	
		-						12.600.000,00					-		16.800.000,00	
			Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi Kewenangan Provinsi	-		-	-	12.600.000,00						-	16.800.000,00	
	3.25.03.1.10.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT						4.600.000,00							8.400.000,00	
		Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi Kewenangan Provinsi	-		-	1 Dokumen	4.600.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	8.400.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU IV
219.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**						**2.951.605.000,00**							**3.088.995.000,00**	
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	-		-	129.675 Ton	7.800.000,00						-	13.650.000,00	
	3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						421.180.000,00					-		453.075.000,00	
		-						421.180.000,00					-		453.075.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	-		-	-	110.800.000,00						-	114.975.000,00	
	3.25.04.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan						3.200.000,00							5.250.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	-		-	1 Dokumen	3.200.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.250.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU IV
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut						2.530.425.000,00					-		2.425.920.000,00	
		-						2.530.425.000,00					-		2.425.920.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	80.040.000,00						-	101.850.000,00	
	3.25.04.1.05.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						4.600.000,00							8.400.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	4.600.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	8.400.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU IV
220.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**1.340.410.800,00**							**1.348.614.750,00**	
			Tingkat kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturaan perundang-undangan	-		-	47,25 %	47.000.000,00						-	49.350.000,00	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil						1.230.252.800,00					-		1.258.839.750,00	
		-						1.230.252.800,00					-		1.258.839.750,00	
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	-		-	-	262.403.000,00						-	271.950.000,00	
			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	-		-	-	211.409.000,00						-	156.975.000,00	
	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi						34.000.000,00							35.700.000,00	
		Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	-		-	4 Pelaku Usaha	34.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	35.700.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU IV
	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)						9.000.000,00							9.450.000,00	
		Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	-		-	1 Kelompok Masyarakat	9.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	9.450.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU IV

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						110.158.000,00					-		89.775.000,00	
		-						110.158.000,00					-		89.775.000,00	
			Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	-		-	-	102.158.000,00						-	81.375.000,00	
	3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi						4.000.000,00							4.200.000,00	
		Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	-		-	3 Pelaku Usaha	4.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	4.200.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU IV
221.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**						**542.098.200,00**							**565.665.450,00**	
			Angka Konsumsi Ikan	-		-	41,48 Angka	14.000.000,00						-	14.700.000,00	
	3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						123.739.000,00					-		138.840.450,00	
		-						123.739.000,00					-		138.840.450,00	
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	-		-	-	123.739.000,00						-	131.490.450,00	
	3.25.06.1.01.0004	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						6.000.000,00							6.300.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	-		-	1 Dokumen	6.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	6.300.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU IV
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar						293.359.200,00					-		295.575.000,00	
		-						293.359.200,00					-		295.575.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	-		-	-	284.359.200,00						-	287.175.000,00	
	3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing						8.000.000,00							8.400.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	-		-	1 Kegiatan	8.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	8.400.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU IV
		CABANG DINAS GUGUS PULAU V						**300.000.000,00**							**315.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**300.000.000,00**							**315.000.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**300.000.000,00**							**315.000.000,00**	
222.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**45.179.459.558,88**							**47.484.970.216,82**	
			Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	-		-	100 %	160.622.000,00						-	168.630.000,00	
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						370.771.000,00					-		438.753.000,00	
		-						370.771.000,00					-		438.753.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	113.360.000,00						-	138.453.000,00	
	3.25.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						9.000.000,00							9.450.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	1 Paket	9.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	9.450.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU V
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.550.708.560,00					-		2.954.994.000,00	
		-						2.550.708.560,00					-		2.954.994.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	97.254.000,00						-	110.433.750,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	1.155.161.000,00						-	1.240.837.500,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	208.384.060,00						-	223.860.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	147.111.500,00						-	167.265.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	155.578.600,00						-	115.158.750,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	579.219.400,00						-	876.676.500,00	
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.500.000,00							3.675.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	3.500.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	3.675.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU V
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						6.000.000,00							6.300.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	6.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	6.300.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU V
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						8.522.000,00							8.925.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	8.522.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	8.925.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU V
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.200.000,00							1.260.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	1.200.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.260.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU V
	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						8.020.000,00							8.400.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	8.020.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	8.400.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU V
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						25.980.000,00							27.300.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	25.980.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	27.300.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU V
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						1.693.845.040,00					-		1.353.187.500,00	
		-						1.693.845.040,00					-		1.353.187.500,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	736.345.040,00						-	563.062.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						11.000.000,00							11.550.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	11.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	11.550.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU V
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						2.303.506.196,00					-		2.506.743.750,00	
		-						2.303.506.196,00					-		2.506.743.750,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	1.104.966.196,00						-	1.230.258.750,00	
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						49.000.000,00							51.450.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	49.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	51.450.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU V
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.884.061.504,00					-		5.216.337.000,00	
		-						4.884.061.504,00					-		5.216.337.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	1.477.241.504,00						-	1.419.363.750,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	2.620.330.000,00						-	2.853.233.250,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	181.490.000,00						-	308.490.000,00	
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						29.000.000,00							30.450.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	3 Unit	29.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	30.450.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU V
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4.000.000,00							4.200.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	3 Unit	4.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	4.200.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU V
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						5.400.000,00							5.670.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	5.400.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.670.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU V
223.	**3.25.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**						**1.180.962.000,00**							**1.260.315.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Luasan Kawasan Konservasi (Ha)	-		-	3318970,89 Ha	12.000.000,00						-	12.600.000,00	
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						277.572.000,00					-		312.270.000,00	
		-						277.572.000,00					-		312.270.000,00	
			Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-		-	-	43.800.000,00						-	45.990.000,00	
	3.25.02.1.03.0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						12.000.000,00							12.600.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-		-	2 Kelompok	12.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	12.600.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU V
224.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**						**14.357.269.600,00**							**15.071.910.000,00**	
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	-		-	268.638,25 Ton	12.000.000,00						-	12.600.000,00	
			-	-		-	-	12.000.000,00						-	12.600.000,00	
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil						8.397.350.000,00					-		8.810.235.000,00	
		-						8.397.350.000,00					-		8.810.235.000,00	
			Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-		-	-	172.370.000,00						-	173.985.000,00	
	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan						12.000.000,00							12.600.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-		-	1 Dokumen	12.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	12.600.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU V
	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT						49.630.000,00					-		55.125.000,00	
		-						49.630.000,00					-		55.125.000,00	
			Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang tersedia	-		-	-	49.630.000,00						-	47.775.000,00	
	3.25.03.1.03.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil						12.000.000,00							12.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang tersedia	-		-	1 Dokumen	12.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	12.600.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU V
225.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**						**2.951.605.000,00**							**3.088.995.000,00**	
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	-		-	129.675 Ton	9.400.000,00						-	9.870.000,00	
	3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						421.180.000,00					-		453.075.000,00	
		-						421.180.000,00					-		453.075.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	-		-	-	110.800.000,00						-	114.975.000,00	
	3.25.04.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan						3.000.000,00							3.150.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	-		-	1 Dokumen	3.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	3.150.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU V
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut						2.530.425.000,00					-		2.425.920.000,00	
		-						2.530.425.000,00					-		2.425.920.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	80.040.000,00						-	101.850.000,00	
			Jumlah Pembudidaya	-		-	-	260.562.000,00						-	195.720.000,00	
	3.25.04.1.05.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						3.000.000,00							3.150.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	3.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	3.150.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU V
	3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi						6.400.000,00							6.720.000,00	
		Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	-		-	10 Orang	6.400.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	6.720.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU V
226.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**1.340.410.800,00**							**1.348.614.750,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Tingkat kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturaan perundang-undangan	-		-	47,25 %	78.478.000,00						-	82.425.000,00	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil						1.230.252.800,00					-		1.258.839.750,00	
		-						1.230.252.800,00					-		1.258.839.750,00	
			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	-		-	-	246.428.800,00						-	213.564.750,00	
			Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	-		-	-	27.490.000,00						-	28.350.000,00	
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	-		-	-	262.403.000,00						-	271.950.000,00	
			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	-		-	-	211.409.000,00						-	156.975.000,00	
	3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi						10.000.000,00							10.500.000,00	
		Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	-		-	2 Pelaku Usaha	10.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.500.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU V
	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi						20.000.000,00							21.000.000,00	
		Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	-		-	4 Pelaku Usaha	20.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	21.000.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU V
	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi						24.978.000,00							26.250.000,00	
		Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	-		-	2 Pelaku Usaha	24.978.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	26.250.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU V
	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)						12.000.000,00							12.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	-		-	1 Kelompok Masyarakat	12.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	12.600.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU V
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						110.158.000,00					-		89.775.000,00	
		-						110.158.000,00					-		89.775.000,00	
			Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	-		-	-	102.158.000,00						-	81.375.000,00	
	3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi						11.500.000,00							12.075.000,00	
		Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	-		-	2 Pelaku Usaha	11.500.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	12.075.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU V
227.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**						**542.098.200,00**							**565.665.450,00**	
			Angka Konsumsi Ikan	-		-	41,48 Angka	12.500.000,00						-	13.125.000,00	
	3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						123.739.000,00					-		138.840.450,00	
		-						123.739.000,00					-		138.840.450,00	
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	-		-	-	123.739.000,00						-	131.490.450,00	
	3.25.06.1.01.0004	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						12.500.000,00							13.125.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	-		-	1 Dokumen	12.500.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	13.125.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU V
		CABANG DINAS GUGUS PULAU VI						**300.000.000,00**							**315.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**300.000.000,00**							**315.000.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**300.000.000,00**							**315.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
228.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**45.179.459.558,88**							**47.484.970.216,82**	
			Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	-		-	100 %	156.200.000,00						-	163.800.000,00	
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						370.771.000,00					-		438.753.000,00	
		-						370.771.000,00					-		438.753.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	113.360.000,00						-	138.453.000,00	
	3.25.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						4.500.000,00							6.300.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	1 Paket	4.500.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	6.300.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU VI
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.550.708.560,00					-		2.954.994.000,00	
		-						2.550.708.560,00					-		2.954.994.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	97.254.000,00						-	110.433.750,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	1.155.161.000,00						-	1.240.837.500,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	208.384.060,00						-	223.860.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	147.111.500,00						-	167.265.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	155.578.600,00						-	115.158.750,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	579.219.400,00						-	876.676.500,00	
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						502.600,00							4.725.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	502.600,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	4.725.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU VI
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						2.317.800,00							6.300.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.317.800,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	6.300.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU VI
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						3.674.360,00							10.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	3.674.360,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.500.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU VI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						750.000,00							4.200.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	750.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	4.200.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU VI
	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						750.000,00							7.350.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	750.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	7.350.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU VI
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						27.392.000,00							48.825.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	27.392.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	48.825.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU VI
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						1.693.845.040,00					-		1.353.187.500,00	
		-						1.693.845.040,00					-		1.353.187.500,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	736.345.040,00						-	563.062.500,00	
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						68.085.040,00							21.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	2 Unit	68.085.040,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	21.000.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU VI
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						2.303.506.196,00					-		2.506.743.750,00	
		-						2.303.506.196,00					-		2.506.743.750,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	1.104.966.196,00						-	1.230.258.750,00	
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						13.498.200,00							14.700.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	13.498.200,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	14.700.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU VI
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.884.061.504,00					-		5.216.337.000,00	
		-						4.884.061.504,00					-		5.216.337.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	1.477.241.504,00						-	1.419.363.750,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	2.620.330.000,00						-	2.853.233.250,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	181.490.000,00						-	308.490.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						35.480.000,00							32.025.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	4 Unit	35.480.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	32.025.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU VI
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							10.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	4 Unit	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.500.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU VI
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							14.175.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	14.175.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU VI
229.	**3.25.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**						**1.180.962.000,00**							**1.260.315.000,00**	
			Luasan Kawasan Konservasi (Ha)	-		-	3318970,89 Ha	14.700.000,00						-	10.500.000,00	
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi						852.490.000,00					-		885.045.000,00	
		-						852.490.000,00					-		885.045.000,00	
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	-		-	-	646.540.000,00						-	668.745.000,00	
	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat						14.700.000,00							10.500.000,00	
		Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	-		-	1 Ha	14.700.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.500.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU VI
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						277.572.000,00					-		312.270.000,00	
		-						277.572.000,00					-		312.270.000,00	
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	-		-	-	131.742.000,00						-	130.830.000,00	
	3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						14.700.000,00							10.500.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	-		-	20 Orang	14.700.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.500.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU VI
230.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**						**14.357.269.600,00**							**15.071.910.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	-		-	268.638,25 Ton	14.700.000,00						-	10.500.000,00	
			-	-		-	-	6.750.000,00						-	10.500.000,00	
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil						8.397.350.000,00					-		8.810.235.000,00	
		-						8.397.350.000,00					-		8.810.235.000,00	
			Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-		-	-	172.370.000,00						-	173.985.000,00	
	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan						14.700.000,00							10.500.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-		-	1 Dokumen	14.700.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.500.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU VI
	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT						49.630.000,00					-		55.125.000,00	
		-						49.630.000,00					-		55.125.000,00	
			Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang tersedia	-		-	-	49.630.000,00						-	47.775.000,00	
	3.25.03.1.03.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil						6.750.000,00							10.500.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang tersedia	-		-	1 Dokumen	6.750.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.500.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU VI
	3.25.03.1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT						90.450.000,00					-		99.750.000,00	
		-						90.450.000,00					-		99.750.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	-		-	-	88.800.000,00						-	92.400.000,00	
	3.25.03.1.09.0003	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)						14.700.000,00							10.500.000,00	
		Diterbitkannya Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	-		-	4 Rekomendasi	14.700.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.500.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU VI
231.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**						**2.951.605.000,00**							**3.088.995.000,00**	
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	-		-	129.675 Ton	6.750.000,00						-	10.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						421.180.000,00					-		453.075.000,00	
		-						421.180.000,00					-		453.075.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	-		-	-	110.800.000,00						-	114.975.000,00	
	3.25.04.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan						6.750.000,00							10.500.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	-		-	1 Dokumen	6.750.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.500.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU VI
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut						2.530.425.000,00					-		2.425.920.000,00	
		-						2.530.425.000,00					-		2.425.920.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	80.040.000,00						-	101.850.000,00	
	3.25.04.1.05.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						0,00							10.500.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.500.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU VI
232.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**1.340.410.800,00**							**1.348.614.750,00**	
			Tingkat kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturaan perundang-undangan	-		-	47,25 %	41.350.000,00						-	29.400.000,00	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil						1.230.252.800,00					-		1.258.839.750,00	
		-						1.230.252.800,00					-		1.258.839.750,00	
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	-		-	-	262.403.000,00						-	271.950.000,00	
			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	-		-	-	211.409.000,00						-	156.975.000,00	
	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi						17.200.000,00							18.900.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	-		-	6 Pelaku Usaha	17.200.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	18.900.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU VI
	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)						14.700.000,00							10.500.000,00	
		Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	-		-	4 Kelompok Masyarakat	14.700.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.500.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU VI
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						110.158.000,00					-		89.775.000,00	
		-						110.158.000,00					-		89.775.000,00	
			Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	-		-	-	102.158.000,00						-	81.375.000,00	
	3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi						9.450.000,00							10.500.000,00	
		Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	-		-	4 Pelaku Usaha	9.450.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.500.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU VI
233.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**						**542.098.200,00**							**565.665.450,00**	
			Angka Konsumsi Ikan	-		-	41,48 Angka	14.700.000,00						-	10.500.000,00	
	3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						123.739.000,00					-		138.840.450,00	
		-						123.739.000,00					-		138.840.450,00	
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	-		-	-	123.739.000,00						-	131.490.450,00	
	3.25.06.1.01.0004	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						14.700.000,00							10.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	-		-	1 Dokumen	14.700.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.500.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU VI
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar						293.359.200,00					-		295.575.000,00	
		-						293.359.200,00					-		295.575.000,00	
			Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	-		-	-	284.359.200,00						-	287.175.000,00	
	3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing						14.700.000,00							10.500.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	-		-	1 Kegiatan	14.700.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.500.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU VI
		CABANG DINAS GUGUS PULAU VII						**300.000.000,00**							**315.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**300.000.000,00**							**315.000.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**300.000.000,00**							**315.000.000,00**	
234.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**45.179.459.558,88**							**47.484.970.216,82**	
			Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	-		-	100 %	145.200.000,00						-	147.210.000,00	
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						370.771.000,00					-		438.753.000,00	
		-						370.771.000,00					-		438.753.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	113.360.000,00						-	138.453.000,00	
	3.25.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						5.000.000,00							9.450.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	9.450.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU VII
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.550.708.560,00					-		2.954.994.000,00	
		-						2.550.708.560,00					-		2.954.994.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	97.254.000,00						-	110.433.750,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	1.155.161.000,00						-	1.240.837.500,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	208.384.060,00						-	223.860.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	147.111.500,00						-	167.265.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	155.578.600,00						-	115.158.750,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	579.219.400,00						-	876.676.500,00	
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.200.000,00							1.050.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	1.200.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.050.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU VII
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						2.515.000,00							2.625.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.515.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.625.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU VII
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						2.695.000,00							2.835.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.695.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.835.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU VII
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.000.000,00							5.250.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	1.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.250.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU VII
	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						1.000.000,00							1.050.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.050.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU VII
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						13.400.000,00							5.250.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	13.400.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.250.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU VII
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						1.693.845.040,00					-		1.353.187.500,00	
		-						1.693.845.040,00					-		1.353.187.500,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	736.345.040,00						-	563.062.500,00	
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						39.300.000,00							16.800.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	39.300.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	16.800.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU VII
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						2.303.506.196,00					-		2.506.743.750,00	
		-						2.303.506.196,00					-		2.506.743.750,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	1.104.966.196,00						-	1.230.258.750,00	
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						32.340.000,00							33.600.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	32.340.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	33.600.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU VII
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.884.061.504,00					-		5.216.337.000,00	
		-						4.884.061.504,00					-		5.216.337.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	1.477.241.504,00						-	1.419.363.750,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	2.620.330.000,00						-	2.853.233.250,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	181.490.000,00						-	308.490.000,00	
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						39.750.000,00							67.200.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	3 Unit	39.750.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	67.200.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU VII
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.000.000,00							5.250.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	1 Unit	5.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.250.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU VII
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						8.000.000,00							8.400.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	8.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	8.400.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU VII
235.	**3.25.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**						**1.180.962.000,00**							**1.260.315.000,00**	
			Luasan Kawasan Konservasi (Ha)	-		-	3318970,89 Ha	26.670.000,00						-	27.090.000,00	
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi						852.490.000,00					-		885.045.000,00	
		-						852.490.000,00					-		885.045.000,00	
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	-		-	-	646.540.000,00						-	668.745.000,00	
	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat						21.870.000,00							22.050.000,00	
		Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	-		-	1 Ha	21.870.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	22.050.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU VII
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						277.572.000,00					-		312.270.000,00	
		-						277.572.000,00					-		312.270.000,00	
			Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-		-	-	43.800.000,00						-	45.990.000,00	
	3.25.02.1.03.0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						4.800.000,00							5.040.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-		-	1 Kelompok	4.800.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.040.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU VII
236.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**						**14.357.269.600,00**							**15.071.910.000,00**	
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	-		-	268.638,25 Ton	28.500.000,00						-	29.925.000,00	
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil						8.397.350.000,00					-		8.810.235.000,00	
		-						8.397.350.000,00					-		8.810.235.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-		-	-	172.370.000,00						-	173.985.000,00	
	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan						17.580.000,00							19.425.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-		-	1 Dokumen	17.580.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	19.425.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU VII
	3.25.03.1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT						90.450.000,00					-		99.750.000,00	
		-						90.450.000,00					-		99.750.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	-		-	-	88.800.000,00						-	92.400.000,00	
	3.25.03.1.09.0003	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)						10.920.000,00							10.500.000,00	
		Diterbitkannya Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	-		-	2 Rekomendasi	10.920.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.500.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU VII
237.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**						**2.951.605.000,00**							**3.088.995.000,00**	
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	-		-	129.675 Ton	27.780.000,00						-	19.425.000,00	
	3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						421.180.000,00					-		453.075.000,00	
		-						421.180.000,00					-		453.075.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	-		-	-	110.800.000,00						-	114.975.000,00	
	3.25.04.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan						9.920.000,00							10.500.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	-		-	1 Dokumen	9.920.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.500.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU VII
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut						2.530.425.000,00					-		2.425.920.000,00	
		-						2.530.425.000,00					-		2.425.920.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	80.040.000,00						-	101.850.000,00	
			Jumlah Pembudidaya	-		-	-	260.562.000,00						-	195.720.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.04.1.05.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						6.960.000,00							10.500.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	6.960.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.500.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU VII
	3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi						10.900.000,00							8.925.000,00	
		Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	-		-	5 Orang	10.900.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	8.925.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU VII
238.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**1.340.410.800,00**							**1.348.614.750,00**	
			Tingkat kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturaan perundang-undangan	-		-	47,25 %	42.000.000,00						-	44.100.000,00	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil						1.230.252.800,00					-		1.258.839.750,00	
		-						1.230.252.800,00					-		1.258.839.750,00	
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	-		-	-	262.403.000,00						-	271.950.000,00	
			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	-		-	-	211.409.000,00						-	156.975.000,00	
	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi						19.300.000,00							31.500.000,00	
		Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	-		-	2 Pelaku Usaha	19.300.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	31.500.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU VII
	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)						22.700.000,00							12.600.000,00	
		Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	-		-	1 Kelompok Masyarakat	22.700.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	12.600.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU VII
239.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**						**542.098.200,00**							**565.665.450,00**	
			Angka Konsumsi Ikan	-		-	41,48 Angka	23.850.000,00						-	12.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						123.739.000,00					-		138.840.450,00	
		-						123.739.000,00					-		138.840.450,00	
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	-		-	-	123.739.000,00						-	131.490.450,00	
	3.25.06.1.01.0004	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						11.350.000,00							12.600.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	-		-	1 Dokumen	11.350.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	12.600.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU VII
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar						293.359.200,00					-		295.575.000,00	
		-						293.359.200,00					-		295.575.000,00	
			Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	-		-	-	284.359.200,00						-	287.175.000,00	
	3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing						12.500.000,00							12.600.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	-		-	1 Kegiatan	12.500.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	12.600.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU VII
		CABANG DINAS GUGUS PULAU VIII						**300.000.000,00**							**315.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**300.000.000,00**							**315.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**300.000.000,00**							**315.000.000,00**	
240.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**45.179.459.558,88**							**47.484.970.216,82**	
			Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	-		-	100 %	175.030.000,00						-	185.850.000,00	
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						370.771.000,00					-		438.753.000,00	
		-						370.771.000,00					-		438.753.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	113.360.000,00						-	138.453.000,00	
	3.25.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						9.000.000,00							9.450.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	1 Paket	9.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	9.450.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU VIII
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.550.708.560,00					-		2.954.994.000,00	
		-						2.550.708.560,00					-		2.954.994.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	97.254.000,00						-	110.433.750,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	1.155.161.000,00						-	1.240.837.500,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	208.384.060,00						-	223.860.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	147.111.500,00						-	167.265.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	155.578.600,00						-	115.158.750,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	579.219.400,00						-	876.676.500,00	
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.505.000,00							2.100.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	1.505.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.100.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU VIII
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						3.387.000,00							2.100.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	3.387.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.100.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU VIII
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						5.987.500,00							5.250.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	5.987.500,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.250.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU VIII
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4.026.500,00							3.150.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	4.026.500,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	3.150.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU VIII
	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						1.100.000,00							3.780.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	1.100.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	3.780.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU VIII
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						30.880.000,00							36.750.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	30.880.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	36.750.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU VIII
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						1.693.845.040,00					-		1.353.187.500,00	
		-						1.693.845.040,00					-		1.353.187.500,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	736.345.040,00						-	563.062.500,00	
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00							21.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	20.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	21.000.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU VIII
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						2.303.506.196,00					-		2.506.743.750,00	
		-						2.303.506.196,00					-		2.506.743.750,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	1.104.966.196,00						-	1.230.258.750,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	12.100.000,00						-	16.485.000,00	
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.200.000,00							1.260.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	1.200.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.260.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU VIII
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						24.600.000,00							32.760.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	24.600.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	32.760.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU VIII
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.884.061.504,00					-		5.216.337.000,00	
		-						4.884.061.504,00					-		5.216.337.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	1.477.241.504,00						-	1.419.363.750,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	2.620.330.000,00						-	2.853.233.250,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	181.490.000,00						-	308.490.000,00	
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						64.344.000,00							64.050.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	3 Unit	64.344.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	64.050.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU VIII
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						3.000.000,00							5.250.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	4 Unit	3.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.250.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU VIII
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						6.000.000,00							6.300.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	6.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	6.300.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU VIII
241.	**3.25.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**						**1.180.962.000,00**							**1.260.315.000,00**	
			Luasan Kawasan Konservasi (Ha)	-		-	3318970,89 Ha	8.480.000,00						-	29.400.000,00	
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi						852.490.000,00					-		885.045.000,00	
		-						852.490.000,00					-		885.045.000,00	
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	-		-	-	646.540.000,00						-	668.745.000,00	
	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat						8.480.000,00							8.400.000,00	
		Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	-		-	1 Ha	8.480.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	8.400.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU VIII
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						277.572.000,00					-		312.270.000,00	
		-						277.572.000,00					-		312.270.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-		-	-	8.480.000,00						-	33.600.000,00	
	3.25.02.1.03.0003	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						8.480.000,00							21.000.000,00	
		Terlibatnya Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-		-	100 Orang	8.480.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	21.000.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU VIII
242.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**						**14.357.269.600,00**							**15.071.910.000,00**	
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	-		-	268.638,25 Ton	8.480.000,00						-	8.925.000,00	
			-	-		-	-	8.480.000,00						-	8.925.000,00	
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil						8.397.350.000,00					-		8.810.235.000,00	
		-						8.397.350.000,00					-		8.810.235.000,00	
			Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-		-	-	172.370.000,00						-	173.985.000,00	
	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan						8.480.000,00							8.925.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-		-	1 Dokumen	8.480.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	8.925.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU VIII
	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT						49.630.000,00					-		55.125.000,00	
		-						49.630.000,00					-		55.125.000,00	
			Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang tersedia	-		-	-	49.630.000,00						-	47.775.000,00	
	3.25.03.1.03.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil						8.480.000,00							8.925.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang tersedia	-		-	1 Dokumen	8.480.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	8.925.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU VIII

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
243.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**						**2.951.605.000,00**							**3.088.995.000,00**	
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	-		-	129.675 Ton	8.480.000,00						-	8.925.000,00	
	3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						421.180.000,00					-		453.075.000,00	
		-						421.180.000,00					-		453.075.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	-		-	-	110.800.000,00						-	114.975.000,00	
	3.25.04.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan						8.480.000,00							8.925.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	-		-	1 Dokumen	8.480.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	8.925.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU VIII
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut						2.530.425.000,00					-		2.425.920.000,00	
		-						2.530.425.000,00					-		2.425.920.000,00	
			Jumlah Pembudidaya	-		-	-	260.562.000,00						-	195.720.000,00	
	3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi						8.480.000,00							8.925.000,00	
		Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	-		-	20 Orang	8.480.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	8.925.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU VIII
244.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**1.340.410.800,00**							**1.348.614.750,00**	
			Tingkat kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturaan perundang-undangan	-		-	47,25 %	57.130.000,00						-	8.925.000,00	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil						1.230.252.800,00					-		1.258.839.750,00	
		-						1.230.252.800,00					-		1.258.839.750,00	
			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	-		-	-	246.428.800,00						-	213.564.750,00	
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	-		-	-	262.403.000,00						-	271.950.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi						23.000.000,00							8.925.000,00	
		Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	-		-	2 Pelaku Usaha	23.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	8.925.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU VIII
	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi						23.530.000,00							8.925.000,00	
		Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	-		-	2 Pelaku Usaha	23.530.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	8.925.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU VIII
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						110.158.000,00					-		89.775.000,00	
		-						110.158.000,00					-		89.775.000,00	
			Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	-		-	-	102.158.000,00						-	81.375.000,00	
	3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi						10.600.000,00							8.925.000,00	
		Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	-		-	2 Pelaku Usaha	10.600.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	8.925.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU VIII
245.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**						**542.098.200,00**							**565.665.450,00**	
			Angka Konsumsi Ikan	-		-	41,48 Angka	8.480.000,00						-	29.925.000,00	
	3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						123.739.000,00					-		138.840.450,00	
		-						123.739.000,00					-		138.840.450,00	
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	-		-	-	123.739.000,00						-	131.490.450,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.06.1.01.0004	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						8.480.000,00							8.925.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	-		-	1 Dokumen	8.480.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	8.925.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU VIII
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar						293.359.200,00					-		295.575.000,00	
		-						293.359.200,00					-		295.575.000,00	
			Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	-		-	-	284.359.200,00						-	287.175.000,00	
	3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing						8.480.000,00							21.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	-		-	1 Kegiatan	8.480.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	21.000.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU VIII
		CABANG DINAS GUGUS PULAU IX						**300.000.000,00**							**315.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**300.000.000,00**							**315.000.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**300.000.000,00**							**315.000.000,00**	
246.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**45.179.459.558,88**							**47.484.970.216,82**	
			Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	-		-	100 %	193.644.000,00						-	202.650.000,00	
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						370.771.000,00					-		438.753.000,00	
		-						370.771.000,00					-		438.753.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	113.360.000,00						-	138.453.000,00	
	3.25.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						9.000.000,00							9.450.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	1 Paket	9.000.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Kepulauan Aru || Kecamatan Pulau-Pulau Aru || Desa Durjela || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	9.450.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU IX
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.550.708.560,00					-		2.954.994.000,00	
		-						2.550.708.560,00					-		2.954.994.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	97.254.000,00						-	110.433.750,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	1.155.161.000,00						-	1.240.837.500,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	208.384.060,00						-	223.860.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	147.111.500,00						-	167.265.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	155.578.600,00						-	115.158.750,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	579.219.400,00						-	876.676.500,00	
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.500.000,00							2.625.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.500.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Kepulauan Aru || Kecamatan Pulau-Pulau Aru || Desa Durjela || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.625.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU IX
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						3.275.000,00							3.360.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	2 Paket	3.275.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Kepulauan Aru || Kecamatan Pulau-Pulau Aru || Desa Durjela || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	3.360.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU IX
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						6.266.000,00							5.985.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	6.266.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Kepulauan Aru || Kecamatan Pulau-Pulau Aru || Desa Durjela || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.985.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU IX

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.303.000,00							3.465.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	2 Paket	3.303.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Kepulauan Aru || Kecamatan Pulau-Pulau Aru || Desa Durjela || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	3.465.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU IX
	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						9.000.000,00							9.450.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	9.000.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Kepulauan Aru || Kecamatan Pulau-Pulau Aru || Desa Durjela || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	9.450.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU IX
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						54.000.000,00							56.700.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	54.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	56.700.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU IX
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						1.693.845.040,00					-		1.353.187.500,00	
		-						1.693.845.040,00					-		1.353.187.500,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	736.345.040,00						-	563.062.500,00	
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00							21.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	3 Unit	20.000.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Kepulauan Aru || Kecamatan Pulau-Pulau Aru || Desa Durjela || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	21.000.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU IX
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						2.303.506.196,00					-		2.506.743.750,00	
		-						2.303.506.196,00					-		2.506.743.750,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	1.104.966.196,00						-	1.230.258.750,00	
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						48.000.000,00							50.400.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	48.000.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Kepulauan Aru || Kecamatan Pulau-Pulau Aru || Desa Durjela || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	50.400.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU IX
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.884.061.504,00					-		5.216.337.000,00	
		-						4.884.061.504,00					-		5.216.337.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	1.477.241.504,00						-	1.419.363.750,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	2.620.330.000,00						-	2.853.233.250,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	181.490.000,00						-	308.490.000,00	
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						34.500.000,00							36.225.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	3 Unit	34.500.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Kepulauan Aru || Kecamatan Pulau-Pulau Aru || Desa Durjela || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	36.225.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU IX
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.300.000,00							5.565.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	5 Unit	5.300.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Kepulauan Aru || Kecamatan Pulau-Pulau Aru || Desa Durjela || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.565.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU IX
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						7.500.000,00							7.875.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	7.500.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Kepulauan Aru || Kecamatan Pulau-Pulau Aru || Desa Durjela || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	7.875.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU IX
247.	**3.25.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**						**1.180.962.000,00**							**1.260.315.000,00**	
			Luasan Kawasan Konservasi (Ha)	-		-	3318970,89 Ha	21.962.000,00						-	23.100.000,00	
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						277.572.000,00					-		312.270.000,00	
		-						277.572.000,00					-		312.270.000,00	
			Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	93.550.000,00						-	101.850.000,00	
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	-		-	-	131.742.000,00						-	130.830.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						13.962.000,00							14.700.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	-		-	25 Orang	13.962.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	14.700.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU IX
	3.25.02.1.03.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan						8.000.000,00							8.400.000,00	
		Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-		-	3 Kelompok	8.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	8.400.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU IX
248.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**						**14.357.269.600,00**							**15.071.910.000,00**	
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	-		-	268.638,25 Ton	8.100.000,00						-	8.400.000,00	
			-	-		-	-	7.800.000,00						-	8.400.000,00	
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil						8.397.350.000,00					-		8.810.235.000,00	
		-						8.397.350.000,00					-		8.810.235.000,00	
			Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-		-	-	172.370.000,00						-	173.985.000,00	
	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan						8.100.000,00							8.400.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-		-	1 Dokumen Dokumen	8.100.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	8.400.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU IX
	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT						49.630.000,00					-		55.125.000,00	
		-						49.630.000,00					-		55.125.000,00	
			Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang tersedia	-		-	-	49.630.000,00						-	47.775.000,00	
	3.25.03.1.03.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil						7.800.000,00							8.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang tersedia	-		-	1 Dokumen Dokumen	7.800.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	8.400.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU IX
	3.25.03.1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT						90.450.000,00					-		99.750.000,00	
		-						90.450.000,00					-		99.750.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	-		-	-	88.800.000,00						-	92.400.000,00	
	3.25.03.1.09.0003	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)						8.100.000,00							8.400.000,00	
		Diterbitkannya Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	-		-	5 Rekomendasi	8.100.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	8.400.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU IX
249.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**						**2.951.605.000,00**							**3.088.995.000,00**	
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	-		-	129.675 Ton	8.000.000,00						-	8.400.000,00	
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut						2.530.425.000,00					-		2.425.920.000,00	
		-						2.530.425.000,00					-		2.425.920.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	80.040.000,00						-	101.850.000,00	
	3.25.04.1.05.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						8.000.000,00							8.400.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	8.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	8.400.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU IX
250.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**1.340.410.800,00**							**1.348.614.750,00**	
			Tingkat kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturaan perundang-undangan	-		-	47,25 %	27.794.000,00						-	14.700.000,00	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil						1.230.252.800,00					-		1.258.839.750,00	
		-						1.230.252.800,00					-		1.258.839.750,00	
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	-		-	-	262.403.000,00						-	271.950.000,00	
			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	-		-	-	211.409.000,00						-	156.975.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi						13.696.000,00							14.700.000,00	
		Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	-		-	5 Pelaku Usaha	13.696.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	14.700.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU IX
	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)						14.098.000,00							14.700.000,00	
		Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	-		-	2 Dokumen Kelompok Masyarakat	14.098.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	14.700.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU IX
251.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**						**542.098.200,00**							**565.665.450,00**	
			Angka Konsumsi Ikan	-		-	41,48 Angka	15.600.000,00						-	8.400.000,00	
	3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						123.739.000,00					-		138.840.450,00	
		-						123.739.000,00					-		138.840.450,00	
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	-		-	-	123.739.000,00						-	131.490.450,00	
	3.25.06.1.01.0004	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						6.600.000,00							8.400.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	-		-	1 Dokumen	6.600.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	8.400.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU IX
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar						293.359.200,00					-		295.575.000,00	
		-						293.359.200,00					-		295.575.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	-		-	-	9.000.000,00						-	8.400.000,00	
	3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar						9.000.000,00							8.400.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Terhadap Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	-		-	1 Kegiatan	9.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	8.400.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU IX
		CABANG DINAS GUGUS PULAU X						**300.000.000,00**							**306.075.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**300.000.000,00**							**306.075.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**300.000.000,00**							**306.075.000,00**	
252.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**45.179.459.558,88**							**47.484.970.216,82**	
			Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	-		-	100 %	203.401.200,00						-	149.625.000,00	
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						370.771.000,00					-		438.753.000,00	
		-						370.771.000,00					-		438.753.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	113.360.000,00						-	138.453.000,00	
	3.25.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						9.000.000,00							9.450.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	1 Paket	9.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	9.450.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU X
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.550.708.560,00					-		2.954.994.000,00	
		-						2.550.708.560,00					-		2.954.994.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	97.254.000,00						-	110.433.750,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	1.155.161.000,00						-	1.240.837.500,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	208.384.060,00						-	223.860.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	147.111.500,00						-	167.265.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	155.578.600,00						-	115.158.750,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	579.219.400,00						-	876.676.500,00	
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.050.000,00							2.100.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	1.050.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.100.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU X
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.800.000,00							4.200.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	5.800.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	4.200.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU X
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						4.246.200,00							6.300.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	4.246.200,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	6.300.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU X
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.050.000,00							2.100.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	2 Paket	1.050.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.100.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU X
	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						3.080.000,00							4.200.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	3.080.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	4.200.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU X
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						37.300.000,00							10.500.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	37.300.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.500.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU X
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						1.693.845.040,00					-		1.353.187.500,00	
		-						1.693.845.040,00					-		1.353.187.500,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	736.345.040,00						-	563.062.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						43.000.000,00							21.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	2 Unit	43.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	21.000.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU X
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						2.303.506.196,00					-		2.506.743.750,00	
		-						2.303.506.196,00					-		2.506.743.750,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	1.104.966.196,00						-	1.230.258.750,00	
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						17.520.000,00							21.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	17.520.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	21.000.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU X
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.884.061.504,00					-		5.216.337.000,00	
		-						4.884.061.504,00					-		5.216.337.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	1.477.241.504,00						-	1.419.363.750,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	2.620.330.000,00						-	2.853.233.250,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	181.490.000,00						-	308.490.000,00	
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						42.405.000,00							48.825.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	4 Unit	42.405.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	48.825.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU X
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							5.250.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	1 Unit	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.250.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU X
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						40.000.000,00							42.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	40.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	42.000.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU X
253.	**3.25.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**						**1.180.962.000,00**							**1.260.315.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Luasan Kawasan Konservasi (Ha)	-		-	3318970,89 Ha	25.500.000,00						-	9.450.000,00	
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi						852.490.000,00					-		885.045.000,00	
		-						852.490.000,00					-		885.045.000,00	
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	-		-	-	646.540.000,00						-	668.745.000,00	
	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat						18.300.000,00							9.450.000,00	
		Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	-		-	1 Ha	18.300.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	9.450.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU X
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						277.572.000,00					-		312.270.000,00	
		-						277.572.000,00					-		312.270.000,00	
			Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	93.550.000,00						-	101.850.000,00	
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	-		-	-	131.742.000,00						-	130.830.000,00	
	3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						1.350.000,00							9.450.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	-		-	10 Orang	1.350.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	9.450.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU X
	3.25.02.1.03.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan						5.850.000,00							9.450.000,00	
		Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-		-	2 Kelompok	5.850.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	9.450.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU X
254.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**						**14.357.269.600,00**							**15.071.910.000,00**	
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	-		-	268.638,25 Ton	12.900.000,00						-	9.450.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil						8.397.350.000,00					-		8.810.235.000,00	
		-						8.397.350.000,00					-		8.810.235.000,00	
			Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-		-	-	172.370.000,00						-	173.985.000,00	
	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan						3.900.000,00							9.450.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-		-	1 Dokumen	3.900.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	9.450.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU X
	3.25.03.1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT						90.450.000,00					-		99.750.000,00	
		-						90.450.000,00					-		99.750.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	-		-	-	88.800.000,00						-	92.400.000,00	
	3.25.03.1.09.0003	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)						9.000.000,00							9.450.000,00	
		Diterbitkannya Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	-		-	10 Rekomendasi	9.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	9.450.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU X
255.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**						**2.951.605.000,00**							**3.088.995.000,00**	
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	-		-	129.675 Ton	11.700.000,00						-	9.450.000,00	
	3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						421.180.000,00					-		453.075.000,00	
		-						421.180.000,00					-		453.075.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	-		-	-	110.800.000,00						-	114.975.000,00	
	3.25.04.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan						7.800.000,00							9.450.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	-		-	1 Dokumen	7.800.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	9.450.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU X
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut						2.530.425.000,00					-		2.425.920.000,00	
		-						2.530.425.000,00					-		2.425.920.000,00	
			Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	-		-	-	54.500.000,00						-	44.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.04.1.05.0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						3.900.000,00							9.450.000,00	
		Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan dan Ikan	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	-		-	3 Unit	3.900.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	9.450.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU X
256.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**1.340.410.800,00**							**1.348.614.750,00**	
			Tingkat kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturaan perundang-undangan	-		-	47,25 %	34.498.800,00						-	34.650.000,00	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil						1.230.252.800,00					-		1.258.839.750,00	
		-						1.230.252.800,00					-		1.258.839.750,00	
			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	-		-	-	246.428.800,00						-	213.564.750,00	
			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	-		-	-	211.409.000,00						-	156.975.000,00	
	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi						23.998.800,00							25.200.000,00	
		Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	-		-	4 Pelaku Usaha	23.998.800,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	25.200.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU X
	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)						9.150.000,00							9.450.000,00	
		Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	-		-	1 Kelompok Masyarakat	9.150.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	9.450.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU X
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						110.158.000,00					-		89.775.000,00	
		-						110.158.000,00					-		89.775.000,00	
			Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	-		-	-	102.158.000,00						-	81.375.000,00	
	3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi						1.350.000,00							9.450.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	-		-	1 Pelaku Usaha	1.350.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	9.450.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU X
257.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**						**542.098.200,00**							**565.665.450,00**	
			Angka Konsumsi Ikan	-		-	41,48 Angka	10.950.000,00						-	9.450.000,00	
	3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						123.739.000,00					-		138.840.450,00	
		-						123.739.000,00					-		138.840.450,00	
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	-		-	-	123.739.000,00						-	131.490.450,00	
	3.25.06.1.01.0004	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						1.800.000,00							9.450.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	-		-	1 Dokumen	1.800.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	9.450.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU X
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar						293.359.200,00					-		295.575.000,00	
		-						293.359.200,00					-		295.575.000,00	
			Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	-		-	-	284.359.200,00						-	287.175.000,00	
	3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing						9.150.000,00							9.450.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	-		-	1 Kegiatan	9.150.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	9.450.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU X
		CABANG DINAS GUGUS PULAU XI						**300.000.000,00**							**315.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**300.000.000,00**							**315.000.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**300.000.000,00**							**315.000.000,00**	
258.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**45.179.459.558,88**							**47.484.970.216,82**	
			Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	-		-	100 %	182.000.000,00						-	168.000.000,00	
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						370.771.000,00					-		438.753.000,00	
		-						370.771.000,00					-		438.753.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	113.360.000,00						-	138.453.000,00	
	3.25.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						5.000.000,00							5.250.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.250.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU XI
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.550.708.560,00					-		2.954.994.000,00	
		-						2.550.708.560,00					-		2.954.994.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	97.254.000,00						-	110.433.750,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	1.155.161.000,00						-	1.240.837.500,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	208.384.060,00						-	223.860.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	147.111.500,00						-	167.265.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	155.578.600,00						-	115.158.750,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	579.219.400,00						-	876.676.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						960.000,00							1.050.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	960.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.050.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU XI
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						1.382.000,00							2.100.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	1.382.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.100.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU XI
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						9.237.000,00							2.100.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	9.237.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.100.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU XI
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						200.000,00							2.100.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	200.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.100.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU XI
	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						2.205.000,00							2.100.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	2.205.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.100.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU XI
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						22.330.000,00							57.750.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	22.330.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	57.750.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU XI
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						1.693.845.040,00					-		1.353.187.500,00	
		-						1.693.845.040,00					-		1.353.187.500,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	82.500.000,00						-	81.375.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	-	75.000.000,00						-	78.750.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	736.345.040,00						-	563.062.500,00	
	3.25.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						25.000.000,00							26.250.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	1 Unit	25.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	26.250.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU XI
	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						15.000.000,00							10.500.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	1 Paket	15.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.500.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU XI
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00							21.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	20.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	21.000.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU XI
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						2.303.506.196,00					-		2.506.743.750,00	
		-						2.303.506.196,00					-		2.506.743.750,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	1.104.966.196,00						-	1.230.258.750,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	12.100.000,00						-	16.485.000,00	
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						600.000,00							1.050.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	600.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.050.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU XI
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						8.508.000,00							5.250.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	8.508.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.250.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU XI
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.884.061.504,00					-		5.216.337.000,00	
		-						4.884.061.504,00					-		5.216.337.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	1.477.241.504,00						-	1.419.363.750,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	2.620.330.000,00						-	2.853.233.250,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	181.490.000,00						-	308.490.000,00	
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						30.578.000,00							44.100.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	4 Unit	30.578.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	44.100.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU XI
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						7.000.000,00							5.250.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	5 Unit	7.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.250.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU XI
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						34.000.000,00							5.250.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	34.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.250.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU XI
259.	**3.25.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**						**1.180.962.000,00**							**1.260.315.000,00**	
			Luasan Kawasan Konservasi (Ha)	-		-	3318970,89 Ha	30.000.000,00						-	10.500.000,00	
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi						852.490.000,00					-		885.045.000,00	
		-						852.490.000,00					-		885.045.000,00	
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	-		-	-	646.540.000,00						-	668.745.000,00	
	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat						17.250.000,00							10.500.000,00	
		Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	-		-	1 Ha	17.250.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.500.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU XI
	3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi						50.900.000,00					-		63.000.000,00	
		-						50.900.000,00					-		63.000.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan	-		-	-	50.900.000,00						-	63.000.000,00	
	3.25.02.1.02.0004	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir						900.000,00							10.500.000,00	
		Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan	-		-	1 Rekomendasi	900.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.500.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU XI
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						277.572.000,00					-		312.270.000,00	
		-						277.572.000,00					-		312.270.000,00	
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	-		-	-	131.742.000,00						-	130.830.000,00	
	3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						11.850.000,00							10.500.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	-		-	20 Orang	11.850.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.500.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU XI
260.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**						**14.357.269.600,00**							**15.071.910.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	-		-	268.638,25 Ton	10.000.000,00						-	10.500.000,00	
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil						8.397.350.000,00					-		8.810.235.000,00	
		-						8.397.350.000,00					-		8.810.235.000,00	
			Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-		-	-	172.370.000,00						-	173.985.000,00	
	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan						10.000.000,00							10.500.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.500.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU XI
261.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**						**2.951.605.000,00**							**3.088.995.000,00**	
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	-		-	129.675 Ton	20.000.000,00						-	10.500.000,00	
	3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						421.180.000,00					-		453.075.000,00	
		-						421.180.000,00					-		453.075.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	-		-	-	110.800.000,00						-	114.975.000,00	
	3.25.04.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan						9.900.000,00							10.500.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	-		-	1 Dokumen	9.900.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.500.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU XI
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut						2.530.425.000,00					-		2.425.920.000,00	
		-						2.530.425.000,00					-		2.425.920.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	80.040.000,00						-	101.850.000,00	
	3.25.04.1.05.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						10.100.000,00							10.500.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	10.100.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.500.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU XI
262.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**1.340.410.800,00**							**1.348.614.750,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Tingkat kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturaan perundang-undangan	-		-	47,25 %	48.000.000,00						-	39.900.000,00	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil						1.230.252.800,00					-		1.258.839.750,00	
		-						1.230.252.800,00					-		1.258.839.750,00	
			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	-		-	-	246.428.800,00						-	213.564.750,00	
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	-		-	-	262.403.000,00						-	271.950.000,00	
			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	-		-	-	211.409.000,00						-	156.975.000,00	
	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi						7.700.000,00							10.500.000,00	
		Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	-		-	1 Pelaku Usaha	7.700.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.500.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU XI
	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi						32.450.000,00							29.400.000,00	
		Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	-		-	1 Pelaku Usaha	32.450.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	29.400.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU XI
	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)						7.850.000,00							10.500.000,00	
		Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	-		-	1 Kelompok Masyarakat	7.850.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.500.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU XI
263.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**						**542.098.200,00**							**565.665.450,00**	
			Angka Konsumsi Ikan	-		-	41,48 Angka	10.000.000,00						-	10.500.000,00	
	3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						123.739.000,00					-		138.840.450,00	
		-						123.739.000,00					-		138.840.450,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	-		-	-	123.739.000,00						-	131.490.450,00	
	3.25.06.1.01.0004	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						10.000.000,00							10.500.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.500.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU XI
		CABANG DINAS GUGUS PULAU XII						**300.000.000,00**							**315.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**300.000.000,00**							**315.000.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**300.000.000,00**							**315.000.000,00**	
264.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**45.179.459.558,88**							**47.484.970.216,82**	
			Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	-		-	100 %	169.600.000,00						-	172.830.000,00	
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						370.771.000,00					-		438.753.000,00	
		-						370.771.000,00					-		438.753.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	113.360.000,00						-	138.453.000,00	
	3.25.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						9.735.000,00							10.221.750,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	1 Paket	9.735.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Maluku Barat Daya || Kecamatan Moa Lakor || Kelurahan Tiakur || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.221.750,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU XII
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.550.708.560,00					-		2.954.994.000,00	
		-						2.550.708.560,00					-		2.954.994.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	97.254.000,00						-	110.433.750,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	1.155.161.000,00						-	1.240.837.500,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	208.384.060,00						-	223.860.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	147.111.500,00						-	167.265.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	155.578.600,00						-	115.158.750,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	579.219.400,00						-	876.676.500,00	
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.000.000,00							3.150.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	3.000.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Maluku Barat Daya || Kecamatan Moa Lakor || Kelurahan Tiakur || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	3.150.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU XII
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.350.000,00							5.250.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	5.350.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Maluku Barat Daya || Kecamatan Moa Lakor || Kelurahan Tiakur || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.250.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU XII
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						11.000.000,00							11.550.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	11.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	11.550.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU XII
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						6.000.000,00							6.300.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	6.000.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Maluku Barat Daya || Kecamatan Moa Lakor || Kelurahan Tiakur || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	6.300.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU XII
	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						7.000.000,00							7.350.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	7.000.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Maluku Barat Daya || Kecamatan Moa Lakor || Kelurahan Tiakur || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	7.350.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU XII
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						49.650.000,00							52.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	49.650.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Nusaniwe || Kelurahan Benteng || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	52.500.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU XII
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						1.693.845.040,00					-		1.353.187.500,00	
		-						1.693.845.040,00					-		1.353.187.500,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	736.345.040,00						-	563.062.500,00	
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00							21.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	2 Unit	20.000.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Maluku Barat Daya || Kecamatan Moa Lakor || Kelurahan Tiakur || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	21.000.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU XII
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						2.303.506.196,00					-		2.506.743.750,00	
		-						2.303.506.196,00					-		2.506.743.750,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	1.104.966.196,00						-	1.230.258.750,00	
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						18.600.000,00							19.530.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	18.600.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Maluku Barat Daya || Kecamatan Moa Lakor || Kelurahan Tiakur || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	19.530.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU XII
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.884.061.504,00					-		5.216.337.000,00	
		-						4.884.061.504,00					-		5.216.337.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	1.477.241.504,00						-	1.419.363.750,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	2.620.330.000,00						-	2.853.233.250,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	181.490.000,00						-	308.490.000,00	
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						34.265.000,00							35.978.250,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	4 Unit	34.265.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Maluku Barat Daya || Kecamatan Moa Lakor || Kelurahan Tiakur || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	35.978.250,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU XII
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.000.000,00							5.250.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	5 Unit	5.000.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Maluku Barat Daya || Kecamatan Moa Lakor || Kelurahan Tiakur || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.250.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU XII
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						5.000.000,00							5.250.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	5.000.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Maluku Barat Daya || Kecamatan Moa Lakor || Kelurahan Tiakur || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.250.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU XII
265.	**3.25.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**						**1.180.962.000,00**							**1.260.315.000,00**	
			Luasan Kawasan Konservasi (Ha)	-		-	3318970,89 Ha	29.400.000,00						-	30.870.000,00	
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi						852.490.000,00					-		885.045.000,00	
		-						852.490.000,00					-		885.045.000,00	
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	-		-	-	646.540.000,00						-	668.745.000,00	
	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat						21.400.000,00							22.470.000,00	
		Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	-		-	1 Ha	21.400.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	22.470.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU XII
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						277.572.000,00					-		312.270.000,00	
		-						277.572.000,00					-		312.270.000,00	
			Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	93.550.000,00						-	101.850.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.02.1.03.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan						8.000.000,00							8.400.000,00	
		Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-		-	2 Kelompok	8.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	8.400.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU XII
266.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**						**14.357.269.600,00**							**15.071.910.000,00**	
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	-		-	268.638,25 Ton	26.000.000,00						-	27.300.000,00	
			-	-		-	-	8.000.000,00						-	8.400.000,00	
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil						8.397.350.000,00					-		8.810.235.000,00	
		-						8.397.350.000,00					-		8.810.235.000,00	
			Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-		-	-	172.370.000,00						-	173.985.000,00	
	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan						18.000.000,00							18.900.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-		-	1 Dokumen	18.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	18.900.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU XII
	3.25.03.1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT						90.450.000,00					-		99.750.000,00	
		-						90.450.000,00					-		99.750.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	-		-	-	88.800.000,00						-	92.400.000,00	
	3.25.03.1.09.0003	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)						8.000.000,00							8.400.000,00	
		Diterbitkannya Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	-		-	5 Rekomendasi	8.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	8.400.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU XII
	3.25.03.1.10	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						12.600.000,00					-		16.800.000,00	
		-						12.600.000,00					-		16.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi Kewenangan Provinsi	-		-	-	12.600.000,00						-	16.800.000,00	
	3.25.03.1.10.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT						8.000.000,00							8.400.000,00	
		Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi Kewenangan Provinsi	-		-	1 Dokumen	8.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	8.400.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU XII
267.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**						**2.951.605.000,00**							**3.088.995.000,00**	
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	-		-	129.675 Ton	8.000.000,00						-	8.400.000,00	
	3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						421.180.000,00					-		453.075.000,00	
		-						421.180.000,00					-		453.075.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	-		-	-	110.800.000,00						-	114.975.000,00	
	3.25.04.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan						8.000.000,00							8.400.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	-		-	1 Dokumen	8.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	8.400.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU XII
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut						2.530.425.000,00					-		2.425.920.000,00	
		-						2.530.425.000,00					-		2.425.920.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	80.040.000,00						-	101.850.000,00	
	3.25.04.1.05.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						8.000.000,00							8.400.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	8.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	8.400.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU XII
268.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**1.340.410.800,00**							**1.348.614.750,00**	
			Tingkat kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturaan perundang-undangan	-		-	47,25 %	30.000.000,00						-	31.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil						1.230.252.800,00					-		1.258.839.750,00	
		-						1.230.252.800,00					-		1.258.839.750,00	
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	-		-	-	262.403.000,00						-	271.950.000,00	
			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	-		-	-	211.409.000,00						-	156.975.000,00	
	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi						22.000.000,00							23.100.000,00	
		Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	-		-	2 Pelaku Usaha	22.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	23.100.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU XII
	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)						8.000.000,00							8.400.000,00	
		Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	-		-	2 Kelompok Masyarakat	8.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	8.400.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU XII
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						110.158.000,00					-		89.775.000,00	
		-						110.158.000,00					-		89.775.000,00	
			Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	-		-	-	8.000.000,00						-	8.400.000,00	
	3.25.05.1.02.0005	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi						8.000.000,00							8.400.000,00	
		Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	-		-	2 Pelaku Usaha	8.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	8.400.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU XII

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
269.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**						**542.098.200,00**							**565.665.450,00**	
			Angka Konsumsi Ikan	-		-	41,48 Angka	8.000.000,00						-	8.400.000,00	
	3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						123.739.000,00					-		138.840.450,00	
		-						123.739.000,00					-		138.840.450,00	
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	-		-	-	123.739.000,00						-	131.490.450,00	
	3.25.06.1.01.0004	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						8.000.000,00							8.400.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	-		-	1 Dokumen	8.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	8.400.000,00	CABANG DINAS GUGUS PULAU XII
		DINAS PARIWISATA						**10.751.770.006,00**							**15.973.592.510,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**10.751.770.006,00**							**15.973.592.510,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**10.751.770.006,00**							**15.973.592.510,00**	
270.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**8.483.783.780,00**							**11.529.106.410,00**	
			Presentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	-		-	undefined undefined	8.458.783.780,00						-	11.189.106.410,00	
	3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						465.000.000,00					Dinas Pariwisata		570.000.000,00	
		-						465.000.000,00					Dinas Pariwisata		570.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	195.582.000,00						-	275.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-		-	-	219.430.000,00						-	220.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	10.000.000,00						-	15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	14.991.100,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	10.000.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	5.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	5.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	4.996.900,00						-	5.000.000,00	
	3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						14.991.100,00							20.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	4 Dokumen	14.991.100,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	20.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						5.000.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	2 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	10.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	2 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	10.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						10.000.000,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	2 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	15.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						10.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	2 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	15.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.996.900,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	1 Laporan	4.996.900,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	5.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						219.430.000,00							220.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-		-	5 Data	219.430.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	220.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						195.582.000,00							275.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	1 Berita Acara	195.582.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	275.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.651.807.072,00					Dinas Pariwisata		7.205.240.000,00	
		-						6.651.807.072,00					Dinas Pariwisata		7.205.240.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	71.040.000,00						-	95.240.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	0,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	0,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	6.580.767.072,00						-	7.100.000.000,00	
	3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						6.580.767.072,00							7.100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	55 Orang/ Bulan	6.580.767.072,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	7.100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						71.040.000,00							95.240.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	1 Dokumen	71.040.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	95.240.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	5.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						0,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	1 Laporan	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	5.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						0,00					Dinas Pariwisata		5.000.000,00	
		-						0,00					Dinas Pariwisata		5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	0,00						-	5.000.000,00	
	3.26.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						0,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	1 Laporan	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	5.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						130.625.300,00					Dinas Pariwisata		80.000.000,00	
		-						130.625.300,00					Dinas Pariwisata		80.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	-		-	-	4.950.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	49.338.300,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	20.000.000,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	56.337.000,00						-	35.000.000,00	
	3.26.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						20.000.000,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	55 Paket	20.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	20.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						4.950.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	-		-	1 Dokumen	4.950.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	5.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						56.337.000,00							35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	5 Orang	56.337.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	35.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan						49.338.300,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	55 Orang	49.338.300,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	20.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						430.165.057,00					Dinas Pariwisata		243.866.410,00	
		-						430.165.057,00					Dinas Pariwisata		243.866.410,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	-	0,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	24.699.240,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	324.205.000,00						-	125.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	38.228.627,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	10.000.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	15.032.190,00						-	35.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	18.000.000,00						-	16.366.410,00	
	3.26.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	2 Paket	10.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	30.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						15.032.190,00							35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	5 Paket	15.032.190,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	35.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						18.000.000,00							16.366.410,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	18.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	16.366.410,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						38.228.627,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	5 Paket	38.228.627,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	20.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						24.699.240,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	24.699.240,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	15.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						324.205.000,00							125.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	324.205.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	125.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						0,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	0 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	2.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						50.000.000,00					Dinas Pariwisata		150.000.000,00	
		-						50.000.000,00					Dinas Pariwisata		150.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	50.000.000,00						-	50.000.000,00	
	3.26.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	1 Paket	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	50.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						170.199.996,00					Dinas Pariwisata		2.670.000.000,00	
		-						170.199.996,00					Dinas Pariwisata		2.670.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	170.199.996,00						-	170.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	2.500.000.000,00	
	3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						170.199.996,00							170.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	2 Laporan	170.199.996,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	170.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							2.500.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	2.500.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						585.986.355,00					Dinas Pariwisata		605.000.000,00	
		-						585.986.355,00					Dinas Pariwisata		605.000.000,00	
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	15.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	95.000.000,00						-	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	390.267.600,00						-	350.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	-	53.719.000,00						-	70.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	31.999.755,00						-	35.000.000,00	
	3.26.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						53.719.000,00							70.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	1 Unit	53.719.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	70.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						390.267.600,00							350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	20 Unit	390.267.600,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	350.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						31.999.755,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	21 Unit	31.999.755,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	35.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						15.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-		-	1 Unit	15.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						95.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	95.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
271.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**						**1.499.999.600,00**							**2.520.000.000,00**	
			Jumlah destinasi pariwisata yang dikelola, ditata, dan dikembangkan	-		-	4 Destinasi	1.499.999.600,00						-	1.220.000.000,00	
			-	-		-	-	0,00						-	350.000.000,00	
	3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi						324.482.800,00					Masyarakat dan wisatawan		345.000.000,00	
		-						324.482.800,00					Masyarakat dan wisatawan		345.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	-		-	-	65.637.000,00						-	80.000.000,00	
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	-		-	-	258.845.800,00						-	265.000.000,00	
	3.26.02.1.01.0005	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi						258.845.800,00							265.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	-		-	6 Lokasi	258.845.800,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	265.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi						65.637.000,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	-		-	2 Laporan	65.637.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	80.000.000,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi						0,00					Masyarakat dan wisatawan		350.000.000,00	
		-						0,00					Masyarakat dan wisatawan		350.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	-		-	-	0,00						-	100.000.000,00	
			Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	-		-	-	0,00						-	250.000.000,00	
	3.26.02.1.02.0001	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi						0,00							100.000.000,00	
		Ditetapkannya Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	-		-	0 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi						0,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	-		-	0 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	250.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi						0,00							0,00	
		Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.02.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Diterapkannya Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	-		-	3 Lokasi	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.02.0008	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi						0,00							0,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	-		-	0 Orang	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi						767.508.300,00					Masyarakat dan wisatawan		1.100.000.000,00	
		-						767.508.300,00					Masyarakat dan wisatawan		1.100.000.000,00	
			Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Ditetapkan	-		-	-	0,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	-		-	-	0,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi	-		-	-	370.400.000,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen yang memuat data dukung dalam rangka menudukung Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional	-		-	-	0,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Kegiatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata	-		-	-	0,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	-		-	-	0,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	-		-	-	229.108.300,00						-	300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	-		-	-	168.000.000,00						-	200.000.000,00	
	3.26.02.1.03.0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi						0,00							50.000.000,00	
		Ditetapkannya Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Ditetapkan	-		-	1 Lokasi	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi						0,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi						168.000.000,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	-		-	3 Unit	168.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi						0,00							0,00	
		Diterapkannya Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	-		-	0 Lokasi	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03.0009	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi						370.400.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi	-		-	0 Dokumen	370.400.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi						229.108.300,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	-		-	40 Orang	229.108.300,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	300.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03.0011	Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi						0,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Tata Kelola Destinasi Pariwisata di Tingkat Provinsi	Jumlah Kegiatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata	-		-	2 Kegiatan	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03.0012	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi						0,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03.0013	Fasilitasi Pengumpulan Data Dukung Dalam Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional						0,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Pengumpulan Data Dukung Dalam Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional	Jumlah dokumen yang memuat data dukung dalam rangka menudukung Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	-	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						408.008.500,00					Masyarakat dan wisatawan		725.000.000,00	
		-						408.008.500,00					Masyarakat dan wisatawan		725.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Provinsi	-		-	-	0,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Peluang Investasi Provinsi yang Siap Ditawarkan	-		-	-	0,00						-	75.000.000,00	
			Jumlah Industri/ Usaha Pariwisata yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	-		-	-	159.617.600,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	-		-	-	0,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata	-		-	-	248.390.900,00						-	300.000.000,00	
	3.26.02.1.04.0010	Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi						0,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Investasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	-		-	1 Laporan	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.04.0011	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Provinsi						0,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata di Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Provinsi	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.04.0018	Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha						248.390.900,00							300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata	-		-	60 Pelaku Usaha	248.390.900,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	300.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.04.0019	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)						159.617.600,00							200.000.000,00	
		Terfasilitasinya Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Jumlah Industri/ Usaha Pariwisata yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	-		-	60 Unit Usaha	159.617.600,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.04.0020	Penyiapan informasi peluang Investasi sektor pariwisata Provinsi yang Siap Ditawarkan						0,00							75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya peluang investasi Provinsi yang Siap Ditawarkan	Jumlah Dokumen Peluang Investasi Provinsi yang Siap Ditawarkan	-		-	0 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	75.000.000,00	DINAS PARIWISATA
272.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**						**207.986.726,00**							**345.000.000,00**	
			Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	-		-	%	207.986.726,00						-	345.000.000,00	
	3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi						207.986.726,00					Masyarakat dan wisatawan		345.000.000,00	
		-						207.986.726,00					Masyarakat dan wisatawan		345.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	-		-	-	0,00						-	45.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	-		-	-	37.200.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	-		-	-	170.786.726,00						-	250.000.000,00	
	3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri						37.200.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	-		-	1 Dokumen	37.200.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.1.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata						0,00							45.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	45.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri						170.786.726,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	-		-	3 Kegiatan	170.786.726,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	250.000.000,00	DINAS PARIWISATA
273.	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**						**235.000.000,00**							**695.000.000,00**	
			Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	-		-	1,94 persentase	235.000.000,00						-	620.000.000,00	
	3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif						170.157.000,00					Masyarakat dan wisatawan		250.000.000,00	
		-						170.157.000,00					Masyarakat dan wisatawan		250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	-		-	-	119.857.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronissi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	-		-	-	30.150.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Prasarana Ruang Kreatif	-		-	-	20.150.000,00						-	50.000.000,00	
	3.26.04.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif						119.857.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	-		-	1 Laporan	119.857.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula						30.150.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronissi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	-		-	1 Laporan	30.150.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.01.0007	Fasilitasi Prasarana Melalui Revitalisasi Ruang Kreatif						20.150.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Prasarana Revitalisasi Ruang Kreatif	Jumlah Prasarana Ruang Kreatif	-		-	1 Unit	20.150.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif						64.843.000,00					Masyarakat		445.000.000,00	
		-						64.843.000,00					Masyarakat		445.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-		-	-	4.800.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	-		-	-	15.300.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	-		-	-	0,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Produk Ekonomi Kreatif yang Mendapat Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual	-		-	-	44.743.000,00						-	70.000.000,00	
			Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif	-		-	-	0,00						-	75.000.000,00	
	3.26.04.1.02.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif						4.800.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-		-	1 Dokumen	4.800.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	25.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02.0012	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah						0,00							250.000.000,00	
		Tersedianya dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	-		-	0 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	250.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02.0014	Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif						0,00							75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif	Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif	-		-	0 Promosi	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	75.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02.0017	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah						15.300.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	-		-	2 Dokumen	15.300.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	25.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02.0022	Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual						44.743.000,00							70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya kKegiatan Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Produk Ekonomi Kreatif yang Mendapat Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual	-		-	35 Produk	44.743.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	70.000.000,00	DINAS PARIWISATA
274.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**						**324.999.900,00**							**884.486.100,00**	
			Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mendapat Pelatihan dan Sertifikasi	-		-	%	324.999.900,00						-	784.486.100,00	
	3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan						324.999.900,00					Masyarakat		690.595.425,00	
		-						324.999.900,00					Masyarakat		690.595.425,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata	-		-	-	0,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		-	-	47.776.000,00						-	90.595.425,00	
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	-		-	-	188.710.900,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	-		-	-	88.513.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	-		-	-	0,00						-	150.000.000,00	
	3.26.05.1.01.0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata						88.513.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terfasilitasinya Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	-		-	37 Orang	88.513.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0007	Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata						0,00							100.000.000,00	
		Terfasilitasinya Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata	-		-	2 Laporan	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata						188.710.900,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	-		-	35 Orang	188.710.900,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	250.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0016	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI						0,00							150.000.000,00	
		Berkembangkan Kapasitas SDM Pariwisata berdasarkan pada SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	-		-	0 Orang	0,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0018	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif						47.776.000,00							90.595.425,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		-	2 Laporan	47.776.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	90.595.425,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif						0,00					Masyarakat		193.890.675,00	
		-						0,00					Masyarakat		193.890.675,00	
			Jumlah Orang yang di fasilitasi sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	-		-	-	0,00						-	96.444.675,00	
			Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	-		-	-	0,00						-	97.446.000,00	
	3.26.05.1.02.0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif						0,00							96.444.675,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang di fasilitasi sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	-		-	20 Orang	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	96.444.675,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.26.05.1.02.0008	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif						0,00							97.446.000,00	
		Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	-		-	20 Orang	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	97.446.000,00	DINAS PARIWISATA
		DINAS PERTANIAN						**56.905.698.427,00**							**55.008.849.411,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**56.905.698.427,00**							**55.008.849.411,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**56.905.698.427,00**							**55.008.849.411,00**	
275.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**46.888.698.512,00**							**44.757.468.144,00**	
			Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	-		-	100 %	44.024.319.748,00						-	41.782.956.594,00	
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.020.511.527,00					-		907.600.027,00	
		-						1.020.511.527,00					-		907.600.027,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	3.255.000,00						-	3.255.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	520.582.027,00						-	325.582.027,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	3.255.000,00						-	3.255.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	3.255.000,00						-	3.255.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	3.255.000,00						-	3.255.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	246.909.500,00						-	348.998.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	240.000.000,00						-	220.000.000,00	
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						520.582.027,00							325.582.027,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	3 Dokumen	520.582.027,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	325.582.027,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						3.255.000,00							3.255.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	3.255.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	3.255.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						3.255.000,00							3.255.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	3.255.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	3.255.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						3.255.000,00							3.255.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	3.255.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	3.255.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						3.255.000,00							3.255.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	3.255.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	3.255.000,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						108.749.500,00							79.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	1 Laporan	108.749.500,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	79.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						240.000.000,00							220.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	1 Laporan	240.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	220.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						41.143.690.621,00					-		39.275.700.067,00	
		-						41.143.690.621,00					-		39.275.700.067,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	147.462.000,00						-	148.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	112.083.000,00						-	43.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	40.827.085.621,00						-	39.040.726.067,00	
	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						40.827.085.621,00							39.040.726.067,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	176 Orang/ Bulan	40.827.085.621,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	39.040.726.067,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						147.462.000,00							148.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	147.462.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	148.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						42.084.000,00							43.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	1 Laporan	42.084.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	43.000.000,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						199.500.000,00					-		204.000.000,00	
		-						199.500.000,00					-		204.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	63.000.000,00						-	64.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-		-	-	57.750.000,00						-	58.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	63.000.000,00						-	65.000.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	15.750.000,00						-	17.000.000,00	
	3.27.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						57.750.000,00							58.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-		-	1 Laporan	57.750.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	58.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan PengendalianBarang Milik Daerah pada SKPD						63.000.000,00							64.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	1 Laporan	63.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	64.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						15.750.000,00							17.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	1 Laporan	15.750.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	17.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						63.000.000,00							65.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	1 Laporan	63.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	65.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						333.370.100,00					-		337.500.000,00	
		-						333.370.100,00					-		337.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	-		-	-	104.919.400,00						-	107.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	-	42.000.000,00						-	43.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	-	136.450.700,00						-	137.500.000,00	
	3.27.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian						136.450.700,00							137.500.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	1 Dokumen	136.450.700,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	137.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						104.919.400,00							107.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	-		-	1 Dokumen	104.919.400,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	107.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai						42.000.000,00							43.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	1 Dokumen	42.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	43.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.756.626.064,00					-		1.492.582.450,00	
		-						1.756.626.064,00					-		1.492.582.450,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	56.657.000,00						-	55.900.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	542.139.000,00						-	415.193.750,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	224.563.800,00						-	227.716.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	191.304.500,00						-	189.567.500,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	97.600.650,00						-	103.398.950,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	617.340.000,00						-	457.406.250,00	
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						35.914.800,00							36.748.950,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	35.914.800,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	36.748.950,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						557.340.000,00							457.406.250,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	557.340.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	457.406.250,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						100.679.200,00							101.716.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	100.679.200,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	101.716.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						136.500.000,00							136.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	136.500.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	136.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						26.195.000,00							27.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	26.195.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	27.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						212.240.000,00							220.258.300,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	212.240.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	220.258.300,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						533.500.000,00					-		512.000.000,00	
		-						533.500.000,00					-		512.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	-	157.500.000,00						-	157.500.000,00	
	3.27.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						157.500.000,00							157.500.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	3 Unit	157.500.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	157.500.000,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						1.012.100.400,00					-		1.017.059.600,00	
		-						1.012.100.400,00					-		1.017.059.600,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	795.080.400,00						-	805.159.600,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	78.000.000,00						-	82.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	110.520.000,00						-	111.250.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	28.500.000,00						-	18.650.000,00	
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						9.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	9.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						253.200.000,00							253.764.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	253.200.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	253.764.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						65.520.000,00							64.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	65.520.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	64.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	0,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						889.399.800,00					-		1.011.026.000,00	
		-						889.399.800,00					-		1.011.026.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	250.000.000,00						-	351.826.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	-	71.142.500,00						-	79.000.000,00	
	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						71.142.500,00							79.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	3 Unit	71.142.500,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	79.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						90.000.000,00							74.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	90.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	74.000.000,00	DINAS PERTANIAN
276.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**						**8.877.398.879,00**							**8.983.689.167,00**	
			Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	-		-	100 %	267.497.900,00						-	368.000.000,00	
			-	-		-	-	7.395.889.779,00						-	6.210.993.367,00	
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian						267.497.900,00					Kelompok Tani		368.000.000,00	
		-						267.497.900,00					Kelompok Tani		368.000.000,00	
			Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	-		-	-	267.497.900,00						-	368.000.000,00	
	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian						267.497.900,00							368.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terawasinya Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	-		-	2 Laporan	267.497.900,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	368.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman						6.445.076.479,00					-		6.387.587.400,00	
		-						6.445.076.479,00					-		6.387.587.400,00	
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	-		-	-	2.133.254.579,00						-	2.113.945.800,00	
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	-		-	-	2.282.557.000,00						-	1.909.945.800,00	
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	-		-	-	1.693.622.000,00						-	1.929.945.800,00	
			Jumlah Sertifikat Benih	-		-	-	335.642.900,00						-	433.750.000,00	
	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih						201.164.300,00							263.000.000,00	
		Terkelolanya Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	-		-	3 Sertifikat	201.164.300,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	263.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.1.02.0018	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan						1.913.253.400,00							1.909.945.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman pangan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	-		-	3 Laporan	1.913.253.400,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.909.945.800,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.1.02.0019	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura						1.913.254.579,00							1.929.945.800,00	
		Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih Hortikultura	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	-		-	3 Laporan	1.913.254.579,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.929.945.800,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.1.02.0020	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan						1.693.622.000,00							1.929.945.800,00	
		Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	-		-	3 Laporan	1.693.622.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.929.945.800,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi						159.545.000,00					-		174.000.000,00	
		-						159.545.000,00					-		174.000.000,00	
			Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	-		-	-	82.495.000,00						-	54.000.000,00	
	3.27.02.1.03.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme						82.495.000,00							54.000.000,00	
		Terlaksananya Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	-		-	1 Laporan	82.495.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	54.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi						1.220.070.800,00					-		1.580.071.767,00	
		-						1.220.070.800,00					-		1.580.071.767,00	
			Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	-		-	-	1.220.070.800,00						-	1.580.071.767,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi						1.220.070.800,00							1.580.071.767,00	
		Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	-		-	4 laporan	1.220.070.800,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.580.071.767,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain						372.029.700,00					-		474.030.000,00	
		-						372.029.700,00					-		474.030.000,00	
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	-		-	-	372.029.700,00						-	474.030.000,00	
	3.27.02.1.07.0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain						372.029.700,00							474.030.000,00	
		Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	-		-	100 Ekor	372.029.700,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	474.030.000,00	DINAS PERTANIAN
277.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**						**4.063.284.800,00**							**3.405.811.050,00**	
			Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	-		-	100 %	4.063.284.800,00						-	3.405.811.050,00	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian						4.063.284.800,00					-		3.405.811.050,00	
		-						4.063.284.800,00					-		3.405.811.050,00	
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	-		-	-	98.182.900,00						-	89.000.000,00	
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	-		-	-	1.538.807.000,00						-	1.538.811.050,00	
			Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	-		-	-	406.323.000,00						-	158.000.000,00	
			Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	-		-	-	1.469.971.900,00						-	1.070.000.000,00	
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola di tingkat Provinsi	-		-	-	150.000.000,00						-	150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	-		-	-	400.000.000,00						-	400.000.000,00	
	3.27.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani						1.538.807.000,00							1.538.811.050,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	-		-	5 Dokumen	1.538.807.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.538.811.050,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya						98.182.900,00							89.000.000,00	
		Terbangun, Terehabilitasi, dan Terpeliharanya Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	-		-	1 Unit	98.182.900,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	89.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.1.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi						400.000.000,00							400.000.000,00	
		Tersusunnya Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	-		-	1 Dokumen	400.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	400.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.1.01.0017	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan						406.323.000,00							158.000.000,00	
		Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Perkebunan	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	-		-	3 Unit	406.323.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	158.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.1.01.0018	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola di tingkat Provinsi	-		-	1 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	150.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.1.01.0023	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan						1.469.971.900,00							1.070.000.000,00	
		Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	-		-	15 Unit	1.469.971.900,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.070.000.000,00	DINAS PERTANIAN
278.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**						**560.576.600,00**							**385.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	-		-	100 %	278.441.000,00						-	280.000.000,00	
	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						173.692.400,00					-		175.000.000,00	
		-						173.692.400,00					-		175.000.000,00	
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-		-	-	173.692.400,00						-	175.000.000,00	
	3.27.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						173.692.400,00							175.000.000,00	
		Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-		-	1 Laporan	173.692.400,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	175.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi						282.135.600,00					-		105.000.000,00	
		-						282.135.600,00					-		105.000.000,00	
			Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	-		-	-	104.748.600,00						-	105.000.000,00	
	3.27.04.1.02.0007	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)						104.748.600,00							105.000.000,00	
		Terawasinya penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	-		-	1 Laporan	104.748.600,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	105.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan						104.748.600,00					-		105.000.000,00	
		-						104.748.600,00					-		105.000.000,00	
			Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	-		-	-	104.748.600,00						-	105.000.000,00	
	3.27.04.1.03.0002	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan						104.748.600,00							105.000.000,00	
		Terbinanya Unit Usaha Produk Hewan Dalam Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	-		-	1 Laporan	104.748.600,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	105.000.000,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
279.	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**						**83.124.000,00**							**90.000.000,00**	
			Meningkatnya jumlah pemenuhan perizinan usaha pertanian	-		-	2 Laporan	83.124.000,00						-	45.000.000,00	
	3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						83.124.000,00					-		90.000.000,00	
		-						83.124.000,00					-		90.000.000,00	
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	-		-	-	41.365.000,00						-	45.000.000,00	
			Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	-		-	-	41.759.000,00						-	45.000.000,00	
	3.27.06.1.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota						41.759.000,00							45.000.000,00	
		Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	41.759.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	45.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.06.1.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian						41.365.000,00							45.000.000,00	
		Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	-		-	1 Laporan	41.365.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	45.000.000,00	DINAS PERTANIAN
280.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**						**1.150.335.600,00**							**1.259.887.600,00**	
			Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	-		-	100 %	526.377.600,00						-	640.377.600,00	
	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian						657.616.600,00					-		776.887.600,00	
		-						657.616.600,00					-		776.887.600,00	
			Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	-		-	-	180.586.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Penyuluh pertanian swadaya dan/atau penyuluh pertanian swasta yang mendapatkan pembinaan	-		-	-	477.030.600,00						-	576.887.600,00	
	3.27.07.1.01.0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian						89.250.000,00							110.000.000,00	
		Terlaksananya peningkatan kapasitas dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	-		-	30 Unit	89.250.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	110.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.1.01.0006	Pembinaan penyuluh pertanian swadaya dan swasta lintas kabupaten/kota						253.377.600,00							255.377.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pembinaan penyuluh pertanian swadaya dan swasta lintas kabupaten/kota	Jumlah Penyuluh pertanian swadaya dan/atau penyuluh pertanian swasta yang mendapatkan pembinaan	-		-	50 Orang	253.377.600,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	255.377.600,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian						492.719.000,00					-		483.000.000,00	
		-						492.719.000,00					-		483.000.000,00	
			Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	-		-	-	283.750.000,00						-	285.000.000,00	
			Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	-		-	-	208.969.000,00						-	198.000.000,00	
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian						183.750.000,00							185.000.000,00	
		Termanfaatkannya Teknologi Inovasi Pertanian yang Didesiminasikan oleh Penyuluh Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	-		-	1 Dokumen	183.750.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	185.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani						89.250.000,00							90.000.000,00	
		Terlaksananya Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	-		-	22 Kelompok	89.250.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	90.000.000,00	DINAS PERTANIAN
		BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH/BIBIT PERTANIAN DAN PETERNAKAN						**961.620.000,00**							**1.007.104.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**961.620.000,00**							**1.007.104.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**961.620.000,00**							**1.007.104.000,00**	
281.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**46.888.698.512,00**							**44.757.468.144,00**	
			Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	-		-	100 %	457.271.600,00						-	518.554.000,00	
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.020.511.527,00					-		907.600.027,00	
		-						1.020.511.527,00					-		907.600.027,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	246.909.500,00						-	348.998.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						100.000.000,00							224.998.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	11 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	224.998.000,00	BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH/BIBIT PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.756.626.064,00					-		1.492.582.450,00	
		-						1.756.626.064,00					-		1.492.582.450,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	56.657.000,00						-	55.900.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	542.139.000,00						-	415.193.750,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	224.563.800,00						-	227.716.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	191.304.500,00						-	189.567.500,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	97.600.650,00						-	103.398.950,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	13.521.114,00						-	16.900.000,00	
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.000.000,00							5.900.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	3.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Passo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.900.000,00	BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH/BIBIT PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						3.544.000,00							6.900.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	3.544.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Passo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	6.900.000,00	BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH/BIBIT PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						8.329.600,00							11.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	8.329.600,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Passo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	11.500.000,00	BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH/BIBIT PERTANIAN DAN PETERNAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						6.000.000,00							6.900.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	2 Paket	6.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Passo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	6.900.000,00	BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH/BIBIT PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						5.760.000,00							6.900.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	0 Laporan	5.760.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Passo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	6.900.000,00	BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH/BIBIT PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						37.437.000,00							50.756.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	2 Laporan	37.437.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	50.756.000,00	BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH/BIBIT PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						533.500.000,00					-		512.000.000,00	
		-						533.500.000,00					-		512.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	271.000.000,00						-	176.000.000,00	
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						112.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	5 Unit	112.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH/BIBIT PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						1.012.100.400,00					-		1.017.059.600,00	
		-						1.012.100.400,00					-		1.017.059.600,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	795.080.400,00						-	805.159.600,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	28.500.000,00						-	18.650.000,00	
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	4 Laporan	3.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Passo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH/BIBIT PERTANIAN DAN PETERNAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						70.500.000,00							92.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	70.500.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Passo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	92.000.000,00	BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH/BIBIT PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						889.399.800,00					-		1.011.026.000,00	
		-						889.399.800,00					-		1.011.026.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	250.000.000,00						-	351.826.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	320.990.000,00						-	272.100.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	169.012.300,00						-	144.600.000,00	
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						57.711.000,00							73.600.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	2 Unit	57.711.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Passo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	73.600.000,00	BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH/BIBIT PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						12.990.000,00							16.100.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	5 Unit	12.990.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Passo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	16.100.000,00	BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH/BIBIT PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						40.000.000,00							36.800.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	6 Unit	40.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Passo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	36.800.000,00	BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH/BIBIT PERTANIAN DAN PETERNAKAN
282.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**						**8.877.398.879,00**							**8.983.689.167,00**	
			-	-		-	-	501.348.400,00						-	474.750.000,00	
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman						6.445.076.479,00					-		6.387.587.400,00	
		-						6.445.076.479,00					-		6.387.587.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	-		-	-	2.133.254.579,00						-	2.113.945.800,00	
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	-		-	-	2.282.557.000,00						-	1.909.945.800,00	
			Jumlah Sertifikat Benih	-		-	-	335.642.900,00						-	433.750.000,00	
	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih						134.478.600,00							170.750.000,00	
		Terkelolanya Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	-		-	120 Sertifikat	134.478.600,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Passo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	170.750.000,00	BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH/BIBIT PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.02.0018	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan						110.303.800,00							0,00	
		Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman pangan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	-		-	11 Laporan	110.303.800,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH/BIBIT PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.02.0019	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura						100.000.000,00							184.000.000,00	
		Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih Hortikultura	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	-		-	11 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	184.000.000,00	BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH/BIBIT PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi						159.545.000,00					-		174.000.000,00	
		-						159.545.000,00					-		174.000.000,00	
			Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai	-		-	-	77.050.000,00						-	120.000.000,00	
	3.27.02.1.03.0002	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme						77.050.000,00							120.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai	-		-	425 Varietas Unggul Baru (VUB)	77.050.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	120.000.000,00	BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH/BIBIT PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi						413.179.000,00					-		0,00	
		-						413.179.000,00					-		0,00	
			Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	-		-	-	79.516.000,00						-	0,00	
	3.27.02.1.05.0003	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak						79.516.000,00							0,00	
		Terawasinya Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	-		-	11 Laporan	79.516.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH/BIBIT PERTANIAN DAN PETERNAKAN
		BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BPTPHP) PROVINSI MALUKU						**961.620.000,00**							**1.011.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**961.620.000,00**							**1.011.000.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**961.620.000,00**							**1.011.000.000,00**	
283.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**46.888.698.512,00**							**44.757.468.144,00**	
			Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	-		-	100 %	491.620.000,00						-	368.000.000,00	
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						333.370.100,00					-		337.500.000,00	
		-						333.370.100,00					-		337.500.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	50.000.000,00						-	50.000.000,00	
	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						50.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	75 Paket	50.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Passo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	50.000.000,00	BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BPTPHP) PROVINSI MALUKU
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.756.626.064,00					-		1.492.582.450,00	
		-						1.756.626.064,00					-		1.492.582.450,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	56.657.000,00						-	55.900.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	224.563.800,00						-	227.716.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	191.304.500,00						-	189.567.500,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	97.600.650,00						-	103.398.950,00	
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	2 Paket	20.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Passo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	20.000.000,00	BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BPTPHP) PROVINSI MALUKU
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						25.715.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	10 Paket	25.715.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Passo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	25.000.000,00	BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BPTPHP) PROVINSI MALUKU
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	5 Paket	20.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Passo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	20.000.000,00	BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BPTPHP) PROVINSI MALUKU
	3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	6 Laporan	15.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Passo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	15.000.000,00	BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BPTPHP) PROVINSI MALUKU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						533.500.000,00					-		512.000.000,00	
		-						533.500.000,00					-		512.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	271.000.000,00						-	176.000.000,00	
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	2 Unit	50.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Passo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	50.000.000,00	BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BPTPHP) PROVINSI MALUKU
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						1.012.100.400,00					-		1.017.059.600,00	
		-						1.012.100.400,00					-		1.017.059.600,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	795.080.400,00						-	805.159.600,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	78.000.000,00						-	82.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	28.500.000,00						-	18.650.000,00	
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.000.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	3.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Passo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	3.000.000,00	BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BPTPHP) PROVINSI MALUKU
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	100.000.000,00	BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BPTPHP) PROVINSI MALUKU
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						78.000.000,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	78.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Passo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	80.000.000,00	BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BPTPHP) PROVINSI MALUKU
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						889.399.800,00					-		1.011.026.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						889.399.800,00					-		1.011.026.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	250.000.000,00						-	351.826.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	320.990.000,00						-	272.100.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	169.012.300,00						-	144.600.000,00	
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						99.905.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	12 Unit	99.905.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Passo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	100.000.000,00	BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BPTPHP) PROVINSI MALUKU
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	12 Unit	25.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	25.000.000,00	BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BPTPHP) PROVINSI MALUKU
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						75.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	12 Unit	75.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	75.000.000,00	BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BPTPHP) PROVINSI MALUKU
284.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**						**400.000.000,00**							**448.000.000,00**	
			-	-		-	-	400.000.000,00						-	448.000.000,00	
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi						400.000.000,00					-		448.000.000,00	
		-						400.000.000,00					-		448.000.000,00	
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	-		-	-	400.000.000,00						-	448.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan						400.000.000,00							448.000.000,00	
		Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	-		-	5000 Ha	400.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	448.000.000,00	BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BPTPHP) PROVINSI MALUKU
		BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN						**819.499.764,00**							**819.500.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**819.499.764,00**							**819.500.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**819.499.764,00**							**819.500.000,00**	
285.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**46.888.698.512,00**							**44.757.468.144,00**	
			Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	-		-	100 %	377.415.764,00						-	394.500.000,00	
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.020.511.527,00					-		907.600.027,00	
		-						1.020.511.527,00					-		907.600.027,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	246.909.500,00						-	348.998.000,00	
	3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						38.160.000,00							45.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	12 Laporan	38.160.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	45.000.000,00	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.756.626.064,00					-		1.492.582.450,00	
		-						1.756.626.064,00					-		1.492.582.450,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	56.657.000,00						-	55.900.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	542.139.000,00						-	415.193.750,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	224.563.800,00						-	227.716.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	191.304.500,00						-	189.567.500,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	97.600.650,00						-	103.398.950,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	13.521.114,00						-	16.900.000,00	
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.483.150,00							14.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	10.483.150,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	14.500.000,00	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						9.977.114,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	9.977.114,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.000.000,00	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						26.998.700,00							27.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	2 Paket	26.998.700,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	27.000.000,00	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						6.054.500,00							9.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	6.054.500,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	9.500.000,00	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						5.000.000,00							7.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	7.000.000,00	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						64.975.000,00							65.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	2 Laporan	64.975.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	65.000.000,00	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						1.012.100.400,00					-		1.017.059.600,00	
		-						1.012.100.400,00					-		1.017.059.600,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	795.080.400,00						-	805.159.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	78.000.000,00						-	82.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	28.500.000,00						-	18.650.000,00	
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	2.500.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.500.000,00	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						130.000.000,00							130.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	130.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	130.000.000,00	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.000.000,00	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						889.399.800,00					-		1.011.026.000,00	
		-						889.399.800,00					-		1.011.026.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	320.990.000,00						-	272.100.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	169.012.300,00						-	144.600.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	18.995.000,00						-	19.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	59.260.000,00						-	144.500.000,00	
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	1 Unit	25.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	25.000.000,00	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						30.012.300,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	4 Unit	30.012.300,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	30.000.000,00	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						18.995.000,00							19.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	18.995.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	19.000.000,00	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						9.260.000,00							8.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	9.260.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	8.000.000,00	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN
286.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**						**1.150.335.600,00**							**1.259.887.600,00**	
			Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	-		-	100 %	442.084.000,00						-	425.000.000,00	
	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian						657.616.600,00					-		776.887.600,00	
		-						657.616.600,00					-		776.887.600,00	
			Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	-		-	-	180.586.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Penyuluh pertanian swadaya dan/atau penyuluh pertanian swasta yang mendapatkan pembinaan	-		-	-	477.030.600,00						-	576.887.600,00	
	3.27.07.1.01.0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian						91.336.000,00							90.000.000,00	
		Terlaksananya peningkatan kapasitas dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	-		-	1 Unit	91.336.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	90.000.000,00	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN
	3.27.07.1.01.0006	Pembinaan penyuluh pertanian swadaya dan swasta lintas kabupaten/kota						131.029.000,00							127.000.000,00	
		Terlaksananya pembinaan penyuluh pertanian swadaya dan swasta lintas kabupaten/kota	Jumlah Penyuluh pertanian swadaya dan/atau penyuluh pertanian swasta yang mendapatkan pembinaan	-		-	25 Orang	131.029.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	127.000.000,00	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian						492.719.000,00					-		483.000.000,00	
		-						492.719.000,00					-		483.000.000,00	
			Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	-		-	-	283.750.000,00						-	285.000.000,00	
			Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	-		-	-	208.969.000,00						-	198.000.000,00	
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian						100.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Termanfaatkannya Teknologi Inovasi Pertanian yang Didesiminasikan oleh Penyuluh Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	-		-	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	100.000.000,00	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani						119.719.000,00							108.000.000,00	
		Terlaksananya Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	-		-	1 Kelompok	119.719.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	108.000.000,00	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN
		BALAI PERBIBITAN TERNAK, LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						**819.500.000,00**							**0,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**819.500.000,00**							**0,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**819.500.000,00**							**0,00**	
287.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**46.888.698.512,00**							**44.757.468.144,00**	
			Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	-		-	100 %	308.450.000,00						-	0,00	
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						41.143.690.621,00					-		39.275.700.067,00	
		-						41.143.690.621,00					-		39.275.700.067,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	57.060.000,00						-	43.974.000,00	
	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						36.120.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	1 Dokumen	36.120.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	BALAI PERBIBITAN TERNAK, LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.756.626.064,00					-		1.492.582.450,00	
		-						1.756.626.064,00					-		1.492.582.450,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	56.657.000,00						-	55.900.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	542.139.000,00						-	415.193.750,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	224.563.800,00						-	227.716.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	191.304.500,00						-	189.567.500,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	97.600.650,00						-	103.398.950,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	617.340.000,00						-	457.406.250,00	
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.702.700,00							0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	5.702.700,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	BALAI PERBIBITAN TERNAK, LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						60.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	3 Paket	60.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	BALAI PERBIBITAN TERNAK, LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						12.341.300,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	12.341.300,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	BALAI PERBIBITAN TERNAK, LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.750.000,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	3.750.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	BALAI PERBIBITAN TERNAK, LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						4.702.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	4.702.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	BALAI PERBIBITAN TERNAK, LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						80.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	8 Laporan	80.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	BALAI PERBIBITAN TERNAK, LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						1.012.100.400,00					-		1.017.059.600,00	
		-						1.012.100.400,00					-		1.017.059.600,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	795.080.400,00						-	805.159.600,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	28.500.000,00						-	18.650.000,00	
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	3.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	BALAI PERBIBITAN TERNAK, LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						63.450.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	2 Laporan	63.450.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	BALAI PERBIBITAN TERNAK, LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						889.399.800,00					-		1.011.026.000,00	
		-						889.399.800,00					-		1.011.026.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	320.990.000,00						-	272.100.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	169.012.300,00						-	144.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						33.374.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	1 Unit	33.374.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	BALAI PERBIBITAN TERNAK, LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						6.010.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	8 Unit	6.010.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	BALAI PERBIBITAN TERNAK, LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
288.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**						**8.877.398.879,00**							**8.983.689.167,00**	
			-	-		-	-	333.663.000,00						-	0,00	
	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi						413.179.000,00					-		0,00	
		-						413.179.000,00					-		0,00	
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	-		-	-	333.663.000,00						-	0,00	
	3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak						333.663.000,00							0,00	
		Terkendalinya penyediaan dan produksi benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	-		-	2 laporan	333.663.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	BALAI PERBIBITAN TERNAK, LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
289.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**						**560.576.600,00**							**385.000.000,00**	
			Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	-		-	100 %	177.387.000,00						-	0,00	
	3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi						282.135.600,00					-		105.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						282.135.600,00					-		105.000.000,00	
			Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	-		-	-	177.387.000,00						-	0,00	
	3.27.04.1.02.0004	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM						177.387.000,00							0,00	
		Terawasi dan terperiksanya kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	-		-	2 Laporan	177.387.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	BALAI PERBIBITAN TERNAK, LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
		UPTD BENIH PADI, PALAWIJA DAN HORTIKULTURA PROVINSI MALUKU						**819.485.800,00**							**0,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**819.485.800,00**							**0,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**819.485.800,00**							**0,00**	
290.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**46.888.698.512,00**							**44.757.468.144,00**	
			Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	-		-	100 %	425.486.000,00						-	0,00	
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						41.143.690.621,00					-		39.275.700.067,00	
		-						41.143.690.621,00					-		39.275.700.067,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	112.083.000,00						-	43.000.000,00	
	3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						69.999.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	0 Laporan	69.999.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	UPTD BENIH PADI, PALAWIJA DAN HORTIKULTURA PROVINSI MALUKU
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.756.626.064,00					-		1.492.582.450,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						1.756.626.064,00					-		1.492.582.450,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	542.139.000,00						-	415.193.750,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	224.563.800,00						-	227.716.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	191.304.500,00						-	189.567.500,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	97.600.650,00						-	103.398.950,00	
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						15.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	0 Paket	15.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	UPTD BENIH PADI, PALAWIJA DAN HORTIKULTURA PROVINSI MALUKU
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						30.500.000,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	0 Paket	30.500.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	UPTD BENIH PADI, PALAWIJA DAN HORTIKULTURA PROVINSI MALUKU
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						15.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	0 Paket	15.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	UPTD BENIH PADI, PALAWIJA DAN HORTIKULTURA PROVINSI MALUKU
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						84.987.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	0 Laporan	84.987.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	UPTD BENIH PADI, PALAWIJA DAN HORTIKULTURA PROVINSI MALUKU
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						533.500.000,00					-		512.000.000,00	
		-						533.500.000,00					-		512.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	271.000.000,00						-	176.000.000,00	
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						85.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	0 Unit	85.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	UPTD BENIH PADI, PALAWIJA DAN HORTIKULTURA PROVINSI MALUKU
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						1.012.100.400,00					-		1.017.059.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						1.012.100.400,00					-		1.017.059.600,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	795.080.400,00						-	805.159.600,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	28.500.000,00						-	18.650.000,00	
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	0 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	UPTD BENIH PADI, PALAWIJA DAN HORTIKULTURA PROVINSI MALUKU
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						25.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	0 Laporan	25.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	UPTD BENIH PADI, PALAWIJA DAN HORTIKULTURA PROVINSI MALUKU
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						889.399.800,00					-		1.011.026.000,00	
		-						889.399.800,00					-		1.011.026.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	320.990.000,00						-	272.100.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	169.012.300,00						-	144.600.000,00	
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						60.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	0 Unit	60.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	UPTD BENIH PADI, PALAWIJA DAN HORTIKULTURA PROVINSI MALUKU
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	0 Unit	50.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	UPTD BENIH PADI, PALAWIJA DAN HORTIKULTURA PROVINSI MALUKU
291.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**						**8.877.398.879,00**							**8.983.689.167,00**	
			-	-		-	-	378.999.800,00						-	0,00	
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman						6.445.076.479,00					-		6.387.587.400,00	
		-						6.445.076.479,00					-		6.387.587.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	-		-	-	2.133.254.579,00						-	2.113.945.800,00	
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	-		-	-	2.282.557.000,00						-	1.909.945.800,00	
	3.27.02.1.02.0018	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan						258.999.800,00							0,00	
		Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman pangan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	-		-	0 Laporan	258.999.800,00	Provinsi Maluku || Kab. Seram Bagian Barat || Kecamatan Kairatu || Desa Kairatu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	UPTD BENIH PADI, PALAWIJA DAN HORTIKULTURA PROVINSI MALUKU
	3.27.02.1.02.0019	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura						120.000.000,00							0,00	
		Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih Hortikultura	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	-		-	0 Laporan	120.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	UPTD BENIH PADI, PALAWIJA DAN HORTIKULTURA PROVINSI MALUKU
		UPTD SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN						**3.175.758.840,00**							**5.370.916.212,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.439.764.440,00**							**3.887.513.662,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**2.439.764.440,00**							**3.887.513.662,00**	
292.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**2.439.764.440,00**							**3.887.513.662,00**	
			-	-		-	-	2.439.764.440,00						-	3.887.513.662,00	
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						2.439.764.440,00					-		3.887.513.662,00	
		-						2.439.764.440,00					-		3.887.513.662,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	-		-	-	300.000.000,00						-	315.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	-	1.500.000.000,00						-	2.215.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	-		-	-	160.000.000,00						-	168.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	-	219.764.440,00						-	377.752.662,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	-		-	-	260.000.000,00						-	811.761.000,00	
	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						219.764.440,00							377.752.662,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	1 Unit	219.764.440,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Passo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	377.752.662,00	UPTD SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN
	1.01.02.1.02.0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik						300.000.000,00							315.000.000,00	
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	-		-	5 Paket	300.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Passo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	315.000.000,00	UPTD SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN
	1.01.02.1.02.0035	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						160.000.000,00							168.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	-		-	1 Unit	160.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Passo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	168.000.000,00	UPTD SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN
	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan						1.500.000.000,00							2.215.000.000,00	
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	100 Peserta didik	1.500.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Passo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.215.000.000,00	UPTD SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN
	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik						260.000.000,00							811.761.000,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	-		-	364 Satuan Pendidikan	260.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Passo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	811.761.000,00	UPTD SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**735.994.400,00**							**1.483.402.550,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**735.994.400,00**							**1.483.402.550,00**	
293.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**46.888.698.512,00**							**44.757.468.144,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	-		-	100 %	508.370.400,00						-	1.078.892.550,00	
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						41.143.690.621,00					-		39.275.700.067,00	
		-						41.143.690.621,00					-		39.275.700.067,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	57.060.000,00						-	43.974.000,00	
	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						20.940.000,00							43.974.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	12 Dokumen	20.940.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Passo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	43.974.000,00	UPTD SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.756.626.064,00					-		1.492.582.450,00	
		-						1.756.626.064,00					-		1.492.582.450,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	13.500.000,00						-	26.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	542.139.000,00						-	415.193.750,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	224.563.800,00						-	227.716.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	191.304.500,00						-	189.567.500,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	97.600.650,00						-	103.398.950,00	
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						7.500.000,00							26.250.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	7.500.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Passo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	26.250.000,00	UPTD SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						20.000.000,00							62.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	20 Paket	20.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Passo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	62.500.000,00	UPTD SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4.000.000,00							16.667.500,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	2 Paket	4.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Passo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	16.667.500,00	UPTD SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN
	3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						13.500.000,00							26.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	5 Dokumen	13.500.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Passo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	26.500.000,00	UPTD SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						62.500.000,00							79.179.450,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	15 Laporan	62.500.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Passo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	79.179.450,00	UPTD SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						533.500.000,00					-		512.000.000,00	
		-						533.500.000,00					-		512.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	40.000.000,00						-	42.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	271.000.000,00						-	176.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	65.000.000,00						-	136.500.000,00	
	3.27.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						40.000.000,00							42.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	1 Paket	40.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Passo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	42.000.000,00	UPTD SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						24.000.000,00							126.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	12 Unit	24.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Passo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	126.000.000,00	UPTD SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN
	3.27.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						65.000.000,00							136.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	10 Unit	65.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Passo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	136.500.000,00	UPTD SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						1.012.100.400,00					-		1.017.059.600,00	
		-						1.012.100.400,00					-		1.017.059.600,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	795.080.400,00						-	805.159.600,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	110.520.000,00						-	111.250.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	28.500.000,00						-	18.650.000,00	
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.000.000,00							3.150.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	4 Laporan	3.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Passo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	3.150.000,00	UPTD SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						152.930.400,00							229.395.600,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	152.930.400,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Passo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	229.395.600,00	UPTD SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN
	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						45.000.000,00							47.250.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	4 Laporan	45.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Passo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	47.250.000,00	UPTD SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						889.399.800,00					-		1.011.026.000,00	
		-						889.399.800,00					-		1.011.026.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	250.000.000,00						-	351.826.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	320.990.000,00						-	272.100.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	169.012.300,00						-	144.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	59.260.000,00						-	144.500.000,00	
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						45.000.000,00							73.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	5 Unit	45.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Passo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	73.500.000,00	UPTD SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						45.000.000,00							73.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	12 Unit	45.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Passo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	73.500.000,00	UPTD SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						45.000.000,00							166.026.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	45.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Passo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	166.026.000,00	UPTD SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN
	3.27.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						50.000.000,00							136.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	50.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Passo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	136.500.000,00	UPTD SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN
294.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**						**1.150.335.600,00**							**1.259.887.600,00**	
			Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	-		-	100 %	92.624.000,00						-	194.510.000,00	
	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian						657.616.600,00					-		776.887.600,00	
		-						657.616.600,00					-		776.887.600,00	
			Jumlah Penyuluh pertanian swadaya dan/atau penyuluh pertanian swasta yang mendapatkan pembinaan	-		-	-	477.030.600,00						-	576.887.600,00	
	3.27.07.1.01.0006	Pembinaan penyuluh pertanian swadaya dan swasta lintas kabupaten/kota						92.624.000,00							194.510.000,00	
		Terlaksananya pembinaan penyuluh pertanian swadaya dan swasta lintas kabupaten/kota	Jumlah Penyuluh pertanian swadaya dan/atau penyuluh pertanian swasta yang mendapatkan pembinaan	-		-	55 Orang	92.624.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Baguala || Desa Passo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	194.510.000,00	UPTD SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		DINAS KEHUTANAN						**52.871.278.415,00**							**51.664.853.354,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**52.871.278.415,00**							**51.664.853.354,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**52.871.278.415,00**							**51.664.853.354,00**	
295.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**39.820.511.440,00**							**41.954.103.911,00**	
			Nilai Sakip Perangkat Daerah	-		-	80 Point	38.313.615.800,00						-	38.866.575.194,00	
			Nilai Sakip Perangkat Daerah (dengan satuan : Point)	-		-	80 Point	100.000.000,00						-	405.460.000,00	
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						130.180.500,00					Dinas Kehutanan		624.710.000,00	
		-						130.180.500,00					Dinas Kehutanan		624.710.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-		-	-	0,00						-	7.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	11.212.000,00						-	11.550.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	42.291.500,00						-	355.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	10.139.000,00						-	12.705.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	11.784.000,00						-	12.705.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	54.754.000,00						-	225.750.000,00	
	3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						42.291.500,00							355.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	3 Dokumen	42.291.500,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	355.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						11.784.000,00							12.705.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	11.784.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	12.705.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						11.212.000,00							11.550.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	11.212.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	11.550.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						10.139.000,00							12.705.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	10.139.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	12.705.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						54.754.000,00							225.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	1 Laporan	54.754.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	225.750.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						0,00							7.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-		-	1 Data	0,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	7.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						36.538.495.000,00					Dinas dan UPTD KPH Kehutanan		36.613.077.605,00	
		-						36.538.495.000,00					Dinas dan UPTD KPH Kehutanan		36.613.077.605,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	638.440.000,00						-	713.022.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	35.900.055.000,00						-	35.900.055.605,00	
	3.28.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						35.900.055.000,00							35.900.055.605,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	339 Orang/ Bulan	35.900.055.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	35.900.055.605,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						250.000.000,00							234.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	1 Dokumen	250.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	234.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						369.488.000,00					Dinas dan UPTD KPH Kehutanan		294.823.000,00	
		-						369.488.000,00					Dinas dan UPTD KPH Kehutanan		294.823.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	369.488.000,00						-	294.823.000,00	
	3.28.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan PengendalianBarang Milik Daerah pada SKPD						369.488.000,00							294.823.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	1 Laporan	369.488.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	294.823.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						130.904.000,00					Dinas dan UPTD KPH Kehutanan		150.705.000,00	
		-						130.904.000,00					Dinas dan UPTD KPH Kehutanan		150.705.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	-	130.904.000,00						-	138.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	-		-	-	0,00						-	12.705.000,00	
	3.28.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai						130.904.000,00							138.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	1 Dokumen	130.904.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	138.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun						0,00							12.705.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	-		-	5 Orang	0,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	12.705.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						832.663.940,00					Dinas dan UPTD KPH Kehutanan		1.908.265.866,00	
		-						832.663.940,00					Dinas dan UPTD KPH Kehutanan		1.908.265.866,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-		-	-	0,00						-	112.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	89.414.000,00						-	139.902.150,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	539.027.000,00						-	1.259.147.899,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	97.430.350,00						-	153.897.361,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	45.450.500,00						-	74.949.275,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	18.557.800,00						-	33.900.281,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	41.492.890,00						-	98.872.300,00	
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						13.760.000,00							21.386.931,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	13.760.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	21.386.931,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						28.973.250,00							72.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	28.973.250,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	72.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						49.186.050,00							91.400.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	49.186.050,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	91.400.000,00	DINAS KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						33.790.000,00							48.250.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	33.790.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	48.250.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						69.615.000,00							120.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	69.615.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	120.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						198.024.000,00							325.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	10 Laporan	198.024.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	325.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						0,00							112.000.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	112.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						169.120.000,00					Dinas dan UPTD KPH Kehutanan		538.086.000,00	
		-						169.120.000,00					Dinas dan UPTD KPH Kehutanan		538.086.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	124.920.000,00						-	127.418.500,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	95.287.500,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	44.200.000,00						-	129.380.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	186.000.000,00	
	3.28.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							95.287.500,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	2 Unit	0,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	95.287.500,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						100.000.000,00							57.172.500,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	1 Paket	100.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	57.172.500,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							67.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	2 Unit	0,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	67.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							186.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	2 Unit	0,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	186.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						343.950.000,00					Dinas dan UPTD KPH Kehutanan		511.792.650,00	
		-						343.950.000,00					Dinas dan UPTD KPH Kehutanan		511.792.650,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	333.550.000,00						-	485.409.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	10.400.000,00						-	26.383.250,00	
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.000.000,00							20.963.250,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	20.963.250,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						153.600.000,00							163.442.400,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	153.600.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	163.442.400,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.305.710.000,00					Dinas dan UPTD KPH Kehutanan		1.312.643.790,00	
		-						1.305.710.000,00					Dinas dan UPTD KPH Kehutanan		1.312.643.790,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	176.250.000,00						-	108.256.508,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	-	1.033.340.000,00						-	1.010.807.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	18.120.000,00						-	72.535.700,00	
	3.28.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						802.900.000,00							587.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	53 Unit	802.900.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	587.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						13.140.000,00							44.467.500,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	51 Unit	13.140.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	44.467.500,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						165.000.000,00							81.281.508,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	5 Unit	165.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	81.281.508,00	DINAS KEHUTANAN
296.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**						**13.974.314.315,00**							**11.508.489.127,00**	
			Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB	-		-	0.57 %	13.115.926.515,00						-	10.041.199.160,00	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi						406.037.000,00					UPTD 11 Kabupaten / Kota		781.762.000,00	
		-						406.037.000,00					UPTD 11 Kabupaten / Kota		781.762.000,00	
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	-		-	-	406.037.000,00						-	781.762.000,00	
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH						406.037.000,00							750.000.000,00	
		Terpeliharanya Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	-		-	11 Unit	406.037.000,00	Provinsi Maluku	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	750.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung						516.988.200,00					Pemegang Ijin Wirausaha di Bidang Kehutanan		692.823.250,00	
		-						516.988.200,00					Pemegang Ijin Wirausaha di Bidang Kehutanan		692.823.250,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	-		-	-	131.374.000,00						-	298.567.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	-		-	-	267.247.200,00						-	264.076.250,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	-		-	-	118.367.000,00						-	130.179.500,00	
	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi						131.374.000,00							298.567.500,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	-		-	6 Dokumen	131.374.000,00	Provinsi Maluku	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	298.567.500,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0010	Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi						118.367.000,00							130.179.500,00	
		Dilakukannya penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	-		-	12 Dokumen	118.367.000,00	Provinsi Maluku	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	130.179.500,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi						250.000.000,00							252.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	-		-	11 Dokumen	250.000.000,00	Provinsi Maluku	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	252.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara						10.690.254.915,00					Masyarakat dan lahan kritis di luar kawasan hutan negara		7.850.000.000,00	
		-						10.690.254.915,00					Masyarakat dan lahan kritis di luar kawasan hutan negara		7.850.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	-		-	-	109.508.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	-		-	-	91.810.000,00						-	0,00	
			Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	-		-	-	1.578.123.000,00						-	1.650.000.000,00	
			Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	-		-	-	2.217.595.000,00						-	0,00	
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	-		-	-	6.582.001.215,00						-	6.200.000.000,00	
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	-		-	-	111.217.700,00						-	0,00	
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)						109.508.000,00							0,00	
		Tersusunnya Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	-		-	1 Dokumen	109.508.000,00	Provinsi Maluku	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara						6.582.001.215,00							6.200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangunnya Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	-		-	125 Ha	6.582.001.215,00	Provinsi Maluku	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	6.200.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara						111.217.700,00							0,00	
		Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	-		-	4 Ha	111.217.700,00	Provinsi Maluku	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0007	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan						2.217.595.000,00							0,00	
		Diterapkannya Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	-		-	2 Ha	2.217.595.000,00	Provinsi Maluku	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan						91.810.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	-		-	5 Laporan	91.810.000,00	Provinsi Maluku	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan						1.578.123.000,00							1.650.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Rehabilitasi Mangrove Di Luar Kawasan Hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	-		-	31 Ha	1.578.123.000,00	Provinsi Maluku	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	1.650.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi						2.083.011.700,00					Pelaku usaha bidang kehutanan dan masyarakat sekitar hutan		1.954.646.060,00	
		-						2.083.011.700,00					Pelaku usaha bidang kehutanan dan masyarakat sekitar hutan		1.954.646.060,00	
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	-		-	-	1.499.688.700,00						-	798.275.500,00	
			Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	-		-	-	199.898.200,00						-	219.989.660,00	
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan						1.319.995.400,00							539.962.500,00	
		Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	-		-	6 Laporan	1.319.995.400,00	Provinsi Maluku	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	539.962.500,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0009	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal						199.898.200,00							219.989.660,00	
		Terlaksananya Pengamanan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	-		-	12 Operasi	199.898.200,00	Provinsi Maluku	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	219.989.660,00	DINAS KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
297.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**						**1.201.000.000,00**							**2.515.777.846,00**	
			Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang terfasilitasi	-		-	15 Kelompok	1.201.000.000,00						-	2.326.209.000,00	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan						1.201.000.000,00					Kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) dan Kelompok Tani Hutan		2.515.777.846,00	
		-						1.201.000.000,00					Kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) dan Kelompok Tani Hutan		2.515.777.846,00	
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-		-	-	667.810.000,00						-	1.139.568.846,00	
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	-		-	-	533.190.000,00						-	1.376.209.000,00	
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial						533.190.000,00							1.376.209.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	-		-	14 Unit	533.190.000,00	Provinsi Maluku	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	1.376.209.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0011	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan						667.810.000,00							950.000.000,00	
		Peningkatan kelas Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-		-	15 Kelompok	667.810.000,00	Provinsi Maluku	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	950.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
298.	**3.28.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**						**140.736.100,00**							**0,00**	
			Terkelolanya DAS Lintas Kabupaten/Kota	-		-	4 Kegiatan	140.736.100,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						140.736.100,00					Pemerintah Daerah Lintas Sektor dan Masyarakat Wilayah DAS		0,00	
		-						140.736.100,00					Pemerintah Daerah Lintas Sektor dan Masyarakat Wilayah DAS		0,00	
			Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan	-		-	-	100.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	-		-	-	40.736.100,00						-	0,00	
	3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS						40.736.100,00							0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	-		-	Jumlah Orang	40.736.100,00	Provinsi Maluku	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.06.1.01.0007	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah						100.000.000,00							0,00	
		Tersusunnya dan ditetapkannya Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan	-		-	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Maluku	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	0,00	DINAS KEHUTANAN
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) AMBON KELAS A						**229.400.000,00**							**42.900.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**229.400.000,00**							**42.900.000,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**229.400.000,00**							**42.900.000,00**	
299.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**39.820.511.440,00**							**41.954.103.911,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Nilai Sakip Perangkat Daerah	-		-	80 Point	129.400.000,00						-	42.900.000,00	
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						36.538.495.000,00					Kantor KPH		36.613.077.605,00	
		-						36.538.495.000,00					Kantor KPH		36.613.077.605,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	638.440.000,00						-	713.022.000,00	
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						33.240.000,00							42.900.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	1 Dokumen	33.240.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	42.900.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) AMBON KELAS A
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						832.663.940,00					Kantor KPH		1.908.265.866,00	
		-						832.663.940,00					Kantor KPH		1.908.265.866,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	89.414.000,00						-	139.902.150,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	539.027.000,00						-	1.259.147.899,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	97.430.350,00						-	153.897.361,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	45.450.500,00						-	74.949.275,00	
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						7.303.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	7.303.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) AMBON KELAS A
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.015.000,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.015.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) AMBON KELAS A
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						4.648.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	4.648.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) AMBON KELAS A
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						29.794.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	29.794.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) AMBON KELAS A
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						343.950.000,00					Kantor KPH		511.792.650,00	
		-						343.950.000,00					Kantor KPH		511.792.650,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	333.550.000,00						-	485.409.400,00	
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						29.400.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	29.400.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) AMBON KELAS A
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.305.710.000,00					Kantor KPH		1.312.643.790,00	
		-						1.305.710.000,00					Kantor KPH		1.312.643.790,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	78.000.000,00						-	104.214.082,00	
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						23.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	5 Unit	23.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) AMBON KELAS A
300.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**						**13.974.314.315,00**							**11.508.489.127,00**	
			Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB	-		-	0.57 %	70.667.000,00						-	0,00	
			-	-		-	-	29.333.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)						255.839.500,00					UTPD KPH		199.064.600,00	
		-						255.839.500,00					UTPD KPH		199.064.600,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	-		-	-	255.839.500,00						-	199.064.600,00	
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan						29.333.000,00							0,00	
		Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	-		-	2 Dokumen	29.333.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) AMBON KELAS A
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi						2.083.011.700,00					KPH dan masyarakat dalam wilayah KPH		1.954.646.060,00	
		-						2.083.011.700,00					KPH dan masyarakat dalam wilayah KPH		1.954.646.060,00	
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	-		-	-	1.499.688.700,00						-	798.275.500,00	
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	-		-	-	107.242.800,00						-	149.480.500,00	
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan						38.668.000,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	-		-	1 Dokumen	38.668.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) AMBON KELAS A

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan						31.999.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	-		-	1 Laporan	31.999.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) AMBON KELAS A
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MALUKU TENGAH KELAS A						**221.300.700,00**							**463.582.722,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**221.300.700,00**							**463.582.722,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**221.300.700,00**							**463.582.722,00**	
301.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**39.820.511.440,00**							**41.954.103.911,00**	
			Nilai Sakip Perangkat Daerah	-		-	80 Point	121.300.700,00						-	333.991.350,00	
			Nilai Sakip Perangkat Daerah (dengan satuan : Point)	-		-	80 Point	0,00						-	16.830.000,00	
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						36.538.495.000,00					UPTD KPH		36.613.077.605,00	
		-						36.538.495.000,00					UPTD KPH		36.613.077.605,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	638.440.000,00						-	713.022.000,00	
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						33.240.000,00							43.758.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	1 Dokumen	33.240.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	43.758.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MALUKU TENGAH KELAS A

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						832.663.940,00					UPTD KPH		1.908.265.866,00	
		-						832.663.940,00					UPTD KPH		1.908.265.866,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	89.414.000,00						-	139.902.150,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	539.027.000,00						-	1.259.147.899,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	97.430.350,00						-	153.897.361,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	45.450.500,00						-	74.949.275,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.291.400,00						-	35.596.600,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	41.492.890,00						-	98.872.300,00	
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							11.220.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	0,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	11.220.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MALUKU TENGAH KELAS A
	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						1.757.200,00							3.085.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	1.757.200,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	3.085.500,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MALUKU TENGAH KELAS A
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						4.564.000,00							6.171.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	4.564.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	6.171.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MALUKU TENGAH KELAS A
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						907.500,00							1.234.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	907.500,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	1.234.200,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MALUKU TENGAH KELAS A
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						3.652.000,00							2.496.450,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	3.652.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	2.496.450,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MALUKU TENGAH KELAS A
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						19.180.000,00							102.102.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	19.180.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	102.102.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MALUKU TENGAH KELAS A
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						169.120.000,00					-		538.086.000,00	
		-						169.120.000,00					-		538.086.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	44.200.000,00						-	129.380.000,00	
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							16.830.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	2 Unit	0,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	16.830.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MALUKU TENGAH KELAS A
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						343.950.000,00					-		511.792.650,00	
		-						343.950.000,00					-		511.792.650,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	333.550.000,00						-	485.409.400,00	
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						21.000.000,00							43.197.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	21.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	43.197.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MALUKU TENGAH KELAS A
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.305.710.000,00					-		1.312.643.790,00	
		-						1.305.710.000,00					-		1.312.643.790,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	-	1.033.340.000,00						-	1.010.807.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	18.120.000,00						-	72.535.700,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	0,00						-	16.830.000,00	
	3.28.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						37.000.000,00							97.614.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	3 Unit	37.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	97.614.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MALUKU TENGAH KELAS A
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							6.283.200,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	2 Unit	0,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	6.283.200,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MALUKU TENGAH KELAS A
	3.28.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							16.830.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	0,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	16.830.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MALUKU TENGAH KELAS A
302.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**						**13.974.314.315,00**							**11.508.489.127,00**	
			Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB	-		-	0.57 %	73.012.500,00						-	69.452.900,00	
			-	-		-	-	26.987.500,00						-	43.308.472,00	
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)						255.839.500,00					UPTD KPH		199.064.600,00	
		-						255.839.500,00					UPTD KPH		199.064.600,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	-		-	-	255.839.500,00						-	199.064.600,00	
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan						26.987.500,00							35.349.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	-		-	1 Dokumen	26.987.500,00	Provinsi Maluku	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	35.349.600,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MALUKU TENGAH KELAS A
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi						2.083.011.700,00					UPTD KPH		1.954.646.060,00	
		-						2.083.011.700,00					UPTD KPH		1.954.646.060,00	
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	-		-	-	1.499.688.700,00						-	798.275.500,00	
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	-		-	-	238.172.000,00						-	406.900.400,00	
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan						25.430.500,00							37.955.500,00	
		Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	-		-	1 Laporan	25.430.500,00	Provinsi Maluku	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	37.955.500,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MALUKU TENGAH KELAS A
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan						47.582.000,00							31.497.400,00	
		Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	-		-	130 Ha	47.582.000,00	Provinsi Maluku	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	31.497.400,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MALUKU TENGAH KELAS A
	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun						22.183.000,00					UPTD KPH		20.663.872,00	
		-						22.183.000,00					UPTD KPH		20.663.872,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindaklanjutnya berupa pengenaan Sanksi Adminsitratif	-		-	-	22.183.000,00						-	20.663.872,00	
	3.28.03.1.07.0005	Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi						0,00							7.958.872,00	
		Terlaksananya Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah	Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindaklanjutnya berupa pengenaan Sanksi Adminsitratif	-		-	10 Unit Managemen	0,00	Provinsi Maluku	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	7.958.872,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MALUKU TENGAH KELAS A
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) SERAM BAGIAN BARAT KELAS A						**351.809.900,00**							**465.031.001,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**351.809.900,00**							**465.031.001,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**351.809.900,00**							**465.031.001,00**	
303.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**39.820.511.440,00**							**41.954.103.911,00**	
			Nilai Sakip Perangkat Daerah	-		-	80 Point	182.860.100,00						-	274.539.906,00	
			Nilai Sakip Perangkat Daerah (dengan satuan : Point)	-		-	80 Point	14.500.000,00						-	17.500.000,00	
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						36.538.495.000,00					UPTD KPH		36.613.077.605,00	
		-						36.538.495.000,00					UPTD KPH		36.613.077.605,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	638.440.000,00						-	713.022.000,00	
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						45.600.000,00							42.900.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	1 Dokumen	45.600.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	42.900.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) SERAM BAGIAN BARAT KELAS A
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						832.663.940,00					UPTD KPH		1.908.265.866,00	
		-						832.663.940,00					UPTD KPH		1.908.265.866,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	89.414.000,00						-	139.902.150,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	539.027.000,00						-	1.259.147.899,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	97.430.350,00						-	153.897.361,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	45.450.500,00						-	74.949.275,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	18.557.800,00						-	33.900.281,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	41.492.890,00						-	98.872.300,00	
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						955.000,00							635.250,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	0 Paket	955.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	635.250,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) SERAM BAGIAN BARAT KELAS A
	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						3.457.000,00							4.065.600,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	3.457.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	4.065.600,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) SERAM BAGIAN BARAT KELAS A
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						11.197.100,00							11.110.281,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	11.197.100,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	11.110.281,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) SERAM BAGIAN BARAT KELAS A

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.370.000,00							2.731.575,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.370.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	2.731.575,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) SERAM BAGIAN BARAT KELAS A
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						6.237.000,00							6.860.700,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	6.237.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	6.860.700,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) SERAM BAGIAN BARAT KELAS A
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						44.914.000,00							116.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	44.914.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	116.600.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) SERAM BAGIAN BARAT KELAS A
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						169.120.000,00					UPTD KPH		538.086.000,00	
		-						169.120.000,00					UPTD KPH		538.086.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	44.200.000,00						-	129.380.000,00	
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						14.500.000,00							17.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	2 Unit	14.500.000,00	Provinsi Maluku || Kab. Seram Bagian Barat || Kecamatan Seram Barat || Desa Piru || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	17.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) SERAM BAGIAN BARAT KELAS A
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						343.950.000,00					UPTD KPH		511.792.650,00	
		-						343.950.000,00					UPTD KPH		511.792.650,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	333.550.000,00						-	485.409.400,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	10.400.000,00						-	26.383.250,00	
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						600.000,00							935.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	600.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	935.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) SERAM BAGIAN BARAT KELAS A
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						18.600.000,00							35.200.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	18.600.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	35.200.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) SERAM BAGIAN BARAT KELAS A
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.305.710.000,00					UPTD KPH		1.312.643.790,00	
		-						1.305.710.000,00					UPTD KPH		1.312.643.790,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	176.250.000,00						-	108.256.508,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	-	1.033.340.000,00						-	1.010.807.500,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	18.120.000,00						-	72.535.700,00	
	3.28.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						40.000.000,00							41.926.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	1 Unit	40.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	41.926.500,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) SERAM BAGIAN BARAT KELAS A
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						3.680.000,00							6.325.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	2 Unit	3.680.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	6.325.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) SERAM BAGIAN BARAT KELAS A
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						5.250.000,00							5.250.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	5.250.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	5.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) SERAM BAGIAN BARAT KELAS A
304.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**						**13.974.314.315,00**							**11.508.489.127,00**	
			Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB	-		-	0.57 %	88.045.800,00						-	95.756.750,00	
			-	-		-	-	66.404.000,00						-	22.234.345,00	
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)						255.839.500,00					UPTD KPH		199.064.600,00	
		-						255.839.500,00					UPTD KPH		199.064.600,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	-		-	-	255.839.500,00						-	199.064.600,00	
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan						44.221.000,00							0,00	
		Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	-		-	1 Dokumen	44.221.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) SERAM BAGIAN BARAT KELAS A
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung						516.988.200,00					UPTD KPH		692.823.250,00	
		-						516.988.200,00					UPTD KPH		692.823.250,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	-		-	-	267.247.200,00						-	264.076.250,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi						17.247.200,00							11.576.250,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	-		-	0 Dokumen	17.247.200,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	11.576.250,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) SERAM BAGIAN BARAT KELAS A
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi						2.083.011.700,00					UPTD KPH		1.954.646.060,00	
		-						2.083.011.700,00					UPTD KPH		1.954.646.060,00	
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	-		-	-	1.499.688.700,00						-	798.275.500,00	
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	-		-	-	107.242.800,00						-	149.480.500,00	
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	-		-	-	238.172.000,00						-	406.900.400,00	
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan						47.854.800,00							26.680.500,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	-		-	1 Dokumen	47.854.800,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	26.680.500,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) SERAM BAGIAN BARAT KELAS A
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan						22.943.800,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	-		-	1 Laporan	22.943.800,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	30.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) SERAM BAGIAN BARAT KELAS A
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan						0,00							27.500.000,00	
		Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	-		-	10 Ha	0,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	27.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) SERAM BAGIAN BARAT KELAS A
	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)						0,00					UPTD KPH		9.529.345,00	
		-						0,00					UPTD KPH		9.529.345,00	
			Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	-		-	-	0,00						-	9.529.345,00	
	3.28.03.1.06.0008	Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi						0,00							9.529.345,00	
		Terlaksananya Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK)	Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	-		-	1 Unit Managemen	0,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	9.529.345,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) SERAM BAGIAN BARAT KELAS A
	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun						22.183.000,00					UPTD KPH		20.663.872,00	
		-						22.183.000,00					UPTD KPH		20.663.872,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindaklanjutnya berupa pengenaan Sanksi Adminsitratif	-		-	-	22.183.000,00						-	20.663.872,00	
	3.28.03.1.07.0005	Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi						22.183.000,00							12.705.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah	Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindaklanjutnya berupa pengenaan Sanksi Adminsitratif	-		-	1 Unit Managemen	22.183.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	12.705.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) SERAM BAGIAN BARAT KELAS A
305.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**						**1.201.000.000,00**							**2.515.777.846,00**	
			Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang terfasilitasi	-		-	15 Kelompok	0,00						-	55.000.000,00	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan						1.201.000.000,00					UPTD KPH		2.515.777.846,00	
		-						1.201.000.000,00					UPTD KPH		2.515.777.846,00	
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-		-	-	667.810.000,00						-	1.139.568.846,00	
	3.28.05.1.01.0011	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan						0,00							55.000.000,00	
		Peningkatan kelas Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-		-	1 Kelompok	0,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	55.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) SERAM BAGIAN BARAT KELAS A
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) SERAM BAGIAN TIMUR KELAS A						**212.601.000,00**							**416.319.082,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**212.601.000,00**							**416.319.082,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**212.601.000,00**							**416.319.082,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
306.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**39.820.511.440,00**							**41.954.103.911,00**	
			Nilai Sakip Perangkat Daerah	-		-	80 Point	109.904.000,00						-	277.002.582,00	
			Nilai Sakip Perangkat Daerah (dengan satuan : Point)	-		-	80 Point	25.000.000,00						-	22.000.000,00	
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						36.538.495.000,00					UPTD KPH		36.613.077.605,00	
		-						36.538.495.000,00					UPTD KPH		36.613.077.605,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	638.440.000,00						-	713.022.000,00	
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						33.240.000,00							42.900.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	1 Dokumen	33.240.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	42.900.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) SERAM BAGIAN TIMUR KELAS A
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						832.663.940,00					UPTD KPH		1.908.265.866,00	
		-						832.663.940,00					UPTD KPH		1.908.265.866,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	89.414.000,00						-	139.902.150,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	539.027.000,00						-	1.259.147.899,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	97.430.350,00						-	153.897.361,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	45.450.500,00						-	74.949.275,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	18.557.800,00						-	33.900.281,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.291.400,00						-	35.596.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	41.492.890,00						-	98.872.300,00	
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.104.000,00							2.310.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	1.104.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	2.310.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) SERAM BAGIAN TIMUR KELAS A
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							16.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	0,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	16.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) SERAM BAGIAN TIMUR KELAS A
	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						1.889.000,00							8.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	1.889.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	8.800.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) SERAM BAGIAN TIMUR KELAS A
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						2.878.000,00							5.629.800,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.878.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	5.629.800,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) SERAM BAGIAN TIMUR KELAS A
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						750.000,00							4.708.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	750.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	4.708.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) SERAM BAGIAN TIMUR KELAS A
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						0,00							5.995.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	0,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	5.995.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) SERAM BAGIAN TIMUR KELAS A
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						31.843.000,00							97.825.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	3 Laporan	31.843.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	97.825.700,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) SERAM BAGIAN TIMUR KELAS A
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						169.120.000,00					UPTD KPH		538.086.000,00	
		-						169.120.000,00					UPTD KPH		538.086.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	44.200.000,00						-	129.380.000,00	
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						25.000.000,00							22.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	25.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	22.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) SERAM BAGIAN TIMUR KELAS A
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						343.950.000,00					UPTD KPH		511.792.650,00	
		-						343.950.000,00					UPTD KPH		511.792.650,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	333.550.000,00						-	485.409.400,00	
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						13.200.000,00							37.620.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	13.200.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	37.620.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) SERAM BAGIAN TIMUR KELAS A
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.305.710.000,00					UPTD KPH		1.312.643.790,00	
		-						1.305.710.000,00					UPTD KPH		1.312.643.790,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	78.000.000,00						-	104.214.082,00	
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						25.000.000,00							54.714.082,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	1 Unit	25.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	54.714.082,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) SERAM BAGIAN TIMUR KELAS A
307.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**						**13.974.314.315,00**							**11.508.489.127,00**	
			Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB	-		-	0.57 %	55.800.000,00						-	44.057.500,00	
			-	-		-	-	21.897.000,00						-	24.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)						255.839.500,00					UPTD KPH		199.064.600,00	
		-						255.839.500,00					UPTD KPH		199.064.600,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	-		-	-	255.839.500,00						-	199.064.600,00	
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan						21.897.000,00							24.500.000,00	
		Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	-		-	1 Dokumen	21.897.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	24.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) SERAM BAGIAN TIMUR KELAS A
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi						2.083.011.700,00					UPTD KPH		1.954.646.060,00	
		-						2.083.011.700,00					UPTD KPH		1.954.646.060,00	
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	-		-	-	1.499.688.700,00						-	798.275.500,00	
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	-		-	-	238.172.000,00						-	406.900.400,00	
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan						19.800.000,00							19.057.500,00	
		Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	-		-	2 Laporan	19.800.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	19.057.500,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) SERAM BAGIAN TIMUR KELAS A
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan						36.000.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	-		-	30 Ha	36.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	25.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) SERAM BAGIAN TIMUR KELAS A
308.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**						**1.201.000.000,00**							**2.515.777.846,00**	
			Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang terfasilitasi	-		-	15 Kelompok	0,00						-	48.759.000,00	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan						1.201.000.000,00					UPTD KPH		2.515.777.846,00	
		-						1.201.000.000,00					UPTD KPH		2.515.777.846,00	
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-		-	-	667.810.000,00						-	1.139.568.846,00	
	3.28.05.1.01.0011	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan						0,00							48.759.000,00	
		Peningkatan kelas Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-		-	1 Kelompok	0,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	48.759.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) SERAM BAGIAN TIMUR KELAS A
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) BURU KELAS A						**221.045.000,00**							**363.555.600,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**221.045.000,00**							**363.555.600,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**221.045.000,00**							**363.555.600,00**	
309.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**39.820.511.440,00**							**41.954.103.911,00**	
			Nilai Sakip Perangkat Daerah	-		-	80 Point	121.045.000,00						-	240.415.600,00	
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						36.538.495.000,00					UPTD KPH		36.613.077.605,00	
		-						36.538.495.000,00					UPTD KPH		36.613.077.605,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	638.440.000,00						-	713.022.000,00	
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						35.160.000,00							42.900.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	12 Dokumen	35.160.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	42.900.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) BURU KELAS A
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						832.663.940,00					UPTD KPH		1.908.265.866,00	
		-						832.663.940,00					UPTD KPH		1.908.265.866,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	539.027.000,00						-	1.259.147.899,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	97.430.350,00						-	153.897.361,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	45.450.500,00						-	74.949.275,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	18.557.800,00						-	33.900.281,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	41.492.890,00						-	98.872.300,00	
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						900.000,00							1.524.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	900.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	1.524.600,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) BURU KELAS A
	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						1.304.000,00							2.541.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	1.304.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	2.541.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) BURU KELAS A
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						4.323.500,00							8.800.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	4.323.500,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	8.800.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) BURU KELAS A
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						594.500,00							4.950.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	594.500,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	4.950.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) BURU KELAS A
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						34.263.000,00							89.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	4 Laporan	34.263.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	89.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) BURU KELAS A
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						343.950.000,00					UPTD KPH		511.792.650,00	
		-						343.950.000,00					UPTD KPH		511.792.650,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	333.550.000,00						-	485.409.400,00	
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						22.200.000,00							37.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	22.200.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	37.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) BURU KELAS A
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.305.710.000,00					UPTD KPH		1.312.643.790,00	
		-						1.305.710.000,00					UPTD KPH		1.312.643.790,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	-	1.033.340.000,00						-	1.010.807.500,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	18.120.000,00						-	72.535.700,00	
	3.28.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						21.000.000,00							44.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	4 Unit	21.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	44.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) BURU KELAS A
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						1.300.000,00							8.700.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	2 Unit	1.300.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	8.700.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) BURU KELAS A
310.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**						**13.974.314.315,00**							**11.508.489.127,00**	
			Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB	-		-	0.57 %	57.600.000,00						-	76.500.000,00	
			-	-		-	-	42.400.000,00						-	46.640.000,00	
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)						255.839.500,00					UPTD KPH		199.064.600,00	
		-						255.839.500,00					UPTD KPH		199.064.600,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	-		-	-	255.839.500,00						-	199.064.600,00	
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan						42.400.000,00							46.640.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	-		-	1 Dokumen	42.400.000,00	Provinsi Maluku	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	46.640.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) BURU KELAS A
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi						2.083.011.700,00					UPTD KPH		1.954.646.060,00	
		-						2.083.011.700,00					UPTD KPH		1.954.646.060,00	
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	-		-	-	1.499.688.700,00						-	798.275.500,00	
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	-		-	-	238.172.000,00						-	406.900.400,00	
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan						25.200.000,00							38.500.000,00	
		Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	-		-	9 Laporan	25.200.000,00	Provinsi Maluku	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	38.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) BURU KELAS A
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan						32.400.000,00							38.000.000,00	
		Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	-		-	200 Ha	32.400.000,00	Provinsi Maluku	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	38.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) BURU KELAS A
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) BURU SELATAN KELAS A						**210.868.800,00**							**386.603.280,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**210.868.800,00**							**386.603.280,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**210.868.800,00**							**386.603.280,00**	
311.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**39.820.511.440,00**							**41.954.103.911,00**	
			Nilai Sakip Perangkat Daerah	-		-	80 Point	110.868.800,00						-	247.178.280,00	
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						36.538.495.000,00					UPTD KPH		36.613.077.605,00	
		-						36.538.495.000,00					UPTD KPH		36.613.077.605,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	638.440.000,00						-	713.022.000,00	
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						33.240.000,00							42.900.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	1 Dokumen	33.240.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	42.900.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) BURU SELATAN KELAS A
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						832.663.940,00					UPTD KPH		1.908.265.866,00	
		-						832.663.940,00					UPTD KPH		1.908.265.866,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	539.027.000,00						-	1.259.147.899,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	97.430.350,00						-	153.897.361,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	45.450.500,00						-	74.949.275,00	
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						6.681.800,00							7.353.280,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	6.681.800,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	7.353.280,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) BURU SELATAN KELAS A
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.495.000,00							1.625.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	1.495.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	1.625.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) BURU SELATAN KELAS A
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						20.080.000,00							115.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	20.080.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	115.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) BURU SELATAN KELAS A
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						343.950.000,00					UPTD KPH		511.792.650,00	
		-						343.950.000,00					UPTD KPH		511.792.650,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	333.550.000,00						-	485.409.400,00	
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						10.872.000,00							27.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	10.872.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	27.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) BURU SELATAN KELAS A
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.305.710.000,00					UPTD KPH		1.312.643.790,00	
		-						1.305.710.000,00					UPTD KPH		1.312.643.790,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	-	1.033.340.000,00						-	1.010.807.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.28.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						38.500.000,00							52.800.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	2 Unit	38.500.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	52.800.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) BURU SELATAN KELAS A
312.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**						**13.974.314.315,00**							**11.508.489.127,00**	
			Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB	-		-	0.57 %	66.750.000,00						-	102.850.000,00	
			-	-		-	-	33.250.000,00						-	36.575.000,00	
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)						255.839.500,00					UPTD KPH		199.064.600,00	
		-						255.839.500,00					UPTD KPH		199.064.600,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	-		-	-	255.839.500,00						-	199.064.600,00	
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan						33.250.000,00							36.575.000,00	
		Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	-		-	1 Dokumen	33.250.000,00	Provinsi Maluku	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	36.575.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) BURU SELATAN KELAS A
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi						2.083.011.700,00					UPTD KPH		1.954.646.060,00	
		-						2.083.011.700,00					UPTD KPH		1.954.646.060,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	-		-	-	1.499.688.700,00						-	798.275.500,00	
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	-		-	-	238.172.000,00						-	406.900.400,00	
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan						18.750.000,00							49.500.000,00	
		Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	-		-	3 Laporan	18.750.000,00	Provinsi Maluku	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	49.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) BURU SELATAN KELAS A
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan						48.000.000,00							53.350.000,00	
		Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	-		-	30 Ha	48.000.000,00	Provinsi Maluku	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	53.350.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) BURU SELATAN KELAS A
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MALUKU TENGGARA KELAS A						**234.732.461,00**							**445.962.200,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**229.603.040,00**							**436.434.200,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**229.603.040,00**							**436.434.200,00**	
313.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**39.820.511.440,00**							**41.954.103.911,00**	
			Nilai Sakip Perangkat Daerah	-		-	80 Point	123.999.040,00						-	266.619.200,00	
			Nilai Sakip Perangkat Daerah (dengan satuan : Point)	-		-	80 Point	24.920.000,00						-	55.000.000,00	
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						36.538.495.000,00					UPTD KPH		36.613.077.605,00	
		-						36.538.495.000,00					UPTD KPH		36.613.077.605,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	638.440.000,00						-	713.022.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						33.240.000,00							42.900.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	1 Dokumen	33.240.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	42.900.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MALUKU TENGGARA KELAS A
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						832.663.940,00					UPTD KPH		1.908.265.866,00	
		-						832.663.940,00					UPTD KPH		1.908.265.866,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	539.027.000,00						-	1.259.147.899,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	45.450.500,00						-	74.949.275,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	18.557.800,00						-	33.900.281,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.291.400,00						-	35.596.600,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	41.492.890,00						-	98.872.300,00	
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.198.800,00							1.815.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	1.198.800,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	1.815.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MALUKU TENGGARA KELAS A
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							6.352.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	0,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	6.352.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MALUKU TENGGARA KELAS A
	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						1.314.240,00							1.905.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	1.314.240,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	1.905.200,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MALUKU TENGGARA KELAS A
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.500.000,00							2.530.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	1.500.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	2.530.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MALUKU TENGGARA KELAS A
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						32.466.000,00							101.640.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	3 Laporan	32.466.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	101.640.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MALUKU TENGGARA KELAS A
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						169.120.000,00					UPTD KPH		538.086.000,00	
		-						169.120.000,00					UPTD KPH		538.086.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	124.920.000,00						-	127.418.500,00	
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						24.920.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	1 Paket	24.920.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	55.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MALUKU TENGGARA KELAS A
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						343.950.000,00					UPTD KPH		511.792.650,00	
		-						343.950.000,00					UPTD KPH		511.792.650,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	333.550.000,00						-	485.409.400,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	10.400.000,00						-	26.383.250,00	
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.800.000,00							385.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	3 Laporan	1.800.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	385.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MALUKU TENGGARA KELAS A
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						27.480.000,00							49.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	2 Laporan	27.480.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	49.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MALUKU TENGGARA KELAS A
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.305.710.000,00					UPTD KPH		1.312.643.790,00	
		-						1.305.710.000,00					UPTD KPH		1.312.643.790,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	176.250.000,00						-	108.256.508,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	-	1.033.340.000,00						-	1.010.807.500,00	
	3.28.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						25.000.000,00							44.467.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	1 Unit	25.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	44.467.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MALUKU TENGGARA KELAS A
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							15.125.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	15.125.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MALUKU TENGGARA KELAS A
314.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**						**13.974.314.315,00**							**11.508.489.127,00**	
			Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB	-		-	0.57 %	47.730.000,00						-	83.815.000,00	
			-	-		-	-	32.954.000,00						-	31.000.000,00	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi						406.037.000,00					UPTD KPH		781.762.000,00	
		-						406.037.000,00					UPTD KPH		781.762.000,00	
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	-		-	-	406.037.000,00						-	781.762.000,00	
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH						0,00							31.762.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpeliharanya Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	-		-	1 Unit	0,00	Provinsi Maluku	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	31.762.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MALUKU TENGGARA KELAS A
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)						255.839.500,00					UPTD KPH		199.064.600,00	
		-						255.839.500,00					UPTD KPH		199.064.600,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	-		-	-	255.839.500,00						-	199.064.600,00	
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan						32.954.000,00							31.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	-		-	1 Dokumen	32.954.000,00	Provinsi Maluku	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	31.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MALUKU TENGGARA KELAS A
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi						2.083.011.700,00					UPTD KPH		1.954.646.060,00	
		-						2.083.011.700,00					UPTD KPH		1.954.646.060,00	
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	-		-	-	1.499.688.700,00						-	798.275.500,00	
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	-		-	-	238.172.000,00						-	406.900.400,00	
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan						18.000.000,00							23.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	-		-	6 Laporan	18.000.000,00	Provinsi Maluku	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	23.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MALUKU TENGGARA KELAS A
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan						29.730.000,00							28.553.000,00	
		Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	-		-	100 Ha	29.730.000,00	Provinsi Maluku	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	28.553.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MALUKU TENGGARA KELAS A
	X							**5.129.421,00**							**9.528.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**5.129.421,00**							**9.528.000,00**	
315.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**12.541.421,00**							**49.466.910,00**	
			Nilai Sakip Perangkat Daerah	-		-	80 Point	5.129.421,00						-	9.528.000,00	
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						5.129.421,00					UPTD KPH		9.528.000,00	
		-						5.129.421,00					UPTD KPH		9.528.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	5.129.421,00						-	9.528.000,00	
	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						5.129.421,00							9.528.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	5.129.421,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	9.528.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MALUKU TENGGARA KELAS A
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) TUAL KELAS A						**90.652.000,00**							**327.968.946,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**83.240.000,00**							**289.468.946,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**83.240.000,00**							**289.468.946,00**	
316.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**39.820.511.440,00**							**41.954.103.911,00**	
			Nilai Sakip Perangkat Daerah	-		-	80 Point	78.540.000,00						-	225.363.100,00	
			Nilai Sakip Perangkat Daerah (dengan satuan : Point)	-		-	80 Point	4.700.000,00						-	21.296.000,00	
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						36.538.495.000,00					UPTD KPH		36.613.077.605,00	
		-						36.538.495.000,00					UPTD KPH		36.613.077.605,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	638.440.000,00						-	713.022.000,00	
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						18.240.000,00							42.900.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	1 Dokumen	18.240.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	42.900.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) TUAL KELAS A
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						832.663.940,00					UPTD KPH		1.908.265.866,00	
		-						832.663.940,00					UPTD KPH		1.908.265.866,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	539.027.000,00						-	1.259.147.899,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	97.430.350,00						-	153.897.361,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	45.450.500,00						-	74.949.275,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.291.400,00						-	35.596.600,00	
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						1.291.400,00							1.524.600,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	1.291.400,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	1.524.600,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) TUAL KELAS A
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						3.986.100,00							2.668.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	3.986.100,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	2.668.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) TUAL KELAS A
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.527.500,00							1.270.500,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	1.527.500,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	1.270.500,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) TUAL KELAS A
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						28.495.000,00							121.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	28.495.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	121.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) TUAL KELAS A
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						169.120.000,00					UPTD KPH		538.086.000,00	
		-						169.120.000,00					UPTD KPH		538.086.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	124.920.000,00						-	127.418.500,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	44.200.000,00						-	129.380.000,00	
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							15.246.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	1 Paket	0,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	15.246.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) TUAL KELAS A
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4.700.000,00							6.050.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	4 Unit	4.700.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	6.050.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) TUAL KELAS A
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.305.710.000,00					UPTD KPH		1.312.643.790,00	
		-						1.305.710.000,00					UPTD KPH		1.312.643.790,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	-	1.033.340.000,00						-	1.010.807.500,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	18.120.000,00						-	72.535.700,00	
	3.28.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						25.000.000,00							54.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	2 Unit	25.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	54.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) TUAL KELAS A
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	3 Unit	0,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	2.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) TUAL KELAS A
317.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**						**13.974.314.315,00**							**11.508.489.127,00**	
			Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB	-		-	0.57 %	0,00						-	15.000.000,00	
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi						2.083.011.700,00					UPTD KPH		1.954.646.060,00	
		-						2.083.011.700,00					UPTD KPH		1.954.646.060,00	
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	-		-	-	107.242.800,00						-	149.480.500,00	
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan						0,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	15.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) TUAL KELAS A
318.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**						**1.201.000.000,00**							**2.515.777.846,00**	
			Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang terfasilitasi	-		-	15 Kelompok	0,00						-	27.809.846,00	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan						1.201.000.000,00					UPTD KPH		2.515.777.846,00	
		-						1.201.000.000,00					UPTD KPH		2.515.777.846,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-		-	-	667.810.000,00						-	1.139.568.846,00	
	3.28.05.1.01.0011	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan						0,00							27.809.846,00	
		Peningkatan kelas Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-		-	5 Kelompok	0,00	Provinsi Maluku	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	27.809.846,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) TUAL KELAS A
	X							**7.412.000,00**							**38.500.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**7.412.000,00**							**38.500.000,00**	
319.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**12.541.421,00**							**49.466.910,00**	
			Nilai Sakip Perangkat Daerah	-		-	80 Point	7.412.000,00						-	38.500.000,00	
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						7.412.000,00					UPTD KPH		39.938.910,00	
		-						7.412.000,00					UPTD KPH		39.938.910,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	7.412.000,00						-	38.500.000,00	
	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						7.412.000,00							38.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	7.412.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	38.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) TUAL KELAS A
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) KEPULAUAN ARU KELAS A						**83.560.000,00**							**236.360.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**83.560.000,00**							**236.360.000,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**83.560.000,00**							**236.360.000,00**	
320.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**39.820.511.440,00**							**41.954.103.911,00**	
			Nilai Sakip Perangkat Daerah	-		-	80 Point	83.560.000,00						-	126.360.000,00	
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						36.538.495.000,00					ASN dan Kantor KPH		36.613.077.605,00	
		-						36.538.495.000,00					ASN dan Kantor KPH		36.613.077.605,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	638.440.000,00						-	713.022.000,00	
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						33.960.000,00							39.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	1 Dokumen	33.960.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	39.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) KEPULAUAN ARU KELAS A
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						832.663.940,00					Kantor KPH		1.908.265.866,00	
		-						832.663.940,00					Kantor KPH		1.908.265.866,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	97.430.350,00						-	153.897.361,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	45.450.500,00						-	74.949.275,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	18.557.800,00						-	33.900.281,00	
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						0,00							3.300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	0,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	3.300.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) KEPULAUAN ARU KELAS A
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						0,00							11.050.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	0,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	11.050.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) KEPULAUAN ARU KELAS A
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						0,00							3.850.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	0,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	3.850.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) KEPULAUAN ARU KELAS A
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						343.950.000,00					Kantor KPH		511.792.650,00	
		-						343.950.000,00					Kantor KPH		511.792.650,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	333.550.000,00						-	485.409.400,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	10.400.000,00						-	26.383.250,00	
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.000.000,00							4.100.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	3.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	4.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) KEPULAUAN ARU KELAS A
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						15.600.000,00							15.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	15.600.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	15.200.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) KEPULAUAN ARU KELAS A
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.305.710.000,00					Kantor KPH		1.312.643.790,00	
		-						1.305.710.000,00					Kantor KPH		1.312.643.790,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	176.250.000,00						-	108.256.508,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	-	1.033.340.000,00						-	1.010.807.500,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	18.120.000,00						-	72.535.700,00	
	3.28.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						25.000.000,00							38.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	1 Unit	25.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	38.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) KEPULAUAN ARU KELAS A
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							4.760.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	1 Unit	0,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	4.760.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) KEPULAUAN ARU KELAS A
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						6.000.000,00							6.600.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	6.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	6.600.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) KEPULAUAN ARU KELAS A
321.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**						**13.974.314.315,00**							**11.508.489.127,00**	
			Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB	-		-	0.57 %	0,00						-	110.000.000,00	
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi						2.083.011.700,00					KPH dan masyarakat dalam wilayah KPH		1.954.646.060,00	
		-						2.083.011.700,00					KPH dan masyarakat dalam wilayah KPH		1.954.646.060,00	
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	-		-	-	238.172.000,00						-	406.900.400,00	
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan						0,00							110.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	-		-	0 Ha	0,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	110.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) KEPULAUAN ARU KELAS A
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MALUKU TENGGARA BARAT KELAS A						**212.518.000,00**							**659.661.496,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**212.518.000,00**							**658.222.586,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**212.518.000,00**							**658.222.586,00**	
322.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**39.820.511.440,00**							**41.954.103.911,00**	
			Nilai Sakip Perangkat Daerah	-		-	80 Point	130.048.000,00						-	233.222.586,00	
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						36.538.495.000,00					ASN dan Kantor KPH		36.613.077.605,00	
		-						36.538.495.000,00					ASN dan Kantor KPH		36.613.077.605,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	638.440.000,00						-	713.022.000,00	
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						38.760.000,00							42.900.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	1 Dokumen	38.760.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	42.900.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MALUKU TENGGARA BARAT KELAS A
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						832.663.940,00					Kantor KPH		1.908.265.866,00	
		-						832.663.940,00					Kantor KPH		1.908.265.866,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	89.414.000,00						-	139.902.150,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	539.027.000,00						-	1.259.147.899,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	97.430.350,00						-	153.897.361,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	41.492.890,00						-	98.872.300,00	
	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						2.231.200,00							2.750.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.231.200,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MALUKU TENGGARA BARAT KELAS A
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						4.225.800,00							3.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	4.225.800,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	3.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MALUKU TENGGARA BARAT KELAS A
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						2.832.000,00							1.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	2.832.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	1.800.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MALUKU TENGGARA BARAT KELAS A
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						38.751.000,00							91.522.586,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	2 Laporan	38.751.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	91.522.586,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MALUKU TENGGARA BARAT KELAS A
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						343.950.000,00					ASN dan Kantor KPH		511.792.650,00	
		-						343.950.000,00					ASN dan Kantor KPH		511.792.650,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	333.550.000,00						-	485.409.400,00	
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						13.248.000,00							41.250.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	13.248.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	41.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MALUKU TENGGARA BARAT KELAS A
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.305.710.000,00					Kantor KPH		1.312.643.790,00	
		-						1.305.710.000,00					Kantor KPH		1.312.643.790,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	78.000.000,00						-	104.214.082,00	
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						30.000.000,00							49.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	2 Unit	30.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	49.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MALUKU TENGGARA BARAT KELAS A
323.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**						**13.974.314.315,00**							**11.508.489.127,00**	
			Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB	-		-	0.57 %	82.470.000,00						-	425.000.000,00	
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi						2.083.011.700,00					KPH dan masyarakat dalam wilayah KPH		1.954.646.060,00	
		-						2.083.011.700,00					KPH dan masyarakat dalam wilayah KPH		1.954.646.060,00	
			Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	-		-	-	38.010.000,00						-	380.000.000,00	
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	-		-	-	238.172.000,00						-	406.900.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.28.03.1.05.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan						38.010.000,00							380.000.000,00	
		Terlaksananya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	-		-	5 Operasi	38.010.000,00	Provinsi Maluku	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	380.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MALUKU TENGGARA BARAT KELAS A
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan						44.460.000,00							45.000.000,00	
		Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	-		-	30 Ha	44.460.000,00	Provinsi Maluku	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	45.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MALUKU TENGGARA BARAT KELAS A
	X							**0,00**							**1.438.910,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**0,00**							**1.438.910,00**	
324.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**12.541.421,00**							**49.466.910,00**	
			Nilai Sakip Perangkat Daerah	-		-	80 Point	0,00						-	1.438.910,00	
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						7.412.000,00					ASN dan Kantor KPH		39.938.910,00	
		-						7.412.000,00					ASN dan Kantor KPH		39.938.910,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	0,00						-	1.438.910,00	
	X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00							1.438.910,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	0,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	1.438.910,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MALUKU TENGGARA BARAT KELAS A
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MALUKU BARAT DAYA KELAS A						**209.337.000,00**							**555.040.113,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**209.337.000,00**							**555.040.113,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**209.337.000,00**							**555.040.113,00**	
325.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**39.820.511.440,00**							**41.954.103.911,00**	
			Nilai Sakip Perangkat Daerah	-		-	80 Point	146.250.000,00						-	256.440.113,00	
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						36.538.495.000,00					UPTD KPH		36.613.077.605,00	
		-						36.538.495.000,00					UPTD KPH		36.613.077.605,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	638.440.000,00						-	713.022.000,00	
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						50.520.000,00							53.064.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	1 Dokumen	50.520.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	53.064.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MALUKU BARAT DAYA KELAS A
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						832.663.940,00					UPTD KPH		1.908.265.866,00	
		-						832.663.940,00					UPTD KPH		1.908.265.866,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	89.414.000,00						-	139.902.150,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	539.027.000,00						-	1.259.147.899,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	97.430.350,00						-	153.897.361,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	45.450.500,00						-	74.949.275,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	18.557.800,00						-	33.900.281,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	41.492.890,00						-	98.872.300,00	
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						640.000,00							2.928.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	640.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	2.928.500,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MALUKU BARAT DAYA KELAS A
	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						567.000,00							3.225.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	567.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	3.225.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MALUKU BARAT DAYA KELAS A
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						3.085.000,00							6.215.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	3.085.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	6.215.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MALUKU BARAT DAYA KELAS A

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						501.000,00							3.800.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	501.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	3.800.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MALUKU BARAT DAYA KELAS A
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						2.430.000,00							2.750.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	2.430.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MALUKU BARAT DAYA KELAS A
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						61.217.000,00							99.457.613,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	5 Laporan	61.217.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	99.457.613,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MALUKU BARAT DAYA KELAS A
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						343.950.000,00					UPTD KPH		511.792.650,00	
		-						343.950.000,00					UPTD KPH		511.792.650,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	333.550.000,00						-	485.409.400,00	
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						8.350.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	8.350.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	35.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MALUKU BARAT DAYA KELAS A
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.305.710.000,00					UPTD KPH		1.312.643.790,00	
		-						1.305.710.000,00					UPTD KPH		1.312.643.790,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	-	1.033.340.000,00						-	1.010.807.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.28.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						18.940.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	2 Unit	18.940.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	50.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MALUKU BARAT DAYA KELAS A
326.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**						**13.974.314.315,00**							**11.508.489.127,00**	
			Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB	-		-	0.57 %	38.290.000,00						-	215.600.000,00	
			-	-		-	-	24.797.000,00						-	25.000.000,00	
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)						255.839.500,00					UPTD KPH		199.064.600,00	
		-						255.839.500,00					UPTD KPH		199.064.600,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	-		-	-	255.839.500,00						-	199.064.600,00	
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan						24.797.000,00							25.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	-		-	1 Dokumen	24.797.000,00	Provinsi Maluku	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	25.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MALUKU BARAT DAYA KELAS A
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi						2.083.011.700,00					UPTD KPH		1.954.646.060,00	
		-						2.083.011.700,00					UPTD KPH		1.954.646.060,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	-		-	-	1.499.688.700,00						-	798.275.500,00	
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	-		-	-	107.242.800,00						-	149.480.500,00	
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	-		-	-	238.172.000,00						-	406.900.400,00	
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan						20.720.000,00							107.800.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	-		-	15 Dokumen	20.720.000,00	Provinsi Maluku	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	5.Melanjutkan hilirisasi dan membangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	107.800.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MALUKU BARAT DAYA KELAS A
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan						17.570.000,00							59.800.000,00	
		Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	-		-	5 Laporan	17.570.000,00	Provinsi Maluku	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	5.Melanjutkan hilirisasi dan membangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	59.800.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MALUKU BARAT DAYA KELAS A
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan						0,00							48.000.000,00	
		Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	-		-	15 Ha	0,00	Provinsi Maluku	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	5.Melanjutkan hilirisasi dan membangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	48.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MALUKU BARAT DAYA KELAS A

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
327.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**						**1.201.000.000,00**							**2.515.777.846,00**	
			Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang terfasilitasi	-		-	15 Kelompok	0,00						-	58.000.000,00	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan						1.201.000.000,00					UPTD KPH		2.515.777.846,00	
		-						1.201.000.000,00					UPTD KPH		2.515.777.846,00	
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-		-	-	667.810.000,00						-	1.139.568.846,00	
	3.28.05.1.01.0011	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan						0,00							58.000.000,00	
		Peningkatan kelas Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-		-	2 Kelompok	0,00	Provinsi Maluku	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	58.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MALUKU BARAT DAYA KELAS A
		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						**12.105.254.081,00**							**14.039.378.262,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**11.970.803.181,00**							**13.984.128.262,00**	
	3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**						**11.970.803.181,00**							**13.984.128.262,00**	
328.	**3.29.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**9.490.668.381,00**							**10.192.209.262,00**	
			Persentase Layanan Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	80 %	8.582.901.381,00						-	8.649.053.262,00	
			Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	-		-	80 %	832.767.000,00						-	1.420.156.000,00	
	3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						100.000.000,00					OPD Terkait		180.000.000,00	
		-						100.000.000,00					OPD Terkait		180.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	100.000.000,00						-	180.000.000,00	
	3.29.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						100.000.000,00							180.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	5 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	180.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8.324.337.344,00					OPD Terkait		8.359.273.102,00	
		-						8.324.337.344,00					OPD Terkait		8.359.273.102,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	64.200.000,00						-	64.200.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	8.260.137.344,00						-	8.295.073.102,00	
	3.29.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						8.260.137.344,00							8.295.073.102,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	70 Orang/ Bulan	8.260.137.344,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	8.295.073.102,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						64.200.000,00							64.200.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	1 Dokumen	64.200.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	64.200.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						63.544.137,00					OPD Terkait		54.780.160,00	
		-						63.544.137,00					OPD Terkait		54.780.160,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	38.740.137,00						-	24.780.160,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	-	14.804.000,00						-	20.000.000,00	
	3.29.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						14.804.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	1 Dokumen	14.804.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	20.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						38.740.137,00							24.780.160,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	1 Laporan	38.740.137,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	24.780.160,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						105.019.900,00					Aparatur lingkup Dinas ESDM		115.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						105.019.900,00					Aparatur lingkup Dinas ESDM		115.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	-	25.081.900,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	-		-	-	10.000.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	34.400.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	30.538.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-		-	-	5.000.000,00						-	10.000.000,00	
	3.29.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana DisiplinPegawai						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-		-	1 Unit	5.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						34.400.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	1 Paket	34.400.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	30.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian						25.081.900,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	1 Dokumen	25.081.900,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun						0,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	-		-	1 Orang	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalamMelaksanakan Tugas						10.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	-		-	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	25.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						30.538.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	2 Orang	30.538.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	30.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						386.867.000,00					Aparatur lingkup Dinas ESDM		434.590.000,00	
		-						386.867.000,00					Aparatur lingkup Dinas ESDM		434.590.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	-	4.980.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	20.000.000,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	166.967.000,00						-	234.006.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	37.601.000,00						-	41.500.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	30.000.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	2.084.000,00						-	2.084.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	105.735.000,00						-	77.500.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	19.500.000,00						-	19.500.000,00	
	3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.084.000,00							2.084.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.084.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.084.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						85.000.000,00							70.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	85.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	70.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						19.500.000,00							19.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	19.500.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	19.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						36.601.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	36.601.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	40.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						30.000.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	30.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	30.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	20.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						153.702.000,00							220.006.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	153.702.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	220.006.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						4.980.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	1 Dokumen	4.980.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						60.000.000,00					Aparatur lingkup Dinas ESDM		527.000.000,00	
		-						60.000.000,00					Aparatur lingkup Dinas ESDM		527.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	35.000.000,00						-	35.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	462.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	25.000.000,00						-	30.000.000,00	
	3.29.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							462.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	462.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						35.000.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	1 Paket	35.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	35.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						25.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	25.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	30.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						330.900.000,00					Aparatur lingkup Dinas ESDM		421.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						330.900.000,00					Aparatur lingkup Dinas ESDM		421.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	129.900.000,00						-	120.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	200.000.000,00						-	300.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
	3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						129.900.000,00							120.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	129.900.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	120.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						200.000.000,00							300.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	200.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	300.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						120.000.000,00					Aparatur lingkup Dinas ESDM		100.566.000,00	
		-						120.000.000,00					Aparatur lingkup Dinas ESDM		100.566.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	30.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	-	80.000.000,00						-	90.566.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
	3.29.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						80.000.000,00							90.566.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	3 Unit	80.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	90.566.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.000.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	15 Unit	10.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						30.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	30.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
329.	**3.29.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**						**285.732.000,00**							**298.118.000,00**	
			Jumlah Volume Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota	-		-	749 juta m3/tahun	99.993.000,00						-	100.000.000,00	
			Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota	-		-	1739 km2	185.739.000,00						-	198.118.000,00	
	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi						185.739.000,00					Wilayah Cekungan Air Tanah dalam Provinsi Maluku		198.118.000,00	
		-						185.739.000,00					Wilayah Cekungan Air Tanah dalam Provinsi Maluku		198.118.000,00	
			Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-		-	-	97.057.000,00						-	120.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-		-	-	15.642.000,00						-	23.435.400,00	
			Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	-		-	-	73.040.000,00						-	54.682.600,00	
	3.29.02.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah						97.057.000,00							120.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkumpulnya dan Terolahnya Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-		-	2 Dokumen	97.057.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	120.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.01.0002	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah						73.040.000,00							54.682.600,00	
		Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	-		-	1 Dokumen	73.040.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	54.682.600,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah						15.642.000,00							23.435.400,00	
		Terkendalinya dan Terawasinya Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-		-	1 Laporan	15.642.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	23.435.400,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi						99.993.000,00					Para Pemangku Kepentingan dan Pengguna Air Tanah		100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						99.993.000,00					Para Pemangku Kepentingan dan Pengguna Air Tanah		100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	-		-	-	830.000,00						-	60.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-		-	-	98.202.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-		-	-	961.000,00						-	10.000.000,00	
	3.29.02.1.03.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah						830.000,00							60.000.000,00	
		Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	-		-	1 Dokumen	830.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	60.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03.0002	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah						961.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-		-	11 Laporan	961.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	10.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah						98.202.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkendalinya dan Terawasinya Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-		-	11 Laporan	98.202.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	30.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
330.	**3.29.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**						**285.749.700,00**							**215.441.500,00**	
			Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR	-		-	2 surat	207.968.700,00						-	160.191.500,00	
	3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil						129.748.700,00					Pelaku Usaha		105.066.500,00	
		-						129.748.700,00					Pelaku Usaha		105.066.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-		-	-	129.748.700,00						-	105.066.500,00	
	3.29.03.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil						129.748.700,00							105.066.500,00	
		Terlaksananya Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-		-	3 Laporan	129.748.700,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	105.066.500,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut						78.220.000,00					Pelaku Usaha		55.125.000,00	
		-						78.220.000,00					Pelaku Usaha		55.125.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	-		-	-	78.220.000,00						-	55.125.000,00	
	3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut						78.220.000,00							55.125.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	-		-	2 Laporan	78.220.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	55.125.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
331.	**3.29.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**						**1.298.815.000,00**							**2.156.609.500,00**	
			Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT	-		-	150 unit	1.150.882.100,00						-	2.106.609.500,00	
			Porsi EBT dalam Bauran Energi	-		-	34,33 %	91.263.000,00						-	50.000.000,00	
	3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi						1.150.882.100,00					Masyarakat Penerima Manfaat		2.106.609.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						1.150.882.100,00					Masyarakat Penerima Manfaat		2.106.609.500,00	
			Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah	-		-	-	90.844.900,00						-	762.452.800,00	
			Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	-		-	-	841.589.100,00						-	1.079.187.200,00	
			Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	-		-	-	88.448.100,00						-	114.969.500,00	
			Jumlah rencana kegiatan pemanfaatan aneka EBT	-		-	-	130.000.000,00						-	150.000.000,00	
	3.29.05.1.07.0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah						88.448.100,00							114.969.500,00	
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	-		-	3 Laporan	88.448.100,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	114.969.500,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0006	Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT						130.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersusunnya rencana kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah rencana kegiatan pemanfaatan aneka EBT	-		-	1 Dokumen	130.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	150.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT						841.589.100,00							1.079.187.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	-		-	150 unit	841.589.100,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	1.079.187.200,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0010	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah						90.844.900,00							762.452.800,00	
		Terkumpulnya data potensi aneka EBT di daerah	Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah	-		-	3 Dokumen	90.844.900,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	762.452.800,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.10	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi						91.263.000,00					Masyarakat Penerima Manfaat		50.000.000,00	
		-						91.263.000,00					Masyarakat Penerima Manfaat		50.000.000,00	
			Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	-		-	-	91.263.000,00						-	50.000.000,00	
	3.29.05.1.10.0005	Sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota						91.263.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	-		-	2 Laporan	91.263.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	50.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
332.	**3.29.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**						**779.289.000,00**							**1.200.000.000,00**	
			Rasio Elektifikasi	-		-	99,70 %	779.289.000,00						-	1.200.000.000,00	
	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan						779.289.000,00					Masyarakat Penerima Manfaat		1.200.000.000,00	
		-						779.289.000,00					Masyarakat Penerima Manfaat		1.200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	-		-	-	229.289.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	-		-	-	550.000.000,00						-	1.000.000.000,00	
	3.29.06.1.06.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu						229.289.000,00							200.000.000,00	
		Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	-		-	0 Dokumen	229.289.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan						550.000.000,00							1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangunnya Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	-		-	92 Unit	550.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	1.000.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		BALAI PENGUJIAN DAN PERALATAN ESDM						**35.000.000,00**							**23.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**35.000.000,00**							**23.000.000,00**	
	3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**						**35.000.000,00**							**23.000.000,00**	
333.	**3.29.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**9.490.668.381,00**							**10.192.209.262,00**	
			Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	-		-	80 %	35.000.000,00						-	23.000.000,00	
	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						386.867.000,00					Aparatur lingkup UPTD		434.590.000,00	
		-						386.867.000,00					Aparatur lingkup UPTD		434.590.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	166.967.000,00						-	234.006.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	37.601.000,00						-	41.500.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	105.735.000,00						-	77.500.000,00	
	3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						20.735.000,00							7.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	20.735.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	7.500.000,00	BALAI PENGUJIAN DAN PERALATAN ESDM
	3.29.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						1.000.000,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	1.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.500.000,00	BALAI PENGUJIAN DAN PERALATAN ESDM
	3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						13.265.000,00							14.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	13.265.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	14.000.000,00	BALAI PENGUJIAN DAN PERALATAN ESDM
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						**18.401.481.087,00**							**17.731.066.999,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**18.401.481.087,00**							**17.731.066.999,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**5.291.668.873,00**							**5.140.958.100,00**	
334.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**						**191.744.000,00**							**210.000.000,00**	
			-	-		-	-	191.744.000,00						-	210.000.000,00	
	3.30.02.1.02	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi						191.744.000,00					Meningkatnya Kemudahan Proses Perijinan dan Pendaftaran Berusaha		210.000.000,00	
		-						191.744.000,00					Meningkatnya Kemudahan Proses Perijinan dan Pendaftaran Berusaha		210.000.000,00	
			Jumlah Pemberian Surat Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perizinan Perdagangan Besar/Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	-		-	-	191.744.000,00						-	210.000.000,00	
	3.30.02.1.02.0004	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Distributor Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik						191.744.000,00							210.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Surat Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perizinan Perdagangan Besar/Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	Jumlah Pemberian Surat Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perizinan Perdagangan Besar/Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	-		-	1 Dokumen	191.744.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	210.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
335.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**						**3.661.326.873,00**							**3.700.000.000,00**	
			-	-		-	-	3.661.326.873,00						-	3.700.000.000,00	
	3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas						3.661.326.873,00					Jumlah Sarana Perdagangan yang ditingkatkan Kualitasnya		3.700.000.000,00	
		-						3.661.326.873,00					Jumlah Sarana Perdagangan yang ditingkatkan Kualitasnya		3.700.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	-		-	-	3.661.326.873,00						-	3.700.000.000,00	
	3.30.03.1.01.0002	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi						3.661.326.873,00							3.700.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	-		-	1 Laporan	3.661.326.873,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	3.700.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
336.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING**						**964.756.000,00**							**1.100.000.000,00**	
			-	-		-	-	964.756.000,00						-	1.100.000.000,00	
	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan						964.756.000,00					Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		1.100.000.000,00	
		-						964.756.000,00					Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		1.100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-		-	-	964.756.000,00						-	1.100.000.000,00	
	3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						964.756.000,00							1.100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-		-	1 Laporan	964.756.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan membangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	1.100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
337.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**						**349.120.000,00**							**0,00**	
			-	-		-	-	349.120.000,00						-	0,00	
	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi						349.120.000,00					PDRB Ekspor Barang dan Jasa		0,00	
		-						349.120.000,00					PDRB Ekspor Barang dan Jasa		0,00	
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	-		-	-	349.120.000,00						-	0,00	
	3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor						349.120.000,00							0,00	
		Meningkatnya Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	-		-	2 Produk	349.120.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan membangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
338.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**						**234.418.000,00**							**130.958.100,00**	
			-	-		-	-	124.722.000,00						-	130.958.100,00	
	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota						55.234.000,00					Peningkatan Penanganan Konsumen		58.310.700,00	
		-						55.234.000,00					Peningkatan Penanganan Konsumen		58.310.700,00	
			Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	-		-	-	55.234.000,00						-	58.310.700,00	
	3.30.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen						55.234.000,00							58.310.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Layanan Penanganan Pengaduan Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	-		-	5 Pengaduan	55.234.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan membangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	58.310.700,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota						69.488.000,00					Persentase Pengawasan yang sesuai ketentuan		72.647.400,00	
		-						69.488.000,00					Persentase Pengawasan yang sesuai ketentuan		72.647.400,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	-		-	-	69.488.000,00						-	72.647.400,00	
	3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga						69.488.000,00							72.647.400,00	
		Meningkatnya Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	-		-	12 Laporan	69.488.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan membangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	72.647.400,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**13.109.812.214,00**							**12.590.108.899,00**	
339.	**3.31.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**9.879.653.114,00**							**11.618.366.319,00**	
			-	-		-	-	9.607.590.214,00						-	11.035.108.899,00	
	3.31.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						418.258.000,00					Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perngkat Daerah		500.000.000,00	
		-						418.258.000,00					Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perngkat Daerah		500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	231.301.000,00						-	275.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	186.957.000,00						-	225.000.000,00	
	3.31.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						231.301.000,00							275.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	1 Dokumen	231.301.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	275.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						186.957.000,00							225.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	1 Laporan	186.957.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	225.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8.133.579.666,00					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		8.540.258.649,00	
		-						8.133.579.666,00					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		8.540.258.649,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	90.960.000,00						-	95.508.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	8.042.619.666,00						-	8.444.750.649,00	
	3.31.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						8.042.619.666,00							8.444.750.649,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	90 Orang/ Bulan	8.042.619.666,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	8.444.750.649,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						69.240.000,00							72.702.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	8 Dokumen	69.240.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	72.702.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						61.494.000,00					Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		68.100.000,00	
		-						61.494.000,00					Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		68.100.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	45.100.000,00						-	51.300.000,00	
	3.31.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						33.500.000,00							37.800.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	104 Orang	33.500.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	37.800.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						406.290.400,00					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan, Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan, Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan, Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan, Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu, Jumlah Laporan Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		570.155.820,00	
		-						406.290.400,00					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan, Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan, Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan, Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan, Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu, Jumlah Laporan Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		570.155.820,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	5.000.000,00						-	5.250.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	41.464.000,00						-	57.113.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	261.820.000,00						-	359.979.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	65.780.000,00						-	92.523.900,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	28.267.500,00						-	28.032.375,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	3.958.900,00						-	27.256.845,00	
	3.31.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.000.000,00							26.250.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	3.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan membangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	26.250.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						57.662.000,00							84.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	57.662.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan membangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	84.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						26.670.000,00							26.355.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	26.670.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan membangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	26.355.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.31.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						5.000.000,00							5.250.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	4 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan membangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	5.250.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						37.070.000,00							52.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	3 Laporan	37.070.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan membangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	52.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						218.500.000,00							315.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	4 Laporan	218.500.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan membangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	315.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						211.000.000,00					Tingkat Aset dan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Perangkat Daerah		1.117.751.250,00	
		-						211.000.000,00					Tingkat Aset dan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Perangkat Daerah		1.117.751.250,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	15.000.000,00						-	15.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	745.500.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	196.000.000,00						-	356.501.250,00	
	3.31.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							745.500.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	745.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	0 Paket	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						146.000.000,00							304.001.250,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	18 Unit	146.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	304.001.250,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						285.039.000,00					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		287.459.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						285.039.000,00					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		287.459.500,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	281.649.000,00						-	280.800.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	3.390.000,00						-	6.659.500,00	
	3.31.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.000.000,00							6.250.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	2.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan membangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	6.250.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						213.249.000,00							225.750.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	213.249.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan membangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	225.750.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						363.992.048,00					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan DInas Jabatan yang dipeliharan dan dibayar Pajaknya, Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		534.641.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						363.992.048,00					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan DInas Jabatan yang dipeliharan dan dibayar Pajaknya, Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		534.641.100,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	235.000.000,00						-	315.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	-	84.821.548,00						-	157.500.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	20.000.000,00						-	36.750.000,00	
	3.31.01.1.09.0001	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						84.821.548,00							157.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	2 Unit	84.821.548,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	157.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15.000.000,00							31.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	1 Unit	15.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	31.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						235.000.000,00							315.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	2 Unit	235.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	315.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
340.	**3.31.02**	**PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**						**3.642.897.180,00**							**1.390.518.739,00**	
			-	-		-	-	3.502.222.000,00						-	840.000.000,00	
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi						3.642.897.180,00					Jumlah Pengembangan Industri Pengolahan		1.390.518.739,00	
		-						3.642.897.180,00					Jumlah Pengembangan Industri Pengolahan		1.390.518.739,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	-		-	-	391.909.000,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	-		-	-	1.117.549.180,00						-	550.518.739,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	-		-	-	2.133.439.000,00						-	440.000.000,00	
	3.31.02.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri						391.909.000,00							400.000.000,00	
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	-		-	1 Dokumen	391.909.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	400.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri						976.874.000,00							400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	-		-	1 Dokumen	976.874.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	400.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat						2.133.439.000,00							440.000.000,00	
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	-		-	1 Dokumen	2.133.439.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	440.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		BALAI ANEKA INDUSTRI DAN KERAJINAN						**354.538.080,00**							**372.276.159,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**354.538.080,00**							**372.276.159,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**354.538.080,00**							**372.276.159,00**	
341.	**3.31.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**9.879.653.114,00**							**11.618.366.319,00**	
			-	-		-	-	213.862.900,00						-	221.757.420,00	
	3.31.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8.133.579.666,00					Jumlah dokumen pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD		8.540.258.649,00	
		-						8.133.579.666,00					Jumlah dokumen pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD		8.540.258.649,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	90.960.000,00						-	95.508.000,00	
	3.31.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						21.720.000,00							22.806.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	1 Dokumen	21.720.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	22.806.000,00	BALAI ANEKA INDUSTRI DAN KERAJINAN
	3.31.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						61.494.000,00					Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		68.100.000,00	
		-						61.494.000,00					Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		68.100.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	16.394.000,00						-	16.800.000,00	
	3.31.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						16.394.000,00							16.800.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	1 Orang	16.394.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	16.800.000,00	BALAI ANEKA INDUSTRI DAN KERAJINAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						406.290.400,00					Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan, jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan, jumlah paket barang logistik kantor yang disediakan, jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu, jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		570.155.820,00	
		-						406.290.400,00					Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan, jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan, jumlah paket barang logistik kantor yang disediakan, jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu, jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		570.155.820,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	41.464.000,00						-	57.113.700,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	261.820.000,00						-	359.979.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	65.780.000,00						-	92.523.900,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	28.267.500,00						-	28.032.375,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	3.958.900,00						-	27.256.845,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.31.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						958.900,00							1.006.845,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	958.900,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	1.006.845,00	BALAI ANEKA INDUSTRI DAN KERAJINAN
	3.31.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						8.118.000,00							8.523.900,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	8.118.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	8.523.900,00	BALAI ANEKA INDUSTRI DAN KERAJINAN
	3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.597.500,00							1.677.375,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	1.597.500,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	1.677.375,00	BALAI ANEKA INDUSTRI DAN KERAJINAN
	3.31.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						4.394.000,00							4.613.700,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	4.394.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	4.613.700,00	BALAI ANEKA INDUSTRI DAN KERAJINAN
	3.31.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						43.320.000,00							44.979.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	2 Laporan	43.320.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan membangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	44.979.000,00	BALAI ANEKA INDUSTRI DAN KERAJINAN
	3.31.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						211.000.000,00					Tingkat aset dan sarana prasarana penunjang urusan perangkat daerah		1.117.751.250,00	
		-						211.000.000,00					Tingkat aset dan sarana prasarana penunjang urusan perangkat daerah		1.117.751.250,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	15.000.000,00						-	15.750.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	196.000.000,00						-	356.501.250,00	
	3.31.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						15.000.000,00							15.750.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	1 Paket	15.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan membangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	15.750.000,00	BALAI ANEKA INDUSTRI DAN KERAJINAN
	3.31.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00							52.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	2 Unit	50.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan membangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	52.500.000,00	BALAI ANEKA INDUSTRI DAN KERAJINAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						285.039.000,00					Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		287.459.500,00	
		-						285.039.000,00					Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		287.459.500,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	281.649.000,00						-	280.800.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	3.390.000,00						-	6.659.500,00	
	3.31.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						390.000,00							409.500,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	390.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	409.500,00	BALAI ANEKA INDUSTRI DAN KERAJINAN
	3.31.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						22.800.000,00							22.050.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	22.800.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	22.050.000,00	BALAI ANEKA INDUSTRI DAN KERAJINAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						363.992.048,00					Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya, jumlah mesin dan peralatan yang dipelihara, jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi		534.641.100,00	
		-						363.992.048,00					Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya, jumlah mesin dan peralatan yang dipelihara, jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi		534.641.100,00	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	20.670.500,00						-	21.716.100,00	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	20.000.000,00						-	36.750.000,00	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	3.500.000,00						-	3.675.000,00	
	3.31.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					20.670.500,00							21.716.100,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	2 Unit	20.670.500,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	21.716.100,00	BALAI ANEKA INDUSTRI DAN KERAJINAN
	3.31.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					5.000.000,00							5.250.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	9 Unit	5.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	5.250.000,00	BALAI ANEKA INDUSTRI DAN KERAJINAN
	3.31.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						3.500.000,00							3.675.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	2 Unit	3.500.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	3.675.000,00	BALAI ANEKA INDUSTRI DAN KERAJINAN
342.	**3.31.02**	**PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**						**3.642.897.180,00**							**1.390.518.739,00**	
			-	-		-	-	140.675.180,00						-	150.518.739,00	
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi						3.642.897.180,00					Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		1.390.518.739,00	
		-						3.642.897.180,00					Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		1.390.518.739,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	-		-	-	1.117.549.180,00						-	550.518.739,00	
	3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri						140.675.180,00							150.518.739,00	
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	-		-	1 Dokumen	140.675.180,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	150.518.739,00	BALAI ANEKA INDUSTRI DAN KERAJINAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG						**392.246.753,00**							**46.500.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**392.246.753,00**							**46.500.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**334.046.753,00**							**0,00**	
343.	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**224.350.753,00**							**0,00**	
			-	-		-	-	224.350.753,00						-	0,00	
	3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						21.720.000,00					Banyaknya Orang yang menerima Tunjangan/Honorarium		0,00	
		-						21.720.000,00					Banyaknya Orang yang menerima Tunjangan/Honorarium		0,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	21.720.000,00						-	0,00	
	3.30.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						21.720.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	1 Dokumen	21.720.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	0,00	BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						24.766.000,00					Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan		0,00	
		-						24.766.000,00					Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan		0,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	24.766.000,00						-	0,00	
	3.30.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						24.766.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	2 Orang	24.766.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	0,00	BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						76.807.400,00					Jumlah Paket Komponen instalasi Listrik yang di sediakan, Jumlah Paket komponen barang cetakan dan penggadaan yang di sediakan, jumlah paket logistik yang di sediakan, jumlah laporan fasilitas Kunjungan Tamu dan jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.		0,00	
		-						76.807.400,00					Jumlah Paket Komponen instalasi Listrik yang di sediakan, Jumlah Paket komponen barang cetakan dan penggadaan yang di sediakan, jumlah paket logistik yang di sediakan, jumlah laporan fasilitas Kunjungan Tamu dan jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.		0,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	5.830.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	55.301.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	10.131.400,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	3.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	2.545.000,00						-	0,00	
	3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.545.000,00							0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.545.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	0,00	BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						10.131.400,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	10.131.400,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	0,00	BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	3.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	0,00	BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						5.830.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	5.830.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	0,00	BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						55.301.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	3 Laporan	55.301.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	0,00	BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						88.557.353,00					Tinggkat Aset dan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Perangkat Daerah		0,00	
		-						88.557.353,00					Tinggkat Aset dan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Perangkat Daerah		0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	-	26.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	62.557.353,00						-	0,00	
	3.30.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						26.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	1 Unit	26.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	0,00	BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						62.557.353,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	3 Unit	62.557.353,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	0,00	BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						12.500.000,00					Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau jabatan yang di pelihara dan di bayar pajaknya, Jumlah mesin dan peralatan yang di pelihara		0,00	
		-						12.500.000,00					Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau jabatan yang di pelihara dan di bayar pajaknya, Jumlah mesin dan peralatan yang di pelihara		0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	7.500.000,00						-	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	5.000.000,00						-	0,00	
	3.30.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						7.500.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	1 Unit	7.500.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	0,00	BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	7 Unit	5.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	0,00	BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
344.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**						**234.418.000,00**							**130.958.100,00**	
			-	-		-	-	109.696.000,00						-	0,00	
	3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota						109.696.000,00					Jumlah Laporan/Sertifikat yang di terbitkan setiap kali Pengujian (Laboratorium)		0,00	
		-						109.696.000,00					Jumlah Laporan/Sertifikat yang di terbitkan setiap kali Pengujian (Laboratorium)		0,00	
			Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	-		-	-	109.696.000,00						-	0,00	
	3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian						109.696.000,00							0,00	
		Meningkatnya Layanan Pengujian Mutu Barang	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	-		-	10 laporan	109.696.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	0,00	BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**58.200.000,00**							**46.500.000,00**	
345.	**3.31.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**9.879.653.114,00**							**11.618.366.319,00**	
			-	-		-	-	58.200.000,00						-	46.500.000,00	
	3.31.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						61.494.000,00					Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan		68.100.000,00	
		-						61.494.000,00					Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan		68.100.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	45.100.000,00						-	51.300.000,00	
	3.31.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						11.600.000,00							13.500.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	50 Orang	11.600.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	13.500.000,00	BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						285.039.000,00					Jumlah laporan Jasa Surat Menyura, jumlah Laporan jasa Komunikasi sumber Daya Air dan Listrik yang di sediakan		287.459.500,00	
		-						285.039.000,00					Jumlah laporan Jasa Surat Menyura, jumlah Laporan jasa Komunikasi sumber Daya Air dan Listrik yang di sediakan		287.459.500,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	281.649.000,00						-	280.800.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	3.390.000,00						-	6.659.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.31.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	0,00	BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.31.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						45.600.000,00							33.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	45.600.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	33.000.000,00	BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
		SEKRETARIAT DAERAH						**86.000.131.168,00**							**90.300.137.726,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**81.344.906.252,00**							**85.412.151.564,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**81.344.906.252,00**							**85.412.151.564,00**	
346.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**118.154.074.282,25**							**125.686.751.213,00**	
			Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	-		-	100 %	80.129.658.538,00						-	84.136.141.464,00	
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						54.140.613.416,00					TUK		56.893.989.687,00	
		-						54.140.613.416,00					TUK		56.893.989.687,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	-	253.248.575,00						-	343.900.604,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	1.149.860.680,00						-	1.175.709.714,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	52.737.504.161,00						-	55.374.379.369,00	
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						52.737.504.161,00							55.374.379.369,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	550 Orang/ Bulan	52.737.504.161,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	55.374.379.369,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						1.062.580.680,00							1.115.709.714,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	9 Dokumen	1.062.580.680,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	1.115.709.714,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						118.000.575,00							123.900.604,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	9 Dokumen	118.000.575,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	123.900.604,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						139.887.405,00					TUK		146.881.775,00	
		-						139.887.405,00					TUK		146.881.775,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	139.887.405,00						-	146.881.775,00	
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						139.887.405,00							146.881.775,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	1 Laporan	139.887.405,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	146.881.775,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.778.018.972,00					-		1.935.642.645,00	
		-						1.778.018.972,00					-		1.935.642.645,00	
			Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	-		-	-	7.806.803,00						-	8.197.143,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	903.728.843,00						-	994.402.135,00	
			Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	-		-	-	7.806.803,00						-	8.197.143,00	
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						362.251.843,00							380.364.435,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	1 Paket	362.251.843,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	380.364.435,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun						7.806.803,00							8.197.143,00	
		Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	-		-	1 Orang	7.806.803,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	8.197.143,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0008	Pemindahan Tugas ASN						7.806.803,00							8.197.143,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	-		-	1 Orang	7.806.803,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	8.197.143,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						20.853.954.442,00					TUK		22.642.351.143,00	
		-						20.853.954.442,00					TUK		22.642.351.143,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	60.625.373,00						-	63.656.641,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	6.902.196.403,00						-	7.027.613.155,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.177.682.990,00						-	1.266.654.237,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	739.177.553,00						-	814.350.988,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	239.447.179,00						-	251.419.538,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	5.190.778.352,00						-	5.645.058.584,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	6.188.271.899,00						-	7.191.328.500,00	
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						239.447.179,00							251.419.538,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	239.447.179,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	251.419.538,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						474.108.075,00							497.813.479,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	474.108.075,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	497.813.479,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						163.170.000,00							171.328.500,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	4 Paket	163.170.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	171.328.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						508.211.018,00							533.621.569,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	508.211.018,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	533.621.569,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						330.551.550,00							347.079.128,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	4 Paket	330.551.550,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	347.079.128,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						60.625.373,00							63.656.641,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	1 Dokumen	60.625.373,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	63.656.641,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						2.984.803.763,00							3.134.043.951,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	4 Laporan	2.984.803.763,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	3.134.043.951,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						13.337.598.892,00					TUK		14.386.413.096,00	
		-						13.337.598.892,00					TUK		14.386.413.096,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	3.916.206.203,00						-	4.117.036.513,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	8.022.096.726,00						-	8.776.301.022,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.243.663.963,00						-	1.326.141.161,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	155.632.000,00						-	166.934.400,00	
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						72.765.000,00							76.403.250,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	72.765.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	76.403.250,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						3.757.806.203,00							3.945.696.513,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	4 Laporan	3.757.806.203,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	3.945.696.513,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						943.943.963,00							991.141.161,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	4 Laporan	943.943.963,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	991.141.161,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						3.867.937.441,00							4.061.334.313,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	4 Laporan	3.867.937.441,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	4.061.334.313,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						13.742.108.225,00					TUK		15.096.581.912,00	
		-						13.742.108.225,00					TUK		15.096.581.912,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	3.417.971.373,00						-	3.812.202.181,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	-	1.055.599.495,00						-	1.212.691.982,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	1.065.835.475,00						-	1.119.127.249,00	
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						529.767.126,00							556.255.482,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	1 Unit	529.767.126,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	556.255.482,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						2.571.326.573,00							2.699.892.901,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	1 Unit	2.571.326.573,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	2.699.892.901,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						1.065.835.475,00							1.119.127.249,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	4 Unit	1.065.835.475,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	1.119.127.249,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						2.652.264.555,00					TUK		2.784.877.783,00	
		-						2.652.264.555,00					TUK		2.784.877.783,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-		-	-	1.838.619.555,00						-	1.930.550.533,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-		-	-	192.937.500,00						-	202.584.375,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	-		-	-	620.707.500,00						-	651.742.875,00	
	4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						1.838.619.555,00							1.930.550.533,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-		-	2 Orang/Bulan	1.838.619.555,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	1.930.550.533,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						620.707.500,00							651.742.875,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	-		-	2 Paket	620.707.500,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	651.742.875,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						192.937.500,00							202.584.375,00	
		Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-		-	2 Orang	192.937.500,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	202.584.375,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah						5.479.063.777,00					TUK		5.753.016.966,00	
		-						5.479.063.777,00					TUK		5.753.016.966,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	-		-	-	1.831.655.821,00						-	1.923.238.612,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	-		-	-	2.372.220.594,00						-	2.490.831.624,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	-		-	-	1.275.187.362,00						-	1.338.946.730,00	
	4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah						1.831.655.821,00							1.923.238.612,00	
		Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	-		-	1 Paket	1.831.655.821,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	1.923.238.612,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah						1.275.187.362,00							1.338.946.730,00	
		Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	-		-	1 Paket	1.275.187.362,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	1.338.946.730,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah TanggaSekretariat Daerah						2.372.220.594,00							2.490.831.624,00	
		Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.372.220.594,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	2.490.831.624,00	SEKRETARIAT DAERAH
347.	**4.01.03**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**						**14.292.513.215,00**							**14.588.084.221,00**	
			Persentase Kebijakan Daerah Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Yang Ditindaklanjuti	-		-	100 %	914.810.400,00						-	960.550.920,00	
			Persentase Kebijakan Daerah Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Yang Ditindaklanjuti	-		-	undefined undefined	145.269.810,00						-	152.533.301,00	
	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah						1.964.810.400,00					TUK		2.310.550.920,00	
		-						1.964.810.400,00					TUK		2.310.550.920,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		-	-	1.364.810.400,00						-	1.510.550.920,00	
	4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan						914.810.400,00							960.550.920,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		-	1 Laporan	914.810.400,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	960.550.920,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah						1.530.702.810,00					TUK		1.592.533.301,00	
		-						1.530.702.810,00					TUK		1.592.533.301,00	
			Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	-		-	-	930.702.810,00						-	792.533.301,00	
	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah						145.269.810,00							152.533.301,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	-		-	1 Dokumen	145.269.810,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	152.533.301,00	SEKRETARIAT DAERAH
348.	**4.01.04**	**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**98.247.360.701,00**							**102.639.728.736,00**	
			Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Difasilitasi	-		-	undefined undefined	147.360.701,00						-	154.728.736,00	
	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar						7.147.360.701,00					TUK		6.979.728.736,00	
		-						7.147.360.701,00					TUK		6.979.728.736,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	-		-	-	3.647.360.701,00						-	3.304.728.736,00	
	4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial						147.360.701,00							154.728.736,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	-		-	1 Dokumen	147.360.701,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	154.728.736,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X							**4.655.224.916,00**							**4.887.986.162,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**4.655.224.916,00**							**4.887.986.162,00**	
349.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**4.655.224.916,00**							**4.887.986.162,00**	
			Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	-		-	100 %	4.655.224.916,00						-	4.887.986.162,00	
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						4.655.224.916,00					TUK		4.887.986.162,00	
		-						4.655.224.916,00					TUK		4.887.986.162,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	4.655.224.916,00						-	4.887.986.162,00	
	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						4.655.224.916,00							4.887.986.162,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	4 Laporan	4.655.224.916,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	4.887.986.162,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BIRO HUKUM						**3.154.280.000,00**							**3.466.389.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**3.154.280.000,00**							**3.466.389.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**3.154.280.000,00**							**3.466.389.000,00**	
350.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**118.154.074.282,25**							**125.686.751.213,00**	
			Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	-		-	100 %	830.000.000,00						-	871.250.000,00	
			-	-		-	-	60.000.000,00						-	70.000.000,00	
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						20.853.954.442,00					BIRO HUKUM		22.642.351.143,00	
		-						20.853.954.442,00					BIRO HUKUM		22.642.351.143,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	6.902.196.403,00						-	7.027.613.155,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.177.682.990,00						-	1.266.654.237,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	739.177.553,00						-	814.350.988,00	
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						115.000.000,00							132.250.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	115.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Honipopu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	132.250.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.000.000,00							13.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	12 Paket	10.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Honipopu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	13.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						390.000.000,00							400.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	390.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	400.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						4.589.464.998,25					BIRO HUKUM		4.458.100.000,00	
		-						4.589.464.998,25					BIRO HUKUM		4.458.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-		-	-	211.920.000,00						-	230.000.000,00	
	4.01.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						60.000.000,00							70.000.000,00	
		Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	60.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	70.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						13.337.598.892,00					BIRO HUKUM		14.386.413.096,00	
		-						13.337.598.892,00					BIRO HUKUM		14.386.413.096,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	3.916.206.203,00						-	4.117.036.513,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	8.022.096.726,00						-	8.776.301.022,00	
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						17.000.000,00							19.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	17.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	19.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						245.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	245.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	250.000.000,00	BIRO HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						13.742.108.225,00					BIRO HUKUM		15.096.581.912,00	
		-						13.742.108.225,00					BIRO HUKUM		15.096.581.912,00	
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	67.476.586,00						-	7.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	-	1.055.599.495,00						-	1.212.691.982,00	
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						47.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	1 Unit	47.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	50.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						6.000.000,00							7.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-		-	6 Unit	6.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	7.000.000,00	BIRO HUKUM
351.	**4.01.05**	**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**						**2.264.280.000,00**							**2.525.139.000,00**	
			-	-		-	-	2.264.280.000,00						-	2.525.139.000,00	
	4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan						1.310.473.648,00					BIRO HUKUM		1.480.698.428,00	
		-						1.310.473.648,00					BIRO HUKUM		1.480.698.428,00	
			Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	-		-	-	388.681.000,00						-	395.600.000,00	
			Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	-		-	-	155.000.000,00						-	162.250.000,00	
			Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	-		-	-	642.792.648,00						-	792.048.428,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	-		-	-	124.000.000,00						-	130.800.000,00	
	4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk HukumPengaturan						642.792.648,00							792.048.428,00	
		Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	-		-	60 Dokumen	642.792.648,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	792.048.428,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk HukumPenetapan						155.000.000,00							162.250.000,00	
		Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	-		-	270 Dokumen	155.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	162.250.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya						124.000.000,00							130.800.000,00	
		Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	-		-	60 Dokumen	124.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	130.800.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk HukumKabupaten/Kota						388.681.000,00							395.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	-		-	8 Dokumen	388.681.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	395.600.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum						953.806.352,00					BIRO HUKUM		1.044.440.572,00	
		-						953.806.352,00					BIRO HUKUM		1.044.440.572,00	
			Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	-		-	-	774.431.352,00						-	857.721.822,00	
			Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	-		-	-	179.375.000,00						-	186.718.750,00	
	4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum						774.431.352,00							857.721.822,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	-		-	9 Kasus	774.431.352,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	857.721.822,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM						179.375.000,00							186.718.750,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	-		-	9 Kasus	179.375.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	186.718.750,00	BIRO HUKUM
		BIRO ORGANISASI						**4.111.005.832,00**							**4.533.385.800,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**4.111.005.832,00**							**4.533.385.800,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**4.111.005.832,00**							**4.533.385.800,00**	
352.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**118.154.074.282,25**							**125.686.751.213,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	-		-	100 %	1.674.406.232,00						-	1.901.325.800,00	
			-	-		-	-	204.599.600,00						-	225.060.000,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						546.099.600,00					Perangkat Daerah		590.060.000,00	
		-						546.099.600,00					Perangkat Daerah		590.060.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	364.599.600,00						-	390.060.000,00	
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						204.599.600,00							225.060.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	2 Laporan	204.599.600,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	225.060.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.778.018.972,00					Biro Organisasi dan Perangkat Daerah		1.935.642.645,00	
		-						1.778.018.972,00					Biro Organisasi dan Perangkat Daerah		1.935.642.645,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	217.007.000,00						-	238.707.700,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	903.728.843,00						-	994.402.135,00	
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						53.200.000,00							59.774.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	2 Paket	53.200.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	59.774.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						217.007.000,00							238.707.700,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	150 Orang	217.007.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	238.707.700,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						20.853.954.442,00					Biro Organisasi		22.642.351.143,00	
		-						20.853.954.442,00					Biro Organisasi		22.642.351.143,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	101.074.693,00						-	117.269.500,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	6.902.196.403,00						-	7.027.613.155,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.177.682.990,00						-	1.266.654.237,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	739.177.553,00						-	814.350.988,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	5.190.778.352,00						-	5.645.058.584,00	
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						84.184.500,00							111.010.750,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	84.184.500,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	111.010.750,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						72.324.000,00							79.557.500,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	72.324.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	79.557.500,00	BIRO ORGANISASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						67.949.500,00							74.744.600,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	2 Paket	67.949.500,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	74.744.600,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						78.324.000,00							87.269.500,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	4 Laporan	78.324.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	87.269.500,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						878.164.000,00							906.635.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	25 Laporan	878.164.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	906.635.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						13.337.598.892,00					Biro Organisasi		14.386.413.096,00	
		-						13.337.598.892,00					Biro Organisasi		14.386.413.096,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	8.022.096.726,00						-	8.776.301.022,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	155.632.000,00						-	166.934.400,00	
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						28.926.400,00							31.819.150,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	28.926.400,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	31.819.150,00	BIRO ORGANISASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						78.416.832,00							184.077.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	78.416.832,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	184.077.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						13.742.108.225,00					Biro Organisasi		15.096.581.912,00	
		-						13.742.108.225,00					Biro Organisasi		15.096.581.912,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	-	1.055.599.495,00						-	1.212.691.982,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	1.135.225.296,00						-	1.145.560.500,00	
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						77.850.000,00							85.683.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	1 Unit	77.850.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	85.683.100,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						38.060.000,00							42.047.500,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	23 Unit	38.060.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	42.047.500,00	BIRO ORGANISASI
353.	**4.01.02**	**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**						**2.232.000.000,00**							**2.407.000.000,00**	
			-	-		-	-	2.232.000.000,00						-	2.032.000.000,00	
	4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan						1.075.000.000,00					Perangkat Daerah		1.125.000.000,00	
		-						1.075.000.000,00					Perangkat Daerah		1.125.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	-		-	-	250.000.000,00						-	275.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	-		-	-	375.000.000,00						-	375.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	-		-	-	450.000.000,00						-	475.000.000,00	
	4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi						450.000.000,00							475.000.000,00	
		Terlaksananya Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	-		-	5 Dokumen	450.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	475.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota						250.000.000,00							275.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	-		-	8 Dokumen	250.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	275.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan						375.000.000,00							375.000.000,00	
		Terlaksananya Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	-		-	3 Dokumen	375.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	375.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja						1.157.000.000,00					Perangkat Daerah		1.282.000.000,00	
		-						1.157.000.000,00					Perangkat Daerah		1.282.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	-		-	-	350.000.000,00						-	375.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	-		-	-	200.000.000,00						-	225.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-		-	-	210.000.000,00						-	235.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	-		-	-	222.000.000,00						-	247.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	-		-	-	175.000.000,00						-	200.000.000,00	
	4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi						210.000.000,00							235.000.000,00	
		Terlaksananya Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-		-	1 Dokumen	210.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	235.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja						200.000.000,00							225.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	-		-	1 Dokumen	200.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	225.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja						175.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	-		-	1 Laporan	175.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	200.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan						222.000.000,00							247.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	-		-	1 Dokumen	222.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	247.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik						350.000.000,00							375.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	-		-	1 Dokumen	350.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	375.000.000,00	BIRO ORGANISASI
		BIRO UMUM						**26.547.145.900,00**							**29.282.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**26.547.145.900,00**							**29.282.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**26.547.145.900,00**							**29.282.000.000,00**	
354.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**118.154.074.282,25**							**125.686.751.213,00**	
			Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	-		-	100 %	23.047.145.900,00						-	25.282.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			-	-		-	-	3.500.000.000,00						-	3.500.000.000,00	
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						54.140.613.416,00					BIRO UMUM		56.893.989.687,00	
		-						54.140.613.416,00					BIRO UMUM		56.893.989.687,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	-	253.248.575,00						-	343.900.604,00	
	4.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						135.248.000,00							220.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	1 Dokumen	135.248.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	220.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.778.018.972,00					BIRO UMUM		1.935.642.645,00	
		-						1.778.018.972,00					BIRO UMUM		1.935.642.645,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	903.728.843,00						-	994.402.135,00	
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						202.880.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	1 Paket	202.880.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	250.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						20.853.954.442,00					BIRO UMUM		22.642.351.143,00	
		-						20.853.954.442,00					BIRO UMUM		22.642.351.143,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	-	104.700.000,00						-	110.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	6.902.196.403,00						-	7.027.613.155,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	739.177.553,00						-	814.350.988,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	5.190.778.352,00						-	5.645.058.584,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	6.188.271.899,00						-	7.191.328.500,00	
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						4.235.000.000,00							4.555.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	4.235.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	4.555.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						5.999.999.900,00							7.000.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	3 Paket	5.999.999.900,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	7.000.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						207.348.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	207.348.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	250.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						734.850.000,00							800.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	734.850.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	800.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						104.700.000,00							110.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	1 Dokumen	104.700.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	110.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						4.589.464.998,25					BIRO UMUM		4.458.100.000,00	
		-						4.589.464.998,25					BIRO UMUM		4.458.100.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	-	3.850.000.000,00						-	3.800.000.000,00	
	4.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						3.500.000.000,00							3.500.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	10 Unit	3.500.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	3.500.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						13.337.598.892,00					BIRO UMUM		14.386.413.096,00	
		-						13.337.598.892,00					BIRO UMUM		14.386.413.096,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	8.022.096.726,00						-	8.776.301.022,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.243.663.963,00						-	1.326.141.161,00	
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						227.120.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	227.120.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	250.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.600.000.000,00							2.700.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	2.600.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	2.700.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						13.742.108.225,00					BIRO UMUM		15.096.581.912,00	
		-						13.742.108.225,00					BIRO UMUM		15.096.581.912,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	7.000.000.000,00						-	7.800.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	3.417.971.373,00						-	3.812.202.181,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	1.135.225.296,00						-	1.145.560.500,00	
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						600.000.000,00							847.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	5 Unit	600.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	847.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	5 Unit	1.000.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	1.000.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						7.000.000.000,00							7.800.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	5 Unit	7.000.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	7.800.000.000,00	BIRO UMUM
		BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN						**3.360.697.183,00**							**3.673.436.206,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**3.360.697.183,00**							**3.673.436.206,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**3.360.697.183,00**							**3.673.436.206,00**	
355.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**118.154.074.282,25**							**125.686.751.213,00**	
			Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	-		-	100 %	1.531.277.183,00						-	1.596.500.000,00	
			-	-		-	-	1.309.420.000,00						-	1.156.936.206,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						546.099.600,00					BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN		590.060.000,00	
		-						546.099.600,00					BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN		590.060.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	181.500.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	364.599.600,00						-	390.060.000,00	
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						181.500.000,00							200.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	181.500.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	200.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						160.000.000,00							165.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	2 Laporan	160.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	165.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						54.140.613.416,00					BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN		56.893.989.687,00	
		-						54.140.613.416,00					BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN		56.893.989.687,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	1.149.860.680,00						-	1.175.709.714,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						48.400.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	1 Dokumen	48.400.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	60.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.778.018.972,00					BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN		1.935.642.645,00	
		-						1.778.018.972,00					BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN		1.935.642.645,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	-		-	-	181.325.683,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	903.728.843,00						-	994.402.135,00	
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						160.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	1 Paket	160.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	200.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						181.325.683,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	-		-	1 Dokumen	181.325.683,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	200.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						20.853.954.442,00					BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN		22.642.351.143,00	
		-						20.853.954.442,00					BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN		22.642.351.143,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	101.074.693,00						-	117.269.500,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	6.902.196.403,00						-	7.027.613.155,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.177.682.990,00						-	1.266.654.237,00	
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						121.000.000,00							133.100.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	121.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	133.100.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						19.783.500,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	19.783.500,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	30.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						309.768.000,00							350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	309.768.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	350.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						4.589.464.998,25					BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN		4.458.100.000,00	
		-						4.589.464.998,25					BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN		4.458.100.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	205.999.998,25						-	183.100.000,00	
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-		-	-	211.920.000,00						-	230.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	321.545.000,00						-	245.000.000,00	
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						121.000.000,00							133.100.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	1 Paket	121.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	133.100.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						160.000.000,00							160.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	160.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	160.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						151.920.000,00							160.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	151.920.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	160.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						13.337.598.892,00					BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN		14.386.413.096,00	
		-						13.337.598.892,00					BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN		14.386.413.096,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	3.916.206.203,00						-	4.117.036.513,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	8.022.096.726,00						-	8.776.301.022,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.243.663.963,00						-	1.326.141.161,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	155.632.000,00						-	166.934.400,00	
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						45.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	45.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	50.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						55.000.000,00							60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	55.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	60.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						72.600.000,00							85.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	72.600.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	85.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						518.400.000,00							518.400.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	518.400.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	518.400.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						13.742.108.225,00					BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN		15.096.581.912,00	
		-						13.742.108.225,00					BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN		15.096.581.912,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	3.417.971.373,00						-	3.812.202.181,00	
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						160.000.000,00							170.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	12 Unit	160.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	170.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan						475.000.000,00					BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN		500.000.000,00	
		-						475.000.000,00					BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN		500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	-		-	-	175.000.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	-		-	-	100.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	-		-	-	200.000.000,00						-	200.000.000,00	
	4.01.01.1.13.0001	Penyiapan Materi Pimpinan						175.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	-		-	1 Dokumen	175.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	200.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	-		-	1 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	100.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan						200.000.000,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	-		-	1 Laporan	200.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	200.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan						420.000.000,00					BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN		498.836.206,00	
		-						420.000.000,00					BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN		498.836.206,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	-		-	-	200.000.000,00						-	268.836.206,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-		-	-	130.000.000,00						-	130.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	-		-	-	90.000.000,00						-	100.000.000,00	
	4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara						200.000.000,00							268.836.206,00	
		Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	-		-	1 Laporan	200.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	268.836.206,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						130.000.000,00							130.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-		-	1 Laporan	130.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	130.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan						90.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	-		-	1 Laporan	90.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	100.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
		BIRO PEREKONOMIAN DAERAH						**1.963.063.723,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.963.063.723,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**1.963.063.723,00**							**0,00**	
356.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**118.154.074.282,25**							**125.686.751.213,00**	
			Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	-		-	100 %	510.921.493,00						-	0,00	
			-	-		-	-	76.545.000,00						-	0,00	
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						54.140.613.416,00					BIRO PEREEKONOMIAN		56.893.989.687,00	
		-						54.140.613.416,00					BIRO PEREEKONOMIAN		56.893.989.687,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	1.149.860.680,00						-	1.175.709.714,00	
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						38.880.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	1 Dokumen	38.880.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAERAH
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.778.018.972,00					BIRO PEREEKONOMIAN		1.935.642.645,00	
		-						1.778.018.972,00					BIRO PEREEKONOMIAN		1.935.642.645,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	903.728.843,00						-	994.402.135,00	
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						51.030.000,00							0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	1 Paket	51.030.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						20.853.954.442,00					BIRO PEREEKONOMIAN		22.642.351.143,00	
		-						20.853.954.442,00					BIRO PEREEKONOMIAN		22.642.351.143,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	101.074.693,00						-	117.269.500,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	6.902.196.403,00						-	7.027.613.155,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.177.682.990,00						-	1.266.654.237,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	739.177.553,00						-	814.350.988,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	6.188.271.899,00						-	7.191.328.500,00	
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						5.101.999,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	5.101.999,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAERAH
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						11.797.117,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	11.797.117,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAERAH
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.121.903,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	5.121.903,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAERAH
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						2.967.193,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	2.967.193,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						193.515.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	193.515.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAERAH
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						4.589.464.998,25					BIRO PEREEKONOMIAN		4.458.100.000,00	
		-						4.589.464.998,25					BIRO PEREEKONOMIAN		4.458.100.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	321.545.000,00						-	245.000.000,00	
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						76.545.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	76.545.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						13.337.598.892,00					BIRO PEREEKONOMIAN		14.386.413.096,00	
		-						13.337.598.892,00					BIRO PEREEKONOMIAN		14.386.413.096,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	8.022.096.726,00						-	8.776.301.022,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	155.632.000,00						-	166.934.400,00	
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.020.600,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	1.020.600,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						75.155.430,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	75.155.430,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						13.742.108.225,00					BIRO PEREEKONOMIAN		15.096.581.912,00	
		-						13.742.108.225,00					BIRO PEREEKONOMIAN		15.096.581.912,00	
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	67.476.586,00						-	7.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	-	1.055.599.495,00						-	1.212.691.982,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	1.135.225.296,00						-	1.145.560.500,00	
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						57.200.369,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	1 Unit	57.200.369,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						7.655.296,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	1 Unit	7.655.296,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAERAH
	4.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						61.476.586,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-		-	1 Unit	61.476.586,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAERAH
357.	**4.01.06**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**						**1.375.597.230,00**							**0,00**	
			-	-		-	-	1.072.507.230,00						-	0,00	
	4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian						505.150.000,00							0,00	
		-						505.150.000,00					BIRO PEREEKONOMIAN		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	-		-	-	303.090.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	-		-	-	202.060.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro						303.090.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	-		-	2 Dokumen	303.090.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAERAH
	4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro						202.060.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	-		-	2 Dokumen	202.060.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAERAH
	4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam						355.194.230,00					BIRO PEREEKONOMIAN		0,00	
		-						355.194.230,00					BIRO PEREEKONOMIAN		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	-		-	-	68.700.400,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	-		-	-	110.700.400,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	-		-	-	175.793.430,00						-	0,00	
	4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan						175.793.430,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	-		-	1 Dokumen	175.793.430,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAERAH
	4.01.06.1.02.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup						110.700.400,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	-		-	1 Dokumen	110.700.400,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAERAH
	4.01.06.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air						68.700.400,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	-		-	1 Dokumen	68.700.400,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAERAH
	4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD						515.253.000,00					BIRO PEREEKONOMIAN		0,00	
		-						515.253.000,00					BIRO PEREEKONOMIAN		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	-		-	-	60.618.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	-		-	-	151.545.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	-		-	-	303.090.000,00						-	0,00	
	4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha						303.090.000,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	-		-	1 Dokumen	303.090.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAERAH
	4.01.06.1.03.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi						151.545.000,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	-		-	1 Dokumen	151.545.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAERAH
	4.01.06.1.03.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD						60.618.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	-		-	1 Dokumen	60.618.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAERAH
		BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						**2.945.408.400,00**							**3.239.949.240,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**2.945.408.400,00**							**3.239.949.240,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**2.945.408.400,00**							**3.239.949.240,00**	
358.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**118.154.074.282,25**							**125.686.751.213,00**	
			Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	-		-	100 %	974.100.600,00						-	1.071.510.660,00	
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.778.018.972,00					BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		1.935.642.645,00	
		-						1.778.018.972,00					BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		1.935.642.645,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	903.728.843,00						-	994.402.135,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	404.216.840,00						-	431.138.524,00	
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						32.967.000,00							36.263.700,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	1 Paket	32.967.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	36.263.700,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						69.216.840,00							76.138.524,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	1 Orang	69.216.840,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	76.138.524,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						20.853.954.442,00					BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		22.642.351.143,00	
		-						20.853.954.442,00					BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		22.642.351.143,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	6.902.196.403,00						-	7.027.613.155,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.177.682.990,00						-	1.266.654.237,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	739.177.553,00						-	814.350.988,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	5.190.778.352,00						-	5.645.058.584,00	
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						87.485.777,00							96.234.355,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	87.485.777,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	96.234.355,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						21.022.880,00							23.125.168,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	21.022.880,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	23.125.168,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						13.206.600,00							14.527.260,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	13.206.600,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	14.527.260,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						202.886.640,00							223.175.304,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	202.886.640,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	223.175.304,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						13.337.598.892,00					BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		14.386.413.096,00	
		-						13.337.598.892,00					BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		14.386.413.096,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	3.916.206.203,00						-	4.117.036.513,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	8.022.096.726,00						-	8.776.301.022,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	155.632.000,00						-	166.934.400,00	
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						7.920.000,00							8.712.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	7.920.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	8.712.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						59.400.000,00							65.340.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	59.400.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	65.340.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						291.578.063,00							320.735.869,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	291.578.063,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	320.735.869,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						13.742.108.225,00					BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		15.096.581.912,00	
		-						13.742.108.225,00					BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		15.096.581.912,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	3.417.971.373,00						-	3.812.202.181,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	-	1.055.599.495,00						-	1.212.691.982,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	1.135.225.296,00						-	1.145.560.500,00	
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						84.942.000,00							93.436.200,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	1 Unit	84.942.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	93.436.200,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						86.644.800,00							95.309.280,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	1 Unit	86.644.800,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	95.309.280,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						16.830.000,00							18.513.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	1 Unit	16.830.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	18.513.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
359.	**4.01.08**	**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**						**1.971.307.800,00**							**2.168.438.580,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			-	-		-	-	1.674.307.800,00						-	1.841.738.580,00	
	4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah						684.307.800,00					BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		752.738.580,00	
		-						684.307.800,00					BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		752.738.580,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	-		-	-	337.807.800,00						-	371.588.580,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	-		-	-	198.000.000,00						-	217.800.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	-		-	-	148.500.000,00						-	163.350.000,00	
	4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD						337.807.800,00							371.588.580,00	
		Terkendalinya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	-		-	1 Laporan	337.807.800,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	371.588.580,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.01.0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN						198.000.000,00							217.800.000,00	
		Terkendalianya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	-		-	1 Laporan	198.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	217.800.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah						148.500.000,00							163.350.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkendalinya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	-		-	1 Laporan	148.500.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	163.350.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah						1.287.000.000,00					BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		1.415.700.000,00	
		-						1.287.000.000,00					BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		1.415.700.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	-		-	-	148.500.000,00						-	163.350.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	-		-	-	148.500.000,00						-	163.350.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	-		-	-	990.000.000,00						-	1.089.000.000,00	
	4.01.08.1.02.0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah						148.500.000,00							163.350.000,00	
		Tersedianya Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	-		-	1 Dokumen	148.500.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	163.350.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah						990.000.000,00							1.089.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	-		-	1 Laporan	990.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	1.089.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.02.0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah						148.500.000,00							163.350.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	-		-	1 Dokumen	148.500.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	163.350.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA						**2.888.396.798,25**							**3.181.400.800,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**2.888.396.798,25**							**3.181.400.800,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**2.888.396.798,25**							**3.181.400.800,00**	
360.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**118.154.074.282,25**							**125.686.751.213,00**	
			Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	-		-	100 %	753.396.800,00						-	861.400.800,00	
			-	-		-	-	259.999.998,25						-	175.000.000,00	
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.778.018.972,00					BIRO BARANG DAN JASA		1.935.642.645,00	
		-						1.778.018.972,00					BIRO BARANG DAN JASA		1.935.642.645,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	404.216.840,00						-	431.138.524,00	
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						150.000.000,00							155.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	5 Orang	150.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	155.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						20.853.954.442,00					BIRO BARANG DAN JASA		22.642.351.143,00	
		-						20.853.954.442,00					BIRO BARANG DAN JASA		22.642.351.143,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-		-	-	150.000.000,00						-	155.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	6.902.196.403,00						-	7.027.613.155,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.177.682.990,00						-	1.266.654.237,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	739.177.553,00						-	814.350.988,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	5.190.778.352,00						-	5.645.058.584,00	
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						100.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	100.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	150.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						185.000.000,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	185.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	200.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						35.000.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	35.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	40.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						119.996.000,00							130.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	119.996.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	130.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						150.000.000,00							155.000.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-		-	2 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	155.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						4.589.464.998,25					BIRO BARANG DAN JASA		4.458.100.000,00	
		-						4.589.464.998,25					BIRO BARANG DAN JASA		4.458.100.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	205.999.998,25						-	183.100.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	-	3.850.000.000,00						-	3.800.000.000,00	
	4.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						175.000.000,00							125.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	3 Unit	175.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	125.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						84.999.998,25							50.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	1 Paket	84.999.998,25	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	50.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						13.337.598.892,00					BIRO BARANG DAN JASA		14.386.413.096,00	
		-						13.337.598.892,00					BIRO BARANG DAN JASA		14.386.413.096,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	8.022.096.726,00						-	8.776.301.022,00	
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						75.400.800,00							75.400.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	75.400.800,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	75.400.800,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						13.742.108.225,00					BIRO BARANG DAN JASA		15.096.581.912,00	
		-						13.742.108.225,00					BIRO BARANG DAN JASA		15.096.581.912,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	-	1.055.599.495,00						-	1.212.691.982,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	1.135.225.296,00						-	1.145.560.500,00	
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						58.000.000,00							76.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	1 Unit	58.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	76.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						30.000.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	25 Unit	30.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	35.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
361.	**4.01.07**	**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**						**1.725.000.000,00**							**1.990.000.000,00**	
			-	-		-	-	1.325.000.000,00						-	1.515.000.000,00	
	4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						405.000.000,00					BIRO BARANG DAN JASA		470.000.000,00	
		-						405.000.000,00					BIRO BARANG DAN JASA		470.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	-		-	-	150.000.000,00						-	170.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	-		-	-	130.000.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	-		-	-	125.000.000,00						-	150.000.000,00	
	4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa						125.000.000,00							150.000.000,00	
		Terkelolanya Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	-		-	2 Laporan	125.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	150.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa						150.000.000,00							170.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	-		-	2 Laporan	150.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	170.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa						130.000.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	-		-	2 Laporan	130.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	150.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik						520.000.000,00					BIRO BARANG DAN JASA		620.000.000,00	
		-						520.000.000,00					BIRO BARANG DAN JASA		620.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	-		-	-	100.000.000,00						-	120.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	-		-	-	320.000.000,00						-	350.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	-		-	-	100.000.000,00						-	150.000.000,00	
	4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik						320.000.000,00							350.000.000,00	
		Terkelolanya Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	-		-	2 Laporan	320.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	350.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa						100.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	-		-	2 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	150.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.07.1.02.0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa						100.000.000,00							120.000.000,00	
		Terkelolanya Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	-		-	2 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	120.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa						800.000.000,00					BIRO BARANG DAN JASA		900.000.000,00	
		-						800.000.000,00					BIRO BARANG DAN JASA		900.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	-		-	-	500.000.000,00						-	550.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	-		-	-	150.000.000,00						-	175.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	-		-	-	150.000.000,00						-	175.000.000,00	
	4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa						150.000.000,00							175.000.000,00	
		Terbinanya Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	-		-	10 Orang	150.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	175.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa						150.000.000,00							175.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	-		-	1 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	175.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa						500.000.000,00							550.000.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	-		-	1 Dokumen	500.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	550.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
		BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH						**3.749.117.254,00**							**0,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**3.749.117.254,00**							**0,00**	
	5.06	**PENGELOLAAN PERBATASAN**						**3.749.117.254,00**							**0,00**	
362.	**5.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**3.647.130.754,00**							**0,00**	
			-	-		-	-	3.647.130.754,00						-	0,00	
	5.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						21.932.000,00					-		0,00	
		-						21.932.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	21.932.000,00						-	0,00	
	5.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						21.932.000,00							0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	5 Dokumen	21.932.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.153.138.354,00					-		0,00	
		-						3.153.138.354,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	45.960.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	3.107.178.354,00						-	0,00	
	5.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.107.178.354,00							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	30 Orang/ Bulan	3.107.178.354,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						45.960.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	1 Dokumen	45.960.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						263.740.400,00					-		0,00	
		-						263.740.400,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	30.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	192.803.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	25.309.400,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	15.628.000,00						-	0,00	
	5.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						25.309.400,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	25.309.400,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						15.628.000,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	15.628.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						30.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	12 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						192.803.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	192.803.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						149.200.000,00					-		0,00	
		-						149.200.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	52.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	97.200.000,00						-	0,00	
	5.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						52.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	52.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						97.200.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	97.200.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						59.120.000,00					-		0,00	
		-						59.120.000,00					-		0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	49.210.000,00						-	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	4.990.000,00						-	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	4.920.000,00						-	0,00	
	5.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						49.210.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	5 Unit	49.210.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						4.990.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	12 Unit	4.990.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						4.920.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	12 Unit	4.920.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
363.	**5.06.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN**						**101.986.500,00**							**0,00**	
			-	-		-	-	84.986.500,00						-	0,00	
	5.06.02.1.01	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama						34.000.000,00					-		0,00	
		-						34.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	-		-	-	17.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	-		-	-	17.000.000,00						-	0,00	
	5.06.02.1.01.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah						17.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	-		-	1 Dokumen	17.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan						17.000.000,00							0,00	
		Tersusunnya Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	-		-	1 Dokumen	17.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.1.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan						33.997.900,00					-		0,00	
		-						33.997.900,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	-		-	-	16.998.200,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasaan	-		-	-	16.999.700,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.06.02.1.02.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan						16.999.700,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasaan	-		-	1 Dokumen	16.999.700,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.1.02.0004	Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan						16.998.200,00							0,00	
		Terlaksananya Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	-		-	1 Dokumen	16.998.200,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.1.03	Monitoring dan Evaluasi						33.988.600,00					-		0,00	
		-						33.988.600,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	-		-	-	16.992.600,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan	-		-	-	16.996.000,00						-	0,00	
	5.06.02.1.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan						16.992.600,00							0,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	-		-	1 Dokumen	16.992.600,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.1.03.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan						16.996.000,00							0,00	
		Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan	-		-	1 Laporan	16.996.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
		BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH						**14.404.429.140,00**							**15.224.429.140,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**14.404.429.140,00**							**15.224.429.140,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**14.404.429.140,00**							**15.224.429.140,00**	
364.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**118.154.074.282,25**							**125.686.751.213,00**	
			Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	-		-	100 %	1.086.996.135,00						-	1.639.429.140,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			-	-		-	-	85.000.000,00						-	85.000.000,00	
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.778.018.972,00					BIRO PEMERINTAHAN		1.935.642.645,00	
		-						1.778.018.972,00					BIRO PEMERINTAHAN		1.935.642.645,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	56.127.000,00						-	55.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	903.728.843,00						-	994.402.135,00	
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						41.400.000,00							68.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	1 Paket	41.400.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	68.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan						56.127.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	1 Orang	56.127.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	55.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						20.853.954.442,00					BIRO PEMERINTAHAN		22.642.351.143,00	
		-						20.853.954.442,00					BIRO PEMERINTAHAN		22.642.351.143,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	6.902.196.403,00						-	7.027.613.155,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.177.682.990,00						-	1.266.654.237,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	739.177.553,00						-	814.350.988,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	5.190.778.352,00						-	5.645.058.584,00	
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						35.000.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	35.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	35.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						23.327.975,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	3 Paket	23.327.975,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	40.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	2 Paket	25.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	25.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						688.213.000,00							683.758.900,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	688.213.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	683.758.900,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						4.589.464.998,25					BIRO PEMERINTAHAN		4.458.100.000,00	
		-						4.589.464.998,25					BIRO PEMERINTAHAN		4.458.100.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	321.545.000,00						-	245.000.000,00	
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						85.000.000,00							85.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	3 Unit	85.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	85.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						13.337.598.892,00					BIRO PEMERINTAHAN		14.386.413.096,00	
		-						13.337.598.892,00					BIRO PEMERINTAHAN		14.386.413.096,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	3.916.206.203,00						-	4.117.036.513,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	8.022.096.726,00						-	8.776.301.022,00	
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						15.000.000,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	15.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	15.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						70.208.160,00							456.353.040,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	70.208.160,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	456.353.040,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						13.742.108.225,00					BIRO PEMERINTAHAN		15.096.581.912,00	
		-						13.742.108.225,00					BIRO PEMERINTAHAN		15.096.581.912,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	-	1.055.599.495,00						-	1.212.691.982,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	1.135.225.296,00						-	1.145.560.500,00	
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						110.040.000,00							261.317.200,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	7 Unit	110.040.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	261.317.200,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						22.680.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	9 Unit	22.680.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	25.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
365.	**4.01.03**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**						**14.292.513.215,00**							**14.588.084.221,00**	
			Persentase Kebijakan Daerah Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Yang Ditindaklanjuti	-		-	100 %	750.000.000,00						-	950.000.000,00	
			Persentase Kebijakan Daerah Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Yang Ditindaklanjuti	-		-	undefined undefined	1.085.433.000,00						-	1.040.000.000,00	
			-	-		-	-	10.797.000.005,00						-	10.685.000.000,00	
	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan						10.797.000.005,00					BIRO PEMERINTAHAN		10.685.000.000,00	
		-						10.797.000.005,00					BIRO PEMERINTAHAN		10.685.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	-		-	-	10.197.000.005,00						-	9.985.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	-		-	-	200.000.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	-		-	-	400.000.000,00						-	500.000.000,00	
	4.01.03.1.01.0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan						400.000.000,00							500.000.000,00	
		Terkelolanya Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	-		-	1 Dokumen	400.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	500.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	-		-	1 Dokumen	200.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	200.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah						10.197.000.005,00							9.985.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	-		-	1 Dokumen	10.197.000.005,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	9.985.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah						1.964.810.400,00					BIRO PEMERINTAHAN		2.310.550.920,00	
		-						1.964.810.400,00					BIRO PEMERINTAHAN		2.310.550.920,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	-		-	-	300.000.000,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	-		-	-	300.000.000,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		-	-	1.364.810.400,00						-	1.510.550.920,00	
	4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD						300.000.000,00							400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	-		-	1 Dokumen	300.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	400.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan						300.000.000,00							400.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	-		-	1 Dokumen	300.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	400.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan						450.000.000,00							550.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		-	1 Laporan	450.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	550.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah						1.530.702.810,00					BIRO PEMERINTAHAN		1.592.533.301,00	
		-						1.530.702.810,00					BIRO PEMERINTAHAN		1.592.533.301,00	
			Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	-		-	-	930.702.810,00						-	792.533.301,00	
			Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	-		-	-	300.000.000,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	-		-	-	300.000.000,00						-	400.000.000,00	
	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah						785.433.000,00							640.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	-		-	1 Dokumen	785.433.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	640.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta						300.000.000,00							400.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	-		-	1 Dokumen	300.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	400.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama						300.000.000,00							400.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	-		-	1 Laporan	300.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	400.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
		BIRO KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						**99.542.800.000,00**							**103.992.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**99.542.800.000,00**							**103.992.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**99.542.800.000,00**							**103.992.000.000,00**	
366.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**118.154.074.282,25**							**125.686.751.213,00**	
			Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	-		-	100 %	1.247.800.000,00						-	1.132.000.000,00	
			-	-		-	-	175.000.000,00						-	175.000.000,00	
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.778.018.972,00					BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		1.935.642.645,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						1.778.018.972,00					BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		1.935.642.645,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	404.216.840,00						-	431.138.524,00	
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						185.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	10 Orang	185.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	200.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						20.853.954.442,00					BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		22.642.351.143,00	
		-						20.853.954.442,00					BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		22.642.351.143,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	6.902.196.403,00						-	7.027.613.155,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.177.682.990,00						-	1.266.654.237,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	739.177.553,00						-	814.350.988,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	5.190.778.352,00						-	5.645.058.584,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	6.188.271.899,00						-	7.191.328.500,00	
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						175.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	175.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	200.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	20.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	20.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						120.000.000,00							125.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	120.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	125.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						45.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	45.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	50.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						400.000.000,00							400.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	400.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	400.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						4.589.464.998,25					BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		4.458.100.000,00	
		-						4.589.464.998,25					BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		4.458.100.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	-	3.850.000.000,00						-	3.800.000.000,00	
	4.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						175.000.000,00							175.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	0 Unit	175.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	175.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						13.337.598.892,00					BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		14.386.413.096,00	
		-						13.337.598.892,00					BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		14.386.413.096,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	3.916.206.203,00						-	4.117.036.513,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	8.022.096.726,00						-	8.776.301.022,00	
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						12.000.000,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	12.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	12.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						200.000.000,00							210.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	200.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	210.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						13.742.108.225,00					BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		15.096.581.912,00	
		-						13.742.108.225,00					BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		15.096.581.912,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	-	1.055.599.495,00						-	1.212.691.982,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	1.135.225.296,00						-	1.145.560.500,00	
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						90.800.000,00							90.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	2 Unit	90.800.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	90.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	20 Unit	20.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	25.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
367.	**4.01.04**	**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**98.247.360.701,00**							**102.639.728.736,00**	
			Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Difasilitasi	-		-	undefined undefined	7.000.000.000,00						-	3.675.000.000,00	
			-	-		-	-	91.100.000.000,00						-	95.660.000.000,00	
	4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual						90.500.000.000,00					BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		95.000.000.000,00	
		-						90.500.000.000,00					BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		95.000.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	-		-	-	20.000.000.000,00						-	21.000.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	-		-	-	70.500.000.000,00						-	74.000.000.000,00	
	4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual						70.500.000.000,00							74.000.000.000,00	
		Terkelolanya Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	-		-	300 Unit	70.500.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	74.000.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
	4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual						20.000.000.000,00							21.000.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	-		-	1 Lembaga	20.000.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	21.000.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar						7.147.360.701,00					BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		6.979.728.736,00	
		-						7.147.360.701,00					BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		6.979.728.736,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	-		-	-	500.000.000,00						-	525.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	-		-	-	3.000.000.000,00						-	3.150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	-		-	-	3.647.360.701,00						-	3.304.728.736,00	
	4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan						3.000.000.000,00							3.150.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	-		-	1 Dokumen	3.000.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	3.150.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
	4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan						500.000.000,00							525.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	-		-	1 Dokumen	500.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	525.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
	4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial						3.500.000.000,00							3.150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	-		-	3 Dokumen	3.500.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	3.150.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
	4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar						600.000.000,00					BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		660.000.000,00	
		-						600.000.000,00					BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		660.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	-		-	-	200.000.000,00						-	210.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	-		-	-	400.000.000,00						-	450.000.000,00	
	4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata						200.000.000,00							210.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	-		-	2 Dokumen	200.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	210.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja						400.000.000,00							450.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	-		-	1 Dokumen	400.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	450.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
		SEKRETARIAT DPRD						**148.277.011.118,00**							**162.405.729.699,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**148.277.011.118,00**							**162.405.729.699,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**						**148.277.011.118,00**							**162.405.729.699,00**	
368.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**79.818.680.418,00**							**95.701.298.999,00**	
			Persentase Terselenggaranya pelayanan urusan Pemerintahan Daerah Sekretariat DPRD Provinsi Maluku	-		-	100 %	0,00						-	0,00	
			-	-		-	-	79.818.680.418,00						-	95.701.298.999,00	
	4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00					ASN Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku dan masyarakat Provinsi Maluku.		0,00	
		-						0,00					ASN Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku dan masyarakat Provinsi Maluku.		0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	0,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	0,00						-	0,00	
	4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						0,00							0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	-	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						0,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	-	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7.824.231.654,00					ASN Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku dan masyarakat Provinsi Maluku.		7.924.231.654,00	
		-						7.824.231.654,00					ASN Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku dan masyarakat Provinsi Maluku.		7.924.231.654,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	7.824.231.654,00						-	7.924.231.654,00	
	4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						7.824.231.654,00							7.924.231.654,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	161 Orang/ Bulan	7.824.231.654,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	7.924.231.654,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						7.080.721.929,00					ASN Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku dan masyarakat Provinsi Maluku.		6.293.889.529,00	
		-						7.080.721.929,00					ASN Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku dan masyarakat Provinsi Maluku.		6.293.889.529,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	1.972.795.000,00						-	1.982.795.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	2.000.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	855.555.000,00						-	865.555.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	377.427.300,00						-	800.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	1.671.324.629,00						-	1.771.324.629,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.410.000,00						-	671.004.900,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	202.210.000,00						-	203.210.000,00	
	4.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.410.000,00							671.004.900,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	1.410.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	671.004.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						202.210.000,00							203.210.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	202.210.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	203.210.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						377.427.300,00							800.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	377.427.300,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.671.324.629,00							1.771.324.629,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	1.671.324.629,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	1.771.324.629,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						1.972.795.000,00							1.982.795.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	1 Dokumen	1.972.795.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	1.982.795.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						2.000.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	2.000.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						855.555.000,00							865.555.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	855.555.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	865.555.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						10.919.904.960,00					ASN Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku dan masyarakat Provinsi Maluku.		11.119.904.960,00	
		-						10.919.904.960,00					ASN Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku dan masyarakat Provinsi Maluku.		11.119.904.960,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	2.097.243.360,00						-	2.197.243.360,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	8.822.661.600,00						-	8.922.661.600,00	
	4.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						2.097.243.360,00							2.197.243.360,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.097.243.360,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	2.197.243.360,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						8.822.661.600,00							8.922.661.600,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	5 Unit	8.822.661.600,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	8.922.661.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						8.821.005.587,00					ASN Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku dan masyarakat Provinsi Maluku.		11.222.005.587,00	
		-						8.821.005.587,00					ASN Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku dan masyarakat Provinsi Maluku.		11.222.005.587,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	952.486.000,00						-	3.152.486.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	6.302.289.587,00						-	6.402.289.587,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.430.320.000,00						-	1.530.320.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	135.910.000,00						-	136.910.000,00	
	4.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						135.910.000,00							136.910.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	135.910.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	136.910.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						952.486.000,00							3.152.486.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	952.486.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	3.152.486.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						1.430.320.000,00							1.530.320.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	1.430.320.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	1.530.320.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						6.302.289.587,00							6.402.289.587,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	6.302.289.587,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	6.402.289.587,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.772.432.169,00					ASN Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku dan masyarakat Provinsi Maluku.		11.812.837.269,00	
		-						4.772.432.169,00					ASN Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku dan masyarakat Provinsi Maluku.		11.812.837.269,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	1.158.028.800,00						-	1.258.028.800,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	1.051.206.405,00						-	2.123.426.405,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	2.563.196.964,00						-	8.431.382.064,00	
	4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1.051.206.405,00							2.123.426.405,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	35 Unit	1.051.206.405,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	2.123.426.405,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						1.158.028.800,00							1.258.028.800,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	5 Unit	1.158.028.800,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	1.258.028.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						2.563.196.964,00							8.431.382.064,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	5 Unit	2.563.196.964,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	8.431.382.064,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						30.617.864.119,00					ASN Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku dan masyarakat Provinsi Maluku.		42.445.910.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						30.617.864.119,00					ASN Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku dan masyarakat Provinsi Maluku.		42.445.910.000,00	
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	-		-	-	28.671.954.119,00						-	40.000.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	-		-	-	200.000.000,00						-	600.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	-		-	-	1.745.910.000,00						-	1.845.910.000,00	
	4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD						28.671.954.119,00							40.000.000.000,00	
		Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	-		-	45 Orang/ Bulan	28.671.954.119,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	40.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD						1.745.910.000,00							1.845.910.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	-		-	45 Paket	1.745.910.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	1.845.910.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD						200.000.000,00							600.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	-		-	45 Orang	200.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD						9.782.520.000,00					ASN Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku dan masyarakat Provinsi Maluku.		4.882.520.000,00	
		-						9.782.520.000,00					ASN Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku dan masyarakat Provinsi Maluku.		4.882.520.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	-		-	-	5.000.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	-		-	-	4.782.520.000,00						-	4.882.520.000,00	
	4.02.01.1.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD						5.000.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	-		-	1 Laporan	5.000.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD						4.782.520.000,00							4.882.520.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	-		-	1 Paket	4.782.520.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-		-	4.882.520.000,00	SEKRETARIAT DPRD
369.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**						**68.458.330.700,00**							**66.704.430.700,00**	
				-		-		4.713.461.540,00						-	4.727.561.540,00	
			Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Ketetapan)	-		-	tepat waktu tepat waktu	6.947.867.000,00						-	6.958.867.000,00	
			Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	-		-	100 %	6.947.867.000,00						-	6.958.867.000,00	
			Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	-		-	100 %	6.635.976.500,00						-	6.839.976.500,00	
			-	-		-	-	50.161.025.660,00						-	48.178.025.660,00	
	4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD						6.947.867.000,00					ASN Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku dan masyarakat Provinsi Maluku.		6.958.867.000,00	
		-						6.947.867.000,00					ASN Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku dan masyarakat Provinsi Maluku.		6.958.867.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	-		-	-	6.130.794.000,00						-	6.140.794.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	-		-	-	817.073.000,00						-	818.073.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	-		-	-	0,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan ProgramPembentukan Peraturan Daerah						817.073.000,00							818.073.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	-		-	5 Dokumen	817.073.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	818.073.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda						6.130.794.000,00							6.140.794.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	-		-	5 Dokumen	6.130.794.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	6.140.794.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah						0,00							0,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	-		-	45 Orang	0,00	Provinsi Maluku	-	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran						4.713.461.540,00					ASN Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku dan masyarakat Provinsi Maluku.		4.727.561.540,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						4.713.461.540,00					ASN Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku dan masyarakat Provinsi Maluku.		4.727.561.540,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	-		-	-	1.131.843.000,00						-	1.132.843.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	-		-	-	730.218.000,00						-	740.218.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	-		-	-	361.178.000,00						-	362.178.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	-		-	-	1.361.260.000,00						-	1.362.260.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	-		-	-	400.285.000,00						-	400.385.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	-		-	-	728.677.540,00						-	729.677.540,00	
	4.02.02.1.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS						730.218.000,00							740.218.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	-		-	2 Dokumen	730.218.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	740.218.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						728.677.540,00							729.677.540,00	
		Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	-		-	2 Dokumen	728.677.540,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	729.677.540,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD						1.131.843.000,00							1.132.843.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	-		-	2 Dokumen	1.131.843.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	1.132.843.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0004	Pembahasan Perubahan APBD						400.285.000,00							400.385.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	-		-	2 Dokumen	400.285.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	400.385.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0005	Pembahasan Laporan Semester						361.178.000,00							362.178.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	-		-	1 Dokumen	361.178.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	362.178.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD						1.361.260.000,00							1.362.260.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	-		-	1 Dokumen	1.361.260.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	1.362.260.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan						6.635.976.500,00					ASN Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku dan masyarakat Provinsi Maluku.		6.839.976.500,00	
		-						6.635.976.500,00					ASN Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku dan masyarakat Provinsi Maluku.		6.839.976.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	-		-	-	1.598.637.000,00						-	1.698.637.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	-		-	-	10.477.500,00						-	11.477.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	-		-	-	1.295.995.500,00						-	1.296.995.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	-		-	-	1.294.195.500,00						-	1.295.195.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	-		-	-	1.218.835.500,00						-	1.318.835.500,00	
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	-		-	-	1.217.835.500,00						-	1.218.835.500,00	
	4.02.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum						1.294.195.500,00							1.295.195.500,00	
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	-		-	1 Laporan	1.294.195.500,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	1.295.195.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur						1.295.995.500,00							1.296.995.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	-		-	1 Laporan	1.295.995.500,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	1.296.995.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat						1.217.835.500,00							1.218.835.500,00	
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	-		-	1 Laporan	1.217.835.500,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	1.218.835.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam						1.218.835.500,00							1.318.835.500,00	
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	-		-	1 Laporan	1.218.835.500,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	1.318.835.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan						10.477.500,00							11.477.500,00	
		Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	-		-	1 Dokumen	10.477.500,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	11.477.500,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.02.02.1.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran						1.598.637.000,00							1.698.637.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	-		-	1 Dokumen	1.598.637.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	1.698.637.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD						15.338.030.960,00					ASN Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku dan masyarakat Provinsi Maluku.		15.641.030.960,00	
		-						15.338.030.960,00					ASN Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku dan masyarakat Provinsi Maluku.		15.641.030.960,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	-		-	-	3.451.987.000,00						-	3.551.987.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	-		-	-	979.980.000,00						-	980.980.000,00	
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	-		-	-	7.811.635.000,00						-	7.812.635.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	-		-	-	513.652.000,00						-	514.652.000,00	
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	-		-	-	1.301.360.000,00						-	1.401.360.000,00	
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	-		-	-	1.279.416.960,00						-	1.379.416.960,00	
	4.02.02.1.04.0001	Orientasi DPRD						979.980.000,00							980.980.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	-		-	1 Dokumen	979.980.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	980.980.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli						1.301.360.000,00							1.401.360.000,00	
		Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	-		-	16 Orang	1.301.360.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	1.401.360.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi						1.279.416.960,00							1.379.416.960,00	
		Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	-		-	9 Orang	1.279.416.960,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	1.379.416.960,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						3.451.987.000,00							3.551.987.000,00	
		Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	-		-	1 Dokumen	3.451.987.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	3.551.987.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD						513.652.000,00							514.652.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	-		-	1 Dokumen	513.652.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	514.652.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD						7.811.635.000,00							7.812.635.000,00	
		Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	-		-	1 Dokumen	7.811.635.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	7.812.635.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						19.543.358.100,00					ASN Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku dan masyarakat Provinsi Maluku.		19.654.358.100,00	
		-						19.543.358.100,00					ASN Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku dan masyarakat Provinsi Maluku.		19.654.358.100,00	
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	-		-	-	14.538.160.000,00						-	14.638.160.000,00	
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	-		-	-	37.558.100,00						-	38.558.100,00	
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	-		-	-	4.967.640.000,00						-	4.977.640.000,00	
	4.02.02.1.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah						4.967.640.000,00							4.977.640.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	-		-	1 Laporan	4.967.640.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	4.977.640.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD						37.558.100,00							38.558.100,00	
		Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	-		-	1 Dokumen	37.558.100,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	38.558.100,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses						14.538.160.000,00							14.638.160.000,00	
		Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	-		-	1 Dokumen	14.538.160.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	14.638.160.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD						251.959.000,00					ASN Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku dan masyarakat Provinsi Maluku.		253.959.000,00	
		-						251.959.000,00					ASN Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku dan masyarakat Provinsi Maluku.		253.959.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	-		-	-	167.201.000,00						-	168.201.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	-		-	-	84.758.000,00						-	85.758.000,00	
	4.02.02.1.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD						167.201.000,00							168.201.000,00	
		Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	-		-	1 Dokumen	167.201.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	168.201.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD						84.758.000,00							85.758.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	-		-	1 Laporan	84.758.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	85.758.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD						15.027.677.600,00					ASN Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku dan masyarakat Provinsi Maluku.		12.628.677.600,00	
		-						15.027.677.600,00					ASN Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku dan masyarakat Provinsi Maluku.		12.628.677.600,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	-		-	-	500.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	-		-	-	2.000.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	-		-	-	12.483.514.600,00						-	12.583.514.600,00	
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	-		-	-	44.163.000,00						-	45.163.000,00	
	4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD						12.483.514.600,00							12.583.514.600,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	-		-	1 Dokumen	12.483.514.600,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	12.583.514.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD						44.163.000,00							45.163.000,00	
		Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	-		-	1 Laporan	44.163.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	45.163.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah						500.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	-		-	1 Dokumen	500.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	-	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus						2.000.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	-		-	1 Dokumen	2.000.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						**18.638.044.296,00**							**259.354.500,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**18.638.044.296,00**							**259.354.500,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**						**18.388.044.296,00**							**259.354.500,00**	
370.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**12.177.917.296,00**							**259.354.500,00**	
			Presentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	-		-	100 %	857.532.767,00						-	0,00	
			Presentase Payanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	-		-	100 %	11.304.363.529,00						-	259.354.500,00	
	5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						160.669.000,00					-		259.354.500,00	
		-						160.669.000,00					-		259.354.500,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	13.723.600,00						-	20.142.700,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	44.956.400,00						-	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	14.101.600,00						-	20.165.500,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	10.021.000,00						-	12.180.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	10.021.000,00						-	12.096.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	8.784.600,00						-	10.909.600,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	59.060.800,00						-	133.860.700,00	
	5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						44.956.400,00							50.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	1 Dokumen	44.956.400,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						10.021.000,00							12.096.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	10.021.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	12.096.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						10.021.000,00							12.180.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	10.021.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	12.180.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						13.723.600,00							20.142.700,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	13.723.600,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	20.142.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						14.101.600,00							20.165.500,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	14.101.600,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	20.165.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						8.784.600,00							10.909.600,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	1 Laporan	8.784.600,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	10.909.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						59.060.800,00							133.860.700,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	1 Laporan	59.060.800,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	133.860.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						11.153.715.529,00					-		0,00	
		-						11.153.715.529,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	251.977.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	208.939.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	77.170.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	10.615.629.529,00						-	0,00	
	5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						10.615.629.529,00							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	1 Orang/ Bulan	10.615.629.529,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						251.977.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	1 Dokumen	251.977.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						208.939.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	208.939.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						77.170.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	1 Laporan	77.170.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						48.533.000,00					-		0,00	
		-						48.533.000,00					-		0,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	48.533.000,00						-	0,00	
	5.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						48.533.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	1 Orang	48.533.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						136.858.300,00					-		0,00	
		-						136.858.300,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	6.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	5.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	99.865.300,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	19.993.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	6.000.000,00						-	0,00	
	5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						6.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	6.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						99.865.300,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	99.865.300,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						19.993.000,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	19.993.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						6.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	1 Dokumen	6.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						5.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						176.338.608,00					-		0,00	
		-						176.338.608,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	176.338.608,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
	5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						176.338.608,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	176.338.608,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						501.802.859,00					-		0,00	
		-						501.802.859,00					-		0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	408.199.970,00						-	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	93.602.889,00						-	0,00	
	5.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						408.199.970,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	1 Unit	408.199.970,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						93.602.889,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	1 Unit	93.602.889,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
371.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**						**3.468.358.000,00**							**0,00**	
			Persentase Keselarasan RPJMD Dengan RKPD	-		-	100 %	2.406.000.000,00						-	0,00	
			Presentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	-		-	100 %	1.062.358.000,00						-	0,00	
	5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						2.406.000.000,00					-		0,00	
		-						2.406.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	-		-	-	16.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	-		-	-	130.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	-		-	-	651.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	-		-	-	669.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	-		-	-	900.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	-		-	-	40.000.000,00						-	0,00	
	5.01.02.1.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah						900.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	-		-	1 Dokumen	900.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya						40.000.000,00							0,00	
		Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	-		-	1 Dokumen	40.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik						130.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	-		-	1 Berita Acara	130.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah						16.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	-		-	1 Berita Acara	16.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi						651.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	-		-	1 Berita Acara	651.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi						669.000.000,00							0,00	
		Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	-		-	1 Dokumen	669.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						277.415.500,00					-		0,00	
		-						277.415.500,00					-		0,00	
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	-		-	-	135.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-		-	-	142.415.500,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.02.1.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah						135.000.000,00							0,00	
		Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	-		-	84 Orang	135.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.02.0003	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						142.415.500,00							0,00	
		Terbinanya Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-		-	84 Orang	142.415.500,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						784.942.500,00					-		0,00	
		-						784.942.500,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	-		-	-	21.028.000,00						-	0,00	
			Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	-		-	-	763.914.500,00						-	0,00	
	5.01.02.1.03.0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkendalinya Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	-		-	1 Kerja Sama	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah						763.914.500,00							0,00	
		Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	-		-	1 Laporan	763.914.500,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						21.028.000,00							0,00	
		Terfasilitasi/Evaluasinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	-		-	1 Dokumen	21.028.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
372.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**						**2.741.769.000,00**							**0,00**	
			Aset Dana Pensiun/PDRB (IUP 45)	-		-	0,31 %	1.020.000.000,00						-	0,00	
			Nilai Transaksi Saham Per kapita Per Provinsi (IUP 45)	-		-	1.191.817, 71 Rupiah	1.020.000.000,00						-	0,00	
			Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-		-	100 %	721.769.400,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-		-	100 %	999.999.600,00						-	0,00	
			Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-		-	100 %	1.020.000.000,00						-	0,00	
			Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (IUP 45)	-		-	25,84 %	1.020.000.000,00						-	0,00	
			Total Kredit/PDRB (IUP 45)	-		-	31,61 %	1.020.000.000,00						-	0,00	
	5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						999.999.600,00					-		0,00	
		-						999.999.600,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-		-	-	31.792.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-		-	-	40.396.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	-		-	-	768.207.600,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	-		-	-	159.604.000,00						-	0,00	
	5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						40.396.000,00							0,00	
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-		-	1 Dokumen	40.396.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan						159.604.000,00							0,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	-		-	1 Laporan	159.604.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						31.792.000,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-		-	1 Dokumen	31.792.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia						768.207.600,00							0,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	-		-	1 Laporan	768.207.600,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						1.020.000.000,00					-		0,00	
		-						1.020.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-		-	-	480.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	-		-	-	255.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	-		-	-	285.000.000,00						-	0,00	
	5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian						255.000.000,00							0,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	-		-	1 Laporan	255.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						480.000.000,00							0,00	
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-		-	1 Dokumen	480.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA						285.000.000,00							0,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	-		-	1 Laporan	285.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						721.769.400,00					-		0,00	
		-						721.769.400,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-		-	-	140.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	-		-	-	281.770.400,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	-		-	-	299.999.000,00						-	0,00	
	5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						140.000.000,00							0,00	
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-		-	1 Dokumen	140.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur						281.770.400,00							0,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	-		-	1 Laporan	281.770.400,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.03.1.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						0,00							0,00	
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan						299.999.000,00							0,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	-		-	1 Laporan	299.999.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**250.000.000,00**							**0,00**	
373.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**						**0,00**							**0,00**	
			Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	-		-	70 %	0,00						-	0,00	
	5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan						0,00					-		0,00	
		-						0,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	-		-	-	0,00						-	0,00	
	5.05.02.1.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan						0,00					-		0,00	
		-						0,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	-		-	-	0,00						-	0,00	
	5.05.02.1.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.1.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi						0,00					-		0,00	
		-						0,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	-		-	-	0,00						-	0,00	
	5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan						0,00							0,00	
		Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	-		-	1 Laporan	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
374.	**5.05.03**	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**						**250.000.000,00**							**0,00**	
			Presentase Produk Inovasi Yang dimanfaatkan	-		-	100 %	250.000.000,00						-	0,00	
	5.05.03.1.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan						100.000.000,00					-		0,00	
		-						100.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	-		-	-	100.000.000,00						-	0,00	
	5.05.03.1.01.0003	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset						100.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	-		-	1 Naskah	100.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.03.1.02	Invensi dan Inovasi						150.000.000,00					-		0,00	
		-						150.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	-		-	-	150.000.000,00						-	0,00	
	5.05.03.1.02.0001	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi						150.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	-		-	1 Laporan	150.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH						**258.388.747.971,92**							**380.133.015.182,99**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**258.388.747.971,92**							**380.133.015.182,99**	
	5.02	**KEUANGAN**						**258.388.747.971,92**							**380.133.015.182,99**	
375.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**17.098.977.215,68**							**30.643.919.482,99**	
			Nilai SAKIP	-		-	70 Nilai	357.510.000,00						-	850.000.000,00	
			Nilai SAKIP	-		-	70 Nilai	2.759.399.099,00						-	5.379.623.679,11	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-		-	70 Nilai	13.972.068.116,68						-	24.092.497.212,38	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						462.566.300,00					BPKAD Provinsi Maluku		820.019.536,31	
		-						462.566.300,00					BPKAD Provinsi Maluku		820.019.536,31	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	153.699.000,00						-	195.361.624,13	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	278.440.000,00						-	446.168.456,01	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	30.427.300,00						-	178.489.456,17	
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						278.440.000,00							446.168.456,01	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	278.440.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	446.168.456,01	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						153.699.000,00							195.361.624,13	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	2 Dokumen	153.699.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	195.361.624,13	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						30.427.300,00							178.489.456,17	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	1 Laporan	30.427.300,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	178.489.456,17	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						13.499.501.816,68					BPKAD Provinsi Maluku		23.122.477.676,07	
		-						13.499.501.816,68					BPKAD Provinsi Maluku		23.122.477.676,07	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	29.434.000,00						-	223.084.228,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	13.470.067.816,68						-	22.899.393.448,07	
	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						13.470.067.816,68							22.899.393.448,07	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	65 Orang/ Bulan	13.470.067.816,68	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	22.899.393.448,07	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						29.434.000,00							223.084.228,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	29.434.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	223.084.228,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						20.000.000,00					BPKAD Provinsi Maluku		150.000.000,00	
		-						20.000.000,00					BPKAD Provinsi Maluku		150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	10.000.000,00						-	140.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
	5.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	10.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						10.000.000,00							140.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	140.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						54.557.000,00					BPKAD Provinsi Maluku		435.478.663,91	
		-						54.557.000,00					BPKAD Provinsi Maluku		435.478.663,91	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	-		-	-	10.000.000,00						-	167.313.171,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	44.557.000,00						-	268.165.492,91	
	5.02.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						10.000.000,00							167.313.171,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	167.313.171,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						44.557.000,00							268.165.492,91	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	6 Orang	44.557.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	268.165.492,91	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						940.669.700,00					BPKAD Provinsi Maluku		1.741.813.424,01	
		-						940.669.700,00					BPKAD Provinsi Maluku		1.741.813.424,01	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	144.585.000,00						-	242.552.637,60	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	550.882.000,00						-	955.159.948,60	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	184.124.000,00						-	222.302.246,31	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	23.499.900,00						-	160.899.295,75	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	37.578.800,00						-	160.899.295,75	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						37.578.800,00							160.899.295,75	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	37.578.800,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	160.899.295,75	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						184.124.000,00							222.302.246,31	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	184.124.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	222.302.246,31	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						23.499.900,00							160.899.295,75	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	2 Paket	23.499.900,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	160.899.295,75	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						144.585.000,00							242.552.637,60	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	144.585.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	242.552.637,60	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						550.882.000,00							955.159.948,60	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	6 Laporan	550.882.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	955.159.948,60	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						357.510.000,00					BPKAD Provinsi Maluku		850.000.000,00	
		-						357.510.000,00					BPKAD Provinsi Maluku		850.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	357.510.000,00						-	850.000.000,00	
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						357.510.000,00							850.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	9 Unit	357.510.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	850.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						1.375.872.399,00					BPKAD Provinsi Maluku		2.529.307.467,02	
		-						1.375.872.399,00					BPKAD Provinsi Maluku		2.529.307.467,02	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	193.600.000,00						-	223.084.228,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.131.772.399,00						-	2.145.323.943,27	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	50.500.000,00						-	160.899.295,75	
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						50.500.000,00							160.899.295,75	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	50.500.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	160.899.295,75	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						193.600.000,00							223.084.228,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	193.600.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	223.084.228,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.131.772.399,00							2.145.323.943,27	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	1.131.772.399,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	2.145.323.943,27	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						388.300.000,00					BPKAD Provinsi Maluku		994.822.715,67	
		-						388.300.000,00					BPKAD Provinsi Maluku		994.822.715,67	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	-	363.300.000,00						-	669.252.684,01	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	25.000.000,00						-	325.570.031,66	
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						363.300.000,00							669.252.684,01	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	20 Unit	363.300.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	669.252.684,01	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						25.000.000,00							325.570.031,66	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	98 Unit	25.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	325.570.031,66	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
376.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**						**240.562.343.556,24**							**345.855.850.000,00**	
			Opini BPK Atas Laporan Keuangan	-		-	WTP Nilai	240.522.343.556,24						-	344.965.885.915,60	
	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						4.213.110.115,00					36 OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku		9.093.921.367,56	
		-						4.213.110.115,00					36 OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku		9.093.921.367,56	
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	-		-	-	803.815.100,00						-	2.011.502.358,17	
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	-		-	-	354.634.200,00						-	1.204.115.871,71	
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	-		-	-	648.050.800,00						-	1.061.483.049,22	
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	-		-	-	1.181.437.653,00						-	1.933.926.206,09	
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	-		-	-	1.225.172.362,00						-	2.882.893.882,37	
	5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS						803.815.100,00							2.011.502.358,17	
		Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	-		-	2 Dokumen	803.815.100,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	2.011.502.358,17	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUAdan Perubahan PPAS						354.634.200,00							1.204.115.871,71	
		Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	-		-	2 Dokumen	354.634.200,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	1.204.115.871,71	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD						1.181.437.653,00							1.933.926.206,09	
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	-		-	2 Dokumen	1.181.437.653,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	1.933.926.206,09	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD						1.225.172.362,00							2.882.893.882,37	
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	-		-	2 Dokumen	1.225.172.362,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	2.882.893.882,37	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran						648.050.800,00							1.061.483.049,22	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	-		-	2 Dokumen	648.050.800,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	1.061.483.049,22	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota						656.888.258,00					11 Kabupaten Kota		3.358.341.562,98	
		-						656.888.258,00					11 Kabupaten Kota		3.358.341.562,98	
			Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	-		-	-	62.764.200,00						-	616.827.053,49	
			Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	-		-	-	98.896.650,00						-	471.081.699,31	
			Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	-		-	-	99.246.500,00						-	269.740.204,79	
			Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	-		-	-	56.368.900,00						-	153.005.605,25	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	-		-	-	123.703.300,00						-	667.758.831,34	
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	-		-	-	114.609.123,00						-	589.964.084,40	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	-		-	-	101.299.585,00						-	589.964.084,40	
	5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota						101.299.585,00							589.964.084,40	
		Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	-		-	11 Laporan	101.299.585,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-		-	589.964.084,40	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota						114.609.123,00							589.964.084,40	
		Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	-		-	11 Laporan	114.609.123,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-		-	589.964.084,40	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota						123.703.300,00								667.758.831,34	
		Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	-		-	11 Laporan	123.703.300,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	667.758.831,34	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota						56.368.900,00							153.005.605,25	
		Terlaksanannya Asistensi Pengeloaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	-		-	11 Dokumen	56.368.900,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	153.005.605,25	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0008	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota						62.764.200,00								616.827.053,49	
		Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	-		-	11 Dokumen	62.764.200,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	616.827.053,49	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0009	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota						99.246.500,00								269.740.204,79	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	-		-	11 Dokumen	99.246.500,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-		-	269.740.204,79	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0010	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota						98.896.650,00								471.081.699,31	
		Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	-		-	11 Dokumen	98.896.650,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-		-	471.081.699,31	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						991.142.900,00					11 Kabupaten Kota, dan 36 OPD		3.102.838.454,44	
		-						991.142.900,00					11 Kabupaten Kota, dan 36 OPD		3.102.838.454,44	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	-		-	-	10.000.000,00						-	75.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	-		-	-	77.783.100,00						-	725.023.741,01	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	-		-	-	32.731.500,00						-	501.939.513,01	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	-		-	-	10.000.000,00						-	75.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	-		-	-	164.810.800,00						-	557.710.570,01	
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	-		-	-	665.817.500,00						-	943.164.630,41	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-		-	-	10.000.000,00						-	75.000.000,00	
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	-		-	-	10.000.000,00						-	75.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	-		-	-	10.000.000,00						-	75.000.000,00	
	5.02.02.1.03.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah						10.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	75.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						10.000.000,00							75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-		-	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	75.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD						164.810.800,00							557.710.570,01	
		Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	-		-	0 Dokumen	164.810.800,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	557.710.570,01	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya						77.783.100,00							725.023.741,01	
		Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	-		-	2 Dokumen	77.783.100,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	725.023.741,01	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank						32.731.500,00							501.939.513,01	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	-		-	2 Dokumen	32.731.500,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	501.939.513,01	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)						10.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	-		-	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	75.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas						10.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	75.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait						665.817.500,00							943.164.630,41	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	-		-	1 Dokumen	665.817.500,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	943.164.630,41	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota						10.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	-		-	1 Orang	10.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	75.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						1.168.787.300,00					36 OPD		1.987.303.095,60	
		-						1.168.787.300,00					36 OPD		1.987.303.095,60	
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	-		-	-	119.322.000,00						-	391.511.313,25	
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	-		-	-	685.738.300,00						-	981.105.593,76	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	-		-	-	35.585.000,00						-	160.482.776,60	
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	-		-	-	328.142.000,00						-	454.203.411,99	
	5.02.02.1.04.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran						685.738.300,00							981.105.593,76	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	-		-	3 Laporan	685.738.300,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	981.105.593,76	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUDdan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah						119.322.000,00							391.511.313,25	
		Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	-		-	1 Laporan	119.322.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	391.511.313,25	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi						328.142.000,00							454.203.411,99	
		Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	-		-	2 Dokumen	328.142.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	454.203.411,99	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi						35.585.000,00							160.482.776,60	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	-		-	36 Orang	35.585.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	160.482.776,60	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						233.159.978.783,24					11 Kabupaten Kota		327.170.374.424,24	
		-						233.159.978.783,24					11 Kabupaten Kota		327.170.374.424,24	
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	-		-	-	605.687.134,00						-	1.687.886.150,90	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	-		-	-	227.144.291.649,24						-	297.041.503.986,42	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	-		-	-	5.410.000.000,00						-	28.440.984.286,92	
	5.02.02.1.05.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah						605.687.134,00							1.687.886.150,90	
		Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	-		-	1 Laporan	605.687.134,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	1.687.886.150,90	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak						5.410.000.000,00							28.440.984.286,92	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	-		-	1 Laporan	5.410.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	28.440.984.286,92	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi						227.144.291.649,24							297.041.503.986,42	
		Terkelolanya Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	-		-	11 Laporan	227.144.291.649,24	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	297.041.503.986,42	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah						372.436.200,00					36 OPD		1.143.071.095,18	
		-						372.436.200,00					36 OPD		1.143.071.095,18	
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	-		-	-	113.908.200,00						-	864.215.810,18	
			Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	-		-	-	258.528.000,00						-	278.855.285,00	
	5.02.02.1.06.0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah						258.528.000,00							278.855.285,00	
		Terlaksananya Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	-		-	13 Dokumen	258.528.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	278.855.285,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.02.1.06.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah						113.908.200,00							864.215.810,18	
		Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	-		-	13 Dokumen	113.908.200,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	864.215.810,18	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
377.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**						**727.427.200,00**							**3.633.245.700,00**	
			Indeks Pengelolaan Aset Daerah	-		-	50 %	727.427.200,00						-	3.633.245.700,00	
	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah						727.427.200,00					11 Kabupaten Kota, dan 36 OPD		3.633.245.700,00	
		-						727.427.200,00					11 Kabupaten Kota, dan 36 OPD		3.633.245.700,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	-		-	-	71.888.300,00						-	844.706.778,97	
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	-		-	-	10.000.000,00						-	495.763.378,12	
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	-		-	-	297.639.800,00						-	1.086.051.572,96	
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	-		-	-	234.503.000,00						-	482.689.587,98	
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	-		-	-	113.396.100,00						-	724.034.381,97	
	5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga						113.396.100,00							724.034.381,97	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	-		-	1 Dokumen	113.396.100,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	724.034.381,97	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah						10.000.000,00							495.763.378,12	
		Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	495.763.378,12	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah						297.639.800,00							1.086.051.572,96	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	-		-	1 Laporan	297.639.800,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	1.086.051.572,96	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah						71.888.300,00							844.706.778,97	
		Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	-		-	1 Dokumen	71.888.300,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	844.706.778,97	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.03.1.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						234.503.000,00							482.689.587,98	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	-		-	36 Laporan	234.503.000,00	Provinsi Maluku || Kota Ambon || Kecamatan Sirimau || Kelurahan Uritetu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	482.689.587,98	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN PENDAPATAN DAERAH						**27.944.689.583,00**							**41.519.823.409,07**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**27.944.689.583,00**							**41.519.823.409,07**	
	5.02	**KEUANGAN**						**27.944.689.583,00**							**41.519.823.409,07**	
378.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**29.312.393.643,00**							**41.566.473.664,60**	
			Indeks Pelayanan Publik	-		-	B	26.098.937.733,00						-	37.809.648.859,07	
			Persentase terselenggaranya pelayanan urusan Pemerintahan Daerah	-		-	100 %	26.098.937.733,00						-	37.809.648.859,07	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						397.169.138,00					-		782.363.877,75	
		-						397.169.138,00					-		782.363.877,75	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	89.219.844,00						-	165.387.793,41	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	307.949.294,00						-	616.976.084,34	
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						89.219.844,00							165.387.793,41	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	6 Dokumen	89.219.844,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	165.387.793,41	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						307.949.294,00							616.976.084,34	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	4 Laporan	307.949.294,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	616.976.084,34	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						19.875.561.237,00					-		20.894.248.500,00	
		-						19.875.561.237,00					-		20.894.248.500,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	577.260.000,00						-	419.248.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	19.298.301.237,00						-	20.475.000.000,00	
	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						19.298.301.237,00							20.475.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	175 Orang/ Bulan	19.298.301.237,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	20.475.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						267.820.000,00							139.047.300,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	1 Dokumen	267.820.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	139.047.300,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						174.607.128,00					-		282.617.038,62	
		-						174.607.128,00					-		282.617.038,62	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	-	60.000.000,00						-	63.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	114.607.128,00						-	219.617.038,62	
	5.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						60.000.000,00							63.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	2 Dokumen	60.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	63.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						114.607.128,00							219.617.038,62	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	13 Laporan	114.607.128,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	219.617.038,62	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						141.558.400,00					-		252.505.753,50	
		-						141.558.400,00					-		252.505.753,50	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	91.500.000,00						-	89.200.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	50.058.400,00						-	163.305.753,50	
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						75.000.000,00							78.750.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	1 Paket	75.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	78.750.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						49.058.400,00							162.205.753,50	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	8 Orang	49.058.400,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	162.205.753,50	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.837.878.023,00					-		8.278.411.807,38	
		-						2.837.878.023,00					-		8.278.411.807,38	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	215.084.000,00						-	164.934.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	1.460.996.123,00						-	2.027.488.094,20	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	534.798.200,00						-	5.307.860.797,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	321.198.900,00						-	332.294.137,13	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	77.978.100,00						-	100.979.791,30	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	227.822.700,00						-	344.854.987,75	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						58.037.600,00							80.263.040,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	58.037.600,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	80.263.040,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						181.290.500,00							309.449.700,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	181.290.500,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	309.449.700,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						333.409.900,00							5.071.731.555,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	333.409.900,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	5.071.731.555,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						296.098.900,00							301.533.750,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	296.098.900,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	301.533.750,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						192.920.000,00							145.387.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	12 Laporan	192.920.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	145.387.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						850.757.023,00							1.759.785.494,20	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	2 Laporan	850.757.023,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	1.759.785.494,20	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						2.774.702.284,00					-		6.417.056.603,25	
		-						2.774.702.284,00					-		6.417.056.603,25	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	300.599.600,00						-	226.441.327,75	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	675.000.000,00						-	2.500.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	-	405.359.602,00						-	2.100.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	1.392.743.082,00						-	1.589.515.275,50	
	5.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						405.359.602,00							2.100.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	5 Unit	405.359.602,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	2.100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						92.542.500,00							81.419.625,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	1 Paket	92.542.500,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	81.419.625,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						749.547.282,00							129.199.675,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	20 Unit	749.547.282,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	129.199.675,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						675.000.000,00							2.500.000.000,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	2 Unit	675.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	2.500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						1.663.367.853,00					-		2.369.926.148,25	
		-						1.663.367.853,00					-		2.369.926.148,25	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	1.145.783.600,00						-	1.708.583.230,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	441.884.253,00						-	570.284.918,25	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	75.700.000,00						-	91.058.000,00	
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						66.900.000,00							77.616.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	66.900.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	77.616.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						695.151.600,00							1.226.112.300,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	695.151.600,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.226.112.300,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						253.302.000,00							278.632.200,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	253.302.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	278.632.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.447.549.580,00					-		2.289.343.935,85	
		-						1.447.549.580,00					-		2.289.343.935,85	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	605.438.235,00						-	1.365.741.773,60	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	654.881.345,00						-	707.059.312,25	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	187.230.000,00						-	216.542.850,00	
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						384.280.000,00							444.969.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	36 Unit	384.280.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	444.969.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						111.420.000,00							122.840.550,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	109 Unit	111.420.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	122.840.550,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						490.964.923,00							1.260.725.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	14 Unit	490.964.923,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	1.260.725.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
379.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**						**113.672.000,00**							**227.344.000,00**	
			Efektifitas Pendapatan Daerah	-		-	95 %	113.672.000,00						-	227.344.000,00	
	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						113.672.000,00					-		227.344.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						113.672.000,00					-		227.344.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	-		-	-	113.672.000,00						-	227.344.000,00	
	5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya						113.672.000,00							227.344.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	-		-	2 Dokumen	113.672.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	227.344.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
380.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**2.731.642.350,00**							**4.456.289.300,00**	
			Efektifitas Pendapatan Daerah	-		-	95 %	1.732.079.850,00						-	3.482.830.550,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						2.731.642.350,00					-		4.456.289.300,00	
		-						2.731.642.350,00					-		4.456.289.300,00	
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	-		-	-	2.182.490.350,00						-	3.632.402.100,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	-		-	-	211.790.000,00						-	423.580.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	-		-	-	183.264.000,00						-	221.999.400,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	-		-	-	0,00						-	2.200.000,00	
			Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	-		-	-	154.098.000,00						-	169.507.800,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	-		-	-	0,00						-	6.600.000,00	
	5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah						154.098.000,00							169.507.800,00	
		Tersedianya Analisa dan Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah, serta Tersusunnya Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	-		-	4 Laporan	154.098.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	169.507.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah						0,00							2.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	-		-	1 Laporan	0,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	2.200.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah						0,00							6.600.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	-		-	12 Sarana dan Prasarana	0,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	6.600.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah						1.182.927.850,00							2.658.943.350,00	
		Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	-		-	6 Dokumen SSPD	1.182.927.850,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	2.658.943.350,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah						183.264.000,00							221.999.400,00	
		Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	-		-	1 Laporan	183.264.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	221.999.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah						211.790.000,00							423.580.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	-		-	5 Laporan	211.790.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	423.580.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		UPTD PELAYANAN PENDAPATAN AMBON KOTA AMBON						**1.204.726.410,00**							**1.480.729.967,50**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.204.726.410,00**							**1.480.729.967,50**	
	5.02	**KEUANGAN**						**1.204.726.410,00**							**1.480.729.967,50**	
381.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**29.312.393.643,00**							**41.566.473.664,60**	
			Indeks Pelayanan Publik	-		-	B	1.099.313.910,00						-	1.364.776.217,50	
			Persentase terselenggaranya pelayanan urusan Pemerintahan Daerah	-		-	100 %	1.099.313.910,00						-	1.364.776.217,50	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						19.875.561.237,00					-		20.894.248.500,00	
		-						19.875.561.237,00					-		20.894.248.500,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	577.260.000,00						-	419.248.500,00	
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						46.040.000,00							42.865.200,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	1 Dokumen	46.040.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	42.865.200,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN AMBON KOTA AMBON
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						141.558.400,00					-		252.505.753,50	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						141.558.400,00					-		252.505.753,50	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	91.500.000,00						-	89.200.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	50.058.400,00						-	163.305.753,50	
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						2.000.000,00							2.200.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	1 Paket	2.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	2.200.000,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN AMBON KOTA AMBON
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						1.000.000,00							1.100.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	2 Orang	1.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	1.100.000,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN AMBON KOTA AMBON
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.837.878.023,00					-		8.278.411.807,38	
		-						2.837.878.023,00					-		8.278.411.807,38	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	215.084.000,00						-	164.934.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	1.460.996.123,00						-	2.027.488.094,20	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	534.798.200,00						-	5.307.860.797,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	321.198.900,00						-	332.294.137,13	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	77.978.100,00						-	100.979.791,30	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	227.822.700,00						-	344.854.987,75	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.350.000,00							9.727.357,50	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.350.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	9.727.357,50	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN AMBON KOTA AMBON
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						1.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	1.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN AMBON KOTA AMBON

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						110.348.200,00							161.627.271,75	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	110.348.200,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	161.627.271,75	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN AMBON KOTA AMBON
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						7.250.000,00							14.149.485,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	2 Paket	7.250.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	14.149.485,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN AMBON KOTA AMBON
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						5.410.000,00							5.951.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	5.410.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	5.951.000,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN AMBON KOTA AMBON
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						28.857.100,00							1.100.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	2 Laporan	28.857.100,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	1.100.000,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN AMBON KOTA AMBON
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						2.774.702.284,00					-		6.417.056.603,25	
		-						2.774.702.284,00					-		6.417.056.603,25	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	300.599.600,00						-	226.441.327,75	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	1.392.743.082,00						-	1.589.515.275,50	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	1.000.000,00						-	1.100.000,00	
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						101.057.100,00							136.221.702,75	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	1 Paket	101.057.100,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	136.221.702,75	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN AMBON KOTA AMBON
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						167.970.800,00							185.890.600,50	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	10 Unit	167.970.800,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	185.890.600,50	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN AMBON KOTA AMBON
	5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						1.000.000,00							1.100.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	2 Unit	1.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	1.100.000,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN AMBON KOTA AMBON

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						1.663.367.853,00					-		2.369.926.148,25	
		-						1.663.367.853,00					-		2.369.926.148,25	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	1.145.783.600,00						-	1.708.583.230,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	441.884.253,00						-	570.284.918,25	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	75.700.000,00						-	91.058.000,00	
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						500.000,00							3.528.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	500.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	3.528.000,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN AMBON KOTA AMBON
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						249.000.000,00							281.137.500,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	249.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	281.137.500,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN AMBON KOTA AMBON
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						180.782.253,00							283.072.718,25	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	180.782.253,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	283.072.718,25	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN AMBON KOTA AMBON
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.447.549.580,00					-		2.289.343.935,85	
		-						1.447.549.580,00					-		2.289.343.935,85	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	605.438.235,00						-	1.365.741.773,60	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	654.881.345,00						-	707.059.312,25	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	187.230.000,00						-	216.542.850,00	
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						136.588.000,00							150.246.800,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	4 Unit	136.588.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	150.246.800,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN AMBON KOTA AMBON

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						36.920.000,00							50.847.300,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	20 Unit	36.920.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	50.847.300,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN AMBON KOTA AMBON
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						23.240.457,00							36.211.281,75	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	3 Unit	23.240.457,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	36.211.281,75	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN AMBON KOTA AMBON
382.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**2.731.642.350,00**							**4.456.289.300,00**	
			Efektifitas Pendapatan Daerah	-		-	95 %	103.412.500,00						-	113.753.750,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						2.731.642.350,00					-		4.456.289.300,00	
		-						2.731.642.350,00					-		4.456.289.300,00	
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	-		-	-	2.182.490.350,00						-	3.632.402.100,00	
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah						103.412.500,00							113.753.750,00	
		Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	-		-	1 Dokumen SSPD	103.412.500,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	113.753.750,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN AMBON KOTA AMBON
		UPTD PELAYANAN PENDAPATAN MASOHI KABUPATEN MALUKU TENGAH						**591.560.000,00**							**633.074.210,28**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**591.560.000,00**							**633.074.210,28**	
	5.02	**KEUANGAN**						**591.560.000,00**							**633.074.210,28**	
383.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**29.312.393.643,00**							**41.566.473.664,60**	
			Indeks Pelayanan Publik	-		-	B	380.960.000,00						-	413.734.210,28	
			Persentase terselenggaranya pelayanan urusan Pemerintahan Daerah	-		-	100 %	380.960.000,00						-	413.734.210,28	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						19.875.561.237,00					-		20.894.248.500,00	
		-						19.875.561.237,00					-		20.894.248.500,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	577.260.000,00						-	419.248.500,00	
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						51.720.000,00							39.996.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	1 Dokumen	51.720.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	39.996.000,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN MASOHI KABUPATEN MALUKU TENGAH
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						141.558.400,00					-		252.505.753,50	
		-						141.558.400,00					-		252.505.753,50	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	91.500.000,00						-	89.200.000,00	
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						7.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	1 Paket	7.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN MASOHI KABUPATEN MALUKU TENGAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.837.878.023,00					-		8.278.411.807,38	
		-						2.837.878.023,00					-		8.278.411.807,38	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	215.084.000,00						-	164.934.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	1.460.996.123,00						-	2.027.488.094,20	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	534.798.200,00						-	5.307.860.797,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	321.198.900,00						-	332.294.137,13	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	77.978.100,00						-	100.979.791,30	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	227.822.700,00						-	344.854.987,75	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						6.780.000,00							2.232.843,80	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	6.780.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	2.232.843,80	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN MASOHI KABUPATEN MALUKU TENGAH
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						13.730.000,00							2.964.720,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	13.730.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	2.964.720,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN MASOHI KABUPATEN MALUKU TENGAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						25.715.000,00							10.121.060,25	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	25.715.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	10.121.060,25	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN MASOHI KABUPATEN MALUKU TENGAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4.500.000,00							1.925.902,13	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	4.500.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	1.925.902,13	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN MASOHI KABUPATEN MALUKU TENGAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						8.140.000,00							4.059.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	8.140.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	4.059.000,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN MASOHI KABUPATEN MALUKU TENGAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						82.195.000,00							48.620.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	2 Laporan	82.195.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	48.620.000,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN MASOHI KABUPATEN MALUKU TENGAH
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						2.774.702.284,00					-		6.417.056.603,25	
		-						2.774.702.284,00					-		6.417.056.603,25	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	300.599.600,00						-	226.441.327,75	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	1.392.743.082,00						-	1.589.515.275,50	
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						38.500.000,00							0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	1 Paket	38.500.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN MASOHI KABUPATEN MALUKU TENGAH
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.500.000,00							222.200.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	7 Unit	50.500.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	222.200.000,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN MASOHI KABUPATEN MALUKU TENGAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						1.663.367.853,00					-		2.369.926.148,25	
		-						1.663.367.853,00					-		2.369.926.148,25	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	1.145.783.600,00						-	1.708.583.230,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	441.884.253,00						-	570.284.918,25	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	75.700.000,00						-	91.058.000,00	
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.200.000,00							1.323.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	1.200.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.323.000,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN MASOHI KABUPATEN MALUKU TENGAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						33.600.000,00							38.234.700,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	33.600.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	38.234.700,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN MASOHI KABUPATEN MALUKU TENGAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						7.800.000,00							8.580.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	7.800.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	8.580.000,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN MASOHI KABUPATEN MALUKU TENGAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.447.549.580,00					-		2.289.343.935,85	
		-						1.447.549.580,00					-		2.289.343.935,85	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	605.438.235,00						-	1.365.741.773,60	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	654.881.345,00						-	707.059.312,25	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	187.230.000,00						-	216.542.850,00	
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						27.073.345,00							18.420.512,25	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	2 Unit	27.073.345,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	18.420.512,25	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN MASOHI KABUPATEN MALUKU TENGAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						6.400.000,00							6.720.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	11 Unit	6.400.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	6.720.000,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN MASOHI KABUPATEN MALUKU TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						16.106.655,00							8.336.471,85	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	16.106.655,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	8.336.471,85	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN MASOHI KABUPATEN MALUKU TENGAH
384.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**2.731.642.350,00**							**4.456.289.300,00**	
			Efektifitas Pendapatan Daerah	-		-	95 %	210.600.000,00						-	219.340.000,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						2.731.642.350,00					-		4.456.289.300,00	
		-						2.731.642.350,00					-		4.456.289.300,00	
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	-		-	-	2.182.490.350,00						-	3.632.402.100,00	
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah						210.600.000,00							219.340.000,00	
		Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	-		-	1 Dokumen SSPD	210.600.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	219.340.000,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN MASOHI KABUPATEN MALUKU TENGAH
		UPTD PELAYANAN PENDAPATAN PIRU KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT						**580.512.000,00**							**615.020.877,75**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**580.512.000,00**							**615.020.877,75**	
	5.02	**KEUANGAN**						**580.512.000,00**							**615.020.877,75**	
385.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**29.312.393.643,00**							**41.566.473.664,60**	
			Indeks Pelayanan Publik	-		-	B	374.112.000,00						-	463.440.877,75	
			Persentase terselenggaranya pelayanan urusan Pemerintahan Daerah	-		-	100 %	374.112.000,00						-	463.440.877,75	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						19.875.561.237,00					-		20.894.248.500,00	
		-						19.875.561.237,00					-		20.894.248.500,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	577.260.000,00						-	419.248.500,00	
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						54.120.000,00							53.328.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	1 Dokumen	54.120.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	53.328.000,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN PIRU KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.837.878.023,00					-		8.278.411.807,38	
		-						2.837.878.023,00					-		8.278.411.807,38	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	215.084.000,00						-	164.934.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	1.460.996.123,00						-	2.027.488.094,20	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	534.798.200,00						-	5.307.860.797,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	321.198.900,00						-	332.294.137,13	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	77.978.100,00						-	100.979.791,30	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	227.822.700,00						-	344.854.987,75	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.629.000,00							1.791.900,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	1.629.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	1.791.900,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN PIRU KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						11.166.200,00							10.829.967,75	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	11.166.200,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	10.829.967,75	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN PIRU KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						18.509.600,00							13.844.160,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	18.509.600,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	13.844.160,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN PIRU KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						0,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	0 Paket	0,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN PIRU KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						1.944.000,00							2.200.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	1.944.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	2.200.000,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN PIRU KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						120.008.000,00							52.146.600,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	2 Laporan	120.008.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	52.146.600,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN PIRU KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						2.774.702.284,00					-		6.417.056.603,25	
		-						2.774.702.284,00					-		6.417.056.603,25	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	300.599.600,00						-	226.441.327,75	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	1.392.743.082,00						-	1.589.515.275,50	
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						16.000.000,00							6.600.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	1 Paket	16.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	6.600.000,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN PIRU KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						77.000.000,00							254.650.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	6 Unit	77.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	254.650.000,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN PIRU KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						1.663.367.853,00					-		2.369.926.148,25	
		-						1.663.367.853,00					-		2.369.926.148,25	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	1.145.783.600,00						-	1.708.583.230,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	75.700.000,00						-	91.058.000,00	
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.300.000,00							1.984.500,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	1.300.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	1.984.500,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN PIRU KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						22.812.000,00							19.196.730,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	22.812.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	19.196.730,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN PIRU KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.447.549.580,00					-		2.289.343.935,85	
		-						1.447.549.580,00					-		2.289.343.935,85	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	605.438.235,00						-	1.365.741.773,60	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	654.881.345,00						-	707.059.312,25	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	187.230.000,00						-	216.542.850,00	
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						23.385.000,00							20.702.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	3 Unit	23.385.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	20.702.000,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN PIRU KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						8.100.000,00							6.215.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	8 Unit	8.100.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	6.215.000,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN PIRU KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						18.138.200,00							19.952.020,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	18.138.200,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	19.952.020,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN PIRU KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
386.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**2.731.642.350,00**							**4.456.289.300,00**	
			Efektifitas Pendapatan Daerah	-		-	95 %	206.400.000,00						-	151.580.000,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						2.731.642.350,00					-		4.456.289.300,00	
		-						2.731.642.350,00					-		4.456.289.300,00	
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	-		-	-	2.182.490.350,00						-	3.632.402.100,00	
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah						206.400.000,00							151.580.000,00	
		Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	-		-	1 Dokumen SSPD	206.400.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	151.580.000,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN PIRU KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
		UPTD PELAYANAN PENDAPATAN NAMLEA KABUPATEN BURU						**600.900.000,00**							**642.380.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**600.900.000,00**							**642.380.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**600.900.000,00**							**642.380.000,00**	
387.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**29.312.393.643,00**							**41.566.473.664,60**	
			Indeks Pelayanan Publik	-		-	B	431.700.000,00						-	494.540.000,00	
			Persentase terselenggaranya pelayanan urusan Pemerintahan Daerah	-		-	100 %	431.700.000,00						-	494.540.000,00	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						19.875.561.237,00					-		20.894.248.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						19.875.561.237,00					-		20.894.248.500,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	577.260.000,00						-	419.248.500,00	
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						54.120.000,00							37.356.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	1 Dokumen	54.120.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	37.356.000,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN NAMLEA KABUPATEN BURU
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						141.558.400,00					-		252.505.753,50	
		-						141.558.400,00					-		252.505.753,50	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	50.058.400,00						-	163.305.753,50	
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	0 Orang	0,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN NAMLEA KABUPATEN BURU
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.837.878.023,00					-		8.278.411.807,38	
		-						2.837.878.023,00					-		8.278.411.807,38	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	215.084.000,00						-	164.934.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	1.460.996.123,00						-	2.027.488.094,20	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	534.798.200,00						-	5.307.860.797,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	321.198.900,00						-	332.294.137,13	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	77.978.100,00						-	100.979.791,30	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	227.822.700,00						-	344.854.987,75	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.850.000,00							1.100.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	3.850.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	1.100.000,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN NAMLEA KABUPATEN BURU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						12.818.000,00							13.010.800,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	12.818.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	13.010.800,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN NAMLEA KABUPATEN BURU
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						32.065.000,00							34.311.200,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	32.065.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	34.311.200,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN NAMLEA KABUPATEN BURU
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						0,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	0 Paket	0,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN NAMLEA KABUPATEN BURU
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						0,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN NAMLEA KABUPATEN BURU
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						117.789.000,00							45.056.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	2 Laporan	117.789.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	45.056.000,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN NAMLEA KABUPATEN BURU
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						2.774.702.284,00					-		6.417.056.603,25	
		-						2.774.702.284,00					-		6.417.056.603,25	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	300.599.600,00						-	226.441.327,75	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	1.392.743.082,00						-	1.589.515.275,50	
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	0 Paket	0,00	Provinsi Maluku	-	-	-		-	0,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN NAMLEA KABUPATEN BURU
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						77.500.000,00							275.625.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	10 Unit	77.500.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	275.625.000,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN NAMLEA KABUPATEN BURU
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						1.663.367.853,00					-		2.369.926.148,25	
		-						1.663.367.853,00					-		2.369.926.148,25	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	1.145.783.600,00						-	1.708.583.230,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	75.700.000,00						-	91.058.000,00	
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN NAMLEA KABUPATEN BURU
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						55.800.000,00							45.540.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	55.800.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	45.540.000,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN NAMLEA KABUPATEN BURU
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.447.549.580,00					-		2.289.343.935,85	
		-						1.447.549.580,00					-		2.289.343.935,85	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	605.438.235,00						-	1.365.741.773,60	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	654.881.345,00						-	707.059.312,25	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	187.230.000,00						-	216.542.850,00	
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						36.005.000,00							24.266.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	4 Unit	36.005.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	24.266.000,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN NAMLEA KABUPATEN BURU
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						11.290.000,00							11.660.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	20 Unit	11.290.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	11.660.000,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN NAMLEA KABUPATEN BURU
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						30.463.000,00							6.615.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	3 Unit	30.463.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	6.615.000,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN NAMLEA KABUPATEN BURU
388.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**2.731.642.350,00**							**4.456.289.300,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Efektifitas Pendapatan Daerah	-		-	95 %	169.200.000,00						-	147.840.000,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						2.731.642.350,00					-		4.456.289.300,00	
		-						2.731.642.350,00					-		4.456.289.300,00	
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	-		-	-	2.182.490.350,00						-	3.632.402.100,00	
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah						169.200.000,00							147.840.000,00	
		Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	-		-	1 Dokumen SSPD	169.200.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	147.840.000,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN NAMLEA KABUPATEN BURU
		UPTD PELAYANAN PENDAPATAN SAUMLAKI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT						**579.620.000,00**							**637.582.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**579.620.000,00**							**637.582.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**579.620.000,00**							**637.582.000,00**	
389.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**29.312.393.643,00**							**41.566.473.664,60**	
			Indeks Pelayanan Publik	-		-	B	409.070.000,00						-	440.077.000,00	
			Persentase terselenggaranya pelayanan urusan Pemerintahan Daerah	-		-	100 %	409.070.000,00						-	440.077.000,00	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						19.875.561.237,00					-		20.894.248.500,00	
		-						19.875.561.237,00					-		20.894.248.500,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	577.260.000,00						-	419.248.500,00	
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						51.720.000,00							53.328.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	1 Dokumen	51.720.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	53.328.000,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN SAUMLAKI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.837.878.023,00					-		8.278.411.807,38	
		-						2.837.878.023,00					-		8.278.411.807,38	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	215.084.000,00						-	164.934.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	1.460.996.123,00						-	2.027.488.094,20	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	534.798.200,00						-	5.307.860.797,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	321.198.900,00						-	332.294.137,13	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	77.978.100,00						-	100.979.791,30	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	227.822.700,00						-	344.854.987,75	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.170.000,00							1.287.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	1.170.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	1.287.000,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN SAUMLAKI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						3.395.000,00							3.734.500,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	3.395.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	3.734.500,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN SAUMLAKI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						5.655.000,00							6.220.500,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	5.655.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	6.220.500,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN SAUMLAKI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.500.000,00							1.650.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	2 Paket	1.500.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	1.650.000,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN SAUMLAKI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						1.000.000,00							1.100.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	1.100.000,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN SAUMLAKI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						61.200.000,00							67.320.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	2 Laporan	61.200.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	67.320.000,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN SAUMLAKI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						2.774.702.284,00					-		6.417.056.603,25	
		-						2.774.702.284,00					-		6.417.056.603,25	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	300.599.600,00						-	226.441.327,75	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	1.392.743.082,00						-	1.589.515.275,50	
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						51.500.000,00							1.100.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	1 Paket	51.500.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	1.100.000,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN SAUMLAKI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						158.000.000,00							234.300.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	20 Unit	158.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	234.300.000,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN SAUMLAKI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						1.663.367.853,00					-		2.369.926.148,25	
		-						1.663.367.853,00					-		2.369.926.148,25	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	1.145.783.600,00						-	1.708.583.230,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	75.700.000,00						-	91.058.000,00	
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.400.000,00							3.740.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	3.400.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	3.740.000,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN SAUMLAKI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						48.620.000,00							53.482.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	48.620.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	53.482.000,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN SAUMLAKI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.447.549.580,00					-		2.289.343.935,85	
		-						1.447.549.580,00					-		2.289.343.935,85	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	605.438.235,00						-	1.365.741.773,60	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	654.881.345,00						-	707.059.312,25	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	187.230.000,00						-	216.542.850,00	
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						8.150.000,00							5.115.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	3 Unit	8.150.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	5.115.000,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN SAUMLAKI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4.500.000,00							8.800.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	8 Unit	4.500.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	8.800.000,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN SAUMLAKI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						9.260.000,00							8.800.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	9.260.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	8.800.000,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN SAUMLAKI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
390.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**2.731.642.350,00**							**4.456.289.300,00**	
			Efektifitas Pendapatan Daerah	-		-	95 %	170.550.000,00						-	187.605.000,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						2.731.642.350,00					-		4.456.289.300,00	
		-						2.731.642.350,00					-		4.456.289.300,00	
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	-		-	-	2.182.490.350,00						-	3.632.402.100,00	
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah						170.550.000,00							187.605.000,00	
		Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	-		-	1 Dokumen SSPD	170.550.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	187.605.000,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN SAUMLAKI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
		UPTD PELAYANAN PENDAPATAN LANGGUR KABUPATEN MALUKU TENGGARA						**655.700.000,00**							**721.496.500,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**655.700.000,00**							**721.496.500,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**655.700.000,00**							**721.496.500,00**	
391.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**29.312.393.643,00**							**41.566.473.664,60**	
			Indeks Pelayanan Publik	-		-	B	516.300.000,00						-	568.156.500,00	
			Persentase terselenggaranya pelayanan urusan Pemerintahan Daerah	-		-	100 %	516.300.000,00						-	568.156.500,00	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						19.875.561.237,00					-		20.894.248.500,00	
		-						19.875.561.237,00					-		20.894.248.500,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	577.260.000,00						-	419.248.500,00	
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						51.720.000,00							53.328.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	1 Dokumen	51.720.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	53.328.000,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN LANGGUR KABUPATEN MALUKU TENGGARA
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						141.558.400,00					-		252.505.753,50	
		-						141.558.400,00					-		252.505.753,50	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	91.500.000,00						-	89.200.000,00	
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						7.500.000,00							8.250.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	1 Paket	7.500.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	8.250.000,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN LANGGUR KABUPATEN MALUKU TENGGARA
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.837.878.023,00					-		8.278.411.807,38	
		-						2.837.878.023,00					-		8.278.411.807,38	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	215.084.000,00						-	164.934.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	1.460.996.123,00						-	2.027.488.094,20	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	534.798.200,00						-	5.307.860.797,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	321.198.900,00						-	332.294.137,13	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	77.978.100,00						-	100.979.791,30	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	227.822.700,00						-	344.854.987,75	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.161.500,00							4.577.650,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	4.161.500,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	4.577.650,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN LANGGUR KABUPATEN MALUKU TENGGARA
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						4.423.000,00							4.865.300,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	4.423.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	4.865.300,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN LANGGUR KABUPATEN MALUKU TENGGARA
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						9.095.500,00							10.005.050,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	9.095.500,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	10.005.050,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN LANGGUR KABUPATEN MALUKU TENGGARA
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						11.850.000,00							13.035.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	2 Paket	11.850.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	13.035.000,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN LANGGUR KABUPATEN MALUKU TENGGARA
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						5.670.000,00							6.237.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	5.670.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	6.237.000,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN LANGGUR KABUPATEN MALUKU TENGGARA
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						200.190.000,00							53.460.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	2 Laporan	200.190.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	53.460.000,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN LANGGUR KABUPATEN MALUKU TENGGARA
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						2.774.702.284,00					-		6.417.056.603,25	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						2.774.702.284,00					-		6.417.056.603,25	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	300.599.600,00						-	226.441.327,75	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	1.392.743.082,00						-	1.589.515.275,50	
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						1.000.000,00							1.100.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	1 Paket	1.000.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	1.100.000,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN LANGGUR KABUPATEN MALUKU TENGGARA
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						112.225.000,00							287.650.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	20 Unit	112.225.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	287.650.000,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN LANGGUR KABUPATEN MALUKU TENGGARA
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						1.663.367.853,00					-		2.369.926.148,25	
		-						1.663.367.853,00					-		2.369.926.148,25	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	1.145.783.600,00						-	1.708.583.230,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	75.700.000,00						-	91.058.000,00	
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.400.000,00							2.866.500,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	2.400.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	2.866.500,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN LANGGUR KABUPATEN MALUKU TENGGARA
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						40.800.000,00							44.880.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	40.800.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	44.880.000,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN LANGGUR KABUPATEN MALUKU TENGGARA
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.447.549.580,00					-		2.289.343.935,85	
		-						1.447.549.580,00					-		2.289.343.935,85	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	605.438.235,00						-	1.365.741.773,60	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	654.881.345,00						-	707.059.312,25	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	187.230.000,00						-	216.542.850,00	
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						39.400.000,00							43.340.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	3 Unit	39.400.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	43.340.000,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN LANGGUR KABUPATEN MALUKU TENGGARA
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						8.600.000,00							9.460.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	15 Unit	8.600.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	9.460.000,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN LANGGUR KABUPATEN MALUKU TENGGARA
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						17.265.000,00							25.102.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	2 Unit	17.265.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	25.102.000,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN LANGGUR KABUPATEN MALUKU TENGGARA
392.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**2.731.642.350,00**							**4.456.289.300,00**	
			Efektifitas Pendapatan Daerah	-		-	95 %	139.400.000,00						-	153.340.000,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						2.731.642.350,00					-		4.456.289.300,00	
		-						2.731.642.350,00					-		4.456.289.300,00	
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	-		-	-	2.182.490.350,00						-	3.632.402.100,00	
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah						139.400.000,00							153.340.000,00	
		Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	-		-	1 Dokumen SSPD	139.400.000,00	Provinsi Maluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	153.340.000,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN LANGGUR KABUPATEN MALUKU TENGGARA
		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH						**8.302.956.432,00**							**8.442.069.007,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**8.302.956.432,00**							**8.442.069.007,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.03	**KEPEGAWAIAN**						**8.302.956.432,00**							**8.442.069.007,00**	
393.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**6.462.118.632,00**							**6.319.157.052,00**	
			Nilai SAKIP BKD	-		-	80 Nilai	6.462.118.632,00						-	6.319.157.052,00	
	5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						269.956.400,00					ASN		108.584.800,00	
		-						269.956.400,00					ASN		108.584.800,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	6.495.400,00						-	6.595.500,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	249.443.000,00						-	87.771.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	9.527.000,00						-	9.627.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	4.491.000,00						-	4.591.300,00	
	5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						249.443.000,00							87.771.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	1 Dokumen	249.443.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	87.771.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						9.527.000,00							9.627.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	2 Dokumen	9.527.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	9.627.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						6.495.400,00							6.595.500,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	2 Dokumen	6.495.400,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	6.595.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						4.491.000,00							4.591.300,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	2 Laporan	4.491.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	4.591.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.545.520.363,00					ASN		5.553.640.363,00	
		-						5.545.520.363,00					ASN		5.553.640.363,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-		-	-	9.327.500,00						-	9.427.500,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	53.280.000,00						-	57.400.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	3.253.000,00						-	3.353.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	10.000.000,00						-	11.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	5.469.659.863,00						-	5.472.459.863,00	
	5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.469.659.863,00							5.472.459.863,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	48 Orang/ Bulan	5.469.659.863,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.472.459.863,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						53.280.000,00							57.400.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	1 Dokumen	53.280.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	57.400.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						9.327.500,00							9.427.500,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-		-	1 Dokumen	9.327.500,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	9.427.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						3.253.000,00							3.353.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	3.253.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	3.353.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						10.000.000,00							11.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	18 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	11.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						139.848.000,00					ASN		73.324.000,00	
		-						139.848.000,00					ASN		73.324.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	-	134.448.000,00						-	67.824.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	5.400.000,00						-	5.500.000,00	
	5.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai						134.448.000,00							67.824.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	1 Dokumen	134.448.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	67.824.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						5.400.000,00							5.500.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	30 Orang	5.400.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						386.174.300,00					ASN		290.184.300,00	
		-						386.174.300,00					ASN		290.184.300,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	25.920.000,00						-	26.920.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	269.521.000,00						-	170.521.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	74.713.300,00						-	75.713.300,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	15.000.000,00						-	16.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.020.000,00						-	1.030.000,00	
	5.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.020.000,00							1.030.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	1.020.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	1.030.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						74.713.300,00							75.713.300,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	74.713.300,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	75.713.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						15.000.000,00							16.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	15.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	16.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						25.920.000,00							26.920.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	2 Laporan	25.920.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	26.920.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						269.521.000,00							170.521.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	2 Laporan	269.521.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	170.521.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						25.967.000,00					ASN		197.771.020,00	
		-						25.967.000,00					ASN		197.771.020,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	24.275.000,00						-	25.275.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	170.704.020,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	1.692.000,00						-	1.792.000,00	
	5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.692.000,00							1.792.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	1.692.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	1.792.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						24.275.000,00							25.275.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	24.275.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	25.275.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							170.704.020,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	170.704.020,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						94.652.569,00					ASN		95.652.569,00	
		-						94.652.569,00					ASN		95.652.569,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	-	94.652.569,00						-	95.652.569,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	0,00						-	0,00	
	5.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						94.652.569,00							95.652.569,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	10 Unit	94.652.569,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	95.652.569,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	1 Unit	0,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
394.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**						**1.840.837.800,00**							**2.122.911.955,00**	
			Persentase Layanan Kepegawaian yang Terpenuhi	-		-	100 Persen	1.840.837.800,00						-	2.122.911.955,00	
	5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						897.035.500,00					ASN		901.136.500,00	
		-						897.035.500,00					ASN		901.136.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	-		-	-	7.404.500,00						-	7.504.670,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	-		-	-	417.001.800,00						-	418.001.900,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	-		-	-	50.020.700,00						-	51.021.000,00	
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	-		-	-	303.433.500,00						-	304.433.930,00	
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	-		-	-	119.175.000,00						-	120.175.000,00	
	5.03.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN						50.020.700,00							51.021.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	-		-	1 Dokumen	50.020.700,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	51.021.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK						303.433.500,00							304.433.930,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	-		-	1 Dokumen	303.433.500,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	304.433.930,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian						7.404.500,00							7.504.670,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	-		-	1 Dokumen	7.404.500,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	7.504.670,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN						119.175.000,00							120.175.000,00	
		Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	-		-	1 Lembaga	119.175.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	120.175.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian						417.001.800,00							418.001.900,00	
		Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	-		-	1 Dokumen	417.001.800,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	418.001.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN						724.310.600,00					ASN		736.310.600,00	
		-						724.310.600,00					ASN		736.310.600,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	-		-	-	11.162.000,00						-	12.162.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	-		-	-	684.000.000,00						-	694.000.000,00	
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	-		-	-	29.148.600,00						-	30.148.600,00	
	5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN						11.162.000,00							12.162.000,00	
		Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	-		-	1 Dokumen	11.162.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	12.162.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN						29.148.600,00							30.148.600,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	-		-	1 Laporan	29.148.600,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	30.148.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN						684.000.000,00							694.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	-		-	1 Dokumen	684.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	694.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN						46.942.500,00					ASN		310.714.800,00	
		-						46.942.500,00					ASN		310.714.800,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	-		-	-	7.942.500,00						-	8.042.600,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	-		-	-	39.000.000,00						-	302.672.200,00	
	5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN						39.000.000,00							302.672.200,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	-		-	1 Dokumen	39.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	302.672.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional						7.942.500,00							8.042.600,00	
		Terfasilitasinya Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	-		-	1 Dokumen	7.942.500,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	8.042.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						172.549.200,00					ASN		174.750.055,00	
		-						172.549.200,00					ASN		174.750.055,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	-		-	-	14.478.300,00						-	15.478.700,00	
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	-		-	-	147.856.500,00						-	148.856.955,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-		-	-	8.083.000,00						-	8.183.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	-		-	-	2.131.400,00						-	2.231.400,00	
	5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						8.083.000,00							8.183.000,00	
		Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-		-	1 Dokumen	8.083.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	8.183.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai						14.478.300,00							15.478.700,00	
		Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	-		-	150 Orang	14.478.300,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	15.478.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN						147.856.500,00							148.856.955,00	
		Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	-		-	30 Orang	147.856.500,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	148.856.955,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0010	Evaluasi Disiplin ASN						2.131.400,00							2.231.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	-		-	1 Laporan	2.131.400,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	2.231.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA						**14.329.102.267,75**							**16.742.825.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**14.329.102.267,75**							**16.742.825.000,00**	
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**14.329.102.267,75**							**16.742.825.000,00**	
395.	**5.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**11.129.102.267,75**							**11.267.820.000,00**	
			Persentase Keselarasan RPJMD Dengan RKPD	-		-	100 %	10.629.102.267,75						-	11.147.820.000,00	
	5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						66.900.000,00					-		300.000.000,00	
		-						66.900.000,00					-		300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	66.900.000,00						-	300.000.000,00	
	5.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						66.900.000,00							300.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	12 Dokumen	66.900.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	300.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8.756.622.067,75					-		8.867.280.000,00	
		-						8.756.622.067,75					-		8.867.280.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	77.280.000,00						-	77.280.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	20.430.000,00						-	40.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	8.658.912.067,75						-	8.750.000.000,00	
	5.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						8.658.912.067,75							8.750.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	86 Orang/ Bulan	8.658.912.067,75	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	8.750.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						77.280.000,00							77.280.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	4 Dokumen	77.280.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	77.280.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						20.430.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	2 Laporan	20.430.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	40.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						99.832.000,00					-		255.000.000,00	
		-						99.832.000,00					-		255.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	99.832.000,00						-	255.000.000,00	
	5.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						99.832.000,00							255.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	8 Orang	99.832.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	255.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						325.548.200,00					-		720.000.000,00	
		-						325.548.200,00					-		720.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	204.562.000,00						-	500.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	29.990.200,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	20.000.000,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	39.996.000,00						-	80.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	31.000.000,00						-	20.000.000,00	
	5.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						39.996.000,00							80.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	39.996.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	80.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						31.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	31.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	20.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						29.990.200,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	29.990.200,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	100.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	20.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	20.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						204.562.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	204.562.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	500.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						1.090.200.000,00					-		150.000.000,00	
		-						1.090.200.000,00					-		150.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	-	500.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	590.200.000,00						-	50.000.000,00	
	5.04.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						500.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	1 Unit	500.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	100.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						590.200.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	45 Unit	590.200.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	50.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						500.000.000,00					-		610.000.000,00	
		-						500.000.000,00					-		610.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	500.000.000,00						-	610.000.000,00	
	5.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						500.000.000,00							610.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	3 Laporan	500.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	610.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						290.000.000,00					-		365.540.000,00	
		-						290.000.000,00					-		365.540.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	-	190.000.000,00						-	215.540.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	100.000.000,00						-	150.000.000,00	
	5.04.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						190.000.000,00							215.540.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	11 Unit	190.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	215.540.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						100.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	100.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	150.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
396.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**						**3.200.000.000,00**							**5.475.005.000,00**	
			Persentase Keselarasan RPJMD Dengan RKPD	-		-	100 %	3.200.000.000,00						-	5.475.005.000,00	
	5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis						1.000.000.000,00					-		1.797.176.000,00	
		-						1.000.000.000,00					-		1.797.176.000,00	
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	-		-	-	1.000.000.000,00						-	1.797.176.000,00	
	5.04.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						1.000.000.000,00							1.797.176.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	-		-	195 Orang	1.000.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.797.176.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						1.980.500.000,00					-		3.200.328.000,00	
		-						1.980.500.000,00					-		3.200.328.000,00	
			Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	-		-	-	65.000.000,00						-	308.589.000,00	
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	-		-	-	1.500.000.000,00						-	2.198.520.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	-		-	-	37.000.000,00						-	242.846.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	-		-	-	378.500.000,00						-	450.373.000,00	
	5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota						65.000.000,00							308.589.000,00	
		Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	-		-	40 Orang	65.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	308.589.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar						378.500.000,00							450.373.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	-		-	3 Laporan	378.500.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	450.373.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga						37.000.000,00							242.846.000,00	
		Terlaksananya Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	-		-	1 Dokumen	37.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	242.846.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan						1.500.000.000,00							2.198.520.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	-		-	89 Orang	1.500.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.198.520.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.02.1.03	Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri						219.500.000,00					-		477.501.000,00	
		-						219.500.000,00					-		477.501.000,00	
			Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	-		-	-	219.500.000,00						-	477.501.000,00	
	5.04.02.1.03.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri						219.500.000,00							477.501.000,00	
		Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	-		-	40 Orang	219.500.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	477.501.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
		BADAN PENGHUBUNG						**8.606.105.991,00**							**4.321.628.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**8.606.105.991,00**							**4.321.628.000,00**	
	5.07	**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**						**8.606.105.991,00**							**4.321.628.000,00**	
397.	**5.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**7.517.970.100,00**							**3.891.628.000,00**	
			Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	-		-	100 %	7.086.264.100,00						-	3.264.628.000,00	
	5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						235.476.000,00					-		252.000.000,00	
		-						235.476.000,00					-		252.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	39.246.000,00						-	42.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	39.246.000,00						-	42.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	39.246.000,00						-	42.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	39.246.000,00						-	42.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	39.246.000,00						-	42.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	39.246.000,00						-	42.000.000,00	
	5.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						39.246.000,00							42.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	1 Dokumen	39.246.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	42.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						39.246.000,00							42.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	39.246.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	42.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						39.246.000,00							42.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	39.246.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	42.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						39.246.000,00							42.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	39.246.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	42.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						39.246.000,00							42.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	39.246.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	42.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						39.246.000,00							42.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	1 Laporan	39.246.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	42.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.347.104.000,00					-		581.128.000,00	
		-						4.347.104.000,00					-		581.128.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-		-	-	39.246.000,00						-	42.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	-	39.246.000,00						-	42.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	60.120.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	39.246.000,00						-	42.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	39.246.000,00						-	42.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	4.130.000.000,00						-	413.128.000,00	
	5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.130.000.000,00							413.128.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	46 Orang/ Bulan	4.130.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	413.128.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						60.120.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	1 Dokumen	60.120.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						39.246.000,00							42.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-		-	1 Dokumen	39.246.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	42.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						39.246.000,00							42.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	39.246.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	42.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						39.246.000,00							42.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	1 Laporan	39.246.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	42.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.07.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						39.246.000,00							42.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	1 Dokumen	39.246.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	42.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						54.246.000,00					-		48.500.000,00	
		-						54.246.000,00					-		48.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	-	10.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	39.246.000,00						-	42.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	-	5.000.000,00						-	6.500.000,00	
	5.07.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						5.000.000,00							6.500.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	6.500.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						39.246.000,00							42.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	1 Laporan	39.246.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	42.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						104.246.000,00					-		42.000.000,00	
		-						104.246.000,00					-		42.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	-		-	-	39.246.000,00						-	42.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	65.000.000,00						-	0,00	
	5.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						65.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	1 Paket	65.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						39.246.000,00							42.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	-		-	1 Dokumen	39.246.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	42.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						233.669.100,00					-		255.000.000,00	
		-						233.669.100,00					-		255.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	44.820.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	49.800.000,00						-	55.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	39.999.100,00						-	40.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	49.050.000,00						-	55.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	50.000.000,00						-	55.000.000,00	
	5.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	50.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	55.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						39.999.100,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	39.999.100,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	40.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						49.050.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	49.050.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	55.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						44.820.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	44.820.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	50.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						49.800.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	49.800.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	55.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						593.000.000,00					-		608.000.000,00	
		-						593.000.000,00					-		608.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	100.266.984,00						-	110.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	472.733.016,00						-	473.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	20.000.000,00						-	25.000.000,00	
	5.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	25.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						100.266.984,00							110.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	100.266.984,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	110.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						472.733.016,00							473.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	472.733.016,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	473.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.950.229.000,00					-		2.105.000.000,00	
		-						1.950.229.000,00					-		2.105.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	299.929.000,00						-	350.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	850.000.000,00						-	900.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	-	750.000.000,00						-	800.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	50.300.000,00						-	55.000.000,00	
	5.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						750.000.000,00							800.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	5 Unit	750.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	800.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						850.000.000,00							900.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	7 Unit	850.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	900.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						299.929.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	7 Unit	299.929.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	350.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						50.300.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	72 Unit	50.300.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	55.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
398.	**5.07.02**	**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**						**1.088.135.891,00**							**430.000.000,00**	
			Meningkatnya Layanan Penghubung Pemerintah Daerah	-		-	100 %	1.088.135.891,00						-	430.000.000,00	
	5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung						1.088.135.891,00					-		430.000.000,00	
		-						1.088.135.891,00					-		430.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	-		-	-	60.000.000,00						-	65.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	-		-	-	287.026.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	-		-	-	170.934.000,00						-	165.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	-		-	-	380.178.891,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	-		-	-	189.997.000,00						-	200.000.000,00	
	5.07.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagiAparatur dan Masyarakat						170.934.000,00							165.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	-		-	1 Laporan	170.934.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	165.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.02.1.01.0002	Pelayanan Kelembagaan Aparatur danMasyarakat						380.178.891,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	-		-	1 Laporan	380.178.891,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.02.1.01.0003	Peningkatan Fasilitasi Promosi ProdukUnggulan dan Pelestarian Seni Budaya						189.997.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	-		-	1 Laporan	189.997.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	200.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.02.1.01.0004	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya						60.000.000,00							65.000.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	-		-	1 Laporan	60.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	65.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.02.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi PelaksanaanPelayanan Penghubung						287.026.000,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	-		-	1 Laporan	287.026.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	BADAN PENGHUBUNG
		INSPEKTORAT						**15.840.332.941,00**							**16.522.000.000,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**15.840.332.941,00**							**16.522.000.000,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**15.840.332.941,00**							**16.522.000.000,00**	
399.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**14.119.000.000,00**							**14.520.000.000,00**	
			Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.	-		-	100 %	13.749.000.000,00						-	14.179.000.000,00	
	6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						70.000.000,00					Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan.		77.000.000,00	
		-						70.000.000,00					Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan.		77.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-		-	-	10.000.000,00						-	11.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	10.000.000,00						-	11.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	10.000.000,00						-	11.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	10.000.000,00						-	11.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	30.000.000,00						-	33.000.000,00	
	6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						10.000.000,00							11.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	11.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						10.000.000,00							11.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	11.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						10.000.000,00							11.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	11.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	6.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						30.000.000,00							33.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	3 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	33.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						10.000.000,00							11.000.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	11.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12.575.000.000,00					Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan.		12.732.500.000,00	
		-						12.575.000.000,00					Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan.		12.732.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	65.000.000,00						-	71.500.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	10.000.000,00						-	11.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	12.500.000.000,00						-	12.650.000.000,00	
	6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						12.500.000.000,00							12.650.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	106 Orang/ Bulan	12.500.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	12.650.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						65.000.000,00							71.500.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	1 Dokumen	65.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	71.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						10.000.000,00							11.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	11.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						10.000.000,00					Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		11.000.000,00	
		-						10.000.000,00					Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		11.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	10.000.000,00						-	11.000.000,00	
	6.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						10.000.000,00							11.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	11.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						300.000.000,00					Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan.		400.000.000,00	
		-						300.000.000,00					Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan.		400.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	50.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	250.000.000,00						-	300.000.000,00	
	6.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						250.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	7 Orang	250.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	300.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	3 Orang	50.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	100.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						704.000.000,00					Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan .		788.500.000,00	
		-						704.000.000,00					Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan .		788.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-		-	-	42.000.000,00						-	45.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	100.000.000,00						-	110.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	350.000.000,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	100.000.000,00						-	110.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	100.000.000,00						-	110.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	5.000.000,00						-	5.500.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	7.000.000,00						-	8.000.000,00	
	6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.000.000,00							5.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						7.000.000,00							8.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	7.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	8.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						100.000.000,00							110.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	100.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	110.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						100.000.000,00							110.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	100.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	110.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						100.000.000,00							110.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	110.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						350.000.000,00							400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	350.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	400.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						42.000.000,00							45.000.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-		-	1 Dokumen	42.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	45.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						70.000.000,00					Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan .		86.000.000,00	
		-						70.000.000,00					Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan .		86.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	10.000.000,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	50.000.000,00						-	55.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	10.000.000,00						-	11.000.000,00	
	6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						10.000.000,00							11.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	11.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						10.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	20.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	55.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						390.000.000,00					Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan.		425.000.000,00	
		-						390.000.000,00					Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan.		425.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	340.000.000,00						-	370.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	50.000.000,00						-	55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	6.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						340.000.000,00							370.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	25 Unit	340.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	370.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	15 Unit	50.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	55.000.000,00	INSPEKTORAT
400.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**						**1.395.000.000,00**							**1.699.500.000,00**	
			Tercapainya Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Penyelesaian Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu.	-		-	100 %	1.345.000.000,00						-	1.699.500.000,00	
	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal						1.330.000.000,00					Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal.		1.628.000.000,00	
		-						1.330.000.000,00					Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal.		1.628.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	-		-	-	250.000.000,00						-	300.000.000,00	
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	-		-	-	50.000.000,00						-	60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	-		-	-	100.000.000,00						-	120.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	-		-	-	300.000.000,00						-	350.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	-		-	-	450.000.000,00						-	600.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	-		-	-	160.000.000,00						-	176.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	-		-	-	20.000.000,00						-	22.000.000,00	
	6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah						300.000.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	-		-	50 Laporan	300.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	350.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah						100.000.000,00							120.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	-		-	5 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	120.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja						20.000.000,00							22.000.000,00	
		Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	-		-	38 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	22.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan						160.000.000,00							176.000.000,00	
		Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	-		-	38 Laporan	160.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	176.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan TeknisKabupaten/Kota						450.000.000,00							600.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	-		-	11 Laporan	450.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	600.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal						50.000.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	-		-	1 Kesepakatan	50.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	60.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP						250.000.000,00							300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	-		-	4 Dokumen	250.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	300.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						65.000.000,00					Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal.		71.500.000,00	
		-						65.000.000,00					Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal.		71.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-		-	-	50.000.000,00						-	55.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	-		-	-	15.000.000,00						-	16.500.000,00	
	6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian KerugianNegara/Daerah						15.000.000,00							16.500.000,00	
		Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	-		-	5 Laporan	15.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	16.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-		-	20 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	55.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
401.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**						**326.332.941,00**							**302.500.000,00**	
			Presentase Nilai Pencegahan Korupsi	-		-	83 %	100.000.000,00						-	110.000.000,00	
			Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan.	-		-	100 %	226.332.941,00						-	192.500.000,00	
	6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di BidangPengawasan dan Fasilitasi Pengawasan						100.000.000,00					Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Internal.		110.000.000,00	
		-						100.000.000,00					Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Internal.		110.000.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	-		-	-	100.000.000,00						-	110.000.000,00	
	6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di BidangPengawasan						100.000.000,00							110.000.000,00	
		Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	-		-	1 Rekomendasi	100.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	110.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi						226.332.941,00					Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal.		192.500.000,00	
		-						226.332.941,00					Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal.		192.500.000,00	
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	-		-	-	101.332.941,00						-	55.000.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	-		-	-	10.000.000,00						-	11.000.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	-		-	-	15.000.000,00						-	16.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	100.000.000,00						-	110.000.000,00	
	6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi UrusanPemerintahan Daerah						100.000.000,00							110.000.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	35 Perangkat Daerah	100.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	110.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, danPenilaian Reformasi Birokrasi						15.000.000,00							16.500.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	-		-	15 Perangkat Daerah	15.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	16.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi						101.332.941,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	-		-	4 Kegiatan	101.332.941,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	55.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan VerifikasiPenegakan Integritas						10.000.000,00							11.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	-		-	1 Perangkat Daerah	10.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	11.000.000,00	INSPEKTORAT
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						**25.875.066.140,00**							**136.495.313.680,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**25.663.916.140,00**							**136.277.960.780,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**25.663.916.140,00**							**136.277.960.780,00**	
402.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**7.757.080.590,00**							**8.149.299.100,00**	
			Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	-		-	100 Persen	7.757.080.590,00						-	8.149.299.100,00	
	8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						36.150.000,00					Kesbangpol Provinsi maluku		37.352.900,00	
		-						36.150.000,00					Kesbangpol Provinsi maluku		37.352.900,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	36.150.000,00						-	37.352.900,00	
	8.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						36.150.000,00							37.352.900,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	6 Dokumen	36.150.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		-	37.352.900,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.558.799.996,00					Kesbangpol Provinsi Maluku		5.793.271.200,00	
		-						5.558.799.996,00					Kesbangpol Provinsi Maluku		5.793.271.200,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	5.558.799.996,00						-	5.793.271.200,00	
	8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.558.799.996,00							5.793.271.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	39 Orang/ Bulan	5.558.799.996,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		-	5.793.271.200,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						369.999.800,00					Kesbangpol Provinsi Maluku		390.000.000,00	
		-						369.999.800,00					Kesbangpol Provinsi Maluku		390.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	150.000.000,00						-	160.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	219.999.800,00						-	230.000.000,00	
	8.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						150.000.000,00							160.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	1 Paket	150.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		-	160.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						219.999.800,00							230.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	5 Orang	219.999.800,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		-	230.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						938.999.800,00					Kesbangpol Provinsi Maluku		964.000.000,00	
		-						938.999.800,00					Kesbangpol Provinsi Maluku		964.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	87.000.000,00						-	88.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	480.000.000,00						-	500.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	84.999.800,00						-	90.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	67.000.000,00						-	69.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	220.000.000,00						-	217.000.000,00	
	8.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						220.000.000,00							217.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	8 Paket	220.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		-	217.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						84.999.800,00							90.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	84.999.800,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		-	90.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						67.000.000,00							69.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	67.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		-	69.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						87.000.000,00							88.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	4 Laporan	87.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		-	88.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						480.000.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	2 Laporan	480.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		-	500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						311.000.000,00					Kesbangpol Provinsi Maluku		350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						311.000.000,00					Kesbangpol Provinsi Maluku		350.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	136.000.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	-	175.000.000,00						-	200.000.000,00	
	8.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						175.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	6 Unit	175.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		-	200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						136.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	3 Paket	136.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		-	150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						123.321.000,00					Kesbangpol Provinsi Maluku		128.875.000,00	
		-						123.321.000,00					Kesbangpol Provinsi Maluku		128.875.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	78.375.000,00						-	81.900.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	43.890.000,00						-	45.865.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	1.056.000,00						-	1.110.000,00	
	8.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.056.000,00							1.110.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	1.056.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		-	1.110.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						78.375.000,00							81.900.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	78.375.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		-	81.900.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						43.890.000,00							45.865.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	43.890.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		-	45.865.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						418.809.994,00					Kesbangpol Provinsi Maluku		485.800.000,00	
		-						418.809.994,00					Kesbangpol Provinsi Maluku		485.800.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	130.625.000,00						-	136.500.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	288.184.994,00						-	349.300.000,00	
	8.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						130.625.000,00							136.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	3 Unit	130.625.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		-	136.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						288.184.994,00							349.300.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	24 Unit	288.184.994,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		-	349.300.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
403.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**						**4.856.985.000,00**							**5.099.834.250,00**	
			Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	-		-	100 Persen	4.751.985.000,00						-	4.989.584.250,00	
	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						4.856.985.000,00					Paskibraka, Purnapasikbraka, pemuda, pelajar,FPK		5.099.834.250,00	
		-						4.856.985.000,00					Paskibraka, Purnapasikbraka, pemuda, pelajar,FPK		5.099.834.250,00	
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	-		-	-	210.000.000,00						-	220.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-		-	-	131.985.000,00						-	138.584.250,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-		-	-	735.000.000,00						-	771.750.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-		-	-	1.732.500.000,00						-	1.819.125.000,00	
			Jumlah Paskibraka	-		-	-	1.890.000.000,00						-	1.984.500.000,00	
			Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	-		-	-	52.500.000,00						-	55.125.000,00	
			Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	-		-	-	52.500.000,00						-	55.125.000,00	
			Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	-		-	-	52.500.000,00						-	55.125.000,00	
	8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						1.732.500.000,00							1.819.125.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-		-	150 Orang	1.732.500.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		-	1.819.125.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						735.000.000,00							771.750.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-		-	1654 Orang	735.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		-	771.750.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						131.985.000,00							138.584.250,00	
		Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-		-	1 Laporan	131.985.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		-	138.584.250,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0007	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila						52.500.000,00							55.125.000,00	
		Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	-		-	54 Orang	52.500.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		-	55.125.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka						52.500.000,00							55.125.000,00	
		Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	-		-	1 Dokumen	52.500.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		-	55.125.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	8.01.02.1.01.0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka						210.000.000,00							220.500.000,00	
		Terlaksananya penugasan paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	-		-	1 Dokumen	210.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		-	220.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila						52.500.000,00							55.125.000,00	
		Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	-		-	1 Dokumen	52.500.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		-	55.125.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka						1.890.000.000,00							1.984.500.000,00	
		Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	-		-	54 Orang	1.890.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		-	1.984.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
404.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**						**3.373.649.800,00**							**119.795.746.180,00**	
			Persentase Kebijakan Pendidikan Politik oleh Pemerintah Daerah (%)	-		-	100 Persen	3.373.649.800,00						-	119.795.746.180,00	
	8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						3.373.649.800,00					partai politik,		119.795.746.180,00	
		-						3.373.649.800,00					partai politik,		119.795.746.180,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-		-	-	189.889.500,00						-	192.836.400,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-		-	-	313.499.900,00						-	327.607.500,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-		-	-	2.870.260.400,00						-	119.275.302.280,00	
	8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						2.870.260.400,00							119.275.302.280,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-		-	400 Orang	2.870.260.400,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		-	119.275.302.280,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						313.499.900,00							327.607.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-		-	100 Orang	313.499.900,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		-	327.607.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						189.889.500,00							192.836.400,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-		-	1 Laporan	189.889.500,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		-	192.836.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
405.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**						**8.069.701.000,00**							**1.546.256.250,00**	
			Persentase Ormas yang aktif (%)	-		-	69 Persen	8.069.701.000,00						-	1.546.256.250,00	
	8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						8.069.701.000,00					Organisasi Kemasyarakatan		1.546.256.250,00	
		-						8.069.701.000,00					Organisasi Kemasyarakatan		1.546.256.250,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-		-	-	77.925.000,00						-	80.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-		-	-	51.950.000,00						-	53.976.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-		-	-	7.939.826.000,00						-	1.412.280.250,00	
	8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						7.939.826.000,00							1.412.280.250,00	
		Terlaksananya Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-		-	100 Orang	7.939.826.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		-	1.412.280.250,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						51.950.000,00							53.976.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-		-	5 Orang	51.950.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		-	53.976.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						77.925.000,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-		-	5 Laporan	77.925.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		-	80.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
406.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**						**374.850.000,00**							**393.592.500,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan (%)	-		-	100 Persen	374.850.000,00						-	393.592.500,00	
	8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						374.850.000,00					Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pemuda ,Pelajar, Masyarakat FKUB		393.592.500,00	
		-						374.850.000,00					Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pemuda ,Pelajar, Masyarakat FKUB		393.592.500,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-		-	-	59.565.000,00						-	63.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-		-	-	315.285.000,00						-	330.592.500,00	
	8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						315.285.000,00							330.592.500,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-		-	150 Orang	315.285.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		-	330.592.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						59.565.000,00							63.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-		-	5 Orang	59.565.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		-	63.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
407.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**						**1.231.649.750,00**							**1.293.232.500,00**	
			Persentase Konflik Sosial Yang Berhasil Difasilitasi	-		-	100 Persen	1.231.649.750,00						-	1.293.232.500,00	
	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						1.231.649.750,00					Masyarakat, Forkopimda		1.293.232.500,00	
		-						1.231.649.750,00					Masyarakat, Forkopimda		1.293.232.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	-		-	-	367.357.900,00						-	378.158.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-		-	-	73.150.000,00						-	76.400.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-		-	-	104.499.850,00						-	109.202.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-		-	-	686.642.000,00						-	729.472.000,00	
	8.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						686.642.000,00							729.472.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-		-	150 Orang	686.642.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		-	729.472.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						104.499.850,00							109.202.500,00	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-		-	150 Orang	104.499.850,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		-	109.202.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						73.150.000,00							76.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-		-	1 Laporan	73.150.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		-	76.400.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi PimpinanDaerah Provinsi						367.357.900,00							378.158.000,00	
		Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	-		-	1 Dokumen	367.357.900,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		-	378.158.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X							**211.150.000,00**							**217.352.900,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**211.150.000,00**							**217.352.900,00**	
408.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**211.150.000,00**							**217.352.900,00**	
			Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	-		-	100 Persen	211.150.000,00						-	217.352.900,00	
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						36.150.000,00					Kesbangpol Provinsi maluku		37.352.900,00	
		-						36.150.000,00					Kesbangpol Provinsi maluku		37.352.900,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	36.150.000,00						-	37.352.900,00	
	X.XX.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						36.150.000,00							37.352.900,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	6 Laporan	36.150.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		-	37.352.900,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						175.000.000,00					Kesbangpol Provinsi Maluku		180.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						175.000.000,00					Kesbangpol Provinsi Maluku		180.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	175.000.000,00						-	180.000.000,00	
	X.XX.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						175.000.000,00							180.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	2 Laporan	175.000.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		-	180.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Luas WPR yang Diusulkan Pemerintah Daerah	-		-	1 Ha	77.781.000,00						-	55.250.000,00	
409.	**-**	**-**						**1.298.815.000,00**							**2.156.609.500,00**	
	-	**-**						**134.450.900,00**							**55.250.000,00**	
			Porsi EBT dalam Bauran Energi	-		-	34,33 %	56.669.900,00						-	0,00	
410.	**-**	**-**						**285.749.700,00**							**215.441.500,00**	
	-	**-**						**134.450.900,00**							**55.250.000,00**	
		-						56.669.900,00					Masyarakat Penerima Manfaat		0,00	
			-	-		-	-	56.669.900,00						-	0,00	
	-	-						56.669.900,00					Masyarakat Penerima Manfaat		0,00	
	-	-						56.669.900,00							0,00	
		-	-	-		-	-	77.781.000,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	55.250.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-	-	-		-	-	56.669.900,00	Provinsi Maluku	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	-	-						77.781.000,00							55.250.000,00	
	J U M L A H							**2.881.118.506.726,20**							**3.013.297.728.221,41**	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran menyeluruh mengenai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam periode pelaporan, yang mencakup perkembangan indikator kinerja utama, indikator kinerja kegiatan, serta indikator kinerja daerah. Penyajian capaian dilakukan secara komprehensif untuk memberikan potret nyata atas keberhasilan maupun tantangan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Analisis capaian tidak hanya menyoroti indikator yang telah mencapai target, tetapi juga mengidentifikasi indikator yang belum mencapai target maupun yang masih kosong. Hal ini penting untuk memastikan adanya tindak lanjut berupa perbaikan kebijakan, penguatan koordinasi, serta peningkatan kapasitas pelaksana program. Dengan demikian laporan kinerja dari penyelenggaraan pemerintah daerah tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi capaian, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi dan dasar perencanaan pembangunan daerah ke depan.

Secara umum, capaian kinerja menunjukkan adanya kemajuan di beberapa aspek, seperti peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan dan kebudayaan, serta keberhasilan layanan penunjang pemerintahan daerah. Namun, masih terdapat indikator yang memerlukan perhatian khusus, terutama pada aspek kualitas pembelajaran, pemerataan tenaga pendidik, dan penguatan data literasi serta numerasi. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan diarahkan pada penguatan sistem monitoring, peningkatan kualitas layanan publik, serta pelestarian budaya yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa setiap program dan kegiatan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat melalui pendekatan berbasis data, evaluasi serta penguatan sistem informasi pemerintahan. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak hanya ditentukan oleh capaian indikator kinerja semata, tetapi juga oleh kemampuan dalam menjalin sinergi antar pemangku kepentingan. Kolaborasi yang erat antara perangkat daerah, lembaga legislatif dan masyarakat merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Capaian kinerja sekaligus menjadi dasar dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara objektif, serta menjadi pijakan penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan di masa mendatang. Berikut disajikan tabel data target indikator makro tahun 2026–2027.

Tabel 7. 1
Capaian dan Target Indikator Makro Provinsi Maluku

No	Indikator Makro	Satuan	Capaian	Target	
			2025	2026	2027
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,56	6,07	6,85
2	PDRB Per Kapita	juta	33,65	38,73	42,65
3	Kontribusi PDRB Provinsi	%	0,29	0,28	0,29
4	Tingkat Kemiskinan **(IUP 45)**	%	15,25	14,54	13,67
5	Rasio Gini	%	0,273	0,271-0,276	0,261-0,265
6	Indeks Modal Manusia (IMM)	Indeks	-	0,49	0,50
7	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	%	-	49,38	58,91
8	IKLH Daerah	Angka	78,83	82,59	82,76
9	Tingkat Pengangguran Terbuka **(IUP 45)**	%	6,27	5,92	5,80

7.1. Penetapan Target Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada hasil (*result-based planning*). IKU ditetapkan sebagai instrumen utama untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis, sekaligus menjadi tolok ukur akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan. Proses penetapan target IKU dilakukan melalui mekanisme analisis capaian kinerja tahun sebelumnya, evaluasi terhadap isu-isu strategis pembangunan, serta sinkronisasi dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan prioritas daerah.

Target IKU dirumuskan secara objektif, terukur, dan berbasis data, sehingga indikator yang ditetapkan mampu mencerminkan efektivitas, efisiensi, dan relevansi pelaksanaan program pembangunan. Selain itu, penetapan target IKU juga mempertimbangkan konsistensi dengan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) serta keterkaitan dengan indikator pembangunan nasional, sehingga tercipta keterpaduan antara kebijakan pusat dan daerah. Dengan demikian, IKU berfungsi tidak hanya sebagai alat evaluasi kinerja, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian dan penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Melalui penetapan target IKU yang jelas, terukur, dan konsisten, RKPD diharapkan mampu menjadi dokumen perencanaan yang lebih operasional, berorientasi pada

hasil, serta mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Berikut penetapan target Indikator Kinerja Utama pada pembangunan Provinsi Maluku tahun 2026 – 2027 dengan mengacu pada arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Maluku periode 2025–2029.

Tabel 7. 2
Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Provinsi Maluku

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian	Target	
			2025	2026	2027
1.	Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Maluku	Indeks	-	67 (B :Cukup Baik)	68 (B :Cukup Baik)
2.	Tingkat Kemiskinan	%	15,25	14,54	13,67
3.	Indeks Modal Manusia	Indeks	-	0,49	0,5
4.	Indeks Infrastruktur	Indeks	-	69,38	70,60
5.	Rasio Konektivitas Wilayah Provinsi Maluku	Rasio	0,704	0,764	0,766
6.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup **(IUP 45)**	Angka	78,83	82,59	82,76
7.	Indeks Risiko Bencana	Angka	-	161,4	161,35
8.	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	-	49,38	58,91
9.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,56	6,07	6,85
10.	Indeks Ekonomi Hijau **(IUP 45)**	Indeks	-	61,9	63,73
11.	Indeks Williamson	Indeks	-	0,388	0,388
12.	Indeks Kerukunan Umat Beragama **(IUP 45)**	Nilai	-	76,53	76,56
13.	Indeks Pembangunan Kebudayaan **(IUP 45)**	Nilai	57,27	61,31	61,91
14.	Indeks Demokrasi Provinsi	Nilai	-	70,55 - 77,19	70,6 – 77,69

Sumber : RPJMD Provinsi Maluku 2025-2029

7.2. Penetapan Indikator dan Target Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci berfungsi sebagai instrumen pengendali sekaligus alat evaluasi yang lebih spesifik dibandingkan Indikator Kinerja Utama (IKU), karena secara langsung menggambarkan capaian kinerja perangkat daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan sesuai kewenangannya. Penetapan Indikator dan Target Kinerja Kunci (IKK) merupakan tahapan penting dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan

Pemerintah Daerah.

Dalam proses penetapan IKK, Pemerintah Daerah mengedepankan prinsip berbasis data, relevansi terhadap kebutuhan masyarakat, serta konsistensi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan RKPD. Target yang ditetapkan tidak hanya mencerminkan capaian teknis, tetapi juga menjadi komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat daya saing daerah, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Selain itu, penetapan IKK dilakukan melalui mekanisme evaluasi berkelanjutan dengan mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya, tren pembangunan, serta tantangan yang dihadapi daerah. Dengan demikian, IKK yang dirumuskan diharapkan mampu menjadi pedoman kerja yang jelas bagi perangkat daerah, sekaligus menjadi dasar dalam menilai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tabel 7. 3
Capaian Indikator Kinerja Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025 dan Target Tahun 2026 – 2027

No.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN	
				2026	2027
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(06)*	*(07)*
1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**				
1	Harapan Lama Sekolah **(IUP 45)**	%	14,1	14.27-14.29	14.33-14.36
2	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk diatas 15 Tahun **(IUP 45)**	%	10,63	10.70-10.72	10.83-10.85
3	Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi	%	-	21.13-23.63	22.39-24.89
4	Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Numerasi	%	-	16.55-19.05	17.55-20.05
5	Skor Literasi/Numerasi	Skor	Literasi : SMA = 49.5, SMK = 39.75, dan SLB (SDLB = 57.14,	54,32	55,29

No.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN	
				2026	2027
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(06)*	*(07)*
			SMPLB = 55.56, dan SMALB = 37.5)/ Numerasi : SMA = 46.86, SMK = 39.53, SLB = (SDLB = 85.7, SMPLB = 33.32, dan SMALB = 75)		
6	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	(%)	57,27	61,31	61,91
7	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi **(IUP 45)**	(%)	15,93	15,09	15,24
8	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi **(IUP 45)**	(%)	46,25	74,92	76,05
III	**ASPEK PELAYANAN UMUM**				
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	%	77,28	100,00	100,00
2	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidikan	%	75,43	60,00	75,00
3	Persentase anak usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)	%	82,07	85,00	87,00
4	Persentase anak usia 4-18 Tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	%	77,28	66,00	67,00
IV	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**				
AA	**1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				
1	Indeks Pendidikan	Indeks	0,525	0,47	0,47
2	Dimensi Warisan Budaya	Nilai	59,05	58,35	58,37

No.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN	
				2026	2027
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(06)*	*(07)*
3	Nilai Sakip	Nilai	61,65	75,50	77,00
4	Persentase pemerataan guru	%	-	100,00	100,00
5	Skor Kemampuan Literasi SLB **(IUP 45)**	%	SDLB = 57.14, SMPLB = 55.56, dan SMALB = 37.5	56,16	57,03
6	Skor Kemampuan Numerasi SMK **(IUP 45)**	%	39,53	55,48	57,68
7	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100,00	100,00
8	Skor Kemampuan Literasi SMK **(IUP 45)**	%	39,75	61,14	62,44
9	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	%	-	35,00	36,00
10	Skor Kemampuan Numerasi SMA **(IUP 45)**	%	46,86	55,85	57,45
11	Persentase layanan dan tidak lanjut pemberian perizinan pendidikan	%	-	10,00	11,00
12	Skor Kemampuan Literasi SMA **(IUP 45)**	%	49,5	61,94	62,54
13	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra Daerah	%	-	3,00	7,00
14	Skor Kemampuan Numerasi SLB **(IUP 45)**	%	SDLB = 85.7, SMPLB = 33.32, dan SMALB = 75	46,79	47,24
AB	**2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				
1	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	Persentase	55,6	100,00	100,00
2	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Persentase	54,05	100,00	100,00
3	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Persentase	70	100,00	100,00

No.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN	
				2026	2027
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(06)*	*(07)*
4	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Persentase	80	45,00	60,00
5	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	Persentase	70,71	50,00	52,00
AC					
1	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	Persentase	97	20,00	25,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN					
VI	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**				
1	Usia Harapan Hidup (UHH) **(IUP 45)**	(tahun)	71,02	71,51	71,85
2	Penemuan Kasus TBC	%	62.3	90,00	90,00
3	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) **(IUP 45)**	(%)	85	90,00	90,00
4	Cakupan Kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasional **(IUP 45)**	%	98,60%	98,70	98,80
5	Prevalensi Balita Stunting **(IUP 45)**	%	21,46%	23,10	21,60
6	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup **(IUP 45)**	Per 100.000 Kelahiran Hidup	87,70%	168,00	151,00
VII	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**				
AA	**1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				
1	Bed Occupancy Rate (BOR)	%	38.44	41,00	60,00
2	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)	%	100	100,00	100,00
3	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan /atau berpotensi bencana	%	100	100,00	100,00
4	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Orang	6 (212 kasus kematian bayi)	11,95	11,28
5	Nilai Sakip	Nilai	63.5	65,00	66,50

No.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN	
				2026	2027
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(06)*	*(07)*
6	Cakupan Penerimaan PKG (Pemeriksaan Kesehatan Gratis)	%	17,90%	25,00	40,00
7	Average Length of Stay	%/hari	6	4,00	3,00
8	Cakupan penerimaan imunisasi bayi lengkap	Persentase	80	85,00	90,00
9	Persentase hipertensi dalam pengendalian	Persentase	3.45	15,00	20,00
10	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman	Persentase	81	82,00	84,00
11	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	%	90.72	60,00	70,00
12	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	94,28	100,00	100,00
13	Angka Kematian Balita/1000 Kelahiran Hidup	Orang	6,4 (227 kasus kematian balita	28,00	26,50
14	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	%	52,83%	50,00	55,00
15	Jumlah Kabupaten/Kota Eliminasi Malaria	Kabupaten /Kota	4	6,00	8,00
16	ODHIV Baru yang ditemukan yang mendapat Pengobatan ARV	%	-	90,00	90,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
IX	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**				
1	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Bidang Tanah	1155	2.200,00	1.200,00
2	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan **(IUP 45)**	(%)	23,77	41,25	44,12
3	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman **(IUP 45)**	(%)	1.43	9,12	9,33
X	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**				
1	Indeks Infrastruktur Dasar	Angka	35,53	35,72	37,27
XI	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**				
AA	**1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				

No.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN	
				2026	2027
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(06)*	*(07)*
1	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	%	13	25,00	39,00
2	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	%	4,32	17,00	18,00
3	Nilai Sakip	Nilai	-	83,50	85,00
4	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah provinsi	%	-	33,00	33,00
5	Tingkat Kemantapan Jalan	%	61.84	56,79	58,37
6	Persentase peningkatan perlindungan kawasan dari abrasi dan banjir rob	%	38,31	22,20	23,00
7	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	%	27,52	39,00	41,00
8	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak	%	14,58	55,10	55,72
9	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Aman	%	1.43	9,12	9,33
10	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100,00	100,00
11	Persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/TPST regional	%	-	22,00	24,00
12	Persentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi baik	%	-	20,00	23,00
13	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	%	100	15,00	20,00
14	Persentase penataan bangunan dan lingkungan	%	100	19,00	20,00
15	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	%	100	18,00	20,00
16	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kab/kota	%	-	19,00	22,00
AB	**2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				
1	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah	%	100	100,00	100,00
2	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	-	100,00	100,00
1.04.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					

No.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN	
				2026	2027
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(06)*	*(07)*
XIII	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**				
1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan **(IUP 45)**	Persentase	-	69,48	71,51
XIV	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**				
AA	**1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				
1	Nilai Sakip	Nilai	belum dikeluarkan oleh Inspektorat	80,50	80,70
2	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	Persentase	25.25	27,22	29,41
3	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Persentase	100	100,00	100,00
4	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	0	100,00	100,00
5	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni	Persentase	0	100,00	100,00
6	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100,00	100,00
1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
XVI	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**				
1	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Indeks	0	50,00	52,00
2	Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Persentase	0	100,00	100,00
XVII	**ASPEK PELAYANAN UMUM**				
1	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah **(IUP 45)**	%	0	100,00	100,00
2	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya **(IUP 45)**	(%)	0	70,75	71,50
XVIII	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**				
AA	**1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG**				

No.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN	
				2026	2027
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(06)*	*(07)*
	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
1	Nilai Sakip	Nilai	B	64,10	66,10
2	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100,00	100,00
3	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	%	100	100,00	100,00
1.05.1.06.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					
XX	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**				
1	Indeks Risiko Bencana **(IUP 45)**	Indeks	203,94	161,40	161,35
2	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,33	0,38	0,40
XXI	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**				
AA	**1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				
1	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	50	100,00	100,00
2	Nilai Sakip	Nilai	belum dirilis	68,05	71,05
3	Persentase penanganan pra bencana	%	72	100,00	100,00
4	Persentase penanganan tanggap bencana darurat	%	100	100,00	100,00
5	Persentase pendampingan penanganan pasca bencana	%	100	100,00	100,00
6	Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	%	-	100,00	100,00
7	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100,00	100,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL					
XXIII	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**				
1	Indeks Kesejahteraan Sosial	Angka	-	48,58	48,59
XXIV	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**				
AA	**1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				

No.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN	
				2026	2027
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(06)*	*(07)*
1	Persentase Masyarakat miskin yang menerima bantuan sosial	%	100	72,00	73,00
2	Nilai SAKIP		Masih Menunggu Rilis	62,00	63,00
3	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasar di dalam panti	%	100	62,00	63,00
4	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani	%	99	72,00	73,00
5	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100,00	100,00
6	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	%	100	90,20	90,30
7	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya **(IUP 45)**	%	100	100,00	100,00
8	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	%	100	82,00	83,00
9	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	%	100	72,00	73,00
10	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100	100,00	100,00
11	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	%	0	72,00	73,00
12	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial, dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	%	100	100,00	100,00
13	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Taraf Kesejahteraannya	%	100	72,00	73,00
14	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100	100,00	100,00
15	Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100	100,00	100,00

No.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN	
				2026	2027
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(06)*	*(07)*
16	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat sesuai Standar	%	100	82,00	83,00
17	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya	%	0	82,00	83,00
18	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola dengan Baik	%	100	82,00	83,00
19	Persentase Pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial	%	100	82,00	83,00
20	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	%	100	72,00	73,00
21	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan	%/orang	27	100,00	100,00
22	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	%	0	63,00	64,00
23	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100,00	100,00
2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					
XXVI	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**				
1	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi **(IUP 45)**	%	49,98	38,00	41,00
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,27	5,92	5,80
3	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan **(IUP 45)**	Angka	-	625,00	1.250,00

No.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN	
				2026	2027
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(06)*	*(07)*
4	Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat Kab/Kota/Provinsi **(IUP 45)**	Unit	3	6,00	8,00
5	Proporsi penciptaan lapangan kerja formal **(IUP 45)**	%	0	35,30	36,00
XXVII	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**				
AA	**2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				
1	Tingkat Produktivitas tenaga Kerja	Persentase	1,51	41,18	41,36
2	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	9,09	20,00	20,00
3	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Persentase	1,11	0,48	0,51
4	Nilai Sakip	Nilai	belum dirilis	62,50	63,50
5	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100,00	100,00
6	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	10.000	250	250
7	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	%	-	0,18	0,21
8	Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya	Orang	-	3.075	3.075
9	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	Persentase	-	0,48	0,51
AB	**3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**				
1	Persentase dokumen perencanaan kawasan terpadu.	%	-	100,00	100,00
2	Tersedianya dokumen perencanaan kawasan transmigrasi baru	Dokumen	-	1	1
3	Persentase Program Transmigrasi yang dilaksanakan	%	50	100,00	100,00
4	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	%	-	0,21	0,50
2.08.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					

No.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN	
				2026	2027
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(06)*	*(07)*
XXIX	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**				
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	-	93,92	94,06
2	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*) **(IUP 45)**	(%)	-	66,08	66,67
3	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	-	70,14	70,59
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	66,66	58,80	59,31
XXX	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**				
AA	**2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				
1	Nilai Sakip	Nilai	belum dirilis	65,50	67,00
2	Ratio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	%	21,5	15,31	14,55
3	Rasio KDRT	%	3,6	2,24	2,22
4	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	%	3,7	7,40	7,03
5	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Peringkat dalam KLA	Persentase	18,09	19,00	19,21
6	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Nilai	-	90,01	91,49
7	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100,00	100,00
8	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100,00	100,00
9	Persentase Anggaran Responsif (ARG)	%	4,5	6,89	7,42
10	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	Nilai	20,96	22,58	24,08
11	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Nilai	-	65,92	66,17
12	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	Nilai	-	0,51	0,75
13	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100,00	100,00

No.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN	
				2026	2027
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(06)*	*(07)*
14	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks		90,01	91,49
15	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	4,5	6,89	7,42
16	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	-	100,00	100,00
17	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	66,66	58,80	59,31
18	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase	100	100,00	100,00
2.09.2.09.0.00.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN					
XXXII	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**				
1	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Ton	847,69	48,00	50,00
2	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	89,3	78,00	79,00
3	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan PoU **(IUP 45)**	%	105,35	27,64	26,84
XXXIII	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**				
1	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	57,18	67,20	69,00
XXXIV	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**				
AA	**2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				
1	Nilai Sakip	Nilai	Belum dirilis	60,00	65,00
2	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	%	104,3	88,00	90,00
3	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100,00	100,00
4	Jumlah Cadangan Pangan (ton)	Ton	54,218	48,00	50,00
5	Persentase Daerah Rentan Rawan pangan	%	46,61	20,10	18,44
2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP					
XXXVI	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**				

No.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN	
				2026	2027
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(06)*	*(07)*
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	78,83	82,59	82,76
2	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah **(IUP 45)**	(%)	67.99	13,50	17,00
3	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah **(IUP 45)**	%	-	65,75	74,50
4	Persentase Penurunan Emisi GRK b) Tahunan **(IUP 45)**	%	85.82	87,65	90,98
5	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (IPKH) **(IUP 45)**	Poin	-	0,55	0,56
XXXVII	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**				
AA	**2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				
1	Jumlah Entitas Pengakuan dan Peningkatan Kapasitas MHA	Kelompok	-	2,00	2,00
2	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan	%	85.71	33,33	33,33
3	Persentase sampah dan jumlah limbah B3 terkelola	%	73.94	50,00	60,00
4	Nilai SAKIP		N/A	61,70	61,80
5	Persentase Penurunan Emisi GRK a) Kumulatif	%	97.39	97,66	97,95
6	Jumlah Masyarakat/ Kelompok/ Pelaku Usaha	Kg/Orang	90	30,00	30,00
7	Jumlah Penerima Penghargaan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penghargaan	-	3,00	3,00
8	Persentase Penyelesaian Sengketa / Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	%	-	100,00	100,00
9	Persentase Limbah B3 yang terkelola	%	79.88	90,00	90,00
10	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	%	85.71	33,33	33,33
11	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Dokumen	-	1	
12	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100,00	100,00
13	Indeks Kualitas Udara	poin	84.22	88,23	88,43

No.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN	
				2026	2027
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(06)*	*(07)*
14	Indeks Kualitas Air	poin	69.74	72,83	73,03
15	Indeks Kualitas Air Laut	poin	72.15	81,99	82,04
16	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	poin	-	20,00	25,00
2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
XXX IX	**ASPEK PELAYANAN UMUM**				
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks	-	72,50	75,00
2	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	64.0 : 67.1	65.8:67.4	67.5:69.1
XL	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**				
AA	**2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				
1	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan	Persentase	0	100,00	100,00
2	Persentase Akte Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100,00	100,00
3	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100,00	100,00
4	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	23,56	55,00	60,00
5	Persentase Akte Perkawian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100,00	100,00
6	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	%	100	100,00	100,00
7	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	5,35	20,00	30,00
8	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	90,8	100,00	100,00
9	Persentase Akte Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100,00	100,00
AB	**2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				
1	Kebijakan fasilitasi dan koordinasi layanan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga	%	100	82,50	85,00
2	Nilai Sakip	Nilai	-	64,00	66,00

No.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN	
				2026	2027
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(06)*	*(07)*
3	Kebijakan fasilitasi dan koordinasi layanan kependudukan dan pencatatan sipil	%	100	82,50	85,00
4	Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja	Indeks	78,8	40,50	42,50
5	Indeks Lansia Berdaya	Indeks	68,5	65,50	68,50
6	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat atau cara KB	%	63,9	60,3	61,60
7	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Angka	17,5	18,40	17,40
8	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Angka	2,42	2,40	2,39
9	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	%	29,31	90,80	91,50
2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
XLII	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**				
1	Indeks Desa	Indeks	66	0,67	0,68
2	Persentase Desa Mandiri **(IUP 45)**	%	9,42	15,67	16,08
XLIII	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**				
AA	**2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				
1	Nilai Sakip	Nilai	69,6	68,50	69,00
2	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase	0	1,70	1,70
3	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100,00	100,00
4	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	Persentase	0	20,00	40,00
5	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persentase	33,3	50,00	67,00
6	Persentase Fasilitasi Kerja Sama Desa	Persentase	0	20,00	40,00
7	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	Persentase	0	1,70	1,70

No.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN	
				2026	2027
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(06)*	*(07)*
8	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Persentase	0	20,00	40,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN					
XLV	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**				
AA	**2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**				
1	Rasio Konektivitas Provinsi	Rasio	0.704	0,72	0,74
2	Konektivitas Darat	Rasio	0.701	0,75	0,79
3	Nilai Sakip	Nilai	Belum dirilis	65,50	67,00
4	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Provinsi	Persentase	25.14	25,24	25,34
5	Konektivitas Laut	Rasio	0.705	0,71	0,71
6	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100,00	100,00
2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
XLVII	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**				
1	Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi **(IUP 45)**	Indeks	-	6,00	6,30
XLVIII	**ASPEK PELAYANAN UMUM**				
1	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	Nilai	-	51,50	54,30
2	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	-	2,40	2,45
3	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah (Indeks Kami)	Skor	267	259,00	304,00
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) **(IUP 45)**	Indeks	Belum dirilis	2,63	2,73
XLIX	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**				
AA	**2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				
1	Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik	Predikat	Informatif (92.10)	Menuju Informatif	Informatif

No.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN	
				2026	2027
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(06)*	*(07)*
2	Nilai SAKIP	Skor	Belum Rilis	76,00	78,00
3	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100,00	100,00
AB	**2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**		(92.AB0)		
1	Persentase data statistik sektoral daerah yang tersedia	%	100	64,00	66,00
AC	**2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**		(92.AC0)		
1	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	%	29,15	28,28	33,19
2.17.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					
LI	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**				
1	Rasio Kewirausahaan Daerah **(IUP 45)**	%	13,63	2,24	2,45
2	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB **(IUP 45)**	%	1,77	0,76	0,78
3	Persentase Pertumbuhan UMKM	%	101	0,60	0,70
4	Persentase Koperasi Aktif	%	73,8	68,60	68,70
LII	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**				
AA	**2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**				
1	Nilai Sakip	Nilai	-	65,50	67,00
2	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100,00	100,00
3	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	%	0	2,10	2,20
4	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	-18,25	2,50	2,50
5	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	%	1,89	9,93	9,94
6	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	0	4,60	4,60
7	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	53,93	1,80	1,90
2.17.0.00.0.00.01.0001 - BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH					

No.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN	
				2026	2027
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(06)*	*(07)*
LIV	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**				
AA	**2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**				
1	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan	Koperasi	0	30,00	30,00
2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
LVI	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**				
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perijinan Penanaman Modal	Indeks	93,3	94,00	94,50
2	Jumlah Realisasi Investasi Provinsi Maluku	triliun rupiah	1,125	3,83	3,91
3	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) **(IUP 45)**	%	0	30,37	31,25
4	Persentase Peningkatan Realisasi Nilai investasi (PMA dan PMDN) yang masuk ke Provinsi Maluku	%	-66,71%	3,83	3,91
LVII	**ASPEK PELAYANAN UMUM**				
1	Rata-rata lama pengurusan dokumen perijinan usaha	Hari	0	15,00	15,00
LVIII	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**				
AA	**2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				
1	Nilai Sakip	Nilai	70,2	72,00	73,00
2	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	%	-	100,00	100,00
3	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	29,92	100,00	100,00
4	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100,00	100,00
5	Jumlah Investor yang Berinvestasi	Investor	0	2,00	2,00
6	Persentase Pemanfaatan Data Dan Informasi Penanaman Modal	%	100	72,50	75,00
2.19.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA					
LX	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**				
1	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	-	57,45	58,16

No.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN	
				2026	2027
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(06)*	*(07)*
2	Indeks Partisipasi Olahraga	Persentase	-	0,33	0,34
3	Persentase Fasilitasi Olahraga	%	100	100,00	100,00
LXI	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**				
AA	**2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				
1	Nilai Sakip	Nilai	Belum dinilai	66,15	67,10
2	Persentase Fasilitasi Pemuda	%	100	100,00	100,00
3	Persentase Fasilitasi Pramuka	%	100	100,00	100,00
4	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100,00	100,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					
LXIII	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**				
1	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	30,18	59,00	59,50
LXIV	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**				
AA	**2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**				
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	57,38	63,00	63,50
2	Nilai Sakip	Nilai	-	78,50	79,50
3	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	%	17	17,00	17,00
4	Persentase Perpustakaan yang dibina sesuai SNP	%	-	38,50	39,00
5	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100,00	100,00
AB	**2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**				
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	Indeks	68,204	74,44	78,37
2	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal	%	54,5	75,10	80,05
3	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal	%	77,34	74,00	77,25
4	Jumlah Arsip yang diselamatkan dan dimusnahkan	Nilai	0	150,00	200,00

No.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN	
				2026	2027
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(06)*	*(07)*
5	Persentase perangkat daerah yang memiliki daftar arsip dinamis	%	13,9	13,00	16,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN					
LXVI	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**				
1	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)	Indeks	100.18	95,50	95,75
2	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Indeks	112.15	103,88	104,36
LXVII	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**				
AA	**3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**				
1	Luasan Kawasan Konservasi (Ha)	Ha	2,677,405,61	2.370.729,20	3.318.970,89
2	Tingkat kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturaan perundang-undangan	%	87.5	45,00	47,25
3	Angka Konsumsi Ikan	Kg/KAP/TH	41.26	40,00	41,48
4	Nilai SAKIP	Skor	-	66,00	68,00
5	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	204.336,91*)	123.500,00	129.675,00
6	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	488.896,60*)	255.846,00	268.638,25
7	Angka Konsumsi Ikan	Angka	41.26	40,00	41,48
8	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	94	100,00	100,00
3.26.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA					
LXIX	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**				
1	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	%	1,47	1,46	1,47
2	Kontribusi Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB Maluku	Persentase	-	1,68	0,16
3	Jumlah Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase	3,07	5,00	7,00
4	Jumlah Tamu Wisatawan (Nusantara dan Mancanegara) **(IUP 45)**	Orang	410.697	444,13	466,34
5	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	Hari	2,56	3,00	3,00

No.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN	
				2026	2027
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(06)*	*(07)*
6	Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara	Hari	1,46	3,00	3,00
7	Jumlah Tamu Wisatawan (Nusantara dan Mancanegara)	%	410.697	444.134,00	466.341,00
LXX	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**				
AA	**3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				
1	Nilai Sakip	Nilai	-	66,00	67,00
2	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	%	1,94	5,00	5,00
3	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mendapat pelatihan dan sertifikasi	%	0,3	0,66	0,96
4	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100,00	100,00
5	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Persentase	1,86	1,92	1,94
6	Jumlah destinasi pariwisata yang dikelola, ditata, dan dikembangkan	Destinasi	4	4,00	4,00
3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN					
LXXII	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**				
1	Pertumbuhan dan Kontribusi Sub Sektor Pertanian	%	10,05*	10,15	10,23
2	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Pertanian	%	54,83*	55,93	56,75
LXXIII	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**				
AA	**3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				
1	Nilai Sakip	Nilai	74,1	70,00	70,00
2	Produksi Komoditas Pertanian	Ton	325.392	301.253,00	307.128,00
3	Cakupan Bina Kelompok Tani	Angka	56	58,20	62,46
4	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	10	10,15	10,23
5	Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks	98,31	102,45	102,55
6	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Angka	4.120	3.925,00	4.003,00
7	Peningkatan Produksi Perkebunan	Angka	-	160.298,00	163.360,00

No.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN	
				2026	2027
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(06)*	*(07)*
8	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Angka	109.820	120.355,00	122.761,00
9	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Ha	32.964	32.964,43	32.964,43
10	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	%	86	87,00	89,00
11	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100,00	100,00
12	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	%	63	75,00	89,00
13	Peningkatan Produksi Hortikultura	Angka	12.610	16.675,00	17.004,00
14	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Angka	6	7,00	8,00
3.27.0.00.0.00.01.0002 - BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BPTPHP) PROVINSI MALUKU					
LXXV	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**				
AA	**3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				
1	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	%	-	75,50	77,50
3.28.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEHUTANAN					
LXXVII	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**				
AA	**3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**				
1	Jumlah kelompok usaha masyarakat di dalam dan sekitar hutan yang terfasilitasi	Kelompok	28	29,00	29,00
2	Nilai Sakip	Nilai	67,15	85,00	85,00
3	Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (Kel)	Kelompok	28	14,00	14,00
4	Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi	Ha	100	100,00	100,00
5	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (%)	%	0,36	0,57	0,57
6	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100,00	100,00
7	Jumlah Kelompok Tani yang terfasilitasi (Kel)	Kelompok	8	15,00	15,00

No.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN	
				2026	2027
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(06)*	*(07)*
8	Terkelolanya DAS Lintas Kabupaten/Kota	Kegiatan	-	4,00	4,00
3.29.0.00.0.00.01.0000 - DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL					
LXXIX	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**				
1	Intensitas Energi Primer **(IUP 45)**	SBM/Milyar Rupiah	-	223.597,25	213.870,50
2	Konsumsi Listrik per Kapita **(IUP 45)**	Kwh/Kapita	-	395,75	441,50
LXXX	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**				
1	Rasio elektrifikasi	%	99.67	99,68	99,70
2	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer **(IUP 45)**	%		32,58	34,30
LXXXI	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**				
AA	**3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**				
1	Persentase Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis tertentu, dan Batuan, Izin Pertambangan Rakyat dan Surat Izin Pertambangan Buatan	%	15	75,00	80,00
2	Nilai SAKIP	Skor	80	80,00	80,00
3	Persentase Pemanfaatan Air Tanah Berkelanjutan	%	0.83	50,00	65,00
4	Jumlah Rumah Tangga sasaran (RTS)	Unit	10	50,00	55,00
5	Porsi EBT dalam Bauran Energi	%	-	31,96	34,33
6	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100,00	100,00
7	Jumlah Volume Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota	Rp. Juta Per Tahun	-	157,00	749,00
8	Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan air Tanah di Wilayah Sungai Lintas kabupaten/Kota	KmÂ²	-	381,00	1.739,00

No.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN	
				2026	2027
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(06)*	*(07)*
9	Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik yang bersumber dari Pembangkit EBT	Rumah Tangga	25	140,00	150,00
10	Luas WPR yang Diusulkan Pemerintah Daerah	Meter	-	10,00	1,00
3.31.3.30.0.00.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					
LXXXIII	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**				
1	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB **(IUP 45)**	%	4.8	6,00	7,00
2	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase	13	7,00	7,00
LXXXIV	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**				
1	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) **(IUP 45)**	%	4.5	3.15-3.17	3.22-3.26
LXXXV	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**				
AA	**3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				
1	Persentase Kepatuhan Berusaha (%)	%	160.5	91,00	92,00
2	Jumlah Izin Usaha Perdagangan Terdaftar yang Difasilitasi		-	2-4	2-4
3	Persentase stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	1.51	3.5-4	3.5-4
4	Jumlah Penanganan Pengaduan Konsumen (Kasus)	Kasus	5	5,00	5,00
5	Jumlah bahan berbahaya yang dipantau peredarannya	%	4	4,00	4,00
6	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor	Pelaku Usaha	10	6,00	8,00
7	Jumlah Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Unit	1	1,00	1,00
8	Jumlah sampel yang diuji	Sampel	141	105,00	110,00
9	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan	%	50	60,00	70,00
AB	**3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**				
1	Nilai Sakip	Nilai	70	70,00	70,00

No.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN	
				2026	2027
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(06)*	*(07)*
2	Rata-rata nilai investasi IKM (%)	%	7	7,00	7,00
3	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri (%)	%	11.89%	3,00	3,50
4	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100,00	100,00
4.01.0.00.0.00.00.0000 - SEKRETARIAT DAERAH					
LXXXVII	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**				
AA	**4.01 - SEKRETARIAT DAERAH**				
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Skor	-	70,00	72,50
2	Nilai Sakip	Nilai	-	100,00	100,00
3	Indeks Pelayanan Publik **(IUP 45)**	Indeks	-	100,00	100,00
4	Indeks Reformasi Hukum **(IUP 45)**	%	-	100,00	100,00
5	Nilai LPPD	%	-	100,00	100,00
6	Indeks Kualitas Kebijakan	%	-	100,00	100,00
7	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Nilai	-	100,00	100,00
8	Indeks Kematangan Organisasi	Nilai	-	100,00	100,00
9	Nilai SPM	Nilai	-	100,00	100,00
10	Persentase Kebijakan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Baik	%	-	100,00	100,00
11	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	-	100,00	100,00
4.01.0.00.0.00.00.0001 - BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH					
LXXXIX	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**				
AA	**4.01 - SEKRETARIAT DAERAH**				
1	Persentase Fasilitasi Kerjasama Daerah	%	-	100,00	100,00
2	Persentase Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	%	-	100,00	100,00
4.01.0.00.0.00.00.0002 - BIRO HUKUM					
XCI	**ASPEK PELAYANAN UMUM**				
1	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM **(IUP 45)**	%	0	62,50	65,00
XCII	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**				
AA	**4.01 - SEKRETARIAT DAERAH**				

No.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN	
				2026	2027
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(06)*	*(07)*
1	Persentase Bantuan Hukum yang tertangani	%	100	100,00	100,00
2	Persentase Produk Hukum yang di fasilitasi	%	100	100,00	100,00
4.01.0.00.0.00.00.0003 - BIRO ORGANISASI					
XCIV	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**				
AA	**4.01 - SEKRETARIAT DAERAH**				
1	Persentase Penyusunan Kebijakan Daerah Bidang Organisasi yang ditindaklanjuti	Persentase	100	100,00	100,00
4.01.0.00.0.00.00.0004 - BIRO KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
XCVI	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**				
AA	**4.01 - SEKRETARIAT DAERAH**				
1	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Difasilitasi	%	100	100,00	100,00
4.01.0.00.0.00.00.0007 - BIRO PEREKONOMIAN DAERAH					
XCVIII	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**				
1	Return on Asset (ROA) BUMD Perangkat Daerah **(IUP 45)**	%	-	2,66	2,83
4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD					
C	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**				
AA	**4.02 - SEKRETARIAT DPRD**				
1	Nilai Sakip	Nilai	N/A	68,00	69,00
2	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase	100	100,00	100,00
3	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100,00	100,00
4	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Ketetapan	Tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
5	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Persentase	100	100,00	100,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
CII	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**				
1	Indeks Inovasi Daerah	Angka	100	50,00	51,25
2	Nilai Transaksi Saham Per kapita Per Provinsi (Rupiah) **(IUP 45)**	Nilai	-	1.007.016,22	1.191.817,71

No.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN	
				2026	2027
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(06)*	*(07)*
3	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB **(IUP 45)**	(%)	-	25,02	25,84
4	Aset Dana Pensiun/PDRB **(IUP 45)**	(%)	-	0,29	0,31
5	Total Kredit/PDRB **(IUP 45)**	(%)	-	30,45	31,61
CIII	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**				
AA	**5.01 - PERENCANAAN**				
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	-	85,55	86,14
2	Nilai Sakip	Nilai	-	82,00	83,00
3	Konsistensi Dokumen Perencanaan	%	100	100,00	100,00
4	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persentase	100	100,00	100,00
5	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase	100	100,00	100,00
6	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100,00	100,00
7	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase	100	100,00	100,00
8	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase	100	100,00	100,00
9	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persentase	100	100,00	100,00
AB	**5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				
1	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	Persentase	-	100,00	100,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH					
CV	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**				
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	C (cukup baik)	B (Perlu Perbaikan)	B (Perlu Perbaikan)
CVI	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**				
AA	**5.02 - KEUANGAN**				
1	Nilai Sakip	Nilai	-	70,00	70,00
2	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	30,82%	18,00	18,00
3	Persentase Penurunan SILPA	%	5%	5,00	5,00

No.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN	
				2026	2027
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(06)*	*(07)*
4	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	100	100,00	100,00
5	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	52,30%	7,20	7,20
6	Persentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	%	20,84%	0,78	0,78
7	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	-	93,90	93,90
8	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100,00	100,00
5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH					
CVIII	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**				
1	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB **(IUP 45)**	(%)	-	1,55	1,60
CIX	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**				
AA	**5.02 - KEUANGAN**				
1	Nilai Sakip	Nilai	62	64,00	66,00
2	Efektifitas pendapatan daerah (persentase)	%	88.04	95,00	95,00
3	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100,00	100,00
4	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	E	B	B
5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH					
CXI	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**				
AA	**5.03 – KEPEGAWAIAN**				
1	Indeks Sistem Merit	%		280,00	285,00
2	Indeks Sistem Merit	Poin	251,5	280,00	285,00
3	Nilai Sakip	Nilai	-	80,00	82,00
4	Nilai Aspek Pengadaan, Perencanaan Kebutuhan, Sistem Informasi	Nilai	87	100,00	102,00
5	Nilai Aspek Manajemen Kinerja, Pengajian, Penghragaan dan Disiplin, dan Perlindungan dan Pelayanan	Nilai	109,5	120,00	122,00
6	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100,00	100,00
7	Nilai Aspek Promosi, Mutasi dan Pengembangan Karier	Nilai	55	60,00	61,00

No.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN	
				2026	2027
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(06)*	*(07)*
5.04.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA					
CXIII	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**				
AA	**5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				
1	Nilai Sakip	Nilai	(Belum Rilis)	68,00	68,50
2	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100,00	100,00
5.06.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH					
CXV	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**				
AA	**5.06 - PENGELOLAAN PERBATASAN**				
1	Nilai Sakip	Nilai	-	64,00	66,00
2	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100,00	100,00
3	Persentase infrastruktur terbangun di kawasan perbatasan	Persentase	100	69,50	72,00
5.07.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGHUBUNG					
CXVII	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**				
AA	**5.07 - PENGELOLAAN PENGHUBUNG**				
1	Nilai Sakip	Nilai		67,00	68,00
2	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%		100,00	100,00
6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT					
CXIX	**ASPEK PELAYANAN UMUM**				
1	Indeks Integritas Nasional **(IUP 45)**	Persentase	66,56	68,12	68,81
CXX	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**				
AA	**6.01 - INSPEKTORAT DAERAH**				
1	Indeks Maturitas SPIP	Level	2	3,00	3,00
2	Nilai Kapabilitas APIP	Level	2	3,00	3,00
3	Nilai Sakip	Nilai	72,15	70,00	70,00
8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
CXXII	**ASPEK PELAYANAN UMUM**				

No.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN	
				2026	2027
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(06)*	*(07)*
1	Indeks Demokrasi Provinsi **(IUP 45)**	%	-	70.55-77.19	70.6-77.69
CXXIII	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**				
AA	**8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				
1	Persentase Fasilitasi Pendaftaran Ormas	%	100	100,00	100,00
2	Persentase Fasilitasi Pendidikan Politik oleh Pemerintah Daerah dan Partai Politik	%	91	100,00	100,00
3	Persentase Kebijakan Penguatan Ideologi Pancasila	%	100	100,00	100,00
4	Persentase Konflik Sosial yang Berhasil Difasilitasi.	%	100	100,00	100,00
5	Nilai Sakip	Nilai	N/A	65,00	66,00
6	Persentase Kebijakan Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika	%	100	100,00	100,00
7	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100,00	100,00

Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2025 belum sepenuhnya tersedia hal ini disebabkan karena sejumlah faktor teknis dan kebijakan yang dapat dijelaskan secara komprehensif diantaranya dikarenakan :

1. Tahun 2025 merupakan transisi dan tahapan perencanaan awal RPJMD 2025–2029
2. Data pendukung untuk indikator dimaksud belum tersedia sehingga belum dapat digunakan sebagai dasar pengukuran capaian.
3. Pengelolaan dan pelaporan indikator tersebut berada di luar kewenangan perangkat daerah terkait, sehingga belum dapat dilakukan secara mandiri dalam periode tersebut.
4. Program yang menjadi dasar pengukuran indikator belum dijalankan pada tahun 2025, baik karena belum masuk dalam prioritas tahunan maupun karena masih dalam tahap persiapan teknis dan kelembagaan.

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2027 bertujuan untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. Tidak terlepas dari hal tersebut penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dapat mewujudkan akuntabilitas alokasi sumber daya publik untuk pembangunan daerah. Selain itu RKPD Provinsi Maluku memperhatikan kebijakan pemerintah pusat sehingga seluruh kebijakan, strategi, program atau kegiatan pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2027 akan berfokus pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

RKPD Tahun 2027 disusun secara bertahap, berkesinambungan, transparan, responsif, efisien, efektif, terukur, akuntabel, inovatif, kreatif, berorientasi pada hasil (outcome) dengan pendekatan *money follows programme* dan *programme follows result*, berbasis risiko (*risk-based planning*) dan berbasis pada riset *(research-based planning*), terpadu lintas sektor, serta berprinsip pada pembangunan yang berkelanjutan.

RKPD Provinsi Maluku Tahun 2027 akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS dalam rangka penyusunan rancangan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2027. Kebijakan dalam RKPD Tahun 2027 harus dipedomani oleh seluruh Perangkat Daerah Provinsi Maluku dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun 2027 dalam rangka mewujudkan sasaran dan target pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

RKPD Tahun 2027 menjadi pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2027, serta menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan pembangunan lainnya termasuk didalamnya masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung program dan kegiatan pembangunan daerah Maluku.

GUBERNUR MALUKU,

HENDRIK LEWERISSA